



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagai satu kesatuan, yang disusun bertahap, terpadu, dan selaras antar dokumen perencanaan baik secara vertikal maupun horizontal;
- b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi kinerja pembangunan sampai dengan Triwulan II tahun 2024, pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, sehingga Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 dipandang perlu diadakan perubahan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, maka berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang

- dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

PENETAPAN DAN SISTEMATIKA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2024

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Perubahan Renja PD Tahun 2024.



- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA SKPD.

Pasal 3

Sistematika Perubahan Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. BAB I : pendahuluan;
- b. BAB II : evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. BAB III : rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. BAB IV : penutup.

Pasal 4

Perubahan Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 26 September 2024

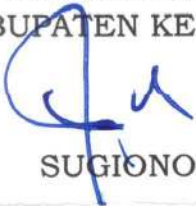
BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 26 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,



SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024 NOMOR 30



KABUPATEN KENDAL

RENJA PERUBAHAN 2024

**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KENDAL**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II dan Rensra Perangkat Daerah	10
2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	34
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	37
BAB IV PENUTUP	38

KATA PENGANTAR

Perencanaan pembangunan tahunan daerah diwujudkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, dan sebagai pedoman Kepala Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2024 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pergeseran pagu antar kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan mendasarkan pada program yang ada dalam Renja.
5. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan Renja Tahun 2024.

Kabupaten Kendal telah menyusun RKPD tahun 2024 dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024. Selanjutnya Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal disusun berdasarkan Peraturan Bupati Tersebut. Renja ini telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II.

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal tahun 2024 secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting, meliputi:

1. Merupakan wadah untuk mewujudkan program prioritas Renstra 2021-2026.
2. Menjadi acuan penyusunan Perubahan program/kegiatan dan/subkegiatan.
3. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menyusun Rancangan APBD perubahan APBD-P).
4. Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD-P.
5. Menjadi instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perubahan Dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan menunjukkan adanya perkembangan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian penyelesaian permasalahan.

Kendal, 2024
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten Kendal

SUDARYANTO, ST.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700715 199903 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Pembangunan merupakan upaya pemerintah Kabupaten Kendal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu serta berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan tahunan daerah diwujudkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, dan sebagaipedoman Kepala Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA)serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 terkait dengan penyusunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, renstra OPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta berdasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2024 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pergeseran pagu antar kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan berdasarkan pada program yang ada dalam Renja.
5. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan Renja Tahun 2024.

Kabupaten Kendal telah menyusun RKPD tahun 2024 dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024. Selanjutnya Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal disusun berdasarkan Peraturan Bupati Tersebut. Renja ini telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal tahun 2024 secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting, meliputi:

1. Merupakan wadah untuk mewujudkan program prioritas Renstra 2021-2026.
2. Menjadi acuan penyusunan Perubahan program/kegiatan dan/subkegiatan.
3. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menyusun Rancangan APBD perubahan APBD-P.
4. Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD-P.
5. Menjadi instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Rancangan Perubahan Renja disusun berdasarkan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah dan hasil evaluasi laporan realisasi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2024.
2. Evaluasi Triwulan I dan II meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi menunjukkan perlu dilakukan perubahan dengan pertimbangan:
 - a. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau

pengurangan target kinerja dan pagukegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan.

- b. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran antar kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan.

Berdasarkan evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal tahun 2024 Triwulan I dan II, menunjukkan adanya perkembangan program dan kegiatan yang kurang sesuai dengan asumsi awal Renja disusun meliputi pergeseran penyelesaian masalah, penambahan dan pengurangan kegiatan dalam upaya pencapaian penyelesaian permasalahan. Oleh karena itu menjadi penting untuk dilakukannya perubahan Renja tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan DaerahTingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi JawaTengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran

- Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 20).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk:

- a. Memberikan acuan dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada rencana kerja perubahan;
- b. Memberikan acuan dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada rencana kerja perubahan;
- c. Memberikan acuan dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada rencana kerja perubahan;
- d. Memberikan acuan dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada rencana kerja perubahan;
- e. Memberikan acuan dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada rencana kerja perubahan.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal tahun 2024 adalah untuk menciptakan keselarasan atas perubahan program dan kegiatan dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen perubahan RKPD Kabupaten Kendal tahun 2024 sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan triwulan II tahun berkenaan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan realisasi program dan kegiatan tahun berjalan.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian rencana kerja dan anggaran yang akan digunakan perangkat daerah.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Pengukuran capaian kinerja disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, juga dapat dilihat sebagai suatu sistem pengukuran kinerja dan merupakan hal yang penting dalam manajemen penanganan program secara menyeluruh, karena kinerja yang diukur akan mendorong pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang. Sehingga dengan adanya suatu pengukuran kinerja maka kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tersebut dilaksanakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap kegiatan selesai dilaksanakan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. Evaluasi Rencana Kerja (Renja) OPD mencakup evaluasi terhadap sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Evaluasi

dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II dan Rensra Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan. Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan kegiatan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang

pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan

Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 secara umum tercapai sesuai target yang ditetapkan. Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut ini :

Tabel 2.1.
Capaian Kinerja Renstra
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kendal 2021-2026
Periode Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Indikator	SPM Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024		Proyeksi Tahun 2024		Catatan Analisis
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1	Persentase jalan kondisi mantap			94,78		83,11		84,09	Tidak tercapai
2	Persentase luasan daerah irigasi kondisi baik			45,48		49,69		45,51	Tidak tercapai
3	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang			14		16		14	tercapai
4	Persentase Capaian Universal Acces			95,44		96,67		97,00	tercapai

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 terbagi dalam tiga indikator yaitu

persentase jalan kondisi mantap, persentase luasan daerah kondisi baik, dan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang, dan persentase capaian universal acces.

a. Persentase Jalan Kondisi Mantap

Indikator Kinerja pada persentase jalan kondisi mantap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas persentase permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik, persentase drainase kondisi baik, rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi, rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi, dan skor nilai SAKIP perangkat daerah.

b. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang

Indikator Kinerja pada persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang terdiri atas persentase penyimpangan pemanfaatan ruang, rasio kepatuhan IMB (PBG) kab/ kota, dan persentase tanah Pemda yang bersertifikat.

c. Persentase Capaian Universal Acces

Indikator Kinerja pada persentase capaian universal acces terdiri atas Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan, dan Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik.

Analisis realisasi program kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang berupa pengkajian terhadap capaian realisasi kinerja dan keuangan serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sampai dengan triwulan 2 tahun 2024 sudah ada yang sesuai dan juga masih ada yang kurang sesuai dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga perlu adanya tambahan ataupun perbaikan guna mendukung dan menghasilkan kinerja yang baik sehingga terciptanya pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Berikut realisasi program kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan 2 tahun 2024 sesuai target capaian dengan rincian sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah melebihi target kinerja yaitu pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (77,14%), Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (59,23%) , Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (50,44%).
2. Dalam program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang telah melebihi target kinerja yaitu pada sub kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai (97,13%), Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai (61,34%)
3. Dalam program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah tidak terdapat sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja dan keuangan, namun terdapat sub kegiatan yang telah melebihi target kinerja dan keuangan yaitu Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik SPALD (88,32%)
4. Dalam program penyelenggaraan Jalan kegiatan yang telah melebihi target kinerja dan keuangan yaitu hanya pada sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan (68,57%)
5. Dalam program penyelenggaraan penataan ruang sub kegiatan yang telah melebihi target kinerja yaitu Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang (98,21%)

6. Dalam program penatagunaan tanah sub kegiatan yang telah melebihi target kinerja yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota (100%).
- b. Sub Kegiatan yang memenuhi target Kinerja
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi target kinerja yaitu pada sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (50%) , Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (50%), Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (50%), Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (50,22%), Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (50%), Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (50%), Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (50%), kegiatanPemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (50%) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (42,05%) Penyediaan Jasa Surat Menyurat (40%)
 2. Dalam program penyelenggaraan penataan ruang sub kegiatan yang memenuhi target kinerja dan keuangan yaitu Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota (50%), Penyusunan RDTR (50%), Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (50%)
- c. Sub Kegiatan yang belum memenuhi target Kinerja
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah belum memenuhi target kinerja yaitu pada sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (37,55%) , Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (36,90%), Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar (32,35%) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik pada SKPD (26,21%), Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (29,60%), Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (16,67%), Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (0,08%), Pengadaan Alat Besar (0%) , Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (0%)

2. Dalam program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang belum memenuhi target kinerja yaitu pada sub kegiatan Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi (40%), Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa (38,61%), Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (36,92%), Operasi dan Pemeliharaan Sungai (17,93%), Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya (0%), Normalisasi/Restorasi Sungai (0%), Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (0%)
3. Dalam program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum sub kegiatan yang belum memenuhi target kinerja yaitu pada sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (22,74%), Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (0%) Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (7,55%)
4. Dalam program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah tidak terdapat sub kegiatan belum memenuhi target kinerja yaitu pada sub kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (25,45%) dan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (0%),Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman (0%)

5. Dalam program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase sub kegiatan yang belum memenuhi target kinerja yaitu Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (37,26%).
6. Dalam program penataan bangunan gedung sub kegiatan yang belum memenuhi target kinerja yaitu Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota (33,33%), Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (35,00%), Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (0,55%).
7. Dalam program penataan bangunan dan lingkungannya sub kegiatan yang belum memenuhi target kinerja yaitu Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota (0%) Penataan Bangunan dan Lingkungan (0%)
8. Dalam program penyelenggaraan jalan sub kegiatan yang belum memenuhi target kinerja dan keuangan yaitu pada sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (20%), Rekonstruksi Jalan (7,14%), Rehabilitasi Jalan (5,79%), Pemeliharaan Berkala Jalan (6,74%) Pengelolaan Leger Jalan (0%), Penggantian Jembatan (0%), Survey Kondisi Jalan/Jembatan (3,5%), Pemeliharaan Berkala Jembatan (0%), Pemeliharaan Rutin Jembatan (4,27%), Rehabilitasi jembatan (0%)
9. Dalam program pengembangan jasa konstruksi sub kegiatan yang belum memenuhi target kinerja yaitu Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan

Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi (38,68%), Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi (16,76%), Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota (1,09%), Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis (2%)

10. Dalam program penyelenggaraan penataan ruang sub kegiatan yang belum memenuhi target yaitu Pelaksanaan Penataan Ruang (17,00%)
11. Dalam program penatagunaan tanah sub kegiatan yang belum memenuhi target kinerja yaitu Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota (39,08%)

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel. 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rensra Perangkat Daerah Tahun 2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian Target Rensra Perangkat daerah sampai tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rensra (%)
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	100,00	100,00	45,68	45,68	100,00	145,68	36,42
		Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (%)	100,00	100,00	45,68	45,68	100,00	145,68	36,42

1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan /Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	24,00	24,00	11,00	45,83	24,00	35,00	8,75
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	1	16,67	6	7	1,75
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	1	59,23	2	3	0,75
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	16	8	50,00	16	24	6,00
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	12,00	12,00	6,00	50,00	12,00	18,00	4,50
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	173	173	87	50,44	178	265	66,32
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	0	37,55	1	1	0,25
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan tersedianya administrasi umum perangkat daerah	12,00	12,00	6,00	50,00	12,00	18,00	4,50
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1	1	1	50,00	1	2	0,50

		Bangunan Kantor yang Disediakan							
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1	77,14	1	2	0,44
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	1	36,90	1	2	0,50
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	0,30	29,60	1	1	0,32
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	6	50,00	12	18	4,50
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	200	100	50,22	1	101	25,25
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	0	26,21	1	1	0,32
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3,00	3,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,25
	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1	1	0	0,00	0	0	0,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	0	0	0,00	3	3	0,75
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan	12,00	12,00	6,00	50,00	12,00	18,00	4,50

		Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	0	40,00	1	1	0,35
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	6	50,00	12	18	4,50
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	6	50,00	12	18	4,50
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	6	50,00	12	18	4,50
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12,00	12,00	6,00	50,00	12,00	18,00	4,50
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	176	176	74	42,05	176	250	62,50
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	14	34	11	32,35	14	25	6,25
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	236	236	118	50,00	236	354	88,50

		Dipelihara							
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	0	0,08	1	1	0,25
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luasan wilayah banjir dan tergenang	15,19	15,19	0,00	0,00	15,01	15,01	3,75
		Persentase luasan daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik	71,08	71,08	0,00	0,00	65,25	65,25	16,31
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang infrastruktur Pengendali Banjir yang terbangun	15,19	500,00	0,00	0,00	15,01	15,01	3,75
	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	1000	1	0	17,93	1.366	1.366	341,50
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	0	0	0	0,00	5	5	1,25
	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0,1	0,1	0,06	61,34	1	1	0,34
	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	100	0,1	0	0,00	3.800	3.800	950,00

	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	1	1	1	97,13	2	3	0,75
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	2	2	0	0,00	0	0	0,00
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentrasi infrastuktur daerah irigasi kewenangan kab/kota dalam kondisi baik	44,75	45,48	8,70	8,70	47,75	56,45	14,11
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1000	1	0	0,00	3.617	3.617	904,20
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	500	0,5	0	36,92	1.535	1.535	383,80
	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	5	5	2	40,00	5	7	1,75
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk	1	1	0,38	38,61	5	5	1,35

	Konstruksi Irigasi dan Rawa	Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun							
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Prosentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	98,48	98,48	1,91	1,94	95,58	97,49	24,37
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase rumah tangga yang menempati hunian dengan Jaringan perpipaan	75,54	75,54	1,91	2,53	76,82	78,73	19,68
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1	1	0,23	22,74	1	1	0,31
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	400	4	0	7,55	740	740	185,08
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	300	300	0	0,00	1.208	1.208	302,00
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Prosentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses Sanitasi (air limbah domestik) Aman	91,13	91,13	22,56	24,76	85,81	108,37	27,09

		tangga yang menempati hunian dengan akses Sanitasi (air limbah domestik) layak							
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase rumah tangga yang menempati hunian dengan layanan pengolahan air limbah Domestik	92,41	92,41	22,88	24,76	85,81	108,69	27,17
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	200	450	0	0,00	200	200	50,00
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	450	200	0	22,45	50	50	12,50
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik SPALD	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0	200	177	88,32	250	427	106,66
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	2	2	0	0,00	0	0	0,00
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	79,26	79,26	29,53	37,26	76,98	106,51	26,63

1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi dan dipelihara	6230,00	6230,00	2321,00	37,26	53050,00	55371,00	13842,75
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	52,8	5280	2.640	50,00	53	2.693	673,20
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase rekomendasi SLF (Sertifikat Laik Fungsi) yang diterbitkan	100,00	87,00	24,59	28,26	100,00	124,59	31,15
		Persentase rekomendasi teknis IMB (PBG) yang diterbitkan	87,00	100,00	24,59	24,59	90,26	114,85	28,71
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase rekomendasi teknis IMB (PBG) yang diterbitkan	100,00	100,00	24,59	24,59	63,33	87,92	21,98
		Persentase rekomendasi SLF (Sertifikat Laik Fungsi) yang diterbitkan	87	87	20,00	22,99	90	110	27,57
	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	6	6	2,00	33,33	1	3	0,75

	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1	1	0,00	0,55	3	3	0,75
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	20	20	7,00	35,00	20	27	6,75
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan/ lingkungan/ kawasan yang ditingkatkan/ tertata	100	100	0	0,00	0	0	0,00
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan/ lingkungan/ kawasan yang ditingkatkan/ tertata	100	100	0	0,00	0	0	0,00
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan yang tersusun	1	1	0	0,00	0	0	0,00
	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan/ lingkungan/ kawasan yang	1	1	0	0,00	0	0	0,00

		telah tertata							
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	71,17	97,80	13,00	13,29	49,69	62,69	15,67
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik	63,39	63,39	8,42	13,28	388,93	397,35	99,34
		Panjang jembatan kabupaten dalam kondisi baik	213,00	239,00	13,28	5,56	9,00	22,28	5,57
	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1	1	0	0,00	1	1	0,25
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	5	5	1	20,00	7	8	2,00
	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	15	15	0	0,00	6	6	1,50
	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	3,89	14	1	7,14	14	15	3,73
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	20	20	1	6,74	20	21	5,34
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	100	100	4	4,27	100	104	26,07
	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitas	8	8	0	0,00	3	3	0,75
	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	100	1	0	0,00	100	100	25,00

	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	2	2	0	3,50	2	2	0,50
	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	3,5	3,5	0	5,79	1	1	0,31
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	35	35	24	68,57	35	59	14,75
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	72,87	72,87	59,85	82,13	59,85	119,70	29,93
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang tersertifikasi	150,00	150,00	2,00	1,33	79,00	81,00	20,25
	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	50	100	2	2,00	100	102	25,50
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/ kota yang aktif dengan data termutakhir	1,00	1,00	0,01	1,09	1,00	1,01	0,25
	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1	1	0	1,09	2	2	0,50
1.03.11.2.04	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1,00	1,00	0,33	32,62	1,00	1,33	0,33
	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang	1	1	0	38,68	1	1	0,35

	Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan							
	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	1	1	0	16,76	0	0	0,04
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyimpangan pemanfaatan ruang	14,00	14,00	2,35	16,76	16,00	18,35	4,59
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang disusun	1,00	2,00	1,00	50,00	2,00	3,00	0,75
	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota		1	1	98,21	2	3	0,75
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1	1	1	50,00	2	3	0,63
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi Kebijakan Penataan Ruang Daerah	1,00	2,00	0,50	25,00	2,00	2,50	0,63
	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1	1	1	50,00	18	19	4,63

1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah	1,00	12,00	5,00	41,67	12,00	17,00	4,25
	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1	1	1	50,00	1	2	0,50
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1,00	12,00	5,00	41,67	12,00	17,00	4,25
	Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	1	0	17,00	1	1	0,25
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								0,00
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								0,00
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Jumlah bidang tanah milik Pemda yang bersertifikat	985,00	985,00	385	39,09		39,08	9,77
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1	Jumlah bertambahnya Bidang tanah Pemerintah Kabupaten Kendal yang Bersertifikat	110,00	110,00	43	39,09		39,08	9,77

	(Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
	Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	1	1	0	39,09		39,08	9,77
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Bidang tanah milik Pemda yang bersertifikat	110	110,00	198,00	100,00	1152,00	1350,00	337,50
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bertambahnya Bidang tanah Pemerintah Kabupaten Kendal yang Bersertifikat	110,00	110,00	198,00	1000,00	398,00	596,00	149,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	110	110	198	100,00	0	198	49,50

A. Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program Kegiatan

1. Pelaksanaan kegiatan yang bersifat rutin masih menunggu proses pencairan dan menunggu proses pengajuan GU selanjutnya, dikarenakan prosedur pengajuan GU untuk Tahun 2024 mengalami perubahan sistem dan harus upload dokumen SPJ yang telah terealisasi terlebih dahulu.
2. Dalam hal pencairan keuangan kegiatan harus berdasarkan Rencana Anggaran Kas (RAK) yang telah direncanakan sehingga tidak dapat memaksimalkan penyerapan anggaran.
3. Kegiatan Fisik pada Semester II Tahun 2024 masih banyak yang belum berkontrak karena adanya kebijakan mengenai kemampuan keuangan APBD pada tahun 2024.
5. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan sesuai dengan pendidikan Teknik.

B. Kebijakan Perencanaan atau Penganggaran

1. Menyusun Rencana Anggaran Kas dengan cermat sesuai denganyang telah direncanakan.
2. Memaksimalkan penyerapan anggaran sesuai dengan rencanaanggaran kas yang telah terpasang.
3. Melaksanakan proses kontrak untuk pekerjaan dari sumber dana DAK, BANKEU, dan DAU Khusus.
4. Melakukan persiapan pelaksanaan untuk perubahan anggaransehingga apabila selesai proses tender maka segera dapat action.

2.2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagaimana fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang utama yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, maka dalam menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tentunya mengacu kepada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Usulan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan telah melalui proses dan mekanisme yang sesuai yaitu melalui proses Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten (Forum SKPD) serta penyesuaian dengan kondisi terkini kebutuhan saat perencanaan. Adapun Kegiatan yang merupakan usulan dari Kecamatan sebagai hasil proses dari Musrenbang Tingkat Desa, Kecamatan dan Forum SKPD. Dari usulan-usulan aspirasi masyarakat melalui proses musrenbang, maka aspirasi tersebut diserap kedalam program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas yang juga disesuaikan dengan kemampuan atau besaran pagu indikatif yang ditetapkan oleh Tim Anggaran, sehingga pengusulan program dan kegiatan akan menyesuaikan dengan anggaran dan usulan serta kebutuhan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Adapun usulan kegiatan dari masyarakat yang diterima yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.3
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
KABUPATEN KENDAL
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PE- NYELENGGARA-AN JALAN				
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Panjang permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik	71,17%	

			Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik	97,80%	
	Rekonstruksi Jalan		Panjang Jalan yang terekonstruksi		
		Rekonstruksi Jl. Boja - Kaligading		96 m	
		Rekonstruksi Jl. Boja - Campurejo		300 m	
		Rekonstruksi Jl. Pasigitan - Gonoharjo		406 m	
		Rekonstruksi Jl. Cangkring - Tosari		156 m	
		Rekonstruksi Jl. Jaro - Pening		248 m	
		Rekonstruksi Jl. Pidodo - TPI		200 m	
		Rekonstruksi Jl. Cepiring - Pidodo		216 m	
		Rekonstruksi Jl. Tlahab - Gemuh		1.436 m	
		Rekonstruksi Jl. Pegandon – Gemuh		836 m	
		Rekonstruksi Jl. Magelung - Sumur		96 m	
		Rekonstruksi Jl. Sendangkulon - Pening		172 m	
		Rekonstruksi Jl. Kendal - Ketapang		222 m	
		Rekonstruksi Jl. Kendal - Bandengan (Jl. Laut)		206 m	
		Rekonstruksi Jl. Limbangan - Sriwulan		700 m	
		Rekonstruksi Jl. Pageruyung - Gondoharum		121 m	
		Rekonstruksi Jl. Krikil - Petung		121 m	
		Rekonstruksi Jl. Mlatiharjo - Ngargosari		1.122 m	

		Rehabilitasi Jl. Sukodono - Bulugede		96 m	
		Rekonstruksi Jl. Plantungan - Blumah		2.450 m	
		Rekonstruksi Jl. Rowosari - Tanjunganom		580 m	
		Rekonstruksi Jl. Kertosari - Goakiskendo		173 m	
		Rekonstruksi Jl. Getas - Kaliputih		121 m	
		Rekonstruksi Jl. Banyuringin - Kaliputih		121 m	
		Rekonstruksi Jl. Donomerto - Gentinggunung - Kediten		121 m	
		Rekonstruksi Jl. Pageruyung - Selokaton		121 m	
		Rekonstruksi Jl. Kebumen - Tamanrejo		121 m	
		Rekonstruksi Jl. Bringinsari - Purwosari		96 m	
		Rekonstruksi Jl. Ngasinan – Sumberagung		1.301 m	
	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan terehabilitasi		
		Rehabilitasi Jl. Lanji - Bulugede		121 m	
		Rehabilitasi Jl. Banyutowo - Turunrejo		121 m	
		Rehabilitasi Jl. Kebongembong - Mojoagung		121 m	
	Penggantian Jembatan		Panjang Jalan yang terekonstruksi		
		Penggantian Jembatan Jl. Banyuurip-Karangmulyo		1 Jembatan	
		Penggantian Jembatan Jl. Wonosari - Kartikajaya		1 Jembatan	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 diarahkan untuk mencapai target Renstra serta disusun berdasarkan hasil evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra. Rencana kerja dan pendanaan daerah mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Kendal.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024, terdapat beberapa perubahan baik dari segi anggaran, perubahan output kegiatan, penambahan dan pengurangan target kinerja, yang mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan. Dari pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 116.512.848.845,- pada pagu anggaran perubahan menjadi Rp. 136.660.824.239,- atau bertambah sebesar Rp. 26.494.116.664,-

Adapun program dan kegiatan perubahan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2024 sesuai perubahan RKPD 2024 sebagaimana pada tabel (terlampir).

BAB IV

PENUTUP

Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan 2 tahun 2024 berdasarkan rencana target yang terdapat dalam Rencana Kerja Tahun 2024 secara berkesinambungan maka format penyusunan Perubahan Rencana Kerja disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan telah dicapai sampai dengan triwulan 2 tahun 2024. Untuk itu perlu kerja keras kembali untuk pencapaian target pada tahun 2024 ini sebagai mana telah ditargetkan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026 dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Kendal serta target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Pemerintah Kabupaten Kendal tahun 2024.

Dalam rangka mewujudkan konsep pembangunan Kabupaten Kendal di bidang infrastruktur yang efisien dan efektif. Konsep pembangunan infrastruktur perlu terus ditata dan disempurnakan dengan didukung sumber daya yang handal sehingga terwujud pemerataan pembangunan untuk sektor infrastruktur di seluruh Kabupaten Kendal.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disusun sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan dari usulan masyarakat, hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan, dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bersumber dari anggaran APBD, APBDProv maupun sumber lain-nya.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari rencana strategis diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang telah ditetapkan perlu disosialisasikan agar semua pihak mempunyai persepsi tentang rencana kerja Tahun 2024 sehingga pelaksanaan kegiatan dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasi dan sinergis dalam mencapai sasaran dan tujuan yang lebih ditetapkan. Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ini dapat dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD.

Untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perubahan diperlukan komitmen dan dukungan dari seluruh sumber daya manusia di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dengan adanya rencana kerja diharapkan kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi lebih efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan good governance bagi Pemerintah Kabupaten Kendal

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2024 disusun untuk memberi gambaran tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Semoga Rencana kerja yang telah disusun dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kendal.

Kendal, 2024
KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KENDAL

SUDARYANTO

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KENDAL
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							110.166.707.575,00	116.512.848.845,00	136.660.824.239,00	26.494.116.664,00							109.048.718.420,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							109.816.707.575,00	116.291.322.845,00	136.439.298.239,00	26.622.590.664,00							108.248.718.420,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							109.816.707.575,00	116.291.322.845,00	136.439.298.239,00	26.622.590.664,00							108.248.718.420,00		
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah				100 %	100 %	21.356.617.471,00	24.919.029.391,00	23.772.769.391,00	4.188.382.529,00							25.545.000.000,00		
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah Laporan /Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun				24 Dokumen	24 Dokumen	324.230.000,00	382.502.750,00	387.532.750,00	63.302.750,00			-	-	-		325.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	100.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	88.294.000,00	9.759.000,00	9.759.000,00	-78.535.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16 Laporan	16 Laporan	135.936.000,00	267.743.750,00	272.773.750,00	136.837.750,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			175.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Jumlah bulan tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah				12 Bulan	12 Bulan	18.081.639.971,00	19.062.715.825,00	17.370.225.825,00	-711.414.146,00			-	-	-		20.010.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				173 Orang/ bulan	173 Orang/ bulan	16.930.782.812,00	18.962.715.825,00	17.262.715.825,00	331.933.013,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			19.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	1.150.857.159,00	100.000.000,00	107.510.000,00	-1.043.347.159,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Persentase Kecukupan Sarana Administrasi Kepegawaian				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	8 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				200 Orang	200 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Jumlah bulan tersedianya administrasi umum perangkat daerah				12 Bulan	12 Bulan	695.500.000,00	2.007.891.766,00	2.347.531.766,00	1.652.031.766,00			-	-	-		710.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	35.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	1.792.791.766,00	2.085.181.766,00	1.585.181.766,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				200 Dokumen	200 Dokumen	20.000.000,00	18.100.000,00	18.100.000,00	-1.900.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.500.000,00	62.000.000,00	84.250.000,00	58.750.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3 Unit	3 Unit	79.395.000,00	649.275.000,00	358.325.000,00	278.930.000,00			-	Pemerataan infrastruktur dengan berbasis peningkatan konektivitas wilayah pendukung perekonomian Pemerataan infrastruktur dengan berbasis peningkatan konektivitas wilayah pendukung perekonomian	-		2.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan infrastruktur dengan berbasis peningkatan konektivitas wilayah pendukung perekonomian Pemerataan infrastruktur dengan berbasis peningkatan konektivitas wilayah pendukung perekonomian			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	79.395.000,00	649.275.000,00	328.325.000,00	248.930.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	786.947.500,00	1.133.971.500,00	1.288.851.500,00	501.904.000,00			-	-	-		625.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	400.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			380.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	81.947.500,00	158.971.500,00	208.971.500,00	127.024.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	620.000.000,00	724.880.000,00	424.880.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			160.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Jumlah Bulan Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	1.388.905.000,00	1.682.672.550,00	2.020.302.550,00	631.397.550,00			-	-	-		1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				176 Unit	176 Unit	350.000.000,00	302.550.000,00	302.550.000,00	-47.450.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				34 Unit	34 Unit	928.905.000,00	1.065.122.500,00	1.157.752.500,00	228.847.500,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				236 Unit	236 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	120.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	215.000.050,00	440.000.050,00	430.000.050,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1. Persentase luasan wilayah banjir dan tergenang 2. Persentrase infrastruktur daerah irigasi kewenangan kab/kota dalam kondisi baik				45,48 15,19 %	15,19 45,48 %	10.143.422.000,00	12.785.213.300,00	15.384.762.808,00	7.026.578.000,00							17.170.000.000,00		
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase luasan wilayah banjir dan tergenang 2. Panjang infrastruktur Pengendali Banjir yang terbangun				0 % 500 M	0 % 500 M	2.754.129.000,00	3.340.853.000,00	3.850.853.000,00	1.096.724.000,00			-	- -	-		9.070.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir																			
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0031	Rehabilitasi Check Dam																			
			Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0071	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku																			
			Panjang Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai																			
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 KM	1 KM	2.000.000.000,00	2.202.518.900,00	2.202.518.900,00	202.518.900,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan				0 Lembaga	0 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai																			
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				0.1 KM	0.1 KM	344.129.000,00	536.696.750,00	941.696.750,00	597.567.750,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir																			
			Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0088	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air																			
			Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																			
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				0.1 KM	0.1 KM	350.000.000,00	451.949.850,00	556.949.850,00	206.949.850,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0104	Pembangunan Check Dam																			
			Jumlah Check Dam yang Dibangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing																			
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi				0 KM	0 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																			
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	55.075.000,00	55.075.000,00	-4.925.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya																			
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			1.485.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai																			
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				0 KM	0 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	94.612.500,00	94.612.500,00	94.612.500,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase infrastruktur daerah irigasi kewenangan kab/kota dalam kondisi baik				45,48 %	45,48 %	7.389.293.000,00	9.444.360.300,00	11.533.909.808,00	4.144.616.808,00			-	- -	-		8.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				1 KM	1 KM	6.462.922.000,00	7.226.900.050,00	8.369.419.558,00	1.906.497.558,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG I RIGASI-PENUG ASAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	- -			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi				2 Bendung	2 Bendung	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				0.5 KM	0.5 KM	558.371.000,00	1.762.095.250,00	2.592.245.250,00	2.033.874.250,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Bendung	1 Bendung	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi																		
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi				5 Lembaga	5 Lembaga	223.000.000,00	288.500.000,00	300.380.000,00	77.380.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	145.000.000,00	166.865.000,00	271.865.000,00	126.865.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1. Prosentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak				98.48 %	98.48 %	6.350.000.000,00	6.867.179.000,00	6.877.135.372,00	-1.900.000.000,00							4.450.000.000,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1. Prosentase rumah tangga yang menempati hunian dengan Jaringan perpipaan				75,54 %	75,54 %	6.350.000.000,00	6.867.179.000,00	6.877.135.372,00	527.135.372,00			-	- -	-		4.450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	374.000.000,00	374.000.000,00	274.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				4 Liter/Detik	4 Liter/Detik	4.100.000.000,00	5.100.000.000,00	5.100.000.000,00	1.000.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PEN UGASAN	-	- -			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				0 Liter/Detik	0 Liter/Detik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				300 SR	300 SR	2.150.000.000,00	1.393.179.000,00	1.403.135.372,00	-746.864.628,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PENUGASAN DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Prosentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses Sanitasi (air limbah domestik) Aman Prosentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses Sanitasi (air limbah domestik) layak				1,28 91,13 %	1,28 91,13 %	2.385.511.000,00	6.326.922.000,00	6.371.992.745,00	3.314.489.000,00							5.700.000.000,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase rumah tangga yang menempati hunian dengan layanan pengolahan air limbah Domestik				92,41 %	92,41 %	2.385.511.000,00	6.326.922.000,00	6.371.992.745,00	3.986.481.745,00			-	-	-		5.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman																		
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun				450 M ³ /Hari	450 M ³ /Hari	1.033.545.000,00	1.738.540.000,00	1.738.540.000,00	704.995.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG SANITASI-PENUGASAN	-	-			4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)																		
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun				300 M ³ /Hari	300 M ³ /Hari	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				200 Rumah Tangga	200 Rumah Tangga	1.351.966.000,00	4.028.182.000,00	3.998.252.745,00	2.646.286.745,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG SANITASI-PENUGASAN	-	-			1.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				200 Orang	200 Orang	0,00	58.200.000,00	83.200.000,00	83.200.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				2 Dokumen	1 Dokumen	0,00	502.000.000,00	552.000.000,00	552.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1. Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik				79,26 %	79,26 %	785.825.000,00	1.068.625.000,00	1.268.625.000,00	2.514.175.000,00							3.300.000.000,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Panjang drainase yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi dan dipelihara				6230 M	6230 M	785.825.000,00	1.068.625.000,00	1.268.625.000,00	482.800.000,00			-	-	-		3.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				600 Sistem Drainase Perkotaan	600 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0027	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan																		
			Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya				1 Kawasan Genangan	1 Kawasan Genangan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				150 Sistem Drainase Perkotaan	150 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				200 Sistem Drainase Perkotaan	200 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				5280 Sistem Drainase Perkotaan	5280 Sistem Drainase Perkotaan	785.825.000,00	1.068.625.000,00	1.268.625.000,00	482.800.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
6.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2. Persentase rekomendasi SLF (Sertifikat Laik Fungsi) yang diterbitkan 1. Persentase rekomendasi teknis IMB (PBG) yang diterbitkan				100 87 % %	100 87 % %	850.000.000,00	1.204.132.000,00	1.488.512.000,00	4.575.000.000,00							5.425.000.000,00		
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1. Persentase rekomendasi teknis IMB (PBG) yang diterbitkan 2. Persentase rekomendasi SLF (Sertifikat Laik Fungsi) yang diterbitkan				100 % 87 %	100 % 87 %	850.000.000,00	1.204.132.000,00	1.488.512.000,00	638.512.000,00			-	- -	-		5.425.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.08.2.01.0014	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara																			
			Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)				5 Bangunan Gedung Negara	5 Bangunan Gedung Negara	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				1 Bangunan Gedung	1 Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung																			
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota				6 Bantuan Teknis	6 Bantuan Teknis	200.000.000,00	238.026.000,00	245.156.000,00	45.156.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	391.000.000,00	391.000.000,00	291.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung																			
			Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya				1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			175.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																			
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				20 Dokumen	20 Dokumen	550.000.000,00	575.106.000,00	852.356.000,00	302.356.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
7.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1. Persentase bangunan/ lingkungan/ kawasan yang ditingkatkan/ tertata				100.00 %	100.00 %	0,00	0,00	500.000.000,00	575.000.000,00							575.000.000,00		
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase bangunan/ lingkungan/ kawasan yang ditingkatkan/ tertata				100 %	100 %	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	- -	-		575.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																			
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				1 Kawasan	1 Kawasan	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
8.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1. Persentase permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik 2. Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik				97,8 71,17 % %	71,17 97,8 % %	66.102.862.104,00	61.788.029.104,00	79.376.277.873,00	-25.509.143.684,00							40.593.718.420,00		
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1. Panjang permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik 2. Panjang jembatan kabupaten dalam kondisi baik				239 M 63,39 Km	239 M 63,39 Km	66.102.862.104,00	61.788.029.104,00	79.376.277.873,00	13.273.415.769,00			-	- -	-		40.593.718.420,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan																			
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	119.999.500,00	119.999.500,00	119.999.500,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				5 Dokumen	13 Dokumen	1.000.000.000,00	1.877.381.300,00	1.877.381.300,00	877.381.300,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Diganti				15 Jembatan	5 Jembatan	2.805.000.000,00	2.343.075.550,00	2.343.075.550,00	-461.924.450,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				1 KM	1 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				-	14 0	42.565.935.204,00	38.378.866.404,00	54.527.174.050,00	11.961.238.846,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG J ALAN-PENUGA SAN-JALAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-		10.593.718.420,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				20 KM	20 KM	1.599.019.750,00	1.085.578.750,00	1.085.578.750,00	-513.441.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa																		
			Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				1 KM	1 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar																		
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar				8000 KM	8000 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				100 Jembatan	100 Jembatan	750.000.000,00	723.099.000,00	723.099.000,00	-26.901.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				8 Jembatan	1 Jembatan	0,00	1.025.656.100,00	1.025.656.100,00	1.025.656.100,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				15 Jembatan	15 Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala				1 Jembatan	1 Jembatan	832.907.150,00	705.387.500,00	705.387.500,00	-127.519.650,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				2 KM	2 KM	500.000.000,00	489.992.750,00	489.992.750,00	-10.007.250,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				3.5 KM	3.5 KM	7.550.000.000,00	8.352.168.250,00	8.352.168.250,00	802.168.250,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				35 KM	35 KM	8.500.000.000,00	6.686.824.000,00	8.126.765.123,00	-373.234.877,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0048	Pelebaran Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dilebarkan				1 Jembatan	1 Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
9.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1. Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi				72,87 %	72,87 %	592.470.000,00	387.743.050,00	458.773.050,00	667.530.000,00							1.260.000.000,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1. Jumlah tenaga terampil konstruksi yang tersertifikasi				150 Orang	150 Orang	190.600.000,00	102.470.000,00	102.470.000,00	-88.130.000,00			-	-	-		160.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				50 Lembaga	50 Lembaga	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				100 Orang	100 Orang	150.600.000,00	102.470.000,00	102.470.000,00	-48.130.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/ kota yang aktif dengan data termutakhir				1 Sistem	1 Sistem	226.370.000,00	179.395.050,00	255.345.050,00	28.975.050,00			-	-	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	226.370.000,00	179.395.050,00	255.345.050,00	28.975.050,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	1. Jumlah dokumen ijin usaha jasa konstruksi yang diterbitkan				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00			-	-	-		350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.03.0006	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi																		
			Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.03.0007	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1. Jumlah Laporan pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				1 Dokumen	1 Dokumen	135.500.000,00	105.878.000,00	100.958.000,00	-34.542.000,00			-	-	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				1 Paket Pekerjaan	1 Paket Pekerjaan	110.000.000,00	76.638.000,00	65.858.000,00	-44.142.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				10 Lembaga	10 Lembaga	25.500.000,00	29.240.000,00	35.100.000,00	9.600.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1. Persentase penyimpangan pemanfaatan ruang				14 %	14 %	1.250.000.000,00	944.450.000,00	940.450.000,00	2.980.000.000,00							4.230.000.000,00	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1. Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00	181.200.000,00	181.200.000,00	-318.800.000,00			-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	17.352.500,00	17.352.500,00	-82.647.500,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Subsansi RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan subsansi RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	163.847.500,00	163.847.500,00	-236.152.500,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang																		
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Dokumen Persetujuan Subsansi Kebijakan Penataan Ruang Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000,00	378.750.000,00	378.750.000,00	-21.250.000,00			-	-	-		2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	378.750.000,00	378.750.000,00	-21.250.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1. Laporan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah 2. Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah				12 Bulan Dokumen	12 Bulan Dokumen	200.000.000,00	292.000.000,00	288.000.000,00	88.000.000,00			-	-	-		380.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	292.000.000,00	288.000.000,00	88.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			380.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah laporan koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 2. Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang				12 Bulan Dokumen	12 Bulan Dokumen	150.000.000,00	92.500.000,00	92.500.000,00	-57.500.000,00			-	- -	-		350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	92.500.000,00	92.500.000,00	-57.500.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							350.000.000,00	221.526.000,00	221.526.000,00	-128.474.000,00							800.000.000,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							350.000.000,00	221.526.000,00	221.526.000,00	-128.474.000,00							800.000.000,00	
1.	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	1. Jumlah bidang tanah milik Pemda yang bersertifikat				955 Bidang	955 Bidang	125.000.000,00	36.076.000,00	36.076.000,00	75.000.000,00							200.000.000,00	
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bertambahnya Bidang tanah Pemerintah Kabupaten Kendal yang Bersertifikat Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				110 Bidang 1 Dokumen	110 Bidang 1 Dokumen	125.000.000,00	36.076.000,00	36.076.000,00	-88.924.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -	Bidang Tanah Pemerintah Daerah		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.10.06.2.01.0007	Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	36.076.000,00	36.076.000,00	-88.924.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	-				-	-	225.000.000,00	185.450.000,00	185.450.000,00	375.000.000,00							600.000.000,00	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bertambahnya Bidang tanah Pemerintah Kabupaten Kendal yang Bersertifikat				110 Bidang	110 Bidang	225.000.000,00	185.450.000,00	185.450.000,00	-39.550.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -	Bidang Tanah Pemerintah Daerah		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				110 Dokumen	110 Dokumen	225.000.000,00	185.450.000,00	185.450.000,00	-39.550.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			J U M L A H						2.455.210.099.261,00	2.554.502.569.720,00	2.710.823.152.865,00	255.613.053.604,00							2.761.903.860.666,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan APBD Kabupaten Kendal Tahun 2024 merupakan acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah pada Perubahan Anggaran Tahun 2024, hal ini karena :

1. Perkembangan situasi yang tidak sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran yang dipengaruhi oleh pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah lainnya.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja.
3. Terjadi keadaan darurat yang bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya serta berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah yang memiliki dampak signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
4. Situasi keadaan luar biasa, hal ini merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% yang merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.

Renja Perubahan APBD 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal berisi program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024 guna mendukung tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dan diharapkan bisa menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan.

Tentunya masih banyak kekurangan dalam kami menyusun Renja Perubahan APBD tahun 2024 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dan semoga dokumen ini bermanfaat bagi kita semua.

Demikian dan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL



ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19660715 199003 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 2

 1.3 Maksud dan Tujuan 5

 1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
 BERKENAAN 8

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan
 Triwulan II Tahun 2024 dan Renstra Perangkat Daerah 8

 2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 34

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 35

BAB IV PENUTUP 40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah, yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Pada ketentuan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa dokumen perencanaan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Oleh sebab itu setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, Renstra PD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Perubahan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2024 merupakan pedoman bagi penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan telah direviu oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang menjadi dasar fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 353 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Renja pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk perubahan anggaran, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam prosesnya penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal mengacu pada hasil evaluasi RKPD sampai dengan Triwulan II tahun 2024.

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target kinerja sasaran daerah, perkembangan kondisi terkini yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, perubahan proyeksi Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya yang akan digunakan untuk tahun berjalan, penambahan kegiatan baru, penghapusan kegiatan yang tidak relevan, perubahan indikator kinerja, target dan pagu kegiatan serta adanya refocussing anggaran termasuk perubahan pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer pusat ke daerah dan bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten/kota.

Adapun alasan yang mendasar dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 antara lain :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan;
- d. Adanya Refocusing atau pengurangan anggaran;
- e. Adanya pengurangan anggaran untuk Gaji ASN dan Non ASN;
- f. Adanya penambahan dan pengurangan sub kegiatan;
- g. Adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar sub kegiatan, kegiatan dan program maupun antar jenis belanja.

Berdasarkan evaluasi Renja tahun 2024 Triwulan I dan II, menunjukkan adanya perkembangan program, kegiatan, subkegiatan yang kurang sesuai dengan asumsi awal penyusunan Renja meliputi pergeseran penyelesaian masalah, penambahan dan pengurangan kegiatan ataupun penganggaran dalam upaya pencapaian penyelesaian permasalahan. Oleh karena itu menjadi penting untuk dilakukannya Perubahan Renja tahun 2024. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup ini diharapkan dapat benar-benar menjadi acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disesuaikan sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah 9 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 20).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud :

Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal 2024 disusun dengan maksud untuk :

- Menjadi acuan bagi SKPD dalam rangka Menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD yang didahului dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2024.
- Menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan Anggaran SKPD Tahun 2024.

Perubahan Renja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tahun 2024 disusun guna mewujudkan keterpaduan arah kebijakan dan strategi serta keselarasan program, kegiatan dan sub

kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan dengan mendasarkan RPJMD tahun 2021-2026 Kabupaten Kendal dalam agenda mewujudkan misi 4 yaitu mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

Tujuan :

- Perubahan Renja ini disusun untuk mewujudkan sasaran RKPD sesuai Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal;
- Sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) APBD Perubahan;
- Sebagai Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun berikutnya.
- Memberikan pedoman dalam penyusunan instrument pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/ Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penyusunan Renja OPD Dinas Lingkungan Hidup

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

**BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN BERKENAAN**

- Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II dan Renstra Perangkat Daerah
- Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 - Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 - Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 - Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
 - Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
 - Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
- 2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang kegiatan lanjutan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan maupun tidak

BAB IV. PENUTUP

Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB II

**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan
Triwulan II Tahun 2024 dan Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2024, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Analisis Capaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal mulai tahun 2021 didasarkan pada Renstra 2021-2026 dimana indikator program dan target renstra SKPD telah disesuaikan dengan (tupoksi) tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.

Kajian (reviuw) terhadap evaluasi hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun 2024, mengacu pada APBD tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya secara fisik telah berjalan sesuai rencana, namun penyerapan anggaran masih relatif rendah dibandingkan dengan target yang seharusnya dicapai. Evaluasi pelaksanaan RKPD Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja capaian program :

~ Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah

Jumlah dana	: Rp. 14.820.672.393,-
Realisasi Anggaran	: Rp. 6.935.817.421,-
Realisasi fisik	: 47 %

I. Kegiatan :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Anggaran : Rp. 184.688.000,-
 - Realisasi fisik : 25,00 %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 17.119.800,- (9,27 %)

Pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebesar 25% pada

triwulan ke II sehingga bisa dikatakan belum mencapai target. Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini antara lain pada sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah masih terealisasi 0% sehingga berpengaruh pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub kegiatan :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Anggaran : Rp. 84.500.000,-
 - Realisasi fisik : 15,00 %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 3.574.800,- (4,23 %)
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Anggaran : Rp. 58.188.000,-
 - Realisasi fisik : 45,00 %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 13.545.000,- (23,28 %)
- 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Anggaran : Rp. 42.000.000,-
 - Realisasi fisik : 0 %
 - Realisasi Anggaran : 0,- (0 %)

II. Kegiatan :

- 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Anggaran : Rp. 10.638.818.183,-
 - Realisasi fisik : 54,00 %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 5.781.947.879,- (54,35 %)

Pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terealisasi sebesar 54% pada triwulan ke II sehingga bisa dikatakan mencapai target. Faktor pendukung terealisasinya kegiatan ini yakni karena hanya terdapat 1 (satu) sub kegiatan yakni Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang setiap bulan selalu rutin pengajian dan tunjangan ASN.

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Anggaran : Rp. 10.638.818.183,-
 - Realisasi fisik : 54,00 %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 5.781.947.879,- (54,35 %)

III. Kegiatan :

- 1) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Anggaran : Rp. 50.000.000,-
 - Realisasi fisik : - %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 0,- (0 %)

Pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terealisasi sebesar 0% pada triwulan ke II sehingga bisa dikatakan belum mencapai target. Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini karena belum berjalannya sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang rencana akan dilaksanakan pada bulan Oktober.

Sub Kegiatan :

- 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - Anggaran : Rp. 50.000.000,-
 - Realisasi fisik : - %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 0,- (0 %)

IV. Kegiatan :

- 1) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Anggaran : Rp. 954.081.210,-
 - Realisasi fisik : 35,00 %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 236.127.150,- (24,75 %)

Pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah baru terealisasi sebesar 35% pada triwulan ke II sehingga bisa dikatakan belum mencapai target. Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini antara lain pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor masih terealisasi 0% sehingga berpengaruh pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Anggaran : Rp. 70.000.000,-
 - Realisasi fisik : - %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 0,- (0 %)
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Anggaran : Rp. 159.640.000,-
 - Realisasi fisik : 25,00 %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 33.397.000,- (20,92 %)
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Anggaran : Rp. 65.060.000,-
 - Realisasi fisik : 55,00 %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 35.049.100,- (53,87 %)
- 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Anggaran : Rp. 625.146.210,-
 - Realisasi fisik : 25,00%
 - Realisasi Anggaran : Rp. 133.836.050,- (21,41 %)

- 5) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - Anggaran : Rp. 34.235.000,-
 - Realisasi fisik : 100,00 %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 33.845.000,- (98,86 %)

V. Kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Anggaran : Rp. 1.417.600.000,-
 - Realisasi fisik : 50,00 %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 574.631.102,- (40,55 %)

Pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar 50% pada triwulan ke II sehingga bisa dikatakan mencapai target. Faktor pendukung terealisasinya kegiatan ini yakni pada 3 (tiga) sub kegiatan yang ada di kegiatan ini, 2 (dua) diantaranya terealisasi diatas 50% yakni sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Anggaran : Rp. 9.000.000,-
 - Realisasi fisik : 50,00 %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 4.500.000,- (50,00 %)
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Anggaran : Rp. 655.000.000,-
 - Realisasi fisik : 45,00 %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 170.331.060,- (26,00 %)
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Anggaran : Rp. 753.600.000,-
 - Realisasi fisik : 55,00 %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 399.800.042,- (53,05 %)

VII. Kegiatan :

- 1) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Anggaran : Rp. 1.575.485.000,-
 - Realisasi fisik : 40,00%
 - Realisasi Anggaran : Rp. 325.991.490,- (20,69 %)

Pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar 40% pada triwulan ke II sehingga bisa dikatakan belum mencapai target. Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini antara lain pada sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya masih terealisasi 0%

sehingga berpengaruh pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Anggaran : Rp. 1.215.485.000,-
 - Realisasi fisik : 20,00 %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 247.516.490,- (20,36 %)
- 2) Pemeliharaan Mebel
 - Anggaran : Rp. 50.000.000,-
 - Realisasi fisik : 100,00 %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 49.980.000,- (99,96 %)
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - Anggaran : Rp. 115.000.000,-
 - Realisasi fisik : 25,00 %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 28.495.000,- (24,78 %)
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Anggaran : Rp. 195.000.000,-
 - Realisasi fisik : - %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 0,- (0 %)

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Indikator kinerja capaian program :

~ Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku

Jumlah dana : Rp. 400.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 10.700.000,-
Realisasi fisik : 50,00 %

I. Kegiatan:

- 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
 - Anggaran : Rp. 150.000.000,-
 - Realisasi fisik : 50,00 %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 4.900.000,- (3,26 %)

Pada kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 50% pada triwulan ke II sehingga bisa dikatakan mencapai target. Faktor pendukung terealisasinya kegiatan ini yakni pada 2 (dua) sub kegiatan yang ada di kegiatan ini, 1 (satu) diantaranya terealisasi sebesar 70% yakni sub kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

- 1) Pengendalian dan Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
 - Anggaran : Rp. 80.000.000,-
 - Realisasi fisik : 40,00 %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 1.700.000,- (2,13 %)
- 2) Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota
 - Anggaran : Rp. 70.000.000,-
 - Realisasi fisik : 70,00 %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 3.200.000,- (4,57 %)

II. Kegiatan:

- 1) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
 - Anggaran : Rp. 250.000.000,-
 - Realisasi fisik : 50,00 %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 5.800.000,- (2,32 %)

Pada kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 50% pada triwulan ke II sehingga bisa dikatakan mencapai target. Faktor pendukung terealisasinya kegiatan ini yakni pada 2 (dua) sub kegiatan yang ada di kegiatan ini, 1 (satu) diantaranya terealisasi sebesar 80% yakni sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD.

Sub Kegiatan :

- 1) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
 - Anggaran : Rp. 150.000.000,-
 - Realisasi fisik : 80,00 %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 4.700.000,- (3,13 %)
- 2) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
 - Anggaran : Rp. 100.000.000,-
 - Realisasi fisik : 30,00 %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 1.100.000,- (1,1 %)

3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Indikator kinerja capaian program :

~ Jumlah sungai yang terpantau kualitas airnya dibagi jumlah sungai yang harus dipantau kualitas airnya

Jumlah dana : Rp. 7.955.221.500,-
Realisasi Anggaran : Rp. 325.294.351,-
Realisasi fisik : 40,50 %

I. Kegiatan:

- 1) Pencegahan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Anggaran : Rp. 184.639.000,-

- Realisasi fisik : 15,00 %
- Realisasi Anggaran : Rp. 15.270.000,- (8,27 %)

Pada kegiatan Pencegahan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 15% pada triwulan ke II sehingga bisa dikatakan belum mencapai target. Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini antara lain pada kegiatan ini terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang realisasinya masih 0% yakni sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

- 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut.
 - Anggaran : Rp. 131.690.000,-
 - Realisasi fisik : 35,00 %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 15.270.000,- (11,59 %)
- 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.
 - Anggaran : Rp. 5.330.000,-
 - Realisasi fisik : - %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 0,- (0 %)
- 3) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
 - Anggaran : Rp. 47.619.000,-
 - Realisasi fisik : - %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 0,- (0 %)

II. Kegiatan :

- 1) Penanggulangan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Anggaran : Rp. 47.120.000,-
 - Realisasi fisik : - %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 0,- (0 %)

Pada kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 0% pada triwulan ke II sehingga belum mencapai target. Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini antara lain pada kegiatan ini terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yang semuanya realisasinya masih 0%.

Sub Kegiatan :

- 1) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
 - Anggaran : Rp. 11.050.000,-
 - Realisasi fisik : - %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 0,- (0%)
- 2) Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Anggaran : Rp. 8.770.000,-
 - Realisasi fisik : - %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 0,- (0%)
- 3) Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Anggaran : Rp. 27.300.000,-
 - Realisasi fisik : - %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 0,- (0%)

II. Kegiatan :

- 1) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Anggaran : Rp. 7.723.426.500,-
 - Realisasi fisik : 42,00 %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 3.237.673.351,- (41,92 %)

Pada kegiatan Pemulihan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 42% pada triwulan ke II sehingga bisa dikatakan belum mencapai target. Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini antara lain pada kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang realisasinya masih 0% yakni sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi.

Sub Kegiatan :

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar
 - Anggaran : Rp. 3.059.152.917,-
 - Realisasi fisik : 50,00 %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 925.175.000,- (30,24 %)
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota
 - Anggaran : Rp. 4.511.759.583,-
 - Realisasi fisik : 51,20 %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 2.312.498.351,- (51,25 %)
- 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi
 - Anggaran : Rp. 152.550.000,-
 - Realisasi fisik : - %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 0,- (0 %)

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Indikator kinerja capaian program :

~ Presentase KEHATI yang dikelola (alun-alun, hutan kota, taman yang dikelola pemda) yang terpelihara dengan baik

Jumlah dana : Rp. 1.441.275.507,-

Realisasi Anggaran : Rp. 366.667.450,-

Realisasi fisik : 25,40 %

I. Kegiatan:

1) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

- Anggaran : Rp. 1.441.275.507,-
- Realisasi fisik : 25,40 %
- Realisasi Anggaran : Rp. 366.667.450,- (25,44 %)

Pada kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 25,40% pada triwulan ke II sehingga bisa dikatakan belum mencapai target. Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini antara lain pada kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang realisasinya masih 22% yakni sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sementara 1 (satu) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sudah mencapai target sebesar 50%.

Sub Kegiatan :

1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

- Anggaran : Rp. 1.023.275.507,-
- Realisasi fisik : 22,00 %
- Realisasi Anggaran : Rp. 225.417.450,- (22,03 %)

2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

- Anggaran : Rp. 418.000.000,-
- Realisasi fisik : 50,00 %
- Realisasi Anggaran : Rp. 141.250.000,- (33,79%)

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Indikator kinerja capaian program :

~ Persentase dokumen persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang disetujui

Jumlah dana : Rp. 131.100.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 21.935.934,-

Realisasi fisik : 20,00 %

I. Kegiatan :

1) Penyimpanan Sementara Limbah B3

- Anggaran : Rp. 30.000.000,-

- Realisasi fisik : - %
- Realisasi Anggaran : Rp. 0,- (0 %)

Pada kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 terealisasi sebesar 0% pada triwulan ke II sehingga belum mencapai target. Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini antara lain pada kegiatan ini terdapat sub kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang realisasinya masih 0%.

Sub Kegiatan :

- 1) Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
 - Anggaran : Rp. 30.000.000,-
 - Realisasi fisik : - %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 0,- (0 %)

II. Kegiatan :

- 1) Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Anggaran : Rp. 101.100.000,-
 - Realisasi fisik : 21,70 %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 21.935.934,- (21,70 %)

Pada kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 21,70% pada triwulan ke II sehingga bisa dikatakan belum mencapai target. Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini antara lain pada kegiatan ini terdapat sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang realisasinya masih 21,70%.

Sub Kegiatan :

- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
 - Anggaran : Rp. 101.100.000,-
 - Realisasi fisik : 21,70 %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 21.935.934,- (21,70 %)

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Indikator kinerja capaian program:

- ~ Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi

ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Jumlah dana	: Rp. 61.350.000,-
Realisasi Anggaran	: Rp. 3.242.700
Realisasi fisik	: 25,30 %

I. Kegiatan :

- 1) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Anggaran : Rp. 61.350.000,-
 - Realisasi fisik : 25,30 %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 3.242.700,- (5,28 %)

Pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 25,30% pada triwulan ke II sehingga bisa dikatakan belum mencapai target. Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini antara lain pada kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang realisasinya masih 0% yakni sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.

Sub Kegiatan :

- 1) Fasilitasi Pemenuhan ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - Anggaran : Rp. 30.000.000,-
 - Realisasi fisik : - %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 0,- (0 %)
- 2) Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Anggaran : Rp. 31.350.000,-
 - Realisasi fisik : 51,00 %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 3.242.700,- (10,34%)

7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Indikator kinerja capaian program :

~ Persentase masyarakat yang dibina

Jumlah Dana	: Rp. 69.069.484,-
Realisasi Anggaran	: Rp. 5.479.500
Realisasi fisik	: 10,00%

I. Kegiatan :

- 1) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Anggaran : Rp. 69.069.484,-
 - Realisasi fisik : 10,00 %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 5.479.500,- (7,93 %)

Pada kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 10% pada triwulan ke II sehingga bisa dikatakan belum mencapai target. Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini antara lain pada kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang realisasinya masih 0% yakni sub kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup.

Sub Kegiatan :

- 1) Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
 - Anggaran : Rp. 32.370.000,-
 - Realisasi fisik : - %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 0,- (0%)
- 2) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan formal/Lembaga masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat
 - Anggaran : Rp. 36.699.484,-
 - Realisasi fisik : 55,00 %
 - Realisasi Anggaran : Rp. 5.479.500,- (14,93%)

8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Indikator kinerja capaian program :

- ~ Persentase masyarakat yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup
- Jumlah Dana : Rp. 23.300.400,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 0
- Realisasi fisik : - %

I. Kegiatan :

- 1) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Anggaran : Rp. 23.300.400,-
 - Realisasi fisik : - %
 - Realisasi anggaran : Rp. 0,- (0%)

Pada kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 0% pada triwulan ke II sehingga belum mencapai target. Permasalahan

yang dihadapi pada kegiatan ini antara lain pada kegiatan ini terdapat sub kegiatan Penilaian Kinerja masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang realisasinya masih 0%.

Sub Kegiatan :

- 1) Penilaian Kinerja masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Anggaran : Rp. 23.300.400,-
 - Realisasi fisik : - %
 - Realisasi anggaran : Rp. 0,- (0%)

9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Indikator kinerja capaian program :
~ Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
Jumlah Dana : Rp. 3.440.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 0
Realisasi fisik : - %

I. Kegiatan :

- 1) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 - Anggaran : Rp. 3.440.000,-
 - Realisasi fisik : - %
 - Realisasi anggaran : Rp. 0,- (0 %)

Pada kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 0% pada triwulan ke II sehingga belum mencapai target. Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini antara lain pada kegiatan ini terdapat sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang realisasinya masih 0%.

Sub Kegiatan :

- 1) Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
 - Anggaran : Rp. 3.440.000,-
 - Realisasi fisik : - %
 - Realisasi anggaran : Rp. 0,- (0 %)

10. Program Pengelolaan Persampahan

Indikator kinerja capaian program :

- ~ Prosentase sampah yang dikelola, Jumlah daerah layanan pengangkutan sampah, dan Timbulan sampah yang ditangani
- Jumlah Dana : Rp. 120.000.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 17.400.000
- Realisasi fisik : 15,00 %

I. Kegiatan :

1) Pengelolaan Sampah

- Anggaran : Rp. 120.000.000,-
- Realisasi fisik : 15,00 %
- Realisasi anggaran : Rp. 17.400.000,- (14,5%)

Pada kegiatan Pengelolaan Sampah terealisasi sebesar 15% pada triwulan ke II sehingga belum mencapai target. Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini antara lain pada kegiatan ini terdapat sub kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan yang realisasinya masih 15%.

Sub Kegiatan :

1) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

- Anggaran : Rp. 120.000.000,-
- Realisasi fisik : 15,00 %
- Realisasi Anggaran : Rp. 17.400.000,- (14,5 %)

Untuk lebih jelasnya mengenai Evaluasi pelaksanaan RKPD Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Triwulan II, dapat dilihat pada lampiran tabel 2.1 Formulir Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup s/d Triwulan II Tahun 2024.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9 = (6+8)	10 = (9/4)
2						Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
2	11					Lingkungan Hidup								
2	11	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 %	100	47	47	100	47	47
2	11	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan, dokumen perencanaan yang disusun	18 kali	18	4,5	25	16	25	139
2	11	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 dokumen	12	1,8	15	12	15	125
2	11	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 laporan	16	7,2	45	16	45	250
2	11	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	3	0	0	12	0	0

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9 = (6+8)	10 = (9/4)
2	11	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan tunjangan ASN yang disediakan pemda	12 bulan	12	6,48	54	12	54	
2	11	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 orang/bulan	12	6,48	54	12	54	
2	11	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	meningkatnya wawasan dan pengetahuan ASN dinas	12 bulan	12	0	0	12	0	
2	11	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 orang	15	0	0	20	0	
2	11	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan umum dinas	12 bulan	12	4,2	35	12	35	
2	11	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	12	0	0	12	0	
2	11	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12	3	25	12	25	
2	11	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12	6,6	55	12	55	
2	11	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12	3	25	12	25	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9 = (6+8)	10 = (9/4)
						Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12	12	100	12	100	
2	11	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tepenuhinya kebutuhan umum penunjang urusan dinas	12	12	6	50	12	50	
2	11	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800 laporan	800	400	50	800 lembar	50	
2	11	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12	5,4	45	12	45	
2	11	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12	6,6	55	12	55	
2	11	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya aset dan barang milik dinas	12 bulan	12	4,8	40	12	40	
2	11	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	141 Unit	141	28	20	139 unit	20	
2	11	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 unit	3	3	100	0	100	
2	11	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	20	5	25	12	25	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9 = (6+8)	10 = (9/4)
2	11	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1	0	0	1	0	
2	11	02				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku	76%	80%	40	50	74%	50	
2	11	02	2	01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH yang disusun	4 Dokumen	4	2	50	4 Dokumen	50	
2	11	02	2	01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	24 Dokumen	20	8	40	22 Dokumen	40	
2	11	02	2	01	06	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	4 dokumen	4	2,8	70	4	70	
2	11	02	2	02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS tata ruang dan PJMD yang disusun	6 Dokumen	7	3,5	50	3	50	
2	11	02	2	02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD / RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	0 Dokumen	1	0,8	80	0	80	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9 = (6+8)	10 = (9/4)
2	11	02	2	02	05	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	3 Dokumen	3	0,9	30	2	30	
2	11	03				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pemantauan kualitas air	80%	100	40,5	40,5	70%	40,5	
							Cakupan pemantauan kualitas udara	80%	100	40,5	40,5	70%	40,5	
2	11	03	2	01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemantauan lingkungan	3 dokumen	3	0,45	15	3	15	
2	11	03	2	01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	56 dokumen	3	1,05	35	50 dokumen	35	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	2	0	0	1	0	
						Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	0 Dokumen	1	0	0	1	0	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9 = (6+8)	10 = (9/4)
2	11	03	2	02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang dilakukan pembinaan	3 lokasi	5	0	0	2	0	
2	11	03	2	02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2 laporan	2	0	0	2	0	
2	11	03	2	02	02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	3 Lokasi	2	0	0	2	0	
2	11	03	2	02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan Jumlah titik Penghentian sumber pencemar sungai melalui Ipal UKM/Ponpes	3 titik	2	0	0	2	0	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
1						2	3	4	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	8	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9 = (6+8)	10 = (9/4)
2	11	03	2	03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	lokasi lahan yang dipulihkan	2 lokasi	2	0,84	42	1	42	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	12	12	6	50		50	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	4	4	2	51,2		51,2	
2	11	03	2	03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	2 dokumen	2	0	0	1	0	
2	11	04				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase KEHATI yang dikelola (alun-alun, hutan kota, taman yang dikelola pemda) yang terpelihara dengan baik	19,04%	20	5,08	25,4	18,56	25,4	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
1						2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9 = (6+8)	10 = (9/4)
2	11	04	2	01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	jumlah alun-alun, hutan kota, taman yang dikelola pemda	33 unit	35	8,89	25,4	32	25,4	
2	11	04	2	01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	10.504 Ha	10 Ha	2,2 Ha	22	10.504	22	
2	11	04	2	01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	6 orang	6	3	50	5 orang	50	
2	11	05				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase dokumen persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang disetujui	78 %	80	16	20	76%	20	
						Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah dokumen yang diverifikasi	30 Dokumen	38	0	0	10	0	
						Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	15 Laporan	10	0	0	10	0	
2	11	05	2	02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah rekomendasi dan koordinasi pengumpulan limbah B3 yang dilakukan	46 dok/kegiatan	58	12,6	21,70	30	21,70	
2	11	05	2	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi	31 dokumen	10	2,2	21,7	30	21,7	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9 = (6+8)	10 = (9/4)
						Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kab/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya							
2	11	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	50 %	60	15,18	25,3	45%	25,3	
2	11	06	2	01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan pembinaan teknis pengelolaan lingkungan	90 perusahaan	100	25,3	25,3	80 perusahaan	25,3	
2	11	06	2	01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan	0 Dokumen	4	0	0	0	0	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
1						2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9 = (6+8)	10 = (9/4)
						Izin PPLH	Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							
2	11	06	2	01	04	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20 dokumen	25	12,75	51	15	51	
2	11	08				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Prosentase masyarakat yang dibina	10 %	15	1,5	10	10 %	10	
2	11	08	2	01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota	jumlah lembaga yang mendapat penyuluhan lingkungan hidup	9 lembaga	11	1,1	10	7 lembaga	10	
2	11	08	2	01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat	2 orang	2	0	0	2	0	
2	11	08	2	01	05	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk	Jumlah Lembaga/ kelompok Masyarakat/ Institusi yang Terdaftar yang Meningkat	5 lembaga	5	2,75	55	5 lembaga	55	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n- 1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9 = (6+8)	10 = (9/4)
						Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH							
2	11	09				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup	25 %	30	0	0	20	0	
2	11	09	2	01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga atau sekolah yang mendapatkan penghargaan bidang LH	5 lembaga/orang/sekolah	7	0	0	4	0	
2	11	09	2	01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 entitas	4	0	0	4	0	
2	11	10				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	60 %	80	64	80	50	80	
2	11	10	2	01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian pengaduan di bidang pengelolaan lingkungan hidup	60 %	80	64	80	50	80	
2	11	10	2	01	04	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kab/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	60 pengaduan	10	8	80	50	80	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9 = (6+8)	10 = (9/4)
2	11	11				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan sampah yang Ditangani	36.136 ton	38.653	5.800	15	35.040	15	
							Prosentase sampah yang Dikelola	23,67%	25	3,75	15	23,11%	15	
							Jumlah daerah layanan pengangkutan sampah	103 desa/kel	108	16	15	100 desa/kel	15	
2	11	11	2	01		Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang tertangani	32.795 ton	34.522	5200	15	31.947 ton	15	
2	11	11	2	01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	11 kelompok	10	1,5	15	10	15	
2	11	11	2	01	07	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2 Ton	36.136	0	0	2 Ton	0	

2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2024 juga telah melalui proses penelaahan usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dari para pemangku kepentingan dan masyarakat. Dari hasil penelaahan usulan Program/Kegiatan/Sub kegiatan dari para pemangku kepentingan dan masyarakat, tidak ada usulan masyarakat yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.

Adapun hasil Penelaahan usulan Program/Kegiatan/Sub kegiatan dari masyarakat dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
USULAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN MASYARAKAT
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	NIHIL				

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2024 ini akan dimuat tentang kegiatan lanjutan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan maupun tidak.

Dalam Perubahan Renja tahun 2024 ini, diusulkan 10 program meliputi 20 kegiatan dan 42 Sub Kegiatan dengan sumber dana dari APBD (Kabupaten/Provinsi), dengan rencana anggaran sejumlah Rp.27.189.929.284,-. Berikut merupakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengalami perubahan pada Perubahan Renja Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mengalami perubahan yakni bertambahnya pagu anggaran sebesar Rp.3.000.000,- yang peruntukannya untuk BBM dan Biaya Penjilidan serta Fotocopy yang pada APBD penetapan sebesar Rp.84.500.000,- menjadi Rp.87.500.000,- pada RKPD Perubahan.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mengalami perubahan yakni berkurangnya pagu anggaran sebesar Rp.390.000.000,- yang peruntukannya untuk penyesuaian Gaji dan Tunjangan ASN sesuai Desk oleh BPKAD dan Baperlitbang. Pagu pada RKPD Perubahan ini menjadi sebesar Rp.10.248.818.183,- dari pagu - sebelumnya yang sebesar Rp.10.638.818.183,-.

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor mengalami perubahan yakni

bertambahnya pagu anggaran sebesar Rp.30.000.000,- yang peruntukannya untuk belanja ATK yang di penetapan tidak teranggarkan. Pagu penetapan sebesar Rp.70.000.000,- menjadi Rp.100.000.000,- di RKPD Perubahan.

2) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mengalami perubahan yakni bertambahnya pagu anggaran yang peruntukannya untuk penambahan Uang harian perjalanan dinas dari bidang-bidang yang di sentralkan di Sekretariat sesuai peraturan yang berlaku. sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada RKPD Perubahan menjadi Rp.949.185.510,-.

d. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik mengalami perubahan yakni bertambahnya pagu anggaran yang peruntukannya untuk Media Lingkar Jateng. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada RKPD Perubahan menjadi Rp.855.000.000,-.

2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor mengalami perubahan yakni bertambahnya pagu anggaran yang peruntukannya untuk kekurangan Gaji tenaga Outsourcing. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada RKPD Perubahan menjadi Rp.877.800.000,-.

e. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan mengalami perubahan yakni bertambahnya pagu anggaran yang peruntukannya untuk pemeliharaan sarpras kebersihan alat berat dan truk pengangkut sampah. Sub kegiatan Penyediaan Jasa

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada RKPD Perubahan menjadi Rp.1.295.485.000,-.

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

- 1) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

Pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut mengalami perubahan yakni bertambahnya pagu anggaran yang peruntukannya untuk kekurangan anggaran uji kualitas air dan udara ambien. Sub kegiatan kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut pada RKPD Perubahan menjadi Rp.156.690.000,-.

- 2) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Pada sub kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota mengalami perubahan yakni bertambahnya pagu anggaran yang peruntukannya untuk kekurangan anggaran untuk kebutuhan internet laboratorium onlimo. Sub kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota pada RKPD Perubahan bertambah Rp.10.000.000,- menjadi Rp.57.619.000,-.

b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

- 1) Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Pada sub kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup mengalami perubahan yakni bertambahnya pagu anggaran yang peruntukannya untuk jasa konsultasi pemetaan lahan. Sub kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada RKPD Perubahan bertambah Rp.25.000.000,- menjadi Rp.52.300.000,-.

c. *Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran

Pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran mengalami perubahan yakni bertambahnya pagu anggaran yang peruntukannya untuk kekurangan BBM pengangkutan sampah yang pada penetapan hanya bisa untuk 9 bulan. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran pada RKPD Perubahan bertambah Rp.334.800.000,- menjadi Rp.3.393.952.917,-.

2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota

Pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota mengalami perubahan yakni bertambahnya pagu anggaran yang peruntukannya untuk kekurangan gaji Tenaga Penunjang Kegiatan Kebersihan yang baru teranggarkan 10 bulan. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota pada RKPD Perubahan bertambah Rp.1.119.600.000,- menjadi Rp.5.631.359.583,-.

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

a. *Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota*

1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pada sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) mengalami perubahan yakni bertambahnya pagu anggaran yang peruntukannya untuk pemeliharaan sarpras taman dan BBM pemeliharaan taman. Sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada RKPD Perubahan bertambah Rp.95.000.000,- menjadi Rp.1.118.275.507,-.

4. Program Pengelolaan Persampahan

a. *Pengelolaan Sampah*

1) Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah

Pada sub kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah mengalami perubahan

yakni yang sebelumnya di penetapan tidak dilaksanakan sub kegiatan ini, namun di perubahan RKPD di tambahkan untuk mengakomodir Pekerjaan Fisik Controlled Landfill dan Rehabilitasi Talud TPA Darupono Baru. Pagu Sub kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah pada RKPD Perubahan sebesar Rp.274.000.000,-.

- Tabel Plafon Rencana anggaran perubahan Dinas Lingkungan Hidup TA 2024 terlampir :

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja pada OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal adalah dokumen perencanaan untuk periode Tahun 2024, yang memuat kebijakan dan rencana program, kegiatan dan sub Kegiatan Perubahan.

Untuk dapat mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, perlu adanya pemberdayaan masyarakat agar mempunyai kesadaran pada pelestarian lingkungan hidup, mempunyai informasi yang cukup tentang masalah-masalah yang dihadapi dan mempunyai keberdayaan dalam berperan serta pada proses pengambilan keputusan demi kepentingan orang banyak.

Kondisi ini perlu ditunjang dengan adanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik khususnya pemerintah daerah dimana perlu memiliki kemampuan pengelolaan di bidang lingkungan hidup (good environmental governance), agar mampu menjawab tantangan dari masyarakat yang sudah diberdayakan. Hal lain adalah pentingnya usaha peningkatan penataan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Penegakan hukum merupakan salah satu aspek utama dalam peningkatan penataan disamping instrumen-instrumen lainnya diantaranya kemampuan keuangan daerah.

Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam mengimplementasikan rencana.

Kendal, 2024
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL

ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19660715 199003 1 007

PENUTUP

Renja Perubahan pada OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal adalah dokumen perencanaan untuk periode Tahun 2024, yang memuat kebijakan dan rencana program, kegiatan dan sub Kegiatan Perubahan.

Untuk dapat mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, perlu adanya pemberdayaan masyarakat agar mempunyai kesadaran pada pelestarian lingkungan hidup, mempunyai informasi yang cukup tentang masalah-masalah yang dihadapi dan mempunyai keberdayaan dalam berperan serta pada proses pengambilan keputusan demi kepentingan orang banyak.

Kondisi ini perlu ditunjang dengan adanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik khususnya pemerintah daerah dimana perlu memiliki kemampuan pengelolaan di bidang lingkungan hidup (good environmental governance), agar mampu menjawab tantangan dari masyarakat yang sudah diberdayakan. Hal lain adalah pentingnya usaha peningkatan penataan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Penegakan hukum merupakan salah satu aspek utama dalam peningkatan penataan disamping instrumen-instrumen lainnya diantaranya kemampuan keuangan daerah.

Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam mengimplementasikan rencana.

Kendal, 20 Agustus 2024
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL



ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19660715 199003 1 007

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n- 1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9 = (6+8)	10 = (9/4)
2 11 11 2 01 04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	11 kelompok	10	1,5	15	10		
2 11 11 2 01 07	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2 Ton	36.136	0	0	2 Ton		

Kendal, 20 Agustus 2024
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL

ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Tk I
NIP. 19660715 199003 1 007



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2024**

user



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut, Rencana Kerja (RENJA) ini disusun mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026 yang merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD.

Renja Dinas Sosial ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Dinas Sosial tahun 2025 mendatang.

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KENDAL**



MUNTOHA, S.KM, M.Kess
Pembina

NIP. 19710416 199403 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Kendal berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun bersangkutan. Sebagai dokumen rencana perubahan tahunan, Perubahan Rencana Kerja ini mempunyai arti yang strategis dalam mendukung tujuan kinerja, mengingat bahwa :

- a. Perubahan Rencana Kerja merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi, dan program OPD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) perubahan.
- b. Perubahan Rencana Kerja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan serta pagu anggaran kedalam aplikasi SIPD RKPD perubahan dan KUA PPAS serta sebagai bahan perencanaan program kegiatan yang dituangkan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perubahan tahun 2024.
- c. Perubahan Rencana Kerja merupakan salah satu instrumen untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana capaian dan realisasi kinerja Perangkat Daerah serta capaian dan realisasi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang telah tercapai.

Penyusunan Perubahan RENJA berpedoman pada Renstra Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Kendal dan mengacu pada perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan perubahan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Sosial.

Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Rencana Kerja (RENJA) Perubahan. Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2024 memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang dilengkapi dengan dana indikatif serta sumber dananya.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2024 dilengkapi dengan lampiran evaluasi hasil pelaksanaan renja Dinas Sosial s/d Triwulan II Tahun 2024 dan rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Perubahan tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 20205 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 202 nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 20);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3 Maksud dan Tujuan

Sebagaimana tercantum pada pasal 7 ayat (1) dan pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan Tupoksi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, yang setiap tahunnya sebagai pedoman dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Maksud : Maksud disusunnya perubahan rencana kerja adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Kendal. untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah

Tujuan :Tujuan disusunnya perubahan rencana kerja adalah :

- 1. sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah;
- 2. sebagai pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- 3. sebagi penyusunan rencana perubahan anggaran Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan perubahan rencana kerja perangkat daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kendal Sampai Dengan Triwulan II

- 2.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
 - Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
 - Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja
 - Faktor – faktor penyebab tidak tercapai, terpenuhinya atau melebihi target kinerja
 - Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra Perangkat Daerah
 - Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu di lakukan

2.2 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III. Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kendal

Lampiran rancangan akhir perubahan RKPD 2024.

BAB IV. Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Tingkat capaian Kinerja Dinas Sosial sebesar 30 % dengan rata-rata capain realisasi keuangan sebesar 30 %. Adapun hasil evaluasi kegiatan tahun 2024 sampai dengan triwulan II diuraikan sebagai berikut :

2.1 Realisasi Program/ Kegiatan yang belum memenuhi target kinerja

Dalam pelaksanaan program ,kegiatan dan sub kegiatan ada beberpa yang belum bisa mencapai target kinerja sesuai dengan yang di rencanakan, anatar lain:

1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota

- Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota

Target kinerja adalah pemberian honor kepada tenaga pengelola data, data yang dikelola 197.084 data dengan capaian realisasi 32 %.Jumlah anggaran Rp 638.340.000 terserap sebesar Rp 202.780.000 atau 31,76 %, Kegiatan belum sesuai target yang direncanakan karena terkendala pada saat verifikasi dan falidasi data. Kegiatan akan di selesaikan pada semester ke 2 tahun anggaran 2024.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Target kinerja adalah pendampingan terhadap penerima bantuan BPNT, PKH APBN, santunan kematian ,penyaluran PKH plus/ APBD dan penyaluran BLT DBHCHT untuk buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok 197.084 data dengan capaian realisasi 32 %. Jumlah anggaran Rp 7.015.477.250 terserap sebesar Rp 560.336.0000 atau 8 %, Kegiatan belum sesuai target yang direncanakan karena terkendala pada saat verifikasi dan falidasi data. Kegiatan akan di selesaikan pada semester ke 2 tahun anggaran 2024.

2. Program Rehabilitasi Sosial

Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti

- Sub Kegiatan Penyediaan permakanan

Target kinerja adalah Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal dengan target 834 orang. Jumlah anggaran Rp 250.000.000 terserap sebesar Rp 40.395.500 atau 16,15 % sedangkan realisasi fisik sebesar 6,7 %. Kegiatan sudah terlaksana dengan baik dan lancar, rendahnya capaian fisik di karenakan adanya kesalahan pada target kinerja dan akan diperbaiki di perubahan anggaran tahun 2024.

- Sub Kegiatan Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat

Target kinerja adalah Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat dengan target 300 orang. Jumlah anggaran Rp 125.165.000 terserap sebesar Rp 600.000 atau 0,47% sedangkan capaian fisik 5 %. Rendahnya capaian keuangan dan kinerja karena kegiatan memang belum di laksanakan, dan akan di laksanakan di bulan september dan Oktober.

- Sub kegiatan Pemberian layanan kedaruratan

Target kinerja adalah jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan dengan target kinerja 80 orang. Jumlah anggaran sebesar Rp 29.300.000 terserap sebesar Rp 200.000 atau 0,68 sedangkan capaian fisik 0 %. Rendahnya capaian kinerja dikarenakan anggaran bersifat penyediaan.

Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial

- Sub Kegiatan Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial

Target kinerja adalah Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial dengan target 150 orang dengan realisasi 0. Jumlah anggaran Rp 48.615.000 terserap sebesar Rp 0 atau 0,0% .Rendahnya capaian keuangan dan kinerja karena kegiatan memang belum di laksanakan, dan akan di laksanakan di bulan september dan Oktober.

2.1.2 Realisasi Program/ Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaranyang direncanakan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Tingkat capaian Kinerja Dinas Sosial sebesar 30 % dengan rata-rata capaian realisasi keuangan sebesar 22,83 %. Adapun hasil evaluasi kegiatan tahun 2023 sampai dengan triwulan II diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

Pencapaian kinerja adalah jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan target kinerja 8 dokumen dengan capaian realisasi 60 %. Jumlah anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 dan terserap sebesar Rp. 530.700 dengan capaian realisasi keuangan 5,05% .

- Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Pencapaian kinerja penyusunan laporan bulanan dan insidentik selama 1 tahun dan terealisasi 10 %. Jumlah anggaran sebesar Rp. 10.150.000 dan terserap sebesar Rp. 530.000 dengan capaian realisasi keuangan 0%.

- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Pencapaian kinerja adalah monitoring evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan Pekan Raya Kendal terpantau dan terlaporkannya kegiatan - kegiatan Dinas Sosial selama satu tahun dengan capaian kinerja 50 %. Jumlah anggaran sebesar Rp. 250.000.000 terserap sebesar Rp 0 dengan capaian realisasi keuangan 0 %.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.

Pencapaian kinerja penyediaan gaji dan tunjangan bagi ASN serta tambahan penghasilan bagi ASN dengan realisasi capaian kinerja 60 % . Jumlah anggaran sebesar Rp. 4.590.715.347 terserap sebesar Rp 1.961.488.834 dengan capaian realisasi keuangan 42 %.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.

Pencapaian kinerja Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 1 (satu) paket dengan realisasi 100 %. Jumlah anggaran Rp. 10.000.000 dan terserap sebesar Rp. 9.811.700 dengan capaian realisasi keuangan 98 %.

- Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Pencapaian kinerja penyediaan alat – alat tulis kantor, alat rumah tangga, alat listrik dan lain sebagainya sebanyak 1 paket dengan realisasi 100%. Jumlah anggaran Rp. 50.000.000 dan terserap sebesar Rp. 41.827.000 dengan capaian realisasi keuangan 83,65 %.

- Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga.

Pencapaian kinerja penyediaan peralatan rumah tangga adalah jumlah paket penyediaan peralatan rumah tangga 1 paket dengan realisasi 89 %. Jumlah anggaran Rp 20.000.000 dan terserap sebesar Rp 17.719.100 dengan capaian realisasi 88,59 %.

- Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor.

Pencapaian kinerja Penyediaan bahan logistik kantor berupa isi ulang tabung gas, tersedianya isi ulang air minum, air mineral, gula, kopi, teh 12 paket dengan realisasi 50 %. Jumlah anggaran sebesar Rp. 18.218.000 dan terserap sebesar Rp. 6.194.500 dengan capaian realisasi keuangan 34,00 %.

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan adalah tersedianya blangko-blanko dan barang cetakan 2 paket dengan realisasi kinerja 100 %. Jumlah anggaran sebesar Rp. 20.000.000 dan terserap sebesar Rp. 3.778.750 dengan capaian realisasi keuangan 18,89 %.

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Pencapaian kinerja kegiatan Rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan ke luar daerah adalah terselenggaranya kegiatan perjalanan dinas dan tersedianya BBM serta makan minum rapat dalam rangka kelancaran tugas kedinasan 12 laporan dengan realisasi kinerja 50 %. Jumlah dana sebesar Rp. 783.012.424 dan terserap sebesar Rp. 100.168.100 dengan capaian realisasi keuangan 12,79 %.

- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Pencapaian kinerja kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD adalah penyediaan alat tulis kantor 1 dokumen dengan realisasi kinerja 100 %. Jumlah anggaran sebesar Rp. 15.000.000 dan terserap sebesar Rp. 13.907.500 dengan capaian realisasi keuangan 92,71 %.

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.

Pencapaian kinerja pengadaan belanja modal alat pendingin, peralatan komputer, dan belanja modal audio visual 8 unit dengan realisasi 10 %. Jumlah anggaran Rp 31.444.000 dan terserap sebesar Rp 10.000.000 dengan capaian realisasi 31 %.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

Pencapaian kinerja Penyediaan jasa surat menyurat adalah penyediaan benda pos, buku cek dan lainnya 4 laporan dengan capaian kinerja 50 %. Jumlah anggaran Rp 4.130.000 dan terserap sebesar Rp 1.330.000 dengan capaian realisasi keuangan 32,20 %.

- Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik

Pencapaian kinerja Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik adalah terbayarnya beban jasa/ langganan telepon, listrik dan PDAM 12 laporan dengan capain kinerja 50 %. Jumlah anggaran Rp 107.155.000 dan terserap sebesarRp 54.620.131 dengan realisasi keuangan sebesar 50,00 %.

- Sub Kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Pencapaian kinerja penyediaan jasa pelayanan umum kantor adalah belanja jasa tenaga administrasi, tenaga operator komputer, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, tenaga sopir, dan iuran asuransi bagi tenaga penunjang 12 laporan dengan capaian realisasi fisik 50 %. Jumlah anggaran Rp 407.912.800 dan terserap sebesar Rp 157.975.000 dengan realisasi keuangan 38,72%.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan.

Pencapaian kinerja kegiatannya adalah pajak, pemeliharaan dan pembelian suku cadang 1 unit kendaraan roda 4 dengan realisasi fisik 100 %. Jumlah anggaran Rp. 20.000.000 dan terserap sebesar Rp. 6.316.900 dengan capaian realisasi keuangan 31,58%.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan.

Pencapaian kinerja jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan roda 2 dan 4 selama 1 tahun 59 unit dengan capaian fisik 50 %. Jumlah anggaran Rp. 75.000.000 dan terserap Rp. 9.262.300,00 dengan capaian realisasi keuangan 12,34 %.

- Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin.

Pencapaian kinerja pemeliharaan peralatan dan mesin kantor adalah untuk pemeliharaan CPU, laptop, printer, AC dan jaringan internet dan alat mesin lainnya 59 unit dengan capaian fisik 50 %. Jumlah dana Rp. 150.000.000 dan terserap sebesar Rp. 24.492.150 dengan capaian realisasi keuangan 16,32 %.

- Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pencapaian kinerja pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya adalah perbaikan gedung kantor Dinas Sosial 1 unit dengan capaian fisik 0 %. Jumlah anggaran Rp. 81.805.000 dan terserap sebesar Rp. 0 dengan capaian realisasi keuangan 0 %.

- Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pencapaian kinerja pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya adalah pemeliharaan AC, printer, komputer, dan jaringan internet 12 unit dengan capaian fisik 50 %. Jumlah anggaran Rp. 57.950.000 dan terserap sebesar Rp. 12.220.000 dengan capaian realisasi keuangan 21,08 %.

2. Program Pemberdayaan Sosial.

Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Dasar Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota.

Pencapaian kinerja peningkatan kemampuan anggota organisasi sosial pelaku PSM 120 orang dengan realisasi fisik 80 %. Jumlah anggaran Rp. 35.970.000 terserap Rp. 23.484.000 dengan capaian realisasi keuangan 65,28 %.

- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kewenangan Kabupaten/Kota.

Pencapaian kinerja peningkatan kemampuan anggota organisasi sosial pelaku kesejahteraan sosial TKSK 20 orang 3 kali pertemuan dengan realisasi fisik 50 %. Jumlah anggaran Rp. 20.290.000 terserap Rp. 5.600.000 dengan capaian realisasi keuangan 27,59 %.

- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan kewenangan Kabupaten/Kota.

Pencapaian kinerja peningkatan kemampuan anggota organisasi sosial pelaku kesejahteraan sosial Kelembagaan 82 lembaga dengan realisasi fisik 50 %. Jumlah anggaran Rp. 13.840.000 terserap Rp. 4.170.000 dengan capaian realisasi keuangan 30,13 %.

3. Program Rehabilitasi Sosial.

1) Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar Panti.

- Sub Kegiatan Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial.

Pencapaian kinerja pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial adalah pemberian layanan rehabilitasi fisik, mental, spiritual dan sosial kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti 200 orang dengan realisasi fisik 50 %. Jumlah dana Rp. 139.139.975 terserap Rp.35.233.250 dengan capaian realisasi keuangan 25,32%.

2). Kegiatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti.

- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan.

Pencapaian kinerja kegiatan pemberian layanan rujukan jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan 60 orang dengan realisasi 30 %. Jumlah anggaran Rp. 77.934.417 terserap sebesar Rp. 20.583.000 dengan capaian realisasi keuangan 26,41 %.

4. Program Penanganan Bencana.

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan Penyediaan Makanan.

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Makanan adalah pemenuhan kebutuhan dasar bagi 100 orang yang terdampak bencana serta pengelolaan gudang logistik bencana, sehingga akan lebih memudahkan dalam pemanfaatannya bila sewaktu-waktu terjadi bencana dengan capaian kinerja 35 %. Jumlah dana sebesar Rp. 205.066.000 terserap Rp. 68.486.000 dengan realisasi capaian kinerja keuangan 33,39 %.

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota

Pencapaian kinerja sub kegiatan pemeliharaan taman makam pahlawan Nasional Kabupaten/Kota adalah melakukan perawatan dan pemeliharaan, TMP dengan target 148 makam dengan capaian kinerja 50 %. Jumlah dana sebesar Rp. 26.420.000 dan terserap sebesar Rp. 2.910.000 dengan capaian realisasi keuangan 11,01 %.

2.1.3 Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Dalam pelaksanaan Program/ kegiatan di tahun 2024 belum ada hasil kegiatan yang melebihi dari target yang telah ditentukan/ direncanakan.

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Faktor – faktor yang menjadi penyebab belum tercapainya kinerja program/ kegiatan, antara lain:

- a. Verifikasi data penerima BLT DBHCHT selesai pada bulan Agustus.
- b. Belum sempurnanya aturan dalam penanganan permasalahan sosial.
- c. Adanya beberapa rekening belanja yang harus di sesuaikan di perubahan anggaran.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang Undang No. 11 Tahun 2009 tentang tentang kesejahteraan sosial, kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pemerintah pusat , pemerintah provinsi dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Implikasi dari program – program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kendal mencakup kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kabupaten Kendal pemberdayaan sosial mencakup peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang akan berkolaborasi dengan Dinas Sosial dalam penanganan permasalahan sosial. Perlindungan dan jaminan sosial mencakup jaminan dan perlindungan dalam bidang kesehatan, PKH, BLT. Rehabilitasi sosial menangani 26 jenis Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) baik yang dengan ketelantaran maupun PPKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA.

2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam mengatasi faktor yang menyebabkan program dan kegiatan tidak sesuai target:

- a. Akan lebih intensif dan berkesinambungan dalam koordinasi, serta meningkatkan kemampuan petugas ferivikator dan supervisor data.
- b. Akan mendorong Pemerintah Kabupaten Kendal dalam pembuatan peraturan berkaitan dengan penanganan kemiskinan.

2.1 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perubahan rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Kendal taghun 2024 berdasarkan hasil dari musrenbang di penetapan anggaran usulan dari masyarakat tidak dapat di akomodir oleh Dinas Sosial karena usulan tidak di lengkapi dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Susulan dari masyarakat permintaan alat bantu untuk disabilitas. Untuk mengatasi usulan yang tidak di lengkapi dengan persyaratan sesuai ketentuan di tindak lanjuti oleh Dinas Sosial dengan berkolaborasi dengan Panti Kartini Temanggung.

**Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat dan Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024**

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL				

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2024

Dinas Sosial Kabupaten Kendal

DINAS SOSIAL KAB KENDAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi i target Renstra (%)
1	Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
1.06.	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial								
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Penunjang Administrasi Perkantoran	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%

1.06.01.2.0 1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	100%	50%	100%	100%	100%
1.06.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	8 dokumen	60%	5 dokumen	8 dokumen	8 dokumen
1.06.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	12 Laporan	50%	6 laporan	6 laporan	6 laporan
1.06.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	12 laporan	50%	6 laporan	12 laporan	12 laporan
1.06.01.2.0 002	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	50%	50%	100%	100%
1.06.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan tunjangan	30 orang/bulan	36 orang/bulan	50%	36 orang/bulan	28 orang/bulan	28 orang/bulan
1.06.01.2.0 6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sara Administrasi Perkantoran	100%	100%	80%	80%	100%	100%

1.06.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	1 paket
1.06.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	1 paket
1.06.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 paket	1paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	1 paket
1.06.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	6 paket	50%	12 paket	12 paket	12 paket
1.06.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	2 paket	2 paket
1.06.01.2.0 6.0007	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	12 laporan	12 laporan	12 laporan
1.06.01.2.0 6.0008	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	0	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
1.06.01.2.0 7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pengadaan Sarana Aset Penunjang Administrasi Perkantoran	100%	100 %	12%	12%	0 %	100%	100%

1.06.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	25 unit	8 unit	1	12%	0 unit	0	0
1.06.01.2.0 8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan sarana jasa penunjang administrasi perkantoran	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
1.06.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	4 laporan	2 laporan	50%	12 laporan	12 laporan	12 laporan
1.06.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	12 laporan	12 laporan	12 laporan
1.06.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	36 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	12 laporan	12 laporan	12 laporan
1.06.01.2.0 9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan sarana aset penunjang administrasi perkantoran	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%

1.06.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	1 unit
1.06.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	75 unit	59 unit	29 unit	50%	59 unit	59 unit	59 unit
1.06.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	75 unit	59 unit	29 unit	50%	59 unit	59 unit	59 unit
1.06.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	2 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	1 unit
1.06.01.2.0 9.0011	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung gedung Kantoratau BangunanLainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 unit	12 unit	6 unit	50%	12 unit	12 unit	12 unit
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Peningkatan peran serta PSKS	100%	100%	60%	60%	100%	100%	100%

1.06.02.2.0 3	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Bertambahnya PSKS di Kabupaten Kendal	124 orang	110 orang	60%	60%	100%	100%	100%
1.06.02.2.0 3.0001	Peningkatan kemampuan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlahorang yang mendapatkan peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	170 orang	120 orang	100%	120 orang	120 orang	120 orang	120 orang
1.06.02.2.0 3.0002	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya	20 orang	60 Orang	30 Orang	50%	60 orang	60 orang	60 orang
1.06.02.2.0 3.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang ditingkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	24 lembaga	82 lembaga	41 lembaga	50%	82 lembaga	82 lembaga	82 lembaga
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS di Luar Panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	100%	100%	30%	30%	100%	100%	100%

1.06.04.2.0 1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diLuar Panti Sosial	Persentase PMKS penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	30%	30%	100%	100%	100%
1.06.04.2.0 1.0001	Penyediaan Permakanan Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	225 orang	834 orang	135 orang	16,18 %	834 orang	834 orang	834 orang
1.06.04.2.0 1.0005	Pemberian Bimbingan Fisik , Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	100 orang	200 orang	100 orang	50 %	200 orang	200 orang	200 orang

1.06.04.2.0 1.0006	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diLuar Panti SosialPenyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan/ Kota	30 orang	300 orang	200 orang	5 %	300 orang	300 orang	300 orang
1.06.04.2.0 1.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten / Kota	32 orang	80 orang	0	0 %	80 orang	80 orang	80 orang
1.06.04.2.0 2	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diLuar Panti Sosial	jumlah fasilitasi bimbingan sosial kepada keluarga PMKS	100%	100%	25 %	25 %	100%	100%	100%

1.06.04.2.0 2.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/ Kota	50 orang	150 orang	0	0 %	150 orang	150 orang	150 orang
1.06.04.2.0 2.0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kwenangan Kabupaten / Kota	20 orang	60 orang	0	25 %	60 orang	60 orang	60 orang
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS fakir miskin dan PMKS anak terlantar yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	27 %	27 %	100%	100%	100%
1.06.05.2.0 2	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	27 %	27 %	100%	100%	100%
1.06.05.2.0 2.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengelolaan Data Fakir Miskin	12000 keluarga	197.084 keluarga	55.021 keluarga	27 %	197.084 keluarga	197.084 keluarga	197.084 keluarga

1.06.05.2.0 2.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10000 keluarga	197.084 keluarga	55.021 keluarga	27 %	197.084 keluarga	197.084 keluarga	197.084 keluarga
1:06:06	Program Penanganan Bencana	Persentase PMKS korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	100%	69 %	69 %	100%	100%	100%
1.06.06.2.0 1	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Persentase PMKS korban bencana alam dan sosial yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	69 %	69 %	100%	100%	100%
1.06.06.2.0 1.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 sehari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	100 orang	69 orang	69 %	100 orang	100 orang	100 orang

1:06:07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01.06.07.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kbupaten/Kota	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01.06.07.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpelihara Pada Taman Mkam Phlawan Nasional Kabupaten /Kota	148 makam	148 makam	100%	148 makam	148 makam	148 makam	148 makam

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada anggaran perubahan tahun anggaran 2024 melalui proses dinamika penganggaran beberapa sub kegiatan Dinas Sosial mengalami penambahan dan refocusing. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kendal yang direncanakan dan akan dicapai dalam tahun 2024, dikelompokkan untuk program-program untuk mencapai sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan :

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Penganggaran untuk kegiatan penyusunan dokumen perencanaan Renja penetapan dan perubahan, RKA penetapan dan perubahan, DPA penetapan dan perubahan dan dokumen lain. Jumlah dana sebesar Rp 10.030.000.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Penganggaran untuk kegiatan penyusunan laporan-laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan atas kinerja SKPD. Jumlah dana sebesar Rp 10.150.000.
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah.
Pengalokasian anggaran adalah melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program-program dinas dalam kurun waktu 1 (satu) tahun untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya dan untuk kegiatan Pekan Raya Kendal (PRK), publikasi pada media cetak dan elektronik. Jumlah dana sebesar Rp. 250.000.000.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
Penganggaran adalah pembayaran gaji dan tunjangan ASN selama 1 (satu) tahun. Jumlah dana sebesar Rp 4.590.715.347 menjadi menjadi Rp. 3.602.715.347. Anggaran berkurang karena penyesuaian anggaran sesuai hasil desk dan rapat gaji dan tunjangan.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
Penganggaran di gunakan untuk peningkatan kapasitas SDM Dinas Sosial sebanyak 45 orang, Jumlah Anggaran Rp 89.000.000.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- Sub Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor.

Penganggaran untuk pemeliharaan instalasi listrik dan keperluan penerangan kantor. Jumlah dana sebesar Rp. 10.000.000.

- Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor.

Penganggaran di gunakan untuk kebutuhan alat tulis kantor, kertas dan cover, dan bahan komputer. Jumlah dana sebesar Rp. 50.000.000.

- Sub Kegiatan Penyediaan peralatan Rumah tangga.

Penganggaran untuk kelancaran pelayanan tugas-tugas kantor berupa penyediaan alat – alat perabot rumah tangga, retribusi pengelolaan sampah, dan jasa laundry. Jumlah dana Rp. 20.000.000. menjadi Rp 23.500.000.

- Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor.

Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat, penerimaan tamu, pembelian air galon, gas dan lainnya dalam 1 (satu) tahun. Jumlah dana sebesar Rp. 18.218.000. menjadi Rp 19.092.000.

- Sub Kegiatan Barang cetakan dan penggandaan.

Pengalokasian anggaran untuk mendukung tugas penyediaan barang cetak dan penggandaan serta administrasi perkantoran lainnya selama 12 bulan. Jumlah dana sebesar Rp. 20.000.000,00.

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

Penganggarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan operasional dalam menghadiri undangan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah, sehingga menunjang kelancaran kegiatan agar lebih cepat, efektif dan efisien, penyediaan makanan dan minuman rapat. Jumlah dana sebesar Rp 783.012.424 menjadi Rp. 832.922.424.

- Sub Kegiatan Penataan arsip dinasmis pada SKPD

Penganggaran digunakan untuk pengelolaan arsip Dinas Sosial dengan mengadakan belanja alat tulis kantor. Jumlah dana sebesar Rp 15.000.000.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.

Penganggaran digunakan untuk pengadaan belanja modal alat pendingin/ AC, peralatan personal komputer, dan belanja modal audio visual. Jumlah dana sebesar Rp 31.444.000.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat

Penganggaran diperuntukkan pembelian benda pos , buku cek dan keperluan surat meyrat selama 12 bulan. Jumlah dana sebesar Rp. 4.130.000.

- Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Penganggaran dimaksud untuk biaya langganan telepon, listrik dan air selama 12 bulan. Jumlah dana Rp 107.155.000 menjadi Rp. 129.655.000. Anggaran bertambah hasil dari pengusulan penambahan anggaran.

- Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

Penganggaran jasa dimaksud untuk biaya honor tenaga penunjang selama 12 bulan. Jumlah dana sebesar Rp 407.912.800 menjadi Rp. 389.512.800. Pagu anggaran berkurang di geser untuk belanja kebutuhan yang lain.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan.

Sub Kegiatan :

- Sub Kegiatan Jasa pemeliharaan,Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan.

Pengalokasian anggaran adalah terpenuhinya biaya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan, pembayaran pajak serta penggantian suku cadang 1 unit. Jumlah dana sebesar Rp. 20.000.000,00.

- Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan,Biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan.

Penganggaran dimaksud adalah biaya pemeliharaan dan biaya pajak untuk kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 sebanyak 59 unit. Jumlah dana sebesar Rp. 75.000.000 menjadi Rp 60.626.000.

- Pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya.

Penganggaran untuk pemeliharaan peralatan dan mesin , pembelian suku cadang mesin. Jumlah dana Rp. 150.000.000 menjadi Rp 172.900.000, anggaran bertambah dari pergeseran antar sub kegiatan di internal Dinas Sosial.

- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

Penganggaran pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana kantor berupa pembangunan shelter/ rumah singgah, sumber dana dari BANPROV dan PAD. Jumlah anggaran sebesar Rp.2.096.525.200 menjadi Rp 81.805.200. Anggaran berkurang dikarenakan usulan BANPROV pembangunan shelter tidak disetujui dan pengurangan anggaran dilakukan saat pergeseran anggaran yang pertama di bulan Maret 2024.

- Penyediaan Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor / Bangunan lainnya. Penganggaran untuk pemeliharaan pendukung antara lain AC,

komputer/laptop, printer dan pemeliharaan tower jaringan. Jumlah dana Rp 57.950.000.

2. Program Pemberdayaan Sosial.

Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan Kabupaten/ Kota.

Penganggaran digunakan untuk rapat koordinasi PSM 120 orang. Jumlah dana Rp 35.970.000

- Sub Kegiatan Peningkatan kemampuan potensi sumber tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan kewenangan Kabupaten/ Kota. Penganggaran digunakan untuk peningkatan kapasitas, rapat koordinasi TKSK. Jumlah dana Rp 20.290.000.

- Sub Kegiatan Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan. Melaksanakan sosialisasi kepada anggota organisasi sosial masyarakat dan masyarakat yang ditingkatkan kualitasnya dalam penanganan kesejahteraan sosial,. Jumlah dana Rp 13.840.000 menjadi Rp. 23.064.982. anggaran bertambah karena mendapatkan tambahan dari silpa DID/DIF dari tahun sebelumnya.

3. Program Rehabilitasi Sosial

Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar panti.

- Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan

Pencapaian kinerja kegiatan adalah pemberian makanan kepada penghuni shelter 3 kali dalam 1 hari dengan target 834 orang. Jumlah dana sebesar Rp 250.000.000.

- Sub Kegiatan Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial.

Pencapaian kinerja kegiatan Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial adalah memberikan bimbingan dan pelayanan rehabilitasi sosial kepada disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti 200 orang. Jumlah dana sebesar Rp. 139.139.975.

- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat. Pencapaian kinerja anggaran kegiatan adalah pemberian bimbingan sosial kepada 300 Orang. Jumlah dana sebesar Rp. 125.165.000 menjadi Rp 109.655.000. Anggaran berkurang karena belanja perjalanan dinas harus dipindah ke sekretariat.

- Sub Kegiatan Pemberian layanan kedaruratan.

Pencapaian kinerja anggaran kegiatan adalah tersedianya pemberian kedaruratan kepada 80 orang. Jumlah dana sebesar Rp. 29.300.000 menjadi Rp 20.800.000 anggaran berkurang karena pergeseran internal anggaran.

Kegiatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti.

- Sub Kegiatan Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial/ PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA.

Pencapaian kinerja pemberian bimbingan sosial kepada 150 orang.. Jumlah dana Rp 48.615.000 menjadi Rp. 30.215.000. anggaran berkurang karena pergeseran internal anggaran.

- Sub Kegiatan pemberian layanan rujukan.

Pencapaian kinerja pemberian layanan rujukan kepada 60 orang. Jumlah dana Rp 77.938.417.

1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan : Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota.

Pencapaian kinerja dimaksud adalah fasilitasi kegiatan verifikasi dan validasi data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota (DTKS,PBI,PPKS,PSKS) 197.084 keluarga. Jumlah dana sebesar Rp 638.340.000 menjadi Rp. 720.080.000. anggaran bertambah karena ada penambahan honor untuk fasilitator dan supervisor data di desa dan kecamatan 2 bulan.

- Sub Kegiatan : Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga.

Pencapaian kinerja anggaran dimaksud adalah melaksanakan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga bagi penerima BPNT,PKH APBN, PKH APBD dan santunan kematian serta BLT dari DBHCHT untuk buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok 197.084 keluarga . Jumlah dana sebesar Rp 7.015.477.250 menjadi Rp. 7.765.477.250. anggaran bertambah karena ada penambahan sumber dana dari DBHCHT untuk BLT.

2. Program Penanganan Bencana.

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan : Penyediaan makan

Pencapaian kinerja dimaksud adalah memberikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak bencana skala Kabupaten Kendal sebanyak 100 orang dengan pengadaan bantuan logistik bagi korban bencana pada saat tanggap darurat bencana dan rapat koordinasi bersama TAGANA . Jumlah dana sebesar

Rp. 205.066.000 menjadi Rp 190.226.000. Anggaran berkurang karena ada pergeseran internal.

3. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota.

- Sub Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

Pencapaian anggaran kinerja dimaksud adalah melakukan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Kusuma Jati Kabupaten Kendal sebanyak 148 makam di satu lokasi. Jumlah dana sebesar Rp 26.240.000.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS SOSIAL KAB. KENDAL
TAHUN 2024

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target		Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
																	8
1	2	3	4	5	6	7							13	14	18	19	20
		DINAS SOSIAL							17.707.147.936	17.352.800.413	15.289.705.341					8.220.521.210	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							17.707.147.936	17.352.800.413	15.289.705.341					8.220.521.210	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							17.707.147.936	17.352.800.413	15.289.705.341					8.220.521.210	
1	0 0 6 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ROT A	Prosentase Terperolehnya Layanan Umum, Kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah				100.00 %	100.00 %	6.302.855.636	8.727.242.771	5.880.432.771					6.362.899.730	
1	0 0 2.0 6 1 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	50.601.000	270.180.000.00	270.180.000.00					230.000.000	DINAS SOSIAL
1	0 0 2.0 6 1 1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	15.741.000.00	10.030.000.00	10.030.000.00		Kab. Kendal, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100.000.000.00	DINAS SOSIAL
1	0 0 2.0 6 1 1		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	14.860.000.00	10.150.000.00	10.150.000.00		Kab. Kendal, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35.000.000.00	DINAS SOSIAL
1	0 0 2.0 6 1 1		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

										Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	95.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Prosentase Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	4.425.488.562,00	4.590.715.347,00	4.590.715.347,00			4.791.899.730,00	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.0	000	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN														
	1	0	0	2.0	1					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		30 Orang/bulan	28 Orang/bulan	4.133.788.562,00	4.590.715.347,00	3.602.715.347,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.591.899.730,00	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
										Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		2 Dokumen	2 Dokumen	291.700.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.0	000	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah				Prosentase Keterlibatan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah		100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			165.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.0	000	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
										Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.0	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
										Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
										Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30.000.000,00	DINAS SOSIAL

										Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	15.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.000.000,00	DINAS SOSIAL
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
										Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.000.000,00	DINAS SOSIAL
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
										Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	227.868.424,00	783.012.424,00	832.922.424,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	250.000.000,00	DINAS SOSIAL
										Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD												
										Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.000.000,00	DINAS SOSIAL
										Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	75.000.000,00	31.444.000,00	31.444.000,00			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
										Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
										Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
										Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
										Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				25 Unit	8 Unit	50.000.000,00	31.444.000,00	31.444.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	316.275.150,00	519.197.800,00	519.197.800,00			328.000.000,00	DINAS SOSIAL
										Penyediaan Jasa Surat Menyurat												

										Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 Unit	968.720.000,00	2.096.525.200,00	81.805.200,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	90.000.000,00	DINAS SOSIAL
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						2 Unit							
										Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						12 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30.000.000,00	DINAS SOSIAL
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						12 Unit							
										Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						12 Unit	0,00	57.950.000,00	57.950.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	PROGRAM PEMERDAYAAN SOSIAL	Prosentase Peningkatan Peranserta PSKS					100,00 %	20.000.000,00	70.100.000,00	79.324.928,00			249.000.000,00	
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pemohon Ijin Penyelenggaraan Undian Berhadiah yang ditangani					100 %	0,00	0,00	0,00			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi	Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang												
										Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang						20 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan Kapasitas PSKS Lembaga dan Non Lembaga					100 %	20.000.000,00	70.100.000,00	70.100.000,00			229.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota													
										Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						100 Orang	0,00	35.970.000,00	35.970.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	29.000.000,00	DINAS SOSIAL

Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota									
1	0	0	2,0	000					
6	2	3							
					Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	60 Orang	20.000.000,00	20.290.000,00
									20.290.000,00
1	0	0	2,0	000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				
6	2	3				20 Keluarga	20 Keluarga	0,00	0,00
					Jumlah Keluarga yang Meningat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				40.000.000,00
1	0	0	2,0	000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				
6	2	3				250 Lembaga	82 Lembaga	0,00	23.064.928,00
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				80.000.000,00
1	0	0	2,0	000	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)				
6	2	3				50 Sertifikat	50 Sertifikat	0,00	0,00
					Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				60.000.000,00
3	1	0			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				
6	3				Prosentase PPKS pekerja migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	100,00 %	100,00 %	0,00	50.000.000,00
1	0	0	2,0		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan dari Titik DebarKasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				
6	3	1			Prosentase PPKS Pekerja Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan	100 %	100 %	0,00	50.000.000,00
1	0	0	2,0	000	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik DebarKasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				
6	3	1							

	1	0	0	0	2.0	000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat				100 persentase	115.460.000,00	205.066.000,00	205.066.000,00		166.033.500,00	DINAS SOSIAL
	1	0	0	0	2.0	1	Penyediaan Makanan											
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	115.460.000,00	205.066.000,00	190.226.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.033.500,00	DINAS SOSIAL
	1	0	0	0	2.0	000	Pelayanan Dukungan Psikososial											
						5		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	0	0	0	2.0	000	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase SDM TARUNA SIAGA BENCANA dan kampung siaga bencana terlibat aktif dalam penanganan bencana				100 persentase	0,00	0,00	0,00		60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	0	0	0	2.0	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan	Kampung Siaga Bencana				2 Kampung	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	0	0	0	2.0	000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan	Taruna Siaga Bencana										
						2												

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan jangka pendek yang disusun dengan berpedoman pada RJPMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kendal. Perubahan Renja ini juga merupakan pedoman dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah untuk tahun 2024 guna mewujudkan visi pemerintah Kabupaten Kendal.

Dengan ditetapkannya program dan kegiatan dalam Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Kendal diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS Kabupaten Kendal yang selanjutnya dapat dijabarkan dalam RKA perubahan Dinas Sosial tahun 2024.

Kondisi objektif organisasi mengisyaratkan betapa pentingnya implementasi sebuah komitmen, oleh karenanya perubahan Rencana Kerja yang tersusun ini harus dapat dijadikan fungsi sebagai berikut :

1. Secara konsisten dijadikan pedoman dan acuan dasar serta diimplementasikan ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal;
2. Sebagai pengikat yang sinergis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kendal;
3. Merupakan landasan bagi Rencana Kerja tahap berikutnya.

Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dalam mengaktualisasikan Renja ini sangat diharapkan, yang pada gilirannya akan mampu mendorong perwujudan Visi, Misi, dan Tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Kendal. Perubahan Renja Dinas Sosial yang tersusun ini jika nantinya telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran maka sebagai dasar evaluasi dan laporan atas kinerja satu tahun bagi Dinas Sosial Kabupaten Kendal.

Demikian Perubahan Renja Tahun 2024 Dinas Sosial ini kami susun, semoga bermanfaat.

Kendal , Agustus 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KENDAL



MUNTOHA, S.KM, M.Kes
NIP. 197104161994031007



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2024**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal Tahun 2024 dapat tersusun.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal Tahun 2024 ini merupakan upaya penyusunan dokumen perencanaan kinerja sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 dan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) juga menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan yang akan dicapai pada tahun 2024 sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi. Selain itu Rencana Kinerja Tahunan ini memuat berbagai program yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai macam kegiatan. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal juga memuat tentang indikator-indikator kinerja kegiatan berupa masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang langsung atau tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran.

Dokumen rencana kinerja juga merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara rencana strategis yang telah ditetapkan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan sistem penganggarnya. Pada Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal merencanakan 6 program yang dijabarkan lebih lanjut dalam 10 kegiatan dan 23 sub kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Kendal,2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KENDAL



ANANG WIDIASMORO, S.STP, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 197911091998101002

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN	
BERKENAAN	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Renstra Perangkat Daerah	10
2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	13
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	14
BAB IV PENUTUP.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 tahun setelah disesuaikan dengan program, kegiatan dan anggaran pada perubahan APBD tahun 2024. Perubahan Renja PD merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) PD sehingga penyusunan Perubahan Renja PD berpedoman pada Renstra PD dan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Kendal mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Kabupaten Kendal, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Perubahan Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan visi misi dan program PD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis PD dan sesuai arahan operasional dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPPD);
2. Perubahan Renja PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUPA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKAP) pada tahun 2024.
3. Perubahan Renja PD merupakan salah satu instrument evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah (PD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 2). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4). Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
- 5). Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);

- 6). Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
- 7). Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
- 8). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 9). Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 10). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 11). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 12). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 13). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 14). Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 20).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal Tahun 2024 dimaksudkan :

- 1) Sebagai dasar evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2024.
- 2) Sebagai dasar perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKAP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal Tahun 2024.

1.3.2. Tujuan :

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal Tahun 2024 adalah :

- 1) Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran 2024.
- 2) Sebagai dasar bagi masyarakat dan *stakeholder* untuk berpartisipasi aktif dalam kemajuan pembangunan khususnya di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.
- 3) Sebagai dasar bagi masyarakat dan *stakeholder* untuk berpartisipasi melakukan pengawasan atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang penyusunan Perubahan Renja keterkaitan antara Perubahan Renja dengan RKPD, Renstra, Renja K/L dan Renja Provinsi/Kab/Kota serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Renja

1.2 Landasan Hukum

Memuat tentang Undang-undang, Permen, Perda dan peraturan lainnya yang mengatur SOTK Kewenangan PD serta pedoman yang di jadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja PD serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan memuat kajian terhadap hasil pengendalian pelaksanaan Renja sd triwulan II.

2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan telaah terhadap usulan program dan kegiatan Masyarakat

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi ulasan yang mencakup isi penting penyelenggaraan tugas dan fungsi program kegiatan indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan, target capaian kinerja baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan serta sumber danan dan Memuat Prioritas pembangunan dan perubahan rencana kerja dan disajikan dalam tabel matrik.

BAB IV. PENUTUP

Memuat uraian penutup, berupa hal-hal yang perlu mendapat perhatian serta berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya sesuai kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II dan Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan secara umum selaras dengan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal Tahun 2024 namun terdapat beberapa kegiatan yang belum terlaksana dikarenakan keterbatasan anggaran pada tahun dimaksud. Kegiatan-kegiatan yang belum dapat dilaksanakan sampai pada Triwulan II Tahun 202, diusulkan kembali pada perubahan anggaran tahun 2024.

Hasil pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal Tahun 2024 triwulan II secara umum telah dilaksanakan dengan optimal untuk dapat mencapai target yang ditetapkan. Namun ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana atau tidak dapat memenuhi output yang diharapkan Realisasi target kinerja output kegiatan Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal Triwulan II terdapat beberapa capaian, yaitu ada yang tercapai sesuai target terutama untuk kegiatan rutin, dan ada yang masih proses pencapaian target yang direncanakan namun terkendala adanya Perubahan Anggaran terkait Penyesuaian Petunjuk Teknis Kegiatan yang dibiayai Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal (DAK Non Fisik FPM) sehingga capaian kinerja belum sesuai yang direncanakan.

Sedangkan untuk realisasi anggaran kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2024 yang melaksanakan Satu Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, 6 program dengan 10 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan. Anggaran Belanja **Rp. 7.440.056.253,-** dengan

capaian realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebesar **Rp. 3.215.789.144,-** atau **43,22 %**.

Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja, yang mencapai target kinerja dan melebihi target kinerja antara lain :

1. Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan : NIHIL
2. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota capaian kinerja keuangan 54 % dan realisasi fisik 54%.
 - b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal capaian kinerja keuangan 32 % dan realisasi fisik 32%.
 - c. Program Promosi Penanaman Modal. capaian kinerja keuangan 43 % dan realisasi fisik 37%.
 - d. Program Pelayanan Penanaman Modal. capaian kinerja keuangan 37 % dan realisasi fisik 37%.
 - e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. capaian kinerja keuangan 61 % dan realisasi fisik 61%.
 - f. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal. capaian kinerja keuangan 3 % dan realisasi fisik 3 %.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan : NIHIL

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/kegiatan :
 - a. peningkatan aktivitas investasi luar dan dalam negeri ditandai dengan meningkatnya nilai investasi dan potensi investasi.
 - b. paket kebijakan pemerintah terkait deregulasi dan debirokratisasi, kebijakan Kemudahan perijinan serta kebijakan terkait pusat logistik turut mendorong peningkatan nilai investasi.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah : Target Kinerja Program/Kegiatan dan sub kegiatan yang tercapai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :
 - a. Penganggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan.
 - b. Anggaran yang disesuaikan dengan kapasitas atau kemampuan sumber daya manusia.
 - c. Pengkoordinasian dalam setiap pelaksanaan kegiatan

Adapun realisasi target kinerja dan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal sampai dengan triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal

				Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2024				Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		100%	100%	54	54	97.38	54	54	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		100%	100%	54	54	97.38	54	54	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100%	100%	54	54	98.25	54	54	
2	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	11 Dokumen	11 Dokumen	6	6	11 dokumen	6	6	

2	18	01	2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	26 Org/bulan	26 Org/bulan	26 Org/ bulan	26 Org/ bulan	26 Org/ bulan	26 Org/ bulan	26 Org/ bulan
2	18	01	2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan barang keperluan kantor	70 barang	70 barang	35	35	70 barang	35	35
2	18	01	03	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	4 penyediaan	4 penyediaan	1	1	4 penyediaan	1	1
2	18	01	03	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik pemerintah daerah dalam kondisi baik dan terpelihara	36 barang	36 barang	6	6	36 barang	6	6
2	18	01		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Prosentase dokumen yang mendukung penanaman modal (investasi)	100%	100%	32	32	97.81 %	32	32
2	18	01		Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemeliharaan dan pengembangan peta terpadu	1 Dokumen	1 Dokumen	32	32	1 Dokumen	32	32
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase kepemilikan investasi	100%	100%	43	43	93.54 %	43	43
				Kegiatan : Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal yang	Jumlah kepemilikan investasi	125 Investor	125 Investor	31	31	125 Investor	31	31

			Kewenangan Kabupaten/ Kota	Penanaman Modal							
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data perizinan dan non perizinan yang dikelola sistem informasi penanaman modal	100%	100%	3	3	94.21 %	3	3
			Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan non perizinan Jumlah sistem informasi perizinan dan non perizinan	1 Dokumen sistem	1 Dokumen sistem	0	0	1 Dokumen sistem	0	0

2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan evaluasi terhadap program yang ada pada Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024, terdapat kesesuaian 100 %. Artinya bahwa jumlah program dalam Renja Tahun 2024 semua terakomodir dalam APBD Tahun 2024 dengan nama program yang sama hal tersebut disesuaikan mulai diberlakukannya Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Untuk anggaran yang ada di Renja dan APBD, setelah dievaluasi terdapat kenaikan anggaran. Anggaran yang diusulkan dalam renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebesar Rp. 6.801.576.329,-, sedangkan dalam APBD penetapan 2024 sebesar Rp. 7.440.056.253,-. Kenaikan anggaran disebabkan adanya penyesuaian kembali terhadap kebutuhan belanja guna kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Kesesuaian Program antara Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024 dengan usulan kegiatan Masyarakat / Pokir yang di akomodir sangat maksimal sebagai upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal menyelaraskannyaguna hasil investasi yang lebih baik.

Tabel 2.2
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Kendal
Perangkat Daerah : DPMPTSP Kabupaten Kendal

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		N I H I L			

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Kendal Tahun 2024 ini akan dimuat tentang sub kegiatan lanjutan, sub kegiatan yang dihapus, penambahan sub kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Perubahan Kegiatan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal Tahun 2024 Secara ringkas dari total sub kegiatan sebanyak 23, terdapat 12 Sub kegiatan (52.17 %) tidak mengalami perubahan, sebanyak 11 Sub kegiatan (47.83 %) mengalami perubahan, 4 Sub kegiatan (17.39 %) mengalami pengurangan dan 7 Sub kegiatan (30.43 %) mengalami penambahan) dan 0 Sub kegiatan (0 %) yang dihapus, serta usulan Sub kegiatan baru sebanyak 0 Sub kegiatan (0 %) di Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Kendal Tahun 2024. Adapun rincian perubahan Sub kegiatan dalam Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Kendal Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1

Rekapitulasi Perubahan Kegiatan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Kendal Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Dalam Perubahan Renja					
		Tetap	Bertambah	Berkurang	Baru	dihapus	Jumlah
1.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kendal	12	7	4	0	0	23

Sub Kegiatan yang masuk kategori Kegiatan yang ada dalam APBD Penetapan Tahun 2024 dan tidak mengalami penambahan maupun pengurangan baik target kinerja maupun pagu indikatif pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebanyak 12 kegiatan. Adapun Sub kegiatan yang tidak mengalami perubahan pagu anggaran pada Perubahan Renja seperti tersebut dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.2

Sub Kegiatan yang Tidak Mengalami Perubahan Pagu Anggaran Pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

No	Kegiatan	PAGU (Rp)		Bertambah / Berkurang
		APBD Penetapan	Perubahan Renja	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	0
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	0
3.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37.500.000	37.500.000	0
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72.616.000	72.616.000	0
5.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.750.000	4.750.000	0
6.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	121.265.000	121.265.000	0
7.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	177.000.000	177.000.000	0
8.	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	132.000.000	132.000.000	0
9.	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berdasarkan Risiko Terintegrasi secara Elektronik	208.000.000	208.000.000	0

10.	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	50.860.000	50.860.000	0
11.	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	420.440.000	420.440.000	0
12.	Pengawasan Penanaman Modal	177.345.000	177.345.000	0

Sub Kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yang ada dalam APBD Penetapan Tahun 2024 dan mengalami pengurangan baik target kinerja dan /atau pagu indikatif sebanyak 4 Sub kegiatan. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian kembali terhadap belanja guna efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan. Adapun kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran dapat dilihat dalam tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.3

Kegiatan Yang Mengalami Pengurangan Pagu Anggaran Pada RenjaPerubahan 2024

No	Kegiatan	PAGU (Rp)		Berkurang
		APBD Penetapan	Perubahan Renja	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.099.995.033	3.855.315.533	(244.679.500)
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	6.795.000	(3.205.000)
3.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	269.870.500	260.000.000	(9.780.500)
4.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten /Kota	452.500.000	442.960.000	(9.540.000)

Sub Kegiatan yang masuk kategori ini adalah Sub kegiatan yang ada dalam APBD Penetapan Tahun 2024 dan mengalami penambahan baik target kinerja dan/atau pagu indikatif sebanyak 7 Sub kegiatan. Sub Kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran dapat dilihat dalam tabel 3.4 dibawah ini.

Tabel 3.4
 Sub Kegiatan yang Mengalami Penambahan Pagu Anggaran Pada
 Perubahan Rencana Kerja (Renja) 2024

No	Kegiatan	PAGU (Rp)		Bertambah
		APBD Penetapan	Perubahan Renja	
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	198.500.000	204.598.000	6.098.000
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.010.000	58.000.000	4.990.000
3.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	363.854.720	516.500.000	152.645.280
4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	258.495.000	269.000.000	10.505.000
5.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.100.000	101.057.000	28.957.000
6.	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	93.000.000	173.000.000	80.000.000
7.	Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis System Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	156.955.000	306.955.000	150.000.000

Sub Kegiatan yang masuk kategori ini adalah Sub kegiatan yang sebelumnya ada dalam APBD Penetapan Tahun 2024, namun diusulkan untuk dihapuskan dalam Perubahan Renja Tahun 2024 ini sebanyak 0 Sub kegiatan, dapat dilihat dalam tabel 3.5 dibawah ini.

Kebijakan belanja pada perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal Tahun 2024 diarahkan pada :

1. Pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja daerah pada tahun 2024;
2. Penghapusan Sub kegiatan yang menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan kegiatan.

Dengan kebijakan belanja tersebut, mengakibatkan perubahan target dan pagu indikatif. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif perubahan renja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal tahun 2024 terlihat dalam tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5 Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Perubahan Renja 2024

Rencana Tahun 2024										Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif (Rp.)	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Hasil Kegiatan	Hasil Kegiatan	Hasil Kegiatan					
													P r o g r a m
						Keluaran Sub Kegiatan							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2													
1													
8													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													
2													
1													
8													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
2													
1													
8													
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
2													
1													
8													
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
2													
1													
8													
Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
6													
dokumen													
6													
dokumen													
5.000.000													
5.000.000													
Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil													
45.000.000													

2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 dokumen	6 dokumen	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	30.000.000
2	1	0	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4.099.995.033	3.855.315.533	PENDAP ATAN ASU DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3.903.241.923
8	1	0	0										
2	1	0	2	0									
2	1	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang/ bulan	25 Orang/ bulan	4.099.995.033	3.855.315.533		3.903.241.923
2	1	0	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah					735.480.720	896.009.000		615.000.000
8	1	0	0										
2	1	0	2	0									
2	1	0	2	0	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerimaan Bangunan Kantor	Jumlah paket penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerimaan Bangunan Kantor	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket (4 penyediaan)	1 Paket (4 penyediaan)	37.500.000	37.500.000		25.000.000
8	1	0	0										
2	1	0	2	0									

2	1	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dari Kantor yang Disediakan	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Paket (3)	10 Paket			198.500.000	204.598.000	Dana Transfer Umum - Danabagi Hasil				245.000.000
2	1	0	2	0	Penyediaan Peralatan RumahTangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket	1 Paket			10.000.000	6.795.000	Dana Transfer Umum - Danabagi Hasil				20.000.000
2	1	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Paket	3 Paket			53.010.000	58.000.000	Dana Transfer Umum - Danabagi Hasil				65.000.000
2	1	0	2	0	Penyediaan BarangCetakan dan Pengandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket	1 Paket			72.616.000	72.616.000	Dana Transfer Umum - Danabagi Hasil				80.000.000
2	1	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 laporan	12 laporan			363.854.720	516.500.000	PENDAP ATAN ASU DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Danabagi Hasil				165.000.000
2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														1.019.250.000
2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan JasaSurat Menyurat	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 laporan	4 laporan			4.750.000	4.750.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4.250.000

2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan	12 laporan	269.870.500	260.000.000	PENDAPA TAN ASLU DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - DanaBagi Hasil				265.000.000
2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 paket	3 paket	121.265.000	121.265.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				265.000.000
2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 paket	6 paket	258.495.000	269.000.000	PENDAPA TAN ASLU DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil				485.000.000
2	1	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
2	1	0	2	0						249.100.000	278.057.000					335.000.000
2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 Unit	35 Unit	72.100.000	101.057.000	PENDAP ATAN ASLU DAERAH (PAD)				85.000.000

2	1	0	2	0	Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik		Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2800 Pelaku Usaha	2800 Pelaku Usaha			208.000.000	208.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah				365.000.000
2	1	0	2	0	Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko		Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				5 Kegiatan Usaha	5 Kegiatan Usaha			50.860.000	50.860.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah				65.000.000
2	1	0	2	0	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko		Jumlah kegiatan Usaha yang mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha		Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2900 Kegiatan Usaha	2900 Kegiatan Usaha			93.000.000	173.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				180.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL																							
2	1	0															597.785.000	587.785.000					430.000.000
2	1	0															597.785.000	587.785.000					430.000.000
PENGendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																							

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal Tahun 2024 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 Perubahan RKPD Kabupaten Kendal maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal Tahun 2024 mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2024.
2. Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja, maka perlu dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 yang selanjutnya dijadikan bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah periode berikutnya.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal 2024 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target yang telah ditetapkan.

Kendal,2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KENDAL



ANANG WIDIASMORO, S.STP, M.M.
Pembina Tk. I

NIP. 19791109 199810 1 002



Pemerintah Kabupaten Kendal

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

Tahun Anggaran 2024

**Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Kendal**

Jl. Soekarno – Hatta No. 193 Kendal

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	3
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II dan Capaian Renstra.....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	15
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	16
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Keg. Masyarakat ...	17
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Perkembangan Yang Tidak Sesuai Dengan Asumsi Awal Renja 2022.....	19
3.2. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	19
BAB V PENUTUP	24
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

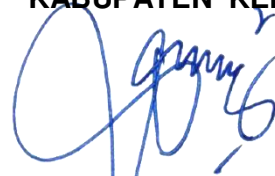
Puji dan syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Anggaran Tahun 2024 yang merupakan rencana kerja tahunan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal telah tersusun. Perubahan Rencana kerja (Renja) 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode pada tahun 2024, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Renja BKPP Kabupaten Kendal disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja OPD yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Renja BKPP Kabupaten Kendal disusun dengan tujuan sebagai pedoman penyusunan perencanaan BKPP Kabupaten Kendal di Triwulan IV tahun 2024 mulai dari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan BKPP Kabupaten Kendal 2024 sampai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran BKPP Kabupaten Kendal 2024.

Demikian Renja Perubahan Anggaran Tahun 2024 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal disusun dengan harapan dapat menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada masa yang akan datang maupun pada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan baik pikiran maupun informasi dalam penyusunan Perubahan Renja tahun 2024 ini. Semoga Renja perubahan anggaran ini dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi Pimpinan dan seluruh staf pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan di tahun yang berjalan.

Kendal, Agustus 2024

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN KENDAL**



ABDUL BASIR, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 197206261996031003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka diwajibkan bagi SKPD menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan mengacu pada RKPD Perubahan, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode berjalan, masalah yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan. Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yang disusun untuk menyesuaikan Kembali rencana program dan kegiatan terhadap perubahan kondisi strategis yang dihadapi dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan.

Sebagai tindak lanjut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal wajib menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan dengan mengacu pada RKPD Perubahan Kabupaten Kendal yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, Rencana Kerja Perubahan dan Penganggarnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penyesuaian dan penyempurnaan pada tahap penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah mengacu pada arah kebijakan pembangunan tahun 2024. Arah kebijakan pada tahun 2024 merupakan arah kebijakan Bupati periode 2021-2026, pada tahun 2026 diharapkan program prioritas Bupati dapat di selesaikan. Pada tahun 2024 pembangunan Kabupaten Kendal menitikberatkan pembangunan aspek “Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan, dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal Smart City”. Berdasarkan hal tersebut maka tema pembangunan pada tahun 2024 ini adalah “Kendal Smart City”.

Terdapat beberapa program dan kegiatan prioritas serta rutin yang dilaksanakan oleh BKPP pada tahun 2024 guna menunjang terwujudnya reformasi birokrasi melalui

peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai tugas dan fungsi BKPP berpedoman pada Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025

- (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kendal ini adalah mendorong semua unsur yang ada di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal untuk bekerja secara optimal, terpadu, terfokus dan terarah berdasarkan indikasi kebijakan dalam program yang telah ditetapkan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Kendal yang telah terakomodir dalam Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal ini adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan perubahan dokumen rencana kerja tahunan bagi BKPP Kabupaten Kendal yang disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan tahun berjalan dengan berdasarkan pada RKPd Perubahan Kabupaten Kendal;
2. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran BKPP Kabupaten Kendal secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan pada tahun 2024;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan BKPP Kabupaten Kendal Tahun 2024;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal disusun dengan sistematika berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun sistematika Renja sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Bagian ini memaparkan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berkenaan yang meliputi capaian kinerja dan anggaran program/kegiatan, serta faktor penyebab keberhasilan / kegagalannya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini memaparkan rencana kerja yang meliputi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah pada kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran beserta kebutuhan pendanaannya.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan dan kinerja kegiatan pada BKPP Kabupaten Kendal Tahun 2024 secara umum selaras dengan rencana kerja tahun 2024 pada BKPP Kabupaten Kendal. Evaluasi kinerja kegiatan menunjukkan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis.

Hasil evaluasi terhadap Renja BKPP Kabupaten Kendal 2024 menunjukkan tahapan-tahapan realisasi kinerja yang ditunjukkan oleh capaian *output* maupun *outcome* masing – masing program dan kegiatan pada BKPP Kabupaten Kendal. Ini dapat dilihat dari terlaksananya semua kegiatan, selaras dengan dinamika situasi dan kondisi yang berkembang khususnya di BKPP selaku unit kerja yang terkait tugas dan fungsinya sebagai penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan .

Monitoring dan evaluasi secara berkala terfokus pada beberapa program/kegiatan prioritas yang terindikasi capaian realisasinya masih rendah. Sebagai penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, tentunya mempunyai konsekuensi bermitra dan kerjasama dengan pihak lain untuk peningkatan kompetensi di Kabupaten Kendal. Hal ini berpengaruh pada tahap perencanaan anggaran terkait dinamika penganggaran dengan kebutuhan insidentil/tidak terduga yang sulit diprediksi sebelumnya dan terkait fasilitas pelayanan kepada ASN di bidang kepegawaian, dan pendidikan dan pelatihan. Evaluasi kinerja setiap kegiatan serta kebutuhan rutin pada tahun-tahun sebelumnya, akomodasi terhadap usulan rencana kebutuhan barang yang masuk serta proyeksi cadangan bagi kebutuhan insidentil/tidak terduga merupakan unsur terpenting dalam proses penganggaran dengan berpedoman pada setiap peraturan dan kebijakan yang berlaku. BKPP untuk beberapa program/kegiatan lebih mengedepankan outcome atas capaian target kinerja yang telah ditentukan. Proyeksi terhadap alokasi penyediaan juga tidak selalu berbanding lurus dengan kebutuhan yang ada seiring dinamika yang terus berkembang mengikuti mekanisme serta kebijakan yang ada. Sinkronisasi dalam setiap langkah perencanaan menjadi pola rutin karena BKPP Kabupaten Kendal sebagai unsur penunjang mempunyai tugas penting dalam memenuhi dan melayani

banyak fungsi di bidang kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan di dalam daerah maupun di luar Kabupaten Kendal.

Sebagai catatan khusus bagi pelaksanaan program/kegiatan yang mempunyai capaian realisasi anggaran rendah disamping realisasi fisiknya juga tidak mencapai hasil maksimal, hal ini dimungkinkan karena beberapa faktor yang diantaranya meliputi pedoman hasil kajian stakeholder, kebijakan maupun mekanisme yang tidak memungkinkan untuk direalisasikan sepenuhnya berdasarkan prioritas dan peraturan perundangan yang ada.

Adapun secara rinci evaluasi pelaksanaan Renja BKPP Kabupaten Kendal Tahun 2024 diuraikan pada **Lampiran I**.

Secara singkat hasil Kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Merupakan program yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan umum administrasi sebagai fungsi penunjang kinerja pelaksanaan kegiatan pelayanan serta administrasi perkantoran di lingkungan BKPP Kabupaten Kendal.

Pada tahun 2024 ini, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah didistribusikan dalam 7 (tujuh) kegiatan untuk mempermudah penganggaran dan pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan fokus dari sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

1.1 Kegiatan – kegiatan tersebut meliputi :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,
- Administrasi Umum Perangkat Daerah,
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.2 Pelaksanaan

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada BKPP Kabupaten Kendal sepanjang Tahun Anggaran 2024 dapat terlaksana dengan baik, terjadwal serta selaras dengan kebutuhan yang ada sebagaimana perencanaan awal sehingga capaian kinerja program/kegiatan dapat terpenuhi dengan baik. Beberapa kegiatan merupakan kegiatan rutin yang

diagendakan setiap tahun anggaran guna mewujudkan terselenggaranya roda pemerintahan, yang meliputi jasa pelayanan dalam bentuk penyediaan akomodasi/fasilitas fisik sarana prasarana serta nonfisik tatakelola administrasi ketatausahaan di lingkungan BKPP Kabupaten Kendal demi tercapainya sasaran peningkatan kinerja pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Kendal.

– **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Pagu anggaran	: Rp.	38.116.000,-
Realisasi anggaran	: Rp.	443.700,-
Realisasi anggaran (%)	: 1 %	
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan	: Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	
Target capaian kegiatan	: 4 dokumen	
Realisasi capaian kegiatan	: 2 dokumen	
Tingkat capaian kinerja (%)	: 50 %	

– **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Pagu anggaran	: Rp.	6.997.126.969,-
Realisasi anggaran	: Rp.	3.381.875.847,-
Realisasi anggaran (%)	: 48 %	
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan	: Prosentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	
Target capaian kegiatan	: 100 persen	
Realisasi capaian kegiatan	: 62,5 persen	
Tingkat capaian kinerja (%)	: 62,5	

– **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Pagu anggaran	: Rp.	11.640.000,-
Realisasi anggaran	: Rp.	0,-
Realisasi anggaran (%)	: 0	
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan	: Prosentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	
Target capaian kegiatan	: 1 laporan	
Realisasi capaian kegiatan	: 0 laporan	
Tingkat capaian kinerja (%)	: 0	

– **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Pagu anggaran	: Rp.	1.049.720.843,-
Realisasi anggaran	: Rp.	286.137.450,-
Realisasi anggaran (%)	: 27	
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan	: Prosentase tersedianya kebutuhan rutin kantor	
Target capaian kegiatan	: 100 persen	

Realisasi capaian kegiatan : 47,74 persen
Tingkat capaian kinerja (%) : 47,74 %

– **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Pagu anggaran : Rp. 39.149.000,-
Realisasi anggaran : Rp. 32.200.000-
Realisasi anggaran (%) : 37
Indikator kinerja capaian : Prosentase tersedianya kebutuhan
keluaran kegiatan sarana prasarana kantor
Target capaian kegiatan : 100 persen
Realisasi capaian kegiatan : 100 persen
Tingkat capaian kinerja (%) : 100 %

– **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Pagu anggaran : Rp. 58.653.000,-
Realisasi anggaran : Rp. 21.595.976-
Realisasi anggaran (%) : 37
Indikator kinerja capaian : Prosentase tersedianya kebutuhan
keluaran kegiatan sarana prasarana kantor
Target capaian kegiatan : 100 persen
Realisasi capaian kegiatan : 50 persen
Tingkat capaian kinerja (%) : 50 %

– **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Pagu anggaran : Rp. 125.966.140,-
Realisasi anggaran : Rp. 52.531.950,-
Realisasi anggaran (%) : 42
Indikator kinerja capaian : Prosentase terlaksananya pemeliharaan sarana
keluaran kegiatan prasarana perkantoran
Target capaian kegiatan : 100 persen
Realisasi capaian kegiatan : 38 persen
Tingkat capaian kinerja (%) : 38 %

1.3. Hasil yang dicapai

Hasil dari pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sepanjang triwulan II tahun anggaran 2024 adalah tercapainya 53% kinerja program yaitu prosentase unit kerja internal yang terlayani melalui penyediaan sarana dan prasarana administrasi perkantoran pada unit kerja di lingkungan BKPP Kabupaten Kendal dapat terealisasi sesuai perencanaan secara fisik maupun serapan anggaran sehingga target kinerja yang telah ditetapkan

dapat tercapai dengan baik. tujuh kegiatan yang menjabarkan program penunjang urusan pemerintah daerah dapat berfungsi dengan baik sebagai penunjang peningkatan kualitas pelayanan publik demi mewujudkan reformasi birokrasi khususnya di lingkungan BKPP Kabupaten Kendal.

2. Program Kepegawaian Daerah

Di tahun 2024 Program Kepegawaian Daerah didistribusikan dalam 4 (empat) kegiatan untuk memudahkan penganggaran dan pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan fokus dari sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.1 Kegiatan – kegiatan tersebut meliputi :

- Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN,
- Mutasi dan Promosi ASN,
- Pengembangan kompetensi ASN,
- Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur,

2.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan program Kepegawaian Daerah selama Tahun Anggaran 2024 meliputi penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan ASN sampai dengan purna tugas yang terencana, prioritas dan efektif sesuai dengan fungsi dan manfaat. Selain itu, agar kualitas yang ada tetap terjaga maka dilaksanakan pula kegiatan yang bersifat evaluasi pengadaan ASN. Dengan demikian, proses dari perencanaan sampai dengan perekrutan dapat berlangsung dengan baik sesuai regulasi yang berlaku. Serangkaian kegiatan tersebut sepanjang tahun anggaran 2024 juga telah dilaksanakan dengan baik mengacu pada rencana kerja yang telah terjadwal, skala prioritas serta kebutuhan operasional yang sudah dialokasikan sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan yang masih terhambat pada triwulan I masih dapat dijalankan dengan baik pada semester II karena jadwal serta tahapan pelaksanaan terus dievaluasi, diselaraskan dan dimonitor dengan lebih intens. Secara umum kegiatan dapat berjalan dengan lancar sebagaimana perencanaan awal sehingga capaian kinerja program/kegiatan dapat terpenuhi dengan baik.

Pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dimaksudkan untuk mewujudkan kelancaran dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi perkantoran dan menunjang operasional tugas-tugas kedinasan di lingkungan BKPP Kabupaten Kendal khususnya yang mendukung peningkatan kinerja pelayanan kepegawaian.

– **Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN**

Pagu Anggaran	:	Rp.	483.579.600,-
Realisasi anggaran	:	Rp.	76.671.700,-
Realisasi anggaran (%)	:	16	
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan	:	Jumlah laporan terlaksananya pengadaan, pemberhentian ASN Jumlah Laporan data dan informasi kepegawaian yang terproses dan diperbarui	
Target capaian kegiatan	:	4 laporan 12 laporan	
Realisasi capaian kegiatan	:	2 laporan 6 laporan	
Tingkat capaian kinerja (%)	:	50 %	

– **Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN**

Pagu anggaran	:	Rp.	576.811.600,-
Realisasi anggaran	:	Rp.	14.864.400,-
Realisasi anggaran (%)	:	3	
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan	:	Jumlah laporan terlaksannya mutasi (internal Perangkat Daerah dan luar kabupaten) dan Kenaikan Pangkat PNS Jumlah laporan promosi PNS	
Target capaian kegiatan	:	4 laporan 4 laporan	
Realisasi capaian kegiatan	:	2 laporan 2 laporan	
Tingkat capaian kinerja (%)	:	50%	

– **Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN**

Pagu anggaran	:	Rp.	10.220.000,-
Realisasi anggaran	:	Rp.	686.000,-
Realisasi anggaran (%)	:	3	
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan	:	Jumlah laporan pengembangan kompetensi	
Target capaian kegiatan	:	4 laporan	
Realisasi capaian kegiatan	:	2 laporan	
Tingkat capaian kinerja (%)	:	50%	

– **Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**

Pagu anggaran	:	Rp.	119.107.000,-
Realisasi anggaran	:	Rp.	9.530.000,-
Realisasi anggaran (%)	:		15,23
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan	:	Jumlah laporan Penilaian Prestasi Kerja dan PNS yang berprestasi Jumlah laporan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur Jumlah laporan tingkat kedisiplinan ASN	
Target capaian kegiatan	:	2 laporan 2 laporan 2 laporan	
Realisasi capaian kegiatan	:	1 laporan 1 laporan 1 laporan	
Tingkat capaian kinerja (%)	:	50%	

2.3. Hasil yang dicapai

Hasil dari pelaksanaan program Kepegawaian Daerah sepanjang Tahun Anggaran 2024 adalah prosentase 50% dari semua kegiatan yang ada, serta dapat terealisasi sesuai target capaian meskipun secara serapan anggaran belum maksimal karena faktor eksternal unpredictable jadwal pelaksanaan dari penyedia contohnya Kegiatan Pengadaan ASN dimana pelaksanaan Seleksi CASN yang besar kemungkinan akan dilaksanakan di triwulan keempat. Empat kegiatan yang menjabarkan program Kepegawaian Daerah dapat berjalan dengan baik sebagai penunjang peningkatan kualitas pelayanan publik demi mewujudkan reformasi birokrasi khususnya di lingkungan BKPP Kabupaten Kendal.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan oleh BKPP Kabupaten Kendal mencakup 2 (dua) kegiatan yaitu Pengembangan Kompetensi Teknis yang dimaksudkan untuk memberikan fasilitas serta akomodasi bagi pegawai di lingkungan Kabupaten Kendal guna meningkatkan kualitas kompetensi sumber daya manusia aparatur di lingkungan Kabupaten Kendal melalui pelatihan-pelatihan maupun bimbingan teknis selaras dengan tugas dan fungsi kedinasan, demi menunjang terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan masyarakat di lingkungan Kabupaten Kendal. Sedangkan Kegiatan Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional bertujuan untuk memberikan fasilitasi peningkatan kompetensi ASN Struktural dan Fungsional.

3.1. Pelaksanaan

Pelaksanaan Program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 berjalan sangat baik sesuai dengan perhitungan dan perencanaan ulang berdasarkan dinamika serta kebutuhan peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Kendal, sehingga manfaat dan hasilnya mampu melebihi target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menunjang peningkatan kinerja pelayanan masyarakat khususnya di Kabupaten Kendal serta demi mewujudkan tujuan dari misi yang ada yaitu reformasi birokrasi di Pemerintahan Kabupaten Kendal.

– **Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis**

Pagu anggaran	: Rp.	1.635.508.000,-
Realisasi anggaran	: Rp.	410.383.800,-
Realisasi anggaran (%)	: 25	
Indikator kinerja capaian	: Jumlah laporan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	
keluaran kegiatan		
Target capaian kegiatan	: 4 laporan	
Realisasi capaian kegiatan	: 2 laporan	
Tingkat capaian kinerja (%)	: 50 %	

– **Kegiatan Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**

Pagu anggaran	: Rp	2.403.328.151,-
Realisasi anggaran	: Rp	309.117.000,-
Realisasi anggaran (%)	: 13	
Indikator kinerja capaian:	: Jumlah laporan dan pengembangan kompetensi	
keluaran kegiatan	manajerial dan fungsional ASN	
Target capaian kegiatan	: 2 laporan	
Realisasi capaian kegiatan	: 1 laporan	
Tingkat capaian kinerja (%)	: 50 %	

3.2. Hasil yang dicapai

Hasil capaian dari pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia yaitu 50% kesesuaian standar ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan selaras dengan kompetensi/tugas fungsi yang didukung ketersediaan fasilitas serta akomodasi yang ada. Sedangkan kelompok sasaran dari pelaksanaan program tersebut adalah aparatur sipil negara di lingkungan Kabupaten Kendal yang diprioritaskan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja, kompetensi

serta profesionalitas diri sesuai kepentingan tugas dinasnya masing-masing. Dengan fasilitas tersebut diharapkan aparatur dapat menunjukkan kualitas kinerja yang tepat guna, bertanggung jawab dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sebagai wujud komitmen seorang aparatur pemerintahan yang berdedikasi tinggi terhadap kinerja pekerjaannya serta pelayanannya kepada publik/masyarakat.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal sesuai dengan pelaksanaan Renja tahun 2024 merupakan unsur dari Organisasi Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, BKPP Kabupaten Kendal mempunyai kedudukan sebagai fungsi penunjang unsur pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas dalam perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas.

Kepala BKPP dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang yaitu Bidang Perencanaan Pengangkatan dan Mutasi Pegawai, Bidang Pengembangan Kompetensi ASN serta Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Data Pegawai yang masing-masing menjalankan sebagian tugas Kepala BKPP.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal, fungsi BKPP guna melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Umum di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal tidak memiliki aturan khusus mengenai SPM (Standar Pelayanan Minimal) dikarenakan tidak langsung terkait pelayanan publik ke masyarakat. Namun tolok ukur kinerjanya tetap berpedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) serta kebijakan yang berlaku demi terwujudnya pelayanan yang prima guna menunjang keberhasilan program/kegiatan yang ada, mewujudkan pelayanan publik disamping memenuhi ketertiban dalam mengelolaketatausahaan. Selama ini kesiapan serta ketepatan waktu selalu menjadi prioritas utama pelayanan yang harus dijaga dan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal. Baik dalam pelaksanaan kegiatan di lingkup internal maupun di luar Kabupaten.

Evaluasi yang dilakukan terhadap kinerja program dan kegiatan yang ada pada BKPP Kabupaten Kendal Tahun 2024 secara umum memperlihatkan hasil kinerja optimal dalam rangka mencapai target yang ditetapkan. Ini dapat dilihat dari terlaksananya semua kegiatan, terpenuhinya outcome kegiatan, dapat menunjang capaian program pembangunan daerah serta selaras dengan dinamika situasi dan kondisi yang berkembang utamanya di lingkungan Sekretariat Daerah selaku unit kerja pelayanan publik, penyedia serta penunjang kegiatan.

Rencana program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal difokuskan pada perwujudan reformasi birokrasi dan pelayanan prima khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah serta pelayanan terhadap pimpinan daerah.

Tabel 2.1

**Pencapaian Kinerja Renstra BKPP Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026
Periode Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023**

No	IKU/IKK/Indikator Program	SPM/Standar Nasional	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian Tahun 2024		Proyeksi		Capaian Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	12	13	14
Indikator Kinerja Utama											
A.	Jumlah Nilai Dimensi Disiplin, Dimensi Kualifikasi, Dimensi Kinerja		42,66	42,67	42,70	42,72	50,97	51,04	51,9	52	119,4%
	Dimensi Kompetensi		33	33,62	34	34	27,94	28,79	34	34	84,6%

No	IKU/IKK/Indikator Program	SPM/Standar Nasional	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian Tahun 2024		Proyeksi		Capaian Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	12	13	14
	Nilai SAKIP		73	74	75	76	73,6	73,6	78	78	96,6%
Indikator Kinerja Kunci											
I.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	-	210	210	215	215	222,79	225,4	226	226	105 %
	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	-	8,09	8,09	8,11	8,11	17,22	17,43	20	21	212%
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	-	23,21	23,22	23,23	23,24	55,61	55,61	56	56	239 %
Indikator Program											
1	Persentase data kepegawaian dalam aplikasi kepegawaian yang ter update	-	61	70	75	80	95	95	95	95	118%
2	Tingkat Kedisiplinan ASN	-	97,3	97,6	97,9	98,2	99,9	99,9	99,9	99,9	102,04%
3	Persentase ASN menyusun SKP dan Penilaian Prestasi Kerja tepat waktu	-	60	65	70	80	98	98	98	98	122,5%
4	Persentase jabatan struktural yang dievaluasi	-	82	85	87	90	0	0	85	87	100%
5	Persentase	-	60	62	65	70	56	56,61	62	65	100%

No	IKU/IKK/Indikator Program	SPM/Standar Nasional	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian Tahun 2024		Proyeksi		Capaian Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	12	13	14
	penempatan ASN sesuai peta jabatan										
6	Persentase struktur jabatan ASN yang terisi	-	80	82	85	87	75	86,51	85,57	87	100%
7	Persentase ASN yang lulus Ujian Dinas Kenaikan Pangkat dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	-	100	100	100	100	0	0	100	100	100%
8	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi yang telah direncanakan		100	100	100	100	0	0	100	100	100%
9	Persentase ASN yang lulus lat pra jabatan/latsar dan lat kepemimpinan		100	100	100	100	0	61	75	100	100%
10	Persentase ketercapaian Perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		100	100	100	100	25	50	75	100	100%
11	Persentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		100	100	100	100	25	50	75	100	100%

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal Tahun 2024 dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana

tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Skor)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah Nilai Dimensi Disiplin, Dimensi Kualifikasi, Dimensi Kinerja	Nilai Disiplin + Dimensi Kinerja + Dimensi Kualifikasi IP ASN	42,72
2	Dimensi Kompetensi	Nilai Kompetensi IP ASN	34
3	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	75

Dari target dan realisasi di triwulan II tahun 2024, terlihat bahwa Triwulan II Tahun 2024 pada beberapa indikator mengalami kenaikan.

- Capaian sasaran Jumlah Nilai Dimensi Disiplin, Dimensi Kualifikasi, Dimensi Kinerja dengan indikator Nilai Disiplin + Dimensi Kinerja + Dimensi Kualifikasi IP ASN sebesar 51,04 dari target 42,72, persentase capaian 119,4 % (sangat baik).
- Capaian sasaran Dimensi Kompetensi, capaian indikator sasaran Nilai Kompetensi IP ASN sebesar 28,79 dari target 34, persentase capaian 84 % (tinggi).
- Capaian Sasaran Nilai SAKIP dengan indikator Nilai SAKIP 73,6 dari target 78. persentase capaian 96,6 % (sangat tinggi)

2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yang relevan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Sedangkan, isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di

masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kendal lima tahun mendatang.

Dari beberapa masalah utama daerah kemudian dijabarkan ke dalam permasalahan dan akar masalah yang lebih spesifik. Keterkaitan masalah utama dengan masalah dan akar masalah adalah bahwa suatu permasalahan utama adalah masalah daerah yang penyelesaiannya harus membutuhkan peran lintas bagian maupun bidang urusan, kemudian dari permasalahan utama tersebut dicari penyebabnya. Sekurang-kurangnya, terdapat empat elemen penting penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi: *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*. Tanpa empat elemen tersebut, sulit sekali untuk menjamin bahwa pembangunan daerah diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Mencermati kinerja “tata kelola pemerintahan yang baik” di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kendal yang belum terwujud, salah satu faktor masalah utama daerah dapat diidentifikasikanyaitu Belum Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Berdasarkan tugas fungsi sesuai Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal, masalah utama BKPP Kabupaten Kendal yang dapat diidentifikasi yaitu terkait Pelayanan publik yang belum maksimal. Dari permasalahan utama tersebut dicari akar masalahnya berdasarkan tugas fungsi pada BKPP Kabupaten Kendal, yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya fasilitas sarana dan prasarana penunjang penunjang urusan pemerintah daerah.
2. Terbatasnya kualitas serta kuantitas SDM;
3. Belum optimalnya perumusan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
4. Kurangnya koordinasi antar sectoral sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pengambilan keputusan

Berdasarkan hasil telaahan terhadap tugas dan fungsi pada BKPP Kabupaten Kendal, permasalahan, akar masalah serta kebijakan – kebijakan yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan didapatkan formulasi yang mengangkat isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Menjadi isu

penting yang harus dihadapi BKPP Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu sebagai berikut :

- a. Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang representatif;
- b. Penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi pelayanan publik;
- c. Pengadaan SDM serta peningkatan kualitas & kompetensi SDM;
- d. Penerapan standar operasional prosedur dan standar pelayanan;
- e. Fasilitasi dan inovasi pelayanan di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja BKPP Kabupaten Kendal Tahun 2024 menyelaraskan dari tahapan-tahapan rancangan awal RKPD 2024 yang penyusunannya tidak terlepas dari pedoman Rencana Strategis BKPP Kabupaten Kendal 2021-2026 serta perbaikan – perbaikan indikator kinerja tahun 2024 yang merupakan tahun ketiga RPJMD 2021-2026.

Terdapat proses perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang merupakan sinkronisasi dari dinamika yang berkembang di lingkungan BKPP Kabupaten Daerah, hal ini tidak lepas dari tugas dan fungsi BKPP Kabupaten Kendal sebagai OPD yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Arah kebijakan pada tahun 2024, pembangunan Kabupaten Kendal berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 Kabupaten Kendal menitikberatkan/ yang menjadi fokus adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan, dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal Smart City. Berdasarkan hal tersebut maka tema pembangunan Kabupaten Kendal pada tahun 2024 adalah “KENDAL SMART CITY”.

Dalam rangka persiapan menunjang capaian visi misi RPJMD ini, Pemerintah Kabupaten Kendal bekerja mewujudkan apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Sehingga RPJMD bisa selaras dan tidak ada penyimpangan dengan apa yang telah direncanakan oleh daerah sesuai dengan kondisi wilayah. Pada periode yang ketiga ini, dari mulai pelaksanaan musrenbangdesa, musrenbang kecamatan sampai musrenbang kabupaten diwujudkan guna menyelaraskan antara desa, kecamatan dan kabupaten dengan program kerja provinsi dan pusat sesuai dengan Nawacita. Apa

yang dibahas dalam musrenbang tidak bisa meninggalkan slogan Jawa Tengah "Jateng Gayeng". Semua ini dipersiapkan bersama tim yang dimulai dengan desk masing - masing (pemerintahan, infrastruktur dan sosial budaya) pembahasan bersama dan tokoh - tokoh akan berbicara baik itu dari Perguruan Tinggi, swasta, tokoh masyarakat, tokoh agama.

Usulan program/kegiatan dari masyarakat merupakan hasil aspirasi dalam forum musrenbang dengan memperhatikan tugas dan fungsi, rencana strategis masing-masing Perangkat Daerah serta isu – isu strategis yang sedang berkembang di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut bila ada dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun Rancangan Renja BKPP Kabupaten Kendal yang nantinya dibahas dalam forum Perangkat Daerah yang dikoordinasi oleh Baperlitbang. Tujuan dari pembahasan rancangan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program/kegiatan, tugas dan fungsi serta penajaman indikator dan target kinerja program/kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi khususnya di BKPP Kabupaten Kendal.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap usulan aspirasi masyarakat pada Musrenbang tahun ini terdapat usulan - usulan program dan kegiatan yang dimintakan masyarakat sebagai aspirasi maupun koreksi kepada beberapa Perangkat Daerah terkait agar diperoleh kesepakatan dalam merencanakan program-program pembangunan yang sifatnya strategis dan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat di daerah sehingga program yang direncanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam penyusunan Rancangan Renja kali ini Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal tidak mendapat usulan aspiratif dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD untuk tahun anggaran 2024, namun BKPP Kabupaten Kendal tetap mengajukan usulan program-program kegiatan lain yang sifatnya strategis dan bermanfaat guna menunjang peningkatan di bidang kepegawaian dan peningkatan Sumber Daya Manusia ASN yang lebih baik dalam mencapai tujuan serta sasaran yang diinginkan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik demi mewujudkan reformasi birokrasi,. Disamping perlunya strategi serta kebijakan khusus pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal sebagai lini pendukung kesuksesan dan kelancaran penyelenggaraan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di daerah, diharapkan pemerintahan daerah di Kabupaten Kendal mampu berpandangan jauh ke

depan (visioner), transparan, akuntabel, efisien dan efektif, profesional, demokratis, partisipatif, responsif, serta memiliki komitmen yang tinggi terhadap kesejahteraan ASN di Kabupaten Kendal.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Perkembangan Yang Tidak Sesuai Dengan Asumsi Awal Renja 2024

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi penganggaran pendapatan daerah yang berakibat terhadap penyesuaian belanja daerah maka perlu dilakukan perubahan program/kegiatan dalam Renja Tahun 2024, yang mencakup pergeseran pagu, kegiatan antar program, pengurangan kegiatan baru/kegiatan alternatif, pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

3.2. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Adapun perubahan dalam program/kegiatan dalam Renja Tahun Anggaran 2023 memuat penambahan atau pengurangan pagu indikatif, target kinerja serta pergeseran kegiatan meliputi:

Program dan Kegiatan	Sumber Dana	PENETAPAN		PERUBAHAN	
		Target Capaian	Pagu	Target Capaian	Pagu
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			8.306.587.352		8.707.497.352
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD	4 dok.	38.116.000	4 dok.	28.116.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DAU	100 %	6.997.126.969	100 %	6.608.126.969
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD	1 laporan	11.640.000	1 laporan	9.040.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD	100 %	1.049.720.843	100 %	1.828.900.843
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD	100 %	39.149.000	100 %	61.149.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD	100 %	58.653.000	100 %	59.253.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD	100 %	125.966.140	100 %	112.911.540
Program Kepegawaian Daerah			1.189.718.200		2.405.018.200
Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	PAD	4 lap. 12 lap.	483.579.600	4 lap. 12 lap.	1.691.879.600
Mutasi dan Promosi ASN	PAD	4 laporan 4 laporan	576.811.600	4 laporan 4 laporan	577.211.600
Pengembangan Kompetensi ASN	PAD	4 laporan	10.220.000	4 laporan	17.220.000
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	PAD	2 laporan 2 laporan 2 laporan	119.107.000	2 laporan 2 laporan 2 laporan	118.707.000
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia			4.060.256.151		4.053.256.151
Pengembangan Kompetensi Teknis	PAD	4 laporan	1.653.508.000	4 laporan	1.646.508.000
Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	PAD	2 laporan	2.403.328.151	2 laporan	2.403.328.151
TOTAL			13,556.561.703		15.165.771.703

Sumber Dana Berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024 yang tercantum dalam RKPD Tahun 2024 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal merumuskan program prioritas sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
2. Program Kepegawaian Daerah,
3. Program Pengembangan Sumberdaya

Berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah tidak terdapat usulan kegiatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal hasil reses maupun usulan kegiatan dari kecamatan. Sedangkan kegiatan yang diusulkan masing-masing bidang pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal untuk tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat menangani program dan kegiatan rutin yang ada pada setiap perangkat daerah, meliputi program, kegiatan dan sub kegiatan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari kegiatan:
 - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang terdiri dari subkegiatan :
 - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari subkegiatan :
 - 1.2.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang terdiri dari subkegiatan :
 - 1.3.1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 - 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri dari subkegiatan :
 - 1.4.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.4.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.4.7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari subkegiatan :

- 1.5.1 Pengadaan Mebel
- 1.5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari subkegiatan :
 - 1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.6.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari subkegiatan :
 - 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.7.2 Pemeliharaan Mebel
 - 1.7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Karir Pegawai

Usulan program, kegiatan dan subkegiatan bidang Pengembangan Kompetensi dan Karir Pegawai adalah :

- 1. Program Kepegawaian Daerah terdiri dari kegiatan:
 - 1.1 Mutasi dan Promosi ASN, yang terdiri dari subkegiatan :
 - 1.1.1 Mutasi dan Promosi ASN
 - 1.2 Pengembangan Kompetensi ASN, yang terdiri dari subkegiatan :
 - 1.2.1 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
 - 1.3 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, yang terdiri dari subkegiatan :
 - 1.3.1 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 1.3.2 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- 2. Program Pengembangan Sumberdaya Manusia terdiri dari kegiatan:
 - 2.1 Pengembangan Kompetensi Teknis, yang terdiri dari subkegiatan :
 - 2.1.1 Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
 - 2.1.2 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah

Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

2.2 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, yang terdiri dari subkegiatan :

- 1.3.1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
- 1.3.2 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan

3 Bidang Perencanaan, Pengangkatan dan Mutasi Pegawai

Usulan Program, Kegiatan dan Subkegiatan dari Bidang Perencanaan, Pengangkatan dan Mutasi Pegawai terdiri dari :

- 1. Program Kepegawaian Daerah terdiri dari kegiatan:
 - 1.1 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, yang terdiri dari subkegiatan :
 - 1.1.1 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
 - 1.1.2 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - 1.1.3 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
 - 1.1.4 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
 - 1.2 Mutasi dan Promosi ASN, yang terdiri dari subkegiatan :
 - 1.2.1 Pengelolaan Mutasi ASN
 - 1.2.2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - 1.3 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, yang terdiri dari subkegiatan :
 - 1.3.1 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 1.3.2 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

3. Bidang Pembinaan, Kesejahteraan, dan Data Pegawai

Usulan Program dan Kegiatan dari Bidang Pembinaan, Kesejahteraan, dan Data Pegawai terdiri dari program :

- 1. Program Kepegawaian Daerah terdiri dari kegiatan:
 - 1.1 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, yang terdiri dari subkegiatan :
 - 1.1.1 Pengelolaan Sistem

Informasi Kepegawaian

1.1.2 Pengelolaan Data Kepegawaian

1.2 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, yang terdiri dari subkegiatan :

1.2.1 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

1.2.2 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai

1.2.3 Pembinaan Disiplin ASN

1.2.4 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

Secara keseluruhan pada perubahan tahun anggaran 2024 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal merencanakan 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Kendal. Total dana yang dibutuhkan untuk 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan kegiatan tersebut sebesar Rp. 12.369.170.297,- (Dua belas milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Perincian kebutuhan dana pada tiap kegiatan dapat dilihat pada Lampiran Renja ini.

BAB IV

PENUTUP

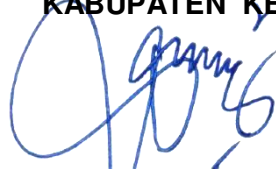
Perubahan Rencana Kerja (Renja) BKPP Kabupaten Kendal tahun 2024 yang telah disusun, merupakan acuan atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas terkait kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini diharapkan bisa menjadi pedoman dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran untuk mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada akhir periode RPJMD 2021-2026.

Perubahan Renja 2024 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal ini diharapkan selaras serta dapat dipergunakan sebagai acuan kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di tahun 2024, sehingga rencana tindak lanjut dapat lebih terarah dan terukur menyesuaikan ketersediaan anggaran serta kaidah pelaksanaan. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur BKPP Kabupaten Kendal, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai diselaraskan dengan tugas dan fungsinya.

Akhir kata, semoga dokumen Perubahan Renja 2024 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *public service* yang lebih baik.

Kendal, Agustus 2023

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN KENDAL**



ABDUL BASIR, S.H, M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 197206261996031003



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
(RENJA - PD) TAHUN 2024**



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

2024

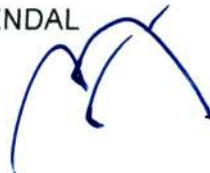
KATA PENGANTAR

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tidak dapat terakomodir dalam APBD Penetapan Tahun 2024. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024. Perubahan RKPD Kabupaten Kendal tahun 2024 secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting, meliputi:

1. Merupakan wadah untuk mewujudkan program prioritas RPJMD 2021-2026.
2. Menjadi acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, berupa program/kegiatan/ subkegiatan Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah.
3. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menyusun Rancangan APBD perubahan (APBD-P).
4. Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD-P
5. Menjadi instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahwa atas pertimbangan adanya hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2024 dan berdasarkan ketentuan pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perubahan Renja dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Adapun untuk Perubahan Renja Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal disamping memperhatikan Perubahan RKPD Kabupaten Kendal juga disebabkan adanya evaluasi anggaran kegiatan setelah perjalanan satu semester atau realisasi anggaran pada Triwulan II tahun berjalan.

Perubahan Renja Inspektorat Daerah ini diharapkan benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif kegiatan Inspektorat Daerah pada perubahan APBD Tahun 2024.

Kendal, 2024
Pit. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN
KENDAL



RINI UTAMI, S.H.M.A

Pembina Tk.I

NIP. 197005061996032002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
Bab II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 dan Renstra Perangkat Daerah	8
2.2 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24
Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	26
Bab IV Penutup	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perangkat Daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada RKPD. Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja Perangkat Daerah, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam Renja Perangkat Daerah dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Renja PD adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pada tahun 2024 dilakukan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Adapun alasan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 antara lain :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. Adanya penambahan dan pengurangan kegiatan;
- c. Adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal ini diharapkan dapat benar-benar dapat menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disesuaikan sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal tahun 2023 ini berdasarkan pada landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008

- Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 17);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 20).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah untuk menyesuaikan dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal.

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024, dilaksanakan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas Pembangunan

Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), dasar pertimbangan perubahan RKPD yang ditindaklanjuti dengan perubahan rencana kerja perangkat daerah menurut peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut adalah adanya perubahan pada :

1. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
2. Target Sasaran Pembangunan Daerah;
3. Penambah dan/atau pengurangan program, kegiatan Perangkat Daerah; dan
4. Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menampilkan usulan rencana kegiatan dan program serta pagu indikatif yang akan dilaksanakan pada anggaran perubahan tahun 2024.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 dan Renstra Perangkat Daerah

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka diperlukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan maupun pelaksanaannya. Menindaklanjuti hal tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal telah melaksanakan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 dengan mengampu program-program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal memuat tentang evaluasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), masing-masing program dan kegiatan di tahun 2024 sampai dengan Triwulan II. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II yaitu Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memperoleh Level 3 setelah sebelumnya mendapat Level 2 pada tahun-tahun sebelumnya, hal tersebut dapat dicapai atas kerja sama serta komitmen bersama antara Pimpinan serta seluruh pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal dalam meningkatkan kualitas pengawasan serta perbaikan administrasi dalam pemenuhan dokumen Peningkatan Kapabilitas APIP. Sedangkan untuk Maturitas SPIP mengalami penurunan pada Penilaian Tahun 2023 dengan memperoleh Level 2, hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya koordinasi antar OPD dalam menyusun kertas kerja Penilaian Mandiri SPIP serta terdapat format dan indikator baru pada kertas kerja Penilaian Mandiri SPIP yang menjadikan OPD kesulitan dalam pengisian kertas kerja tersebut, untuk

tahun 2024 dilakukan koordinasi antara OPD *leading sector* dengan OPD Pendukung lebih awal dari *timeline* Penilaian Mandiri SPIP yang diberikan BPKP RI yaitu pada awal tahun guna membangun komitmen bersama untuk menaikkan level Maturitas SPIP serta melakukan pelatihan-pelatihan pengisian kertas kerja PM SPIP, ditambah dengan peran aktif Badan Perencanaan, Penelitian, dan Perkembangan Kabupaten Kendal pada tahun 2024 dalam meningkatkan Manajemen Risiko Indeks (MRI) yang merupakan unsur penunjang Maturitas SPIP.

Dibawah ini akan dijelaskan pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan oleh masing-masing program dan kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal sampai dengan Triwulan II Tahun 2024. Alokasi anggaran penetapan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebesar Rp15.450.925.480,00 dengan penyerapan anggaran pada Triwulan II sebesar Rp5.932.416.552,00 atau 38,40%. Dengan realisasi fisik pada masing-masing program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencapai 40,59%, Program Penyelenggaraan Pengawasan mencapai 30,25%, dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi mencapai 4,10%.

Realisasi Program/ Kegiatan yang tidak memenuhi target hasil/keluaran yang direncanakan

Terdapatnya beberapa rencana kegiatan yang belum memenuhi target kinerja sampai dengan tahun 2024 Triwulan II, hal itu dikarenakan pengefektifan dan pengefisienan kebutuhan dan pergeseran rencana pelaksanaan kegiatan. Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan di Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II sebagai berikut :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Indikator Kinerja Program :
- Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Perangkat Daerah pada Triwulan II, realisasi 40,69% dari target 100% karena realisasi pada beberapa indikator kinerja kegiatan belum mencapai target.

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja :

- Persentase Ketercapaiannya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Triwulan II, realisasi 4,03% dari target 100%, hal ini dikarenakan pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah belum terdapat realisasi keuangan dikarenakan semua belanja belum dilaksanakan pembayarannya, pada bulan Agustus atau September 2024 akan dilakukan pembayaran belanja-belanja dari awal tahun. Faktor lain adalah pada sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) seluruh OPD Kabupaten Kendal akan dilaksanakan pada bulan September 2024.

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Kinerja :

- Persentase Ketercapaiannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada triwulan II, realisasi 10,30% dari target 100%, hal ini dikarenakan pada sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi tidak tercapai target karena mayoritas APIP mendaftarkan diri untuk melaksanakan diklat penjenjangan maupun diklat teknis pada periode triwulan III dan IV, serta pada sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan rencana akan dilaksanakan pada periode triwulan IV tahun 2024, dan pada sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan belum mencapai target karena kelompok jabatan fungsional Auditor dan PPUPD jarang melaksanakan pelatihan kantor sendiri. Komitmen semua pihak terkait dapat mendorong pencapaian target kinerja perangkat daerah.

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kinerja :

- Persentase Ketercapaiannya Administrasi Umum Perangkat Daerah pada triwulan II, realisasi 32,48% dari target 100%, hal ini dikarenakan mayoritas sub kegiatan merupakan belanja yang bersifat penyediaan satu tahun, sedangkan sampai dengan triwulan II tahun 2024 masih memanfaatkan persediaan pada awal tahun 2024.

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja :

- Persentase Ketercapaiannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada triwulan II, realisasi 0% dari target 100%, hal tersebut dikarenakan rencana pengadaan akan dilaksanakan mulai triwulan III tahun 2024.

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja :

- Persentase Ketercapaiannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada triwulan II, realisasi 32,68% dari target 100%, hal ini karena merupakan kegiatan dalam satu tahun. Komitmen semua pihak terkait dapat mendorong pencapaian target kinerja perangkat daerah.

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja :

- Persentase Ketercapaiannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada triwulan II, realisasi 12,12% dari target 100%, hal ini karena sub kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud dan sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya belum dilaksanakan dan direncanakan akan dilaksanakan pada periode triwulan IV tahun 2024.

B. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Indikator Kinerja :

- Prosentase tercapainya Penyelenggaraan Pengawasan di Daerah pada triwulan II, realisasi 30,25% dari target 100% karena realisasi pada beberapa indikator kinerja kegiatan belum mencapai target.

Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Indikator Kinerja :

- Persentase Ketercapaiannya Penyelenggaraan Pengawasan Internal pada triwulan II, realisasi 28,16% dari target 100%, hal ini karena sub kegiatan Reviu Laporan Keuangan belum dilaksanakan kegiatan Reviu Rencana Kerja Anggaran Perubahan 2024 dan 2025, hal tersebut dikarenakan *timeline* reviu dilaksanakan pada periode triwulan III dan triwulan IV tahun 2024 serta sub kegiatan *Monitoring* Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP belum melaksanakan pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. Komitmen semua pihak terkait dapat mendorong pencapaian target kinerja perangkat daerah.

Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Indikator Kinerja :

- Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu pada triwulan II, realisasi 37,78% dari target 100%, hal ini karena kegiatan ini tergantung kepada penyelesaian laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang mana mayoritas penyelesaiannya lama dikarenakan tingkat kesulitan kasus yang ditangani oleh tim pemeriksa. Komitmen semua pihak terkait dapat mendorong pencapaian target kinerja perangkat daerah.

C. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Indikator Kinerja :

- Prosentase Hasil Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi pada triwulan II, realisasi 4,10% dari target 100% karena realisasi pada indikator kinerja kegiatan belum mencapai target.

Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi

Indikator Kinerja :

- Persentase Ketercapaian Pendampingan dan Asistensi pada triwulan II, realisasi 4,10% dari target 100%, hal ini karena pada sub kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi terdapat kegiatan sosialisasi sapu bersih pungutan liar (saber pungli) yang rencana akan dilaksanakan pada bulan September dan Oktober 2024 dan pembayaran honor tim saber pungli untuk Aparat Penegak Hukum (APH) belum dibayarkan dari awal tahun dan direncanakan akan dicairkan pada bulan September 2024. Selain itu terdapat sub kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi belum berjalan dan akan dilaksanakan pada periode triwulan III dan IV tahun 2024. Untuk sub kegiatan Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas akan diadakan sosialisasi antikorupsi dengan target anggota DPRD yang baru, pejabat eselon II di Lingkungan Kabupaten Kendal, serta perwakilan paguyuban Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Sekolah se-Kabupaten Kendal direncanakan dilaksanakan pada bulan September 2024.

Secara umum, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja Program/ Kegiatan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Rencana kegiatan berada pada Triwulan III dan IV;
- b. Kegiatan bersifat penyediaan 1 tahun;

- c. Adanya pertimbangan teknis dan keuangan sehingga kegiatan belum dilaksanakan.

Implementasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah secara umum mencapai target yang telah ditetapkan, meskipun demikian guna untuk meningkatkan kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal maka perlu peningkatan kapabilitas APIP dan penambahan Jumlah APIP agar bisa maksimal dalam melakukan pengawasan ke obyek pemeriksaan dan penanganan aduan masyarakat guna mendukung pencapaian visi misi Bupati Kendal

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, yaitu :

- a. Perencanaan anggaran untuk program pengawasan lebih dimaksimalkan agar pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah bisa maksimal
- b. Pengajuan tambahan kekurangan anggaran pada perubahan RKPD untuk program, kegiatan, sub kegiatan prioritas.
- c. Pergeseran anggaran antar kegiatan maupun sub kegiatan sesuai dengan perubahan kebijakan.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Dinas Kominfo Kabupaten Kendal dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sampai Triwulan II		Tingkat Realisasi (%)
6				PENGAWASAN								
6	01			Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan								
6	01	02		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	100	%	40,69	%	40,69

PERUBAHAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
			100	%	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	100	%	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sampai Triwulan II	4,03	%		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			100	%	100	%	4,03	%	4,03	100	%	85,39	%	85,39
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaianny Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dok	6	Dok	6	Dok	6	Dok	12	Dok	2 %
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53	Lap	53	Lap	35	lap	53	Lap	89	Lap	1,68 %
		administrasi Keuangan Perangka daerah	Persentase Ketercapaiannya administrasi keuangan perangkat daerah	100	%	100	%	50	%	100	%	93,51	%	93,51
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57	Orang/ bulan	14	bulan	14	bulan	57	org/ bulan	85	Org/ bula n	1.5 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
			12	Dok		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		12	Dok	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Realisasi Capaian Target Renstra (%)	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	lap		1	1	1,00		1	lap	3	36	3,0 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	lap		1	1	1,00		1	lap	3	lap	3,0%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Semesteran	-	Lap		2	2	1,00		-	lap	4	lap	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			100	%	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sampai Triwulan II		Tingkat Realisasi (%)	Target		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
						100	%		10.02	%			100	%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaiannya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	%					10.02	%	99,82	%	99,82	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	60	Paket	-	stel	-	stel	-	stel	65	stel	1,08 %	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsinya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	55	Org	45	org	37	org	0,82	org	132	org	2,4 %	
	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan	150	Org	50	org	50	org	1,00	org	202	org	1,347 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			55	Org	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	55	Org	45	36	0,8	org	55	136	2,47 %
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaiannya administrasi umum perangkat daerah	100	%	100	32,48	32,48	%	100	99,49	99,49
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	16	Paket	14	10	0,71	jenis	16	38	2,375 %
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	65	paket	65	61,75	0,92	Jenis	65	138,75	2,135%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik	1.500	Paket	1.434	932	0,65	dus	1.450	3.936	2.624 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
				Target Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Perangkat Daerah tahun 2024 sampai Triwulan II		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
	Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
	Pengadaan Mebel	Jumlah Kebutuhan Meubeler yang harus disediakan	-	Unit	1	set	1	set	1,00	-	unit	2	Unit	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1	Unit	-	unit	-	unit	-	8	unit	11	unit	9,09 %
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5	Unit	25	Unit	9	Unit	0,36	10	Unit	19	Unit	3,8 %
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang disediakan	-	Unit	1	Set	1	set	1,00	6	unit	7	Unit	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaiannya jasa penunjang urusan	100	%	100	%	32,68	%	32,68	100	%	99,78	%	99,78

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
		pemerintahan daerah									
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500	Lap	200	180	0,9	420	lapora n	1300	2,6 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, dan Telepon yang disediakan	12	Laporan	12	12	1,00	12	lapora n	36	3 %
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	Laporan	12	10	1,00	12	lapora n	34	2,83 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	12	12	1,00	12	Lapora n	36	3 %

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
			100	%	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	100	%	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sampai Triwulan II	12.12	%	Tingkat Realisasi (%)	100	%	Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Persentase Ketercapaiannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36	Unit	41	unit	39	unit	0,95	36	unit	107	unit	2,97 %
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya												
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	1	Unit	-	unit	-	unit	-	-	unit	-	unit	-
			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud												
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1,00	1	Unit	3	Unit	3 %
			Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi												

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024				Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sampai Triwulan II		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
				1	unit	1	unit	1,00	-					unit	13
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	-	Unit											
	PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN	Prosentase tercapainya penyelenggaraan pengawasan di daerah	100	%	100	%	30.25	%	30.25	100	%	99,96	%	99,96	
	Penyelenggaraan Pengawasan internal	Persentase Ketercapaiannya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100	%	100	%	28.16	%	28.16	100	%	100	%	100	100
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	150	Laporan	150	obrik	80	obrik	0,53	150	laporan	380	laporan	2,53 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			4	Lap		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	5	lap	13	lap	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Reviu Laporan Keuangan	4	Lap		5	lap	0,8	5	lap	13	lap		3,25 %
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	140	Dok		120	obrik	0,70	140	Dok	277	Dok		1,98%
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100	%		100	%	37,78	100	%	99,84	%		99,84
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	40	Lap		40	obrik	0,75	40	lap	122	lap		3,05%
		PROGRAM PERUMUSAN	100	%		100	%	4,10	100	%	99,9	%		99,9

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	pendampingan dan asistensi								
	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Ketercapaiannya Pendampingan dan Asistensi	100 %	100 %	4.10 %	4.10 %	100 %	100 %	99,9 %	99,9
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	50 Perang kat daerah	49 org	39 org	0.8 org	49 Peran gkat Daera h	140 org	2,8%	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	60 Perang kat Daerah	15 OPD	13 OPD	0,86	49 Peran gkat Daera h	63 Pera ngka t Daer ah	1,05%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sampai Triwulan II		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
					6	lap	-	lap	-	-	6	Keg	7	Keg	7 %
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1	Keg											
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	57	Perang kat Daerah	400 0	lap	3992	lap	0,998	57	Peran gkat Daera h	57	Pera ngka t Daer ah		1 %

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun 2024 dimanfaatkan guna menyelesaikan isu strategis pembinaan dan pengawasan. Isu strategis pembinaan dan pengawasan merupakan permasalahan yang berkaitan fenomena atau yang belum dapat diselesaikan tahun-tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi berkesinambungan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat
2. Tuntutan peningkatan kapabilitas APiP
3. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di jajaran Organisasi Perangkat Daerah.
4. Masih banyaknya aduan masyarakat terhadap pelayanan publik.
5. Belum optimalnya manajemen pengelolaan data di setiap OPD sehingga berdampak pada pengukuran evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan.
6. Organisasi Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti temuan hasil pengawasan sering tidak tepat waktu terutama hasil temuan BPK RI.
7. Tuntutan peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi

2.2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal selama ini didasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta kebijakan program pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri dan belum melibatkan secara langsung aspirasi dari masyarakat. Namun demikian isu-isu strategis maupun permasalahan yang berkembang di masyarakat dijadikan pertimbangan untuk penetapan sasaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tabel 2.2

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2024
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra.
2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi.
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka tujuan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal adalah Meningkatkan tata kelola pemeritahan yang bersih dan bebas korupsi melalui penguatan peran APIP.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal menetapkan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya efektivitas pengawasan internal
- b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
- c. Meningkatnya Kapabilitas APIP

Dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal sebagai gambaran mengenai

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal sebagai berikut :

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah

NO	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	5		6	7	8
	Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Maturitas SPIP	Level 3		Level 3	Level 3	Level 3
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 2		Level 3	Level 3	Level 3
	Indikator Kinerja Program					
1	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	100 %
2	Persentase ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan	100 %		100 %	100 %	100 %
3	Persentase ketercapaian Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	100 %		100 %	100 %	100 %

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan

sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Secara keseluruhan, Pagu Perubahan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal tidak mengalami perubahan pagu anggaran sebesar Rp15.450.915.480,00. Rencana Program dan Kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan :

a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan :

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Kegiatan :

a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal,

Sub Kegiatan :

- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- Reviu Laporan Keuangan

- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Sub Kegiatan :

- Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan :

a. Pendampingan dan Asistensi

Sub Kegiatan :

- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Rumusan rencana program dan kegiatan, indikator program/kegiatan, lokasi, target capaian kinerja, dan sumber dana sebagaimana pada Tabel 3.2 :

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KENDAL
TAHUN 2024

[illegible]

[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 yang telah disusun, sebagai dokumen perencanaan kegiatan bidang pengawasan tahunan berdasarkan potensi, kekuatan dan kemampuan organisasi untuk menjadi dasar serta pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk ketersediaan anggaran yang tidak sesuai kebutuhan maka dengan skala prioritas dalam penetapan kegiatan sehingga kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang paling menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebagai dasar dan pedoman penyusunan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) SKPD Tahun Anggaran 2024. Dokumen Renja ini berfungsi sebagai tolok ukur yang mengarahkan seluruh kegiatan dalam mencapai Visi dan Misi organisasi dengan menjabarkannya kedalam sasaran program dan kegiatan. Oleh karena itu keberhasilan pelaksanaan dokumen Renja ini akan sangat tergantung pada komitmen semua pihak yang secara fungsional terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pemerintah, termasuk ketersediaan sumber daya pendukung untuk terwujudnya pemerintah Kabupaten Kendal yang *good government*, efektif, efisien dan akuntabel. Selanjutnya Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal dalam penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan memberikan pemahaman kepada masing-masing OPD untuk menyelesaikan dan menindaklanjuti hasil-hasil pengawasan.

Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian, dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yaitu program pengawasan lebih bisa diperhatikan sesuai dengan aturan yang berlaku terkait pemenuhan pagu indikatif agar pelaksanaan pengawasan bisa maksimal

dan sesuai dengan tujuan, sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal.

Demikian Dokumen Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 kami susun semoga bermanfaat dalam proses perencanaan dan penganggaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal.

Kendal,

Plt. INSPEKTUR DAERAH

KABUPATEN KENDAL



RINI UTAMI, S.H.M.A

Pembina Tk.I

NIP. 197005061996032002



PERUBAHAN RENCANA KERJA

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2024**



☎ (0294) 381966

🌐 satpolkar.kendalkab.go.id

📍 Jl. Soekarno - Hatta 169 Kendal

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adapun penyusunan Perubahan Rencana Kerja PD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sesuai Perda Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, Satpol PP mulai tahun 2017 berubah menjadi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran. Fungsi Pemadam Kebakaran bergabung dalam Satpol PP. Sesuai Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 sudah mengacu pada Renstra Satpol PP Tahun 2021-2026 serta penyesuaian kebijakan pusat dan propinsi. Beberapa Kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal pada Tahun 2024 adalah ikut menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah yang didukung dengan Peningkatan Kinerja PPNS, Pemenuhan target RPJMD serta pemenuhan Standart Pelayanan Minimal (SPM), juga penyesuaian implementasi Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja serta Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

Perubahan Rencana Kerja Satpol PP dan Pemadam Kebakaran ini diharapkan dapat benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan serta penetapan pagu pada Perubahan Anggaran Tahun 2024.

Kendal,

2024



KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KENDAL,

Drs. BAMBANG DJOKO PITONO

Pembina Utama Muda

NIP. 19690323 199003 1 008

DAFTAR ISI :

Kata Pengantar..... 1

Daftar Isi..... 2

BAB I Pendahuluan..... 3

 1.1 Latar Belakang..... 3

 1.2 Landasan Hukum..... 4

 1.3 Maksud dan Tujuan..... 6

 1.4 Sistematika Penulisan..... 7

BAB II Eavaluasi Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 9
 Berkenaan.....

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai 9
 Dengan Triwulan II dan Renstra Perangkat Daerah.....

 2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat... 36

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah..... 38

BAB IV Penutup..... 62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap PD diharuskan untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai acuan perencanaan kegiatan PD untuk kurun waktu satu tahun. Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode tahun berjalan dalam triwulan akhir tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan secara langsung oleh Perangkat Daerah maupun yang ditempuh sebagai upaya mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Perubahan Renja PD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, Renstra PD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Semester I Tahun 2024 untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Perubahan Renja PD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Perubahan Renja PD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Perubahan Renja PD selaras dengan Renstra PD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Semester I menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra PD berdasarkan pelaksanaan Perubahan Renja PD tahun berjalan. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Perubahan Renja PD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam Perubahan Renja PD dan mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Perubahan Renja PD dibahas pada forum PD yang dikoordinasikan oleh Baperlitbang, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD, penyelarasan program dan kegiatan antar PD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD yang didukung dengan penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD. Perubahan Renja PD ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Baperlitbang yang selanjutnya Perubahan Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan.

Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal Tahun 2024 secara hirarki berpedoman pada perencanaan Pembangunan Daerah yang dimulai dari rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang dijabarkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dalam setiap tahunnya. RPJMD Kabupaten Kendal menjadi pedoman dalam pembuatan Renstra PD yang selanjutnya diderivasikan dalam Rencana Kerja PD setiap tahun dan Perubahan Renja PD dalam triwulan akhir tahun.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 20).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan bagi Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan pada tahun berkenaan;
- b. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menentukan lokasi kegiatan periode tahun berkenaan;
- c. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun indikator kinerja kegiatan tahun berkenaan;
- d. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam kelompok sasaran kegiatan periode tahun berkenaan;
- e. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan tahun berkenaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal Tahun 2024 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja PD, proses penyusunan Perubahan Renja PD, keterkaitan antara Perubahan Renja PD dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi /Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat Penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD (Perubahan RKPD tahun 2024).

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Evaluasi Renja PD Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

1. Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Dihasilkan.
2. Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Dihasilkan.
3. Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Dihasilkan.
4. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan.
5. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah.
6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran.
7. Penelaahan Usulan/Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi Lampiran Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2024.

BAB IV Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II dan Renstra Perangkat Daerah

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II.

Capaian IKU Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal adalah Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan, dengan Tingkat Realisasi Capaian 100%, berupa pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada secara tuntas dalam 1 tahun di Triwulan II Tahun 2024 dan Persentase penanganan kebakaran sesuai standar tingkat waktu tanggap (*respon time*) dengan tingkat realisasi capaian 85 %, berupa jumlah penanganan aduan kebakaran yang dilaksanakan sesuai waktu tanggap (*respon time*).

Faktor Pendukung IKU : sinergitas antara aparat keamanan dan intelijen daerah. Faktor Penghambat IKU : belum optimalnya pemahaman masyarakat dalam kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Satpolkar Kendal, yang meliputi persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan serta persentase penanganan kebakaran sesuai standar waktu tanggap (response time), didukung oleh beberapa faktor kunci. Sumber daya manusia yang kompeten, serta koordinasi lintas instansi menjadi faktor utama yang mendorong keberhasilan pencapaian target kinerja. Selain itu, ketersediaan kendaraan dan peralatan yang memadai mempercepat penanganan kebakaran. Namun, keterbatasan anggaran dan luasnya wilayah jangkauan, standar kelengkapan yang kurang memadai menjadi hambatan signifikan, terutama dalam menjaga intensitas patroli dan mempercepat respon di daerah terpencil. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan pada peraturan dan tindakan preventif kebakaran juga memperlambat pencapaian IKU yang optimal.

Secara singkat hasil Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :**
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Pagu anggaran : 27.500.000
 - Realisasi anggaran : 0
 - Realisasi anggaran : 0%
 - (%)
 - Indikator kinerja : Jumlah Dokumen Perencanaan capaian Perangkat Daerah yang disusun
 - Keluaran kegiatan
 - Target capaian : 3 Dokumen kegiatan
 - Realisasi capaian : 0 Dokumen kegiatan
 - Tingkat capaian : 0%
 - kinerja (%)
 - b. Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD
 - Pagu anggaran : 7.500.000
 - Realisasi anggaran : 0
 - Realisasi anggaran : 0%
 - (%)
 - Indikator kinerja : Jumlah Dokumen RKA SKPD yang capaian disusun
 - Keluaran kegiatan
 - Target capaian : 1 Dok kegiatan
 - Realisasi capaian : 0 Dok kegiatan
 - Tingkat capaian : 0%

- kinerja (%)
- c. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD
- Pagu anggaran : 7.500.000
- Realisasi anggaran : 0
- Realisasi anggaran : 0%
- (%)
- Indikator kinerja : Jumlah Dokumen Perubahan RKA
capaian SKPD yang disusun
- Keluaran kegiatan
- Target capaian : 1 Dok
- kegiatan
- Realisasi capaian : 0 Dok
- kegiatan
- Tingkat capaian : 0%
- kinerja (%)
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Pagu anggaran : 7.500.000
- Realisasi anggaran : 1.108.000
- Realisasi anggaran : 14,77%
- (%)
- Indikator kinerja : Jumlah Dokumen DPA SKPD yang
capaian disusun
- Keluaran kegiatan
- Target capaian : 1 Dok
- kegiatan
- Realisasi capaian : 0 Dok
- kegiatan
- Tingkat capaian : 0%
- kinerja (%)
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Pagu anggaran : 7.500.000
- Realisasi anggaran : 0
- Realisasi anggaran : 0%
- (%)
- Indikator kinerja : Jumlah Dokumen Perubahan DPA
capaian SKPD yang disusun
- Keluaran kegiatan
- Target capaian : 1 Dok
- kegiatan
- Realisasi capaian : 0 Dok
- kegiatan
- Tingkat capaian : 0%
- kinerja (%)
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Pagu anggaran : 45.000.000
- Realisasi anggaran : 1.531.600
- Realisasi anggaran : 0,34%
- (%)
- Indikator kinerja : Jumlah laporan capaian kinerja
capaian dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD yang disusun
- Keluaran kegiatan
- Target capaian : 4 Laporan
- kegiatan
- Realisasi capaian : 0 Laporan

- kegiatan
Tingkat capaian : 0%
kinerja (%)
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pagu anggaran : 11.983.282.546
Realisasi anggaran : 4.390.600.601
Realisasi anggaran : 36,63%
(%)
Indikator kinerja : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan
Keluaran kegiatan
Target capaian : 46 orang/bulan
kegiatan
Realisasi capaian : 46 orang/bulan
kegiatan
Tingkat capaian : 100%
kinerja (%)
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Pagu anggaran : 0
Realisasi anggaran : 0
Realisasi anggaran : 0
(%)
Indikator kinerja : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Keluaran kegiatan
Target capaian : 0 Dokumen
kegiatan
Realisasi capaian : 0 Dokumen
kegiatan
Tingkat capaian : 0
kinerja (%)
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Pagu anggaran : 33.000.000
Realisasi anggaran : 0
Realisasi anggaran : 0%
(%)
Indikator kinerja : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Keluaran kegiatan
Target capaian : 1 Laporan
kegiatan
Realisasi capaian : 0 Laporan
kegiatan
Tingkat capaian : 0%
kinerja (%)
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Pagu anggaran : 33.000.000

- Realisasi anggaran : 0
Realisasi anggaran : 0%
(%)

Indikator kinerja : Jumlah Laporan Keuangan
capaian Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD dan Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan

Keluaran kegiatan
Target capaian : 18 Laporan
kegiatan
Realisasi capaian : 9 Laporan
kegiatan
Tingkat capaian : 50%
kinerja (%)
3. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Pagu anggaran : 8.000.000
Realisasi anggaran : 0
Realisasi anggaran : 0%
(%)

Indikator kinerja : Jumlah Paket Pakaian Dinas
capaian Beserta Atribut Kelengkapan
Pakaian Dinas dan
Perlengkapannya

Keluaran kegiatan
Target capaian : 1 Paket
kegiatan
Realisasi capaian : 0 Paket
kegiatan
Tingkat capaian : 0%
kinerja (%)

b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pagu anggaran : 72.000.000
Realisasi anggaran : 0
Realisasi anggaran : 0%
(%)

Indikator kinerja : Jumlah Pegawai Berdasarkan
capaian Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan

Keluaran kegiatan
Target capaian : 4 orang
kegiatan
Realisasi capaian : 0 orang
kegiatan
Tingkat capaian : 0%
kinerja (%)

c. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Pagu anggaran : 275.000.000
Realisasi anggaran : 0
Realisasi anggaran : 0%
(%)

Indikator kinerja : Jumlah Orang yang Mengikuti
capaian Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan

Keluaran kegiatan

- Target capaian : 250 orang
kegiatan
- Realisasi capaian : 0 orang
kegiatan
- Tingkat capaian : 0%
kinerja (%)
- 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Pagu anggaran : 29.000.000
Realisasi anggaran : 6.717.500
Realisasi anggaran : 23,16%
(%)
- Indikator kinerja : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
- Keluaran kegiatan
- Target capaian : 4 Paket
kegiatan
- Realisasi capaian : 1 Paket
kegiatan
- Tingkat capaian : 25%
kinerja (%)
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Pagu anggaran : 48.550.000
Realisasi anggaran : 0
Realisasi anggaran : 0%
(%)
- Indikator kinerja : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
- Keluaran kegiatan
- Target capaian : 1 paket
kegiatan
- Realisasi capaian : 0 paket
kegiatan
- Tingkat capaian : 00%
kinerja (%)
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Pagu anggaran : 15.000.000
Realisasi anggaran : 0
Realisasi anggaran : 0%
(%)
- Indikator kinerja : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
- Keluaran kegiatan
- Target capaian : 6 Paket
kegiatan
- Realisasi capaian : 0 Paket
kegiatan
- Tingkat capaian : 0%
kinerja (%)
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Pagu anggaran : 96.000.000
Realisasi anggaran : 33.377.000

- Realisasi anggaran : 34,76%
(%)
- Indikator kinerja : Jumlah Paket Bahan Logistik
capaian Kantor yang Disediakan
- Keluaran kegiatan
- Target capaian : 12 Paket
kegiatan
- Realisasi capaian : 6 Paket
kegiatan
- Tingkat capaian : 50%
kinerja (%)
- e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Pagu anggaran : 96.000.000
- Realisasi anggaran : 36.265.200
- Realisasi anggaran : 37,77%
(%)
- Indikator kinerja : Jumlah Paket Barang Cetakan
capaian dan Penggandaan
yang Disediakan
- Keluaran kegiatan
- Target capaian : 12 Paket
kegiatan
- Realisasi capaian : 6 Paket
kegiatan
- Tingkat capaian : 50%
kinerja (%)
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Pagu anggaran : 0
- Realisasi anggaran : 0
- Realisasi anggaran : 0%
(%)
- Indikator kinerja : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
capaian dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan
- Keluaran kegiatan
- Target capaian : 0Dokumen
kegiatan
- Realisasi capaian : 0 Dokumen
kegiatan
- Tingkat capaian : 0%
kinerja (%)
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pagu anggaran : 1.038.500.000
- Realisasi anggaran : 307.603.400
- Realisasi anggaran : 29,61%
(%)
- Indikator kinerja : Jumlah Laporan Penyelenggaraan
capaian Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
- Keluaran kegiatan
- Target capaian : 180 Laporan
kegiatan
- Realisasi capaian : 90 Laporan
kegiatan

- Tingkat capaian : 50%
kinerja (%)
- h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Pagu anggaran : 90.000.000
Realisasi anggaran : 0
Realisasi anggaran : 0%
(%)
Indikator kinerja : Jumlah Dokumen Penatausahaan
capaian Arsip Dinamis
pada SKPD

Keluaran kegiatan
Target capaian : 5 Dokumen
kegiatan
Realisasi capaian : 0 Dokumen
kegiatan
Tingkat capaian : 0%
kinerja (%)
- 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pagu anggaran : 0
Realisasi anggaran : 0
Realisasi anggaran : 0%
(%)
Indikator kinerja : Jumlah Unit Kendaraan Dinas
capaian Operasional atau Lapangan yang
Disediakan pada SKPD

Keluaran kegiatan
Target capaian : 1 unit
kegiatan
Realisasi capaian : 0 unit
kegiatan
Tingkat capaian : 0%
kinerja (%)
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu anggaran : 5.000.000
Realisasi anggaran : 3.250.000
Realisasi anggaran : 65,00%
(%)
Indikator kinerja : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
capaian Surat Menyurat Perangko, Materai
dan Benda Pos Lainnya

Keluaran kegiatan
Target capaian : 4 Laporan
kegiatan
Realisasi capaian : 2 Laporan
kegiatan
Tingkat capaian : 50%
kinerja (%)
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pagu anggaran : 226.000.000
Realisasi anggaran : 112.240.189
Realisasi anggaran : 49,66%
(%)
Indikator kinerja : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

- | | |
|---------------------|---|
| capaian | Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |
| Keluaran kegiatan | |
| Target kegiatan | capaian : 12 Laporan |
| Realisasi kegiatan | capaian : 6 Laporan |
| Tingkat kinerja (%) | capaian : 50% |
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- | | |
|------------------------|---|
| Pagu anggaran | : 70.000.000 |
| Realisasi anggaran | : 17.420.000 |
| Realisasi anggaran (%) | : 24,88% |
| Indikator capaian | kinerja : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Pemeliharaan Alat Kantor |
| Keluaran kegiatan | |
| Target kegiatan | capaian : 6 Laporan |
| Realisasi kegiatan | capaian : 3 Laporan |
| Tingkat kinerja (%) | capaian : 50% |
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- | | |
|------------------------|--|
| Pagu anggaran | : 151.825.000 |
| Realisasi anggaran | : 35.916.592 |
| Realisasi anggaran (%) | : 23,65% |
| Indikator capaian | kinerja : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |
| Keluaran kegiatan | |
| Target kegiatan | capaian : 12 Laporan |
| Realisasi kegiatan | capaian : 6 Laporan |
| Tingkat kinerja (%) | capaian : 50% |
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- | | |
|------------------------|--|
| Pagu anggaran | : 300.000.000 |
| Realisasi anggaran | : 68.015.250 |
| Realisasi anggaran (%) | : 22,67% |
| Indikator capaian | kinerja : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya |
| Keluaran kegiatan | |
| Target kegiatan | capaian : 57 Unit |

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator capaian	kinerja : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
----------------------	---

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Realisasi anggaran : 0
Realisasi anggaran : 0%
(%)

Keluaran kegiatan	
Target	capaian : 1 unit
kegiatan	
Realisasi	capaian : 0 unit
kegiatan	
Tingkat	capaian : 0%
kinerja (%)	

1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota :

Pagu anggaran	:	10.000.000
Realisasi anggaran	:	0
Realisasi anggaran (%)	:	0%

Keluaran kegiatan

- Target capaian : 3 Dokumen
kegiatan
Realisasi capaian : 0 Dokumen
kegiatan
Tingkat capaian : 0%
kinerja (%)
- b. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
Pagu anggaran : 6.650.769.000
Realisasi anggaran : 1.395.451.674
Realisasi anggaran : 20,98%
(%)
Indikator kinerja : Jumlah Dokumen yang Memuat
capaian Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

Keluaran kegiatan
Target capaian : 12 Dokumen
kegiatan
Realisasi capaian : 6 Dokumen
kegiatan
Tingkat capaian : 50%
kinerja (%)
- c. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
Pagu anggaran : 5.000.000
Realisasi anggaran : 0
Realisasi anggaran : 0%
(%)
Indikator kinerja : Jumlah SDM Satuan Polisi
capaian Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Keluaran kegiatan
Target capaian : 100 orang
kegiatan
Realisasi capaian : 0 orang
kegiatan
Tingkat capaian : 0%
kinerja (%)
- d. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Pagu anggaran : 15.000.000
Realisasi anggaran : 1.600.000
Realisasi anggaran : 10,66%
(%)
Indikator kinerja : Jumlah Dokumen Hasil
capaian Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

Keluaran kegiatan
Target capaian : 4 Dokumen
kegiatan

- Realisasi capaian : 1 Dokumen kegiatan
Tingkat capaian : 25%
kinerja (%)
- e. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
Pagu anggaran : 5.000.000
Realisasi anggaran : 0
Realisasi anggaran : 0%
(%)
Indikator kinerja : Jumlah buku SOP dan buku profil capaian yang disusun per tahun
Keluaran kegiatan
Target capaian : 1 Dokumen kegiatan
Realisasi capaian : 0 Dokumen kegiatan
Tingkat capaian : 0%
kinerja (%)
- f. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
Pagu anggaran : 80.000.000
Realisasi anggaran : 14.100.000
Realisasi anggaran : 17,62%
(%)
Indikator kinerja : Jumlah Kasus Gangguan capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
Keluaran kegiatan
Target capaian : 96 Kasus kegiatan
Realisasi capaian : 19 Kasus kegiatan
Tingkat capaian : 19,79%
kinerja (%)
- g. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
Pagu anggaran : 70.000.000
Realisasi anggaran : 4.400.000
Realisasi anggaran : 6,28%
(%)
Indikator kinerja : Jumlah Kasus Gangguan capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan
Keluaran kegiatan

- Target capaian : 100 Kasus
kegiatan
- Realisasi capaian : 6 Kasus
kegiatan
- Tingkat capaian : 6 %
kinerja (%)
- h. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
- Pagu anggaran : 20.000.000
- Realisasi anggaran : 0
- Realisasi anggaran : 0%
(%)
- Indikator kinerja : Jumlah Laporan Penyediaan capaian Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani
- Keluaran kegiatan
- Target capaian : 5 Laporan
kegiatan
- Realisasi capaian : 0 Laporan
kegiatan
- Tingkat capaian : 0%
kinerja (%)
- i. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Pagu anggaran : 80.000.000
- Realisasi anggaran : 0
- Realisasi anggaran : 0%
(%)
- Indikator kinerja : Jumlah Sarana dan Prasarana capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia
- Keluaran kegiatan
- Target capaian : 8 Unit
kegiatan
- Realisasi capaian : 0 Unit
kegiatan
- Tingkat capaian : 0%
kinerja (%)
- 2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**
- a. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
- Pagu anggaran : 25.000.000
- Realisasi anggaran : 4.050.000
- Realisasi anggaran : 1,62%
(%)
- Indikator kinerja : Jumlah Laporan Hasil capaian Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- Keluaran kegiatan
- Target capaian : 70 Laporan
kegiatan

- Realisasi capaian : 1 Laporan kegiatan
 - Tingkat capaian : 1,42% kinerja (%)
- b. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Pagu anggaran : 500.000.000
 - Realisasi anggaran : 19.961.000
 - Realisasi anggaran : 3,99% (%)
 - Indikator kinerja : Jumlah Laporan Pelaksanaan capaian Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang Dapat Ditangani Sesuai SOP
 - Keluaran kegiatan
 - Target capaian : 125 Laporan kegiatan
 - Realisasi capaian : 5 Laporan kegiatan
 - Tingkat capaian : 4% kinerja (%)
 - Indikator kinerja : Jumlah Berkas Penyidikan capaian
 - Keluaran kegiatan
 - Target capaian : 15 Berkas kegiatan
 - Realisasi capaian : 0 Berkas kegiatan
 - Tingkat capaian : 0% kinerja (%)

3. **Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**

- a. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
 - Pagu anggaran : 55.000.000
 - Realisasi anggaran : 0
 - Realisasi anggaran : 0% (%)
 - Indikator kinerja : Jumlah Laporan Hasil capaian Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada
 - Keluaran kegiatan
 - Target capaian : 6 Laporan kegiatan
 - Realisasi capaian : 0 Laporan kegiatan
 - Tingkat capaian : 0% kinerja (%)

**III PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN
KEBAKARAN dan PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**

**1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran
dalam Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Pagu anggaran : 3.201440.000
Realisasi anggaran : 1.027.363.500
Realisasi anggaran : 32.09%
(%)
Indikator kinerja : Jumlah Laporan Hasil
capaian Pelaksanaan Kegiatan
Kesiapsiagaan Petugas Piket dan
Pemadaman Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/Kota

Keluaran kegiatan
Target capaian : 365 Laporan
kegiatan
Realisasi capaian : 182 Laporan
kegiatan
Tingkat capaian : 500%
kinerja (%)
- b. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan
Non Kebakaran
Pagu anggaran : 100.000.000
Realisasi anggaran : 31.511.000
Realisasi anggaran : 31,51%
(%)
Indikator kinerja : Jumlah Dokumen Hasil
capaian Pelaksanaan Kegiatan
Kesiapsiagaan Petugas Piket dan
Penyelamatan/Evakuasi Saat
Penanggulangan Kebakaran dan
Non Kebakaran

Keluaran kegiatan
Target capaian : 360 Dokumen
kegiatan
Realisasi capaian : 180 Dokumen
kegiatan
Tingkat capaian : 50%
kinerja (%)
- c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan,
Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
Pagu anggaran : 90.000.000
Realisasi anggaran : 67.068.950
Realisasi anggaran : 74,52%
(%)
Indikator kinerja : Jumlah Sarana dan Prasarana
capaian Untuk Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran dan
Alat Pelindung Diri yang Sah dan
Legal Sesuai Standar Teknis
Terkait Penanggulangan
Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

- Keluaran kegiatan
Target capaian : 30 unit
kegiatan
Realisasi capaian : 23 unit
kegiatan
Tingkat capaian : 76,66%
kinerja (%)
- d. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
Pagu anggaran : 20.000.000
Realisasi anggaran : 0
Realisasi anggaran : 0%
(%)
Indikator kinerja : Jumlah Aparatur Pemadam
capaian Kebakaran yang Memiliki
Sertifikasi Keterampilan Teknis
dan Analis Dalam Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran
- Keluaran kegiatan
Target capaian : 10 orang
kegiatan
Realisasi capaian : 0 orang
kegiatan
Tingkat capaian : 0%
kinerja (%)
- e. Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran
dan Penyelamatan (SKIK)
Pagu anggaran : 70.000.000
Realisasi anggaran : 1.980.000
Realisasi anggaran : 2,82%
(%)
Indikator kinerja : Jumlah Desa/Kelurahan yang
capaian Memiliki Sistem Komunikasi &
Infomasi Kebakaran dan
Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa
di Secara Perbaharui atau
Dimutakhirkan Secara Berkala
(Setiap Tahun), Berkelanjutan dan
Real Time yang Dimiliki Oleh
Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya
- Keluaran kegiatan
Target capaian : 1 Desa/Kelurahan
kegiatan
Realisasi capaian : 0 Desa/Kelurahan
kegiatan
Tingkat capaian : 0%
kinerja (%)
- f. Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah
Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam
Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran
dan Penyelamatan Non Kebakaran
Pagu anggaran : 10.000.000
Realisasi anggaran : 0
Realisasi anggaran : 0%
(%)
Indikator kinerja : Jumlah Dokumen Hasil
capaian Penyelenggaraan Kerja Sama dan

				Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran
	Keluaran kegiatan			
	Target	capaian	:	3 dok
	kegiatan			
	Realisasi	capaian	:	0 dok
	kegiatan			
	Tingkat	capaian	:	0%
	kinerja (%)			
2.	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			
a.	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			
	Pagu anggaran	:		10.000.000
	Realisasi anggaran	:		2.058.400
	Realisasi anggaran	:		20,05%
	(%)			
	Indikator	kinerja	:	Jumlah Dokumen yang Memuat
	capaian			Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
	Keluaran kegiatan			
	Target	capaian	:	25 dok
	kegiatan			
	Realisasi	capaian	:	5 dok
	kegiatan			
	Tingkat	capaian	:	20%
	kinerja (%)			
3.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			
a.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat			
	Pagu anggaran	:		1.069.632.555
	Realisasi anggaran	:		643.927.700
	Realisasi anggaran	:		60,20%
	(%)			
	Indikator	kinerja	:	Jumlah Warga Masyarakat yang
	capaian			Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya
	Keluaran kegiatan			
	Target	capaian	:	750 Orang
	kegiatan			
	Realisasi	capaian	:	450 Orang
	kegiatan			
	Tingkat	capaian	:	60,20%
	kinerja (%)			
b.	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran			
	Pagu anggaran	:		15.000.000
	Realisasi anggaran	:		6.000.000
	Realisasi anggaran	:		40%
	(%)			

Indikator kinerja : Jumlah Desa/Kelurahan yang
 capaian Terbetuk dan Terbina Relawan
 Pemadam Kebakaran pada
 Lingkup Sistem Ketahanan
 Kebakaran Lingkungan (SKKL)
 Setiap Tahunnya

Keluaran kegiatan
 Target capaian : 20 Desa/Kelurahan
 kegiatan
 Realisasi capaian : 8 Desa/Kelurahan
 kegiatan
 Tingkat capaian : 40%
 kinerja (%)

4. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi

- a. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
- Pagu anggaran : 100.000.000
 Realisasi anggaran : 51.910.060
 Realisasi anggaran : 51,91%
 (%)
- Indikator kinerja : Jumlah Dokumen yang Memuat
 capaian Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar
- Keluaran kegiatan
 Target capaian : 8 Dokumen
 kegiatan
 Realisasi capaian : 4 Dokumen
 kegiatan
 Tingkat capaian : 50%
 kinerja (%)
- b. Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi
- Pagu anggaran : 10.000.000
 Realisasi anggaran : 0
 Realisasi anggaran : 0%
 (%)
- Indikator kinerja : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan
 capaian Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal
- Keluaran kegiatan
 Target capaian : 2 Laporan
 kegiatan
 Realisasi cap keg : 0 Laporan
 Tingkat cap kinerja : 00%
 (%)

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1,05	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat								
1-05.0-00.0-00.03.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN								
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN dan KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Cakupan petugas Linmas di Kabupaten per RT	1,4	1,4	1,6	101%	1,4	1,4	100%

			% pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan	83%	83%	42%	51%	83%	83%	100%
2,01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkada/Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditindaklanjuti	335	100	33	33%	235	216	74%
01		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan CegahDini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	450	96	100	104%	96	354	101%
02		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan PenangananUnjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	335	100	33	33%	235	216	74%
04		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	48	12	6	50%	36	36	88%
05		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakattermasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	296	100	0	0%	196	196	66%
07		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	21	4	0	0%	17	17	81%

02		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.367	365	183	50%	2002	2002	92%
03		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1.080	360	491	136%	720	720	112%
06		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	88	30	0	0%	58	58	66%
07		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	24	10	0	0%	14	14	58%
08		Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	2	1	0	0%	1	1	50%
09		Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	9	3	0	0%	6	6	67%

			kinerja OPD							
2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	3	1	33%	9	7	67%
02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	4	1	0	0%	3	3	75%
03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	4	1	0	0%	3	3	75%
04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	4	1	0	0%	3	3	75%
05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	4	1	1	100%	3	3	100%
06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	4	2	50%	12	12	88%
2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	191	46	46	100%	145	145	100%
03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45	12	12	100%	33	33	100%
05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	1	0	0%	3	3	75%

07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72	18	9	50%	54	54	88%
2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kedisiplinan administrasi pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	228	1	0	0%	227	227	100%
09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	14	4	0	0%	10	10	71%
10		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	750	250	0	0%	500	500	67%
2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan rutin perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24	4	2	50%	20	20	92%
02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13	1	0	0%	12	12	92%
03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30	6	3	50%	24	24	90%
04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48	12	6	50%	36	36	88%
05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	48	12	6	50%	36	36	88%
06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.316	0	0	#DIV/0!	2.316	2316	100%
09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	552	180	90	50%	372	372	84%

10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15	5	2	40%	10	10	80%
2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	1	0	0%	1	1	50%
2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	24	4	2	50%	20	20	92%
02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	12	6	50%	36	36	88%
03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Pemeliharaan Alat Kantor	36	6	3	50%	30	30	92%
04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Pemeliharaan Alat Kantor	48	12	6	50%	36	36	88%
2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	222	57	30	53%	165	165	88%
02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	222	57	24	42%	165	165	85%
09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	1	0	0%	1	1	50%

Dari data sebagaimana tabel 2.1 tersebut di atas, Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan Dua Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal
 - a. Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 1 urusan, 3 program dengan 6 indikator kinerja program, dan 14 kegiatan dengan 14 indikator kinerja kegiatan.
 - b. Dari 3 indikator kinerja program, terdapat 6 indikator yang masih dalam proses pencapaian target.
 - c. Dari 14 indikator kinerja kegiatan, 14 masih dalam proses pencapaian target.
2. Perkiraan Capaian Target Perubahan Kedua Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Triwulan Dua Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal
 - a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 3 program dengan 6 indikator program dan 14 kegiatan dengan 14 indikator.
 - b. Dari 3 indikator kinerja program, terdapat 6 indikator yang masih dalam proses pencapaian target.
 - c. Dari 14 indikator kinerja kegiatan, terdapat 14 indikator yang masih dalam proses pencapaian target.

2.2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil telaahan terhadap tugas dan fungsi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal, permasalahan, akar masalah serta kebijakan – kebijakan yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan didapatkan formulasi yang mengangkat isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Menjadi isu penting yang harus dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu sebagai berikut :

1. Pengadaan SDM serta peningkatan kualitas & kompetensi SDM;
2. Optimalisasi koordinasi maupun kerja sama dengan OPD lain;
3. Peningkatan kualitas dan kompetensi PPNS melalui Pendidikan dan Pelatihan;
4. Memaksimalkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran;
5. Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang representatif;
6. Penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi pelayanan public;
7. Penerapan standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal;
8. Fasilitasi dan inovasi pelayanan di bidang trantibum dan kebakaran.
9. Pada Perubahan Anggaran Tahun 2024 untuk :
 - a. Pemenuhan honor bagi Linmas dan Petugas Pemadam Kebakaran
 - b. Peningkatan kapasitas dan kompetensi
 - c. Percepatan pelaksanaan kegiatan
 - d. Pengadaan Sarana dan prasarana
 - e. Inovasi pelayanan publik

Tingkat pencapaian Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan terdiri dari 3 Program dan 14 Kegiatan serta 48 Sub Kegiatan secara umum dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan

rencana dengan penyerapan anggaran sebesar 30,63% dan capaian fisik sebesar 31%.

Pada Perubahan Renja 2024, di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal tidak terdapat usulan program dan kegiatan masyarakat.

Tabel 2.2.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2024Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Satpol PP dan Damkar

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	N I H I L				

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 13 ayat (2), memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana tersebut mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Dengan demikian Renja yang disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPJMD.

Secara garis besar Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rancangan Akhir Perubahan RKPD 2024
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal

O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHI R PERIO DE RENS TRA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASAR AN
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Be rkurang (10- 12)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
							SEBEL UM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAH AN 2024				NASION AL	DAE RAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN								21.814.006.038,00	27.072.817.205,00	26.049.917.205,00	4.235.911.167,00				
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							21.814.006.038,00	27.072.817.205,00	26.049.917.205,00	4.235.911.167,00					
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							21.814.006.038,00	27.072.817.205,00	26.049.917.205,00	4.235.911.167,00					
1,	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD				100 %	100 %	8.630.487.855,00	14.860.975.650,00	17.229.965.650,00	461.169.251,00					

	1.05.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah				100 %	100 %	207.554.00 0,00	102.500.00 0,00	60.000.000, 00	147.554.000,0 0	-			Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transform asi Pelayana n Publik	-	OPD Satpolk ar
	1.05.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokum en	3 Dokum en	125.000.00 0,00	27.500.000, 00	25.000.000, 00	100.000.000,0 0	-	Kab. Kendal, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transform asi Pelayana n Publik	-	
	1.05.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				1 Dokum en	1 Dokum en	3.750.000,0 0	7.500.000,0 0	5.000.000,0 0	1.250.000,00	-	Kab. Kendal, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transform asi Pelayana n Publik	-	
	1.05.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokum en	1 Dokum en	3.354.000,0 0	7.500.000,0 0	5.000.000,0 0	1.646.000,00	-	Kab. Kendal, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transform asi Pelayana n Publik	-	
	1.05.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																

			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	3.250.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00	1.750.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	
	1.05.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	3.200.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00	1.800.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	
	1.05.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				4 Laporan	4 Laporan	69.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00	-54.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -	
	1.05.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat</i>				100 %	100 %	6.583.814.855,00	12.049.282.546,00	10.821.282.546,00	4.237.467.691,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	- -	OPD Satpolkar

			daerah												Pelayanan Publik		
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	46 Orang/bulan	6.258.838.855,00	11.983.282.546,00	10.683.282.546,00	4.424.443.691,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayana n Publik	- -	
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	310.000.000,00	0,00	0,00	- 310.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayana n Publik	- -	
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.976.000,00	33.000.000,00	15.000.000,00	10.024.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayana n Publik	- -	
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															

			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>				18 Laporan	18 Laporan	10.000.000,00	33.000.000,00	123.000.000,00	113.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase kedisiplinan administrasi pegawai</i>				100 %	100 %	162.048.000,00	355.000.000,00	483.000.000,00	320.952.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	OPD Satpolk ar
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				63 Paket	63 Paket	9.914.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-1.914.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				4 Orang	4 Orang	19.360.000,00	72.000.000,00	200.000.000,00	180.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	

	1.05.01.2.0 5.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan															
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				250 Orang	250 Orang	132.774.00 0,00	275.000.00 0,00	275.000.00 0,00	142.226.000,0 0	Kab. Kendal, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	-	- -	
	1.05.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase terpenuhinya kebutuhan rutin perkantoran</i>				100 %	100 %	559.827.00 0,00	1.413.050.0 00,00	2.226.627.0 00,00	1.666.800.000, 00			Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayana n Publik	- -	OPD Satpolk ar
	1.05.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	4 Paket	26.106.000, 00	29.000.000, 00	35.000.000, 00	8.894.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayana n Publik	- -	
	1.05.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	11.204.000, 00	48.550.000, 00	128.000.00 0,00	116.796.000,0 0	Kab. Kendal, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayana n Publik	- -	
	1.05.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	35.214.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	-15.214.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayana n Publik	-	
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	70.000.000,00	96.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayana n Publik	-	
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	52.000.000,00	96.000.000,00	100.000.000,00	48.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayana n Publik	-	
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				768 Dokumen	768 Dokumen	7.688.000,00	0,00	0,00	-7.688.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayana n Publik	-	
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															

			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				180 Laporan	180 Laporan	269.283.000,00	1.038.500.000,00	1.733.627.000,00	1.464.344.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhamkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				5 Dokumen	5 Dokumen	88.332.000,00	90.000.000,00	110.000.000,00	21.668.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhamkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase terpenuhinya kebutuhan rutin perkantoran</i>				100 %	100 %	249.170.000,00	0,00	1.832.738.000,00	1.583.568.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhamkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	OPD Satpolkar
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	51.170.000,00	0,00	1.832.738.000,00	1.781.568.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhamkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	198.000.000,00	0,00	0,00	- 198.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhamkam Dan Transformasi	-	-

													Kel/De sa		asi Pelayana n Publik		
	1.05.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran</i>				100 %	100 %	425.624.00 0,00	452.825.00 0,00	568.000.00 0,00	142.376.000,0 0			Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transform asi Pelayana n Publik	- -	OPD Satpolk ar
	1.05.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				4 Lapora n	4 Lapora n	6.124.000,0 0	5.000.000,0 0	5.000.000,0 0	-1.124.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transform asi Pelayana n Publik	- -	
	1.05.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Lapora n	12 Lapora n	226.000.00 0,00	226.000.00 0,00	313.000.00 0,00	87.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transform asi Pelayana n Publik	- -	
	1.05.01.2.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				6 Lapora n	6 Lapora n	53.500.000, 00	70.000.000, 00	80.000.000, 00	26.500.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transform asi Pelayana n Publik	- -	

	1.05.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Lapora n	12 Lapora n	140.000.00 0,00	151.825.00 0,00	170.000.00 0,00	30.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transform asi Pelayana n Publik	- -	
	1.05.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran				100 %	100 %	442.450.00 0,00	488.318.10 4,00	1.238.318.1 04,00	795.868.104,0 0			Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transform asi Pelayana n Publik	- -	OPD Satpolk ar
	1.05.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				57 Unit	57 Unit	198.450.00 0,00	300.000.00 0,00	900.000.00 0,00	701.550.000,0 0	Kab. Kendal, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transform asi Pelayana n Publik	- -	
	1.05.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				57 Unit	57 Unit	44.000.000. 00	50.000.000. 00	50.000.000. 00	6.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transform asi Pelayana n Publik	- -	
	1.05.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															

			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	138.318.104,00	288.318.104,00	88.318.104,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	
2,	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				100 %	-	7.970.418.183,00	7.515.769.000,00	4.786.779.000,00	-4.496.107.729,00					
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				100Kejadian	-	7.586.418.183,00	6.935.769.000,00	4.246.779.000,00	-3.339.639.183,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	--	Masyarakat
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	-85.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan	- -	

			Tingkat Kabupaten/Kota												an dan Pembera ntasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelud upan			
1.05.02.2.0 1.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																	
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokum en	12 Dokum en	6.905.544.3 79,00	6.650.769.0 00,00	3.654.779.0 00,00	3.250.765.379, 00	-	Kab. Kendal, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperk uat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperk uat Pencegah an dan Pembera ntasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelud upan	- -	
1.05.02.2.0 1.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																	
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				100 Orang	100 Orang	64.195.000, 00	5.000.000,0 0	12.000.000, 00	-52.195.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperk uat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperk uat Pencegah an dan Pembera ntasan	- -		

																	Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelud upan		
1.05.02.2.0 1.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				4 Dokum en	4 Dokum en	50.781.454, 00	15.000.000, 00	20.000.000, 00	-30.781.454,00	Kab. Kendal, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperk uat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperk uat Pencegah an dan Pembera ntasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelud upan	- -			
1.05.02.2.0 1.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1 Dokum en	1 Dokum en	15.000.000, 00	5.000.000,0 0	55.000.000, 00	40.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperk uat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperk uat Pencegah an dan Pembera ntasan	- -			

															Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelud upan		
	1.05.02.2.0 1.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan															
			<i>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</i>				96 laporan	96 lapora n	200.000.00 0,00	80.000.000, 00	90.000.000, 00	- 110.000.000,0 0	Kab. Kendal, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperk uat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperk uat Pencegah an dan Pembera ntasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelud upan	- -	
	1.05.02.2.0 1.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa															
			<i>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan</i>				100 Lapora n	100 Lapora n	147.750.00 0,00	70.000.000, 00	80.000.000, 00	-67.750.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperk uat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperk uat Pencegah an dan Pembera ntasan	- -	

			<i>Massa yang Dilakukan Penindakan</i>												Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan		
	1.05.02.2.0 1.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah															
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani</i>				5 Laporan	5 Laporan	15.375.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	4.625.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	--	
	1.05.02.2.0 1.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum															
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia</i>				8 Unit	8 Unit	87.772.350,00	80.000.000,00	300.000.000,00	212.227.650,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	- -	

															ntasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelud upan		
	1.05.02.2.0 2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kot a dan Peraturan Bupati/Wali Kota	<i>jumlah perda/perkada yang diterbitkan</i>				6 Jenis	6 Jenis	258.000.00 0,00	525.000.00 0,00	535.000.00 0,00	277.000.000,0 0			-	- -	Masyar akat
	1.05.02.2.0 2.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah															
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP</i>				125 Lapora n	125 Lapora n	150.000.00 0,00	500.000.00 0,00	500.000.00 0,00	350.000.000,0 0	Kab. Kendal, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DBH CUKAI HASIL TEMBAK AU (CHT)	-	- -	
	1.05.02.2.0 2.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>				70 Lapora n	70 Lapora n	108.000.00 0,00	25.000.000, 00	35.000.000, 00	-73.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transform asi Pelayana n Publik	- -	

	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS yang dibina				6 Orang	6 Orang	126.000.000,00	55.000.000,00	5.000.000,00	121.000.000,00	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	ASN Satpolkar
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				6 Laporan	6 Laporan	126.000.000,00	55.000.000,00	5.000.000,00	121.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		
3,	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase penanganan kebakaran sesuai standar tingkat waktu tanggap (respon time)				100 %	100 %	5.213.100.000,00	4.696.072.555,00	4.033.172.555,00	323.925.000,00	-					
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				100 %	100 %	4.713.450.000,00	3.491.440.000,00	2.765.540.000,00	1.947.910.000,00	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Masyarakat
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																

			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				365 Laporan	365 Laporan	4.206.050.000,00	3.201.440.000,00	1.583.040.000,00	- 2.623.010.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	
	1.05.04.2.0 1.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran															
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				360 Dokumen	360 Dokumen	250.000.000,00	100.000.000,00	180.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	
	1.05.04.2.0 1.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran															
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	
	1.05.04.2.0 1.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)															

			Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya				1 Desa/Kelurahan	1 Desa/Kelurahan	56.760.000,00	70.000.000,00	85.000.000,00	28.240.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	--	
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				30 Unit	30 Unit	85.640.000,00	90.000.000,00	870.000.000,00	784.360.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran															

[illegible]

			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				750 Orang	750 Orang	181.500.000,00	1.069.632.555,00	1.069.632.555,00	888.132.555,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN BIDANG PENDIDIKAN	-	-		
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran																
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				20 Desa/Kelurahan	20 Desa/Kelurahan	100.000.000,00	15.000.000,00	22.000.000,00	-78.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-	
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang diselenggarakan				100 %	100 %	170.590.000,00	110.000.000,00	159.000.000,00	-11.590.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-	asyarakat
	1.05.04.2.05.0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																

			Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penye- lamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar				8 Dokum en	8 Dokum en	95.590.000, 00	100.000.00 0,00	139.000.00 0,00	43.410.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transform asi Pelayana n Publik	- -	
	1.05.04.2.0 5.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi															
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penye- lamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal				2 Lapora n	2 Lapora n	75.000.000, 00	10.000.000, 00	20.000.000, 00	-55.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transform asi Pelayana n Publik	- -	
	JUMLAH								21.814.006. 038,00	27.072.817. 205,00	26.049.917. 205,00	255.613.053.6 04,00					

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal Tahun 2024 ini merupakan bagian integral dari perencanaan tahunan yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun 2024. Dokumen ini disusun sebagai kelanjutan dari program-program sebelumnya, memberikan arah serta pedoman yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Melalui penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024, diharapkan dapat memfasilitasi proses perencanaan anggaran yang lebih tepat sasaran, serta memastikan kegiatan yang diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan aktual. Beberapa poin penting yang perlu menjadi perhatian utama, antara lain:

1. Dukungan Terhadap RPJMD

Program dan kegiatan yang direncanakan harus mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal.

2. Kesesuaian dengan Renstra

Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal. Setiap program dan kegiatan harus sejalan dengan target-target strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut.

3. Acuan Pelaksanaan Kegiatan

Dokumen ini juga berfungsi sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran pada tahun 2024, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional.

Dalam menyikapi tantangan yang ada, terutama terkait dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Kendal, Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan landasan yang lebih kuat dalam penetapan prioritas pembangunan. Dokumen ini juga diharapkan mampu mewujudkan koordinasi, integrasi, dan sinergi yang lebih baik antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan perangkat daerah lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

Sebagai langkah tindak lanjut, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal akan terus berkomitmen untuk melakukan peningkatan

kualitas internal. Hal ini bertujuan agar Satpol PP dan Pemadam Kebakaran semakin mampu memberikan pelayanan yang profesional, responsif, dan berkualitas kepada masyarakat.

Dengan demikian, Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal Tahun 2024 ini menjadi landasan yang kuat dalam mengarahkan pelaksanaan tugas ke arah yang lebih terarah, sinergis, dan berkelanjutan.

Kendal, 2024



KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KENDAL,

Drs. BAMBANG DJOKO PITONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19690323 199003 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KECAMATAN PEGANDON
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KECAMATAN PEGANDON
KABUPATEN KENDAL
Jl. Raya Tegorejo-Pegandon Telp. (0294) 381554**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perubahan OPD) diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tidak dapat terakomodir dalam APBD Penetapan Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perubahan Renja Dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 20).

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan ini diharapkan dapat benar-benar menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif kegiatan Kecamatan Pegandon pada perubahan APBD Tahun 2024.

Kendal, 2024

CAMAT PEGANDON
JUNAEDI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19790216 201101 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Pegandon merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Kecamatan Pegandon memuat perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah.

Mendasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Perubahan RKPD Kabupaten Kendal telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penyelarasan dan penyempurnaan sejak tahap penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada arah kebijakan pembangunan

tahun 2024, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal pada tahun 2024 adalah “**Kendal Smart City**” yang diprioritaskan pada “Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal *Smart City*”. Arah kebijakan ini dengan focus peningkatan kemantapan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan *clean* dan *Good Governances*, penguatan *Smart City* yang difokuskan pada *Smart Government*, *Smart Education*, *Smart Health*, *Smart Economy* dan *Smart Transportation*.

Pembangunan daerah yang menerapkan perencanaan yang SMART dan prinsip Money Follow Program Priority, dan Money Follow Result, diharapkan mampu untuk lebih mendorong potensi dan keunggulan daerah menuju kemandirian ekonomi daerah. Mendasarkan pada isu global, nasional dan regional.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 20).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja OPD adalah sebagai berikut:

1. Maksud
 - a. Menjadi pedoman penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS, serta Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pegandon untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2024.
 - b. Memberikan acuan bagi OPD dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun berjalan;
 - c. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun berjalan;
 - d. Memberikan acuan bagi OPD dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun berjalan;

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal Tahun 2024 adalah untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi makro sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Memberikan acuan dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan pada perubahan APBD Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang penyusunan Rencana Kerja, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

BAB III RENCANA KERJA & PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menampilkan usulan rencana kegiatan dan program serta pagu indikatif yang akan dilaksanakan pada anggaran perubahan tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II dan Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Pegandon sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 secara umum selaras dengan Rencana Kerja Kecamatan Pegandon tahun 2024, namun terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran dan SE yang berlaku pada tahun bersangkutan. Untuk kegiatan-kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun 2024, diusulkan kembali pada perubahan anggaran tahun 2024 dan tahun 2025.

Adapun kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun 2024 dan diusulkan kembali pada Rencana Kerja tahun 2025 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b) Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - Sub Kegiatan : Pengadaan Bangunan Gedung Lainnya.
 - c) Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel; dan
 - Sub Kegiatan : Pemeliharaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pegandon Tahun 2024 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Adapun review hasil evaluasi pelaksanaan Renja

Kecamatan Pegandon sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Realisasi Program/ kegiatan/ sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang telah ditetapkan

Program/ kegiatan yang memenuhi dan/ atau melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang telah ditetapkan adalah :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang meliputi sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, (Sub Kegiatan dilaksanakan karena berisi makanan dan minuman rapat dan perjalanan dinas luar daerah).

b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Sub Kegiatan dilaksanakan pada TW III);

c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang meliputi sub kegiatan :

- Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, tidak tercapai karena sub kegiatan termasuk Point Point yang Masuk dalam SE Penyusunan RKA 2024 (sub kegiatan tidak dilaksanakan);

2) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut:

- Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (sub kegiatan dilaksanakan pada TW III);
- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

- 3) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan target Kinerja yang dijabarkan dalam sub kegiatan
 - Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional (sub kegiatan dilaksanakan pada TW III);
 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (sub kegiatan tidak dilaksanakan);
 - 4) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Indikator Kinerja yang dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (sub kegiatan dilaksanakan pada TW III);
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa(sub kegiatan dilaksanakan pada TW III);
2. Realisasi Program/ kegiatan yang memenuhi target dan/atau melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang telah ditetapkan
- Program/ kegiatan yang memenuhi dan/ atau melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang telah ditetapkan adalah :
- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang meliputi sub kegiatan:
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik ;

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2) Program Penyelenggaraan pemerintahan Dan Pelayanan Publik.
- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat sub kegiatan sebagai berikut:
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
- Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
- 4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah:
 - Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah:
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- 3. Realisasi Program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang telah ditetapkan Program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang telah ditetapkan nihil.
- 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, tercapainya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan
 - a. Faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target kegiatan antara lain :
 - Adanya Surat Edaran Pembatasan Dalam Penyusunan RKA seluruh Perangkat Daerah se- Kabupaten Kendal;
 - Terjadi pergeseran rencana pelaksanaan kegiatan ke triwulan IV tahun 2024;
 - b. Faktor yang mendukung tercapainya kegiatan karena adanya komitmen semua pihak untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, sebagai bagian untuk pencapaian perjanjian kinerja perangkat daerah.
 - c. Faktor yang menjadi penyebab melebihinya target kinerja program/ kegiatan adalah nihil
- 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
 - a. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah secara umum mencapai target yang telah ditetapkan, meskipun demikian guna

meningkatkan pelayanan Kecamatan Pegandon, perlu ditingkatkan pelaksanaan kegiatan yang langsung mendukung implementasi e-government, bersentuhan dengan kebutuhan layanan kepada masyarakat.

6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor penghambat adalah dengan perencanaan dan penganggaran yang mendukung percepatan Pelayanan Kecamatan Pegandon antara lain :

- a) pengajuan penambahan kekurangan anggaran pada perubahan RKPD untuk kegiatan-kegiatan yang kurang anggaran pada penetapan anggaran;
- b) pergeseran anggaran antar kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan perubahan kebijakan/ prioritas.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2024 Kecamatan Pegandon, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Analisis IKU Kecamatan Pegandon

Faktor pendukung tercapainya nilai SAKIP ada beberapa faktor yaitu :

- a. Komitmen Pimpinan Kunci Keberhasilan SAKIP
- b. Adanya koordinasi yang melibatkan semua kepala seksi, kepala subbagian dan aparatur Kecamatan dalam hal penataan administrasi perkantoran
- c. Manajemen kinerja dalam mendukung efektivitas

Faktor penghambat tercapainya nilai SAKIP ada beberapa faktor yaitu :

- a. Keterbatasan peralatan dan fasilitas kantor pendukung pelaksanaan pekerjaan.
- b. Data dan dokumen pendukung perencanaan yang belum memadai.
- c. Regulasi tentang perencanaan yg selalu mengalami perubahan.

Faktor pendukung tercapainya nilai IKM ada beberapa faktor yaitu :

- a. Komitmen Pimpinan Kunci Keberhasilan tercapainya Nilai IKM
- b. Kecepatan dalam memproses permintaan atau penyelesaian layanan, serta efisiensi dalam penyampaian hasil.
- c. Kepastian bahwa layanan akan diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan konsistensi dalam penerapan layanan.

Faktor penghambat tercapainya nilai IKM ada beberapa faktor yaitu :

- a. Keterbatasan peralatan dan fasilitas kantor pendukung pelaksanaan pekerjaan.
- b. Kurang informatif; informasi kurang tersebar luas kepada masyarakat
- c. Tanpa tindakan perbaikan yang jelas, masyarakat mungkin merasa bahwa survei tidak memberikan dampak yang nyata.

Kecamatan Pegandon Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II, dari alokasi anggaran sebesar Rp.2.673.626.669,00,- (Dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan untuk realisasi pelaksanaan program dan kegiatan telah menyerap Anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar Rp.1.146.196.566,00,- (Satu milyar seratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) atau dengan penyerapan anggaran 42,87%. Capaian target kinerja dan keuangan Kecamatan Pegandon selama Triwulan II masih belum menampakkan kinerja yang maksimal hal ini dikarenakan ada beberapa faktor penghambat.

Ada Program/Kegiatan yang Realisasinya tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran sesuai yang direncanakan. Tapi ada juga yang memenuhi bahkan melebihi, seperti yang diuraikan dibawah ini sekaligus Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, kemudian Implikasi yang timbul terhadap target capaian program

Renstra Perangkat Daerah serta Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun gambaran lebih lengkap mengenai realisasi pencapaian kinerja Kecamatan Pegandon Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II, berdasarkan Evaluasi Hasil Renja OPD Kecamatan Pegandon Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Indikator Kinerja Prosentase unit kerja yang terlayani dengan target kinerja 100%, realisasi kinerja 44,12 % yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Target Kinerja 4 Dokumen dengan alokasi anggaran Penetapan sebesar Rp.6.080.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp.0,- atau 0%

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yaitu terbayarnya gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN, Target Kinerja jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 16 Orang/Bulan dengan alokasi anggaran penetapan sebesar Rp. 2.079.701.944,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp.976.038.503,- atau 46,93 %.

- c. Administrasi Umum

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik target kinerja 12 paket dengan alokasi anggaran penetapan sebesar Rp.3.864.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp.0,- atau 0%.

- Penyediaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor indikator kinerja Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dan target kinerja 12

paket dengan alokasi anggaran penetapan sebesar Rp.20.489.725,-. dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 7.557.100,- atau 36,88 %.

- Penyediaan Bahan Logistik

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik target kinerja Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dan target kinerja 12 paket dengan alokasi anggaran penetapan sebesar Rp. 24.300.000,-. dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 1.095.000,- atau 4,51 %.

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik target kinerja Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dan target kinerja 12 dokumen dengan alokasi anggaran penetapan sebesar Rp. 450.000,-. dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 0,- atau 0 %.

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, indikator kinerja Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dan target kinerja 12 Laporan dengan alokasi anggaran penetapan Rp. 98.920.000,-. dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 32.733.548,- atau 33,09%.

- Penatausahaan Arsip Dinamis

Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis indikator kinerja Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD target kinerja 4 dokumen dengan alokasi anggaran penetapan sebesar Rp.4.756.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp.1.300.000,- atau 27,33%

- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Anggaran

- Pengadaan Gedung Bangunan Kantor

Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Bangunan Kantor indicator kinerja dan target kinerja 1 unit dengan alokasi anggaran penetapan sebesar Rp. 10.000.000,-. dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 0,- sebesar 0 %

- Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

Sub Kegiatan pengadaan Peralatan Mesin Lainnya indikator kinerja Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan target kinerja 3 unit dengan alokasi anggaran penetapan sebesar Rp. 7.100.000,-. dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 7.100.000,- atau 100%

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat indicator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dan target kinerja 12 laporan dengan alokasi anggaran penetapan sebesar Rp.3.600.000,-. dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp.800.000,- atau 22.22%.

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Indikator Kinerja Jumlah bulan kebutuhan layanan listrik, telepon, air dan hosting/internet, dengan target kinerja adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Target Kinerja 12 Laporan dengan anggaran penetapan Rp. 42.415.000,-. dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 12.307.223,- atau 29.02%

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan target kinerja 12 laporan dengan alokasi anggaran penetapan sebesar Rp. 92.770.000,-. dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 39.678.484,- atau 42.77 %.

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Kinerja adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Target Kinerja 12 Laporan dengan anggaran penetapan Rp. 4.200.000,-. Adapun realisasi kegiatan 0% dan keuangannya mencapai Rp. 0,- sebesar 0%.

f. Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Indikator Kinerja adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Target Kinerja 16 Unit dengan anggaran penetapan sebesar Rp.30.800.000,-. dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 3.453.500,- atau sebesar 11.21%

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Kinerja adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Target Kinerja 4 unit dengan anggaran penetapan Rp.8.300.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 3.453.500,- atau 11.21%

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Kinerja adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Target Kinerja 1 unit dengan anggaran penetapan Rp. 17.520.000,-. dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp.0,- atau 0%.

2) Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik Indikator Kinerja Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan Kecamatan dengan target kinerja 100%, realisasi kinerja 98,14% yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan indikator kinerja Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan alokasi anggaran penetapan sebesar

Rp.6.640.000,-. dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp.6.340.000,- atau 98.14%

- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Indikator Kinerja Prosentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD dengan target kinerja 100%, realisasi kinerja 62,78% yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Kinerja adalah Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Target Kinerja 12 Lembaga dengan anggaran penetapan Rp. 10.130.000,-. dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 9.230.000,- atau 91.12 %.

- b. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja kecamatan

Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja kecamatan indicator kinerja Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan target kinerja 12 dokumen dengan alokasi anggaran penetapan sebesar Rp.18.700.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 10.500.000 atau 56.15 %.

- a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Kinerja adalah Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Target Kinerja 12 Laporan dengan anggaran penetapan Rp. 7.060.000,-. dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Rp.2.800.000,- sebesar 39.66 %

- 4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Indikator kinerja prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani dengan target kinerja 100%, realisasi capaian kinerja 28,99% yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan, Indikator Kinerja adalah Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Target Kinerja 1 Laporan dengan anggaran penetapan Rp.9.180.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 0,- atau 0%.
 - b. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, dengan alokasi anggaran Rp. 5.000.000,-
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Pencapaian kinerja kegiatan ini Indikator Kinerja adalah Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Target Kinerja 12 Laporan dengan anggaran penetapan Rp.95.400.000,-. dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Rp.31.763.208,- atau 49.62 %
- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Indikator Kinerja Prosentase kasus konflik yang di tangani dengan target kinerja 100%, realisasi capaian kinerja 14,72% yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator kinerja adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Target Kinerja 75 Orang dengan anggaran penetapan Rp. 7.680.000,-. dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Rp.0,- atau 0 %

- b. Sub Kegiatan Penanganan kasus konflik sosial indicator kinerja Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, indicator kinerja Jumlah target kinerja 12 laporan dengan Alokasi anggaran penetapan sebesar Rp. 3.300.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Rp.0,- atau 0 %
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan indikator kinerja Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dan target kinerja 12 dokumen dengan alokasi anggaran Rp.6.000.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Rp.2.500.000 atau 41,67%
- 6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Kinerja Prosentase desa maju dengan target kinerja 100%, realisasi capaian kinerja 0% yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa indkator kinerja Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa dan target kinerja 12 dokumen dengan alokasi anggaran penetapan Rp.40.300.000,-, dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Rp.0,- atau 0%
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa indikaotr kinerja Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desadan target kinerja 12 dokumen dengan alokasi anggaran penetapan sebesar Rp9.600.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Rp.0,- atau 0%

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Pernagkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dapat dilihat pada Tabel T-C.29 berikut ini :

b. Tabel T-C.29.

c. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Kegiatan Tahun 2024				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sampai TW II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(8/4)
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG							
	0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100	100	50	50,00%	100	100%
	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang disusun	4	4	2	50,00%	4	100%
	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun						
	01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	16	16	7	50,00%	16	100%
	01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor	100	100	50	50,00%	100	100%

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Kegiatan Tahun 2024				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sampai TW II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(8/4)
	01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	6	50%	12	100%
	01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	5	41,66%	12	100%
	01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	5	41,66%	12	100%
	01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	5	41,66%	12	100%
	01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	4	4	1	25%	4	100%
	01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset yang diadakan						
	01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	3	3	100%	3	100%
	01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Dokumen DED Perencanaan Bangunan	1	1	0	0%	1	100%

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Kegiatan Tahun 2024				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sampai TW II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(8/4)
			Gedung Rumah Dinas						
	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor						
	01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	12	12	4	33,3%	12	100%
	01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	12	5	41,6%	12	100%
	01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	5	41,6%	12	100%
	01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	0	0,00%	12	100%
	01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah asset yang dipelihara tiap Bulan						

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Kegiatan Tahun 2024				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sampai TW II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(8/4)	
	01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas yang dipelihara dan Jumlah unit kendaraan dinas yang pajaknya harus dibayar (Unit)	16	16	7	43,75%	16	100%
	01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4	4	2	50%	4	100%
	01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/ yang Dipelihara (Unit)	1	1	0	0,00%	1	100%
	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100	100	100	100	100	100%
	02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	12	6	50%	12	100%
	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat yang diakomudir dalam musrenbang	100	100	0	0	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sampai TW II	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(8/4)
	03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah koordinasi yang dilaksanakan					
	03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang (Desa)	12	12	100%	12	100%
	03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	12	12	50%	12	100%
	03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	6	50%	12	100%
	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100	100	0	100	100%
	04.2.02	Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	jumlah koordinasi yang dilaksanakan					

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Kegiatan Tahun 2024				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sampai TW II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(8/4)
	04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	1	50%	2	100%
	04.2.01.02	Harmonisasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Msyarakat	1	0	0	0%	1	100%
	04.02.02	KoordinasiPenerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan KoordinasiPenerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Kegiatan Tahun 2024				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sampai TW II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(8/4)	
	04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (laporan)	12	12	4	33.3%	12	100%
	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase kegiatan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100	100	0	0	100	100%
	05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	12	12				
	05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional	75	75	0	0	75	100%
	05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Perundang Undangan	Jumlah Laporan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Perundang Undangan yang ditangani	12	12	0	0	12	100%

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Kegiatan Tahun 2024				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sampai TW II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(8/4)
	05.2.01.08	Prlaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan dikecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	12	12	3	25%	12	100%
	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa tertib administrasi	100	100	0	0,00%	100	0%
	06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	12	12		0,00%	12	100%
	06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	12	6	50%	12	100%
	06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	12	0	0	0,00%	12	100%

2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 tidak memasukkan usulan dari masyarakat yang disampaikan lewat kegiatan Musrenbangcam, karena program/kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan bersifat rutin dan tugas pokok yang dilakukan bersifat koordinatif dan pembinaan. Sedangkan usulan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat bersifat fisik.

Usulan program/ kegiatan dari masyarakat merupakan hasil aspirasi dalam forum musrenbang dengan memperhatikan tugas dan fungsi, rencana strategis perangkat daerah. Serta isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut apabila ada, dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun Perubahan renja Kecamatan yang nantinya dibahas dalam forum perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Baperlitbang.

Dalam Menyusun Usulan Perubahan Renja Kecamatan Pegandon tidak mendapat usulan aspirasi dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD untuk tahun anggaran 2024.

Usulan yang berasal dari masyarakat tersebut selanjutnya ditampung dalam Daftar Usulan Prioritas Kegiatan yang kemudian disampaikan dalam Musrenbangkab. Program/kegiatan yang berasal dari masyarakat tersebut diperjuangkan dan dikawal oleh Tim Kecamatan agar masuk dalam program/kegiatan prioritas di OPD teknis terkait yang ada di Kabupaten Kendal.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan sebagai penjabaran misi yang pertama seperti tersebut diatas, maka tujuan yang ditetapkan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Pegandon pada tahun 2024 yaitu untuk mengacu pada arah kebijakan pembangunan tahun 2024, Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2024 **“Kendal Smart City”** yang diprioritaskan pada “Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal *Smart City*”. Arah kebijakan ini dengan focus peningkatan kemantapan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan *clean* dan *Good Governances*, penguatan *Smart City* yang difokuskan pada *Smart Government, Smart Education, Smart Health, Smart Economy* dan *Smart Transportation*.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka Rencana Kerja dan Pendanaan yang diusulkan pada Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pegandon Tahun 2024 terdiri dari 6 program dan 12 kegiatan, dengan nominal anggaran penetapan sebesar Rp. 2.673.626.669,00,- berkurang Rp. 140.000.000,-, sehingga menjadi Rp. 2.533.626.669,00,-. Adapun program/kegiatan yang diusulkan Perubahan APBD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp. 6.080.000,- menjadi 6.080.000,-
 - b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 2.079.701.944,00,- berkurang Rp. 190.000.000,- menjadi Rp. 1.889.701.944,00,- dilakukan perhitungan ulang sesuai jumlah pegawai dan efisiensi anggaran.
 - c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran penetapan sebesar Rp.3.864.000,-

- berkurang Rp. 263.200,- menjadi Rp.3.600.800,- berpindah pada belanja fotocopy
- d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan Anggaran Penetapan sebesar Rp.20.489.725,- bertambah Rp. 1.504.200,- menjadi Rp.22.002.925,-; untuk memenuhi anggaran Atk Kantor yang penyediaannya tinggal sedikit.
 - e. Penyediaan Logistik Kantor, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 24.300.000,- bertambah Rp.1.200.000,- menjadi Rp. 25.500.000,-. Untuk memenuhi kebutuhan belanja kebutuhan logistic kantor yang penyediaanya tinggal sedikit.
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran penetapan Rp.450.000,- berkurang Rp.450.000 menjadi Rp.0,- dikarenakan tidak dilakukan belanja bahan bacaan
 - g. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 98.920.000,- bertambah Rp. 59.699.000,- menjadi Rp. 158.619.000,-; bertambah pada anggaran bantuan transport kegiatan dan Makan Minuman Rapat.
 - h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan anggaran penetapan Rp4.756.000,- berkurang Rp.2.400.000,- Menjadi Rp. 2.356.000,- berkurang karena sosialisasi penataan arsip tidak dilaksanakan
 - i. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya , dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 7.100.000- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.
 - j. Pengadaan Gedung kantor dan bangunan lainnya , dengan anggaran penetapan sebesar Rp.10.000.000- berkurang Rp.10.000.000,- menjadi Rp.0,- berkurang karena belanja dokumen DED rumah dinas tidak dilaksanakan
 - k. Penyediaan jasa surat menyurat. Dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 3.600.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.
 - l. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 42.415000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.

- m. Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 92.770.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.
 - n. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran penetapan sebesar Rp4.200.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.
 - o. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, anggaran Penetapan sebesar Rp30.800.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.
 - p. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, anggaran Penetapan sebesar Rp.8.300.000,- bertambah Rp.3.650.000,- Rp.11.950.000,- untuk pemeliharaan meubel kantor Kecamatan Pegandon
 - q. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, anggaran Penetapan sebesar Rp. 17.520.000,- bertambah Rp.7.200.000,- Rp. 24.720.000.- untuk pemeliharaan pagar Kecamatan Pegandon
- 2) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMRINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Yang dijabarkan dalam subkegiatan:
- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan, anggaran penetapan sebesar Rp. 6.460.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.
- 2) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Yang dijabarkan dalam subkegiatan:
- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa , anggaran penetapan RP. 10.130.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.
 - b. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan anggaran penetapan Rp.18.700.000,- bertambah Rp.48.155.000 Menjadi Rp 66.855.000,- untuk kegiatan sosialisasi Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

- c. Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 7.060.000,- bertambah Rp.6.520.000,- Menjadi Rp.13.580.000,- untuk kegiatan pembinaan administrasi Tim Penggerak PKK Kecamatan Pegandon.

3) PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Yang dijabarkan dalam subkegiatan:

- a. Sinergitas dengan kepolisian Negara republic Indonesia. Tentara nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 9.180.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.
- b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan anggaran penetapan sebesar Rp.5000.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.
- c. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan anggaran penetapan sebesar Rp.95.400.000,- berkurang Rp.15.780.000,- menjadi Rp. 79.620.000,- berkurang honor linmas yang pindah instansi menjadi PPPK.

4) PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- a. Fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional, dengan anggaran penetapan Rp. 7.680.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.
- b. Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran penetapan Rp.3.300.000,- berkurang Rp.3.300.000,- menjadi Rp.0,- berpindah ke rapat konsultasi SKPD karena berisi makan dan minuman rapat.
- c. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan anggaran penetapan Rp.6.000.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.

5) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Yang dijabarkan dalam subkegiatan:

- a. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, dengan anggaran sebesar Rp.40.300.000,- berkurang Rp.27.590.000 Menjadi Rp.12.710.000,- berpindah ke rapat konsultasi SKPD karena berisi makanan dan minuman rapat serta perjalanan dinas.
- b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan asset desa, dengan anggaran sebesar Rp.9.600.000,- bertambah Rp. 24.896.000,- menjadi Rp. 34.496.000.- bertambah untuk kegiatan pembiaaan administrasi pengelolaan keuangan Desa.

Adapun Lampiran Rancangan Akhir Perubahan RKPD 2024 hasil printout sipd.kemendagri.go.id sebagaimana Tabel berikut ini :

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pegandon Tahun 2024 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Pegandon itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Pegandon dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pegandon Tahun 2024 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Perencanaan Kabupaten Kendal, sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran berkenaan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Pegandon Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Penetapan maupun Perubahan Kecamatan Pegandon pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kendal;
2. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pegandon ini berpedoman pada Renstra Kecamatan Pegandon Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja.
3. Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Pegandon ini juga berpedoman pada RKPD Perubahan Kabupaten Kendal Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Pegandon Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pegandon ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Pegandon Tahun 2024;

2. Dalam penyusunan RKAP nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kendal. Begitu pula dalam penyusunan DPPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Kendal;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Pegandon Tahun 2024.

Rencana Tindak Lanjut

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal pada tahun 2024 adalah “**Kendal Smart City**” yang diprioritaskan pada “Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal *Smart City*”. Arah kebijakan ini dengan focus peningkatan kemantapan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan *clean* dan *Good Governances*, penguatan *Smart City* yang difokuskan pada *Smart Government*, *Smart Education*, *Smart Health*, *Smart Economy* dan *Smart Transportation*.

Pembangunan daerah yang menerapkan perencanaan yang SMART dan prinsip Money Follow Program Priority, dan Money Follow Result, diharapkan mampu untuk lebih mendorong potensi dan keunggulan daerah menuju kemandirian ekonomi daerah. Mendasarkan pada isu global, nasional dan regional.

Berdasarkan arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2024, Kecamatan Pegandon menetapkan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja dengan fokus kinerja aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan pada Kecamatan Rowosari;
2. Peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap aparatur desa melalui pembinaan SDM dan kelembagaan / administrasi diprioritaskan kepada Aparatur desa yang kurang memahami tugas dan fungsi;

3. Peningkatan pelaksanaan kewenangan Bupati kepada Camat diprioritaskan kepada pembinaan dan pendampingan penyusunan APBDes, LPPDes serta pemantauan aset Pemda dan aset desa.
4. Peningkatan kinerja pelayanan publik difokuskan pada penilaian SKM.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan apabila dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, kami mohon sarannya untuk perbaikan di tahun yang akan datang.

Kendal, 2024
GAMAT PEGANDON,

JUNAEDI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19790216 201101 1 008



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Pramuka Nomor 5 Kendal 51314

Telp. (0294) 381457 / 381566 Fax (0294) 382440

Laman : disdikbud.kendalkab.go.id Surel : disdikbud@kendalkab.go.id

KATA PENGANTAR

Implementasi Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal tahun 2022 telah berlangsung hampir 3 (tiga) triwulan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan RKPD Tahun 2024 dan Renja PD Tahun 2024 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Harapan kami semoga Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyesuaian penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2024 ini.

Kendal, 2024
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kendal



Drs. FERINANDO RAD BONAY
Pembina Utama Muda
NIP. 19730223 199302 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

I. Pendahuluan..... 1

 1.1. Latar Belakang..... 1

 1.2. Landasan Hukum 2

 1.3. Maksud dan Tujuan..... 4

 1.4. Sistematika Penulisan..... 4

II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan 6

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan
 Triwulan II dan Renstra Perangkat Daerah 6

 2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 49

III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 50

IV. Penutup 85

Lampiran

 1. Draft Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
 Tahun 2024.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dimana dalam level Perangkat Daerah disebut Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pada tahun 2024 dilakukan perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Beberapa konsisi berikut ini menjadi pertimbangan perlunya penyusunan Perubahan Kedua Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2024 :

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja;
- c. mengakomodir dana SiLPA atas program kegiatan yang bersifat *earmark* dan harus diluncurkan kembali pada tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024 ini disusun dengan mendasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal 2024.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dala Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008

Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);

14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 20).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal Tahun 2024 adalah :

1. menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Tahun 2024;
2. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika PenulisanEvaluasi Semester I Tahun 2024

II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Renstra Perangkat Daerah

2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Renstra Perangkat Daerah

Capaian Kinerja RKPD Semester I atau Triwulan II Tahun 2024 berisi perbandingan target dan realisasi yang dilaksanakan dari dokumen Renja PD tahun 2024 yang sudah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024. Jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun 2024, sedangkan jumlah anggaran (Rp.) untuk setiap program sesuai dengan APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan rencana strategis visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal adalah “UNGGUL” yaitu suatu kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, religius, berbudaya, sehat jasmanidan rohani, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan serta siap menghadapi revolusi industri 4.0.

Misi yang akan dicapai dari misi Pemerintah Kabupaten Kendal yaitu :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0;
2. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stokeholder pembangunan.

Pengukuran Kinerja Utama Tahun 2024 didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana tersebut dalam tabel.

Tabel 2.1

Pengukuran Kinerja Kunci Berdasarkan Sasaran Strategis

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Target Kinerja Perubahan	Capaian s.d Semester I (triwulan II)
Meningkatkan SDM yang berkualitas, religius, berbudaya, sehat jasmani dan rohani.	harapan lama sekolah	tahun	13,5	13,5	12,98
	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,9	7,9	7,73
Meningkatkan kualitas pengelolaan kebudayaan	% budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	%	100	100	50

Tabel 2.2

Pengukuran Kinerja Utama Berdasarkan Sasaran Strategis

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Target Kinerja Perubahan	Capaian s.d Semester I (triwulan II)
Meningkatkan akses dan kualitas layanan pedidikan	Angka Partisipasi Sekolah SD	%	100	100	99,72
	Angka Partisipasi Sekolah SMP	%	100	100	97,83
Meningkatnya kelestarian budaya lokal	% Budaya Lokal yang dilestarikan	%	100 %	100	50

Rekapitulasi evaluasi terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Semester I/Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagaimana Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD berikut :

Tabel 2.3

TABEL REALISASI KEUANGAN DAN FISIK
TAHUN ANGGARAN 2024 KONDISI SAMPAI DENGAN BULAN JUNI

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD	
			REAL KEUANGAN (Rp.)	REAL FISIK (%)
		777.078.075.631	359.063.721.460	38,99
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	775.079.575.631	358.756.615.192	18,26
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	575.690.299.831	298.048.843.055	45,91
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	826.815.200	33.729.368	11,40
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	764.050.200	21.152.912	2,77
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	62.765.000	12.576.456	20,04
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	571.679.397.412	296.827.672.700	58,68
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	571.338.897.412	296.640.291.969	51,92
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	154.000.000	51.152.819	33,22
c	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	166.925.000	121.152.912	72,58
d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.575.000	15.075.000	77,01
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	153.520.000	149.860.000	100,00
a	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	153.520.000	149.860.000	100,00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.162.060.719	429.263.500	31,76
a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	405.680.000	176.657.615	43,55
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.890.000	2.475.000	11,31
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.343.500	20.129.900	38,46
d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	682.147.219	230.000.985	33,72
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.385.706.500	523.599.950	46,62
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	6.000.000	40,00
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.000.000	294.180.198	49,03
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000	43.260.000	72,10
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	710.706.500	180.159.752	25,35
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	482.800.000	84.717.537	26,97

a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	8.874.000	17,75
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	190.000.000	40.445.625	21,29
c	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	4.650.000	46,50
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.500.000	9.595.000	39,16
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	208.300.000	21.152.912	10,16
B	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	190.032.989.800	56.805.664.173	16,19
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	88.310.452.000	33.682.916.588	11,27
a	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.523.281.250	0	-
b	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	384.806.250	0	-
c	Pengadaan Mebel Sekolah	1.392.812.500	0	-
d	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	422.937.500	0	-
e	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	25.000.000	0	-
f	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	301.768.750	0	-
g	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	501.360.000	52.000.000	10,37
h	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.268.169.000	673.043.750	53,07
i	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	50.000.000	8.250.000	16,50
j	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	73.110.320.000	32.612.027.292	44,61
k	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	285.000.000	255.749.900	89,74
l	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi TIK untuk Pendidikan	100.000.000	0	-
m	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	50.000.000	0	-
n	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	50.000.000	0	-
o	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	241.550.000	23.151.456	9,58
p	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	50.000.000	0	-
q	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	25.000.000	0	-
r	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	243.990.500	0	-
s	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	3.676.850.000	58.694.190	1,60
t	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.607.606.250	0	-
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	56.001.836.000	20.022.967.217	20,48
a	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	350.000.000	8.774.550	2,51

b	Pembangunan Laboratorium	824.120.000	0	-
c	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	500.000.000	0	-
d	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.533.550.000	0	-
e	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	569.000.000	0	-
f	Pengadaan Mebel Sekolah	351.500.000	0	-
g	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	40.000.000	0	-
h	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	100.000.000	0	-
i	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	180.750.000	0	-
j	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	491.800.000	80.688.256	16,41
k	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	579.035.000	557.374.100	96,26
l	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	82.138.000	11.516.456	14,02
m	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	42.332.000.000	19.093.148.441	45,10
n	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	225.000.000	184.155.000	81,85
o	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	20.000.000	19.999.900	100,00
p	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	50.000.000	0	-
q	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	19.862.000	6.478.000	32,62
r	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	15.000.000	15.000.000	100,00
s	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	20.000.000	0	-
t	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	2.475.000.000	22.134.014	0,89
u	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.210.000.000	23.698.500	1,96
v	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	30.000.000	0	-
w	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.530.000.000	0	-
x	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	473.081.000	0	-
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	22.160.502.000	195.164.112	23,22
a	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	192.612.000	530.000	0,28
b	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	497.000.000	0	-
c	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	135.000.000	0	-
d	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	177.990.000	90.137.800	50,64
e	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	50.000.000	17.227.056	34,45

f	Pengelolaan Dana BOP PAUD	21.072.900.000	77.269.456	0,37
g	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	25.000.000	0	-
h	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	10.000.000	9.999.800	100,00
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	23.560.199.800	2.904.616.256	9,79
a	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	17.368.500.000	0	-
b	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	55.000.000	0	-
c	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	85.000.000	20.264.800	23,84
d	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	5.642.550.000	2.873.775.000	50,93
e	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	50.000.000	0	-
f	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	60.000.000	0	-
g	Pembangunan Ruang Kelas Baru	120.000.000	0	-
h	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	79.149.800	10.576.456	13,36
i	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	100.000.000	0	-
C	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	75.000.000	0	-
1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	75.000.000	0	-
a	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	75.000.000	0	-
D	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	9.266.286.000	3.900.957.564	21,52
1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	9.266.286.000	3.900.957.564	21,52
a	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	200.786.000	0	-
b	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	9.065.500.000	3.900.957.564	43,03
E	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	15.000.000	1.150.400	7,67
1	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	15.000.000	1.150.400	7,67
a	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	15.000.000	1.150.400	7,67
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.998.500.000	307.106.268	20,74

F	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.365.000.000	136.934.912	11,36
1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	635.000.000	54.332.456	11,30
a	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	215.000.000	42.610.000	19,82
b	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	420.000.000	11.722.456	2,79
2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	730.000.000	82.602.456	11,41
a	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	350.000.000	47.931.000	13,69
b	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	380.000.000	34.671.456	9,12
G	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	84.000.000	26.454.500	38,90
1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	84.000.000	26.454.500	38,90
a	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	34.000.000	26.454.500	77,81
b	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	50.000.000	0	-
H	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	200.000.000	46.090.000	23,05
1	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	46.090.000	23,05
a	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	200.000.000	46.090.000	23,05
I	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	300.000.000	97.626.856	30,38
1	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	300.000.000	97.626.856	30,38
a	Pelindungan Cagar Budaya	200.000.000	73.726.856	36,86
b	Pemanfaatan Cagar Budaya	100.000.000	23.900.000	23,90
J	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	49.500.000	0	-
1	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	49.500.000	0	-
a	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Teadu	49.500.000	0	-

- a. Realisasi Program Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
Berikut program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada anggaran tahun 2024 sampai dengan semester I yang realisasi keuangan dan fisik dibawah 20% pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Kendal :
- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD
 - 4) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar
 - 5) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
 - 6) Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
 - 7) Pembangunan Perpustakaan Sekolah (SMP)
 - 8) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP
 - 9) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SMP
 - 10) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
 - 11) Pembangunan Ruang Kelas Baru
 - 12) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
 - 13) Pengelolaan Dana BOP PAUD
 - 14) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Kesetaraan
 - 15) Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
 - 16) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
 - 17) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
 - 18) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
 - 19) Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
- b. Realisasi program kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
Realisasi program kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dengan capaian kinerja 70% sampai dengan 100% pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan semester I tahun anggaran 2024 yaitu sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 5) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 6) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
 - 7) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
 - 8) Pengembangan konten digital untuk pendidikan SMP
 - 9) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan SMP
 - 10) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan PAUD
 - 11) Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
- c. Realisasi program kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Berikut merupakan program kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

- 1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 2) Pengembangan konten digital untuk pendidikan SMP
 - 3) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan SMP
 - 4) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan PAUD
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapai, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Berikut merupakan faktor-faktor penyebab tidak tercapai, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal :

- 1) Adanya perubahan kebijakan nasional dapat memengaruhi fokus dan prioritas program, sehingga mengakibatkan penyesuaian yang tidak selalu tepat waktu
 - 2) Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan jadwal atau kalender pendidikan Tahun Ajaran berjalan
 - 3) Program yang dirancang tidak didukung dengan analisis kebutuhan yang mendalam. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian antara kegiatan yang dilaksanakan dengan kebutuhan
 - 4) Proses pengadaan barang jasa yang memerlukan waktu yang cukup lama
 - 5) Ketersediaan indeks satuan harga yang belum sesuai dengan kebutuhan, sehingga dokumen anggaran belum bisa dilaksanakan
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat daerah

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Kendal, diantaranya :

- 1) Menurunnya layanan dan kualitas layanan pendidikan
 - 2) Tujuan dan sasaran tidak tercapai seluruhnya
 - 3) Keterlambatan capaian program kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal
 - 4) Serapan anggaran dan realisasi fisik akan terlaksana pada akhir semester II tahun berjalan.
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
- Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang akan dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab, yaitu sebagai berikut :
- 1) analisis mendalam terhadap program yang sedang berjalan untuk menentukan mana yang masih relevan dan mana yang perlu disesuaikan dengan kebijakan baru
 - 2) Perencanaan program kegiatan disesuaikan dengan jadwal yang ada pada satuan pendidikan /sesuai dengan kalender pendidikan
 - 3) Identifikasi lebih mendalam antara kebutuhan dan penganggaran
 - 4) Persiapan dokumen pengadaan barang jasa lebih matang, sebelum pelaksanaan dokumen harus disiapkan terlebih dahulu.
 - 5) Usul Indeks satuan harga sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 2.4

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kendal

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN								
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	50	50	100 Persen	100 Persen	100

	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun	7 Dokumen	7 Dokumen	3	50	7 Dokumen	7 Dokumen	100
	1	01	01	2.01	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen		50	0 Dokumen	0 Dokumen	100
	1	01	01	2.01	000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0 Laporan		50	0 Laporan	0 Laporan	100
	1	01	01	2.01	000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan		50	1 Laporan	1 Laporan	100
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	6	50	12 Bulan	12 Bulan	100
	1	01	01	2.02	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6000 Orang/bulan	6000 Orang/bulan	6000	50	6000 Orang/bulan	6000 Orang/bulan	100
	1	01	01	2.02	000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	5 Dokumen	3	50	5 Dokumen	5 Dokumen	100
	1	01	01	2.02	000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	3	50	5 Dokumen	5 Dokumen	100
	1	01	01	2.02	000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	3	50	5 Laporan	5 Laporan	100
	1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase laporan aset yang tersusun	100 Persen	100 Persen	50	50	100 Persen	100 Persen	100
	1	01	01	2.03	000 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								

							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	2	50	3 Laporan	3 Laporan	100
	1	01	01	2.03	000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	6	50	12 Laporan	12 Laporan	100
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rutin	12 Bulan	12 Bulan	6	50	12 Bulan	12 Bulan	100
	1	01	01	2.06	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	10	50	20 Paket	20 Paket	100
	1	01	01	2.06	000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	10	50	20 Paket	20 Paket	100
	1	01	01	2.06	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6	50	12 Paket	12 Paket	100
	1	01	01	2.06	000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								

							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6	50	12 Paket	12 Paket	100
	1	01	01	2.06	000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	6	50	12 Dokumen	12 Dokumen	100
	1	01	01	2.06	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	300 Laporan	150	50	300 Laporan	300 Laporan	100
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	110 Unit	110 Unit	50	50	110 Unit	110 Unit	100
	1	01	01	2.07	000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	8	50	15 Unit	15 Unit	100
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rutin	12 Bulan	12 Bulan	6	50	12 Bulan	12 Bulan	100
	1	01	01	2.08	000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	6	50	12 Laporan	12 Laporan	100
	1	01	01	2.08	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	6	50	12 Laporan	12 Laporan	100
	1	01	01	2.08	000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	6	50	12 Laporan	12 Laporan	100
	1	01	01	2.08	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	6	50	12 Laporan	12 Laporan	100
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah yang terpelihara	32 Unit	32 Unit		50	32 Unit	32 Unit	100
	1	01	01	2.09	000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				15				

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	157 Unit	157 Unit	70	50	157 Unit	157 Unit	100
	1	01	01	2.09	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	5	50	10 Unit	10 Unit	100
	1	01	01	2.09	000 5	Pemeliharaan Mebel								
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	5	50	10 Unit	10 Unit	100
	1	01	01	2.09	000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1	50	1 Unit	1 Unit	100
	1	01	01	2.09	001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	11 Unit	6	50	11 Unit	11 Unit	100
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, Pendidikan Kesetaraan, SD dan SMP	87,7 Persen	87,7 Persen	50	50	87,7 Persen	87,7 Persen	100
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tingkat partisipasi warga usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100 Persen	100 Persen	50	50	100 Persen	100 Persen	100
	1	01	02	2.01	000 3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU								
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-	1 Ruang	1	50	1 Ruang	1 Ruang	
	1	01	02	2.01	000 4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-	3 Ruang	3	50	3 Ruang	3 Ruang	
	1	01	02	2.01	000 5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah								
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-	2 Ruang	2	50	2 Ruang	2 Ruang	
	1	01	02	2.01	000 6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								

							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	6 Unit	3	50	6 Unit	6 Unit	100
	1	01	02	2.01	000 9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU								
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	3 Ruang	1	50	3 Ruang	3 Ruang	100
	1	01	02	2.01	001 0	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang		50	1 Ruang	1 Ruang	100
	1	01	02	2.01	001 1	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah								
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	1	50	1 Ruang	1 Ruang	100
	1	01	02	2.01	001 4	Pengadaan Mebel Sekolah								
							Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	10 Paket	10 Paket	10	50	10 Paket	10 Paket	100
	1	01	02	2.01	001 9	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	1 Unit	1	50	1 Unit	1 Unit	100

	1	01	02	2.01	002 1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar								
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000 Peserta Didik	1000 Peserta Didik	500	50	1000 Peserta Didik	1000 Peserta Didik	100
	1	01	02	2.01	002 2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa								
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	3 Paket	3 Paket	2	50	3 Paket	3 Paket	100
	1	01	02	2.01	002 5	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik	300 Peserta Didik	150	50	300 Peserta Didik	300 Peserta Didik	100
	1	01	02	2.01	002 7	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar								
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3775 Orang	3775 Orang	1500	50	3775 Orang	3775 Orang	100

	1	01	02	2.01	002 8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah								
							Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	25	50	50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	100
	1	01	02	2.01	002 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar								
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	681 Satuan Pendidikan	681 Satuan Pendidikan	300	50	681 Satuan Pendidikan	681 Satuan Pendidikan	100
	1	01	02	2.01	003 0	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar								
							Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	3 Orang	3 Orang	1	50	3 Orang	3 Orang	100
	1	01	02	2.01	003 1	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar								
							Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	-	3 Ruang	1	50	3 Ruang	3 Ruang	100
	1	01	02	2.01	003 5	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan								

							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200 Orang	200 Orang	100	50	200 Orang	200 Orang	100
	1	01	02	2.01	003 6	Pengembangan konten digital untuk pendidikan								
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	100 Konten Digital	100 Konten Digital	50	50	100 Konten Digital	100 Konten Digital	100
	1	01	02	2.01	003 7	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan								
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	100 Orang	50	50	100 Orang	100 Orang	100
	1	01	02	2.01	003 8	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100 Dokumen	100 Dokumen	50	50	100 Dokumen	100 Dokumen	100
	1	01	02	2.01	003 9	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan								

							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1	50	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	1	01	02	2.01	004 1	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan								
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	10 Komunitas	10 Komunitas	5	50	10 Komunitas	10 Komunitas	100
	1	01	02	2.01	004 3	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi								
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	6 Kegiatan	6 Kegiatan	3	50	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100
	1	01	02	2.01	004 5	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik								
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	100 Buku	100 Buku	100	50	100 Buku	100 Buku	100
	1	01	02	2.01	004 6	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik								

							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	4 Paket	4 Paket	2	50	4 Paket	4 Paket	100
	1	01	02	2.01	004 8	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	1 Unit	1	50	1 Unit	1 Unit	100
	1	01	02	2.01	004 9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan								
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	100 Orang	50	50	100 Orang	100 Orang	100
	1	01	02	2.01	005 0	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik								
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	566 Satuan Pendidikan	566 Satuan Pendidikan	300	50	566 Satuan Pendidikan	566 Satuan Pendidikan	100
	1	01	02	2.01	005 1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah								

							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2 Ruang	1	50	2 Ruang	2 Ruang	100
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100 Persen	100 Persen	50	50	100 Persen	100 Persen	100
	1	01	02	2.02	000 5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah								
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	1	50	1 Ruang	1 Ruang	100
	1	01	02	2.02	000 6	Pembangunan Laboratorium								
							Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang	1	50	2 Ruang	2 Ruang	100
	1	01	02	2.02	001 2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	16 Unit	16 Unit	10	50	16 Unit	16 Unit	100
	1	01	02	2.02	001 4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah								
							Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	10 Ruang	5	50	10 Ruang	10 Ruang	100

	1	01	02	2.02	001 8	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium								
							Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang	7 Ruang	3	50	7 Ruang	7 Ruang	100
	1	01	02	2.02	002 5	Pengadaan Mebel Sekolah								
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	3 Paket	3 Paket	2	50	3 Paket	3 Paket	100
	1	01	02	2.02	003 0	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	10 Unit	10 Unit	5	50	10 Unit	10 Unit	100
	1	01	02	2.02	003 2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama								
							Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	64 Peserta Didik	64 Peserta Didik	30	50	64 Peserta Didik	64 Peserta Didik	100
	1	01	02	2.02	003 5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa								
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	12 Paket	12 Paket	6	50	12 Paket	12 Paket	100
	1	01	02	2.02	003 8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								

							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	250	50	500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	100
	1	01	02	2.02	004 0	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1858 Orang	1858 Orang	750	50	1858 Orang	1858 Orang	100
	1	01	02	2.02	004 1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah								
							Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	110 Satuan Pendidikan	110 Satuan Pendidikan	60	50	110 Satuan Pendidikan	110 Satuan Pendidikan	100
	1	01	02	2.02	004 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama								
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	108 Satuan Pendidikan	108 Satuan Pendidikan	50	50	108 Satuan Pendidikan	108 Satuan Pendidikan	100
	1	01	02	2.02	004 3	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama								

						Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	3 Orang	3 Orang	2	50	3 Orang	3 Orang	100
	1	01	02	2.02	004 9	Pengembangan konten digital untuk pendidikan							
						Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	1 Konten Digital	1	50	1 Konten Digital	1 Konten Digital	100
	1	01	02	2.02	005 0	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan							
						Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	110 Orang	110 Orang	60	50	110 Orang	110 Orang	100
	1	01	02	2.02	005 1	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	50 Dokumen	50 Dokumen	25	50	50 Dokumen	50 Dokumen	100
	1	01	02	2.02	005 2	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan							

							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	1	50	2 Dokumen	2 Dokumen	100
	1	01	02	2.02	005 4	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan								
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5 Komunitas	5 Komunitas	3	50	5 Komunitas	5 Komunitas	100
	1	01	02	2.02	005 5	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi								
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	5 Kegiatan	5 Kegiatan	3	50	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100
	1	01	02	2.02	005 8	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik								
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	4500 Satuan Pendidikan	4500 Satuan Pendidikan	2000	50	4500 Satuan Pendidikan	4500 Satuan Pendidikan	100
	1	01	02	2.02	005 9	Pembangunan Ruang Kelas Baru								

							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	3 Ruang	1	50	3 Ruang	3 Ruang	100
	1	01	02	2.02	006 1	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik								
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	60 Buku	60 Buku		50	60 Buku	60 Buku	100
	1	01	02	2.02	006 2	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik								
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	6 Paket	6 Paket	6	50	6 Paket	6 Paket	100
	1	01	02	2.02	006 4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU								
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	4 Ruang		50	4 Ruang	4 Ruang	100
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (SPM PAUD)	100 Persen	100 Persen		50	100 Persen	100 Persen	100
	1	01	02	2.03	000 2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD								

							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	8 Unit	8 Unit	2	50	8 Unit	8 Unit	100
	1	01	02	2.03	000 3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD								
							Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit	6 Unit	2	50	6 Unit	6 Unit	100
	1	01	02	2.03	001 2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD								
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	17 Paket	17 Paket	10	50	17 Paket	17 Paket	100
	1	01	02	2.03	001 6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD								
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2665 Orang	2665 Orang	1000	50	2665 Orang	2665 Orang	100
	1	01	02	2.03	001 7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD								

							Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	20	50	50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	100
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD								
							Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	900 Satuan Pendidikan	900 Satuan Pendidikan		50	900 Satuan Pendidikan	900 Satuan Pendidikan	100
	1	01	02	2.03	0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan								
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	1 Konten Digital	1	50	1 Konten Digital	1 Konten Digital	100
	1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan								
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1	50	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	1	01	02	2.03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan								
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7 Komunitas	7 Komunitas	3	50	7 Komunitas	7 Komunitas	100
	1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru								
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0 Ruang	0 Ruang		50	0 Ruang	0 Ruang	100

	1	01	02	2.03	003 9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan								
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	125 Orang	125 Orang		50	125 Orang	125 Orang	100
	1	01	02	2.03	004 1	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik								
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket	3 Paket	2	50	3 Paket	3 Paket	100
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah warga anegara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah, yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Jumlah warga negara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah, yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	100 Persen	100 Persen	50	50	100 Persen	100 Persen	100

	1	01	02	2.04	000 1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan								
							Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	4 Unit	4 Unit	2	50	4 Unit	4 Unit	100
	1	01	02	2.04	001 4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	13455 Orang	13455 Orang		50	13455 Orang	13455 Orang	100
	1	01	02	2.04	001 5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	100 Orang	100	50	100 Orang	100 Orang	100

	1	01	02	2.04	001 6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan								
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	8 Satuan Pendidikan	8 Satuan Pendidikan	8	50	8 Satuan Pendidikan	8 Satuan Pendidikan	100
	1	01	02	2.04	001 7	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan								
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	21 Satuan Pendidikan	21 Satuan Pendidikan	21	50	21 Satuan Pendidikan	21 Satuan Pendidikan	100
	1	01	02	2.04	002 7	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	27 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen	50	27 Dokumen	27 Dokumen	100
	1	01	02	2.04	003 6	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik								
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	10 Paket	10 Paket	50	10 Paket	10 Paket	100
	1	01	02	2.04	003 9	Pembangunan Ruang Kelas Baru								

							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	50	1 Ruang	1 Ruang	100
	1	01	02	2.04	004 1	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	5 Unit	5 Unit	50	5 Unit	5 Unit	100
	1	01	02	2.04	004 6	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik								
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	2625 Peserta Didik	2625 Peserta Didik	2625 Peserta Didik	50	2625 Peserta Didik	2625 Peserta Didik	100
	1	01	02	2.04	004 8	Pengadaan Mebel Sekolah								
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	5 Paket	5 Paket	5 Paket	50	5 Paket	5 Paket	100
	1	01	02	2.04	004 9	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	50	1 Unit	1 Unit	100
	1	01	02	2.04	005 0	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah								
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	2 Unit	2 Unit	50	2 Unit	2 Unit	100

3	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase Kurikulum muatan lokal yang ditetapkan Prosentase Kurikulum muatan lokal yang ditetapkan	100 13, 80 Persen %	13, 80 100 % Persen	13, 80 100 % Persen	50	13, 80 100 % Persen	13, 80 100 % Persen	100
	1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah kompetensi dasar muatan lokal yang ditetapkan	1 muatan lokal	1 muatan lokal	1 muatan lokal	50	1 muatan lokal	1 muatan lokal	100
	1	01	03	2.02	000 6	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal								
							Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase Pendidik Bersertifikat pendidik	57 Persen	57 Persen	57 Persen	50	57 Persen	57 Persen	100
	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti Diklat/Bimtek	824 Orang	824 Orang	824 Orang	50	824 Orang	824 Orang	100

	1	01	04	2.01	000 1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								
							Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1169 Dokumen	1169 Dokumen	1169 Dokumen	50	1169 Dokumen	1169 Dokumen	100
	1	01	04	2.01	000 2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	616 Laporan	616 Laporan	616 Laporan	50	616 Laporan	616 Laporan	100

5	1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Prosentase Penerbitan Rekomendasi Pendirian PAUD, SD dan SMP	75 Persen	75 Persen	75 Persen	50	75 Persen	75 Persen	100
	1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Prosentase rekomendasi ijin pendirian yang dikeluarkan jenjang PAUD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50	100 Persen	100 Persen	100
	1	01	05	2.02	000 1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	50	2 Dokumen	2 Dokumen	100
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
6	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Prosentase kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50	100 Persen	100 Persen	100

	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten	20 Kelompok	20 Kelompok	20 Kelompok	50	20 Kelompok	20 Kelompok	100
	2	22	02	2.01	000 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan								
							Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	20 Objek	2 Objek	2 Objek	50	2 Objek	2 Objek	100
	2	22	02	2.01	000 2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan								
							Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	200 Orang	200 Orang	200 Orang	50	200 Orang	200 Orang	100
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten yang dilestarikan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50	100 Persen	100 Persen	100
	2	22	02	2.02	000 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya								

							Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	5 Objek	5 Objek	50	5 Objek	5 Objek	100
	2	22	02	2.02	000 3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan								
							Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	5 Sertifikat	5 Sertifikat	5 Sertifikat	50	5 Sertifikat	5 Sertifikat	100
7	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Prosentase kesenian tradisional yang dikembangkan Prosentase kesenian tradisional yang dikembangkan	100.00 100 % Persen	100.00 100 % Persen	100.00 100 % Persen	50	100.00 100 % Persen	100.00 100 % Persen	100
	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten	3 kegiatan 3 Kegiatan	3 kegiatan 3 Kegiatan	3 kegiatan 3 Kegiatan	50	3 kegiatan 3 Kegiatan	3 kegiatan 3 Kegiatan	100
	2	22	03	2.01	000 1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional								

							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	100 Orang	100 Orang	100 Orang	50	100 Orang	100 Orang	100
	2	22	03	2.01	000 2	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan								
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	50 Sertifikat	50 Sertifikat	50 Sertifikat	50	50 Sertifikat	50 Sertifikat	100
8	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Prosentase Tradisi Budaya yang Dilestarikan	100 Persen	100 persen	100 persen	50	100 persen	100 persen	100
	2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kegiatan Tradisi Budaya	5 Orang	12 Kegiatan	12 Kegiatan	50	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100
	2	22	04	2.01	000 1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota								
							Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	100 Orang	1000 Orang	1000 Orang	50	1000 Orang	1000 Orang	100

9	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Prosentase cagar budaya yang dilestarikan (pendaftaran, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50	100 Persen	100 Persen	100
	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Presentase pendaftaran, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan yang diterbitkan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50	100 Persen	100 Persen	100
	2	22	05	2.01	000 2	Penetapan Cagar Budaya								
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	5 Objek	5 Objek	5 Objek	50	5 Objek	5 Objek	100
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Prosentase obyek Cagar Budaya yang dilindungi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50	100 Persen	100 Persen	100
	2	22	05	2.02	000 1	Pelindungan Cagar Budaya								
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	3 Objek	3 Objek	3 Objek	50	3 Objek	3 Objek	100
	2	22	05	2.02	000 3	Pemanfaatan Cagar Budaya								
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	4 Objek	4 Objek	4 Objek	50	4 Objek	4 Objek	100
10	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Prosentase Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50	100 Persen	100 Persen	100

	2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	50	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100
	2	22	06	2.01	000 1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu								
							Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	3 Unit	3 Unit	3 Unit	50	3 Unit	3 Unit	100

2.2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil Musrenbang tingkat Kabupaten tidak terdapat kegiatan yang diminta oleh masyarakat maupun kecamatan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Kendal. Berikut beberapa faktor penyebab usulan masyarakat yang tidak bisa diakomodir oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal :

- a. Beberapa usulan yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Kendal merupakan prgram kegiatan yang bukan kewenangan;
- b. Lokasi sasaran usulan sudah mendapatkan alokasi dana DAK;
- c. Kelengkapan administrasi usulan kegiatan yang tidak dipenuhi oleh calon penerima bantuan/Hibah.

Tabel. 2.5

**Usulan dan Program Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Kendal**

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume
	NIHIL			

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan yang tertuang dalam Perubahan Kedua Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal Tahun 2024 berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 dan didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian visi dan misi kepala daerah (terutama misi ke 2 dan ke 3).

3.1. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal melaksanakan 2 urusan yaitu urusan Pendidikan dan urusan kebudayaan, terdiri dari 10 program, dan 21 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1) 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 1.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 1.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

3) 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4) 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- 1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5) 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6) 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7) 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan
- 1.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel
- 1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 1.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Pendidikan

1) 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

- 1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- 1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- 1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- 1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- 1.01.02.2.01.10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- 1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- 1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah

- 1.01.02.2.01.19 pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah
- 1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
- 1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- 1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- 1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- 1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- 1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- 1.01.02.2.01.30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- 1.01.02.2.01.31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
- 1.01.02.2.01.35 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
- 1.01.02.2.01.36 Pengembangan konten digital untuk pendidikan
- 1.01.02.2.01.37 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
- 1.01.02.2.01.38 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
- 1.01.02.2.01.39 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
- 1.01.02.2.01.41 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 1.01.02.2.01.43 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
- 1.01.02.2.01.45 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
- 1.01.02.2.01.46 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
- 1.01.02.2.01.48 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 1.01.02.2.01.49 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
- 1.01.02.2.01.50 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
- 1.01.02.2.01.51 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

2) 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

- 1.01.02.2.02.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- 1.01.02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium
- 1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

- 1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
- 1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah
- 1.01.02.2.02.30 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah
- 1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
- 1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- 1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- 1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- 1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- 1.01.02.2.02.43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- 1.01.02.2.02.49 Pengembangan konten digital untuk pendidikan
- 1.01.02.2.02.50 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
- 1.01.02.2.02.51 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
- 1.01.02.2.02.52 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
- 1.01.02.2.02.54 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 1.01.02.2.02.55 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
- 1.01.02.2.02.58 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
- 1.01.02.2.02.59 Pembangunan Ruang Kelas Baru
- 1.01.02.2.02.61 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
- 1.01.02.2.02.62 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
- 1.01.02.2.02.64 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

3) 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- 1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
- 1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
- 1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD

- 1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
- 1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
- 1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD
- 1.01.02.2.03.23 Pengembangan konten digital untuk pendidikan
- 1.01.02.2.03.26 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
- 1.01.02.2.03.29 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 1.01.02.2.03.30 Pembangunan Ruang Kelas Baru
- 1.01.02.2.03.39 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
- 1.01.02.2.03.41 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik

4) 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

- 1.01.02.2.04.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan
- 1.01.02.2.04.14 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- 1.01.02.2.04.15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- 1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
- 1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
- 1.01.02.2.04.27 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
- 1.01.02.2.04.36 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
- 1.01.02.2.04.39 Pembangunan Ruang Kelas Baru
- 1.01.02.2.04.41 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 1.01.02.2.04.46 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
- 1.01.02.2.04.48 Pengadaan Mebel Sekolah
- 1.01.02.2.04.49 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 1.01.02.2.04.50 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

3. Program Pengembangan Kurikulum

1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal

1) Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

- 1.01.03.2.02.06 Penyusunan Kompetensi Dasar / capaian pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
- 4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**
- 1) 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**
- 1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - 1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- 5. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan**
- 1) 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**
- 1.01.05.2.02.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
- 6. Program Pengembangan Kebudayaan**
- 1) 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**
- 2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
 - 2.22.02.2.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
- 2) 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**
- 2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
 - 2.22.02.2.02.03 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
- 7. Program Pengembangan Kesenian Tradisional**
- 1) 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**
- 2.22.03.2.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
 - 2.22.03.2.01.02 Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
- 8. Program Pembinaan Sejarah**
- 1) 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
- 2.22.04.2.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
- 9. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya**
- 1) 2.22.05.2.01 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**

- 2.22.05.2.01.02 Penetapan Cagar Budaya

1) 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

- 2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya
- 2.22.05.2.02.03 Pemanfaatan Cagar Budaya

10. Program Pengelolaan Permuseuman

1) 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota

- 2.22.06.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu

Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan dalam Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal Tahun 2024 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif secara rinci disajikan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Tabel 3.1
Rumusan Renja Perubahan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
						DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				763.987.915.631,00	835.657.445.905,00			764.261.325.800,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				761.989.415.631,00	833.160.445.905,00			762.691.325.800,00
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				761.989.415.631,00	833.160.445.905,00			762.691.325.800,00
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	562.370.139.831,00	630.877.376.298,00			597.420.325.800,00
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun	7 Dokumen	7 Dokumen	916.815.200,00	916.815.200,00			160.000.000,00
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	764.050.200,00	809.200.396,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		0,00

	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0 Laporan	62.765.000,00	62.765.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0,00
	1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	0,00	Bantuan Keuangan		160.000.000,00
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	558.269.237.412,00	558.269.237.412,00		593.810.325.800,00
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6000 Orang/bulan	6000 Orang/bulan	557.928.737.412,00	625.750.937.186,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		592.625.325.800,00
	1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							

						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	5 Dokumen	154.000.000,00	154.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		560.000.000,00
	1	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	166.925.000,00	166.925.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		300.000.000,00
	1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	19.575.000,00	19.575.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		325.000.000,00
	1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase laporan aset yang tersusun	100 Persen	100 Persen	153.520.000,00	153.520.000,00		160.000.000,00
	1	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	153.520.000,00	153.520.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		95.000.000,00
	1	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		65.000.000,00

	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rutin	12 Bulan	12 Bulan	1.162.060.719,00	1.162.060.719,00			1.555.000.000,00
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	405.680.000,00	398.910.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		475.000.000,00
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	0,00	0,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		65.000.000,00
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	21.890.000,00	75.429.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		225.000.000,00
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	52.343.500,00	53.443.500,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		425.000.000,00
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		65.000.000,00
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	300 Laporan	682.147.219,00	1.020.147.200,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		300.000.000,00
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	110 Unit	110 Unit	0,00	0,00		175.000.000,00
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	0,00	0,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		175.000.000,00
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rutin	12 Bulan	12 Bulan	1.385.706.500,00	1.385.706.500,00		830.000.000,00
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		25.000.000,00
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	600.000.000,00	711.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		525.000.000,00
	1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	130.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		25.000.000,00

	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	710.706.500,00	783.731.500,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		255.000.000,00
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah yang terpelihara	32 Unit	32 Unit	482.800.000,00	482.800.000,00		730.000.000,00
	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	157 Unit	157 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		115.000.000,00
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	190.000.000,00	190.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		215.000.000,00
	1	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel							
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		25.000.000,00
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	24.500.000,00	114.492.516,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		175.000.000,00
	1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							

						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	11 Unit	208.300.000,00	208.300.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		200.000.000,00
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, Pendidikan Kesetaraan, SD dan SMP	87,7 Persen	87,7 Persen	190.262.989.800,00	190.982.733.607,00		150.231.000.000,00
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tingkat partisipasi warga usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100 Persen	100 Persen	88.310.452.000,00	88.310.452.000,00		75.270.000.000,00
	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-	1 Ruang	0,00	301.231.250,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		325.000.000,00
	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-	3 Ruang	0,00	373.693.750,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		400.000.000,00
	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah							

						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-	2 Ruang	0,00	602.462.500,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		625.000.000,00
	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	6 Unit	3.523.281.250,00	1.269.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		525.000.000,00
	1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	3 Ruang	384.806.250,00	384.806.250,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		300.000.000,00
	1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		85.000.000,00
	1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah							
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	0,00	141.231.250,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		150.000.000,00
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah							
						Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	10 Paket	10 Paket	1.392.812.500,00	1.392.812.500,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		600.000.000,00

	1	01	02	2.01	0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	1 Unit	422.937.500,00	422.937.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		125.000.000,00
	1	01	02	2.01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar							
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000 Peserta Didik	1000 Peserta Didik	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15.000.000,00
	1	01	02	2.01	0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa							
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	3 Paket	3 Paket	301.768.750,00	330.964.750,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		0,00
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa							
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik	300 Peserta Didik	501.360.000,00	501.360.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.200.000.000,00
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar							
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3775 Orang	3775 Orang	1.268.169.000,00	1.268.169.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.050.000.000,00
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah							
						Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60.000.000,00
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							

						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	681 Satuan Pendidikan	681 Satuan Pendidikan	73.110.320.000,00	73.110.320.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		62.500.000.000,00
	1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
						Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	3 Orang	3 Orang	285.000.000,00	789.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		160.000.000,00
	1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar							
						Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	-	3 Ruang	0,00	976.693.750,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		1.000.000.000,00
	1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200 Orang	200 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100.000.000,00
	1	01	02	2.01	0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan							
						Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	100 Konten Digital	100 Konten Digital	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50.000.000,00
	1	01	02	2.01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan							
						Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50.000.000,00

	1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100 Dokumen	100 Dokumen	241.550.000,00	282.520.325,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		265.000.000,00
	1	01	02	2.01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan							
						Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		50.000.000,00
	1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan							
						Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	10 Komunitas	10 Komunitas	25.000.000,00	25.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		30.000.000,00
	1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi							
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	6 Kegiatan	6 Kegiatan	0,00	0,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		175.000.000,00
	1	01	02	2.01	0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik							
						Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	100 Buku	100 Buku	0,00	0,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		15.000.000,00
	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik							
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	4 Paket	4 Paket	0,00	0,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		15.000.000,00

	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	1 Unit	243.990.500,00	102.759.250,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		0,00
	1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan							
						Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		120.000.000,00
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik							
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	566 Satuan Pendidikan	566 Satuan Pendidikan	3.676.850.000,00	2.887.555.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		4.100.000.000,00
	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah							
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2 Ruang	2.607.606.250,00	2.607.606.250,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		180.000.000,00
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100 Persen	100 Persen	56.231.836.000,00	56.231.836.000,00		34.099.000.000,00
	1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah							

						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	350.000.000,00	350.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		375.000.000,00
	1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium							
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang	824.120.000,00	824.120.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		0,00
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	16 Unit	16 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		425.000.000,00
	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah							
						Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	10 Ruang	3.533.550.000,00	3.533.550.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		425.000.000,00
	1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium							
						Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang	7 Ruang	569.000.000,00	569.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		0,00
	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah							

						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	3 Paket	3 Paket	351.500.000,00	351.500.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		0,00
	1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	10 Unit	10 Unit	270.000.000,00	40.000.000,00	Bantuan Keuangan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		325.000.000,00
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama							
						Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	64 Peserta Didik	64 Peserta Didik	100.000.000,00	100.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		64.000.000,00
	1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa							
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	12 Paket	12 Paket	180.750.000,00	180.750.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		0,00
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa							
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	491.800.000,00	491.800.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		750.000.000,00
	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							

						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1858 Orang	1858 Orang	579.035.000,00	779.035.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		250.000.000,00
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah							
						Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	110 Satuan Pendidikan	110 Satuan Pendidikan	82.138.000,00	82.138.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		165.000.000,00
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							
						Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	108 Satuan Pendidikan	108 Satuan Pendidikan	42.332.000.000,00	42.297.000.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		27.500.000.000,00
	1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							
						Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	3 Orang	3 Orang	225.000.000,00	551.500.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		110.000.000,00
	1	01	02	2.02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan							
						Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	1 Konten Digital	20.000.000,00	20.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		20.000.000,00
	1	01	02	2.02	0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan							
						Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	110 Orang	110 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		50.000.000,00

	1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	50 Dokumen	50 Dokumen	19.862.000,00	63.362.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25.000.000,00
	1	01	02	2.02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan							
						Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		15.000.000,00
	1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan							
						Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5 Komunitas	5 Komunitas	0,00	0,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		0,00
	1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi							
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	5 Kegiatan	5 Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		0,00
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik							
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	4500 Satuan Pendidikan	4500 Satuan Pendidikan	2.475.000.000,00	1.986.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		3.100.000.000,00
	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru							

						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	3 Ruang	1.210.000.000,00	1.210.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		0,00
	1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik							
						Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	60 Buku	60 Buku	30.000.000,00	30.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		0,00
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik							
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	6 Paket	6 Paket	1.530.000.000,00	1.531.753.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		0,00
	1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	4 Ruang	473.081.000,00	473.081.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		500.000.000,00
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (SPM PAUD)	100 Persen	100 Persen	22.160.502.000,00	22.160.502.000,00		21.995.000.000,00
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD							
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	8 Unit	8 Unit	192.612.000,00	192.612.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		250.000.000,00

	1	01	02	2.03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD							
						Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit	6 Unit	497.000.000,00	497.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		275.000.000,00
	1	01	02	2.03	0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD							
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	17 Paket	17 Paket	135.000.000,00	137.380.482,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		120.000.000,00
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD							
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2665 Orang	2665 Orang	177.990.000,00	1.652.190.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		250.000.000,00
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD							
						Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	125.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		65.000.000,00
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD							
						Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	900 Satuan Pendidikan	900 Satuan Pendidikan	21.072.900.000,00	21.155.582.000,00	DAK Non Fisik-BOP PAUD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		21.000.000.000,00
	1	01	02	2.03	0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan							

						Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	1 Konten Digital	25.000.000,00	25.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		25.000.000,00
	1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan							
						Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	249.739.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		10.000.000,00
	1	01	02	2.03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan							
						Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7 Komunitas	7 Komunitas	0,00	0,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		0,00
	1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru							
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		0,00
	1	01	02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan							
						Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	125 Orang	125 Orang	0,00	0,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		0,00
	1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik							
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket	3 Paket	0,00	0,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		0,00

	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah warga anegara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah, yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Jumlah warga negara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah, yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	100 Persen	100 Persen	23.560.199.800,00	23.560.199.800,00			18.867.000.000,00
	1	01	02	2.04	0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan								
							Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		225.000.000,00
	1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	13455 Orang	13455 Orang	17.368.500.000,00	16.566.918.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		12.500.000.000,00
	1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	100 Orang	55.000.000,00	55.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		65.000.000,00
	1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan								

						Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	8 Satuan Pendidikan	8 Satuan Pendidikan	85.000.000,00	85.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		12.000.000,00
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan							
						Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	21 Satuan Pendidikan	21 Satuan Pendidikan	5.642.550.000,00	5.642.550.000,00	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		5.500.000.000,00
	1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	27 Dokumen	27 Dokumen	50.000.000,00	93.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		70.000.000,00
	1	01	02	2.04	0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik							
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	10 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		0,00
	1	01	02	2.04	0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru							
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	1 Ruang	120.000.000,00	120.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		0,00
	1	01	02	2.04	0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		220.000.000,00

	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik							
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	2625 Peserta Didik	2625 Peserta Didik	79.149.800,00	79.149.800,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		75.000.000,00
	1	01	02	2.04	0048	Pengadaan Mebel Sekolah							
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	5 Paket	5 Paket	0,00	0,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		75.000.000,00
	1	01	02	2.04	0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		125.000.000,00
	1	01	02	2.04	0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah							
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		0,00
3	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase Kurikulum muatan lokal yang ditetapkan Prosentase Kurikulum muatan lokal yang ditetapkan	100 13, 80 Persen %	13, 80 100 % Persen	75.000.000,00	75.000.000,00		20.000.000,00
	1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah kompetensi dasar muatan lokal yang ditetapkan	1 muatan lokal	1 muatan lokal	75.000.000,00	75.000.000,00		20.000.000,00
	1	01	03	2.02	0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal							

						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		20.000.000,00
4	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase Pendidik Bersertifikat pendidik	57 Persen	57 Persen	9.266.286.000,00	11.210.336.000,00		15.000.000.000,00
	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti Diklat/Bimtek	824 Orang	824 Orang	9.266.286.000,00	9.266.286.000,00		15.000.000.000,00
	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
						Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1169 Dokumen	1169 Dokumen	200.786.000,00	244.286.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		1.000.000.000,00
	1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	616 Laporan	616 Laporan	9.065.500.000,00	10.966.050.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		14.000.000.000,00

5	1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Prosentase Penerbitan Rekomendasi Pendirian PAUD, SD dan SMP	75 Persen	75 Persen	15.000.000,00	15.000.000,00			20.000.000,00
	1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Prosentase rekomendasi ijin pendirian yang dikeluarkan jenjang PAUD	100 Persen	100 Persen	15.000.000,00	15.000.000,00			20.000.000,00
	1	01	05	2.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		20.000.000,00
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.998.500.000,00	2.497.000.000,00			1.570.000.000,00
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				1.998.500.000,00	2.497.000.000,00			1.570.000.000,00
6	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Prosentase kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	100 Persen	100 Persen	1.365.000.000,00	1.820.000.000,00			715.000.000,00
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten	20 Kelompok	20 Kelompok	635.000.000,00	635.000.000,00			450.000.000,00
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan								
							Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	20 Objek	2 Objek	215.000.000,00	615.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		300.000.000,00
	2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan								

						Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	200 Orang	200 Orang	420.000.000,00	420.000.000,00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		150.000.000,00
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten yang dilestarikan	100 Persen	100 Persen	730.000.000,00	730.000.000,00		265.000.000,00
	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya							
							Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	5 Objek	350.000.000,00	350.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	65.000.000,00
	2	22	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan							
							Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	5 Sertifikat	5 Sertifikat	380.000.000,00	435.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	200.000.000,00
7	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Prosentase kesenian tradisional yang dikembangkan Prosentase kesenian tradisional yang dikembangkan	100.00 100 % Persen	100.00 100 % Persen	84.000.000,00	127.500.000,00		105.000.000,00
	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten	3 kegiatan 3 Kegiatan	3 kegiatan 3 Kegiatan	84.000.000,00	84.000.000,00		105.000.000,00
	2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional							

						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	100 Orang	100 Orang	34.000.000,00	34.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		45.000.000,00
	2	22	03	2.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan							
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	50 Sertifikat	50 Sertifikat	50.000.000,00	93.500.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		60.000.000,00
8	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Prosentase Tradisi Budaya yang Dilestarikan	100 Persen	100 persen	200.000.000,00	200.000.000,00		250.000.000,00
	2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kegiatan Tradisi Budaya	5 Orang	12 Kegiatan	200.000.000,00	200.000.000,00		250.000.000,00
	2	22	04	2.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota							
						Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	100 Orang	1000 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		250.000.000,00
9	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Prosentase cagar budaya yang dilestarikan (pendaftaran, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	100 Persen	100 Persen	300.000.000,00	300.000.000,00		415.000.000,00

	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Presentase pendaftaran, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan yang diterbitkan	100 Persen	100 Persen	0,00	0,00			75.000.000,00
	2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya								
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	5 Objek	5 Objek	0,00	0,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		75.000.000,00
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Prosentase obyek Cagar Budaya yang dilindungi	100 Persen	100 Persen	300.000.000,00	300.000.000,00			340.000.000,00
	2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya								
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	3 Objek	3 Objek	200.000.000,00	200.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		215.000.000,00
	2	22	05	2.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya								
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	4 Objek	4 Objek	100.000.000,00	100.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		125.000.000,00
10	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Prosentase Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	100 Persen	100 Persen	49.500.000,00	49.500.000,00			85.000.000,00

	2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	2 Kegiatan	2 Kegiatan	49.500.000,00	49.500.000,00			85.000.000,00
	2	22	06	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu								
							Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	3 Unit	3 Unit	49.500.000,00	49.500.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		85.000.000,00
	J U M L A H									763.987.915.631,00	835.657.445.905,00			764.261.325.800,00

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal Tahun 2024 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja OPD yang efektif, optimal, dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan.

Perubahan Renja Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2024 yang akan digunakan sebagai dasar dan pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024.

Berkaitan dengan itu, diperlukan dukungan dan partisipasi langsung semua pihak dalam pelaksanaannya. Dukungan masyarakat dalam pembangunan pendidikan cukup nyata diperlukan karena pendidikan dan kebudayaan itu sendiri terkait dengan kebutuhan atau hajat para orang tua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah. Dukungan masyarakat secara umum diperlukan karena berbagai hasil pendidikan dan kebudayaan akan dimanfaatkan atau akan berdampak pada kepentingan kehidupan masyarakat. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, berfungsi juga sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024. Selain itu juga perlu adanya rencana tindak lanjut untuk evaluasi capaian indikator program.

Tabel.4.1
RENCANA TINDAK LANJUT
INDIKATOR PROGRAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
ANGGARAN PERUBAHAN 2024

No	Program	Indikator	Target 2024	Target Sasaran	Deskripsi kegiatan	Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, Pendidikan Kesetaraan, SD dan SMP	87,70	Tujuan dan sasaran bertujuan untuk mendorong pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat dan memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan jenjang usianya 1) Kesetaraan Gender: Mengurangi dan akhirnya menghilangkan kesenjangan APK antara anak laki-laki dan perempuan di semua jenjang pendidikan 2) Inklusivitas: Meningkatkan APK anak-anak berkebutuhan khusus dan memastikan mereka memiliki akses ke pendidikan inklusif 3) Pemerataan Geografis: Meningkatkan APK di daerah terpencil, pedesaan, dan wilayah tertinggal untuk mendekati atau menyamai tingkat partisipasi di daerah perkotaan.	1) Pembangunan dan rehabilitasi gedung dan sarana pembelajaran 2) Pelatihan peningkatan kualitas guru 3) Peningkatan kapasitas pendidikan guru/pengajar 4) Pemberian beasiswa bagi keluarga kurang mampu 5) Program pendidikan inklusi	1) Peningkatan jumlah peserta didik pada satuan pendidikan formal dan non formal 2) Peningkatan jumlah peserta didik pada satuan pendidikan formal dan non formal 2) keseimbangan partisipasi antara siswa laki-laki dan perempuan 3) partisipasi anak-anak dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi, termasuk kelompok miskin. 4) APK Pendidikan sesuai dengan target nasional dan daerah yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan 5) Persentase peserta didik yang berhasil menyelesaikan program pendidikan dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.	1) Bidang Pembinaan PAUD dan PNF 2) Bidang Pembinaan SD 3) Bidang Pembinaan SMP

No	Program	Indikator	Target 2024	Target Sasaran	Deskripsi kegiatan	Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab
2	Program Pengembangan Kurikulum	Prosentase Kurikulum muatan lokal yang ditetapkan	100,00	1) Penguatan identitas budaya daerah 2) Pelestarian bahasa daerah	Penetapan bahasa daerah sebagai kurikulum muatan lokal daerah	1) Meningkatnya Frekuensi penggunaan bahasa daerah oleh siswa dalam komunikasi sehari-hari di lingkungan sekolah dan di luar sekolah 2) Meningkatkan kesadaran dan kebanggaan siswa terhadap bahasa daerah dan budaya lokal 3) Tingkat partisipasi siswa dalam kegiatan yang menggunakan bahasa daerah, seperti lomba pidato, teater, atau puisi dalam bahasa daerah	1) Bidang Pembinaan PAUD dan PNF 2) Bidang Pembinaan SD 3) Bidang Pembinaan SMP
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prosentase Pendidik Bersertifikat pendidik	57,00	90 persen tenaga pendidik jenjang PAUD, SD dan SMP sudah memiliki sertifikat pendidik (bersertifikat)	1) sosialisasi persiapan Peningkatan Profesi Guru 2) kerja sama dengan perguruan tinggi lembaga sertifikasi	Prosentase capaian pendidikan bersertifikat melebihi target nasional dan target daerah	Bidang Pembinaan Ketenagaan
4	Program Pengendalian Perizinan	Prosentase Penerbitan Rekomendasi Pendirian PAUD, SD dan SMP	75,00	100 persen satuan pendidikan telah memiliki rekomendasi pendirian sekolah	Sosialisasi Penerbitan Rekomendasi Pendirian PAUD, SD dan SMP	Prosentase capaian Penerbitan Rekomendasi Pendirian satuan pendidikan melebihi target nasional dan target daerah	1) Bidang Pembinaan PAUD dan PNF 2) Bidang Pembinaan SD 3) Bidang Pembinaan SMP
5	Program Penunjang Urusan	Prosentase terpenuhinya layanan umum,	100,00	100 persen terpenuhinya layanan umum, kepegawaian	1) Pemenuhan sarana prasarana layanan umum	100 persen terpenuhinya layanan umum, kepegawaian	Sekretariat

No	Program	Indikator	Target 2024	Target Sasaran	Deskripsi kegiatan	Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	kepegawaian dan keuangan perangkat daerah		dan keuangan perangkat daerah 1) Peningkatan pelayanan umum, Meningkatkan efisiensi pelayanan publik dengan digitalisasi proses administrasi dan pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan yang terintegrasi. 2) Layanan Kepegawaian, Memperbarui data kepegawaian secara berkala, meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta memperkuat sistem penilaian kinerja pegawai. 3) Keuangan, Mengembangkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi keuangan berbasis teknologi.	2) SDM yang kompeten dan tercukupi 3) SOP pelayanan publik 4) Bintek pengelolaan kepegawaian 5) Bintek pengelolaan keuangan	dan keuangan perangkat daerah	
		Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah.	100,00	100 persen terpenuhinya ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah. 1) Meningkatkan kualitas perencanaan dengan menyusun dokumen perencanaan yang tepat waktu dan sesuai dengan	1) rakor penyusunan perencanaan program kegiatan 2) rakor penyusunan dokumen anggaran 3) evaluasi perencanaan program dan kegiatan	100 persen terpenuhinya ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah.	Sekretariat

No	Program	Indikator	Target 2024	Target Sasaran	Deskripsi kegiatan	Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab
				kebutuhan serta prioritas pembangunan daerah 2) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dengan memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan dan aturan yang berlaku 3) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran sehingga anggaran yang disusun benar-benar mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah	4) penguatan sistem informasi perencanaan dan keuangan 5) pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM		
6	Program Pengembangan Kebudayaan	Prosentase kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	100,00	Capaian Prosentase kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman) adalah 100 persen atau lebih 1) pelesatريان warisan budaya tak benda 2) revitalisasi dan pengembangan kesenian tradisional 3) pendidikan dan edukasi budaya daerah 4) promosi kebudayaan daerah 5) pengarsipan dan digitalisasi budaya daerah	1) Festival atau pertunjukan seni daerah dan budaya 2) pendataan, pengumpulan informasi, dan dokumentasi tentang warisan budaya takbenda 3) pemasangan papan informasi edukatif di situs cagar budaya untuk memberikan pengetahuan kepada pengunjung tentang sejarah dan pentingnya situs 4) Fasilitasi kegiatan budaya daerah	1) Pengakuan warisan budaya 2) Pemeliharaan situs budaya 3) Pengenalan budaya kepada generasi muda 4) Akses dan publikasi informasi budaya	Bidang Kebudayaan
7	Program Pengembangan	Prosentase kesenian	100,00	Capaian Prosentase kesenian tradisional yang dikembangkan adalah 100 persen atau lebih	1) Fersival kesenian tradisional 2) Pelatihan kesenian	1) Bertambahnya sanggar seni	Bidang Kebudayaan

No	Program	Indikator	Target 2024	Target Sasaran	Deskripsi kegiatan	Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab
	Kesenian Tradisional	tradisional yang dikembangkan		Kelompok sasaran : pelaku seni, kelompok kesenian tradisional.	3) Pertunjukan kesenian tradisional di tiap kecamatan 4) Lomba kesenian tradisional 5) Pembinaan pelaku seni dan kelompok seni	2) Partisipasi masyarakat yang meningkat 3) Pemeliharaan kualitas dan keaslian kesenian tradisional	
8	Program Pembinaan Sejarah	Prosentase Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat dibagi Jumlah Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat yang direncanakan dikalikan 100.	100,00	Capaian Prosentase Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat adalah 100 persen atau lebih Kelompok sasaran : pemerintah daerah, masyarakat, sejarawan, dan pelajar	1) Pembinaan SDM penjaga situs budaya 2) Kunjungan ke situs budaya yang ada di wilayah kabupaten Kendal	Museum daerah Kabupaten Kendal	Bidang Kebudayaan
9	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Prosentase cagar budaya yang dilestarikan (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	100,00	Capaian Prosentase cagar budaya yang dilestarikan (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan) adalah 100 persen atau lebih Kelompok sasaran : pemerintah daerah, masyarakat	1) Pemeliharaan bangunan cagar budaya 2) Pendataan bangunan cagar budaya 3) Pengusulan penetapan cagar budaya	Pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya	Bidang Kebudayaan
10	Program Pengelolaan Permuseuman	Prosentase Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	100,00	Capaian Prosentase Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat adalah 100 persen atau lebih Kelompok sasaran : pemerintah daerah, masyarakat	1) Pembinaan SDM penjaga situs budaya 2) Kunjungan ke situs budaya yang ada di wilayah kabupaten Kendal	Museum daerah Kabupaten Kendal	Bidang Kebudayaan

Rencana Kerja juga dapat digunakan selain sebagai sarana atau pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi Dinas dan Kebudayaan Kabupaten Kendal, juga memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja di masa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Kendal, 2024.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kendal



Drs. FERINANDO RAD BONAY

Pembina Utama Muda

NIP. 19730223 199302 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SUKOREJO
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KECAMATAN SUKOREJO
KABUPATEN KENDAL
Jl. Raya No. 81 Sukorejo Telp. (0294) 451002**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas ridho-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Sukorejo Tahun 2024.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal.

Adapun Penyusunan Perubahan Renja PD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukorejo Tahun 2024 diharapkan dapat benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Kecamatan Sukorejo tahun 2025 mendatang.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparat terkait di Kecamatan Sukorejo, yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukorejo Tahun 2024 ini. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih ada kekurangan oleh karena itu kami mohon saran untuk penyempurnaan Renja di tahun yang akan datang.

Kendal,

2024


Kecamatan Sukorejo,
TEJO PRAMONO SAKTI, S.IP.
Pembina
NIP. 197210012003121010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Bab I Pendahuluan 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Landasan Hukum 3

 1.3. Maksud dan Tujuan 5

 1.4. Sistematika Penulisan 6

Bab II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan 8

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun
 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 8

 2.2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 25

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 26

Bab IV Penutup 80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan merupakan upaya pemerintah Kabupaten Kendal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu serta berkelanjutan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai bagian dari perencanaan Pembangunan Nasional.

Perubahan RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan akhir RKPD Perubahan. Renstra Perangkat Daerah juga menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD Perubahan yang disusun ke dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD Perubahan. Pembuatan RKPD Perubahan, sesuai

dengan Pasal 7 Undang-undang No.25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD Kabupaten, sedangkan RKPD Perubahan dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon anggaran sementara (PPAS).

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Sukorejo Tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan Pembangunan melalui penyelenggaraan Musernbang Tahunan yang dilaksanakan secara berjenjang untuk keterpaduan Perubahan Renja Perangkat Daerah, Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Sukorejo sebagai satuan kerja Perangkat Daerah, pada Tahun 2024 ini menyusun Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo Tahun 2024, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen rencana Pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD Perubahan yang disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai SKPD, sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo Tahun 2024 merupakan Rencana Pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kendal periode 2021-2026, menetapkan visi yang akan menjadi arah penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan dalam 5 (lima) Tahun ke depan adalah “Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan”.

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Kendal dan dalam rangka mendukung visi dan misi Kabupaten Kendal maka setiap Perangkat Daerah harus menjalankan visi dan misi Kepala Daerahnya adapun misi yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Sukorejo adalah Misi Kelima yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi dengan memberikan ruang

yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1, Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 20).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Maksud
 - a. Menjadi pedoman penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS, serta Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2024.
 - b. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun berjalan;
 - c. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun berjalan;
 - d. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun berjalan;

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukorejo Tahun 2024 adalah untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi makro sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja PD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuanserta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Pada bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan perkiraan capaian tahun berjalan, kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah beserta dana yang dibutuhkan dan penjelasan tentang urusan/bidang urusan pemerintah daerah.

BAB IV : PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka

pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sukorejo sampai dengan semester 1 untuk Nilai SAKIP dari target 77 realisasi 72,45 (95,5%) dengan status capaian tinggi Hal ini dikarenakan efiden SAKIP sudah dilaksanakan beserta data dukung dan hasil Rekomendasi LHE AKIP sudah di tindak lanjuti dan dilaksanakan. Nilai IKM dari Target 87 Realisasi 96,03 (109,03) dengan status capaian sangat tinggi hal ini dikarenakan Pelayanan di Kecamatan Sukorejo sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang dibuat, Pelayanan Cepat dan Mudah, sehingga masyarakat merasa puas atas produk layanan yang ada di Kecamatan Sukorejo.

Permasalahan yang muncul dari realisasi capaian kinerja Kecamatan Sukorejo sampai dengan triwulan II tahun 2024 adalah tidak tercapainya tingkat capaian kinerja dikarenakan tidak seluruh anggaran terealisasi sampai dengan triwulan II.

Faktor yang mendukung tidak tercapainya Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan II adalah Realisasi anggaran belum sampai dengan satu tahun anggaran. Realisasi Capaian Kinerja dapat tercapai seluruhnya pada waktu triwulan ke IV. Faktor lain yang mempengaruhi adanya re-efisiensi anggaran di beberapa kegiatan maupun sub kegiatan.

Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/ PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan –

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukorejo menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Sukorejo sampai dengan Triwulan II 2024. Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sukorejo sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2024 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Adapun gambaran lebih lengkap mengenai realisasi pencapaian kinerja Kecamatan Sukorejo Tahun Anggaran 2024 berdasarkan evaluasi pengukuran kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Merupakan program yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan umum administrasi sebagai fungsi penunjang kinerja pelaksanaan kegiatan pelayanan serta administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal.

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah :

a. Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah , dengan 1 sub kegiatan

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Indikator Kinerja antara lain :

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp. 2.030.794.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp. 1.016.802.345,- |
| Realisasi Anggaran (%) | : | 50% |
| 2. Indikator kinerja capaian keluaran | : | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |
| 3. Target capaian kegiatan | : | 18 Orang/bulan |

- 4. Realisasi capaian kegiatan : 14 Orang/bulan
- 5. Tingkat capaian kinerja (%) : 78%

Tidak tercapainnya realisasi capaian kinerja disebabkan jumlah pegawai semakin berkurang karena purna tugas, mutasi pegawai dan penyesuaian anggaran disesuaikan jumlah pegawai.

b. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**, dengan 5 sub kegiatan dan Indikator Kinerjanya :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- 1. Pagu Anggaran : Rp. 6.551.400,-
Realisasi Anggaran : Rp. 5.048.600,-
Realisasi Anggaran (%) : 77%
- 2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Paket
keluaran Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan
- 3. Target capaian kegiatan : 5 Paket
- 4. Realisasi capaian kegiatan : 4 Paket
- 5. Tingkat capaian kinerja (%) : 80 %

Tidak tercapainnya realisasi capaian kinerja disebabkan realisasi anggaran belum sampai dengan satu tahun anggaran/ belum sampai triwulan IV.

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- 1. Pagu Anggaran : Rp. 24.015.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 12.300.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 51%
- 2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Paket
keluaran Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
- 3. Target capaian kegiatan : 4 Paket
- 4. Realisasi capaian kegiatan : 2 Paket
- 5. Tingkat capaian kinerja (%) : 50%

Tidak tercapainnya realisasi capaian kinerja disebabkan realisasi anggaran belum sampai dengan satu tahun anggaran/ belum sampai triwulan IV.

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1. Pagu Anggaran : Rp. 6.264.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 4.515.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 72%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Paket Bahan
keluaran Logistik Kantor yang
Disediakan
3. Target capaian kegiatan : 12 Paket
4. Realisasi capaian kegiatan : 9 Paket
5. Tingkat capaian kinerja (%) : 75%

Tidak tercapainnya realisasi capaian kinerja disebabkan realisasi anggaran belum sampai dengan satu tahun anggaran/ belum sampai triwulan IV.

4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1. Pagu Anggaran : Rp. 16.517.600,-
Realisasi Anggaran : Rp. 1.680.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 10%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Paket Barang
keluaran Cetak dan
Penggandaan yang
Disediakan
3. Target capaian kegiatan : 12 Paket
4. Realisasi capaian kegiatan : 1 Paket
5. Tingkat capaian kinerja (%) : 8 %

Tidak tercapainnya realisasi capaian kinerja disebabkan realisasi anggaran belum sampai dengan satu tahun anggaran/ belum sampai triwulan IV.

5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1. Pagu Anggaran : Rp. 216.128.612,-
Realisasi Anggaran : Rp. 39.451.000,-

- | | | | |
|----|------------------------------------|---|---|
| | Realisasi Anggaran (%) | : | 18% |
| 2. | Indikator kinerja capaian keluaran | : | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| 3. | Target capaian kegiatan | : | 12 Laporan |
| 4. | Realisasi capaian kegiatan | : | 2 Laporan |
| 5. | Tingkat capaian kinerja (%) | : | 16% |

Tidak tercapainnya realisasi capaian kinerja disebabkan realisasi anggaran belum sampai dengan satu tahun anggaran/ belum sampai triwulan IV.

c. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan 1 sub kegiatan

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Indikator Kinerja antara lain:

- | | | | |
|----|------------------------------------|---|---|
| 1. | Pagu Anggaran | : | Rp. 5.652.000,- |
| | Realisasi Anggaran | : | Rp. 0 |
| | Realisasi Anggaran (%) | : | 0% |
| 2. | Indikator kinerja capaian keluaran | : | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan |
| 3. | Target capaian kegiatan | : | 2 Unit |
| 4. | Realisasi capaian kegiatan | : | 0 Unit |
| 5. | Tingkat capaian kinerja (%) | : | 0% |

Tidak tercapainnya realisasi capaian kinerja dikarenakan adanya re-efisiensi anggaran di beberapa kegiatan maupun sub kegiatan.

d. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan 3 sub kegiatan dan Indikator Kinerja antara lain :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- | | | | |
|----|---------------------------|---|-----------------|
| 1. | Pagu Anggaran | : | Rp. 6.500.000,- |
| | Realisasi Anggaran | : | Rp. 2.000.000,- |
| | Realisasi Anggaran (%) | : | 30% |
| 2. | Indikator kinerja capaian | : | Jumlah Laporan |

- | keluaran | Penyediaan | Jasa |
|--------------------------------|----------------|-----------|
| | Surat Menyurat | |
| 3. Target capaian kegiatan | : | 5 Laporan |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : | 2 Laporan |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%) | : | 40% |

Tidak tercapainnya realisasi capaian kinerja disebabkan realisasi anggaran belum sampai dengan satu tahun anggaran/ belum sampai triwulan IV.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp. 27.325.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp. 11.890.293,- |
| Realisasi Anggaran (%) | : | 44% |
| 2. Indikator kinerja capaian | : | Jumlah laporan |
| keluaran | | penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan. |
| 3. Target capaian kegiatan | : | 12 laporan |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : | 5 laporan |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%) | : | 41% |

Tidak tercapainnya realisasi capaian kinerja disebabkan realisasi anggaran belum sampai dengan satu tahun anggaran/ belum sampai triwulan IV.

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp. 77.924.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp. 41.890.000,- |
| Realisasi Anggaran (%) | : | 54% |
| 2. Indikator kinerja capaian | : | Jumlah laporan |
| keluaran | | penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan |
| 3. Target capaian kegiatan | : | 12 Laporan |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : | 6 Laporan |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%) | : | 50% |

Tidak tercapainnya realisasi capaian kinerja disebabkan realisasi anggaran belum sampai dengan satu tahun anggaran/ belum sampai triwulan IV.

e. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan 4 sub kegiatan dan Indikator Kinerja antara lain:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp. 33.462.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp. 6.157.000,- |
| Realisasi Anggaran (%) | : | 18% |
| 2. Indikator kinerja capaian | : | Jumlah Kendaraan keluaran Dinas Oprasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |
| 3. Target capaian kegiatan | : | 28 Unit |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : | 5 Unit |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%) | : | 17% |

Tidak tercapainnya realisasi capaian kinerja disebabkan realisasi anggaran belum sampai dengan satu tahun anggaran/ belum sampai triwulan IV.

2. **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya**

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp. 4.990.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp. 0 |
| Realisasi Anggaran (%) | : | 0% |
| 2. Indikator kinerja capaian | : | Jumlah Peralatan dan keluaran Mesin Lainnya yang Dipelihara |
| 3. Target capaian kegiatan | : | 4 Unit |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : | 0 Unit |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%) | : | 0% |

Tidak tercapainnya realisasi capaian kinerja dikarenakan adanya re-efisiensi anggaran di beberapa kegiatan maupun sub kegiatan.

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp. 65.716.640,- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp. 0 |
| Realisasi Anggaran (%) | : | 0% |
| 2. Indikator kinerja capaian | : | Jumlah Gedung keluaran Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |
| 3. Target capaian kegiatan | : | 1 Unit |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : | 0 Unit |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%) | : | 0% |

Tidak tercapainnya realisasi capaian kinerja dikarenakan adanya re-efisiensi anggaran di beberapa kegiatan maupun sub kegiatan.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan Indikator Kinerja antara lain : | | |
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp. 26.966.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp. 24.140.400,- |
| Realisasi Anggaran (%) | : | 90% |
| 2. Indikator kinerja capaian | : | Jumlah Laporan keluaran Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
| 3. Target capaian kegiatan | : | 2 Laporan |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : | 2 Laporan |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%) | : | 100% |

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah

a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan sub kegiatan:

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran	: Rp. 95.400.000,-
Realisasi Anggaran	: Rp. 63.120.000,-
Realisasi Anggaran (%)	: 66%

2. Indikator kinerja capaian keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
---------------------------------------	---

3. Target capaian kegiatan : 12 Laporan

4. Realisasi capaian kegiatan : 8 Laporan

5. Tingkat capaian kinerja (%) : 67%

Tidak tercapainya realisasi capaian kinerja disebabkan realisasi anggaran belum sampai dengan satu tahun anggaran/ belum sampai triwulan IV.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan sub kegiatan antara lain:

1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan

Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Indikator Kinerja antara lain :

- 1. Pagu Anggaran : Rp. 100.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 0
Realisasi Anggaran (%) : 0%
- 2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Orang yang keluaran Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
- 3. Target capaian kegiatan : 24 Orang
- 4. Realisasi capaian kegiatan : 0 Orang
- 5. Tingkat capaian kinerja (%) : 0%

Tidak tercapainnya realisasi capaian kinerja dikarenakan adanya re-efisiensi anggaran di beberapa kegiatan maupun sub kegiatan

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan sub kegiatan antara lain:

- 1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan Indikator Kinerja antara lain :
 - 1. Pagu Anggaran : Rp. 42.820.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 14.900.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 35%

2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Dokumen keluaran yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
3. Target capaian kegiatan : 2 Dokumen
4. Realisasi capaian kegiatan : 1 Dokumen
5. Tingkat capaian kinerja (%) : 50%

Tidak tercapainnya realisasi capaian kinerja disebabkan realisasi anggaran belum sampai dengan satu tahun anggaran/ belum sampai triwulan IV.

2. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 10.192.800,-
Realisasi Anggaran : Rp.0
Realisasi Anggaran (%) : 0%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Dokumen keluaran yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
3. Target capaian kegiatan : 4 Dokumen
4. Realisasi capaian kegiatan : 0 Dokumen
5. Tingkat capaian kinerja (%) : 0%

Tidak tercapainnya realisasi capaian kinerja dikarenakan adanya re-efisiensi anggaran di beberapa kegiatan maupun sub kegiatan.

Adapun gambaran penggunaan anggaran Kecamatan Sukorejo sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.698.454.852,- terserap anggaran sebesar Rp. 1.621.748.924,- Keseluruhan anggaran yang telah dicairkan, telah direalisasikan kegiatannya dan telah dipertanggung jawabkan (di-SPJ-kan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adapun anggaran yang belum terserap sebesar Rp. 1.076.705.928,-.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sukorejo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Unit Kerja yang terlayani	100	100	23	23	100	100	100
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan yang tersusun	14	14	14	100	14	14	100
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	14	100	14	14	100
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor	100	100	100	100	100	100	100

7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100	5	5	100	12	5	100
7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2000	4	4	100	1	4	100
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	12	12	100	12	12	100
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12	12	12	100	12	12	100
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	12	12	100	12	12	100
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	Jumlah aset yang diadakan	14	4	4	100	4	4	100
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	6	2	5	100	2	2	100
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor	12	12	12	100	12	12	100
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750	5	5	100	450	5	100

7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Persediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	100	12	12	100
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	100	12	12	100
7.01.01.2.09	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit aset yang terpelihara	86	39	39	100	23	39	100
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Pajak Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	28	28	100	15	28	100
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28	4	4	100	7	4	100
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	1	1	100	1	1	100

7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang RKPD	100	100	100	100	100	100	100
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	2	2	2	100	18	2	100
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	2	2	100	18	2	100
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100	100	67	67	100	100	100
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12	2	2	100	12	2	100
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	12	12	100	12	12	100

7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase kasus konflik social yang ditangani	100	100	100	0	100	100	100
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan	7	7	7	100	7	7	100
7.01.05.2.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5	24	24	100	5	24	100
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa Maju	45	100	17	17	100	100	100

7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes jumlah koordinasi yang dilaksanakan	18	17	17	100	18	17	100
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5	2	2	100	5	2	100
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Penyandangunaan Aset Desa	18	4	4	100	18	4	100

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan ;

- a. Realisasi jasa perizinan kendaraan dinas/operasional kurang sesuai dengan jumlah yang tertera di Surat Tanda Nomor Kendaraan ;
 - b. Adanya re-efisiensi anggaran di beberapa rekening kegiatan
- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut**

Perencanaan dan penganggaran lebih efektif dan menggunakan aplikasi SIPD yang standarisasi biayanya sesuai dengan Peraturan Bupati Kendal.

2.2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukorejo Tahun 2024 tidak memasukkan usulan dari masyarakat yang disampaikan lewat kegiatan Musrenbangcam, karena program/kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan bersifat rutin dan tugas pokok yang dilakukan bersifat koordinatif dan pembinaan. Sedangkan usulan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat bersifat fisik.

Usulan yang berasal dari masyarakat tersebut selanjutnya ditampung dalam Daftar Usulan Prioritas Kegiatan yang kemudian disampaikan dalam Musrenbangkab. Program/kegiatan yang berasal dari masyarakat tersebut diperjuangkan dan dikawal oleh Tim Kecamatan agar masuk dalam program/kegiatan prioritas di OPD teknis terkait yang ada di Kabupaten Kendal.

Dalam Menyusun Usulan Perubahan Renja Kecamatan Sukorejo tidak mendapat usulan aspirasi dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD untuk tahun anggaran 2024.

Tabel 2.2
Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat
Pada Perubahan Tahun 2024 Kabupaten Kendal
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sukorejo

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah untuk menangani sabagai urusan otonomi daerah, dan sebagai penjabaran misi yang kelima seperti tersebut diatas, maka tujuan yang ditetapkan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 pada Kecamatan Sukorejo yaitu “Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam perumusan hingga evaluasi kebijakan”. Tahun 2024 Kecamatan Sukorejo memasang plafon anggaran sebesar Rp. 2.792.301.849,- menjadi Rp. 2.698.454.852,- bertambah/berkurang Rp. 93.846.997,- dengan jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Sukorejo Tahun 2024 adalah 6 program dan 15 Kegiatan sehingga dapat dijabarkan dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota dengan Anggaran Rp. 2.521.840.252,-

Kegiatan :

- a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 2.030.794.000,-
Sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 2.030.794.000,-
- b) Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 231.785.462,-
Sub kegiatan :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor sebesar Rp. 6.551.400,-
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 24.015.000,-
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp. 6.264.000,-

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 16.517.600,-
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 216.128.612,-
- c) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp. 5.652.000,-
Sub kegiatan :
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 5.652.000,-
- d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp109.749.000,-
Sub kegiatan :
 - Penyediaan Surat Menyurat sebesar Rp. 6.500.000,-
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 27.352.000,-
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 77.924.000,-
- e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp. 54.168.590,-
Sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 33.462.000,-
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 4.990.000,-
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya sebesar Rp. 65.716.640,-

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Anggaran Rp. 35.908.000,-

Kegiatan :

- a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sebesar Rp. 27.381.800,-
Sub kegiatan

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebesar Rp. 26.966.000,-

3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Anggaran Rp. 95.400.000,-

Kegiatan :

- a) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebesar Rp. 95.400.000,-

Sub kegiatan :

- Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp. 95.400.000,-

4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Anggaran sebesar Rp. 100.000,-

Kegiatan :

- a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah sebesar Rp. 100.000,-

Sub kegiatan :

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar Rp. 100.000,-

5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Anggaran Rp. 53.732.800,-

Kegiatan :

- a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 43.424.000,-

Sub kegiatan :

- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa sebesar Rp. 42.820.000,-

- Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa sebesar Rp. 10.912.800,-

Rincian Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat daerah terlampir pada tabel hasil print out SIPD RI dibawah ini :

Tabel 3.1
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUKOREJO KAB. KENDAL
TAHUN 2024

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKA SI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
				SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBA HAN 2024				NASIO NAL	DAERA H				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN SUKOREJO					2.792.301. 849,00	2.898.454. 852,00	2.698.454. 852,00	- 93.846.997,00						3.282.113. 000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAH AN				2.792.301. 849,00	2.898.454. 852,00	2.698.454. 852,00	- 93.846.997,00							3.282.113. 000,00	
	7.01	KECAMATAN				2.792.301. 849,00	2.898.454. 852,00	2.698.454. 852,00	- 93.846.997,00							3.282.113. 000,00	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Prosentase unit kerja yang terlayani	100 %	100 %	2.527.630. 049,00	2.732.149. 052,00	2.521.840. 252,00	357.899.951,0 0							2.885.530. 000,00	

	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun</i>	19 dokumen	19 dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00			-	-	Kecamatan Sukorejo		12.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	4 Dokumen	4 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															

			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	4 Laporan	4 Laporan	6.000.000,0 0	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Kendal , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.000.000,0 0	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen laporan yang tersusun</i>	14 laporan	14 laporan	2.228.594.0 00,00	2.330.794.0 00,00	2.030.794.0 00,00	- 197.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Kecamatan Sukorejo		2.188.680.0 00,00	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2. 02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															

			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	18 Orang/ bulan	18 Orang/ bulan	2.139.914.000,00	2.330.794.000,00	2.030.794.000,00	- 109.120.000,00	Kab. Kendal , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			2.100.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	88.680.000,00	0,00	0,00	-88.680.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			88.680.000,00	KECAMATAN SUKOREJO

	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		15.500.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	18 Paket	18 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal , Sukorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.500.000,00	KECAMATAN SUKOREJO

	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor</i>	100 %	100 %	103.875.854,00	231.785.462,00	269.476.612,00	165.600.758,00			Memperkuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	- -	Kecamatan Sukorejo		305.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	5 Paket	5 Paket	6.551.400,00	6.551.400,00	6.551.400,00	0,00	Kab. Kendal , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	- -			6.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															

			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	4 Paket	19.758.500,00	19.758.500,00	24.015.000,00	4.256.500,00	Kab. Kendal , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim			29.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															

			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-			13.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	12 Paket	11.704.000,00	6.264.000,00	6.264.000,00	-5.440.000,00	Kab. Kendal , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			9.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																

			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	12 Paket	16.023.600, 00	16.517.600, 00	16.517.600, 00	494.000,00	Kab. Kendal , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	- -			12.000.000, 00	KECAMA TAN SUKOREJ O
	7.01.01.2. 06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan</i>	12 Dokum en	12 Dokum en	1.800.000,0 0	0,00	0,00	-1.800.000,00	Kab. Kendal , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj utan dengan memperh atikan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj			18.000.000, 00	KECAMA TAN SUKOREJ O

													utan dengan memperh atikan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim				
	7.01.01.2. 06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Lapora n	12 Lapora n	48.038.354, 00	182.693.96 2,00	216.128.61 2,00	168.090.258,00	Kab. Kendal , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	- -			215.000.00 0,00	KECAMA TAN SUKOREJ O
	7.01.01.2. 06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD															

			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			3.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah aset yang diadakan</i>	4 unit	4 unit	50.775.000,00	5.652.000,00	5.652.000,00	-45.123.000,00			-	- -	Kecamatan Sukorejo		195.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel															

			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	2 Unit	2 Unit	21.000.000, 00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Kendal , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	- -			60.000.000, 00	KECAMA TAN SUKOREJ O
	7.01.01.2. 07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	2 Unit	5 Unit	29.775.000, 00	5.652.000,0 0	5.652.000,0 0	-24.123.000,00	Kab. Kendal , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	- -			60.000.000, 00	KECAMA TAN SUKOREJ O
	7.01.01.2. 07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															

			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			75.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah bulan tersedianya jasa kantor</i>	12 bulan	12 bulan	87.889.000,00	109.749.000,00	111.749.000,00	23.860.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan	Kecamatan Sukorejo		141.364.000,00	KECAMATAN SUKOREJO

													memperh atikan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim				
	7.01.01.2. 08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	5 Lapora n	5 Lapora n	4.500.000,0 0	4.500.000,0 0	6.500.000,0 0	2.000.000,00	Kab. Kendal , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj utan dengan memperh atikan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj			4.500.000,0 0	KECAMA TAN SUKOREJ O

													utan dengan memperh atikan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim				
	7.01.01.2. 08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Lapora n	12 Lapora n	27.325.000, 00	27.325.000, 00	27.325.000, 00	0,00	Kab. Kendal , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj utan dengan memperh atikan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj			45.000.000, 00	KECAMA TAN SUKOREJ O

													utan dengan memperh atikan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim				
	7.01.01.2. 08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Lapora n	12 Lapora n	56.064.000, 00	77.924.000, 00	77.924.000, 00	21.860.000,00	Kab. Kendal , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj utan dengan memperh atikan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj			1.864.000,0 0	9 KECAMA TAN SUKOREJ O

													utan dengan memperh atkan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim				
	7.01.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah unit aset yang terpelihara</i>	39 unit	39 unit	44.496.195, 00	54.168.590, 00	104.168.64 0,00	59.672.445,00			Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj utan dengan memperh atkan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan	Kecama tan Sukorej o		7.986.000,0 0	2 KECAMA TAN SUKOREJ O

													berkelanj utan dengan memperh atikan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim				
	7.01.01.2. 09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	28 Unit	28 Unit	22.080.000, 00	33.462.000, 00	33.462.000, 00	11.382.000,00	Kab. Kendal , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj utan dengan memperh atikan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj			.000.000,00	KECAMA TAN SUKOREJ O

													utan dengan memperh atikan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim				
	7.01.01.2. 09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	4 Unit	4 Unit	8.400.000,0 0	4.990.000,0 0	4.990.000,0 0	-3.410.000,00	Kab. Kendal , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj utan dengan memperh atikan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj			.000.000,00	KECAMA TAN SUKOREJ O

													utan dengan memperh atikan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim				
	7.01.01.2. 09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya															
			<i>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara</i>	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal , Sukore jo, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj utan dengan memperh atikan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj			.990.000,00	KECAMA TAN SUKOREJ O

													utan dengan memperh atikan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim				
	7.01.01.2. 09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi</i>	1 Unit	1 Unit	14.016.195, 00	15.716.590, 00	65.716.640, 00	51.700.445,00	Kab. Kendal , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj utan dengan memperh atikan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj			4.996.000,0 0	KECAMA TAN SUKOREJ O

													utan dengan memperh atikan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim				
2,	7.01.02	PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTA HAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100 %	100 %	17.312.80 0,00	0,00	0,00	- 10.812.800,00							.500.000,0 0	
	7.01.02.2. 01	Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah koordinasi yang dilaksanakan</i>	6 kegiata n	6 kegiata n	14.560.000, 00	0,00	0,00	-14.560.000,00			-	Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj utan dengan memperh atikan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim	Kecama tan Sukorej o		3.000.000,0 0	KECAMA TAN SUKOREJ O

													Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj utan dengan memperh atikan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim					
	7.01.02.2. 01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	1 Lapora n	1 Lapora n	7.280.000,0 0	0,00	0,00	-7.280.000,00	Kab. Kendal , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj utan dengan memperh atikan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan			1.500.000,0 0	KECAMA TAN SUKOREJ O	

													berkelanj utan dengan memperh atikan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim				
	7.01.02.2. 01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	1 Dokum en	1 Dokum en	7.280.000,0 0	0,00	0,00	-7.280.000,00	Kab. Kendal , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj utan dengan memperh atikan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj			1.500.000,0 0	KECAMA TAN SUKOREJ O

													utan dengan memperh atkan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim				
	7.01.02.2. 04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan</i>	1 kegiata n	1 kegiata n	2.752.800,0 0	0,00	0,00	-2.752.800,00			-	Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj utan dengan memperh atkan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj utan dengan	Kecama tan Sukorej o		3.500.000,0 0	KECAMA TAN SUKOREJ O

													memperh atkan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim				
	7.01.02.2. 04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha															
			<i>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan</i>	1 Dokum en	1 Dokum en	2.752.800,0 0	0,00	0,00	-2.752.800,00	Kab. Kendal , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj utan dengan memperh atkan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj			3.500.000,0 0	KECAMA TAN SUKOREJ O

													utan dengan memperh atikan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim				
3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAK AT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase penduduk miskin yang mendapat bantuan sosial	100 %	100 %	31.233.00 0,00	27.381.80 0,00	27.381.80 0,00	79.267.000,00							110.500.0 00,00	
	7.01.03.2. 01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaa n desa</i>	2 kegiata n	2 kegiata n	31.233.000, 00	27.381.800, 00	27.381.800, 00	-3.851.200,00			-	Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj utan dengan memperh atikan kelestari an lingkung an dan perubaha	Kecama tan Sukorej o		67.500.000, 00	KECAMA TAN SUKOREJ O

													n iklim Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj utan dengan memperh atkan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim					
	7.01.03.2. 01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																
		<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa</i>	25 Lemba ga K emasya rak atan	25 Lemba ga K emasya rak atan	10.511.000, 00	415.800,00	415.800,00	-10.095.200,00	Kab. Kendal , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj utan dengan memperh atkan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim Pembang unan infrastru ktur yang berkualit				22.500.000, 00	KECAMA TAN SUKOREJ O	

													as dan berkelanj utan dengan memperh atkan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim				
	7.01.03.2. 01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan															
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	2 Lapora n	2 Lapora n	20.722.000, 00	26.966.000, 00	26.966.000, 00	6.244.000,00	Kab. Kendal , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj utan dengan memperh atkan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj			45.000.000, 00	KECAMA TAN SUKOREJ O

													utan dengan memperh atkan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim				
	7.01.03.2. 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj utan dengan memperh atkan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj utan dengan	-		43.000.000, 00	KECAMA TAN SUKOREJ O

													memperh atikan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim				
	7.01.03.2. 02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	0 Lemba ga Kemas yara katan	0 Lemba ga Kemas yara katan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal , Sukore jo, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj utan dengan memperh atikan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj			43.000.000, 00	KECAMA TAN SUKOREJ O

													utan dengan memperh atikan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim				
4,	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100 %	100 %	92.300.00 0,00	95.400.00 0,00	95.400.00 0,00	88.700.000,00							181.000.0 00,00	
	7.01.04.2. 01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah koordinasi yang dilaksanakan</i>	2 kegiata n	2 kegiata n	4.300.000,0 0	0,00	0,00	-4.300.000,00			-	Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj utan dengan memperh atikan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim	Kecama tan Sukorej o		93.000.000, 00	KECAMA TAN SUKOREJ O

													Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj utan dengan memperh atikan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim					
	7.01.04.2. 01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	2 Lapora n	2 Lapora n	4.300.000,0 0	0,00	0,00	-4.300.000,00	Kab. Kendal , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj utan dengan memperh atikan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan			5.000.000,0 0	KECAMA TAN SUKOREJ O	

													berkelanj utan dengan memperh atikan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim				
	7.01.04.2. 01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat															
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	12 Lapora n	12 Lapora n	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj utan dengan memperh atikan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj			88.000.000, 00	KECAMA TAN SUKOREJ O

													utan dengan memperh atkan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim				
	7.01.04.2. 02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<i>Jumlah koordinasi yang dilaksanakan</i>	2 kegiata n	2 kegiata n	88.000.000, 00	95.400.000, 00	95.400.000, 00	7.400.000,00			-	Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj utan dengan memperh atkan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj utan dengan	Kecama tan Sukorej o		88.000.000, 00	KECAMA TAN SUKOREJ O

													memperh atkan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim				
	7.01.04.2. 02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia															
		<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	12 Lapora n	12 Lapora n	88.000.000, 00	95.400.000, 00	95.400.000, 00	7.400.000,00	Kab. Kendal , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj utan dengan memperh atkan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj			88.000.000, 00	KECAMA TAN SUKOREJ O	

													utan dengan memperh atikan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim				
5,	7.01.05	PROGRAM PENYELENG GARAAN URUSAN PEMERINTA HAN UMUM	Prosentase kasus konflik sosial yang ditangani	100 %	100 %	21.800.00 0,00	100.000,0 0	100.000,0 0	- 12.717.000,00							9.083.000, 00	
	7.01.05.2. 01	Penyelenggara n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan</i>	7 kegiata n	7 kegiata n	21.800.000, 00	100.000,00	100.000,00	-21.700.000,00			-	Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj utan dengan memperh atikan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim	Kecama tan Sukorej o		9.083.000,0 0	KECAMA TAN SUKOREJ O

												Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj utan dengan memperh atikan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim					
	7.01.05.2. 01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika</i>	24 Orang	24 Orang	7.360.000,0 0	100.000,00	100.000,00	-7.260.000,00	Kab. Kendal , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj utan dengan memperh atikan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan			1.283.000,0 0	KECAMA TAN SUKOREJ O

			<i>serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>										berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim				
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional															
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</i>	50 Orang	50 Orang	7.220.000,00	0,00	0,00	-7.220.000,00	Kab. Kendal , Sukorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			0,00	KECAMATAN SUKOREJO

													utan dengan memperh atikan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim				
	7.01.05.2. 01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan															
			<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	3 Dokum en	3 Dokum en	7.220.000,0 0	0,00	0,00	-7.220.000,00	Kab. Kendal , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj utan dengan memperh atikan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj			.800.000,00	KECAMA TAN SUKOREJ O

													utan dengan memperh atkan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim				
6,	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWAS AN PEMERINTA HAN DESA	Prosentase desa maju	45 %	45 %	102.026.0 00,00	43.424.00 0,00	53.732.80 0,00	- 12.526.000,00							8 9.500.000, 00	
	7.01.06.2. 01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes Jumlah koordinasi yang dilaksanakan</i>	17 kegiata n 17 Lapora n	17 kegiata n 17 Lapora n	102.026.00 0,00	43.424.000, 00	53.732.800, 00	-48.293.200,00			-	Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj utan dengan memperh atkan kelestari an lingkung an dan perubaha	Kecama tan Sukorej o		8 9.500.000,0 0	KECAMA TAN SUKOREJ O

													n iklim Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj utan dengan memperh atkan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim					
	7.01.06.2. 01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	3 Dokum en	3 Dokum en	9.000.000,0 0	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Kendal , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj utan dengan memperh atkan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim Pembang unan infrastru ktur yang berkualit			.000.000,00	KECAMA TAN SUKOREJ O	

													as dan berkelanj utan dengan memperh atkan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim				
	7.01.06.2. 01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa															
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	2 Dokum en	2 Dokum en	57.320.000, 00	42.820.000, 00	42.820.000, 00	-14.500.000,00	Kab. Kendal , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj utan dengan memperh atkan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj			8.000.000,0 0	5 KECAMA TAN SUKOREJ O

													utan dengan memperh atikan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim				
	7.01.06.2. 01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa															
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaguna an Aset Desa</i>	4 Dokum en	4 Dokum en	12.802.000, 00	604.000,00	10.912.800, 00	-1.889.200,00	Kab. Kendal , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj utan dengan memperh atikan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj			2.500.000,0 0	1 KECAMA TAN SUKOREJ O

													utan dengan memperh atkan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim				
	7.01.06.2. 01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa															
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawar atan Desa</i>	1 Dokum en	1 Dokum en	2.964.000,0 0	0,00	0,00	-2.964.000,00	Kab. Kendal , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj utan dengan memperh atkan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj			.000.000,00	KECAMA TAN SUKOREJ O

													utan dengan memperh atkan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim				
	7.01.06.2. 01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa															
			<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembanguna n Daerah dengan Pembanguna n Desa</i>	2 Dokum en	2 Dokum en	4.000.000,0 0	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Kendal , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj utan dengan memperh atkan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj			4.000.000,0 0	KECAMA TAN SUKOREJ O

													utan dengan memperh atkan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim				
	7.01.06.2. 01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum															
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggar aan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	0 Dokum en	0 Dokum en	7.220.000,0 0	0,00	0,00	-7.220.000,00	Kab. Kendal , Sukore jo, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj utan dengan memperh atkan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj			0,00	KECAMA TAN SUKOREJ O

													utan dengan memperh atkan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim				
	7.01.06.2. 01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan															
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,0 0	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Kendal , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			3.000.000,0 0	KECAMATAN SUKOREJO

													utan dengan memperh atikan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim				
	7.01.06.2. 01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif															
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembanguna n Partisipatif</i>	0 Dokum en	0 Dokum en	7.220.000,0 0	0,00	0,00	-7.220.000,00	Kab. Kendal , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj utan dengan memperh atikan kelestari an lingkung an dan perubaha n iklim Pembang unan infrastru ktur yang berkualit as dan berkelanj			0,00	KECAMA TAN SUKOREJ O

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukorejo Tahun 2024 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2025 yang akan datang.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukorejo Tahun 2024 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Perencanaan Kabupaten Kendal, sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran berkenaan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukorejo Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Penetapan maupun Perubahan Kecamatan Sukorejo pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kendal;
2. Penyusunan Perubahan Renja PD Kecamatan Sukorejo ini berpedoman pada Renstra Kecamatan Sukorejo Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja.
3. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini juga berpedoman pada RKPD Perubahan Kabupaten Kendal Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja PD Kecamatan Sukorejo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja PD Kecamatan Sukorejo ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP)

sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Sukorejo Tahun 2024;

2. Dalam penyusunan RKAP telah berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kendal. Begitu pula dalam penyusunan DPPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Kendal;

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal pada tahun 2024 adalah “**Kendal Smart City**” yang diprioritaskan pada “Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal *Smart City*”. Arah kebijakan ini dengan focus peningkatan kemantapan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan *clean* dan *Good Governances*, penguatan *Smart City* yang difokuskan pada *Smart Government*, *Smart Education*, *Smart Health*, *Smart Economy* dan *Smart Transportation*.

Pembangunan daerah yang menerapkan perencanaan yang SMART dan prinsip Money Follow Program Priority, dan Money Follow Result, diharapkan mampu untuk lebih mendorong potensi dan keunggulan daerah menuju kemandirian ekonomi daerah. Mendasarkan pada isu global, nasional dan regional.

Berdasarkan arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2024, Kecamatan Sukorejo menetapkan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja dengan fokus kinerja aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan pada Kecamatan Sukorejo
2. Peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap aparatur desa melalui pembinaan SDM dan kelembagaan / administrasi diprioritaskan kepada Aparatur desa yang kurang memahami tugas dan fungsi
3. Peningkatan pelaksanaan kewenangan Bupati kepada Camat diprioritaskan kepada pembinaan dan pendampingan penyusunan APBDes, LPPDes serta pemantauan aset Pemda dan aset desa.
4. Peningkatan kinerja pelayanan publik difokuskan pada penilaian SKM.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Kabupaten Kendal.

Kendal, 2024


Kecamatan Sukorejo,
TEJO PRAMONO SAKTI, S.IP.
Pembina
NIP. 197210012003121010



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN WELERI

Jl. Soekarno – Hatta No. 277 Kode Pos. 51335 Telp/Fax. (0294)641447 Weleri
e-mail : kecweleri@kendalkab.go.id Website : www.kecweleri.kendalkab.go.id

Weleri, 30 September 2024

Kepada Yth

Kepala Baperlitbang

Kab . Kendal

di –

KENDAL

SURAT PENGANTAR

Nomor : 000.7.2 /331 /Wlr

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Perubahan Renja Kerja Kecamatan Weleri Tahun 2024	1 (satu) bendel	Dikirim untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya



Camat Weleri

Drs. DWI CAHYONO SURYO, M.A.P

Pembina Tingkat I

NIP. 19690418 199009 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN WELERI
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH KECAMATAN WELERI
KABUPATEN KENDAL**

Jl. Soekarno – Hatta No. 277 Kode Pos. 51335
Telp/Fax. (0294)641447 Weleri

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Weleri Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini.

Perubahan Renja Kecamatan Weleri Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Weleri untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Weleri Tahun 2021-2026, dan juga disajikan sebagai pedoman dalam Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 di Kecamatan Weleri. Dokumen ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Weleri ini berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 serta Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Weleri Tahun 2021 – 2026.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparat terkait di Kecamatan Weleri, yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan Renja 2024 ini. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih ada kekurangan oleh karena itu kami mohon saran untuk penyempurnaan Renja di tahun yang akan datang.

Weleri, 29 September 2024


CAMAT WELERI
Drs. DWI CAHYONO SURYO, M.A.P
Pembina TK1
NIP. 196904181990091001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
Bab II Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	14
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	17
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	18
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	25
Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	29
3.1. Rencana Kerja	29
3.2. Pendanaan.....	29
Bab IV Penutup	30
Lampiran :	
1. SK TIM Renja 2024 Kecamatan Weleri	
2. Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2024	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 Kecamatan Weleri mengacu pada konsep Renstra Kecamatan Weleri tahun 2021-2026. Penyusunan Perubahan Renja 2024 sudah memperhatikan prioritas RPJMD tahun 2021-2026 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kendal. Renja tahun 2024 juga memperhatikan RPJPD (2005-2025), prioritas Nasional tahun 2024 dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 disusun sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang akan ditetapkan dalam Rencana Strategis 2021-2026 yaitu guna mendukung pencapaian visi-misi Bupati Kendal yaitu “ Visi pembangunan jangka menengah daerah adalah untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah yaitu “*Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan*”.

Selanjutnya, karena berfungsi sebagai dokumen publik yang memuat daftar rencana program kegiatan tahun 2024, maka proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal ini juga dilakukan secara *top down* dan *bottom up*, yaitu memadukan antara hasil kajian prioritas kebutuhan program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah atasan baik melalui Renstra Kecamatan Weleri maupun RPJMD Kabupaten Kendal, yang secara otomatis Renja 2024 harus masuk dalam Renstra 2021-2026.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Rencana Kerja Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan

memuat arah kebijakan dan program kegiatan Perangkat Daerah. Sebagai rencana operasional, Renja merupakan pedoman dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal ini, peraturan yang dipergunakan sebagai landasan hukum, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,

13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 Tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat 2 Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

- Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198).
 13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 nomor 20).

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Tahun 2024 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana program dan kegiatan prioritas pada tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Weleri ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Pemerintah Kecamatan Weleri dalam menentukan prioritas program dan kegiatan/ penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2024;

2. Menyediakan pedoman resmi bagi Pemerintah Kecamatan Weleri dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan Kecamatan Weleri tahun 2024;
3. Menyediakan satu acuan bagi Pemerintah Kecamatan Weleri dalam penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Tahun Anggaran 2024;
4. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan Kecamatan Weleri dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis;
5. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Pemerinah Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I :Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

Pada bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran

target kinerja Renstra Perangkat Daerah serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan program dan kegiatan.

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah beserta dana yang dibutuhkan

Bab V : Penutup

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sampai dengan Triwulan II

Kualitas Rancangan Akhir Perubahan Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal tahun yang lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Kecamatan Weleri dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Secara rinci rekapitulasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana Tabel 2.1 berikut.

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN WELERI
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

Sasaran SKPD Tahunan :

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2023)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024 (%)		Ket					
								I		II		III		IV				K	Rp		K	%			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		7	UNSUR KEWILAYAHAN			3.038.106.662		0		3.038.106.662		382.508.137		487.217.208						869.725.345		869.725.345		28,63	
		7.01	KECAMATAN			3.038.106.662		0		3.038.106.662		382.508.137		487.217.208						869.725.345		869.725.345		28,63	
1		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah (%)	500	2.908.601.662	100	0	500	2.908.601.662	25	347.967.232	25	475.380.118					50	823.347.350	150	823.347.350	30	28,31	
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran Evaluasi yang Tersusun (Dokumen)	500	3.538.000	100	0	100	3.538000	25	462.000	25	364.500					50	826.500	150	826.500	30	23,33	
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	1.838.000	4	0	4	1.838.000	1	462.000	1	364.500					2	826.500	6	826.500	150	44,97	
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	1.700.000	12	0	12	1.700.000	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	60	2.215.742.662	12	0	12	2.215.742.662	25	260.464.672	25	384.260.369					6	644.725.041	18	644.725.041	60	29,10	

7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/bulan)	26	2.212.348.662	15	0	13	2.212.348.662	13	260.464.672	13	383.480.369					26	643.945.041	41	643.945.041	158	29,10
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (dokumen)	12	0	12	0	12	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10	1.834.000	5		10	1.834.000	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	1.560.000	12		12	1.560.000	0	0	6	780.000					28	780.000		780.000	50	50,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Terpenuhiya Kebutuhan Pelayanan Kantor (Persen)	500	376.640.600	100	0	12	376.640.600	25	41.628.000	25	62.394.000					50	104.022.000	150	104.022.000	150	27,62
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	12	7.025.000	12	0	12	7.025.000	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	12	54.371.000	12	0	12	54.371.000	3	4.675.000	3	9.385.000					6	14.060.000	18	14.060.000	150	25,86
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	12	50.690.000	12	0	12	50.690.000	3	3.397.000	3	6.782.000					6	10.179.000	18	10.179.000	150	20,08
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	12	15.635.000	12	0	12	15.635.000	3	450.000	3	2.245.000					6	2.695.000	18	2.695.000	150	17,24
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)	12	29.293.600	12	0	12	29.293.600	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang di sediakan (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	218.026.000	12	0	12	218.026.000	3	33.106.000	3	43.982.000					6	77.088.000	18	77.088.000	150	35,36
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis SKPD	12	1.600.000	12	0	12	1.600.000	0	0	0	0					0	0		0	0	0

7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset Kantor yang Tersedia (Unit)	85	5.148.000	12	0	25	5.148.000	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	12	5.148.000	12	0	12	5.148.000	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor (bulan)	60	209.596.000	60	0	12	209.596.000	15	42.305.560	25	25.102.249				40	67.407.809	100	67.407.809	167	3,73
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	4.000.000	12	0	12	4.000.000	3	500.000	3	800.000				6	1.300.000	18	1.300.000	150	32,50
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	108.932.000	12	0	12	108.932.000	3	18.013.655	3	8.440.979				6	26.454.634	18	26.454.634	150	24,28
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	96.664.000	12	0	12	96.664.000	3	23.791.905	3	15.861.270				6	39.653.175	18	39.653.175	150	41,02
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Aset yang Dipelihara (Unit)	60	97.936.400	60	0	25	97.936.400	25	3.107.000	25	3.259.000				6	6.366.000	66	6.366.000	10	6,50
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Pejabat	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Pejabat	14	19.500.000	12	0	14	19.500.000	3	928.000	3	823.000				6	1.751.000	18	1.751.000	129	8,98
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	14	3.900.000	12	0	14	3.900.000	0	0	6	376.000				6	376.000	18	376.000	129	9,64
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	12	5.000.000	0	0	12	5.000.000	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	12	14.280.000	12	0	12	14.280.000	3	2.179.000	3	1.500.00				6	3.679.000	18	3.679.000	150	25,76
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	41.226.400	5	0	5	41.226.400	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	14.030.000	12	0	12	14.030.000	0	0	6	560.000				6	560.000	18	560.000	150	3,99
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																					
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																					
Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																					
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya :																					

	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan (%)	500	1.900.000	100	0	12	1.900.000	12	1.900.000	0	0					100	1.900.000	100	1.900.000	20	100
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Peserta Sosialisasi tentang Paten (Kegiatan)	60	1.900.000	60	0	25	1.900.000	12	1.900.000	0	0					100	1.900.000	100	1.900.000	167	100
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	12	1.900.000	12	0	12	1.900.000	12	1.900.000	0	0					100	1.900.000	100	1.900.000	833	100
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																						
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																						
	Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																						
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya :																						
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD (%)	250	11.005.000	12	0	100	11.005.000	3	200.000	3	1.900.000					6	2.100.000	18	2.100.000	30,91	19,08
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan (Kali)	60	11.005.000	16	0	25	11.005.000	16	200.000	25	1.900.000					16	2.100.000	32	2.100.000	53	19,08
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa (Lemba Kemasyarakatan)	16	2.005.000	16	0	16	2.005.000	16	200.000	16	100.000					16	300.000	32	300.000	200	14,96
	7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1	6.000.000	1	0	1	6.000.000	0	0		0					0	0		0	0	0
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan (laporan)	12	3.000.000	12	0	12	3.000.000	0	0	6	1.800.000					6	1.800.000	18	1.800.000	150	60,00
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																						
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																						
Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																							
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya :																							
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani (%)	500	107.800.000	100	0	100	107.800.000	25	25.540.905	25	9.937.090					50	35.477.995	150	35.477.995	29,33	32,91
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan (Bulan)	60	12.400.000	60	0	25	12.400.000	25	1.749.000	25	4.650.000					6	6.399.000	66	6.399.000	110	51,60

		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)	12	12.400.000	12	0	12	12.400.000	3	1.749.000	3	4.650.000					6	6.399.000	6	6.399.000	50	51,60
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Bulan Pembayaran Upah/Honor Petugas Penunjang Perkantoran (Bulan)	60	95.400.000	0	0	12	95.400.000	25	23.791.905	25	5.287.090					6	29.078.995	18	29.078.995	30	30,48
		7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	95.400.000	12	0	12	95.400.000	3	23.791.905	3	5.287.090					6	29.078.995	12	29.078.995	100	30,48
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																						
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																						
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																						
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya :																						
5		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani (%)	500	6.900.000	0	0	100	6.900.000	100	6.900.000	0	0					100	6.900.000	100	6.900.000	0	100
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan (Kali)	60	6.900.000	0	0	1	6.900.000	100	6.900.000	0	0					100	6.900.000	100	6.900.000	167	100
		7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80	6.900.000	80	0	80	6.900.000	80	6.900.000	0	0					100	6.900.000	100	6.900.000	167	100
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																						
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																						
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																						
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya :																						
6		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu (%)	500	1.900.000	200	0	100	1.900.000	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kegiatan)	80	1.900.000	16	0	16	1.900.000	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa (dokumen)	16	1.900.000	16	0	16	1.900.000	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0

		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa (dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																						
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																						
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																						
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya :																						
		JUMLAH			3.038.108.662		0	0	3.038.108.662		382.508.137		487.217.208						869.725.345		869.725.345			
		Rata-rata capaian kinerja (%)																28,75	28,63			69,67	28,63	
		Predikat kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat rendah	Sangat Rendah	

Dari data sebagaimana tabel 2.1 tersebut di atas, hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

- Adanya mekanisme yang jelas dalam hal pengadaan barang dan jasa serta perencanaan anggaran kas yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan.

b. Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Masih lemahnya kapasitas SDM

c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

- Optimalisasi koordinasi antara Pimpinan dan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga capaian kinerja kegiatan bisa lebih baik.

d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:

- Penguatan kapasitas SDM bidang keuangan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas workshop atau bintek keuangan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Efektivitas adalah tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas pencapaian sasaran diartikan sebagai tercapainya sasaran (100% atau lebih) sesuai target yang ditetapkan berdasarkan capaian kinerja sasaran. Berdasarkan laporan capaian indikator kinerja tahun 2024 menunjukkan adanya program dan kegiatan yang belum efektif atau belum terealisasi sesuai dengan rencana meski capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang memuaskan.

Sampai dengan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, capaian sasarannya adalah sebagai berikut:

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota

NO	Indikator	Tujuan / Sasaran	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		(16)
1	Indeks reformasi birokrasi	Meningkatkan birokrasi yang akuntabel	Nilai SAKIP	72,37	73,00	74,00	75,00	86,00	72,37	73,00	74,00	75,00	74,00	75,00	76,00	
		Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Nilai rata-rata IKM	85,39	80,47	82,00	84,00	86,00	85,35	80,47	82,00	84,00	82,00	84,00	88,17	

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Weleri sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

Kinerja pelayanan Kecamatan Weleri terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Weleri sampai dengan tahun 2024 sudah cukup baik, dimana seluruh target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dan memenuhi target yang telah ditetapkan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Weleri tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Weleri, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal sebagai berikut:

a. **Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat (Partisipasi)**

Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah pendekatan partisipatif. Walaupun selama ini pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah dilakukan khususnya musrenbang namun pelibatan tersebut masih bersifat elit mengingat peserta musrenbang yang menghadiri para tokoh sehingga fungsi keterwakilan belum optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat masih dalam tataran mengusulkan daftar keinginan belum beranjak pada daftar kebutuhan sehingga usulan tersebut belum dapat menyelesaikan masalah-masalah di tingkat bawah.

Di samping faktor eksternal, juga terdapat beberapa faktor internal yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. Keberadaan sumber daya Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal :

a. **Belum Memadainya Sumber Daya Manusia Kecamatan Weleri** Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia belum memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Begitu

pula dari segi kualitas dilihat dari spesifikasi keilmuan dan pengetahuan, SDM belum memadai untuk mengerjakan fungsi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. Satu orang pegawai bisa menangani beberapa pekerjaan yang tidak masuk dalam tupoksinya dikarenakan tidak adanya pejabat yang mengisi jabatan tersebut.

- b. Keterbatasan Anggaran Permasalahan lainnya yang sangat berpengaruh adalah anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program dalam mencapai sasaran kurang memadai sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusi dengan baik. Padahal sarana dan prasarana kantor kecamatan juga tidak kalah penting untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Belum maksimalnya penerapan Standar Operasional Prosedur masing – masing Seksi SOP adalah rangkaian urutan langkah kerja yang dilakukan menurut keterkaitan pekerjaan, yaitu dimana saja pekerjaan itu dilakukan, apa saja yang terjalin dalam pekerjaan, bagaimana cara melakukan sebuah pekerjaan dan siapakah yang melakukan pekerjaan. Selain untuk memperlancar pekerjaan juga sebagai pedoman untuk setiap pekerja baru atau awam sehingga tidak perlu lagi mengeluarkan tenaga untuk mengajarkan. Keberadaan SOP di Kecamatan Weleri yang sudah berjalan dan sudah dilaksanakan dengan baik.

2.4 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil Musrenbang tingkat desa dan Kecamatan, tidak terdapat usulan kegiatan yang dimintakan

masyarakat kepada Kecamatan dikarenakan sifat pemerintah Kecamatan yang hanya menjadi penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Disamping itu Kecamatan juga bukan Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan melaksanakan kegiatan fisik.

Namun usulan program kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbangdes yang telah dikerucutkan didalam forum Musrenbangcam tersebut diajukan dan diperjuangkan oleh Pemerintah Kecamatan Weleri dalam forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten agar dapat dimasukkan dalam RKPD Kabupaten Kendal dan Renja Perangkat Daerah Dinas/Instansi terkait yang membidangi urusan sesuai usulan tersebut.

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Weleri

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sampai Triwulan II)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah							
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun							
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terbayar gaji dan tunjangan ASN	15	15	15	100	13	43	10,5
7.01.01.2.02.05	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas	12	12	12	100	12	36	9
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas harian dan emblem/ID card yang tersedia							
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian beserta atributnya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut	0	0	0	100	0	36	9

		kelengkapannya							
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor							
7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12	12	12	100	12	36	9
7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	12	100	12	36	9
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah bulan tersedianya makan minum rapat	12	12	12	100	12	36	9
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12	12	12	100	12	36	9
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan	12	12	12	100	0	24	6
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan tersedianya bahan bakar minyak dan biaya perjalanan dinas dalam serta luar daerah	12	12	12	100	12	36	9
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	Jumlah aset yang diadakan							
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan barang mebel yang tersedia	30	30	30	100	0	60	15
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia	15	15	15	100	0	30	7,5
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor							

7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah bulan penyediaan materai yang tersedia	12	12	12	100	12	36	9
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya jasa telp, air, internet dan listri	12	12	12	100	12	36	9
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan tersedianya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	12	12	12	100	12	36	9
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan tersedianya honor tenaga penunjang	12	12	12	100	12	36	9
7.01.01.2.09	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis aset yang dipelihara							
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Pajak Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas dan suku cadang yang tersedia dan terbayarnya pajak/STNK kendaraan dinas	10	10	10	100	10	30	7,5
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan komputer, jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan mesin	12	12	12	100	12	36	9
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	1	1	100	1	3	12
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan							

7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan							
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah laporan pelaksanaan penerbitan izin non usaha	12	12	12	100	12	36	9
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD							
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah koordinasi yang dilaksanakan							
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah desa yang melaksanakan musrenbang	16	16	16	100	16	48	12
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan, penyuluhan dan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16	16	16	100	16	48	12
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani							
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	jumlah koordinasi yang dilaksanakan							
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bulan koordinasi yang dilaksanakan	12	12	12	100	12	36	9

	dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani							
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan							
7.01.05.2.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	jumlah peserta bimtek tentang wawasan kebangsaan	50	50	50	100	50	150	37,5
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu							
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemde							
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah desa yang difasilitasi Penyusunan APBDes Tepat Waktu	16	16	16	100	16	48	15
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	jumlah desa yang difasilitasi keuangan desa	0	0	0	0	0	0	0

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil musrenbang tingkat desa dan Kecamatan, tidak terdapat usulan kegiatan yang dimintakan masyarakat kepada Kecamatan dikarenakan sifat pemerintah Kecamatan yang hanya menjadi penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Disamping itu Kecamatan juga bukan OPD yang memiliki kewenangan melaksanakan kegiatan fisik.

Namun usulan program kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbangdes yang telah dikerucutkan didalam forum Musrenbangcam tersebut diajukan dan diperjuangkan oleh Pemerintah Kecamatan Weleri dalam forum OPD dan Musrenbang Kabupaten agar dapat dimasukkan dalam RKPD Kabupaten Kendal dan Renja OPD Dinas/Instansi terkait yang membidangi urusan sesuai usulan tersebut.

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Weleri

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Weleri	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 %	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluas Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Weleri	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja OPD	100 %	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Weleri	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Weleri	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Weleri	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor	100 %	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Weleri	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor	100 %	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Weleri	Prossntase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	

1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Weleri	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Weleri	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100 %	
2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Weleri	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	100 %	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Weleri	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	50 %	
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Weleri	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100 %	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Weleri	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100 %	
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Weleri	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	
4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Weleri	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	
5	PROGRAM	Kec. Weleri	Persentase kasus konflik sosial	100 %	

	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		yang di tangani		
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Weleri	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Weleri	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	100 %	
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Weleri	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100 %	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja

Rancangan Akhir Perubahan Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Kecamatan Weleri Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 serta Perubahan Renstra Kecamatan Weleri Tahun 2021-2026. Rencana kerja dan pendanaan tersebut juga memperhatikan sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku. Adapun rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Kecamatan Weleri Tahun 2024 tersaji pada tabel (terlampir).

3.2 Pendanaan

Pada prinsipnya bahwa semua perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Kecamatan Weleri baik menyangkut Rencana Kinerja maupun Rencana Anggaran Perubahan pada tahun 2024 ini dilaksanakan secara partisipatif dengan meminta masukan dan saran dari masing-masing seksi dan sekretariat untuk dirumuskan bersama berdasarkan Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Weleri, yang kemudian dituangkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Weleri dan diajukan untuk disahkan oleh Bupati Kendal

Pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam perjanjian kinerja Kecamatan Weleri Tahun 2024, di danai dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Kendal Tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kecamatan Weleri Tahun 2024.

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Weleri Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran Kecamatan Weleri beserta indikatornya, penyesuaian program dan kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif program / kegiatan. Perubahan Renja ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Kecamatan Weleri Tahun Anggaran 2024.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Weleri Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Weleri pada Tahun Anggaran 2024.

CAMAT WELERI,



Drs. DWI CAHYONO SURYO, M.A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 196904181990091001

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	82.250.000,00	15.635.000,00	15.635.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					120.000.000,00	KECAMATAN WELERI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	25.349.600,00	29.293.600,00	29.293.600,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					30.000.000,00	KECAMATAN WELERI
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					4.000.000,00	KECAMATAN WELERI
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	12 Laporan	90.453.000,00	218.026.000,00	249.303.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					130.000.000,00	KECAMATAN WELERI
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					12 Dokumen	12 Dokumen	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					9.000.000,00	KECAMATAN WELERI
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset yang diadakan	-				17 Jenis	17 Jenis	47.498.000,00	5.148.000,00	5.148.000,00			-	-	-				210.000.000,00	KECAMATAN WELERI
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					30.000.000,00	KECAMATAN WELERI
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					100 Unit	100 Unit	31.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					80.000.000,00	KECAMATAN WELERI
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					3 Unit	3 Unit	15.998.000,00	5.148.000,00	10.296.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					100.000.000,00	KECAMATAN WELERI
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor	-				12 Bulan	12 Bulan	180.088.000,00	209.596.000,00	209.596.000,00			-	-	-				196.000.000,00	KECAMATAN WELERI
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					6.000.000,00	KECAMATAN WELERI
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	92.348.000,00	108.932.000,00	108.932.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					110.000.000,00	KECAMATAN WELERI
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	83.740.000,00	96.664.000,00	96.664.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					80.000.000,00	KECAMATAN WELERI
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis aset yang dipelihara	-				17 Jenis	17 Jenis	92.506.400,00	97.936.400,00	97.936.400,00			-	-	-				559.500.000,00	KECAMATAN WELERI
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					14 Unit	14 Unit	19.200.000,00	19.500.000,00	26.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					35.000.000,00	KECAMATAN WELERI
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					14 Unit	14 Unit	3.600.000,00	3.900.000,00	4.200.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					4.500.000,00	KECAMATAN WELERI
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																				
							Jumlah Mebel yang Dipelihara					8 Unit	8 Unit	2.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					5.000.000,00	KECAMATAN WELERI
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					12 Unit	12 Unit	14.280.000,00	14.280.000,00	10.750.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					15.000.000,00	KECAMATAN WELERI
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					5 Unit	5 Unit	41.226.400,00	41.226.400,00	43.944.943,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					250.000.000,00	KECAMATAN WELERI
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	2 Unit	12.200.000,00	14.030.000,00	9.150.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					250.000.000,00	KECAMATAN WELERI

2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan				100 %	100 %	7.620.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00														30.000.000,00	
	7		01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	-			12 Kali	12 Kali	0,00	0,00	0,00					-	-	-							15.000.000,00	KECAMATAN WELERI
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																								
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00		Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-								15.000.000,00	KECAMATAN WELERI
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	-			12 Laporan	12 Laporan	7.620.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00					-	-	-							15.000.000,00	KECAMATAN WELERI
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																								
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.620.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00		Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-								15.000.000,00	KECAMATAN WELERI
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD				50 %	50 %	45.355.000,00	11.005.000,00	9.300.000,00														85.000.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	-			12 Kali	12 Kali	45.355.000,00	11.005.000,00	11.005.000,00					-	-	-							85.000.000,00	KECAMATAN WELERI
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																								
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				16 Lembaga Kemasyarakatan	16 Lembaga Kemasyarakatan	9.995.000,00	2.005.000,00	300.000,00		Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-								20.000.000,00	KECAMATAN WELERI
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																								
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-								15.000.000,00	KECAMATAN WELERI
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																								
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	25.360.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-								50.000.000,00	KECAMATAN WELERI
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani				100 %	100 %	98.590.000,00	107.800.000,00	60.100.000,00														105.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	-			12 Kali	12 Kali	14.850.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00					-	-	-							25.000.000,00	KECAMATAN WELERI
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																								
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	14.850.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00		Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-								25.000.000,00	KECAMATAN WELERI
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	-			12 Kali	12 Kali	83.740.000,00	95.400.000,00	95.400.000,00					-	-	-							80.000.000,00	KECAMATAN WELERI
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																								
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	83.740.000,00	95.400.000,00	47.700.000,00		Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-								80.000.000,00	KECAMATAN WELERI
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani				100 %	100 %	7.920.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00														15.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan	-			12 Laporan	12 Laporan	7.920.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00					-	-	-							15.000.000,00	KECAMATAN WELERI
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																								

[illegible]



D O K U M E N

RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KENDAL**

2024

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Hal tersebut sebagai tindak lanjut atas amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja Perubahan Dispermasdes Kabupaten Kendal Tahun 2024 ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, Revisi RPJMD, Revisi Renstra Perangkat Daerah, kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, aspirasi masyarakat melalui Musrenbang tingkat desa, Kecamatan, Kabupaten serta hasil reses anggota DPRD Kabupaten Kendal.

Diharapkan Renja Perubahan Dispermasdes tahun 2024 ini benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Dispermasdes tahun 2025 mendatang.

Kendal, 2024
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KENDAL



YANUAR FATONI, S.STP

Pembina Utama Muda

NIP. 19790115 199802 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Bab I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II tahun Berkenaan	9
2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Renstra Perangkat Daerah	9
2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	42
Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	43
Bab IV. Penutup	46
Lampiran.	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan sinergitas, sinkronisasi, dan integrasi segenap potensi di Kabupaten Kendal, dibutuhkan sebuah rencana yang secara komprehensif dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah di Kabupaten Kendal. Rencana pembangunan tersebut diwujudkan dalam RPJMD Kabupaten Kendal sebagaimana dijabarkan dalam dokumen perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan. Merujuk pernyataan sebelumnya dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Kendal harus menyusun RPJMD dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2024.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap OPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai pedoman perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu tahun anggaran. Penyusunan Renja PD mengacu pada RPJMD 2021-2026, Renstra PD, rancangan awal RKPD serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun anggaran sebelumnya untuk proyeksi atas kebutuhan serta dinamika yang akan dihadapi.

Rancangan awal RKPD menjadi acuan tahunan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja PD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra PD menjadi pedoman jangka

menengah lima tahunan dalam menjabarkan tujuan dan sasaran dalam program/kegiatan yang selaras dengan rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja PD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru demi tercapainya sasaran pada Renstra PD. Masalah dan dinamika yang dihadapi menjadi acuan perumusan dalam penyusunan rancangan Renja PD sehingga dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program serta kegiatan yang bersumber dari aspirasi masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja PD dengan mengakomodir aspirasi yang selaras dengan tugas dan fungsi serta program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Rancangan Renja PD dibahas pada forum Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Baperlitbang, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan dari semua aspirasi yang masuk melalui musrenbang Kecamatan yang akan ditampung bersamaan dengan usulan kegiatan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Forum ini merupakan pembahasan usulan-usulan yang masuk, juga merupakan sarana dan fasilitas untuk melakukan koordinasi antara Kecamatan dengan OPD yang bersangkutan khususnya untuk melakukan sinkronisasi terhadap usulan-usulan kegiatan setiap kecamatan yang akan diakomodir dalam program dan usulan kegiatan OPD terkait, disamping reses anggota DPRD, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah. Renja PD disusun kemudian ditetapkan menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Baperlitbang. Kemudian Renja tersebut juga dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun $n+1$.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai tindak lanjut RKPD Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 dimana RKPD Perubahan Tahun 2024 merupakan pedoman untuk penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penyelarasan dan penyempurnaan yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 20).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah antara lain :

1. Sinkronisasi program: Renja Perangkat Daerah disusun agar selaras dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Pedoman pelaksanaan kegiatan: Menjadi panduan operasional bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan tahunan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
3. Perencanaan anggaran: Menjadi dasar dalam menyusun anggaran belanja daerah secara efektif dan efisien, sesuai dengan prioritas pembangunan dan ketersediaan sumber daya.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan: Menciptakan perencanaan yang berorientasi pada hasil guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah: Renja berfungsi untuk memastikan bahwa Perangkat Daerah bekerja sesuai dengan tujuan strategis yang ditetapkan, serta mencapai sasaran yang telah ditentukan dalam RPJMD.
3. Akuntabilitas dan transparansi: Menyediakan dokumen yang dapat dipantau dan dievaluasi secara terbuka, sehingga

meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan program pemerintah.

4. Pengoptimalan sumber daya: Menyusun rencana agar sumber daya yang ada digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.
5. Penilaian kinerja tahunan: Renja memberikan dasar untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan Perangkat Daerah, sebagai bagian dari siklus perencanaan dan penganggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pendahuluan berisi mengenai mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II. Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan III tahun berjalan dan perkiraan capaian tahun berjalan,

selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah berjalan.

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi tentang rencana pendanaan sesuai dengan rancangan akhir perubahan RKPD tahun 2024 untuk melaksanakan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mencapai sasaran dan target kinerja Perangkat Daerah.

BAB IV. Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan triwulan II tahun 2024 secara umum telah dilaksanakan selaras dengan Renja Dispermasdes Tahun 2024. Renja Dispermasdes Tahun 2024 secara garis besar telah dilaksanakan dengan optimal dan mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Adapun secara rinci evaluasi pelaksanaan Renja Dispermasdes Tahun 2024 sampai dengan triwulan II diuraikan pada Lampiran. Sedangkan secara singkat hasil Kegiatan tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

1) Program Administrasi Pemerintahan Desa

A. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

a) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Pencapaian kinerja sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa adalah Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Pagu anggaran Rp. 5.637.496.000,- Realisasi keuangan Rp. 5.610.270.624,- (99,52%), dan prosentase fisik 100%.
Faktor penghambat :

- Banyak desa yang kekurangan SDM dengan keterampilan administrasi yang baik. Aparatur desa sering kali belum memiliki pelatihan yang cukup terkait dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa

- Aparatur desa sering kali kurang memahami regulasi atau peraturan yang terus berkembang terkait dengan administrasi pemerintahan, yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
- Kurangnya pengawasan dari pemerintah di tingkat yang lebih tinggi dapat menyebabkan kualitas administrasi di desa kurang diperhatikan dan tidak berjalan dengan baik.

Faktor penunjang :

- Kegiatan pelatihan dan pembinaan bagi aparatur desa dalam bidang administrasi sangat penting untuk meningkatkan kualitas manajemen dan pengelolaan pemerintahan desa.
- Bantuan teknis, finansial, dan supervisi dari pemerintah pusat maupun daerah merupakan faktor penting dalam memajukan administrasi pemerintahan desa. Kebijakan seperti Dana Desa dan program pembinaan berkelanjutan bisa sangat membantu.

b) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

Pencapaian kinerja sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa adalah Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan perencanaan Pagu anggaran Rp. 1.400.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 1.399.138.704,- (99,94%), dan prosentase fisik 100%.

Faktor penghambat :

- Banyak perangkat desa yang kurang memahami aspek teknis perencanaan pembangunan, seperti analisis kebutuhan, pemetaan sumber daya, dan penyusunan anggaran.

- Kurangnya data yang valid dan up-to-date mengenai kondisi desa, seperti jumlah penduduk, kondisi ekonomi, atau sumber daya alam, bisa menghambat proses perencanaan yang efektif.

Faktor penunjang :

- Pelatihan bagi perangkat desa serta pendampingan teknis dari pemerintah daerah atau lembaga pendukung sangat membantu meningkatkan kapasitas desa dalam menyusun perencanaan pembangunan yang baik.

c) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Pencapaian kinerja sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa adalah Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa. Pagu anggaran Rp. 4.715.340.000,- Realisasi keuangan Rp. 3.158.031.468,- (66,97%), dan prosentase fisik 60%.

Faktor penghambat :

- Minimnya pelatihan yang memadai bagi perangkat desa dalam penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan (misalnya, Sistem Keuangan Desa/Siskeudes).
- Regulasi yang sering berubah juga dapat membingungkan aparat desa dalam implementasinya.
- Pengawasan dari pemerintah kabupaten atau provinsi yang tidak optimal bisa menyebabkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.

Faktor penunjang :

- Penggunaan aplikasi seperti Siskeudes yang didukung oleh infrastruktur yang baik (akses internet dan perangkat yang memadai) sangat membantu pengelolaan keuangan yang lebih efisien.

- Pemerintah pusat dan daerah sering kali memberikan pelatihan dan pendampingan kepada aparat desa terkait pengelolaan keuangan. Ini termasuk pemberian regulasi yang jelas dan sosialisasi mengenai aturan baru.

d) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa

Pencapaian kinerja sub kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa adalah Jumlah BUMDES dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa yang dibina. Pagu anggaran Rp. 800.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 0,- (0%), dan prosentase fisik 90%.

Faktor penghambat :

- Banyak pengurus BUM Desa dan lembaga antar desa yang belum memiliki keterampilan manajerial dan teknis yang memadai, seperti pengelolaan keuangan, pemasaran, atau perencanaan bisnis.

Faktor penunjang :

- Pemerintah pusat dan daerah yang memberikan pendampingan, pelatihan, serta regulasi yang mendukung sangat membantu dalam pengelolaan dan pengembangan BUM Desa.

e) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa adalah terisinya jabatan kepala desa di kabupaten Kendal. Pagu anggaran Rp 80.236.000,- Realisasi keuangan Rp. 4.356.800,- (5,43%), dan prosentase fisik 55%.

Faktor penghambat :

- Konflik sosial atau ketegangan di tingkat lokal dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Faktor penunjang :

- Adanya dukungan baik dalam hal anggaran, fasilitas, maupun sumber daya manusia dari pemerintah daerah bisa memperlancar proses penyelenggaraan.

f) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

Pencapaian kinerja sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa adalah Jumlah desa yang memiliki profil desa Pagu anggaran Rp. 1.550.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 2.400.000,- (0,15%), dan prosentase fisik 100%.

Faktor penghambat :

- Kurangnya kapasitas atau keterampilan aparatur desa dalam pengumpulan dan pengelolaan data.

Faktor penunjang :

- Adanya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparatur desa dan masyarakat dalam pengumpulan dan pengelolaan data.

g) Sub Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa. Pagu anggaran Rp. 314.242.000,- Realisasi keuangan Rp. 16.905.000,- (5,38%) dan prosentase fisik 50%.

Faktor penghambat :

- Terdapat perbedaan pandangan atau sengketa antarwarga atau antardesa mengenai batas wilayah yang diwariskan secara turun-temurun.
- Perubahan alam seperti sungai yang mengering atau berpindah aliran yang menyebabkan perubahan batas alami.

- Sikap saling tidak percaya atau adanya persaingan antar desa terkait pemanfaatan sumber daya alam di daerah perbatasan.

Faktor penunjang :

- Penggunaan teknologi geospasial, seperti GIS (Geographic Information System) dan GPS, mempermudah pengukuran dan pemetaan batas yang akurat.
- Adanya pendampingan dari lembaga-lembaga terkait, seperti Badan Informasi Geospasial (BIG) atau instansi lainnya, dalam penyediaan data dan tenaga ahli.

2) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

A. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

a) Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Pencapaian kinerja sub kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat adalah Jumlah Desa yang difasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga

Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
Pagu anggaran Rp. 1.620.000.000,- Realisasi keuangan
Rp. 64.560.000,- (3,99%), dan prosentase fisik 100%.

Faktor penghambat :

- Masyarakat kurang terlibat aktif dalam kegiatan kelembagaan, baik karena kurangnya pemahaman atau kesadaran akan pentingnya Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Faktor penunjang :

- Adanya program pelatihan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi pengurus lembaga, baik dalam hal manajemen kelembagaan maupun pemberdayaan masyarakat.

- b) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
Pencapaian kinerja sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat adalah Jumlah Desa yang difasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
Pagu anggaran Rp. 1.882.473.423,- Realisasi keuangan
Rp. 0,- (0%), dan prosentase fisik 100%.

Faktor penghambat :

- Keterbatasan kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan pengurus atau anggota lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dapat menghambat pelaksanaan kegiatan.

Faktor penunjang :

- Program pelatihan yang berkelanjutan untuk pengurus dan anggota lembaga kemasyarakatan dapat meningkatkan kompetensi dan kapasitas mereka.

c) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Pencapaian kinerja sub kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna adalah Jumlah desa yang di Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna. Pagu anggaran Rp. 674.926.577,- Realisasi keuangan Rp. 674.523.450,- (99,94%), dan prosentase fisik 100%.

Faktor penghambat :

- Pemanfaatan TTG membutuhkan biaya, baik untuk pembelian alat, pelatihan, maupun pemeliharaan. Keterbatasan anggaran di tingkat desa sering kali menjadi kendala.
- Tidak adanya kebijakan atau regulasi yang mendukung implementasi TTG.
- Sebagian masyarakat desa mungkin merasa nyaman dengan cara kerja tradisional dan enggan beralih menggunakan teknologi baru yang dianggap rumit atau tidak diperlukan.

Faktor penunjang :

- Pelatihan dan Pendampingan oleh pihak yang berkompeten yang berkelanjutan bagi perangkat desa dan masyarakat dalam penggunaan teknologi akan membantu meningkatkan adopsi TTG.

d) Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Pencapaian kinerja sub kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat adalah Jumlah desa

yang difasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat. Pagu anggaran Rp. 50.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 46.450.000 (92,90%), dan prosentase fisik 100%.

Faktor penghambat :

- Masyarakat yang cenderung individualis dan lebih mementingkan kepentingan pribadi bisa mengurangi semangat gotong royong.

Faktor penunjang :

- Kepemimpinan yang baik dari tokoh masyarakat, RT, RW, atau desa berperan penting dalam mengoordinasikan kegiatan dan menjaga semangat gotong royong.

- e) Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Pencapaian kinerja sub kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga adalah Jumlah kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga. Pagu anggaran Rp. 750.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 106.669.574,- (14,22%), dan prosentase fisik 40%.

Faktor penghambat :

- Tidak semua masyarakat aktif dalam mengikuti program-program PKK.
- Minimnya sinergi antara Tim Penggerak PKK dengan instansi terkait, seperti dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan pemerintah daerah.

Faktor penunjang :

- Program pelatihan dan edukasi yang terus-menerus bagi anggota PKK dan masyarakat membantu meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola program pemberdayaan.

3) Program Penataan Desa

A. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa

a) Sub Kegiatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa

Pencapaian kinerja sub kegiatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa adalah Jumlah desa yang difasilitasi sarana dan prasarana. Pagu anggaran Rp. 2.299.010.000,- Realisasi keuangan Rp. 1.370.395.799,- (59,61%), dan prosentase fisik 80%.

Faktor penghambat :

- Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan teknis perangkat desa dalam mengelola proyek pembangunan.
- Lokasi desa yang terpencil atau sulit dijangkau, misalnya di daerah pegunungan atau kepulauan, yang menyulitkan pengangkutan bahan bangunan dan alat-alat konstruksi.

Faktor penunjang :

- Keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan infrastruktur desa.
- Gotong royong dan kesadaran kolektif yang kuat di antara warga desa.

b) Sub Kegiatan Fasilitas Tata Wilayah Desa

Pencapaian kinerja sub kegiatan Fasilitas Tata Wilayah Desa adalah Jumlah desa yang difasilitasi tata wilayah. Pagu anggaran Rp. 4.401.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 76.564.000,- (1,89%) dan prosentase fisik 55%.

Faktor penghambat :

- Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman pemerintah desa terkait pentingnya tata wilayah yang baik.

Faktor penunjang :

- Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk peraturan dan program, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Peraturan Desa tentang tata wilayah.

4) Program Peningkatan Kerjasama Desa

A. Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa

a) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota

Pencapaian kinerja sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota adalah Jumlah desa yang difasilitasi kerjasama antar desa. Pagu anggaran Rp. 15.300.000, Realisasi keuangan Rp. 1.000.000 (6,54%), dan prosentase fisik 20%.

Faktor penghambat :

- Desa yang memiliki perbedaan visi, misi, atau prioritas pembangunan dapat mengalami kesulitan dalam menyelaraskan kerja sama. Konflik kepentingan ini bisa menunda atau bahkan membatalkan upaya kerjasama.
- Tidak semua desa memiliki sumber daya manusia yang memiliki keterampilan atau pengetahuan yang cukup dalam mengelola kerja sama.

Faktor penunjang :

- Desa-desa yang memiliki kepentingan yang sama dalam bidang tertentu, seperti infrastruktur, pertanian, atau pariwisata, lebih mudah

membangun kerja sama yang efektif karena memiliki visi yang serupa.

b) Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pencapaian kinerja sub kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah Jumlah kawasan perdesaan yang difasilitasi pembangunan kawasan. Pagu anggaran Rp. 300.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 0,- (97,29%), dan prosentase fisik 50%.

Faktor penghambat :

- Ketidakmerataan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi antara kelompok masyarakat di desa bisa menciptakan ketegangan sosial dan menghambat pembangunan yang merata.

Faktor penunjang :

- Potensi sumber daya alam yang melimpah di kawasan perdesaan dapat menjadi modal besar dalam pengembangan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan usaha kecil lainnya.

5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

A. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan. Pagu anggaran Rp. 4.894.731.681,- Realisasi keuangan Rp. 2.628.453.895,- (53,70%), dan prosentase fisik 57%.

Faktor penghambat :

- Desk Gaji yang dilakukan Baperlitbang sehingga menghasilkan penganggaran gaji yang teramat rigid dan terbatas sehingga menyebabkan pembayaran

Gaji dan TPP ASN di lingkungan Dispermasdes tidak dapat dibayarkan / ditunda selama berbulan bulan.

Faktor penunjang :

- Aparatur dispermasdes yang sabar dan tetap menjalankan tugas fungsinya meskipun gajinya belum dibayarkan selama beberapa bulan.

B. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Pagu anggaran Rp. 24.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 3.421.600,- (14,26%) dan prosentase fisik 55%.

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini karena sifatnya penyediaan apabila dibutuhkan.

b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Pagu anggaran Rp. 70.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 29.325.250,- (41,89%), dan prosentase fisik 60%.

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini karena sifatnya penyediaan apabila dibutuhkan.

c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga adalah jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga. Pagu anggaran Rp. 46.055.116,- Realisasi keuangan Rp. 4.018.150,- (8,72%) dan prosentase fisik 40%.

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini karena sifatnya penyediaan apabila dibutuhkan.

d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor. Pagu anggaran Rp. 110.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 36.411.825,- (33,10%), dan prosentase fisik 50%.

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini karena sifatnya penyediaan apabila dibutuhkan.

e) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan adalah Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Pagu anggaran Rp. 10.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 4.500.000,- (45,00%), dan prosentase fisik 50%.

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini karena sifatnya penyediaan apabila dibutuhkan.

f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Jumlah bulan penyediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Pagu anggaran Rp. 1.436.129.485,-, Realisasi keuangan Rp. 557.453.707,- (38,82%), dan prosentase fisik 40%.

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini karena sifatnya penyediaan apabila dibutuhkan.

C. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Pagu anggaran Rp. 150.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 36.439.875,- (24,29%), dan prosentase fisik 60%.

Faktor penghambat :

- Para pengguna kendaraan dinas kurang peduli terhadap perawatan dan pembayaran pajak kendaraan dinas yang digunakannya sehingga banyak kendaraan yang rusak berat serta menunggak pajaknya dan akhirnya mangkrak tidak dapat digunakan.

Faktor penunjang :

- Pengurus barang yang merangkap perencanaan sehingga mampu mengawal penyediaan anggaran pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas.

- b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pencapaian kinerja sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan dan mesin selama 12 bulan. Pagu anggaran Rp. 235.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 4.740.810,- (2,02%), dan prosentase fisik 10%.

Faktor penghambat :

- Belanja Modal pengadaan peralatan dan mesin tidak diperkenankan walaupun seharusnya banyak peralatan dan mesin yang sudah rusak dan tidak layak digunakan sehingga menyebabkan anggaran pemeliharaan peralatan mesin membengkak.

Faktor penunjang :

- Pengurus barang yang merangkap perencanaan sehingga mampu mengawal penyediaan anggaran pemeliharaan peralatan dan mesin.

c) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pencapaian kinerja sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan kantor gedung selama 12 bulan. Pagu anggaran Rp. 270.080.000, Realisasi keuangan Rp. 0,- (0%), dan prosentase fisik 10%.

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini karena kegiatan belum dilaksanakan

D. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. Pagu anggaran Rp. 5.000.000, Realisasi keuangan Rp. 3.000.000 (60%), dan prosentase fisik 40%.

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini karena sifatnya penyediaan apabila dibutuhkan

b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah

Terbayarnya tagihan rekening telepon, air PAM, listrik dan pembelian alat listrik selama satu tahun anggaran. Pagu anggaran Rp. 150.000.000,-, Realisasi keuangan Rp. 76.898.023,- (51,27%), dan prosentase fisik 50%.

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini karena sifatnya penyediaan apabila dibutuhkan

c) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Pagu anggaran Rp. 1.258.844.000,- Realisasi keuangan Rp. 551.680.436,- (43,82%), dan prosentase fisik 50%.

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini karena sifatnya penyediaan apabila dibutuhkan

E. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pencapaian kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah Jumlah bulan penyediaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Pagu anggaran Rp. 25.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 4.947.000,- (19,79%), dan prosentase fisik 50%.

Faktor penghambat :

- Tidak semua ASN paham dan mengetahui indikator-indikator kinerja apa saja yang harus dicapai.
- Data kinerja yang dikumpulkan sering kali tidak lengkap atau kurang valid, sehingga menyulitkan proses penyusunan laporan yang tepat.

- Kurangnya koordinasi yang baik antar bidang dan sekretariat dapat menyebabkan keterlambatan pengumpulan data dan informasi, atau ketidaksesuaian dalam penyusunan laporan.

Faktor penunjang :

- Indikator kinerja yang tepat, terukur, dan relevan dengan tugas dan fungsi telah ditetapkan di dalam Renstra.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dipermasdes menerapkan ketepatan waktu sebagai tolok ukurnya dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa, demikian pula dengan pengelolaan kesekretariatan. Selama ini ketepatan waktu tersebut selalu dapat dijaga dan dilaksanakan oleh Dipermasdes Kabupaten Kendal. Baik dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dipermasdes, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dapat berasal dari beberapa unsur, sebagai berikut

1. Berkaitan dengan implementasi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, pada tahun 2017, maka menjadi tugas berat bagi aparat Dispermasdes untuk lebih memahami UU tersebut, yang jadi masalah adalah masih minimnya jumlah aparat di Dipermasdes yang memahami UU tersebut dan memahami pelaksanaan dan implementasi UU tersebut beserta ketentuan perundangan turunannya kepada perangkat desa yang ada di Kabupaten Kendal.
2. Kurang optimalnya koordinasi antar bidang di Dipermasdes sehingga pelaksanaan kegiatan kurang berjalan secara optimal.

3. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah lain dalam mengatasi permasalahan pembangunan khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
4. Pelaksanaan Pilkades.
5. Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa berbasis Dusun.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut diatas dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Dilaksanakan sosialisasi dan peningkatan kapasitas untuk lebih memahami segala hal terkait pelaksanaan UU Desa tersebut kepada desa dan aparatur Dispermasdes.
2. Rutin dilaksanakan rapat koordinasi internal dan evaluasi pelaksanaan kegiatan setiap bulan.
3. Dilaksanakan rapat-rapat koordinasi terkait desa dengan perangkat daerah yang lain di Kabupaten Kendal
4. Senantiasa diupayakan sosialisasi Pilkades di setiap kesempatan yang ada.
5. Mengawal setiap tahapan BKK kepada Pemerintah Desa berbasis dusun dimulai dari pemasukan proposal usulan hingga pelaksanaan dan pelaporannya.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2024
Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan 2024	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
2.07	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA								
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100	100	50	50%	100	50	50%
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100	100	50	50%	100	50	50%
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4			0%			0%
2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1			0%			0%
		Jumlah bulan penyediaan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12			0%			0%
2.13.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1			0%			0%
		Jumlah bulan penyediaan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	12			0%			0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan 2024	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.13.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1			0%			0%
		Jumlah bulan penyediaan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12			0%			0%
2.13.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1			0%			0%
		Jumlah bulan penyediaan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12			0%			0%
2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	2	67%	4	2	50%
		Jumlah bulan penyediaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	12	6	50%	12	6	50%
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3			0%	4	0	0%
		Jumlah bulan penyediaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12			0%	12	0	0%
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100	100	50	50%	100	50	50%
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	33	32	97%	33	32	97%
		Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan	12	12	7	58%	14	7	50%
2.13.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2			0%			0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan 2024	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	100			0%			0%
2.13.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2			0%			0%
2.13.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2			0%			0%
2.13.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2			0%			0%
2.13.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2			0%			0%
2.13.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2			0%			0%
2.13.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2			0%			0%
2.13.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2			0%			0%
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100			0%			0%
2.13.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50			0%			0%
		Jumlah pakaian dinas untuk pegawai di lingkungan Dispermasdes	50			0%			0%
2.13.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50			0%			0%
		Jumlah pegawai lingkungan Dispermasdes yang ikut bintek	50			0%			0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan 2024	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase unit kerja internal yang terlayani	100	100	50	50%	100	50	50%
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	2	50%	0	2	0%
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1	100%	1	1	100%
		Jumlah bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	6	50%	12	6	50%
2.13.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	1	100%	0	1	0%
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	1	100%	1	1	100%
		Jumlah bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	12	6	50%	12	6	50%
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	100%	1	1	100%
		Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	12	6	50%	12	6	50%
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1			0%	1		0%
		Jumlah bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12			0%	12		0%
2.13.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2			0%	0		0%
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	2	1	50%	2	1	50%
		Jumlah bulan penyediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	6	50%	12	6	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan 2024	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.13.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2			0%			0%
		Jumlah bulan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12			0%			0%
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100			0%	100	0	0%
2.13.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2			0%			0%
		Jumlah bulan penyediaan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12			0%			0%
2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2			0%	2	0	0%
		Jumlah bulan penyediaan Pengadaan Mebel	12			0%	12	0	0%
2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2			0%			0%
2.13.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1			0%			0%
2.13.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1			0%	0	0	0%
		Jumlah bulan penyediaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12			0%	8	0	0%
2.13.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1			0%			0%
		Jumlah bulan penyediaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12			0%			0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan 2024	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100%	100	100	100%
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	2	1	50%	2	1	50%
		Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor	12	12	6	50%	12	6	50%
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	2	1	50%	2	1	50%
		Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	6	50%	12	6	50%
2.13.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	1	50%	2	1	50%
		Jumlah bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	6	50%	12	6	50%
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	2	1	50%	2	1	50%
		Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	6	50%	12	6	50%
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	80	80%	80	80	100%
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30	30	15	50%	30	15	50%
		Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	12	6	50%	12	6	50%
2.13.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30			0%	0	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan 2024	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah bulan penyediaan PemeliharaanMebel Kantor	12			0%			0%
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	100	50	50%	100	50	50%
		Jumlah bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	12	6	50%	12	6	50%
2.13.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	50			0%			0%
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	0	0%	1	0	0%
		Jumlah bulan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	12	6	50%	12	6	50%
2.13.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1			0%	1		0%
		Jumlah bulan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12			0%	12		0%
2.13.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1			0%	0		0%
		Jumlah bulan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12			0%	0		0%
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Prosentase desa yang memiliki sarpras dalam kondisi baik (jalan, kantor)	73	73	72	99%	71	72	101%
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan desa	266	266	266	100%	266	266	100%
2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan,	5			0%			0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan 2024	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Penggabungan, dan Perubahan Status Desa							
		Jumlah desa yang difasilitasi Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desanya	5			0%			0%
2.13.02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	266	266	266	100%	266	266	100%
		Jumlah desa yang difasilitasi tata wilayah	266	266	266	100%	266	266	100%
2.13.02.2.01.03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	266			0%			0%
		Jumlah desa yang difasilitasi penataan kewenangan	266			0%			0%
2.13.02.2.01.04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	266			0%			0%
		Jumlah desa yang difasilitasi penamaan dan kode	266			0%			0%
2.13.02.2.01.05	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	2			0%			0%
		Jumlah desa yang difasilitasi penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat kewenangan kabupaten	266			0%			0%
2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	3	3	1	33%	3	1	33%
		Jumlah desa yang difasilitasi sarana dan prasarana	266	266	266	100%	1	266	26600%
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Prosentase Desa yang memiliki Kerjasama	4,51	4,51	0	0%	3,38	0	0%
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah desa yang difasilitasi kerja sama	266	266	266	100%	266	266	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan 2024	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2	2	0	0%	2	0	0%
		Jumlah desa yang difasilitasi kerjasama antar desa	6	6	0	0%	5	0	0%
2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	2			0%			0%
		Jumlah desa yang difasilitasi kerja sama antar desa dengan pihak ketiga	3			0%			0%
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2	2	0	0%	2	0	0%
		Jumlah kawasan perdesaan yang difasilitasi pembangunan kawasan	3	3	0	0%	2	0	0%
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan RPJMDES, RKPDES, APBDES tepat waktu	100	100	100	100%	100	100	100%
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	266	266	266	100%	266	266	100%
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2	2	0	0%	2		0%
		Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	266	266	266	100%	266		0%
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	2			0%			0%
		Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan produk hukum	15			0%			0%
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	2	2	0	0%	2		0%
		Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan perencanaan	30	30	0	0%	25		0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan 2024	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	2	2	0	0%	2		0%
		Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa	266	266	266	100%	266	266	0%
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	266	266		205%	380		0%
		Jumlah desa yang dibina peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	266	266		0%	266		0%
2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	2			0%			0%
		Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan musyawarah desa	35			0%			0%
2.13.04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	2			0%			0%
		Jumlah monev pengawasan perdes	266			0%			0%
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2	2		0%	2		0%
		Jumlah BUMDES dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa yang dibina	70	70		0%	65		0%
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	2	2		0%	2		0%
		Jumlah desa yang difasilitasi pelaksanaan pilkades, pengangkatan dan pemberhentian	5	5		0%	0		0%
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2			0%			0%
		Jumlah desa yang difasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	266			0%			0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan 2024	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	2	2		0%	2	0	0%
		Jumlah desa yang memiliki profil desa	266	266	266	100%	266	266	100%
2.13.04.2.01.12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	2			0%			0%
		Jumlah Desa yang difasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	266			0%			0%
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	2			0%	2		0%
		Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan aset desa	266			0%	266		0%
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	266			0%	483		0%
		Jumlah desa yang dibina Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	266			0%	266		0%
2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	6	6	0	0%	5	0	0%
2.13.04.2.01.16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	2			0%			0%
		Jumlah Desa yang di fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	266			0%			0%
2.13.04.2.01.17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	2			0%			0%
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2			0%	2		0%
		Jumlah desa yang dimonev dalam perkembangan desa	266			0%	266		0%
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,	Prosentase desa yang kelembagaan desanya dibina {RT,RW,PKK,Posyandu,karangtaruna}	100	100	25	25%	100	25	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan 2024	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang kelompok masyarakat desanya yang dibina	266	266	266	100%	266	266	100%
2.13.05.2.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	2			0%			0%
		Jumlah Desa yang sudah teridentifikasi masyarakat hukum adatnya	266			0%			0%
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2	2	1	50%	2	1	50%
		Jumlah Desa yang difasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	266	266	266	100%	266	266	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan 2024	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	266	266	266	100%	266	266	100%
		Jumlah Desa yang difasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	266	266	266	100%	266	266	100%
2.13.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	266			0%			0%
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2			0%			0%
		Jumlah desa yang difasilitasi pengembangan usaha ekonomi	266			0%			0%
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2	2	1	50%	2	1	50%
		Jumlah desa yang di Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	266	266	266	100%	266	266	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan 2024	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2	2	1	50%	2	1	50%
		Jumlah Desa yang difasilitasi BBGRM	266	266	266	100%	266	266	100%
2.13.05.2.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	2			0%			0%
		Jumlah desa yang difasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	266			0%	266		0%
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2	2	1	50%	2	1	50%
		Jumlah kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1	1	0	0%	1	0	0%
2.13.05.2.01.10	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	266			0%			0%
2.13.05.2.01.11	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	266			0%			0%

2.2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil musrenbang baik tingkat desa dan kecamatan tidak terdapat usulan program dan kegiatan masyarakat pada anggaran 2024 perubahan ini.

Tabel 2.2

Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kendal namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif perubahan tahun 2024 (RKPD Perubahan 2024) secara ringkas adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	Anggaran Sebelum (Rp)	Anggaran Sesudah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	34.814.864.282	36.719.926.977	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	34.814.864.282	36.719.926.977	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.684.840.282	8.565.680.282	
A	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	25.000.000	16.000.000	
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000	16.000.000	Terdapat efesiensi untuk belanja bahan bakar pelumas
B	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	4.894.731.681	4.694.731.681	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.894.731.681	4.694.731.681	efesiensi anggaran berdasarkan hasil desk gaji dan TPP oleh baperlitbang
C	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	1.696.184.601	1.937.584.601	
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.000.000	24.000.000	tetap
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000	70.000.000	tetap
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	46.055.116	46.055.116	tetap
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	110.000.000	362.297.120	Penambahan belanja makan minum rapat
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	10.000.000	tetap
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.436.129.485	1.425.232.365	penyesuaian kebutuhan anggaran rapat koordinasi
D	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1.413.844.000	1.244.644.000	
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	25.000.000	penambahan belanja materai
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000	160.800.000	penyesuaian kebutuhan biaya listrik
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.258.844.000	1.058.844.000	penyesuaian anggaran untuk publikasi
E	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	655.080.000	672.720.000	
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.000.000	150.000.000	tetap
13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	235.000.000	235.000.000	tetap
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	270.080.000	287.720.000	penyesuaian kebutuhan pemeliharaan gedung
II	PROGRAM PENATAAN DESA	6.340.010.000	6.741.962.695	
F	<i>Penyelenggaraan Penataan Desa</i>	6.340.010.000	6.741.962.695	
15	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	4.041.000.000	3.713.950.000	penyesuaian honorarium fasilitator BKK
16	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	2.299.010.000	3.028.012.695	penambahan kegiatan TMMD & KBM
III	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	315.300.000	315.300.000	
G	<i>Fasilitasi Kerja Sama antar Desa</i>	315.300.000	315.300.000	
17	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	15.300.000	15.300.000	tetap
18	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	300.000.000	300.000.000	tetap
IV	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	14.497.314.000	15.974.534.000	

NO	URAIAN	Anggaran Sebelum (Rp)	Anggaran Sesudah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
H	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	14.497.314.000	15.974.534.000	
19	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	5.637.496.000	5.622.716.000	efisiensi dan penyesuaian kebutuhan
20	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1.400.000.000	2.500.000.000	jasa konsultasi penyusunan RPJMDes
21	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	4.715.340.000	4.912.340.000	Penyesuaian kebutuhan luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta penghargaan desa anti korupsi
22	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	800.000.000	995.000.000	Penambahan Pelatihan BUMDesa Bersama
23	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	80.236.000	80.236.000	tetap
24	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	1.550.000.000	1.550.000.000	tetap
25	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	314.242.000	314.242.000	tetap
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	4.977.400.000	5.122.450.000	
I	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.977.400.000	5.122.450.000	
26	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.620.000.000	1.719.900.000	Penambahan belanja Pembuatan Stempel untuk LKD/LKK
27	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.882.473.423	1.927.623.423	Penyesuaian kebutuhan anggaran Bimtek Lembaga Kemasyarakatan Desa
28	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	674.926.577	674.926.577	tetap
29	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	50.000.000	50.000.000	tetap
30	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	750.000.000	750.000.000	tetap
Jumlah		34.814.864.282	36.719.926.977	

Pada Perubahan tahun 2024 ini dispermades melaksanakan 5 program, 9 kegiatan dan 30 sub kegiatan dengan Pagu RKPD Perubahan Dispermades tahun 2024 bertambah dari Rp. 34.814.864.282 menjadi Rp. 36.719.926.977 perubahan baik penambahan maupun pengurangan anggaran untuk masing-masing kegiatan digunakan sebagaimana tertulis pada kolom keterangan tabel diatas.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Tahun 2024 yang telah disusun, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024. RKPD Perubahan Tahun 2024 itu sendiri disusun sebagai respon atas perubahan dan perkembangan kebutuhan yang dihadapi di semester 1 tahun 2024 dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026 yang diturunkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJD) Kabupaten Kendal yang diselaraskan dengan RPJD Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) sebagai acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal serta sebagai acuan dalam menyusun kegiatan tahun 2024. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2024.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah adalah:

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja Perangkat Daerah.
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.

Penyusunan serta penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan pada Renja Perubahan 2024 didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja Perubahan setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pengorganisasian dan bahan evaluasi serta feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi. Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan pada Renja Perubahan Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur dan memberikan pelayanan yang berkualitas dan profesional. Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 tersebut didalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan dengan hal tersebut, telah disepakati dan ditetapkan dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja serta ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja ini sebagai pedoman dalam menyusun dan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sekaligus sebagai acuan dalam evaluasi atas program, kegiatan dan sub kegiatan yang Perangkat Daerah;
2. Program, kegiatan, dan sub kegiatan selaras dengan sistem perencanaan dan penganggaran, maka program, kegiatan dan sub kegiatannya mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024, selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Sementara (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2024.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kendal Tahun 2024 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2024. Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diselaraskan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kendal.

Akhir kata, semoga dokumen Renja Perubahan Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *public service* yang lebih baik.

Kendal, 2024
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KENDAL



YANUAR FATONI, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19790115 199802 1 001

LAMPIRAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Soekarno Hatta Kotak Pos 113 Kode Pos 51351

Telp (0294) 381122 / Fax (0294) 384716 Kendal

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2024 disusun berpedoman pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023. Renja ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan dan daya dukung sumberdaya alam yang ada guna kesejahteraan masyarakat.

Semoga Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Kendal, 26 September 2024

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KABUPATEN KENDAL



PANDU RAPRIAT ROGOJATI, SP

Pembina Tk. I

NIP. 197701122003121003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum..... 2

 1.3 Maksud dan Tujuan..... 5

 1.4 Sistematika Penulisan..... 6

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 8

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 8

 2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 19

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 20

BAB IV PENUTUP..... 47

DAFTAR TABEL

Tabel

2.1	Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	9
2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	12
2.3	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024	19
3.1	Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi ...	20
3.2	Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pertanian yang meliputi sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan diharapkan mampu meningkatkan produksi pertanian dan ketersediaan pangan di Kabupaten Kendal. Masyarakat Kabupaten Kendal khususnya petani akan memperoleh kesejahteraan lebih baik melalui daya saing produk pertanian yang semakin baik, peningkatan produktivitas, dan efisiensi usaha. Oleh karena itu, Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai peranan penting dan didukung oleh SDM pertanian baik teknis maupun penyuluh pertanian yang terampil sebagai pendamping untuk meningkatkan kemampuan petani, pelaku utama, dan pelaku usaha sehingga peningkatan produksi pertanian dapat tercapai serta mendukung Jawa Tengah sebagai penghasil produk pertanian dan penyangga ketahanan pangan nasional.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Dinas Pertanian dan Pangan perlu menyusun rencana kegiatan yang komprehensif dari tahun ke tahun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup satuan kerja merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan rencana

pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan sebagai sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Penyusunan RKPD dilakukan guna menampung seluruh asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena adanya asumsi makro yang berimbas pada stuktur APBD.

Penyusunan rancangan Renja mengacu pada Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2021 -2026 yang memuat pagu anggaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan serta indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan. Rancangan Renja didasarkan pada hasil evaluasi Renja tahun sebelumnya dan disusun sebagai bahan acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

- Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 20).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal disusun dengan maksud :

1. Menjabarkan rencana strategis jangka pendek 1 (satu) tahun;
2. Menyelaraskan rencana strategis dengan usulan masyarakat dan evaluasi kinerja sampai tahun sebelumnya;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan daerah, yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024;
4. Sebagai bahan acuan agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD Tahun 2024, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kendal;
2. Menetapkan program, kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024;
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024;
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Nomor 000.7.2/1589/Baperlitbang tentang Pedoman Penyusunan dan Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Pendahuluan memuat gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun

Berkenaan

Berisi tentang :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut;
- g. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi tentang program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan, sub kegiatan beserta *output* dan *outcome* yang diinginkan.

BAB IV. Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja menjadi salah satu indikator substansif dalam Kebijakan Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2024. Evaluasi dilakukan dengan mengukur capaian indikator setiap program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berjalan. Realisasi capaian indikator yang belum memenuhi target namun bersifat wajib dan merupakan prioritas daerah perlu penyesuaian input anggaran atau penambahan program/kegiatan namun dengan tetap mempertimbangkan kemampuan anggaran dan sisa waktu pelaksanaan. Sebaliknya, program/kegiatan yang telah melampaui pencapaian target indikator kinerja dan bukan merupakan program/kegiatan prioritas daerah juga perlu dilakukan penyesuaian anggaran atau bahkan penghapusan program/kegiatan. Selain penyesuaian anggaran dan penambahan atau penghapusan program/kegiatan, berdasarkan evaluasi juga dapat dilakukan penyesuaian target indikator kinerja dengan memperhatikan kondisi daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Tahun 2023 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan, menunjukkan bahwa untuk mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026 telah dilaksanakan dengan baik.

Pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tanggal 27 Desember 2023 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal mendapatkan alokasi belanja operasi sebesar Rp. 43.457.303.269,- dan belanja modal sebesar Rp. 2.670.500.000,-, sehingga jumlah keseluruhan Rp. 46.127.803.269,-. Alokasi anggaran tersebut untuk melaksanakan 10 program yang dijabarkan dalam 23 kegiatan dan

50 sub kegiatan. Namun Adanya perubahan dalam pelaksanaan kegiatan serta untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas, maka Dinas Pertanian dan Pangan mengajukan perubahan anggaran. Sesuai dengan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) tanggal 29 Agustus 2024, anggaran belanja operasi menjadi Rp. 41.385.355.806,- dan modal menjadi Rp. 2.696.375.000,- sehingga jumlah keseluruhan Rp. 44.081.730.806,-. Perubahan tersebut dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja utama yang didukung oleh capaian program/kegiatan Perangkat Daerah.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama
Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No.	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Produktivitas padi	Ku/Ha	56,25	56,24	99,98
2	Produktivitas jagung	Ku/Ha	70,19	65,78	93,72
3	Produktivitas cabai	Ku/Ha	70,00	82,83	118,33
4	Produktivitas bawang merah	Ku/Ha	94,35	96,30	102,07
5	Produktivitas kopi	Ku/Ha	7,77	0,00	0,00
6	Produksi daging sapi	Ton	1.034	263,12	25,45
7	Produksi daging ayam ras	Ton	15.600	6.028,11	38,64
8	Persentase cadangan pangan beras (konversi dari gabah)	%	5,70	0.00	0,00

Dari data tersebut, sebagian besar indikator telah tercapai. Untuk produktivitas kopi akan tercapai di triwulan ke III karena panen kopi akan dilaksanakan di bulan Juli. Realisasi produksi daging sapi dan ayam ras masih rendah di triwulan II karena pemotongan daging di luar RPH belum tercatat, sedangkan persentase cadangan pangan beras akan terhitung di akhir triwulan karena menunggu jumlah penduduk Jawa Tengah dan Kabupaten Kendal.

Capaian Indikator Kinerja Utama di tahun berjalan, didukung oleh ketercapaian program/kegiatan. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dilihat berdasar program/kegiatan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Tidak ada program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan, atau semua program/kegiatan mendukung output dan outcome yang ditargetkan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Masih ada program/kegiatan yang belum memenuhi keluaran yang direncanakan. Namun, karena dukungan komitmen semua pihak dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah maka akan mempermudah pencapaian kinerja Dinas;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, melebihi target indikator Renstra, yaitu 50 ton sedangkan target di Renstra 40 ton, melebihi 25% dari yang ditargetkan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

- a. Faktor yang mendukung tercapainya kegiatan karena adanya komitmen semua pihak untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, sebagai bagian untuk pencapaian perjanjian kinerja perangkat daerah.

- b. Faktor yang menjadi penyebab melebihinya target kinerja adalah :

Pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah berupa gabah kering giling 50 ton pada triwulan II, guna mencukupi kekurangan pemenuhan target pada tahun sebelumnya karena gabah kering giling ini merupakan barang persediaan yang digunakan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga dalam penanganan kedaruratan pangan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah secara umum mencapai target yang ditetapkan, meskipun demikian guna meningkatkan kinerja dalam ketercukupan pangan maka Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal perlu meningkatkan pelaksanaan kegiatannya melalui penyuluhan, pembinaan, pendampingan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani, gabungan kelompok tani maupun kelompok wanita tani serta saling mensinergikan kebutuhan petani dan peternak dalam implementasi kegiatan yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal.
6. Kebijakan dalam mengatasi ketercapaian indikator Dinas Pertanian dan Pangan adalah dengan perencanaan dan penganggaran yang mendukung peningkatan produksi pertanian dan peternakan, antara lain :
 - a. Integrasi mendukung produksi pertanian yakni komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan melalui pembangunan irigasi pertanian dan jalan pertanian, demplot dengan penggunaan varietas benih unggul, penerapan teknologi pertanian, penyuluhan dan pembinaan kepada petani, penanganan wabah atau hama;
 - b. Pengajuan penambahan anggaran pada perubahan RKPD untuk kegiatan prioritas dengan mempertimbangkan dampak dari suatu masalah yang bilamana tidak diselesaikan akan menimbulkan masalah baru.
 - c. Pergeseran anggaran antar kegiatan maupun sub kegiatan sesuai dengan kebijakan.

Adapun capaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024 sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kendal

OPD : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	100%	50%	50	100%	100%	100
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja dinas	9 dokumen	9 dokumen	4 dokumen	44	8 dokumen	9 dokumen	100
2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dokumen	6 dokumen	4 dokumen	66	6 dokumen	6 dokumen	100
2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50	12 laporan	12 laporan	100
2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50	12 laporan	12 laporan	100
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	7 bulan	50	14 bulan	14 bulan	100
2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	175 orang/bulan	175 orang/bulan	175 orang/bulan	100	175 orang/bulan	175 orang/bulan	100
2	09	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50	12 dokumen	12 dokumen	100
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50	12 bulan	12 bulan	100
2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	100	-	1 paket	-
2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
2	09	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan makan minum yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	6 paket	50	12 paket	12 paket	100
2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	6 paket	50	12 paket	12 paket	100
2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50	12 dokumen	12 dokumen	100

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	09	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	5 paket	5 paket	2 paket	40	1 paket	5 paket	100
2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50	12 laporan	12 laporan	100
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50	12 bulan	12 bulan	100
2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50	12 laporan	12 laporan	100
2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50	12 laporan	12 laporan	100
2	09	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50	12 laporan	12 laporan	100
2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50	12 laporan	12 laporan	100
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara	26 jenis	26 jenis	18 jenis	69.23	26 jenis	26 jenis	100
2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	192 unit	192 unit	97 unit	50.52	192 unit	192 unit	100
2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	0 unit	0	1 unit	1 unit	100
2	09	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	18 unit	1 unit	1 unit	100	20 unit	1 unit	100
2	09	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase lumbung pangan aktif	16.67%	-	-	-	14.28%	-	100
2	09	2	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lumbung pangan aktif	5 kelompok	-	-	-	5 kelompok	-	100
2	09	2	2.01	0001	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah lumbung pangan yang tersedia	37 unit	-	-	-	35 unit	-	100
2	09	2	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia	-	-	-	-	4 unit	-	100
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan bahan pokok utama (beras)	135%	135%	41.07%	30.42	162.21%	135%	100
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Angka Ketersediaan protein	56 gr/kap/hr	56 gr/kap/hr	35,46 gr/kap/hr	63.32	104,36 gr/kap/hr	56 gr/kap/hr	100
						Angka Ketersediaan Energi	2.060 kkal/kap/hr	2.060 kkal/kap/hr	1.302 kkal/kap/hr	63.20	3.590 kkal/kap/hr	2.060 kkal/kap/hr	100
2	09	03	2.01	0001	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	1 laporan	-	-	-	1 laporan	-	100

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	09	03	2.01	0004	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Laporan harga dan pasokan pangan pokok Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	-	100
2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	1 unit	1 unit	5 unit	500	1 unit	1 unit	
2	09	03	2.01	0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	-	1 laporan	0 laporan	0	-	1 laporan	
2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	-	1 dokumen	0 dokumen	0	-	1 dokumen	
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan cadangan pangan pemerintah (gabah)	40 ton	40 ton	0 ton	0	30 ton	40 ton	100
2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	40 ton	50 ton	0 ton	0	30 ton	50 ton	100
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah kelompok yang memenuhi konsumsi pangannya secara beragam, bergizi, seimbang dan aman	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	100	10 kelompok	10 kelompok	100
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	1 laporan	1 laporan	0 laporan	0	1 laporan	1 laporan	100
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	54.39	54.39	54.39	100	54.81	54.39	100
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah dokumen FSVA	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen	100
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen	100
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa mandiri pangan yang terfasilitasi	11 desa	11 desa	9 desa	81.82	11 desa	11 desa	100
2	09	04	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten / kota	1 laporan	1 laporan	0 desa	0	1 laporan	1 laporan	100
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	80%	80%	0%	0	95%	80%	100
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pangan yang diperiksa	20 sampel	20 sampel	0 sampel	0	20 sampel	20 sampel	100
2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 laporan	1 laporan	0 laporan	0	1 dokumen	1 laporan	100
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase luasan tanaman pangan yang menggunakan varietas benih unggul	86.50	86.50	0.00	0	99.61	86.50	100

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Persentase luasan tanaman hortikultura yang menggunakan varietas benih unggul	72.73	72.73	0.00	0	95.91	72.73	100
						Persentase luasan tanaman perkebunan yang menggunakan varietas bibit unggul	69.97	69.97	0.00	0	69.8	69.97	100
						Persentase penggunaan bibit ternak unggul	76.2	76.2	0.00	0	78.70	76.2	100
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan sarana pertanian	1 kelompok	1 kelompok	14 kelompok	1400	3 kelompok	1 kelompok	100
3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 laporan	3 laporan	0 laporan	0	1 laporan	3 laporan	100
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	3 laporan	1 laporan	0 laporan	0	1 laporan	1 laporan	100
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah luasan areal tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura yang dikembangkan	57 Ha	57 Ha	0 Ha	0	88 Ha	57 Ha	100
3	27	02	2.02	0001	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	2 VUB	-	-	-	-	-	100
3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan / Tanaman	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen	100
3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen	100
3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	-	2 VUB	0 VUB	0	-	2 VUB	100
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penangkar benih yang terbina	25 orang	25 orang	0 orang	0	75 orang	25 orang	100
3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah pengawasan mutu benih / bibit ternak, bahan pakan / pakan / tanaman skala kecil	1 laporan	1 laporan	0 laporan	0	1 laporan	1 laporan	100
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah benih / bibit ternak yang berhasil dikembangkan	21.700 ekor	21.700 ekor	14.391 ekor	66.32	15.369 ekor	21.700 ekor	100
3	27	02	2.05	0001	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	19.727.934 ekor	-	-	-	20,128,938	-	100
3	27	02	2.05	0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang beredar	330.530 ton	-	-	-	-	-	100
3	27	02	2.05	0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah pengawasan produksi benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan/pakan	2 laporan	-	-	-	-	-	100
3	27	02	2.05	0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	-	19.727.934 ekor	4.932.283 ekor	25	-	19.727.934 ekor	100
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	22.666 Ha	22.666 Ha	22.666 Ha	100	22.666 Ha	22.666 Ha	100

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Luas lahan yang mendapat pengairan dari sumber-sumber air (irigasi tanah dangkal / dalam, embung, dam parit, long storage) dan pengelolaan jaringan irigasi sesuai kewenangan	1.350 Ha	1.350 Ha	0 Ha	0	1.350 Ha	1.350 Ha	100
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase pengembangan prasarana pertanian melalui digitasi lahan pertanian	25%	25%	0%	0	20%	25%	100
						Prosentase pengembangan prasarana pertanian melalui action plan	25%	-	-	-	-	-	-
3	27	03	2.01	0001	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan / KP2B dan lahan cadangan pangan pertanian pangan berkelanjutan	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	-	100
3	27	03	2.01	0002	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B	5 dokumen	-	-	-	-	-	100
3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	1 laporan	1 laporan	0 dokumen	0	1 laporan	1 laporan	100
3	27	03	2.01	0004	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas perkebunan	5 dokumen	-	-	-	-	-	100
3	27	03	2.01	0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0	-	1 dokumen	100
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang terbangun / terehab	35 unit	35 unit	0 unit	0	60 unit	35 unit	100
3	27	03	2.02	0001	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara	20 unit	-	-	-	-	-	100
3	27	03	2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah embung pertanian dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	1 unit	-	-	-	-	-	100
3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	8 unit	21 unit	0 unit	0	25 unit	21 unit	100
3	27	03	2.02	0007	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	1 unit	-	-	-	-	-	100
3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 unit	3 unit	0 unit	0	-	3 unit	100
3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang terbangun, terehab, dan terpelihara	1 unit	3 unit	0 unit	0	14 unit	3 unit	100
3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	-	11 unit	0 unit	0	-	11 unit	100

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	-	1 unit	0 unit	0	-	1 unit	100
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	0.01%	0.01%	0.0%	0	59.42%	0.01%	100
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Angka morbiditas hewan	1.750 ekor	1.750 ekor	74 ekor	4.23	2.076 ekor	1.750 ekor	100
3	27	04	2.01	0001	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	1 laporan	-	-	-	1 laporan	-	100
3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	-	1 laporan	0 laporan	0	-	1 laporan	100
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah specimen yang diperiksa	670 sampel	-	-	-	-	-	100
3	27	04	2.02	0001	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah penilaian risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan	1 laporan	-	-	-	-	-	100
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan medik veteriner dan jasa pemotongan di RPH	2.552 kali	2.552 kali	630 kali	24.69	2.490 kali	2.552 kali	100
3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah usaha peternakan yang mendapatkan pengawasan	21 unit	21 unit	0 unit	0	8 unit	21 unit	100
3	27	04	2.04	0001	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	1 laporan	-	-	-	1 laporan	-	100
3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	1 laporan	1 laporan	0 laporan	0	1 laporan	1 laporan	100
3	27	04	2.04	0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	-	1 unit usaha	0 unit usaha	0	-	1 unit usaha	100
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	90.24%	90.24%	0.00%	0	95.68%	90.24%	100
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah gerakan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	11 kali	11 kali	0 kali	0	11 kali	11 kali	100
3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dikendalikan	747 Ha	747 Ha	0 Ha	0	1.288,20 Ha	747 Ha	100
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Cakupan Kelompok Tani yang aktif	87%	87%	28.00%	32.18	88.41%	87%	100
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani aktif	750 kelompok	750 kelompok	210 kelompok	28	1.091 kelompok	750 kelompok	100

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	157 unit	157 unit	30 unit	19.12	3 unit	157 unit	100
3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	17 unit	20 unit	6 unit	30	37 unit	20 unit	100
3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	2 unit	3 unit	0 unit	0	12 unit	3 unit	100
3	27	07	2.01	0004	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang dibentuk	1 unit	1 unit	0 unit	0	-	1 unit	100

2.2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun yang ditujukan kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal dalam bentuk proposal maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari pelaksanaan musrenbang kecamatan. Usulan rencana pembangunan pertanian dan pangan mengacu pada sistem *bottom up*. Proses untuk memperoleh usulan dari pemangku kepentingan melalui identifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang diajukan ke desa untuk diverifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi usulan prioritas desa. Selanjutnya usulan diajukan ke tingkat kecamatan untuk dikaji melalui musrenbang kecamatan. Hasil dari musrenbang kecamatan menjadi usulan program/kegiatan kecamatan dan diajukan ke Baperlitbang untuk dikaji melalui musrenbang kabupaten. Hasil dari musrenbang kabupaten tidak semua program/kegiatan disetujui karena banyaknya usulan kegiatan dan keterbatasan anggaran daerah untuk mendanai program/kegiatan. Oleh karena itu, usulan prioritas kecamatan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait untuk disinkronkan dengan Renstra Perangkat Daerah, RPJMD dan program/kegiatan baik dari provinsi dan pusat menjadi usulan rencana kerja Perangkat Daerah tahunan. Namun demikian, usulan program dari para pemangku kepentingan pada tahun berjalan yakni Tahun 2024 untuk dilaksanakan pada Tahun 2024 perubahan anggaran, tidak ada sebagaimana dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3. USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Vol	Catatan
1	2	3	4	5	6
		N I H I L			

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1. Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaah terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Tahun 2024 yang selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi

1	Kebijakan Nasional	
	Tema Pembangunan : Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Penguatan logistik komoditas pangan dan pertanian, pengendalian inflasi pangan, kemandirian pangan.
2	Kebijakan Provinsi	
	Tema Pembangunan : Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan. Didukung dengan SDM yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter	Menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri nasional.
3	Kebijakan Kabupaten	
	Tema Pembangunan : Kendal Smart City, Kendal Handal, Kendal Melayani bertujuan dalam pelaksanaan tata Kelola Pemerintah untuk lebih mendorong dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat	Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (<i>start up</i>); melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan kemandirian pangan.

Mengacu pada arah kebijakan nasional, kebijakan provinsi, dan kebijakan daerah, maka arah kebijakan perencanaan program dan kegiatan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal diselaraskan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.

2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada Visi Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 adalah “KENDAL HANDAL, Unggul, Makmur, Berkeadilan”. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan dan merujuk pada dokumen RPJMD, maka misi yang dapat didukung secara langsung yakni misi ke 1 “Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up)”.

Sebagai upaya mendukung visi dan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan Dinas pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan potensi dan keunggulan lokal;
2. Meningkatkan ketahanan pangan;
3. Meningkatkan kinerja Dinas Pertanian dan Pangan.

Sedangkan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal sebagai berikut :

1. Meningkatnya Produktivitas komoditas pertanian dan produksi peternakan unggulan;
2. Meningkatnya ketersediaan pangan daerah;
3. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel.

3. Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perubahan rumusan program dan kegiatan antara lain adalah :

1. Program/kegiatan/sub kegiatan rutin setiap tahun;
2. Program/kegiatan/sub kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan khususnya untuk peningkatan pelayanan masyarakat;
3. Program/kegiatan/sub kegiatan di bidang pembangunan fisik, ekonomi, sosial budaya yang menjadi skala prioritas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Dinas Pertanian dan Pangan melaksanakan 9 program, 22 kegiatan, dan 50 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 46.127.803.269,-. Pada perubahan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024 ini secara alokasi anggaran total Dinas mengalami pengurangan sebanyak Rp. 2.046.072.463,- dengan jumlah program/kegiatan/sub kegiatan masih sama yakni 9 program, 22 kegiatan, dan 50 sub kegiatan sehingga total alokasi anggaran perubahan menjadi Rp. 44.081.730.806,-.

Berikut uraian garis besar mengenai rekapitulasi program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal pada Perubahan Renja Tahun 2024 :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - i. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah bertambah Rp. 35.172.000,-
 - ii. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berkurang Rp. 22.534.500,-
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berkurang Rp. 2.350.560.000,-
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - i. Penyediaan Bahan Logistik Kantor bertambah Rp. 400.000,-
 - ii. Penyediaan Bahan/Material berkurang Rp. 219.060.000,-
 - iii. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- bertambah Rp. 87.094.000,-
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
bertambah Rp. 4.995.000,00
 - ii. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
bertambah Rp. 40.000.000,-
 - iii. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
berkurang Rp. 188.350.000,-
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
bertambah Rp. 23.564.000,-
 - ii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
bertambah Rp. 10.000.000,-
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
 - i. Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota
berkurang Rp. 84.207.500,-
 - b. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
 - i. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
berkurang Rp. 2.470.000,-
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
- a. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - i. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
bertambah Rp. 32.170.000,-

4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - i. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi bertambah Rp. 671.066.394,-
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
 - i. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman berkurang Rp. 670.115.000,-
 - ii. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman bertambah Rp. 13.480.000,-
 - c. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - i. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak berkurang Rp. 73.708.000,-
5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - a. Pengembangan Prasarana Pertanian
 - i. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya bertambah Rp. 7.950.000,-
 - b. Pembangunan Prasarana Pertanian
 - i. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya bertambah Rp. 35.000.000,-
 - ii. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani bertambah Rp. 12.765.143,-
 - iii. Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan bertambah Rp. 25.875.000,-
6. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
 - i. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

bertambah Rp. 95.000.000,-

7. Program Penyuluhan Pertanian

a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

- i. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
bertambah Rp. 437.938.000,-
- ii. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
bertambah Rp. 29.900.000,-
- iii. Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani
bertambah Rp. 2.563.000,-

Perubahan rencana kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, bisa dilihat pada tabel 3.2. berikut :

**TABEL 3.2. PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KAB. KENDAL
TAHUN 2024**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
			TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkuran g (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASION AL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				35,954,699,218.00	46,127,803,269.00	44,381,730,806.00	8,427,031,588.00							37,916,043,892.00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				20,457,051,666.00	24,358,367,100.00	21,945,944,100.00	1,488,892,434.00							23,620,043,892.00	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				20,457,051,666.00	24,358,367,100.00	21,945,944,100.00	1,488,892,434.00							23,620,043,892.00	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase lumbung pangan aktif	20.00 %	16.67 %	100,000,000.00	0.00	0.00	-100,000,000.00						16.67%	0.00	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lumbung pangan aktif	6 Kelompok	6 Kelompok	100,000,000.00	0.00	0.00	-100,000,000.00			-	Pemerataan infrastruktur dengan berbasis peningkatan konektivitas wilayah pendukung perekonomian Pemerataan infrastruktur dengan berbasis peningkatan konektivitas wilayah pendukung perekonomian	-	5 kelompok	0.00	DINAS PERTAN IAN DAN PANGA N
2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya															
		Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	35 Unit	0 Unit	100,000,000.00	0.00	0.00	-100,000,000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Pemerataan infrastruktur dengan berbasis peningkatan konektivitas wilayah pendukung perekonomian Pemerataan infrastruktur dengan berbasis peningkatan konektivitas wilayah pendukung perekonomian			0.00	DINAS PERTAN IAN DAN PANGA N
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN	Persentase ketersediaan bahan pokok utama (beras)	139.00 %	135 %	831,900,000.00	744,761,340.00	742,291,340.00	-15,900,000.00						137%	816,000,000.00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
			TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkuran g (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASION AL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Angka ketersediaan energi Angka ketersediaan protein	2100 kkal/kap/hari 56 gram/kap/hari	2060 kkal/kap/hari 56 gram/kap/hari	65,000,000.00	113,555,000.00	113,555,000.00	48,555,000.00			-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata	-	2080 kkal/kap/hari 56 gram/kap/hari	221,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota															
		Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	-	1 Unit	0.00	93,870,000.00	93,870,000.00	93,870,000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata		1 unit	150,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis															

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
			TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkuran g (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASION AL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 Laporan	1 Laporan	35,000,000.00	3,960,000.00	3,960,000.00	-31,040,000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			36,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																
		Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000.00	15,725,000.00	15,725,000.00	-14,275,000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata		1 Dokumen	35,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
			TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkuran g (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASION AL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan cadangan pangan pemerintah (gabah)	40 Ton	40 Ton	450,000,000.00	493,244,340.00	493,244,340.00	43,244,340.00			-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata	-	40 ton	410,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota															
		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	45 Ton	50 Ton	450,000,000.00	493,244,340.00	493,244,340.00	43,244,340.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata		40 ton	410,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
			TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkuran g (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASION AL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah kelompok yang memenuhi konsumsi pangannya secara beragam, bergizi, seimbang, dan aman	10 Kelompok	10 Kelompok	316,900,000.00	137,962,000.00	135,492,000.00	-181,408,000.00			-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata	-	10 kelompok	185,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal															
		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	1 Laporan	316,900,000.00	137,962,000.00	135,492,000.00	-181,408,000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata		1 laporan	185,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	56.07 %	54.39 %	136,900,000.00	110,845,000.00	143,015,000.00	8,100,000.00						55.23%	145,000,000.00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
			TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkuran g (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASION AL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah dokumen FSVA	1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	-16,000,000.00			-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata	-	1 Dokumen	35,000,000.00	DINAS PERTAN IAN DAN PANGA N
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan															
		Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	-16,000,000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata	-	1 Dokumen	35,000,000.00	DINAS PERTAN IAN DAN PANGA N
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa mandiri pangan yang terfasilitasi	11 Desa	11 Desa	106,900,000.00	96,845,000.00	129,015,000.00	22,115,000.00			-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	-	11 Desa	110,000,000.00	DINAS PERTAN IAN DAN PANGA N
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota															

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
			TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkuran g (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASION AL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	1 Laporan	106,900,000.00	96,845,000.00	129,015,000.00	22,115,000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani		1 laporan	110,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	90.00 %	80 %	35,000,000.00	35,907,000.00	35,907,000.00	1,000,000.00						80%	36,000,000.00		
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pangan yang diperiksa	20 Sampel	20 Sampel	35,000,000.00	35,907,000.00	35,907,000.00	907,000.00			-	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan	-	20 sampel	36,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																
		Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000.00	35,907,000.00	35,907,000.00	907,000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1 Dokumen	36,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 %	100 %	19,353,251,666.00	23,466,853,760.00	21,024,730,760.00	3,269,792,226.00						100%	22,623,043,892.00		
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja dinas	9 Dokumen	9 Dokumen	137,851,578.00	121,784,878.00	107,784,878.00	-30,066,700.00			-	- -	-	8 Dokumen	227,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	65,000,000.00	48,490,000.00	48,490,000.00	-16,510,000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -		6 Dokumen	120,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	12 Laporan	12 Laporan	12,000,000.00	1,674,000.00	1,674,000.00	-10,326,000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -		12 Laporan	12,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
			TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkuran g (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASION AL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	60,851,578.00	71,620,878.00	57,620,878.00	-3,230,700.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	- -	- -		12 Laporan	95,000,000.00	DINAS PERTAN IAN DAN PANGA N	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	17,029,500,088.00	19,387,051,051.00	17,036,491,051.00	6,990,963.00			- -	- -	-	14 Bulan	19,590,043,892.00	DINAS PERTAN IAN DAN	
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	179 Orang/ bulan	179 Orang/ bulan	16,614,500,088.00	19,387,051,051.00	17,036,491,051.00	421,990,963.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	- -	- -		175 Orang/bul an	19,175,043,892.00	DINAS PERTAN IAN DAN PANGA N	
3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	415,000,000.00	0.00	0.00	-415,000,000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	- -	- -		12 Dokumen	415,000,000.00	DINAS PERTAN IAN DAN PANGA N	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	1,007,000,000.00	1,940,712,831.00	1,973,098,031.00	966,098,031.00			-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	-	12 Bulan	1,051,000,000.00	DINAS PERTAN IAN DAN PANGA N	
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani		1 Paket	25,000,000.00	DINAS PERTAN IAN DAN PANGA N	
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	130,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	10,000,000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	-		1 Paket	130,000,000.00	DINAS PERTAN IAN DAN PANGA N	
3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH H PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	42,000,000.00	42,000,000.00	42,000,000.00	0.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-		1 Paket	30,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100,000,000.00	25,240,000.00	25,640,000.00	-74,360,000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-		12 Paket	100,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	48,000,000.00	48,000,000.00	48,000,000.00	0.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-		12 Paket	48,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12,000,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	-7,200,000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-		12 Dokumen	13,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	350,000,000.00	312,160,000.00	126,500,000.00	-223,500,000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-		5 Paket	350,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	300,000,000.00	1,343,512,831.00	1,561,158,031.00	1,261,158,031.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-		12 Laporan	355,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	4 Jenis	0.00	0.00	0.00	0.00			-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	-	6 Jenis	350,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani		1 unit	350,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan	963,400,000.00	1,801,805,000.00	1,658,292,800.00	694,892,800.00			-	-	-	12 Bulan	1,005,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGA
3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	5,000,000.00	5,005,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-		12 Laporan	5,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGA
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	259,000,000.00	833,200,000.00	833,200,000.00	574,200,000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani		1 laporan	250,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGA
3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	50,000,000.00	50,000,000.00	90,000,000.00	40,000,000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-		12 Laporan	50,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGA
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	649,400,000.00	913,600,000.00	725,092,800.00	75,692,800.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-		12 Laporan	700,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGA
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara	26 Jenis	26 Jenis	215,500,000.00	215,500,000.00	249,064,000.00	33,564,000.00			-	-	-	26 Jenis	400,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGA
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	192 Unit	192 Unit	188,000,000.00	188,000,000.00	211,564,000.00	23,564,000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-		192 Unit	204,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGA
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
			TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkuran g (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASION AL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	12,500,000.00	12,500,000.00	22,500,000.00	10,000,000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani		1 unit	180,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani		1 unit	16,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				15,497,647,552.00	21,769,436,169.00	22,435,786,706.00	6,938,139,154.00							14,296,000,000.00		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				15,497,647,552.00	21,769,436,169.00	22,435,786,706.00	6,938,139,154.00							14,296,000,000.00		
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase penggunaan bibit ternak unggul Persentase luasan tanaman perkebunan yang menggunakan varietas bibit unggul Persentase luasan tanaman hortikultura yang menggunakan varietas benih unggul Persentase luasan tanaman pangan yang menggunakan varietas benih unggul	87.50 73.73 70.37 82,9 % % % %	76,20 69,97 72.73 86,50 % % % %	2,143,671,640.00	4,321,118,088.00	4,389,809,482.00	736,328,360.00						79,7% 70,17% 73,23% 87%	2,880,000,000.00		
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan sarana pertanian	1 kelompok	1 kelompok	1,398,271,640.00	2,735,333,088.00	3,406,399,482.00	2,008,127,842.00			-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	-	1 kelompok	1,970,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
			TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkuran g (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASION AL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 Laporan	3 Laporan	1,298,271,640.00	2,709,703,088.00	3,380,769,482.00	2,082,497,842.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL DBH CUKAI HASIL TEBBAKAU (CHT) DAK NONFISIK- DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani		1 laporan	1,900,000,000.00	DINAS PERTAN IAN DAN PANGA N	
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																
		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan	1 Laporan	100,000,000.00	25,630,000.00	25,630,000.00	-74,370,000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani		3 Laporan	70,000,000.00	DINAS PERTAN IAN DAN PANGA N	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah luasan areal tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura yang dikembangkan	57 Ha	57 Ha	460,000,000.00	1,005,045,000.00	348,410,000.00	-111,590,000.00			-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata	-	56 Ha	500,000,000.00	DINAS PERTAN IAN DAN PANGA N	
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERAN GKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen	80,000,000.00	57,805,000.00	57,805,000.00	-22,195,000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata		1 Dokumen	90,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman															
		Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen	160,000,000.00	796,595,000.00	126,480,000.00	-33,520,000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAK NONFISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata		1 Dokumen	170,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman															
		Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	2 Varietas Unggul Baru (VUB)	2 Varietas Unggul Baru (VUB)	220,000,000.00	150,645,000.00	164,125,000.00	-55,875,000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani		2 Varietas Unggul Baru (VUB)	240,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
			TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkuran g (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASION AL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penangkar benih yang terbina	25 orang	25 orang	100,000,000.00	96,125,000.00	126,125,000.00	26,125,000.00			-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata	-	25 orang	110,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil																
		Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000.00	96,125,000.00	126,125,000.00	26,125,000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata		1 laporan	110,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah benih/bibit ternak yang berhasil dikembangkan	21700 ekor	21700 ekor	185,400,000.00	484,615,000.00	508,875,000.00	323,475,000.00			-	-	-	21700 ekor	300,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak																

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
			TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkuran g (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASION AL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	19727934 Laporan	19729134 Laporan	185,400,000.00	484,615,000.00	508,875,000.00	323,475,000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL INSENTIF FISKAL	-	-		19,728,114 Laporan	300,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Luas lahan yang mendapat pengaliran dari sumber-sumber air (irigasi tanah dangkal / dalam, embung, dam parit, long storage) dan pengelolaan jaringan irigasi sesuai kewenangan	22666.00 1350.00 Ha	22666.00 1350 Ha	9,951,278,000.00	14,368,580,000.00	14,432,176,143.00	-2,916,278,000.00						22.666 Ha 1.350 Ha	7,035,000,000.00	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase pengembangan prasarana pertanian melalui action plan Prosentase pengembangan prasarana pertanian melalui digitasi lahan pertanian	0 % 25 %	0 % 25 %	175,000,000.00	169,844,000.00	177,794,000.00	2,794,000.00			-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	-	0 % 25 %	180,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya															
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	1 Laporan	75,000,000.00	75,000,000.00	82,950,000.00	7,950,000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani		1 laporan	80,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota															
		Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000.00	94,844,000.00	94,844,000.00	-5,156,000.00	Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani		1 Dokumen	100,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
			TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkuran g (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASION AL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang terbangun/terehab	35 unit	35 unit	9,776,278,000.00	14,198,736,000.00	14,254,382,143.00	4,478,104,143.00			-	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim	-	36 unit	6,855,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian															
		Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim		1 unit	130,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani															
		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	23 Unit	21 Unit	5,000,000,000.00	4,586,625,000.00	4,586,625,000.00	-413,375,000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENGUASAN-PENGANGUNAN	-	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim		8 Unit	700,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya															
		Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	3 Unit	760,000,000.00	390,000,000.00	390,000,000.00	-370,000,000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani		2 Unit	275,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya															

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
			TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkuran g (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASION AL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	3 Unit	626,278,000.00	4,780,000,000.00	4,815,000,000.00	4,188,722,000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL DAK FISIK- BIDANG P ERTANIAN- PEN UGASAN- PEMB ANGUNAN/ REN OVASI SARANA DAN PRASARAN A FISIK DASAR P EMBANGUN AN PERTANIAN	-	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim		1 unit	2,000,000,000.00	DINAS PERTAN IAN DAN PANGA N	
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																
		Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	11 Unit	11 Unit	2,850,000,000.00	2,390,811,000.00	2,385,582,143.00	-464,417,857.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL DAK FISIK- BIDANG P ERTANIAN- PEN UGASAN- PEMB	-	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim		20 unit	3,000,000,000.00	DINAS PERTAN IAN DAN PANGA N	
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																
		Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	1 Unit	540,000,000.00	2,051,300,000.00	2,077,175,000.00	1,537,175,000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL DAK FISIK- BIDANG P ERTANIAN- PEN UGASAN- PEMB ANGUNAN/ REN OVASI SARANA DAN PRASARAN A FISIK DASAR P EMBANGUN AN PERTANIAN	-	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim		1 unit	750,000,000.00	DINAS PERTAN IAN DAN PANGA N	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
			TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkuran g (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASION AL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	0.008 %	0.01 %	1,057,625,000.00	687,075,000.00	687,075,000.00	198,375,000.00						0.01%	1,256,000,000.00	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Angka morbiditas hewan	1650 ekor	1750 ekor	188,500,000.00	178,250,000.00	178,250,000.00	-10,250,000.00			-	-	-	1.700 ekor	226,000,000.00	DINAS PERTAN IAN DAN PANGA N
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															
		Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 Laporan	1 Laporan	188,500,000.00	178,250,000.00	178,250,000.00	-10,250,000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	-	-	1 laporan	226,000,000.00	DINAS PERTAN IAN DAN PANGA N
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan medik veteriner dan jasa pemotongan di RPH	2661 kali	2552 kali	612,225,000.00	340,755,000.00	340,755,000.00	-271,470,000.00			-	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan	-	2.605 kali	650,000,000.00	DINAS PERTAN IAN DAN PANGA N
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner															
		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	1 Laporan	612,225,000.00	340,755,000.00	340,755,000.00	-271,470,000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL DAK NONFISIK- DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan	-	1 laporan	650,000,000.00	DINAS PERTAN IAN DAN PANGA N
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah usaha peternakan yang mendapatkan pengawasan	32 unit	21 unit	256,900,000	168,070,000.00	168,070,000.00	-88,830,000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-			26 unit	380,000,000.00	DINAS PERTAN IAN DAN PANGA N
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan															
		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	1 Laporan	156,900,000.00	92,445,000.00	92,445,000.00	-64,455,000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM- DANA	-	-	-		180,000,000.00	DINAS PERTAN IAN DAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
			TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkuran g (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASION AL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan															
		Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	100,000,000.00	75,625,000.00	75,625,000.00	-24,375,000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata		16.67%	200,000,000.00	DINAS PERTAN IAN DAN PANGA N
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	91.58 %	90.24 %	235,072,912.00	199,392,081.00	294,392,081.00	64,927,088.00						5 kelompok	300,000,000.00	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah gerakan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	11 Kali	11 Kali	235,072,912.00	199,392,081.00	294,392,081.00	59,319,169.00			-	- -	-		300,000,000.00	DINAS PERTAN IAN DAN PANGA
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan															
		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang	747 Ha	747 Ha	235,072,912.00	199,392,081.00	294,392,081.00	59,319,169.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL DBH CUKAI HASIL	-	- -		137%	300,000,000.00	DINAS PERTAN IAN DAN PANGA N

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
			TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkuran g (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASION AL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Cakupan Kelompok Tani yang aktif	89.00 %	87 %	2,110,000,000.00	2,193,271,000.00	2,632,334,000.00	715,000,000.00						2080 kkal/k ap/hari 56 gram/ka p/hari	2,825,000,000.00	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani aktif	770 kelompok	750 kelompok	2,110,000,000.00	2,193,271,000.00	2,632,334,000.00	522,334,000.00			-	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0 Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0	-		2,825,000,000.00	DINAS PERTAN IAN DAN PANGA N
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa															
		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	157 Unit	157 Unit	380,000,000.00	339,895,000.00	339,895,000.00	-40,105,000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL DAK- NONFISIK- DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0 Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0			380,000,000.00	DINAS PERTAN IAN DAN PANGA N
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa															
		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	17 Unit	20 Unit	1,350,000,000.00	1,369,990,000.00	1,809,990,000.00	459,990,000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0 Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0			1,350,000,000.00	DINAS PERTAN IAN DAN PANGA N
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian															

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
			TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkuran g (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASION AL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3 Unit	3 Unit	290,000,000.00	257,660,000.00	254,160,000.00	-35,840,000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAK FISIK- BIDANG P ERTANIAN- PEN UGASAN- PEMB ANGUNAN/ REN	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani		40 ton	1,000,000,000.00	DINAS PERTAN IAN DAN PANGA N
3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani															
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	40 ton	20	21
		Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	1 Unit	1 Unit	90,000,000.00	225,726,000.00	228,289,000.00	138,289,000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata		10 kelompok	95,000,000.00	DINAS PERTAN IAN DAN PANGA N
J U M L A H					2,455,210,099,261.00	2,554,502,569,720.00	2,710,823,152,865.00	255,613,053,604.00							2,761,903,860,666.00	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2024 merupakan turunan dari Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 dengan berinduk pada RPJP Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026. Penyusunan Renja berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun 2024.

Output Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal adalah program prioritas yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi beserta sasarannya. Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja serta umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur dan memberikan pelayanan yang berkualitas serta profesional. Pencapaian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026, dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, telah disepakati dan ditetapkan dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2024, serta kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Rencana Kerja sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan sekaligus sebagai bahan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;

2. Program, kegiatan, dan sub kegiatan selaras dengan sistem perencanaan dan penganggaran yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Tahun 2024, selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

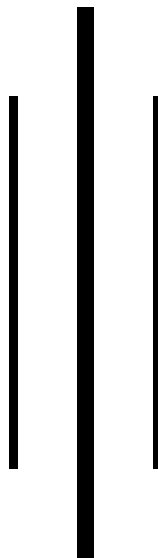
Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2024 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada Tahun 2024. Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diselaraskan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kendal.

Kendal, 26 September 2024
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KENDAL





**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN KANGKUNG
TAHUN 2024**



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KANGKUNG**

Jl. KH.Ibrohim No.1 Telp/Fax (0294) 383203 Email :

kec.kangkung@kendalkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas ridhonya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kangkung Tahun 2024.

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal.

Adapun penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Kangkung diharapkan dapat benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Kecamatan Kangkung Tahun 2025 mendatang.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparat terkait di Kecamatan Kangkung, yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih ada kekurangan, oleh karena itu kami mohon saran untuk penyempurnaan Rencana Kerja di tahun yang akan datang.



Kendal, 2024
KAMAT KANGKUNG

ANTIN KUSTIYAH WIJAYANTI, S.Sos. M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 197311241993032005

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II dan Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	27
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	28
BAB IV PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mendasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Perubahan RKPD Kabupaten Kendal telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penyelarasan dan penyempurnaan sejak tahap penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada arah kebijakan pembangunan tahun 2024, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal pada tahun 2024 adalah **“Kendal Smart City”** yang diprioritaskan pada “Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal *Smart City*”. Arah kebijakan ini dengan focus peningkatan kemantapan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan *clean* dan *Good Governances*, penguatan *Smart City* yang difokuskan pada *Smart Government*, *Smart Education*, *Smart Health*, *Smart Economy* dan *Smart Transportation*.

Pembangunan daerah yang menerapkan perencanaan yang SMART dan prinsip *Money Follow Program Priority*, dan *Money Follow Result*, diharapkan mampu untuk lebih mendorong potensi dan keunggulan daerah menuju kemandirian ekonomi daerah. Mendasarkan pada isu global, nasional dan regional.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 20).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Maksud
 - a. Menjadi pedoman penyusunan RKAP dan DPPU.

- b. Memberikan acuan bagi OPD dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun berjalan;
- c. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun berjalan;
- d. Memberikan acuan bagi OPD dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun berjalan;

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal Tahun 2024 adalah untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi makro sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang penyusunan Rencana Kerja, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

BAB III RENCANA KERJA & PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menampilkan usulan rencana kegiatan dan program serta pagu indikatif yang akan dilaksanakan pada anggaran perubahan tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II dan Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Kangkung sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 secara umum selaras dengan Renja Kecamatan Kangkung tahun 2024, namun terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran dan SE yang berlaku pada tahun bersangkutan. Untuk kegiatan-kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun 2024, diusulkan kembali pada perubahan anggaran tahun 2024 dan tahun 2025.

Adapun kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun 2024 dan diusulkan kembali pada Renja tahun 2025 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 - a) Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - b) Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel; dan
 - Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kangkung Tahun 2024 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Adapun review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kangkung sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Realisasi Program/ kegiatan/ sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang telah ditetapkan

Program/ kegiatan yang memenuhi dan/ atau melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang telah ditetapkan adalah :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

- 1) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang meliputi sub kegiatan :

- a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, tidak tercapai karena sub kegiatan belum tercukupi anggarannya (sub kegiatan akan dilaksanakan pada perubahan anggaran);

2. Realisasi Program/ kegiatan yang memenuhi target dan/atau melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang telah ditetapkan

Program/ kegiatan yang memenuhi dan/ atau melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang telah ditetapkan adalah :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

- 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang meliputi sub kegiatan:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- 2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik ;

- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - 3) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Indikator Kinerja Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan Kecamatan dengan target kinerja 100%, realisasi kinerja 100% yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan;

- c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - 1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
 - d) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 1) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Indikator Kinerja yang dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
3. Realisasi Program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang telah ditetapkan

Program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang telah ditetapkan nihil.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, tercapainya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan

a) Faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target kegiatan antara lain :

1) Adanya Surat Edaran Pembatasan Dalam Penyusunan RKA seluruh Perangkat Daerah se-Kabupaten Kendal;

2) Terjadi pergeseran rencana pelaksanaan kegiatan ke triwulan IV tahun 2024;

b) Faktor yang mendukung tercapainya kegiatan karena adanya komitmen semua pihak untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, sebagai bagian untuk pencapaian perjanjian kinerja perangkat daerah.

c) Faktor yang menjadi penyebab melebihinya target kinerja program/ kegiatan adalah nihil

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

a) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah secara umum mencapai target yang telah ditetapkan, meskipun demikian guna meningkatkan pelayanan Kecamatan Kangkung, perlu ditingkatkan pelaksanaan kegiatan yang langsung mendukung implementasi e-goverment, bersentuhan dengan kebutuhan layanan kepada masyarakat.

6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor penghambat adalah dengan perencanaan dan penganggaran yang mendukung percepatan Pelayanan Kecamatan Kangkung antara lain :

a) pengajuan penambahan kekurangan anggaran pada perubahan RKPD untuk kegiatan-kegiatan yang kurang anggaran pada penetapan anggaran;

- b) pergeseran anggaran antar kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan perubahan kebijakan/ prioritas.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2024 Kecamatan Kangkung, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

➤ **Analisis IKU Kecamatan Kangkung**

Faktor pendukung tercapainya nilai SAKIP ada beberapa faktor yaitu :

- a. Komitmen Pimpinan Kunci Keberhasilan SAKIP
- b. Adanya koordinasi yang melibatkan semua kepala seksi, kepala subbagian dan aparatur Kecamatan dalam hal penataan administrasi perkantoran
- c. Manajemen kinerja dalam mendukung efektivitas

Faktor penghambat tercapainya nilai SAKIP ada beberapa faktor yaitu :

- a. Keterbatasan peralatan dan fasilitas kantor pendukung pelaksanaan pekerjaan.
- b. Data dan dokumen pendukung perencanaan yang belum memadai.
- c. Regulasi tentang perencanaan yg selalu mengalami perubahan.

Faktor pendukung tercapainya nilai IKM ada beberapa faktor yaitu :

- a. Komitmen Pimpinan Kunci Keberhasilan tercapainya Nilai IKM
- b. Kecepatan dalam memproses permintaan atau penyelesaian layanan, serta efisiensi dalam penyampaian hasil.
- c. Kepastian bahwa layanan akan diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan konsistensi dalam penerapan layanan.

Faktor penghambat tercapainya nilai IKM ada beberapa faktor yaitu :

- a. Keterbatasan peralatan dan fasilitas kantor pendukung pelaksanaan pekerjaan.
- b. Kurang informatif; informasi kurang tersebar luas kepada masyarakat
- c. Tanpa tindakan perbaikan yang jelas, masyarakat mungkin merasa bahwa survei tidak memberikan dampak yang nyata.

Kecamatan Kangkung Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II, dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.952.547.697,00,- (Dua milyar sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sedangkan untuk realisasi pelaksanaan program dan kegiatan telah menyerap Anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 1.532,764.038,- (Satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga puluh delapan rupiah) atau dengan penyerapan anggaran 51.91%. Capaian target kinerja dan keuangan Kecamatan Kangkung selama Triwulan II masih belum menampakkan kinerja yang maksimal hal ini dikarenakan ada beberapa faktor penghambat.

Ada Program/Kegiatan yang Realisasinya tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran sesuai yang direncanakan. Tapi ada juga yang memenuhi bahkan melebihi, seperti yang diuraikan dibawah ini sekaligus Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, kemudian Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah serta Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun gambaran lebih lengkap mengenai realisasi pencapaian kinerja Kecamatan Kangkung Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II, berdasarkan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kangkung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja : Prosentase unit kerja yang terlayani dengan target kinerja 100%, realisasi kinerja 52,30 % yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, realisasi capaian kinerja dijabarkan dalam sub kegiatan:
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Indikator Kinerja Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Target Kinerja 18 Orang/bulan dengan anggaran penetapan Rp. 2.378.963.197,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 1.345.984.476,- atau 56.58%
 - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor, target kinerja 100% , realisasi capaian kinerja 26.51% % yang dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Kinerja adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Target Kinerja 12 Paket dengan anggaran penetapan Rp. 3.440.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 1.192.000,- atau 34.65%
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Indikator Kinerja adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Target Kinerja 12 Paket dengan anggaran penetapan Rp. 22.446.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 11.049.200,- atau 49,23%.
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor , Indikator Kinerja adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Target Kinerja 12 Paket dengan anggaran penetapan Rp.13.360.000,-,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp.4.368.000,- atau 32.69%.

- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Indikator Kinerja adalah Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Target Kinerja 12 Paket dengan anggaran penetapan Rp. 3.563.700,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp.1.598.000,- atau 44.84%.
 - 5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Indikator Kinerja adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Target Kinerja 12 Laporan dengan anggaran penetapan Rp.203.777.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 47.162.000,- atau 23.14%.
- c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Indikator Kinerja Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan dengan Target Kinerja 8 Unit, realisasi capaian Kinerja 1 Unit, yang dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:
- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Indikator Kinerja adalah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Target Kinerja 1 unit dengan anggaran penetapan Rp. 7.500.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 4.995.000,- atau 66.60%.
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Indikator Kinerja Jumlah bulan tersedianya jasa kantor dengan target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 39.99% yang dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat, Indikator Kinerja adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Target Kinerja 12 Laporan dengan anggaran penetapan Rp. 5.000.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 2.000.000,- atau 40%.
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Indikator Kinerja Jumlah bulan

- kebutuhan layanan listrik, telepon, air dan hosting/internet, dengan target kinerja adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Target Kinerja 12 Laporan dengan anggaran penetapan Rp.90.655.500,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp.34.216.127,- atau 37.74%.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Indikator Kinerja adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Target Kinerja 12 Laporan dengan anggaran penetapan Rp.36.360.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp.16.573.636,- atau 45.58%.
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Indikator kinerja Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, dengan target kinerja 12 unit, realisasi capaian kinerja 21,30% yang dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Indikator Kinerja adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Target Kinerja 15 Unit dengan anggaran penetapan Rp. 34.270.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp.4.560.600,- atau 13.31%.
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya, Indikator Kinerja adalah Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara Target Kinerja 1 unit dengan anggaran penetapan Rp. 27.653.300,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp.7.580.000,- atau 27.41%.
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya, Indikator Kinerja adalah Jumlah Sarana dan

Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Target Kinerja 14 unit dengan anggaran penetapan Rp.12.570.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp.3,725.000,- atau 29.63%.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Indikator Kinerja Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan Kecamatan dengan target kinerja 100%, realisasi kinerja 100 % yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat, Indikator Kinerja dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, Indikator kinerja adalah jumlah kegiatan sosialisasi bidang paten Target Kinerja 1 Kegiatan dengan anggaran penetapan Rp. 1.800.000, dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp.1.800.000,- atau 100%.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Indikator Kinerja Prosentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD dengan target kinerja 100%, realisasi kinerja 1.68% yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Indikator Kinerja Jumlah kegiatan pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan, target kinerja dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, Indikator Kinerja adalah Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Target Kinerja 7 Lembaga dengan anggaran penetapan Rp. 300.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp.200.000,- atau 66.66%.
 - 2) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan,

Indikator Kinerja adalah Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Target Kinerja 6 Laporan dengan anggaran penetapan Rp.11.579.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp.0,- atau 0%.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Indikator kinerja prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani dengan target kinerja 100%, realisasi capaian kinerja 47.22% yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Indikator Kinerja dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

1) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, Indikator Kinerja adalah Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Target Kinerja 1 Laporan dengan anggaran penetapan Rp. 750.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 250.000,- atau 33.33%.

2) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Indikator Kinerja adalah Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Target Kinerja 12 Laporan dengan anggaran penetapan Rp.94.680.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp.44.810.000,- atau 47.33%.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Indikator Kinerja Prosentase kasus konflik yang di tangani

dengan target kinerja 100%, realisasi capaian kinerja 0% yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan target Kinerja yang dijabarkan dalam sub kegiatan:
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Indikator kinerja adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Target Kinerja 12 Laporan dengan anggaran penetapan Rp.2.200.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 0,- atau 0%.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Indikator Kinerja Prosentase desa maju dengan target kinerja 100%, realisasi capaian kinerja 41.67% yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Indikator Kinerja yang dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Indikator Kinerja Jumlah bulan kebutuhan pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan, dengan target kinerja adalah Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Target Kinerja 15 Dokumen dan Terlaksananya kegiatan fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Target Kinerja 15 Dokumen dengan anggaran penetapan Rp.840.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 300.000,- atau 16.67%.
 - 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Indikator Kinerja adalah Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka

Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Target Kinerja 15 Dokumen dengan anggaran penetapan Rp. 840.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 400.000,- atau 47.62%.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kangkung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terbayar gaji dan tunjangan ASN	14	14	14	100	14	14	100%
7.01.01.2.02.05	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan	12	12	12	100	12	12	100%

7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas harian dan emblem/ID card yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian beserta atributnya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	18	0	0	0	0	18	100%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12	12	12	100	12	12	100%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	12	100	12	12	100%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah bulan tersedianya makan minum rapat	12	12	12	100	12	12	100%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12	12	12	100	12	12	100%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan	12	0	0	0	0	12	100%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan tersedianya bahan bakar minyak dan biaya perjalanan dinas dalam serta luar daerah	12	12	12	100	12	12	100%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah aset yang diadakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Pemda								
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan barang mebel yang tersedia	0	0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia	15	0	0	0	0	12	100%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah bulan penyediaan materai yang tersedia	12	12	12	100	12	12	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya jasa telp, air, internet dan listri	12	12	12	100	12	12	100%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan tersedianya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	12	12	12	100	12	12	100%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan tersedianya honor tenaga penunjang	12	12	12	100	12	12	100%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis aset yang dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Pajak Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas dan suku cadang yang tersedia dan terbayarnya pajak/STNK kendaraan dinas	10	10	10	100	10	12	100%

7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan komputer, jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan mesin	12	12	12	100	12	12	100%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	1	1	100	1	1	100%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah laporan pelaksanaan penerbitan izin non usaha	12	12	12	100	12	12	100%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah desa yang melaksanakan musrenbang	15	15	15	100	15	12	100%

7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan, penyuluhan dan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15	15	15	100	15	12	100%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	jumlah bulan koordinasi yang dilaksanakan	12	12	12	100	12	12	100%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7.01.05.2.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	jumlah peserta bimtek tentang wawasan kebangsaan	75	75	75	100	70	75	100%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	12	12	100	12	12	100%
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Telaksananya kegiatan fasilitasi pengelolaan dan pendayagunaan aset desa	12	12	12	100	12	12	100%

2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 tidak memasukkan usulan dari masyarakat yang disampaikan lewat kegiatan Musrenbangcam, karena program/kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan bersifat rutin dan tugas pokok yang dilakukan bersifat koordinatif dan pembinaan. Sedangkan usulan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat bersifat fisik.

Usulan program/ kegiatan dari masyarakat merupakan hasil aspirasi dalam forum musrenbang dengan memperhatikan tugas dan fungsi, rencana strategis perangkat daerah. Serta isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut apabila ada, dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan yang nantinya dibahas dalam forum perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Baperlitbang.

Dalam Menyusun Usulan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kangkung tidak mendapat usulan aspirasi dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD untuk tahun anggaran 2024.

(Tabel 2.2)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kangkung

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan sebagai penjabaran misi yang pertama seperti tersebut diatas, maka tujuan yang ditetapkan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Kangkung pada tahun 2024 yaitu untuk mengacu pada arah kebijakan pembangunan tahun 2024, Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2024 **“Kendal Smart City”** yang diprioritaskan pada “Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal *Smart City*”. Arah kebijakan ini dengan focus peningkatan kemantapan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan *clean* dan *Good Governances*, penguatan *Smart City* yang difokuskan pada *Smart Government*, *Smart Education*, *Smart Health*, *Smart Economy* dan *Smart Transportation*.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka Rencana Kerja dan Pendanaan yang diusulkan pada Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kangkung Tahun 2024 terdiri dari 6 program dan 11 kegiatan, dengan nominal anggaran penetapan sebesar Rp. 2.952.547.697,- bertambah Rp. 30.000.000,-, sehingga menjadi Rp. 2.982.547.697,- Adapun program/kegiatan yang diusulkan Perubahan APBD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Yang dijabarkan dalam subkegiatan:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 2.378.963.197,- berkurang Rp.20.000.000,- menjadi Rp. 2.358.963.197,-; dilakukan perhitungan ulang sesuai jumlah pegawai dan efisiensi anggaran.

- b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran penetapan sebesar Rp.3.440.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan
- c. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan Anggaran Penetapan sebesar Rp.22.446.000,- bertambah Rp.4.504.000,- menjadi Rp.26.950.000,-; untuk memenuhi anggaran Alat Tulis Kantor Kantor yang penyediaannya tinggal sedikit.
- d. Penyediaan Logistik Kantor, dengan anggaran penetapan sebesar Rp.13.360.000,- berkurang Rp. 910.000,- menjadi Rp. 12.450.000. Untuk di pindah ke Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- e. Penyediaan barang cetakan dan Pengadaan Rp.3.563.700,- bertambah Rp.3.114.500,- menjadi Rp. 6.678.200,-; untuk memenuhi anggaran yang penyediaannya tinggal sedikit.
- f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan anggaran penetapan sebesar Rp.203.777.000,- bertambah Rp.56.995.000,- menjadi Rp.260.772.000,-; bertambah pada anggaran Belanja Perjalanan Dinas dan kegiatan Makanan dan Minuman Rapat
- g. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya , dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 7.500.000- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.
- h. Penyediaan jasa surat menyurat. Dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 5.000.000,- tidak mengalami penambahan dan pengurangan.
- i. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dengan anggaran penetapan sebesar Rp.90.655.500,- berkurang Rp. 13.735.500,- menjadi Rp. 76.930.000.- dilakukan perhitungan ulang sesuai kondisi dan efisiensi anggaran.
- j. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran penetapan sebesar Rp.36.360.000,- berkurang Rp. 360.000,- menjadi Rp. 36.000.000.-; dilakukan

perhitungan ulang sesuai jumlah pegawai dan efisiensi anggaran.

- k. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, anggaran Penetapan sebesar Rp.34.270.000,- bertambah Rp.1.614.000,- menjadi Rp. 35.884.000,-. Untuk memenuhi anggaran belanja suku cadang kendaraan dinas.
- l. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, anggaran Penetapan sebesar Rp.27.653.300,- tidak mengalami penambahan dan pengurangan .
- m. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 12.570.000 bertambah Rp.8.470.000,- menjadi Rp. 21.040.000,-. Untuk memenuhi anggaran Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang Penyediaanya kurang.

2) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMRINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Yang dijabarkan dalam subkegiatan:

- a. Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan, anggaran penetapan sebesar Rp. 1.800.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.

3) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Yang dijabarkan dalam subkegiatan:

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa , anggaran penetapan RP.300.000,- berkurang Rp.100.000,- menjadi Rp. 200.000,-; untuk penyesuaian anggaran yang terealisasi.

b. Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan, dengan anggaran penetapan sebesar Rp.11.579.000,- berkurang Rp. 10.121.000,- menjadi Rp. 21.700.000,-. Untuk Kegiatan Sosialisasi peningkatan sumber daya Masyarakat.

4) PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Yang dijabarkan dalam subkegiatan:

a. Sinergitas dengan kepolisian Negara republic Indonesia. Tentara nasional Indonesia dan Instansi vertical di wilayah Kecamatan, dengan anggaran penetapan sebesar Rp.750.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.

b. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan anggaran penetapan sebesar Rp.94.680.000,- bertambah Rp.240.000,- menjadi Rp. 95.200.000,-; adanya penghitungan ulang kebutuhan anggaran.

5) PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

a. Fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional, dengan anggaran penetapan Rp.2.200.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.

6) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Yang dijabarkan dalam subkegiatan:

a. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, dengan anggaran sebesar Rp.840.000,- bertambah Rp. 14.100.000,- menjadi Rp. 14.940.000,-; adanya

penambahan anggaran yang akan digunakan untuk kegiatan sosialisasi tata pemerintahan desa.

- b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan asset desa, dengan anggaran sebesar Rp. 920.000,- bertambah Rp.15.937.000,- menjadi Rp. 16.777.000.-; adanya penambahan anggaran yang akan digunakan untuk kegiatan sosialisasi tata pengelolaan keuangan desa.

Adapun rincian perubahan rencana kerja dan pendanaan dapat dilihat pada Tabel 3.1. dibawah ini :

Tabel 3.1
Rencana Kerja Kecamatan Kangkung Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)			
								Target 2024							
								Sebelum	Sesudah	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
1	2					3	4	8	9	11	12	13			
						KECAMATAN KANGKUNG							2.952.547.697	2.982.547.697	30.000.000
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							2.952.547.697	2.982.547.697	30.000.000
	7	01				KECAMATAN							2.952.547.697	2.982547.697	30.000.000
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							2.841.878.638	2.772.058.638	- 69.820.000
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							1.853.004	1.200.000	- 653.004
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	0	0	-			
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.853.004	1.200.000	- 653.004			
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2.359.838.134	2.209.838.134	- 150.000.000
	7	01	01	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	2.359.838.134	2.209.838.134	- 150.000.000
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	-	-
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	20 Paket	-	-	-
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				265.603.500	308.936.504	43.333.004
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	7.110.000	10.610.000	3.500.000
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	45.382.500	47.382.500	2.000.000
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						

							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	14.033.000	14.033.000	-	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	49.895.500	49.895.500	-	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	14.938.500	14.941.504	3.004	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	134.244.000	172.074.000	37.830.000	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					6.500.000	6.500.000	-
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	-	-	-	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	6.500.000	6.500.000	-	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					156.664.000	174.164.000	17.500.000

	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	4.500.000	4.700.000	200.000
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	66.500.000	78.500.000	12.000.000
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	85.664.000	90.964.000	5.300.000
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			51.420.000	71.420.000	20.000.000
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	25.300.000	25.300.000	-
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	17.120.000	17.120.000	-
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0,00	20.000.000	20.000.000
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	18 Unit	9.000.000	9.000.000	-
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.200.000	1.200.000	-
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	1.200.000	1.200.000	-
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000	1.200.000	-
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				19.890.000	19.890.000	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12 kali	12 kali	19.890.000	19.890.000	-
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.650.000	1.650.000	-

	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	18.240.000	18.240.000	-
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			90.650.000	98.600.000	7.950.000
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			3.200.000	3.200.000	-
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	6 Laporan	3.200.000	3.200.000	-
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			87.450.000	95.400.000	7.950.000
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	87.450.000	95.400.000	7.950.000
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			3.700.000	3.700.000	-

	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Perundang - undangan	12 Laporan	12 Laporan	3.700.000	3.700.000	-
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	30 Orang	30 Orang	3.700.000	3.700.000	-
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				2.120.000	14.290.000	12.170.000
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				2.120.000	14.290.000	12.170.000
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 Dokumen	16 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000	-
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 Dokumen	16 Dokumen	920.000	13.090.000	12.170.000

Adapun Lampiran Rancangan Akhir Perubahan RKPD 2024 hasil printout sipd.kemendagri.go.id sebagaimana Tabel berikut ini :

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEKAWATAN / SUB KEKAWATAN	INDIKATOR PROGRAM / REKAWATAN / SUB REKAWATAN	TARGET AKHIR REVISI REVISI OPD	REALISASI CAPAIAN REVISI TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REVISI TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRAKIRAAN MAJU MENCA TAHUN 2025		PERANGKAT DAKRAH PENANGGULUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU BIKRATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SARAF	PAGU BIKRATIF (Rp)					
							SEBELUM	SEDUHAH	RKPD 2024	APBD 2024				NKPD PERUBAHAN 2024	NABIONAL		DAERAH	18		19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
7.01.06.3.01		Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Peningkatan dan Pengembangan Pemertintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina				12 Laporan	12 Laporan	13.525.000,00	1.680.000,00	17.617.000,00	4.092.000,00			Mempertuik Bantuan Peningkatan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemertintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Mempertuik Desa		15.000.000,00	KECAMATAN KANGKUNG		
7.01.06.3.01.0002		Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Dibekal: dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				15 Dokumen	15 Dokumen	7.500.000,00	840.000,00	840.000,00	-6.660.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertuik Bantuan Peningkatan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemertintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			7.600.000,00	KECAMATAN KANGKUNG		
7.01.06.3.01.0003		Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Dibekal: dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				15 Dokumen	15 Dokumen	6.025.000,00	840.000,00	16.777.000,00	10.752.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertuik Bantuan Peningkatan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemertintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			7.600.000,00	KECAMATAN KANGKUNG		
J U M L A H									3.835.374.748,00	3.952.547.697,00	3.982.547.697,00	144.272.948,00								3.197.343.228,00		

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kangkung Tahun 2024 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Kangkung itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Kangkung dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kangkung Tahun 2024 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Perencanaan Kabupaten Kendal, sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran berkenaan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Rencana Kerja Kecamatan Kangkung Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Rencana Kerja Penetapan maupun Perubahan Kecamatan Kangkung pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kendal;
2. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kangkung ini berpedoman pada Renstra Kecamatan Kangkung Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Rencana Kerja.
3. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kangkung ini juga berpedoman pada RKPD Perubahan Kabupaten Kendal Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Kangkung Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kangkung ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Kangkung Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RKAP nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kendal. Begitu pula dalam penyusunan DPPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Kendal;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kangkung Tahun 2024.

c. Rencana Tindak Lanjut

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal pada tahun 2024 adalah “**Kendal Smart City**” yang diprioritaskan pada “Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep *Kendal Smart City*”. Arah kebijakan ini dengan focus peningkatan kemantapan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan *clean* dan *Good Governances*, penguatan *Smart City* yang difokuskan pada *Smart Government*, *Smart Education*, *Smart Health*, *Smart Economy* dan *Smart Transportation*.

Pembangunan daerah yang menerapkan perencanaan yang SMART dan prinsip Money Follow Program Priority, dan Money Follow Result, diharapkan mampu untuk lebih mendorong potensi dan keunggulan daerah menuju kemandirian ekonomi daerah. Mendasarkan pada isu global, nasional dan regional.

Berdasarkan arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2024, Kecamatan Kangkung menetapkan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja dengan fokus kinerja aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan pada Kecamatan Kangkung
2. Peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap aparatur desa melalui pembinaan SDM dan kelembagaan / administrasi diprioritaskan kepada Aparatur desa yang kurang memahami tugas dan fungsi
3. Peningkatan pelaksanaan kewenangan Bupati kepada Camat diprioritaskan kepada pembinaan dan pendampingan penyusunan APBDes, LPPDes serta pemantauan aset Pemda dan aset Desa.
4. Peningkatan kinerja pelayanan publik difokuskan pada penilaian SKM.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan apabila dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, kami mohon sarannya untuk perbaikan di tahun yang akan datang.



Kendal, 2024
CAMAT KANGKUNG

ANTIN KUSTIYAH WIJAYANTI, S.Sos. M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 197311241993032005



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

**PERUBAHAN
RENJA**

Tahun Anggaran 2024

**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kendal**





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

KATA PENGANTAR iii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Dan Renstra Perangkat Daerah..... 6

2.2 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.. 17

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ... 26

Lampiran Rancangan Akhir Perubahan RKPD 2024 26

BAB IV. PENUTUP 38



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target dan Realisasi Kinerja Program s.d Triwulan II Tahun 2024	6
Tabel 2.2	Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan	10
Tabel 2.3	Realisasi Program / Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil / Keluaran Yang Direncanakan	14
Tabel 2.4	Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan	16
Tabel 2.5	Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024	18
Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluas Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024.....	19
Tabel 3.1	Uraian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Mengalami Penurunan Ataupun Kenaikan Pagu Indikatif	30



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran tahun 2024 yang merupakan rencana kerja tahunan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran adalah dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal.

Rencana kerja perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Kendal.. Dengan demikian rencana kerja perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal. merupakan turunan dan bagian tak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal., dan RPD dan Renstra 2021-2026.

Rencana kerja perubahan dibuat setiap tahun dengan mendasarkan pada rencana strategis, dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal sampai dengan bulan Juni 2024 atau di TW II, rencana kerja perubahan disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan tahun 2024.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan perubahan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tahun 2024 dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa rencana kerja perubahan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal dan Pemerintah Kabupaten Kendal

Kendal, September 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. KENDAL



RATNA MUSTIKANINGSIH, S.E, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19740404 199803 2 007



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata cara Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebagai implementasi setiap tahunnya maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas dijabarkan kembali menjadi Rencana Kerja (Renja) Dinas yang menjadi dasar/ acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal setiap tahun/kinerja tahunan.

Dalam rangka meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut disusun dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024. Adapun nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



1.2. Landasan Hukum

Sebagai Landasan Hukum Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana



- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 20).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Menjamin Sinergitas, Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pengawasan serta Efisiensi sumber daya.

Tujuan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) adalah

- a. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKA P dan DPPA 2024;
- b. Sebagai Pedoman Dokumen Perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 sesuai Tupoksinya;
- c. Sebagai sarana pengendalian program kegiatan sub kegiatan 2024;
- d. Untuk menjamin keselarasan, penganggaran dan hasil yang optimal.

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan



Renja provinsi/ Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. (disesuaikan dengan perbup Perubahan RKPD tahun 2024).

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Dan Renstra Perangkat Daerah

2.2 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

(Menggunakan Lampiran Rancangan Akhir Perubahan RKPD 2024)

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Dan Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, demikian halnya dengan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II dimaksudkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program/ kegiatan/ sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi.

Target dan Realisasi Kinerja Program s.d Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Target dan Realisasi Kinerja Program s.d Triwulan II Tahun 2024

No	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2024 (%)	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2024 (%)	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ Kota	%	100	67,20	Terdapat beberapa target kinerja yang baru selesai di akhir tahun
2	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pendaftaran Penduduk	%	100	87,419	Terdapat beberapa target kinerja yang baru selesai di akhir tahun
3	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Pencatatan Sipil	%	100	85	Kebanyakan target kinerja di akhir tahun

Berdasarkan evaluasi kinerja yang ada di SIPD , laporan pelaksanaan APBD sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2024, maka perbandingan



antara target kinerja fisik dan keuangan dengan realisasi fisik dan keuangan adalah sebagai berikut :

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Ada 23 sub kegiatan yang tidak bisa memenuhi target yang ditetapkan diantaranya adalah :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, pagu anggaran sebesar 46.132.000, target sampai dengan TW 2 sebesar 23.566.000 (50 %) realisasi keuangan sebesar 990.000 (2,12 %) , realisasi fisik 3 %, Tidak memenuhi target karena pelaksanaan kegiatan ada di Tribulan IV.
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pagu anggaran sebesar 34.400.000, target sampai dengan TW 2 sebesar 27.200.000 (50 %) realisasi keuangan sebesar 0, realisasi fisik 0 %, Tidak memenuhi target karena pelaksanaan kegiatan ada di Tribulan IV.
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, pagu anggaran sebesar 21.893.750, target sampai dengan TW 2 sebesar 10.946.875 (50 %) realisasi keuangan sebesar 8.026.500 (36,66 %), realisasi fisik 40 %. Tidak memenuhi target karena belanja sesuai dengan kebutuhan.
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, pagu anggaran sebesar 40.225.000, target sampai dengan TW 2 sebesar 20.112.500 (50 %) realisasi keuangan sebesar 8.844.750 (21,99), realisasi fisik 25 %. Tidak memenuhi target karena belanja sesuai dengan kebutuhan.
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, pagu anggaran sebesar 618.185.568, target sampai dengan TW 2 sebesar 309.092.784 (50 %) realisasi keuangan sebesar 60.274.500 (9,75 %), realisasi fisik 12 %, Tidak memenuhi target karena belanja sesuai dengan kebutuhan.
6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, pagu anggaran sebesar 103.592.000, target sampai dengan TW 2 sebesar 51.796.000 (50 %) realisasi keuangan sebesar 38.710.630 (37,37), realisasi fisik 40 %, Tidak memenuhi target karena belanja sesuai dengan kebutuhan.
7. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, pagu anggaran sebesar 3.250.000, target sampai dengan TW 2 sebesar 1.625.000 (50 %) realisasi



- keuangan sebesar 1.500.000 (46,15 %), realisasi fisik 50 %, Tidak memenuhi target karena belanja sesuai dengan kebutuhan.
8. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, pagu anggaran sebesar 291.000.000, target sampai dengan TW 2 sebesar 145.500.000 (50 %) realisasi keuangan sebesar 137.993.864 (47,42 %), realisasi fisik 50 %, Tidak memenuhi target karena belanja sesuai dengan kebutuhan.
 9. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, pagu anggaran sebesar 274.350.000, target sampai dengan TW 2 sebesar 137.175.000 (50 %) realisasi keuangan sebesar 109.102.835 (39,77 %), realisasi fisik 42 %, Tidak memenuhi target karena belanja sesuai dengan kebutuhan.
 10. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, pagu anggaran sebesar 529.664.800, target sampai dengan TW 2 sebesar 264.382.400 (50 %) realisasi keuangan sebesar 207.068.535 (39,09 %), realisasi fisik 42 %, Tidak memenuhi target karena belanja sesuai dengan kebutuhan.
 11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pagu anggaran sebesar 102.820.000, target sampai dengan TW 2 sebesar 51.410.000 (50 %) realisasi keuangan sebesar 34.695.800 (33,74 %) , realisasi fisik 35 %, Tidak memenuhi target karena belanja sesuai dengan kebutuhan.
 12. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pagu anggaran sebesar 74.500.000, target sampai dengan TW 2 sebesar 37.250.000 (50 %) realisasi keuangan sebesar 6.355.000 (8,53) , realisasi fisik 10 %, Tidak memenuhi target karena belanja sesuai dengan kebutuhan.
 13. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, pagu anggaran sebesar 91.204.500, target sampai dengan TW 2 sebesar 45.602.250 (50 %) realisasi keuangan sebesar 0 (0) , realisasi fisik 0 %, karena pelaksanaan kegiatan ada di Tribulan III.
1. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
 1. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan, pagu anggaran sebesar 80.000.000, target sampai dengan TW 2 sebesar 40.000.000 (50 %) realisasi keuangan sebesar 73.300.000 (91.63) , realisasi fisik 95 %.



2. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk pagu anggaran sebesar 145.850.000 target sampai dengan TW 2 sebesar 72.925.000 (50 %) realisasi keuangan sebesar 60.772.265 (41,67 %) , realisasi fisik 45 %, Tidak memenuhi target karena belanja sesuai dengan kebutuhan.
3. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk pagu anggaran sebesar 15.460.000 target sampai dengan TW 2 sebesar 7.730.000 (50 %) realisasi keuangan sebesar 3.900.000 (25,23 %) , realisasi fisik 27 %, Tidak memenuhi target karena belanja sesuai dengan kebutuhan.

2. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

1. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil pagu anggaran sebesar 87.510.000, target sampai dengan TW 2 sebesar 43.755.000 (50 %) realisasi keuangan sebesar 39.661.700 (45,32 %) , realisasi fisik 47 %, Tidak memenuhi target karena belanja sesuai dengan kebutuhan.
2. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil, pagu anggaran sebesar 11.250.000, target sampai dengan TW 2 sebesar 5.625.000 (50 %) realisasi keuangan sebesar 4140.000 (36,80 %) , realisasi fisik 40 %, Tidak memenuhi target karena belanja sesuai dengan kebutuhan.

3. PROGRAM PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1. Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan pagu anggaran sebesar 500.000.000, target sampai dengan TW 2 sebesar 250.000.000 (50 %) realisasi keuangan sebesar 0 (0 %) , realisasi fisik 0 %, Tidak memenuhi target karena pelaksanaan kegiatan ada di Tribulan III.
2. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi pagu anggaran sebesar 251.910.000, target sampai dengan TW 2 sebesar 125.955.000 (50 %) realisasi keuangan sebesar 38.437.500 (15,26 %) , realisasi fisik 17 % Tidak memenuhi target karena pelaksanaan kegiatan ada di Tribulan III.



3. Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan pagu anggaran sebesar 43.300.000, target sampai dengan TW 2 sebesar 21.650.000 (50 %) realisasi keuangan sebesar 21.325.000 (49,25 %) , realisasi fisik 52 % , Tidak memenuhi target karena pelaksanaan kegiatan ada di Tribulan III.
4. Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pagu anggaran sebesar 493.377.000, target sampai dengan TW 2 sebesar 246.608.500 (50 %) realisasi keuangan sebesar 198.490.490 (49,25 %) , realisasi fisik 52 % , Tidak memenuhi target karena pelaksanaan kegiatan ada di Tribulan III.
5. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi pagu anggaran sebesar 12.750.000, target sampai dengan TW 2 sebesar 6.375.000 (50 %) realisasi keuangan sebesar 0 %) , realisasi fisik 0 % , Tidak memenuhi target karena pelaksanaan kegiatan ada di Triwulan III.

Dari 35 Sub kegiatan ada 23 yang tidak dapat memenuhi target yng sudah ditetapkan di awal tahun, diantaranya sebagai berikut :

Tabel 2.2

Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil /
keluaran yang direncanakan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase Target (%)	Prosentase Realisasi
1	2	3	4	5	6
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.132.000	990,000	50	2,12 %
2	Evaluasi Kinerja Perangkat) realisasi keuangan	34.400.000	0	50 %	0 %
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga	21.893.750	8.026.500	50 %	36,66



	n Bangunan Kantor sebesar				
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	40.225.000	8.844.750	50	21,99
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	618.185.568	3,696,200	50	9,75%
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	103.592.000	38.710.630	50	37,37%
7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.250.000,	1.500.000	50	46,15%
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	291.000.000	137.993.864	50	47,42 %
9	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor,	274.350.000	137.175.000	50	39,77 %
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	529.664.800	207.068.535	50	39,09%
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.820.000	34.695.800	50	33,74%
12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.500.000,	6.355.000	50	8,53 %
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	91.204.500	0	50	0%
14	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	145.850.000	60.772.265	50	41,67 %



15	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	15.460.000	3.900.000	50	25.23%
16	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	87.510.000,	39.661.700	50	45,32%
17	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	11.250.000	5.625.000	50	36,80 %
18	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	500.000.000	0	50	0 %
19	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi.	68,540,000	38.437.500	50	15,26 %
20	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	43.300.000	21.325.000	50	49,25 %
21	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	493.377.000	198.490.490	50	40,23
22	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi pagu anggaran	12.750.000	0	50	0 %



Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan Ada 7 sub kegiatan yang memenuhi target yang ditetapkan diantaranya adalah :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, pagu anggaran sebesar 8.630.056.046, target sampai dengan TW 2 sebesar 4.315.032.523 (50 %) realisasi keuangan sebesar 4.536.319.606 (52,56 %) , realisasi fisik 55 %.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD pagu anggaran sebesar 37.000.000, target sampai dengan TW 2 sebesar 18.500.000 (50 %) realisasi keuangan sebesar 34.931.850 (94,41 %) , realisasi fisik 100%.
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pagu anggaran sebesar 495.697.850, target sampai dengan TW 2 sebesar 247.848.925 (50 %) realisasi keuangan sebesar 34.931.850 (87,50 %) , realisasi fisik 100%.
4. Pengadaan Mebel pagu anggaran sebesar 6.800.000, target sampai dengan TW 2 sebesar 3.400.000 (50 %) realisasi keuangan sebesar 3.900.000 (57,35 %) , realisasi fisik 60 %.
5. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Mebel pagu anggaran sebesar 593.983.000, target sampai dengan TW 2 sebesar 296.991.500 (50 %) realisasi keuangan sebesar 520.728.000 (87,67 %) , realisasi fisik 90 %.
6. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan pagu anggaran sebesar 80.000.000, target sampai dengan TW 2 sebesar 40.000.000 (50 %) realisasi keuangan sebesar 73.300.000 (91,63 %) , realisasi fisik 95 %.
7. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan pagu anggaran sebesar 280.000.000, target sampai dengan TW 2 sebesar 140.000.000 (50 %) realisasi keuangan sebesar 179.977.000 (64,28 %) , realisasi fisik 70 %.



Tabel 2.3.
Realisasi Program / Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil /
Keluaran Yang Direncanakan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase Target (%)	Prosentase Realisasi
1	2	3	4	5	6
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	10.341.192.553			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.630.056.046	4.536.319.606	50	52,56 %
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	37.000.000	34,931.850	50	94,41%
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	495,697,850	433.754.550	50	87,50%
4	Pengadaan Mebel	6.800.000	3.900.000		57,35 %
5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Mebel	593.983.000	52.728.000	50	87,67%
6	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	80.000.000	73.300.000	50	91,63 %
7	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	280.000.000	179.977.000	50	64,28 %



Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Ada 7 sub kegiatan yang memenuhi target yang ditetapkan diantaranya adalah :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, pagu anggaran sebesar 8.630.065.046 target sampai dengan TW 2 sebesar 4.315.032.523 (50 %) realisasi keuangan sebesar 4,536.319.606 (52,56 %) , realisasi fisik 55 %.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD pagu anggaran sebesar 37.000.000 target sampai dengan TW 2 sebesar 18.500.000 (50 %) realisasi keuangan sebesar 34.931.850 (94,41 %) , realisasi fisik 97 %.
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pagu anggaran sebesar 495.697.850 target sampai dengan TW 2 sebesar 247.848.925 (50 %) realisasi keuangan sebesar 433.754.550 (87,50 %) , realisasi fisik 90 %
4. Pengadaan Mebel pagu anggaran sebesar 6.800.000 target sampai dengan TW 2 sebesar 3.400.000 (50 %) realisasi keuangan sebesar 3.900.000 (57,35 %) , realisasi fisik 50 %.
5. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Mebel pagu anggaran sebesar 593.983.000 target sampai dengan TW 2 sebesar 296.991.500 (50 %) realisasi keuangan sebesar 520.728.000 (87,67 %) , realisasi fisik 90 %.
6. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan pagu anggaran sebesar 80.000.000 target sampai dengan TW 2 sebesar 40.000.000 (50 %) realisasi keuangan sebesar 73.300.000 (91,63 %) , realisasi fisik 95 %.
7. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan pagu anggaran sebesar 280.000.000 target sampai dengan TW 2 sebesar 140.000.000 (50 %) realisasi keuangan sebesar 179.977.000 (64,28 %) , realisasi fisik 70 %.



Tabel 2.4
Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase Target (%)	Prosentase Realisasi
1	2	3	4	5	6
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.634.907.308	3,954,027,014	50	68.53%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	123.472.000	74,024,968	50	68.95%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	442.456.000	199,754,416	50	51.92%
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	153,796,000	80,853,864		60.46%
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	68,540,000	42,975,000	50	72,11%
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	375,655,000	276,573,000	50	84.67%
	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	279,514,000	150,280,000	50	61.83%
	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	568,665,000	398,817,000	50	80.65%



Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan Dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang yang tidak dapat mencapai target disebabkan oleh :

- a. Penjadwalan dari sub kegiatan tersebut di triwulan III dan IV
- b. Anggaran di realisasikan sesuai dengan kebutuhan

Untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang yang dapat mencapai target dan melebihi target disebabkan oleh:

1. Sub kegiatan di jadwalkan di awal tahun setelah APBD disahkan;
2. Sub kegiatan yang sifatnya rutin.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

- a. Akibat yang timbul dari target yang tidak tercapai adalah capaian realisasi dinas rendah (realisai POK) rendah.

- b. Secara makro menghambat pelayanan kepada masyarakat

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- a. Dalam menentukan anggaran kas untuk lebih berhati hati supaya dapat tercapai sesuai denga target dan rencana anggaran kas.

- b. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berisikan telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat.

2.2 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat diakomodir melalui proses Musrenbang kabupaten. Musrenbang kabupaten adalah musyawarah para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten untuk mematangkan rancangan RKPD kabupaten berdasarkan Renja SKPD hasil forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD. Prinsip-prinsip penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten adalah memperhatikan hasil pembahasan forum SKPD atau forum gabungan SKPD, hasil musrenbang kecamatan, RPJMD atau Renstra Daerah (bagi daerah yang belum melakukan Pilkada), hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun berjalan dan masukan dari para peserta.

Keluaran dari pelaksanaan musrenbang kabupaten adalah kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan rancangan RKPD dan rancangan Renja SKPD, yang



meliputi penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan pagu indikatif menurut fungsi/SKPD.

Untuk Adapun hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui kegiatan Musrenbang tingkat Kabupaten disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Kendal

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	<u>NIHIL</u>				



Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	12				URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Prosentase Kepemilikan KK	98,50	99,80	79,49	79,33	99,80	79,49	78,30
						Persentase Kepemilikan KTP Elektronik (%)	99,35	99,89	99,15	99,04	99,89	99,15	98,51
						Prosentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	18,00	38,00	67,38	25,60	38,00	67,38	12,13
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk								



2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Koordinasi Sosialisasi Pendaraan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Kegiatan)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00
2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Berkas)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00
2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Mobil Keliling/ UP3SK (Kegiatan)	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	100,00	48 Laporan	48 Laporan	100,00
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk								
2	12	02	2.02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Tercapainya Rakor Monitoring Pelayanan Adminitrasi Kependudukan di Sekolahan (Kegiatan)	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00
2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100,00	5 Paket	5 Paket	100,00
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk								
2	12	02	2.03	0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam	Tercapainya Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00	4 Laporan	4 Laporan	100,00



					Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Kegiatan)							
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Prosentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak (Usia 0 - 18 Tahun)	87,50	98,00	99,02	97,04	98,00	99,02	86,64
						Prosentase Penerbitan Akta Kematian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
						Prosentase Kepemilikan Dokumen Perkawinan	98,50	99,80	100,00	99,80	99,80	100,00	98,50
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil								
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	100 Layanan	100 Layanan	100 Layanan	100,00	100 Layanan	100 Layanan	100,00
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil								
2	12	03	2.02	0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100,00	100 Laporan	100 Laporan	100,00
2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pelayanan Pencatatan Sipil (Kegiatan)	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100,00	10 Laporan	10 Laporan	100,00
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah Lembaga Pemerintah Yang Memanfaatkan Data Base Kependudukan	98	30	23	69,00	25	98	96,04
						Sistem Informasi Kependudukan Yang Diperbarui	100	100	100	100,00	100	100	100,00



2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan								
2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	24 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	100,00	20 Dokumen	20 Dokumen	80,00
2	12	04	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								
2	12	04	2.02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun (Dokumen)	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								
2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	25 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100,00	10 Laporan	25 Laporan	100,00
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Tersusunnya Profil Kependudukan Kabupaten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan								



2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	7 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	7 Dokumen	100,00
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Perangkat Daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00	5 Dokumen	100,00
2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00	2 Laporan	100,00
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang	70 Orang	70 Orang	70 Orang	100,00	70 Orang	100,00
2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00	4 Laporan	100,00
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								



2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket	24 Paket	24 Paket	24 Paket	100,00	24 Paket	100,00
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	24 Paket	24 Paket	24 Paket	100,00	24 Paket	100,00
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100,00	12 Paket	100,00
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	100,00	6 Paket	100,00
2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	12 Dokumen	100,00
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100,00	100 Laporan	100,00
2	12	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3000 Dokumen	3000 Dokumen	3000 Dokumen	3000 Dokumen	100,00	3000 Dokumen	100,00
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100,00	5 Paket	100,00
2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	100,00	24 Unit	100,00
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	51 Laporan	52 Laporan	53 Laporan	100,00	55 Laporan	100,00



2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	100,00
2	12	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	100,00
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	100,00
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	38 Unit	38 Unit	38 Unit	38 Unit	100,00	38 Unit	100,00
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	101 Unit	102 Unit	103 Unit	100,00	105 Unit	100,00
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100,00	3 Unit	100,00



BAB III.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Secara keseluruhan pagu indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal yang semula sebesar Rp.14.056.833.514,- pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Tahun 2024 sesuai dengan Pagu RKPD Perubahan Renja menjadi Rp.13.849.833.514,-, ada penurunan Rp. 207.000.000 Hal ini disebabkan karena adanya pengurangan anggaran di sub kegiatan gaji Rp.830.000.000,-. Disamping itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kendal juga mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 623.000.000,- di gunakan untuk sosialisasi berupa iklan di sosial media online, juga adanya penyesuaian gaji dan tunjangan serta penganggaran untuk peralatan dan perlengkapan kantor sehubungan dengan adanya tambahan PPPK sebanyak 9 orang dan tambahan untuk belanja Ribbon dan Film Printer Cetak EKTP dan belanja Blangko KIA serta untuk pembuatan kamar mandi di UPTD Sukorejo. Untuk prioritas di perubahan adalah di sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk pembelian Ribbon dan Film Printer Cetak EKTP, guna persiapan cetak KTP Elektronik terkait Pilkada 2024.

Adapun rincian perubahan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



II. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
- Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
- Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

2. Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk

- Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminkuk Terkait Pendaftaran Penduduk
- Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan

3. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

- Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk

III. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

1. Pelayanan Pencatatan Sipil

- Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

- Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil
- Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil

IV. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

- Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan

2. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan



Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan

3. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

V. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

1. Penyusunan Profil Kependudukan
 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain

Adapun uraian program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami penurunan ataupun kenaikan pagu indikatif adalah sebagai berikut :



Tabel 3.1

Uraian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Mengalami Penurunan Ataupun Kenaikan Pagu Indikatif

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KENDAL TAHUN 2024																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							11.456.375.622,00	14.056.833.514,00	13.849.833.514,00	2.393.457.892,00							13.033.532.836,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.456.375.622,00	14.056.833.514,00	13.849.833.514,00	2.393.457.892,00							13.033.532.836,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							11.456.375.622,00	14.056.833.514,00	13.849.833.514,00	2.393.457.892,00							13.033.532.836,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	10.356.201.822,00	11.995.426.514,00	11.866.896.514,00	234.331.014,00							10.590.532.836,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	62.615.000,00	81.195.000,00	86.195.000,00	23.580.000,00			Memperkuat Stabilitas Potlukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel		192.132.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				125 Dokumen	125 Dokumen	20.795.000,00	46.795.000,00	51.795.000,00	31.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Potlukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			87.132.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi/ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	3.800.000,00	0,00	0,00	-3.800.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Potlukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi/ Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	38.020.000,00	34.400.000,00	34.400.000,00	-3.620.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Potlukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN				70 orang	70 orang	7.429.032.177,00	8.667.065.046,00	7.837.065.021,00	408.032.844,00			- -	- -	Meningkatnya tata kelola yang akuntabel		7.993.005.836,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/b ulan	70 Orang/b ulan	7.424.762.177,00	8.630.065.046,00	7.800.065.021,00	375.282.844,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	- -	- -			7.987.505.836,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi/ Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan n/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	4.250.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	32.750.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	- -	- -			5.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Renja Perubahan 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kendal

2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah				12 bulan	12 bulan	1.020.285.045.00	1.279.594.108.00	1.881.488.193.00	861.202.548.00			Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Meningkatnya tata kelola yang akuntabel		630.347.000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.893.750.00	21.893.750.00	21.893.750.00	0.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			25.770.000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	355.214.250.00	495.697.850.00	1.069.247.850.00	714.033.600.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			497.890.000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	38.975.000.00	40.225.000.00	35.703.000.00	-3.272.000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			40.115.000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6.000.000.00	0.00	0.00	-6.000.000.00	Semua Kota,Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			6.000.000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	4.800.000.00	0.00	0.00	-4.800.000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			5.000.000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	492.590.045.00	618.185.568.00	637.751.593.00	145.100.948.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		

SIPD-FR : diortak pada 2024-09-09 09:17:48

Halaman 1



Renja Perubahan 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kendal

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3000 Dokumen	3000 Dokumen	100.812.000,00	103.592.000,00	116.892.000,00	16.080.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			35.032.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3 unit	5 unit	566.050.000,00	600.783.000,00	634.360.000,00	68.310.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Meningkatnya tata kelola yang akuntabel		587.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	4.000.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	2.800.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			37.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	562.050.000,00	593.983.000,00	627.360.000,00	65.310.000,00	Semua Kota,Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			550.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Laporan	12 Laporan	927.899.000,00	1.098.254.800,00	1.135.263.800,00	207.364.800,00			Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Meningkatnya tata kelola yang akuntabel		881.728.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50 Laporan	50 Laporan	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			4.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	291.000.000,00	291.000.000,00	323.495.000,00	32.495.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			301.300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	121.620.000,00	274.350.000,00	274.350.000,00	152.730.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			128.472.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	512.029.000,00	525.064.800,00	534.164.800,00	22.135.800,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			447.450.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Renja Perubahan 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kendal

2.12.01.2.09	Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	350.320.000,00	268.524.500,00	292.524.500,00	-57.795.500,00			Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Meningkatnya tata kelola yang akuntabel		305.320.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				38 Unit	38 Unit	78.820.000,00	102.820.000,00	102.820.000,00	24.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Keli Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			89.920.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0006	Peneliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	79.500.000,00	74.500.000,00	98.500.000,00	19.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Keli Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			65.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi				3 Unit	3 Unit	192.000.000,00	91.204.500,00	91.204.500,00	-100.795.500,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Keli Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			190.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Indeks Pendaftaran Penduduk			99,85 persen	99,85 persen	372.332.000,00	521.310.000,00	435.430.000,00	655.668.000,00							1.028.000.000,00	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				4 Laporan	4 Laporan	345.332.000,00	241.310.000,00	231.430.000,00	-113.902.000,00			Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Meningkatnya terbit Administrasi Kependudukan		393.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																		
		Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				10 Dokumen	10 Dokumen	84.800.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-4.800.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Keli Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL INSENTIF FISKAL	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Pemberbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																		
		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Pemberbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				3000 Dokumen	3000 Dokumen	203.632.000,00	145.850.000,00	135.970.000,00	-67.662.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Keli Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			135.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				4 Laporan	4 Laporan	56.850.000,00	15.460.000,00	15.460.000,00	-41.390.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Keli Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			98.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Renja Perubahan 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kendal

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.02.2.02	Pemetaan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	18.000.000,00	280.000.000,00	204.000.000,00	185.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Meningkatnya terbit Administrasi Kependudukan		189.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			39.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				-	5 Dokumen	0,00	280.000.000,00	204.000.000,00	204.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				4 Laporan	4 Laporan	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Meningkatnya terbit Administrasi Kependudukan		445.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				4 Laporan	4 Laporan	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk				-	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemantauan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimantapkan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk				5 Laporan	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Renja Perubahan 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kendal

3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan dokumen Perkawinan Persentase Kepemilikan akta kelahiran anak (usia 0 - 17 tahun) Indeks catatan sipil (Persentase penduduk yang memiliki administrasi kependudukan (akte kelahiran, akte nikah dan akte kematian) Persentase Penerbitan akta kematian Persentase penduduk yang memiliki administrasi kependudukan (akte kelahiran, akte nikah dan akte kematian)				89,80 97,5 97 96,50 100,00 % persen % %	89,80 98,50 97 100,00 97,5 % persen % %	205.654.800,00	238.760.000,00	238.760.000,00	49.345.200,00						255.000.000,00		
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Jumlah dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil				97,5 persen	97,5 persen	87.654.800,00	87.510.000,00	87.510.000,00	-144.800,00		-	-		Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan	105.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				100 Layanan	100 Layanan	87.654.800,00	87.510.000,00	87.510.000,00	-144.800,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Koti/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA BAGI HASIL INSENTIF FISKAL	-	-		105.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				1 Dokumen	1 Dokumen	118.000.000,00	151.250.000,00	151.250.000,00	33.250.000,00		Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-	Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan	150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				100 Laporan	100 Laporan	41.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	-30.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Koti/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		38.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil																		



Renja Perubahan 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kendal

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				10 Laporan	10 Laporan	76.750.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	63.250.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL INSENTIF FISKAL	Memperkuat Stabilitas Polriukhtankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			112.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Sistem Informasi Kependudukan yang terupdate dan Jumlah lembaga pemerintah yang memanfaatkan database Kependudukan Jumlah lembaga pemerintah yang memanfaatkan data base Kependudukan Sistem Informasi Kependudukan yang diperbarui				20 28,00 100,00 opd % %	20 28,00 100,00 opd % %	493.437.000,00	1.288.587.000,00	1.295.997.000,00	626.563.000,00							1.120.000.000,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyalinan Database Kependudukan	Jumlah lembaga yang memanfaatkan data dari Disdukcapil				20 OPD	20 OPD	30.862.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	469.138.000,00			Memperkuat Stabilitas Polriukhtankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Meningkatnya terbit Administrasi Kependudukan		40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				2 Dokumen	2 Dokumen	30.862.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	469.138.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polriukhtankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	237.160.000,00	251.910.000,00	251.910.000,00	14.750.000,00			Memperkuat Stabilitas Polriukhtankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Meningkatnya terbit Administrasi Kependudukan		280.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	237.160.000,00	251.910.000,00	251.910.000,00	14.750.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polriukhtankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			280.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Renja Perubahan 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kendal

2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				10 Laporan	10 Laporan	225.415.000,00	536.677.000,00	544.087.000,00	318.672.000,00			-	-	Meningkatnya terbit Administrasi Kependudukan	800.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.0003	Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																	
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				10 Laporan	10 Laporan	100.415.000,00	43.300.000,00	43.300.000,00	-57.115.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL INSENTIF FISKAL	-	-		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan																	
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani		600.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																	
		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	493.377.000,00	500.787.000,00	375.787.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Politik/Lingkungan Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase tersusunnya Profil Kependudukan Kabupaten			100,00 %	100,00 %	28.750.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	11.250.000,00						40.000.000,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah buku profil Kependudukan dan jumlah buku data Kependudukan			22 Buku	22 Buku	28.750.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	-16.000.000,00			-	-	Meningkatnya terbit Administrasi Kependudukan	40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyekti Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																
		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyekti Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	28.750.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	-16.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL INSENTIF FISKAL	-	-		40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		J U M L A H						11.456.375.622,00	14.056.833.514,00	13.849.833.514,00	255.613.053.604,00						13.033.532.836,00	



BAB IV

PENUTUP

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 merupakan dokumen penting yang harus dilaksanakan oleh OPD guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mengingat hal tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini memuat rencana program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang Administrasi Kependudukan, yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten;
2. Organisasi Perangkat Daerah dan stakeholders berkewajiban melaksanakan program- program dalam Perubahan Rencana Kerja dengan sebaik-baiknya;
3. Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu pada pendekatan baru dalam sistem penganggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana anggaran program dan kegiatan dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan dapat ter realisasi sesuai dengan kebutuhan mengingat jumlahnya masih mengacu pada jumlah pagu indikatif. Namun demikian jumlah tersebut belum sesuai dengan kebutuhan riil untuk tahun 2024, sehingga diharapkan adanya penambahan anggaran yang memadai dari APBD Kabupaten Kendal khususnya terkait peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan tugas. Harapan kami, semoga dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dapat diimplementasikan secara bertanggung jawab dan bermanfaat dalam memberikan kontribusi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.



Demikian Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 ini disusun untuk dapat dijadikan acuan bagi segenap aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan untuk diketahui oleh para stakeholder yang berkepentingan.

Kendal, September 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL



RATNA MUSTIKANINGSIH, S.E, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19740404 199803 2 007



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2024



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



KATA PENGANTAR

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tidak dapat terakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Penetapan Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada perubahan APBD Tahun 2024.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KENDAL



MARDI EDI SUSILO, SE.Par, M.Par
Pembina Tingkat I
NIP. 19670917 199103 1 008

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB. I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	11
BAB. II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	12
TAHUN 2024	
2.1. Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat	12
Daerah sampai dengan Triwulan II	
BAB. III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	27
DAERAH	
3.1. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas	27
dan Fungsi Perangkat Daerah	
3.2. Program dan Kegiatan	28
..	
BAB. IV. PENUTUP	30
Lampiran	
Plafon anggaran perubahan sementara berdasarkan program dan kegiatan	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang

1.1.1. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja

Mendasarkan ketentuan pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah ditetapkan palinglambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD ditetapkan.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 merupakan perubahan atas dokumen perencanaan tahunan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal yang memuat program-program dan kegiatan urusan pemerintahan fungsi penunjang, sebagai bagian dari menunjang capaian Visi dan Misi Kabupaten Kendal Tahun 2021 - 2026. Di dalam Perubahan Renja ini memuat permasalahan serta menyelaraskan target capaian kinerja yang belum diselesaikan dan penajaman strategi dalam rangka mewujudkan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal sampai akhir tahun anggaran 2024.

Perubahan RKPD Kabupaten Kendal telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024. Setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang kemudian disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja PD ini mengacu pada Rancangan Awal Perubahan RKPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode triwulan I dan II untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, menyelaraskan serta mendasarkan kegiatan prioritas yang masih dilaksanakan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 juga diatur tentang tatacara Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah yaitu dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud diatas meliputi perubahan :

- a. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. target sasaran pembangunan daerah;
- c. prioritas pembangunan daerah;
- d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah; dan
- e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 disusun dengan tahapan :

- a. penyusunan rancangan perubahan RKPD;
- b. perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
- c. penetapan.

Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.

Rancangan akhir perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan bagian akhir dari penyusunan dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah yang harus diverifikasi guna memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan awal perubahan RKPD. Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Keuangan Daerah Kabupaten Kendal berkewajiban menyusun Dokumen Perubahan Renja 2024 sebagai satu kesatuan dari sistem perencanaan pemerintah daerah, provinsi dan nasional. Rancangan akhir perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang termuat dalam RPJMD, serta menjadi dasar untuk penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 merupakan bagian penjabaran dari perencanaan tahun keempat RPJMD Kabupaten Kendal dan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.

Mempedomani Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2024.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan atau tahun 2024. Hasil evaluasi tersebut disampaikan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah melalui Kepala Baperlitbang atau Tim Penyusun Perubahan RKPD Kabupaten Kendal yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi yang menunjukkan perlu dilakukan perubahan dengan pertimbangan :

- 1) Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan.

- 2) Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar OPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan.
- 3) Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2023 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2024.
- 4) Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Perubahan RKPD Tahun 2024 ditetapkan dengan peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota yang kemudian menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS, Renstra PD dan Perubahan Renja PD untuk menyusun rancangan perubahan APBD Provinsi dan Kabupaten/ Kota tahun 2024.

Selanjutnya Perubahan Renja tahun 2024 dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Perangkat Daerah dan kemudian ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD Perubahan) Kabupaten Kendal.

1.1.2. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka menunjang capaian Visi dan Misi Kabupaten Kendal Tahun 2021 - 2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal mendukung dan berkontribusi dalam mencapai salah satu tujuan Pembangunan Kabupaten Kendal yaitu “Mewujudkan Reformasi Birokrasi” yang fokus pada penerapan strategi daerah yaitu Perbaikan tata kelola pemerintahan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mendukung pembangunan Kabupaten Kendal yang menitikberatkan pada pembangunan seluruh aspek guna terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kendal.

Upaya untuk mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2024 ditunjang dengan beberapa sinkronisasi kegiatan prioritas yang rutin dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal selama tahun anggaran 2024 demi menunjang terwujudnya reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal .

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal masih berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam merumuskan serta dalam melaksanakan program dan kegiatan yang meliputi : 3 program 13 kegiatan dan 48 sub kegiatan masih perlu diselaraskan dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah “Meningkatnya kinerja pelayanan masyarakat ” melalui beberapa rumusan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan guna memperlancar dan mempercepat tercapainya tujuan Pembangunan Kabupaten Kendal yaitu “Mewujudkan Reformasi Birokrasi”.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal merupakan unsur dari Organisasi Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kendal, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang yang masing masing menjalankan sebagian tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal mempunyai fungsi sebagai berikut berikut :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian teknis di bidang keuangan;

- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang keuangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang keuangan;
- f. pelaksanaan administrasi Badan di bidang keuangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang keuangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal memiliki Standar Pelayanan dan tetap berpedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) serta kebijakan yang berlaku demi terwujudnya pelayanan yang prima guna menunjang keberhasilan program/kegiatan yang ada, mewujudkan pelayanan publik disamping memenuhi ketertiban dalam mengelola ketatausahaan. Selama ini kesiapan serta ketepatan waktu selalu menjadi prioritas utama pelayanan yang harus dijaga dan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal. Baik dalam pelaksanaan kegiatan di lingkup internal Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal maupun di luar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kendal.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RenjaP erangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 secara umum memperlihatkan hasil kinerja yang cukup optimal, masih *on the track* pada target/proyeksi yang telah ditetapkan.

Dalam rangka menunjang capaian program pembangunan daerah diperlukan penyelarasan terhadap dinamika yang berkembang khususnya di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal, guna mengoptimalkan kinerja, tugas dan fungsi Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal unit kerja pelayanan publik, penyedia serta penunjang kegiatan semua unit kerja di lingkungan Kabupaten Kendal .

Perubahan dalam rangka penyelarasan terhadap beberapa program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal difokuskan demi menunjang terwujudnya reformasi birokrasi dan menyajikan pelayanan prima khususnya di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal serta pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Kendal.

Tabel 1.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023
Kabupaten Kendal

No	IKU/IKK/Indikator Program	SPM/Standar Nasional	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian	Proyeksi	Capaian Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Indikator Kinerja Utama											
1	IPKD (Indek Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	-	79,325	79,326	79,327	79,327	79,328	79,329	70,641	75,00	89,05%
Indikator Program											
1	Prosentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
2	Prosentase kesesuaian APBD dengan KUA PPAS	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
3	Prosentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (Kemenkeu, KPPN, KPP, Taspen)	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
4	Prosentase OPD menyusun laporan keuangan sesuai standar keuangan	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
5	Prosentase Sistem Keuangan yang Terintegrasi	-	50	50	50	50	50	50	50	50	100%
6	Prosentase aset daerah yang dikelola dengan baik	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100%

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011 - 2031) (Lembaran Daerah Kabupateen Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1 ,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 20).
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
16. Keputusan Bupati Kendal Nomor 050/167/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) adalah tersusunnya dokumen perubahan perencanaan pembangunan tahunan bagi Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan daerah jangka menengah dan panjang .

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan acuan yang lebih rasional bagi Perangkat Daerah dalam menyelaraskan dengan tugas dan fungsinya;
- b. Memberikan acuan yang lebih rasional bagi Perangkat Daerah dalam menyelaraskan capaian dan proyeksi kinerja program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran;
- c. Memberikan acuan yang lebih rasional bagi Perangkat Daerah dalam menyelaraskan lokasi kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran;
- d. Memberikan acuan yang lebih rasional bagi Perangkat Daerah dalam menyelaraskan indikator kinerja kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran;
- e. Memberikan acuan yang lebih rasional bagi Perangkat Daerah dalam menyelaraskan kelompok sasaran kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran;
- f. Memberikan acuan yang lebih rasional bagi Perangkat Daerah dalam menyelaraskan sertamemproyeksi pendanaandalam rangka menyelaraskan dinamika pelayanan sampai akhir tahun anggaran;
- g. Memberikan pedoman pembangunan tahun 2024 bagi Perangkat Daerah yang akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perubahan Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja dan gambaran pelayanan perangkat daerah, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II.

BAB III. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi ulasan yang mencakup isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan, target capaian kinerja baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan serta sumber dana.

BAB IV. Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II

Dalam rangka menunjang capaian Visi dan Misi Kabupaten Kendal Tahun 2021 - 2026 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal mendukung dan berkontribusi dalam mencapai salah satu tujuan Pembangunan Kabupaten Kendal yaitu “Mewujudkan Reformasi Birokrasi” yang fokus pada penerapan strategi daerah yaitu Perbaikan tata kelola pemerintahan.

Pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal di tahun 2023 sampai dengan Triwulan II secara umum masih selaras dengan dinamika yang ada setelah melalui penyelarasan dan penyempurnaan terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kinerja kegiatan menunjukkan penilaian atas keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Triwulan II menunjukkan kinerja yang optimal, selaras dan masih *on the track* dengan target serta capaian yang diharapkan. Ini dapat dilihat dari berjalannya semua kegiatan, selaras dengan dinamika situasi dan kondisi yang berkembang khususnya di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal, dimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal selaku unit kerja yang terkait tugas dan fungsinya sebagai penyedia/penunjang pelayanan publik di bidang umum pada lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah termasuk pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kendal.

Monitoring dan evaluasi secara berkala terfokus pada beberapa program/kegiatan prioritas yang terindikasi capaian realisasinya masih rendah. Hal ini berpengaruh pada tahap perencanaan anggaran terkait dinamika penganggaran dengan kebutuhan insidentil/tidak terduga yang sulit diprediksi sebelumnya dan terkait penunjang pelayanan kepada masyarakat serta optimalisasi penunjang pelayanan kepada masyarakat. Evaluasi kinerja setiap kegiatan serta kebutuhan rutin pada tahun-tahun sebelumnya, akomodasi terhadap usulan rencana kebutuhan barang yang masuk serta proyeksi cadangan bagi kebutuhan insidentil/tidak terduga merupakan unsur terpenting dalam proses penganggaran dengan berpedoman pada setiap peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal untuk beberapa program/kegiatan lebih mengedepankan outcome atas capaian target kinerja yang telah ditentukan. Proyeksi terhadap alokasi penyediaan juga tidak selalu berbanding lurus dengan kebutuhan yang ada seiring dinamika yang terus berkembang mengikuti mekanisme serta kebijakan yang ada. Sinkronisasi dalam setiap langkah perencanaan menjadi pola rutin karena Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal sebagai unsur penunjang mempunyai tugas penting dalam memenuhi dan melayani masyarakat umum guna menunjang capaian program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal.

Sebagai catatan khusus bagi pelaksanaan program/kegiatan yang mempunyai capaian realisasi anggaran rendah disamping realisasi fisiknya juga tidak mencapai hasil maksimal, hal ini dimungkinkan karena beberapa faktor yang diantaranya meliputi pertimbangan hasil kajian, kebijakan maupun mekanisme yang tidak memungkinkan untuk direalisasikan sepenuhnya berdasarkan prioritas dan peraturan perundangan yang ada.

Dalam pelaksanaan serta evaluasi yang berjalan, beberapa program/kegiatan perlu adanya perubahan pada rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal guna mengakomodasi serta menyelaraskan terhadap berbagai dinamika kebutuhan prioritas yang berkembang di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal dengan penyesuaian atas APBD Tahun 2024.

Perubahan rencana kerja ini akan mengakomodir usulan proyeksi anggaran perubahan yang diprioritaskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal yang selanjutnya akan ditetapkan masing-masing plafon anggaran per kegiatan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Perubahan rencana kerja ini juga akan mengakomodir adanya beberapa pergeseran belanja pada beberapa kegiatan guna penyesuaian atas kondisi-kondisi yang terjadi pada APBD Tahun 2024, dinamika kebutuhan yang sedang berkembang serta faktor efisiensi pada beberapa belanja kegiatan yang memungkinkan optimalisasi capaian kinerja pada belanja kegiatan lain yang lebih prioritas dengan berpedoman pada peraturan/kebijakan yang ada.

Pada tahun 2024 belanja operasi diarahkan guna mendanai program dan kegiatan sesuai bidang kewenangan/urusan pemerintah daerah dengan tujuan dan target sasaran yang jelas guna mendukung arah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024. Sedangkan untuk belanja pegawai, pengalokasian anggaran dalam bentuk belanja pegawai yang rutin

diperuntukkan sebagai pemberian gaji dan tunjangan bagi PNS Badan keuangan daerah Kabupaten Kendal.

Tabel 2.

Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024
BPKAD Kab. Kendal

No.	Uraian	Alokasi	Realisasi (SP2D)	
			(Rp)	(%)
5	BELANJA	421.857.377.436	172.186.894.060	40,82
5.1	BELANJA OPERASI	421.848.477.436	172.186.894.060	40,82
5.2	BELANJA MODAL	8.900.000	0	0

Sumber : SIPD 2024 (s/d 30 Juni 2024)

Tabel 3.

Evaluasi Hasil Renja
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024
BPKAD Kab. Kendal

NO	Program Kegiatan	PAGU ANGGARAN	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD yang dievaluasi	
			K	Rp.	K	%
1	2	3	4		5	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	105.808.000	3	23.731.684	75 %	22,43%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.230.000	4	372.000	50 %	2,61%
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.760.000	0,5	0	50 %	0%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.410.931.259	8	3.031.036.272	57,14 %	47,28%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					

5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80.000.000	2	0	10%	0%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	133.413.500	1	35.748.000	33,33%	26,79%
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	52.205.950	1	7.274.000	25%	13,93%
8	Penyediaan bahan logistik kantor	56.820.000	6	25.869.330	50%	45,53%
9	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	154.100.000	5	47.290.800	41,67%	30,69%
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.270.000	0	0	0%	0%
11	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1.236.067.800	4	304.635.900	33,33%	24,65%
12	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	94.700.000	500	55.290.000	50%	58,38%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.900.000	3	0	60%	0%
	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
14	Penyediaan jasa surat menyurat	20.000.000	4	2.297.000	33,33%	11,49%
15	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	265.700.000	6	101.653.935	50%	38,26%
16	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	239.600.000	6	98.457.550	50%	41,09%
	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah					
17	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	175.000.000	30	80.992.561	37,04%	46,28%
18	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	105.950.000	3	28.630.000	25%	27,02%
19	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	177.500.000	0,5	19.244.600	50%	10,84%
II	Program Pengelolaan Keuangan Daerah					
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					
20	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	51.603.000	0	0	0%	0%

21	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	57.403.000	0	0	0%	0%
22	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	59.500.000	20	19.846.000	37,74%	33,35%
23	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	35.750.000	0	0	0%	0%
24	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	48.500.000	20	4.409.100	18,69%	9,09%
25	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	24.750.000	0	0	0%	0%
26	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	174.136.000	0,5	87.784.052	50%	50,41%
27	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	113.734.000	0	0	0%	0%
28	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	598.646.000	6	248.250.000	50%	41,47%
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					
29	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	233.840.000	3	0	50%	0%
30	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	17.330.000	60	0	32,6%	0%
31	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	102.950.000	0,5	29.393.026	25%	28,55%
32	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	83.450.000	1	9.450.000	20%	11,32%

	Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan					
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					
33	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	60.565.000	26	21.566.684	32,91%	35,61%
34	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	129.545.000	1	22.562.284	20%	17,42%
35	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	34.136.000	20	400.000	39,22%	1,17%
36	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4.811.000	0	0	0%	0%
37	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	18.580.000	0,5	2.128.000	25%	11,45%
38	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	31.421.000	50	5.500.000	31,65%	17,50%
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					
39	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	370.708.742.500	133	165.975.296.420	50%	44,77%
40	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.000.000.000	0,25	1.005.467.100	25%	20,11%
41	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	30.856.708.427	0	0	0	0%

	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah					
42	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	40.880.000	0	0	0%	0%
III	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah					
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah					
43	Penyusunan Standar Harga	143.400.000	0,2	4.245.600	20%	2,96%
44	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	20.000.000	20	6.308.000	35,08%	31,54%
45	Penatausahaan Barang Milik Daerah	207.600.000	0,1	8.453.826	10%	4,07%
46	Inventarisasi Barang Milik Daerah	80.000.000	0,8	63.234.684	80%	79,04%
47	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	315.600.000	0,5	29.497.768	10%	9,35%
48	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	3.219.840.000	2	780.577.884	33,33%	24,24%
		421.857.377.436		210.736.813.187	39,87%	40,82%

Tingkat rata - rata capaian kinerja dan realisasi anggaran pada evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II masih menunjukkan Tingkat Capaian Kinerja 39,87% dan Realisasi Anggaran Renja OPD 40,82%. Namun evaluasi kinerja ini dikalkulasi dengan indikator kinerja output melalui besaran serta capaian output yang telah terealisasi terhadap target yang telah ditentukan.

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target program/kegiatan :
 - Ketidaksesuaian antara rencana dan kebutuhan;
 - Keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, keuangan, fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung program/kegiatan;
 - Kurangnya koordinasi/sosialisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatan;
 - Perubahan kebijakan/regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan program/kegiatan.
2. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target program/kegiatan :
 - Perencanaan yang realistis dan terukur, didukung dengan data dan informasi yang akurat;
 - Sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, anggaran yang cukup dan fasilitas infrastruktur yang memadai;
 - Koordinasi dan kerjasama yang baik;
 - Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi atau tantangan yang muncul.
3. Faktor-faktor penyebab melebihi target program/kegiatan :
 - Penggunaan metode perencanaan yang inovatif dan strategi yang melebihi ekspektasi;
 - Memiliki tim yang sangat terampil, berdedikasi, dan berpengalaman yang dapat melebihi kinerja yang diharapkan serta anggaran yang lebih dari cukup;
 - Koordinasi dan komunikasi internal yang sangat baik juga didukung komunikasi yang efektif dengan pihak eksternal;
 - Kemampuan untuk mengadaptasi ide-ide baru dan metode yang meningkatkan efisiensi dan hasil

Implikasi positif yang timbul dari target capaian program Renstra Perangkat Daerah yaitu :

1. Peningkatan Kinerja Organisasi
2. Kepuasan Masyarakat
3. Pengelolaan Anggaran yang Lebih Baik
4. Peningkatan Moral dan Motivasi Tim
5. Peluang untuk Pengembangan Lebih Lanjut

Sedangkan implikasi negatif yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah yaitu :

1. Kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan, mempengaruhi kualitas dan hasil akhir dari program, serta menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat;
2. Penurunan Kepercayaan dan Kepuasan Publik;
3. Masalah dalam Pengelolaan Sumber Daya;
4. Mempengaruhi motivasi dan semangat kerja tim;
5. Peningkatan Kebutuhan Perbaikan dan Evaluasi.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut diatas adalah :

1. Perencanaan yang lebih baik, disertai evaluasi, studi kelayakan, analisis kebutuhan dan analisis risiko dan dampak;
2. Penganggaran yang efektif berbasis kinerja yang fleksibel dan transparan serta pengawasan dan pemantauan berkala;
3. Peningkatan kapasitas dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan staf terkait perencanaan dan penganggaran;
4. Komunikasi internal yang jelas dan terbuka antara semua unit dan pihak terkait;
5. Menyiapkan mekanisme untuk menangani masalah atau kendala dengan cepat dan efektif;

2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mendasari Peraturan Bupati Kendal Nomor 99 tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa tugas BPKAD membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan. Sehingga BPKAD tidak menampung usulan program dan kegiatan masyarakat, hanya menunjang kegiatan masyarakat yang dilaksanakan oleh dinas teknis lain.

Tabel T.C. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kendal

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1) Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	02	01	2.01	01									
01					Program Penunjang urusan pemerintahan daerah								
01					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
01	2	01		05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	4 dokumen (Renja,RKA,DPA, Progran Kerja)	4 dokumen	3 dokumen	75	4 dokumen	4 dokumen	100
01	2	01		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	8 dokumen (Sakip,LPPD,LKPJ, Lapor,POK,RB,ZI, SPIP)	8 dokumen	4 dokumen	50	8 dokumen	8 dokumen	100
01	2	01		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Kendal Expo	1 laporan	1 laporan	0,5	50	1 laporan	1 laporan	100
01	2	02			Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah								
01	2	02		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan	14 bulan	14 bulan	8 bulan	57,14	14 bulan	14 bulan	100

01	2	05			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
01	2	05		09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang dikirim diklat	20 orang	20	2	10	20 orang	20	100
01	2	06			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
01	2	06		02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan	3 paket	3 paket	1 paket	33,33	3 paket	3 paket	100
01	2	06		03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	4 paket	1 paket	25	4 paket	4 paket	100
01	2	06		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos penyediaan makan minum rapat	12 paket	12 paket	6 paket	50	12 paket	12 paket	100
01	2	06		05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetakan / penggandaan	8 paket	8 paket	5 paket	41,67	8 paket	8 paket	100
01	2	06		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan bacaan	12 Dokumen	12 Dokumen	0	0	12 Dokumen	12 Dokumen	100
01	2	06		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah bulan keg.rapat koordinasi dan konsultasi	12 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	33,33	12 Laporan	12 Laporan	100
01	2	06		10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah kegiatan penyusutan arsip	1000 Dokumen	1000 Dokumen	500 Dokumen	50	1.000 Dokumen	1.000 Dokumen	100
01	2	07			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
01	2	07		06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang diadakan	5 unit	5 unit	3	60	5 unit	5 unit	100
01	2	08			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
01	2	08		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	33,33	12 Laporan	12 Laporan	100
01	2	08		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50	12 Laporan	12 Laporan	100

01	2	08		04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan pembayaran honor penatausahaan keuangan tenaga keamanan, tenaga kebersihan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50	12 Laporan	12 Laporan	100
01	2	09			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
01	2	09		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas yang berizin	81 unit	81 unit	30 unit	37,04	81 unit	81 unit	100
01	2	09		06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Bulan terpeliharanya Peralatan dan Mesin	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	25	12 Bulan	12 Bulan	100
01	2	09		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	1 paket	1 paket	0,5	50	1 paket	1 paket	100
02					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								
02	2	01			Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran								
02	2	01		01	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	dok KUAPPAS YANG DISUSUN	2 dokumen	2 dokumen	0	0	2 dokumen	2 dokumen	100
02	2	01		02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	JUMLAH DOK PERUBAHAN KUAPPAS YANG DISUSUN	2 dokumen	2 dokumen	0	0	2 dokumen	2 dokumen	100
02	2	01		03	Koordinasi, penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	jumlah OPD yang terverifikasi dok RKA	53 dokumen	53 dokumen	20 dokumen	37,74	53 dokumen	53 dokumen	100
02	2	01		03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	53 dokumen	53 dokumen	0	0	53 dokumen	53 dokumen	100
02	2	01		05	Koordinasi, penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA OPD yang terverifikasi	107 dokumen	107 dokumen	20 dokumen	18,69	107 dokumen	107 dokumen	100
02	2	01		05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	107 dokumen	107 dokumen	0	0	107 dokumen	107 dokumen	100

02	2	01		07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 dokumen	1 dokumen	0,5 dokumen	50	1 dokumen	1 dokumen	100
02	2	01		08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	2 dokumen	0	0	2 dokumen	2 dokumen	100
02	2	01		09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	12 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50	12 dokumen	12 dokumen	100
02	2	02			Kegiatan Koordinasi dan pengelolaan Perbendaharaan								
02	2	02		01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	jumlah laporan yang disusun	6 dokumen	6 dokumen	3 dokumen	50	6 dokumen	6 dokumen	100
02	2	02		05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	jumlah dok laporan pengelolaan dana perimbangan dan transfer (gaji dan bankeu)	184 Laporan	184 Laporan	60 Laporan	32,6	184 Laporan	184 Laporan	100
02	2	02		09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah dokumen rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait - Rekonsiliasi Gaji - Rekonsiliasi BPJS	2 dok	2 dokumen	0,5 dokumen	25	2 dokumen	2 dokumen	100
02	2	02		10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	jumlah dok kebijakan yang disusun (SK PEJABAT PENGEOLOAN KEUANGAN, BESARAN UP, JUKNI PENGELOLAAN	5 dok	5 dokumen	1 dokumen	20	5 dokumen	5 dokumen	100
02	2	03			Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah								
02	2	03		01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	79 Laporan	79 Laporan	26 Laporan	32,91	79 Laporan	79 Laporan	100

02	2	03		03	Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	20	5 Dokumen	5 Dokumen	100
02	2	03		04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	51 Laporan	51 Laporan	20 Laporan	39,22	51 Laporan	51 Laporan	100
02	2	03		06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	2 Dokumen	2 Dokumen	100
02	2	03		09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait penyusunan LK	2 Dokumen	2 Dokumen	0,5 Dokumen	25	2 Dokumen	2 Dokumen	100
02	2	03		11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	158 orang	158 orang	50 orang	31,65	158 orang	158 orang	100
02	2	05			Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup								
02	2	05		02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	0	0	1 dokumen	1 dokumen	100
03					PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								
03	2	01			Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah								
03	2	01		01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0,2 Dokumen	20	1 Dokumen	1 Dokumen	100
03	2	01		03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	57 Dokumen	57 Dokumen	20 Dokumen	35,08	57 Dokumen	57 Dokumen	100
03	2	01		05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah aset BMD yang terpeliharanya	1 Laporan	1 Laporan	0,1 Laporan	10	1 Laporan	1 Laporan	100

03	2	01		06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	jumlah dokumen inventarisasi barang milik daerah	1 Laporan	1 Laporan	0,8 Laporan	80	1 Laporan	1 Laporan	100
03	2	01		10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, pemindahtanganan,	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	0,5 Dokumen	10	5 Dokumen	5 Dokumen	100
03	2	01		12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	33,33	6 Dokumen	6 Dokumen	100

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KENDAL

MARDI EDI SUSILO, SE.Par, M.Par

Pembina Tingkat I

NIP. 19670917 199103 1 008

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yang relevan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Sedangkan, isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kendal.

Dari beberapa masalah utama daerah kemudian dijabarkan ke dalam permasalahan dan akar masalah yang lebih spesifik. Keterkaitan masalah utama dengan masalah dan akar masalah adalah bahwa suatu permasalahan utama adalah masalah daerah yang penyelesaiannya harus membutuhkan peran lintas bagian maupun bidang urusan, kemudian dari permasalahan utama tersebut dicari penyebabnya. Sekurang-kurangnya, terdapat empat elemen penting penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi: *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*. Tanpa empat elemen tersebut, sulit sekali untuk menjamin bahwa pembangunan daerah diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Mencermati kinerja “tata kelola pemerintahan yang baik” di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kendal yang belum terwujud, salah satu faktor masalah utama daerah dapat diidentifikasi yaitu Belum Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Menimbang tugas dan fungsinya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal, sesuai dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal maka masalah utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal yang dapat diidentifikasi yaitu terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

1. Masih ditemukannya ketidaksesuaian pagu anggaran antara APBD dengan KUA PPAS, penyusunan rencana anggaran belum sesuai dengan kodefikasi Permendagri 90 tahun 2019 dan pemutakhirannya;
2. Belum terjadinya konsistensi antara rencana belanja modal dengan realisasi;
3. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;

Berdasarkan hasil telaahan terhadap tugas dan fungsi pada Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal, permasalahan, serta kebijakan – kebijakan yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan didapatkan formulasi yang mengangkat isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Menjadi isu penting yang harus dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu meliputi :

1. Belum optimalnya pengelolaan keuangan dalam prinsip indek pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan menuju kesesuaian pagu anggaran KUAPPAS dengan RAPBD;
2. Belum optimalnya pemanfaatan dan penataan aset daerah / BMD untuk pelayanan publik dan kerjasama dengan pihak swasta yang mendatangkan pendapatan daerah;
3. Belum optimalnya pelayanan dan kinerja perangkat daerah

3.2. Program dan Kegiatan

Dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 tetap mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah dan dinamika yang berkembang. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Perubahan rencana kerja ini akan mengakomodir usulan proyeksi anggaran perubahan yang diprioritaskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal yang selanjutnya akan ditetapkan masing-masing plafon anggaran per kegiatan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Perubahan rencana kerja ini juga akan mengakomodir adanya beberapa pergeseran belanja pada beberapa kegiatan guna penyesuaian atas kondisi-kondisi yang terjadi pada APBD Tahun 2024.

Dinamika yang sedang berkembang memerlukan langkah rasionalisasi pada beberapa belanja kegiatan yang diharapkan mampu mengoptimalkan capaian kinerja pada belanja kegiatan lain yang lebih prioritas dengan berpedoman pada peraturan/kebijakan yang ada. Sedangkan untuk belanja tidak langsung juga diakomodir dalam perubahan rencana kerja tahun 2024, pengalokasian anggaran dalam bentuk belanja pegawai yang rutin diperuntukkan sebagai pemberian gaji dan tunjangan bagi PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal.

Adapun rincian yang mencakup penyesuaian terhadap isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan, target capaian kinerja baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan serta sumber dana terdapat pada **Lampiran** *Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 Perubahan.*

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal tahun 2024 yang telah ditetapkan merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyelarasan program/kegiatan pada Perubahan Renja 2024 lebih bersifat prioritas dan mendesak untuk diakomodir sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 .

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal ini sebagai penyesuaian atas proyeksi serta dinamika yang terjadi sampai akhir tahun anggaran, dan dipergunakan sebagai acuan kinerja dalam melanjutkan pelaksanaan tugas dan fungsi sampai dengan akhir tahun anggaran 2024, sehingga rencana kerja dapat lebih terarah dan terukur sesuai perencanaan dan kaidah yang ada. Dan ini diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal, dalam menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Akhir kata, semoga Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik, disertai kerja keras dan dedikasi tinggi dari segenap aparatur di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal melalui mekanisme yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan good governance dan public service yang lebih baik.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KENDAL



MARDI EDI SUSILO, SE.Par, M.Par
Pembina Tingkat I
NIP. 19670917 199103 1 008

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. KENDAL
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REMITRA OPD	REALISASI CAPAIAN REKJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REKJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MALU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGKALAN JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																		
	5	UNSUB PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							387.974.050.717,00	421.967.377.436,00	428.736.177.436,00	30.781.118.719,00							510.549.834.022,00	
	5.02	KEUANGAN							387.974.050.717,00	421.967.377.436,00	428.736.177.436,00	30.781.118.719,00							510.549.834.022,00	
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah				100,00 %	100,00 %	6.114.833.991,00	9.363.966.808,00	9.392.566.528,00	308.989.700,00							8.490.703.691,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang terakumulasi Prosentase terpenuhinya tuntutan umum, pengapalan dan keuangan Perangkat Daerah				100 persen 11 Dokumen	100 persen 11 Dokumen	136.963.000,00	170.796.000,00	146.628.000,00	9.635.000,00			-	-	-		272.128.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	76.493.000,00	105.808.000,00	92.938.000,00	16.445.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua kelDesa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	-	-		124.283.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	8 Laporan	11.740.000,00	14.230.000,00	11.830.000,00	90.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua kelDesa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	50.760.000,00	50.760.000,00	43.990.000,00	-6.900.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua kelDesa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	-	-		132.845.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.3.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terakumulasi Gaji dan Tunjangan ASN Prosentase terpenuhinya tuntutan umum, pengapalan dan keuangan Perangkat Daerah				14 Bulan	14 Bulan	5.968.294.741,00	6.410.931.259,00	6.410.931.259,00	442.606.518,00			-	-	-		5.475.944.741,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.3.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	5.552.094.741,00	6.410.931.259,00	6.410.931.259,00	658.836.518,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua kelDesa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.062.094.741,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.3.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi a Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	416.170.000,00	0,00	0,00	-416.170.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua kelDesa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	-	-		423.850.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.3.05	Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terakumulasi Prosentase terpenuhinya tuntutan umum, pengapalan dan keuangan Perangkat Daerah				81 Orang 81 Paket	81 Orang 81 Paket	175.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-115.000.000,00			-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.3.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	175.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-115.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua kelDesa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.3.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terakumulasi Prosentase terpenuhinya tuntutan umum, pengapalan dan keuangan Perangkat Daerah				12 Bulan 61 Orang	12 Bulan 61 Orang	844.426.250,00	1.729.577.250,00	1.751.747.250,00	857.321.000,00			-	-	-		1.567.930.950,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.3.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	135.413.500,00	133.413.500,00	133.413.500,00	-2.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua kelDesa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	-	-		135.413.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.3.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	54.005.950,00	52.205.950,00	42.205.950,00	-11.800.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua kelDesa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	-	-		54.005.950,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.3.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	150.000.000,00	56.820.000,00	56.820.000,00	-93.180.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua kelDesa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.3.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	185.000.000,00	154.100.000,00	154.100.000,00	-10.900.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua kelDesa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	-	-		185.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.3.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perabotan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perabotan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.700.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00	-7.920.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua kelDesa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	-	-		10.700.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.3.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	254.806.800,00	1.268.067.800,00	1.251.067.800,00	96.261.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua kelDesa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	-	-		956.311.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.3.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1000 Dokumen	1000 Dokumen	125.000.000,00	94.700.000,00	111.970.000,00	-13.130.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua kelDesa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	-	-		125.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REKENTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REKJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REKJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEDUDAH	R/PO 2024	APSD 2024				R/PO PERUBAHAN 2024	NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Perantara Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana prasarana yang disediakan Prosentase terpenuhinya anggaran umum, kepegawaian dan kasubangan Peningkat Daerah				11 Unit	11 Unit	19.000.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	-10.100.000,00			-	-	-		344.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	Jumlah Ruang Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan Semua KariDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		144.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	7.000.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	1.900.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan Semua KariDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan kebutuhan rutin Prosentase terpenuhinya anggaran umum, kepegawaian dan kasubangan Peningkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	470.700.000,00	525.300.000,00	535.300.000,00	64.600.000,00			-	-	-		470.700.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Sural Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sural Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan Semua KariDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	265.700.000,00	265.700.000,00	265.700.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan Semua KariDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		265.700.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	185.000.000,00	239.600.000,00	249.600.000,00	64.600.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan Semua KariDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		185.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terdapat Prosentase terpenuhinya anggaran umum, kepegawaian dan kasubangan Peningkat Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang terdapat Prosentase terpenuhinya anggaran umum, kepegawaian dan kasubangan Peningkat Daerah				94 Unit	94 Unit	448.450.000,00	458.450.000,00	477.450.000,00	29.000.000,00			-	-	-		370.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Operatif dan Disediakan Pajak dan Perawatannya				81 Unit	81 Unit	175.000.000,00	175.000.000,00	174.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan Semua KariDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		175.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki				12 Unit	12 Unit	105.950.000,00	105.950.000,00	105.950.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan Semua KariDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		95.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	167.500.000,00	177.500.000,00	197.500.000,00	30.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan Semua KariDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (Kemenkum, KPPN, KPP, Laport) Persentase kesesuaian APBD dengan KUA PPAS Persentase Sistem Keuangan yang Terintegrasi Persentase sistem keuangan yang terintegrasi				100,00 80,00 % %	100 100,00 80 80,00 % % %	386.703.894.726,00	406.496.980.827,00	416.366.780.827,00	112.916.646.806,00				-	-	-	486.819.130.331,00	
5.02.02.2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dok anggaran daerah yang dibuat (KUA,PPAS R/A, RAPRD, APBD, DPA)				5 Dokumen	5 Dokumen	1.432.516.000,00	1.164.022.000,00	1.490.022.000,00	57.506.000,00			Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-	Peningkat Daerah	1.586.400.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0001		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	64.500.000,00	51.603.000,00	51.603.000,00	-12.897.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan Semua KariDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		75.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00	57.403.000,00	57.403.000,00	-2.597.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan Semua KariDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		75.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0003		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi R/A-SKPD	Jumlah R/A-SKPD yang Diverifikasi				83 Dokumen	83 Dokumen	91.400.000,00	59.500.000,00	59.500.000,00	-31.900.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan Semua KariDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		91.400.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0004		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan R/A-SKPD	Jumlah Perubahan R/A-SKPD yang Diverifikasi				83 Dokumen	83 Dokumen	80.700.000,00	35.750.000,00	35.750.000,00	-44.950.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan Semua KariDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		80.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0005		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi				107 Dokumen	107 Dokumen	62.150.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00	-13.650.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan Semua KariDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		70.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0006		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan CPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REKENTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2022	PRAKARAN CAPAIAN TARGET REJENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKARAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGKUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEDULAH	RUPD 2024	APSD 2024				RUPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				107 Dokumen	107 Dokumen	51.800.000,00	24.750.000,00	24.750.000,00	-27.050.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KaiDesa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0007		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penyelenggaraan APBD					1 Dokumen	1 Dokumen	136.491.000,00	174.138.000,00	174.138.000,00	37.646.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KaiDesa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0008		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penyelenggaraan Perubahan APBD					2 Dokumen	2 Dokumen	84.119.000,00	113.734.000,00	113.734.000,00	29.615.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KaiDesa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			75.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0009		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penyelenggaraan Perubahan APBD					2 Dokumen	2 Dokumen	84.119.000,00	113.734.000,00	113.734.000,00	29.615.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KaiDesa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			75.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0009		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penyelenggaraan Perubahan APBD					2 Dokumen	2 Dokumen	84.119.000,00	113.734.000,00	113.734.000,00	29.615.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KaiDesa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			75.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0013		Pembinaan Pelaksanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					106 Orang	106 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KaiDesa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Daerah	Jumlah OPD yang telah diteliti pengendali perencanaan daerah				49 Dokumen	49 Dokumen	531.960.000,00	437.570.000,00	437.570.000,00	94.390.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KaiDesa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Perangkat Daerah		695.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0001		Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	325.000.000,00	233.840.000,00	233.840.000,00	91.160.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KaiDesa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			325.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0005		Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Pembiayaan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Pembiayaan dan Dana Transfer Lainnya				184 Dokumen	184 Dokumen	30.000.000,00	17.330.000,00	17.330.000,00	-12.670.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KaiDesa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0009		Revisi Data Pembiayaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Revisi Data Pembiayaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				2 Dokumen	2 Dokumen	75.950.000,00	102.950.000,00	102.950.000,00	26.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KaiDesa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			160.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0010		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Pembiayaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Pembiayaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	83.450.000,00	83.450.000,00	-16.550.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KaiDesa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			110.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah OPD yang dikonsolidasi penyusunan laporan keuangan				51 OPD	51 OPD	383.370.000,00	279.058.000,00	279.058.000,00	-104.312.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KaiDesa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Perangkat Daerah		585.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0001		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Pembiayaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Pembiayaan dan Pengeluaran Kas Daerah				79 Laporan	79 Laporan	75.000.000,00	60.585.000,00	60.585.000,00	-14.415.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KaiDesa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			85.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0003		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				5 Laporan	5 Laporan	169.225.000,00	129.545.000,00	129.545.000,00	-39.680.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KaiDesa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			275.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0004		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				51 Laporan	51 Laporan	50.000.000,00	34.136.000,00	34.136.000,00	-15.864.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KaiDesa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			65.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0006		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atau Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atau Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	4.811.000,00	4.811.000,00	-10.189.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KaiDesa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0009		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	18.580.000,00	18.580.000,00	-21.420.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KaiDesa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0011		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				31 Orang	31 Orang	37.145.000,00	31.421.000,00	31.421.000,00	-5.724.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KaiDesa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			85.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTAN OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENYA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEKUDAH	R/PO 2024	APBO 2024				R/PO PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	5.02.02.2.04	Peningkatan Usaha Kewirausahaan Pengkayaan Keuangan Daerah	Jumlah desa penerima Q2/ACC/Chg hasil pajak dan retribusi				266 Laporan	266 Laporan	363.314.868.726,00	406.585.450.927,00	413.108.250.927,00	20.782.382.201,00			Mempertukar Stabilitas Penguatan dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Pangkat Daerah		495.772.720.331,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0006	Analisis Perencanaan dan Penyusunan Rencana Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyusunan Rencana Keuangan				266 Laporan	266 Laporan	349.269.432.110,00	370.708.742.500,00	370.708.742.500,00	21.439.310.390,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Mempertukar Stabilitas Penguatan dan Transformasi Pelayanan Publik	-			459.144.315.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Daerah dan Mendisak	Jumlah Laporan Hasil Pengkayaan Dana Daerah dan Mendisak				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	7.500.000.000,00	2.500.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Mempertukar Stabilitas Penguatan dan Transformasi Pelayanan Publik	-			625.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengkajian dan bag Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengkajian dan bag Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	29.045.436.616,00	30.896.708.427,00	34.896.598.427,00	5.854.071.811,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Mempertukar Stabilitas Penguatan dan Transformasi Pelayanan Publik	-			35.832.414.131,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengkajian Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Data Base Sistem Informasi Keuangan yang terintegrasi				-	2 Laporan	40.880.000,00	40.880.000,00	40.880.000,00	0,00			Mempertukar Stabilitas Penguatan dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Pangkat Daerah	30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	40.880.000,00	40.880.000,00	40.880.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Mempertukar Stabilitas Penguatan dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani		30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Perentase aset daerah yang dikelola dengan baik				100,00 %	100,00 %	4.166.640.000,00	3.986.440.000,00	3.986.440.000,00	736.640.000,00							3.460.000.000,00	
	5.02.03.2.01	Pengkajian Barang Milik Daerah	Jumlah aset daerah yang terakreditasi tahun n-1 dibagi jumlah aset daerah n-1 kali 100% Jumlah barang milik daerah yang dikelola				100 persen	100 % 100 persen	4.166.640.000,00	3.986.440.000,00	3.986.440.000,00	-169.200.000,00			Mempertukar Stabilitas Penguatan dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Pangkat Daerah	3.450.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	185.800.000,00	143.400.000,00	142.400.000,00	-43.400.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Mempertukar Stabilitas Penguatan dan Transformasi Pelayanan Publik	-			350.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000,00	20.000.000,00	21.000.000,00	-39.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Mempertukar Stabilitas Penguatan dan Transformasi Pelayanan Publik	-			60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Pendaftaran Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pendaftaran Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	207.600.000,00	192.800.000,00	-57.400.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Mempertukar Stabilitas Penguatan dan Transformasi Pelayanan Publik	-			199.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil inventarisasi (LIR) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Mempertukar Stabilitas Penguatan dan Transformasi Pelayanan Publik	-			60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemendanaan, Penunahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemendanaan, Penunahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	360.000.000,00	315.800.000,00	305.800.000,00	-54.400.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Mempertukar Stabilitas Penguatan dan Transformasi Pelayanan Publik	-			220.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				12 Laporan	12 Laporan	3.219.840.000,00	3.219.840.000,00	3.244.840.000,00	25.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Mempertukar Stabilitas Penguatan dan Transformasi Pelayanan Publik	-			2.800.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		J U M L A H							367.974.068.717,00	421.867.377.436,00	426.736.177.436,00	30.761.119.719,00							610.548.834.022,00	



BUPATI KENDAL
 PROVINSI JAWA TENGAH
 KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 050/167 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KENDAL
 TAHUN 2024

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 sehingga dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. Ketua bertugas :
 - a. memimpin segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024;

- b. mengoordinir segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 dalam pelaksanaan, pengendalian, *monitoring* seluruh kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - c. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.
2. Sekretaris bertugas :
- a. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan dan penatausahaan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.
3. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan bertugas :
- a. mengumpulkan data dan informasi bidang kesekretariatan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.
4. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Anggaran bertugas :
- a. mengumpulkan data dan informasi bidang anggaran dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.
5. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi bertugas :
- a. mengumpulkan data dan informasi bidang perbendaharaan dan akuntansi dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan

- b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.
- 6. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pengelolaan Aset Daerah bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang pengelolaan aset daerah dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.
- 7. Anggota Kelompok Kerja bertugas membantu tugas Koordinator Kelompok Kerja masing-masing.

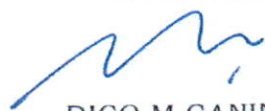
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Sekretaris, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Anggaran, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pengelolaan Aset Daerah dan Anggota Kelompok Kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 3 Mei 2023.

BUPATI KENDAL



DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Kepala BPKAD Kabupaten Kendal;
 3. Segenap Anggota Tim yang bersangkutan;
 4. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 050/167/2023
TANGGAL : 3 Mei 2023

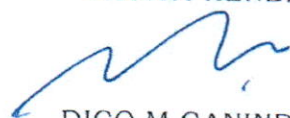
SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
2.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris	
3.	Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan		
	Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
4.	Kelompok Kerja Bidang Anggaran		
	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
	Sub Koordinator Analisis Kebijakan dan Evaluasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
5.	Kelompok Kerja Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi		
	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Belanja Penilaian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
	Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
	Sub Koordinator Pemegang Kas Daerah, Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
6.	Kelompok Kerja Bidang Pengelolaan Aset Daerah		
	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
	Kepala Sub Bidang Penatausahaan, Pengamanan, dan Penilaian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupten Kendal		
	Sub Koordinator Perencanaan Kebutuhan, Penganggaran, dan Penggunaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KENDAL

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal telah selesai disusun. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal yang mempedomani Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tahun 2021 - 2026 "Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan".

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal melaksanakan Misi Ke-1 "Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up)". Ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal dalam menurunkan angka pengangguran terbuka.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2024 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan ketenagakerjaan, transmigrasi dan perindustrian yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal tahun 2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2024.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal tahun 2024. Kami berharap agar Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal tahun 2024 dapat bermanfaat baik bagi seluruh aparatur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal tahun 2024, maupun seluruh pihak terkait.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Kendal, 26 September 2024

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kendal

CICIK SULASTRI S.H, M.A.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670612 198603 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN.....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sanmpai Dengan Triwulan II dan Renstra Perangkat Daerah	11
2.2 Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat.....	28
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	38
BAB IV PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan proses pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil pelaksanaan pembangunan ini tercermin dalam berbagai aspek seperti peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan. Indikator keberhasilan pembangunan daerah adalah semakin meningkatnya daya saing daerah serta makin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia. Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Secara terminologi, perencanaan pembangunan daerah dimaknai sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengamanatkan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pengganti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.

Sebagai salah satu dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2024 disusun melalui skala prioritas dan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk memberikan kontribusi dalam perbaikan pelayanan dibidang tenaga kerja.

Untuk menjamin terselenggaranya pelayanan dibidang tenaga kerja yang lebih prima sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal, Rencana Kerja dituangkan dalam wujud dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 362 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal merupakan dokumen perencanaan untuk 1 tahun. Secara substansial memuat rencana program dan kegiatan serta pendanaannya, yang pelaksanaannya difokuskan pada bulan Oktober, Nopember dan Desember Tahun 2024. Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari Rencana Kerja Tahun 2024 dalam rangka untuk menyesuaikan situasi dan kondisi pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal saat ini, agar pelayanan penyelenggaraan dibidang tenaga kerja dapat maksimal atau berjalan lancar.

Rencana Kerja Perubahan memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif, digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD Perubahan.

1.2. Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal, antara lain :

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);

13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 102);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 7).
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 20);

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2024 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud

Maksud Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang bersifat tahunan yang telah disusun pada Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2024 tetap menjadi bagian secara utuh dari upaya pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

2. Tujuan

Tujuan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2024 bertujuan untuk :

- a. Mengantisipasi perkembangan keadaan yang terjadi pada tahun berjalan.
- b. Menjadi acuan bagi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Dokumen Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen Perubahan Rencana Kerja.

BAB II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Berisi tentang evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024 pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal.

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi tentang rencana perubahan program dan kegiatan Tahun 2024.

BAB IV. Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II dan Renstra Perangkat Daerah

Realisasi target kinerja output kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Triwulan II Terdapat beberapa capaian, yaitu ada yang tercapai sesuai target terutama untuk kegiatan rutin dan ada yang masih proses pencapaian target yang direncanakan tercapai sampai akhir tahun anggaran 2024.

Hasil capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Tingkat partisipasi angkatan kerja, definisi operasionalnya Jumlah angkatan kerja/Jumlah penduduk usia kerja kali 100% dengan target pada tahun 2024 yaitu 81,17%. Capaian tahun 2024 bisa dihitung pada akhir tahun sedangkan capaian akhir periode renstra sebesar 86.35%.
- b. Prosentase Penyerapan Tenaga Kerja, definisi operasionalnya Jumlah pencari kerja yang ditempatkan/Jumlah pencari kerja kali 100% dengan target pada tahun 2024 yaitu 35%. Capaian TW II tahun 2024 yaitu 34,97% sedangkan capaian akhir periode renstra sebesar 45%.
- c. Persentase pertumbuhan industri pengolahan dalam PDRB, definisi operasionalnya Nilai PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan Tahun (n)-Nilai PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan Tahun (n-1) dibagi Nilai PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan Th. (n-1) kali 100% dengan target pada tahun 2024 yaitu 1,5%. Capaian tahun 2024 bisa dihitung pada akhir tahun sedangkan capaian akhir periode renstra sebesar 1,5%.
- d. Prosentase pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah, definisi operasionalnya Jumlah Industri kecil dan menengah tahun (n) -Jumlah industri kecil dan menengah tahun (n-1) dibagi - Jumlah industry kecil dan menengahtahun (n-1) kali 100% dengan target pada tahun 2024 yaitu 50 %.

Capaian TW II tahun 2024 yaitu 1,69 % sedangkan capaian akhir periode renstra sebesar 70%.

- e. Nilai Sakip pada tahun 2024 belum keluar, akan tetapi capaian nilai sakip tahun 2023 yaitu 75,30 sedangkan target akhir renstra sebesar 73.

Hasil capaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja target pada tahun 2024 yaitu 10%, capaian TW II pada tahun 2024 sebesar 9,71%, sedangkan target akhir renstra 16%.
- b. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi target pada tahun 2024 yaitu 35%, capaian TW II pada tahun 2024 sebesar 35,7%, sedangkan target akhir periode renstra 45%.
- c. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja target pada tahun 2024 yaitu 867660.7, capaian TW II pada tahun 2024 sebesar 867,851.10 sedangkan target akhir periode renstra 867660,7.
- d. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) target pada tahun 2024 yaitu 63%, capaian TW II pada tahun 2024 sebesar 60,54%, sedangkan target capaian akhir renstra sebesar 68%.
- e. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota target pada tahun 2024 yaitu 63%, capaian TW II pada tahun 2024 sebesar 98,79%, sedangkan target akhir periode renstra 68%.
- f. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah dengan target pada tahun 2024 sebesar 50%, capaian kinerja TW II pada tahun 2024 1,69%, sedangkan target akhir periode renstra yaitu 80%.

Hasil evaluasi program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2024 yang melaksanakan kegiatan urusan wajib bukan pelayanan dasar dan urusan pilihan 9 program dengan 20 kegiatan 39 Sub Kegiatan, dengan anggaran Belanja Langsung Rp. 10.873.443.651,- realisasi keuangan sampai dengan

triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp. 4.677.272.021,- pencapaian fisik kegiatan sebesar 44 %. Pencapaian realisasi anggaran triwulan II relatif sedang dikarenakan ada beberapa kegiatan masih dalam proses pelaksanaan dan pelaksanaan pada triwulan III antara lain kegiatan Pelatihan, pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Job fair/Bursa Kerja, Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Program penunjang urusan pemerintah daerah yang terdiri dari 5 kegiatan dan 17 Sub Kegiatan pagu anggaran sebesar Rp. 7.305.285.060,- dengan realisasi keuangan Rp. 3.640.594.221,- dan capaian kinerja sebesar 50%. Kegiatan pada program ini merupakan kegiatan rutin sebagai penunjang pencapaian kinerja pelayanan umum perangkat daerah;
- b. Program perencanaan tenaga kerja terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan pagu anggaran sebesar Rp. 21.230.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 0,- dan capaian kinerja sebesar 0 %. Hal ini karena kegiatan rapat koordinasi dan pengolahan data tenaga kerja dilaksanakan disemester II setelah adanya kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan Tenaga Kerja Makro yang dilaksanakan oleh Dlnas Tenaga kerja Provinsi Jawa Tengah.
- c. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja yang terdiri dari 4 kegiatan dan 4 Sub Kegiatan, pagu anggaran sebesar Rp. 1.712.495.591,- dengan realisasi keuangan Rp. 494.832.300,- dan capaian kinerja sebesar 29 %.
- d. Program penempatan tenaga kerja yang terdiri dari 3 kegiatan dan 4 Sub Kegiatan, pagu anggaran sebesar Rp. 620.888.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 125.424.000,- dan capaian kinerja sebesar 20 %.
- e. Program hubungan industrial terdiri dari 2 kegiatan dan 6 Sub Kegiatan, pagu anggaran sebesar Rp. 74.374.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 20.082.500,- dan capaian kinerja sebesar 27 %.
- f. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri yang terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, pagu anggaran 1.106.981.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 395.989.000,- dan capaian kinerja sebesar 36 %.

- g. Program Pengendalian Izin Usaha Industri yang terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, pagu anggaran Rp. 8.812.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 5.492.000,- dan capaian 62%.
- h. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, pagu anggaran Rp. 17.786.000,- dengan realisasi Rp. 750.000,- dan capaian 4%.
- i. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub kegiatan, pagu anggaran Rp. 32.190.000,- dengan realisasi Rp. 350.000,- dan capaian 1%.

Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Terhadap APBD Tahun 2024

Kesesuaian Program Antara Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024

Berdasarkan evaluasi terhadap program yang ada pada rencana kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal dengan APBD Tahun 2024, terdapat kesesuaian 100 %. Artinya bahwa jumlah program dalam renja sama dengan jumlah program yang ada dalam APBD, yaitu ada 9 program pada APBD 2024 sedangkan pada Renja terdapat 9 program Kesesuaian Kegiatan Antara Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024.

Seperti halnya evaluasi program, untuk kegiatan yang ada di Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal dengan APBD tahun 2024 terdapat kesesuaian 100% yaitu jumlah kegiatan yang ada di Renja sebanyak 19 sedangkan kegiatan yang ada di APBD sebanyak 19 kegiatan.

Anggaran yang ada di renja dan APBD, setelah dievaluasi ada terdapat perbedaan kenaikan/penurunan anggaran. Anggaran yang diusulkan dalam renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebesar Rp. 10.434.747.541,-, sedangkan dalam APBD penetapan 2024 sebesar Rp. 10.873.443.651,- Kenaikan /penurunan anggaran disebabkan adanya beberapa kegiatan yang harus dinaikan/turunkan sesuai kebutuhan agar pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.

Hasil evaluasi kesesuaian program, kegiatan dan pagu kegiatan antara renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1. dibawah ini.

Tabel 2.1

Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Antara Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024 dengan APBD 2024

No.	Uraian	Renja 2024	APBD 2024
1	Program	9	9
2	Kegiatan	19	19
3	Sub. Kegiatan	39	37
4	Pagu Anggaran	Rp 10.434.747.541,-	Rp 10.873.443.651,-

a. Realisasi program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.2

Realisasi program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi
1	4	5	8	13
			K	K
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah (%)	100	50

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terbayarnya gaji dan honor ASN (Bulan)	12	6
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan barang keperluan kantor (Buah)	16	8
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	6
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	6
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Buah)	4	3
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	6
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan daerah (Unit)	40	17
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	20	17
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	14	9.71
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	35	0
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan (Orang)	400	96
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n (Orang)	400	96
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah (Lembaga)	2	0

	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)	2	0
4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah (%)	63	98,8
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan antar kerja (Orang)	560	50
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	60	0
	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	500	50
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI yang dilindungi (pra dan purna) penempatan (Orang)	3.110	1.075
	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	3.000	1.075
5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar (%))	63	60,54
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan yang disahkan (Dokumen)	10	8
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	7	7
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	2	1
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang terselesaikan (Kasus)	10	7
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	10	7

	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan SP)	25	0
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	1	0
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	20.000	0
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
6	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase sentra industri yang dikembangkan (%)	90	28,5
		Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA (%)	90	
		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah (%)	60	1,69
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi yang disusun (Orang)	20	0
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	1	0
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	16	0
7	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang diusulkan mendapatkan Izin Usaha Industri (IUI) (%)	40	0
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi (IKM)	1	0

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota		1	0
8	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	50	43,57
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil fasilitasi (Dokumen)	1	0
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	1	0
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			
9	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Prosentase jumlah calon transmigran yang diberangkatkan (%)	50	0
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang diberangkatkan (KK)	2	0
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan (Kepala Keluarga(KK))	2	0

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Tabel 2.3

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi
1	4	5	8	13
			K	K
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah (%)	100	50	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi (Dokumen)	3	3	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terbayarnya gaji dan honor ASN (Bulan)	12	6	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	48	48	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	14	9.71	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen RTK (Dokumen)	1	1	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1	1	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	35	35.72	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina (Lembaga)	10	70	
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	40	70
	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultansi peningkatan produktivitas (Perusahaan)	5	25	
		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	5	25
4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah (%)	63	98,8	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah informasi pasar kerja yang dikelola (Perusahaan)	1.002	1.105	
	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	200	1.105	

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Tabel 2.4

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	35	35.72
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina (Lembaga)	10	70
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	40	70
	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas (Perusahaan)	5	25
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	5	25
2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah (%)	63	98,8
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah informasi pasar kerja yang dikelola (Perusahaan)	1.002	1.105
	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	200	1.105

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

1) Faktor penyebab Program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

a) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA :

- Secara Umum, belum tercapainya target kinerja dikarenakan rencana kegiatan yang memang belum bisa dimulai;
- Untuk kegiatan pemeliharaan terkendala tidak adanya biaya konsultasi perencanaan dan pengawasan, sehingga belum bisa dimulai proses pekerjaannya;

b) PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA :

- Terkendala data ketenagakerjaan yang dari BPS (Kendal Dalam Angka) yang belum lengkap, dan belum adanya tanggapan dari Pusdatin Kemnaker serta BPS atas permintaan data yang dibutuhkan;
- Menunggu Rilis data Susenas 2024 yang sudah dilakukan survey oleh, sehingga untuk proyeksinya memakai baseline 2024;
- Untuk draft perhitungan dengan baseline 2023 sudah dipersiapkan.

c) PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi dan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja :

- Time schedule yang memang baru akan selesai di triwulan 3, bergantian dengan jadwal kegiatan pelatihan yang dibiayai oleh APBN;
- Terbatasnya Tim Pengukur Kompetensi dan Produktivitas yang terbatas, sehingga pelaksanaannya mengikuti penjadwalan dari provinsi.

d) PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

- 1) Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota :
 - Time schedule yang memang baru akan selesai di triwulan 3;
 - Penyusunan time schedule menyesuaikan target dan saran kegiatan yaitu selepas lulusan SMA / SMK sederajat.
- 2) Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota :
 - Merupakan kegiatan layanan rutin bagi pencari kerja, untuk pencapaian targetnya sangat tergantung dengan permintaan layanan.

e) PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

- 1) Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota :
 - Sesuai Rencana Aliran Kas yang sudah disusun, kegiatan sosialisasi dan Pembinaan secara Klasikal akan dilakukan pada triwulan III
 - Untuk pembinaan yang sifatnya keliling, sudah dilakukan;
 - Untuk pengesahannya tergantung pada pengajuan dari Perusahaan.
- 2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota :
 - Sesuai Rencana Aliran Kas yang sudah disusun, kegiatan sosialisasi dan Pembinaan secara Klasikal akan dilakukan pada triwulan III dan IV;
 - Untuk pembinaan yang sifatnya keliling, sudah dilakukan;
 - Untuk layanan pengaduan dan mediasi, sudah berjalan secara rutin, berdasarkan pengaduan dan pelaporan.

f) PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

- Sesuai Rencana Aliran Kas yang sudah disusun, kegiatan Pelatihan Melinting Industri Hasil Tembakau akan dilakukan pada triwulan III;
- Untuk pembinaan yang sifatnya keliling, sudah dilakukan;
- Untuk layanan dan pembinaan, sudah berjalan secara rutin.

g) PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

- Sesuai Rencana Aliran Kas yang sudah disusun, kegiatan akan dilakukan pada triwulan III;
- Untuk pembinaan yang sifatnya keliling, sudah dilakukan;
- Untuk layanan dan pembinaan, sudah berjalan secara rutin.

h) PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

- Sesuai Rencana Aliran Kas yang sudah disusun, kegiatan akan dilakukan pada triwulan III;
- Untuk pembinaan yang sifatnya keliling, sudah dilakukan;
- Untuk layanan dan pembinaan, sudah berjalan secara rutin.

i) PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

- Sesuai Rencana Aliran Kas yang sudah disusun, kegiatan akan dilakukan pada triwulan III;
- Untuk pemberangkatan Calon Transmigran menunggu kesiapan lahan, yang biasanya diberangkatkan di Triwulan IV;
- Untuk kegiatan seleksi dan pelatihan bagi Calon Transmigrasi akan dimulai pada Triwulan III.

2) Faktor penyebab program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

- Secara umum, program / kegiatan tersebut sesuai sesuai dengan Rencana Aliran Kas yang sudah disusun;
- Kinerja yang baik dan efektif dari setiap unsur dalam Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

- Terjalinnya komunikasi dan kolaborasi yang baik dan efektif dengan stakeholder;
- 3) Faktor penyebab program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- a) PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
- 1) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
- Melakukan rotasi materi pembinaan, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada. Untuk saat ini, pembinaan yang dilakukan terkait dengan Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang menggunakan system OSS berdasarkan KBLI;
 - Mengkombinasikan pola pembinaan, dengan melakukan pembinaan melalui pertemuan-pertemuan dan pembinaan dengan cara berkunjung / keliling ke Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
- 2) Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
- Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
 - Melakukan kombinasi dalam melakukan konsultasi Produktivitas, baik secara kelompok melalui pertemuan maupun dengan konsultasi secara berkeliling, didatangi satu persatu ke Perusahaan Kecil, disesuaikan dengan kebutuhan;
 - Membuka pusat layanan bimbingan dan konsultasi ketenagakerjaan, kompetensi, dan produktivitas.
- b) PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
- 1) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Sub. Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja :
- Adanya potensi dari pertumbuhan Pelaku Usaha Baru yang membutuhkan tenaga kerja yang tinggi, berdasarkan data yang diberikan oleh Badan Usaha Kawasan Industri Kendal, proyeksi

kebutuhan tenaga kerja pada tahun 2024 sebesar 17.292 tenaga kerja;

- Adanya inovasi kegiatan berupa Relasi Siap Kerja dimana kegiatan penempatan tenaga kerja dikolaborasikan dengan kegiatan pelatihan kerja, Kegiatan Bimbingan Jabatan, Job Canvassing, dan kegiatan lainnya. Tidak hanya mengandalkan kegiatan Job Fair/Bursa Kerja;
- Semakin meningkatnya “Trust” akan pelayanan dari Pelaku Usaha baik di Kabupaten Kendal dan sekitarnya, sehingga setiap mereka membutuhkan tenaga kerja, melakukan kolaborasi dengan Disperinaker Kab. Kendal melalui kegiatan rekrutmen dan walk in interview yang kapanpun Pelaku Usaha membutuhkan, selalu siap membantu.
- Penggunaan Kendal Karier mampu mengefisiensi waktu, anggaran, dan SDM dalam proses Job Fair

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Secara prinsip tidak ada Kendala yang berarti atas pelaksanaan dan pencapaian renja 2024, meskipun ada beberapa hal yang menjadikan tertundanya kegiatan yang belum sesuai dengan RAK / Time Schedule yang sudah ditentukan sudah dapat dicarikan solusinya. Hanya saja memang dari beberapa Program / Kegiatan yang realisasinya masih belum tercapai dikarenakan memang secara jadwal kegiatan sudah direncanakan pada triwulan III dan Triwulan IV (untuk Kegiatan Rapat Perhitungan UMK dan Pengiriman Calon Transmigrasi).

Program/ Kegiatan pada Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja telah sesuai dengan Renstra. Perhitungan capaian indikator renstra hanya bisa dihitung pada posisi akhir tahun. Seluruh kegiatan juga berimplikasi dalam mendukung tercapainya target kinerja OPD, yang secara makro berimplikasi kepada capaian indikator Makro Daerah, seperti penurunan Tingkat

Pengangguran Terbuka yang lumayan tinggi dibandingkan kabupaten/ Kota lain, kenaikan TPAK, dan Penurunan Angka Kemiskinan/ Miskin Ekstrim.

f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

- 1) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :
 - a) Menyusun Analisa Kebutuhan terkait kegiatan, potensi yang ada, kekurangan / kelemahan agar ketika menentukan target indikator kinerja, Rencana Kerja, kebutuhan anggaran dengan disertai data-data yang yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga ketika melaksanakan kegiatan bisa terukur dan tepat sasaran;
 - b) Menganalisa secara saksama target kinerja yang ingin dicapai, disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini, berdasarkan analisa kebutuhan prioritas sehingga dapat terukur;
 - c) Pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d) Melakukan pembinaan internal, mengusulkan, dan mengirimkan ASN untuk mengikuti workshop/ Bimtek/ Diklat agar terjadi peningkatan kompetensi;
 - e) Meningkatkan disiplin kinerja aparatur sehingga kinerja dapat terealisasi.
- 2) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :
 - a) Tetap konsistensi terhadap perencanaan dalam memenuhi target kinerja dalam rangka pendukung program prioritas pembangunan;
 - b) Meningkatkan koordinasi dengan semua pihak sehingga kinerja dapat terealisasi.
- 3) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

- a) Meningkatkan koordinasi dengan pihak lain, sebagai bahan analisa dalam menentukan target kinerja yang akan dicapai sehingga disesuaikan dengan analisa kebutuhan di lapangan.

2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2024, disamping berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026, juga mengakomodasi usulan para pemangku kepentingan, khususnya dari masyarakat.

Tabel 2.5
Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

Tabel 2.6

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kendal

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			K	K	K	K	K	K	%
2									
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								0
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah (%)	100	100	50	50	100	100	100
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi (Dokumen)	15	3	2	66.7	3	3	100
2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	1	1	100	1	1	100

2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	1	1	100	1	1	100
2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	1	0	0	1	2	1000
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terbayarnya gaji dan honor ASN (Bulan)	60	12	6	50	12	10	100
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100	48	48	0	52	48	100
2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3	1	0	0	2	0	100
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan barang keperluan kantor (Buah)	1.127	16	8	50	16	0,71	100
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	1	0	0	1	0	100
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	13	12	3	6	1	46,15	100
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	1	0	0	1	0	100
2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	1	0	0	3	0	100

2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	37	12	6	50	25	16,22	100
2.07.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2	1	0	0	1	50	100
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Buah)	1.738	4	2	50	4	0,06	100
2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	1	0	50	1	0	100
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	12	6	50	12	25	100
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7	7	7	50	7	50	100
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan daerah (Unit)	225	40	0	0	40	0	100
2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	40	20	10	50	20	0	100
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40	20	0	0	20	0	100
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	1	0	0	1	0	100

2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	10	10	9.71	97	8	0	0
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen RTK (Dokumen)	9	2	0	0	2	0	100
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	2	1	0	0	1	0	100
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	35	35	0	0	30	18,06	0
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan (Orang)	1.840	400	96	24	400	5,22	100
2.07.03.2.01.0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n (Orang)	400	400	96	24	272	400	100
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina (Lembaga)	50	40	40	100	40	140	0
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	85	40	40	100	40	82,35	0
2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas (Perusahaan)	30	5	25	100	5	83,33	0
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	15	5	25	100	5	166,67	0

2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah (Lembaga)	18	2	0	0	2	0	0
2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)	3	2	0	0	2	0	0
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah (%)	63	63	98,8	98,8	60	39,64	0
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan antar kerja (Orang)	4.872	1.120	50	50	1120	1,03	0
2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	80	60	0	0	0	0	0
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	2.100	500	50	10	1600	2,38	0
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah informasi pasar kerja yang dikelola (Perusahaan)	4.058	1.002	1.105	110	1002	27,23	0
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	350	200	1.105	553	150	315,71	0
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI yang dilindungi (pra dan purna) penempatan (Orang)	13.440	3.110	1.075	34.6	3110	8	0

2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	5.000	3.000	1.075	35,8	2000	21,5	0
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar (%))	63	63	60,54	60,54	60	33,54	0
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan yang disahkan (Dokumen)	40	10	0	0	1	0	0
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	20	0	0	0	1	0	0
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	1	0	0	0	1	0	0
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang terselesaikan (Kasus)	41	10	7	70	20	17,07	0

2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan (Perkara)	20	10	7	70	7	35	0
2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan SP)	25	0	0	0	0	0	0
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	20	0	0	0	20	0	0
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	50	0	0	0	0	0	0
3									0
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								0
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase sentra industri yang dikembangkan (%)	90	90	28,5	28,5	85	5,33	100
		Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA (%)	90	90	0	0	85	18,69	100

		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah (%)	60	60	1,69	1,69	50	11,69	100
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi yang disusun (Orang)	706	20	0	0	20	0	0
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	1	0	0	0	0	0	0
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1	0	0	0	0	0	0
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang diusulkan mendapatkan Izin Usaha Industri (IUI) (%)	40	40	0	0	0	0	0
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi (IKM)	58	2	0	0	0	0	0
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota								0
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	40	50	43,57	43,57	30	21,79	0
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil fasilitasi (Dokumen)	4	1	0	0	0	0	0

3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	1	0	0	0	0	0	0
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								0
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Prosentase jumlah calon transmigran yang diberangkatkan (%)	75	50	0	0	0	0	0
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang diberangkatkan (KK)	10	2	0	0	0	0	0
3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan (Kepala Keluarga(KK))	4	2	0	0	0	2	100

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2024 ini akan dimuat tentang kegiatan lanjutan, kegiatan yang dihapus, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Adapun rincian perubahan kegiatan dalam Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1. Rekapitulasi Perubahan Kegiatan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kabupaten Kendal Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Dalam Perubahan Renja					
		Tetap	Bertambah	Berkurang	Baru	Dihapus	Jumlah
1	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Kendal	37	0	0	0	0	37

Kegiatan yang tidak mengalami perubahan pagu anggaran

Kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yang ada dalam APBD Penetapan Tahun 2024 dan tidak mengalami penambahan maupun pengurangan baik target kinerja maupun pagu indikatif pada Perubahan Renja Tahun 2024. Adapun Sub kegiatan yang tidak mengalami perubahan pagu anggaran pada renja perubahan seperti tersebut dalam tabel dibawah ini.

Tabel. 3.2 Kegiatan Yang Tidak Mengalami Perubahan Pagu Anggaran Pada Renja
Perubahan Tahun 2024

No	Sub Kegiatan	PAGU (Rp)		Bertambah / Berkurang
		APBD Penetapan	Perubahan Renja	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000	2.500.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ihtisar Realisasi Kinerja RKPD	2.500.000	2.500.000	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.150.000	30.150.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	. 29.650.000	. 29.650.000	
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000	35.000.000	
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.000.000	17.000.000	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	10.000.000	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang– Undangan	2.000.000	2.000.000	
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Berbasis Elektronik pada SKPD	52.954.000	52.954.000	
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	325.000.000	325.000.000	

12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	270.604.664	270.604.664	
13	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	21.230.000	21.230.000	
14	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	34.800.000	34.800.000	
15	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	11.871.000	11.871.000	
16	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	49.018.150	49.018.150	
17	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerj	6.408.000	6.408.000	
18	Jab Fair/ Bursa Kerja	123.480.000	123.480.000	
19	Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran	61.850.000	61.850.000	
20	Pengesahaan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	7.250.000	7.250.000	
21	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	29.150.000	29.150.000	
22	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat /berdampak di 1 (satu) di daerah kabupaten/kota	8.100.000	8.100.000	
23	Penyelenggaraan Veerivikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan koordinasi serikat pekerja/ serikat buruh serta non afiliasi	6.200.000	6.200.000	
24	Pelaksanaan Operasi Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten /Kota	15.050.000	15.050.000	

25	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	8.624.000	8.624.000	
26	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	21.822.000	21.822.000	
27	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	8.812.000	8.812.000	
28	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	17.786.000	17.786.000	
29	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	32.190.000	32.190.000	

Kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran.

Kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yang ada dalam APBD Penetapan Tahun 2024 dan mengalami pengurangan baik target kinerja dan / pagu indikatif tidak ada. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian kembali terhadap belanja guna efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan sebanyak 1 Sub Kegiatan. Adapun kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran dapat dilihat dalam tabel 3.3. dibawah ini.

Tabel. 3.3. Kegiatan Yang Mengalami Pengurangan Pagu Anggaran
Pada Renja Perubahan 2024

No	Sub Kegiatan	PAGU (Rp)		Berkurang
		APBD Penetapan	Perubahan Renja	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.938.044.324	5.878.044.324	(60.000.000)

Kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran

Kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yang ada dalam APBD Penetapan Tahun 2024 dan mengalami penambahan baik target kinerja dan / pagu indikatif sebanyak 8 Sub kegiatan. Sub Kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran dapat dilihat dalam tabel 3.4 dibawah ini.

Tabel 3.4. Kegiatan Yang Mengalami Penambahan Pagu Anggaran
Pada Renja Perubahan 2024

No	Sub Kegiatan	PAGU (Rp)		Bertambah	Peruntukan Penambahan Anggaran
		APBD Penetapan	Perubahan Renja		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	465.281.272	471.987.022	6.705.750	Penyesuaian kegiatan UMK dari halfday ke fullboard
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.800.000	106.520.000	47.720.000	Pemeliharaan kendaraan dan sepeda motor
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	31.750.000	16.750.000	Pemeliharaan AC dan komputer
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.000.000	363.206.250	315.206.250	Pemeliharaan gedung UPTD BLK dan Dinas
5	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	1.616.805.941	2.468.223.941	851.418.000	Pelatihan berbasis kompetensi
6	Perluasan Kesempatan Kerja	429.150.000	708.188.795	279.038.795	Penciptaan wirausaha baru
7	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.058.561.000	1.258.561.000	200.000.000	Pelatihan melinting

Kegiatan yang mengalami penghapusan

Kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yang sebelumnya ada dalam APBD Penetapan Tahun 2024, namun diusulkan untuk dihapuskan dalam Perubahan Renja Tahun 2024 ini sebanyak 0 sub kegiatan. Sub Kegiatan yang ditambah dapat dilihat dalam tabel 3.5. dibawah ini.

Tabel 3.5. Kegiatan Yang Dihapus Pada Renja Perubahan Tahun 2024

No	Sub Kegiatan	PAGU		Berkurang
		APBD Penetapan	Perubahan Renja	
		NIHIL		

Kegiatan baru di perubahan.

Kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yang sebelumnya belum ada dalam APBD Penetapan Tahun 2024, namun diusulkan untuk dimasukkan dalam Renja Tahun 2024. Sub kegiatan baru dapat dilihat dalam Tabel 3.6. dibawah ini.

Tabel 3.6. Kegiatan Baru Pada Renja Perubahan 2024

No	Sub Kegiatan	PAGU (Rp)		Bertambah
		Penetapan Renja	Perubahan Renja	
		NIHIL		

Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2024

Kebijakan belanja pada perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja daerah pada tahun 2024;
2. Kegiatan baru maupun penghapusan kegiatan yang menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2024.

Dengan kebijakan belanja tersebut, mengakibatkan perubahan target dan pagu indikatif. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif perubahan renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal tahun 2024 terlihat dalam tabel 3.7. dibawah ini :

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KENDAL
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA								10.434.747.541.00	10.873.443.651.00	12.680.482.446.00	2.245.734.905.00						10.831.000.000.00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.892.471.498.00	9.734.272.651.00	11.341.311.446.00	2.448.839.948.00							9.761.000.000.00
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							8.892.471.498.00	9.734.272.651.00	11.341.311.446.00	2.448.839.948.00							9.761.000.000.00
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah				100.00 %	100.00 %	6.873.563.891.00	7.305.285.060.00	7.631.867.060.00	497.436.109.00							7.371.000.000.00
	2.07.01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi				3 Dokumen	3 Dokumen	64.129.650.00	35.150.000.00	35.150.000.00	-28.979.650.00			-	-	-		87.000.000.00
	2.07.01.2. 01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000.00	2.500.000.00	2.500.000.00	-22.500.000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000.00
	2.07.01.2. 01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000.00	2.500.000.00	2.500.000.00	-7.500.000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.000.000.00
	2.07.01.2. 01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	29.129.650.00	30.150.000.00	30.150.000.00	1.020.350.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	-	-			45.000.000.00
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terbayarnya gaji dan honor ASN				12 Bulan	12 Bulan	5.687.859.991.00	5.967.694.324.00	5.907.694.324.00	219.834.333.00			-	-	-		6.035.000.000.00
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	5.469.290.341.00	5.938.044.324.00	5.878.044.324.00	408.753.983.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-	-	-			6.000.000.000.00
	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	189.440.000.00	0.00	0.00	-189.440.000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0.00
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	29.129.650.00	29.650.000.00	29.650.000.00	520.350.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			35.000.000.00
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0.00	0.00	0.00	0.00			-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata	-		0.00

	2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	60 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			0.00
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan barang keperluan kantor				16 Buah	16 Buah	371.129.650.00	582.236.072.00	588.941.822.00	217.812.172.00			-	-			535.000.000.00
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.000.000.00	35.000.000.00	35.000.000.00	0.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	-	-			70.000.000.00
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30.000.000.00	17.000.000.00	17.000.000.00	-13.000.000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	-	-			50.000.000.00
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	0.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	-	-			20.000.000.00
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000.00	2.000.000.00	2.000.000.00	0.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	-	-			5.000.000.00
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000.00	465.281.272.00	471.987.022.00	271.987.022.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	-	-			230.000.000.00
	2.07.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	

			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	94.129.650.00	52.954.800.00	52.954.800.00	-41.174.850.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	-	-			160.000.000.00
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				4 Buah	4 Buah	550.444.600.00	598.604.664.00	598.604.664.00	48.160.064.00			-	-	-		524.000.000.00
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000.00	3.000.000.00	3.000.000.00	0.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	-	-			4.000.000.00
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	325.000.000.00	325.000.000.00	325.000.000.00	0.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	-	-			300.000.000.00
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	222.444.600.00	270.604.664.00	270.604.664.00	48.160.064.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	-	-			220.000.000.00
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan daerah				65 Unit	65 Unit	200.000.000.00	121.600.000.00	501.476.250.00	301.476.250.00			-	-	-		190.000.000.00
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Disediakan				20 Unit	20 Unit	80.000.000.00	58.600.000.00	106.520.000.00	26.520.000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	-	-			90.000.000.00
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	15.000.000.00	15.000.000.00	31.750.000.00	16.750.000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	-	-			40.000.000.00
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	105.000.000.00	48.000.000.00	363.206.250.00	258.206.250.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	-	-			60.000.000.00
2.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja				16.00 %	16.00 %	60.000.000.00	21.230.000.00	21.230.000.00	20.000.000.00							80.000.000.00
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen RTK				2 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000.00	21.230.000.00	21.230.000.00	-38.770.000.00			-	-	-		80.000.000.00
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																	

			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000.00	21.230.000.00	21.230.000.00	-38.770.000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	-	-			80.000.000.00
3.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi				45.00 %	45.00 %	1.402.389.007.00	1.712.495.591.00	2.713.913.591.00	-257.389.007.00							1.145.000.000.00
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan				400 Orang	400 Orang	1.293.259.357.00	1.616.805.941.00	2.618.223.941.00	1.324.964.584.00			-	-	-		1.000.000.000.00
	2.07.03.2.01.0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi																	
			Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n				400 Orang	400 Orang	1.265.742.701.00	1.616.805.941.00	2.618.223.941.00	1.352.481.240.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	-			1.000.000.000.00
	2.07.03.2.01.0006	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas																	
			Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan				10 Kesepakatan	10 Kesepakatan	27.516.656.00	0.00	0.00	-27.516.656.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0.00
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina				10 Lembaga	10 Lembaga	30.000.000.00	34.800.000.00	34.800.000.00	4.800.000.00			-	-	-		40.000.000.00
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																	
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				40 Lembaga	40 Lembaga	30.000.000.00	34.800.000.00	34.800.000.00	4.800.000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	-	-			40.000.000.00
	2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	[deleted] Jumlah Konsultasi dan Bimbingan Perusahaan Jumlah perusahaan kecil yang mendapat				5 Perusahaan	5 Perusahaan	50.000.000.00	11.871.500.00	11.871.500.00	-38.128.500.00			-	-	-		15.000.000.00
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil																	
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas				5 Perusahaan	5 Perusahaan	50.000.000.00	11.871.500.00	11.871.500.00	-38.128.500.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	-	-			15.000.000.00
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah				2 Lembaga	2 Lembaga	29.129.650.00	49.018.150.00	49.018.150.00	19.888.500.00			-	-	-		90.000.000.00

Perubahan Renja Tahun 2024

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal

	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat				2 Dokumen	2 Dokumen	29.129.650.00	49.018.150.00	49.018.150.00	19.888.500.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	-	-		90.000.000.00
4.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme				68.00 %	68.00 %	432.388.950.00	620.888.000.00	899.926.795.00	347.611.050.00						780.000.000.00
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan antar kerja				1120 Orang	1120 Orang	174.129.650.00	435.558.000.00	714.596.795.00	540.467.145.00			-	-	-	520.000.000.00
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				100 Orang	100 Orang	45.000.000.00	6.408.000.00	6.408.000.00	-38.592.000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	-	-		20.000.000.00
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				500 Orang	500 Orang	129.129.650.00	429.150.000.00	708.188.795.00	579.059.145.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		500.000.000.00
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah informasi pasar kerja yang dikelola				1002 Perusahaan	1002 Perusahaan	200.000.000.00	123.480.000.00	123.480.000.00	-76.520.000.00			-	-	-	160.000.000.00
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				200 Orang	200 Orang	200.000.000.00	123.480.000.00	123.480.000.00	-76.520.000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	-	-		160.000.000.00
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI yang dilindungi (pra dan purna) penempatan				3110 Orang	3110 Orang	58.259.300.00	61.850.000.00	61.850.000.00	3.590.700.00			-	-	-	100.000.000.00
	2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran																
			Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani				3000 Orang	3000 Orang	58.259.300.00	61.850.000.00	61.850.000.00	3.590.700.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100.000.000.00
5.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar				68.00 %	68.00 %	124.129.650.00	74.374.000.00	74.374.000.00	260.870.350.00						385.000.000.00

2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan yang disahkan				10 Dokumen	10 Dokumen	39.129.650.00	36.400.000.00	36.400.000.00	-2.729.650.00			-	-	-		220.000.000.00
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan																	
		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial				7 Perusahaan	7 Perusahaan	10.000.000.00	7.250.000.00	7.250.000.00	-2.750.000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000.00
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																	
		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta				2 Laporan	2 Laporan	29.129.650.00	29.150.000.00	29.150.000.00	20.350.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000.00
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang terselesaikan				10 Kasus	10 Kasus	85.000.000.00	37.974.000.00	37.974.000.00	-47.026.000.00			-	-	-		165.000.000.00
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				10 Perkara	10 Perkara	10.000.000.00	8.100.000.00	8.100.000.00	-1.900.000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000.00
2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi																	
		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				25 Asosiasi dan Serikat Pekerja	25 Asosiasi dan Serikat Pekerja	20.000.000.00	6.200.000.00	6.200.000.00	-13.800.000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000.00
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																	
		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	30.000.000.00	15.050.000.00	15.050.000.00	-14.950.000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	-	-	-		100.000.000.00
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																	
		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan				20000 Orang	20000 Orang	25.000.000.00	8.624.000.00	8.624.000.00	-16.376.000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	-	-	-		20.000.000.00

	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							1.542.276.043.00	1.139.171.000.00	1.339.171.000.00	-203.105.043.00							1.070.000.000.00
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							1.478.276.043.00	1.106.981.000.00	1.306.981.000.00	-171.295.043.00							1.000.000.000.00
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah Persentase sentra industri yang dikembangkan				80.00 100.00 %	80.00 100.00 %	1.403.276.043.00	1.080.383.000.00	1.280.383.000.00	-403.276.043.00							1.000.000.000.00
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi yang disusun				21 Orang	21 Orang	1.403.276.043.00	1.080.383.000.00	1.280.383.000.00	-122.893.043.00			-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata	-		1.000.000.000.00
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000.00	21.822.000.00	21.822.000.00	-3.178.000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			0.00

	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				16 Dokumen	16 Dokumen	1.378.276.043.00	1.058.561.000.00	1.258.561.000.00	-119.715.043.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	-		1.000.000.000.00
2.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	-				-	-	50.000.000.00	8.812.000.00	8.812.000.00	-50.000.000.00						0.00
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000.00	8.812.000.00	8.812.000.00	-41.188.000.00			-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata	-	0.00
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																

			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000.00	8.812.000.00	8.812.000.00	-16.188.000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			0.00
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)																	
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000.00	0.00	0.00	-25.000.000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			0.00
3.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI	-				-	-	25.000.000.00	17.786.000.00	17.786.000.00	-25.000.000.00							0.00

	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	25.000.000.00	17.786.000.00	17.786.000.00	-7.214.000.00			-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil	-			0.00
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000.00	17.786.000.00	17.786.000.00	-7.214.000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan				0.00

	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						64.000.000.00	32.190.000.00	32.190.000.00	-31.810.000.00							70.000.000.00
1.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Prosentase jumlah calon transmigran yang diberangkatkan				50.00 %	50.00 %	64.000.000.00	32.190.000.00	32.190.000.00	6.000.000.00						70.000.000.00
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang diberangkatkan				2 KK	2 KK	64.000.000.00	32.190.000.00	32.190.000.00	-31.810.000.00			-	-	-	70.000.000.00
	3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
			Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan				2 Kepala Keluarga	2 Kepala Keluarga	64.000.000.00	32.190.000.00	32.190.000.00	-31.810.000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-		70.000.000.00

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2024 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang target yang menjadi kinerja Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Kendal.

Dalam rangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat daerah (Perubahan RENJA) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2024 mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2024.
2. Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja, maka perlu dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 yang selanjutnya dijadikan bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah periode berikutnya.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target yang telah ditetapkan.

Kendal, 26 September 2024

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kendal

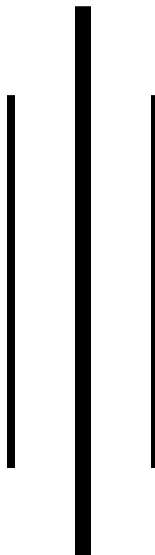
CICIK SULASTRI S.H, M.A.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670612 198603 2 001



PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PATEAN TAHUN 2024



KECAMATAN PATEAN

Jl. Raya Curugsewu No. 02 Patean, Telp./Fax. (0294)451005

Laman: kecpatean.kendalkab.go.id, posel : patean451005@gmail.com 51364

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya, maka Penetapan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Patean Tahun 2024 dapat terselesaikan. Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Patean ini sesuai dengan Pasal 361 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021, bahwa setiap Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Kerja sebagai acuan perencanaan kegiatan kurun waktu satu tahun.

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Patean ini berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 serta Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Patean Tahun 2021 – 2026. Rencana Kerja sebagaimana dimaksud merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Patean Tahun 2024, setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2024, dan penyusunan renja perubahan ini dimaksudkan bahwa dalam penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien dan penyempurnaan target anggaran yang belum terealisasi pada akhir tahun berjalan.

Dengan telah selesainya Penetapan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Patean tahun 2024, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparat terkait di Kecamatan Patean, yang telah membantu dalam penyusunannya. Kami menyadari dalam penyusunan Renja ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu mohon kritik dan saran untuk penyempurnaan Renja di tahun yang akan datang.

Kendal, 24 September 2024

CAMAT PATEAN,



MUH SYAMSUDLUHA TANTOMI, S.Sos

Pembina, IV/a

NIP. 19800910 200903 1003

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iii
 BAB 1 PENDAHULUAN	 5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
 BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	
TAHUN BERKENAAN	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai	11
Dengan Triwulan II dan Renstra Perangkat Daerah	
2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	29
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
DAERAH	30
 BAB IV PENUTUP	 68

DAFTAR TABEL

			Hal
1	Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022 s/d Tahun 2023 Kabupaten Kendal	17
2	Tabel 2.2	Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Pada Perubahan Tahun 2024 Kabupaten Kendal	29
2	Tabel 3.1	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Patean Tahun 2024	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pembangunan merupakan upaya pemerintah Kabupaten Kendal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu serta berkelanjutan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai bagian dari perencanaan Pembangunan Nasional

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2024 disusun sebagai penyempurnaan target anggaran yang belum terealisasi pada tahun berjalan serta efektifitas dan efisiensi anggaran sesuai kebutuhan dan menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perangkat Daerah (PD), sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan akhir RKPD. Renstra PD juga menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja PD, selaras dengan Renstra PD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra PD. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja PD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja PD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD. Pembuatan RKPD, sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang No.25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap PD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) PD, yang disusun dengan berpedoman Renstra PD dan mengacu kepada RKPD Kabupaten, sedangkan, RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon

anggaran sementara (PPAS) Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Patean Tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan Pembangunan melalui penyelenggaraan Musernbang Tahunan yang dilaksanakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja PD. Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Patean sebagai satuan kerja Perangkat Daerah, pada Tahun 2024 ini menyusun Rencana Kerja Perubahan, Renja PD Perubahan ini merupakan dokumen penyempurnaan rencana Pembangunan PD tahun 2024 berjalan guna merealisasikan kegiatan yang belum teranggarkan pada RKPD awal sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai PD, sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Rencana kerja Perubahan Kecamatan Patean Tahun 2024 disusun karena untuk memenuhi capaian kinerja yang belum terealisasi pada RKPD awal sehingga perlu memasukkan anggaran kegiatan tersebut pada RKPD Perubahan di tahun berjalan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kendal periode 2021-2026, menetapkan visi yang akan menjadi arah penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan dalam 5 (lima) Tahun ke depan adalah "Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan" Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Kendal dan dalam rangka mendukung visi dan misi Kabupaten Kendal maka setiap OPD harus menjalankan visi dan misi Kepala Daerahnya adapun misi yang harus dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Patean adalah Misi Kelima yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

2.1 LANDASAN HUKUM

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal

- Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 20).

3.1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud: menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan pembangunan daerah serta sebagai acuan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) adalah untuk:

- Sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
- Sebagai landasan penyusunan perubahan RKA dan DPPA pada perubahan APBD Tahun 2024
- Sebagai instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan kegiatan Perangkat Daerah

4.1 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Patean Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Mengemukakan pengertian pendahuluan, memuat latar belakang ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/ Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. (disesuaikan dengan perbup Perubahan RKPD tahun 2024)

Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Berisi uraian tentang evaluasi renja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan yang memuat uraian tentang hasil evaluasi renja pada triwulan II tahun 2024 yang terdiri dari program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja, yg telah memenuhi target kinerja, yang melebihi target kinerja. factor-faktor penyebab tidak tercapainya/terpenuhinya/ melebihi target kinerja, implikasi yang timbul terhadap capaian Renstra PD dan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor penyebab tersebut. dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian tentang rencana kerja dan pendanaan pada tahun 2024

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannyamaupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan. Dan Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Capaian Indeks Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Patean pada triwulan II
Indeks Kinerja Utama Kecamatan Patean adalah tercapainya **target** nilai **IKM dengan Skor : 88** dan nilai **SAKIP dengan skor : 73**.

Nilai IKM semester I yang dilaksanakan pada bulan Juni 2024 dengan skor nilai IKM **91,12** dengan kriteria **mutu pelayanan sangat baik**, terdapat nilai lebih dari yang ditargetkan 73 capaian 91,12 prosentase capaian 124,8% yang melebihi dari target yang ditetapkan ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat puas dengan kinerja pelayanan di Kecamatan Patean dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kecamatan Patean sangat tinggi

Faktor yang mendukung tercapainya IKM adalah karena kerjasama antara pemegang program dengan pimpinan terjalin komunikasi kerja sama yang baik dengan dukungan lintas sektoral maupun aparatur pemerintahan di desa dan lingkungan yang kondusif serta kepercayaan masyarakat yang tinggi, keramahan petugas dalam melayani masyarakat sangat baik sehingga kegiatan berjalan dengan baik dan lancar.

Adapun Target nilai SAKIP adalah 73 Capaian masih 0 %

Ini disebabkan belum terlaksananya penyusunan SAKIP yang masih dalam proses evaluasi oleh Inspektoral Wilayah Kabupaten Kendal.

Penetapan anggaran RKPD 2024 Kecamatan Patean sebesar Rp. 2.646.788.464,-

Penggunaan anggaran s/d Tiwulan II : Rp. 1.110.352.817,- (41,95 %)

Belum Terealisasi tahun berkenaan : Rp. 1.536.435.647,- (58,05%)

Namun ada beberapa kegiatan yang perlu dilakukan perubahan guna efisiensi anggaran dan penambahan volume kegiatan, antara lain pada sub kegiatan :

- Pembayaran gaji pegawai (pengurangan volume anggaran)
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan,
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi PD,

- Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan
- Peningkatan wawasan kebangsaan terhadap masyarakat dalam upaya penguatan kebangsaan sebagai wujud persatuan dan kesatuan bangsa serta pengamalan pancasila dan UUD 1945.(penambahan volume kegiatan)
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Penyalahgunaan Aset Desa

Pada tahun 2024 Kecamatan Patean ada 6 Program pokok kegiatan yang harus dipenuhi dalam pencapaian target

Prosentase penggunaan anggaran per program dari total pagu anggaran tahun 2024 sejumlah **Rp 2.646.788.464,-** pada Triwulan ke II sudah terealisasi **41,95%** dengan rincian sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota dari pagu anggaran Rp. 2.395.639.454 realisasi 40,64%
- Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik dari pagu anggaran Rp. 20.278.000 realisasi 50,69%
- Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan dari pagu anggaran Rp.53.767.010 realisasi 58,47%
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban dari pagu anggaran Rp. 109.826.000 realisasi 63,69%
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum dari pagu anggaran Rp. 11.052.000 realisasi 0,00% ini pada sub kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan Nasional dan pembinaan keutuhan NKRI yang belum terealisasi kegiatannya
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dari pagu anggaran Rp. 56.226.000 realisasi 44,51%

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;

Pada dasarnya semua kegiatan yang direncanakan pada semester satu sudah terlaksana adapun yang belum terealisasi dikarenakan jadwal pelaksanaannya pada semester dua atau triwuwan 3 dan 4 namun masih ada beberapa kegiatan yang perlu direvisi ulang dalam RKA perubahan yaitu kurang atau lebihnya dalam volume kegiatan yang menyebabkan berkurang atau bertambahnya anggaran. Kegiatan yang **belum terealisasi** antara lain sebagai berikut :

SEKRETARIAT

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD Capaian 0%
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Capaian 0%
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Capaian 0%

SEKSI PELAYANAN UMUM

Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik

- Pelaksanaan urusan Pemerintah yang terkait dengan Non Perizinan Capaian 0%
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan capaian 0%

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan

- Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah kecamatan capaian 0%

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI capaian 0%
- Penanganan Konflik Sosial sesuai Peraturan Undang Undang capaian 0%

SEKSI PEMERINTAHAN

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa capaian 0%
- Fasilitasi Pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat desa 0%
- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif capaian 0%
- Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga capaian 0%

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/
keluaran yang direncanakan;

Kegiatan yang sudah terjadwal dalam perencanaan pada semester satu
sudah terealisasi antara lain :

PROGRAM DAN KEGIATAN	Capaian kinerja	Penggunaan anggaran
BELANJA DAERAH	50%	41,95%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	50%	40,64%
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	100%	36,54%
Administrasi Umum Perangkat daerah	88%	40,74%
Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	100%	42,72%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	43,73%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	83,3%	
Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50%	58,51%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75%	58,51%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	64,57%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	50%	50,69%
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	50%	58,47%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%	
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kec.	100%	

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	50%	63,69%
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kec	100%	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100%	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	50%	0%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	60%	44,51%
asilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	100%	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100%	
Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	100%	
asilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	100%	
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- realisasi program yang melebihi target kinerja antara lain pada indikator pembayaran gaji pegawai yang mana terjadi mutasi kerja dan pensiun pegawai sehingga berimbas pada kelebihan pagu anggaran pada sektor gaji pegawai. Maka perlunya perubahan renja guna efisiensi anggaran yang dapat digunakan pada kegiatan lainnya yang menjadi prioritas.

4. **Faktor-faktor penyebab** tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
- Pergeseran waktu Pelaksanaan Kegiatan menyesuaikan anggaran
 - Belum terealisasi sesuai dengan rencana tindak lanjut kegiatan
 - Kegiatan pada semester I (satu) sudah terlaksana
 - Pagu gaji melebihi karena Pegawai Mutasi tempat Kerja dan Pensiun
5. **Implikasi yang timbul** terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- Kelebihan atau kekurangan anggaran
 - Perlunya perubahan anggaran untuk efisiensi anggaran dan tepat sasaran sesuai kebutuhan
6. **Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil** untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- Membuat Rencana Kegiatan dan Rencana Kerja Anggaran
 - Mengusulkan Perubahan anggaran kepada Kepala Daerah melalui RKPD Perubahan tahun 2024
 - Rencana Pelaksanaan Kegiatan sesuai Dokumen Penetapan Anggaran
 - Tindak lanjut kegiatan sesuai perencanaan dan evaluasi kinerja

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN PATEAN

Lembar

Kode			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
			KECAMATAN PATEAN								
			UNSUR KEWILAYAHAN								
	01		KECAMATAN								
I	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100%					
				Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	80%	100%	50%	50%	100%	80%	100%
	7.01.01.2.01	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

				Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi yang tersusun	36	12	8	66,67%	12	36	100%
	7.01.01.2.01.0001	a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	5	3	60%	5	15	100%
		b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18	6	4	66,67%	6	18	100%
		c	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja yang dilaksanakan	2	0	0	0	1	1	50%
	1.01.01.2.02	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
				Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun		14					
	7.01.01.2.02.0001	a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	12	12	100%	13	12	85,71%
		b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	6	50%	12	12	100%
		c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	1	0	0,0	1	2	100%

		d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	6	4	2	50%	6	6	100%
		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	0	0	0	0	0
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
		a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	12	100%	12	12,0	100%
		b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21	12	12	100%	9	21	100%
		c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	6	3	50%	6	12	100%
		d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	12	100%	12	12	100%
		e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	10	83,33%	12	12	100%
		f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0	0	0

		g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	10	6	50%	10	10	83,33%
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		6	2	1	50%	2	6	100%
		a	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	0	0	0	2	2	100%
		b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	2	0	0	0	2	100%
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
		a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	6	50%	12	12	100%
		b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	6	50%	4	12	100%
		c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	6	50%	12	12	100%
		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
		a	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21	12	9	75%	9	21	100%
		b	Pemeliharaan/Rehabilita	Jumlah Gedung Kantor dan	7	7	7	100%	7	7	100%

		si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi							
II	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
			% Pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	80%	100%	50%	50%	100%	80%	100%
		1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
			jumlah koordinasi yang dilaksanakan	4	1	1	100	2	4	100%
		a	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	1	1	100%	1	1	100%
		b	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	1	1	100%	1	1	100,00
		2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							
		a	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0
		b	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di	0	0	0	0	0	0	0

			Wilayah Kecamatan	Wilayah Kecamatan							
		c	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	1	1	100%	1	1	100%
		3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
		a	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1	1	0	0	1	1	100%
		b	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1	1	1	100%	1	1	100%
		c	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	1	0	0 %	0	1	100%
III	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
				Prosentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	80%	100%	50%	50%	100%	80%	100%
		1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah koordinasi yang dilaksanakan							
		a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	10	10	10	100%	10	10	100,00

			Pembangunan di Desa	Pembangunan di Desa							
		b	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kec.	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kec	1	1	1	100%	1	1	100%
		c	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	1	1	100%	1	1	100%
IV	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
				Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	80%	20%	10%%	50%	60%	80%	100%
		1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	8	3	2	66,6%	5	8	100%
		a	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kec.	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kec	1	1	1	100%	1	1	100%
		b	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3	1	1	100%	2	3	100%
		2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah								

			dan Peraturan Kepala Daerah								
		a	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4	1	1	100%	3	4	100%
V	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								
				% kasus konflik sosial yang di tangani	80%	20%	0%	0%	60%	80%	100%
		1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan	12	3	3	100	6	12	100%
		a	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	jumlah desa yang dibina wawasan kebangsaan	14	14	0	0	14	14	100%

			Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI								
		b	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3	1	0	0	2	3	100%
		c	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	1	1	100%	3	4	100%
VI	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								
				% Desa Maju	50%	35%	35%	100%	35%	35%	71%
		1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes	14	14	14	100%	14	14	100%
		a	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4	1	1	100%	3	4	100%
		b	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4	1	1	100%	3	4	100%
		c	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4	1	0	0	3	4	100%

	d	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	4	1	1	100%	3	4	100%
	e	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4	1	1	100%	3	4	100%
	f	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	0	0	0	0	00
	g	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0	0	0	0	0	0	0
	h	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1	1	1	100%	1	1	100%
	i	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1	1	0	0	1	1	100%
	j	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah dokumen Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1	1	0	0	1	1	100%
	k	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	1	1	100%	1	1	100%

Dari data sebagaimana tabel 2.1 tersebut di atas, dapat disampaikan sebagai berikut :
Telaahan Target Renja Kecamatan Patean Tahun 2024 tahun berkenaan terhadap capaian Renstra RKPD dan Capaian renja Kegiatan sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Cakupan

- Kegiatan : **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:**
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah cakupan renstra 50% ini dikarenakan belum terealisasinya penyusunan evaluasi jangka menengah (Rentra) lima tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yang akan datang
 - Cakupan target Renstra Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sampai tahun **85,71%** ini dikarenakan adanya **pengurangan jumlah pegawai** yang pensiun dan mutasi kerja yang sampai saat ini belum ada SDM penggantinya dan ini perlunya perubahan anggaran pada kegiatan lainnya untuk efektifitas dan efisiensi anggaran yang dialihkan ke pos kegiatan lainnya
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD cakupan rensra 82,33% dikarenakan adanya pengurangan volume kegiatan karena penyesuaian anggaran
 - Cakupan Renja sampai dengan Triwulan ke II yang belum mencapai 100% dikarenakan pelaksanaannya tejadwalkan pada Triwulan III dan IV tahun berkenaan

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

- Capaian Renstra memenuhi target
- Capaian Renja Pada pelayanan publik ini sudah tercapai dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan dalam pelayanan yang baik cepat dan bermutu guna peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

3. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Cakupan Renstra sudah memenuhi target
- Cakupan Renja sampai dengan Triwulan II sudah memenuhi target namun masih ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan adalah kesiagaan bencana yang dapat muncul sewaktu waktu dan Kegiatan Harmonisasi kepada masyarakat serta memantau ketentraman dan ketertiban wilayah secara kontinew dalam upaya menjaga kondusifitas wilayah dan menjaga kesatuan persatuan bangsa dan budaya dan agama.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia perkiraan capaian Renstra **31%** ini dikarenakan belum terealisasi kegiatannya dan perlunya menambah volume kegiatan dan anggaran karena untuk mencakup 14 desa, dengan asumsi 1 desa 1 orang yang dibina dalam 1 tahun, ini masih kurang relevan, sehingga perlunya anggaran perubahan dan ini penting untuk pembinaan generasi muda dan masyarakat dan penggalangan kesatuan bangsa

- Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan capaian 0 % ini belum terlaksana dikarenakan situasional kondisi masyarakat apabila terjadi konflik sosial yang perlu penanganan.

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- cakupan **Renstra** memenuhi target
- cakupan Renja kegiatan sampai Triwulan II tahun berjalan baru terealisasi 50% dikarenakan masih ada 3 kegiatan yang belum dilaksanakan karena pelaksanaannya terjadwalkan pada Triwulan III dan IV
- Perlunya Pembinaan Fasilitasi penyusunan administrasi keuangan dan asset desa karena desa mampu sepenuhnya untuk melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan desa yang baik transparan dan akuntabel sehingga perlu penambahan volume kegiatan pada sub kegiatan pembinaan dan fasilitasi dalam penyusunan administrasi keuangan dan asset desa

6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

- Cakupan Renstra tepenuhi
- Cakupan Renja pada program ini sudah terpenuhi, hanya ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV dan guna mendukung Visi dan misi Kabupaten Kendal dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan ketersediaan lapangan pekerjaan diperlukan upaya motivasi, pembinaan, pelatihan, sosialisasi terhadap masyarakat dan generasi muda agar mempunyai kemampuan mandiri, beinovasi dalam persaingan global.

Dan dari semua kegiatan lainnya yang belum mencapai 100 % pada triwulan II dikarenakan realisasi kegiatannya dijadwalkan pada Triwulan III dan IV tahun berkenaan.

2.2 **PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Usulan program dan kegiatan masyarakat terdapat dalam musrenbang yang ditindak lanjuti oleh pemerintah Kabupaten Kendal. Dan realisasinya langsung ke Desa masing-masing

Usulan program/kegiatan dari masyarakat merupakan hasil aspirasi dalam forum musrenbang dengan memperhatikan tugas dan fungsi, rencana strategis masing-masing Perangkat Daerah serta isu – isu strategis yang sedang berkembang di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut bila ada dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun rancangan Renja Kecamatan Patean yang nantinya dibahas dalam forum Perangkat Daerah yang dikoordinasi oleh Baperlitbang. Tujuan dari pembahasan rancangan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program/kegiatan, tugas dan fungsi serta penajaman indikator dan target kinerja program/kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi khususnya di Kecamatan Patean.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap usulan aspirasi masyarakat pada Musrenbang tahun ini terdapat usulan - usulan program dan kegiatan yang dimintakan masyarakat sebagai aspirasi maupun koreksi kepada beberapa Perangkat Daerah terkait agar diperoleh kesepakatan dalam merencanakan program-program pembangunan yang sifatnya strategis dan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat di daerah sehingga program yang direncanakan dapat berdayaguna dan berhasil guna.

Tabel 2.2

**Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Pada Perubahan Tahun 2024
Kabupaten Kendal**

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Vol	Catatan
	NIHIL				

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya mewujudkan capaian cakupan kinerja Kecamatan dan efisiensi anggaran Patean perlu melakukan Perubahan Renja pada tahun berjalan karena untuk mengatasi kendala yang muncul pada pelaksanaan kegiatan dan ketersediaan anggaran pada RKPD, dengan adanya isu penting yang berkembang dan menjadi skala prioritas yang belum teranggarkan pada RKPD maka dapat diusulkan lewat rencana anggaran perubahan RKPD pada tahun berkenaan sehingga kegiatan tersebut dapat teranggarkan dan dilaksanakan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah. Dalam penggunaan pagu anggaran pada tahun berkenaan terdapat program kegiatan yang dimungkinkan terjadi lebih atau berkurangnya anggaran pada akhir tahun.

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota** pada
 - Sub Kegiatan **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** di APBD Rp. 1.970.351.098,- di RKPD perubahan menjadi Rp. 1.895.351.098,- ada selisih berkurang **Rp. 75.000.000,-** ini dikarenakan adanya pegawai yang pensiun dan mutasi kerja,
 - Sub Kegiatan : **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya** di APBD Rp. 44.000.000,- di RKPD Perubahan Rp. 43.900.000,- selisih berkurang **Rp. 100.000,-** berkurangnya anggaran ini dikarenakan efisiensi sesuai kebutuhan barang yang diadakan.
2. **Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
 - Sub Kegiatan : **Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa** di APBD Rp. 7.800.000,- di RKPD Perubahan Rp. 0,- ada selisih berkurang **Rp. 7.800.000,-** pengurangan anggaran pada kegiatan ini dikarenakan sudah adanya pembinaan dan peningkatan kualitas aparatur Desa melalui bintek oleh Dispermasdes sehingga di tingkat Kecamatan ditiadakan

Dari efisiensi pengurangan anggaran pada 3 sub kegiatan sebesar Rp 82.900.000,- tersebut maka **diperuntukkan pada kegiatan lainnya** guna menunjang capaian kinerja Kecamatan Patean antara lain pada :

1. **Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
 - Sub Kegiatan : **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan**

Pengawasan di APBD Rp. 56.226.000,- di RKPD Perubahan Rp. 86.486.000,- ada selisih lebih Rp. 30.260.000,- penambahan volume kegiatan ini karena pentingnya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa sebanyak 14 desa untuk mengantisipasi penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan yang berakibat merugikan negara ataupun pemerintah daerah

- Sub Kegiatan : **Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa** Di APBD Rp. 7.800.000 di RKPD Perubahan Rp. 45.860.000,- ada selisih lebih Rp. 38.060.000,- penambahan anggaran ini dikarenakan untuk meningkatkan kualitas SDM agar mampu mengelola keuangan dan aset secara baik dan benar sesuai peraturan daerah ataupun perundang-undangan.
- Sub Kegiatan : **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** di APBD Rp. 130.675.781,- di RKPD Perubahan Rp. 150.279.781 ada selisih lebih Rp. 19.604.000,- penambahan anggaran ini dikarenakan untuk meningkatkan sinergitas lintas sektoral dan vertikal dalam upaya kondusifitas wilayah dan tertib pelaporan dan optimalisasi capaian kinerja Kecamatan Patean.

2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

TABEL 3.1
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PATEAN TAHUN 2024

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHI R PERI ODE REN S TRA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN N 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN PATEAN								2.567.346.585,00	2.646.788.464,00	2.621.788.464,00	54.441.879,00						3.071.818.330,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.567.346.585,00	2.646.788.464,00	2.621.788.464,00	54.441.879,00							3.071.818.330,00	
	7.01	KECAMATAN							2.567.346.585,00	2.646.788.464,00	2.621.788.464,00	54.441.879,00							3.071.818.330,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah				100.00 %	100.00 %	2.277.846.585,00	2.395.639.454,00	2.340.379.454,00	322.471.745,00							2.600.318.330,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran yang tersusun				12 Dokumen	12 Dokumen	4.585.000,00	4.585.000,00	4.585.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim	ASN		11.400.000,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	2.085.000,00	2.085.000,00	2.085.000,00	0,00	Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim			5.700.000,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim			5.700.000,00	KECAMATAN PATEAN

																kan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim				
	7.01.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuanga n yang tersusun				14 bulan	14 bulan	1.890.994.010,00	1.975.351.098,00	1.900.351.098,00	9.357.088,00			-	Pembanguna n infrastrukt r yang berkualitas dan berkelanjuta n dengan memperhati kan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim Pembanguna n infrastrukt r yang berkualitas dan berkelanjuta n dengan memperhati kan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim	ASN		2.136.618.330,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.797.314.010,00	1.970.351.098,00	1.895.351.098,00	98.037.088,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-M-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim			2.035.938.330,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	88.680.000,00	0,00	0,00	-88.680.000,00	Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim			89.680.000,00	KECAMATAN PATEAN

																kan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim					
	7.01.01.2 .02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJANA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Kendal , Patean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim			5.500.000,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Kendal , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim			5.500.000,00	KECAMATAN PATEAN

	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas harian dan emblem/ID card yang tersedia				21 stel	21 stel	9.750.000,00	0,00	0,00	-9.750.000,00			-	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim	ASN		10.000.000,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				18 Paket	0 Paket	9.750.000,00	0,00	0,00	-9.750.000,00	Kab. Kendal , Patean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI / DAERAH (PAD)	-	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim			10.000.000,00	KECAMATAN PATEAN

	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor				100 Persen	100 Persen	155.100.000,00	186.475.781,00	206.315.781,00	51.215.781,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim	ASN		155.600.000,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Kendal , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim			4.500.000,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.800.000,00	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	Kab. Kendal , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN ASLI DAER AH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan <i>memperhatikan</i> kelestarian lingkungan dan perubahan iklim Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan <i>memperhatikan</i> kelestarian lingkungan dan perubahan iklim			22.000.000,00	KECAMATAN PATEAN
--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	---------------	---------------	---------------	------	---	---	--	--	--	--	---------------	---------------------

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGK AT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01 .206.0 003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralata n Rumah Tangga yang Disediak an				12 Paket	12 Paket	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDA PATAN ASLI DAER AH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	- -			5.000.000,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01.01 .206.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	36.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	-29.500.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDA PATAN ASLI DAER AH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim			42.100.000,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01.01 .206.0 005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.236.000,00	236.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim			20.000.000,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01.01.206.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0 Dokumen	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim			2.000.000,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01.01.206.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	68.000.000,00	130.675.781,00	150.279.781,00	82.279.781,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim			60.000.000,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah aset yang diadakan</i>				6 unit	6 unit	44.300.000,00	44.000.000,00	43.900.000,00	-400.000,00			-	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim	ASN		70.000.000,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01.01.2.07.005	Pengadaan Mebel																		

			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim			10.000.000,00	KECAMATAN PATEAN	
	7.01.01 .207.0 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	29.300.000,00	44.000.000,00	43.900.000,00	14.600.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim			60.000.000,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor				12 bulan	12 bulan	124.469.550,00	139.529.550,00	139.529.550,00	15.060.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim	ASN		141.700.000,00	KECAMATAN PATEAN

	7.01.01 .2.08.0 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	12 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kab. Kendal , Patean, Semua Kel/De sa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim	4.700.000,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01.01 .2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	36.629.550,00	39.629.550,00	39.629.550,00	3.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan , Semua Kel/D esa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim	47.000.000,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01.01 .2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	83.340.000,00	95.400.000,00	95.400.000,00	12.060.000,00	Kab. Kendal , Patean, Semua Kel/De sa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim			90.000.000,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kendaraan dinas yang dipelihara, dibayar pajaknya tepat waktu, jumlah unit peralatan kantor dan jumlah unit gedungkantor yang dipelihara				6 unit	6 unit	48.648.025,00	45.698.025,00	45.698.025,00	-2.950.000,00			-	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim	ASN		75.000.000,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				21 Unit	21 Unit	16.000.000,00	14.100.000,00	14.100.000,00	-1.900.000,00	Kab. Kendal , Patean, Semua Kel/De sa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim			20.000.000,00	KECAMATAN PATEAN
--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---	---	---	--	--	--	---------------	---------------------

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim			11.000.000,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	22.148.025,00	21.098.025,00	21.098.025,00	-1.050.000,00	Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim			44.000.000,00	KECAMATAN PATEAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan pelayanan kewenangan kecamatan				100 %	100 %	28.200.000,00	20.278.000,00	20.278.000,00	46.300.000,00							74.500.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan				1 Laporan	1 Laporan	2.200.000,00	3.252.000,00	3.252.000,00	1.052.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim			17.000.000,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01.02.2.01.0	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		

	001																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	1.100.000,00	1.626.000,00	1.626.000,00	526.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim			7.000.000,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01.02.2.01.002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00	1.626.000,00	1.626.000,00	526.000,00	Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim			10.000.000,00	KECAMATAN PATEAN

	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan yang diadakan				1 dokumen	1 dokumen	8.000.000,00	1.626.000,00	1.626.000,00	-6.374.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim			29.500.000,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01.02.2.02.001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencana an Kegiatan Pelayanan kepada Masyaraka t di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Des a	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim			3.500.000,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01.02 .02.0 002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Des a	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			13.000.000,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01.02 .02.0 003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaa n Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	1.626.000,00	1.626.000,00	-6.374.000,00	Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Des a	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan	- -			13.000.000,00	KECAMATAN PATEAN

			<i>kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>												Publik					
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang diadakan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	-2.600.000,00			-	-	Masyarakat		28.000.000,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01.02.2.04.001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			<i>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	-2.600.000,00	Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01.02.2.04.002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan</i>				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01.02.2.04.003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.000.000,00	KECAMATAN PATEAN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase aspirasi masyarakat dalam musrenbang RKPD				90 %	90 %	75.000.000,00	53.767.010,00	53.767.010,00	18.000.000,00							93.000.000,00	

	7.01.03.201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan yang diadakan				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	53.767.010,00	53.767.010,00	-21.232.990,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Masyara kat		93.000.000,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01.03.201.001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 Lembaga Kemasyar ak atan	10 Lembaga K emasyar ak atan	15.000.000,00	10.460.000,00	10.460.000,00	-4.540.000,00	Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			16.000.000,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01.03.201.002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	15.214.000,00	15.214.000,00	-4.786.000,00	Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			22.000.000,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01.03.201.003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	28.093.010,00	28.093.010,00	-11.906.990,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			55.000.000,00	KECAMATAN PATEAN
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBA	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban				100 %	100 %	103.800.000,00	109.826.000,00	109.826.000,00	29.200.000,00							133.000.000,00	

		N UMUM	yang ditangani																	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah Laporan koordinasi yang dilaksanakan				1 Laporan	1 Laporan	13.000.000,00	6.626.000,00	6.626.000,00	-6.374.000,00			-	-	Masyarakat		23.000.000,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01.04.2.01.001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01.04.2.01.002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	1.626.000,00	1.626.000,00	-3.374.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		13.000.000,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	jumlah Laporan koordinasi yang dilaksanakan				1 Laporan	1 Laporan	90.800.000,00	103.200.000,00	103.200.000,00	12.400.000,00			-	-	Masyarakat		110.000.000,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01.04.2.02.001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		

			Jumlah Laporan Koordinasi/Sin ergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	90.800.000,00	103.200.000,00	103.200.000,00	12.400.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			110.000.000,00	KECAMATAN PATEAN
--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	---------------	----------------	----------------	---------------	---	--	---	---	--	--	----------------	---------------------

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENG GARAAN URUSAN PEMERINTA HAN UMUM	Prosentase kasus konflik sosial yang ditangani				100 %	100 %	17.500.000,00	11.052.000,00	11.052.000,00	7.500.000,00							25.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelengga raan Urusan Pemerintaha n Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kegiatan yang diadakan				14 Orang	14 Orang	17.500.000,00	11.052.000,00	11.052.000,00	-6.448.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Masyara kat		25.000.000,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01.05.2.01.001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian				14 Orang	14 Orang	8.000.000,00	1.626.000,00	1.626.000,00	-6.374.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			12.000.000,00	KECAMATAN PATEAN

			Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																	
	7.01.05 .201.0 005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.626.000,00	1.626.000,00	126.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			3.000.000,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01.05 .201.0 008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	-200.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim			10.000.000,00	KECAMATAN PATEAN
6.	7.01.0 6	PROGRAM PEMBINAA N DAN PENGAWA SAN PEMERINT	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu				100 %	100 %	65.000.000,00	56.226.000,00	86.486.000,00	81.000.000,00							146.000.000,00	

		AHAN DESA																		
	7.01.06 .2.01	Fasilitasi, Rekomenda si dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah an Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam kegiatan yang diadakan				14 Dokumen	14 Dokumen	65.000.000,00	56.226.000,00	86.486.000,00	21.486.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Masyara kat		146.000.000,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01.06 .2.01.0 001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	-200.000,00	Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			13.000.000,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01.06 .2.01.0 002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitas i dalam rangka Administr asi Tata Pemerint ahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	-200.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			13.000.000,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01.06 .2.01.0 003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		

			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	7.800.000,00	45.860.000,00	37.860.000,00	Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim			13.000.000,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01.06.2.01.004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim			12.000.000,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01.06.2.01.005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPO SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaa n Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	-200.000,00	Kab. Kendal , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim			13.000.000,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01. 06.2. 01.00 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentia n Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	7.800.000,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Kendal , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan			15.000.000,00	KECAMATAN PATEAN

																perubahan iklim				
	7.01. 06.2. 01.00 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	-200.000,00	Kab. Kendal , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim			13.000.000,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01. 06.2. 01.00 13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		

			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	-200.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim			15.000.000,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga																		
			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim			10.000.000,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		

			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	1.626.000,00	1.626.000,00	-6.374.000,00	Kab. Kendal , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim			8.000.000,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim			10.000.000,00	KECAMATAN PATEAN
	7.01. 06.2. 01.00 18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																		

			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kend al, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim			11.000.000,00	KECAMATAN PATEAN
	J U M L A H								2.567.346.585,00	2.646.788.464,00	2.621.788.464,00	54.441.879,00							3.071.818.330,00	

BAB IV

PENUTUP

Renja Perubahan Kecamatan Patean Tahun 2024 ini disusun untuk menyelaraskan anggaran dan kegiatan sesuai kebutuhan OPD dengan efisiensi dan tepat sasaran, Renja ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya serta perubahan anggaran dan kegiatan. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Patean di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun berkenaan pada triwulan 3 dan 4, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada penyusunan Renja Kecamatan Patean Tahun 2024 bahwa penyusunan renja perubahan perlu mempertimbangkan isu-isu penting yang berkembang di wilayahnya dengan menyelaraskan kegiatan yang akan dilakukan. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Patean pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kendal, Penyusunan Renja Kecamatan Patean ini berpedoman pada Renstra Kecamatan Patean Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan output/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Patean, Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Patean ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Patean Kabupaten Kendal Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Renja Kecamatan Patean ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Patean Tahun 2024;
- Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kendal. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Kendal;
- Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Patean Tahun 2024.

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Patean Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan

dokumen Renja Kecamatan Patean Tahun 2024 untuk setiap triwulannya. Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Patean Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Patean, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Kendal.

Dengan disusunnya Renja Perubahan Kecamatan Patean Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Patean pada Tahun Anggaran 2024 pada semester II tahun berkenaan.

Kendal, 24 September 2024

CAMAT PATEAN,



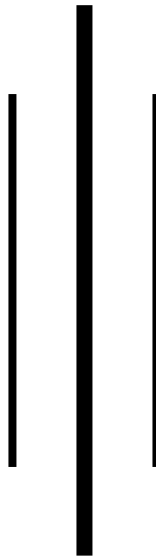
MUH SYAMSUDLUHA TANTOMI, S.Sos

Pembina, IV/a

NIP. 198000910 200903 1003



PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BOJA TAHUN 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN BOJA**

Jl. Pramuka No. 07 Boja, Telp./Fax. (0294)571002
Laman: kecboja.kendalkab.go.id, Pos-el : kecboja@gmail.com 51381

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya, maka Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Boja Tahun 2024 dapat terselesaikan. Penyusunan Perubahan Renja Kerja Kecamatan Boja ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021, bahwa setiap SKPD diharuskan menyusun Perubahan Rencana Kerja sebagai acuan perencanaan kegiatan kurun waktu satu tahun.

Penyusunan Perubahan Renja Kerja Perubahan Kecamatan Boja ini berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 serta Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Boja Tahun 2021 – 2026. Rencana Kerja sebagaimana dimaksud merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Boja Tahun 2024, setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2024 yang akan datang.

Dengan telah selesainya penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparat terkait di Kecamatan Boja, yang telah membantu dalam penyusunannya. Kami menyadari dalam penyusunan Perubahan Renja Kerja ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu mohon kritik dan saran untuk penyempurnaan Perubahan Renja Kerja di tahun yang akan datang.

Kendal, 30 September 2024

CAMAT BOJA,



SUNARTO, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19690617 199803 1006

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iii
 BAB 1 PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
 BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	 6
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan capaian Renstra Perangkat Daerah.....	 6
2.2 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	21
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 22
BAB IV PENUTUP	26

DAFTAR TABEL

1	Tabel 2.1	Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024.....	Hal 15
2	Tabel 2.2	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Kendal	21

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perubahan Renja Perangkat Daerah memuat perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan akhir RKPD Perubahan. Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan akhir RKPD Perubahan yang disusun ke dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun 2024, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Bupati RKPD Tahun 2024

Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 diperlukan dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2021-2026, sehingga terdapat konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran sebagai bagian dari evaluasi audit kinerja yang mulai dilaksanakan tahun 2023. Dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjalanan roda Pemerintah Daerah.

2. Landasan Hukum

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 20). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

3. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Boja Tahun 2024, dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan bagi perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan daerah jangka menengah dan jangka panjang.

Tujuan :

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Boja tahun 2024 adalah untuk merencanakan pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran–sasaran strategis, program–program pembangunan selama tahun 2024 yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kendal tahun 2021 – 2026.

4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan yang dipergunakan

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dan pendanaan Perangkat Daerah.

BAB IV. Penutup

Memuat uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil Renja Kecamatan Boja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan kedua secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan semua kegiatan dapat terlaksana dan memenuhi output yang diharapkan. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Boja ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Boja selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2024 Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

- ***Penetapan Indikator Kinerja***

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

- ***Capaian Analisis Kinerja***

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja, dan mengukur capaian Kinerja yang telah dicapai oleh kinerja Kecamatan

Untuk Tahun 2024 Rencana Kerja awal di Kecamatan Boja sebesar Rp. 2.980.653.347,- Adapun secara rinci evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Boja Tahun 2024 diuraikan secara singkat dengan hasil Kegiatan sebagai berikut ;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pencapaian kinerja program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja Kecamatan Boja secara keseluruhan terealisasi 41 % yang dijabarkan dalam kegiatan :

Kegiatan :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan pencapaian: sampai Triwulan II atau semester 1 dengan jumlah dana sebesar Rp 400.000,- dan anggaran yang terserap sebesar Rp 0,- atau terealisasi 0%, karena kegiatan dilaksanakan pada Semester II. Belum terlaksana karena menyesuaikan Rencana Anggaran Kasnya, dengan capaian Kinerja 0%
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp.1.399.422.547,- dan anggaran yang terserap Rp. 824.268.103,- atau terealisasi anggaran 41 %. dengan capaian Kinerja 100%
 - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana, pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.575.000,- dan anggaran yang terserap Rp. 0,- atau terealisasi 0 %. Akan dilaksanakan di Semester II, belum terlaksana karena anggaran tidak sesuai, dengan capaian Kinerja 0%
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 3.500.000,- dan anggaran yang terserap Rp. 1.728.000,- atau terealisasi 49%. Capaian sudah memenuhi target bulannya, dengan capaian Kinerja 100%
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 46.909.000 ,- dan anggaran yang terserap Rp. 20.024.000 ,- atau terealisasi 43 %. Capaian sudah memenuhi target bulannya, dengan capaian Kinerja 100%
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 4.000.000 ,- dan anggaran yang terserap Rp. 1.273.000 ,- atau terealisasi 32 %. Capaian sudah memenuhi target bulannya, dengan capaian Kinerja 100%

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.206.000 ,- dan anggaran yang terserap Rp. 0 ,- atau terealisasi 0 %, Belum dilaksanakan karena belum dibelanjakan dengan capaian Kinerja 0%
 - Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 21.318.300 ,- dan anggaran yang terserap Rp. 4.252.000 ,- atau terealisasi 20 %. Capaian sudah memenuhi target bulannya, dengan capaian Kinerja 100%
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 111.360.000 ,- dan anggaran yang terserap Rp. 35.469.000 ,- atau terealisasi 32 %. Capaian sudah memenuhi target bulannya, dengan capaian Kinerja 100%
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :
- Belanja Bahan Pakai Habis dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.550.000,- dan anggaran yang terserap Rp. 0 ,- atau terealisasi 0 %, karena kegiatan dilaksanakan pada Semester II. Belum dilaksanakan karena belum dibelanjakan, dengan capaian Kinerja 0%
 - Belanja Modal Alat Rumah Tangga, dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 500.000,- dan anggaran yang terserap Rp. 0 ,- atau terealisasi 0 %, karena kegiatan dilaksanakan pada Semester II. Belum dilaksanakan karena belum dibelanjakan, dengan capaian Kinerja 0%
- e. Kegiatan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 6.000.000 ,- dan anggaran yang terserap Rp. 4.000.000,- atau terealisasi 67 %. Capaian sudah memenuhi target bulannya, dengan capaian Kinerja 100%
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 52.125.000 ,- dan anggaran yang terserap 21.960.311,- atau terealisasi 42 %. Capaian sudah memenuhi target bulannya, dengan capaian Kinerja 100%

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 169.440.000,- dan anggaran yang terserap 61.613.575,- atau terealisasi 36%. Capaian sudah memenuhi target bulannya, dengan capaian Kinerja 100%
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :
- Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dengan pencapaian sampai Triwulan II dengan jumlah dana sebesar Rp. 38.090.000,- dan anggaran yang terserap 8.210.000,- atau terealisasi 52%. Capaian sudah memenuhi target bulannya, dengan capaian Kinerja 100%
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp24.000.000,- dan anggaran yang terserap Rp. 23.999.850,- atau terealisasi 100 %,,. Capaian sudah memenuhi, dengan capaian Kinerja 100%

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- Pencapaian kinerja program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah terselenggaranya kegiatan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan secara keseluruhan terealisasi 0 % yang dijabarkan dalam kegiatan :
- a. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat dengan sub kegiatan :
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 32.926.000 ,- dan anggaran yang terserap Rp. 0,- atau terealisasi 0%. Belum dilaksanakan karena belum dibelanjakan, dengan capaian Kinerja 0%

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- Pencapaian kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah terlaksananya Pemberdayaan di tingkat desa untuk menunjang pembangunan secara keseluruhan terealisasi 24% yang dijabarkan dalam kegiatan :
- a. Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sub kegiatan :
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 298.000,- dan anggaran yang terserap Rp. 298.000,- atau terealisasi anggaran 100%. dengan capaian Kinerja 100%

- Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 108.480.000,- dan anggaran yang terserap Rp. 25.000.000,- atau terealisasi 23 %. Capaian belum sesuai, karena masih ada kegiatan yang belum dilaksanakan, dengan capaian Kinerja 100%
 - Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 8.821.000,- dan anggaran yang terserap Rp. 3.400.000,- atau terealisasi 39%. Capaian belum sesuai, karena masih ada kegiatan yang belum dilaksanakan, dengan capaian Kinerja 100%
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Pencapaian kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah Koordinasi berkaitan dengan Pengamanan Wilayah di Kecamatan terealisasi 0 %, yang dijabarkan dalam kegiatan :
- a. Kegiatan Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum dengan sub kegiatan :
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 40.000,- dan anggaran yang terserap Rp. 0,- atau terealisasi 0%. Belum dilaksanakan karena belum dibelanjakan, dengan capaian Kinerja 0%
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Pencapaian kinerja kegiatan program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah terlaksananya kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif di tingkat desa secara keseluruhan terealisasi 0 %, yang dijabarkan dalam kegiatan :
- a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 2.750.000,- dan anggaran yang terserap Rp. 0 ,- atau terealisasi 0 %, karena kegiatan dilaksanakan pada Semester II. Belum dilaksanakan karena belum dibelanjakan, dengan capaian Kinerja 0%
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 0,- dan

anggaran yang terserap Rp. 0,- atau terealisasi 0%. Belum dilaksanakan karena belum dibelanjakan, dengan capaian Kinerja 0%

- Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.920.000,- dan anggaran yang terserap Rp. 0,- atau terealisasi 0 %, karena kegiatan dilaksanakan pada Semester II. Belum dilaksanakan karena belum dibelanjakan, dengan capaian Kinerja 0%

1. Realisasi Program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah ditetapkan, Program/kegiatan yang memenuhi dan/atau melebihi target kinerja hasil/keluaran yang telah ditetapkan adalah :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

- 1) Kegiatan Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang meliputi Sub kegiatan :

- a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tidak tercapai karena penyusunan laporan capaian kinerja dilaksanakan akhir tahun.

2. Realisasi Program/kegiatan yang memenuhi target dan/atau melebihi target kinerja hasil/keluaran yang telah ditetapkan Program/ kegiatan yang memenuhi dan/atau melebihi target kinerja hasil/keluaran yang telah ditetapkan adalah :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang meliputi sub kegiatan:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

3. Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah daerah yang meliputi sub kegiatan:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat

3. Realisasi Program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang telah ditetapkan Program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang telah ditetapkan nihil.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, tercapainya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan
 - a) Faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target kegiatan antara lain :
 - 1) Adanya Surat Edaran Pembatasan Dalam Penyusunan RKA seluruh Perangkat Daerah se- Kabupaten Kendal;
 - 2) Terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Bupati Kendal, sehingga anggaran harus digeser ;
 - b) Faktor yang mendukung tercapainya kegiatan karena adanya komitmen semua pihak untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, sebagai bagian untuk pencapaian perjanjian kinerja perangkat daerah.
 - c) Faktor yang menjadi penyebab melebihinya target kinerja program/ kegiatan adalah nihil
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
 - a) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah secara umum mencapai target yang telah ditetapkan, meskipun demikian guna meningkatkan pelayanan Kecamatan Boja, perlu ditingkatkan pelaksanaan kegiatan yang langsung mendukung smartcity, bersentuhan dengan kebutuhan layanan kepada masyarakat.
6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor penghambat adalah dengan perencanaan dan penganggaran yang mendukung percepatan Pelayanan Kecamatan Boja antara lain :
 - a) pengajuan penambahan kekurangan anggaran pada perubahan RKPD untuk kegiatan-kegiatan yang kurang anggaran pada penetapan anggaran;
 - b) pergeseran anggaran antar kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan perubahan kebijakan/ prioritas.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2024 Kecamatan Boja, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

❖ Analisis IKU Kecamatan Boja

Faktor pendukung tercapainya nilai SAKIP ada beberapa faktor yaitu :

- a. Komitmen Pimpinan Kunci Keberhasilan SAKIP
- b. Adanya koordinasi yang melibatkan semua kepala seksi, kepala subbagian dan aparaturnya Kecamatan dalam hal penataan administrasi perkantoran
- c. Manajemen kinerja dalam mendukung efektivitas

❖ Faktor penghambat tercapainya nilai SAKIP ada beberapa faktor yaitu :

- a. Keterbatasan peralatan dan fasilitas kantor pendukung pelaksanaan pekerjaan.
- b. Data dan dokumen pendukung perencanaan yang belum memadai.
- c. Regulasi tentang perencanaan yg selalu mengalami perubahan.

❖ Faktor pendukung tercapainya nilai IKM ada beberapa faktor yaitu :

- a. Komitmen Pimpinan Kunci Keberhasilan tercapainya Nilai IKM
- b. Kecepatan dalam memproses permintaan atau penyelesaian layanan, serta efisiensi dalam penyampaian hasil.
- c. Kepastian bahwa layanan akan diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan konsistensi dalam penerapan layanan.

❖ Faktor penghambat tercapainya nilai IKM ada beberapa faktor yaitu :

- a. Keterbatasan peralatan dan fasilitas kantor pendukung pelaksanaan pekerjaan.
- b. Kurang informatif; informasi kurang tersebar luas kepada masyarakat
- c. Tanpa tindakan perbaikan yang jelas, masyarakat mungkin merasa bahwa survei tidak memberikan dampak yang nyata.

masih belum menampakkan kinerja yang maksimal hal ini dikarenakan ada beberapa faktor, kurangnya promosi dan sosialisasi

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Boja sampai dengan Semester I untuk nilai SAKIP dari target 72 realisasi 73,50 (102,08 %) dengan status capaian sangat tinggi, hal ini karena semua eviden SAKIP sudah dilaksanakan lengkap beserta data dukung dan hasil rekomendasi LHE AKIP sudah ditindak lanjuti dan dilaksanakan. Nilai IKM dari target 87,37 realisasi 93,08 (106,53 %) dengan status capaian sangat tinggi, hal ini karena pelayanan di Kecamatan Boja sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang dibuat, pelayanan cepat dan mudah, sehingga masyarakat merasa puas atas produk layanan yang ada di Kecamatan Boja.

Berdasarkan formulir Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Kecamatan Boja dari aplikasi Si-Eva bahwa Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah 50,50 (rendah), Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah 63,09 (sedang). Anggaran Tahun 2024 Kecamatan Boja sebesar Rp. 2.980.653.347,- (Dua milyar Sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) dan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 1.880.551.332,- (Satu milyar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) realisasi fisik sebesar 48,04 % (rendah), masih belum menampakkan kinerja yang maksimal hal ini dikarenakan ada beberapa faktor penghambat.

Ada Program/Kegiatan yang Realisasinya tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran sesuai yang direncanakan. Tapi ada juga yang memenuhi bahkan melebihi, seperti yang diuraikan dibawah ini sekaligus Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, kemudian Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah serta Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Boja sampai dengan Semester II Tahun 2024 dapat dilihat di tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)*
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN BOJA

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sampai TW II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
			KECAMATAN BOJA								
			UNSUR KEWILAYAHAN								
01			KECAMATAN								
7.01.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah		100	100	100	100	100	100
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah		100	100	100	100	100	100
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	14	14	14	100	14	6	4

				Tunjangan ASN							
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	12	100	12	0	4
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>							
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	0	0	0	0	0
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase hasil penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah</i>							
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	12	96,52	12	6	4
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	12	99,65	12	6	4
2			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	12	96,74	12	6	4
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	12	99,86	12	6	4

			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	12	99,46	12	6	4
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	12	100	12	0	0
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	94,46	12	6	4
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia</i>							
3			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	36	36	36	99,52	36	0	0
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	4	4	96,14	4	0	0
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	100	12	6	4
4			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12	12	12	81,77	12	6	4

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	100	12	6	4
5			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	12	12	93	12	6	4
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2	2	2	98,82	7	1	3
	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan		100	100	100	100	100	100
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			100	100	100	100	100	100
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1	1	1	83,5	1	0	0
	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			100	100	100	100	100	100
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								

			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14	14	14	100	14	6	100
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2	2	2	100	2	2	0
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	5	5	99,87	5	1	6.77
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1	1	1	100	0	0	0
			Peningkatan Kapasitas Lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	1	1	1	100	0	0	0
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	1	1	1	100	0	0	0
	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban		100	100	100	100	100	100

			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum</i>							
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	1	1	100	0	0	0
	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu		100	100	100	100	100	100
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan hasil koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa</i>							
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18	18	18	100	18	18	100
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	18	18	18	100	18	18	100
			Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa	18	18	18	100	18	18	100

				di wilayahnya							
--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--

2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan dari masyarakat pada umumnya tercantum dalam kegiatan Musrenbangcam, yaitu kegiatan untuk kepentingan umum, serta sarana prasarana pelayanan lainnya. Namun demikian kegiatan-kegiatan yang memerlukan anggaran yang cukup besar sangat bergantung pada kemampuan APBD Kabupaten Kendal.

Tabel 2.2
Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kabupaten Kendal
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Boja

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume (Rp)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
		NIHIL			

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah untuk menangani berbagai urusan otonomi daerah, dan sebagai penjabaran misi yang kelima seperti tersebut diatas, maka tujuan yang ditetapkan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 pada Kecamatan Boja yaitu “Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam perumusan hingga evaluasi kebijakan”. Tahun 2024 Renja Kerja Perubahan Kecamatan Boja memasang Plafond Anggaran sebesar Rp 3.108.093.347,00,- sehingga dapat dijabarkan dalam program dan Kegiatan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Anggaran Rp. 2.953.534.347,00

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp. 400.000,00, anggaran tetap, tidak ada Perubahan
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 2.408.445.047,00
 - a. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN dengan Pencapaian sampai dengan Triwulan II atau Semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 2.238.081.850,00 dan mengalami perubahan dalam APBDP 2024 disesuaikan/ ditambah menjadi Rp. 2.408.445.047,00
 - b. Penyediaan administrasi Pelaksanaan tugas ASN Rp.0,00, yang semula teranggarkan sebesar Rp.1.575.000 mengalami perubahan anggaran digeser karena tidak sesuai kebutuhan
3. Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah Rp. 207.364.300,00
 - a. Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor Rp. 3.500.000,00, anggaran tetap
 - b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor Rp. 46.909.000,00, anggaran tetap

- c. Penyediaan peralatan rumah tangga Rp. 4.000.000,00, anggaran tetap
- d. Penyediaan bahan logistik kantor Rp. 1.206.000,00,, dan mengalami perubahan dalam APBD 2024 dengan penambahan menjadi Rp. 3.206.000,00,
- e. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan Rp. 21.318.300,00 anggaran tetap
- f. Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD Rp. 111.360.000,00 dan mengalami perubahan dalam APBD 2024 dengan penambahan menjadi Rp. 128.431.000,00

4. Kegiatan Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 2.050.000,00 dan mengalami perubahan dalam APBD 2024 dengan penambahan menjadi Rp. 27.050.000,00

5. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah Rp. 217.125.000,00

- a. Penyediaan surat menyurat Rp. 6.000.000,00 anggaran tetap
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik Rp. 52.125.000,00 anggaran tetap
- c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Rp. 169.440.000,00 dan mengalami perubahan dalam APBD 2024 dengan pengurangan menjadi 159.000.000,00

6. Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah sebesar Rp. 93.150.000,00

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan operasional atau lapangan Rp. 38.090.000,00 dan mengalami perubahan dalam APBD 2024 dengan penambahan menjadi Rp. 45.150.000,00
- b. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Rp. 24.000.000,00 dan mengalami perubahan dalam APBD 2024 dengan penambahan menjadi Rp. Rp. 48.000.000,00

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Anggaran Rp. 32.960.000,00 untuk kegiatan :

- 1. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, dipergunakan untuk kegiatan :
 - a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non Usaha Rp. 32.960.000,00 dan mengalami perubahan dalam APBD 2024

dengan kegiatan ini dirubah karena tidak mungkin dilaksanakan sehingga dialihkan ke kegiatan lainnya menjadi Rp. 0,00

C. Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan, anggaran sebesar Rp. 117.599.000,00 dipergunakan untuk :

1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Rp. 117.599.000,00
 - a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan sebesar Rp. 298.000,00 anggaran tetap
 - b. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja dan Kecamatan Rp. 108.480.000,00 dan mengalami perubahan dalam APBD 2024 dengan penambahan menjadi Rp. 108.480.000,00
 - c. Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Rp. 8.821.000,00 anggaran tetap

D. Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum, anggaran sebesar Rp. 40.000,00 dipergunakan untuk :

1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Rp. 40.000,00
 - a. Sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan dianggarkan sebesar Rp. 40.000,00 anggaran tetap

E. Program pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa, anggaran sebesar Rp.36.920.000,00 dipergunakan untuk :

1. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Rp.36.920.000,00
 - a. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa sebesar Rp. 2.750.000,00 dan mengalami perubahan dalam APBD 2024 dengan penambahan menjadi Rp. 35.000.000,00 anggaran ini diperuntukkan untuk kegiatan Sosialisasi Dana BKK Dusun dan Kegiatan Apel SPJ Dana Desa, serta Kegiatan Monitoring Ke Desa-desa se Kecamatan Boja
 - b. Rekomendasi pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dianggarkan sebesar Rp. 1.920.000,00, Kegiatan ini dipergunakan untuk Pendampingan Pengangkatan Perangkat desa dan Pemberhentian Perangkat Desa

Jumlah Anggaran Rencana Kerja perubahan Kecamatan Boja Tahun 2024 sebesar Rp. 3.108.093.347,00 (*Tiga Milyar seratus delapan juta Sembilan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah*). Rincian Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat daerah terlampit pada tabel hasil print out SIPD RI dibawah ini :

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Boja Tahun Anggaran 2024, merupakan proyeksi program dan kegiatan serta kebutuhan anggaran yang direncanakan pada tahun 2024 yang akan datang. Dalam penyusunan perubahan Renja ini memasukkan seluruh program dan kegiatan yang diperlukan, disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Boja Tahun 2021 - 2026. Namun apabila dalam pelaksanaannya anggaran yang dialokasikan tidak mencukupi, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana kerja dan anggaran disesuaikan dengan anggaran yang ada berdasarkan skala prioritas.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Boja ini didasarkan pada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023, serta Rencana Strategis Kecamatan Boja Tahun 2021 – 2026. Renja sebagaimana dimaksud merupakan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Kecamatan Boja Tahun 2024, guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kendal.

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Boja Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan profesional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana strategis Kecamatan Boja Tahun 2021-2026 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Boja Tahun 2024 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan seksi.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan , sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil yang telah dilaksanakan.

3. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Boja 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan OPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kendal.
4. Dalam Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Boja Tahun 2024 berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya antara lain: RPJMD, Renstra Kabupaten RKPD Kabupaten, Renstra Kecamatan Boja.
5. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Boja Tahun 2024 harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan / kegiatan Kecamatan Boja tahun 2024 setelah adanya Perubahan Anggaran.

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan / kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodir di dalam kebijakan tersebut dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasyarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan,
2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara , terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggungjawab tentang penyelenggaraan pemerintahan. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan.
3. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks.

4. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan. Dalam sinegritas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD yang membawahi Perencanaan (Baperlitbang) agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.

Demikian untuk menjadikan maklum dan apabila dalam penyusunan Renja ini masih banyak kekurangan, kami mohon kritik dan saran untuk perbaikan di tahun yang akan datang.

Boja, 30 September 2024

CAMAT BOJA,



SUNARTO, S.Sos

Pembina Tk.I

NIP. 19690617 199803 1006



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan petunjuk- Nya kepada kita, maka Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal telah selesai disusun.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal tahun 2024 berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal tahun 2021-2026, yang di dalamnya terdapat beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal sesuai dengan Visi Bupati Kendal yaitu Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan. Kendal Handal yakni suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jateng yang mandiri, berprestasi, berdaya saing serta berwawasan lingkungan. Sementara Unggul adalah suatu kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, religi, berbudaya sehat jasmani dan rohani. Kendal Makmur yakni kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, dengan menumbuhkan, memfasilitasi dan melindungi pelaku ekonomi, industri rumah tangga dan sebagainya. Sedangkan Kendal Berkeadilan adalah suatu kondisi pembangunan yang merata, berimbang dan proporsional.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja OPD yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal disusun dengan tujuan sebagai pedoman penyusunan perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal di Triwulan IV tahun 2024 mulai dari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal 2024 sampai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal 2024.

Demikian, kami sampaikan terima kasih dan mohon kiranya untuk dukungan dalam mengimplementasikan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal.

Kendal, 2024

a.n BUPATI KENDAL

Sekretaris Daerah



Ir. SUGIONO, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19640928 199303 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isiiii

I. Pendahuluan 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum..... 5

1.3. Maksud dan Tujuan7

1.4. Sistematika Penulisan 8

II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan.....9

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Renstra Perangkat Daerah.....9

2.2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....44

III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....45

IV. Penutup163

Lampiran.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Mendasarkan ketentuan pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD ditetapkan.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 merupakan perubahan atas dokumen perencanaan tahunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal yang memuat program-program dan kegiatan urusan pemerintahan fungsi penunjang, sebagai bagian dari menunjang capaian Visi dan Misi Kabupaten Kendal Tahun 2021 - 2026. Di dalam Perubahan Renja ini memuat permasalahan serta menyelaraskan target capaian kinerja yang belum diselesaikan dan penajaman strategi dalam rangka mewujudkan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal sampai akhir tahun anggaran 2024.

Perubahan RKPD Kabupaten Kendal telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024. Setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang kemudian disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja PD ini mengacu pada Rancangan Awal Perubahan RKPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode triwulan I dan II untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, menyelaraskan serta mendasarkan kegiatan prioritas yang masih dilaksanakan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 juga diatur tentang tatacara Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah yaitu dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah. Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud diatas meliputi perubahan :

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Target sasaran pembangunan daerah;
- c. Prioritas pembangunan daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah; dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 disusun dengan tahapan :

- a. Penyusunan rancangan perubahan RKPD;
- b. Perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
- c. Penetapan.

Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.

Rancangan akhir perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan bagian akhir dari penyusunan dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah yang harus diverifikasi guna memastikan bahwa

penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan awal perubahan RKPD. Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal berkewajiban menyusun Dokumen Perubahan Renja 2024 sebagai satu kesatuan dari sistem perencanaan pemerintah daerah, provinsi dan nasional. Rancangan akhir perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang termuat dalam RPJMD, serta menjadi dasar untuk penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.

Mempedomani Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2024.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan atau tahun 2024. Hasil evaluasi tersebut disampaikan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah melalui Kepala Baperlitbang atau Tim Penyusun Perubahan RKPD Kabupaten Kendal yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi yang menunjukkan perlu dilakukan perubahan dengan pertimbangan :

- 1) Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan.
- 2) Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar OPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan.

- 3) Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2023 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2024.
- 4) Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Perubahan RKPD Tahun 2024 ditetapkan dengan peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota yang kemudian menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS, Renstra PD dan Perubahan Renja PD untuk menyusun rancangan perubahan APBD Provinsi dan Kabupaten/ Kota tahun 2024.

Selanjutnya Perubahan Renja tahun 2024 dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Perangkat Daerah dan kemudian ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD Perubahan) Kabupaten Kendal.

Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kendal. Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Kendal. Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal ini diharapkan dapat benar-benar menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disesuaikan sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan Pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Dokumen Perubahan Renja juga menjadi instrumen untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib yang diampu oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal pada khususnya dan instrumen

untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah, target standar pelayanan minimal dan kinerja pelayanan OPD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Renja Perubahan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan,Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 adalah menjadi acuan bagi perangkat daerah, stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan dan untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun program, sub kegiatan dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- b. Memberikan acuan bagi OPD dalam menentukan lokasi sub kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- c. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun indikator kinerja sub kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

- d. Memberikan acuan bagi OPD dalam kelompok sasaran sub kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- e. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju sub kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

Bab II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi ulasan yang mencakup isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan, target capaian kinerja baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan serta sumber dana.

Bab IV Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Renstra Perangkat Daerah

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II.

Secara singkat hasil Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Triwulan II Tahun Anggaran 2024 secara umum selaras dengan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal 2024, namun terdapat beberapa sub kegiatan yang sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2024 belum dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran pada tahun bersangkutan. Untuk kegiatan-kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun 2024, diusulkan Kembali pada Renja Tahun 2025 nihil atau tidak ada.

Sedangkan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada penetapan tahun 2024 dan diusulkan pada Perubahan RKPD tahun 2024 antara lain :

1. Program Perekonomian dan Pembangunan
 - a. Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Pada prinsipnya kegiatan sudah berjalan agar lebih optimal perlu adanya penambahan anggaran yang diusulkan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai berikut:

- ❖ Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sejumlah Rp. 105.000.000,- yang diusulkan untuk Belanja Jasa Konsultan penyusunan Laporan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2024 dan proses pemilihan pengadaan barang/jasa
- ❖ Sub Kegiatan : Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik, sejumlah Rp. 20.000.000,- diperuntukkan untuk sosialisasi dan pendampingan pencatatan pada SPSE, E-Purchasing dan SIRUP
- ❖ Sub Kegiatan : Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, sejumlah Rp. 25.000.000 diperuntukkan untuk pendampingan pelaksanaan proyek strategis, monev pelaksanaan DAK dan pendampingan P3DN

b. Kegiatan : Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

- ❖ Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan sejumlah Rp. 75.000.000,- untuk melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan : Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Pada prinsipnya kegiatan sudah berjalan agar lebih optimal perlu adanya penambahan anggaran yang diusulkan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai berikut:

- ❖ Sub Kegiatan : Fasilitasi Keprotokolan sejumlah Rp. 130.000.000,- yang diusulkan untuk tambahan anggaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan dan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa
- ❖ Sub Kegiatan : Pendokumentasian Tugas Pimpinan sejumlah Rp 50.000.000,- yang diusulkan untuk tambahan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa guna memfasilitasi kegiatan pimpinan

Daerah.

b. Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- ❖ Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, sejumlah Rp. 10.000.000,- dengan indikator Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD . Dimana sub kegiatan ini direncanakan untuk mengakomodir penyelenggaraan kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal.

Anggaran pada Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD ini dialihkan untuk menambah alokasi anggaran yang lebih prioritas yaitu : Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang meliputi belanja peralatan komponen penunjang instalasi listrik serta untuk penerangan bangunan kantor di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal.

Pada prinsipnya kegiatan sudah berjalan agar lebih optimal perlu adanya penambahan anggaran yang diusulkan pada Perubahan RKPD Tahun 2024.

3. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

a. Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

- ❖ Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual sejumlah Rp. 200.000.000,- untuk fasilitasi kegiatan lomba MTQ tingkat nasional.
- ❖ Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait kesejahteraan masyarakat sejumlah Rp. 200.000.000,- untuk fasilitasi kegiatan silaturahmi Bupati dan masyarakat.

b. Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan

- ❖ Sub Kegiatan : Penataan Administrasi Pemerintahan sejumlah Rp. 291.084.952, - untuk memfasilitasi kegiatan

administrasi pemerintahan berupa pembinaan administrasi kantor di kecamatan dan kelurahan.

- ❖ Sub Kegiatan : Pengelolaan administrasi Kewilayahan sejumlah Rp. 400.482.600, - untuk memfasilitasi kegiatan verifikasi batas wilayah, pengumpulan rupa bumi, toponimi, dan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat.
- ❖ Sub Kegiatan : Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah sejumlah Rp. 509.507.000, - untuk memfasilitasi kegiatan LKPJ, LPPD, SPM dan IKK.

c. Kegiatan : Fasilitas Kerja Sama Daerah

- ❖ Sub Kegiatan : Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri sejumlah Rp. 245.394.000,- untuk memfasilitasi kegiatan MOU Pemerintah Kabupaten Kendal dengan instansi vertikal, daerah lain dan pihak ketiga.

Realisasi Program/ kegiatan/ sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang telah ditetapkan

Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang telah ditetapkan adalah :

1. Program Perekonomian dan Pembangunan

a. Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

- ❖ Sub kegiatan : Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik tercapai 81%, dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik terealisasi sejumlah 45 dokumen dari target 2024 sebanyak 55 dokumen
- ❖ Sub Kegiatan : Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada triwulan II tercapai 90,8%, jumlah orang yang mengikuti pembinaan pengadaan barang dan jasa sejumlah 79 orang dari target 2024 sejumlah 87 orang

b. Kegiatan : Pelaksanaan Adminisrasi Pembangunan

- ❖ Sub kegiatan : Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan tercapai 26,49%, dokumen Pengelolaan Evaluasi

dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan terealisasi sejumlah 4 dokumen dari target 2024 sebanyak 4 dokumen

b. Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

- ❖ Sub kegiatan : Pengendalian dan Distribusi Perekonomian tercapai sesuai target yaitu 9 dokumen dari target akhir tahun 2024 yaitu 19 dokumen. untuk pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten
- ❖ Sub kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD sudah tercapai sesuai target yaitu 4 dokumen dari target akhir tahun 2024 yaitu 8 dokumen. untuk pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan BLUD dan pembuatan Peraturan Daerah tentang perusahaan perseroan daerah.
- ❖ Sub Kegiatan : Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil sudah tercapai sesuai target yaitu 9 dokumen dari target akhir tahun 2024 yaitu 19 dokumen. untuk pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan termasuk pembinaan terhadap lembaga keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) di Kabupaten Kendal.

c. Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

- ❖ Sub Kegiatan : Kebijakan Pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan sudah tercapai sesuai target yaitu 1 dokumen dari target akhir tahun 2024 yaitu 1 dokumen untuk melaksanakan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dan tertib administrasi penggunaan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) oleh OPD pengampu di Kabupaten Kendal

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

a. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,

- ❖ Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

-Target kinerja hasil : 100%

- Realisasi kinerja hasil : 37,73%
- Target kinerja keluaran : 150 Orang/bulan
- Realisasi kinerja keluaran : 139 Orang/bulan
- ❖ Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Target kinerja hasil : 100%
 - Realisasi kinerja hasil : 37,73%
 - Target kinerja keluaran : 250 Dokumen
 - Realisasi kinerja keluaran : 104 Dokumen
- ❖ Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Target kinerja hasil : 100%
 - Realisasi kinerja hasil : 37,73%
 - Target kinerja keluaran : 2 Laporan
 - Realisasi kinerja keluaran : 0 Laporan
- b. Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah,
 - ❖ Sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Target kinerja hasil : 100%
 - Realisasi kinerja hasil : 0%
 - Target kinerja keluaran : 0 Laporan
 - Realisasi kinerja keluaran : 0 Laporan
- c. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,
 - ❖ Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Target kinerja hasil : 100%
 - Realisasi kinerja hasil : 0%

-Target kinerja keluaran : 2 Paket

-Realisasi kinerja keluaran : 0 Paket

d. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah,

❖ Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-Target kinerja hasil : 100%

-Realisasi kinerja hasil : 36,03%

-Target kinerja keluaran : 2 Paket

-Realisasi kinerja keluaran : 0 Paket

❖ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-Target kinerja hasil : 100%

-Realisasi kinerja hasil : 36,03%

-Target kinerja keluaran : 3 Paket

-Realisasi kinerja keluaran : 1 Paket

❖ Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

-Target kinerja hasil : 100%

-Realisasi kinerja hasil : 36,03%

-Target kinerja keluaran : 5 Paket

-Realisasi kinerja keluaran : 2 Paket

❖ Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

-Target kinerja hasil : 100%

-Realisasi kinerja hasil : 36,03%

-Target kinerja keluaran : 3 Paket

-Realisasi kinerja keluaran : 1 Paket

❖ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Target kinerja hasil : 100%
- Realisasi kinerja hasil : 36,03%
- Target kinerja keluaran : 84 Laporan
- Realisasi kinerja keluaran : 50 Laporan
- ❖ Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - Target kinerja hasil : 100%
 - Realisasi kinerja hasil : 36,03%
 - Target kinerja keluaran : 4 Dokumen
 - Realisasi kinerja keluaran : 2 Dokumen
- e. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - ❖ Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Target kinerja hasil : 100%
 - Realisasi kinerja hasil : 0%
 - Target kinerja keluaran : 1 Unit
 - Realisasi kinerja keluaran : 0 Unit
 - ❖ Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Target kinerja hasil : 100%
 - Realisasi kinerja hasil : 0%
 - Target kinerja keluaran : 2 Unit
 - Realisasi kinerja keluaran : 0 Unit
 - ❖ Sub Kegiatan Mebel
 - Target kinerja hasil : 100%
 - Realisasi kinerja hasil : 0%

- Target kinerja keluaran : 3 Unit
- Realisasi kinerja keluaran : 0 Unit
- ❖ Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Target kinerja hasil : 100%
 - Realisasi kinerja hasil : 22,67%
 - Target kinerja keluaran : 10 Unit
 - Realisasi kinerja keluaran : 0 Unit
- f. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - ❖ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Target kinerja hasil : 100%
 - Realisasi kinerja hasil : 50,00%
 - Target kinerja keluaran : 12 Laporan
 - Realisasi kinerja keluaran : 6 Laporan
 - ❖ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Target kinerja hasil : 100%
 - Realisasi kinerja hasil : 50,00%
 - Target kinerja keluaran : 12 Laporan
 - Realisasi kinerja keluaran : 6 Laporan
 - ❖ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Target kinerja hasil : 100%
 - Realisasi kinerja hasil : 50,00%
 - Target kinerja keluaran : 12 Laporan

-Realisasi kinerja keluaran : 6 Laporan

❖ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

-Target kinerja hasil : 100%

-Realisasi kinerja hasil : 50,00%

-Target kinerja keluaran : 12 Laporan

-Realisasi kinerja keluaran : 6 Laporan

g. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

❖ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

-Target kinerja hasil : 100%

-Realisasi kinerja hasil : 27,39%

-Target kinerja keluaran : 27 Unit

-Realisasi kinerja keluaran : 7 Unit

❖ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

-Target kinerja hasil : 100%

-Realisasi kinerja hasil : 27,39%

-Target kinerja keluaran : 131 Unit

-Realisasi kinerja keluaran : 26 Unit

❖ Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

-Target kinerja hasil : 100%

-Realisasi kinerja hasil : 27,39%

-Target kinerja keluaran : 400 Unit

-Realisasi kinerja keluaran : 141 Unit

❖ Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

-Target kinerja hasil : 100%

-Realisasi kinerja hasil : 27,39%

-Target kinerja keluaran : 2 Unit

-Realisasi kinerja keluaran : 0 Unit

❖ Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

-Target kinerja hasil : 100%

-Realisasi kinerja hasil : 27,39%

-Target kinerja keluaran : 2 Unit

-Realisasi kinerja keluaran : 1 Unit

❖ Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

-Target kinerja hasil : 100%

-Realisasi kinerja hasil : 27,39%

-Target kinerja keluaran : 3 Unit

-Realisasi kinerja keluaran : 1 Unit

h. Kegiatan : Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

❖ Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

-Target kinerja hasil : 100%

-Realisasi kinerja hasil : 58,33%

-Target kinerja keluaran : 6 Paket

-Realisasi kinerja keluaran : 2 Paket

❖ Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

-Target kinerja hasil : 100%

-Realisasi kinerja hasil : 58,33%

-Target kinerja keluaran : 5 Orang

-Realisasi kinerja keluaran : 4 Orang

❖ Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

-Target kinerja hasil : 100%

-Realisasi kinerja hasil : 58,33%

-Target kinerja keluaran : 10 Orang/Bulan

-Realisasi kinerja keluaran : 2 Orang/Bulan

i. Kegiatan : Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah,

❖ Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah

-Target kinerja hasil : 100%

-Realisasi kinerja hasil : 75,00%

-Target kinerja keluaran : 4 Paket

-Realisasi kinerja keluaran : 3 Paket

❖ Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah

-Target kinerja hasil : 100%

-Realisasi kinerja hasil : 75,00%

-Target kinerja keluaran : 4 Paket

-Realisasi kinerja keluaran : 3 Paket

❖ Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

- Target kinerja hasil : 100%
- Realisasi kinerja hasil : 75,00%
- Target kinerja keluaran : 4 Paket
- Realisasi kinerja keluaran : 3 Paket

3. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

a. Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan

- ❖ Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah untuk nilai LPPD tidak mencapai target karena adanya masa transisi dari manual ke sistem sehingga nilai LPPD Kabupaten/Kota di seluruh Jawa Tengah cenderung turun semua namun Kabupaten Kendal dan beberapa Kabupaten lain termasuk sudah memenuhi standart dalam nilai LPPD tingkat nasional dan lebih dari setengah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah belum memenuhi standart.

b. Kegiatan : Fasilitasi Perundang-undangan

- ❖ Sub kegiatan Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum dimana pada sub kegiatan tersebut terdapat honor narasumber untuk pengadilan yang masih dibawah indek sehingga diusulkan kembali pada perubahan anggaran 2024.
- ❖ Sub kegiatan Jumlah produk hukum daerah yang disusun belum tercapai dimana belum termasuk realisasi regulasi perubahan.

Realisasi Program/ kegiatan yang memenuhi target dan/atau melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang telah ditetapkan

Program / kegiatan yang memenuhi dan / atau melebihi target kinerja hasil / keluaran yang telah ditetapkan adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan : Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Realisasi pada TW II sebesar 100% dari target tahun 2024, dimana sejumlah kegiatan dan naskah sambutan dalam memfasilitasi pimpinan daerah sesuai dengan target yang ditetapkan

- ❖ Sub Kegiatan : Fasilitasi Keprotokolan pada TW II sebesar 100% telah tercapai dari target yang ditentukan yang terdiri dari 12 laporan dan sampai triwulan II sudah tercapai 6 laporan.
- ❖ Sub Kegiatan : Fasilitasi komunikasi Pimpinan pada TW II sebesar 100% telah tercapai dari target yang ditentukan yang terdiri dari 12 laporan dan sampai triwulan II sudah tercapai 6 laporan.
- ❖ Sub Kegiatan : Pendokumentasian Tugas Pimpinan pada TW II sebesar 100% telah tercapai dari target yang ditentukan yang terdiri dari 12 laporan dan sampai triwulan II sudah tercapai 6 laporan.

c. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- ❖ Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Target kinerja hasil : 100%
 - Realisasi kinerja hasil : 90,83%
 - Target kinerja keluaran : 4 Dokumen
 - Realisasi kinerja keluaran : 4 Dokumen
- ❖ Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Target kinerja hasil : 100%
 - Realisasi kinerja hasil : 90,83%
 - Target kinerja keluaran : 40 Orang
 - Realisasi kinerja keluaran : 69 Orang

d. Kegiatan : Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,

❖ Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

-Target kinerja hasil : 100%

-Realisasi kinerja hasil : 22,67%

-Target kinerja keluaran : 30 Unit

-Realisasi kinerja keluaran : 34 Unit

d. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

❖ Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

-Target kinerja hasil : 100%

-Realisasi kinerja hasil : 58,33%

-Target kinerja keluaran : 2 Orang/Bulan

-Realisasi kinerja keluaran : 2 Orang/Bulan

e. Kegiatan Penataan Organisasi

❖ Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Sub kegiatan ini digunakan untuk melaksanakan mandatori penyederhanaan birokrasi, syarat kompetensi jabatan atau manajerial maupun pelaksana, syarat formasi rekrutmen ASN menggunakan Anjab ABK dan kebijakan sistem kerja. Dari target 4 dokumen tersebut telah dapat direalisasikan 100%.

❖ Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Sub Kegiatan ini digunakan untuk fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik berupa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Penilaian Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik (PEKPP). Kepatuhan terhadap pelayanan publik dan kebijakan ketatalaksanaan Standart Pelayanan (SP), Standart Operasional Procedure (SOP), Peta Proses Bisnis (ProBis) dan kebijakan tata laksana lainnya.

❖ Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Sub Kegiatan ini digunakan untuk fasilitasi implementasi kinerja akuntabilitas dan kebijakan reformasi birokrasi seperti pelaporan LKJIP, Perjanjian Kinerja, Evaluasi RB dan Budaya Kerja.

2. Program Perekonomian dan Pembangunan

a. Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

- ❖ Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, realisasi triwulan II sebesar 364% dari target tahun 2024. Dokumen pengadaan barang dan jasa terdiri dari dokumen tender atau seleksi 64 dokumen dan paket pengadaan non tender sejumlah 300 dokumen, Hal tersebut melebihi dari target tahun 2024 sejumlah 103 dokumen.

a. Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

- ❖ Sub kegiatan : Pengendalian dan Distribusi Perekonomian tercapai sesuai target yaitu 9 dokumen dari target akhir tahun 2024 yaitu 19 dokumen. untuk pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten
- ❖ Sub kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD sudah tercapai sesuai target yaitu 4 dokumen dari target akhir tahun 2024 yaitu 8 dokumen. untuk pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan BLUD dan pembuatan Peraturan Daerah tentang perusahaan perseroan daerah.
- ❖ Sub Kegiatan : Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil sudah tercapai sesuai target yaitu 9 dokumen dari target akhir tahun 2024 yaitu 19 dokumen. untuk pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan termasuk pembinaan terhadap lembaga keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) di Kabupaten Kendal.

b. Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

- ❖ Sub Kegiatan : Kebijakan Pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan sudah tercapai sesuai target yaitu 1 dokumen dari target akhir tahun 2024 yaitu 1 dokumen untuk melaksanakan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dan tertib administrasi penggunaan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) oleh OPD pengampu di Kabupaten Kendal

3. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

a. Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

- ❖ Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual untuk realisasi sampai dengan triwulan II sudah tercapai sesuai target yaitu 2 dokumen dari target akhir 2024 yaitu 6 dokumen.
- ❖ Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan dan Evaluasi Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial realisasi sampai dengan triwulan II sudah tercapai sesuai target yaitu 2 dokumen dari target akhir 2024 yaitu 4 dokumen.
- ❖ Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan dan Evaluasi Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat realisasi sampai dengan triwulan II sudah tercapai sesuai target yaitu 2 dokumen dari target akhir 2024 yaitu 4 dokumen.

b. Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan

- ❖ Sub Kegiatan : Penataan Administrasi Pemerintahan Capaian Kinerja terkait Penataan Administrasi Pemerintahan realisasi sampai dengan triwulan II sudah tercapai sesuai target yaitu 50 dokumen dari target akhir 2024 yaitu 87 dokumen.
- ❖ Sub Kegiatan : Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Capaian Kinerja terkait Pengelolaan Administrasi Kewilayahan realisasi sampai dengan triwulan II sudah tercapai sesuai target yaitu 14 dokumen dari target akhir 2024 yaitu 28 dokumen.
- ❖ Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Capaian Kinerja terkait Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

realisasi sampai dengan triwulan II sudah tercapai sesuai target yaitu 14 dokumen dari target akhir 2024 yaitu 14 dokumen.

- ❖ Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Dalam NegeriCapaian Kinerja terkait Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah realisasi sampai dengan triwulan II sudah tercapai sesuai target yaitu 6 dokumen dari target akhir 2024 yaitu 12 dokumen.

c. Kegiatan : Fasilitasi Perundang-undangan

- ❖ Sub Kegiatan : Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasikan sudah mencapai target akhir 2024 yaitu sejumlah 1 dokumen pada triwulan I.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN)

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan								
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan								
		Persentase terpenuhinya administrasi pembangunan daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	9 Dokumen	100%
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan								
		Persentase terpenuhinya administrasi pembangunan daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	5 Laporan	100%
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan								
		Persentase terpenuhinya administrasi pembangunan daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								

		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	103 Dokumen	103 Dokumen	103 Dokumen	100%	103 Dokumen	103 Dokumen	100%
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik								
		Jumlah OPD yang difasilitasi pengadaan barang dan jasa	55 Dokumen	55 Dokumen	55 Dokumen	100%	55 Dokumen	55 Dokumen	100%
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa								
		Jumlah OPD yang difasilitasi pengadaan barang dan jasa	87 Orang	87 Orang	87 Orang	100%	87 Orang	87 Orang	100%
	-								
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi keuangan pada Sekretariat Daerah	158 Orang/ bulan	142 Orang/ bulan	142 Orang/ bulan	100%	150 Orang/ bulan	150 Orang/ bulan	100%
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi keuangan pada Sekretariat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								

		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi keuangan pada Sekretariat Daerah	250 Dokumen	250 Dokumen	250 Dokumen	100%	250 Dokumen	250 Dokumen	100%
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi keuangan pada Sekretariat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
		Persentase ketercapaian pelayanan umum administrasi Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi kepegawaian di Sekretariat Daerah	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi kepegawaian di Sekretariat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi kepegawaian di Sekretariat Daerah	40 Orang	40 Orang	40 Orang	100%	40 Orang	40 Orang	100%
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum di Sekretariat Daerah	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum di Sekretariat Daerah	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100%
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum di Sekretariat Daerah	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100%	5 Paket	5 Paket	100%
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum di Sekretariat Daerah	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100%
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum di Sekretariat Daerah	88 Laporan	80 Laporan	80 Laporan	100%	84 Laporan	84 Laporan	100%
4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum di Sekretariat Daerah	4 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								

		Persentase ketercapaian pelayanan umum pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah di Sekretariat Daerah	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Persentase ketercapaian pelayanan umum pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah di Sekretariat Daerah	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
		Persentase ketercapaian pelayanan umum pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah di Sekretariat Daerah	5 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Persentase ketercapaian pelayanan umum pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah di Sekretariat Daerah	40 Unit	30 Unit	30 Unit	100%	30 Unit	30 Unit	100%
4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Persentase ketercapaian pelayanan umum pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah di Sekretariat Daerah	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	10 Unit	100%
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Persentase ketercapaian pelayanan umum penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah di Sekretariat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Persentase ketercapaian pelayanan umum penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah di Sekretariat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Persentase ketercapaian pelayanan umum penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah di Sekretariat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Persentase ketercapaian pelayanan umum penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah di Sekretariat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaaa, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								

		Persentase ketercapaian pelayanan umum pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah di Sekretariat Daerah	30 Unit	25 Unit	25 Unit	100%	27 Unit	27 Unit	100%
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaaa, Biaya Pemeliharaan dan pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan								
		Persentase ketercapaian pelayanan umum pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah di Sekretariat Daerah	134 Unit	128 Unit	128 Unit	100%	131 Unit	131 Unit	100%
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Persentase ketercapaian pelayanan umum pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah di Sekretariat Daerah	400 Unit	400 Unit	400 Unit	100%	400 Unit	400 Unit	100%
4.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya								
		Persentase ketercapaian pelayanan umum pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah di Sekretariat Daerah	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Persentase ketercapaian pelayanan umum pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah di Sekretariat Daerah	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%

4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Persentase ketercapaian pelayanan umum pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah di Sekretariat Daerah	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	100%	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	100%
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6 Paket	6 Paket	6 Paket	100%	6 Paket	6 Paket	100%
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5 Orang	5 Orang	5 Orang	100%	5 Orang	5 Orang	100%
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10 Orang/Bulan	10 Orang/Bulan	10 Orang/Bulan	100%	10 Orang/Bulan	10 Orang/Bulan	100%
4.01.01.2.12	Fasilitasi								

	Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah								
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah								
		Persentase ketercapaian pelayanan umum kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	4 Paket	100%
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah								
		Persentase ketercapaian pelayanan umum kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	4 Paket	100%
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah								
		Persentase ketercapaian pelayanan umum kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	4 Paket	100%
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi								
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan								
		jumlah peranda yang difasiitasi	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana								
		jumlah peranda yang difasiitasi	161 Laporan	111 Laporan	111 Laporan	100%	112 Laporan	112 Laporan	100%
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi								
		jumlah peranda yang difasiitasi	160 Dokumen	150 Dokumen	150 Dokumen	100%	155 Dokumen	155 Dokumen	100%
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan								
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan								

		Jumlah kecamatan dan kelurahan yang difasilitasi	87 Dokumen	87 Dokumen	87 Dokumen	100%	87 Dokumen	87 Dokumen	100%
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan								
		Jumlah kecamatan dan kelurahan yang difasilitasi	28 Dokumen	28 Dokumen	28 Dokumen	100%	28 Dokumen	28 Dokumen	100%
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah								
		Jumlah kecamatan dan kelurahan yang difasilitasi	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	100%	14 Dokumen	14 Dokumen	100%
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah								
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri								
		Jumlah kerjasama antara daerah dan pihak ketiga, serta kerjasama di wilayah Kedungsepur	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum								
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah								
		Jumlah Raperda Yang di usulkan ke PROPEMPERDA	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum								
		Jumlah Raperda Yang di usulkan ke PROPEMPERDA	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	100%	3 Kasus	3 Kasus	100%
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum								
		Jumlah Raperda Yang di usulkan ke PROPEMPERDA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.01.022.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat								
4.01.022.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual								

		% fasilitasi kebijakan kesejahteraan Rakyat	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
4.01.022.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial								
		% fasilitasi kebijakan kesejahteraan Rakyat	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
4.01.022.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat								
		% fasilitasi kebijakan kesejahteraan Rakyat	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian								
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD								
		persentasi kebijakan dan evaluasi dalam pengembangan BUMD dan BLUD yang terfasilitasi	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian								
		persentasi kebijakan dan evaluasi dalam pengembangan BUMD dan BLUD yang terfasilitasi	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	100%	19 Laporan	19 Laporan	100%
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil								
		persentasi kebijakan dan evaluasi dalam pengembangan BUMD dan BLUD yang terfasilitasi	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	100%	19 Dokumen	19 Dokumen	100%
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam								
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan								
		jumlah dok kebijakan SDA yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan								
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan								
		persentase kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan								
		persentase kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan								
		persentase kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target Kinerja program / kegiatan

Hasil evaluasi kinerja dikalkulasi dengan indikator kinerja output melalui besaran serta capaian output yang telah terealisasi terhadap target yang telah ditentukan.

Untuk faktor-faktor pendukung tercapai dan tidaknya target program / kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal antara lain sebagai berikut dibawah ini :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target program/kegiatan :
 - Ketidaksesuaian antara rencana dan kebutuhan;
 - Keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, keuangan, fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung program/kegiatan;
 - Kurangnya koordinasi/sosialisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatan;
 - Perubahan kebijakan/regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan program/kegiatan.
2. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target program/kegiatan :
 - Perencanaan yang realistis dan terukur, didukung dengan data dan informasi yang akurat;
 - Sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, anggaran yang cukup dan fasilitas infrastruktur yang memadai;
 - Koordinasi dan kerjasama yang baik;
 - Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi atau tantangan yang muncul.
3. Faktor-faktor penyebab melebihi target program/kegiatan :
 - Penggunaan metode perencanaan yang inovatif dan strategi yang melebihi ekspektasi;
 - Memiliki tim yang sangat terampil, berdedikasi, dan berpengalaman yang dapat melebihi kinerja yang diharapkan serta anggaran yang lebih dari cukup;
 - Koordinasi dan komunikasi internal yang sangat baik juga didukung komunikasi yang efektif dengan pihak eksternal;
 - Kemampuan untuk mengadaptasi ide-ide baru dan metode yang meningkatkan efisiensi dan hasil

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi positif yang timbul dari target capaian program Renstra Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut yaitu :

1. Peningkatan Kinerja Organisasi
2. Kepuasan Masyarakat
3. Pengelolaan Anggaran yang Lebih Baik
4. Peningkatan Moral dan Motivasi Tim
5. Peluang untuk Pengembangan Lebih Lanjut

Sedangkan implikasi negatif yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah yaitu :

1. Kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan, mempengaruhi kualitas dan hasil akhir dari program, serta menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat;
2. Penurunan Kepercayaan dan Kepuasan Publik;
3. Masalah dalam Pengelolaan Sumber Daya;
4. Mempengaruhi motivasi dan semangat kerja tim;
5. Peningkatan Kebutuhan Perbaikan dan Evaluasi.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut diatas adalah :

1. Perencanaan yang lebih baik, disertai evaluasi, studi kelayakan, analisis kebutuhan dan analisis risiko dan dampak;
2. Penganggaran yang efektif berbasis kinerja yang fleksibel dan transparan serta pengawasan dan pemantauan berkala;
3. Peningkatan kapasitas dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan staf terkait perencanaan dan penganggaran;
4. Komunikasi internal yang jelas dan terbuka antara semua unit dan pihak terkait;
5. Menyiapkan mekanisme untuk menangani masalah atau kendala dengan cepat dan efektif;

Adapun Rekapitulasi Capaian Kinerja Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 Periode sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2

CAPAIAN KINERJA RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KENDAL 2021-2026
PERIODE SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024		PROYEKSI TAHUN 2024		CATATAN ANALISIS
					TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
A	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) OPD								
1	Nilai Komponen pelaporan SAKIP	-	-	96.70%		101.00%	-	101.00%	
2	Nilai Penataan dan Penguatan Organisasi	-	-	85.71%	-	NA	-	NA	
3	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah			99.64%		115.56%		115.56%	
4	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan			96.12%		119.80%		119.80%	
5	Indek Tata Kelola PBJ			75.00%		67.24%		100,00%	

6	Prosentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)			83.33%		61.82%		100,00%	
7	IKM Pelayanan Persuratan			98.79%		117.36%		117.36%	
8	IKM Keprotokolan			98.79%		112.61%		112.61%	
9	IKM Bidang Kesejahteraan Rakyat			98.79%		109.96%		109.96%	
10	Nilai LPPD			99.99%		84.53%		100,00%	
11	Indek Reformasi Hukum			97.10%		71.01%		100,00%	
12	Prosentase Peningkatan Penerimaan Deviden			83.33%		-14.58%		100,00%	
13	Prosentase Penyerapan Anggaran Belanja Daerah			99.46%		40.58%		100,00%	
B	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) OPD								
1	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif			98.79%		112.61%		240.26	
2	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan			98.79%		109.96%		43.87	

2.2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal tidak mendapatkan usulan aspirasi dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD untuk tahun anggaran 2024

Adapun Tabel Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :

1. Program Perekonomian Dan Pembangunan

- a. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
 - 1) Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
 - 2) Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
 - 3) Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
- b. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
 - 1) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
 - 2) Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
 - 3) Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
- c. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
 - 1) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
- d. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - 1) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - 2) Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
 - 3) Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

- a. Administrasi Tata Pemerintahan
 - 1) Penataan Administrasi Pemerintahan
 - 2) Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
 - 3) Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
- b. Fasilitasi Kerjasama Daerah
 - 1) Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
- c. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 - 1) Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
 - 2) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
 - 3) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
- d. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
 - 1) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
 - 2) Fasilitasi Bantuan Hukum

- 3) Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penataan Organisasi
 - 1) Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - 2) Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
 - 3) Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- b. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - 1) Fasilitasi Keprotokolan
 - 2) Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
 - 3) Pendokumentasian Tugas Pimpinan
- c. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- d. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 6) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pengadaan Mebel
 - 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan"
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- j. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 2) "Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut
 - 3) Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah"
 - 4) Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- k. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 1) Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
 - 2) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
 - 3) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah

4) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

Pendanaan

Pendanaan Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 3.1 (terlampir)

Tabel 3.1
PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024				
							Keluaran Sub Kegiatan		Pagu Indikatif		Sumber dana
							sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	
1				2	3	4	5		6		7
				SEKRETARIAT DAERAH							
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH AN					67.172.122.356	73.556.907.281	
4	01			SEKRETARIAT DAERAH					67.172.122.356	73.556.907.281	
4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	- Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	100%	50.138.071.858	56.720.036.858	

4	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi keuangan pada Sekretariat Daerah	- Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	100%	20.447.781.801	20.817.781.801	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		150 org/bln	137 org/bln	20.361.588.801	20.708.818.801	
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dalam		12 dok	-	0	0	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		250 dok	250 dok	78.333.000	101.103.000	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2 lap	2 lap	7.860.000	7.860.000	

4	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum administrasi Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah	- Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	-	10.000.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 lap	-	10.000.000	0	
4	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi kepegawaian di Sekretariat Daerah	- Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	100%	1.033.525.000	589.845.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 paket	-	0	0	

				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		4 dok	4 dok	23.525.000	29.925.000	
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		40 org	120 org	1.010.000.000	559.920.000	
4	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum di Sekretariat Daerah	- Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	100%	6.175.239.007	7.275.302.849	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2 paket	2 paket	225.000.000	325.000.000	
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 paket	3 paket	299.979.800	299.979.800	

				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		5 paket	5 paket	914.862.000	988.462.000	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		3 paket	3 paket	277.529.000	264.901.000	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		84 lap	152 lap	4.368.418.207	5.262.769.049	
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		4 dok	4 dok	89.450.000	134.191.000	
4	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah di Sekretariat Daerah	- Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	100%	3.237.917.800	4.910.183.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		3 unit	-	0	0	
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		2 unit	-	0	0	
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		3 unit	-	0	0	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		30 unit	115 unit	2.826.051.800	4.526.503.800	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		10 unit	105 unit	411.866.000	383.680.000	

4	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah di Sekretariat Daerah	- Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	100%	5.246.413.500	5.426.413.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 lap	12 lap	167.260.000	167.260.000	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 lap	12 lap	3.100.000.000	3.100.000.000	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 lap	12 lap	152.500.000	332.500.000	
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 lap	12 lap	1.826.653.500	1.826.653.500	

4	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah di Sekretariat Daerah	- Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	100%	6.714.224.750	8.596.478.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		27 unit	26 unit	50.000.000	50.000.000	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		131 unit	158 unit	80.000.000	80.000.000	

				Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		400 unit	400 unit	2.659.565.000	2.841.819.000		
				Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		2 unit	2 unit	50.000.000	50.000.000		
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 unit	5 unit	1.131.193.750	2.180.193.750		
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 unit	3 unit	2.743.466.000	3.394.466.000		

4	01	01	2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	100%	1.825.100.000	2.481.161.158	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2 org/bln	2 org/bln	400.000.000	200.000.000	
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		6 paket	6 paket	325.100.000	325.100.000	
				Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		5 org	5 org	500.000.000	1.356.061.158	

				Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		10 org/bln	2 org/bln	600.000.000	600.000.000	
4	01	01	2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	- Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	100%	5.447.870.000	6.622.870.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		4 paket	4 paket	1.360.000.000	1.750.000.000	
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		4 paket	4 paket	840.000.000	1.125.000.000	
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		4 paket	4 paket	3.247.870.000	3.747.870.000	

4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Presentase OPD yang memiliki nilai SKM B Persentase OPD yang difasilitasi dalam implementasi RB	- Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	100%	1.487.221.295	1.347.221.295	
4	01	01	2.13	Penataan Organisasi	jumlah peranda yang difasiitasi	- Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57 OPD	57 OPD	1.487.221.295	1.347.221.295	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
				Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		4 Dok	4 Dok	328.527.000	328.527.000	
				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		155 Dok	155 Dok	830.167.295	690.167.295	
				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		112 lap	112 lap	328.527.000	328.527.000	

4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terpenuhinya fasilitas protokol dan komunikasi pimpinan daerah	- Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	100%	1.340.195.000	1.564.980.000	
4	01	01	2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	persentase kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan	- Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	100%	1.340.195.000	1.564.980.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
				Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 lap	12 lap		739.515.000	869.515.000	
				Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 lap	12 lap		372.840.000	372.840.000	
				Pendokument asian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 lap	12 lap		227.840.000	322.625.000	
4	01			PROGRAM PEMERINTAH AN DAN KESEJAHTERA AN RAKYAT	Persentase terselenggaran ya koordinasi di bidang kesejahteraan rakyat	- Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	100%	7.339.759.051	6.939.759.051	

4	01	02	2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	- Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	100%	7.339.759.051	6.939.759.051	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
				Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		6 dok	6 dok	3.470.849.000	3.870.849.000	
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas		4 dok	4 dok	2.300.956.451	1.767.953.600	

				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		4 dok	4 dok	1.567.953.600	1.300.956.451	
4	01			PROGRAM PEMERINTAH AN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase Kecamatan dan Kelurahan tertib administrasi	- Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	100%	1.259.433.552	1.282.074.552	

4	01	02	2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang difasilitasi	- Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 kec / kel	40 kec / kel	1.259.433.552	1.282.074.552	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
				Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen hasil penataan Administrasi Pemerintahan		87 dok	87 dok	208.250.952	291.084.952	
				Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan Administrasi Kewilayahan		28 dok	28 dok	400.482.600	400.482.600	
				Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan Otonomi Daerah		14 dok	14 dok	650.700.000	590.507.000	
4	01			PROGRAM PEMERINTAH AN DAN KESEJAHTERA AN RAKYAT	Persentase kerjasama yg terimplementa si secara efektif"	- Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	100%	300.000.000	245.394.000	

4	01	02	2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah kerjasama antara daerah dan pihak ketiga, serta kerjasama di wilayah Kedungsepur	- Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 dokumen	12 dokumen	300.000.000	245.394.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
				Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Kerja Sama dalam negeri		12 dok	12 dok	300.000.000	245.394.000	
4	01			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase raperda yang diusulkan ke propemperda	- Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	100%	682.941.600	682.941.600	
4	01	02	2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Raperda Yang di usulkan ke PROPEMPERDA	- Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 buah	6 buah	682.941.600	682.941.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang disusun		6 dok	6 dok	253.885.808	253.885.808	

				Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum		3 kasus	3 kasus	280.347.472	280.347.472	
				Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasikan		1 dok	1 dok	148.708.320	148.708.320	
4	01	03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase kenaikan deviden dari sektor BUMD	- Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	100%	1.649.500.000	1.649.499.925	
4	01	03	2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	persentasi kebijakan dan evaluasi dalam pengembangan BUMD dan BLUD yang terfasilitas	- Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	100%	1.072.801.817	1.072.801.742	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD		8 dok	8 dok	400.000.000	400.000.000	

				BLUD							
				Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah hasil laporan pengendalian dan distribusi perekonomian		19 lap	19 lap	500.000.000	500.000.000	
				Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil		19 dok	19 dok	172.801.817	172.801.742	
4	01	03	2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	jumlah dok kebijakan SDA yang disusun	- Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 dokumen	1 dokumen	576.698.183	576.698.183	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan	Jumlah rakor dan monev SDA		4 monev	4 monev	576.698.183	576.698.183	

				Perikanan							
4	01	03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kegiatan pembangunan yang tidak mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan	- Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	100%	2.065.000.000	2.065.000.000	
4	01	03	2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase terpenuhinya administrasi pembangunan daerah	- Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	100%	2.065.000.000	2.065.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
				Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah		9 dok	9 dok	850.000.000	850.000.000	
				Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan hasil Pengendalian dan Evaluasi Program pembangunan daerah		5 lap	5 lap	600.000.000	600.000.000	

				Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program pembangunan daerah		4 lap	4 lap	615.000.000	615.000.000	
4	01	03		PROGRAM PEREKONOMI AN DAN PEMBANGUN AN	Persentase Belanja Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP	- Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	100%	910.000.000	1.060.000.000	
4	01	03	2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah OPD yang difasilitasi pengadaan barang dan jasa	- Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 opd	30 opd	910.000.000	1.060.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa		103 dok	103 dok	590.000.000	695.000.000	
				Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik		55 dok	55 dok	160.000.000	180.000.000	

				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi barang dan jasa						
						87 org	87 org	160.000.000	185.000.000		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KENDAL TAHUN 2024																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STRA OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAH UN 2022	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJA OPD TAHU N 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKA SI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAH AN 2024				NASION AL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SEKRETARIAT DAERAH								61.110.32 2.073.00	66.416.90 7.281.00	73.556.90 7.281.00	12.446.585. 208.00						105.118.1 81.032.00	
	4	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN							61.110.32 2.073.00	66.416.90 7.281.00	73.556.90 7.281.00	12.446.585. 208.00							105.118.1 81.032.00	
	4.01	SEKRETAR IAT DAERAH							61.110.32 2.073.00	66.416.90 7.281.00	73.556.90 7.281.00	12.446.585. 208.00							105.118.1 81.032.00	
1	4.01.01	PROGRA M PENUNJA NG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah				100 %	100 %	47.600.08 7.870.00	53.010.27 3.153.00	59.632.23 8.153.00	32.961.469. 750.00							80.561.55 7.620.00	

		KABUPAT EN/KOTA																		
	4.01.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi keuangan pada Sekretariat Daerah				100 %	100 %	19.545.19 7.689.00	20.447.78 1.801.00	20.817.78 1.801.00	1.272.584.1 12.00			-	- -	-		23.169.000 .000.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.01.2. 02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				150 Oran g/ bula n	137 Oran g/ bula n	18.543.19 7.689.00	20.361.58 8.801.00	20.708.81 8.801.00	2.165.621.1 12.00	Kab. Kenda I, Semu a Keca matan / Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM DAU TAMBA HAN DUKUN GAN PENDA NAAN ATAS KEBIJAK AN PENGG	-	- -			21.225.000 .000.00	SEKRET ARIAT DAERAH

														AJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA						
	4.01.01.2. 02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Doku men	12 Doku men	900.000.0 00.00	0.00	0.00	- 900.000.000 .00	Kab. Kenda I, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	-			865.000.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.01.2. 02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				250 Dokumen	250 Dokumen	85.000.000.00	78.333.000.00	1.060.000.00	- 83.940.000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			90.000.000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				2 Laporan	2 Laporan	17.000.000.00	7.860.000.00	0.00	- 17.000.000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			17.000.000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase ketercapaian pelayanan umum administrasi Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah</i>				100 %	100 %	0.00	10.000.000.00	0.00	0.00			-	-	-		80.000.000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

	03.0005																			
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				0 Lapo ran	0 Lapo ran	0.00	10.000.00 0.00	0.00	0.00	Kab. Kenda l, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA TRANSF ER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000 .00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.01.2. 05	Administrasi Kepegawai an Perangkat Daerah	<i>Persentase ketercapaian pelayanan administrasi kepegawaian di Sekretariat Daerah</i>				100 %	100 %	271.500.0 00.00	1.033.525 .000.00	589.845.0 00.00	318.345.000 .00			-	-	-		760.000.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.01.2. 05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				2 Pake t	2 Pake t	161.500.0 00.00	0.00	0.00	- 161.500.000 .00	Kab. Kenda l, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA TRANSF ER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			250.000.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.01.2.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		

	05.0003																			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000.00	23.525.000.00	0.00	- 10.000.000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	40 Orang	100.000.000.00	1.010.000.000.00	110.940.000.00	10.940.000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum di Sekretariat Daerah				100 %	100 %	5.168.844.886.00	6.175.239.007.00	7.275.302.849.00	2.106.457.963.00			-	-	-		9.764.412.900.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

	06.0001																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Pake t	2 Pake t	225.000.0 00.00	225.000.0 00.00	0.00	- 225.000.000 .00	Kab. Kenda I, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	-			250.000.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.01.2. 06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan				3 Pake t	3 Pake t	250.000.0 00.00	299.979.8 00.00	0.00	- 250.000.000 .00	Kab. Kenda I, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	-			225.000.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.01.2. 06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Pake t	5 Pake t	600.000.0 00.00	914.862.0 00.00	104.730.9 20.00	- 495.269.080 .00	Kab. Kenda I, Semu a Keca matan	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I	-	-			600.000.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	75.000.000.00	89.450.000.00	0.00	- 75.000.000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			110.000.000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketercapaian pelayanan umum pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah di Sekretariat Daerah</i>				100 %	100 %	4.051.378.000.00	3.237.917.800.00	4.910.183.800.00	858.805.800.00			-	-	-		9.250.000.000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	797.030.000.00	0.00	0.00	- 797.030.000.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/D	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.500.000.000.00	SEKRETARIAT DAERAH

													esa							
	4.01.01.2. 07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				2 Unit	2 Unit	344.685.0 00.00	0.00	0.00	- 344.685.000 .00	Kab. Kenda I, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	-			500.000.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.01.2. 07.0005	Pengadaan Mebel																		
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				3 Unit	3 Unit	1.000.000 .000.00	0.00	0.00	- 1.000.000.0 00.00	Kab. Kenda I, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	-			400.000.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.01.2. 07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				30 Unit	30 Unit	1.509.663.000.00	2.826.051.800.00	0.00	- 1.509.663.000.00	Kab. Kendal, Kecamatan, Semu Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.850.000.000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				10 Unit	10 Unit	400.000.000.00	411.866.000.00	0.00	- 400.000.000.00	Kab. Kendal, Kecamatan, Semu Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			375.000.000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketercapaian pelayanan umum penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah di Sekretariat</i>				100 %	100 %	4.312.500.000.00	5.246.413.500.00	5.426.413.500.00	1.113.913.500.00			-	-	-		9.500.000.000.00	SEKRETARIAT DAERAH

			Daerah																	
	4.01.01.2. 08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Lapo ran	12 Lapo ran	160.000.0 00.00	167.260.0 00.00	17.960.00 0.00	- 142.040.000 .00	Kab. Kenda I, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	- -			170.000.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.01.2. 08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Lapo ran	12 Lapo ran	3.100.000 .000.00	3.100.000 .000.00	677.064.0 00.00	- 2.422.936.0 00.00	Kab. Kenda I, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	- -			3.450.000. 000.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.01.2. 08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Lapo ran	12 Lapo ran	152.500.0 00.00	152.500.0 00.00	47.000.00 0.00	- 105.500.000 .00	Kab. Kenda I, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	- -			155.000.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.01.2. 08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Lapo ran	12 Lapo ran	900.000.0 00.00	1.826.653 .500.00	396.082.5 15.00	- 503.917.485 .00	Kab. Kenda I, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	- -			975.000.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketercapaian pelayanan umum pemeliharaan barang penunjang urusan pemerintahan daerah di Sekretariat</i>				100 %	100 %	5.853.466 .000.00	6.714.224 .750.00	8.596.478 .750.00	2.743.012.7 50.00			-	- -	-		12.960.000 .000.00	SEKRET ARIAT DAERAH

			Daerah																	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				27 Unit	27 Unit	50.000.00 0.00	50.000.00 0.00	0.00	- 50.000.000.00	Kab. Kenda I, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			130.000.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				131 Unit	131 Unit	80.000.00 0.00	80.000.00 0.00	0.00	- 80.000.000.00	Kab. Kenda I, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			140.000.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.01.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

	09.0006																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				400 Unit	400 Unit	2.100.000.000.00	2.659.565.000.00	157.885.500.00	- 1.942.114.500.00	Kab. Kendal, Semud, Kecamatan, Semud, Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.500.000.000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	100.000.000.00	50.000.000.00	0.00	- 100.000.000.00	Kab. Kendal, Semud, Kecamatan, Semud, Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			110.000.000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang				2 Unit	2 Unit	1.000.000.000.00	1.131.193.750.00	0.00	- 1.000.000.000.00	Kab. Kendal, Semud, Kecamatan, Semud, Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			750.000.000.00	SEKRETARIAT DAERAH

			Dipelihara/Di rehabilitasi										, Semu a Kel/D esa	UMUM						
	4.01.01.2. 09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi				3 Unit	3 Unit	2.523.466 .000.00	2.743.466 .000.00	132.328.0 00.00	- 2.391.138.0 00.00	Kab. Kenda I, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	-			2.850.000. 000.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.01.2. 11	Administ rasi Keuangan dan Operasion al Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				100 %	100 %	1.625.000 .000.00	1.825.100 .000.00	2.481.161 .158.00	856.161.158 .00			-	-	-		2.710.000. 000.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.01.2. 11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		

			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				2 Oran g/Bu lan	2 Oran g/Bu lan	400.000.000.00	400.000.000.00	61.518.890.00	- 338.481.110.00	Kab. Kenda l, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			400.000.000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>				6 Paket	6 Paket	250.000.000.00	325.100.000.00	24.828.000.00	- 225.172.000.00	Kab. Kenda l, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			275.000.000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala</i>				5 Oran g	5 Oran g	375.000.000.00	500.000.000.00	0.00	- 375.000.000.00	Kab. Kenda l, Semu a Keca matan , Semu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGAJIAN BIDANG KESEHA	-	-			80.000.000.00	SEKRETARIAT DAERAH

			Daerah										a Kel/D esa	TAN						
	4.01.01.2. 11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				10 Oran g/B ulan	10 Oran g/B ulan	600.000.0 00.00	600.000.0 00.00	100.000.0 00.00	- 500.000.000 .00	Kab. Kenda I, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	- -			600.000.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.01.2. 12	Fasilitasi Kerumaht anggaan Sekretaria t Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum kerumahtang gaan Sekretariat Daerah				100 %	100 %	4.600.000 .000.00	5.447.870 .000.00	6.622.870 .000.00	2.022.870.0 00.00			-	- -	-		9.040.000. 000.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.01.2. 12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang				4 Pake t	4 Pake t	960.000.0 00.00	1.360.000 .000.00	293.744.0 00.00	- 666.256.000 .00	Kab. Kenda I, Semu a Keca matan	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I	-	- -			972.000.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH

			<i>Disediakan</i>										, Semu a Kel/D esa	UMUM						
	4.01.01.2. 12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>				4 Pake t	4 Pake t	640.000.0 00.00	840.000.0 00.00	191.576.0 00.00	- 448.424.000 .00	Kab. Kenda l, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	-			648.000.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.01.2. 12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</i>				4 Pake t	4 Pake t	3.000.000 .000.00	3.247.870 .000.00	351.384.7 59.00	- 2.648.615.2 41.00	Kab. Kenda l, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	-			2.900.000. 000.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.01.2. 13	Penataan Organisasi	<i>jumlah peranda yang</i>				57 OPD	57 OPD	987.221.2 95.00	1.487.221 .295.00	1.347.221 .295.00	360.000.000 .00			-	-	-		2.073.164. 720.00	SEKRET ARIAT

			<i>difasilitasi</i>																	DAERAH
	4.01.01.2. 13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</i>				4 Doku men	4 Doku men	328.527.0 00.00	328.527.0 00.00	9.503.100 .00	- 319.023.900 .00	Kab. Kenda I, Semu a Keca matan / Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			344.977.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.01.2. 13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>				161 Lapo ran	161 Lapo ran	330.167.2 95.00	830.167.2 95.00	3.055.000 .00	- 327.112.295 .00	Kab. Kenda I, Semu a Keca matan / Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			346.628.36 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.01.2. 13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		

			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</i>				160 Doku men	160 Doku men	328.527.0 00.00	328.527.0 00.00	7.867.850 .00	- 320.659.150 .00	Kab. Kenda I, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			344.977.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH
2	4.01.02	PROGRA M PEMERINT AHAN DAN KESEJAHT ERAAN RAKYAT	Persentase terselenggar anya koordinasi di bidang kesejahteraa n rakyat				100 %	100 %	9.585.734 .203.00	8.782.134 .203.00	9.150.169 .203.00	8.677.939.2 09.00							18.263.67 3.412.00	
	4.01.02.2. 02	Pelaksana an Kebijakan Kesejahter aan Rakyat	<i>Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraa n Rakyat</i>				100 %	100 %	7.339.759 .051.00	6.539.759 .051.00	6.939.759 .051.00	- 400.000.000 .00			-	-	-		14.713.513 .100.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.02.2. 02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual</i>				6 Doku men	6 Doku men	3.470.849 .000.00	3.670.849 .000.00	809.620.2 00.00	- 2.661.228.8 00.00	Kab. Kenda I, Semu a Keca matan , Semu	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.781.891. 757.00	SEKRET ARIAT DAERAH

													a Kel/D esa							
	4.01.02.2. 02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk				4 Dokumen	4 Dokumen	2.300.956 .451.00	1.300.956 .451.00	0.00	- 2.300.956.4 51.00	Kab. Kendal, Semarang Kecamatan , Semarang Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.103.513. 483.00	SEKRET ARIAT DAERAH

			dan KB																	
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				4 Dokumen	4 Dokumen	1.567.953.600.00	1.567.953.600.00	69.663.200.00	- 1.498.290.400.00	Kab. Kendal, Semarang, Kecamatan / Semarang/Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.471.351.310.00	SEKRETARIAT DAERAH

	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	<i>Jumlah Raperda Yang di usulkan ke PROPEMPER DA</i>				6 buah	6 buah	686.541.600.00	682.941.600.00	682.941.600.00	- 3.600.000.00			-	-	-		1.343.133.412.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			<i>Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum</i>				3 Kasus	3 Kasus	280.347.472.00	280.347.472.00	2.115.000.00	- 278.232.472.00	Kab. Kendal, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			397.264.812.00	SEKRETARIAT DAERAH
3	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase kenaikan deviden dari sektor BUMD				2.50 %	2.50 %	3.924.500.000.00	4.624.499.925.00	4.774.499.925.00	2.368.450.000.00							6.292.950.000.00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	<i>persentasi kebijakan dan evaluasi dalam pengembangan BUMD dan BLUD yang terfasilitasi</i>				100 %	100 %	1.072.801.817.00	1.072.801.742.00	1.072.801.742.00	-75.00			-	-	-		1.862.950.000.00	SEKRETARIAT DAERAH

	4.01.03.2. 01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				8 Doku men	8 Doku men	400.000.0 00.00	400.000.0 00.00	0.00	- 400.000.000 .00	Kab. Kenda I, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			340.000.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.03.2. 01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomia n				19 Lapo ran	19 Lapo ran	500.000.0 00.00	500.000.0 00.00	0.00	- 500.000.000 .00	Kab. Kenda I, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			271.475.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.03.2. 01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan				19 Doku men	19 Doku men	172.801.8 17.00	172.801.7 42.00	0.00	- 172.801.817 .00	Kab. Kenda I, Semu a Keca	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			320.000.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH

			<i>Ekonomi Mikro Kecil</i>										matan , Semu a Kel/D esa							
	4.01.03.2. 02	Pelaksana an Administ rasi Pembangu nan	<i>Persentase terpenuhinya administrasi pembanguna n daerah</i>				100 %	100 %	1.365.000 .000.00	2.065.000 .000.00	2.065.000 .000.00	700.000.000 .00			-	- -	-		2.320.000. 000.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.03.2. 02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembanguna n Daerah</i>				9 Doku men	9 Doku men	350.000.0 00.00	850.000.0 00.00	50.582.00 0.00	- 299.418.000 .00	Kab. Kenda l, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			350.000.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.03.2. 02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembanguna n</i>				5 Lapo ran	5 Lapo ran	500.000.0 00.00	600.000.0 00.00	49.096.00 0.00	- 450.904.000 .00	Kab. Kenda l, Semu a Keca matan ,	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			410.000.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH

													Semua Kel/D esa							
	4.01.03.2. 02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan</i>				4 Laporan	4 Laporan	515.000.0 00.00	615.000.0 00.00	61.360.40 0.00	- 453.639.600 .00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan , Semua Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			400.000.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.03.2. 03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	<i>Jumlah OPD yang difasilitasi pengadaan barang dan jasa</i>				30 OPD	30 OPD	910.000.0 00.00	910.000.0 00.00	1.060.000 .000.00	150.000.000 .00			Memperkuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	ASN dan Masyarakat		1.920.000. 000.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.03.2. 03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				103 Dokumen	103 Dokumen	590.000.000.00	590.000.000.00	101.285.000.00	- 488.715.000.00	Kab. Kendal, Semud, Kecamatan, Semud, Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			610.000.000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				55 Dokumen	55 Dokumen	160.000.000.00	160.000.000.00	7.360.000.00	- 152.640.000.00	Kab. Kendal, Semud, Kecamatan, Semud, Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			175.000.000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				87 Orang	87 Orang	160.000.000.00	160.000.000.00	11.920.000.00	- 148.080.000.00	Kab. Kendal, Semud, Kecamatan, Semud	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	-			175.000.000.00	SEKRETARIAT DAERAH

													a Kel/D esa		Pelayan an Publik						
	4.01.03.2. 04	Pemantau an Kebijakan Sumber Daya Alam	jumlah dok kebijakan SDA yang disusun				1 doku men	1 doku men	576.698.1 83.00	576.698.1 83.00	576.698.1 83.00	0.00			-	- -	-		190.000.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH	
	4.01.03.2. 04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan , Perindustrian , KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Doku men	1 Doku men	576.698.1 83.00	576.698.1 83.00	0.00	- 576.698.183 .00	Kab. Kenda I, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DBH CUKAI HASIL TEMBA KAU (CHT)	-	- -			95.000.000 .00	SEKRET ARIAT DAERAH	
		BAGIAN ORGANISASI							61.110.32 2.073.00	66.416.90 7.281.00	73.556.90 7.281.00	12.446.585. 208.00							105.118.1 81.032.00		

	4	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN							61.110.32 2.073.00	66.416.90 7.281.00	73.556.90 7.281.00	12.446.585. 208.00							105.118.1 81.032.00	
	4.01	SEKRETAR IAT DAERAH							61.110.32 2.073.00	66.416.90 7.281.00	73.556.90 7.281.00	12.446.585. 208.00							105.118.1 81.032.00	
1	4.01.01	PROGRA M PENUNJA NG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPAT EN/KOTA	-				-	-	47.600.08 7.870.00	53.010.27 3.153.00	59.632.23 8.153.00	32.961.469. 750.00							80.561.55 7.620.00	
	4.01.01.2. 13	Penataan Organisasi	-				-	-	987.221.2 95.00	1.487.221 .295.00	1.347.221 .295.00	360.000.000 .00			-	Peningk atan tata kelola pemer intahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni Peningk atan tata kelola pemer intahan	-		2.073.164. 720.00	SEKRET ARIAT DAERAH

																yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani				
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				-	4 Dokumen	0.00	0.00	319.023.900.00	319.023.900.00	Kab. Kendal, Semud, Kecamatan, Semud Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			344.977.000.00	SEKRETARIAT DAERAH

	4.01.01.2. 13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>				-	161 Lapo ran	0.00	0.00	687.112.2 95.00	687.112.295 .00	Kab. Kenda I, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningk atan tata kelola pemer intahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni Peningk atan tata kelola pemer intahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni			346.628.36 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.01.2. 13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		

			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				-	160 Doku men	0.00	0.00	320.659.1 50.00	320.659.150 .00	Kab. Kenda l, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningk atan tata kelola pemer intahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni			344.977.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH
		BAGIAN UMUM							61.110.32 2.073.00	66.416.90 7.281.00	73.556.90 7.281.00	12.446.585. 208.00							105.118.1 81.032.00	
	4	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN							61.110.32 2.073.00	66.416.90 7.281.00	73.556.90 7.281.00	12.446.585. 208.00							105.118.1 81.032.00	
	4.01	SEKRETAR IAT DAERAH							61.110.32 2.073.00	66.416.90 7.281.00	73.556.90 7.281.00	12.446.585. 208.00							105.118.1 81.032.00	

1	4.01.01	PROGRA M PENUNJA NG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPAT EN/KOTA	-				-	-	47.600.08 7.870.00	53.010.27 3.153.00	59.632.23 8.153.00	32.961.469. 750.00						80.561.55 7.620.00	
	4.01.01.2. 02	Administr asi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	19.545.19 7.689.00	20.447.78 1.801.00	20.817.78 1.801.00	1.272.584.1 12.00			-	Peningk atan tata kelola pemer intahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni Peningk atan tata kelola pemer intahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni	-	23.169.000 .000.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.01.2. 02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	

			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				-	0 Doku men	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kenda I, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	Peningk atan tata kelola pemer intahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni			865.000.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.01.2. 02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD				-	250 Doku men	0.00	0.00	100.043.0 00.00	100.043.000 .00	Kab. Kenda I, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	Peningk atan tata kelola pemer intahan yang efektif, efisien, akuntab el dan			90.000.000 .00	SEKRET ARIAT DAERAH

													esa			melaya ni Peningk atan tata kelola pemer ntahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni					
	4.01.01.2. 02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				-	2 Lapo ran	0.00	0.00	7.860.000 .00	7.860.000.0 0	Kab. Kenda l, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	Peningk atan tata kelola pemer ntahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni Peningk atan tata kelola pemer ntahan yang efektif, efisien,				17.000.000 .00	SEKRET ARIAT DAERAH

																akuntabel dan melayani				
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	0.00	10.000.000.00	0.00	0.00			-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	-		80.000.000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				-	0 Lapo ran	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kenda I, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	Peningk atan tata kelola pemer intahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni			40.000.000 .00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.01.2. 05	Administr asi Kepegawai an Perangkat Daerah	-				-	-	271.500.0 00.00	1.033.525 .000.00	589.845.0 00.00	318.345.000 .00			-	Peningk atan tata kelola pemer intahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni	-		760.000.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH

																atan tata kelola pemer ntahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni				
	4.01.01.2. 05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				-	0 Pake t	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kenda l, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	Peningk atan tata kelola pemer ntahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni Peningk atan tata kelola pemer ntahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya			250.000.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH

																ni				
	4.01.01.2. 05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				-	4 Doku men	0.00	0.00	29.925.00 0.00	29.925.000. 00	Kab. Kenda I, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	Peningk atan tata kelola pemer ntahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni Peningk atan tata kelola pemer ntahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni			30.000.000 .00	SEKRET ARIAT DAERAH

	4.01.01.2. 05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan</i>				-	120 Oran g	0.00	0.00	448.980.0 00.00	448.980.000 .00	Kab. Kenda I, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningk atan tata kelola pemer intahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni Peningk atan tata kelola pemer intahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni			100.000.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.01.2. 06	Administ rasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	5.168.844 .886.00	6.175.239 .007.00	7.275.302 .849.00	2.106.457.9 63.00			-	Peningk atan tata kelola pemer intahan yang efektif, efisien, akuntab el dan	-		9.764.412. 900.00	SEKRET ARIAT DAERAH

																melaya ni Peningk atan tata kelola pemer ntahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni				
	4.01.01.2. 06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	2 Pake t	0.00	0.00	325.000.0 00.00	325.000.000 .00	Kab. Kenda l, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	Peningk atan tata kelola pemer ntahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni Peningk atan tata kelola pemer ntahan yang efektif, efisien,			250.000.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH

																akuntabel dan melayani				
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	3 Paket	0.00	0.00	299.979.800.00	299.979.800.00	Kab. Kendal, Semud, Kecamatan, Semud, Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			225.000.000.00	SEKRETARIAT DAERAH

	4.01.01.2. 06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				-	5 Pake t	0.00	0.00	883.731.0 80.00	883.731.080 .00	Kab. Kenda I, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	Peningk atan tata kelola pemer ntahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni Peningk atan tata kelola pemer ntahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni			600.000.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.01.2. 06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	3 Paket	0.00	0.00	258.162.200.00	258.162.200.00	Kab. Kendal, Semudakamatan, Semudakel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			185.000.000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	152 Laporan	0.00	0.00	4.888.971.811.00	4.888.971.811.00	Kab. Kendal, Semudakamatan, Semudakel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan			3.512.206.450.00	SEKRETARIAT DAERAH

													esa			melaya ni Peningk atan tata kelola pemer ntahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni					
	4.01.01.2. 06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD				-	4 Doku men	0.00	0.00	134.191.0 00.00	134.191.000 .00	Kab. Kenda I, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	Peningk atan tata kelola pemer ntahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni Peningk atan tata kelola pemer ntahan yang efektif, efisien,			110.000.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH	

																akuntabel dan melayani				
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.051.378.000.00	3.237.917.800.00	4.910.183.800.00	858.805.800.00			-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	-		9.250.000.000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kenda I, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	Peningk atan tata kelola pemer intahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni			1.500.000. 000.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.01.2. 07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kenda I, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	Peningk atan tata kelola pemer intahan yang efektif, efisien, akuntab el dan			500.000.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH

													esa			melaya ni Peningk atan tata kelola pemer ntahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni				
	4.01.01.2. 07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kenda I, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	Peningk atan tata kelola pemer ntahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni Peningk atan tata kelola pemer ntahan yang efektif, efisien,			400.000.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH

																akuntabel dan melayani				
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	115 Unit	0.00	0.00	4.526.503.800.00	4.526.503.800.00	Kab. Kendal, Semud, Kecamatan, Semud, Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			1.850.000.000.00	SEKRETARIAT DAERAH

	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	105 Unit	0.00	0.00	383.680.000.00	383.680.000.00	Kab. Kendal, Semuma Kecamatan, Semuma Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			375.000.000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.312.500.000.00	5.246.413.500.00	5.426.413.500.00	1.113.913.500.00			-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan	-		9.500.000.000.00	SEKRETARIAT DAERAH

																melaya ni Peningk atan tata kelola pemer ntahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni						
	4.01.01.2. 08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-	12 Lapo ran	0.00	0.00	149.300.0 00.00	149.300.000 .00	Kab. Kenda l, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	Peningk atan tata kelola pemer ntahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni Peningk atan tata kelola pemer ntahan yang efektif, efisien,				170.000.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH	

																akuntabel dan melayani				
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				-	12 Laporan	0.00	0.00	2.422.936.000.00	2.422.936.000.00	Kab. Kendal, Semud, Kecamatan, Semud, Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			3.450.000.000.00	SEKRETARIAT DAERAH

	4.01.01.2. 08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	12 Laporan	0.00	0.00	285.500.0 00.00	285.500.000 .00	Kab. Kenda I, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	Peningk atan tata kelola pemer intahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni Peningk atan tata kelola pemer intahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni			155.000.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.01.2. 08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	12 Lapo ran	0.00	0.00	1.430.570 .985.00	1.430.570.9 85.00	Kab. Kenda l, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	Peningk atan tata kelola pemer intahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni			975.000.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH
4.01.01.2. 09	Pemeliha aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	-				-	-		5.853.466 .000.00	6.714.224 .750.00	8.596.478 .750.00	2.743.012.7 50.00			-	Peningk atan tata kelola pemer intahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni	-		12.960.000 .000.00	SEKRET ARIAT DAERAH

																atan tata kelola pemer intahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni					
	4.01.01.2. 09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				-	26 Unit	0.00	0.00	50.000.00 0.00	50.000.000. 00	Kab. Kenda I, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	Peningk atan tata kelola pemer intahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni Peningk atan tata kelola pemer intahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya			130.000.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH	

																ni				
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				-	158 Unit	0.00	0.00	80.000.000.00	80.000.000.00	Kab. Kendal, Semud, Kecamatan, Semud, Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			140.000.000.00	SEKRETARIAT DAERAH

	4.01.01.2. 09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				-	400 Unit	0.00	0.00	2.683.933 .500.00	2.683.933.5 00.00	Kab. Kenda I, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	Peningk atan tata kelola pemer intahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni Peningk atan tata kelola pemer intahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni			2.500.000. 000.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.01.2. 09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		

			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				-	2 Unit	0.00	0.00	50.000.00 0.00	50.000.000. 00	Kab. Kendal, Semudakamatan, Semudakel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			110.000.00 0.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	5 Unit	0.00	0.00	2.180.193 .750.00	2.180.193.7 50.00	Kab. Kendal, Semudakamatan, Semudakel/D	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan			750.000.00 0.00	SEKRETARIAT DAERAH

													esa			melaya ni Peningk atan tata kelola pemer ntahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni				
	4.01.01.2. 09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi				-	3 Unit	0.00	0.00	3.262.138 .000.00	3.262.138.0 00.00	Kab. Kenda I, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	Peningk atan tata kelola pemer ntahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni Peningk atan tata kelola pemer ntahan yang efektif, efisien,			2.850.000. 000.00	SEKRET ARIAT DAERAH

																akuntabel dan melayani				
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				-	-	1.625.000.000.00	1.825.100.000.00	2.481.161.158.00	856.161.158.00			-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	-		2.710.000.000.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				-	2 Oran g/Bu lan	0.00	0.00	138.481.1 10.00	138.481.110 .00	Kab. Kenda l, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	Peningk atan tata kelola pemer intahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni			400.000.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.01.2. 11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				-	6 Pake t	0.00	0.00	300.272.0 00.00	300.272.000 .00	Kab. Kenda l, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	Peningk atan tata kelola pemer intahan yang efektif, efisien, akuntab el dan			275.000.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH

													esa			melaya ni Peningk atan tata kelola pemer ntahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni				
	4.01.01.2. 11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				-	5 Oran g	0.00	0.00	1.356.061 .158.00	1.356.061.1 58.00	Kab. Kenda l, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DAU YANG DITENT UKAN P ENGGU NAANN YA BIDANG KESEHA TAN	-	Peningk atan tata kelola pemer ntahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni Peningk atan tata kelola pemer ntahan yang efektif, efisien,			80.000.000 .00	SEKRET ARIAT DAERAH

																akuntabel dan melayani				
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				-	2 Oran g/Bulan	0.00	0.00	500.000.000.00	500.000.000.00	Kab. Kendal, Semud a Kcamatan , Semud a Kel/D esa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani		600.000.000.00	SEKRETARIAT DAERAH

	4.01.01.2. 12	Fasilitasi Kerumaht anggaan Sekretaria t Daerah	-				-	-	4.600.000 .000.00	5.447.870 .000.00	6.622.870 .000.00	2.022.870.0 00.00			-	Peningk atan tata kelola pemer intahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni Peningk atan tata kelola pemer intahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni	-		9.040.000. 000.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.01.2. 12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</i>				-	2 Pake t	0.00	0.00	1.456.256 .000.00	1.456.256.0 00.00	Kab. Kenda l, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	Peningk atan tata kelola pemer intahan yang efektif, efisien, akuntab el dan			972.000.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH

													esa			melaya ni Peningk atan tata kelola pemer ntahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni				
	4.01.01.2. 12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				-	2 Pake t	0.00	0.00	933.424.0 00.00	933.424.000 .00	Kab. Kenda I, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	Peningk atan tata kelola pemer ntahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni Peningk atan tata kelola pemer ntahan yang efektif, efisien,			648.000.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH

																akuntabel dan melayani				
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				-	4 Paket	0.00	0.00	3.396.485.241.00	3.396.485.241.00	Kab. Kendal, Semud, Kecamatan, Semud, Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			2.900.000.000.00	SEKRETARIAT DAERAH

		BAGIAN PEMERINTAHAN							61.110.32 2.073.00	66.416.90 7.281.00	73.556.90 7.281.00	12.446.585. 208.00						105.118.1 81.032.00	
	4	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN							61.110.32 2.073.00	66.416.90 7.281.00	73.556.90 7.281.00	12.446.585. 208.00						105.118.1 81.032.00	
	4.01	SEKRETAR IAT DAERAH							61.110.32 2.073.00	66.416.90 7.281.00	73.556.90 7.281.00	12.446.585. 208.00						105.118.1 81.032.00	
1	4.01.02	PROGRA M PEMERINT AHAN DAN KESEJAHT ERAAN RAKYAT	Prosentase Kecamatan dan Kelurahan tertib administrasi				100 %	100 %	9.585.734 .203.00	8.782.134 .203.00	9.150.169 .203.00	8.677.939.2 09.00						18.263.67 3.412.00	
	4.01.02.2. 01	Administ rasi Tata Pemerinta han	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang difasilitasi				40 kec dan kel	40 kec dan kel	1.259.433 .552.00	1.259.433 .552.00	1.282.074 .552.00	22.641.000. 00			-	-	-	1.659.684. 229.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.02.2. 01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintaha				87 Doku men	87 Doku men	208.250.9 52.00	208.250.9 52.00	291.084.9 52.00	82.834.000. 00	Kab. Kenda I, Semu a Keca matan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		286.913.49 6.00	SEKRET ARIAT DAERAH

4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah kerjasama antara daerah dan pihak ketiga, serta kerjasama di wilayah Kedungsepur				12 Naskah	12 Naskah	300.000.000.00	300.000.000.00	245.394.000.00	- 54.606.000.00			-	-	-		547.342.671.00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				12 Dokumen	12 Dokumen	300.000.000.00	300.000.000.00	245.394.000.00	- 54.606.000.00	Kab. Kendal, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		547.342.671.00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN HUKUM						61.110.322.073.00	66.416.907.281.00	73.556.907.281.00	12.446.585.208.00							105.118.181.032.00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							61.110.322.073.00	66.416.907.281.00	73.556.907.281.00	12.446.585.208.00							105.118.181.032.00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH							61.110.322.073.00	66.416.907.281.00	73.556.907.281.00	12.446.585.208.00							105.118.181.032.00	

1	4.01.02	PROGRA M PEMERINT AHAN DAN KESEJAHT ERAAN RAKYAT	"Persentase raperda yang diusulkan ke propemperd a"				100 %	100 %	9.585.734 .203.00	8.782.134 .203.00	9.150.169 .203.00	8.677.939.2 09.00							18.263.67 3.412.00	
	4.01.02.2. 03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	<i>Jumlah Raperda Yang di usulkan ke PROPEMPER DA</i>				6 buah	6 buah	686.541.6 00.00	682.941.6 00.00	682.941.6 00.00	- 3.600.000.0 0			-	-	-		1.343.133. 412.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.02.2. 03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			<i>Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun</i>				6 Doku men	6 Doku men	253.885.8 08.00	253.885.8 08.00	253.885.8 08.00	0.00	Semu a Kota/ Kab, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			359.430.06 8.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.02.2. 03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		

			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum				-	3 Kasus	0.00	0.00	278.232.472.00	278.232.472.00	Kab. Kendal, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			397.264.812.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				1 Dokumen	1 Dokumen	152.308.320.00	148.708.320.00	148.708.320.00	- 3.600.000.00	Kab. Kendal, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			189.173.720.00	SEKRETARIAT DAERAH

													esa								
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							61.110.32 2.073.00	66.416.90 7.281.00	73.556.90 7.281.00	12.446.585. 208.00							105.118.1 81.032.00		
	4	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN							61.110.32 2.073.00	66.416.90 7.281.00	73.556.90 7.281.00	12.446.585. 208.00								105.118.1 81.032.00	
	4.01	SEKRETAR IAT DAERAH							61.110.32 2.073.00	66.416.90 7.281.00	73.556.90 7.281.00	12.446.585. 208.00								105.118.1 81.032.00	
1	4.01.02	PROGRA M PEMERINT AHAN DAN KESEJAHT ERAAN RAKYAT	-				-	-	9.585.734 .203.00	8.782.134 .203.00	9.150.169 .203.00	8.677.939.2 09.00								18.263.67 3.412.00	
	4.01.02.2. 02	Pelaksana an Kebijakan Kesejahter aan Rakyat	-				-	-	7.339.759 .051.00	6.539.759 .051.00	6.939.759 .051.00	- 400.000.000 .00			-	Peningk atan tata kelola pemer intahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni	-			14.713.513 .100.00	SEKRET ARIAT DAERAH

																Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani				
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				-	6 Dokumen	0.00	0.00	3.061.228.800.00	3.061.228.800.00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan			4.781.891.757.00	SEKRETARIAT DAERAH

																melaya ni				
	4.01.02.2. 02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan				-	4 Doku men	0.00	0.00	1.300.956 .451.00	1.300.956.4 51.00	Kab. Kenda l, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningk atan tata kelola pemer intahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni Peningk atan tata kelola pemer intahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni			1.103.513. 483.00	SEKRET ARIAT DAERAH

			an Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB																	
	4.01.02.2. 02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraa n Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaa n, Kearsipan, Trantibum Linmas				-	4 Doku men	0.00	0.00	1.698.290 .400.00	1.698.290.4 00.00	Kab. Kenda l, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningk atan tata kelola pemer intahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni Peningk atan tata kelola pemer intahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya			1.471.351. 310.00	SEKRET ARIAT DAERAH

																ni				
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							61.110.32 2.073.00	66.416.90 7.281.00	73.556.90 7.281.00	12.446.585. 208.00							105.118.1 81.032.00	
	4	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN							61.110.32 2.073.00	66.416.90 7.281.00	73.556.90 7.281.00	12.446.585. 208.00							105.118.1 81.032.00	
	4.01	SEKRETAR IAT DAERAH							61.110.32 2.073.00	66.416.90 7.281.00	73.556.90 7.281.00	12.446.585. 208.00							105.118.1 81.032.00	
1	4.01.03	PROGRA M PEREKON OMIAN DAN PEMBANG UNAN	-				-	-	3.924.500 .000.00	4.624.499 .925.00	4.774.499 .925.00	2.368.450.0 00.00							6.292.950. 000.00	

	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-				-	-	1.365.000.000.00	2.065.000.000.00	2.065.000.000.00	700.000.000.00			-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	-		2.320.000.000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				-	9 Dokumen	0.00	0.00	799.418.000.00	799.418.000.00	Kab. Kendal, Semud, Kecamatan, Semud, Kel/D	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan			350.000.000.00	SEKRETARIAT DAERAH

													esa			melaya ni Peningk atan tata kelola pemer ntahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni				
	4.01.03.2. 02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembanguna n				-	5 Lapo ran	0.00	0.00	550.904.0 00.00	550.904.000 .00	Kab. Kenda l, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningk atan tata kelola pemer ntahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni Peningk atan tata kelola pemer ntahan yang efektif, efisien,			410.000.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH

																akuntabel dan melayani				
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				-	4 Laporan	0.00	0.00	553.639.600.00	553.639.600.00	Kab. Kendal, Semud, Kecamatan, Semud, Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			400.000.000.00	SEKRETARIAT DAERAH

		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA								61.110.32 2.073.00	66.416.90 7.281.00	73.556.90 7.281.00	12.446.585. 208.00							105.118.1 81.032.00	
	4	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN							61.110.32 2.073.00	66.416.90 7.281.00	73.556.90 7.281.00	12.446.585. 208.00							105.118.1 81.032.00		
	4.01	SEKRETAR IAT DAERAH							61.110.32 2.073.00	66.416.90 7.281.00	73.556.90 7.281.00	12.446.585. 208.00							105.118.1 81.032.00		
1 .	4.01.03	PROGRA M PEREKON OMIAN DAN PEMBANG UNAN	-				-	-	3.924.500 .000.00	4.624.499 .925.00	4.774.499 .925.00	2.368.450.0 00.00							6.292.950. 000.00		
	4.01.03.2. 03	Pengelola an Pengadaa n Barang dan Jasa	-				-	-	910.000.0 00.00	910.000.0 00.00	1.060.000 .000.00	150.000.000 .00			-	Peningk atan tata kelola pemer intahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni Peningk atan tata kelola pemer intahan	-		1.920.000. 000.00	SEKRET ARIAT DAERAH	

																yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani				
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				-	103 Dokumen	0.00	0.00	593.715.000.00	593.715.000.00	Kab. Kendal, Semud Kecamatan, Semud Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			610.000.000.00	SEKRETARIAT DAERAH

	4.01.03.2. 03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				-	55 Doku men	0.00	0.00	172.640.0 00.00	172.640.000 .00	Kab. Kenda I, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningk atan tata kelola pemer intahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni Peningk atan tata kelola pemer intahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni			175.000.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.03.2. 03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		

			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				-	87 Oran g	0.00	0.00	173.080.0 00.00	173.080.000 .00	Kab. Kenda l, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningk atan tata kelola pemer intahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni			175.000.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM							61.110.32 2.073.00	66.416.90 7.281.00	73.556.90 7.281.00	12.446.585. 208.00							105.118.1 81.032.00	
	4	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN							61.110.32 2.073.00	66.416.90 7.281.00	73.556.90 7.281.00	12.446.585. 208.00							105.118.1 81.032.00	
	4.01	SEKRETAR IAT DAERAH							61.110.32 2.073.00	66.416.90 7.281.00	73.556.90 7.281.00	12.446.585. 208.00							105.118.1 81.032.00	

1	4.01.03	PROGRA M PEREKON OMIAN DAN PEMBANG UNAN	-				-	-	3.924.500 .000.00	4.624.499 .925.00	4.774.499 .925.00	2.368.450.0 00.00						6.292.950. 000.00	
	4.01.03.2. 01	Pelaksana an Kebijakan Perekono mian	-				-	-	1.072.801 .817.00	1.072.801 .742.00	1.072.801 .742.00	-75.00			-	Peningk atan tata kelola pemer intahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni	-	1.862.950. 000.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.03.2. 01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																	

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				-	8 Doku men	0.00	0.00	400.000.0 00.00	400.000.000 .00	Kab. Kenda l, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningk atan tata kelola pemer intahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni Peningk atan tata kelola pemer intahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni			340.000.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH	
	4.01.03.2. 01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																			

			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				-	19 Laporan	0.00	0.00	500.000.000.00	500.000.000.00	Kab. Kendal, Semudakamatan, Semudakel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan infrastruktur dengan berbasis peningkatan konektivitas wilayah pendukung perekonomian Pemerataan infrastruktur dengan berbasis peningkatan konektivitas wilayah pendukung perekonomian			271.475.000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		

			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				-	19 Doku men	0.00	0.00	172.801.7 42.00	172.801.742 .00	Kab. Kenda l, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningk atan tata kelola pemer ntahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni			320.000.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.03.2. 04	Pemantau an Kebijakan Sumber Daya Alam	-				-	-	576.698.1 83.00	576.698.1 83.00	576.698.1 83.00	0.00			-	Peningk atan tata kelola pemer ntahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni	-		190.000.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH

																atan tata kelola pemer ntahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni				
	4.01.03.2. 04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan , Perindustrian , KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja</i>				-	1 Doku men	0.00	0.00	576.698.1 83.00	576.698.183 .00	Kab. Kenda I, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DBH CUKAI HASIL TEMBA KAU (CHT)	-	Peningk atan tata kelola pemer ntahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya ni Peningk atan tata kelola pemer ntahan yang efektif, efisien, akuntab el dan melaya			95.000.000 .00	SEKRET ARIAT DAERAH

															ni				
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN						61.110.32 2.073.00	66.416.90 7.281.00	73.556.90 7.281.00	12.446.585. 208.00							105.118.1 81.032.00	
	4	UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERINT AHAN						61.110.32 2.073.00	66.416.90 7.281.00	73.556.90 7.281.00	12.446.585. 208.00							105.118.1 81.032.00	
	4.01	SEKRETAR IAT DAERAH						61.110.32 2.073.00	66.416.90 7.281.00	73.556.90 7.281.00	12.446.585. 208.00							105.118.1 81.032.00	
1	4.01.01	PROGRA M PENUNJA NG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPAT EN/KOTA	"Persentase terpenuhiny a fasilitas protokol dan komunikasi pimpinan daerah"				100 %	100 %	47.600.08 7.870.00	53.010.27 3.153.00	59.632.23 8.153.00	32.961.469. 750.00						80.561.55 7.620.00	
	4.01.01.2. 14	Pelaksana an Protokol dan Komunika	<i>persentase kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan</i>				100 %	100 %	1.184.980 .000.00	1.384.980 .000.00	1.564.980 .000.00	380.000.000 .00			-	-	-	1.254.980. 000.00	SEKRET ARIAT DAERAH

		si Pimpinan	yang dilaksanakan																	
	4.01.01.2. 14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Lapo ran	12 Lapo ran	739.515.0 00.00	739.515.0 00.00	869.515.0 00.00	130.000.000 .00	Kab. Kenda I, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			789.515.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.01.2. 14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Lapo ran	12 Lapo ran	172.840.0 00.00	372.840.0 00.00	372.840.0 00.00	200.000.000 .00	Kab. Kenda I, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			189.411.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	4.01.01.2. 14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		

			<i>Jumlah Laporan Pendokumen tasian Tugas Pimpinan</i>				12 Lapo ran	12 Lapo ran	272.625.0 00.00	272.625.0 00.00	322.625.0 00.00	50.000.000. 00	Kab. Kenda l, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			276.054.00 0.00	SEKRET ARIAT DAERAH
	J U M L A H								61.110.32 2.073.00	66.416.90 7.281.00	73.556.90 7.281.00	255.613.053 .604.00							105.118.1 81.032.00	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 yang telah disusun, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kendal merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai landasan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 yang akan digunakan sebagai dasar dan pedoman Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal tahun 2024 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja perangkat daerah yang efektif, optimal, dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan.

Keberhasilan pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal tahun 2024 sebagaimana telah disempurnakan dan diubah menyesuaikan asumsi dan kondisi terkini, tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal itu sendiri. Dalam kaitannya dengan hal ini, maka setiap unsur aparatur Sekretariat Daerah perlu bersungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Renja Tahun 2024 beserta perubahannya agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil nyata untuk pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan adalah untuk kegiatan-kegiatan prioritas yang belum mendapat pagu tambahan anggaran pada tahap RKPD Perubahan, diprioritaskan untuk dianggarkan dari pergeseran intenal atau dianggarkan ulang pada Rencana Kerja Tahun 2025. Agar realisasi program dari kegiatan sesuai dengan sasaran, maka diperlukan semangat, komitmen, dan disiplin yang tinggi dari Perangkat Daerah dan stakeholders sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Dokumen ini diharapkan mampu dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana. Evaluasi dimaksud meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan anggaran, kendala yang dihadapi sehingga perlu dilakukan perubahan serta faktor yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan. Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Kabupaten Kendal.

Sekiranya dokumen Perubahan Rencana Kerja 2024 ini dapat bermanfaat dalam proses perencanaan dan penganggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal.

a.n BUPATI KENDAL

Sekretaris Daerah



Ir. SUGIONO, MT
Pembina Utama Madya

NIP. 19640928 199303 1 004



PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS KESEHATAN

KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KENDAL
2024**

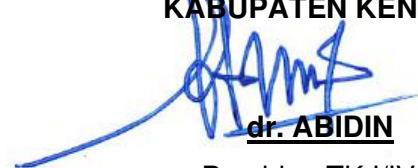
KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan acuan guna penyusunan perubahan APBD. Adapun penyusunan Perubahan Renja OPD aturannya secara rinci mengacu pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.

Perubahan Renja Dinas Kesehatan tahun 2021 tidak terlepas dari Renstra Dinas Kesehatan 2021-2026. Di dalamnya memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Kesehatan tahun 2024 sampai dengan triwulan II dan uraian mengenai tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Perubahan Renja Dinas Kesehatan ini diharapkan dapat benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Dinas Kesehatan tahun 2024.

Kendal, 2024
**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KENDAL**



dr. ABIDIN

Pembina TK.I/IV b
NIP, 197103072002121003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi..... ii

BAB I. Pendahuluan 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Landasan Hukum..... 1

 1.3 Maksud dan Tujuan 3

 1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II. Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan 5

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II
 Tahun 2024 dan Renstra Perangkat Daerah 5

 2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 21

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 22

BAB. IV Penutup 25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan rencana kerja dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Penyusunan Perubahan Renja OPD ini mengacu pada Laporan Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2024.

Perubahan Renja OPD bertujuan untuk mendukung program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Perubahan renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur Penyusunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan Evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Tahun sebelumnya dan mengacu pada tahun berkenaan.
2. Program dalam Perubahan Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Perubahan Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Perubahan Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) dan Indikator kinerja keluaran (output).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2024 dilengkapi dengan lampiran evaluasi hasil pelaksanaan renja Dinas Kesehatan s/d triwulan II tahun 2024 dan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Perubahan tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi

- Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 20).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja OPD (Renja OPD) adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan periode satu Semester pada tahun saat ini;
- b. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu semester pada tahun saat ini;
- c. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu semester pada tahun saat ini;
- d. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu semester pada tahun saat ini;
- e. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu semester pada tahun saat ini.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja OPD berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II. Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan.

- Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:
 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat kegiatan lanjutan, memuat kegiatan lanjutan tahun sebelum yang belum terlaksana, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan di tahun 2024 (Lampiran Rancangan Akhir Perubahan RKPD 2024).

BAB IV. Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 secara singkat hasil Kegiatan tahun Tahun 2024 sampai dengan triwulan II (Dinas Kesehatan, 30 BLUD Puskesmas dan RSUD H. Soewondo Kendal) dapat diketahui bahwa untuk Dinas Kesehatan di Kabupaten Kendal Tahun Tahun 2024 triwulan ke-II realisasi sebesar **56,80 %** atau sekitar Rp. **145.467.228.876,-** dari anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 256.122.662.348,-. Sesuai dengan Tabel TC-29 terlampir.

Tabel 2.1 T-C 2.9
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Kendal
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024		Ket
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		1				211.829.494.765		0		211.829.494.765		46.131.946.954		47.639.861.182						93.771.808.136		93.771.808.136		44,27	
		1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			211.829.494.765		0		211.829.494.765		46.131.946.954		47.639.861.182						93.771.808.136		93.771.808.136		44,27	
1		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Pemerintah Daerah	412	146.146.665.071	200	0	12	146.146.665.071	5	44.443.217.867	0	45.741.811.047					5	90.185.028.914	205	90.185.028.914	49,76	61,71	
		1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang terusun (Dokumen)	20	100.000.000	10	0	5	100.000.000	3	8.712.005	0	7.957.500					3	16.669.505	13	16.669.505	65	16,67	
		1.02.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20	100.000.000	11	0	5	100.000.000	3	8.712.005	0	7.957.500					3	16.669.505	14	16.669.505	70	16,67	
		1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen keuangan yang disusun (12)	48	144.174.475.903	24	0	12	144.174.475.903	3	43.936.644.559	0	45.431.439.934					3	89.368.084.493	27	89.368.084.493	56,25	61,99	
		1.02.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.884	144.148.926.103	24	0	1.430	144.148.926.103	1.933	43.930.082.059	123	45.431.439.934					2.056	89.361.521.993	2.080	89.361.521.993	72,12	61,99	
		1.02.01.2.02.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	4	25.549.800	2	0	1	25.549.800	0	6.562.500	0	0					0	6.562.500	2	6.562.500	50	25,69	
		1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat			65.865.000		0		65.865.000		0		3.330.000						3.330.000		3.330.000		5,06	
		1.02.01.2.03.00 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	65.865.000	0	0	2	65.865.000	0	0	0	3.330.000					0	3.330.000	0	3.330.000	0	5,06	
		1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang difasilitasi	48	347.014.000	24	0	12	347.014.000	3	104.617.250	0	38.814.950					3	143.432.200	27	143.432.200	56,25	41,33	
		1.02.01.2.06.00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	1	31.339.000	0	0	0	31.339.000	0	0	0	7.951.650					0	7.951.650	0	7.951.650	0	25,37	
		1.02.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pencetakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pencetakan	2	62.125.000	12	0	1	62.125.000	1	56.460.100	0	0					1	56.460.100	13	56.460.100	650	90,88	
		1.02.01.2.06.00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	37	53.550.000	24	0	1	53.550.000	0	20.071.500	0	6.527.500					0	26.599.000	24	26.599.000	64,86	49,67	
		1.02.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	37	200.000.000	24	0	1	200.000.000	0	28.085.650	0	24.335.800					0	52.421.450	24	52.421.450	64,86	26,21	
		1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sarana prasarana yang diadakan (Unit)	0	81.000.000	0	0	30	81.000.000	10	12.405.000	0	0					0	12.405.000	0	12.405.000	0	15,31	
		1.02.01.2.07.00 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45	81.000.000	20	0	15	81.000.000	10	12.405.000	0	0					10	12.405.000	30	12.405.000	66,67	15,31	
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi (Unit)	0	1.251.910.168	0	0	4	1.251.910.168	4	374.116.203	0	218.163.963					0	592.280.166	0	592.280.166	0	47,31	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024		Ket
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02.01.2.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	37	4.840.000	24		0	1	4.840.000	0	500.000	0	876.500				0	1.376.500	24	1.376.500	64,86	28,44	
		1.02.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	37	500.000.000	24		0	1	500.000.000	0	210.759.221	0	86.213.983				0	296.973.204	24	296.973.204	64,86	59,39	
		1.02.01.2.08.00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	77.993.000	0		0	1	77.993.000	1	76.022.900	0	0				0	76.022.900	0	76.022.900	0	97,47	
		1.02.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan (Laporan)	37	669.077.168	24		0	12	669.077.168	3	86.834.082	1	131.073.480				4	217.907.562	28	217.907.562	75,68	32,57	
		1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang Terpelihara (Unit)	0	126.400.000	0		0	0	126.400.000	12	6.722.850	0	42.104.700				0	48.827.550	0	48.827.550	0	38,63	
		1.02.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknyaaraan perorangan dinas atau kendaraan	73	70.000.000	24		0	25	70.000.000	2	0	10	34.504.700				12	34.504.700	36	34.504.700	49,32	49,29	
		1.02.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (unit)	34	0	24		0	0	0	0	0	0	0				0	0	24	0	70,59	0	
		1.02.01.2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26	56.400.000	24		0	1	56.400.000	0	6.722.850	0	7.600.000				0	14.322.850	24	14.322.850	92,31	25,4	
2		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata rata capain SPM (%)	500	59.654.971.777	176,68		0	100	59.654.971.777	27,63	1.480.814.192	0	1.359.952.092				27,63	2.840.766.284	204,31	2.840.766.284	40,86	4,76	
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas kesehatan yang difasilitasi (Unit)	0	16.512.617.042	0		0	37	16.512.617.042	37	79.263.450	0	59.810.000				0	139.073.450	0	139.073.450	0	0,84	
		1.02.02.2.01.00 02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang dibangun (Unit)	6	4.097.340.200	0		0	2	4.097.340.200	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	
		1.02.02.2.01.00 03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	2	1.800.000.000	0		0	1	1.800.000.000	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	
		1.02.02.2.01.00 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	0	32.693.800	0		0	1	32.693.800	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	
		1.02.02.2.01.00 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Didapatkan	162	5.704.616.076	0		0	10	5.704.616.076	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	
		1.02.02.2.01.00 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional	1.150	325.672.000	30		0	275	325.672.000	0	0	0	0				0	0	30	0	2,61	0	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024		Ket
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02.02.2.01.00 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai	114	264.086.000	0		83	264.086.000	0	23.993.450	0						0	23.993.450	0	23.993.450	0	9,09	
		1.02.02.2.01.00 23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	0	3.595.835.766	0		1	3.595.835.766	0		0						0		0		0	0	
		1.02.02.2.01.00 24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh	0	16.530.000	0		71.425	16.530.000	13.087	6.600.000	0						0	6.600.000	0	6.600.000	0	39,93	
		1.02.02.2.01.00 26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta	0	675.843.200	0		360	675.843.200	0	48.670.000	83	59.810.000					83	108.480.000	83	108.480.000	100	16,05	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Buiukan Tingkat	Jumlah Layanan kesehatan yang disediakan (Unit)	0	42.842.235.535	0		34	42.842.235.535	34	1.397.197.442	0	1.277.212.116					0	2.674.409.558	0	2.674.409.558	0	6,24	
		1.02.02.2.02.00 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	32.031	66.010.000	0		18.592	66.010.000	2.799	4.475.000	3.789	5.850.000					6.588	10.325.000	6.588	10.325.000	20,57	15,64	
		1.02.02.2.02.00 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	30.418	548.496.000	0		16.979	548.496.000	2.800	7.295.400	3.790	5.260.000					6.590	12.555.400	6.590	12.555.400	21,66	2,29	
		1.02.02.2.02.00 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	32.075	234.342.933	97		18.695	234.342.933	2.808	2.620.000	3.826	45.096.000					6.634	47.716.000	6.731	47.716.000	20,99	20,36	
		1.02.02.2.02.00 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	138.728	31.452.000	98		74.761	31.452.000	20.535		34.754						55.289		55.387		39,92	0	
		1.02.02.2.02.00 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	265.703	42.500.000	0		120.415	42.500.000	23.979		23.979	9.668.000					47.958	9.668.000	47.958	9.668.000	18,05	22,75	
		1.02.02.2.02.00 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	jumlah penduduk Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1.374.192	85.094.000	78		682.900	85.094.000	143.577	6.980.000	138.393	5.910.000					281.970	12.890.000	282.048	12.890.000	20,52	15,15	
		1.02.02.2.02.00 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	268.197	34.815.000	94,7		139.481	34.815.000	39.417	9.814.900	50.286	24.750.000					89.703	34.564.900	89.797,7	34.564.900	33,48	99,28	
		1.02.02.2.02.00 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan	625.698	23.990.000	0		310.815	23.990.000	60.188	6.140.000	56.516	740.000					116.704	6.880.000	116.704	6.880.000	18,65	28,68	
		1.02.02.2.02.00 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart (Q2023)	39.107	1.787.271.685	0		19.426	1.787.271.685	6.719		5.905	13.560.000					12.624	13.560.000	12.624	13.560.000	32,28	0,76	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024		Ket
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02.02.2.02.00 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat	5.216	175.000.000	0		2.582	175.000.000	821	1.310.000	244	26.550.000					1.065	27.860.000	1.065	27.860.000	20,42	15,92	
		1.02.02.2.02.00 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Pedoman	23.209	933.820.000	5.876		11.605	933.820.000	2.481	13.305.400	487	10.197.350					2.968	23.502.750	8.844	23.502.750	38,11	2,52	
		1.02.02.2.02.00 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Pedoman	40.815	386.965.000	16.954		22.646	386.965.000	4.684	11.838.228	0	10.520.000					4.684	22.358.228	21.638	22.358.228	53,01	5,78	
		1.02.02.2.02.00 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau	8	62.828.000	100		2	62.828.000	0	0	0	10.397.800					0	10.397.800	100	10.397.800	1.250	16,55	
		1.02.02.2.02.00 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	34	151.875.000	59,2		4	151.875.000	1	18.154.700	0	409.931.400					1	428.086.100	60,2	428.086.100	177,06	281,87	
		1.02.02.2.02.00 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	90		200		0		0	0	0	0					0	0	200		222,22	0	
		1.02.02.2.02.00 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan yaitu profil, IKL, E Monev, rekom Laik sehat, rekom kualitas air bersih, rekom	20	1.079.040.400	154,51		5	1.079.040.400	0	14.340.000	0	17.370.000					0	31.710.000	154,51	31.710.000	772,55	2,94	
		1.02.02.2.02.00 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	35	450.931.000	30		5	450.931.000	0	31.418.000	0	55.683.866					0	87.101.866	30	87.101.866	85,71	19,32	
		1.02.02.2.02.00 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	62	158.163.000	60		1	158.163.000	1	22.390.000	0	19.456.400					1	41.846.400	61	41.846.400	98,39	26,46	
		1.02.02.2.02.00 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan	0	68.155.000	0		820.008	68.155.000	0	0	0	2.500.000					0	2.500.000	0	2.500.000	0	3,67	
		1.02.02.2.02.00 24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan	8	14.730.000	42,3		4	14.730.000	0	0	0	2.885.000					0	2.885.000	42,3	2.885.000	528,75	19,59	
		1.02.02.2.02.00 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	22	2.282.004.782	8,1		11	2.282.004.782	3	104.873.364	0	64.515.800					3	169.389.164	11,1	169.389.164	50,45	7,42	
		1.02.02.2.02.00 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	170	31.889.811.400	78,3		2	31.889.811.400	2	926.272.000	0	10.520.000					2	936.792.000	80,3	936.792.000	47,24	2,94	
		1.02.02.2.02.00 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	30	41.950.000	12		14	41.950.000	4	2.520.000	0	4.680.000					4	7.200.000	16	7.200.000	53,33	17,16	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024		Ket
											I		II		III		IV			13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.00 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	0	1.152.278.800	0		0	1	1.152.278.800	1	184.234.450	0	69.030.000					0	253.264.450	0	253.264.450	0	21,98	
		1.02.02.2.02.00 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2	315.423.000	12		0	1	315.423.000	1	5.141.000	0	300.000.000					1	305.141.000	13	305.141.000	650	96,74	
		1.02.02.2.02.00 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan	2	47.765.035	100		0	1	47.765.035	1	13.825.000	0	11.175.000					1	25.000.000	101	25.000.000	5.050	52,34	
		1.02.02.2.02.00 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	4.421	92.170.000	0		0	2.272	92.170.000	445	10.250.000	95	0					540	10.250.000	540	10.250.000	12,21	11,12	
		1.02.02.2.02.00 41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	670	179.556.000	0		0	165	179.556.000	40		0	0	29.177.500				40	29.177.500	40	29.177.500	5,97	16,25	
		1.02.02.2.02.00 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	44	73.717.500	0		0	13	73.717.500	1		0	3	0				4	0	4	0	9,09	0	
		1.02.02.2.02.00 45	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan				100.000.000			0		100.000.000		0		0					0		0		0	
		1.02.02.2.02.00 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0	332.080.000	0		0	1	332.080.000	0		0	0	111.788.000				0	111.788.000	0	111.788.000	0	33,66	
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah SIK yang terintegrasi (Unit)	0	167.810.000	0		0	1	167.810.000	1	4.353.300	0	7.929.976					0	12.283.276	0	12.283.276	0	7,32	
		1.02.02.2.03.00 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	167.810.000	12		0	0	167.810.000	0	4.353.300	0	7.929.976					0	12.283.276	12	12.283.276	1.200	7,32	
		1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah	jumlah rumah sakit daerah tipe C dan D yang dibina (Unit)	0	132.309.200	0		0	6	132.309.200	6		0	0	15.000.000				0	15.000.000	0	15.000.000	0	11,34	
		1.02.02.2.04.00 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	72	132.309.200	30		0	36	132.309.200	101		0	0	15.000.000				101	15.000.000	131	15.000.000	181,94	11,34	
3		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Proporsi puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar (%)	354	2.301.590.917	130		0	75	2.301.590.917	22	36.717.800	0	155.192.100				22	191.909.900	152	191.909.900	42,94	8,34		
		1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			0			0		0		0		0				0		0		0	0		
		1.02.03.2.01.00 02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia	1	0	70		0	0	0	0	0	0	0			0	0	70	0	7.000	0			
		1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDK (Dokumen)	2	629.042.000	0		0	1	629.042.000	0	36.717.800	0	64.051.500				0	100.769.300	0	100.769.300	0	16,02		
		1.02.03.2.02.00 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan	786	446.146.000	46		0	680	446.146.000	0	36.717.800	0	35.310.000				0	72.027.800	46	72.027.800	5,85	16,14		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2023)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024		Ket					
								I		II		III		IV				14 = 7 + 13			15=14/6 x100%				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
		1.02.03.2.02.00 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	fasilitas kesehatan dengan tenaga kesehatan yang berbasis (fasuakes)	243	182.896.000	106	0	75	182.896.000	32	0	0	28.741.500					32	28.741.500	138	28.741.500	56,79	15,71	
		1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	Jumlah tenaga SDM yang meningkat kapasitasnya (Orang)	160	1.672.548.917	0	0	80	1.672.548.917	22	0	0	91.140.600					22	91.140.600	22	91.140.600	13,75	5,45	
		1.02.03.2.03.00 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu	296	1.672.548.917	136	0	90	1.672.548.917	22	0	106	91.140.600					128	91.140.600	264	91.140.600	89,19	5,45	
4		1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN	Proporsi fasyankes yang melakukan pelayanan farmasi	454,8	503.831.000	20,2	0	92	503.831.000	24,6	0	0	13.985.800					24,6	13.985.800	44,8	13.985.800	9,85	2,78	
				Proporsi pembinaan Mutu makanan dan	58,4		20,2		12,5		91		0						91		111,2		190,41		
		1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah ijin yang diterbitkan (Ijin)	0	94.615.000	0	0	30	94.615.000	7	0	0	4.485.800					0	4.485.800	0	4.485.800	0	4,74	
		1.02.04.2.01.00 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro	190	94.615.000	110	0	120	94.615.000	64	0	0	4.485.800					64	4.485.800	174	4.485.800	91,58	4,74	
		1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang	Jumlah sertifikat P- IRT yang diterbitkan (Lokasi)	0	198.096.000	0	0	70	198.096.000	59	0	0	9.500.000					0	9.500.000	0	9.500.000	0	4,8	
		1.02.04.2.03.00 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan	200	198.096.000	120	0	100	198.096.000	0	0	0	9.500.000					0	9.500.000	120	9.500.000	60	4,8	
		1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan	Jumlah produk IRTP yang dilakukan pemeriksaan (lokasi)	0	211.120.000	0	0	35	211.120.000	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	
		1.02.04.2.06.00 01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka	63	211.120.000	40	0	35	211.120.000	0	0	0	0					0	0	40	0	63,49	0	
5		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka	436	3.222.436.000	170,4	0	88	3.222.436.000	94	171.197.095	0	368.920.143					94	540.117.238	264,4	540.117.238	60,64	16,76	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024		Ket	
									I		II		III		IV			13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase desa siaga aktif mandiri (%)	40	914.208.000	0	0	22	914.208.000	0	9.530.000	0	25.410.000					0	34.940.000	0	34.940.000	0	3,82	
		1.02.05.2.01.00 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat	7	914.208.000	0	0	3	914.208.000	0	9.530.000	0	25.410.000					0	34.940.000	0	34.940.000	0	3,82	
		1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah	Jumlah pilar GERMAS yang dilaksanakan (pilar)	14	2.291.922.000	0	0	7	2.291.922.000	7	161.667.095	0	327.600.393					7	489.267.488	7	489.267.488	50	21,35	
		1.02.05.2.02.00 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	6	2.291.922.000	0	0	5	2.291.922.000	2	161.667.095	0	327.600.393					2	489.267.488	2	489.267.488	33,33	21,35	
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang difasilitasi (Unit)	6	16.306.000	0	0	3	16.306.000	2	0	0	15.909.750					2	15.909.750	2	15.909.750	33,33	97,57	
		1.02.05.2.03.00 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	2	16.306.000	0	0	1	16.306.000	1	0	0	15.909.750					1	15.909.750	1	15.909.750	50	97,57	

Sedangkan untuk Unit Organisasi Bersifat Fungsional dan Unit Organisasi Bersifat Khusus dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Target dan Realisasi BLUD dan BOK Puskesmas Tahun 2024

NO	UOBF / UOBK	Target	Realisasi	%
1	PUSKESMAS PLANTUNGAN	3.657.594.000	966.366.670	26.42%
2	PUSKESMAS SUKOREJO 01	4.148.849.000	1.499.937.299	36.15%
3	PUSKESMAS SUKOREJO 02	2.368.213.000	1.008.926.171	42.60%
4	PUSKESMAS PAGERUYUNG	3.471.536.068	1.350.870.353	38.91%
5	PUSKESMAS PATEAN	4.495.826.000	1.890.325.881	42.05%
6	PUSKESMAS SINGOROJO 01	2.806.204.719	1.170.750.247	41.72%
7	PUSKESMAS SINGOROJO 02	1.964.767.503	618.619.607	31.49%
8	PUSKESMAS LIMBANGAN	3.863.610.000	1.575.126.998	40.77%
9	PUSKESMAS BOJA 01	6.019.383.000	1.919.853.178	31.89%
10	PUSKESMAS BOJA 02	1.963.360.590	494.382.088	25.18%
11	PUSKESMAS KALIWUNGU	4.414.551.887	1.282.666.795	29.06%
12	PUSKESMAS KALIWUNGU SELATAN	2.966.634.630	854.697.450	28.81%
13	PUSKESMAS BRANGSONG 01	2.193.090.450	718.437.431	32.76%
14	PUSKESMAS BRANGSONG 02	2.540.403.975	1.077.067.995	42.40%
15	PUSKESMAS PEGANDON	3.731.226.615	1.143.690.829	30.65%
16	PUSKESMAS NGAMPEL	2.438.308.300	938.363.450	38.48%
17	PUSKESMAS GEMUH 01	2.385.155.900	870.199.581	36.48%
18	PUSKESMAS GEMUH 02	1.867.551.000	403.598.101	21.61%
19	PUSKESMAS RINGINARUM	2.945.610.000	962.088.891	32.66%
20	PUSKESMAS WELERI 01	2.227.415.000	644.327.732	28.93%
21	PUSKESMAS WELERI 02	1.778.394.300	521.096.093	29.30%
22	PUSKESMAS ROWOSARI 01	2.422.620.000	908.372.601	37.50%
23	PUSKESMAS ROWOSARI 02	2.507.360.000	900.385.864	35.91%
24	PUSKESMAS KANGKUNG 01	2.200.590.000	736.175.630	33.45%
25	PUSKESMAS KANGKUNG 02	1.734.337.000	475.158.431	27.40%
26	PUSKESMAS CEPIRING	4.249.254.752	1.619.108.051	38.10%
27	PUSKESMAS PATEBON 01	1.712.269.000	613.244.337	35.81%
28	PUSKESMAS PATEBON 02	2.216.527.030	704.830.081	31.80%
29	PUSKESMAS KENDAL 01	2.521.470.097	748.644.480	29.69%
30	PUSKESMAS KENDAL 02	2.023.438.000	829.406.001	40.99%
	Sub Total	85.835.551.816	29.446.718.316	34.31%
31	RSUD H. SOEWONDO KENDAL	145.462.650.000	65.447.455.590	44.99%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk BLUD 30 Puskesmas di Kabupaten Kendal Tahun Tahun 2024 triwulan ke-II realisasi sebesar 34.31

% atau sekitar Rp. 29.446.718.316 dari anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 85.835.551.816,- dan RSUD H. Soewondo Kendal sebesar 44.99 % atau sekitar Rp. 65.447.455.590 dari anggaran triwulan II anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 145.462.650.000.

Dalam analisa kinerja pelayanan perangkat daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal merupakan perangkat daerah teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kesehatan. Berdasarkan Perda Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Kendal, Dinas Kesehatan mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kesehatan. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, tugas dan fungsi Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang kesehatan;
- d. pengelolaan dan fasilitasi di bidang kesehatan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kesehatan;
- f. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kesehatan.

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026, tujuan pembangunan kesehatan Kabupaten Kendal adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, maka beberapa indikator kinerja yang dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 T-C 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	0,82	0,82	0.82	0.85	0.94	0,82	0.82	0.85	
			Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/ kota yang terakreditasi	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100	100	100	99.99	29.65	100	100	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	100	100	100	99.99	29.64	100	100	
		Jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100	100	100	99.25	29.29	100	100	
		Jumlah balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	100	100	100	100	45.66	100	100	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	80.00	100	100	
		Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	89.55	27.69	100	100	
		Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	98.17	41.55	100	100	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	83.22	25.66	100	100	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100.6	40.61	100	100	
		Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100	100	98.18	37.76	100	100	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100	100	100	90.32	28.55	100	100	
		Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	100	100	100	94.95	38.64	100	100	

Evaluasi pelayanan dianalisis berdasarkan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam Renstra Dinas Kesehatan tahun 2021-2026 yang juga berkaitan dengan pengelolaan isu – isu strategis untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021 sebagai berikut Angka Kematian Ibu (AKI), AKB (Angka Kematian Bayi, Prevalensi Stunting, dan Capaian SPM. Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum Dinas Kesehatan Tahun 2023 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2023 dapat di capai sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Pendorong masalah tersebut meliputi Angka Kematian Ibu (AKI) yang disebabkan oleh berbagai hal meliputi Eklamsi/PE, Covid, DBD, Jantung, Demam, Typoid, dan Pendarahan, kemudian tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) yang disebabkan oleh BBLR, Asfiksia, Kelaian Jantung, Kelaian Konginental, dan sebagainya, lalu untuk tingginya Prevalensi Stunting disebabkan oleh kunjungan posyandu yang belum 100% setiap bulannya serta GAP beban kerja & petugas sebaran petugas gizi belum merata dikarenakan perlu 2 petugas untuk intervsi & pencatatan pelaporan. Disisi lain Capaian SPM juga belum mencapai 100% dikarenakan beberapa penyebab yaitu pelaksanaan persalinan tidak di fasilitas kesehatan, kurangnya sarana dan prasarana untuk pemeriksaan, belum semua POS memiliki alat Set Posbindu, belum rutinnya penginputan data di aplikasi terkait pelaporan data (Contoh : Si IPEH – Hipertensi), kurangnya kepedulian keluarga selama masa pengobatan penderita, serta untuk TB terdapat kendala keterbatasan katrid TCM dan reagen Zn yg digunakan untuk pemeriksaan terduga TBC.

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) meliputi Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk, Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/ kota yang terakreditasi, Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil, Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan, Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar, Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar, Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TB sesuai standar, dan Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar. Untuk indikator kinerja kunci yang berkaitan dengan standar pelayanan minimal (SPM) secara keseluruhan belum mencapai target yang sudah di tentukan akan tetapi secara indeks pencapaian indeks pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) sudah mencapai indeks tuntas.

Capaian tersebut tidak terlepas dari factor pendorong dari sisi internal dan eksternal yang merupakan kebijakan/Tindakan yang diambil guna mengatasi factor – factor penyebab tidak tercapainya target kinerja. Adapun factor pendorong internal yang kami maksudkan antara lain:

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2023.
- b. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai sesuai dengan target IKU dan IKK serta tidak hanya fokus pada tindakan.
- c. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.
- d. Telah dilaksanakannya setiap bulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.

Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan yang kami maksudkan antara lain :

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari UPTD, UOBK dan UOBF yang ada di Dinas Kesehatan dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kesehatan.
- b. Adanya sinergitas program/kegiatan yang telah direncanakan dengan program dari Kementerian kesehatan dan kementerian dalam negeri, seperti pencapaian dalam standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan.

2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Disamping Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan, Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2024 juga telah melalui proses penelaahan usulan Program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan/ masyarakat. Secara umum, dari hasil penelaahan usulan Program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan, tidak ada usulan masyarakat yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal sesuai dengan tabel 2.4 berikut:

**Tabel 2.4 T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Kabupaten Kendal**

No	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal tahun 2024 yang dituangkan dalam Bab III ini adalah merupakan rangkaian pembahahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan penambahan usulan yang didanai oleh APBD perubahan Kabupaten Kendal Tahun 2024.

Adapun perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal tahun 2024 sebagai berikut, dimana rincian Rencana Program dan Kegiatan perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2024 terlampir :

Tabel 3.1. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal tahun 2024

No	Sub Kegiatan	Pagu Penetapan Pergeseran III	Total Pagu Perubahan	Keterangan
1.	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	99.480.000	Untuk pembuatan DED Labkesda Lokus DAK Fisik Th 2025
2.	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.595.835.766	4.059.828.099	Untuk pengadaan BMHP Labkesda dan PKM
3.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	30.389.811.400	39.894.759.800	Untuk premi asuransi PBI dan Non PBI
4.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	181.164.052.086	186.840.052.086	Untuk penyediaan gaji Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	53.550.000	78.550.000	Penyediaan makmin tamu
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	233.926.356	Penyediaan Rapat koordinasi
7.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	81.000.000	101.000.000	Pemeliharaan gedung dalam rangka penilaian ombudsman
8.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.000.000	650.000.000	Penyediaan biaya jasa listrik dan internet
9.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.000.000	99.000.000	Penyediaan pemeliharaan kendaraan bermotor

Sedangkan, dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut Angka Kematian Ibu (AKI), AKB (Angka Kematian Bayi, Prevalensi Stunting, dan Capaian SPM.

Tabel 3.2. Target dan Realisasi IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal

NO	IKU PD	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	TARGET 2024	TARGET 2025
1	AKI (Angka Kematian Ibu)	AKI / 100.000 Penduduk	81	134,53	80,9	80,8
2	AKB (Angka Kematian Bayi)	AKB / 1000 Kelahiran Hidup	7,8	9,79	7,7	7,6
3	Prevalensi Stunting	%	14,2	10,91	13,8	13,4
4	Capaian SPM	%	100	96,19	100	100

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum Dinas Kesehatan Tahun 2023 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2023 dapat di capai sesuai dengan target yang sudah di tentukan. Berikut target indikator kinerja kunci (IKK) dinas kesehatan.

Tabel 3.3. Target dan Realisasi IKK Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal

NO	IKK PD	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	TARGET 2024	TARGET 2025
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	Per 1000 Penduduk	0,82	0,94	0,82	0,82
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/ kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	99,99	100	100
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	99,99	100	100
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	99,25	100	100
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	89,55	100	100
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	98,17	100	100

NO	IKK PD	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	TARGET 2024	TARGET 2025
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	83,22	100	100
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100,6	100	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	98,18	100	100
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	90,32	100	100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	94,95	100	100

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2024 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2024, terutama pada pemenuhan kebutuhan anggaran gaji dan tunjangan di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah H. Soewondo Kendal dan 30 Puskesmas se-Kabupaten Kendal serta program-program yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minima di Bidang Kesehatan.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Kabupaten Kendal.

Kendal, 2024
**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KENDAL**



dr. ABIDIN
Pembina TK.I/IV b
NIP. 197103072002121003

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KESEHATAN KAB. KENDAL
TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
						DINAS KESEHATAN			526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00				
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00				
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 %	100 %	382.660.990.940,00	206.130.964.887,00	256.565.234.444,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		320.099.656.005,00		
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jmlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang di susun	5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		572.484.000,00		
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	118.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		572.484.000,00		
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan yang disusun	12 Bulan	12 Bulan	182.237.552.487,00	144.174.475.903,00	144.174.475.903,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		221.233.714.000,00		
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASI														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1417 Orang/bulan	1417 Orang/bulan	139.117.930.076,00	144.148.926.103,00	187.240.052.086,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		221.174.714.000,00		
	1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKF														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	330.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		44.000.000,00		
	1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKf														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30 Laporan	30 Laporan	25.549.800,00	25.549.800,00	25.549.800,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		15.000.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan yang disusun	12 Bulan	12 Bulan	20.725.000,00	65.865.000,00	65.865.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		283.381.000,00
	1	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKI												
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	20.725.000,00	65.865.000,00	65.865.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		283.381.000,00
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terlayani	90 orang	90 orang	0,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		119.000.000,00
	1	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	89 Paket	89 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		119.000.000,00
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	373.605.000,00	347.014.000,00	347.014.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		425.767.000,00
	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	57.930.000,00	31.339.000,00	31.339.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		36.492.000,00
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaar												
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	62.125.000,00	62.125.000,00	62.125.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		114.275.000,00
	1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu												
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	53.550.000,00	53.550.000,00	93.550.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		8.800.000,00
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKI												

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	246.900.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		266.200.000,00		
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang yang di adakan	15 unit	15 unit	7.400.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		316.470.000,00		
	1	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	7.400.000,00	81.000.000,00	155.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		316.470.000,00		
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	4 unit	4 unit	1.251.454.168,00	1.251.910.168,00	1.251.910.168,00		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		2.460.285.002,00		
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	4.840.000,00	4.840.000,00	4.840.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		5.324.000,00		
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listri													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	650.000.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		951.665.000,00		
	1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantc													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	77.993.000,00	97.993.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		638.799.000,00		
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kanto													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	696.614.168,00	669.077.168,00	669.077.168,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		864.497.002,00
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah yang di pelihara	36 unit	36 unit	107.600.000,00	126.400.000,00	126.400.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.018.004.000,00
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabat												
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	25 Unit	75.000.000,00	70.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		358.764.000,00
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	66 Unit	66 Unit	32.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		48.440.000,00
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	0,00	56.400.000,00	106.400.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		610.800.000,00
2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata rata capain SPM	100 %	100 %	138.619.310.435,00	84.243.136.777,00	100.994.075.666,00						98.749.297.205,00
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas) yang dibangun Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang di fasilitasi	36 Unit 5 Unit	36 Unit 5 Unit	63.939.574.835,00	16.512.617.042,00	16.512.617.042,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		11.707.740.000,00
	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	6 Unit	6 Unit	16.506.560.800,00	4.097.340.200,00	4.085.825.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		90.000.000,00
	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya												
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	1.185.000.000,00	1.800.000.000,00	99.480.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.000.000.000,00
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas												
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	7 Unit	0,00	0,00	1.650.291.836,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		2.000.000.000,00
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya												
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	1 Unit	0,00	0,00	58.058.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		70.000.000,00
	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya		-	0,00	32.693.800,00	32.693.800,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		100.000.000,00
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Keseha												
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	19 Unit	19 Unit	8.778.161.400,00	5.704.616.076,00	3.996.266.240,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		3.800.000.000,00
	1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibra:												
							Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regiona Maintainance Center	275 Unit	275 Unit	250.000.000,00	325.672.000,00	325.672.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		200.000.000,00
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Keseh												
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	30 Unit	30 Unit	0,00	264.086.000,00	264.086.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		100.000.000,00
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Keseha												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	14.132.954.635,00	3.595.835.766,00	4.309.828.099,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Dana Insentif Daerah DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		3.960.000.000,00
	1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga												
							Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	71425 Keluarga	71425 Keluarga	16.530.000,00	16.530.000,00	16.530.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		57.500.000,00
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Keseh												
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	360 Paket	360 Paket	711.343.000,00	675.843.200,00	675.843.200,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		275.000.000,00
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen 2 Dokumen	1 Dokumen 2 Dokumen	66.329.735.600,00	67.311.171.183,00	67.311.171.183,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		84.233.996.738,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Ham												
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16780 Orang	16780 Orang	66.010.000,00	66.010.000,00	66.010.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		72.000.000,00
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersali												
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16979 Orang	16979 Orang	725.404.000,00	548.496.000,00	548.496.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.032.964.500,00
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lah												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18695 Orang	18695 Orang	127.630.000,00	234.342.933,00	234.342.933,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		302.500.000,00		
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balit														
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74761 Orang	74761 Orang	31.452.000,00	31.452.000,00	31.452.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		302.500.000,00		
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Das														
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120415 Orang	120415 Orang	116.745.990,00	42.500.000,00	42.500.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		191.670.589,00		
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	691292 Orang	691292 Orang	448.394.000,00	85.094.000,00	85.094.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		462.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	128716 Orang	128716 Orang	329.915.000,00	34.815.000,00	34.815.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		308.100.000,00		
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	314883 Orang	314883 Orang	50.390.000,00	23.990.000,00	23.990.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		31.680.000,00		
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	6 Dokumen	6 Dokumen	62.828.000,00	62.828.000,00	37.203.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		907.500.000,00		
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen Dokumen	4 Dokumen Dokumen	290.342.000,00	151.875.000,00	8.995.882.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Insentif Fiskal	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.515.670.590,00		
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahrag														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	2 Dokumen	141.815.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		232.984.250,00		
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	5 Dokumen	561.009.000,00	1.079.040.400,00	1.079.040.400,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		684.795.100,00		
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehata														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5 Dokumen	5 Dokumen	381.358.000,00	450.931.000,00	450.931.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		23.344.274,00		
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lain														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		220.368.500,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	30 Dokumen	30 Dokumen	75.000.000,00	158.163.000,00	163.334.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		133.100.000,00
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZ												
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	0 0	0,00	68.155.000,00	68.155.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		50.000.000,00
	1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Keseha												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	286 Dokumen	286 Dokumen	335.411.000,00	14.730.000,00	15.154.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.028.500.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menul:												
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11 Dokumen	11 Dokumen	2.728.105.030,00	2.282.004.782,00	2.579.234.204,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		2.057.000.000,00
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	23.427.500.000,00	31.889.811.400,00	38.668.056.734,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		34.331.914.100,00
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasic												
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	14 Paket	14 Paket	34.810.000,00	41.950.000,00	64.980.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		66.500.000,00
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat												
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	9 Dokumen	9 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		541.155.000,00
	1	02	02	2.02	0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan												
							Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		273.174.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	30 Dokumen	30 Dokumen	2.175.711.400,00	1.152.278.800,00	1.281.778.800,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		457.133.050,00		
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	315.423.000,00	315.423.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hibah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.100.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	15 Unit	15 Unit	332.945.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Mas														
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	7 Laporan	7 Laporan	45.515.000,00	47.765.035,00	44.765.035,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		66.500.000,00		
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	36 Dokumen	36 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		66.500.000,00		
	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														
							Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	1.800.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.000.000.000,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulo:												
						Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2149 Orang	2149 Orang	184.340.000,00	92.170.000,00	92.170.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		110.604.000,00	
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)												
						Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	120 Orang	120 Orang	359.112.000,00	179.556.000,00	179.556.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		115.200.000,00	
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria												
						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	31 Orang	31 Orang	215.440.000,00	73.717.500,00	73.717.500,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		100.324.000,00	
	1	02	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok												
						Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	8 Tatanan	8 Tatanan	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		150.000.000,00	
	1	02	02	2.02	0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/k												
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		528.176.000,00	
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Ana												
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	0 Dokumen	0,00	332.080.000,00	332.080.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00	
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12 Bulan	12 Bulan	250.000.000,00	287.039.352,00	287.039.352,00		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.084.223.387,00	
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	167.810.000,00	167.810.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		953.051.000,00		
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah sakit daerah tipe C dan D yang dibina	6 unit	6 unit	8.100.000.000,00	132.309.200,00	132.309.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.723.337.080,00		
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehata														
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	36 Unit	36 Unit	100.000.000,00	132.309.200,00	132.309.200,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		815.837.080,00		
	1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	6 Dokumen	6 Dokumen	8.000.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hibah DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		907.500.000,00		
3	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Proporsi puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar	75 %	75 %	517.781.000,00	2.301.590.917,00	2.301.590.917,00						899.200.000,00		
	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Ijin Yang diterbitkan	80 Ijin	80 Ijin	0,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		59.200.000,00		
	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehat														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	85 Dokumen	85 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		59.200.000,00		
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standart di fasilitas pelayanan kesehatan	6 oran	6 oran	272.166.000,00	629.042.000,00	629.042.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		440.000.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Stand:														
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	680 Orang	680 Orang	272.166.000,00	446.146.000,00	446.146.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		220.000.000,00		
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehata														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		2 Dokumen	0,00	182.896.000,00	182.896.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		220.000.000,00		
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	70 oang	70 oang	245.615.000,00	1.672.548.917,00	1.672.548.917,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		400.000.000,00		
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kr														
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	90 Orang	90 Orang	245.615.000,00	1.672.548.917,00	1.672.548.917,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		400.000.000,00		
4	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Proporsi pembinaan Mutu makanan dan minuman Proporsi fasyankes yang melakukan pelayanan farmasi sesuai standar	13,3 93 % %	13,3 93 % %	811.829.000,00	503.831.000,00	503.831.000,00						820.600.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek , Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dikendalikan dan di awasi dalam rangka penerbitan dan tindak lanjut penerbitan ijin apotek, toko obat, toko alkes , usaha mikro obat tradisional (umot)	70 sarana	70 sarana	169.693.000,00	94.615.000,00	94.615.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		220.000.000,00		
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UI														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizina Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	90 Dokumen	90 Dokumen	169.693.000,00	94.615.000,00	94.615.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		220.000.000,00		
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor pirt sebagai ijin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat di produksi oleh industri rumah tangga	65 dokumen	65 dokumen	226.000.000,00	198.096.000,00	198.096.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		248.600.000,00		
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100 Dokumen	100 Dokumen	226.000.000,00	198.096.000,00	198.096.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		248.600.000,00
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Produk produk dan sarana produksi makanan minuman industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	30undefined produk	30undefined produk	416.136.000,00	211.120.000,00	211.120.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		352.000.000,00
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawa												
							Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	35 Unit	35 Unit	416.136.000,00	211.120.000,00	211.120.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		352.000.000,00
5	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Rumah Tangga PHBS	90 %	90 %	4.096.279.300,00	4.485.523.000,00	4.485.523.000,00						3.696.635.660,00
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase desa siaga aktif mandiri	18 %	18 %	839.964.000,00	914.208.000,00	914.208.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		379.500.000,00

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat												
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	839.964.000,00	914.208.000,00	914.208.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		379.500.000,00	
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pilar Germas yang dilaksanakan	7 pilar	7 pilar	2.517.642.000,00	2.291.922.000,00	2.291.922.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		2.277.000.000,00
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat												
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	5 Dokumen	5 Dokumen	2.448.402.000,00	2.291.922.000,00	2.291.922.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		2.277.000.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang difasilitasi	3 unit	3 unit	738.673.300,00	1.279.393.000,00	1.279.393.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.040.135.660,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)												
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	220.000.000,00	16.306.000,00	16.306.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		253.000.000,00	
						PUSKESMAS PLANTUNGAN			526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00		
6	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 %	100 %	382.660.990.940,00	206.130.964.887,00	256.565.234.444,00						320.099.656.005,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah unit kerja BLUD	31 unit	31 unit	198.562.654.285,00	59.984.299.816,00	59.984.299.816,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		93.670.551.003,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	2.781.126.733,00	Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		2.921.491.935,00		
7	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata rata capain SPM	100 %	100 %	138.619.310.435,00	84.243.136.777,00	100.994.075.666,00						98.749.297.205,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan kesehatan yang disediakan	34 Unit	34 Unit	66.329.735.600,00	67.311.171.183,00	67.311.171.183,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		84.233.996.738,00		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Ham														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	484 Orang	484 Orang	139.120.000,00	59.280.000,00	59.280.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		150.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersali														
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	240 Orang	0,00	33.720.000,00	33.720.000,00	Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		35.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balit														
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2430 Orang	2430 Orang	9.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Das														
							Jumlah Anak Usia Pendidika Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4324 Orang	4324 Orang	20.400.000,00	34.400.000,00	34.400.000,00	Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		25.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produkt														
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21868 Orang	21868 Orang	1.700.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanju														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4302 Orang	4302 Orang	13.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Plantungan Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Beri														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	84 Orang	84 Orang	4.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Plantungan Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	365 Orang	365 Orang	6.400.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Kendal, Plantungan Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		8.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi H														
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	552 Orang	552 Orang	1.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Kendal, Plantungan Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.500.000,00		
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	97 Dokumen	97 Dokumen	465.269.960,00	220.494.000,00	220.494.000,00	Kab. Kendal, Plantungan Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		415.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	49 Dokumen	49 Dokumen	7.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Plantungan Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	129 Dokumen	129 Dokumen	11.400.000,00	19.600.000,00	19.600.000,00	Kab. Kendal, Plantungan Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		13.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	44 Dokumen	44 Dokumen	172.377.400,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Plantungan Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	18 Dokumen	18 Dokumen	2.300.000,00	14.080.000,00	14.080.000,00	Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		2.500.000,00
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZ												
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	10 Orang	10 Orang	7.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular												
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	82 Dokumen	82 Dokumen	33.300.000,00	81.700.000,00	81.700.000,00	Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		35.000.000,00
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasic												
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	8 Paket	8 Paket	400.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas												
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen	16 Dokumen	201.656.000,00	228.622.000,00	228.622.000,00	Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		210.000.000,00
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Mas												
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3 Laporan	3 Laporan	250.000,00	300.000,00	300.000,00	Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		500.000,00
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis												
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	72 Orang	72 Orang	13.200.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Kendal, Plantungan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		15.000.000,00
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	30 Orang	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Kendal, Plantungan Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.500.000,00		
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malari														
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	16 Orang	16 Orang	800.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Plantungan Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduk														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	11 Dokumen	0,00	27.269.000,00	27.269.000,00	Kab. Kendal, Plantungan Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		30.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Ana														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	540 Dokumen	0,00	87.300.000,00	87.300.000,00	Kab. Kendal, Plantungan Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		40.000.000,00		
8	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Rumah Tangga PHBS	90 %	90 %	4.096.279.300,00	4.485.523.000,00	4.485.523.000,00						3.696.635.660,00		
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang difasilitasi	3 unit	3 unit	738.673.300,00	1.279.393.000,00	1.279.393.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.040.135.660,00		
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKB														
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	31 Dokumen	31 Dokumen	17.400.000,00	120.629.000,00	120.629.000,00	Kab. Kendal, Plantungan Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		20.000.000,00		
						PUSKESMAS SUKOREJO I				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00						424.265.388.870,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00						424.265.388.870,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00						424.265.388.870,00		
9	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 %	100 %	382.660.990.940,00	206.130.964.887,00	256.565.234.444,00						320.099.656.005,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah unit kerja BLUD	31 Unit	31 Unit	198.562.654.285,00	59.984.299.816,00	59.984.299.816,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		93.670.551.003,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.898.808.102,00	3.200.000.000,00	3.361.526.238,00	Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		3.663.000.000,00		
10	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata rata capain SPM	100 %	100 %	138.619.310.435,00	84.243.136.777,00	100.994.075.666,00						98.749.297.205,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan kesehatan yang disediakan	34 Unit	34 Unit	66.329.735.600,00	67.311.171.183,00	67.311.171.183,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		84.233.996.738,00		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Ham														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	500 Orang	47.865.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	300 Orang	0,00	25.170.000,00	25.170.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		25.500.000,00		
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersali														
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	112 Orang	0,00	16.536.000,00	16.536.000,00	Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		16.536.000,00		
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balit														
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120 Orang	120 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Das														
							Jumlah Anak Usia Pendidika Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	1000 Orang	10.200.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		35.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produkt														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	600 Orang	363 Orang	5.200.000,00	20.889.000,00	20.889.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		20.889.000,00
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanju												
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	350 Orang	350 Orang	7.250.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Ber:												
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	10 Orang	10 Orang	4.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis												
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5 Orang	5 Orang	1.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		6.000.000,00
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi H												
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6 Orang	6 Orang	600.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		600.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	565.592.980,00	254.334.000,00	254.334.000,00	Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		509.562.900,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	11.160.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		11.160.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11 Dokumen	11 Dokumen	6.300.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		6.300.000,00
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	10 Dokumen	10 Dokumen	79.496.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		79.496.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehata												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen	10 Dokumen	3.200.000,00	56.780.000,00	56.780.000,00	Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		3.200.000,00
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZ												
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	300 Orang	300 Orang	500.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menulu												
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	99.300.000,00	167.900.000,00	167.900.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		179.900.000,00
	1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekola												
							Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	800 Orang	800 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		2.000.000,00
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasico												
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	10 Paket	10 Paket	10.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		10.600.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas												
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	199.814.600,00	226.534.000,00	226.534.000,00	Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		199.814.600,00
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Mas												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4 Laporan	4 Laporan	400.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		400.000,00		
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulos														
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	10 Orang	3.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata		3.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	20 Orang	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		2.100.000,00		
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduk														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Ana														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	24 Dokumen	0,00	78.420.000,00	78.420.000,00	Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		53.500.000,00		
11	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Rumah Tangga PHBS	90 %	90 %	4.096.279.300,00	4.485.523.000,00	4.485.523.000,00						3.696.635.660,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang difasilitasi	3 Unit	3 Unit	738.673.300,00	1.279.393.000,00	1.279.393.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.040.135.660,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKB)												
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	50.900.000,00	39.586.000,00	39.586.000,00	Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		50.900.000,00
						PUSKESMAS SUKOREJO II				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00	
12	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 %	100 %	382.660.990.940,00	206.130.964.887,00	256.565.234.444,00						320.099.656.005,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah unit kerja BLUD	31 unit	31 unit	198.562.654.285,00	59.984.299.816,00	59.984.299.816,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		93.670.551.003,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD												
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.550.000.000,00	1.581.000.000,00	1.679.051.365,00	Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.650.000.000,00
13	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata rata capain SPM	100 %	100 %	138.619.310.435,00	84.243.136.777,00	100.994.075.666,00						98.749.297.205,00
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan kesehatan yang disediakan	34 unit	34 unit	66.329.735.600,00	67.311.171.183,00	67.311.171.183,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		84.233.996.738,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Ham												
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	361 Orang	361 Orang	56.880.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		70.000.000,00
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersali												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1 Orang	0,00	28.200.000,00	28.200.000,00	Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balit														
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1316 Orang	1316 Orang	500.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		600.000,00		
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Das														
							Jumlah Anak Usia Pendidika Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3375 Orang	3375 Orang	10.750.000,00	34.800.000,00	34.800.000,00	Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		11.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produkt														
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15924 Orang	15924 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		3.500.000,00		
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanju														
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2979 Orang	2979 Orang	10.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		10.500.000,00		
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Ber:														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	58 Orang	58 Orang	5.100.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		5.300.000,00		
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulos														
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yan Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	50 Orang	50 Orang	5.300.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		5.500.000,00		
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi H														
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	434 Orang	434 Orang	3.000.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		3.300.000,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	21 Dokumen	21 Dokumen	359.216.480,00	191.523.000,00	191.523.000,00	Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		305.000.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5 Dokumen	5 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		5.000.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	5 Dokumen	9.400.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00	Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		10.000.000,00
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	6 Dokumen	6 Dokumen	190.050.200,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		200.000.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	28.256.000,00	28.256.000,00	Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		3.000.000,00
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA												
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	48 Orang	48 Orang	3.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		4.000.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular												
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5 Dokumen	5 Dokumen	56.100.000,00	115.586.000,00	115.586.000,00	Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		57.000.000,00
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional												
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	6 Paket	6 Paket	300.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		400.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	165.776.200,00	182.644.000,00	182.644.000,00	Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		170.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Mas														
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	10 Laporan	10 Laporan	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		500.000,00		
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulos														
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	50 Orang	50 Orang	6.600.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		7.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV														
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	1 Orang	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Kendal, Sukorejo, Sukorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10 Orang	10 Orang	22.900.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		23.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduk														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		18.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Ana														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	0,00	62.400.000,00	62.400.000,00	Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		26.400.000,00		
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	250.000.000,00	287.039.352,00	287.039.352,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.084.223.387,00		
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	5.304.000,00	5.304.000,00	Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		5.000.000,00
14	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Rumah Tangga PHBS	90 %	90 %	4.096.279.300,00	4.485.523.000,00	4.485.523.000,00						3.696.635.660,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang difasilitasi	3 unit	3 unit	738.673.300,00	1.279.393.000,00	1.279.393.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.040.135.660,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKB												
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5 Dokumen	5 Dokumen	25.550.000,00	53.400.000,00	53.400.000,00	Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		26.000.000,00
						PUSKESMAS PAGERUYUNG				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00						424.265.388.870,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00						424.265.388.870,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00						424.265.388.870,00
15	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 %	100 %	382.660.990.940,00	206.130.964.887,00	256.565.234.444,00						320.099.656.005,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-			198.562.654.285,00	59.984.299.816,00	59.984.299.816,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		93.670.551.003,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD												
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.004.000.000,00	2.437.245.068,00	2.555.191.655,00	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		2.588.528.800,00
16	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata rata capain SPM	100 %	100 %	138.619.310.435,00	84.243.136.777,00	100.994.075.666,00						98.749.297.205,00
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan kesehatan yang disediakan	34 unit	34 unit	66.329.735.600,00	67.311.171.183,00	67.311.171.183,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		84.233.996.738,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Ham												
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	200 Orang	250.390.000,00	50.050.000,00	50.050.000,00	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		300.000.000,00
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersali												
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	120 Orang	0,00	32.200.000,00	32.200.000,00	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		32.700.000,00
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balit												
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang	600.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Das												
							Jumlah Anak Usia Pendidika Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	200 Orang	4.000.000,00	17.800.000,00	17.800.000,00	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		4.500.000,00
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produkt												
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang	250 Orang	1.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanju												
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	190 Orang	190 Orang	22.190.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Ber:												
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	90 Orang	90 Orang	15.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulos												
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	91 Orang	91 Orang	300.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		300.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi H														
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	30 Orang	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	39 Dokumen	39 Dokumen	511.498.380,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
							Jumlah Dokumen Hasil Pagelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	120 Dokumen	0,00	247.788.000,00	247.788.000,00	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahrag														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	7.450.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	9.450.000,00	38.800.000,00	38.800.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		38.800.000,00		
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehata														
							Jumlah Dokumen Hasil Pagelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	20 Dokumen	20 Dokumen	55.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehata														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	15 Dokumen	15 Dokumen	2.000.000,00	18.385.000,00	18.385.000,00	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		18.385.000,00		
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menul														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	21 Dokumen	21 Dokumen	78.750.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	12 Dokumen	0,00	145.425.000,00	145.425.000,00	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasic												
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	2 Paket	2 Paket	100.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas												
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen	16 Dokumen	217.807.400,00	246.933.000,00	246.933.000,00	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		246.933.000,00
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Mas												
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan	250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		300.000,00
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulos												
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20 Orang	20 Orang	4.000.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		15.400.000,00
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV												
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	6 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduk												
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	124 Dokumen	0,00	16.760.000,00	16.760.000,00	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Ana												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	136 Dokumen	0,00	129.800.000,00	129.800.000,00	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
17	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Rumah Tangga PHBS	90 %	90 %	4.096.279.300,00	4.485.523.000,00	4.485.523.000,00						3.696.635.660,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			738.673.300,00	1.279.393.000,00	1.279.393.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.040.135.660,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKB												
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	23 Dokumen	23 Dokumen	33.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	4 Dokumen	0,00	64.050.000,00	64.050.000,00	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
						PUSKESMAS PATEAN				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00	
18	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 %	100 %	382.660.990.940,00	206.130.964.887,00	256.565.234.444,00						320.099.656.005,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-			198.562.654.285,00	59.984.299.816,00	59.984.299.816,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		93.670.551.003,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD												
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.653.077.752,00	3.330.000.000,00	4.565.759.367,00	Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		3.750.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
19	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata rata capain SPM	100 %	100 %	138.619.310.435,00	84.243.136.777,00	100.994.075.666,00						98.749.297.205,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			66.329.735.600,00	67.311.171.183,00	67.311.171.183,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		84.233.996.738,00		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Ham														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	738 Orang	738 Orang	219.794.000,00	35.238.000,00	35.238.000,00	Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		300.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersali														
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	280 Orang	0,00	45.066.000,00	45.066.000,00	Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balit														
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	671 Orang	671 Orang	300.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		400.000,00		
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Das														
							Jumlah Anak Usia Pendidika Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7074 Orang	7074 Orang	23.400.000,00	15.800.000,00	15.800.000,00	Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		24.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produkt														
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35619 Orang	35619 Orang	4.650.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		4.700.000,00		
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanju														
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7253 Orang	7253 Orang	5.950.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		6.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Ber:														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	137 Orang	137 Orang	32.350.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		32.400.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis												
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	603 Orang	603 Orang	7.800.000,00	13.950.000,00	13.950.000,00	Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		7.825.000,00
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi H												
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1117 Orang	1117 Orang	3.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		3.625.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6 Dokumen	6 Dokumen	546.480.280,00	272.880.000,00	272.880.000,00	Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		490.500.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	2 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		2.000.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokumen	6 Dokumen	18.900.000,00	22.200.000,00	22.200.000,00	Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		20.000.000,00
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	125.893.300,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		127.000.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen	3 Dokumen	5.350.000,00	99.132.000,00	99.132.000,00	Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		6.000.000,00
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZ												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	137 Orang	137 Orang	800.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		900.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menuli												
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	21 Dokumen	21 Dokumen	85.620.800,00	155.600.000,00	155.600.000,00	Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		90.000.000,00
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasic												
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12 Paket	12 Paket	1.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		2.000.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas												
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	18 Dokumen	18 Dokumen	245.436.200,00	278.336.000,00	278.336.000,00	Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		300.000.000,00
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Mas												
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	6 Laporan	6 Laporan	300.000,00	802.000,00	802.000,00	Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		400.000,00
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulos												
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	22 Orang	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV												
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	34 Orang	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	Kab. Kendal, Patean, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malari												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.836.754.719,00	1.836.754.719,00	1.965.341.298,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		2.436.559.694,00		
22	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata rata capain SPM	100 %	100 %	138.619.310.435,00	84.243.136.777,00	100.994.075.666,00						98.749.297.205,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			66.329.735.600,00	67.311.171.183,00	67.311.171.183,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		84.233.996.738,00		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Ham														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	507 Orang	507 Orang	79.986.000,00	20.136.000,00	20.136.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		125.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersali														
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	472 Orang	472 Orang	15.800.000,00	37.992.000,00	37.992.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		41.791.000,00		
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lah														
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	204 Orang	204 Orang	6.380.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		7.018.000,00		
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balit														
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	360 Orang	360 Orang	20.864.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Das														
							Jumlah Anak Usia Pendidika Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3461 Orang	3461 Orang	17.400.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		18.150.000,00		
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produkt														
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang	2000 Orang	3.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		40.418.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanju														
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4393 Orang	4393 Orang	24.240.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	373 Orang	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		15.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi H														
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	10 Orang	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		17.500.000,00		
	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (K														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	248 Dokumen	248 Dokumen	16.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	420.291.480,00	231.448.000,00	231.448.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		280.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	4 Dokumen	6.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10 Dokumen	10 Dokumen	28.500.000,00	18.350.000,00	18.350.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		20.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	19.500.000,00	30.776.000,00	30.776.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		33.000.000,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZ												
						Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	116 Orang	116 Orang	13.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00	
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular:												
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	163.600.000,00	174.050.000,00	174.050.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		178.960.000,00	
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasic												
						Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	25 Paket	25 Paket	4.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas												
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen	16 Dokumen	204.152.800,00	231.453.000,00	231.453.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		250.000.000,00	
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Mas												
						Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	5 Laporan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		3.300.000,00	
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulos												
						Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	373 Orang	373 Orang	27.400.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		7.000.000,00	
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV												
						Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	1 Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		5.000.000,00	
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduk												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen	0,00	36.744.000,00	36.744.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		40.000.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Ana												
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	507 Dokumen	0,00	119.696.000,00	119.696.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		130.000.000,00
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	250.000.000,00	287.039.352,00	287.039.352,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.084.223.387,00
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatai												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
23	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Rumah Tangga PHBS	90 %	90 %	4.096.279.300,00	4.485.523.000,00	4.485.523.000,00						3.696.635.660,00
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			2.517.642.000,00	2.291.922.000,00	2.291.922.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		2.277.000.000,00
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Seh												
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	882 Dokumen	882 Dokumen	69.240.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	738.673.300,00	1.279.393.000,00	1.279.393.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.040.135.660,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKB												
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	64 Dokumen	0,00	14.105.000,00	14.105.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		17.000.000,00
						PUSKESMAS SINGOROJO II				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00						424.265.388.870,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00						424.265.388.870,00			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00						424.265.388.870,00			
24	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 %	100 %	382.660.990.940,00	206.130.964.887,00	256.565.234.444,00						320.099.656.005,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-			198.562.654.285,00	59.984.299.816,00	59.984.299.816,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		93.670.551.003,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.113.804.094,00	1.225.184.503,00	1.283.949.276,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.546.068.714,00		
25	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata rata capain SPM	100 %	100 %	138.619.310.435,00	84.243.136.777,00	100.994.075.666,00						98.749.297.205,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			66.329.735.600,00	67.311.171.183,00	67.311.171.183,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		84.233.996.738,00		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Ham														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	329 Orang	329 Orang	68.950.000,00	14.130.000,00	14.130.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		75.845.000,00		
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersali														
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	329 Orang	0,00	16.825.000,00	16.825.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		16.825.000,00		
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balit														
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1196 Orang	1196 Orang	4.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		4.400.000,00		
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Das														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2353 Orang	2353 Orang	9.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		9.900.000,00		
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13841 Orang	13841 Orang	19.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		20.900.000,00		
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanju														
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2721 Orang	2721 Orang	15.175.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		16.692.500,00		
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Beri														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	53 Orang	53 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		5.500.000,00		
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulos														
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yan Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	237 Orang	237 Orang	7.300.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		8.030.000,00		
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi H														
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	50 Orang	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		2.400.000,00		
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	9 Dokumen	9 Dokumen	347.093.280,00	208.447.000,00	208.447.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		320.169.520,00		
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahrag														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10 Dokumen	10 Dokumen	57.430.300,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		63.173.330,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan												
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	5 Dokumen	10.600.000,00	30.700.000,00	30.700.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		11.660.000,00	
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan												
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	8 Dokumen	8 Dokumen	73.376.400,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		80.714.040,00	
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan												
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.450.000,00	34.858.000,00	34.858.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		2.695.000,00	
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA												
						Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	753 Orang	753 Orang	4.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		4.840.000,00	
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular												
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	28 Dokumen	28 Dokumen	64.330.000,00	75.750.000,00	75.750.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		70.763.000,00	
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional												
						Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	4 Paket	4 Paket	100.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		110.000,00	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas												
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	2 Dokumen	155.946.200,00	171.572.000,00	171.572.000,00	-	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		171.540.820,00	
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Mas												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	5 Laporan	5 Laporan	600.000,00	800.000,00	800.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		660.000,00		
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulos														
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	120 Orang	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		3.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV														
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	50 Orang	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.200.000,00		
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduk														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	5 Dokumen	0,00	19.250.000,00	19.250.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		19.250.000,00		
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Ana														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	5 Dokumen	0,00	66.625.000,00	66.625.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		66.625.000,00		
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	250.000.000,00	287.039.352,00	287.039.352,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.084.223.387,00		
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatai														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		5.000.000,00		
26	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Rumah Tangga PHBS	90 %	90 %	4.096.279.300,00	4.485.523.000,00	4.485.523.000,00						3.696.635.660,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			738.673.300,00	1.279.393.000,00	1.279.393.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.040.135.660,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKB)												
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5 Dokumen	5 Dokumen	39.720.000,00	52.026.000,00	52.026.000,00	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		43.692.000,00
						PUSKESMAS LIMBANGAN				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00	
27	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 %	100 %	382.660.990.940,00	206.130.964.887,00	256.565.234.444,00						320.099.656.005,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-			198.562.654.285,00	59.984.299.816,00	59.984.299.816,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		93.670.551.003,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD												
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.846.716.917,00	2.776.000.000,00	3.655.063.579,00	Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		3.019.790.728,00
28	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata rata capain SPM	100 %	100 %	138.619.310.435,00	84.243.136.777,00	100.994.075.666,00						98.749.297.205,00
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			66.329.735.600,00	67.311.171.183,00	67.311.171.183,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		84.233.996.738,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Ham												
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	580 Orang	580 Orang	172.625.700,00	60.480.000,00	60.480.000,00	Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		181.256.985,00
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersali												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	720 Orang	0,00	5.155.000,00	5.155.000,00	Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		10.500.000,00		
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balit														
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1386 Orang	1386 Orang	11.100.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		11.655,00		
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Das														
							Jumlah Anak Usia Pendidika Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3455 Orang	3455 Orang	15.400.000,00	26.600.000,00	26.600.000,00	Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		16.170.000,00		
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produkt														
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25070 Orang	25070 Orang	6.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		6.930.000,00		
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanju														
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5000 Orang	5000 Orang	16.920.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		17.766.000,00		
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Ber:														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	90 Orang	90 Orang	19.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		20.160.000,00		
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulos														
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yan Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	402 Orang	402 Orang	3.300.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		3.465.000,00		
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi H														
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	724 Orang	724 Orang	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		2.200.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Benc														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	3 Dokumen	3 Dokumen	300.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		350.000,00		
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	9 Dokumen	9 Dokumen	550.318.480,00	249.334.000,00	249.334.000,00	Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		250.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	7 Dokumen	7 Dokumen	20.790.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		21.829.500,00		
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7 Dokumen	7 Dokumen	9.000.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00	Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		9.900.000,00		
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	8 Dokumen	8 Dokumen	96.050.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		100.852.500,00		
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen	10 Dokumen	5.050.000,00	44.700.000,00	44.700.000,00	Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		5.302.500,00		
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZ														
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	20 Orang	20 Orang	1.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.890.000,00		
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menul														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	21 Dokumen	21 Dokumen	87.400.000,00	158.000.000,00	158.000.000,00	Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		91.770.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasic												
						Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	2 Paket	2 Paket	200.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		250.000,00	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas												
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	2 Dokumen	229.035.570,00	257.163.000,00	257.163.000,00	Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		240.486.750,00	
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Mas												
						Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4 Laporan	4 Laporan	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		450.000,00	
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis												
						Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	396 Orang	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.500.000,00	
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV												
						Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	624 Orang	0,00	450.000,00	450.000,00	Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		500.000,00	
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduk												
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		2.200.000,00	
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Ana												
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	720 Dokumen	0,00	163.320.000,00	163.320.000,00	Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		165.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	250.000.000,00	287.039.352,00	287.039.352,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.084.223.387,00			
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	12 Dokumen	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		3.000.000,00		
29	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Rumah Tangga PHBS	90 %	90 %	4.096.279.300,00	4.485.523.000,00	4.485.523.000,00						3.696.635.660,00		
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			738.673.300,00	1.279.393.000,00	1.279.393.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.040.135.660,00		
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10 Dokumen	10 Dokumen	26.820.000,00	91.658.000,00	91.658.000,00	Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		28.161.000,00		
						PUSKESMAS BRANGSONG I				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00			
30	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 %	100 %	382.660.990.940,00	206.130.964.887,00	256.565.234.444,00						320.099.656.005,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-			198.562.654.285,00	59.984.299.816,00	59.984.299.816,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		93.670.551.003,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.437.139.915,00	1.502.120.450,00	1.516.126.579,00	Kab. Kendal, Brangsong, Sidorejo	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		21.774.366.690,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata rata capain SPM	100 %	100 %	138.619.310.435,00	84.243.136.777,00	100.994.075.666,00						98.749.297.205,00
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			66.329.735.600,00	67.311.171.183,00	67.311.171.183,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		84.233.996.738,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Ham												
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	550 Orang	550 Orang	136.895.000,00	19.845.000,00	19.845.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Sidorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		157.429.250,00
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersali												
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	500 Orang	0,00	26.140.000,00	26.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balit												
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1100 Orang	1100 Orang	17.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		20.470.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Das												
							Jumlah Anak Usia Pendidika Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2500 Orang	2500 Orang	14.200.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		16.330.000,00
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanju												
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang	250 Orang	24.350.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		28.002.500,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulos												
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	50 Orang	50 Orang	4.500.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		5.175.500,00
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi H												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	25 Orang	25 Orang	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.380.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	352.933.280,00	162.499.000,00	162.499.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		341.438.680,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	13.475.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		15.496.250,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	8.400.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		9.660.000,00
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	44.755.500,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		51.468.825,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	5.400.000,00	19.045.000,00	19.045.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		6.210.000,00
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA												
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	30 Orang	30 Orang	5.300.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		6.095.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular												
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	55.300.000,00	92.650.000,00	92.650.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		63.595.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	145.508.900,00	164.966.000,00	164.966.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		167.335.235,00
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Mas												
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	3 Laporan	0,00	300.000,00	300.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulo												
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	12 Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV												
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	7 Orang	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduk												
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	7 Dokumen	0,00	13.230.000,00	13.230.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Ana												
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	330 Dokumen	0,00	86.942.000,00	86.942.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
32	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	4.096.279.300,00	4.485.523.000,00	4.485.523.000,00						3.696.635.660,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	738.673.300,00	1.279.393.000,00	1.279.393.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.040.135.660,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKB)												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	14 Dokumen	0,00	71.753.000,00	71.753.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
						PUSKESMAS BRANGSONG II				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00			
33	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 %	100 %	382.660.990.940,00	206.130.964.887,00	256.565.234.444,00						320.099.656.005,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-			198.562.654.285,00	59.984.299.816,00	59.984.299.816,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		93.670.551.003,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.480.715.311,00	1.793.262.975,00	2.319.684.434,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		2.139.942.322,00		
34	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata rata capain SPM	100 %	100 %	138.619.310.435,00	84.243.136.777,00	100.994.075.666,00						98.749.297.205,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			66.329.735.600,00	67.311.171.183,00	67.311.171.183,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		84.233.996.738,00		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Ham														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	409 Orang	409 Orang	34.980.000,00	22.080.000,00	22.080.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		38.478.000,00		
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersal														
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	384000 Orang	0,00	5.220.000,00	5.220.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Brangsong	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		5.742.000,00		
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balit														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1436 Orang	1436 Orang	43.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		47.850.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Das												
							Jumlah Anak Usia Pendidika Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	337 Orang	337 Orang	15.100.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		16.610.000,00
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif												
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	370 Orang	370 Orang	2.650.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		2.915.000,00
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut												
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2369 Orang	2369 Orang	23.960.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		25.000.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis												
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	252 Orang	252 Orang	11.150.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		15.000.000,00
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV												
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	585 Orang	585 Orang	1.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		2.000.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	13 Dokumen	13 Dokumen	348.224.580,00	177.231.000,00	177.231.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		300.000.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	29 Dokumen	29 Dokumen	21.540.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		25.000.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16 Dokumen	16 Dokumen	11.400.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		13.000.000,00
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatar												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	10 Dokumen	10 Dokumen	160.644.400,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		180.000.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatar												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6 Dokumen	6 Dokumen	3.750.000,00	14.422.000,00	14.422.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		5.000.000,00
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZ												
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	56 Orang	56 Orang	5.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		6.000.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menuli												
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	21 Dokumen	21 Dokumen	48.600.000,00	109.950.000,00	109.950.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		52.000.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas												
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	157.437.700,00	178.377.000,00	178.377.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Brangsong	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		160.000.000,00
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Mas												
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	5 Laporan	0,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		550.000,00
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulos												
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	24 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		6.600.000,00
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	56 Orang	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		2.475.000,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduk												
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	2 Dokumen	0,00	11.600.000,00	11.600.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		12.000.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Ana												
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	50 Dokumen	0,00	128.860.000,00	128.860.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		141.746.000,00
35	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Rumah Tangga PHBS	90 %	90 %	4.096.279.300,00	4.485.523.000,00	4.485.523.000,00						3.696.635.660,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			738.673.300,00	1.279.393.000,00	1.279.393.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.040.135.660,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKB												
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	2.800.000,00	57.051.000,00	57.051.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		3.100.000,00
						PUSKESMAS PEGANDON				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00	
36	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 %	100 %	382.660.990.940,00	206.130.964.887,00	256.565.234.444,00						320.099.656.005,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-			198.562.654.285,00	59.984.299.816,00	59.984.299.816,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		93.670.551.003,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUC												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.859.077.752,00	2.822.473.615,00	2.963.654.933,00	Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		4.000.000.000,00		
37	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata rata capain SPM	100 %	100 %	138.619.310.435,00	84.243.136.777,00	100.994.075.666,00						98.749.297.205,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			66.329.735.600,00	67.311.171.183,00	67.311.171.183,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		84.233.996.738,00		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Ham														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	650 Orang	650 Orang	121.300.000,00	37.620.000,00	37.620.000,00	Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		133.430.000,00		
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersali														
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	60 Orang	0,00	5.720.000,00	5.720.000,00	Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		7.500.000,00		
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balit														
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2500 Orang	2500 Orang	18.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		20.680.000,00		
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Das														
							Jumlah Anak Usia Pendidika Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3500 Orang	3500 Orang	35.800.000,00	37.950.000,00	37.950.000,00	Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		39.380.000,00		
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produkt														
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2100 Orang	2100 Orang	5.850.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		6.435.000,00		
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanju														
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7500 Orang	7500 Orang	13.860.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		15.246.000,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025							
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Beri:														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	150 Orang	150 Orang	2.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		3.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis:														
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	125 Orang	125 Orang	8.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		10.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi H														
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	30 Orang	30 Orang	600.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat:														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	20 Dokumen	20 Dokumen	499.608.280,00	217.204.000,00	217.204.000,00	Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		487.936.020,00		
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga:														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	4 Dokumen	21.475.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		25.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan:														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10 Dokumen	10 Dokumen	9.600.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		10.600.000,00		
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan:														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	7 Dokumen	7 Dokumen	23.499.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		25.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan:														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	30 Dokumen	30 Dokumen	2.301.900,00	9.228.000,00	9.228.000,00	Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		2.500.000,00		
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAP2														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	130 Orang	130 Orang	1.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		2.200.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menuli												
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	88.900.000,00	200.775.000,00	200.775.000,00	Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		95.000.000,00
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasic												
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	30 Paket	30 Paket	5.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		6.000.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas												
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	192.570.900,00	216.962.000,00	216.962.000,00	Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		210.000.000,00
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Mas												
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	30 Laporan	30 Laporan	2.000.000,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		2.500.000,00
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulos												
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	120 Orang	120 Orang	2.400.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		3.000.000,00
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV												
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	20 Orang	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		2.000.000,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduk												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	10 Dokumen	0,00	7.150.000,00	7.150.000,00	Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		9.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Ana														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	50 Dokumen	0,00	136.992.000,00	136.992.000,00	Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		155.000.000,00		
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	250.000.000,00	287.039.352,00	287.039.352,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.084.223.387,00		
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatai														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	82.000,00	82.000,00	Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		100.000,00		
38	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Rumah Tangga PHBS	90 %	90 %	4.096.279.300,00	4.485.523.000,00	4.485.523.000,00						3.696.635.660,00		
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			738.673.300,00	1.279.393.000,00	1.279.393.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.040.135.660,00		
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKB)														
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	30 Dokumen	30 Dokumen	17.400.000,00	17.070.000,00	17.070.000,00	Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		20.000.000,00		
						PUSKESMAS NGAMPEL				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00			
39	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 %	100 %	382.660.990.940,00	206.130.964.887,00	256.565.234.444,00						320.099.656.005,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-			198.562.654.285,00	59.984.299.816,00	59.984.299.816,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		93.670.551.003,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD												
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.539.386.409,00	1.582.386.300,00	1.768.747.864,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.926.387.263,00
40	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata rata capain SPM	100 %	100 %	138.619.310.435,00	84.243.136.777,00	100.994.075.666,00						98.749.297.205,00
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			66.329.735.600,00	67.311.171.183,00	67.311.171.183,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		84.233.996.738,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Ham												
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	569 Orang	569 Orang	84.781.000,00	56.700.000,00	56.700.000,00	Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		90.000.000,00
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersali												
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	60 Orang	0,00	5.780.000,00	5.780.000,00	Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		5.780.000,00
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balit												
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1080 Orang	1080 Orang	63.700.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		70.000.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar												
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3279 Orang	3279 Orang	8.400.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		10.000.000,00
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif												
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	1000 Orang	5.250.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		6.000.000,00
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1440 Orang	1440 Orang	24.300.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		25.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Beri														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		7.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	300 Orang	300 Orang	2.900.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		3.500.000,00		
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi H														
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	30 Orang	30 Orang	2.400.000,00	200.000,00	200.000,00	Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		3.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2772 Dokumen	2772 Dokumen	534.405.180,00	203.702.000,00	203.702.000,00	Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		500.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahrag														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	3.900.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		5.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	6.500.000,00	24.900.000,00	24.900.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		7.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehata														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	144 Dokumen	144 Dokumen	25.965.700,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		30.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehata														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	24 Dokumen	24 Dokumen	5.500.000,00	27.190.000,00	27.190.000,00	Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		6.000.000,00
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZ												
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	100 Orang	750.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.000.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular												
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	60 Dokumen	60 Dokumen	45.050.000,00	119.200.000,00	119.200.000,00	Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		50.000.000,00
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasic												
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	10 Paket	10 Paket	500.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.000.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas												
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 Dokumen	60 Dokumen	180.245.600,00	204.348.000,00	204.348.000,00	Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		200.000.000,00
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Mas												
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0 Laporan	0,00	800.000,00	800.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		800.000,00
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis												
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	50 Orang	50 Orang	2.000.000,00	8.550.000,00	8.550.000,00	Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		3.000.000,00
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0 Orang	0,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		600.000,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduk												
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	0 Dokumen	0,00	11.800.000,00	11.800.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		11.800.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Ana												
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	0 Dokumen	0,00	113.760.000,00	113.760.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		113.760.000,00
41	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Rumah Tangga PHBS	90 %	90 %	4.096.279.300,00	4.485.523.000,00	4.485.523.000,00						3.696.635.660,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			738.673.300,00	1.279.393.000,00	1.279.393.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.040.135.660,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKB												
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	24 Dokumen	24 Dokumen	12.240.000,00	58.792.000,00	58.792.000,00	Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		15.000.000,00
						PUSKESMAS GEMUH I				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00	
42	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 %	100 %	382.660.990.940,00	206.130.964.887,00	256.565.234.444,00						320.099.656.005,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-			198.562.654.285,00	59.984.299.816,00	59.984.299.816,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		93.670.551.003,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUC												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.442.230.750,00	1.656.169.900,00	2.031.352.312,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		2.565.910.568,00
43	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata rata capain SPM	100 %	100 %	138.619.310.435,00	84.243.136.777,00	100.994.075.666,00						98.749.297.205,00
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			66.329.735.600,00	67.311.171.183,00	67.311.171.183,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		84.233.996.738,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Ham												
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	433 Orang	433 Orang	101.620.000,00	37.800.000,00	37.800.000,00	Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		37.800.000,00
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersali												
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6 Dokumen	414 Orang	0,00	26.600.000,00	26.600.000,00	Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		26.600.000,00
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balit												
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1664 Orang	1664 Orang	400.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar												
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4389 Orang	4389 Orang	16.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	5430 Orang	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		13.000.000,00
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif												
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19722 Orang	19722 Orang	5.900.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3778 Orang	3778 Orang	6.945.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Beri														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	75 Orang	75 Orang	7.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	61 Orang	61 Orang	3.800.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		9.600.000,00		
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi H														
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	472 Orang	472 Orang	2.300.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		2.300.000,00		
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8 Dokumen	8 Dokumen	360.806.380,00	173.997.000,00	173.997.000,00	Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		304.776.300,00		
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahrag														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5 Dokumen	5 Dokumen	9.730.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Dokumen	3 Dokumen	15.400.000,00	16.507.000,00	16.507.000,00	Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		15.400.000,00		
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehata														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	6 Dokumen	414 Orang	112.385.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehata														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	61 Orang	61 Orang	6.300.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		6.300.000,00
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)												
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	28 Orang	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.400.000,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduk												
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	123 Dokumen	0,00	5.064.000,00	5.064.000,00	Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		5.064.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Ana												
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	2576 Dokumen	0,00	94.960.000,00	94.960.000,00	Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		94.960.000,00
44	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	4.096.279.300,00	4.485.523.000,00	4.485.523.000,00						3.696.635.660,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	738.673.300,00	1.279.393.000,00	1.279.393.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.040.135.660,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKB)												
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	268 Dokumen	0,00	2.680.000,00	2.680.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		2.680.000,00
						PUSKESMAS GEMUH II				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00	
45	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 %	100 %	382.660.990.940,00	206.130.964.887,00	256.565.234.444,00						320.099.656.005,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-			198.562.654.285,00	59.984.299.816,00	59.984.299.816,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		93.670.551.003,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD												
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.250.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	12 Unit Kerja	0,00	1.150.000.000,00	1.273.368.877,00	Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
46	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata rata capain SPM	100 %	100 %	138.619.310.435,00	84.243.136.777,00	100.994.075.666,00						98.749.297.205,00
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			66.329.735.600,00	67.311.171.183,00	67.311.171.183,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		84.233.996.738,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Ham												
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	323 Orang	323 Orang	94.807.000,00	29.040.000,00	29.040.000,00	Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		95.000.000,00
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersali												
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	14.312.000,00	14.312.000,00	Kab. Kendal, Gemuh, Tlahab	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		14.312.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Das												
							Jumlah Anak Usia Pendidika Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesua Standar	446 Orang	446 Orang	24.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		25.000.000,00
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanju												
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesua Standar	2962 Orang	2962 Orang	37.260.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Ber:												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	78 Orang	78 Orang	3.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	265 Orang	265 Orang	2.800.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		3.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi H														
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	409 Orang	409 Orang	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (K														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	6.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	351.894.580,00	168.908.000,00	168.908.000,00	Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		300.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	4 Dokumen	15.410.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	4 Dokumen	7.300.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		7.500.000,00		
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5 Dokumen	5 Dokumen	80.064.900,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5 Dokumen	5 Dokumen	1.800.000,00	25.884.000,00	25.884.000,00	Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		2.000.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular												
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 Dokumen	4 Dokumen	71.151.600,00	122.700.000,00	122.700.000,00	Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		72.000.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas												
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	2 Dokumen	151.105.200,00	171.312.000,00	171.312.000,00	Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		152.000.000,00
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Mas												
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan	600.000,00	900.000,00	900.000,00	Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		700.000,00
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis												
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	265 Orang	265 Orang	3.100.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		3.500.000,00
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV												
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0 Orang	0,00	200.000,00	200.000,00	Kab. Kendal, Gemuh, Tlahab	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		200.000,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduk												
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	0 Dokumen	0,00	3.630.000,00	3.630.000,00	Kab. Kendal, Gemuh, Tlahab	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		3.630.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Ana												
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	0 Dokumen	0,00	112.520.000,00	112.520.000,00	Kab. Kendal, Gemuh, Tlahab	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		64.400.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	250.000.000,00	287.039.352,00	287.039.352,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.084.223.387,00			
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	121.000,00	121.000,00	Kab. Kendal, Gemuh, Tlahab	DAK Non Fisik-BOK KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		121.000,00		
47	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Rumah Tangga PHBS	90 %	90 %	4.096.279.300,00	4.485.523.000,00	4.485.523.000,00						3.696.635.660,00		
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			738.673.300,00	1.279.393.000,00	1.279.393.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.040.135.660,00		
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00	31.324.000,00	31.324.000,00	Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		7.300.000,00		
						PUSKESMAS RINGINARUM				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00						424.265.388.870,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00						424.265.388.870,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00						424.265.388.870,00		
48	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 %	100 %	382.660.990.940,00	206.130.964.887,00	256.565.234.444,00						320.099.656.005,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-			198.562.654.285,00	59.984.299.816,00	59.984.299.816,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		93.670.551.003,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.991.000.000,00	2.090.550.000,00	2.237.107.071,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		2.370.500.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
49	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	138.619.310.435,00	84.243.136.777,00	100.994.075.666,00						98.749.297.205,00		
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	63.939.574.835,00	16.512.617.042,00	16.512.617.042,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		11.707.740.000,00		
	1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Sudah Kunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	2 Keluarga	2 Keluarga	38.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Ringinarum Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		42.240.000,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	66.329.735.600,00	67.311.171.183,00	67.311.171.183,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		84.233.996.738,00		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Ham														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	534 Orang	534 Orang	127.500.000,00	62.462.000,00	62.462.000,00	Kab. Kendal, Ringinarum Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		140.250.000,00		
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersali														
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	509 Orang	0,00	45.343.000,00	45.343.000,00	Kab. Kendal, Ringinarum Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balit														
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2335 Orang	2335 Orang	1.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Ringinarum Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.320.000,00		
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Das														
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3193 Orang	3193 Orang	17.300.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Kab. Kendal, Ringinarum Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		19.030.000,00		
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produkt														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25862 Orang	25862 Orang	7.800.000,00	13.920.000,00	0,00	Kab. Kendal, Ringinarum Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		8.580.000,00
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanju												
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5022 Orang	5022 Orang	10.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Ringinarum Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		11.220.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis												
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	428 Orang	428 Orang	1.900.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	Kab. Kendal, Ringinarum Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		2.090.000,00
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi H												
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	Kab. Kendal, Ringinarum Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		14.500.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7 Dokumen	7 Dokumen	424.858.380,00	197.862.000,00	197.862.000,00	Kab. Kendal, Ringinarum Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		405.711.130,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	400.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Ringinarum Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		440.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	5 Dokumen	18.800.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		20.680.000,00
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5 Dokumen	5 Dokumen	95.270.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Ringinarum Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		104.797.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen	3 Dokumen	1.000.000,00	14.240.000,00	14.240.000,00	Kab. Kendal, Ringinarum Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.100.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular												
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	29 Dokumen	29 Dokumen	80.250.000,00	138.901.000,00	138.901.000,00	Kab. Kendal, Ringinarum Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		88.275.000,00
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasic												
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	1 Paket	1.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.320.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas												
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	3 Dokumen	180.064.100,00	204.142.000,00	204.142.000,00	Kab. Kendal, Ringinarum Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		198.070.510,00
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Mas												
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	39 Laporan	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kab. Kendal, Ringinarum Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.980.000,00
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulos												
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	428 Orang	428 Orang	1.200.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kendal, Ringinarum Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.320.000,00
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV												
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0 Orang	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Kendal, Ringinarum Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		13.200.000,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduk												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen Dokumen	0,00	0,00	13.920.000,00	Kab. Kendal, Ringinarum Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		15.312.000,00		
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Ana														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	0 Dokumen	0,00	87.730.000,00	87.730.000,00	Kab. Kendal, Ringinarum Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		95.000.000,00		
50	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Rumah Tangga PHBS	90 %	90 %	4.096.279.300,00	4.485.523.000,00	4.485.523.000,00						3.696.635.660,00		
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			738.673.300,00	1.279.393.000,00	1.279.393.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.040.135.660,00		
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKB														
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	2 Dokumen	6.480.000,00	12.360.000,00	12.360.000,00	Kab. Kendal, Ringinarum Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		7.128.000,00		
						PUSKESMAS WELERI I				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00			
51	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 %	100 %	382.660.990.940,00	206.130.964.887,00	256.565.234.444,00						320.099.656.005,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-			198.562.654.285,00	59.984.299.816,00	59.984.299.816,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		93.670.551.003,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.379.686.000,00	1.448.700.000,00	1.454.200.009,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.996.500.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
52	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata rata capain SPM	100 %	100 %	138.619.310.435,00	84.243.136.777,00	100.994.075.666,00						98.749.297.205,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			66.329.735.600,00	67.311.171.183,00	67.311.171.183,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		84.233.996.738,00		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Ham														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1312 Orang	1312 Orang	98.152.000,00	34.020.000,00	34.020.000,00	Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		34.020.000,00		
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersali														
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	104 Orang	0,00	13.612.000,00	13.612.000,00	Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balit														
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	363 Orang	363 Orang	800.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		880.000,00		
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Das														
							Jumlah Anak Usia Pendidika Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	544 Orang	544 Orang	27.200.000,00	23.700.000,00	23.700.000,00	Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		29.400.000,00		
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produkt														
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	966 Orang	966 Orang	3.700.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		4.070.000,00		
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanju														
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	720 Orang	720 Orang	19.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		20.120.000,00		
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Ber:														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	32 Orang	32 Orang	1.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.760.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis												
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	25 Orang	25 Orang	1.400.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.540.000,00
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi H												
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	50 Orang	50 Orang	6.100.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		6.710.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	14286 Dokumen	14286 Dokumen	397.582.080,00	168.162.000,00	168.162.000,00	Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		375.707.200,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8 Dokumen	8 Dokumen	300.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		330.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	5 Dokumen	6.200.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		6.820.000,00
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	75.805.700,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		83.386.270,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	56 Dokumen	56 Dokumen	2.800.000,00	34.975.648,00	34.975.648,00	Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		3.080.000,00
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZ												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	7 Orang	7 Orang	1.750.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.925.000,00		
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menul:														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	39 Dokumen	39 Dokumen	63.350.000,00	102.550.000,00	102.550.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		103.550.000,00		
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasic														
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	8 Paket	8 Paket	800.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		880.000,00		
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen	153.338.700,00	173.846.000,00	204.446.352,00	Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		168.672.570,00		
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	0 Dokumen	0,00	19.950.000,00	19.950.000,00	Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Mas														
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4 Laporan	4 Laporan	400.000,00	800.000,00	800.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		840.000,00		
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulos														
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	24 Orang	24 Orang	1.200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.312.000,00		
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0 Orang	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malari														
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	18 Orang	18 Orang	1.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.980.000,00		
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduk														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	3 Dokumen	0,00	2.685.000,00	2.685.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Ana														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	400 Dokumen	0,00	88.096.000,00	88.096.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		97.096.000,00		
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	250.000.000,00	287.039.352,00	287.039.352,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.084.223.387,00		
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatai														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	30.600.352,00	0,00	Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		33.660.387,00		
53	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Rumah Tangga PHBS	90 %	90 %	4.096.279.300,00	4.485.523.000,00	4.485.523.000,00						3.696.635.660,00		
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			738.673.300,00	1.279.393.000,00	1.279.393.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.040.135.660,00		
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKB														
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5 Dokumen	5 Dokumen	8.203.100,00	57.518.000,00	57.518.000,00	Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		9.130.000,00		
						PUSKESMAS WELERI II				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00						424.265.388.870,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00	
54	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 %	100 %	382.660.990.940,00	206.130.964.887,00	256.565.234.444,00					320.099.656.005,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-			198.562.654.285,00	59.984.299.816,00	59.984.299.816,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan	93.670.551.003,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD												
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.239.898.171,00	1.115.891.300,00	1.165.873.695,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan	1.532.464.543,00	
55	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata rata capain SPM	100 %	100 %	138.619.310.435,00	84.243.136.777,00	100.994.075.666,00					98.749.297.205,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			66.329.735.600,00	67.311.171.183,00	67.311.171.183,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan	84.233.996.738,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Ham												
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	361 Orang	361 Orang	77.480.700,00	25.648.000,00	25.648.000,00	Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan	85.000.000,00	
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersal												
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	6.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan	7.000.000,00	
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Das												
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3043 Orang	3043 Orang	10.450.000,00	14.950.000,00	14.950.000,00	Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan	11.000.000,00	
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produkt												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18355 Orang	18355 Orang	14.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanju												
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3301 Orang	3301 Orang	6.140.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		6.700.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis												
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	417 Orang	417 Orang	15.200.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		16.200.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	386.035.580,00	153.517.000,00	153.517.000,00	Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		360.000.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	24.050.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		28.000.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.850.000,00	19.550.000,00	19.550.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		4.100.000,00
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatar												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen	14.130.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		18.000.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatar												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	8.800.000,00	39.529.000,00	39.529.000,00	Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		9.700.000,00
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZ												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	69 Orang	69 Orang	6.350.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		7.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menul:														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	74.850.000,00	108.250.000,00	108.250.000,00	Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		81.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasic														
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	8 Paket	8 Paket	2.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		2.200.000,00		
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	139.514.200,00	158.170.000,00	158.170.000,00	Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		149.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Mas														
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	8 Laporan	8 Laporan	800.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		900.000,00		
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulos														
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	12 Orang	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0		6.200.000,00		
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah				
																			Sebelum	Sesudah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	12 Orang	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0		6.300.000,00		
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduk														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen	0,00	10.600.000,00	10.600.000,00	Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0		12.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Ana														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen	0,00	85.012.000,00	85.012.000,00	Kab. Kendal, Weleri, Weleri	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0		90.000.000,00		
56	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Rumah Tangga PHBS	90 %	90 %	4.096.279.300,00	4.485.523.000,00	4.485.523.000,00						3.696.635.660,00		
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			738.673.300,00	1.279.393.000,00	1.279.393.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.040.135.660,00		
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKB														
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	2 Dokumen	7.680.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen	0,00	22.277.000,00	22.277.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		23.000.000,00		
						PUSKESMAS ROWOSARI I				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00						424.265.388.870,00			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00						424.265.388.870,00			
57	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 %	100 %	382.660.990.940,00	206.130.964.887,00	256.565.234.444,00						320.099.656.005,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-			198.562.654.285,00	59.984.299.816,00	59.984.299.816,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		93.670.551.003,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.500.433.000,00	1.600.000.000,00	1.824.254.693,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.969.900.307,00		
58	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata rata capain SPM	100 %	100 %	138.619.310.435,00	84.243.136.777,00	100.994.075.666,00						98.749.297.205,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			66.329.735.600,00	67.311.171.183,00	67.311.171.183,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		84.233.996.738,00		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Ham														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	654 Orang	654 Orang	95.530.000,00	19.872.000,00	19.872.000,00	Kab. Kendal, Rowsari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		95.530.000,00		
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersali														
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	453 Orang	0,00	23.280.000,00	23.280.000,00	Kab. Kendal, Rowsari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		25.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balit														
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2779 Orang	2779 Orang	9.700.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Rowsari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		9.700.000,00		
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Das														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5030 Orang	5030 Orang	27.600.000,00	44.400.000,00	44.400.000,00	Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		27.600.000,00
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif												
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9600 Orang	9600 Orang	400.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		400.000,00
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanju												
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3992 Orang	3992 Orang	14.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		14.200.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulos												
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yan Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	396 Orang	396 Orang	13.950.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		13.950.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6 Dokumen	6 Dokumen	391.877.880,00	190.109.000,00	190.109.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		335.847.800,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahrag												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	19.530.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		19.530.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.500.000,00	6.413.000,00	6.413.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		3.500.000,00
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatar												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	80.353.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		80.353.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatar												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	8.700.000,00	13.444.000,00	13.444.000,00	Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZ												
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	92 Orang	92 Orang	3.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		3.600.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular												
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	71.750.000,00	138.440.000,00	138.440.000,00	Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		140.440.000,00
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasic												
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	3 Paket	3 Paket	300.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		300.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas												
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	173.232.500,00	196.397.000,00	196.397.000,00	Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		173.232.500,00
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Mas												
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	18 Laporan	18 Laporan	900.000,00	800.000,00	800.000,00	Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		900.000,00
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis												
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	419 Orang	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		17.000.000,00
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	554 Orang	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		3.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduk														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	9 Dokumen	0,00	4.275.000,00	4.275.000,00	Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		5.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Ana														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	737 Dokumen	0,00	120.522.000,00	120.522.000,00	Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		110.000.000,00		
59	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Rumah Tangga PHBS	90 %	90 %	4.096.279.300,00	4.485.523.000,00	4.485.523.000,00						3.696.635.660,00		
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			738.673.300,00	1.279.393.000,00	1.279.393.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.040.135.660,00		
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKB														
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	62.360.600,00	36.768.000,00	36.768.000,00	Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		62.360.600,00		
						PUSKESMAS ROWOSARI II				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00			
60	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 %	100 %	382.660.990.940,00	206.130.964.887,00	256.565.234.444,00						320.099.656.005,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-			198.562.654.285,00	59.984.299.816,00	59.984.299.816,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		93.670.551.003,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUC														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.789.077.752,00	1.800.000.000,00	2.033.376.382,00	Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		2.751.156.562,00		
61	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata rata capain SPM	100 %	100 %	138.619.310.435,00	84.243.136.777,00	100.994.075.666,00						98.749.297.205,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			66.329.735.600,00	67.311.171.183,00	67.311.171.183,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		84.233.996.738,00		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Ham														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1906 Orang	1906 Orang	162.356.000,00	30.240.000,00	30.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		178.591.600,00		
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersali														
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	560 Orang	0,00	40.960.000,00	40.960.000,00	Kab. Kendal, Rowosari, Rowosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		45.056.000,00		
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balit														
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20 Orang	20 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.100.000,00		
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Das														
							Jumlah Anak Usia Pendidika Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	284 Orang	284 Orang	4.200.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		4.620.000,00		
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produkt														
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	57 Orang	57 Orang	2.850.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		3.135.000,00		
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanju														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	26.380.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		29.018.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.912.900,00	53.880.000,00	53.880.000,00	Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		2.104.190,00
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZ												
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	6 Orang	6 Orang	300.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		330.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular												
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	33.000.000,00	120.394.000,00	120.394.000,00	Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		36.300.000,00
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasic												
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	1 Paket	1.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.980.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas												
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	148.960.700,00	168.879.000,00	168.879.000,00	Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		150.456.770,00
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Mas												
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan	400.000,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		440.000,00
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	72 Orang	72 Orang	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		3.960.000,00		
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	90 Orang	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Kendal, Rowosari, Rowosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		4.950.000,00		
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	192 Orang	192 Orang	9.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		10.560.000,00		
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduk														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	320 Dokumen	0,00	20.160.000,00	20.160.000,00	Kab. Kendal, Rowosari, Rowosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		22.176.000,00		
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Ana														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	0,00	40.214.000,00	40.214.000,00	Kab. Kendal, Rowosari, Rowosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		44.235.400,00		
62	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Rumah Tangga PHBS	90 %	90 %	4.096.279.300,00	4.485.523.000,00	4.485.523.000,00						3.696.635.660,00		
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			738.673.300,00	1.279.393.000,00	1.279.393.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.040.135.660,00		
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKB														
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	9.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		10.560.000,00		
						PUSKESMAS BOJA I				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00						424.265.388.870,00		
63	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 %	100 %	382.660.990.940,00	206.130.964.887,00	256.565.234.444,00						320.099.656.005,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-			198.562.654.285,00	59.984.299.816,00	59.984.299.816,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		93.670.551.003,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.532.077.752,00	4.990.650.000,00	5.415.270.557,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		6.598.005.700,00		
64	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata rata capain SPM	100 %	100 %	138.619.310.435,00	84.243.136.777,00	100.994.075.666,00						98.749.297.205,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			66.329.735.600,00	67.311.171.183,00	67.311.171.183,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		84.233.996.738,00		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Ham														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	782 Orang	782 Orang	128.620.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	782 Orang	0,00	10.010.000,00	10.010.000,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		15.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersali														
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	7000 Orang	0,00	10.710.000,00	10.710.000,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		15.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balit														
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2235 Orang	2235 Orang	15.700.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Das														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4137 Orang	4137 Orang	16.400.000,00	41.900.000,00	41.900.000,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		18.040.000,00		
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3978 Orang	3978 Orang	3.900.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanju														
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6984 Orang	6984 Orang	2.080.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Beri														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	152 Orang	152 Orang	36.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulos														
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yan Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	50 Orang	50 Orang	2.300.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		20.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi H														
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	150 Orang	150 Orang	6.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	50 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		10.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	30 Dokumen	30 Dokumen	461.808.380,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	200 Dokumen	0,00	233.017.000,00	233.017.000,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		250.000.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	38 Dokumen	38 Dokumen	52.914.300,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	21 Dokumen	21 Dokumen	36.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	200 Dokumen	0,00	33.300.000,00	33.300.000,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		40.000.000,00
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehata												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	40 Dokumen	40 Dokumen	131.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehata												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8 Dokumen	8 Dokumen	4.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen	0,00	32.626.000,00	32.626.000,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		35.000.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menul												
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	57 Dokumen	57 Dokumen	77.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	200 Dokumen	0,00	162.200.000,00	162.200.000,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		160.000.000,00
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasid												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	60 Paket	60 Paket	3.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas												
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	26 Dokumen	26 Dokumen	216.636.900,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	200 Dokumen	0,00	245.606.000,00	245.606.000,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		255.000.000,00
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Mas												
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	15 Laporan	15 Laporan	1.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	12 Laporan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		2.000.000,00
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis												
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	90 Orang	90 Orang	9.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	50 Orang	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		26.000.000,00
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	60 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		10.000.000,00
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malari												
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10 Orang	10 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduk												
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	950 Dokumen	0,00	26.350.000,00	26.350.000,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		30.000.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Ana												
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	700 0	0,00	168.610.000,00	168.610.000,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		200.000.000,00
		1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	250.000.000,00	287.039.352,00	287.039.352,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.084.223.387,00
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatai												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	18.000,00	18.000,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		20.000,00
65	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Rumah Tangga PHBS	90 %	90 %	4.096.279.300,00	4.485.523.000,00	4.485.523.000,00						3.696.635.660,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			738.673.300,00	1.279.393.000,00	1.279.393.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.040.135.660,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKB)												
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	20 Dokumen	20 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	100 Dokumen	0,00	16.386.000,00	16.386.000,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		20.000.000,00		
						PUSKESMAS BOJA II				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00			
66	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 %	100 %	382.660.990.940,00	206.130.964.887,00	256.565.234.444,00						320.099.656.005,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-			198.562.654.285,00	59.984.299.816,00	59.984.299.816,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		93.670.551.003,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.081.535.800,00	1.135.612.590,00	1.389.456.786,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.356.089.220,00		
67	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata rata capain SPM	100 %	100 %	138.619.310.435,00	84.243.136.777,00	100.994.075.666,00						98.749.297.205,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			66.329.735.600,00	67.311.171.183,00	67.311.171.183,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		84.233.996.738,00		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Ham														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	406 Orang	406 Orang	75.800.000,00	26.496.000,00	26.496.000,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		79.590.000,00		
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersal														
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	387 Orang	0,00	5.474.000,00	5.474.000,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		5.747.700,00		
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balit														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1107 Orang	1107 Orang	7.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		7.560.000,00		
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2415 Orang	2415 Orang	13.000.000,00	37.900.000,00	37.900.000,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		13.600.000,00		
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14496 Orang	14496 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		3.150.000,00		
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2800 Orang	2800 Orang	9.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		10.080.000,00		
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	56 Orang	56 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		3.150.000,00		
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	246 Orang	246 Orang	12.350.000,00	20.550.000,00	20.550.000,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		12.967.500,00		
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	509 Orang	509 Orang	2.600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		2.730.000,00		
	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		2.625.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	430.027.480,00	187.961.000,00	187.961.000,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		392.694.270,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahrag												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	3 Dokumen	21.150.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		22.207.500,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7 Dokumen	7 Dokumen	23.809.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		24.999.450,00
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehata												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5 Dokumen	5 Dokumen	59.564.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		62.542.200,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehata												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen	5.600.000,00	70.584.000,00	70.584.000,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		5.880.000,00
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZ												
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	56 Orang	56 Orang	18.235.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		19.146.750,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular												
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 Dokumen	4 Dokumen	98.400.000,00	139.450.000,00	139.450.000,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		103.320.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	3 Dokumen	174.312.300,00	192.622.000,00	197.622.000,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		183.027.915,00		
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Mas														
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		420.000,00		
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		3.150.000,00		
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8 Orang	8 Orang	4.500.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		4.725.000,00		
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	5 Orang	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		4.725.000,00		
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	1 Orang	300.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		315.000,00		
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduk														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen	0,00	4.643.000,00	4.643.000,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		4.875.150,00		
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Ana														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	18 Dokumen	0,00	81.368.000,00	81.368.000,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		55.020.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	250.000.000,00	287.039.352,00	287.039.352,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.084.223.387,00			
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		5.250.000,00		
68	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Rumah Tangga PHBS	90 %	90 %	4.096.279.300,00	4.485.523.000,00	4.485.523.000,00						3.696.635.660,00		
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			738.673.300,00	1.279.393.000,00	1.279.393.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.040.135.660,00		
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dokumen	3 Dokumen	14.880.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	Kab. Kendal, Boja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		15.624.000,00		
						PUSKESMAS KALIWUNGU				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00			
69	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 %	100 %	382.660.990.940,00	206.130.964.887,00	256.565.234.444,00						320.099.656.005,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-			198.562.654.285,00	59.984.299.816,00	59.984.299.816,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		93.670.551.003,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.494.798.179,00	3.308.152.887,00	3.464.806.531,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		3.940.000.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
70	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata rata capain SPM	100 %	100 %	138.619.310.435,00	84.243.136.777,00	100.994.075.666,00						98.749.297.205,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			66.329.735.600,00	67.311.171.183,00	67.311.171.183,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		84.233.996.738,00		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Ham														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1062 Orang	660 Orang	94.466.000,00	39.930.000,00	39.930.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		94.466.000,00		
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersali														
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	43 Orang	0,00	6.358.000,00	6.358.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		6.993.800,00		
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balit														
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2801 Orang	0 Orang	2.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Das														
							Jumlah Anak Usia Pendidika Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	600 Orang	650 Orang	28.350.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		28.350.000,00		
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produkt														
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	0 Orang	19.650.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanju														
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang	0 Orang	5.700.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Ber:														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	146 Orang	0 Orang	14.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis												
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	85 Orang	85 Orang	8.500.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		12.000.000,00
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi H												
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	40 Orang	40 Orang	9.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		5.500.000,00
	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Benc												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	6 Dokumen	0 Dokumen	1.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	134 Dokumen	134 Dokumen	614.922.080,00	273.636.000,00	273.636.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		300.000.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahrag												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	28 Dokumen	0 Dokumen	45.050.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	146 Dokumen	146 Dokumen	33.500.000,00	53.500.000,00	53.500.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		58.000.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehata												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	100 Dokumen	10.350.100,00	56.376.000,00	56.376.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		61.000.000,00
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAP2												
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	50 Orang	0 Orang	1.650.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menuli:												
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	150 Dokumen	150 Dokumen	91.100.000,00	124.201.000,00	124.201.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		136.000.000,00
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasic												
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	6 Paket	0 Paket	500.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas												
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	17 Dokumen	106 Dokumen	222.347.600,00	247.080.000,00	247.080.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		310.000.000,00
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya												
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	3 Dokumen	0,00	19.950.000,00	19.950.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		22.000.000,00
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Mas												
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	8 Laporan	7 Laporan	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		900.000,00
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulos												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	10 Orang	4.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		16.000.000,00
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)												
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	40 Orang	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		4.400.000,00
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malari												
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	180 Orang	0 Orang	1.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduk												
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	15 Dokumen	0,00	35.550.000,00	35.550.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		39.000.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Ana												
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	325 Dokumen	0,00	94.170.000,00	94.170.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		103.600.000,00
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	250.000.000,00	287.039.352,00	287.039.352,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.084.223.387,00
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatai												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	35.598.000,00	35.598.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		40.000.000,00
71	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Rumah Tangga PHBS	90 %	90 %	4.096.279.300,00	4.485.523.000,00	4.485.523.000,00						3.696.635.660,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			738.673.300,00	1.279.393.000,00	1.279.393.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.040.135.660,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKB)												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	28 Dokumen	28 Dokumen	28.250.000,00	58.050.000,00	58.050.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		63.800.000,00		
						PUSKESMAS KALIWUNGU SELATAN				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00			
72	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 %	100 %	382.660.990.940,00	206.130.964.887,00	256.565.234.444,00						320.099.656.005,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-			198.562.654.285,00	59.984.299.816,00	59.984.299.816,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		93.670.551.003,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.532.200.000,00	1.951.293.630,00	2.034.914.437,00	Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		3.293.762.620,00		
73	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata rata capain SPM	100 %	100 %	138.619.310.435,00	84.243.136.777,00	100.994.075.666,00						98.749.297.205,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			66.329.735.600,00	67.311.171.183,00	67.311.171.183,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		84.233.996.738,00		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Ham														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	724 Orang	724 Orang	96.252.000,00	23.157.000,00	23.157.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		105.877.200,00		
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersali														
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	708 Orang	0,00	47.560.000,00	47.560.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		52.316.000,00		
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balit														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	674 Orang	674 Orang	11.100.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		12.210.000,00		
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Das														
							Jumlah Anak Usia Pendidika Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesua Standar	1600 Orang	1600 Orang	20.200.000,00	30.900.000,00	30.900.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		22.220.000,00		
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produkt														
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	45 Orang	45 Orang	750.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		825.000,00		
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanju														
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesua Standar	5581 Orang	5581 Orang	38.460.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		42.306.000,00		
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Ber														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	126 Orang	126 Orang	4.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		4.840.000,00		
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulos														
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yan Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		566 Orang	0,00	14.600.000,00	14.600.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		16.060.000,00		
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi H														
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	806 Orang	806 Orang	2.400.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		3.300.000,00		
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	580.201.780,00	232.265.000,00	232.265.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		576.588.870,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga												
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	17.390.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		19.129.000,00	
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan												
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	31.500.000,00	45.900.000,00	45.900.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		34.650.000,00	
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan												
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	12.228.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		13.450.800,00	
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan												
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	4.600.000,00	60.056.000,00	60.056.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		5.060.000,00	
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZ												
						Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	6 Orang	6 Orang	600.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		660.000,00	
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular												
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	85.300.000,00	150.498.000,00	150.498.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		93.830.000,00	
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional												
						Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	1 Paket	400.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		440.000,00	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas												
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	213.816.700,00	242.409.000,00	242.409.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		235.198.370,00	
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Mas												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		330.000,00		
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulos														
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	548 Orang	548 Orang	7.400.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		8.140.000,00		
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV														
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	850 Orang	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		9.240.000,00		
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduk														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen	0,00	23.600.000,00	23.600.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		25.960.000,00		
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Ana														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	9 Dokumen	0,00	91.796.000,00	91.796.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		100.975.000,00		
74	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Rumah Tangga PHBS	90 %	90 %	4.096.279.300,00	4.485.523.000,00	4.485.523.000,00						3.696.635.660,00		
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			738.673.300,00	1.279.393.000,00	1.279.393.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.040.135.660,00		
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKB														
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	66.059.600,00	34.900.000,00	34.900.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		72.665.560,00		
						PUSKESMAS CEPIRING				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00						424.265.388.870,00			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00						424.265.388.870,00			
75	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 %	100 %	382.660.990.940,00	206.130.964.887,00	256.565.234.444,00						320.099.656.005,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-			198.562.654.285,00	59.984.299.816,00	59.984.299.816,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		93.670.551.003,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.154.890.752,00	3.154.890.752,00	3.472.607.169,00	Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		3.375.813.000,00		
76	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata rata capain SPM	100 %	100 %	138.619.310.435,00	84.243.136.777,00	100.994.075.666,00						98.749.297.205,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			66.329.735.600,00	67.311.171.183,00	67.311.171.183,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		84.233.996.738,00		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Ham														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	778 Orang	778 Orang	166.270.000,00	37.755.000,00	37.755.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		176.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersali														
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	10 Orang	0,00	28.485.000,00	28.485.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		29.585.000,00		
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balit														
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	742 Orang	742 Orang	17.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		19.200.000,00		
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Das														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2198 Orang	2198 Orang	26.000.000,00	32.150.000,00	32.150.000,00	Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		28.600.000,00
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif												
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4500 Orang	4500 Orang	16.200.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		17.800.000,00
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanju												
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2227 Orang	2227 Orang	24.300.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		26.700.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Ber:												
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	137 Orang	137 Orang	4.500.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		4.950.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulo:												
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	605 Orang	605 Orang	2.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		2.200.000,00
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi H												
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	969 Orang	969 Orang	4.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		4.900.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	510.091.180,00	249.150.000,00	249.150.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		499.061.100,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	36.245.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		39.245.000,00		
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	6.350.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		6.950.000,00		
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	84.040.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		90.040.000,00		
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4 Dokumen	4 Dokumen	6.600.000,00	31.563.000,00	31.563.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		7.200.000,00		
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZ														
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	137 Orang	137 Orang	1.090.400,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.190.400,00		
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menul:														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	125.900.000,00	239.078.000,00	239.078.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		136.900.000,00		
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasic														
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	1 Paket	1.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.650.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas												
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	230.457.600,00	261.275.000,00	261.275.000,00	Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		250.457.000,00	
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Mas												
						Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan	400.000,00	700.000,00	700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		440.000,00	
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulos												
						Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	302 Orang	302 Orang	8.400.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		9.200.000,00	
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV												
						Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	12 Orang	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		3.300.000,00	
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduk												
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen	0,00	7.350.000,00	7.350.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		8.000.000,00	
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Ana												
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	4 Dokumen	0,00	155.468.000,00	155.468.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		125.000.000,00	
77	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Rumah Tangga PHBS	90 %	90 %	4.096.279.300,00	4.485.523.000,00	4.485.523.000,00					3.696.635.660,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			738.673.300,00	1.279.393.000,00	1.279.393.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.040.135.660,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Dava Masyarakat (UKBI												

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	4 Dokumen	9.530.000,00	18.890.000,00	18.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		10.430.000,00		
						PUSKESMAS KANGKUNG I			526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00			
78	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 %	100 %	382.660.990.940,00	206.130.964.887,00	256.565.234.444,00					320.099.656.005,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-			198.562.654.285,00	59.984.299.816,00	59.984.299.816,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan	93.670.551.003,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.350.000.000,00	1.417.000.000,00	1.469.598.637,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan	2.100.000.000,00		
79	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata rata capain SPM	100 %	100 %	138.619.310.435,00	84.243.136.777,00	100.994.075.666,00					98.749.297.205,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			66.329.735.600,00	67.311.171.183,00	67.311.171.183,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan	84.233.996.738,00		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Ham													
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	567 Orang	567 Orang	70.320.000,00	25.080.000,00	25.080.000,00	Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan	71.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersali													
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	5.314.000,00	5.314.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan	6.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balit													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1516 Orang	1516 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Kungkung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Das														
							Jumlah Anak Usia Pendidika Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2540 Orang	2540 Orang	34.050.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	Kab. Kendal, Kungkung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		36.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produkt														
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2113 Orang	2113 Orang	7.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Kungkung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanju														
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3000 Orang	3000 Orang	21.945.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Kungkung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		22.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulos														
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	28129 Orang	28129 Orang	11.800.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	Kab. Kendal, Kungkung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi H														
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	28129 Orang	28129 Orang	4.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Kungkung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	404.795.180,00	192.052.000,00	192.052.000,00	Kab. Kendal, Kungkung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		350.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	800.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Kungkung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	4 Dokumen	8.300.000,00	15.750.000,00	15.750.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		17.000.000,00
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5 Dokumen	5 Dokumen	84.284.800,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5 Dokumen	5 Dokumen	3.550.000,00	36.880.000,00	36.880.000,00	Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		14.000.000,00
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZ												
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	28129 Orang	28129 Orang	34.900.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular												
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10 Dokumen	10 Dokumen	61.605.000,00	129.015.000,00	129.015.000,00	Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		130.000.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas												
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	3 Dokumen	165.013.000,00	187.079.000,00	187.079.000,00	Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		190.000.000,00
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Mas												
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	0 Laporan	0,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		600.000,00
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis												
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0 Orang	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		27.000.000,00
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0 Orang	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		13.000.000,00
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malari												
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	28129 Orang	28129 Orang	3.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		4.000.000,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduk												
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	0 Dokumen	0,00	19.335.000,00	19.335.000,00	Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		20.000.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Ana												
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	0 Dokumen	0,00	87.280.000,00	87.280.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		9.900.000,00
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	250.000.000,00	287.039.352,00	287.039.352,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0		1.084.223.387,00
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehata												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	5.000,00	5.000,00	Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0		10.000,00
80	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Rumah Tangga PHBS	90 %	90 %	4.096.279.300,00	4.485.523.000,00	4.485.523.000,00						3.696.635.660,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			738.673.300,00	1.279.393.000,00	1.279.393.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.040.135.660,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBI												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5 Dokumen	5 Dokumen	15.000.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		21.000.000,00		
						PUSKESMAS KANGKUNG II				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00			
81	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 %	100 %	382.660.990.940,00	206.130.964.887,00	256.565.234.444,00						320.099.656.005,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-			198.562.654.285,00	59.984.299.816,00	59.984.299.816,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		93.670.551.003,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Satu Tahun Unit Kerja	Satu Tahun Unit Kerja	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00	1.138.874.986,00	Kab. Kendal, Kangkung, Sendangkulon	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.600.000.000,00		
82	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata rata capain SPM	100 %	100 %	138.619.310.435,00	84.243.136.777,00	100.994.075.666,00						98.749.297.205,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			66.329.735.600,00	67.311.171.183,00	67.311.171.183,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		84.233.996.738,00		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Ham														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	365 Orang	365 Orang	56.260.000,00	26.586.000,00	26.586.000,00	Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		50.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersali														
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	365 Orang	0,00	6.385.000,00	6.385.000,00	Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		10.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balit														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1228 Orang	1228 Orang	10.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Das														
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2099 Orang	2099 Orang	18.450.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		25.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3462 Orang	3462 Dokumen	1.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanju														
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	924 Orang	924 Orang	6.945.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Ber														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	52 Orang	52 Orang	1.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulos														
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11 Orang	11 Orang	3.150.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		5.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi H														
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	43 Orang	43 Orang	300.000,00	700.000,00	0,00	Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	9 Dokumen	9 Dokumen	367.590.780,00	146.120.000,00	146.120.000,00	Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		400.000.000,00		

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11 Orang	11 Orang	3.600.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		5.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	7 Orang	0,00	0,00	700.000,00	Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduk														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	3462 Orang	3462 Dokumen	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		2.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Ana														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	10 Dokumen	0,00	95.844.000,00	95.844.000,00	Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		85.000.000,00		
83	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	4.096.279.300,00	4.485.523.000,00	4.485.523.000,00						3.696.635.660,00		
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	738.673.300,00	1.279.393.000,00	1.279.393.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.040.135.660,00		
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKB														
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	4 Dokumen	0,00	37.832.000,00	37.832.000,00	Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		50.000.000,00		
						PUSKESMAS PATEBON I				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00			
84	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 %	100 %	382.660.990.940,00	206.130.964.887,00	256.565.234.444,00						320.099.656.005,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-			198.562.654.285,00	59.984.299.816,00	59.984.299.816,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		93.670.551.003,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD												
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.141.590.835,00	1.000.000.000,00	1.458.612.848,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.050.000.000,00
85	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata rata capain SPM	100 %	100 %	138.619.310.435,00	84.243.136.777,00	100.994.075.666,00						98.749.297.205,00
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			66.329.735.600,00	67.311.171.183,00	67.311.171.183,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		84.233.996.738,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Ham												
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	337 Orang	337 Orang	82.035.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	320 Orang	0,00	22.695.000,00	22.695.000,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0		44.000.000,00
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersali												
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1200 Orang	0,00	14.175.000,00	14.175.000,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0		28.000.000,00
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balit												
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1355 Orang	1355 Orang	700.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1355 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar												
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2465 Orang	2465 Orang	14.800.000,00	23.750.000,00	23.750.000,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		24.937.500,00
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif												
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15460 Orang	15460 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanju												
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2761 Orang	2761 Orang	10.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		11.550.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Ber:												
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	58 Orang	58 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulo:												
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	261 Orang	261 Orang	15.100.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		20.500.000,00
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi H												
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	10 Orang	0,00	750.000,00	750.000,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0		1.500.000,00
	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Benc												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	0 Dokumen	351.274.580,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	12 Dokumen	0,00	167.974.000,00	167.974.000,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0		200.000.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahrag												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	17.555.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		11.130.000,00
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehata												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	91.450.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehata												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	7.167.400,00	18.595.000,00	18.595.000,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		19.524.750,00
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAP2												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	20 Orang	20 Orang	4.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular												
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5 Dokumen	5 Dokumen	74.100.000,00	113.869.000,00	113.869.000,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		119.562.450,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas												
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	2 Dokumen	149.994.400,00	170.051.000,00	170.051.000,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		178.553.550,00
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Mas												
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	10 Laporan	0,00	800.000,00	800.000,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0		1.600.000,00
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulos												
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	120 Orang	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0		16.000.000,00
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV												
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	5 Orang	0,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0		1.000.000,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduk												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	11 Dokumen	0,00	16.050.000,00	16.050.000,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0		23.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Ana														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	10 Dokumen	0,00	90.470.000,00	90.470.000,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0		100.000.000,00		
86	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Rumah Tangga PHBS	90 %	90 %	4.096.279.300,00	4.485.523.000,00	4.485.523.000,00						3.696.635.660,00		
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			738.673.300,00	1.279.393.000,00	1.279.393.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.040.135.660,00		
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKB)														
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	13.200.000,00	42.290.000,00	42.290.000,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		44.404.500,00		
						PUSKESMAS PATEBON II				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00			
87	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 %	100 %	382.660.990.940,00	206.130.964.887,00	256.565.234.444,00						320.099.656.005,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-			198.562.654.285,00	59.984.299.816,00	59.984.299.816,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		93.670.551.003,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUC														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.513.425.691,00	1.461.927.030,00	1.531.930.673,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.844.865.916,00
88	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata rata capain SPM	100 %	100 %	138.619.310.435,00	84.243.136.777,00	100.994.075.666,00						98.749.297.205,00
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			66.329.735.600,00	67.311.171.183,00	67.311.171.183,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		84.233.996.738,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Ham												
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	551 Orang	551 Orang	87.650.000,00	27.027.000,00	27.027.000,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.040.000,00
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersali												
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	551 Orang	0,00	25.290.000,00	25.290.000,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		30.000.000,00
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balit												
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2004 Orang	2004 Orang	1.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		2.000.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Das												
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6851 Orang	6851 Orang	18.200.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		20.000.000,00
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produkt												
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25427 Orang	25427 Orang	6.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	25427 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Patebon, Kebonharjo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		10.000.000,00
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanju												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4354 Orang	4354 Orang	18.825.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		20.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Beri														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	90 Orang	90 Orang	1.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		3.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulos														
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	426 Orang	426 Orang	36.000.000,00	14.850.000,00	8.100.000,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		37.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi H														
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	734 Orang	734 Orang	4.600.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		8.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Benc														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	2.250.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	412.005.880,00	172.613.000,00	172.613.000,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		360.000.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahrag												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	3 Dokumen	4.625.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		6.000.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	2 Dokumen	7.900.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		8.500.000,00
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatai												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen	13.078.500,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		14.000.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatai												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	45.086.000,00	45.086.000,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		60.000.000,00
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZ												
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	90 Orang	90 Orang	1.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		3.000.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menuli:												
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 Dokumen	4 Dokumen	101.800.000,00	143.150.000,00	143.150.000,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		150.000.000,00
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasic												
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	1 Paket	2.250.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		4.000.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	2 Dokumen	158.908.700,00	180.158.000,00	180.158.000,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		190.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Mas														
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan	900.000,00	900.000,00	900.000,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulos														
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	3 Orang	0,00	0,00	6.750.000,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		7.425.000,00		
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV														
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	40 Orang	0,00	900.000,00	900.000,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		3.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	5 Orang	5 Orang	300.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Patebon, Kebonharjo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		350.000,00		
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduk														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	25427 Dokumen	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		5.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Ana														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	2751 Dokumen	0,00	75.127.000,00	75.127.000,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		80.000.000,00		
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	250.000.000,00	287.039.352,00	287.039.352,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.084.223.387,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		7.000.000,00
89	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Rumah Tangga PHBS	90 %	90 %	4.096.279.300,00	4.485.523.000,00	4.485.523.000,00						3.696.635.660,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			738.673.300,00	1.279.393.000,00	1.279.393.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.040.135.660,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKB												
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dokumen	3 Dokumen	15.300.000,00	18.949.000,00	18.949.000,00	Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		19.000.000,00
						PUSKESMAS KENDAL I				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00					424.265.388.870,00	
90	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 %	100 %	382.660.990.940,00	206.130.964.887,00	256.565.234.444,00						320.099.656.005,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-			198.562.654.285,00	59.984.299.816,00	59.984.299.816,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		93.670.551.003,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD												
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.546.133.895,00	1.667.034.097,00	1.777.744.596,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		2.100.000.000,00
91	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	138.619.310.435,00	84.243.136.777,00	100.994.075.666,00						98.749.297.205,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	63.939.574.835,00	16.512.617.042,00	16.512.617.042,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		11.707.740.000,00
	1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga												
							Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	100 Keluarga	100 Keluarga	11.725.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		13.000.000,00
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			66.329.735.600,00	67.311.171.183,00	67.311.171.183,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		84.233.996.738,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil												
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	230 Orang	230 Orang	32.685.000,00	25.938.000,00	25.938.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		35.000.000,00
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin												
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33 Orang	33 Orang	14.300.000,00	4.585.000,00	4.585.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		15.000.000,00
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir												
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	30 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		4.000.000,00
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balit												
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang	250 Orang	30.435.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		33.000.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar												
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang	300 Orang	38.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		40.000.000,00
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	150 Orang	150 Orang	6.900.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		7.500.000,00
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanju												
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3000 Orang	3000 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		19.500.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Ber:												
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	50 Orang	50 Orang	4.700.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		6.000.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis												
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	60 Orang	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0		17.000.000,00
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi H												
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	9 Dokumen	9 Dokumen	432.754.280,00	199.044.000,00	199.044.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		400.000.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8 Dokumen	8 Dokumen	30.250.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		32.000.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokumen	6 Dokumen	15.300.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		16.500.000,00
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatar												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	4 Dokumen	55.405.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		60.000.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatar												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	4 Dokumen	0,00	30.885.000,00	30.885.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0		20.000.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular												
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	40 Dokumen	136.785.000,00	146.800.000,00	146.800.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		150.000.000,00
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasic												
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	1 Paket	200.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		300.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas												
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	3 Dokumen	179.932.400,00	204.032.000,00	204.032.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		190.000.000,00
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Mas												
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		2.000.000,00
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wab:												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.500.000,00		
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	2 Orang	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduk														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	2 Dokumen	0,00	25.520.000,00	25.520.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		27.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Ana														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	8 Dokumen	0,00	94.538.000,00	94.538.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		78.000.000,00		
92	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	4.096.279.300,00	4.485.523.000,00	4.485.523.000,00						3.696.635.660,00		
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	738.673.300,00	1.279.393.000,00	1.279.393.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0		1.040.135.660,00		
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKB														
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	4 Dokumen	0,00	38.044.000,00	38.044.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0		45.000.000,00		
						PUSKESMAS KENDAL II				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00						424.265.388.870,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00						424.265.388.870,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00						424.265.388.870,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
93	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 %	100 %	382.660.990.940,00	206.130.964.887,00	256.565.234.444,00						320.099.656.005,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-			198.562.654.285,00	59.984.299.816,00	59.984.299.816,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		93.670.551.003,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.704.194.737,00	1.150.000.000,00	1.319.969.810,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.809.446.421,00		
94	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata rata capain SPM	100 %	100 %	138.619.310.435,00	84.243.136.777,00	100.994.075.666,00						98.749.297.205,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			66.329.735.600,00	67.311.171.183,00	67.311.171.183,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		84.233.996.738,00		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Ham														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	359 Orang	359 Orang	84.330.000,00	29.850.000,00	29.850.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		92.400.000,00		
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersali														
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	280 Orang	0,00	11.240.000,00	11.240.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		13.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balit														
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	540 Orang	540 Orang	54.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Das														
							Jumlah Anak Usia Pendidika Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	900 Orang	900 Orang	15.100.000,00	19.250.000,00	19.250.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		17.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produkt														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	500 Orang	7.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanju												
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesua Standar	600 Orang	0 Orang	16.650.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulos												
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yan Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang	3.900.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		5.000.000,00
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi H												
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	35 Orang	35 Orang	900.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.500.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyaraka												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	11 Dokumen	11 Dokumen	420.826.280,00	209.289.000,00	209.289.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		380.000.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahrag												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5 Dokumen	0 Dokumen	14.170.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	5 Dokumen	6.650.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		13.600.000,00
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehata												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	10 Dokumen	0 Dokumen	109.948.200,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehata												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	15 Dokumen	0,00	15.196.000,00	15.196.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		16.600.000,00		
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZ														
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	55 Orang	0 Orang	8.550.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menul:														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	26 Dokumen	26 Dokumen	58.500.000,00	145.400.000,00	145.400.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		169.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	16 Dokumen	173.274.030,00	196.474.000,00	196.474.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		225.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	3 Dokumen	0,00	21.450.000,00	21.450.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		55.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Mas														
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	5 Laporan	0,00	750.000,00	750.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		825.000,00		
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	24 Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		3.960.000,00		
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV														
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	2 Orang	0,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		660.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduk												
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	-	0,00	4.749.000,00	4.749.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		5.500.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Ana												
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	190 Dokumen	0,00	123.200.000,00	123.200.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		93.940.000,00
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	250.000.000,00	287.039.352,00	287.039.352,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.084.223.387,00
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehat												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	29.101.000,00	29.101.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		32.011.000,00
95	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Rumah Tangga PHBS	90 %	90 %	4.096.279.300,00	4.485.523.000,00	4.485.523.000,00						3.696.635.660,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			738.673.300,00	1.279.393.000,00	1.279.393.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		1.040.135.660,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKB												
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	5 Dokumen	3.100.000,00	44.639.000,00	44.639.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		54.200.000,00
						RUMAH SAKIT UMUM dr. H. SOEWONDO				0,00	184.046.607.983,00	152.608.190.708,00						208.016.477.021,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	184.046.607.983,00	152.608.190.708,00						208.016.477.021,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				0,00	184.046.607.983,00	152.608.190.708,00						208.016.477.021,00
96	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 %	100 %	0,00	179.583.957.983,00	148.145.540.708,00						184.696.355.810,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	600 orang/bulan	600 orang/bulan	0,00	38.583.957.983,00	38.583.957.983,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		43.696.355.810,00		
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	600 Orang/bulan	659 Orang/bulan	0,00	38.583.957.983,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		43.696.355.810,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase operasional pelayanan BLUD	100 %	100 %	0,00	141.000.000.000,00	141.000.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		141.000.000.000,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	141.000.000.000,00	148.145.540.708,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		141.000.000.000,00		
97	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata rata capain SPM	100 %	100 %	0,00	4.462.650.000,00	4.462.650.000,00						23.320.121.211,00		
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang di fasilitasi	37 Unit	1 Unit	0,00	4.462.650.000,00	4.462.650.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		23.000.121.211,00		
	1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungny														
							Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		121.211,00		
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya;														
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	1 Unit	0,00	1.130.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0		0,00		
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Keseha														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	7 Unit	5 Unit	0,00	1.932.650.000,00	1.932.650.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		23.000.000.000,00		
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit														
							Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1 Unit	0,00	1.400.000.000,00	2.530.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		0,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			0,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		320.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		320.000.000,00		
J U M L A H										526.706.190.675,00	297.665.046.581,00	364.850.255.027,00						424.265.388.870,00		



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 050/157/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2024 dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 75);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. Ketua bertugas :

- a. memimpin segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2024 dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2024;
- b. mengoordinir segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2024 dalam pelaksanaan, pengendalian, *monitoring* seluruh kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
- c. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2024.

2. Sekretaris bertugas :

- a. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan dan penatausahaan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan

- b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2024.
- 3. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang kesekretariatan, keuangan, umum dan kepegawaian, serta perencanaan evaluasi dan pelaporan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2024.
- 4. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesehatan Masyarakat bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang Kesehatan Masyarakat dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2024.
- 5. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2024.
- 6. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang Sumber Daya Kesehatan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2024.
- 7. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Kesehatan bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang Pelayanan Kesehatan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2024.
- 8. Anggota Kelompok Kerja bertugas membantu tugas Koordinator Kelompok Kerja masing-masing.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Sekretaris, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesehatan Masyarakat, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Kesehatan, dan Anggota Kelompok Kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 14 April 2023



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
 4. Segenap Anggota Tim yang bersangkutan ;
 5. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Sekretaris	
3.	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan	
4.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
5.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesehatan Masyarakat	
7.	Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Sub Koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
12.	Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
	Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal		
15.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan	
16.	Sub Koordinator Kefarmasian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
17.	Sub Koordinator Sarana dan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
18.	Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
19.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Kesehatan	
20.	Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
21.	Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
22.	Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Pembiayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
23.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	



- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 14 April 2023



BUPATI KENDAL,
DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
 4. Segenap Anggota Tim yang bersangkutan ;
 5. Arsip.
-



PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KALIWUNGU TAHUN 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KALIWUNGU**

Jl. Soekarno Hatta No 39 Kaliwungu Kendal Telp. (0294) 381191
Kode Pos 51372

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya pada Pemerintah Kecamatan Kaliwungu telah dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Kaliwungu Tahun 2024 dengan lancar tanpa adanya suatu hambatan apapun, juga diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja mulai dari konsep dan rancangan awal hingga penetapan.

Renja Perubahan Kecamatan Kaliwungu Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kaliwungu Tahun 2021-2026 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Kaliwungu selama 1 (satu) tahun anggaran. Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi riil yang terjadi saat ini, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Tri Wulan II. Selain itu, penyusunan Renja Perubahan ini berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kaliwungu tahun 2021-2026.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Kaliwungu Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu masukan, saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan sehingga penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Kaliwungu ke depan semakin lebih baik.

Kendal, 31 Juli 2024



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
 BAB II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan.....	 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	 7
2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	35
BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	36
BAB IV PENUTUP	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Guna menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka masing-masing daerah diberi kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang diharapkan mampu menjawab dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat, pemerintahan dan lingkungan sosial serta fisik secara komprehensif.

Sesuai amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai acuan perencanaan kegiatan PD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, Renstra PD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Tri Wulan II untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Selanjutnya, proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal ini juga dilakukan secara *top down* dan *bottom up*, yaitu memadukan antara hasil kajian prioritas kebutuhan program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah atasan dan dokumen Renstra Kecamatan Kaliwungu.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kaliwungu ini mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kaliwungu berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan, dan program kegiatan Perangkat Daerah. Sebagai rencana operasional, Renja Perubahan Perangkat Daerah ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana

Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Tahun 2024..

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 20).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

1. Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Tahun 2024 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melakukan penyesuaian terhadap evaluasi hasil Rencana Kerja Kecamatan Kaliwungu sampai dengan Triwulan II dan mengoptimalkan proses pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dalam mencapai tujuan berdasarkan target indikator program yang telah ditetapkan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kaliwungu Tahun 2024 adalah :

- a. Memberikan acuan dalam menyusun program dan kegiatan pada perubahan APBD Tahun 2024;
- b. Memberikan acuan dalam menyusun indikator kinerja kegiatan pada perubahan APBD Tahun 2024;

- c. Memberikan acuan dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan pada perubahan APBD Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/ Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berisi hasil capaian kinerja pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan capaian Renstra

2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah pada Perubahan Renja Tahun 2024.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. ,Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kecamatan Kaliwungu sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Kaliwungu sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 secara umum selaras dengan Renja Kecamatan Kaliwungu tahun 2024, namun terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran dan SE yang berlaku pada tahun bersangkutan. Untuk kegiatan-kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun 2024, diusulkan kembali pada perubahan anggaran tahun 2024 dan tahun 2025.

Adapun kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun 2024 dan diusulkan kembali pada Renja tahun 2025 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 - a) Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - b) Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kaliwungu Tahun 2024 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Adapun review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kaliwungu sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Realisasi Program/ kegiatan/ sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang telah ditetapkan

Program/ kegiatan yang memenuhi dan/ atau melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang telah ditetapkan adalah :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

- 1) Kegiatan Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang meliputi

Sub kegiatan :

- a. Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, tidak tercapai karena anggaran digunakan untuk penyusunan dokumen perubahan Renja dan renja tahun 2025 yang masih dalam proses penyusunan
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tidak tercapai karena penyusunan laporan capaian kinerja dilaksanakan akhir tahun.

- 2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tidak tercapai karena sebagian besar lampu masih menyala , belum mati .
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor belum tercapai karena karena kunjungan tamu yang berkoordinasi di kecamatan rendah.

- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan belum tercapai karena dokumen yang perlu difotocopy masih sedikit dan cetak stopmap juga masih sedikit.
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD belum tercapai , hal ini karena undangan dinas luar kota masih rendah sehingga persediaan SPPD luar kota belum terserap sesuai target yang ditentukan. Makan minum Rapat Koordinasi juga belum semua dilaksanakan.
- 2) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang meliputi sub kegiatan :
- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya belum tercapai karena ada yang sudah teralisasi ada yang dialihkan /digeser untuk kegiatan lain, sudah terealisasi pengadaan mesin finger , pengadaan printer dan UPS dialihkan untuk kegiatan lain yang dianggarkan melalui anggaran perubahan.
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tidak tercapai karena masih dalam proses dengan pihak penyedia untuk pengadaan sarpras pembelian rak arsip dan filling kabinet.
- 3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi sub kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tidak tercapai karena pembayaran sesuai dengan rekening listrik , telepon dan wifi .
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor tidak tercapai karena pembayaran honor TPK sopir, penjaga malam dan petugas kebersihan dibayarkan bulan berikutnya, jadi bulan Juni baru dibayarkan honor sampai bulan Mei, untuk Desember dibayarkan 2 kali

yaitu diawal bulan untuk honor bulan November dan di akhir bulan untuk honor bulan Desember.

4) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang meliputi sub kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak tercapai karena pajak kendaraan bermotor belum waktunya perpanjangan STNK nya.
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak tercapai karena peralatan dan mesin masih belum perlu perbaikan, hanya beberapa yang perlu diperbaiki.
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya tidak tercapai karena belum ada perbaikan/pemeliharaan gedung.
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya belum tercapai, karena belum waktunya untuk dilaksanakan pemeliharaan AC.

b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik :

1) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat , yang meliputi sub kegiatan :

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan tidak tercapai karena belum dilaksanakan sosialisasi administrasi kependudukan tingkat kecamatan Kaliwungu, sesuai RAK dilaksanakan bulan Agustus 2024.

c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan :

1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang meliputi sub kegiatan :

- a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan tidak tercapai karena kegiatan raker dan pleno PKK telah

dilaksanakan sampai dengan bulan Juni, Lomba MTQ sudah dilaksanakan, namun masih ada kelebihan anggaran pengadaan piala karena kategori yang dilombakan berkurang, anggaran dialihkan untuk kegiatan lain di anggaran perubahan dan Koordinasi Penurunan Stunting dilaksanakan bulan Juli karena merupakan kegiatan untuk evaluasi penurunan stunting selama satu semester.

d) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum :

1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang meliputi sub kegiatan :

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan tidak tercapai karena pembayaran honor Linmas sejumlah 3 orang dibayarkan bulan berikutnya dan bulan Desember dibayarkan honor bulan November dan Desember.

e) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum :

1) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang meliputi sub kegiatan :

- a. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan tidak tercapai karena rapat koordinasi Forkompincam baru dilaksanakan 1 (satu) kali , apabila ada permasalahan yang mendesak langsung diadakan koordinasi melalui telepon ataupun rapat koordinasi di Polsek ataupun di Koramil.

f) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa :

1) Kegiatan Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang meliputi sub kegiatan :

- a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa tidak tercapai karena Perdes dan Perkades disusun di akhir tahun antara bulan

November- Desember, sehingga pendampingan penyusunan Perdes Perkades belum dilaksanakan

- b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa tidak tercapai karena pembinaan administrasi tata pemerintahan desa dilaksanakan semester II setelah pembagian SPPT PBB dan penarikan PBB dari desa , untuk monev capaian PBB. Peningkatan kapasitas lembaga yang di anggarkan di sub kegiatan ini dialihkan di program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- 2. Realisasi Program/ kegiatan yang memenuhi target dan/atau melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang telah ditetapkan

Program/ kegiatan yang memenuhi dan/ atau melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang telah ditetapkan adalah :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang meliputi sub kegiatan:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat;
- d) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

- 1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
 - b. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
- e) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Indikator Kinerja yang dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
3. Realisasi Program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang telah ditetapkan

Program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang telah ditetapkan nihil.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, tercapainya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan
 - a) Faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target kegiatan antara lain :
 - 1) Adanya Surat Edaran Pembatasan Dalam Penyusunan RKA seluruh Perangkat Daerah se- Kabupaten Kendal;
 - 2) Terjadi pergeseran rencana pelaksanaan kegiatan ke triwulan IV tahun 2024;
 - b) Faktor yang mendukung tercapainya kegiatan karena adanya komitmen semua pihak untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, sebagai bagian untuk pencapaian perjanjian kinerja perangkat daerah.

- c) Faktor yang menjadi penyebab melebihi target kinerja program/ kegiatan adalah nihil
- 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
 - a) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah secara umum mencapai target yang telah ditetapkan, meskipun demikian guna meningkatkan pelayanan Kecamatan Kaliwungu, perlu ditingkatkan pelaksanaan kegiatan yang langsung mendukung implementasi e-government, bersentuhan dengan kebutuhan layanan kepada masyarakat.
- 6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor penghambat adalah dengan perencanaan dan penganggaran yang mendukung percepatan Pelayanan Kecamatan Kaliwungu antara lain :

- a) Pengajuan penambahan kekurangan anggaran pada perubahan RKPD untuk kegiatan-kegiatan yang kurang anggaran pada penetapan anggaran;
- b) Pergeseran anggaran antar kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan perubahan kebijakan/ prioritas.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2024 Kecamatan Kaliwungu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

➤ **Analisis IKU Kecamatan Kaliwungu**

Faktor pendukung tercapainya nilai SAKIP ada beberapa faktor yaitu :

- a. Komitmen Pimpinan Kunci Keberhasilan SAKIP
- b. Adanya koordinasi yang melibatkan semua kepala seksi, kepala subbagian dan aparatur Kecamatan dalam hal penataan administrasi perkantoran

c. Manajemen kinerja dalam mendukung efektivitas

Faktor penghambat tercapainya nilai SAKIP ada beberapa faktor yaitu :

- a. Keterbatasan peralatan dan fasilitas kantor pendukung pelaksanaan pekerjaan.
- b. Data dan dokumen pendukung perencanaan yang belum memadai.
- c. Regulasi tentang perencanaan yg selalu mengalami perubahan.

Faktor pendukung tercapainya nilai IKM ada beberapa faktor yaitu :

- a. Komitmen Pimpinan Kunci Keberhasilan tercapainya Nilai IKM
- b. Kecepatan dalam memproses permintaan atau penyelesaian layanan, serta efisiensi dalam penyampaian hasil.
- c. Kepastian bahwa layanan akan diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan konsistensi dalam penerapan layanan.

Faktor penghambat tercapainya nilai IKM ada beberapa faktor yaitu :

- a. Keterbatasan peralatan dan fasilitas kantor pendukung pelaksanaan pekerjaan.
- b. Kurang informatif; informasi kurang tersebar luas kepada masyarakat
- c. Tanpa tindakan perbaikan yang jelas, masyarakat mungkin merasa bahwa survei tidak memberikan dampak yang nyata.

masih belum menampakkan kinerja yang maksimal hal ini dikarenakan ada beberapa faktor penghambat

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kaliwungu sampai dengan Semester I untuk nilai SAKIP dari target 73 realisasi

73,60 (108,08 %) dengan status capaian sangat tinggi, hal ini karena semua eviden SAKIP sudah dilaksanakan lengkap beserta data dukung dan hasil rekomendasi LHE AKIP sudah ditindak lanjuti dan dilaksanakan. Nilai IKM dari target 96 realisasi 97 (101,04 %) dengan status capaian sangat tinggi, hal ini karena pelayanan di Kecamatan Kaliwungu sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang dibuat, pelayanan cepat dan mudah, sehingga masyarakat merasa puas atas produk layanan yang ada di Kecamatan Kaliwungu.

Berdasarkan formulir Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu dari aplikasi Si-Eva bahwa Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah 45,66 (rendah), Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah 45,66 (rendah).Anggaran Tahun 2024 Kecamatan Kaliwungu sebesar Rp. 3.008.046.474,- (Tiga Milyard delapan juta empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) dan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 1.373.333.720,- (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh rupiah) realisasi fisik sebesar 45,66 % (rendah), masih belum menampakkan kinerja yang maksimal hal ini dikarenakan ada beberapa faktor penghambat.

Ada Program/Kegiatan yang Realisasinya tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran sesuai yang direncanakan. Tapi ada juga yang memenuhi bahkan melebihi, seperti yang diuraikan dibawah ini sekaligus Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, kemudian Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah serta Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pada Triwulan II belum semua program terlaksana pada Kecamatan Kaliwungu dan juga belum sesuai dengan yang direncanakan. Realisasi Capaian kinerja dan anggaran masing-masing program ,kegiatan,dan sub kegiatan pada Kecamatan Kaliwungu dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.797.724.474,- realisasi sebesar Rp.1.315.415.902,-realisasi fisik sebesar 47,02 % dengan rincian sebagai berikut :

1.1. Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.1.600.000,- realisasi anggaran Rp. 0,- realisasi fisik sebesar 35,95 % (rendah) yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

1.1.1. Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- realisasi Rp. 0,- realisasi fisik 36,61%,hal ini karena proses penyusunan dokumen perencanaan masih dalam proses penyusunan baik Renja Tahun 2025 maupun Perubahan Renja Tahun 2024.

1.1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.600.000,- realisasi Rp. 0,- realisasi fisik 35,10 % , capaian masih rendah karena belum waktunya penyusunan laporan capaian kinerja penyusunan LKJIP, SAKIP dan LKPD tahun 2024.

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.161.844.980,- relisasi sebesar Rp. 1.082.712.686,- realisasi fisik sebesar 50,08 % (tinggi), yang terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 2.161.844.980,- relisasi sebesar Rp. 1.082.712.686,- realisasi fisik 50,08 % , sudah sesuai

dengan target karena gaji dan tunjangan harus dibayarkan tiap bulan sebagai hak ASN.

- 1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 280.860.994,- realisasi sebesar Rp. 76.318.003,- realisasi fisik 27,17 % (rendah), yang terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu :

- 1.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 6.100.000,- realisasi sebesar Rp. 0,- realisasi fisik 90 % (rendah), capaian masih rendah karena Masuk di bulan Juli.

- 1.3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 21.250.000,- realisasi Rp. 6.103.000,- realisasi fisik 28.72 % (rendah), hal ini karena kebutuhan ATK, kertas cover, kardus arsip, dan lain-lain untuk menunjang administrasi kantor dalam pelaksanaan kegiatan masuk di bulan Juli

- 1.3.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp. 10.166.000,- realisasi sebesar Rp. 0 realisasi fisik 0 % (rendah), karena untuk penyediaan pelatan rumah tangga masuk di bulan juli.

- 1.3.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran Rp. 12.310.000,- realisasi Rp. 2.746.000,- realisasi fisik 22.31 % (rendah), dokumen yang perlu difotocopy masih sedikit dan cetak stopmap juga masih sedikit.

- 1.3.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 231.034.994,- realisasi sebesar Rp. 67.469.003,- realisasi fisik 29,20 % (rendah) , hal ini karena undangan dinas luar kota masih rendah sehingga persediaan SPPD luar kota belum terserap sesuai target yang ditentukan. Makan

minum Rapat Koordinasi juga belum semua dilaksanakan.

- 1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 15.200.000,- realisasi sebesar Rp. 14.875.000,- realisasi fisik 97.86% (Tinggi), yang terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

- 1.4.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 15.200.000,- realisasi sebesar Rp. 14.875.000,- realisasi fisik 97.86 % (Tinggi) , sudah terealisasi Sound Sistem untuk Fasilitas Pendopo Kecamatan Kaliwungu.

- 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 263.662.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 120.789.913,- realisasi fisik 45.81 % (rendah) yang terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu :

- 1.5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 3.800.000,- realisasi sebesar Rp. 1.400.000,- realisasi fisik 36.84,00 % (rendah) , untuk terpenuhinya tertib administrasi keuangan diperlukan materai bagi belanja diatas Rp. 5.000.000,- sebagian di realisasikan bulan juli.

- 1.5.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 63.274.000,- realisasi sebesar Rp. 28.888.489,- realisasi fisik 45.66 % (rendah), pembayaran sesuai dengan rekening listrik , telepon dan wifi .

- 1.5.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 95.400.000,- realisasi sebesar Rp. 44.895.212,- realisasi fisik 47,06 % (rendah), sesuai bulan pembayaran honor TPK, Sopir

- 1.5.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 101.188.000,- realisasi sebesar Rp. 45.606.212,- realisasi fisik 45.07 % (rendah), sesuai bulan pembayaran honor TPK , penjaga malam dan petugas kebersihan.
- 1.6. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 73.556.500,- realisasi sebesar Rp. 20.720,300,- realisasi fisik 28,17 % (rendah) yang terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu :
- 1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 27.000.000,- realisasi sebesar Rp.4.684.800,- realisasi fisik 17.35 % (rendah) karena pajak kendaraan bermotor belum waktunya perpanjangan STNK nya.
- 1.6.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran Rp. 5.500.000,- realisasi sebesar Rp. 1.588.500,- realisasi fisik 28.88 % (rendah), peralatan dan mesin masih belum perlu perbaikan, hanya beberapa yang perlu diperbaiki.
- 1.6.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp. 9.530.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.340.000 , - realisasi fisik 24.55 % , karena perbaikan/pemeliharaan gedung belum semua dilaksanakan
- 1.6.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaranRp. 31.526.500,- realisasi sebesar Rp. 12.107.000,- realisasi fisik 38.40 %, karena belum waktunya untuk dilaksanakan pemeliharaan AC.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan anggaran Rp. 8.550.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- realisasi fisik 0 % dengan rincian sebagai berikut :
 - 2.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan anggaran sebesar Rp. 8.550.000,- realisasi sebesar Rp. 0,- realisasi fisik 0 % (rendah) yang terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :
 - 2.1.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan dengan anggaran Rp. 8.550.000,- realisasi Rp. 0,- realisasi fisik 0% , belum dilaksanakan sosialisasi administrasi kependudukan tingkat kecamatan Kaliwungu.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp. 49.783.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 26.261.000,- realisasi fisik 52,75 % (rendah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - 3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 32.190.000,- realisasi sebesar Rp. 6.150.000,- realisasi fisik 19.11 % (tinggi) yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :
 - 3.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan anggaran sebesar Rp. 6.460.000,- realisasi sebesar Rp. 6.150.000,- realisasi fisik 95.20 %(tinggi), musrenbangcam sudah dilaksanakan sebagai sarana untuk menyampaikan usulan masyarakat agar ada sinkronisasi antara program pemerintah dan yang diinginkan oleh masyarakat.
 - 3.1.2. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 14.050.000,- realisasi

Rp.,- realisasi fisik 0 % ,Sosialisasi bagi UMKM sudah dilaksanakan , Pekan Raya Kendal belum dilaksanakan.

3.1.3. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 11.680.000,- realisasi sebesar Rp. 0,- realisasi fisik 31,4 % (rendah), kegiatan raker dan pleno PKK telah dilaksanakan sampai dengan bulan Juni, Lomba MTQ sudah dilaksanakan, namun masih ada kelebihan anggaran pengadaan piala karena kategori yang dilombakan berkurang, anggaran dialihkan untuk kegiatan lain di anggaran perubahan. Koordinasi Penurunan Stunting belum dilaksanakan.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp. 95.400.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 47.467.818,- realisasi fisik 49,76 % dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp. 95.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 47.467.818,- realisasi fisik 49.76 % yang terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

4.1.1. Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan anggaran Rp. 95.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 47.467.818,- realisasi fisik 49.76 %, sub kegiatan ini adalah pembayaran honor Linmas sejumlah 3 orang dan sudah dibayarkan sampai dengan bulan pembayaran honor.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran sebesar Rp. 45.595.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.300.000,- realisasi fisik 9.43 % dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
- 5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 45.595.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.300.000,- realisasi fisik 9.43 % yang terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :
- 5.1.1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Bimtek , Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dengan anggaran sebesar Rp. 8.585.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- realisasi fisik sebesar 0 % , rapat koordinasi Forkompincam baru dilaksanakan 1 (satu) kali karena apabila ada permasalahan yang mendesak langsung diadakan koordinasi melalui telepon ataupun rapat koordinasi di Polsek ataupun di Koramil.
- 5.1.2. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dengan anggaran sebesar Rp. 20.010.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- realisasi Fisik 0% karena dilaksanakan di bulan juli.
- 5.1.3. Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intra suku Umat Beragama Ras dan Golongan :Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan nasional.dengan Anggaran sebesar Rp. 17.000.000 realisasi sebesar Rp. 4.300.000 realisasi fisik 25.29% masih (rendah) Karena Kegiatan ada yang dilaksanakan di Semester dua.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 28.587.000,- realisasi sebesar Rp. 0,- realisasi fisik 0 % dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

6.1. Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 28.587.000,- realisasi sebesar Rp. 28.587.000,- realisasi fisik 0 % yang terdiri dari 2 sub kegiatan sebagai berikut :

6.1.1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 17.509.000,- realisasi sebesar Rp. 0,- realisasi fisik 0 %, pembinaan administrasi tata pemerintahan desa dilaksanakan semester II setelah pembagian SPPT PBB dan penarikan PBB dari desa , untuk monev capaian PBB. Peningkatan kapasitas lembaga yang di anggarkan di sub kegiatan ini dialihkan di program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

6.1.2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa anggaran sebesar Rp. 11.078.000,- realisasi sebesar Rp. 0,- realisasi fisik 0 %,guna tertib administrasi keuangan desa belum dilaksanakan bimtek penyusunan SPJ dan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan aturan TNT oleh Dispermasdes Kabupaten Kendal.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu sampai dengan Semester II Tahun 2024 dapat dilihat di tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kaliwungu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisas i (%)		Proyeks i Capaian Progra m dan Kegiata n s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=6(/5)	8	9	10=(9/4)
7		UNSUR KEWILAYAHAN							

7	0 1			KECAMATAN								
7	0 1	0 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100%	100%	49,02%	25%	100%	100%	100%
7	0 1	0 1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja OPD	100%	100%	50%	50%	100%	100	100
7	0 1	0 1	2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	3	50 %	4	6	100
7	0 1	0 1	2.01. 0007 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kinerja SKPD	Jumlah Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan	3	3	2	66,67 %	6	3	100

7	0	0	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
1	1	1										
7	0	0	2.02.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18	18	18	100%	18	14	77,78
1	1	1	0001									
7	0	0	2.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	0	0	0	12	0	0
1	1	1	0002									
7	0	0	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	100%	0	0	0	0	0	0
1	1	1										
7	0	0	2.05.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	18	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0002									
7	0	0	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
1	1	1										

					kebutuhan pelayanan kantor							
7	0 1	0 1	2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	6	50 %	40	12	100 %
7	0 1	0 1	2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	6	50 %	12	12	100 %
7	0 1	0 1	2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	6	50 %	12	12	100 %
7	0 1	0 1	2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	6	50 %	12	12	100 %
7	0 1	0 1	2.06. 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	0	0	0	7	0	0

					(Dokumen							
7	0	0	2.06.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	6	50 %	12	12	100 %
1	1	1	0009									
7	0	0	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah (unit)	11	11	1	9,09%	19	11%	100%
1	1	1										
7	0	0	2.07.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	9	9	1	11,11 %	8	9	100%
1	1	1	0006									
7	0	0	2.07.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	0	0%	0	2	100 %
1	1	1	0010									
7	0	0	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor	12	12	6	50%	12	12	100%
1	1	1										
7	0	0	2.08.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	6	50 %	12	12	100 %
1	1	1	0001									
7	0	0	2.08.	Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan	12	12	6	50 %	12	12	100 %
1	1	1										

	1	1	0002	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)							
7	0	0	2.08.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	6	50 %	12	12	100 %
	1	1	0004									
7	0	0	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Unit)	19	19	4	21,05%	19	19	100%
	1	1										
7	0	0	2.09	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8	8	7	87,5 %	10	8	100%
	1	1	0006									
7	0	0	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	4	3	75 %	4	4	100%
	1	1	0009									
7	0	0	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Sarana dan	11	11	11	100 %	10	11	100%

	1	1	0010	si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si (Unit)							
7	0 1	0 2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan Kecamatan	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%
7	0 1	0 2	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan (Kegiatan)	1	1	0	0%	1	1	100%
7	0 1	0 2	2.04. 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	1	1	0	0%	1	1	100%
7	0 1	0 3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	80%	30%	25	83,33%	30%	30%	37,5%
7	0	0	2.01	Koordinasi Kegiatan	Jumlah koordinasi	13	13	13	100%	13	13	100%

	1	3		Pemberdayaan Desa	kegiatan pemberdayaan masyarakat desa (Desa)							
7	0 1	0 3	2.01. 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga)	9	9	9	100%	9	9	100%
7	0 1	0 3	2.01. 0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	6	50 %	12	12	100%
7	0 1	0 3	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah desa yang dibina (desa)							
7	0 1	0 4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
7	0	0	2.01	Sinergitas dengan	Jumlah koordinasi yang	12	12	6	50%	12	12	100%

	1	4		Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan	Dilaksanakan (kali)							
7	0 1	0 4	2.02 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12	6	50%	12	12	100%
7	0 1	0 5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani (%)	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
7	0 1	0 5	2.02	Fasilitasi Koordinasi dan pembinaan Bimblek Sosialisasi, konsultasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah kegiatan Bimblek umum yang dilaksanakan (kali)	12	12	6	50%	12	12	100%

				dan Ketahanan Nasional								
7	0	0	2.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		12	12	12	50%	12	12	100
7	0	0	2.01	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan lainnya Guna mewujudkan Stabilitas keamanan Lokal Regional dan Nasional	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan	4	4	2	50 %	4	4	100%
7	0	0		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	90%	90%	0%	0%	90%	90%	90%
7	0	0	2.01	Fasilitasi, Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi dan pemerintah desa	9	9	0	0%	9	9	100%
7	0	0	2.01	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9	9	0	0%	9	9	100%

2. 2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 tidak memasukkan usulan dari masyarakat, karena program/kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan bersifat rutin dan tugas pokok yang dilakukan bersifat koordinatif dan pembinaan. Sedangkan usulan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat bersifat fisik.

Tabel 2.2
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kaliwungu

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	N	I	H	I L	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penambahan dan pengurangan Anggaran Perubahan RKPD tahun 2024 dilakukan dengan pertimbangan untuk kelancaran pelayanan dalam administrasi perkantoran serta mengefektifkan kinerja perkantoran, maka perlu penambahan dan pengurangan dana. Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mengalami pengurangan disebabkan ada beberapa Pegawai yang pensiun dan pindah tugas(mutasi) dari Kecamatan Kaliwungu sehingga kebutuhan gaji sudah bisa terpenuhi berdasarkan realisasi sampai dengan bulan Juni dan perkiraan sampai dengan bulan Desember 2024. Program yang mengalami penambahan adalah Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa disebabkan capaian kinerja program belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan kurang tertibnya administrasi keuangan di desa, dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan dan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Program yang mengalami pengurangan adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya ,Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan Koordinasi

Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan , Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

Program dan Kegiatan yang diusulkan pada Perubahan Renja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan :**

1.1 . Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2 . Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.3 . Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

1.4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan :

2.1 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan

Aset Desa

Adapun Rincian Program dan Kegiatan Kecamatan Kaliwungu Pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KALIWUNGU
KAB. KENDAL
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berku rang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAH AN 2024				NASIONAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN KALIWUNGU								2.883.166.277,00	3.008.046.474,00	2.983.046.474,00	99.880.197,00						3.005.150.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.883.166.277,00	3.008.046.474,00	2.983.046.474,00	99.880.197,00							3.005.150.000,00	
	7.01	KECAMATAN							2.883.166.277,00	3.008.046.474,00	2.983.046.474,00	99.880.197,00							3.005.150.000,00	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOT A	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah				100.00 %	100.00 %	2.566.003.777,00	2.797.724.474,00	2.726.222.474,00	151.146.223,00							2.717.150.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun				4 Dokumen	4 Dokumen	22.425.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	-19.825.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	ASN		27.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	17.425.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-16.425.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			17.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-3.400.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transform asi Pelayanan Publik	- -			10.000.000,0 0	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuanganyang tersusun Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun				12 Doku men 26 Dokumen	12 Doku men 26 Dokumen	2.044.821.783 ,00	2.161.844.98 0,00	2.086.844.98 0,00	42.023.197,00			Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transform asi Pelayanan Publik	- -	ASN		2.080.650.00 0,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.02.0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Meneri ma Gaji dan Tunjan gan ASN				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	1.946.421.783 ,00	2.161.844.98 0,00	2.086.844.98 0,00	140.423.197,00	Kab. Kendal, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transform asi Pelayanan Publik	- -			1.980.650.00 0,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.02.0 002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				14 Dokumen	14 Dokumen	98.400.000,0 0	0,00	0,00	-98.400.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transform asi Pelayanan Publik	- -			100.000.000,0 00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas Beserta atribut dan kelengkap annya Jumlah stel pakaian dinas emblem/id card yang tersedia				20 Paket 21 stel	20 Paket 21 stel	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transform asi Pelayanan Publik	- -	ASN		20.000.000,0 0	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.05.0 002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	20 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transform asi Pelayanan Publik	- -			20.000.000,0 0	KECAMATAN KALIWUNGU

7.01.01.2.06	Admini strasi Umum Perang kat Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor Prosentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Kantor				100 % 1927 Paket	100 % 1927 Paket	187.176.994,00	280.860.994,00	272.568.994,00	85.392.000,00			Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transform asi Pelayanan Publik	-	ASN		172.500.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
7.01.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.000.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	1.100.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transform asi Pelayanan Publik	-			7.500.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
7.01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	21.250.000,00	21.250.000,00	1.250.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transform asi Pelayanan Publik	-			30.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
7.01.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.900.000,00	10.166.000,00	10.166.000,00	3.266.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transform asi Pelayanan Publik	-			7.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
7.01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1100 Paket	1100 Paket	39.000.000,00	0,00	0,00	-39.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transform asi Pelayanan Publik	-			40.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
7.01.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7.642.000,00	12.310.000,00	12.346.000,00	4.704.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transform asi Pelayanan Publik	-			8.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
7.01.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	108.634.994,00	231.034.994,00	222.706.994,00	114.072.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	-			80.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset yang diadakan				7 unit	7 unit	32.000.000,00	15.200.000,00	17.200.000,00	-14.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	-	ASN		75.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.07.005	Pengadaan Mebel																		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHI R PERIO DE RENS TRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berk urang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	32.000.000,00	0,00	0,00	-32.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			35.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	15.200.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			40.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan tersedianya jasa kantor				12 bulan	12 bulan	224.130.000,00	263.662.000,00	271.692.000,00	47.562.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	ASN		131.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				380 Laporan	380 Laporan	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			4.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	53.650.000,00	63.274.000,00	71.304.000,00	17.654.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			42.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	83.340.000,00	95.400.000,00	95.400.000,00	12.060.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim			0,00	KECAMATAN KALIWUNGU
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	83.340.000, 00	101.188.00 0,00	101.188.00 0,00	17.848.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transform asi Pelayanan Publik	- -			85.000.000, 00	KECAMATAN KALIWUNGU
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis aset yang dipelihara Jumlah Jenis Aset yang diPelihara				40 unit 40 Unit	40 unit 40 Unit	55.450.000, 00	73.556.500, 00	75.316.500, 00	19.866.500,00			Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transform asi Pelayanan Publik	- -	ASN		211.000.00 0,00	KECAMATAN KALIWUNGU
7.01.01.2.09. 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	20 Unit	27.000.000, 00	27.000.000, 00	27.000.000, 00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transform asi Pelayanan Publik	- -			28.000.000, 00	KECAMATAN KALIWUNGU
7.01.01.2.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanganyang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	5.500.000,0 0	5.500.000,0 0	5.500.000,0 0	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transform asi Pelayanan Publik	- -			6.000.000,0 0	KECAMATAN KALIWUNGU
7.01.01.2.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	11.450.000, 00	9.530.000,0 0	11.290.000, 00	-160.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transform asi Pelayanan Publik	- -			15.000.000, 00	KECAMATAN KALIWUNGU
7.01.01.2.09. 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transform asi Pelayanan Publik	- -			150.000.00 0,00	KECAMATAN KALIWUNGU
7.01.01.2.09. 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			

			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	11.500.000,00	31.526.500,00	31.526.500,00	20.026.500,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhamkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			12.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan Presentase Ketercapaian Penunjang Urusan Perangkat Daerah				97%	87%	33.483.500,00	8.550.000,00	8.550.000,00	-16.483.500,00							17.000.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan				1 Laporan 45 Kegiatan	1 Laporan 45 Kegiatan	33.483.500,00	8.550.000,00	8.550.000,00	-24.933.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhamkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	ASN		17.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	33.483.500,00	8.550.000,00	8.550.000,00	-24.933.500,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhamkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			17.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD				50 %	50 %	59.000.000,00	32.190.000,00	32.190.000,00	2.000.000,00							61.000.000,00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASAR AN	RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berku rang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUDA H	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAER AH				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan akan Jumlah Koordinasi yang di Laksanakan				9 Kegiatan 9 Lembaga kemasyarakatan	9 Kegiatan 9 Lembaga kemasyarakatan	59.000.000,00	32.190.000,00	32.190.000,00	-26.810.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	ASN		61.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		KECAMATAN KALIWUNGU
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				9 Lembaga kemasyarakatan	9 Lembaga kemasyarakatan	11.500.000,00	6.460.000,00	6.460.000,00	-5.040.000,00	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			12.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		KECAMATAN KALIWUNGU
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swastadi Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	19.500.000,00	14.050.000,00	14.050.000,00	-5.450.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			20.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		KECAMATAN KALIWUNGU
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	28.000.000,00	11.680.000,00	11.680.000,00	-16.320.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			29.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang di Tangani				95 %	95 %	83.340.000,00	95.400.000,00	95.400.000,00	-10.340.000,00							73.000.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan KetertibanUmum	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan akan				12 Laporan	12 Laporan	83.340.000,00	95.400.000,00	95.400.000,00	12.060.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	ASN		73.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		

			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	83.340.000,00	95.400.000,00	95.400.000,00	12.060.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	-			73.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani				96 %	96 %	55.680.000,00	45.595.000,00	45.595.000,00	6.320.000,00							62.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan				1 Keg	1 keg	55.680.000,00	45.595.000,00	45.595.000,00	-10.085.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	-	ASN		62.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				45 Orang	45 Orang	11.500.000,00	8.585.000,00	8.585.000,00	-2.915.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	-			12.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				0 Orang	0 Orang	24.180.000,00	20.010.000,00	20.010.000,00	-4.170.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	-			30.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas				60 Orang	60 Orang	20.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	-			20.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU

			Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																	
6	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan anAPBDes tepat waktu				100 %	100 %	85.659.000,00	28.587.000,00	75.089.000,00	-10.659.000,00							75.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan permdes				9 Dokumen	9 Dokumen	85.659.000,00	28.587.000,00	75.089.000,00	-10.570.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	ASN		75.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.06.2.01. 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				9 Dokumen	9 Dokumen	70.659.000,00	17.509.000,00	64.011.000,00	-6.648.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			55.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	7.01.06.2.01. 0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				9 Dokumen	9 Dokumen	15.000.000,00	11.078.000,00	11.078.000,00	-3.922.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			20.000.000,00	KECAMATAN KALIWUNGU
	J U M L A H								2.455.210.099.26 1,00	2.554.502.569.72 0,00	2.710.823.152.8 65,00	255.613.053.604,0 0							2.761.903.860.66 6,00	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kaliwungu Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran Kecamatan Kaliwungu beserta indikatornya, penyesuaian program dan kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif program / kegiatan. Rencana Kerja Perubahan ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Kecamatan Kaliwungu Tahun Anggaran 2024.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Tahun 2024 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kaliwungu pada Tahun Anggaran 2024. Perubahan Rencana Kerja dilakukan sesuai dengan ketersediaan anggaran Pemerintah Kabupaten Kendal. Dalam pemilihan program dan kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja 2024 bersifat prioritas dan mendesak untuk dipenuhi dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) 2024 dan tetap berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kaliwungu Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Kendal, 31 Juli 2024


Drs. NUNG TUBENO
PEMBINA TK.I
NIP. 196702041986071001



RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN
RENCANA KERJA
KECAMATAN RINGINARUM
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN RINGINARUM

Jl. Kyai Cabe Ringinarum Telp. (0294) 5791144 Fax. 5791144
Kode Pos 51356

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya pada Pemerintah Kecamatan Ringinarum telah dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Ringinarum Tahun 2024 dengan lancar tanpa adanya suatu hambatan apapun, juga diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja mulai dari konsep dan rancangan awal hingga penetapan.

Renja Perubahan Kecamatan Ringinarum Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ringinarum Tahun 2021-2026 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Ringinarum selama 1 (satu) tahun anggaran. Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi riil yang terjadi saat ini, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Tri Wulan II. Selain itu, penyusunan Renja Perubahan ini berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ringinarum tahun 2021-2026.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Ringinarum Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu masukan, saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan sehingga penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Ringinarum ke depan semakin lebih baik.


CAMAT RINGINARUM
KUKUH DWI WIDAGDO, ST,MM
Pembina Tk. I
NIP. 19800120 200312 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI ii i

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI RENJA S/D TRIWULAN II TAHUN 2024 6

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD S/D Triwulan II dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah 6

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD 12

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan PD 12

BAB I V PENUTUP 17

.4.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan 17

4.2 Rencana Tindak Lanjut 18

LAMPIRAN

1. Perubahan Pendanaan, Program dan Kegiatan Kecamatan Ringinarum Tahun
2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Guna menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka masing-masing daerah diberi kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang diharapkan mampu menjawab dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat, pemerintahan dan lingkungan sosial serta fisik secara komprehensif.

Sesuai amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai acuan perencanaan kegiatan PD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, Renstra PD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Tri Wulan II untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Selanjutnya, proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal ini juga dilakukan secara *top down* dan *bottom up*, yaitu memadukan antara hasil kajian prioritas kebutuhan program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah atasan dan dokumen Renstra Kecamatan Ringinarum.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Ringinarum ini mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Ringinarum berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan, dan program kegiatan Perangkat Daerah. Sebagai rencana operasional, Renja Perubahan Perangkat Daerah ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Ringinarum Tahun 2024..

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 20).

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Ringinarum Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan. Kegiatan selama satu semester kedepan yang tertuang dalam Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Ringinarum merupakan implementasi dari Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Ringinarum maupun semua lapisan masyarakat sehingga pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan hasil-hasil pelayanan publik dapat menciptakan kondisi yang kondusif dan mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Ringinarum Tahun 2024 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah Kecamatan Ringinarum dalam melaksanakan program dan kegiatan setelah anggaran perubahan;
2. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan setelah anggaran perubahan;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah Kecamatan Ringinarum.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dan pendanaan Perangkat Daerah.

BAB IV Penutup

Memuat uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

TAHUN 2024

2.1 Hasil Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Hasil Renja Kecamatan Ringinarum Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan semua kegiatan dapat terlaksana dan memenuhi output yang diharapkan. Adapun secara rinci evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 diuraikan pada **Lampiran 1**. Sedangkan secara singkat hasil Kegiatan sampai Triwulan II Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pencapaian kinerja program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja Kecamatan Ringinarum secara keseluruhan terealisasi 53,96 % yang dijabarkan dalam kegiatan :

Kegiatan :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan pencapaian: sampai Triwulan II atau semester 1 dengan jumlah dana sebesar Rp 1.085.000,- dan anggaran yang terserap sebesar Rp 0,- atau terealisasi 0%, karena kegiatan dilaksanakan pada Semester II.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp.1.951.215.560,- dan anggaran yang terserap Rp. 1.102.621.291 ,- atau terealisasi 56,45 %.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.085.000 ,- dan anggaran yang terserap Rp. 0 ,-atau terealisasi 0 %, karena kegiatan dilaksanakan pada Semester II.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD, dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.085.000 ,- dan anggaran yang terserap Rp. 545.000 ,-atau terealisasi 50 %.
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya dengan ditidakan.
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 4.000.000,- dan anggaran yang terserap Rp. 3.369.500,- atau terealisasi 84,24 %.
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 13.568.500 ,- dan anggaran yang terserap Rp. 10.372.750 ,- atau terealisasi 76,45 %.
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 6.395.000 ,- dan anggaran yang terserap Rp. 2.122.500 ,- atau terealisasi 33,19 %.
 - Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 5.000.000 ,- dan anggaran yang terserap Rp. 708.000 ,- atau terealisasi 14,63 %.
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 0 ,- dan anggaran yang terserap Rp. 0,- atau terealisasi 0 %.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 127.795.000 ,- dan anggaran yang terserap Rp. 32.341.000 ,- atau terealisasi 25,31 %.
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 0 ,- dan anggaran yang terserap Rp. 0 ,- atau terealisasi 0 %, karena kegiatan dilaksanakan pada Semester II.

- f. Kegiatan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 4.000.000 ,- dan anggaran yang terserap 1.400.000,- atau terealisasi 35 %.
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 25.080.000 ,- dan anggaran yang terserap 6.1173.736,- atau terealisasi 24,62 %.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 33.144.000 ,- dan anggaran yang terserap 16.340.640,- atau terealisasi 49,30 %.
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :
- Penyediaan jasa Pemeliharaan , Baiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 15.000.000 ,- dan anggaran yang terserap atau terealisasi 0 %, karena kegiatan dilaksanakan pada Semester II.
 - Penyediaan jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dengan pencapaian sampai Triwulan II dengan jumlah dana sebesar Rp. 5.000.000 ,- dan anggaran yang terserap 1.854.500,- atau terealisasi 37 %.
 - Pemeliharaan Mebel dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 4.000.000,- dan anggaran yang terserap 0,- atau terealisasi 0 %, karena kegiatan dilaksanakan pada Semester II.
 - Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 4.000.000,- dan anggaran yang terserap 0,- atau terealisasi 0 %, karena kegiatan dilaksanakan pada Semester II.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 22.919.125 ,- dan anggaran yang terserap Rp. 22899.125 ,- atau terealisasi 100 %,.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pencapaian kinerja program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah terselenggaranya kegiatan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan secara keseluruhan terealisasi 41,27% yang dijabarkan dalam kegiatan :

- a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan :
 - Peningkatan efektivitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 115.290.000 ,- dan anggaran yang terserap Rp. 45.573.030,- atau terealisasi 39,53%.
- b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat dengan sub kegiatan :
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 4.820.000 ,- dan anggaran yang terserap Rp. 4.000.000,- atau terealisasi 83%.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pencapaian kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah terlaksananya Pemberdayaan di tingkat desa untuk menunjang pembangunan secara keseluruhan terealisasi 79,71% yang dijabarkan dalam kegiatan :

- a. Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sub kegiatan :
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 12.400.000,- dan anggaran yang terserap Rp. 4.300.000,- atau terealisasi 35%.
 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 9.740.000,- dan anggaran yang terserap Rp. 0,- atau terealisasi 0 %.

- Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 15.898.000,- dan anggaran yang terserap Rp. 8.900.000,- atau terealisasi 56%.

4. Program Koordinasi Ketretaman dan Ketertiban Umum

Pencapaian kinerja Program Koordinasi Ketretaman dan Ketertiban Umum adalah terbayarnya honor Linmas Kecamatan sebanyak 3 orang secara keseluruhan terealisasi 50 %, yang dijabarkan dalam kegiatan :

- a. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan sub kegiatan :
 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Trugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 83.520.000,- dan anggaran yang terserap Rp. 41.623.560,- atau terealisasi 50%.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Pencapaian kinerja kegiatan program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum secara keseluruhan terealisasi 0 %, yang dijabarkan dalam kegiatan :

- a. Kegiatan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah dengan sub kegiatan :
 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosilaisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 10.230.000,- dan anggaran yang terserap Rp. 0 ,- atau terealisasi 0 %, karena kegiatan dilaksanakan pada Semester II.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pencapaian kinerja kegiatan program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah terlaksananya kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif di tingkat desa secara keseluruhan terealisasi 0 %, yang dijabarkan dalam kegiatan :

- a. Kegiatan Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan :

- Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 11.940.000,- dan anggaran yang terserap Rp. 0 ,- atau terealisasi 0 %, karena kegiatan dilaksanakan pada Semester II.
- Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 18.450.000 dan anggaran yang terserap Rp. 0,- atau terealisasi 0%.
- Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 5.115.000,- dan anggaran yang terserap Rp. 0 ,- atau terealisasi 0 %, karena kegiatan dilaksanakan pada Semester II.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1.1 Rencana Kerja dan Pendanaan PD

Rencana kerja Kecamatan Ringinarum dan pendanaan Perubahan pada Tahun 2024 mengalami banyak Perubahan, dikarenakan keadaan keuangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Kendal yang mengalami defisit sehingga perubahan yang terjadi adalah pengurangan terhadap anggaran yang ada di setiap OPD tidak terkecuali pada Anggaran di Kecamatan Ringinarum, adapun secara rinci rencana Renja Perubahan Kecamatan Ringinarum Tahun 2024 diuraikan pada Lampiran II, sedangkan secara singkat rencana kerja dan pendanaan Perubahan pada Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

1.) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja Kecamatan Ringinarum secara keseluruhan yang mengalami perubahan sebagai berikut :

Kegiatan :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, jumlah dana sebesar Rp 1.085.000,- Tetap .
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.951.215.560 ,- dan mengalami perubahan dalam APBDP 2024 disesuaikan / dikurangi menjadi Rp. 1.1.855.318.646 ,,-.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD,I dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.085.000 ,- dan tetap.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD, dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.085.000,- dan tetap.
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya dengan jumlah dana sebesar Rp. 0,-

- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
- Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan jumlah dana sebesar Rp. 4.000.000,- tetap.
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan dengan jumlah dana sebesar Rp. 13.568.500 ,- dan tetap.
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan jumlah dana sebesar Rp. 14.451.000 ,- dan mengalami perubahan dalam APBDP 2023 dengan dikurangi Rp. 8.805.000,- karena menyesuaikan kegiatannya menjadi Rp. 8.605.000,-
 - Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan dengan jumlah dana sebesar Rp. 5.000.000 ,- dan mengalami perubahan dalam APBDP 2023 dengan ditambah Rp. 5.014.800,- karena menyesuaikan kegiatannya menjadi Rp. 10.014.800,-
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan jumlah dana sebesar Rp. 0 ,- tidak mengalami perubahan dalam APBDP 2024.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan jumlah dana sebesar Rp. 127.795.000 ,- dan mengalami perubahan dalam APBDP 2024 dengan ditambah Rp. 18.820.000,- karena menyesuaikan kegiatannya menjadi Rp. 145.865.114,-.
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :
- Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya dengan jumlah dana sebesar Rp. 0 ,- dan mengalami perubahan dalam APBDP 2023 disesuaikan / dikurangi menjadi Rp. 0 ,,-
- f. Kegiatan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan jumlah dana sebesar Rp. 4.000.000 ,- dan mengalami perubahan dalam APBDP 2024 disesuaikan / ditambah menjadi Rp. 5.000.000 ,,-
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan jumlah dana sebesar Rp. 25.080.000 ,- dan tidak mengalami perubahan dalam APBDP 2024.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan jumlah dana sebesar Rp. 34.944.000 ,- dan mengalami perubahan dalam APBDP 2024 dengan ditambah Rp. 1.500.000,- karena menyesuaikan kebutuhannya menjadi Rp. 34.944.000,-.
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :

- Penyediaan jasa Pemeliharaan , Baiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan dengan jumlah dana sebesar Rp. 15.000.000,- dan dan mengalami perubahan dalam APBDP 2024 dengan dikurangi Rp. 3.148.000,- karena menyesuaikan kebutuhannya menjadi Rp. 11.854.000,-.
- Penyediaan jasa Pemeliharaan , Baiaya Pemeliharaan dan Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dengan dengan jumlah dana sebesar Rp. 5.000.000 ,- tidak mengalami perubahan dalam APBDP 2023.
- Pemeliharaan mebel dengan dengan jumlah dana sebesar Rp. 4.000.000 ,- tidak mengalami perubahan dalam APBDP 2023.
- Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya dengan dengan jumlah dana sebesar Rp. 4.000.000 ,- tidak mengalami perubahan dalam APBDP 2024.
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya dengan jumlah dana sebesar Rp. 22.919.125,- dan tidak mengalami perubahan dalam APBDP 2023.

2.) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pencapaian kinerja program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah terselenggaranya kegiatan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan secara keseluruhan yang mengalami perubahan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan :
 - Peningkatan efektivitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan dengan jumlah dana sebesar Rp. 115.290.000 ,- dan mengalami perubahan dalam APBDP 2023 dengan dikurangi Rp. 12.420.000,- karena menyesuaikan kebutuhannya menjadi Rp. 91.620.000,-.
- b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat deng sub kegiatan :
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha jumlah dana sebesar Rp. 4.820.000 ,- dan tidak mengalami perubahan dalam APBDP 2024.

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pencapaian kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah terlaksananya Pemberdayaan di tingkat desa untuk menunjang pembangunan secara keseluruhan yang mengalami perubahan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sub kegiatan :

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan jumlah dana sebesar Rp. 12.400.000,- dan mengalami perubahan dalam APBDP 2024 disesuaikan / dikurangi menjadi Rp. 4.300.000 , -.
- Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta dengan jumlah dana sebesar Rp. 9.740.000,- dan tidak mengalami perubahan dalam APBDP 2024.
- Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan dengan jumlah dana sebesar Rp. 15.898.000,- dan mengalami perubahan dalam APBDP 2024 disesuaikan / dikurangi menjadi Rp. 12.148.000 , -.

d. Program Koordinasi Ketretaman dan Ketertiban Umum

Pencapaian kinerja Program Koordinasi Ketretaman dan Ketertiban Umum adalah terbayarnya honor Linmas Kecamatan sebanyak 3 orang secara keseluruhan yang mengalami perubahan sebagai berikut :

a. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan sub kegiatan :

- Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan jumlah dana sebesar Rp. 83.520.000,- dan tidak mengalami perubahan dalam APBDP 2024.

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Pencapaian kinerja kegiatan program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum secara keseluruhan yang mengalami perubahan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah dengan sub kegiatan :

- Fasiltasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosilaisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dengan jumlah dana sebesar Rp. 10.230.000,- dan tidak mengalami perubahan dalam APBDP 2024.

f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pencapaian kinerja kegiatan program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah terlaksananya kegiatan koordinasi pengawasan

yang lebih komprehensif di tingkat desa secara keseluruhan yang mengalami perubahan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan :
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan jumlah dana sebesar Rp. 11.940.000,- dan mengalami perubahan dalam APBDP 2024 disesuaikan menjadi Rp. 50.000.000,-.
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan jumlah dana sebesar Rp. 18.450.000 dan mengalami perubahan dalam APBDP 2024 disesuaikan / dikurangi menjadi Rp. 4.850.000 ,,-.
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum dengan jumlah dana sebesar Rp. 5.115.000,- dan tidak mengalami perubahan dalam APBDP 2024.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ringinarum Tahun 2023 ini diharapkan akan memberikan arahan atau “*guidance*” serta sebagai tolak ukur dalam menjalankan kinerja Kecamatan Ringinarum sesuai dengan prioritas program dan kegiatan selama 6 bulan, sehingga program dan kegiatan dapat terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya Rencana Kerja Kecamatan Ringinarum ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUAP) serta prioritas dan plafon anggaran sementara Perubahan (PPASP) dan APBD.

Untuk itu, perlu dukungan dari semua pihak terutama jajaran aparatur Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal agar tantangan dan problema yang ada dalam pelaksanaan tugas diberbagai bidang (pendayagunaan sumber daya aparatur) dapat dihadapi secara bersinergi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ringinarum Tahun 2024 sangat dipengaruhi oleh ketersediaan alokasi anggaran, sehingga jika alokasi anggaran untuk Kecamatan Ringinarum Tahun 2024 sudah ditetapkan, masih memungkinkan untuk merevisi dan menyesuaikan kegiatan dalam Rumusan Rencana Kerja dengan alokasi anggaran yang tersedia.

a. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ringinarum Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan profesional.

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana strategis Kecamatan Ringinarum Tahun 2021-2026 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ringinarum Tahun 2024 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi anatar sekretariat dan seksi.

2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan , sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil yang telah dilaksanakan.
3. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ringinarum 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan OPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kendal.
4. Dalam Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ringinarum Tahun 2024 berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya antara lain : RPJMD, Renstra Kabupaten RKPD Kabupaten, Renstra Kecamatan Ringinarum.
5. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ringinarum Tahun 2024 harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan / kegiatan Kecamatan Ringinarum tahun 2024 setelah adanya Perubahan Anggaran.

b. Rencana Tindak Lanjut

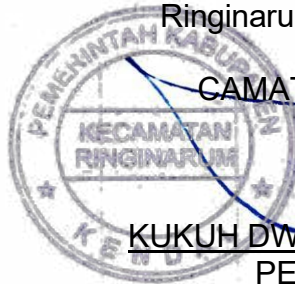
Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan / kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodir di dalam kebijakan tersebut dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasyarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan,
2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara , terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggungjawab tentang penyelenggaraan pemerintahan.

3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan.
4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks.
5. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan.
6. Dalam sinegritas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD yang membawahi Perencanaan (Baperlitbang) agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.

Ringinarum, Agustus 2024



CAMAT RINGINARUM


KUKUH DWI WIDAGDO, ST,MM
PEMBINA TK.I
NIP. 19800120 200312 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024



KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

Jl. Veteran No. 05 Desa Limbangan Telp. (0294) 571011

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Limbangan Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini.

Penyusunan Perubahan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal berdasarkan pada Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2024 yaitu Kendal Smart City dengan Fokus Pembangunan Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kendal semakin efektif, efisien, pelayanan publik semakin mudah dan handal, serta kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Penetapan Kinerja Tahun 2024 ini mendeskripsikan bagaimana capaian kinerja yang hendak diwujudkan oleh Kecamatan Limbangan pada tahun 2024 sesuai dengan Rencana Strategik yang telah ditetapkan. Melalui instrumen ini diharapkan dapat mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam membangun pemerintahan yang baik dan terpercaya berdasarkan prinsip-prinsip good governance.

Kami menyadari bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Limbangan Tahun 2024 ini masih banyak kelemahan dan kekurangan namun setidaknya dapat menjadi bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan sebagai tugas pokok dan fungsi Camat serta dapat menjadi bahan kajian yang bermanfaat bagi upaya peningkatan penyelenggaraan kegiatan yang akan datang.

Demikian dan semoga dokumen ini dapat menjadi bahan masukan serta informasi yang berguna bagi pengambil keputusan (decision maker) dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.

Limbangan, Agustus 2024

CAMAT LIMBANGAN

SUCIPTO, S. STP., M.M

Pembina

NIP. 197807041997031002



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		iv
BAB I PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang		1
1.2 Landasan Hukum		4
1.3 Maksud dan Tujuan		7
1.4 Sistematika Penulisan		8
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU		
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra PD		10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD		21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD		25
2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD		30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat		34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional		37
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD		38
3.3 Program Kegiatan.....		39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		48
BAB V PENUTUP		62
Lampiran - lampiran		

DAFTAR TABEL

Tb.T-C.29	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022 Kec. Limbangan	15
Tb.T-C 30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kec. Limbangan Kabupaten Kendal	23
Tb.T-C.31	Review Terhadap RKPD Tahun 2024 Kecamatan Limbangan	32
Tb.T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023	34
Tb.T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Kendal	41
Tabel	Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Limbangan	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan di tetapkannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Kecamatan Limbangan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal.

1.1.1. Pengertian Renja

Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Tahun 2024 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi misi Pemerintah Kabupaten Kendal seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Limbangan Tahun 2021 – 2026

Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Limbangan Tahun 2024 merupakan dokumen yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Limbangan Tahun 2021–2026 dan merupakan salah satu bahan dari SKPD yang akan digunakan untuk penyusunan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun 2024 yang telah disusun dengan mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 .

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari enam tahapan utama yaitu tahap Persiapan Penyusunan, tahap

Penyusunan Rancangan Akhir, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir dan tahap Penetapan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

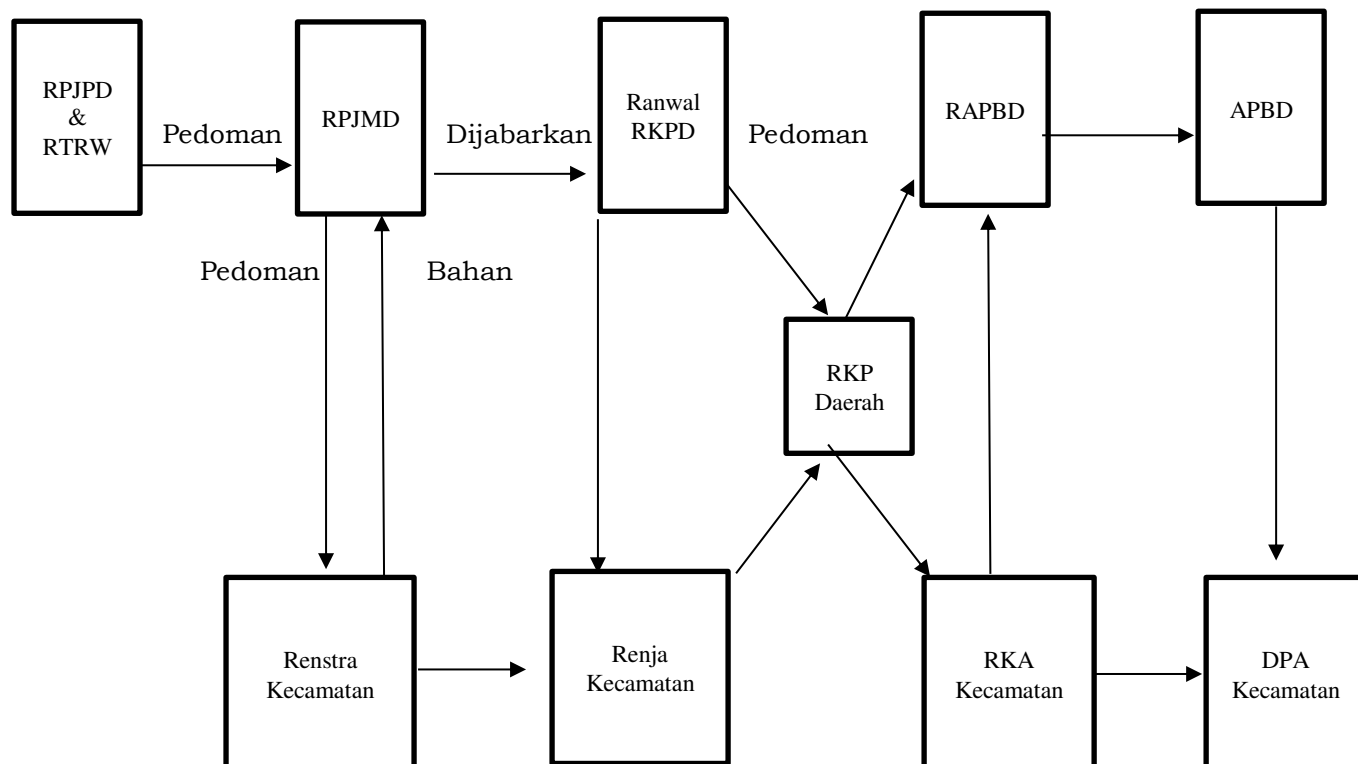
Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Limbangan tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD. Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Limbangan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini menyusun Rencana Kerja Tahun 2024. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan dan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



1.2 Landasan hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 590);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun

- 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
 21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 37).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Tahun 2024 adalah tersusunnya dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi Kecamatan Limbangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama kurun waktu 2024.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Limbangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Kecamatan Limbangan dalam menentukan prioritas Program dan Kegiatan Tahun 2024.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Limbangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Limbangan untuk memahami Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Operasional Tahun 2024, dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan

penyusunan anggaran sehingga terwujud anggaran berbasis kinerja.

4. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Limbangan tahun 2024 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2024;
5. Menjabarkan tentang gambaran umum daerah sekarang dan yang ingin dicapai pada tahun 2024 kedepan sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapinya misi dan visi kepala daerah;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Limbangan Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Berisi mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.

Bab II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap terhadap Rancangan Akhir RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah,

rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra perangkat daerah serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi. Tahun 2022 Kecamatan Limbangan melaksanakan 5 program dan 10 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai triwulan keempat tahun 2022 dapat terealisasi rata-rata 99.7%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/ kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 95 %.

Kegiatan yang telah mencapai 100% adalah 5 kegiatan sedangkan yang tidak mencapai 100% sebanyak 5 kegiatan karena ada rasionalisasi anggaran, sehingga beberapa kegiatan tidak tercapai secara optimal. Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan tahun 2022 adalah rata-rata 99,8%

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (Tahun $n-2 = 2022$) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja Program sesuai target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Jumlah program Tahun 2022 ada 5 program, sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Target dari program tersebut adalah Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Perangkat Daerah sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersebut sebesar Rp

2.713.019.284,00 terealisasi sebesar Rp 2.530.756.580,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 93,28 %.

- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Target dari Program tersebut adalah Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tersebut sebesar Rp 6.712.000,00 terealisasi sebesar Rp 6.712.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Target dari Program tersebut adalah Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD sebesar 100% terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tersebut sebesar Rp 33.343.000,00 terealisasi sebesar Rp 33.343.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
- 4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Target dari Program tersebut adalah Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani 100% dan terealisasi sebesar 99,9% atau tingkat capaian kinerja sebesar 99,9%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tersebut sebesar Rp 144.714.000,00 terealisasi sebesar Rp 144.630.544,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 99,9%.
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Target dari Program tersebut adalah Persentase penyusunan APBDes tepat waktu sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tersebut sebesar Rp

61.650.000,00 terealisasi sebesar Rp. 61.650.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan.

Kegiatan Tahun 2022 jumlahnya ada 10 Kegiatan, sebagai berikut :

1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Target dari Kegiatan tersebut adalah Persentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100% (target cetak dokumen perencanaan 160) dan terealisasi sebanyak 160 dokumen atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp 18.450.000,00 terealisasi sebesar Rp 18.450.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Target dari Kegiatan tersebut adalah Persentase capaian kinerja keuangan perangkat daerah selama 14 bulan dan terealisasi sebesar 14 bulan atau tingkat capaian kinerja 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp 2.286.442.784,00 terealisasi sebesar Rp 2.109.402.185,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 92,26%.

3) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Target dari Kegiatan tersebut adalah Persentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah selama 12 bulan dan terealisasi sebesar 12 bulan atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 119.981.500,00 terealisasi sebesar Rp. 118.978.500,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 99,16 %.

4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Target dari Kegiatan tersebut adalah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selama sebanyak 12 bulan dan terealisasi selama 12 bulan atau tingkat capaian

kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 118.276.000,00 terealisasi sebesar Rp. 115.033.205,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 97,26%.

5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Target dari Kegiatan tersebut adalah Persentase capaian kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan jumlah gedung yang diperbaiki 1 unit dan terealisasi sebesar 1 unit atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 169.869.000,00 terealisasi sebesar Rp. 168.892.690,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 99,43%.

6) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

Target dari Kegiatan tersebut adalah Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan dengan target 7 dokumen tercetak 50 dokumen atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 6.172.000,00 terealisasi sebesar Rp. 6.172.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

7) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Target dari Kegiatan tersebut adalah Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sebanyak 16 desa dan terealisasi sebesar 16 desa atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 33.343.000,00 terealisasi sebesar Rp. 33.343.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

8) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Target dari Kegiatan tersebut adalah Jumlah pembinaan anggota linmas sebanyak 50 orang linmas dan terealisasi 50

orang atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 134.554.000,00 terealisasi sebesar Rp. 134.470.554,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 99,9%.

9) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Target dari Kegiatan tersebut adalah Jumlah desa yang dimonitor dalam kegiatan pengawasan wilayah sebanyak 16 desa dan terealisasi 16 desa atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 10.160.000,00 terealisasi sebesar Rp. 10.160.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

10) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Target dari Kegiatan tersebut adalah Jumlah desa yang difasilitasi dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sebanyak 16 desa dan terealisasi 16 desa atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 61.650.000,00 terealisasi sebesar Rp. 61.650.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

Adapun Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya serta tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada **Tabel T-C.29** berikut:

Tabel T-C 29.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Kendal**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Limbangan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian realisasi target renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Prosentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	98	100	93.29	93.29	100	0	0
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100	100	100	100	1	100	0	0
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase capaian kinerja keuangan perangkat daerah	100	89,3	100	92.26	0.9226	100	0	0
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	0	0	0		0	0
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100	100	100	99,16	99.16	100	0	0
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pemenuhan jasa penunjang	100	100	100	97,26	97.26	100	0	0

7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase capaian kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	100	98,6	100	99,43	99.43	100	0	0
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100	100	100	100	100	100	0	0
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	100	100	100	100	100	100	0	0
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN	Prosentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	100	100	100	100	100	100	0	0
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	16 kali	16 kali	100	100	100	100	0	0
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100	100	100	99,94	99.94	100	0	0
7	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi dengan Satpol PP	12 kali	12 kali	100	99,94	99.94	100	0	0
7	01	04	2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12 kali	12 kali	100	100	100	100	0	0
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase penyusunan APBDes tepat waktu	100	100	100	100	100	100	0	0
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pembinaan, pengawasan pemerintahan desa	16 Desa	16 Desa	16 Desa	16 Desa	100	100	0	0

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
Semua program dan kegiatan tahun 2022 telah terealisasi sesuai dengan target yang diusulkan (100%) secara fisik, dan realisasi anggaran tercapai 99,4 %
2. Realisasi program/kegiatan tahun 2022 yang terealisasi sesuai dengan target kinerja 100% dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah.

No	Program/ Keg/ Sub Keg	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Persentase
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat Daerah	100	93,28	93,28
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	160 dok	160 dok	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan triwulanan/semi steran	160 dok	160 dok	100
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja keuangan perangkat daerah	100	89,3	89,3
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	92,14
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pengelola keuangan	5 orang	5 orang	100
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja	100	99,16	99,16

		administrasi umum perangkat daerah			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12	12	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	12	99,99
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	12	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan perpu	12	12	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan BBM dan perjalanan dinas	12	12	97,95
d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	97,26	97,26
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah belanja materi	500	500	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan belanja rekening listrik, air dan telpon	12	12	92,96
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan peralatan kantor	12	12	96,12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja jasa tenaga penunjang kegiatan kantor	2 orang	2 orang	99,89

e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	99,43	99,43
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang di rehab dan diperbaiki	1	1	99,43
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100	100	100
a	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	100	100	100
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dokumen perijinan	50	50	100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	100	99,9	99,9
a	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	16	16	100
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang mengikuti kegiatan musrenbang	16	16	100

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Monitoring dan evaluasi kegiatan efektifitas pemberdayaan masyarakat desa	16	16	100
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100	99,9	99,9
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12	12	100
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang dimonitor	16	16	100
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi	50 orang	50 orang	99,94
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah tenaga linmas dan peserta pembinaan linmas	50 orang	50 orang	99,94
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	100	100	100
a	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	16	16	100

	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah APBDes yang disusun	16	16	100
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah desa yang dibina	16	16	100

3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya / terpenuhinya target kinerja program/kegiatan.

- Adanya rasionalisasi anggaran dan pandemi covid-19 mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana atau capaian kinerja tidak maksimal;
- Keterbatasan SDM dengan volume kegiatan yang kurang seimbang mempengaruhi hasil kinerja
- Keterbatasan fasilitas dan fasilitasi dari dinas terkait sehingga kegiatan dilaksanakan dengan memaksimalkan SDM yang tersedia untuk dapat mencapai hasil yang maksimal
- Adanya regulasi kebijakan yang berubah-ubah dalam waktu yang singkat sehingga pelaksanaan program dan kegiatan mengalami perubahan yang terjadi dengan memakan waktu yang lama.

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD.

Target capaian program Renstra tahun 2021-2026 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana kerja (renja) sehubungan dengan perkembangan kebutuhan baik dari segi anggaran maupun kegiatan di wilayah.

5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut adalah;

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program/kegiatan lebih difokuskan pada prioritas kegiatan sesuai visi misi daerah dan memaksimalkan anggaran yang tersedia.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Limbangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk

mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Limbangan, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Limbangan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Kendal;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Limbangan selama kurun waktu tahun 2022 cukup baik. Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Limbangan yang dapat terealisasi sebesar 99,4% dari target yang telah ditentukan.

Selanjutnya, lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Limbangan dapat dilihat dari **Tabel T-C.30** berikut.

Tabel T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Prosentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah			100	100	100	100	98	93.29	100	100	
2	Prosentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Prosentase capaian kinerja keuangan perangkat daerah			100	100	100	100	89,3	92.26	100	100	
4	Prosentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100	100	100	100	100	0	100	100	
5	Prosentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah			100	100	100	100	100	99,16	100	100	
6	Prosentase pemenuhan jasa penunjang			100	100	100	100	100	97,26	100	100	
7	Prosentase capaian kegiatan pemeliharaan barang milik daerah			100	100	100	100	98,6	99,43	100	100	
8	Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan			100	100	100	100	100	100	100	100	

9	Prosentase kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan			100	100	100	100	100	100	100	100	
10	Prosentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD			100	100	100	100	100	100	100	100	
11	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa			16 kali	16 kali	16 kali	16 kali	16 kali	100	16 kali	16 kali	
12	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani			100	100	100	100	100	99,94	100	100	
13	Jumlah koordinasi dengan Satpol PP			12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	99,94	12 kali	12 kali	
14	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum			12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100	12 kali	12 kali	
15	Prosentase penyusunan APBDes tepat waktu			100	100	100	100	100	100	100	100	
16	Jumlah desa yang difasilitasi pembinaan, pengawasan pemerintahan desa			16 Desa	16 Desa	16 Desa	16 Desa	16 Desa	16 Desa	16 Desa	16 Desa	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan yang ada di Kecamatan Limbangan dalam melaksanakan tupoksinya adalah belum optimalnya pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi lintas sektor di setiap seksi yang disebabkan oleh keterbatasan SDM dengan beban kerja yang banyak.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Limbangan secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bidang Pemerintahan

1}. Peraturan Desa

Dalam pembuatan Peraturan Desa masih banyak terjadi kendala antara lain masih kurangnya pemahaman Pemerintahan Desa terhadap pentingnya Produk Hukum bagi Pemerintah Desa, sehingga terkesan setiap pembuatan Peraturan Desa tidak berkualitas baik dari segi redaksi tata bahasa, nilai estetika, filosofi hukum dan esensi yang diatur.

Upaya-upaya yang telah dilakukan :

- Memberikan Sosialisasi kepada Pemerintah Desa tentang pedoman pembuatan Peraturan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Sosialisasi Produk Hukum dengan sasaran Perangkat Desa dan Lembaga Desa;
- Pembinaan Anggota BPD selaku Badan Pengawas Desa yang membantu mengawasi jalannya pemerintahan desa.

2}. Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)

Redaksional penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD, mekanisme kerja Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang menunjang pelaporan ADD dan DD serta Landasan Hukum yang mendasari penyusunan laporan tersebut untuk seluruh Desa banyak yang belum dioperasionalkan secara

optimal. Upaya yang telah dilakukan mengenai Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD dengan **Aplikasi Silakus**

3}. *Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Perangkat Desa*

Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Perangkat Desa serta sarana TIK yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan secara efektif dan efisien;

Upaya yang telah dilakukan :

- Mengadakan pembinaan peningkatan kapasitas SDM perangkat desa;
- Pembinaan administrasi desa dan aset desa;
- Peningkatan kinerja pemerintahan desa;
- Peningkatan sarana prasarana pendukung kinerja pemerintahan desa;
- Inovasi dibidang Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa.

4). *Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022*

- Target PBB Tahun 2022 Kecamatan Limbangan sebesar Rp. 1.332.485.869,00, terealisasi sebesar Rp. 1.229.524.595,00, dengan capaian kinerja 92,27%. Dari 16 desa yang sudah lunas 100% sebanyak 9 desa.
- Sebagai upaya peningkatan pembayaran PBB dilaksanakan sosialisasi dan monitoring perkembangan pembayaran pajak ke desa-desa oleh Tim intensifikasi PBB
- Selalu memantau perkembangan realisasi PBB melalui sistem.

5). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*

- Penyusunan APBDes sering tidak tepat waktu;
- Adanya perubahan regulasi kebijakan yang menghambat penyusunan APBDes
- Keterbatasan SDM Tim Penyusun APBDes
- Budaya cypaste

Upaya yang telah dilakukan :

- Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyusunan APBDes bersama Tim Pendamping Desa dan Kecamatan;
- Mengevaluasi lebih dini konsep APBDes;
- Pendampingan ke desa-desa;
- Melaksanakan Rakor Tingkat Kecamatan dengan mengundang Tim Penyusun APBDes;
- Memaksimalkan sistem yang sudah ada untuk penyusunan APBDes tepat waktu;
- Melibatkan semua unsur yang terlibat dan berkompeten dalam penyusunan APBDes.

b. Bidang Pelayanan Publik

- Keterbatasan SDM;
- Masyarakat belum memahami sepenuhnya dengan sistem pelayanan publik berbasis IT;

Upaya yang telah dilakukan :

- Mengusulkan tambahan SDM;
- Memberikan pembekalan serta peningkatan kemampuan SDM staf yang membidangi pelayanan publik, baik melalui pelatihan formal maupun dalam koordinasi internal kecamatan dengan cara mendorong peningkatan kerjasama antar staf dan para kasi;
- Merencanakan kegiatan penataan organisasi dengan maksud untuk peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi

c. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- Penyusunan RKPDDes belum optimal
- Tim evaluasi yang dibentuk belum berjalan dengan optimal
- Belum tersosialisasikannya secara optimal pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis evaluasi RAPB-Des dan LPP-Des

- Perlu dibangun sarana integritas pelaporan administrasi desa sinergis dengan kecamatan secara online, menuju desa mandiri dan maju;
- Pemerintahan Desa belum memfasilitasi untuk menampung kegiatan UMKM sebagai wadah bagi peningkatan ekonomi rakyat, sementara masih berjalan individual;
- Terkait dengan peningkatan destinasi wisata, untuk infrastruktur perlu ditingkatkan sebagai akses jalan masuk ke lokasi wisata

Upaya yang telah dilakukan:

- Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat, lembaga yang berada di tingkat desa maupun kecamatan dengan *stake holder* atau dinas terkait;
- Memantau perkembangan program kerja yang turun sehingga dapat berjalan maksimal dan berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna;
- Mengadakan pertemuan-pertemuan informal dengan tokoh masyarakat baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa/kelurahan;
- Perlu dibangun sarana integritas pelaporan administrasi desa sinergis dengan kecamatan secara online, menuju desa mandiri dan maju;
- Melakukan koordinasi dan terobosan sebagai upaya peningkatan destinasi wisata;
- Inovasi Digitalisasi Desa Wisata.

d. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;
- 2) Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para

generasi muda yang terhimpun dalam karang taruna di masing-masing wilayah, serta masih banyak desa yang belum terbentuk kepengurusan Karang Taruna Desa yang aktif.

Upaya yang telah dilakukan :

- 1) Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah;
- 2) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Kepala Desa untuk memaksimalkan peran kader dan institusi masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target keluarga sehat dan bebas stunting;
- 3) Telah dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga serta karang taruna yang ada di wilayah guna menumbuhkan kembangkan bakat dan kemampuan para generasi muda.

e. Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum

- 1) Keterbatasan sarana prasarana dalam upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) Minimnya kesadaran hukum (hak dan kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha dalam hal ini pelayanan perijinan.
- 3) Permasalahan Pajak Bumi Bangunan yang kami hadapi di wilayah tidak terlalu signifikan hanya waktu yang diberikan untuk Pembetulan SPPT sangat pendek;
- 4) Wajib Pajak tidak bertempat tinggal di Desa tersebut (luar kota) sehingga sulit ditemui oleh petugas pemungut.

Upaya yang telah dilakukan :

- 1) Melakukan koordinasi dengan forkompincam dalam rangka peningkatan ketertiban masyarakat dengan keterbatasan sarpras
- 2) Mengadakan sosialisasi dan persuasif dengan PKL agar tertib, tidak mengganggu keamanan dan ketertiban sepanjang jalan protokol dan dapatnya berpindah lokasi berjualan;
- 3) Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha dengan cara melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan *stakeholder* terkait.
- 4) Mengusulkan pengadaan sarana prasarana pendukung komunikasi antara pemerintahan desa dan kecamatan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Pada hasil Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 ada beberapa hal yang disesuaikan dengan RKPD ada pula yang mengalami perubahan didalam Hasil Analisis Kebutuhan dan beberapa program dan kegiatan yang mengalami penambahan anggaran serta pengurangan anggaran. Di samping itu, terdapat penambahan kegiatan pada salah satu program karena adanya penambahan kebutuhan.

Berikut ini penjabaran catatan analisis pada hasil Review RKPD Kecamatan Limbangan :

- 1) Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah capaian kinerja tercapai 93,28% disebabkan adanya rasionalisasi anggaran dan ada beberapa kegiatan yang capaian anggarannya tidak mencapai 100% sehingga ada sisa anggaran yang dikembalikan ke kasda;
- 2) Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik capaian kinerja tercapai 100%.

- 3) Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan capaian kinerja mencapai 100%. Secara fisik kegiatan tercapai 100% dengan memaksimalkan anggaran yang tersedia dan SDM yang ada.
- 4) Pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum capaian kinerja mencapai 99,9%. Ada beberapa permasalahan dalam kegiatan tersebut diantaranya belum adanya sarana komunikasi sebagai penghubung informasi antara pemerintahan desa dan kecamatan, sehingga informasi yang diterima kadang mengalami keterlambatan, penanganan dan pengawasan wilayah juga membutuhkan waktu sehubungan medan yang sulit dijangkau.
- 5) Pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa capaian kinerja mencapai 100%. Adanya rasionalisasi anggaran mengakibatkan kegiatan di seksi pemerintahan desa tidak tercapai maksimal, sasaran kegiatan tidak tercapai 100%

Selanjutnya, uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada **Tabel T-C.31** berikut ini:

Tabel T - C. 31
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kec. Limbangan	Prosentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	2.715.269.599	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kec. Limbangan	Prosentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	2.715.269.599	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Limbangan	Prosentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100	6.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Limbangan	Prosentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100	6.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Limbangan	Prosentase capaian kinerja keuangan perangkat daerah	100	2.394.682.599	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Limbangan	Prosentase capaian kinerja keuangan perangkat daerah	100	2.394.682.599	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Limbangan	Prosentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Limbangan	Prosentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Limbangan	Prosentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100	147.208.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Limbangan	Prosentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100	147.208.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Limbangan	Prosentase pemenuhan jasa penunjang	100	151.130.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Limbangan	Prosentase pemenuhan jasa penunjang	100	151.130.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Limbangan	Prosentase pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	110.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Limbangan	Prosentase pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	110.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Limbangan	Prosentase capaian kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	100	7.236.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Limbangan	Prosentase capaian kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	100	7.236.000	

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Limbangan	Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100	5.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Limbangan	Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100	5.000.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Limbangan	Prosentase kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	100	1.100.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Limbangan	Prosentase kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	100	1.100.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Limbangan	Jumlah dokumen peayanna umum yang dikeluarkan	100	3.900.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Limbangan	Jumlah dokumen peayanna umum yang dikeluarkan	100	3.900.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN	Kec. Limbangan	Prosentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPd	100	12.249.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN	Kec. Limbangan	Prosentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPd	100	12.249.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Limbangan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100	15.249.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Limbangan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100	15.249.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Limbangan	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100	102.300.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Limbangan	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100	102.300.000	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Limbangan	Jumlah koordinasi dengan Satpol PP	100	97.600.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Limbangan	Jumlah koordinasi dengan Satpol PP	100	97.600.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Limbangan	Prosentase penyusunan APBDes tepat waktu	100	19.767.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Limbangan	Prosentase penyusunan APBDes tepat waktu	100	19.767.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Limbangan	Jumlah desa yang difasilitasi pembinaan, pengawasan pemerintahan desa	100	3.640.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Limbangan	Jumlah desa yang difasilitasi pembinaan, pengawasan pemerintahan desa	100	3.640.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kendal membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal Bottom Up yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan tingkat Kabupaten Kendal. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan Top Down dari kunjungan kerja Bupati dan Reses DPRD.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kendal yang mana penjangkaran kebutuhan masyarakat dilakukan melalui sistem E-Planning yang diajukan ke Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Kecamatan Limbangan berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Dari usulan tersebut akan ditentukan prioritas usulan yang dapat diakomodir oleh Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Usulan masyarakat yang masuk kedalam RKPD dan Renja Kecamatan Limbangan adalah usulan untuk. Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupate Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Limbangan

No.	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Limbangan	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Limbangan	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi yang tersusun	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Limbangan	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi yang tersusun	100	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Limbangan	Prosentase capaian kinerja keuangan perangkat daerah	100	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Limbangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Limbangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Limbangan	Prosentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian	100	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Limbangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Limbangan	Prosentase capaian kinerja adm umum Perangkat Daerah	100	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Limbangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Limbangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Limbangan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Limbangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Limbangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Limbangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Limbangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Limbangan	Prosentase pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Limbangan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Limbangan	Prosentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Limbangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Limbangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Limbangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Limbangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Limbangan	Prosentase capaian kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	100	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Limbangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Limbangan	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	100	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Limbangan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Limbangan	jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	100	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Limbangan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	100	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Limbangan	jumlah koordinas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Limbangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Limbangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Limbangan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Limbangan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Limbangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Limbangan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam kegiatan pembinaan pengawasan pemerintahan desa	100	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Limbangan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	100	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Limbangan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Limbangan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Limbangan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	100	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Limbangan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	100	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kec. Limbangan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	100	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Limbangan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	100	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan Nasional adalah pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana Nasional pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka dokumen perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2024 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kendal Tahun 2024.

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Limbangan Tahun 2024 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun propinsi.

Guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional tahun 2024, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas nasional/provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional/provinsi.

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan PUG pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Dalam rangka mengintegrasikan pengaursutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran, pada tahun 2003 diterbitkan Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 132 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah.

Pada tahun 2008 dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011. Peraturan ini menginstruksikan pada semua unit pemerintah untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran. Menurut Permendagri tersebut, penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Kecamatan Limbangan, dan Rencana Kerja Kecamatan Limbangan .

Pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan yang dilakukan dengan cara mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan di bidang pembangunan. Pengarusutamaan gender merupakan proses memasukkan analisis gender ke dalam program dan kegiatan dari instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.

Fungsi Kecamatan Limbangan sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN merupakan wujud dari pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka turut mendukung pelaksanaan Visi Misi Kabupaten Kendal sesuai yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dimana pada tahun 2024 mendatang kecamatan diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di bidang sebagaimana rencana yang sudah ditetapkan.

Tujuan dari penyusunan rencana kerja PD tahun 2024 adalah untuk melaksanakan sebagian wewenang tugas Kepala Daerah yang dilimpahkan kepada kecamatan, rencana kerja tersebut didukung dengan program dan kegiatan di bidang pelayanan administrasi perkantoran, bidang pelayanan publik, bidang pemberdayaan masyarakat desa, bidang ketentraman dan ketertiban umum serta di bidang pemerintahan desa.

Sedangkan sasaran program Kecamatan Limbangan tahun 2024 secara umum adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan.

3.3 Program dan Kegiatan

Pelaksanaan kinerja Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal 2024 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung (belanja pegawai) dan belanja langsung (Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal), dalam Rencana Kerja kecamatan Limbangan tahun 2024 direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Belanja Langsung dan Tidak Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang & Jasa dan Belanja Modal dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.551.305.283,- yang terbagi ke dalam beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 - a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - a.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - a.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 - b) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - b.1. Penyediaan Komponen Instalasi;
 - b.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - b.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - b.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - b.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - c) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - c.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - c.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

- c.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; dan
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - a.1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
 - a.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Mustawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
- 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a.1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
 - a.2. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - a.3. Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Limbangan Tahun 2024 dan Prakiraan maju Tahun 2025 akan disajikan pada tabel T-C. 33 sebagai berikut :

Tabel T-C. 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Provinsi Jawa
Tengah Kabupaten Kendal
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Limbangan

Lembar _____ dari _____

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target	Kebutuhan	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01				KECAMATAN				2.551.305.283				3.409.976.000
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		Kec. Limbangan		2.432.435.283				3.048.976.000
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	Kec. Limbangan	4 dokumen	0				20.000.000
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi yang tersusun		4 Dokumen	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Dokumen	10.000.000
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi yang tersusun		25 Laporan	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25 Laporan	10.000.000

7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase capaian kinerja keuangan perangkat daerah			2.221.452.283	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.400.476.000
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		19 orang / bulan	2.159.602.283	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		19 orang / bulan	2.350.000.000
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	61.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Dokumen	50.476.000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian			0				12.000.000
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Limbangan	21 paket	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.000.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase capaian kinerja adm umum Perangkat Daerah			97.333.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			243.500.000
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Limbangan	10 paket	3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 paket	3.500.000
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Limbangan	2 paket	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 paket	40.000.000
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Limbangan	4 Paket	3.396.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Paket	23.000.000
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Limbangan	12 Paket	23.630.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Paket	55.000.000

7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Limbangan	12 Paket	18.542.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Paket	50.000.000
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Limbangan	12 Dokumen	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Dokumen	2.000.000
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Limbangan	250 laporan	48.765.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		250 laporan	70.000.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Limbangan	1 unit	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	200.000.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			113.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			143.000.000
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Limbangan	500 laporan	3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		500 laporan	5.000.000
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Limbangan	12 laporan	33.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 laporan	40.000.000

7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Limbangan	12 laporan	15.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 laporan	30.000.000
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Limbangan	12 laporan	62.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 laporan	68.000.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase capaian kegiatan pemeliharaan barang milik daerah			0				30.000.000
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Limbangan	1 unit	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 unit	30.000.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								145.000.000
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah koordinasi yang dilaksanakan			100.000.000				125.000.000
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Limbangan	12 laporan	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 laporan	125.000.000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan			0				20.000.000
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kec. Limbangan	200 dokumen	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200 dokumen	20.000.000

					Pelayanan Perizinan Non Usaha								
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			2.250.000					85.000.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah koordinas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa			2.250.000				85.000.000
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Limbangan	16 Lembaga	2.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16 Lembaga	20.000.000
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Limbangan	16 Laporan	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16 laporan	65.000.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				0				60.000.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum			0				
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Limbangan	16 laporan	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16 laporan	30.000.000
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan	Kec. Limbangan	16 laporan	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16 laporan	30.000.000

						dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat							
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam kegiatan pembinaan pengawasan pemerintahan desa			16.620.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			71.000.000
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Limbangan	16 dokumen	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16 dokumen	15.000.000
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Limbangan	16 dokumen	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16 dokumen	15.000.000
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Limbangan	16 dokumen	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16 dokumen	15.000.000
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Limbangan	16 dokumen	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16 dokumen	5.000.000
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Limbangan	1 dokumen	10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 dokumen	6.000.000
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pangkatan dan	Kec. Limbangan	16 dokumen	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16 dokumen	5.000.000

						Pemberhentian Perangkat Desa							
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Limbangan	16 laporan	6.620.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16 laporan	10.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan SKPD. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan catatan untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja juga merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ante), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah system akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator knerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor public memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan public yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator kinerja Kecamatan Limbangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Limbangan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra.

KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks kepuasan masyarakat	Skor
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Nilai SAKIP Kecamatan	Skor

Kelompok Sasaran adalah sekumpulan sasaran yang mempunyai tujuan interaksi satu sama lain untuk mencapai tujuan program dalam kurun waktu yang ditentukan.

Indikator Sasaran adalah alat ukur spesifik menggambarkan target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kendal namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Prov, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Limbangan Tahun 2024 sebagaimana tersebut dibawah :

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kab. Kendal

Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN LIMBANGAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN LIMBANGAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					KECAMATAN LIMBANGAN								2.715.269.599				3.454.658.599	
7					UNSUR KEWILAYAHAN								2.715.269.599				3.454.658.599	
7	01				KECAMATAN								2.715.269.599				3.454.658.599	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.575.953.599				3.093.658.599	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								6.000.000				20.000.000	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi yang tersusun	- Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kendal, Limbangan, Limbangan	100 % 100.00 %	4 Dokumen	4 Dokumen	3.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	10.000.000
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

						Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi yang tersusun	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 % 100.00 %	25 Laporan	4 Dokumen	3.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25 Laporan	10.000.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.394.682.599					2.445.158.599
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 % 100.00 %	19 Orang/bulan	26 Laporan	2.094.682.599	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	2.394.682.599
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
						Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 % 100.00 %	12 Dokumen	26 Laporan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	50.476.000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								0					12.000.000

7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
						Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pakaian Dinas harian dan atribunya	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100.00 % 100 %	21 Paket	19 Paket	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 Paket	12.000.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								147.208.000					243.500.000
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan dokumen administrasi umum	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 % 100.00 %	10 Paket	6 laporan	6.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	3.500.000
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan dokumen administrasi umum	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 % 100.00 %	2 Paket	6 laporan	18.740.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	40.000.000
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													

						Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah laporan dokumen administrasi umum	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 % 100.00 %	4 Paket	6 laporan	3.046.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	23.000.000
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan dokumen administrasi umum	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 % 100.00 %	12 Paket	6 laporan	18.220.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	55.000.000
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah laporan dokumen administrasi umum	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 % 100.00 %	12 Paket	6 laporan	18.690.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	50.000.000
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													

						Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah laporan dokumen administrasi umum	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 % 100.00 %	12 Dokumen	6 laporan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.000.000
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan dokumen administrasi umum	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 % 100.00 %	250 Laporan	6 laporan	125.009.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	70.000.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								110.000.000					200.000.000
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Barang milik daerah Penunjang urusan yang tersedia	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 % 100.00 %	1 Unit	0 0	110.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								151.130.000					143.000.000
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													

						Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 % 100.00 %	500 Laporan	12 Bulan	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	5.000.000
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 % 100.00 %	12 Laporan	12 Bulan	43.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.000.000
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 % 100.00 %	12 Laporan	12 Bulan	56.730.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

						Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 % 100.00 %	12 Laporan	12 Bulan	63.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	68.000.000
7	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								7.236.000				30.000.000
7	01	01	2.09	0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
						Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100.00 % 100 %	1 Unit	1 unit	7.236.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								5.000.000				145.000.000
7	01	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								1.100.000				125.000.000
7	01	02	2.01	0001		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
						Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan Jumlah dokumen pelayanan yang tercetak	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan kecamatan	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	64 kali 100 % 200 dokumen	12 Laporan	0 kali 12 kali	1.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	125.000.000
7	01	02	2.04			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								3.900.000				20.000.000

7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha													
						Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan Jumlah dokumen pelayanan yang tercetak Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Jumlah dokumen pelayanan umum yang dikeluarkan Jumlah dokumen pelayanan yang dikeluarkan	- Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	64 kali 200 dokumen 100 %	0 Dokumen	200 Dokumen 200 dok	3.900.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanak an	0 Dokumen	20.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								15.249.000					85.000.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								15.249.000					85.000.000
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
						Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah laporan kegiatan koordinasi pemberdayaan desa	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	50 %	16 Lembaga Kemasyarak atan	16 desa	460.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipas i dalam Forum Musyawarah Perencanaa n Pambangun an di Desa	16 Lembaga Kemasyar akatan	20.000.000
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
						Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan kegiatan koordinasi pemberdayaan desa	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	50 %	16 Laporan	16 desa	11.789.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16 Laporan	65.000.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								102.300.000					60.000.000

7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								97.600.000					60.000.000
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
						Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang dimonitor Jumlah laporan kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	16 Laporan	16 desa 2 laporan	96.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16 Laporan	30.000.000
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
						Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah desa yang dimonitor Jumlah laporan kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	16 Laporan	16 desa 2 laporan	5.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	16 Laporan	30.000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								19.767.000					71.000.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								3.640.000					71.000.000
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa													
						Persentase Penyusunan APBDes Tepat Waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 %	16 Dokumen	16 Desa	300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan	16 Dokumen	15.000.000

																Peraturan Kepala Desa		
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
						Persentase Penyusunan APBDes Tepat Waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 %	16 Dokumen	16 Desa	600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintah n Desa	16 Dokumen	15.000.000
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
						Persentase Penyusunan APBDes Tepat Waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 %	16 Dokumen	16 Desa	16.767.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagun aan Aset Desa	16 Dokumen	15.000.000
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa													
						Persentase Penyusunan APBDes Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Dokumen	16 Desa	300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	0 Dokumen	5.000.000
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa													

						Persentase Penyusunan APBDes Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	16 Desa	100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	6.000.000
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa													
						Persentase Penyusunan APBDes Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Dokumen	16 Desa	300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Rekomendas i Pengangkata n dan Pemberhenti an Perangkat Desa	0 Dokumen	5.000.000
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya													
						Persentase Penyusunan APBDes Tepat Waktu	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	- Kab. Kendal, Limbangan, Semua Kel/Desa	100 %	16 Laporan	16 Desa	1.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendamping an Desa di Wilayahnya	16 Laporan	10.000.000
TOTAL													2.715.269.599					3.454.658.599

BAB V

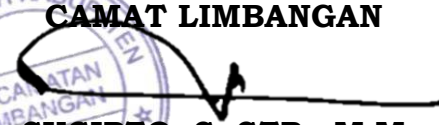
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Tahun 2024 merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal tahun 2024 ini telah diupayakan sebaik-baiknya, terukur dan akuntabel, disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun-tahun sebelumnya, isu – isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, serta memperhatikan aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal akan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku sehingga pencapaian terhadap sasaran yang diharapkan akan terpenuhi. Jika dalam proses selanjutnya ternyata kondisi keuangan daerah tidak dapat memenuhi pagu indikatif yang dialokasikan untuk Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal dimana implikasinya Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal akan mengurangi jumlah pagu kegiatan dan merasionalisasi kembali anggaran pada setiap kegiatan yang ada. Dalam mengeliminasi dan merasioanalisis RENJA yang ada, Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal akan benar-benar menelaah dimana kegiatan-kegiatan yang dapat dieliminasi tersebut adalah kegiatan-kegiatan yang paling kecil peranannya dalam pencapaian target dan sasaran dalam RENSTRA.

Keberhasilan pelaksanaan Renja tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan, serta peran aktif masyarakat. Dalam kaitan itu mohon aparat pemerintah khususnya Aparatur Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal dan lembaga lainya bersama masyarakat perlu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Renja ini.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal tahun 2024 dan dapat menjadi pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran pada Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.


CAMAT LIMBANGAN

SUCIPTO, S. STP., M.M
Pembina
NIP. 197807041997031002



PERUBAHAN RENCANA KERJA

KECAMATAN BRANGSONG

KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

KECAMATAN BRANGSONG

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tidak dapat terakomodir dalam APBD Penetapan Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perubahan Renja dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Perubahan Renja Kecamatan Brangsong ini diharapkan dapat benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indicator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif kegiatan Kecamatan Brangsong pada perubahan APBD Tahun 2024.

CAMAT BRANGSONG



YUNAN ARIEF RAKHMAN, ST, MT

Pembina

NIP. 197306292005011003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Bab I Pendahuluan 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 1

 1.3 Maksud dan Tujuan 4

 1.4 Sistematika Penulisan 4

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Triwulan II 6

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan triwulan II
 Tahun 2024 6

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD 14

 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 17

 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD 19

 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 22

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 23

Bab IV Penutup..... 24

Lampiran – lampiran 25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa proses perencanaan Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan sistem yang terdielei dari rencana Jangka Panjang, Rencana Jangka Pendek Menengah untuk periode lima tahun yang dituangkan dalam RPJM dan Rencana Jangka Pendek untuk periode 1 tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD dan Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan. Sebagai sebuah proses yang memungkinkan adanya perubahan dari segi kebijakan mengikuti perkembangan kondisi terkini baik secara internal maupun eksternal, maka perencanaan perlu bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan dinamika tersebut

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Brangsong sebagai perangkat daerah telah menyusun Perubahan Renja Kecamatan Brangsong Tahun 2024, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun 2024 serta Renstra Kecamatan Brangsong Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Brangsong Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008

Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);

14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 20).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Brangsong Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Brangsong di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Brangsong secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Brangsong Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Brangsong pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2024 dan Renstra Kecamatan Brangsong Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Brangsong secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja, sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Perangkat Daerah sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Brangsong Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen perubahan Rencana Kerja Kecamatan Brangsong Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pasal 343 menyebutkan bahwa perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan

hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Berisi mengenai evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah serta review terhadap rancangan awal RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi Rencana Kerja di dasarkan pada arah kebijakan pembangunan tahun n, daftar program/kegiatan prioritas dan lampiran program dan kegiatan (Lampiran rancangan akhir RKPD)

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup dari Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Brangsong pada tahun 2023.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sampai dengan Triwulan II

- a. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Kendal

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Ralisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah								
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	30 dokumen	-	-		6 dokumen	4 dokumen	66%
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 laporan	-	-	-	4 laporan	2 laporan	50%
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 kegiatan	-	-	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 orang/bulan	15 orang/bulan	15 orang/bulan	100%	15 orang/bulan	15 orang/bulan	100%
	Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	6 dokumen	50%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					100%			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48 paket	12 paket	12 paket	100%	1 paket	0 paket	0%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	6 paket	50%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 paket	12 paket	12 paket	100%	6 paket	3 paket	50%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	6 paket	50%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	6 paket	50%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	9 dokumen	6 dokumen	66%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	6 laporan	50%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21 unit	-	-	-	5 unit	0 unit	0%

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 unit	-	-	100%	2 unit	0 unit	0%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 unit	4 unit	4 unit	100%	4 unit	0 unit	0%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	6 laporan	50%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	6 laporan	50%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	6 laporan	50%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	84 unit	16 unit	16 unit	100%	14 unit	8 unit	57%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 unit	14 unit	14 unit	100%	15 unit	8 unit	57%

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	1 unit	1 unit	100%	2 unit	0 unit	0%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	90 unit	18 unit	18 unit	100%	18 unit	9 unit	50%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							-	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	-	-	100%	1 laporan	1 laporan	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	50%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	60 lembaga	12 lembaga	12 lembaga	100%	12 lembaga	12 lembaga	100%
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	3 laporan	3 laporan	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	6 laporan	50%
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							-	

	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	60 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	6 laporan	50%
	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 orang	-	-	-	50 orang	50 orang	100%
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	250 orang	50 orang	50 orang	100%	50 orang	50 orang	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								

	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	0 dokumen	0%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 dokumen	-	-	100%	1 dokumen	0 dokumen	0%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	0 dokumen	0%
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12 dokumen	-	-	-	12 dokumen	0 dokumen	0%
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 dokumen	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%

Dari data sebagaimana tabel 2.1 tersebut di atas, hasil evaluasi terhadap Target Renja Kecamatan Brangsong sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

1. Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Brangsong pada Tahun 2024 telah dilaksanakan 1 urusan, 6 program, 12 kegiatan dan 37 Sub kegiatan;
2. Dari 6 program beberapa program sudah memenuhi target kinerja 50% di semester I / Triwulan II
3. Dari 12 kegiatan terdapat 29 sub kegiatan telah memenuhi target 50% kinerja sedangkan sisa sub kegiatan lainnya belum memenuhi target kinerja dikarenakan kegiatan belum sepenuhnya di laksanakan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Didalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal, Camat mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau

kelurahan;

- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang meliputi aspek :

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. fasilitasi;
- f. penetapan;
- g. penyelenggaraan; dan
- h. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;

- h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas umum pemerintahan sebagaimana tersebut diatas, Camat selaku Pimpinan Kecamatan juga melaksanakan pendelegasian kewenangan yang diberikan Bupati sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 103 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kendal kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Otonomi Daerah. Sebagian kewenangan yang dilimpahkan tersebut meliputi 20 bidang yaitu : pengembangan otonomi daerah; perimbangan keuangan daerah; perekonomian; pertamanan, keindahan dan kebersihan lingkungan; permukiman; pendidikan dan kebudayaan; kesehatan; sosial dan kesejahteraan rakyat; pertanahan; pertanian tanaman pangan; perkebunan dan kehutanan; peternakan; perikanan dan kelautan; pertambangan umum; pekerjaan umum; pengairan; penataan ruang; perindustrian dan perdagangan; lingkungan hidup serta bidang pemuda dan olah raga.

Kecamatan Brangsong sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 mempunyai tugas dan fungsi pelayanan masyarakat, namun pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan Brangsong sebatas pada pemberian legalisasi Camat yang kemudian ditangani oleh Instansi lain, pelayanan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, SKCK oleh Polsek dan Polres, sebagian perijinan yang berskala kecil yaitu Ijin Mendirikan Bangunan dengan luasan bangunan kurang dari 100 m², sedangkan perijinan yang berskala besar dilaksanakan oleh DPMPT-SP dan sebagainya, artinya baik buruknya pelayanan masyarakat pada proses pelayanan tersebut secara langsung yang mendapat aduan atau ketidak puasan atas pelayanan publik adalah Kecamatan, untuk itu perlu

bersinergi dengan instansi terkait, dan melakukan kiat - kiat serta strategi dalam peningkatan pelayanan, misalnya kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan, upaya jemput bola dengan sosialisasi ke desa-desa, pemeliharaan perangkat komputer agar selalu siap untuk melaksanakan kegiatan pelayanan.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks reformasi birokrasi	Meningkatkan birokrasi yang akuntabel	Nilai SAKIP	-	70	71	72	-	70.37	71	72	
		Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Nilai rata-rata IKM	-	-	79	80	-	79.62	79	80	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

1. Tingkat Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan kinerja pelayanan PD lebih dahulu harus dimengerti tentang kondisi PD, kondisi masyarakat tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat didalam menerima program-program Pemerintah . Kecamatan Brangsong adalah kecamatan dengan kondisi yang dapat dikatakan minimalis mulai dari personil, fasilitas dan sarana prasarana

perkantoran. Dengan kondisi semacam itu maka pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan minimal, itupun belum memenuhi kriteria terutama pada fasilitas pelayanan yang belum didukung adanya ruang laktasi, sarana untuk disabilitas dan posko pengaduan, sehingga pelayanan kepada masyarakat disesuaikan dengan kondisi yang ada.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD. Bahwa di dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Brangsong terdapat banyak permasalahan dan hambatan seperti telah diuraikan di atas.

Dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, difokuskan pada peningkatan pelayanan masyarakat dengan meningkatkan sumber daya aparatur baik di tingkat Kecamatan maupun di desa.

3. Dampak terhadap pencapaian program Kepala Daerah, terhadap capaian program Nasional, seperti SPM dan isu strategis saat ini antara lain:

- Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran
- Pembangunan Infrastruktur
- Pelayanan Publik dan Perijinan
- Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif dan Demokratis
- Penurunan angka kriminalitas

Bupati Kendal selalu menekankan bahwa di dalam pencapaian program Kepala Daerah selalu disinergikan dengan Program nasional seperti SPM dan isu strategis dengan selalu mengawasi perkembangannya

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan PD Kecamatan Brangsong adalah :

- Dengan peningkatan disiplin PNS, peningkatan kinerja PNS dengan melakukan tugas yang riil dan terukur.

- Selektif memilih program/kegiatan dalam rangka peningkatan fasilitas, sarana prasarana kantor
 - Evaluasi semua kegiatan pelayanan
Dengan demikian peluang dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan
5. Formula isu-isu penting rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program/kegiatan prioritas tahun yang direncanakan
- Setiap personil yang terlibat dalam perencanaan hendaknya menyadari dan mempunyai cara pandang kedepan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan Perangkat Daerah
 - Eksplorasi potensi yang ada dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan Bekerja sama dengan tenaga ahli dalam mengelola sumberdaya yang ada
 - Evaluasi kegiatan, untuk menentukan sikap selanjutnya

2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD.

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, sebagaimana tersaji pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024
 Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Brangsong

No	Rancangan Perubahan RKPD (materi Perubahan RKPD Tahun 2024)					Hasil Analisis Kebutuhan (materi Perubahan RKPD Tahun 2024)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Kecamatan Brangsong	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	100%	2.684.776.970	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.	Kecamatan Brangsong	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	100%	2.684.776.970	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Brangsong	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100%	1.200.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Brangsong	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100%	1.200.000	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.	Kecamatan Brangsong	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	100%	27.091.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.	Kecamatan Brangsong	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	100%	27.091.000	

4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Brangsong	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100%	105.550.000	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Brangsong	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100%	105.550.000	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Brangsong	Prosentase kasus konflik sosial yang ditangani	100%	15.225.000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Brangsong	Prosentase kasus konflik sosial yang ditangani	100%	15.225.000	
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kecamatan Brangsong	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	100%	31.650.000	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	Kecamatan Brangsong	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	100%	31.650.000	
					2.829.492.970					2.829.492.970	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program/kegiatan dari masyarakat pada umumnya tercantum dalam kegiatan Musrenbangcam, yaitu kegiatan untuk kepentingan umum, serta sarana prasarana pelayanan lainnya. Usulan yang berasal dari masyarakat tersebut selanjutnya ditampung dalam Daftar Usulan Prioritas Kegiatan yang kemudian disampaikan dalam Musrenbangkab. Program/kegiatan yang berasal dari masyarakat tersebut diperjuangkan dan dikawal oleh Tim Kecamatan agar masuk dalam program/kegiatan prioritas di SKPD teknis yang ada di Kabupaten Kendal. Namun demikian kegiatan – kegiatan yang memerlukan anggaran yang cukup besar sangat bergantung pada kemampuan APBD Kabupaten Kendal.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Brangsong

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Brangsong Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan yang berisikan rencana pembangunan tahunan memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Strategi Kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan disajikan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Prioritas Program dalam Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Brangsong Tahun 2024 terdiri dari 6 program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Rencana Kerja ini berisi program dan kegiatan prioritas guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui dan mengakomodir prakiraan maju program dan kegiatan serta perhitungan kebutuhan dana untuk Tahun 2024. Prioritas program dan kegiatan yang tertuang di dalam Perubahan Rencana Kerja ini bersifat indikatif, hal ini dimaksudkan bahwa kebutuhan pendanaan setiap tahun yang dijabarkan dalam rencana kerja perangkat daerah disesuaikan dengan prioritas daerah setiap tahun sehingga kebutuhan pendanaan dapat diselaraskan.

Adapun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Tahun 2024 mulai dari program dan kegiatan serta pendanaan dapat dilihat di lampiran I.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Brangsong Kabuapten Kendal Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Brangsong di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Brangsong pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabuapten Kendal;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Brangsong ini berpedoman pada Renstra OPD Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Perubahan Renja
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Brangsong ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kabuapten Kendal Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Penyusunan Renja Perubahan 2024 didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan permasalahan dan analisis kebutuhan sesuai dengan pagu anggaran yang ada. Penyusunan Renja Perubahan ini dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi bagi program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Brangsong Tahun 2024 berisi usulan pengurangan/penambahan pagu anggaran, dan kode rekening baru yang telah disesuaikan dengan kebutuhan.

Dengan disusunnya perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 diharapkan dapat terealisasi dan dapat dilaksanakan, serta sebagai tolak ukur dalam menjalankan program dan kegiatan di Kecamatan Brangsong.

CAMAT BRANGSONG



YUNAN ARIEF RAKHMAN, ST, MT

Pembina Tk. I

NIP. 197306292005011003

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KENDAL TAHUN 2024																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN BRANGSONG								2.650.754.548,00	2.717.092.970,00	2.829.492.970,00	178.738.422,00						3.239.173.971,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.650.754.548,00	2.717.092.970,00	2.829.492.970,00	178.738.422,00							3.239.173.971,00	
	7.01	KECAMATAN							2.650.754.548,00	2.717.092.970,00	2.829.492.970,00	178.738.422,00							3.239.173.971,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah				100.00 %	100.00 %	2.395.452.548,00	2.558.667.970,00	2.648.776.970,00	561.867.423,00							2.957.319.971,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi yang tersusun				11 Dokumen	11 Dokumen	6.360.000,00	0,00	0,00	-6.360.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN		12.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	3.180.000,00	0,00	0,00	-3.180.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			6.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.180.000,00	0,00	0,00	-3.180.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			6.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	1.892.871.548,00	1.986.034.971,00	2.036.034.971,00	143.163.423,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN		2.124.714.971,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/b ulan	15 Orang/b ulan	1.804.191.548,00	1.986.034.971,00	2.036.034.971,00	231.843.423,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			2.036.034.971,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	88.680.000,00	0,00	0,00	-88.680.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			88.680.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian administrasi kepegawaian PD				100 %	100 %	10.500.000,00	0,00	0,00	-10.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN		10.500.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				15 Paket	15 Paket	10.500.000,00	0,00	0,00	-10.500.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			10.500.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor				100 %	100 %	175.036.000,00	244.497.999,00	265.706.999,00	90.670.999,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN		159.765.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.289.000,00	5.941.000,00	5.941.000,00	652.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			5.775.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30.184.000,00	30.938.000,00	30.938.000,00	754.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			30.500.000,00	KECAMATAN BRANGSONG	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.500.000,00	24.400.000,00	26.039.000,00	10.539.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			17.500.000,00	KECAMATAN BRANGSONG	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	24.091.000,00	6.084.000,00	8.784.000,00	-15.307.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			25.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7.500.000,00	13.398.000,00	15.272.000,00	7.772.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			8.500.000,00	KECAMATAN BRANGSONG	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			2.640.000,00	KECAMATAN BRANGSONG	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	90.072.000,00	163.736.999,00	178.732.999,00	88.660.999,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			69.850.000,00	KECAMATAN BRANGSONG	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan yang diadakan				9 Unit	9 Unit	75.200.000,00	30.600.000,00	37.100.000,00	-38.100.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN		125.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				27 Unit	27 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			45.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	31.000.000,00	0,00	0,00	-31.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			50.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	24.200.000,00	30.600.000,00	37.100.000,00	12.900.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			30.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan tersedianya jasa kantor				12 Bulan	12 Bulan	192.885.000,00	224.225.000,00	236.625.000,00	43.740.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN		196.840.000,00	KECAMATAN BRANGSONG	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			5.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	49.985.000,00	61.225.000,00	71.225.000,00	21.240.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			53.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	138.900.000,00	159.000.000,00	161.400.000,00	22.500.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			138.840.000,00	KECAMATAN BRANGSONG	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset yang dipelihara				46 Unit	46 Unit	42.600.000,00	73.310.000,00	73.310.000,00	30.710.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN		328.500.000,00	KECAMATAN BRANGSONG	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	19.600.000,00	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			30.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	18 Unit	11.000.000,00	10.710.000,00	10.710.000,00	-290.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			13.500.000,00	KECAMATAN BRANGSONG	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			250.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				18 Unit	18 Unit	12.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			35.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan				90 %	90 %	19.973.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.027.000,00							22.000.000,00		
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	19.973.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-18.773.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN		22.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																			
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	19.973.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-18.773.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			22.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD				60 %	60 %	61.843.000,00	31.350.000,00	27.091.000,00	6.757.000,00							68.600.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa				12 Desa	12 Desa	61.843.000,00	31.350.000,00	27.091.000,00	-34.752.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN		68.600.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	15.600.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	-7.950.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			21.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	13.513.000,00	9.200.000,00	7.500.000,00	-6.013.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			15.600.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	32.730.000,00	14.500.000,00	11.941.000,00	-20.789.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			32.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani				87 %	87 %	104.976.000,00	105.550.000,00	105.550.000,00	5.428.000,00							110.404.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi penyelenggaraan trantibum				12 Desa	12 Desa	21.672.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	-11.522.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN		25.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	21.672.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	-11.522.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			25.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi penerapan dan penegakan perda				12 Dokumen	12 Dokumen	83.304.000,00	95.400.000,00	95.400.000,00	12.096.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN		85.404.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	83.304.000,00	95.400.000,00	95.400.000,00	12.096.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			85.404.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani				85 %	85 %	32.350.000,00	15.225.000,00	15.225.000,00	1.500.000,00							33.850.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan				3 Kegiatan	3 Kegiatan	32.350.000,00	15.225.000,00	15.225.000,00	-17.125.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Pemerintah Desa		33.850.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				55 Orang	55 Orang	29.700.000,00	15.225.000,00	15.225.000,00	-14.475.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			25.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	2.650.000,00	0,00	0,00	-2.650.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			8.850.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu				100 %	100 %	36.160.000,00	5.100.000,00	31.650.000,00	10.840.000,00							47.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Fasilitasi Pembinaan pengawasan Pemerintah Desa</i>				12 Desa	12 Desa	36.160.000,00	5.100.000,00	31.650.000,00	-4.510.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Pemerintah Desa		47.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	9.540.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-8.340.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			10.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	20.260.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	-17.560.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			15.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	6.360.000,00	1.200.000,00	27.750.000,00	21.390.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			22.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
		J U M L A H							2.650.754.548,00	2.717.092.970,00	2.829.492.970,00	255.613.053.604,00						3.239.173.971,00		

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PAGERUYUNG
TAHUN 2024**



**KECAMATAN PAGERUYUNG
KABUPATEN KENDAL**
Jl. Abuman No. 72 Pageruyung (51361)

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2024 merupakan acuan perencanaan kegiatan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari Renstra Perangkat Daerah. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci mengacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Kecamatan Pageruyung ini diharapkan dapat benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan program, kegiatan sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan Sub kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Kecamatan Pageruyung tahun 2025 mendatang.

Kendal,

2024



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang1

 1.2 Landasan Hukum3

 1.3 Maksud dan Tujuan 6

 1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 8

 2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....8

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 38

BAB IV PENUTUP 50

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah, yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Pada ketentuan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa dokumen perencanaan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang 6 tak terpisahkan dalam tahap penyusunan perencanaan pembangunan sampai dengan penyusunan anggaran. Perubahan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2024 merupakan pedoman bagi penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan telah direviu oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang menjadi dasar fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diatur dalam Pasal

353 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target kinerja sasaran daerah, perkembangan kondisi terkini yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, perubahan proyeksi Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya yang akan digunakan untuk tahun berjalan, penambahan kegiatan baru, penghapusan kegiatan yang tidak relevan, perubahan indikator kinerja, target dan pagu kegiatan serta adanya refocussing anggaran termasuk perubahan pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer pusat ke daerah dan bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten/kota. Perubahan Renja Tahun 2024 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan.
4. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan subkegiatan baru/subkegiatan alternatif penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan mendasarkan pada program yang ada dalam RPJMD.
5. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2024. Kabupaten Kendal telah menyusun RKPD tahun 2024 dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024. RKPD ini telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II.

Berdasarkan evaluasi Renja tahun 2024 Triwulan I dan II, menunjukkan adanya perkembangan program, kegiatan, subkegiatan yang kurang sesuai dengan asumsi awal Renja disusun meliputi pergeseran penyelesaian masalah, penambahan dan pengurangan kegiatan dalam upaya pencapaian penyelesaian permasalahan. Oleh karena itu menjadi penting untuk dilakukannya perubahan Renja tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Ranwal Renja Tahun 2024 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No.11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor !, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan

- Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
 13. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No.29 tahun 2023 tentang RKPD Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 29).

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud Perubahan Renja Kecamatan Pageruyung Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk:
 - a. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang didahului dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA),

- serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS P-APBD) Tahun 2024.
- b. Menjadi pedoman penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS, serta Perubahan Renja Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2024.
 - c. Maksud Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pageruyung Tahun 2024 disusun untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh kecamatan terencana dengan baik, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pageruyung Tahun 2024 adalah :
- a. untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi makro sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
 - b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran kecamatan.
 - c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan publik di tingkat kecamatan.

1.4 Sistematikan Penulisan.

Sistematikan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Denga sistematika sebagai berikut:

BAB.I Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB.II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan.

- BAB.III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- Perubahan Rencana Kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dan pendanaan Perangkat Daerah.
- BAB.IV Penutup

BAB. II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BEKENAAN

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Renstra Perangkat Daerah

1. Capaian Kinerja IKU Kecamatan Pageruyung yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas Nilai IKM dengan target 85,5 realisasi sebesar 91,78 dengan indikator Sangat Baik dari presentase kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, hal ini karena pelayanan di Kecamatan Pageruyung sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang dibuat, pelayanan cepat dan mudah, sehingga masyarakat merasa puas atas produk layanan yang ada di Kecamatan Pageruyung.
- b. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pageruyung sampai dengan Semester I untuk nilai SAKIP dari target 71,5 realisasi 72,30 dengan status capaian sangat tinggi, hal ini karena semua eviden SAKIP sudah dilaksanakan lengkap beserta data dukung dan hasil rekomendasi LHE AKIP sudah ditindak lanjuti dan dilaksanakan.

2. Permasalahan dan faktor pendukung

a. Permasalahan

1. Keterbatasan SDM
 - fasilitas yang mempengaruhi kemampuan pelaksanaan program dan kegiatan.
 - Prosedur birokrasi yang kompleks dan lambat dalam pengolahan data atau permintaan.
2. Kurangnya Partisipasi Masyarakat
 - Rendahnya partisipasi masyarakat dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan.
3. Kualitas data dan Informasi
 - Data yang tidak akurat atau tidak terupdate mengakibatkan kesulitan dalam pengambilan keputusan.

b. Faktor Pendukung

1. Kerjasama dengan lembaga pemerintah lainnya, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta dapat mendukung pelaksanaan kegiatan.
2. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparat kecamatan dapat meningkatkan kompetensi dan kinerja.

Pelaksanaan Renja Tahun 2024 (Triwulan II) di Kecamatan Pageruyung dapat dijabarkan sebagai berikut :

Renja Tahun 2024 meliputi 6 (enam) Program , 12 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan, pendanaan mencapai Rp. 2.726.383.727 yang tertuang dalam DPPA 2024. Realisasi target Kinerja pada tahun 2024 mencapai: 59,28% dengan realisasi keuangan Rp. 1.616.410.565,00 lebih jelasnya kami jabarkan, sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Program sesuai target kinerja yang ditetapkan dalam Renja

Jumlah Program Tahun 2024 ada 6 program, sebagai berikut :

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebesar Rp.2.466.475.727,00 terealisasi sebesar Rp.1.536.451.535,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 62,29%. Permasalahan dan upaya yang dilaksanakan yaitu dengan perencanaan yang matang, terarah dan berdasarkan koordinasi dengan dinas/instansi lain dalam hal merencanakan kegiatan agar anggaran dapat terserap sesuai target.

Dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 7 Kegiatan. Faktor pendukungnya yaitu Kebijakan dan regulasi yang mendukung dapat mempermudah pelaksanaan program dan memberikan kerangka hukum yang jelas.

2) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Anggaran dalam melaksanakan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tersebut sebesar Rp. 19.700.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.550.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 7,61%, belum mencapai target karena masih menunggu waktu pelaksanaan. Permasalahan dan upaya yang dilaksanakan yaitu dengan perencanaan yang matang, terarah dan berdasarkan koordinasi dengan dinas/instansi lain dalam hal merencanakan kegiatan agar anggaran dapat terserap sesuai target. Kepemimpinan yang Efektif dan visioner dapat memotivasi tim, menetapkan arah yang jelas, dan memastikan komitmen terhadap program dan layanan publik.

3) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Anggaran dalam melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tersebut sebesar Rp. 50.895.000,00 terealisasi sebesar Rp. 38.164.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 74,98% dan belum sepenuhnya terlaksana karena masih menunggu jadwal pelaksanaannya. Permasalahan dan upaya yang dilaksanakan yaitu dengan perencanaan yang matang, terarah dan berdasarkan koordinasi dengan dinas/instansi lain dalam hal merencanakan kegiatan agar anggaran dapat terserap sesuai target. Dan Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dapat meningkatkan relevansi dan kualitas pelayanan. Dalam program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan.

4) PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tersebut sebesar Rp. 101.028.000,00 terealisasi sebesar Rp. 97.032.120,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 96,04%. Permasalahan dan upaya yang dilaksanakan yaitu dengan perencanaan yang matang, terarah dan berdasarkan koordinasi dengan dinas/instansi lain dalam hal merencanakan kegiatan agar anggaran dapat terserap sesuai target dan Sebagian anggaran belum terlaksana karena menunggu jadwal pelaksanaan. Dalam program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum terdiri dari 2 (dua) Kegiatan.

5) PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Target dari program tersebut adalah Persentase kasus konflik sosial yang di tangani 100% dan terealisasi sebesar 100%. Anggaran dalam melaksanakan program tersebut sebesar Rp. 29.385.000,00 dengan realisasi anggaran yang terserap Rp. 7.710.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 26,23%. Hal ini karena masih belum selesai pelaksanaan dan masih menunggu proses dan jadwal pelaksanaannya. Upaya yang dilaksanakan yaitu dengan perencanaan yang matang, terarah dan berdasarkan koordinasi dengan dinas/instansi lain dalam hal merencanakan kegiatan agar anggaran dapat terserap sesuai target. Faktor Pendukung Dalam program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Meningkatkan koordinasi antar instansi dan memastikan komunikasi yang efektif untuk memperlancar pelaksanaan program. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan.

6) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Anggaran dalam melaksanakan program tersebut sebesar Rp. 58.900.000,00 terealisasi Rp. 31.740.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 53,88%. Capaian belum mencapai 100% karena belum sepenuhnya terlaksana menunggu jadwal pelaksanaan. Permasalahan dan upaya yang dilaksanakan yaitu dengan perencanaan yang matang, terarah dan berdasarkan koordinasi dengan dinas/instansi lain dalam hal merencanakan kegiatan agar anggaran dapat terserap sesuai target. Faktor pendukung dalam program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa adalah Mengintegrasikan sistem teknologi informasi untuk mempermudah administrasi, pelaporan, dan koordinasi antar unit. Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) Kegiatan.

3. Capaian Target Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan

Jumlah Kegiatan Tahun 2024 ada 12 (dua belas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) subkegiatan, sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan target 6 dokumen laporan keuangan yang harus disusun dan realisasi 6 dokumen laporan keuangan telah disusun, capaian kinerja kegiatan tersebut 100%. Anggaran dalam melaksanakan kegiatan tersebut Rp. 6.540.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.255.000,00 tingkat capaian keuangan sebesar 34,48% dengan sub kegiatannya sebagai berikut :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, target dari subkegiatan tersebut adalah 4 dokumen. Anggaran dalam melaksanakan subkegiatan tersebut Rp. 3.270.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.025.000,00. Analisis pelaksanaan subkegiatan tersebut 61,92% dari target fisik.
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, target dari subkegiatan tersebut adalah 2 dokumen. Anggaran dalam melaksanakan subkegiatan tersebut Rp. 3.270.000,00 terealisasi sebesar Rp. 230.000,00. Analisis pelaksanaan subkegiatan tersebut 7,03% dari target fisik.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan target 12 dokumen laporan keuangan yang harus disusun dan realisasi 12 dokumen laporan keuangan telah disusun, capaian kinerja kegiatan tersebut 100%. Anggaran dalam melaksanakan kegiatan tersebut Rp. 2.094.742.978 terealisasi sebesar Rp. 1.374.763.152,00 tingkat capaian keuangan sebesar 65,62% dengan sub kegiatannya sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, target dari subkegiatan tersebut adalah 14 bulan terbayarnya gaji dan tunjangan ASN, dengan realisasi 14 bulan gaji dan tunjangan ASN telah terbayar. Anggaran dalam melaksanakan subkegiatan tersebut sebesar Rp.1.997.142.978,00 dengan realisasi Rp. 1.318.553.152,00. Analisis pelaksanaan subkegiatan tersebut 66,02% dari target fisik;
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, target dari subkegiatan tersebut adalah 12 bulan terbayarnya honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan. Anggaran dalam melaksanakan subkegiatan tersebut Rp. 97.600.000,00 terealisasi sebesar Rp. 56.210.000,00. Analisis pelaksanaan subkegiatan tersebut 57,59% dari target fisik.

- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya ditiadakan.
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan target Anggaran dalam melaksanakan kegiatan tersebut Rp.185.829.749,00 terealisasi sebesar Rp. 77.414.300,00 tingkat capaian keuangan sebesar 41,65%. dengan sub kegiatannya sebagai berikut;
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, target dari subkegiatan tersebut adalah 7 jenis alat listrik dan elektronik yang tersedia dan realisasi 7 jenis alat listrik dan elektronik telah tersedia. Anggaran dalam melaksanakan subkegiatan tersebut Rp.4.844.500,00 terealisasi sebesar 2.968.000,00 Analisis pelaksanaan subkegiatan tersebut 61,26% dari target fisik. Permasalahan dan upaya yang dilaksanakan yaitu tidak ada.
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, target dari subkegiatan tersebut adalah 25 jenis alat tulis kantor dan peralatan kantor yang tersedia dan realisasi 25 jenis alat tulis kantor dan peralatan kantor telah tersedia. Anggaran dalam melaksanakan subkegiatan tersebut Rp 21.716.000,00 terealisasi sebesar 10.955.500,00 Analisis pelaksanaan subkegiatan tersebut 50,44% dari target fisik. Permasalahan dan upaya yang dilaksanakan yaitu tidak ada.
 - c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, target dari subkegiatan tersebut adalah 12 jenis alat Rumah tangga dan realisasi 12 jenis Peralatan Rumah Tangga. Anggaran dalam melaksanakan Subkegiatan tersebut Rp. 4.528.000,00 tersealisasi 2.695.000,00 Analisis pelaksanaan subkegiatan tersebut 59,51% dari target fisik.
 - d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, target dari subkegiatan tersebut adalah 858 Paket bahan logistik kantor yang tersedia dan realisasi 858 Paket bahan logistik kantor telah tersedia. Anggaran dalam melaksanakan subkegiatan tersebut Rp. 40.750.000,00 dan terealisasi 19.604.000,00 Analisis pelaksanaan subkegiatan tersebut 48,10% dari target fisik. Permasalahan dan upaya yang dilaksanakan yaitu harga indeks harga makanan atau bahan logistik yang dijadikan acuan

rendah solusinya adalah menaikkan indeks standar harga makanan ditahun berikutnya.

- e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, target dari subkegiatan tersebut adalah 2 Paket barang cetakan dan penggandaan yang tersedia dan realisasi 2 paket barang cetakan dan penggandaan telah tersedia. Anggaran dalam melaksanakan subkegiatan tersebut Rp. 4.202.000,00 dan terealisasi 3.427.300,00 Analisis pelaksanaan subkegiatan tersebut 81,56% dari target fisik.
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, target dari subkegiatan tersebut adalah 12 bulan BBM perjalanan dinas dalam dan luar daerah tersedia. dan realisasi 12 bulan BBM perjalanan dinas dalam dan luar daerah telah tersedia. Anggaran dalam melaksanakan subkegiatan tersebut Rp. 109.789.249,00 dan terealisasi Rp. 37.763.500,00 Analisis pelaksanaan subkegiatan tersebut 34,39% dari target fisik. Permasalahan dan upaya yang dilaksanakan tidak ada.
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan target dari kegiatan tersebut adalah 12 bulan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedia, realisasi 12 bulan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah tersedia, capaian kinerja kegiatan tersebut 100 %. Anggaran dalam melaksanakan kegiatan tersebut Rp. 119.060.000,00 terealisasi sebesar Rp. 45.120.583,00 tingkat capaian keuangan sebesar 37,89% dari target Fisik dengan sub kegiatannya sebagai berikut;
- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, target dari subkegiatan tersebut adalah 350 buah materai tersedia dan realisasi 350 buah materai telah tersedia. Anggaran dalam melaksanakan subkegiatan tersebut Rp. 3.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.100.000,00 Analisis pelaksanaan subkegiatan tersebut 31,42% dari target fisik. Permasalahan dan upaya yang dilaksanakan tidak ada.
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, target dari subkegiatan tersebut adalah 12 bulan terbayarnya jasa komunikasi, air, dan listrik dan realisasi 12 bulan jasa komunikasi, air, dan listrik telah terbayar. Anggaran dalam melaksanakan subkegiatan tersebut Rp. 40.720.000,00 dan terealisasi Rp. 15.114.573,00 Analisis pelaksanaan subkegiatan

tersebut 37,11% dari target fisik. Permasalahan dan upaya yang dilaksanakan yaitu biaya perbaikan yang membengkak dikarenakan terjadi kebocoran air solusi yang dilakukan adalah perbaikan jaringan air dan menambah anggaran air diperubahan.

- c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, target dari subkegiatan tersebut adalah 4 jenis peralatan kantor dan mesin diperbaiki/diservis realisasi 4 jenis peralatan kantor dan mesin telah diperbaiki/diservis. Anggaran dalam melaksanakan subkegiatan tersebut Rp. 13.870.000,00 dan terealisasi Rp. 5.165.000,00 Analisis pelaksanaan subkegiatan tersebut 37,23% dari target fisik. Permasalahan dan upaya yang dilaksanakan tidak ada.
- d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, target dari subkegiatan tersebut adalah 12 bulan penyediaan Honorarium Penatausahaan Keuangan realisasi 11 bulan penyediaan Honorarium Penatausahaan Keuangan telah terbayar. Anggaran dalam melaksanakan subkegiatan tersebut Rp. 60.970.000,00 dan terealisasi Rp. 23.741.010,00 Analisis pelaksanaan subkegiatan tersebut 38,93% dari target fisik. Permasalahan dan upaya yang dilaksanakan tidak ada.
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan target dari kegiatan tersebut adalah 6 Jenis aset yang dipelihara, realisasi 6 Jenis aset telah terpelihara, capaian kinerja kegiatan tersebut 100%. Anggaran dalam melaksanakan kegiatan tersebut Rp. 60.303.000,00 terealisasi sebesar Rp. 36.898.500,00 tingkat capaian keuangan sebesar 61,18%. dengan sub kegiatannya sebagai berikut;
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, target dari subkegiatan tersebut adalah 17 unit kendaraan dinas yang diservis dan diganti suku cadangnya. realisasi 17 unit kendaraan dinas telah diservis dan diganti suku cadangnya. Anggaran dalam melaksanakan subkegiatan tersebut Rp. 29.803.000,00 dan terealisasi Rp. 12.873.500,00 Analisis pelaksanaan subkegiatan tersebut 43,19 % dari target fisik. Permasalahan dan upaya yang dilaksanakan yaitu

terjadinya kerusakan mobil dinas yang tidak terduga sehingga perlu menambah anggaran diperebutkan tahun yang berjalan.

- b) Penyediaan Pemeliharaan Mesin dan Lainnya, target dari subkegiatan tersebut adalah 2 unit kendaraan dinas yang terbayar pajaknya. Realisasi 2 unit kendaraan dinas telah dibayar pajaknya. Anggaran dalam melaksanakan subkegiatan tersebut Rp. 2.000.000,00 dan terealisasi Rp.0 Analisis pelaksanaan subkegiatan tersebut 0% dari target fisik. Permasalahan dan upaya yang dilaksanakan tidak ada.
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, target dari subkegiatan tersebut adalah 5 unit gedung yang dilakukan pemeliharaan/ direhabilitas. realisasi 5 unit gedung telah dilakukan pemeliharaan/ direhabilitas. Anggaran dalam melaksanakan subkegiatan tersebut Rp. 24.000.000,00 dan terealisasi Rp. 21.775.000,00 Analisis pelaksanaan subkegiatan tersebut 90,72% dari target fisik.
 - d) Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya. Realisasi 5 Unit gedung. Anggaran dalam melaksanakan subkegiatan tersebut Rp. 4.500.000,00 dan realisasi Rp. 2.250.000,00. Analisis pelaksanaan subkegiatan tersebut 50% dari target fisik.
- 7) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan target 2 kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan, realisasi 2 kali kegiatan Urusan Pemerintahan telah Dilimpahkan, capaian kinerja kegiatan tersebut 100 %. Anggaran dalam melaksanakan kegiatan tersebut Rp. 19.700.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.550.000,00 tingkat capaian keuangan sebesar 7,86%. sub kegiatannya sebagai berikut;
- a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan, target dari subkegiatan tersebut adalah 100 peserta penyuluhan perizinan dengan realisasi 100 peserta telah diberi penyuluhan. Anggaran dalam melaksanakan subkegiatan tersebut Rp. 19.700.000,00 dan terealisasi Rp. 1.550.000 Analisis pelaksanaan subkegiatan tersebut 7,86% dari target fisik, karena kegiatan belum dilaksanakan.
 - b) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan target 12 kali koordinasi yang dilaksanakan, realisasi 12 kali

koordinasi telah dilaksanakan, capaian kinerja kegiatan tersebut 100 %. Anggaran dalam melaksanakan kegiatan tersebut Rp.50.895.000,00 terealisasi sebesar Rp. 11.816.000,00 tingkat capaian keuangan sebesar 23,21%. dari 2 (dua) sub kegiatannya sebagai berikut;

- a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, target dari subkegiatan tersebut adalah 14 desa yang melaksanakan musrenbang dengan realisasi 14 desa telah melaksanakan musrenbang. Anggaran dalam melaksanakan subkegiatan tersebut Rp. 4.845.000,00 dan terealisasi Rp. 1.800.000,00 Analisis pelaksanaan subkegiatan tersebut 37,15% dari target fisik. Permasalahan dan upaya yang dilaksanakan yaitu tidak ada.
 - b) Singkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta Di Wilayah Kerja Kecamatan, target dari subkegiatan tersebut adalah 2 Dokumen. Anggaran dalam melaksanakan Subkegiatan tersebut adalah Rp. 10.000.000,00 dan terealisasi RP. 950.000,00 , Analisis pelaksanaan subkegiatan tersebut adalah 9,5% karena kegiatan belum terlaksana.
 - c) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, target dari subkegiatan tersebut adalah 2 kali kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan dengan realisasi 2 kali kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan telah dilaksanakan. Anggaran dalam melaksanakan subkegiatan tersebut Rp. 36.050.000,00 dan terealisasi Rp. 9.066.000,00 Analisis pelaksanaan subkegiatan tersebut 25,14% dari target fisik. Kegiatan belum sepenuhnya terlaksana.
- 8) Kegiatan Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan target 100% kali koordinasi yang dilaksanakan, realisasi 12 kali koordinasi telah dilaksanakan, capaian kinerja kegiatan tersebut 100 %. Anggaran dalam melaksanakan kegiatan tersebut Rp. 101.028.000,00 terealisasi sebesar Rp. 48.053.030,00 tingkat capaian keuangan sebesar 47,56%. dari 3 (tiga) sub kegiatannya sebagai berikut;
- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan target 12 kali koordinasi yang

dilaksanakan, realisasi 12 kali koordinasi telah dilaksanakan, capaian kinerja kegiatan tersebut 100 %. Anggaran dalam melaksanakan kegiatan tersebut Rp. 5.700.000,00 terealisasi sebesar Rp. 500.000,00 tingkat capaian keuangan sebesar 8,77% karena baru akan dilaksanakan di bulan Nopember, dari 1 (satu) sub kegiatannya sebagai berikut;

- b. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, target dari subkegiatan tersebut adalah 36 bulan jasa tenaga keamanan/ linmas terbayar dengan realisasi 36 bulan jasa tenaga keamanan/ linmas telah terbayar. Anggaran dalam melaksanakan subkegiatan tersebut Rp. 95.328.000,00 dan terealisasi Rp. 47.553.030,00 Analisis pelaksanaan subkegiatan tersebut 49,88% dari target fisik. Permasalahan yaitu tidak ada karena ini honor 3 orang linmas.
- c. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan target 2 kali kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan, realisasi 2 kali kegiatan pemerintahan umum telah dilaksanakan, capaian kinerja kegiatan tersebut 100%. Anggaran dalam melaksanakan kegiatan tersebut Rp. 29.385.000,00 terealisasi sebesar Rp. 7.710.000,00 tingkat capaian keuangan sebesar 26,23%. dari 1 (satu) sub kegiatannya sebagai berikut;
- d. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, target dari subkegiatan tersebut adalah 100 peserta bimtek wawasan kebangsaan, realisasi 100 peserta telah dibimtek wawasan kebangsaan. Anggaran dalam melaksanakan subkegiatan tersebut Rp. 29.385.000,00 dan terealisasi Rp. 7.710.000,00 Analisis pelaksanaan subkegiatan tersebut 26,23% dari target fisik. Permasalahan yaitu tidak ada, kegiatan belum sepenuhnya terlaksana menunggu waktu pelaksanaan.
- e. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan target 5 kali kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, realisasi 5 kali kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa telah dilakukan, capaian

kinerja kegiatan tersebut 100 %. Anggaran dalam melaksanakan kegiatan tersebut Rp. 58.900.000,00 terealisasi sebesar Rp. 10.830.000,00 tingkat capaian keuangan sebesar 18,38% dari target fisik, dari 3 (tiga) sub kegiatannya sebagai berikut;

- a) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, target dari subkegiatan tersebut adalah 14 Dokumen pembinaan penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa dengan realisasi 14 dokumen telah dibina dalam penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa. Anggaran dalam melaksanakan subkegiatan tersebut Rp. 300.000,00 dan terealisasi Rp. 150.000,00 Analisis pelaksanaan subkegiatan tersebut 50% dari target fisik. Permasalahan dan upaya yang dilaksanakan yaitu tidak ada.
- b) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, target dari subkegiatan tersebut adalah 14 Dokumen pembinaan keuangan desa dan pendayagunaan aset Desa dengan realisasi 14 dokumen telah dibina dalam keuangan desa dan pendayagunaan aset Desa. Anggaran dalam melaksanakan subkegiatan tersebut Rp. 26.400.000,00 dan terealisasi Rp. 8.780.000,00 Analisis pelaksanaan subkegiatan tersebut 33,25% dari target fisik karena kegiatan belum semua terlaksana.
- c) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan Aset Desa. Anggaran dalam melaksanakan Subkegiatan tersebut Rp. 23.500.000,00 dan terealisasi Rp. 1.500.000,00 Analisis pelaksanaan subkegiatan tersebut 6,38%, karena kegiatan belum selesai dilaksanakan.
- d) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Target dari subkegiatan tersebut adalah 1 dokumen dengan realisasi 1 desa. Anggaran dalam melaksanakan subkegiatan tersebut adalah Rp. 4.200.000,00 dan terealisasi Rp. 0. Analisis pelaksanaan subkegiatan tersebut 0% dari target fisik. Penyebab Kegiatan ini masih terealisasi 0% karena belum dilaksanakan.
- e) Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Target dari subkegiatan tersebut adalah 14 Dokumen dengan realisasi 14 desa. Anggaran dalam melaksanakan subkegiatan tersebut adalah Rp. 4.500.000,00 dan terealisasi

Rp. 400.000,00 target fisik 8,88%, karena kegiatan belum dilaksanakan menunggu jadwal pelaksanaan.

Adapun Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya serta tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada **Tabel 2.1** berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun berjalan)
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pageruyung

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	6	7	8=7/(6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7				UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01			KECAMATAN								
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan perangkat daerah	100%	100%	41%	41%	100%	100 %	100%
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	-	100%	100%	100%	100 %	100%
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	12	12	1	1	12	12	100%

PERUBAHAN RENJA 2024 Kecamatan Pageruyung

7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	12	12	12	12	12	12	100%
			2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkatat daerah	20%	23%	43%	43%	100%	100%	100%
			2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset yang diadakan	1 set	5 unit	5 unit	100%	5 unit	5 unit	100%
			2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tersedianya jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100%	48%	48%	100%	100%	100%
			2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	10%	29%	39%	39%	100 %	100%	100%
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	100%	3%	1%	1%	100%	100%	100%
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	39%	33%	9%	9%	50%	36,98%	100%

Tantangan dan Langkah Perbaikan:

Meskipun banyak pencapaian yang telah diraih, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti kekurangan tenaga kerja di beberapa unit layanan dan kebutuhan untuk memperbarui beberapa sistem perangkat lunak yang sudah usang. Langkah-langkah perbaikan yang direncanakan meliputi rekrutmen tenaga kerja tambahan, peningkatan anggaran untuk teknologi, dan evaluasi rutin terhadap proses layanan untuk memastikan bahwa standar kualitas tetap terjaga.

2.1 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program/kegiatan dari masyarakat umumnya tertampung dalam kegiatan Musrenbangcam, yaitu kegiatan untuk kepentingan umum serta sarana prasana pelayanan lainnya. misalnya usulan rabat beton jalan desa, pembangunan saluran irigasi, pengembangan destinasi wisata dan lain-lain, namun usulan dari masyarakat tersebut langsung tertuju pada Dinas/Instansi terkait. Namun demikian kegiatan-kegiatan yang memerlukan anggaran yang cukup besar sangat bergantung pada kemampuan APBD Kabupaten Kendal.

Adapun Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dapat dilihat pada **Tabel 2.2** berikut:

Tabel 2.2

No	Usulan Masyarakat	Deskripsi Usulan	Lokasi	Prioritas	Anggaran	Sumber Dana	Keterangan
	NIHIL				-	-	-

BAB. III**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH****1.1. Rencana Kerja Tahun 2024 dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Pendanaan perangkat daerah untuk tahun 2024 biasanya dibagi dalam beberapa kategori untuk mendukung berbagai program dan kegiatan. Berikut adalah beberapa peruntukannya:

a. Belanja Modal

- o Pembangunan dan Renovasi

Dana untuk pembangunan infrastruktur baru atau renovasi fasilitas yang sudah ada.

- o Pembelian Aset Tetap

Investasi dalam peralatan, kendaraan, atau teknologi baru.

b. Belanja Operasional

- o Pengeluaran Rutin

Biaya operasional harian seperti gaji pegawai, biaya utilitas, dan pemeliharaan fasilitas.

- o Program Kegiatan

Biaya untuk melaksanakan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

c. Belanja Sosial

- o Bantuan Sosial

Dana untuk program bantuan langsung kepada masyarakat, termasuk bantuan untuk kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesehatan.

- o Program Pemberdayaan

Investasi dalam program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

d. Belanja Tidak Terduga

- o Cadangan Anggaran

Dana cadangan untuk menghadapi kebutuhan mendesak atau keadaan darurat yang tidak terencana.

e. Pendanaan Proyek Prioritas

- o Proyek Khusus

Dana untuk proyek-proyek prioritas yang menjadi fokus utama tahun ini, seperti proyek strategis daerah atau inisiatif pembangunan berkela.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah tahun 2024 dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang

telah ditetapkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif. Fokus utama akan berada pada peningkatan infrastruktur, pengembangan ekonomi, pelayanan publik, serta program sosial. Pengelolaan pendanaan yang efisien dan efektif akan menjadi kunci untuk mencapai hasil yang optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Rencana Kerja Kecamatan Pageruyung dan pendanaan perubahan pada tahun 2024 mengalami banyak perubahan, Perubahan dalam pendapatan daerah, baik karena kenaikan atau penurunan, memerlukan penyesuaian anggaran untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja, dikarenakan keadaan keuangan yang ada di Pemerintahan Kabupaten Kendal yang mengalami devisaite sehingga perubahan yang terjadi adalah pengurangan terhadap anggaran yang ada di setiap OPD termasuk di Kecamatan Pageruyung. Secara singkat Rencana Kerja dan pendanaan Perubahan Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah , dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp.2.455.875.727,00

Rencana Program tersebut dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

meliputi sub kegiatan :

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan
- Penyediaan peralatan rumah tangga
- Penyediaan Bahan logistik
- Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
- Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah meliputi Sub kegiatan :
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

- f. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah meliputi Sub Kegiatan :
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- g. Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah meliputi Sub Kegiatan :
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak pajak dinas kendaraan dinas operasional lapangan
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
2. Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.579.500,00 meliputi Kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat meliputi sub kegiatan :
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan , dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.895.000,00 dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi Pemberdayaan Desa meliputi Sub Kegiatan :
 - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta diwilayah kerja kecamatan
 - Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 101.028.000,00 untuk kegiatan :
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum meliputi sub kegiatan :
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

- b. Koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah meliputi Sub Kegiatan :
 - Koordnasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Indonesia.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 29.385.000,00, digunakan untuk kegiatan/sub kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah meliputi Sub Kegiatan ;
 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika dan mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 58.900.000,00 meliputi Kegiatan :
 - a. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa dan meliputi Sub Kegiatan :
 - Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa
 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Total alokasi anggaran program 1(satu) sampai dengan 6 (enam) sebesar Rp. 2.455.875.727,00 (Dua milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) lebih rinci bisa dilihat di tabel 3.1 dibawah ini;

8

SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-03 14:46:58

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pefungsikan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	9.410.000,00	9.410.000,00	13.870.000,00	4.460.000,00	Kab. Kendal, Pagaruyung Semua Ke/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN PAGERUYUNG
7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	53.236.000,00	60.970.000,00	60.970.000,00	7.734.000,00	Kab. Kendal, Pagaruyung Semua Ke/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			53.300.000,00	KECAMATAN PAGERUYUNG
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis aset yang dipelihara				6 Jenis	6 Jenis	59.303.000,00	60.303.000,00	60.303.000,00	1.000.000,00			-	-	-		89.000.000,00	KECAMATAN PAGERUYUNG
7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	17 Unit	29.803.000,00	29.803.000,00	29.803.000,00	0,00	Kab. Kendal, Pagaruyung Semua Ke/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			32.000.000,00	KECAMATAN PAGERUYUNG
7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Kendal, Pagaruyung Semua Ke/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.000.000,00	KECAMATAN PAGERUYUNG
7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Renabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Pagaruyung Semua Ke/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN PAGERUYUNG
7.01.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Renabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kab. Kendal, Pagaruyung Semua Ke/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN PAGERUYUNG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase pelaksanaan pempilahan kewenangan kacamatan				100 %	100 %	10.900.000,00	9.700.000,00	19.706.006,00	9.100.000,00							20.000.000,00	
7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan				2 Kali	2 Kali	10.900.000,00	9.700.000,00	19.700.000,00	8.800.000,00			-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN PAGERUYUNG
7.01.02.2.04.0003		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				2 Laporan	2 Laporan	10.900.000,00	9.700.000,00	19.700.000,00	8.800.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN PAGERUYUNG
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase aspirasi masyarakat yang diskomudir dalam musrenbang				33 %	33 %	51.215.872,00	26.000.000,00	31.195.000,00	3.784.128,00							55.000.000,00	
7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan				12 Kali	12 Kali	51.215.872,00	26.000.000,00	31.195.000,00	-20.020.872,00			-	-	-		55.000.000,00	KECAMATAN PAGERUYUNG
7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				14 Lembaga K emasyarak atan	14 Lembaga K emasyarak atan	13.715.872,00	4.650.000,00	4.845.000,00	-8.970.872,00	Kab. Kendal, Pagaruyung Semua Ke/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN PAGERUYUNG
7.01.03.2.01.0002		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN PAGERUYUNG
7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	27.500.000,00	11.350.000,00	16.350.000,00	-11.150.000,00	Kab. Kendal, Pagaruyung Semua Ke/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN PAGERUYUNG
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani				100 %	100 %	91.654.000,00	101.028.000,00	101.028.000,00	1.650.000,00							93.304.000,00	
7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyeleenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi yang ditaksanakan				12 Kali	12 Kali	8.350.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	-2.650.000,00			-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN PAGERUYUNG
7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	8.350.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	-2.650.000,00	Kab. Kendal, Pagaruyung Semua Ke/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN PAGERUYUNG
7.01.04.2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi yang ditaksanakan				12 Kali	12 Kali	83.304.000,00	95.328.000,00	95.328.000,00	12.024.000,00			-	-	-		83.304.000,00	KECAMATAN PAGERUYUNG
7.01.04.2.02.0001		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				2 Laporan	2 Laporan	83.304.000,00	95.328.000,00	95.328.000,00	12.024.000,00	Kab. Kendal, Pagaruyung Semua Ke/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			83.304.000,00	KECAMATAN PAGERUYUNG
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase kasus konflik sosial yang di tangani				100 %	100 %	11.425.000,00	9.685.000,00	9.685.000,00	8.575.000,00							20.000.000,00	
7.01.05.2.01		Penyeleenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang ditaksanakan				1 Kali	1 Kali	11.425.000,00	9.685.000,00	9.685.000,00	-1.740.000,00			-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN PAGERUYUNG
7.01.05.2.01.0002		Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																		

PERUBAHAN RENJA 2024 Kecamatan Pageruyung

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSYRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				100 Orang	100 Orang	11.425.000,00	9.685.000,00	9.685.000,00	-1.740.000,00	Kab. Kendal, Pageruyung, Semus KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN PAGERUYUNG
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Penyusunan APBDes tepat waktu				100 %	100 %	43.315.105,00	26.900.000,00	58.900.000,00	-7.815.100,00							35.500.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi pembinaan pengawasan pemerintahan desa				5 Kali	5 Kali	43.315.100,00	26.900.000,00	58.900.000,00	15.584.900,00		-	-	-	-		35.500.000,00	KECAMATAN PAGERUYUNG
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				14 Dokumen	14 Dokumen	5.600.000,00	300.000,00	300.000,00	-5.300.000,00	Kab. Kendal, Pageruyung, Semus KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.000.000,00	KECAMATAN PAGERUYUNG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				14 Dokumen	14 Dokumen	16.261.100,00	13.500.000,00	26.400.000,00	10.138.900,00	Kab. Kendal, Pageruyung, Semus KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN PAGERUYUNG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Penyaygunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Penyaygunaan Aset Desa				14 Dokumen	14 Dokumen	11.220.000,00	4.400.000,00	23.800.000,00	12.280.000,00	Kab. Kendal, Pageruyung, Semus KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN PAGERUYUNG
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.734.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	-1.534.000,00	Kab. Kendal, Pageruyung, Kebongembong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.000.000,00	KECAMATAN PAGERUYUNG
	7.01.06.2.01.0005	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				14 Dokumen	14 Dokumen	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kab. Kendal, Pageruyung, Semus KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.500.000,00	KECAMATAN PAGERUYUNG
			J U M L A H						2.754.658.472,00	2.868.688.227,00	2.676.383.727,90	-78.275.745,00							2.801.529.000,00	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Kendal
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN PAGERUYUNG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN PAGERUYUNG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN											2,808,613,500			6,027,971,400
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											2,606,581,000			2,853,691,800
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											6,000,000			8,000,000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dicapai	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kelurahan	100 persen	4 Dokumen	100 persen	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 persen	4,000,000	
7		01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dicapai	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kelurahan	100 persen	2 Laporan	100 persen	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 persen	4,000,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											2,158,918,500			2,321,855,800
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kelurahan	100 persen	19 Orang/bulan	2 laporan	2,064,718,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 persen	2,221,855,800	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kelurahan	100 persen	12 Dokumen	12 laporan	94,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 persen	100,000,000	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											14,250,000			15,000,000
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaporkan	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kelurahan	100 persen	20 Paket	12 laporan	14,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 persen	15,000,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											174,276,500			187,900,000
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kelurahan	100 persen	7 Paket	100 persen	4,836,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 persen	6,500,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kelurahan	100 persen	27 Paket	100 persen	20,084,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 persen	30,000,000	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kelurahan	100 persen	14 Paket	100 persen	8,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 persen	9,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Kendal
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN PAGERUYUNG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN PAGERUYUNG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kelurahan	100 persen	700 Paket	100 persen	44,756,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 persen	50,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kelurahan	100 persen	3 Paket	100 persen	15,872,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 persen	20,000,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kelurahan	100 persen	12 Dokumen	100 persen	1,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 persen	2,400,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	100 persen	78,928,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 persen	70,000,000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								47,360,000				55,000,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Aset yang diadakan	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kelurahan	100 persen	9 Unit	8 unit	19,180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 persen	20,000,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Aset yang diadakan	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kelurahan	100 persen	2 Unit	8 unit	28,180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 persen	35,000,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								108,656,000				116,436,000	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kelurahan	100 persen	300 Laporan	12 bulan	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 persen	3,000,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	12 bulan	43,120,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 persen	50,000,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kelurahan	100 persen	2 Laporan	12 bulan	9,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 persen	10,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	12 bulan	53,236,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 persen	53,436,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								97,120,000				149,500,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Kendal
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN PAGERUYUNG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN PAGERUYUNG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Aset yang dipelihara	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kelurahan	100 persen	17 Unit	6 jenis	31,570,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 persen	27,500,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Aset yang dipelihara	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kelurahan	100 persen	2 Unit	6 jenis	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 persen	7,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Aset yang dipelihara	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kelurahan	100 persen	5 Unit	6 jenis	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 persen	100,000,000
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Aset yang dipelihara	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kelurahan	100 persen	5 Unit	6 jenis	4,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 persen	15,000,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								16,275,000			17,577,000		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								16,275,000			17,577,000		
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilakukan	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kelurahan	100 persen	2 Laporan	2 kali	16,275,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100 persen	17,577,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								42,246,000			42,547,000		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								42,246,000			42,547,000		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang	Koordinasi yang di laksanakan	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kelurahan	39 persen	14 Desa	12 kali	10,091,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	39 persen	14,420,000
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Koordinasi yang di laksanakan	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kelurahan	39 persen	1 Dokumen	12 kali	9,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	39 persen	5,027,000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Koordinasi yang di laksanakan	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kelurahan	39 persen	3 Laporan	12 kali	22,255,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	39 persen	23,100,000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								95,894,000			93,895,000		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								12,590,000			10,591,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Kendal
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN PAGERUYUNG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN PAGERUYUNG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Koordinasi yang di laksanakan	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	12 kali	12,590,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100 persen	10,591,000
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								83,304,000				83,304,000	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	12 kali	83,304,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100 persen	83,304,000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								20,317,500				21,942,900	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								20,317,500				21,942,900	
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kelurahan	100 persen	100 Orang	2 kali	20,317,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kasus konflik sosial yang di tangani	100 persen	21,942,900
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								27,300,000				25,984,000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								27,300,000				25,984,000	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kegiatan Fasilitasi pembinaan pengawasan pemerintah desa yang dilaksanakan	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kelurahan	100 persen	14 Dokumen	4 kali	5,070,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	100 persen	5,700,000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kegiatan Fasilitasi pembinaan pengawasan pemerintah desa yang dilaksanakan	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kelurahan	100 persen	14 Dokumen	4 kali	17,430,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	100 persen	16,800,000
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kegiatan Fasilitasi pembinaan pengawasan pemerintah desa yang dilaksanakan	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kelurahan	100 persen	14 Dokumen	4 kali	4,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	100 persen	3,484,000
TOTAL													2,808,613,500				6,027,971,400	

BAB. IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Daerah Kecamatan pageruyung Tahun 2024 diharapkan akan memberikan arahan serta sebagai tolak ukur dalam menjalankan kinerja Kecamatan Pageruyung sesuai prioritas Program dan kegiatan selama 6 bulan, sehingga program dan kegiatan terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Catatan penting yang diperlu mendapatkan perhatian adalah bahwa Rencana Kerja 2024 disusun berdasarkan aspirasi dan kebutuhan yang memang mendesak demi mengejar ketertinggalan Perangkat Daerah Kecamatan Pageruyung terutama untuk peningkatan pemberdayaan UMKM dan pemulihan ekonomi masyarakat.

Dan sebagai Rencana Tindak lanjut yaitu Perlu menjadikan perhatian kita semua bahwa di wilayah Kecamatan Pageruyung yang mempunyai potensi di bidang Perkebunan, khususnya Tanaman buah-buahan, yaitu Tanaman Durian di Desa Kebongembong dan buah jambu getas merah yang tersebar merata di 14 (empat belas) Desa mestinya ada upaya dari semua pihak agar dapat mendukung kegiatan ini dengan memberikan alternatif pemasaran dan pengolahan produk sebagaimana telah dipelopori oleh salah satu industri rumah tangga di Desa Tambahrejo yang mengolah buah Jambu getas merah menjadi sari buah, Sirup, Dodol dan sebagainya.

Demikian harapan kami semoga mendapat dukungan dari semua pihak.

Kendal, 2024
CAMAT PAGERUYUNG,

CASPURI,S.Sos.
Pembina Tk.I
NIP. 19670917 198607 1 001



PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN KENDAL
TAHUN 2024

KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah selama satu tahun. Adapun penyusunan Perubahan Rencana Kerja merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kendal tahun 2024 tidak terlepas dari Renstra Kecamatan Kendal 2021-2026. Pada Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 ini terdapat beberapa kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal pada tahun 2024 yang mengarah pada kegiatan ekonomi pada unit-unit usaha mikro/menengah dan pelayanan percepatan penanganan kesehatan. Dan perbaikan penatausahaan keuangan pada tingkat Kelurahan.

Harapan kami semoga Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Kendal ini benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif.

Kendal, 2024

KECAMATAN KENDAL,
SAEFUDIN, S.Sos
Pembina
NIP. 196707251989031007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II dan Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	21
III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	22
IV. PENUTUP	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini mengacu pada Renstra Perangkat Daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, perubahan proyeksi Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya yang akan digunakan untuk tahun berjalan, penambahan kegiatan baru, penghapusan kegiatan yang tidak relevan, perubahan indikator kinerja, target dan pagu kegiatan serta adanya refocusing anggaran termasuk perubahan pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer pusat ke daerah dan bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten/kota.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dibahas pada forum Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Baperlitbang, dimana pembahasan tersebut meliputi perubahan proyeksi Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya yang akan digunakan untuk tahun berjalan, penambahan kegiatan baru, penghapusan kegiatan yang tidak relevan, perubahan indikator kinerja, target dan pagu kegiatan serta adanya refocusing anggaran termasuk perubahan pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer pusat ke daerah dan bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten/kota. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Baperlitbang. Kemudian Perubahan Rencana Kerja tersebut

dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Kendal (Lembaran daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 20).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kendal Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan. Kegiatan selama satu semester kedepan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kendal merupakan implementasi dari Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Kendal maupun semua lapisan masyarakat sehingga pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan hasil-hasil pelayanan publik dapat menciptakan kondisi yang kondusif dan mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kendal Tahun 2024 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah Kecamatan Kendal dalam melaksanakan program dan kegiatan setelah anggaran perubahan;
2. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan setelah anggaran perubahan;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah Kecamatan Kendal.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal disusun dengan sistematika berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun sistematika Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kendal, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Bagian ini memaparkan hasil evaluasi Rencana Kerja perangkat daerah triwulan II yang meliputi capaian kinerja dan anggaran program/kegiatan, serta faktor penyebab keberhasilan/ kegagalan.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini memaparkan perubahan rencana kerja yang meliputi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah setelah perubahan beserta kebutuhan pendanaannya.

BAB IV. PENUTUP

Memuat uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Kendal Tahun 2024 secara umum selaras dengan Renja Penetapan 2024. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

a. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 4 (empat) sub kegiatan dan Indikator Kinerja antara lain :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan :

1. Pagu Anggaran	:	Rp.104.000.000,00
Realisasi Anggaran	:	Rp.19.110.950,00
Realisasi Anggaran (%)	:	18,38 %
2. Indikator kinerja capaian keluaran	:	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara
3. Target capaian kegiatan	:	98 unit
4. Realisasi capaian kegiatan	:	98 unit
5. Tingkat capaian kinerja (%)	:	20

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan :

1. Pagu Anggaran	:	Rp.30.600.000,00
Realisasi Anggaran	:	Rp.2.739.500,00
Realisasi Anggaran (%)	:	8,95%
2. Indikator kinerja capaian keluaran	:	Jumlah pajak kendaraan bermotor dibayar

3. Target capaian kegiatan : 98 unit
4. Realisasi capaian kegiatan : 98 unit
5. Tingkat capaian kinerja (%) : 10

3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya :

1. Pagu Anggaran : Rp.142.077.000,00
Realisasi Anggaran : Rp.24.810.000,00
Realisasi Anggaran (%) : 17,46 %
2. Indikator kinerja capaian : Tersedianya bulan
keluaran Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya
3. Target capaian kegiatan : 12 bulan
4. Realisasi capaian kegiatan : 12 bulan
5. Tingkat capaian kinerja (%) : 20

4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya :

1. Pagu Anggaran : Rp.104.400.000,00
Realisasi Anggaran : 0
Realisasi Anggaran (%) : 0 %
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah unit gedung
keluaran kantor dan
bangunan yang
dipelihara
3. Target capaian kegiatan : 3 unit
4. Realisasi capaian kegiatan : 3 unit
5. Tingkat capaian kinerja (%) : 0 %

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 13.500.000,00

- | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|
| Realisasi Anggaran | : | Rp. 3.824.300,00 |
| Realisasi Anggaran (%) | : | 28,33 % |
| 2. Indikator kinerja capaian keluaran | : | Tercukupinya dokumen perencanaan |
| 3. Target capaian kegiatan | : | 4 dokumen |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : | 2 dokumen |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%) | : | 50 |

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Indikator Kinerja antara lain :

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp.15.990.440.815,00 |
| Realisasi Anggaran | : | Rp.7.823.743.020,00 |
| Realisasi Anggaran (%) | : | 48,93 % |
| 2. Indikator kinerja capaian keluaran | : | Jumlah bulan terbayarnya gaji dan tunjangan |
| 3. Target capaian kegiatan | : | 14 bulan |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : | 14 bulan |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%) | : | 50 |

2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Indikator Kinerja antara lain :

- | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp.34.962.000,00 |
| Realisasi Anggaran | : | Rp.6.324.000,00 |
| Realisasi Anggaran (%) | : | 18,09 % |
| 2. Indikator kinerja capaian keluaran | : | Jumlah kegiatan subbag Keuangan |
| 3. Target capaian kegiatan | : | 12 bulan |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : | 12 bulan |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%) | : | 50 |

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 5 (lima) sub kegiatan dan indikator kerjanya :

1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor :

1. Pagu Anggaran : Rp.446.195.470,00
Realisasi Anggaran : Rp.94.901.900,00
Realisasi Anggaran (%) : 21,27 %
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah bulan
keluaran tersedianya Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
3. Target capaian kegiatan : 12 bulan
4. Realisasi capaian kegiatan : 12 bulan
5. Tingkat capaian kinerja (%) : 40

2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga :

1. Pagu Anggaran : Rp.145.774.000,00
Realisasi Anggaran : Rp.34.450.750,00
Realisasi Anggaran (%) : 23,63 %
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Penyediaan
keluaran Peralatan Rumah
Tangga
3. Target capaian kegiatan : 12 bulan
4. Realisasi capaian kegiatan : 12 bulan
5. Tingkat capaian kinerja (%) : 50

3) Penyediaan Bahan Logistik :

1. Pagu Anggaran : Rp.29.290.000,00
Realisasi Anggaran : Rp.7.582.500,00
Realisasi Anggaran (%) : 25,89 %
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah bulan
keluaran tersedianya bahan
logistik
3. Target capaian kegiatan : 12 bulan
4. Realisasi capaian kegiatan : 12 bulan
5. Tingkat capaian kinerja (%) : 50

4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan :

1. Pagu Anggaran : Rp.107.358.800,00
Realisasi Anggaran : Rp.45.112.250,00

- | | | | |
|----|------------------------------------|---|---|
| | Realisasi Anggaran (%) | : | 42,02 % |
| 2. | Indikator kinerja capaian keluaran | : | Jumlah bulan tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan |
| 3. | Target capaian kegiatan | : | 12 bulan |
| 4. | Realisasi capaian kegiatan | : | 12 bulan |
| 5. | Tingkat capaian kinerja (%) | : | 60 |

5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD :

- | | | | |
|----|------------------------------------|---|---|
| 1. | Pagu Anggaran | : | Rp.659.758.000,00 |
| | Realisasi Anggaran | : | Rp.147.921.465,00 |
| | Realisasi Anggaran (%) | : | 22,42 % |
| 2. | Indikator kinerja capaian keluaran | : | Jumlah bulan tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| 3. | Target capaian kegiatan | : | 12 bulan |
| 4. | Realisasi capaian kegiatan | : | 12 bulan |
| 5. | Tingkat capaian kinerja (%) | : | 40 |

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 4 (empat) sub kegiatan dan indikator kinerja antara lain :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat :

- | | | | |
|----|------------------------------------|---|---------------------------------|
| 1. | Pagu Anggaran | : | Rp.15.400.000,00 |
| | Realisasi Anggaran | : | Rp.7.545.000,00 |
| | Realisasi Anggaran (%) | : | 48,99 % |
| 2. | Indikator kinerja capaian keluaran | : | Tersedianya jasa surat menyurat |
| 3. | Target capaian kegiatan | : | 12 bulan |
| 4. | Realisasi capaian kegiatan | : | 12 bulan |
| 5. | Tingkat capaian kinerja (%) | : | 95 |

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik :

- | | | | |
|----|--------------------|---|-------------------|
| 1. | Pagu Anggaran | : | Rp.791.574.900,00 |
| | Realisasi Anggaran | : | Rp.210.670.372,00 |

- | | | | |
|----|------------------------------------|---|--|
| | Realisasi Anggaran (%) | : | 26.62 % |
| 2. | Indikator kinerja capaian keluaran | : | Jumlah bulan tersedianya jasa Telp, internet, air, dan listrik |
| 3. | Target capaian kegiatan | : | 12 bulan |
| 4. | Realisasi capaian kegiatan | : | 12 bulan |
| 5. | Tingkat capaian kinerja (%) | : | 50 |

3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor :

- | | | | |
|----|------------------------------------|---|---|
| 1. | Pagu Anggaran | : | Rp.946.304.600,00 |
| | Realisasi Anggaran | : | Rp.350.564.700,00 |
| | Realisasi Anggaran (%) | : | 37,05 % |
| 2. | Indikator kinerja capaian keluaran | : | Jumlah bulan tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor |
| 3. | Target capaian kegiatan | : | 12 bulan |
| 4. | Realisasi capaian kegiatan | : | 12 bulan |
| 5. | Tingkat capaian kinerja (%) | : | 60 |

4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor :

- | | | | |
|----|------------------------------------|---|---|
| 1. | Pagu Anggaran | : | Rp.1.813.676.800,00 |
| | Realisasi Anggaran | : | Rp.687.572.700,00 |
| | Realisasi Anggaran (%) | : | 37,91 % |
| 2. | Indikator kinerja capaian keluaran | : | Jumlah bulan tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 3. | Target capaian kegiatan | : | 12 bulan |
| 4. | Realisasi capaian kegiatan | : | 12 bulan |
| 5. | Tingkat capaian kinerja (%) | : | 60 |

- e. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan 1 (satu) sub kegiatan :

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, dengan indikator kinerja antara lain :

- | | | |
|---------------------------------------|---|------------------------------|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp.8.458.800,00 |
| Realisasi Anggaran | : | Rp.1.867.500,00 |
| Realisasi Anggaran (%) | : | 22,08 % |
| 2. Indikator kinerja capaian keluaran | : | Jumlah kegiatan dilaksanakan |
| 3. Target capaian kegiatan | : | 3 kegiatan |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : | 2 kegiatan |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%) | : | 70 % |

f. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan :

1) Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan :

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp.17.326.000,00 |
| Realisasi Anggaran | : | Rp.16.840.000,00 |
| Realisasi Anggaran (%) | : | 97,19 % |
| 2. Indikator kinerja capaian keluaran | : | Prosentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang |
| 3. Target capaian kegiatan | : | 5 kegiatan |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : | 5 kegiatan |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%) | : | 90 % |

2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan :

- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp.63.323.000,00 |
| Realisasi Anggaran | : | Rp.2.000.000,00 |
| Realisasi Anggaran (%) | : | 3,16 % |
| 2. Indikator kinerja capaian keluaran | : | Prosentase aspirasi masyarakat yang dilaksanakan |
| 3. Target capaian kegiatan | : | 80 % |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : | 80 % |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%) | : | 5 % |

3) Evaluasi Kelurahan :

1. Pagu Anggaran : Rp.15.900.000,00
- Realisasi Anggaran : Rp.980.000,00
- Realisasi Anggaran (%) : 6,16 %
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah evaluasi
keluaran dilaksanakan
3. Target capaian kegiatan : 2 kegiatan
4. Realisasi capaian kegiatan : 2 kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja (%) : 10

g. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum :

1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan :

1. Pagu Anggaran : Rp.55.580.000,00
- Realisasi Anggaran : Rp.26.744.300,00
- Realisasi Anggaran (%) : 48,12 %
2. Indikator kinerja capaian : Pelaksanaan
keluaran kegiatan keamanan
dan ketertiban
3. Target capaian kegiatan : 3 kegiatan
4. Realisasi capaian kegiatan : 2 kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja (%) : 60 %

REKAP REALISASI DAKEL SAMPAI DENGAN BULAN JUNI 2024 KECAMATAN KENDAL						
NO	KELURAHAN	ANGGARAN	REALISASI (SP2D)		TOTAL REALISASI	%TASE
			TU 1	TU 2		
1	CANDIROTO	200.000.000	39.455.000	90.000.000	129.455.000	65%
2	SUKODONO	200.000.000	42.997.000		42.997.000	21%
3	JOTANG	200.000.000	25.362.000	7.380.000	32.742.000	16%
4	TROMPO	200.000.000	43.084.300	100.000.000	143.084.300	72%
5	KETAPANG	200.000.000	44.545.000		44.545.000	22%
6	KEBONDALEM	200.000.000	39.905.000		39.905.000	20%
7	KALIBUNTUWETAN	200.000.000	38.225.000		38.225.000	19%
8	SIJERUK	200.000.000	46.432.000		46.432.000	23%
9	TUNGGULREJO	200.000.000	24.080.000		24.080.000	12%
10	JETIS	200.000.000	-		-	0%
11	BUGANGIN	200.000.000	47.490.000		47.490.000	24%
12	LANGENHARJO	200.000.000	74.950.000		74.950.000	37%
13	PEKAUMAN	200.000.000	27.715.000	100.000.000	127.715.000	64%
14	PATUKANGAN	200.000.000	61.589.600	28.769.500	90.359.100	45%
15	PEGULON	200.000.000	74.450.000		74.450.000	37%
16	BANYUTOWO	200.000.000	41.665.000		41.665.000	21%
17	KARANGSARI	200.000.000	-		-	0%
18	NGILIR	200.000.000	33.797.000		33.797.000	17%
19	BANDENGAN	200.000.000	45.500.000		45.500.000	23%
20	BALOK	200.000.000	33.471.000		33.471.000	17%
TOTAL		4.000.000.000	784.712.900	326.149.500	1.110.862.400	

3. Realisasi program kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang telah ditetapkan nihil.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan OPD, sebagai berikut :

- a. Faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target kegiatan antara lain :

1) Adanya Surat Edaran Pembatasan Dalam Penyusunan RKA seluruh Perangkat daerah se-Kabupaten Kendal;

2) Terjadi pergeseran rencana pelaksanaan kegiatan ke triwulan IV tahun 2024
- b. Faktor yang mendukung tercapainya kegiatan karena adanya komitmen semua pihak untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, sebagai bagian untuk pencapaian perjanjian kinerja perangkat daerah.

- c. Faktor yang menjadi penyebab melebihi target kinerja program/ kegiatan adalah nihil
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah :
- a. Meningkatnya pelayanan prima kepada publik yang akuntable, transparan, dan efisien meliputi: IMB, Pertanahan, KTP, KK, Surat Waris, legalisasi lainnya;
 - b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan di Kecamatan.
 - c. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur Kecamatan meliputi ketrampilan penggunaan Teknologi Informasi.
 - d. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap aparatur Kelurahan meliputi kedisiplinan SDM dan tertib administrasi Kelurahan.
 - e. Meningkatnya Evaluasi Pendapatan Daerah.
 - f. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya swadaya masyarakat dan pembayaran PBB.
 - g. Peningkatan pelayanan publik:
 - h. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kecamatan;
 - i. Keterbukaan informasi pelayanan publik.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
- a. Pelaksana pelimpahan sebagian wewenang Pemerintahan dari Bupati.
 - b. Peningkatan Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan.
 - c. Peningkatan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan.
 - d. Peningkatan Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan.
 - e. Peningkatan koordinasi Pengoordinasi pembangunan yang meliputi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
 - f. Peningkatan Pengelolaan urusan kesekretariatan Kecamatan.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2024 Kecamatan Kendal, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Analisis IKU Kecamatan Kendal

Faktor pendukung tercapainya nilai SAKIP ada beberapa faktor yaitu :

- a. Komitmen Pimpinan Kunci Keberhasilan SAKIP
- b. Adanya koordinasi yang melibatkan semua kepala seksi, kepala subbagian dan aparatur Kecamatan dalam hal penataan administrasi perkantoran
- c. Manajemen kinerja dalam mendukung efektivitas

Faktor penghambat tercapainya nilai SAKIP ada beberapa faktor yaitu :

- a. Keterbatasan peralatan dan fasilitas kantor pendukung pelaksanaan pekerjaan.
- b. Data dan dokumen pendukung perencanaan yang belum memadai.
- c. Regulasi tentang perencanaan yg selalu mengalami perubahan.

Faktor pendukung tercapainya nilai IKM ada beberapa faktor yaitu :

- a. Komitmen Pimpinan Kunci Keberhasilan tercapainya Nilai IKM
- b. Kecepatan dalam memproses permintaan atau penyelesaian layanan, serta efisiensi dalam penyampaian hasil.
- c. Kepastian bahwa layanan akan diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan konsistensi dalam penerapan layanan.

Faktor penghambat tercapainya nilai IKM ada beberapa faktor yaitu :

- a. Keterbatasan peralatan dan fasilitas kantor pendukung pelaksanaan pekerjaan.
- b. Kurang informatif; informasi kurang tersebar luas kepada masyarakat
- c. Tanpa tindakan perbaikan yang jelas, masyarakat mungkin merasa bahwa survei tidak memberikan dampak yang nyata.

Kecamatan Kendal Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II, dari alokasi anggaran sebesar Rp.25.535.896.185,- (Dua puluh lima milyar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu seratus delapan puluh lima rupiah) sedangkan untuk realisasi pelaksanaan program dan kegiatan telah menyerap Anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar Rp.10.519.943.107,- (Sepuluh milyar lima ratus Sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh rupiah) atau dengan penyerapan anggaran 41,20%. Capaian target kinerja dan keuangan Kecamatan Kendal selama Triwulan II masih belum menampakkan kinerja yang maksimal hal ini dikarenakan ada beberapa faktor penghambat.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel.2.1
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
 Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah
 Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kendal
 Lembar : 1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian RealisasiTarget Renstra (%)
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Ketercapaian Penunjang Urusan Perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %
7.01.01.2..05	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen keuangan yang tersusun	40 laporan	40 laporan	40 laporan	100 %	40 laporan	40 laporan	50 %
7.01.01.2..06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan terlaksananya keg adm umum	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	50 %
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan jasa penunjang yang tercukupi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	50 %
7.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit aset yang terpelihara	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	50 %
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase pelimpahan	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	50 %

	dan Pelayanan Publik	pelaksanaan kewenangan							
7.01.02.2.04	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah urusan kegiatan pemerintahan yang dilimpahkan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	50 %
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase klurahan tertib administrasi	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	50 %
7.01.03..02	Kegiatan Pemberdayaan kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %
7.01.04	Progrm Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %
7.01.04.2.01. 01	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah koordinasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %

2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 tidak memasukkan usulan dari masyarakat yang disampaikan lewat kegiatan Musrenbangcam, karena program/kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan bersifat rutin dan tugas pokok yang dilakukan bersifat koordinatif dan pembinaan. Sedangkan usulan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat bersifat fisik.

Usulan program/kegiatan dari masyarakat merupakan hasil aspirasi dalam forum musrenbang dengan memperhatikan tugas dan fungsi, rencana strategis perangkat daerah. Serta isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut apabila ada, dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun Perubahan renja Kecamatan yang nantinya dibahas dalam forum perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Baperlitbang.

Dalam Menyusun Usulan Perubahan Renja Kecamatan Kendal tidak mendapat usulan aspirasi dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD untuk tahun anggaran 2024.

Tabel 2.2
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kabupaten Kendal

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi pelaksana program, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu seluruh satker mulai membuat rencana aksi dalam upaya penggalan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat ataupun dunia usaha.

Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan.

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip safe guarding akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan

perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan hasil cetakan input dari SIPD RI sebagaimana dibawah ini :

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen perubahan rencana kerja ini merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada perubahan rencana kerja Kecamatan Kendal diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kendal;
2. Penyusunan perubahan rencana kerja berpedoman pada Renstra Kecamatan Kendal Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam rencana kerja;
3. Penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Kendal ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen perubahan rencana kerja Kecamatan Kendal Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan rencana kerja Kecamatan Kendal ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Kecamatan Kendal Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RKA Perubahan nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil revidi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal. Begitu juga penyusunan DPA Perubahan dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Kendal;

3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kendal Tahun 2024.

Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2024, Kecamatan Kendal menetapkan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja dengan focus kinerja aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan pada Kecamatan Kendal;
2. Peningkatan pengetahuan, ketrampilan, dan kapasitas aparatur;
3. Peningkatan kinerja pelayanan public difokuskan pada penilaian SKM;
4. Peningkatan pelaksanaan kewenangan Bupati kepada Camat diprioritaskan pada pembinaan dan pendampingan penyusunan Dana Kelurahan serta pemantauan asset;
5. Peningkatan intensitas koordinasi antar dinas/instansi, UPTD/UPTB dan Kelurahan diprioritaskan kepada program bersama dalam pembangunan, keamanan, dan kesejahteraan.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan apabila dalam penyusunan perubahan rencana kerja ini masih banyak kekurangan, kami mohon saran dan arahan untuk perbaikan di tahun yang akan datang.

Kendal, 2024


CAMAT KENDAL,
KECAMATAN
KENDAL
SAEFUDIN, S.Sos
Pembina
NIP. 196707251989031007

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KENDAL TAHUN 2024																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN KENDAL								24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00						24.608.328.231,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00	
	7.01	KECAMATAN							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah				100 %	100 %	19.909.666.395,00	21.375.310.385,00	19.267.910.385,00	589.661.836,00							20.499.328.231,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen dan penganggaran evaluasi yang tersusun jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran evaluasi yang tersusun JUmlah dokumen perencanaan dan penganggaran evaluasi yang tersususun				20 dokumen 20 persen	20 dokumen 20 persen	47.590.000,00	13.500.000,00	14.990.000,00	-32.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN		50.000.000,00	KECAMATAN KENDAL
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	47.590.000,00	13.500.000,00	14.990.000,00	-32.600.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			50.000.000,00	KECAMATAN KENDAL
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan yang tersusun				54 laporan	54 laporan	14.459.821.095,00	16.025.402.815,00	13.931.102.815,00	-528.718.280,00			-	- -	ASN		13.818.328.231,00	KECAMATAN KENDAL
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				118 Orang/ bulan	118 Orang/ bulan	14.414.471.095,00	15.990.440.815,00	13.896.140.815,00	-518.330.280,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			13.673.428.231,00	KECAMATAN KENDAL
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				28 Dokumen	28 Dokumen	45.350.000,00	34.962.000,00	34.962.000,00	-10.388.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			144.900.000,00	KECAMATAN KENDAL
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas harian dan emblem ID yang tersedia				138 stel	138 stel	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0 Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0	ASN		51.000.000,00	KECAMATAN KENDAL
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				108 Paket	108 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0 Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0			51.000.000,00	KECAMATAN KENDAL
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah bulan terlaksananya kegiatan administrasi umum jumlah bulan terlaksananya kegiatan adm umum				10 persen 12 bulan	10 persen 12 bulan	976.525.000,00	1.388.374.270,00	1.280.922.520,00	304.397.520,00			-	- -	-		1.271.000.000,00	KECAMATAN KENDAL
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				18 Paket	18 Paket	364.353.000,00	446.195.470,00	346.195.470,00	-18.157.530,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			599.000.000,00	KECAMATAN KENDAL
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				19 Paket	19 Paket	106.921.000,00	145.774.000,00	155.436.500,00	48.515.500,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			107.000.000,00	KECAMATAN KENDAL
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	253.761.000,00	29.290.000,00	29.290.000,00	-224.471.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			264.000.000,00	KECAMATAN KENDAL
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	100.000.000,00	107.356.800,00	133.481.800,00	33.481.800,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			158.000.000,00	KECAMATAN KENDAL
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	151.490.000,00	659.758.000,00	616.518.750,00	465.028.750,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			143.000.000,00	KECAMATAN KENDAL
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan jasa penunjang yang tercukupi				12 bulan	12 bulan	4.119.387.800,00	3.566.956.300,00	3.555.486.800,00	-563.901.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	ASN		3.911.000.000,00	KECAMATAN KENDAL
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			11.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	612.894.400,00	791.574.900,00	840.595.400,00	227.701.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			613.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	696.182.600,00	946.304.600,00	946.304.600,00	250.122.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			687.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.794.910.800,00	1.813.676.800,00	1.753.186.800,00	-1.041.724.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			2.600.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah unit aset yang terpelihara				6 jenis/unit	6 jenis/unit	306.342.500,00	381.077.000,00	485.408.250,00	179.065.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	ASN		1.398.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	20 Unit	120.000.000,00	104.000.000,00	108.000.000,00	-12.000.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			125.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	21 Unit	30.600.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			31.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	141.610.000,00	142.077.000,00	142.077.000,00	467.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			142.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	14.132.500,00	104.400.000,00	204.731.250,00	190.598.750,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			1.100.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan				90 %	90 %	49.861.000,00	8.456.800,00	8.456.800,00	10.139.000,00							60.000.000,00		
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan				12 bulan 20 persen	12 bulan 20 persen	49.861.000,00	8.456.800,00	8.456.800,00	-41.404.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -	Aparatur Pemerintah		60.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																			
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				10 Dokumen	10 Dokumen	49.861.000,00	8.456.800,00	8.456.800,00	-41.404.200,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			60.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelurahan tertib administrasi Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD Presentase kelurahan tertib administrasi				95,00 95 80 % % %	95 80 95,00 % % %	4.261.853.000,00	4.096.549.000,00	4.175.210.200,00	-495.853.000,00							3.766.000.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan				100 % 20 persen	100 % 20 persen	4.261.853.000,00	4.096.549.000,00	4.175.210.200,00	-86.642.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	ASN		3.766.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	37.000.000,00	17.326.000,00	17.326.000,00	-19.674.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			40.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				20 Pokmas / Ormas	20 Pokmas / Ormas	104.853.000,00	63.323.000,00	113.323.000,00	8.470.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			120.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	15.900.000,00	23.300.000,00	-96.700.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			121.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani				100 %	100 %	282.000.000,00	55.580.000,00	55.580.000,00	1.000.000,00							283.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah koordinasi				10 persen 90 %	10 persen 90 %	282.000.000,00	55.580.000,00	55.580.000,00	-226.420.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	ASN		283.000.000,00	KECAMATAN KENDAL
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	282.000.000,00	55.580.000,00	55.580.000,00	-226.420.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			283.000.000,00	KECAMATAN KENDAL
		KELURAHAN CANDIROTO							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00					24.608.328.231,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00	
	7.01	KECAMATAN							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase kelurahan tertib administrasi Prosentase kelurahan tertib administrasi Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD				95.00 80 95 % % %	95.00 95 80 % % %	4.261.853.000,00	4.096.549.000,00	4.175.210.200,00	-495.853.000,00							3.766.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan				100 % 20 persen	100 % 20 persen	4.261.853.000,00	4.096.549.000,00	4.175.210.200,00	-86.642.800,00			-	- -	Masyarakat		3.766.000.000,00	KECAMATAN KENDAL
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Candirototo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			55.000.000,00	KECAMATAN KENDAL
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Candirototo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0 Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0			110.000.000,00	KECAMATAN KENDAL
		KELURAHAN SUKODONO							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00					24.608.328.231,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00	
	7.01	KECAMATAN							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelurahan tertib administrasi Presentase kelurahan tertib administrasi Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD				80 95 95.00 % % %	95 95.00 80 % % %	4.261.853.000,00	4.096.549.000,00	4.175.210.200,00	-495.853.000,00							3.766.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan				100 % 20 persen	100 % 20 persen	4.261.853.000,00	4.096.549.000,00	4.175.210.200,00	-86.642.800,00			-	- -	Masyarakat		3.766.000.000,00	KECAMATAN KENDAL
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Kendal, Sukodono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			55.000.000,00	KECAMATAN KENDAL
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Kendal, Sukodono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			110.000.000,00	KECAMATAN KENDAL
		KELURAHAN JOTANG							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00					24.608.328.231,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00	
	7.01	KECAMATAN							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase kelurahan tertib administrasi Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD Prosentase kelurahan tertib administrasi				80 95.00 95 % % %	95.00 80 95 % % %	4.261.853.000,00	4.096.549.000,00	4.175.210.200,00	-495.853.000,00							3.766.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan				100 % 20 persen	100 % 20 persen	4.261.853.000,00	4.096.549.000,00	4.175.210.200,00	-86.642.800,00			-	- -	Masyarakat		3.766.000.000,00	KECAMATAN KENDAL
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Kendal, Jotang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-			55.000.000,00	KECAMATAN KENDAL
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Kendal, Jotang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-			110.000.000,00	KECAMATAN KENDAL
		KELURAHAN TROMPO							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00	
	7.01	KECAMATAN							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelurahan tertib administrasi Presentase kelurahan tertib administrasi Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD				95 80 95.00 % % %	95 80 95.00 % % %	4.261.853.000,00	4.096.549.000,00	4.175.210.200,00	-495.853.000,00							3.766.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan jumlah keiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan				100 % 20 persen	100 % 20 persen	4.261.853.000,00	4.096.549.000,00	4.175.210.200,00	-86.642.800,00			-	-	Masyarakat		3.766.000.000,00	KECAMATAN KENDAL
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Kendal, Trompo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-			55.000.000,00	KECAMATAN KENDAL
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Kendal, Trompo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-			110.000.000,00	KECAMATAN KENDAL
		KELURAHAN KETAPANG							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00	
	7.01	KECAMATAN							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase kelurahan tertib administrasi Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD Prosentase kelurahan tertib administrasi				95.00 80 95 % % %	95.00 80 95 % % %	4.261.853.000,00	4.096.549.000,00	4.175.210.200,00	-495.853.000,00							3.766.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan jumlah keiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan				100 % 20 persen	100 % 20 persen	4.261.853.000,00	4.096.549.000,00	4.175.210.200,00	-86.642.800,00			-	-	Masyarakat		3.766.000.000,00	KECAMATAN KENDAL
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Ketapang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-			55.000.000,00	KECAMATAN KENDAL
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Ketapang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-			110.000.000,00	KECAMATAN KENDAL
		KELURAHAN KEBONDALEM							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00	
	7.01	KECAMATAN							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelurahan tertib administrasi Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD Presentase kelurahan tertib administrasi				95 95.00 80 % % %	95 80 95.00 % % %	4.261.853.000,00	4.096.549.000,00	4.175.210.200,00	-495.853.000,00							3.766.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan jumlah keiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan				100 % 20 persen	100 % 20 persen	4.261.853.000,00	4.096.549.000,00	4.175.210.200,00	-86.642.800,00			-	-	Masyarakat		3.766.000.000,00	KECAMATAN KENDAL
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	114.000.000,00	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Kendal, Kebondalem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			55.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	86.000.000,00	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Kendal, Kebondalem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			110.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
		KELURAHAN KALIBUNTUWETAN							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00		
	7.01	KECAMATAN							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD Presentase kelurahan tertib administrasi Prosentase kelurahan tertib administrasi				80 95 95.00 % % %	80 95.00 95 % % %	4.261.853.000,00	4.096.549.000,00	4.175.210.200,00	-495.853.000,00							3.766.000.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan				100 % 20 persen	100 % 20 persen	4.261.853.000,00	4.096.549.000,00	4.175.210.200,00	-86.642.800,00			-	- -	Masyarakat		3.766.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Kendal, Kalibutuwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			55.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Kendal, Kalibutuwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			110.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
		KELURAHAN SIJERUK							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00		
	7.01	KECAMATAN							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase kelurahan tertib administrasi Prosentase kelurahan tertib administrasi Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD				95 95.00 80 % % %	95 95 80 % % %	4.261.853.000,00	4.096.549.000,00	4.175.210.200,00	-495.853.000,00							3.766.000.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan				100 % 20 persen	100 % 20 persen	4.261.853.000,00	4.096.549.000,00	4.175.210.200,00	-86.642.800,00			-	- -	Masyarakat		3.766.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Kendal, Sijeruk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			55.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Kendal, Sijeruk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			110.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
		KELURAHAN TUNGGULREJO							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00		
	7.01	KECAMATAN							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelurahan tertib administrasi Presentase kelurahan tertib administrasi Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD				95.00 95 80 % % %	95 95.00 80 % % %	4.261.853.000,00	4.096.549.000,00	4.175.210.200,00	-495.853.000,00							3.766.000.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan				100 % 20 persen	100 % 20 persen	4.261.853.000,00	4.096.549.000,00	4.175.210.200,00	-86.642.800,00			-	- -	Masyarakat		3.766.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-			55.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-			110.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
		KELURAHAN JETIS							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00						24.608.328.231,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00		
	7.01	KECAMATAN							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD Prosentase kelurahan tertib administrasi Presentase kelurahan tertib administrasi				80 95 95.00 % % %	80 95 95.00 % % %	4.261.853.000,00	4.096.549.000,00	4.175.210.200,00	-495.853.000,00							3.766.000.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan jumlah keiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan				100 % 20 persen	100 % 20 persen	4.261.853.000,00	4.096.549.000,00	4.175.210.200,00	-86.642.800,00			-	-	Masyarakat		3.766.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Kendal, Jetis Kab. Kendal, Kendal, Balok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-			55.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Kendal, Jetis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-			110.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
		KELURAHAN BUGANGIN							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00						24.608.328.231,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00		
	7.01	KECAMATAN							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase kelurahan tertib administrasi Prosentase kelurahan tertib administrasi Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD				95 80 95.00 % % %	95.00 95 80 % % %	4.261.853.000,00	4.096.549.000,00	4.175.210.200,00	-495.853.000,00							3.766.000.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan jumlah keiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan				100 % 20 persen	100 % 20 persen	4.261.853.000,00	4.096.549.000,00	4.175.210.200,00	-86.642.800,00			-	-	Masyarakat		3.766.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Kendal, Bugangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-			55.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Kendal, Bugangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-			110.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
		KELURAHAN LANGENHARJO							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00						24.608.328.231,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00		
	7.01	KECAMATAN							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase kelurahan tertib administrasi Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD Prosentase kelurahan tertib administrasi				80 95.00 95 % % %	95.00 80 95 % % %	4.261.853.000,00	4.096.549.000,00	4.175.210.200,00	-495.853.000,00							3.766.000.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan jumlah keiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan				100 % 20 persen	100 % 20 persen	4.261.853.000,00	4.096.549.000,00	4.175.210.200,00	-86.642.800,00			-	-	Masyarakat		3.766.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	103.653.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-33.653.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Langenharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			75.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	96.347.000,00	130.000.000,00	151.261.200,00	54.914.200,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			135.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
		KELURAHAN PEKAUMAN							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00					24.608.328.231,00				
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00		
	7.01	KECAMATAN							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD Prosentase kelurahan tertib administrasi Presentase kelurahan tertib administrasi				95 95,00 80 % % %	80 95 95,00 % % %	4.261.853.000,00	4.096.549.000,00	4.175.210.200,00	-495.853.000,00							3.766.000.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan jumlah keiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan				100 % 20 persen	100 % 20 persen	4.261.853.000,00	4.096.549.000,00	4.175.210.200,00	-86.642.800,00			-	- -	Masyarakat		3.766.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	300.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-200.000.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Pekauman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			55.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Pekauman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			110.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
		KELURAHAN PATUKANGAN							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00					24.608.328.231,00				
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00		
	7.01	KECAMATAN							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelurahan tertib administrasi Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD Presentase kelurahan tertib administrasi				80 95,00 95 % % %	95 80 95,00 % % %	4.261.853.000,00	4.096.549.000,00	4.175.210.200,00	-495.853.000,00							3.766.000.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan jumlah keiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan				100 % 20 persen	100 % 20 persen	4.261.853.000,00	4.096.549.000,00	4.175.210.200,00	-86.642.800,00			-	- -	Masyarakat		3.766.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Patukangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			55.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	120.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Patukangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			110.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
		KELURAHAN PEGULON							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00					24.608.328.231,00				
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00		
	7.01	KECAMATAN							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelurahan tertib administrasi Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD Presentase kelurahan tertib administrasi				95,00 80 95 % % %	95 80 95,00 % % %	4.261.853.000,00	4.096.549.000,00	4.175.210.200,00	-495.853.000,00							3.766.000.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan jumlah keiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan				100 % 20 persen	100 % 20 persen	4.261.853.000,00	4.096.549.000,00	4.175.210.200,00	-86.642.800,00			-	- -	Masyarakat		3.766.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Kendal, Pegulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			55.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Pegulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			110.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
		KELURAHAN BANYUTOWO							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00						24.608.328.231,00			
7		UNSUR KEWILAYAHAN							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00		
	7.01	KECAMATAN							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase kelurahan tertib administrasi Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD Prosentase kelurahan tertib administrasi				95 95,00 80 % % %	95,00 80 95 % % %	4.261.853.000,00	4.096.549.000,00	4.175.210.200,00	-495.853.000,00							3.766.000.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan				100 % 20 persen	100 % 20 persen	4.261.853.000,00	4.096.549.000,00	4.175.210.200,00	-86.642.800,00			-	- -	Masyarakat		3.766.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Kendal, Banyutowo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			55.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Kendal, Banyutowo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			110.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
		KELURAHAN KARANGSARI							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00						24.608.328.231,00			
7		UNSUR KEWILAYAHAN							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00		
	7.01	KECAMATAN							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD Presentase kelurahan tertib administrasi Prosentase kelurahan tertib administrasi				80 95,00 95 % % %	80 95,00 95 % % %	4.261.853.000,00	4.096.549.000,00	4.175.210.200,00	-495.853.000,00							3.766.000.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan				100 % 20 persen	100 % 20 persen	4.261.853.000,00	4.096.549.000,00	4.175.210.200,00	-86.642.800,00			-	- -	Masyarakat		3.766.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Kendal, Karangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			55.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Kendal, Karangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			110.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
		KELURAHAN NGILIR							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00						24.608.328.231,00			
7		UNSUR KEWILAYAHAN							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00		
	7.01	KECAMATAN							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelurahan tertib administrasi Presentase kelurahan tertib administrasi Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD				80 95,00 95 % % %	95 95,00 80 % % %	4.261.853.000,00	4.096.549.000,00	4.175.210.200,00	-495.853.000,00							3.766.000.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan				100 % 20 persen	100 % 20 persen	4.261.853.000,00	4.096.549.000,00	4.175.210.200,00	-86.642.800,00			-	- -	Masyarakat		3.766.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Kendal, Ngilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			55.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Kendal, Ngilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			110.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
		KELURAHAN BANDENGAN								24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00						24.608.328.231,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00		
	7.01	KECAMATAN							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelurahan tertib administrasi Presentase kelurahan tertib administrasi Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD				80 95,00 95 % % %	95 95,00 80 % % %	4.261.853.000,00	4.096.549.000,00	4.175.210.200,00	-495.853.000,00							3.766.000.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan jumlah keiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan				100 % 20 persen	100 % 20 persen	4.261.853.000,00	4.096.549.000,00	4.175.210.200,00	-86.642.800,00			-	- -	Masyarakat		3.766.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Bandengan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			55.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			155.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
		KELURAHAN BALOK								24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00						24.608.328.231,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00		
	7.01	KECAMATAN							24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	-996.223.010,00							24.608.328.231,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelurahan tertib administrasi Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD				95 80 % %	80 95 % %	4.261.853.000,00	4.096.549.000,00	4.175.210.200,00	-495.853.000,00							3.766.000.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan jumlah keiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan				100 % 20 persen	100 % 20 persen	4.261.853.000,00	4.096.549.000,00	4.175.210.200,00	-86.642.800,00			-	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0 Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0	Masyarakat		3.766.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Kendal, Balok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0 Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0			150.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Kendal, Balok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			110.000.000,00	KECAMATAN KENDAL	
		J U M L A H								24.503.380.395,00	25.535.896.185,00	23.507.157.385,00	255.613.053.604,00						24.608.328.231,00		



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN PLANTUNGAN**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN PLANTUNGAN TAHUN 2024**

KECAMATAN PLANTUNGAN

Jl. Suratman No. 10 Plantungan

e-mail : kec.plantungan@kendalkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya pada Pemerintah Kecamatan Plantungan telah dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Plantungan Tahun 2024 dengan lancar tanpa adanya suatu hambatan apapun, juga diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja mulai dari konsep dan rancangan awal hingga penetapan.

Renja Perubahan Kecamatan Plantungan Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Plantungan Tahun 2021-2026 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Plantungan selama 1 (satu) tahun anggaran. Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi riil yang terjadi saat ini, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Tri Wulan II. Selain itu, penyusunan Renja Perubahan ini berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Plantungan tahun 2021-2026.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Plantungan Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu masukan, saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan sehingga penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Plantungan ke depan semakin lebih baik.

Plantungan, 15 Agustus 2024

CAMAT PLANTUNGAN,



M MUCHOROBIN HS, S.H., M.Si.

Penata Tk. I

NIP. 19820919 201101 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
Bab II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah sampai dengan Triwulan II dan Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	31
Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	32
Bab IV Penutup	42
Lampiran-lampiran Rencana Program dan Kegiatan Perubahan OPD Tahun 2024	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mendasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan. Perubahan RKPD Kabupaten Kendal telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penyelarasan dan penyempurnaan sejak tahap penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada arah kebijakan pembangunan tahun 2024, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal pada tahun 2024 adalah “**Kendal Smart City**” yang diprioritaskan pada “Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep *Kendal Smart City*”. Arah kebijakan ini dengan focus peningkatan kemantapan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan *clean*

dan *Good Governances*, penguatan *Smart City* yang difokuskan pada *Smart Government*, *Smart Education*, *Smart Health*, *Smart Economy* dan *Smart Transportation*.

Pembangunan daerah yang menerapkan perencanaan yang SMART dan prinsip *Money Follow Program Priority*, dan *Money Follow Result*, diharapkan mampu untuk lebih mendorong potensi dan keunggulan daerah menuju kemandirian ekonomi daerah. Mendasarkan pada isu global, nasional dan regional.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal

Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);

13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 20).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) adalah sebagai berikut:

1. Maksud

- a. Menjadi pedoman penyusunan RKAP dan DPPA Tahun 2024.
- b. Memberikan acuan dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada anggaran perubahan tahun berjalan;
- c. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun berjalan;
- d. Memberikan acuan bagi OPD dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun berjalan;

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2024 adalah untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi makro sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat

pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dan pendanaan Perangkat Daerah.

BAB IV Penutup

Memuat uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Renstra Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Plantungan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Plantungan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Triwulan II Tahun 2024 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Triwulan II Tahun 2024 telah dilaksanakan dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Plantungan dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 didasarkan pada data yang ada pada Kecamatan Plantungan antara lain :

1. Analisis IKU Kecamatan Plantungan

Faktor pendukung tercapainya nilai SAKIP yaitu :

1. Komitmen Pimpinan kunci keberhasilan nilai SAKIP
2. Adanya koordinasi yang melibatkan semua kepala seksi, kepala subbagian dan aparatur Kecamatan dalam hal penataan administrasi perkantoran
3. manajemen kinerja dalam mendukung efektivitas
4. evaluasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja

Faktor penghambat tercapainya nilai SAKIP yaitu :

1. Data dan dokumen pendukung perencanaan yang belum memadai.
2. Dokumen tidak disimpan dengan baik dan benar
3. Regulasi tentang perencanaan yang selalu mengalami perubahan / dinamis.

Faktor pendukung tercapainya nilai IKM yaitu :

1. Komitmen Pimpinan kunci keberhasilan tercapainya nilai IKM
2. Kemudahan akses terhadap layanan yang diberikan, termasuk lokasi dan waktu pelayanan.
3. Kecepatan dalam memproses permintaan atau penyelesaian pelayanan, serta efisiensi dalam penyampaian hasil.
4. Kepastian bahwa pelayanan akan diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan konsistensi dalam penerapan pelayanan.

Faktor penghambat tercapainya nilai IKM yaitu :

1. Kurang informatif, informasi kurang tersebar luas kepada masyarakat
2. Tanpa tindakan perbaikan yang jelas, masyarakat mungkin merasa bahwa survei tidak memberikan dampak yang nyata.
3. Kesalahan dalam pengumpulan atau pencatatan data dapat menyebabkan hasil survei yang tidak akurat.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2024 Kecamatan Plantungan, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan

program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Kecamatan Plantungan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II, dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.533.503.699,- (Dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sedangkan untuk realisasi pelaksanaan program dan kegiatan telah menyerap Anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 1.390.672.344,- (Satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) atau dengan penyerapan anggaran 54.38%. Capaian target kinerja dan keuangan Kecamatan Plantungan selama Triwulan II masih belum menampakkan kinerja yang maksimal hal ini dikarenakan ada beberapa faktor penghambat.

Ada 10 program, 13 kegiatan dan 32 sub kegiatan. Pada program/kegiatan tersusebu ada yang realisasinya belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai yang direncanakan. Tapi ada juga yang memenuhi bahkan melebihi, seperti yang diuraikan dibawah ini sekaligus faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, kemudian implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah serta Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun gambaran lebih lengkap mengenai realisasi pencapaian kinerja Kecamatan Plantungan Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II,

berdasarkan Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Plantungan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

1.1.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

Pencapaian kinerja sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha adalah jumlah kegiatan pembinaan penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan yang dilaksanakan 3 kegiatan dengan anggaran penetapan Rp. 3.802.400 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 0 atau 0%, karena kegiatan belum dilaksanakan

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN

2.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

2.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum

Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Pencapaian kinerja sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa adalah jumlah desa yang melaksanakan kegiatan musrenbangcam, jumlah 12 desa dengan anggaran penetapan Rp. 520.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 0,- atau 0%, karena anggaran tersebut digunakan untuk ATK sedangkan pada saat pelaksanaan

kegiatan anggaran ATK ikut dalam kegiatan di sekretariat.

2.1.2. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan.

Pencapaian kinerja sub kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan adalah jumlah kegiatan Kendal Expo 1 kegiatan dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 9.978.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 6.678.000,- atau 66,93%;

2.1.3. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Pencapaian kinerja sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan adalah jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, jumlah 4 laporan dengan anggaran penetapan Rp. 10.300.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 3.120.000,- atau 30,29%, kegiatan akan dilanjutkan di semester II.

3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

3.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaran Ketenteraman dan Keteriban Umum

3.1.1. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Pencapaian kinerja sub kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, jumlah 12 laporan dengan anggaran penetapan Rp. 7.074.800,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 0,- atau 0%, karena kegiatan akan dilaksanakan di semester II.

3.2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

3.2.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pencapaian kinerja sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, jumlah 12 laporan dengan anggaran penetapan Rp. 100.510.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 60.295.398,- atau 60%

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

4.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah

4.1.1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara

Pencapaian kinerja sub kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara adalah jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, jumlah 180 orang dengan anggaran penetapan Rp. 4.854.800,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp.4.800.000,- atau 98,87%.

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

5.1. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

5.1.1. Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Pencapaian kinerja sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa adalah jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, jumlah 3 dokumen dengan anggaran penetapan Rp. 470.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 0,- atau 0%, karena anggaran tersebut digunakan untuk ATK sedangkan pada saat pelaksanaan kegiatan anggaran ATK ikut dalam kegiatan di sekretariat.

5.1.2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Pencapaian kinerja sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa adalah jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, jumlah 3 dokumen dengan anggaran penetapan Rp. 1.010.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 0,- atau 0%, karena anggaran tersebut digunakan untuk ATK sedangkan pada saat pelaksanaan kegiatan anggaran ATK ikut dalam kegiatan di sekretariat.

5.1.3. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pencapaian kinerja sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, jumlah 1 dokumen dengan anggaran penetapan Rp. 600.000,- dengan realisasi sampai dengan

Triwulan II sebesar Rp. 0,- atau 0%, kegiatan tersebut ditiadakan.

5.1.4. Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Pencapaian kinerja sub kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan adalah jumlah dokumen fasilitas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan, jumlah 4 dokumen dengan anggaran penetapan Rp. 400.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 0,- atau 0%, karena anggaran tersebut digunakan untuk ATK sedangkan pada saat pelaksanaan kegiatan anggaran ATK ikut dalam kegiatan di sekretariat.

5.1.5. Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga

Pencapaian kinerja sub kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga adalah jumlah dokumen fasilitas dalam rangka kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga, jumlah 2 dokumen dengan anggaran penetapan Rp. 240.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 0,- atau 0%, karena anggaran tersebut digunakan untuk ATK sedangkan pada saat pelaksanaan kegiatan anggaran ATK ikut dalam kegiatan di sekretariat.

6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

6.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia sebanyak 4 dokumen dengan anggaran penetapan Rp. 3.450.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 0,- atau 0% karena kegiatan makan minum rapat dipindahkan ke rekening Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD

6.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

kinerja sub kegiatan Pencapaian kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah Jumlah laporan capaian kinerja yang tersedia sebanyak 6 laporan dengan anggaran penetapan Rp. 1.259.800,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 0,- atau 0%. karena kegiatan akan dilaksanakan di semester II.

6.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

6.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN, jumlah 13 orang dengan anggaran penetapan Rp. 1.903.707.959,- dengan realisasi sampai dengan

Triwulan II sebesar Rp. 1.390.672.344,- atau 54,38%.

6.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN adalah jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, jumlah 12 dokumen dengan anggaran penetapan Rp. 82.640.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 44.240.000,- atau 53,53%.

6.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

6.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan, jumlah 12 paket dengan anggaran penetapan Rp. 3.070.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 1.181.900,- atau 38%, kegiatan akan dilanjutkan di semester II.

6.3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan, jumlah 28 paket dengan anggaran penetapan Rp. 28.471.500,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 6.753.200,- atau 23,7%, kegiatan akan dilanjutkan di semester II.

6.3.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga adalah jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan, jumlah 9 paket dengan anggaran penetapan Rp. 12.010.400,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 2.074.500,- atau 17,27%, kegiatan akan dilanjutkan di semester II.

6.3.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan, jumlah 5 paket dengan anggaran penetapan Rp. 9.356.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 1.737.000,- atau 18,57%, kegiatan akan dilanjutkan di semester II.

6.3.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pencapaian kinerja sub Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan, jumlah 7 paket dengan anggaran penetapan Rp. 23.006.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 5.066.000,- atau 22%, kegiatan akan dilanjutkan di semester II.

6.3.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, jumlah 12 laporan dengan anggaran penetapan Rp. 188.720.000,- dengan

realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 58.867.000,- atau 31%, kegiatan akan dilanjutkan di semester II.

6.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

6.4.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pencapaian kinerja sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan, jumlah 2 unit dengan anggaran penetapan Rp. 24.000.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 0,- atau 0%, anggaran akan dialihkan pada kegiatan lain

6.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6.5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat, jumlah 12 laporan dengan anggaran penetapan Rp. 3.620.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 800.000,- atau 22%, kegiatan akan dilanjutkan di semester II.

6.5.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan, jumlah 12 laporan dengan anggaran penetapan Rp 25.500.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 15.208.326,- atau 60%.

6.5.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan, jumlah 12 laporan dengan anggaran penetapan Rp. 58.340.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 36.996.932,- atau 63%.

6.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya, jumlah 11 unit dengan anggaran penetapan Rp. 18.150.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 8.313.000,- atau 46%.

6.6.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya, jumlah 11 unit dengan anggaran penetapan Rp. 4.200.000,-

dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 1.209.000,- atau 29%, kegiatan akan dilanjutkan di semester II.

6.6.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pencapaian kinerja sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi, jumlah 3 unit dengan anggaran penetapan Rp. 16.692.040,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 10.119.400,- atau 61%.

6.6.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pencapaian kinerja sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi, jumlah 3 unit dengan anggaran penetapan Rp. 5.100.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 2.100.000,- atau 41%.

6.6.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pencapaian kinerja sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi, jumlah 2

unit dengan anggaran penetapan Rp. 6.450.000,-
dengan realisasi sampai dengan Triwulan II
sebesar Rp. 3.330.000- atau 51%.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Plantungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah							
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi kinerja Perangkat Daerah							
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah tersusunnya dokumen perencanaan	4	4	2	50	4	4	100
7.01.01.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	6	6	0	0	6	6	100

	Kinerja SKPD								
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun							
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terbayar gaji dan tunjangan ASN	14	14	7	50	14	14	100
7.01.01.2.02.05	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas	12	12	6	50	12	12	100
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas harian dan emblem/ID card yang tersedia							
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian beserta atributnya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	20	15	0	0	0	15	100
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor							
7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12	12	6	50	12	12	100
7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	6	50	12	12	100
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan tersedianya peralatan rumah tangga	12	12	6	50	12	12	100
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah bulan tersedianya makan minum rapat	12	12	6	50	12	12	100

7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12	12	6	50	12	12	100
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan tersedianya bahan bakar minyak dan biaya perjalanan dinas dalam serta luar daerah	12	12	6	50	12	12	100
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	Jumlah aset yang diadakan							
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia	1	0	0	0	5	5	100
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor							
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang terpenuhi	420	430	210	50	430	430	100
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya jasa telp, air, internet dan listri	12	12	6	50	12	12	100
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan tersedianya honor tenaga penunjang	12	12	6	50	12	12	100
7.01.01.2.09	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis aset yang dipelihara							

7.01.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diservis dan diganti suku cadang	15	15	7	50	15	15	100
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Pajak Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas dan suku cadang yang tersedia dan terbayarnya pajak/STNK kendaraan dinas	15	15	7	50	15	15	100
7.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah kegiatan pengelolaan/pemeliharaan website kecamatan	0	1	0	0	0	1	100
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	3	1	50	3	3	100
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (Av/pendingin ruangan, sound system, genset)	3	3	1	50	3	3	100
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan gedung kantor (PC/laptop/printer)	2	2	1	50	2	2	100
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan							

7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan							
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah kegiatan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	3	3	1	50	3	12	100
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD							
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah koordinasi yang dilaksanakan							
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah desa yang melaksanakan musrenbang	12	12	6	50	12	12	100
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang diusulkan untuk pemerintah dan swasta	1	1	0	0	1	1	100
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan, penyuluhan dan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8	8	4	50	8	8	100

7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani							
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	jumlah koordinasi yang dilaksanakan							
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	jumlah bulan koordinasi yang dilaksanakan	12	12	6	50	12	12	100
7.01.04.2.02	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum							
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	4	3	1	50	4	4	100
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani							

7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah dokumen urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah							
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	120	120	0	0	120	120	100
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu							
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes							
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12	12	6	50	12	12	100

7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	12	6	50	12	12	100
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12	12	6	50	12	12	100
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	12	12	6	50	12	12	100

2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 tidak memasukkan usulan dari masyarakat yang disampaikan lewat kegiatan Musrenbangcam, karena program/kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan bersifat rutin dan tugas pokok yang dilakukan bersifat koordinatif dan pembinaan. Sedangkan usulan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat bersifat fisik.

Usulan program/ kegiatan dari masyarakat merupakan hasil aspirasi dalam forum musrenbang dengan memperhatikan tugas dan fungsi, rencana strategis perangkat daerah. Serta isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut apabila ada, dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun rancangan Perubahan renja Kecamatan yang nantinya dibahas dalam forum perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Baperlitbang.

Dalam Menyusun Usulan Perubahan Renja Kecamatan Plantungan tidak mendapat usulan aspirasi dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD untuk tahun anggaran 2024. Usulan yang berasal dari masyarakat tersebut selanjutnya ditampung dalam Daftar Usulan Prioritas Kegiatan yang kemudian disampaikan dalam Musrenbangkab. Program/kegiatan yang berasal dari masyarakat tersebut diperjuangkan dan dikawal oleh Tim Kecamatan agar masuk dalam program/kegiatan prioritas di OPD teknis terkait yang ada di Kabupaten Kendal.

Tabel 2.2
Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat pada Perubahan
Tahun 2024 Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Plantungan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	N I H I L				

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan sebagai penjabaran misi yang pertama seperti tersebut diatas, maka tujuan yang ditetapkan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Plantungan pada tahun 2024 yaitu untuk mengacu pada arah kebijakan pembangunan tahun 2024, Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2024 “**Kendal Smart City**” yang diprioritaskan pada “Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal *Smart City*”. Arah kebijakan ini dengan focus peningkatan kemantapan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan *clean* dan *Good Governances*, penguatan *Smart City* yang difokuskan pada *Smart Government*, *Smart Education*, *Smart Health*, *Smart Economy* dan *Smart Transportation*.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka Rencana Kerja dan Pendanaan yang diusulkan pada Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Plantungan Tahun 2024 terdiri dari 6 program dan 12 kegiatan, dengan nominal anggaran penetapan sebesar Rp. 2.557.503.699,- berkurang Rp. 111.740.000,-, sehingga menjadi Rp. 2.445.763.699,-. Adapun program/kegiatan yang diusulkan Perubahan APBD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Yang dijabarkan dalam subkegiatan:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp. 3.450.000,- berkurang Rp. 2.980.000,- menjadi Rp. 470.000,- karena kegiatan makan minum rapat

- dipindahkan ke rekening Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD;
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp. 1.259.800,- berkurang Rp. 1.140.000,- menjadi Rp. 119.800,- karena kegiatan makan minum rapat dipindahkan ke rekening Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD;
 - c. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 1.903.707.959,- berkurang Rp. 170.000.000,- menjadi Rp. 1.733.707.959,- karena ada menyesuaikan dengan kebutuhan pegawai yang ada;
 - d. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebesar Rp. 82.640.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan;
 - e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 3.070.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan;
 - f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan Anggaran Penetapan sebesar Rp. 28.471.500,- berkurang Rp. 9.944.000,- menjadi Rp. 18.527.500,- besaran anggaran telah disesuaikan dengan kebutuhan di anggaran perubahan;
 - g. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan Anggaran Penetapan Rp. 12.010.400,- berkurang Rp. 800.000,- menjadi Rp. 11.210.400,- besaran anggaran telah disesuaikan dengan kebutuhan di anggaran perubahan;
 - h. Penyediaan Logistik Kantor, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 9.356.000,- berkurang Rp. 2.514.000,- menjadi Rp. 6.842.000,- besaran anggaran telah disesuaikan dengan kebutuhan di anggaran perubahan;
 - i. Penyediaan barang cetakan dan Pengadaan Rp. 23.006.000,- berkurang Rp. 7.870.000,- menjadi Rp. 15.136.000,- besaran anggaran telah disesuaikan dengan kebutuhan di anggaran perubahan;

- j. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 188.720.000,- berkurang Rp. 5.631.000,- menjadi Rp. 183.089.000,- besaran anggaran telah disesuaikan dengan kebutuhan di anggaran perubahan;
- k. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya , dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 24.000.000,- berkurang Rp. 24.000.000,- menjadi Rp. 0,- karena dipindahkan menjadi kegiatan lainnya;
- l. Penyediaan jasa surat menyurat dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 3.620.000,- berkurang Rp. 1.220.000,- menjadi Rp. 2.400.000,- besaran anggaran telah disesuaikan dengan kebutuhan di anggaran perubahan;
- m. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 25.500.000,- bertambah Rp. 1.209.000,- menjadi Rp. 26.709.000,- besaran anggaran telah disesuaikan dengan kebutuhan di anggaran perubahan
- n. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 58.340.000,- bertambah Rp. 5.260.000,- menjadi Rp. 63.600.000,- besaran anggaran telah disesuaikan dengan kebutuhan di anggaran perubahan;
- o. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 18.150.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan;
- p. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, anggaran penetapan sebesar Rp. 4.200.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan;
- q. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya anggaran penetapan sebesar Rp. 16.692.040,- bertambah Rp. 1.200.000,- menjadi Rp. 17.892.040,-

besaran anggaran telah disesuaikan dengan kebutuhan di anggaran perubahan;

- r. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya anggaran penetapan sebesar Rp. 5.100.000,- bertambah Rp. 19.260.000,- menjadi Rp. 24.360.000,- besaran anggaran telah disesuaikan dengan kebutuhan di anggaran perubahan;
- s. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya anggaran penetapan sebesar Rp. 6.450.000,- bertambah Rp. 690.000,- menjadi Rp. 7.140.000,- besaran anggaran telah disesuaikan dengan kebutuhan di anggaran perubahan;

2) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

yang dijabarkan dalam subkegiatan:

- a. Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan, anggaran penetapan sebesar Rp. 3.802.400,- berkurang Rp. 3.600.000,- menjadi Rp. 202.400,- besaran anggaran telah disesuaikan dengan kebutuhan di anggaran perubahan;

3) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

yang dijabarkan dalam subkegiatan:

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa, anggaran penetapan RP. 520.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.
- b. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan anggaran penetapan RP. 9.978.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.

- c. Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 10.300.000,- bertambah Rp. 18.900.000,- menjadi Rp. 29.200.000,- karena besaran anggaran telah disesuaikan dengan kebutuhan di anggaran perubahan;
- 4) PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- yang dijabarkan dalam subkegiatan:
- a. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 10.300.000,- bertambah Rp. 7.074.800,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.
 - b. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 100.510.000,- bertambah Rp. 7.890.000,- menjadi Rp. 108.400.000,- karena besaran anggaran telah disesuaikan dengan kebutuhan di anggaran perubahan
- 5) PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
- a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 4.854.800,- bertambah Rp. 12.000.000,- menjadi Rp. 16.854.800,- karena besaran anggaran telah disesuaikan dengan kebutuhan di anggaran perubahan

6) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Yang dijabarkan dalam subkegiatan:

- a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dengan anggaran penetapan Rp. 470.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.
- b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan anggaran sebesar Rp. 1.010.000,- bertambah Rp. 52.150.000,- menjadi Rp. 53.160.000,- karena besaran anggaran telah disesuaikan dengan kebutuhan di anggaran perubahan
- c. Fasilitasi Pelaksanaan Kepala Desa dengan anggaran sebesar Rp. 600.000,- berkurang Rp. 600.000,- menjadi Rp. 0,- karena kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan
- d. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp. 400.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.
- e. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga dengan anggaran sebesar Rp. 240.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.

Pada prinsipnya bahwa semua perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Kecamatan Plantungan baik menyangkut Rencana Kinerja maupun Rencana Anggaran Perubahan pada tahun 2024 ini dilaksanakan secara partisipatif dengan meminta masukan dan saran dari masing-masing seksi dan sekretariat untuk dirumuskan bersama berdasarkan Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Plantungan, yang kemudian dituangkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Plantungan dan diajukan untuk disahkan oleh Bupati Kendal

Pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam perjanjian kinerja Kecamatan Plantungan Tahun 2024, didanai dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Kendal Tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kecamatan Plantungan Tahun 2024.

Tabel 3.1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Plantungan Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)			
								Target 2024							
								Sebelum	Sesudah	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
1	2					3	4	8	9	11	12	13			
						KECAMATAN PLANTUNGAN							2.557.503.699	2.445.763.699	- 111.734.000
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							2.557.503.699	2.445.763.699	- 111.734.000
	7	01				KECAMATAN							2.557.503.699	2.445.763.699	- 111.734.000
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							2.417.743.699	2.219.263.699	- 198.480.000
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							4.709.800	589.800	- 4.120.000
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	3.450.000	470.000	- 2.980.000			
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.259.800	119.800	- 1.140.000			
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1.986.347.959	1.816.347.959	- 170.000.000
	7	01	01	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1.903.707.959	1.733.707.959	- 170.000.000
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
							Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	82.640.000	82.640.000	-
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				264.633.900	237.874.900	- 26.759.000
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	3.070.000	3.070.000	-
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	28.471.500	18.527.500	- 9.944.000
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12.010.400	11.210.400	- 800.000
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	9.356.000	6.842.000	- 2.514.000

	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	23.006.000	15.136.000	- 7.870.000
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	188.720.000	183.089.000	- 5.631.000
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			24.000.000	0	- 24.000.000
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	24.000.000	0	- 24.000.000
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			87.460.000	92.709.000	5.249.000
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	3.620.000	2.400.000	- 1.220.000
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	25.500.000	26.709.000	1.209.000
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	58.340.000	63.600.000	5.260.000

	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				50.592.000	71.742.040	21.150.040
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
							Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	11 Unit	11 Unit	18.150.000	18.150.000	-
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	4.200.000	4.200.000	-
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	16.692.040	17.892.040	1.200.000
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	5.100.000	24.360.000	19.260.000
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	6.450.000	7.140.000	690.000
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				3.802.400	202.400	3.600.000

	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	3.802.400	202.400	3.600.000
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.802.400	202.400	3.600.000
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				20.798.000	39.698.000	18.900.000
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12 kali	12 kali	20.798.000	39.698.000	18.900.000
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	520.000	520.000	-
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan						
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	9.978.000	9.978.000	-
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						

							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	10.300.000	29.200.000	18.900.000	
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					107.584.800	115.474.800	7.890.000
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					107.584.800	115.474.800	7.890.000
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat							
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6 Laporan	6 Laporan	7.074.800	7.074.800	-	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					100.510.000	108.400.000	7.890.000
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia							
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	100.510.000	108.400.000	7.890.000	
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					4.854.800	16.854.800	12.000.000
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan	120 orang	120 orang	4.854.800	16.854.800	12.000.000	

						UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				2.720.000	54.270.000	51.550.000		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				2.720.000	54.270.000	51.550.000		
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa								
							Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	470.000	470.000	-		
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa								
							Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	1.010.000	53.160.000	52.150.000		
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa								
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	600.000	0	- 600.000		
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan								

							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	12 Dokumen	400.000	400.000	-
	7	01	06	2.01	0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga						
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	12 Dokumen	12 Dokumen	240.000	240.000	-

BAB IV

PENUTUP

Renja Perubahan Kecamatan Plantungan Tahun 2024 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Plantungan itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Plantungan dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Renja Perubahan Kecamatan Plantungan Tahun 2024 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Perencanaan Kabupaten Kendal, sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran berkenaan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Plantungan Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Penetapan maupun Perubahan Kecamatan Plantungan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kendal;
2. Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Plantungan ini berpedoman pada Renstra Kecamatan Plantungan Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja.
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Plantungan ini juga berpedoman pada RKPD Perubahan Kabupaten Kendal Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Plantungan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Plantungan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Plantungan Tahun 2024;

2. Dalam penyusunan RKAP nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kendal. Begitu pula dalam penyusunan DPPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Kendal;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Plantungan Tahun 2024.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal pada tahun 2024 adalah “**Kendal Smart City**” yang diprioritaskan pada “Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal *Smart City*”. Arah kebijakan ini dengan focus peningkatan kemantapan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan *clean* dan *Good Governances*, penguatan *Smart City* yang difokuskan pada *Smart Government*, *Smart Education*, *Smart Health*, *Smart Economy* dan *Smart Transportation*.

Pembangunan daerah yang menerapkan perencanaan yang SMART dan prinsip Money Follow Program Priority, dan Money Follow Result, diharapkan mampu untuk lebih mendorong potensi dan keunggulan daerah menuju kemandirian ekonomi daerah. Mendasarkan pada isu global, nasional dan regional.

Berdasarkan arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2024, Kecamatan Plantungan menetapkan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja dengan fokus kinerja aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan pada Kecamatan Plantungan
2. Peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap aparatur desa melalui pembinaan SDM dan kelembagaan / administrasi diprioritaskan kepada Aparatur desa yang kurang memahami tugas dan fungsi
3. Peningkatan pelaksanaan kewenangan Bupati kepada Camat diprioritaskan kepada pembinaan dan pendampingan penyusunan APBDes, LPPDes serta pemantauan aset Pemda dan aset desa.

4. Peningkatan kinerja pelayanan publik difokuskan pada penilaian SKM.

Demikian untuk menjadikan periksa dan apabila dalam penyusunan Renja Perubahan ini masih banyak kekurangan, kami mohon sarannya untuk perbaikan di tahun yang akan datang.

Plantungan, 15 Agustus 2024



M MUCHOROBIN HS, S.H., M.Si.

Pejabat Tk. I

NIP. 19820919 201101 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

KECAMATAN CEPIRING

Jl. Raya Karangayu No. 59 Cepiring Telp./Fax. (0294) 381414 KP 51352

e-mail:kec.cepiring@kendalkab.go.id

Cepiring, 26 September 2024

Kepada Yth

Kepala Baperlitbang

Setda Kendal

di –

KENDAL

SURAT PENGANTAR

Nomor : 000.7.2 / 112 /Cep

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Perubahan Renja Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cepiring Tahun 2024	1 (satu) bendel	Dikirim untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN CEPIRING
Drs. DWI CAHYONO SURYO M.A.P.
Pembina Tk. I
NIP. 19690418 199009 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN
CEPIRING
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KECAMATAN CEPIRING
KABUPATEN KENDAL
Jl. Raya Karangayu No. 59 Cepiring
Telp. (0294) 381414**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Cepiring Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Cepiring Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Cepiring untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Cepiring Tahun 2021-2026, dan juga disajikan sebagai pedoman dalam Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 di Kecamatan Cepiring. Dokumen ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Cepiring ini berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 serta Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cepiring Tahun 2021 – 2026.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparat terkait di Kecamatan Cepiring, yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Cepiring Tahun 2024 ini. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih ada kekurangan oleh karena itu kami mohon saran untuk penyempurnaan Renja di tahun yang akan datang.


 Pdt. CAMAT CEPILING
Drs. DWI CAHYONO SURYO M.A.P
 Pembina Tk. I
 NIP. 19690418 199009 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	III
Daftar Isi	IV
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
Bab II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan	6
2.1. Hasil Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.	26
Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	27
Bab IV Penutup	30
Lampiran :	
1. SK TIM Renja 2024 Kecamatan Cepiring	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cepiring Tahun 2024 mengacu pada konsep Renstra Kecamatan Cepiring tahun 2021-2026. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sudah memperhatikan prioritas RPJMD tahun 2021-2026 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kendal. Renja tahun 2024 juga memperhatikan RPJPD (2005-2025), prioritas Nasional tahun 2024 dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cepiring Tahun 2024 disusun sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang akan ditetapkan dalam Rencana Strategis 2021-2026 yaitu guna mendukung pencapaian visi-misi Bupati Kendal yaitu “ Visi pembangunan jangka menengah daerah adalah untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah yaitu *“Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan ”*.

Selanjutnya, karena berfungsi sebagai dokumen publik yang memuat daftar rencana program kegiatan tahun 2024, maka proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal ini juga dilakukan secara *top down* dan *bottom up*, yaitu memadukan antara hasil kajian prioritas kebutuhan program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah atasan baik melalui Renstra Kecamatan Cepiring maupun RPJMD Kabupaten Kendal, yang secara otomatis Renja 2024 harus masuk dalam Renstra 2021-2026.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Rencana Kerja Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan dan program kegiatan Perangkat Daerah. Sebagai rencana operasional, Renja

merupakan pedoman dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal ini, peraturan yang dipergunakan sebagai landasan hukum, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 Tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat 2 Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198).
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 nomor 20).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Tahun 2024 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana program dan kegiatan prioritas pada tahun 2024. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cepiring ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Pemerintah Kecamatan Cepiring dalam menentukan prioritas program dan kegiatan/penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2024;
2. Menyediakan pedoman resmi bagi Pemerintah Kecamatan Cepiring dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan Kecamatan Cepiring tahun 2024;

3. Menyediakan satu acuan bagi Pemerintah Kecamatan Cepiring dalam penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Tahun Anggaran 2024;
4. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan Kecamatan Cepiring dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis;
5. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Pemerinah Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I :Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Pada bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah beserta dana yang dibutuhkan

Bab IV : Penutup

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Renstra Perangkat Daerah

Kualitas Rancangan Akhir Perubahan Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal tahun yang lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Kecamatan Cepiring dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Secara rinci rekapitulasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2024. Hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja sampai dengan triwulan II. Adapun kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun 2024 dan diusulkan kembali pada Renja tahun 2025 antara lain :

1. Realisasi Program/ kegiatan/ sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang telah ditetapkan

Program/ kegiatan yang memenuhi dan/ atau melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang telah ditetapkan adalah :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

1) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang meliputi sub kegiatan :

a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, tidak tercapai karena sub kegiatan belum tercukupi anggarannya (sub kegiatan akan dilaksanakan pada perubahan anggaran);

2. Realisasi Program/ kegiatan yang memenuhi target dan/atau melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang telah ditetapkan

Program/ kegiatan yang memenuhi dan/ atau melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang telah ditetapkan adalah :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang meliputi sub kegiatan:

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut:

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik ;

- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 3) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Indikator Kinerja Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan Kecamatan dengan target kinerja 100%, realisasi kinerja 100% yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di

Kecamatan yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
- c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - 1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
- d) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 1) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Indikator Kinerja yang dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
3. Realisasi Program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang telah ditetapkan
 Program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang telah ditetapkan nihil.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, tercapainya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan
 - a) Faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target kegiatan antara lain :
 - 1) Adanya Surat Edaran Pembatasan Dalam Penyusunan RKA seluruh Perangkat Daerah se- Kabupaten Kendal;
 - 2) Terjadi pergeseran rencana pelaksanaan kegiatan ke triwulan IV tahun 2024;
 - b) Faktor yang mendukung tercapainya kegiatan karena adanya komitmen semua pihak untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, sebagai bagian untuk pencapaian perjanjian kinerja perangkat daerah.
 - c) Faktor yang menjadi penyebab melebihinya target kinerja program/ kegiatan adalah nihil
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
 - a) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah secara umum mencapai target yang telah ditetapkan, meskipun

demikian guna meningkatkan pelayanan Kecamatan Kangkung, perlu ditingkatkan pelaksanaan kegiatan yang langsung mendukung implementasi e-government, bersentuhan dengan kebutuhan layanan kepada masyarakat.

6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor penghambat adalah dengan perencanaan dan penganggaran yang mendukung percepatan Pelayanan Kecamatan Cepiring antara lain :

- a) pengajuan penambahan kekurangan anggaran pada perubahan RKPD untuk kegiatan-kegiatan yang kurang anggaran pada penetapan anggaran;
- b) pergeseran anggaran antar kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan perubahan kebijakan/ prioritas.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2024 Kecamatan Cepiring, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

➤ Analisis IKU Kecamatan Cepiring

Faktor pendukung tercapainya nilai SAKIP ada beberapa faktor yaitu :

- a. Komitmen Pimpinan Kunci Keberhasilan SAKIP
- b. Adanya koordinasi yang melibatkan semua kepala seksi, kepala subbagian dan aparatur Kecamatan dalam hal penataan administrasi perkantoran
- c. Manajemen kinerja dalam mendukung efektivitas

Faktor penghambat tercapainya nilai SAKIP ada beberapa faktor yaitu :

- a. Keterbatasan peralatan dan fasilitas kantor pendukung pelaksanaan pekerjaan.
- b. Data dan dokumen pendukung perencanaan yang belum memadai.
- c. Regulasi tentang perencanaan yg selalu mengalami perubahan.

Faktor pendukung tercapainya nilai IKM ada beberapa faktor yaitu :

- a. Komitmen Pimpinan Kunci Keberhasilan tercapainya Nilai IKM
- b. Kecepatan dalam memproses permintaan atau penyelesaian layanan, serta efisiensi dalam penyampaian hasil.
- c. Kepastian bahwa layanan akan diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan konsistensi dalam penerapan layanan.

Faktor penghambat tercapainya nilai IKM ada beberapa faktor yaitu :

- a. Keterbatasan peralatan dan fasilitas kantor pendukung pelaksanaan pekerjaan.
- b. Kurang informatif; informasi kurang tersebar luas kepada masyarakat
- c. Tanpa tindakan perbaikan yang jelas, masyarakat mungkin merasa bahwa survei tidak memberikan dampak yang nyata.

Kecamatan Cepiring Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II, dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.735.408.060,00,- (Dua milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan ribu rupiah) sedangkan untuk realisasi pelaksanaan program dan kegiatan telah menyerap Anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 1.379.825.286,- (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) atau dengan penyerapan anggaran 50.44%. Capaian target kinerja

dan keuangan Kecamatan Cepiring selama Triwulan II masih belum menampakkan kinerja yang maksimal hal ini dikarenakan ada beberapa faktor penghambat.

Ada Program/Kegiatan yang Realisasinya tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran sesuai yang direncanakan. Tapi ada juga yang memenuhi bahkan melebihi, seperti yang diuraikan dibawah ini sekaligus Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, kemudian Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah serta Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun gambaran lebih lengkap mengenai realisasi pencapaian kinerja Kecamatan Cepiring Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II, berdasarkan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cepiring Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja : Prosentase unit kerja yang terlayani dengan target kinerja 100%, realisasi kinerja 51,17 % yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, realisasi capaian kinerja dijabarkan dalam sub kegiatan:
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Indikator Kinerja Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Target Kinerja 18 Orang/bulan dengan anggaran penetapan Rp. 2.242.268.713,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 1.207.819.107,- atau 53.87%

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor, target kinerja 100% , realisasi capaian kinerja 33.33 % yang dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Kinerja adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Target Kinerja 12 Paket dengan anggaran penetapan Rp. 5.071.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 1.760.000,- atau 34.71%
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Indikator Kinerja adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Target Kinerja 12 Paket dengan anggaran penetapan Rp. 15.818.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 7.143.000,- atau 45.16%.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor , Indikator Kinerja adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Target Kinerja 12 Paket dengan anggaran penetapan Rp.11.900.000,- , dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp.3.122.000,- atau 26.24%.
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Indikator Kinerja adalah Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Target Kinerja 12 Paket dengan anggaran penetapan Rp. 12.900.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp.1.868.000,- atau 14.48%.
- 5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Indikator Kinerja adalah

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Target Kinerja 12 Laporan dengan anggaran penetapan Rp.134.118.663,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 46.033.555,- atau 34.32%.

c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Indikator Kinerja Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan dengan Target Kinerja 3 Unit, realisasi capaian Kinerja 1 Unit, yang di jabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Indikator Kinerja adalah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Target Kinerja 1 unit dengan anggaran penetapan Rp. 15.096.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 4.620.000,- atau 30.60%.

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Indikator Kinerja Jumlah bulan tersedianya jasa kantor dengan target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 35.77% yang dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat, Indikator Kinerja adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Target Kinerja 12 Laporan dengan anggaran penetapan Rp. 5.000.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 2.250.000,- atau 45%.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Indikator Kinerja Jumlah bulan kebutuhan layanan listrik, telepon, air dan hosting/internet, dengan target kinerja adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Target Kinerja 12 Laporan dengan

anggaran penetapan Rp.57.707.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp.26.704.344,- atau 46.28%.

- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Indikator Kinerja adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Target Kinerja 12 Laporan dengan anggaran penetapan Rp.39.056.200,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp.13.972.000,- atau 35.77%.

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Indikator kinerja Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, dengan target kinerja 12 unit, realisasi capaian kinerja 27.94% yang dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Indikator Kinerja adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Target Kinerja 15 Unit dengan anggaran penetapan Rp. 43.598.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp.16.794.250,- atau 38.52%.
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya, Indikator Kinerja adalah Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara Target Kinerja 1 unit dengan anggaran penetapan Rp. 16.514.484,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp.0,- atau 0%.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Indikator Kinerja Prosentase pelaksanaan

pelimpahan kewenangan Kecamatan dengan target kinerja 100%, realisasi kinerja 100 % yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat, Indikator Kinerja dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, Indikator kinerja adalah jumlah kegiatan sosialisasi bidang paten Target Kinerja 1 Kegiatan dengan anggaran penetapan Rp. 150.000, dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp.0,- atau 0%.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Indikator Kinerja Prosentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD dengan target kinerja 100%, realisasi kinerja 22.43% yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Indikator Kinerja Jumlah kegiatan pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan, target kinerja dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

1) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, Indikator Kinerja adalah Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Target Kinerja 7 Lembaga dengan anggaran penetapan Rp. 8.150.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp.8.076.000,- atau 99.09%.

2) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, Indikator Kinerja adalah Jumlah Laporan

Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Target Kinerja 6 Laporan dengan anggaran penetapan Rp.27.860.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp.0,- atau 0%.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Indikator kinerja prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani dengan target kinerja 100%, realisasi capaian kinerja 41.51% yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Indikator Kinerja dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

1) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, Indikator Kinerja adalah Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Target Kinerja 1 Laporan dengan anggaran penetapan Rp. 150.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 0,- atau 0%.

2) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Indikator Kinerja adalah Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Target Kinerja 12 Laporan dengan anggaran penetapan Rp.95.550.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp.39.663.030,- atau 41.51%.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Indikator Kinerja Prosentase kasus konflik yang ditangani dengan target kinerja 100%, realisasi capaian kinerja 0% yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan target Kinerja yang dijabarkan dalam sub kegiatan:
 - 1) Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, Indikator kinerja adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Target Kinerja 12 Laporan dengan anggaran penetapan Rp.150.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 0,- atau 0%.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Indikator Kinerja Prosentase desa maju dengan target kinerja 100%, realisasi capaian kinerja 0% yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Indikator Kinerja yang dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Indikator Kinerja Jumlah bulan kebutuhan pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan, dengan target kinerja adalah Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Target Kinerja 15 Dokumen dan Terlaksananya kegiatan fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Target Kinerja 15 Dokumen dengan anggaran penetapan Rp.150.000,- dengan

realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 0,- atau 0%.

- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Indikator Kinerja adalah Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Target Kinerja 15 Dokumen dengan anggaran penetapan Rp. 150.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 0,- atau 0%.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024.
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Cepiring

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai TW II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(7/6)	8	9=(5+6+8)	10=(9/4)
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100	100	51.17	100	100	100	100
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	26	26	12	50	26	26	100
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terbayar gaji dan tunjangan ASN	14	14	14	100	14	42	3
7.01.01.2.02.05	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas	12	12	12	100	12	36	3

7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas harian dan emblem/ID card yang tersedia	0	0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian beserta atributnya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	0	0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor	12	12	12	12	12	12	12
7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12	12	12	100	12	36	3
7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	12	100	12	36	3
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah bulan tersedianya makan minum rapat	12	12	12	100	12	36	3
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12	12	12	100	12	36	3
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan	12	12	12	100	0	24	3
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan tersedianya bahan bakar minyak dan biaya perjalanan dinas dalam serta luar daerah	12	12	12	100	12	36	3
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	Jumlah aset yang diadakan	3	3	3	50	3	3	3
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan barang mebel yang tersedia	30	30	30	100	0	60	3
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia	15	15	15	100	0	30	2

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor	12	12	12	50	12	12	12
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah bulan penyediaan materai yang tersedia	12	12	12	100	12	36	3
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya jasa telp, air, internet dan listri	12	12	12	100	12	36	3
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan tersedianya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	12	12	12	100	12	36	3
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan tersedianya honor tenaga penunjang	12	12	12	100	12	36	3
7.01.01.2.09	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis aset yang dipelihara	16	16	16	50	16	16	3
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Pajak Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas dan suku cadang yang tersedia dan terbayarnya pajak/STNK kendaraan dinas	10	10	10	100	10	30	3
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan komputer, jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan mesin	12	12	12	100	12	36	3
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	1	1	100	1	3	3
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100	100	0	100	100	100	100

	PELAYANAN PUBLIK								
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12	12	12	50	12	12	12
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah laporan pelaksanaan penerbitan izin non usaha	12	12	12	100	12	36	3
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	100	100	22.43	100	100	100	100
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	15	15	15	50	15	15	15
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah desa yang melaksanakan musrenbang	16	16	16	100	16	48	3
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan, penyuluhan dan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16	16	16	100	16	48	3
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100	100	41.51	100	100	100	100
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	jumlah koordinasi yang dilaksanakan							

7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	jumlah bulan koordinasi yang dilaksanakan	12	12	12	100	12	36	3
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani	100	100	0	100	100	100	100
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan	50	50	50	100	50	50	50
7.01.05.2.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	jumlah peserta bimtek tentang wawasan kebangsaan	50	50	50	100	50	150	3
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	100	100	0	100	100	100	100
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes	15	15	15	50	15	15	15
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah desa yang difasilitasi Penyusunan APBDes Tepat Waktu	15	15	15	100	15	48	3
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	jumlah desa yang difasilitasi keuangan desa	15	15	15	100	0	6	0,4

2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Berdasarkan hasil musrenbang tingkat desa dan Kecamatan, tidak terdapat usulan kegiatan yang dimintakan masyarakat kepada Kecamatan dikarenakan sifat pemerintah Kecamatan yang hanya menjadi penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Disamping itu Kecamatan juga bukan OPD yang memiliki kewenangan melaksanakan kegiatan fisik.

Namun usulan program kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbangdes yang telah dikerucutkan didalam forum Musrenbangcam tersebut diajukan dan diperjuangkan oleh Pemerintah Kecamatan Cepiring dalam forum OPD dan Musrenbang Kabupaten agar dapat dimasukkan dalam RKPD Kabupaten Kendal dan Renja OPD Dinas/Instansi terkait yang membidangi urusan sesuai usulan tersebut.

(Tabel 2.2)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Cepiring

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		N I H I L			

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penambahan dan pengurangan anggaran perubahan RKPD tahun 2024 dilakukan dengan pertimbangan untuk kelancaran pelayanan dalam administrasi perkantoran serta mengefektifkan kinerja perkantoran, maka perlu penambahan dan pengurangan dana. Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mengalami pengurangan disebabkan ada beberapa Pegawai yang pensiun sehingga kebutuhan gaji sudah bisa terpenuhi berdasarkan realisasi sampai dengan bulan Juni dan perkiraan sampai dengan bulan Desember 2024. Program yang mengalami penambahan adalah Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa disebabkan capaian kinerja program belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan kurang tertibnya administrasi keuangan di desa, dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan dan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Program yang mengalami pengurangan adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya ,Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub Kegiatan Penyediaan Jasa

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan , Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

Program dan Kegiatan yang diusulkan pada Perubahan Renja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Dearah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor

1.3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan :

2.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan.

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

3.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

4.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

5. Program Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Desa

5.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan

Pendayagunaan Aset Desa

Adapun Rincian Program dan Kegiatan Kecamatan Cepiring Pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 sebagaimana tabel dibawah ini

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Cepiring Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran Kecamatan Cepiring beserta indikatornya, penyesuaian program dan kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif program / kegiatan. Perubahan Renja ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Kecamatan Cepiring Tahun Anggaran 2024.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Cepiring Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cepiring pada Tahun Anggaran 2024.

Cepiring, 26 September 2024

**KAMAT CEPILING**
Drs. DWI CAHYONO SURYO M.A.P
Pembina Tk. I
NIP. 19690418 199009 1 001



RENJA PERUBAHAN



KECAMATAN SINGOROJO KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024



KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2024



Kendal Handal
Beautiful Land, Good Business

KATA PENGANTAR

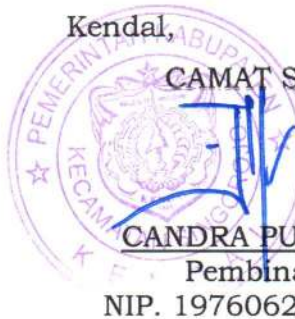
Puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya pada Pemerintah Kecamatan Singorojo telah dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Tahun 2024 dengan lancar tanpa adanya suatu hambatan apapun, juga diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut terlibat dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja mulai dari konsep dan rancangan awal hingga penetapan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah) diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tidak dapat terakomodir dalam APBD Penetapan Tahun 2024 Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perubahan Rencana Kerja dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi riil yang terjadi saat ini, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Tri Wulan II Adapun untuk Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah disebabkan adanya kegiatan yang tidak dapat terakomodir pada APBD Penetapan serta adanya rasionalisasi anggaran yang disebabkan pendapatan daerah yang tidak memenuhi target yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Tahun 2024 ini diharapkan dapat benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif kegiatan Kecamatan Singorojo pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Kendal,

2024.


CAMAT SINGOROJO

CANDRA PUTRA, S.H.M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760622 199703 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
I. Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	8
2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	35
III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	36
IV. Penutup.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun 2024 membawa konsekuensi logis adanya perubahan Renja Perangkat Daerah bagi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan dalam rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024. Kecamatan Singorojo merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mengalami perubahan dalam rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan adanya capaian kinerja yang belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga perlu ditambah anggarannya serta pengurangan anggaran / rasionalisasi anggaran.

Sesuai amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, Renstra Perangkat Daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Tri Wulan II untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Selanjutnya, proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal ini juga dilakukan secara top down dan bottom up, yaitu memadukan antara hasil kajian prioritas kebutuhan program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah atasan dan dokumen Renstra Kecamatan Singorojo.

Dasar pertimbangan perubahan Rencana Kerja dengan gambaran tentang perubahan asumsi daerah yaitu : Adanya pergeseran kegiatan dan pagu anggaran, perubahan target kinerja

dan pagu kegiatan, dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja tersebut akan dijelaskan pada uraian berikut ini.

1. Adanya pergeseran kegiatan dan pagu anggaran, perubahan target kinerja dan pagu kegiatan. Perubahan RKPD tahun 2024 perlu dilakukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Perubahan rincian belanja pada Penetapan dengan DPA 2024. Dalam perubahan APBD 2024 hal tersebut dapat diidentifikasi sehingga perlu diusulkan perubahan.
 - b. Perlu adanya pergeseran beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. Keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran lebih tahun anggaran tahun berjalan;
 - b. Pergeseran pagu kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan.
3. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
4. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
5. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Perundang - undangan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan

- Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjamenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah

Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 20).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Tahun 2024 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melakukan penyesuaian terhadap evaluasi hasil Rencana Kerja Kecamatan Singorojo sampai dengan Triwulan II dan mengoptimalkan proses pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dalam mencapai tujuan berdasarkan target indikator program yang telah ditetapkan.

Tujuan

- a. Memberikan acuan dalam menyusun program dan kegiatan pada perubahan APBD Tahun 2024;
- b. Memberikan acuan dalam menyusun indikator kinerja kegiatan pada perubahan APBD Tahun 2024;
- c. Memberikan acuan dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan pada perubahan APBD Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/ Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Berisi hasil capaian kinerja pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan capaian Renstra
- 2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Berisikan telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah pada Perubahan Renja Tahun 2024.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. ,Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kecamatan Singorojo sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Singorojo sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 secara umum selaras dengan Renja Kecamatan Singorojo tahun 2024, namun terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran dan SE yang berlaku pada tahun bersangkutan. Untuk kegiatan-kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun 2024, diusulkan kembali pada perubahan anggaran tahun 2024 dan tahun 2025.

Adapun kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun 2024 dan diusulkan kembali pada Renja tahun 2025 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 - a) Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - b) Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

- Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Singorojo Tahun 2024 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Adapun review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Singorojo sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Realisasi Program/ kegiatan/ sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang telah ditetapkan

Program/ kegiatan yang memenuhi dan/ atau melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang telah ditetapkan adalah :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

- 1) Kegiatan Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang meliputi Sub kegiatan :

- a. Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, tidak tercapai karena anggaran digunakan untuk penyusunan dokumen perubahan Renja dan renja tahun 2025 yang masih dalam proses penyusunan
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tidak tercapai karena penyusunan laporan capaian kinerja dilaksanakan akhir tahun.

- 2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tidak tercapai karena sebagian besar lampu masih menyala , belum mati .

- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor belum tercapai karena karena kunjungan tamu yang berkoordinasi di kecamatan rendah.
 - c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan belum tercapai karena dokumen yang perlu difotocopy masih sedikit dan cetak stopmap juga masih sedikit.
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD belum tercapai , hal ini karena undangan dinas luar kota masih rendah sehingga persediaan SPPD luar kota belum terserap sesuai target yang ditentukan. Makan minum Rapat Koordinasi juga belum semua dilaksanakan.
- 2) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang meliputi sub kegiatan :
- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya belum tercapai karena ada yang sudah teralisasi ada yang dialihkan /digeser untuk kegiatan lain, sudah terealisasi pengadaan mesin finger , pengadaan printer dan UPS dialihkan untuk kegiatan lain yang dianggarkan melalui anggaran perubahan.
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tidak tercapai karena masih dalam proses dengan pihak penyedia untuk pengadaan sarpras pembelian rak arsip dan filling kabinet.
- 3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi sub kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tidak tercapai karena pembayaran

sesuai dengan rekening listrik , telepon dan wifi

.

- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor tidak tercapai karena pembayaran honor TPK sopir, penjaga malam dan petugas kebersihan dibayarkan bulan berikutnya, jadi bulan Juni baru dibayarkan honor sampai bulan Mei, untuk Desember dibayarkan 2 kali yaitu diawal bulan untuk honor bulan November dan di akhir bulan untuk honor bulan Desember.

4) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang meliputi sub kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak tercapai karena pajak kendaraan bermotor belum waktunya perpanjangan STNK nya.
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak tercapaia karena peralatan dan mesin masih belum perlu perbaikan, hanya beberapa yang perlu diperbaiki.
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya tidak tercapai karena belum ada perbaikan/pemeliharaan gedung.
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya belum tercapai , karena belum waktunya untuk dilaksanakan pemeliharaan AC.

b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik :

1) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat , yang meliputi sub kegiatan :

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan tidak tercapai karena belum dilaksanakan sosialisasi administrasi kependudukan tingkat kecamatan Singorojo, sesuai RAK dilaksanakan bulan Agustus 2024.

c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan :

- 1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang meliputi sub kegiatan :
 - a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan tidak tercapai karena kegiatan raker dan pleno PKK telah dilaksanakan sampai dengan bulan Juni, Lomba MTQ sudah dilaksanakan, namun masih ada kelebihan anggaran pengadaan piala karena kategori yang dilombakan berkurang, anggaran dialihkan untuk kegiatan lain di anggaran perubahan dan Koordinasi Penurunan Stunting dilaksanakan bulan Juli karena merupakan kegiatan untuk evaluasi penurunan stunting selama satu semester.
- d) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum :
 - 1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang meliputi sub kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan tidak tercapai karena pembayaran honor Linmas sejumlah 3 orang dibayarkan bulan berikutnya , dan bulan Desember dibayarkan honor bulan November dan Desember.
- e) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum :
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang meliputi sub kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan tidak tercapai karena rapat koordinasi Forkompincam baru dilaksanakan 1 (satu) kali , apabila ada permasalahan yang mendesak langsung diadakan koordinasi melalui telepon ataupun rapat koordinasi di Polsek ataupun di Koramil.
- f) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa :
 - 1) Kegiatan Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang meliputi sub kegiatan :
 - a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa tidak tercapai karena Perdes dan Perkades disusun di akhir tahun antara bulan November- Desember, sehingga pendampingan penyusunan Perdes Perkades belum dilaksanakan

- b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa tidak tercapai karena pembinaan administrasi tata pemerintahan desa dilaksanakan semester II setelah pembagian SPPT PBB dan penarikan PBB dari desa , untuk monev capaian PBB. Peningkatan kapasitas lembaga yang di anggarakan di sub kegiatan ini dialihkan di program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

2. Realisasi Program/ kegiatan yang memenuhi target dan/atau melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang telah ditetapkan

Program/ kegiatan yang memenuhi dan/ atau melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang telah ditetapkan adalah :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 3) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang meliputi sub kegiatan:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat;
- d) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

- 1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
 - b. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
- e) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Indikator Kinerja yang dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
3. Realisasi Program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang telah ditetapkan
 Program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang telah ditetapkan nihil.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, tercapainya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan
 - a) Faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target kegiatan antara lain :
 - 1) Adanya Surat Edaran Pembatasan Dalam Penyusunan RKA seluruh Perangkat Daerah se- Kabupaten Kendal;
 - 2) Terjadi pergeseran rencana pelaksanaan kegiatan ke triwulan IV tahun 2024;
 - b) Faktor yang mendukung tercapainya kegiatan karena adanya komitmen semua pihak untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, sebagai bagian untuk pencapaian perjanjian kinerja perangkat daerah.

- c) Faktor yang menjadi penyebab melebihi target kinerja program/ kegiatan adalah nihil
- 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
 - a) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah secara umum mencapai target yang telah ditetapkan, meskipun demikian guna meningkatkan pelayanan Kecamatan Singorojo, perlu ditingkatkan pelaksanaan kegiatan yang langsung mendukung implementasi e-government, bersentuhan dengan kebutuhan layanan kepada masyarakat.
- 6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor penghambat adalah dengan perencanaan dan penganggaran yang mendukung percepatan Pelayanan Kecamatan Singorojo antara lain :

 - a) pengajuan penambahan kekurangan anggaran pada perubahan RKPD untuk kegiatan-kegiatan yang kurang anggaran pada penetapan anggaran;
 - b) pergeseran anggaran antar kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan perubahan kebijakan/ prioritas.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2024 Kecamatan Singorojo, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

➤ **Analisis IKU Kecamatan Singorojo**

Faktor pendukung tercapainya nilai SAKIP ada beberapa faktor yaitu :

- a. Komitmen Pimpinan Kunci Keberhasilan SAKIP
- b. Adanya koordinasi yang melibatkan semua kepala seksi, kepala subbagian dan aparatur Kecamatan dalam hal penataan administrasi perkantoran

c. Manajemen kinerja dalam mendukung efektivitas

Faktor penghambat tercapainya nilai SAKIP ada beberapa faktor yaitu :

- a. Keterbatasan peralatan dan fasilitas kantor pendukung pelaksanaan pekerjaan.
- b. Data dan dokumen pendukung perencanaan yang belum memadai.
- c. Regulasi tentang perencanaan yg selalu mengalami perubahan.

Faktor pendukung tercapainya nilai IKM ada beberapa faktor yaitu :

- a. Komitmen Pimpinan Kunci Keberhasilan tercapainya Nilai IKM
- b. Kecepatan dalam memproses permintaan atau penyelesaian layanan, serta efisiensi dalam penyampaian hasil.
- c. Kepastian bahwa layanan akan diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan konsistensi dalam penerapan layanan.

Faktor penghambat tercapainya nilai IKM ada beberapa faktor yaitu :

- a. Keterbatasan peralatan dan fasilitas kantor pendukung pelaksanaan pekerjaan.
- b. Kurang informatif; informasi kurang tersebar luas kepada masyarakat
- c. Tanpa tindakan perbaikan yang jelas, masyarakat mungkin merasa bahwa survei tidak memberikan dampak yang nyata.

masih belum menampakkan kinerja yang maksimal hal ini dikarenakan ada beberapa faktor penghambat

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Singorojo sampai dengan Semester I untuk nilai SAKIP dari target 71,5 realisasi 72,25 (101,05 %) dengan status capaian sangat tinggi,

hal ini karena semua eviden SAKIP sudah dilaksanakan lengkap beserta data dukung dan hasil rekomendasi LHE AKIP sudah ditindak lanjuti dan dilaksanakan. Nilai IKM dari target 91,9 realisasi 93,06 (101,26 %) dengan status capaian sangat tinggi, hal ini karena pelayanan di Kecamatan Singorojo sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang dibuat, pelayanan cepat dan mudah, sehingga masyarakat merasa puas atas produk layanan yang ada di Kecamatan Singorojo.

Berdasarkan formulir Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo dari aplikasi Si-Eva bahwa Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah 55,56 (rendah), Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah 64,65 (rendah).Anggaran Tahun 2024 Kecamatan Singorojo sebesar Rp. 2.758.989.663,- (Dua milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) dan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 1.325.422.859,- (Satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) realisasi fisik sebesar 48,04 % (rendah), masih belum menampakkan kinerja yang maksimal hal ini dikarenakan ada beberapa faktor penghambat.

Ada Program/Kegiatan yang Realisasinya tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran sesuai yang direncanakan. Tapi ada juga yang memenuhi bahkan melebihi, seperti yang diuraikan dibawah ini sekaligus Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, kemudian Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah serta Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pada Triwulan II belum semua program terlaksana pada Kecamatan Singorojo dan juga belum sesuai dengan yang direncanakan. Realisasi Capaian kinerja dan anggaran masing-masing program ,kegiatan,dan sub kegiatan pada Kecamatan Singorojo dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.550.291.863,- realisasi sebesar Rp.1.250.135.460,-realisasi fisik sebesar 49,02 % dengan rincian sebagai berikut :

1.1. Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.1.600.000,- realisasi anggaran Rp. 575.200,- realisasi fisik sebesar 35,95 % (rendah) yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

1.1.1. Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 900.000,- realisasi Rp. 329.500,- realisasi fisik 36,61%,hal ini karena proses penyusunan dokumen perencanaan masih dalam proses penyusunan baik Renja Tahun 2025 maupun Perubahan Renja Tahun 2024.

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 700.000,- realisasi Rp. 245.700,- realisasi fisik 35,10 % , capaian masih rendah karena belum waktunya penyusunan laporan capaian kinerja penyusunan LKJIP, SAKIP dan LKPD tahun 2024.

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.104.567.462,- relisasi sebesar Rp. 1.104.633.485,- realisasi fisik sebesar 52,49 % (tinggi), yang terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 2.104.567.462,- relisasi sebesar Rp. 1.104.633.485,- realisasi fisik 52,49 % , sudah sesuai

dengan target karena gaji dan tunjangan harus dibayarkan tiap bulan sebagai hak ASN.

- 1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 206.117.750,- realisasi sebesar Rp. 68.554.000,- realisasi fisik 33,26 % (rendah), yang terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu :

1.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 3.822.000,- realisasi sebesar Rp. 520.000,- realisasi fisik 13,61 % (rendah), capaian masih rendah karena belum ada lampu yang mati.

1.3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 25.397.000,- realisasi Rp. 13.846.500,- realisasi fisik 54,52 % (tinggi), hal ini karena kebutuhan ATK, kertas cover, kardus arsip, dan lain-lain untuk menunjang administrasi kantor dalam pelaksanaan kegiatan.

1.3.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 2.800.000,- realisasi sebesar Rp. 1.243.000 realisasi fisik 44,39 % (rendah), karena kunjungan tamu yang berkoordinasi di kecamatan rendah.

1.3.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran Rp. 13.017.750,- realisasi Rp. 4.728.500,- realisasi fisik 36,32 % (rendah), dokumen yang perlu difotocopy masih sedikit dan cetak stopmap juga masih sedikit.

1.3.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 161.081.000,- realisasi sebesar Rp. 48.216.000,- realisasi fisik 29,93 % (rendah) , hal ini karena undangan dinas luar kota masih rendah sehingga persediaan SPPD luar kota belum terserap sesuai target yang ditentukan. Makan

minum Rapat Koordinasi juga belum semua dilaksanakan.

- 1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 27.300.000,- realisasi sebesar Rp. 3.550.000,- realisasi fisik 13 % (rendah), yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

- 1.4.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 18.300.000,- realisasi sebesar Rp. 3.550.000,- realisasi fisik 19,40 % (rendah) , sudah terealisasi pengadaan mesin finger , pengadaan printer dan UPS dialihkan untuk kegiatan lain yang dianggarkan melalui anggaran perubahan.

- 1.4.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 9.000.000,- realisasi sebesar Rp. 0 ,- realisasi fisik) % karena belum diproses pengadaan sarpras untuk pembelian rak arsip dan filling kabinet.

- 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 140.412.651,- dengan realisasi sebesar Rp. 53.671.775,- realisasi fisik 38,22 % (rendah) yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :

- 1.5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- realisasi sebesar Rp. 1.060.000,- realisasi fisik 53,00 % (tinggi) , untuk terpenuhinya tertib administrasi keuangan diperlukan materai bagi belanja diatas Rp. 5.000.000,-

- 1.5.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 41.651.851,- realisasi sebesar Rp. 12.950.075,- realisasi fisik 31,09 % (rendah), pembayaran sesuai dengan rekening listrik , telepon dan wifi .

- 1.5.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 96.760.800,- realisasi sebesar

Rp. 39.661.699,- realisasi fisik 40,99 % (rendah), sesuai bulan pembayaran honor TPK sopir, penjaga malam dan petugas kebersihan.

- 1.6. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 70.294.000,- realisasi sebesar Rp. 19.151.000,- realisasi fisik 27,24 % (rendah) yang terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu :

- 1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 36.904.000,- realisasi sebesar Rp. 17.161.000,- realisasi fisik 46,50 % (rendah) karena pajak kendaraan bermotor belum waktunya perpanjangan STNK nya.

- 1.6.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp. 5.680.000,- realisasi sebesar Rp. 1.990.000,- realisasi fisik 35,04 % (rendah), peralatan dan mesin masih belum perlu perbaikan, hanya beberapa yang perlu diperbaiki.

- 1.6.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp. 21.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 0 ,- realisasi fisik 0 % , karena perbaikan/pemeliharaan gedung belum dilaksanakan

- 1.6.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp. 6.710.000,- realisasi sebesar Rp. 0,- realisasi fisik 0 %, karena belum waktunya untuk dilaksanakan pemeliharaan AC.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan anggaran Rp. 9.600.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- realisasi fisik 0 % dengan rincian sebagai berikut :

- 2.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan anggaran sebesar Rp. 9.600.000,- realisasi sebesar Rp. 0,- realisasi fisik 0 % (rendah) yang terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :
 - 2.1.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan anggaran Rp. 9.600.000,- realisasi Rp. 0,- realisasi fisik 0% , belum dilaksanakan sosialisasi administrasi kependudukan tingkat kecamatan Singorojo.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp. 49.783.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 26.261.000,- realisasi fisik 52,75 % (rendah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - 3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 49.783.000,- realisasi sebesar Rp. 26.261.000,- realisasi fisik 52,75 % (tinggi) yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :
 - 3.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan anggaran sebesar Rp. 9.800.000,- realisasi sebesar Rp. 9.800.000,- realisasi fisik 100 %(tinggi), musrenbangcam sudah dilaksanakan sebagai sarana untuk menyampaikan usulan masyarakat agar ada sinkronisasi antara program pemerintah dan yang diinginkan oleh masyarakat.
 - 3.1.2. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 18.100.000,- realisasi Rp. 9.580.000,- realisasi fisik 52,93 % ,Sosialisasi bagi UMKM sudah dilaksanakan , Pekan Raya Kendal belum dilaksanakan.
 - 3.1.3. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan anggaran

sebesar Rp. 21.883.000,- realisasi sebesar Rp. 6.881.000,- realisasi fisik 31,4 % (rendah), kegiatan raker dan pleno PKK telah dilaksanakan sampai dengan bulan Juni, Lomba MTQ sudah dilaksanakan, namun masih ada kelebihan anggaran pengadaan piala karena kategori yang dilombakan berkurang, anggaran dialihkan untuk kegiatan lain di anggaran perubahan. Koordinasi Penurunan Stunting belum dilaksanakan.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp. 96.788.800 realisasi anggaran sebesar Rp. 39.661.699,- realisasi fisik 40,98 % dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 4.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 96.788.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 39.661.699,- realisasi fisik 40,98 % yang terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

- 4.1.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan anggaran Rp. 96.788.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 39.661.699,- realisasi fisik 40,98 %, sub kegiatan ini adalah pembayaran honor Linmas sejumlah 3 orang dan sudah dibayarkan sampai dengan bulan pembayaran honor.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran sebesar Rp. 13.826.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.500.000,- realisasi fisik 18,08 % dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 13.826.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.500.000,- realisasi fisik 18,08 % yang terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

5.1.1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 13.826.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.500.000,- realisasi fisik sebesar 18,08 % , rakat koordinasi Forkompincam baru dilaksanakan 1 (satu) kali karena apabila ada permasalahan yang mendesak langsung diadakan koordinasi melalui telepon ataupun rapat koordinasi di Polsek ataupun di Koramil.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 38.700.000,- realisasi sebesar Rp. 9.564.700,- realisasi fisik 24,71 % dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

6.1. Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 38.700.000,- realisasi sebesar Rp. 9.564.700,- realisasi fisik 24,71 % yang terdiri dari 3 sub kegiatan sebagai berikut :

6.1.1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dengan anggaran sebesar Rp. 9.600.000,- realisasi sebesar Rp. 0,- realisasi fisik 0 %, Perdes dan Perkades disusun di akhir tahun antara bulan November- Desember, sehingga pendampingan penyusunan Perdes Perkades belum dilaksanakan.

6.1.2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 19.500.000,- realisasi sebesar Rp. 0,- realisasi fisik 0 %, pembinaan administrasi tata pemerintahan desa dilaksanakan semester II setelah pembagian SPPT PBB dan penarikan PBB dari desa , untuk monev capaian PBB. Peningkatan kapasitas lembaga yang di anggarkan di sub kegiatan ini dialihkan di program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

6.1.3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaayagunaan Aset Desa anggaran sebesar Rp.

9.600.000,- realisasi sebesar Rp. 9.564.700,- realisasi fisik 99,63 %,guna tertib administrasi keuangan desa sudah dilaksanakan bimtek penyusunan SPJ dan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan aturan TNT oleh Dispermasdes Kabupaten Kendal.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo sampai dengan Semester II Tahun 2024 dapat dilihat di tabel 2.1 berikut ini :

Adapun realisasi per sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Singorojo

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Proyeksi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7=6(/5)	8	9	10=(9/4)
7				UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01			KECAMATAN								
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Ketercapaian pelayanan	100%	100%	49,02%	25%	100%	100%	100%

				DAERAH KABUPATEN/KOTA	umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah							
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja OPD	100%	100%	50%	50%	100%	100	100
7	01	01	2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	3	50 %	4	6	100
7	01	01	2.01. 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3	2	66,67 %	6	3	100
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%

					Perangkat Daerah							
7	01	01	2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18	18	18	100%	18	14	77,78
7	01	01	2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	0	0	0	12	0	0
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	100%	0	0	0	0	0	0
7	01	01	2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	18	0	0	0	0	0	0
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
7	01	01	2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	6	50 %	40	12	100 %
7	01	01	2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	12	12	6	50 %	12	12	100 %

					Kantor yang Disediakan (Paket)							
7	01	01	2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	6	50 %	12	12	100 %
7	01	01	2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	6	50 %	12	12	100 %
7	01	01	2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	0	0	0	7	0	0
7	01	01	2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	6	50 %	12	12	100 %
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah (unit)	11	11	1	9,09%	19	11%	100%
7	01	01	2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	9	9	1	11,11 %	8	9	100%
7	01	01	2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	2	2	0	0%	0	2	100 %

					Lainnya yang Disediakan (Unit)							
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor	12	12	6	50%	12	12	100%
7	01	01	2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	6	50 %	12	12	100 %
7	01	01	2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	6	50 %	12	12	100 %
7	01	01	2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	6	50 %	12	12	100 %
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Unit)	19	19	4	21,05%	19	19	100%
7	01	01	2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8	8	7	87,5 %	10	8	100%
7	01	01	2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	4	4	3	75 %	4	4	100%

					Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)							
7	01	01	2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	11	11	11	100 %	10	11	100%
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan Kecamatan	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan (Kegiatan)	1	1	0	0%	1	1	100%
7	01	02	2.04. 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	1	1	0	0%	1	1	100%
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	80%	30%	25	83,33%	30%	30%	37,5%
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan	13	13	13	100%	13	13	100%

					masyarakat desa (Desa)							
7	01	03	2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga)	7	7	7	100%	7	7	100%
7	01	03	2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	6	50 %	12	12	100%
7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah desa yang dibina (desa)							
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
7	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi yang Dilaksanakan (kali)	12	12	6	50%	12	12	100%
7	01	04	2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat	12	12	6	50%	12	12	100%

				Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)							
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani (%)	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan (kali)	12	12	6	50%	12	12	100%
7	01	05	2.01 0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	4	2	50 %	4	4	100%
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	90%	90%	0%	0%	90%	90%	90%
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	13	13	0	0%	13	13	100%

7	01	06	2.01 0002	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	13	13	13	100 %	13	13	100 %
7	01	06	2.01 0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13	13	0	0%	13	13	100%

2.2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 tidak memasukkan usulan dari masyarakat, karena program/kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan bersifat rutin dan tugas pokok yang dilakukan bersifat koordinatif dan pembinaan. Sedangkan usulan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat bersifat fisik.

Tabel 2.2
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Kendal
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Singorojo

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	N	I	H	I L	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penambahan dan pengurangan anggaran perubahan RKPD tahun 2024 dilakukan dengan pertimbangan untuk kelancaran pelayanan dalam administrasi perkantoran serta mengefektifkan kinerja perkantoran, maka perlu penambahan dan pengurangan dana. Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mengalami pengurangan disebabkan ada beberapa Pegawai yang pensiun dan pindah tugas(mutasi) dari Kecamatan Singorojo sehingga kebutuhan gaji sudah bisa terpenuhi berdasarkan realisasi sampai dengan bulan Juni dan perkiraan sampai dengan bulan Desember 2024. Program yang mengalami penambahan adalah Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa disebabkan capaian kinerja program belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan kurang tertibnya administrasi keuangan di desa, dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan dan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Program yang mengalami pengurangan adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya ,Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan , Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

Program dan Kegiatan yang diusulkan pada Perubahan Renja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan lainnya

1.4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan :

2.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

3.1 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan :

4.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan :

5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Adapun Rincian Program dan Kegiatan Kecamatan Singorojo Pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 sebagaimana tabel dibawah ini

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Singorojo Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran Kecamatan Singorojo beserta indikatornya, penyesuaian program dan kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif program / kegiatan. Rencana Kerja Perubahan ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Kecamatan Singorojo Tahun Anggaran 2024.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2024 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Singorojo pada Tahun Anggaran 2024. Perubahan Rencana Kerja dilakukan sesuai dengan ketersediaan anggaran Pemerintah Kabupaten Kendal. Dalam pemilihan program dan kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja 2024 bersifat prioritas dan mendesak untuk dipenuhi dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) 2024 dan tetap berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Singorojo Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Kendal,

2024.



CAMAT SINGOROJO

CANDRA PUTRA, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19760622 199703 1 004

LAMPIRAN



RENCANA KERJA PERUBAHAN

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN
KENDAL**

TAHUN 2024

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN KENDAL**

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2024 disusun melalui skala prioritas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan kontribusi dalam perbaikan pelayanan dibidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Untuk menjamin terselenggaranya pelayanan dibidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang lebih prima sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal, rencana kerja dituangkan dalam wujud dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 362 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal merupakan dokumen perencanaan untuk 1 tahun. Secara substansial memuat rencana program dan kegiatan serta pendanaannya, yang pelaksanaannya difokuskan pada bulan September, Oktober, Nopember dan Desember Tahun 2024. Renja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari Rencana Kerja Tahun 2024 dalam rangka untuk menyesuaikan situasi dan kondisi pelayanan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal saat ini, agar pelayanan penyelenggaraan dibidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dapat maksimal/berjalan lancar.

Rencana Kerja Perubahan memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif, digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD Perubahan.

Kendal, 9 Agustus 2024

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KENDAL


ALBERTUS HENDRI S., S.P., M.T.
Pembina

NIP. 19810522 2005011010

DAFTAR ISI

SK Renja
Kata Pengantar
Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

2.1 Evaluasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV Penutup

LAMPIRAN

Lampiran Rancangan Akhir Perubahan RKPD 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023, setiap OPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja OPD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, Renstra OPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja OPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra OPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja OPD, selaras dengan Renstra OPD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra OPD berdasarkan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja OPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Rancangan renja perubahan OPD dibahas pada forum OPD yang dikoordinasikan oleh Baperlitbang, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD. Renja OPD ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) Kabupaten Kendal. Kemudian Renja perubahan tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan tahun 2024

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2024 didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 20).

15. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 95)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang bersifat tahunan yang telah disusun pada tahun 2024. Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal Tahun 2024 tetap menjadi bagian secara utuh dari upaya pelaksanaan Renstra Tahun 2021-2026.

2. Tujuan

Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal Tahun 2024 bertujuan untuk:

- a) Mengantisipasi perkembangan keadaan yang terjadi pada tahun berjalan.
- b) Menjadi acuan bagi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kabupaten Kendal.
- c) Mencukupi target capaian Indikator Kinerja Utama yang belum sesuai dengan realisasi.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja DP2KBP2PA Kab. kedal OPD berdasarkan Permendagri Nomor 10 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang

SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

(disesuaikan dengan Perbup Perubahan RKPD tahun 2024)

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan Rencana Kerja didasarkan pada arah kebijakan Pembangunan, daftar program/ kegiatan prioritas dan lampiran program dan kegiatan.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap perangkat daerah yang bersangkutan.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki dua urusan yaitu :

- 1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dan
- 2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dari kedua urusan itu ada 10 Program, 24 Kegiatan dan 61 sub kegiatan. Untuk evaluasi program / kegiatan / sub kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2024, disajikan dalam tabel 2.1 berikut ini :

LAPORAN REALISASI KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KENDAL

Kondisi samapai dengan Triwulan 2 / Bulan Juni

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN	BULAN/ GU								Realisasi		Sisa Dana
			Januari	Pebruari	Maret GU 1	April GU 2	April GU 3	Mei GU 4	Mei GU 5	Juni GU 6	Keuangan	%	
2.14.2.08.0.00.01.0000	DP2KBP2PA	23.122.689.154	281.714.958	125.774.521	1.174.778.972	1.057.278.604	791.243.084	899.193.735	571.452.774	1.129.487.983	6.030.924.631	26,08	17.091.764.523
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.950.256.938	281.714.958	125.774.521	584.706.546	322.103.604	176.791.184	252.785.835	90.928.374	441.471.783	2.276.276.805	32,75	4.673.980.133
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	5.608.841.236	281.714.958	125.774.521	503.885.046	322.103.604	170.636.784	238.785.835	33.048.975	441.471.783	2.117.421.506	37,75	3.491.419.730
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	4.236.340.036	281.714.958	86.152.148	372.273.152	279.456.952	100.886.000	220.158.986	-	382.231.080	1.722.873.276	40,67	2.513.466.760
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.236.340.036	281.714.958	86.152.148	372.273.152	279.456.952	100.886.000	220.158.986	-	382.231.080	1.722.873.276	40,67	2.513.466.760
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji pokok PNS	1.610.000.000	64.857.700	64.991.100	135.762.200	74.457.000		90.431.400		149.540.400	580.039.800		1.029.960.200
5.1.01.01.02.0001	Belanja tunjangan Keluarga PNS	110.376.000	4.741.598	4.741.598	9.689.748	5.573.630		6.751.508		11.227.600	42.725.682		67.650.318
5.1.01.01.03.0001	Belanja tunjangan jabatan PNS	121.352.000	5.505.000	5.505.000	11.570.000	5.785.000		5.785.000		11.570.000	45.720.000		75.632.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja tunjangan fungsional PNS	95.928.000	2.700.000	2.700.000	5.400.000	2.700.000		2.700.000		5.400.000	21.600.000		74.328.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja tunjangan fungsional umum PNS	40.768.000	1.285.000	1.285.000	2.570.000	1.470.000		1.470.000		2.940.000	11.020.000		29.748.000
5.1.01.01.06.0001	Belanja tunjangan beras PNS	81.648.000	2.969.220	2.969.220	5.793.600	3.186.480		3.186.480		6.372.960	24.477.960		57.170.040
5.1.01.01.07.0001	Belanja tunjangan pph /tunjangan khusus PNS	207.116.000	166.589	166.589	4.807.864	372.430		494.089		5.263.484	11.271.045		195.844.955
5.1.01.01.08.0001	Belanja pembulatan gaji PNS	49.000	818	824	1.804	798		2.727		1.851	8.822		40.178
5.1.01.01.09.0001	Belanja iuran jaminan kesehatan PNS	168.000.000	3.163.571	3.168.907	3.187.978	3.599.425		4.285.517		3.613.559	21.018.957		146.981.043
5.1.01.01.10.0001	Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS	9.600.000	155.656	155.976	156.648	178.697		217.041		179.448	1.043.466		8.556.534
5.1.01.01.11.0001	Belanja iuran jaminan kematian PNS	14.400.000	466.974	467.934	469.948	536.092		651.120		538.347	3.130.415		11.269.585
5.1.01.02.01.0001	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS	1.443.373.036	195.702.832		161.093.362	163.632.400		86.969.104		167.068.431	774.466.129		668.906.907
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban pengelola keuangan	208.080.000			31.770.000	17.965.000		17.215.000		17.215.000	84.165.000		123.915.000
	PA 12 x 3.010.000												

	PPK 12 x 1.250.000												
	BP 12 x 1.090.000												
	BP Pem 48 x 500.000												
	BP Pem 24 x 570.000												
	PPTK 12 x 1.910.000												
	PPTK 24 x 2.210.000												
	PPTK 12 x 2.520.000												
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan barang dan jasa	21.150.000					1.950.000			1.300.000	3.250.000		17.900.000
	Honor Pejabat pengadaan 11 x 650.000												
	Honor tim teknis 4 paket x 350.000												
	Honor tim teknis 12 paket x 350.000												
	Honor tim teknis 24 paket x 350.000												
5.1.01.03.08.0002	Belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan	4.500.000									-		4.500.000
	Pengurus barang OPD 12 x 375.000												
5.1.02.02.08.0002	Belanja jasa konsultan perencanaan arsitektur jasa desainsitektur	100.000.000					98.936.000				98.936.000		1.064.000
	Jasa konsultan perencanaan 1 paket x 100.000.000												
2.08.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	18.300.000	-	-	603.700	-	91.500	-	555.900	-	1.251.100	6,84	17.048.900
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	10.800.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan bakar dan pelumas	7.230.000									-		7.230.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	3.570.000									-		3.570.000
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	7.500.000	-	-	603.700	-	91.500	-	555.900	-	1.251.100	16,68	6.248.900
5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan bakar dan pelumas	1.710.000									-		1.710.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	2.490.000			603.700		91.500		555.900		1.251.100		1.238.900
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara, dan panitia	3.300.000									-		3.300.000
	Honorarium moderator 1 Org x 700.000												
	Honorarium Narasumber/Pembahas 2 x 900.000												
	Honorarium Narasumber 2 x 400.000												

2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	529.201.200	-	-	61.153.225	487.800	6.572.454	8.328.090	13.401.375	3.573.190	93.516.134	17,67	435.685.066
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	40.000.000	-	-	39.844.000	-	-	-	-	-	39.844.000	99,61	156.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	3.695.000			3.602.000						3.602.000		93.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor kertas dan cover	12.355.000			12.316.000						12.316.000		39.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan komputer	23.950.000			23.926.000						23.926.000		24.000
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.670.000	-	-	774.700	267.000	371.000	466.000	923.100	318.000	3.119.800	18,72	13.550.200
5.1.02.01.01.0010	Belanja bahan (isi tabung gas elpiji)	2.250.000							220.000		220.000		2.030.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan pakan - Natura	8.420.000			388.700	267.000		466.000	91.100	318.000	1.530.800		6.889.200
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan minuman jamuan tamu	6.000.000			386.000		371.000		612.000		1.369.000		4.631.000
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	10.448.200	-	-	2.044.000	220.800	-	574.800	98.000	98.000	3.035.600	29,05	7.412.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	10.448.200			2.044.000	220.800		574.800	98.000	98.000	3.035.600		7.412.600
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	452.259.000	-	-	16.345.525	-	6.201.454	7.287.290	12.380.275	3.157.190	45.371.734	10,03	406.887.266
5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan bakar dan pelumas	28.947.000			4.122.025		2.961.454	1.601.790	2.074.324	422.190	11.181.783		17.765.217
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	32.000									-		32.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	224.248.000			2.470.000			530.000			3.000.000		221.248.000
	Snack 4700 x 15.000												
	Makan 4046 x 38.000												
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	179.532.000			6.453.500		740.000	4.855.500	10.255.951	2.735.000	25.039.951		154.492.049
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota	19.500.000			3.300.000		2.500.000	300.000	50.000		6.150.000		13.350.000
2.08.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.824.000	-	-	2.145.000	-	-	-	-	-	2.145.000	21,83	7.679.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	8.024.000			945.000						945.000		7.079.000
5.1.02.21.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara, dan panitia	1.800.000			1.200.000						1.200.000		600.000
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	647.000.000	-	39.622.373	63.752.869	42.158.852	60.356.830	10.298.759	2.908.700	35.991.249	255.089.632	39,43	391.910.368
2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	5.000.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Benda Pos)	5.000.000									-		5.000.000
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	130.000.000	-	8.062.373	25.004.332	9.175.239	2.845.680	10.298.759	65.500	2.116.249	57.568.132	44,28	72.431.868

5.1.02.01.01.0031	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (alat listrik)	3.999.500					1.027.500	965.000			1.992.500		2.007.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja tagihan telepon	1.575.000			235.064	70.934		70.934		74.595	451.527		1.123.473
5.1.02.02.01.0060	Belanja tagihan air	1.625.000			196.500	65.500			65.500	65.500	393.000		1.232.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja tagihan listrik	101.200.500		8.062.373	22.200.448	9.038.805		7.444.645		1.976.154	48.722.425		52.478.075
5.1.02.02.01.0063	Belanja kawat/faksimil/Internet/TV berlangganan	21.600.000			2.372.320		1.818.180	1.818.180			6.008.680		15.591.320
2.08.01.2.08.0003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	32.000.000	-	-	6.245.000	480.000	2.125.000	-	1.650.000	2.315.000	12.815.000	40,05	19.185.000
5.1.02.01.01.0009	Belanja bahan ISI TABUNG Pemadam kebakaran	1.200.000							1.200.000		1.200.000		-
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	90.000									-		90.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja pemeliharaan alat kantor dan Rumah tangga (alat rumah tangga alat pendingin)	11.700.000			2.895.000	480.000				1.875.000	5.250.000		6.450.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja pemeliharaan komputer (Komputer unit-personal computer)	14.010.000			2.200.000		995.000		450.000	440.000	4.085.000		9.925.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja pemeliharaan komputer komputer-computer unit - komputer munit lainny	5.000.000			1.150.000		1.130.000				2.280.000		2.720.000
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor	480.000.000	-	31.560.000	32.503.537	32.503.613	55.386.150	-	1.193.200	31.560.000	184.706.500	38,48	295.293.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	6.066.300									-		6.066.300
5.1.02.01.01.0030	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (perabot Kantor)	16.053.700			781.000	456.000			834.000		2.071.000		13.982.700
5.1.02.02.01.0026	Belanja jasa tenaga administrasi	231.440.000		21.040.000	21.040.000	21.040.000	21.040.000			21.040.000	105.200.000		126.240.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja jasa tenaga kebersihan	159.720.000		5.260.000	5.260.000	5.260.000	29.086.150		359.200	5.260.000	50.485.350		109.234.650
5.1.02.02.01.0031	Belanja jasa tenaga keamanan	63.120.000		5.260.000	5.260.000	5.260.000	5.260.000			5.260.000	26.300.000		36.820.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN	1.800.000			72.238	216.717					288.955		1.511.045
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran jaminan kematian bagi non ASN	1.800.000			90.299	270.896					361.195		1.438.805
2.08.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	178.000.000	-	-	6.102.100	-	2.730.000	-	16.183.000	19.676.264	44.691.364	25,11	133.308.636
2.08.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.000.000	-	-	2.102.100	-	2.730.000	-	3.650.000	19.676.264	28.158.364	38,05	45.841.636
5.1.02.01.01.0013	Belanja suku cadang (suku cadang alat angkutan)	29.110.000					2.730.000		3.650.000	12.512.904	18.892.904		10.217.096
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	40.000									-		40.000
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	14.700.000			1.900.500					1.709.000	3.609.500		11.090.500

5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan alat angkutan (Alat angkutan darat bermotor, kendaraan dinas bermotor perorangan)	30.150.000			201.600					5.454.360	5.655.960		24.494.040
2.08.01.2.09.0005	Penyediaan jasa pemeliharaan mebel	4.000.000	-	-	4.000.000	-	-	-	-	-	4.000.000	100,00	-
5.1.02.03.02.0118	Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga (Alat rumah tanggamebel)	4.000.000			4.000.000						4.000.000		-
2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	100.000.000	-	-	-	-	-	-	12.533.000	-	12.533.000	12,53	87.467.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	1.000.000									-		1.000.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa konsultan perencanaan arsitektur jasa arsitektur lainnya	15.000.000							12.533.000		12.533.000		2.467.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa konsultan pengawasan Rekayasa-jasa Pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung	14.000.000									-		14.000.000
5.1.03.01.01.0001	Belanja Modal bangunan Gedung Kantor	70.000.000									-		70.000.000
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	399.991.702	-	-	15.460.000	-	6.154.400	-	27.699.399	-	49.313.799	12,33	350.677.903
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	79.750.000	-	-	250.000	-	-	-	-	-	250.000	0,31	79.500.000
2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	41.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	41.800.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	850.000									-		850.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara, dan panitia	21.950.000									-		21.950.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan	3.000.000									-		3.000.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas paket meeting Dalam kota	16.000.000									-		16.000.000
2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	37.950.000	-	-	250.000	-	-	-	-	-	250.000	0,66	37.700.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan bakar dan pelumas	5.025.000			250.000						250.000		4.775.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	775.000									-		775.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara, dan panitia	25.400.000									-		25.400.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniawan	750.000									-		750.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan	6.000.000									-		6.000.000
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	18.070.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	18.070.000

2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi.	18.070.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	18.070.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan bakar dan pelumas	1.230.000									-		1.230.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	690.000									-		690.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara, dan panitia	10.050.000									-		10.050.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja jasa tenaga kebersihan	100.000									-		100.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan	1.000.000									-		1.000.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas paket meeting Dalam kota	5.000.000									-		5.000.000
2.08.02.2.03	Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	302.171.702	-	-	15.210.000	-	6.154.400	-	27.699.399	-	49.063.799	16,24	253.107.903
2.08.02.2.03.0001	Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota kabupaten/kota	138.171.702	-	-	15.210.000	-	-	-	-	-	15.210.000	11,01	122.961.702
5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan bakar dan pelumas	3.600.000			600.000						600.000		3.000.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja bahan bahan lainnya	5.000.000									-		5.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	6.771.600			950.000						950.000		5.821.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	29.680.000			6.360.000						6.360.000		23.320.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara, dan panitia	21.900.000			2.000.000						2.000.000		19.900.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan	10.000.000			900.000						900.000		9.100.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.920.102									-		5.920.102
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota kurang dari 8 jam	1.400.000			400.000						400.000		1.000.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas paket meeting Dalam kota	41.900.000			4.000.000						4.000.000		37.900.000
5.1.02.16.01.0001	Belanja Modal alat peraga pelatihan	12.000.000									-		12.000.000
2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	80.000.000	-	-	-	-	-	-	650.000	-	650.000	0,81	79.350.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan bakar dan pelumas	4.800.000									-		4.800.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja bahan bahan lainnya	5.000.000									-		5.000.000

5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	4.600.000									-		4.600.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	13.250.000									-		13.250.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara, dan panitia	16.350.000									-		16.350.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja jasa tenaga kebersihan	300.000									-		300.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.700.000									-		3.700.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota kurang dari 8 jam	2.500.000						450.000		450.000			2.050.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas paket meeting Dalam kota	23.500.000						200.000		200.000			23.300.000
5.1.02.16.01.0001	Belanja Modal alat peraga pelatihan	6.000.000									-		6.000.000
2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan kewenangan Kabupaten/kota	84.000.000	-	-	-	-	6.154.400	-	27.049.399	-	33.203.799	39,53	50.796.201
5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan bakar dan pelumas	3.222.000					860.000				860.000		2.362.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	4.528.000					794.400		1.469.400		2.263.800		2.264.200
5.1.02.01.01.0036	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya)	6.000.000							3.000.000		3.000.000		3.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	29.150.000							13.250.000		13.250.000		15.900.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara, dan panitia	17.000.000							2.550.000		2.550.000		14.450.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan	10.000.000							4.999.999		4.999.999		5.000.001
5.1.02.02.01.0030	Belanja jasa tenaga kebersihan	600.000							300.000		300.000		300.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.700.000							1.480.000		1.480.000		2.220.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota kurang dari 8 jam	800.000									-		800.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas paket meeting Dalam kota	9.000.000					4.500.000				4.500.000		4.500.000
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	167.836.000	-	-	24.690.000	-	-	14.000.000	28.060.000	-	66.750.000	39,77	101.086.000
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	27.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	27.900.000
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	27.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	27.900.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan bakar dan pelumas	4.710.000									-		4.710.000

5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	3.540.000									-		3.540.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara, dan panitia	7.650.000									-		7.650.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas paket meeting Dalam kota	12.000.000									-		12.000.000
2.08.03.2.02	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten Kota	139.936.000	-	-	24.690.000	-	-	14.000.000	28.060.000	-	66.750.000	47,70	73.186.000
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten Kota	59.936.000	-	-	21.000.000	-	-	-	-	-	21.000.000	35,04	38.936.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan bakar dan pelumas	6.030.000									-		6.030.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	6.506.000									-		6.506.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	47.400.000			21.000.000						21.000.000		26.400.000
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/kota.	80.000.000	-	-	3.690.000	-	-	14.000.000	28.060.000	-	45.750.000	57,19	34.250.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan bakar dan pelumas	6.015.000			900.000				400.000		1.300.000		4.715.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	7.520.000			200.000				1.100.000		1.300.000		6.220.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	16.000.000							16.000.000		16.000.000		-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara, dan panitia	19.000.000							8.700.000		8.700.000		10.300.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniawan	1.250.000							750.000		750.000		500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.215.000			2.590.000				1.110.000		3.700.000		12.515.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas paket meeting Dalam kota	14.000.000						14.000.000			14.000.000		-
02.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	76.625.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	76.625.000
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.625.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	76.625.000
2.08.04.2.01.0001	Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan kabupaten/kota	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	50.000.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan bakar dan pelumas	3.450.000									-		3.450.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	3.770.000									-		3.770.000

5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	6.360.000										-	6.360.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara, dan panitia	7.500.000										-	7.500.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja jasa tenaga kebersihan	200.000										-	200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.720.000										-	18.720.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas paket meeting Dalam kota	10.000.000										-	10.000.000
2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, informasi dan edukasi KG dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan kabupaten/kota	26.625.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	26.625.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan bakar dan pelumas	550.000										-	550.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	1.025.000										-	1.025.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara, dan panitia	10.050.000										-	10.050.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan	3.000.000										-	3.000.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas paket meeting Dalam kota	12.000.000										-	12.000.000
02.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	180.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	180.000.000
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	180.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	180.000.000
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	180.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	180.000.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan bakar dan pelumas	10.000.000										-	10.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	2.750.000										-	2.750.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	60.950.000										-	60.950.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja jasa tenaga kebersihan	1.300.000										-	1.300.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan	15.000.000										-	15.000.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas paket meeting Dalam kota	90.000.000										-	90.000.000
02.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	312.724.000	-	-	36.921.500	-	-	-	2.120.000	-	39.041.500	12,48	273.682.500
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	297.780.000	-	-	36.921.500	-	-	-	2.120.000	-	39.041.500	13,11	258.738.500

2.08.06.2.01.0001	Advokasi kebijakan dan pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, non Pemerintah, Media dan Dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	273.000.000	-	-	32.446.500	-	-	-	2.120.000	-	34.566.500	12,66	238.433.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan bakar dan pelumas	8.000.000			950.000						950.000		7.050.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	2.530.000			320.000						320.000		2.210.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	63.600.000			2.120.000				2.120.000		4.240.000		59.360.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara, dan panitia	11.000.000									-		11.000.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	57.600.000			24.600.000						24.600.000		33.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan	25.000.000			1.000.000						1.000.000		24.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.370.000			3.456.500						3.456.500		6.913.500
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas paket meeting Dalam kota	94.900.000									-		94.900.000
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	24.780.000	-	-	4.475.000	-	-	-	-	-	4.475.000	18,06	20.305.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	480.000			175.000						175.000		305.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara, dan panitia	14.500.000			4.300.000						4.300.000		10.200.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniawan	500.000									-		500.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja jasa tenaga kebersihan	300.000									-		300.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas paket meeting Dalam kota	9.000.000									-		9.000.000
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualita Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	14.944.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	14.944.000
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	14.944.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	14.944.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan bakar dan pelumas	1.300.000									-		1.300.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	594.000									-		594.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara, dan panitia	12.000.000									-		12.000.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniawan	750.000									-		750.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja jasa tenaga kebersihan	300.000									-		300.000
02.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	204.239.000	-	-	3.750.000	-	-	-	-	-	3.750.000	1,84	200.489.000

2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan para Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	15.760.000	-	-	750.000	-	-	-	-	-	750.000	4,76	15.010.000
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pemdampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan program/kegiatan pencegahan KTA	15.760.000	-	-	750.000	-	-	-	-	-	750.000	4,76	15.010.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan bakar dan pelumas	3.900.000			750.000						750.000		3.150.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	3.760.000									-		3.760.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara, dan panitia	8.100.000									-		8.100.000
2.08.07.2.02	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	188.479.000	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	3.000.000	1,59	185.479.000
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	171.659.000	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	3.000.000	1,75	168.659.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan bakar dan pelumas	10.245.000									-		10.245.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	10.814.000									-		10.814.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	130.600.000			3.000.000						3.000.000		127.600.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas paket meeting Dalam kota	20.000.000									-		20.000.000
2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	16.820.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	16.820.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan bakar dan pelumas	4.400.000									-		4.400.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	3.670.000									-		3.670.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara, dan panitia	3.750.000									-		3.750.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas paket meeting Dalam kota	5.000.000									-		5.000.000
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	16.172.432.216	-	-	590.072.426	735.175.000	614.451.900	646.407.900	480.524.400	688.016.200	3.754.647.826	23,22	12.417.784.390
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	414.600.000	-	-	30.822.000	-	26.326.000	19.306.000	18.980.000	30.766.000	126.200.000	30,44	288.400.000
2.14.02.2.01	Pemaduan dan sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	123.000.000	-	-	4.400.000	-	10.040.000	-	7.320.000	7.680.000	29.440.000	23,93	93.560.000
2.14.02.2.01.0016	Implementasi Pendidikan kependudukan jalur informasi di kelompok kegiatan masyarakat binaan	50.000.000	-	-	4.400.000	-	4.400.000	-	4.400.000	4.400.000	17.600.000	35,20	32.400.000

5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan bakar dan pelumas	1.500.000									-		1.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	2.460.000									-		2.460.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	14.900.000			1.200.000		1.200.000		1.200.000	1.200.000	4.800.000		10.100.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara, dan panitia	9.600.000			1.200.000		1.200.000		1.200.000	1.200.000	4.800.000		4.800.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja jasa tenaga kebersihan	200.000									-		200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.590.000									-		2.590.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam kotakurang dari 8 jam	2.850.000									-		2.850.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas paket meeting Dalam kota	15.900.000			2.000.000		2.000.000		2.000.000	2.000.000	8.000.000		7.900.000
2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan kependudukan jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	73.000.000	-	-	-	-	5.640.000	-	2.920.000	3.280.000	11.840.000	16,22	61.160.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan bakar dan pelumas	7.800.000					1.200.000		700.000	1.250.000	3.150.000		4.650.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	1.390.000									-		1.390.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara, dan panitia	4.400.000									-		4.400.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniawan	500.000									-		500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota kurang/lebih dari 8 jam	2.850.000								550.000	550.000		2.300.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas paket meeting Dalam kota	37.560.000									-		37.560.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas paket meeting Luar kota	18.500.000					4.440.000		2.220.000	1.480.000	8.140.000		10.360.000
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	291.600.000	-	-	26.422.000	-	16.286.000	19.306.000	11.660.000	23.086.000	96.760.000	33,18	194.840.000
2.14.03.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	75.600.000	-	-	-	-	6.400.000	-	-	12.600.000	19.000.000	25,13	56.600.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas paket meeting Dalam kota	75.600.000					6.400.000			12.600.000	19.000.000		56.600.000
2.14.03.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	216.000.000	-	-	26.422.000	-	9.886.000	19.306.000	11.660.000	10.486.000	77.760.000	36,00	138.240.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan bakar dan pelumas	22.000.000			600.000						600.000		21.400.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	9.100.000									-		9.100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	47.700.000			5.300.000				11.660.000		16.960.000		30.740.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja kawat/faxsimil/Internet/TV berlangganan	102.900.000			19.772.000		9.886.000	9.306.000		10.486.000	49.450.000		53.450.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota kurang/lebih dari 8 jam	14.300.000			750.000						750.000		13.550.000

5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas paket meeting Dalam kota	20.000.000						10.000.000			10.000.000		10.000.000
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	10.415.052.716	-	-	553.910.426	264.175.000	564.575.900	132.551.900	432.604.400	186.250.200	2.134.067.826	20,49	8.280.984.890
2.14.03.2.01	Pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan budaya lokal	1.871.223.000	-	-	176.705.620	56.900.000	3.638.100	92.602.400	32.116.900	70.538.200	432.501.220	23,11	1.438.721.780
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	80.130.000	-	-	15.502.500	-	-	-	7.080.000	-	22.582.500	28,18	57.547.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	2.860.000									-		2.860.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	41.870.000			15.502.500				3.180.000		18.682.500		23.187.500
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara, dan panitia	26.400.000									-		26.400.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota kurang/lebih dari 8 jam	9.000.000							3.900.000		3.900.000		5.100.000
2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi sarana KIE Program Bangga Kencana	68.428.000	-	-	2.360.000	-	2.360.000	2.360.000	-	2.360.000	9.440.000	13,80	58.988.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban pengelola keuangan	25.960.000			2.360.000		2.360.000	2.360.000		2.360.000	9.440.000		16.520.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan bakar dan pelumas	8.550.000									-		8.550.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	158.000									-		158.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Kertas dan cover)	12.460.000									-		12.460.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	5.300.000									-		5.300.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota kurang/lebih dari 8 jam	6.000.000									-		6.000.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas paket meeting Dalam kota	10.000.000									-		10.000.000
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan operasional dan sarana di Balai penyuluhan Bangga Kencana	892.800.000	-	-	116.542.720	56.900.000	1.278.100	60.363.200	3.046.900	56.458.200	294.589.120	33,00	598.210.880
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	23.704.000					1.278.100	718.900	1.437.900	1.358.200	4.793.100		18.910.900
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	53.000.000									-		53.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara, dan panitia	12.000.000									-		12.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja jasa tenaga kebersihan	432.000.000			72.000.000	36.000.000		36.000.000		34.200.000	178.200.000		253.800.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja jasa tenaga keamanan	250.800.000			41.800.000	20.900.000		20.900.000		20.900.000	104.500.000		146.300.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja tagihan air	19.890.000			1.723.720			1.620.800	790.500		4.135.020		15.754.980
5.1.02.02.01.0061	Belanja tagihan listrik	26.406.000			1.019.000			1.123.500	818.500		2.961.000		23.445.000

5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas paket meeting Dalam kota	75.000.000									-		75.000.000
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Kekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	300.200.000	-	-	29.879.400	-	-	29.879.200	-	-	59.758.600	19,91	240.441.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	9.400.000			799.400			799.200			1.598.600		7.801.400
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	190.800.000			19.080.000			19.080.000			38.160.000		152.640.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara, dan panitia	100.000.000			10.000.000			10.000.000			20.000.000		80.000.000
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui Media Massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	179.995.000	-	-	-	-	-	-	-	11.720.000	11.720.000	6,51	168.275.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan bakar dan pelumas	1.500.000								900.000	900.000		600.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	86.718.000									-		86.718.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Suvenir/cinder mata)	1.800.000									-		1.800.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya)	3.900.000								900.000	900.000		3.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	23.860.000								2.120.000	2.120.000		21.740.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara, dan panitia	2.000.000									-		2.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja jasa tenaga kebersihan	600.000									-		600.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja jasa Juri perlombaan/pertandingan	7.700.000									-		7.700.000
5.1.02.02.05.0055	Belanja jasa iklan/Reklame, film dan pemotretan	20.000.000									-		20.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.990.000								1.800.000	1.800.000		3.190.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota kurang/lebih dari 8 jam	1.250.000									-		1.250.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas paket meeting Dalam kota	2.000.000									-		2.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja hadiah yang bersifat perlombaan	9.000.000									-		9.000.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja penghargaan atas suatu prestasi	14.677.000								6.000.000	6.000.000		8.677.000
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan budaya lokal	100.000.000	-	-	4.206.000	-	-	-	2.220.000	-	6.426.000	6,43	93.574.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan bakar dan pelumas	4.740.000			1.350.000						1.350.000		3.390.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja bahan bahan lainnya	3.000.000									-		3.000.000

5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	3.540.000			606.000						606.000		2.934.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Suvenir/cinderamata)	6.000.000									-		6.000.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya)	30.000.000									-		30.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	20.730.000									-		20.730.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara, dan panitia	19.800.000									-		19.800.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan	2.000.000									-		2.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.440.000							2.220.000		2.220.000		2.220.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota kurang/lebih dari 8 jam	4.750.000			2.250.000						2.250.000		2.500.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas paket meeting Dalam kota	1.000.000									-		1.000.000
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja advokasi kepada stakeholder dan mitra kerja	249.670.000	-	-	8.215.000	-	-	-	19.770.000	-	27.985.000	11,21	221.685.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	3.590.000									-		3.590.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	178.080.000			8.215.000				12.720.000		20.935.000		157.145.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara, dan panitia	33.000.000									-		33.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota kurang/lebih dari 8 jam	15.000.000							7.050.000		7.050.000		7.950.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas paket meeting Dalam kota	20.000.000									-		20.000.000
2.14.03.2.02	Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	6.292.704.000	-	-	237.614.900	177.925.000	189.324.800	909.500	345.354.500	600.000	951.728.700	15,12	5.340.975.300
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	1.066.177.000	-	-	-	177.925.000	-	-	140.450.000	-	318.375.000	29,86	747.802.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	120.000									-		120.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	27.507.000									-		27.507.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas paket meeting Dalam kota	1.038.550.000				177.925.000			140.450.000		318.375.000		720.175.000
2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di lini Lapangan oleh PKB/PLKB	2.326.600.000	-	-	232.339.400	-	185.000.000	909.500	202.050.000	600.000	620.898.900	26,69	1.705.701.100
5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan bakar dan pelumas	3.000.000									-		3.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	11.310.000			839.400			909.500			1.748.900		9.561.100
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	31.800.000									-		31.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara, dan panitia	3.000.000									-		3.000.000

5.1.02.02.01.0030	Belanja jasa tenaga kebersihan	1.000.000									-		1.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.440.000									-		4.440.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota kurang dari 8 jam	5.250.000							1.050.000	600.000	1.650.000		3.600.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas paket meeting Dalam kota	2.266.800.000			231.500.000		185.000.000		201.000.000		617.500.000		1.649.300.000
2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, pelayanan dan pengembangan program Bangga Kencana untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB)	2.899.927.000	-	-	5.275.500	-	4.324.800	-	2.854.500	-	12.454.800	0,43	2.887.472.200
5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan bakar dan pelumas	10.500.000			950.000						950.000		9.550.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	9.147.000			1.165.500		1.969.800		499.500		3.634.800		5.512.200
5.1.02.01.01.0027	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - Benda pos	2.000.000			600.000		500.000		500.000		1.600.000		400.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	75.000.000									-		75.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	5.300.000			1.060.000		1.855.000		1.855.000		4.770.000		530.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.480.000									-		1.480.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota kurang dari 8 jam	41.500.000			1.500.000						1.500.000		40.000.000
5.1.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	56.000.000									-		56.000.000
5.1.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat kantor lainnya	16.800.000									-		16.800.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Modal mebel	103.400.000									-		103.400.000
5.1.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	56.628.000									-		56.628.000
5.1.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer unit lainnya	150.000.000									-		150.000.000
5.1.02.10.02.0005	Belanja Modal peralatan Komputer unit lainnya	2.000.000									-		2.000.000
5.1.03.01.01.0001	Belanja Modal bangunan gedung kantor	2.370.172.000									-		2.370.172.000
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan Alat dan obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.547.325.000	-	-	62.315.000	-	303.210.000	16.065.000	-	109.752.000	491.342.000	31,75	1.055.983.000
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan obat Kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	36.000.000	-	-	1.900.000	-	4.150.000	-	-	-	6.050.000	16,81	29.950.000

5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan bakar dan pelumas	18.000.000			850.000		2.050.000				2.900.000		15.100.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota kurang dari 8 jam	18.000.000			1.050.000		2.100.000				3.150.000		14.850.000
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	1.473.978.000	-	-	57.355.000	-	290.339.000	-	-	109.752.000	457.446.000	31,03	1.016.532.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	263.000								255.000	255.000		8.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	213.325.000			9.010.000		40.863.000				49.873.000		163.452.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja jasa tenaga Kesehatan	804.340.000			27.745.000		162.876.000			109.497.000	300.118.000		504.222.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota kurang 8 jam	-									-		-
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas paket meeting Dalam kota	456.050.000			20.600.000		86.600.000				107.200.000		348.850.000
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk jaringan dan jejaringnya	37.347.000	-	-	3.060.000	-	8.721.000	16.065.000	-	-	27.846.000	74,56	9.501.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan bakar dan pelumas	5.580.000									-		5.580.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	271.000									-		271.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	9.646.000			1.060.000		3.021.000	5.565.000			9.646.000		-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota kurang/lebih 8 jam	3.650.000									-		3.650.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas paket meeting Dalam kota	18.200.000			2.000.000		5.700.000	10.500.000			18.200.000		-
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	703.800.716	-	-	77.274.906	29.350.000	68.403.000	22.975.000	55.133.000	5.360.000	258.495.906	36,73	445.304.810
2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan dan pembinaan kesertaan ber-KB	117.720.000	-	-	40.464.906	2.050.000	6.620.000	-	750.000	5.360.000	55.244.906	46,93	62.475.094
5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan bakar dan pelumas	16.000.000			1.150.000		2.000.000			1.300.000	4.450.000		11.550.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	720.000					500.000			200.000	700.000		20.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	2.650.000					1.900.000		750.000		2.650.000		-
5.1.02.02.01.0014	Belanja jasa tenaga kesehatan	57.000.000			32.224.906						32.224.906		24.775.094
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota kurang 8 jam	17.850.000			1.350.000	2.050.000				900.000	4.300.000		13.550.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas paket meeting Dalam kota	5.000.000			5.000.000						5.000.000		-

5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas paket meeting Luar kota	18.500.000			740.000		2.220.000			2.960.000	5.920.000		12.580.000
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	5.348.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	5.348.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	313.000									-		313.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	5.035.000									-		5.035.000
2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	75.330.716	-	-	1.970.000	-	8.340.000	22.975.000	8.480.000	-	41.765.000	55,44	33.565.716
5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan bakar dan pelumas	6.120.000			950.000		1.000.000		850.000		2.800.000		3.320.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	1.280.716						450.000			450.000		830.716
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	18.550.000						11.925.000			11.925.000		6.625.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara, dan panitia	8.800.000							5.400.000		5.400.000		3.400.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja jasa tenaga kebersihan	1.200.000						600.000			600.000		600.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota kurang 8 jam	5.000.000					800.000		750.000		1.550.000		3.450.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas paket meeting Dalam kota	25.500.000			650.000		5.800.000	10.000.000			16.450.000		9.050.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas paket meeting Luar kota	8.880.000			370.000		740.000		1.480.000		2.590.000		6.290.000
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	505.402.000	-	-	34.840.000	27.300.000	53.443.000	-	45.903.000	-	161.486.000	31,95	343.916.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	208.502.000			14.840.000		33.443.000		18.603.000		66.886.000		141.616.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara, dan panitia	1.200.000									-		1.200.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas paket meeting Dalam kota	295.700.000			20.000.000	27.300.000	20.000.000		27.300.000		94.600.000		201.100.000
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.342.779.500	-	-	5.340.000	471.000.000	23.550.000	494.550.000	28.940.000	471.000.000	1.494.380.000	27,97	3.848.399.500
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	397.279.500	-	-	5.340.000	-	-	-	5.390.000	-	10.730.000	2,70	386.549.500
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	38.460.000	-	-	5.340.000	-	-	-	4.090.000	-	9.430.000	24,52	29.030.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan bakar dan pelumas	5.970.000			900.000				2.800.000		3.700.000		2.270.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	3.560.000									-		3.560.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara, dan panitia	7.200.000									-		7.200.000

5.1.02.02.01.0030	Belanja jasa tenaga kebersihan	600.000									-		600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.180.000			4.440.000				740.000		5.180.000		-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota kurang dari 8 jam	2.150.000							550.000		550.000		1.600.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas paket meeting Dalam kota	13.800.000									-		13.800.000
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan sarana kelompok kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	300.000.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja bahan bahan lainnya	294.542.600									-		294.542.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	5.457.400									-		5.457.400
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis pelaksanaan/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	10.884.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	10.884.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan bakar dan pelumas	3.180.000									-		3.180.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	1.204.500									-		1.204.500
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara, dan panitia	1.300.000									-		1.300.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja jasa tenaga kebersihan	200.000									-		200.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas paket meeting Dalam kota	5.000.000									-		5.000.000
2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	47.935.000	-	-	-	-	-	-	1.300.000	-	1.300.000	2,71	46.635.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan bakar dan pelumas	5.205.000									-		5.205.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	4.230.000									-		4.230.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara, dan panitia	12.500.000							1.300.000		1.300.000		11.200.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja jasa tenaga kebersihan	1.000.000									-		1.000.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas paket meeting Dalam kota	25.000.000									-		25.000.000
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui	4.945.500.000	-	-	-	471.000.000	23.550.000	494.550.000	23.550.000	471.000.000	1.483.650.000	30,00	3.461.850.000

	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga												
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.590.500.000	-	-	-	235.500.000	23.550.000	259.050.000	23.550.000	235.500.000	777.150.000	30,00	1.813.350.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (Alat Tulis Kantor)	235.500.000					23.550.000	23.550.000	23.550.000		70.650.000		164.850.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas paket meeting Dalam kota	2.355.000.000				235.500.000		235.500.000		235.500.000	706.500.000		1.648.500.000
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.355.000.000	-	-	-	235.500.000	-	235.500.000	-	235.500.000	706.500.000	30,00	1.648.500.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas paket meeting Dalam kota	2.355.000.000				235.500.000		235.500.000		235.500.000	706.500.000		1.648.500.000
	Jumlah	23.122.689.154	281.714.958	125.774.521	1.174.778.972	1.057.278.604	791.243.084	899.193.735	571.452.774	1.129.487.983	6.030.924.631	26,08	17.091.764.523

Capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal sampai pada Triwulan II umumnya tercapai. **Ada beberapa sub kegiatan yang capaian kinerjanya kurang maksimal dikarenakan :**

1. Ada beberapa sub kegiatan yang pelaksanaannya ada di triwulan IV
2. Ada sub kegiatan untuk bangunan fisik dalam proses pelaksanaan konstruksi

2.2 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat daerah

Capaian Program yang tidak tercapai

2.3 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab

1. Adanya dukungan Anggaran yang memadai, terutama untuk mendukung Program
2. Mengentimbangan kesertaan stakeholder terkait

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)
Kabupaten Kendal

DP2KBP2PA Kabupaten Kendal

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Program	Indikator kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerjs Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target renja Perangkat daerah Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun (n-2)2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase ketercapaian penunjang urusan perangda	100	100	100	100	1	100	300	3
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangda	100	100	100	100	1	100	300	3
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2	2	2	2	1	2	6	3
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
2.14.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12	12	12	12	1	12	36	3
2.14.01.2.02.02	Penyediaan adm pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	1	1	1	1	1	3	3
2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	100	100	100	1	100	300	3
2.14.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	1	1	1	1	1	1	3	3

2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangka	100	100%	100%	100%	1	100%	3	0
2.14.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	57	50	52	52	1	54	154	3
2.14.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	12	12	12	1	12	36	3
2.14.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	13	10	12	12	1	13	34	3
2.14.01.2.06.05	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	1	1	1	1	1	1	3	3
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	1	1	1	1	3	3
2.14.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1	1	1	1	1	1	3	3
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	100	100	1	100	300	3
2.14.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	7	7	7	7	1	7	21	3
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100%	100%	100%	1	100%	3	0
2.14.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1	1	1	1	1	1	3	3
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	1	1	1	1	1	1	3	3
2.14.01.2.08.03	Penyediaan Jasa peraalatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	1	1	1	1	1	3	3
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1	1	1	1	1	1	3	3
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	100	100	1	12	300	3
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	113	113	113	113	1	113	339	3
2.14.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	2	2	2	2	1	2	6	3

2.14.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	3	3
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Prosentase tersosialisasinya kebijakan PUG	50	40	50	50	1	50	140	3
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase tersosialisasinya kebijakan PUG	77,7	64,1	68,75	68	0,989091	77,7	201	3
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) kewenangan kabupaten / kota	1	1	1	1	1	1	3	3
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah perangkat yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan responsif gender (PPRG) kewenangan Kab/kota kewenangan Kabupaten / Kota	72	72	72	72	1	72	216	3
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemberdayaan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kab/Kota	100	100	100	100	1	100	300	3
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/kota	1	1	1	1	1	1	3	3
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase tersosialisasinya informasi kebijakan dan pendamping	100%	100%	100%	98%	0,98	100%	3	3
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan Kab/Kota	29	29	29	29	1	29	87	3

2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten / Kota yang mendapat peningkatan kapasitas	200	200	200	200	1	200	600	3
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota yang tersedia	1	1	1	1	1	1	3	3
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Prosentase Korban dapat terlayani	100	100	100	95%	0,0095	100	201	2
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prosenrase Korban dapat terlayani	100	100	100	98%	0,0098	100	201	2
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan kabupaten/kota	1	1	1	1	1	1	3	3
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten / Kota	100	100	100	100	1	100	300	3
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten / Kota	20	20	20	20	1	20	60	3
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Prosentase pemberian edukasi pada anak	100	100	100	97	0,97	100	297	3
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	100	95	100	90	0,9	100	285	3
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat yang mendapat advokasi dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan Gender (KG) dan perlindungan anak kewenangan Kabupaten / Kota	72	72	72	72	1	72	216	3

2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) kesetaraan gender (KG) dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan kabupaten / kota yang tersedia	1	1	1	1	1	1	3	3
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak	100	100	100	100	1	1	300	3
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah pengumpulan, pengelolaan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	100	1	1	300	3
2.08.05.2.01.01	Penyajian Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	tersedianya data gender dan anak kabupaten / kota	1	1	1	1	1	1	3	3
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Presentase kecamatan layak anak	60	45	45	45	1	60	135	2
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan Kab/Kota	100	95	100	98	0,98	100	293	3
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha					#DIV/0!			#DIV/0!
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya jumlah lembaga pemenuhan hak anak	20	20	20	20	1	20	60	3
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kab/Kota	100	100	100	100	1	100	300	3
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten / kota	1	1	1	1	1	1	3	3
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota	1	1	1	1	1	1	3	3

2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prosentase kekerasan pada anak yang ditangani	100%	100%	100%	100	100	100%	102	102
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kab/Kota	100%	100%	100%	100	100	100%	102	102
2.08.07.2.01.02	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kab/Kota	1	1	1	1	1	1	3	3
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah layanan bagi Perlindungan anak	100%	100%	100%	100	100	100%	102	102
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan kewenangan Kab/Kota	100	100	100	100	1	100	300	3
2.08.07.2.02.02	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kab/Kota	20	20	20	20	1	20	60	3
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Prosentase Penurunan Usia Pernikahan Dini	100	100	100	100	1	100	300	3
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Dengan Pemerintah Daerah Kab / Kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	Prosentase laporan perkembangan akseptor dan PUS	100%	100%	100%	100	100	100%	102	102
2.14.02.2.01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal	1	1	1	1	1	1	3	3
2.14.02.2.01.11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah dokumen hasil pendidikan kependudukan jalur informal di kelompok kegiatan masyarakat binaan	1	1	1	1	1	1	3	3
2.14.02.2.01	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase laporan perkembangan akseptor dan PUS	100%	100%	100%	100	100	100%	102	102

2.14.02.2.01.10	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal	1	1	1	1	1	1	3	3
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prosentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet need)	14	15,77	14	15,77	1,126429	14	46	3
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah pelaksanaan advokasi komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan lokal	100%	90%	100%	90	90	100%	92	92
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah unit sarana penyediaan dan pendistribusian KIE program bangga kencana (Pembangunan Keluarga , Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai kearifan budaya lokal	1	1	1	1	1	1	3	3
2.14.03.2.01.09	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah unit sarana penyediaan dan pendistribusian KIE program bangga kencana (Pembangunan Keluarga , Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai kearifan budaya lokal	1	1	1	1	1	1	3	3
2.14.03.2.01.10	Pengelolaan operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1	1	1	1	1	1	3	3
2.14.03.2.01.11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1	1	1	1	1	1	3	3

2.14.03.2.01.12	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1	1	1	1	1	1	3	3
2.14.03.2.01.13	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1	1	1	1	1	1	3	3
2.14.03.2.01.14	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1	1	1	1	1	1	3	3
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Prosentase pengetahuan dan ketrampilan kader PPKBD	100	100%	100%	100	100	100%	102	1
2.14.03.2.02.04	Penggerakkan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1899	1899	1899	1899	1	1899	5.697	3
2.14.03.2.02.05	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1	1	1	1	1	1	3	3

2.14.03.2.02.06	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1	1	1	1	1	1	3	3
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten / Kota	100	80	100	90	0,9	100	270	3
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4500	4300	4500	4000	0,888889	4500	12.800	3
2.14.03.2.03.03	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4500	4300	4500	4000	0,888889	4500	12.800	3
2.14.03.2.03.06	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB	70	70	70	70	1	70	210	3
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	70	70	70	70	1	70	210	3
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tk daerah Kab/Kota dlm Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber KB	Prosentase penurunan angka kematian ibu	100%	95%	100%	90	90	100%	92	92

2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah organisasi yang mendapatkan penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	30	30	30	30	1	90	90	3
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan Keluarga berencana)di Kamoung Kb	42	42	42	42	1	42	126	3
2.14.03.2.04.04	Pembinaan terpadu Kampung KB	Jumlah laporan hasil pembinaan terpadu kampung KB	1	1	1	1	1	1	3	3
2.14.03.2.04.06	Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan Keluarga berencana)di Kamoung Kb	42	42	42	42	1	42	126	3
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase Kelompok Masyarakat Dibidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera Yang Dibina	60	50	60	55	0,916667	60	165	3
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase meningkatnya ketahanan keluarga melalui tribina	100%	95%	100%	90	90	100%	92	92
2.14.04.2.01.16	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	80	80	80	80	1	80	240	3
2.14.04.2.01.17	Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	Jumlah laporan hasil promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	1	1	1	1	1	1	3	3
2.14.04.2.01.18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	80	80	80	80	1	80	240	3

2.14.04.2.01.19	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader yang mengikuti orientasi/pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan pemberdayaan ekonomi keluarga / UPPKS)	3600	3500	3600	3000	0,833333	3600	10.100	3
2.14.04.2.01.21	Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Jumlah laporan hasil orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	1	1	1	1	1	1	3	3
2.14.04.2.01.24	Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	Jumlah kader pengelola dan pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan pemberdayaan ekonomi keluarga / UPPKS)	3600	3500	3600	3000	0,833333	3600	10.100	3
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase meningkatnya ketahanan keluarga melalui tribina	100%	95%	100%	90	90	100%	92	92
2.14.04.2.02.05	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	80	80	80	80	1	80	240	3
2.14.04.2.02.06	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	80	80	80	80	1	80	240	3

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal tahun 2024, pelaksanaannya difokuskan pada bulan September, Oktober, Nopember dan Desember tahun 2024. Renja perubahan merupakan dokumen perencanaan perangkat sebagai tindak lanjut agar pelayanan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat maksimal / berjalan lancar.

Rencana kerja dan Pendanaan dapat lihat pada: Lampiran Rancangan Akhir Perubahan RKPD 2024.

BAB IV PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal ini diharapkan Program dan Kegiatan dan sub kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan memberikan kontribusi untuk pembangunan Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kendal, 9 Agustus 2024

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KENDAL**



ALBERTUS HENDRI S., S.P., M.T.

Pembina

NIP. 19810522 2005011010

LAMPIRAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KENDAL TAHUN 2024																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							22.660.238.677,00	23.122.689.154,00	22.429.270.654,00	-230.968.023,00							27.426.453.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							22.660.238.677,00	23.122.689.154,00	22.429.270.654,00	-230.968.023,00							27.426.453.000,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							6.379.913.677,00	6.950.256.938,00	6.139.827.938,00	-240.085.739,00							7.053.206.000,00	
1.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	persentase OPD yang Mengimplemetasikan PUG				100.00 %	100.00 %	464.065.000,00	399.991.702,00	399.991.702,00	10.935.000,00							475.000.000,00	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan duniausaha kewenangan Kab/Kota Jumlah Peserta Sosialisasi dan launching Desa layak Anak				100 % 115 orang/k egiatan	100 % 115 orang/k egiatan	145.000.000,00	79.750.000,00	79.750.000,00	-65.250.000,00			-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	-		135.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				100% Dokumen	100% Dokumen	75.000.000,00	41.800.000,00	41.800.000,00	-33.200.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			70.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				100% Perangkat Daerah	100% Perangkat Daerah	70.000.000,00	37.950.000,00	37.950.000,00	-32.050.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			65.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kab/kota				100 %	100 %	25.000.000,00	18.070.000,00	18.070.000,00	-6.930.000,00			-	- -	-		25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				240 Dokumen	240 Dokumen	25.000.000,00	18.070.000,00	18.070.000,00	-6.930.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota				75 %	75 %	294.065.000,00	302.171.702,00	302.171.702,00	8.106.702,00			-	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0 Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0	-		315.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				29 Lembaga	29 Lembaga	49.065.000,00	138.171.702,00	138.171.702,00	89.106.702,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNGAANNYA BIDANG PENDIDIKAN INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0 Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				150 Orang	150 Orang	120.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-40.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNGAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			130.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				0 Dokumen	0 Dokumen	125.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	-41.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNGAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			135.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kekerasan terhadap perempuan yang ditangani				100.00 %	100.00 %	195.000.000,00	167.836.000,00	167.836.000,00	129.506.000,00							324.506.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan pencegahan kekerasan terhadap perempuan				100 %	100 %	65.000.000,00	27.900.000,00	27.900.000,00	-37.100.000,00			-	- -	-		200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Dokumen	10 Dokumen	65.000.000,00	27.900.000,00	27.900.000,00	-37.100.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota				100 %	100 %	130.000.000,00	139.936.000,00	139.936.000,00	9.936.000,00			-	- -	-		124.506.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				-	20 0	0,00	59.936.000,00	59.936.000,00	59.936.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			104.506.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Layanan	10 Layanan	130.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN INSENTIF FISKAL	-	- -			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang dibina				100.00 %	100.00 %	160.000.000,00	76.625.000,00	76.625.000,00	-45.000.000,00							115.000.000,00	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota Jumlah peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota				100 %	100 %	160.000.000,00	76.625.000,00	76.625.000,00	-83.375.000,00			-	- -	-		115.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	85.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-35.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			35.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	26.625.000,00	26.625.000,00	-48.375.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			80.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Prosentase OPD yang memiliki data pilah gender				100.00 %	100.00 %	60.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	15.000.000,00							75.000.000,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengumpulan pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah Kab/Kota				100 %	100 %	60.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	120.000.000,00			-	- -	-		75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				6 Dokumen	6 Dokumen	60.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	120.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	-	- -			75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Prosentase Kecamatan Layak Anak Persentase Kecamatan Layak Anak				100.00 100 % %	100 100.00 % %	275.000.000,00	312.724.000,00	393.124.000,00	510.000.000,00							785.000.000,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan Dunia Usaha kewenangan Kabupaten/Kota				100 %	100 %	235.000.000,00	297.780.000,00	378.180.000,00	143.180.000,00			-	- -	-		235.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				4 Organisasi	4 Organisasi	160.000.000,00	273.000.000,00	353.400.000,00	193.400.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN INSENTIF FISKAL	-	-			165.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	24.780.000,00	24.780.000,00	-50.220.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			70.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kab/Kota				100 %	100 %	40.000.000,00	14.944.000,00	14.944.000,00	-25.056.000,00			-	-	-		550.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	40.000.000,00	14.944.000,00	14.944.000,00	-25.056.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			550.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Presentase kekerasan pada anak yang ditangani				100.00 %	100.00 %	358.502.000,00	204.239.000,00	204.239.000,00	1.498.000,00							360.000.000,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kab/Kota				100 %	100 %	20.000.000,00	15.760.000,00	15.760.000,00	-4.240.000,00			-	-	-		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																		
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				7 Orang	7 Orang	20.000.000,00	15.760.000,00	15.760.000,00	-4.240.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kab/Kota				100 %	100 %	338.502.000,00	188.479.000,00	188.479.000,00	-150.023.000,00			-	-	-		340.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				11 Orang	11 Orang	318.502.000,00	171.659.000,00	171.659.000,00	-146.843.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			320.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	16.820.000,00	16.820.000,00	-3.180.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah				100 %	100 %	4.867.346.677,00	5.608.841.236,00	4.718.012.236,00	51.353.323,00							4.918.700.000,00	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	91.350.000,00	18.300.000,00	15.000.000,00	-76.350.000,00			-	-	-		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100% Dokumen	100% Dokumen	50.000.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	-39.200.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100% Laporan	100% Laporan	41.350.000,00	7.500.000,00	4.200.000,00	-37.150.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			80.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	3.721.367.877,00	4.236.340.036,00	3.186.340.036,00	-535.027.841,00			-	- -	-		3.820.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100% Oran g/bulan	100% Oran g/bulan	3.410.367.877,00	4.236.340.036,00	3.186.340.036,00	-224.027.841,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				100% Dokumen	100% Dokumen	311.000.000,00	0,00	0,00	-311.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			320.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	76.904.000,00	0,00	0,00	-76.904.000,00			-	- -	-		80.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				100% Dokumen	100% Dokumen	76.904.000,00	0,00	0,00	-76.904.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	298.752.400,00	529.201.200,00	587.672.200,00	288.919.800,00			-	- -	-		349.700.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100% Paket	100% Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	52.500.000,00	12.500.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			52.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100% Paket	100% Paket	25.000.000,00	16.670.000,00	16.670.000,00	-8.330.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100% Paket	100% Paket	13.252.400,00	10.448.200,00	10.449.200,00	-2.803.200,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				100% Dokumen	100% Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			2.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100% Laporan	100% Laporan	200.000.000,00	452.259.000,00	498.229.000,00	298.229.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			225.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.14.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	18.500.000,00	9.824.000,00	9.824.000,00	-8.676.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	16.398.400,00	0,00	10.000.000,00	-6.398.400,00			-	- -	-		65.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				100% Unit	100% Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				100% Unit	100% Unit	16.398.400,00	0,00	10.000.000,00	-6.398.400,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	328.574.000,00	647.000.000,00	722.000.000,00	393.426.000,00			-	- -	-		238.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			3.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				100% Laporan	100% Laporan	130.000.000,00	130.000.000,00	160.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			160.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.14.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100% Laporan	100% Laporan	23.000.000,00	32.000.000,00	75.000.000,00	52.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				100% Laporan	100% Laporan	172.574.000,00	480.000.000,00	482.000.000,00	309.426.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	334.000.000,00	178.000.000,00	197.000.000,00	-137.000.000,00			-	- -	-		265.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				97 Unit	97 Unit	74.000.000,00	74.000.000,00	89.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			89.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.14.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				100% Unit	100% Unit	10.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			1.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				100% Unit	100% Unit	250.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-150.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			175.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							16.280.325.000,00	16.172.432.216,00	16.289.442.716,00	9.117.716,00							20.373.247.000,00	
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase penurunan usia pernikahan dini				20.00 %	20.00 %	210.000.000,00	414.600.000,00	497.550.000,00	-50.000.000,00							160.000.000,00	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Peserta Pelatihan Sekolah Siaga dan Jumlah Peserta BKL				20 %	20 %	210.000.000,00	123.000.000,00	205.950.000,00	-4.050.000,00			-	- -	-		160.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan																		
			Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	75.000.000,00	50.000.000,00	132.950.000,00	57.950.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			80.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal																		
			Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal				1 Kegiatan	1 Kegiatan	135.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	-62.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			80.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	291.600.000,00	291.600.000,00	291.600.000,00			-	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0 Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				-	0 Laporan	0,00	75.600.000,00	75.600.000,00	75.600.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0 Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				-	0 Dokumen	0,00	216.000.000,00	216.000.000,00	216.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0 Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentaes kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)				10.00 %	10.00 %	10.111.825.000,00	10.415.052.716,00	10.416.234.216,00	4.441.422.000,00							14.553.247.000,00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				10 %	10 %	1.248.900.000,00	1.871.223.000,00	1.871.223.000,00	622.323.000,00			-	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0 Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0	-		2.178.700.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				-	0 0	0,00	80.130.000,00	80.130.000,00	80.130.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0 Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0			90.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana																			
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Unit	1 Unit	172.200.000,00	68.428.000,00	68.428.000,00	-103.772.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			182.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Laporan	1 Laporan	866.700.000,00	892.800.000,00	892.800.000,00	26.100.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			867.700.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																			
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				-	1 Laporan	0,00	300.200.000,00	300.200.000,00	300.200.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0			270.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																			
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	140.000.000,00	179.995.000,00	179.995.000,00	39.995.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAK NON FISIK-BOKB-KB DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	- -			409.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																			
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	- -			230.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																			
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				-	0 Organisasi	0,00	249.670.000,00	249.670.000,00	249.670.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan			130.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				10 %	10 %	3.582.080.000,00	6.292.704.000,00	6.293.885.500,00	2.711.805.500,00			-	- -	-		6.448.927.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																			
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				1889 Orang	1889 Orang	1.162.600.000,00	0,00	0,00	-1.162.600.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																			
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				-	1 Orang	0,00	1.066.177.000,00	1.066.177.000,00	1.066.177.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0			59.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																			
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				10 Organisasi	10 Organisasi	2.359.480.000,00	2.326.600.000,00	2.326.600.000,00	-32.880.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	- -			3.500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	2.899.927.000,00	2.901.108.500,00	2.841.108.500,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-KB	-	- -			2.889.927.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				10 %	10 %	4.352.880.000,00	1.547.325.000,00	1.547.325.000,00	-2.805.555.000,00			-	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0 Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0	-		4.465.620.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																			
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				-	1 0	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0 Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				4600 Orang	4600 Orang	2.337.260.000,00	0,00	0,00	-2.337.260.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0 Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				-	0 Orang	0,00	1.473.978.000,00	1.473.978.000,00	1.473.978.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0 Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0			2.100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																			
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				42 Unit	42 Unit	2.015.620.000,00	0,00	0,00	-2.015.620.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-KB	-	- -			2.115.620.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				-	1 Laporan	0,00	37.347.000,00	37.347.000,00	37.347.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0 Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0			200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				10 %	10 %	927.965.000,00	703.800.716,00	703.800.716,00	-224.164.284,00			-	- -	-		1.460.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																			
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				30 Organisasi	30 Organisasi	170.000.000,00	117.720.000,00	117.720.000,00	-52.280.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			750.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																			
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				-	1 Dokumen	0,00	5.348.000,00	5.348.000,00	5.348.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0 Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				1 Laporan	1 Laporan	97.965.000,00	75.330.716,00	75.330.716,00	-22.634.284,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	- -			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				42 Kampung	42 Kampung	660.000.000,00	0,00	0,00	-660.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				-	1 0	0,00	505.402.000,00	505.402.000,00	505.402.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0 Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0			670.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	presentase kelompok masyarakat dibidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera yang dibina				80.00 %	80.00 %	5.958.500.000,00	5.342.779.500,00	5.375.658.500,00	-298.500.000,00							5.660.000.000,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				80 %	80 %	5.958.500.000,00	397.279.500,00	430.158.500,00	-5.528.341.500,00			-	- -	-		560.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)																		
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	1 Laporan	48.000.000,00	38.460.000,00	38.460.000,00	-9.540.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				5 Unit	5 Unit	25.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	275.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			395.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				0 Orang	0 Orang	45.000.000,00	10.884.500,00	43.763.500,00	-1.236.500,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			55.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	47.935.000,00	47.935.000,00	-27.065.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			85.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				1889 Orang	1889 Orang	5.765.500.000,00	0,00	0,00	-5.765.500.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	0,00	4.945.500.000,00	4.945.500.000,00	4.945.500.000,00			-	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0 Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0	-		5.100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				-	0 laporan	0,00	2.590.500.000,00	2.590.500.000,00	2.590.500.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0 Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0			2.400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				-	0 laporan	0,00	2.355.000.000,00	2.355.000.000,00	2.355.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0 Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0			2.700.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		J U M L A H							2.455.210.099.261,00	2.554.502.569.720,00	2.710.823.152.865,00	255.613.053.604,00						2.761.903.860.666,00		



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kegiatan yang sedang dilaksanakan selama tahun 2024 oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang Perhubungan.

Tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan Dinas Perhubungan sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang pembangunan Perhubungan. Sebagai bahan acuan dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan serta dokumen penetapan perubahan anggaran APBD 2024.



Daftar isi

KATA PENGANTAR..... 2

Daftar isi 3

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1. Latar Belakang 4

1.2. Landasan Hukum 5

1.3. Maksud dan Tujuan..... 6

1.4. Sistematika Penulisan Renja Dinas Perhubungan 7

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN..... 8

2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Dan Renstra Perangkat Daerah 8

2.2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 18

BAB. III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 19

BAB IV PENUTUP..... 40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata cara Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya Penyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Pada ketentuan Pasal 263 disebutkan bahwa dokumen perencanaan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target kinerja sasaran daerah, perkembangan kondisi terkini yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, perubahan proyeksi Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya yang akan digunakan untuk tahun berjalan, penambahan kegiatan baru, penghapusan kegiatan yang tidak relevan, perubahan indikator kinerja, target dan pagu kegiatan serta adanya refocussing anggaran termasuk perubahan pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer pusat ke daerah dan bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten/kota.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan peran Dinas Perhubungan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta mendukung program-program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khusus pada Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten Kendal perlu untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah

Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 20).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2024 sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perubahan dan DPPA.

- 2. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dengan tetap memperhatikan RKPD.
- 2. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan tahun 2024 yang mengacu pada Renstra dan RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan Renja Dinas Perhubungan

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
	Memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun berken dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
	Memuat uraian berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan tindak lanjut Renja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2024.
BAB IV	PENUTUP
	Memuat uraian berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan tindak lanjut Renja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2024.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Dan Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan tahun 2024 hampir seluruh program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Belanja langsung yang dianggarkan dalam pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 32.745.145.388,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.270.056.579,- atau 52,74 %.

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Kegiatan program penunjang urusan pemerintah daerah ini masih berjalan sehingga pemenuhan target masih belum tercapai. Adapun keterangan kegiatan yang belum mencapai target sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemenuhan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dalam setahun. Target kegiatan ini 100% dengan realisasi kegiatan sampai triwulan II sebesar 30%. Adapun anggaran kegiatan sebesar Rp. 16.630.000,- dengan realisasi Rp. 5.000.000,- (Realisasi keuangan 30,07%).
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah. Target kegiatan ini 100% dengan realisasi kegiatan sampai triwulan II 50%. Adapun anggaran kegiatan sebesar Rp. 8.013.074.299,- dengan realisasi keuangan 51,03 %.
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Target kegiatan ini 100% dengan realisasi kegiatan sampai triwulan II 46%. Adapun anggaran kegiatan sebesar Rp. 1.595.570.200,- dengan realisasi Rp. 673.506.643,- (Realisasi keuangan 42,21%).
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Target kegiatan ini 100% dengan realisasi kegiatan sampai triwulan II 33,81%. Adapun anggaran kegiatan sebesar Rp. 18.887.385.700,- dengan realisasi Rp. 11.267.344.461,- (Realisasi keuangan 59,66%).
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Target kegiatan ini 100%

dengan realisasi kegiatan sampai triwulan II 41,91%. Adapun anggaran kegiatan sebesar Rp. 354.703.800,- dengan realisasi Rp. 157.780.700,- (Realisasi keuangan 44,48%).

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Kegiatan program penunjang urusan pemerintah daerah ini masih berjalan sehingga pemenuhan target masih belum tercapai. Adapun keterangan kegiatan yang belum mencapai target sebagai berikut :

a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemenuhan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota. Target kegiatan ini 200 buah dengan realisasi kegiatan sampai triwulan II 43 buah. Adapun anggaran kegiatan sebesar Rp. 1.217.313.200,- dengan realisasi Rp. 321.131.970,- (Realisasi keuangan 26,38%).

b. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemenuhan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota. Target kegiatan ini 100% dengan realisasi kegiatan sampai triwulan II 0%. Adapun anggaran kegiatan sebesar Rp. 9.081.189,- dengan realisasi Rp. 0,- (Realisasi keuangan 0%). Kegiatan ini terlaksana pada semester II.

c. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemenuhan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Target kegiatan ini 100% dengan realisasi kegiatan sampai triwulan II 7,01%. Adapun anggaran kegiatan sebesar Rp. 190.015.000,- dengan realisasi Rp. 18.240.000,- (Realisasi keuangan 9,60%). Banyak kegiatan yang akan berjalan pada semester II.

d. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota. Target kegiatan ini 100% dengan realisasi kegiatan sampai triwulan II 19,17%. Adapun anggaran kegiatan sebesar Rp. 404.566.000,- dengan realisasi Rp. 46.816.430,- (Realisasi keuangan 11,57%). Banyak kegiatan yang akan berjalan pada semester II.

e. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemenuhan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan. Target kegiatan ini 100% dengan realisasi kegiatan sampai

triwulan II 28,80%. Adapun anggaran kegiatan sebesar Rp. 1.233.370.000,- dengan realisasi Rp. 514.600.360,- (Realisasi keuangan 41,72%).

- f. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemenuhan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Target kegiatan ini 100% dengan realisasi kegiatan sampai triwulan II 10,28%. Adapun anggaran kegiatan sebesar Rp. 170.464.000,- dengan realisasi Rp. 18.416.500,- (Realisasi keuangan 10,80%).

3. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

- a. Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemenuhan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal. Target kegiatan ini 100% dengan realisasi kegiatan sampai triwulan II 25,05%. Adapun anggaran kegiatan sebesar Rp. 652.972.000,- dengan realisasi Rp. 157.815.520,- (Realisasi keuangan 24,17%).

Anggaran kegiatan di semester I tahun 2024 ini terserap 52,74% dari anggaran yang tersedia tetapi untuk pelaksanaan kegiatan ataupun hasil dari kegiatan mencapai target kinerja rata-rata 50% dimana hasil capaian ini masih banyak belum terlaksana pada semester I dan akan di realisasikan pada semester II.

Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program yang tidak memenuhi target kinerja ada 3 program atau 100 % (3 dari 3 program), kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja ada 12 kegiatan atau 100 % (12 dari 12 kegiatan), sedangkan sub kegiatan yang tidak memenuhi target ada 33 sub kegiatan atau 100 % (33 dari 33 sub kegiatan).

Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan (nilainya sama)

Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan (nilainya sama) adalah nihil atau 0 %.

Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program / kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan adalah nihil atau 0 %.

Faktor – Faktor penyebab Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi penghambat tidak tercapainya target kinerja antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan yang harus menyesuaikan juknis dari pemerintah pusat
2. Pelaksanaan kegiatan yang harus menyesuaikan jadwal Rencana Anggaran Kas (RAK)
3. Data capaian kinerja yang tidak konsisten

Implikasi atas realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target terhadap target capaian program dan kegiatan

Dikarenakan adanya faktor-faktor penghambat berimplikasi pada tidak tercapainya target program dan kegiatan sehingga target-target program yang belum tercapai tersebut perlu perhatian khusus atau lebih diprioritaskan dan diambil kebijakan agar target tersebut dapat dicapai pada tahun rencana.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

1. Menyusun ulang pelaksanaan rencana kegiatan/sub kegiatan yang tidak tercapai I semester I ke Semester II tahun 2024;
2. Merencanakan kembali kegiatan/sub kegiatan yang tidak tercapai sampai dengan triwulan II dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan tahun 2024;
3. Menyusun kembali skala prioritas kegiatan/sub kegiatan;
4. Menambah alokasi anggaran untuk kegiatan/sub kegiatan yang prioritas dan mengurangi alokasi anggaran untuk kegiatan/sub kegiatan yang kurang prioritas.

Tabel 2.1
 Rekapuitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
 Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
 Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Dinas perhubungan Kabupaten Kendal

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	6	7	8	9	10	11
					DINAS PERHUBUNGAN								
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		100%	100%	25,78%	25,78%	100%	100%	100%
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	100%	38,67%	38,67%	100%	100%	100%
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersedia	100 %	100%	30,07%	30,07%	100%	100%	100%
2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Laporan	0 Laporan	30,07%	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersedia		100%	46%	46,18%	100%	100%	100%
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	56 Orang/bulan	28 Orang/bulan	51,55%	56 Orang/bulan	56 Orang/bulan	100%

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	6	7	8	9	10	11
2	15	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	40,81%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum		100%	33,81%	33,81%	100%	100%	100%
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Unit	60 Paket	35 Paket	58,42%	60 Paket	60 Paket	100%
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Paket	1 Paket	13,46%	12 Paket	12 Paket	100%
2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Unit	20 Paket	4 Paket	23,36%	20 Paket	20 Paket	100%
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Kali	48 Paket	13 Paket	27,60%	48 Paket	48 Paket	100%
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	12 Paket	0 Paket	0,00%	12 Paket	12 Paket	100%
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Kali	55 Laporan	25 Laporan	46,73%	55 Laporan	55 Laporan	100%
2	15	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Arsip	12 Dokumen	8 Dokumen	67,12%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia		100%	41,40%	41,40%	100%	100%	100%
2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Laporan	3 Laporan	29,77%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	12 Laporan	7 Laporan	61,61%	12 Laporan	12 Laporan	100%

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	6	7	8	9	10	11
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	96 Orang	96 Laporan	31 Laporan	32,81%	96 Laporan	96 Laporan	100%
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik		100%	41,91%	41,91%	100%	100%	100%
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 bulan	12 Unit	5 Unit	43,87%	12 Unit	12 Unit	100%
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	22 Unit	10 Unit	47,34%	22 Unit	22 Unit	100%
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Gedung	6 Unit	3 Unit	52,94%	6 Unit	6 Unit	100%
2	15	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 bulan	12 Unit	3 Unit	23,49%	12 Unit	12 Unit	100%
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Prasarana jalan dalam kondisi baik Persentase ketersediaan aplikasi penerbitan rekom online Persentase pemenuhan kebutuhan rambu jalan Persentase kendaraan (angkutan umum dan angkutan barang) yang lulus uji KIR	85%	89,29	14,50%	14,50%	89,29	89,29	100%
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan jalan dalam kondisi baik		200 buah	43 Buah	21,72%	200 buah	200 buah	100%

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	6	7	8	9	10	11
2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Halte	1 Unit	0 Unit	0,00%	1 Unit	1 Unit	100%
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	80 PJU	80 Unit	25 Unit	31,04%	80 Unit	80 Unit	100%
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	130 PJU	130 Unit	44 Unit	34,11%	130 Unit	130 Unit	100%
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal dalam kondisi baik		3 Unit	0,00%	0,00%	3 Unit	3 Unit	100%
2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	3 Unit	2 Unit	0 Unit	0,00%	2 Unit	2 Unit	100%
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Presentase kendaraan wajib uji yang terlayani		100%	7,01%	7,01%	100%	100%	100%
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	7.300 Set	1000 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	1000 Dokumen	1000 Dokumen	100%
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	11 Unit	11 Unit	1 Unit	14,03%	11 Unit	11 Unit	100%
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas		100%	19,17%	19,17%	100%	100%	100%
2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Laporan	0 Laporan	0,00%	50 Laporan	50 Laporan	100%
2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang	120 Buah	120 Dokumen	11 Dokumen	9,27%	120 Dokumen	120 Dokumen	100%

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	6	7	8	9	10	11
						dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan							
2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	11 Bulan	11 Laporan	5 Laporan	48,25%	11 Laporan	11 Laporan	100%
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah kegiatan pembinaan awak angkutan umum	1 Kegiatan	1 kegiatan	28,80%	28,80%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
2	15	02	2.08	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	4 Unit	4 Laporan	1 Laporan	45,40%	4 Laporan	4 Laporan	100%
2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	12 bulan	12 Laporan	5 Laporan	41,00%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2	15	02	2.08	0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Keg	1 Laporan	0 Laporan	0,00%	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Operasional bus sekolah dan angkutan orang	30 Kali	30 Kali	4 Kali	10,28%	30 Kali	30 Kali	100%
2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10 Unit	10 Laporan	1 Laporan	5,06%	10 Laporan	10 Laporan	100%
2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar	30 Kali	30 Unit	4 Unit	15,50%	30 Unit	30 Unit	100%

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	6	7	8	9	10	11
					dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia							
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pemenuhan pelabuhan sesuai standar	100%	100.00 %	24,17%	24,17%	100.00 %	100.00 %	100%
2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Capaian pemenuhan pelabuhan sesuai standar	100%	100%	25,05%	25,05%	100%	100%	100%
2	15	03	2.12	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 Unit	1 Dokumen	1 Dokumen	12,22%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	15	03	2.12	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	4500 Orang	4500 Unit	1704,63 Unit	37,88%	4500 Unit	4500 Unit	100%

2.2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil musrenbang tingkat Kecamatan, terdapat usulan kegiatan yang dimintakan masyarakat kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal dan juga ada Pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal. Pada umumnya usulan masyarakat dan Pokok Pikiran DPRD mengemukakan permasalahan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).

Usulan – usulan tersebut sebagian besar sudah terakomodir pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), namun karena keterbatasan anggaran sehingga usulan tersebut belum dilaksanakan.

Tabel 2.2
Usulan Program dan Kegiatan dari pemangku Kepentingan Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume
-	-	-	-	-

BAB. III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2024 berisi program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan guna mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yaitu melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan pembantuan di bidang Perhubungan. Tujuan tersebut didukung dengan program dan kegiatan di bidang Perhubungan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Pengelolaan Pelayaran.

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal.

Pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2024 terdapat penambahan dan pengurangan anggaran yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat 3 kegiatan yang berkurang dan 3 kegiatan yang bertambah sehingga terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 5.409.788.043, kemudian untuk Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) terdapat 6 kegiatan yang berkurang dan tidak ada kegiatan yang bertambah sehingga mendapatkan pengurangan anggaran sebesar Rp. – 1.117.549.861, dan untuk Program Pengelolaan Pelayaran terdapat 1 penambahan anggaran sebesar Rp. 188.689.944.

Adapun rincian perubahan pendanaan masing masing program, kegiatan dan sub kegiatan serta sumber pendanaan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

Mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp. 5.409.788.043 , dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berkurang menjadi Rp. -50.600.000, dari sub kegiatan :
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp. -50.600.000.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah berkurang menjadi Rp.-124.765.957, dari sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. - 74.765.957;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebesar Rp. - 50.000.000;

- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah bertambah menjadi Rp. 1.158.711.00, dari sub kegiatan :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. -1.300.000;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. - 52.555.000;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp. - 1.800.000;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 1.230.016.000;
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sebesar Rp. - 15.650.000.
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berkurang menjadi Rp. - 9.380.000, dari sub kegiatan :
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. -8.380.000
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bertambah menjadi Rp. 4.375.306.200, dari sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 3.499.307.200;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 875.999.000.
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bertambah menjadi Rp. 60.516.800, dari sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 32.310.000;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 30.000.000;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp. -1.590.000;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar Rp. -203.200.
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- Mendapatkan pengurangan anggaran sebesar Rp. -1.117.549.861, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota bertambah menjadi Rp. 756.401.200, dari sub kegiatan :
 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 222.300.000;
 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 595.500.000;

- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan sebesar Rp. - 61.398.800.
- b. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C berkurang menjadi Rp. -61, dari sub kegiatan :
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) sebesar Rp. -61.
- c. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor berkurang menjadi Rp. -47.485.000, dari sub kegiatan :
 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebesar Rp. -32.500.000;
 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebesar Rp. -14.985.000.
- d. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota berkurang menjadi Rp. -1.087.870.000, dari sub kegiatan :
 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp. -18.470.000;
 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebesar Rp. -100.840.000;
 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp. -100.840.000;
 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp. -968.560.000.
- e. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan berkurang menjadi Rp. - 671.760.000, dari sub kegiatan :
 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal sebesar Rp. - 33.750.000;
 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota sebesar Rp. - 636.160.000;
 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum sebesar Rp. - 1.850.000.
- f. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berkurang menjadi Rp. -66.836.000, dari sub kegiatan :
 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota sebesar Rp. - 66.451.000;

- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp. -385.000.

3. Program Pengelolaan Pelayaran

Mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp. -1.117.549.861, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal bertambah menjadi Rp. 188.689.944, dari sub kegiatan :
 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal sebesar Rp. 243.897.944;
 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal sebesar Rp. -55.208.000

TABEL 3.1
PERUBAHAN KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KENDAL TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERHUBUNGAN					31.382.915.206	33.045.838.188	35.863.843.332	4.480.928.126						41.246.356.000	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				31.382.915.206	33.045.838.188	35.863.843.332	4.480.928.126							41.246.356.000	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				31.382.915.206	33.045.838.188	35.863.843.332	4.480.928.126							41.246.356.000	
1,	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100.00 %	100.00 %	26.629.340.956	29.168.056.799	32.039.128.999	5.409.788.043							27.291.356.000	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersedia	100 Persen	100 Persen	67.230.000	16.630.000	16.630.000	-50.600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -	ASN		190.000.000	DINAS PERHUBUN GAN
	2.15.01.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	0	0	0	0	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			30.000.000	DINAS PERHUBUN GAN
	2.15.01.2.01. 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	67.230.000	16.630.000	16.630.000	-50.600.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			160.000.000	DINAS PERHUBUN GAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersedia	100 Persen	100 Persen	7.387.840.256	8.013.074.299	7.263.074.299	-124.765.957			- -	- -	ASN		7.890.000.000	DINAS PERHUBUN GAN
	2.15.01.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/b ulan	56 Orang/b ulan	7.000.000.256	7.625.234.299	6.925.234.299	-74.765.957	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	- -	- -			7.500.000.000	DINAS PERHUBUN GAN
	2.15.01.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	387.840.000	387.840.000	337.840.000	-50.000.000	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			390.000.000	DINAS PERHUBUN GAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang tersedia	100 Persen	100 Persen	0	0	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -	ASN		250.900.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	0	0	0	0	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			35.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	2 Orang	0	0	0	0	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			215.900.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 Persen	100 Persen	478624200	1595570200	1637335200	1158711000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -	ASN		960.456.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	60 Paket	60 Paket	44.416.500	43.116.500	43.116.500	-1.300.000	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -		60.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	12 Paket	76.096.000	76.096.000	76.096.000	0	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -		85.096.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.01.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	20 Paket	20 Paket	20.330.200	20.330.200	20.330.200	0	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -		25.360.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.01.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	48 Paket	48 Paket	117.391.500	117.391.500	117.391.500	0	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -		150.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	116.350.000	63.795.000	63.795.000	-52.555.000	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		150.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.01.2.06. 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	1.800.000	0	0	-1.800.000	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		150.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	55 Laporan	61.000.000	1.249.251.000	1.291.016.000	1.230.016.000	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		300.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.01.2.06. 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD															
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	41.240.000	25.590.000	25.590.000	-15.650.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		40.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang tersedia	100 Persen	100 Persen	9.380.000	0	0	-9.380.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	ASN	15.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.01.2.07. 0005	Pengadaan Mebel															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	100 Unit	100 Unit	0	0	0	0	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -		10.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.01.2.07. 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	10 Unit	10 Unit	9.380.000	0	0	-9.380.000	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -		5.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia</i>	100 Persen	100 Persen	18.312.079.500	19.188.078.500	22.687.385.700	4.375.306.200			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -	ASN	17.005.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.01.2.08. 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12 Laporan	12 Laporan	3.751.500	3.751.500	3.751.500	0	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -		5.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.01.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	17.908.204.000	17.908.204.000	21.407.511.200	3.499.307.200	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		16.500.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.01.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	96 Laporan	96 Laporan	400.124.000	1.276.123.000	1.276.123.000	875.999.000	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -		500.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik</i>	100 Persen	100 Persen	374.187.000	354.703.800	434.703.800	60.516.800			-	- -	ASN	980.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.01.2.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	12 Unit	12 Unit	264.650.000	266.960.000	296.960.000	32.310.000	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		300.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.01.2.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	20 Unit	22 Unit	102.000.000	82.000.000	132.000.000	30.000.000	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.01.2.09. 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	6 Unit	6 Unit	3.290.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	-1.590.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			430.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	12 Unit	12 Unit	4.247.000	4.043.800	4.043.800	-203.200	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2,	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Prasarana jalan dalam kondisi baik Persentase ketersediaan aplikasi penerbitan rekom online Persentase pemenuhan kebutuhan rambu jalan Persentase kendaraan (angkutan umum dan angkutan barang) yang lulus uji KIR	85.00 89,29 95.00 100.00 % % % %	89,29 100.00 95.00 85.00 % % % %	4.270.594.250	3.224.809.389	3.153.044.389	-1.117.549.861							12.455.000.000	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Perlengkapan jalan dalam kondisi baik</i>	200 buah	200 buah	460.912.000	1.217.313.200	1.217.313.200	756.401.200			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	masyarakat		5.400.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	-	222.300.000	222.300.000	222.300.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -			350.000.000	DINAS PERHUBUN GAN
	2.15.02.2.02. 0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota															
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	80 Unit	80 Unit	-	595.500.000	595.500.000	595.500.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -			3.400.000.000	DINAS PERHUBUN GAN
	2.15.02.2.02. 0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan															
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	3 Unit	3 Unit	0	0	0	0	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -			50.000.000	DINAS PERHUBUN GAN
	2.15.02.2.02. 0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan															
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	130 Unit	130 Unit	460.912.000	399.513.200	399.513.200	-61.398.800	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -			1.600.000.000	DINAS PERHUBUN GAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal dalam kondisi baik	3 Unit	3 Unit	9.081.250	9.081.189	9.081.189	-61			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -	m asyarakat		250.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)															
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2 Unit	2 Unit	9081250	9081189	9081189	-61	Kab. Kendal, Sukorejo, Kebumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -			250.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah kegiatan Peningkatan disiplin lalu lintas dan Penataan Perparkiran	1 Kali	1 Kali	0	0	0	0			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -	m asyarakat		150.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota															
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	0	0	0	0	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -			150.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Presentase kendaraan wajib uji yang terlayani</i>	100 persen	100 persen	220.000.000	190.015.000	172.515.000	-47.485.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkata n tata kelola pemerintah an yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkata n tata kelola pemerintah an yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	m asyarakat	455.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.02.2.05. 0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor															
			<i>Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	6000 Dokumen	1000 Dokumen	75.000.000	60.000.000	42.500.000	-32.500.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkata n tata kelola pemerintah an yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkata n tata kelola pemerintah an yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani		200.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.02.2.05. 0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	11 Unit	11 Unit	145.000.000	130.015.000	130.015.000	-14.985.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -		230.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.02.2.05. 0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor															
			Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan	4 Laporan	0	0	0	0	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -		25.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	100 Persen	100 Persen	1.490.156.000	404.566.000	402.286.000	-1.087.870.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -	m asyarakat	3.400.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.02.2.06. 0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota															
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	50 Laporan	50 Laporan	45.000.000	28.810.000	26.530.000	-18.470.000	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -		50.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.02.2.06. 0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan</i>	120 Dokumen	120 Dokumen	445.856.000	345.016.000	345.016.000	-100.840.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -		2.200.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.02.2.06. 0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota															
			<i>Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provin si</i>	11 Laporan	11 Laporan	999.300.000	30.740.000	30.740.000	-968.560.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -		1.150.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	<i>Jumlah kegiatan pembinaan awak angkutan umum</i>	1 kegiatan	1 kegiatan	1.937.480.000	1.233.370.000	1.265.720.000	-671.760.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -	m asyarakat	2.150.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.02.2.08. 0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal															
			<i>Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal</i>	4 Laporan	4 Laporan	457.000.000	388.250.000	423.250.000	-33.750.000	Kab. Kendal, Sukorejo, Kebumen Kab. Kendal, Boja, Boja Kab. Kendal, Weleri, Weleri Kab. Kendal, Kendal, Pekauman	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -		550.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.02.2.08. 0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			<i>Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota</i>	12 Laporan	12 Laporan	1.461.280.000	825.120.000	825.120.000	-636.160.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -		1.550.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.02.2.08. 0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum															
			<i>Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</i>	1 Laporan	1 Laporan	19.200.000	20.000.000	17.350.000	-1.850.000	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -		50.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Operasional bus sekolah dan angkutan orang</i>	30 Kali	30 Kali	152.965.000	170.464.000	86.129.000	-66.836.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -	m asyarakat	600.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.02.2.09. 0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota															
			<i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>	10 Laporan	10 Laporan	111.880.000	76.679.000	45.429.000	-66.451.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -		200.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.02.2.09. 0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	30 Unit	30 Unit	41085000	93785000	40700000	-385000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -		400.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi penerbitan rekom online yang tersedia	1 Unit	1 Unit	0	0	0	0			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -	m asyarakat	50.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.02.2.14. 0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik															
			Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Unit	1 Unit	0	0	0	0	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -		50.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
3,	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pemenuhan pelabuhan sesuai standar	100.00 %	100.00 %	482.980.000	652.972.000	671.669.944	188.689.944						1.500.000.000		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
	2.15.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan angkutan laut pelayaran kewenangan kabupaten	6 Kali	6 Kali	0	0	0	0			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -	m asyarakat	150.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.03.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota															
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Laporan	6 Laporan	0	0	0	0	Kab. Kendal, Kaliwungu, Mororejo Kab. Kendal, Cepiring, Korowelanganyar Kab. Kendal, Kendal, Bandengan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -		150.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Capaian pemenuhan pelabuhan sesuai standar	100 Persen	100 Persen	482.980.000	652.972.000	671.669.944	188.689.944			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -	m asyarakat	1.350.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.03.2.12.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal															
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 Dokumen	1 Dokumen	123.750.000	348.950.000	367.647.944	243.897.944	Kab. Kendal, Kaliwungu, Mororejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -		500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
											KHUSUS FISIK						
	2.15.03.2.12. 0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal															
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	4500 Unit	4500 Unit	359.230.000	304.022.000	304.022.000	-55.208.000	Kab. Kendal, Kaliwungu, Mororejo	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			700.000.000	DINAS PERHUBUN GAN
	2.15.03.2.12. 0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal															
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	24 Laporan	24 Laporan	0	0	0	0	Kab. Kendal, Kaliwungu, Mororejo	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			150.000.000	DINAS PERHUBUN GAN
	J U M L A H					31.382.915.206	33.045.838.188	35.863.843.332	4.480.928.126							41.246.356.000	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 dalam menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Kendal serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Perubahan Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2024. Dukungan anggaran yang memadai sangat menunjang pelaksanaan semua program dan kegiatan yang direncanakan sehingga mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Untuk tindak lanjut dalam penyusunan Perubahan Renja ini selanjutnya kami akan menyusun program kegiatan dan anggaran dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024.

Demikian Perubahan Renja Tahun 2024 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.





**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah memberi rahmat serta karunia-Nya, atas tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2024.

Perubahan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2024 memuat kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal selama 1 (satu) tahun anggaran. Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi riil yang terjadi saat ini, evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun berkenaan yaitu evaluasi hasil Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal sampai dengan Triwulan II, serta mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.

Diharapkan kepada semua pihak yang terkait dapat memanfaatkan Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai acuan dan masukan terutama dalam meningkatkan koordinasi program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal.

Kami menyadari bahwa penyusunan Perubahan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2024 ini belum sempurna, oleh karena itu masukan, saran serta kritik membangun sangat kami harapkan sehingga dalam penyusunan Perubahan Renja semakin baik.

Kendal, 2024

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KENDAL



TONJARI WIBOWO, AP., MM
Pemuda Utama Muda
NIP. 19760117 199412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABELiv

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 2

 1.3 Maksud dan Tujuan 4

 1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II Hasil Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan 6

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 dan
 Renstra Perangkat Daerah..... 6

 2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat24

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 25

BAB IV PENUTUP 37

L A M P I R A N 39

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Semester I Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2024..... 6

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)*.....14

Tabel 2.3 Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Antara Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2024 dengan APBD 2024.....21

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....24

Tabel 3.1 Rekapitulasi Perubahan Kegiatan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2024 25

Tabel 3.2 Kegiatan Yang Tidak Mengalami Perubahan Pagu Anggaran Pada Renja Perubahan Tahun 2024 26

Tabel 3.3 Kegiatan Yang Mengalami Pengurangan Pagu Anggaran Pada Renja Perubahan 2024 26

Tabel 3.4 Kegiatan Baru Pada Renja Perubahan 2024.....31

Tabel 3.5 Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Perubahan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2024..... 35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD), merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berjalan. Rencana Kerja Perubahan disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, disamping juga berpedoman pada Rencana Strategis, RPJMD dan RPJPD.

Perubahan Rencana kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2024 disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja juga didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026.

Dengan adanya acuan diatas, perubahan rencana kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Perubahan Renja diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam Perubahan APBD Kabupaten Kendal Tahun 2024.

Perubahan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2024, dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan meliputi Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), dasar pertimbangan perubahan RKPD yang ditindaklanjuti dengan perubahan renja perangkat daerah

menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut adalah adanya perubahan pada :

1. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
2. Target sasaran pembangunan daerah;
3. Prioritas pembangunan daerah;
4. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah; dan
5. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal

Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 20).

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Dokumen Perubahan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi Kabupaten Kendal disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan Sebagai acuan dalam penyusunan RKAP dan DPPA Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2024.

2. Tujuan

Dokumen Perubahan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal disusun bertujuan untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok pembahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta garis besar isi dokumen Renja perubahan 2024.

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 dan Renstra Perangkat Daerah

2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV Penutup

BAB II

EVALUASI HASIL RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN

BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 dan Renstra Perangkat Daerah

Capaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal pada semester I Tahun 2024 didapatkan melalui pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis tahun 2024. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut selanjutnya dapat dilakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis tahun 2024, secara detail realisasi IKU Tahun 2024 semester I dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Semester I Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase pertumbuhan perdagangan besar dan retail dalam PDRB	(Nilai output sekarang – output tahun lalu)/output tahun lalu*100	1	-	Data menunggu publish dari BPS
2	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan sesuai standart	Persentase pasar yang layak fungsi	30,76 (4 pasar)	-	Keterbatasan anggaran
3	Meningkatnya kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase ketersediaan barang pokok dan barang penting	150%	159,13%	
4	Meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	83%	62,12%	
5	Berkembangnya usaha mikro menjadi usaha kecil	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	80,00%	79,63%	
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan anggaran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang baik	Persentase nilai SAKIP	74,55	-	Belum dilaksanakan penilaian
7	Meningkatnya kualitas pengelolaan energi terbarukan	Persentase energi terbarukan yang di awasi	100,00%	100%	

Capaian realisasi IKU Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal pada semester 1 ini baru ada satu

Indikator Kinerja Utama yang sudah melebihi target, yaitu Persentase ketersediaan barang pokok dan barang penting dari target 150% dapat terealisasi 159,3%, sedangkan Indikator Kinerja yang lain belum tercapai karena masih dalam proses pelaksanaan. Selain itu ada 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang tidak akan tercapai sampai dengan akhir tahun 2024 ini yaitu pada Indikator Kinerja Utama “Persentase pasar yang layak fungsi” yang dikarenakan keterbatasan anggaran pada tahun 2024 ini.

Realisasi target kinerja output kegiatan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Triwulan II terdapat beberapa capaian, yaitu ada yang tercapai sesuai target utama, dan ada yang masih proses pencapaian target yang direncanakan tercapai sampai pada akhir tahun anggaran 2024.

Sedangkan untuk realisasi anggaran kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2024 yang melaksanakan 2 (dua) urusan, yaitu urusan perdagangan dan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah, 13 program dengan 21 kegiatan, 36 Sub Kegiatan dengan anggaran Belanja Rp.24.525.711.524,- dengan capaian realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp.15.527.077.451,- atau 36,69%.

Pencapaian realisasi anggaran triwulan II relatif masih rendah dikarenakan ada beberapa kegiatan yang di pihak ketigakan masih dalam proses pelaksanaan, salah satunya pada adalah Sub Kegiatan penyediaan sarana distribusi perdagangan, dengan total anggaran sebesar Rp.592.758.000,- baru terealisasi Rp.5.391.300,- anggaran tersebut direncanakan untuk perencanaan pasar cepiring, pasar Boja dan pasar pegandon. Untuk 3 paket perencanaan pasar tersebut masih dalam proses pelaksanaannya, selanjutnya Sub Kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan, total anggaran Rp.1.591.979.393,- realisasi Rp.658.337.500,- atau 24% adapun kegunaan dana tersebut di antaranya adalah untuk pembayaran gaji Tenaga Penunjang Kegiatan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) Orang yang proses pengadaan lewat pihak ketiga, alokasi selanjutnya digunakan untuk penyediaan insidentiiil sarana prasarana pasar, selain itu juga untuk membayar tenaga satgas kebersihan kantor juga dialokasikan untuk pembelian alat-alat keperluan pasar yang sudah masih dalam proses pengadaan.

Secara umum pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perdagangan,

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal dapat berjalan sesuai dengan perencanaan, selain itu juga untuk membayar tenaga satgas kebersihan kantor juga dialokasikan untuk pembelian alat-alat keperluan pasar yang sudah masih dalam proses pengadaan, selanjutnya pada Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal, dengan total anggaran Rp.867.277.000,- kegiatan ini dialokasikan untuk pelaksanaan Kendal Explore yang masuk dari bagian acara Pekan Raya Kendal, direncanakan dilaksanakan pada bulan juli, untuk pelaksanaannya masih dalam proses dibulan Juli ini, kemudian pada Sub Kegiatan Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran sebesar Rp.1.406.763.388,- terealisasi sebesar Rp.199.089.496,-, dialokasikan untuk penyediaan operasional perkantoran dalam satu dinas, Sub Kegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan, dengan anggaran Rp.540.437.000,- realisasi Rp.2.412.500,- kegiatan ini untuk pelaksanaan keikutsertaan dalam event promosi pameran dagang tingkat Provinsi dan tingkat nasional, sampai saat ini baru 1 (satu) event pameran dagang tingkat provinsi yang sudah terlaksana, sisanya menunggu jadwal pelaksanaannya dari panitia penyelenggara kegiatan.

Pada kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro dengan total anggaran Rp.100,000.000,- realisasi Rp.0,- direncanakan untuk melaksanakan pendataan potensi UMKM di Kabupaten Kendal, untuk menyempurnakan pendataan UMKM yang sudah dilaksanakan pada tahun 2022, kegiatan ini dtarget dapat selesai pada akhir bulan oktober 2024 ini.

Kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota dengan total anggaran Rp.86.069.000,- realisasi Rp.23.39100,- atau 44% target dari kegiatan ini adalah pelaksanaan pemeriksaan koperasi sebanyak 100 Koperasi per bulan Juni sudah terealisasi semua, penyerapan anggaran masih dalam proses pengajuan di Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp.1.486.460.000,- alokasi dari anggaran tersebut adalah untuk penyediaan gaji pegawai outsorcing (tenaga keamanan, tenaga kebersihan, driver) dalam pelaksanaannya tidak ada kendala, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, total anggaran Rp.15.127.633.543,- terealisasi sebesar Rp.6.932.275.337,- anggaran penyediaan gaji dan tunjangan ASN di Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah cukup besar, yaitu kegunaannya adalah untuk memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan ASN sebanyak 116 PNS, penyediaan tunjangan penata usahaan keuangan

dan penyediaan honor insentif ASN.

Secara detail pengelompokan target kinerja disajikan sebagai berikut :

Realisasi Sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

1. Target kinerja Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan target 100 Koperasi, terealisasi 100 Koperasi atau 100%;
2. Target kinerja Sub kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 83 Koperasi, terealisasi 83 Koperasi atau 100%;
3. Target kinerja Sub kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 60 koperasi, terealisasi 60 koperasi atau 100%;
4. Target kinerja Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dengan target 30 orang, terealisasi 30 orang atau 100%;
5. Target kinerja Sub kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi dengan target 800 UMKM, terealisasi 800 UMKM atau 100%;
6. Target kinerja Sub kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota dengan target 1 Pameran (Kendal Explore), terealisasi 1 pameran atau 100%;

Realisasi Sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

1. Target kinerja Sub kegiatan pelaksanaan metrologi legal, berupa Tera, Tera ulang dengan target 6000 alat UTTP, terealisasi 2287 atau 38,11%;
2. Target kinerja Sub kegiatan Pengawasan/Penyuluhan metrologi legal dengan target 9000 alat UTTP, terealisasi 4500 atau 50%;
3. Target kinerja Sub kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

- dengan target 3 Pasar, terealisasi 2 pasar atau 67,00%;
4. Target kinerja Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan target 13 unit, terealisasi 11 unit atau 84,61%;
 5. Target kinerja Sub kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dengan target Target 13 dokumen, terealisasi 4 dokumen atau 33,33%;
 6. Target kinerja Sub Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dengan target 13 dokumen, terealisasi 4 dokumen atau 33,33%;
 7. Target kinerja Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat dengan target 12 laporan, terealisasi 8 laporan atau 67,00%;
 8. Target kinerja Sub kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan dengan target 12 laporan, terealisasi 9 laporan atau 75,00%;
 9. Target kinerja Sub kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan target Target 6 laporan, terealisasi 2 laporan atau 33,33%;
 10. Target kinerja Sub Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target 4 Dokumen, terealisasi 2 Dokumen atau 50,00%;
 11. Target kinerja Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target 12 laporan, terealisasi 6 laporan atau 50%;
 12. Target kinerja Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 115 orang/14 bulan, terealisasi 10 bulan atau 71,00%;
 7. Target kinerja Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan target 20 paket, terealisasi 12 paket atau 60%;
 8. Target kinerja Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan target 12 bulan, terealisasi 8 bulan atau 67,00%;
 9. Target kinerja Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan target 12 paket, terealisasi 8 paket atau 67,00%;
 10. Target kinerja Sub kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

- perundang-undangan dengan target 12 dokumen, terealisasi 8 dokumen atau 67,00%;
11. Target kinerja Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 100 laporan, terealisasi 75 laporan atau 75,00%;
 12. Target kinerja Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target 12 laporan, terealisasi 8 laporan atau 67,00%;
 13. Target kinerja Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target 12 laporan, terealisasi 8 laporan atau 67,00%;
 14. Target kinerja Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target 12 laporan, terealisasi 8 laporan atau 67,00%;
 15. Target kinerja Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan target 12 laporan, terealisasi 8 laporan atau 67,00%;
 16. Target kinerja Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan target 77 unit, terealisasi 67 unit atau 87,01%;
 17. Target kinerja Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan target 152 Unit, terealisasi 120 Unit atau 78,94%;
 18. Target kinerja Sub kegiatan Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kabupaten/Kota dengan target 1 Dokumen, terealisasi 0 Dokumen atau 0%;
 19. Target kinerja Sub kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor dengan target Target 1 kegiatan, terealisasi 0 kegiatan atau 0,00%;
 20. Target kinerja Sub kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor dengan target 1 kegiatan, terealisasi 0 kegiatan atau 0,00%;
 21. Target kinerja Sub kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 100 koperasi, terealisasi 33 koperasi atau 33%;
 22. Target kinerja Sub kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan dengan target 4 pameran tingkat nasional, terealisasi 2 pameran tingkat nasional atau 50%;

23. Target kinerja Sub kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD dengan target 4 laporan, terealisasi 2 laporan atau 50%;
24. Target kinerja Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target 12 paket, terealisasi 6 paket atau 50%;
25. Target kinerja Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan target 12 Laporan, terealisasi 6 paket atau 50%;
26. Target kinerja Sub Kegiatan Penyusunan basis data usaha mikro dengan target 1 dokumen, terealisasi 0 dokumen atau 0%;

Realisasi Sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

1. Target kinerja Sub kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 30 Koperasi, terealisasi 50 Koperasi, atau 167%;
2. Target kinerja Sub kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro dengan target 40 UMKM, terealisasi 50 UMKM atau 125%.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Faktor tidak tercapainya kinerja adalah adanya rasionalisasi anggaran sehingga kegiatan yang sudah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan dan diperlukan adanya perubahan rencana kinerja guna mengoptimalkan kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
2. Faktor terpenuhinya kinerja adalah semua paket pekerjaan yang sudah terjadwal yang tentunya sudah teranggarkan pada penetapan anggaran menjadi kunci terpenuhinya kinerja kami, sebagai contoh pelaksanaan Kendal Explore (Pekan Raya Kendal) yang terjadwal pada bulan Juli sesuai dengan jadwal dari panitia, tidak ada kendala dalam pelaksanaannya;
3. Faktor melebihi kinerja adalah target penetapan kinerja yang berdasarkan capaian tahun sebelumnya, namun didalam pelaksanaannya melebihi capaian tahun sebelumnya, sebagai contoh pada Dinas kami ada kegiatan pelaksanaan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro, target pelaksanaannya 40 UMKM namun pada saat akan dilaksanakan UMKM yang mendaftar melebihi dari yang

ditargetkan, hal tersebut menunjukkan besarnya minat dari pelaku UMKM di Kabupaten Kendal.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah yaitu adanya sub kegiatan yang belum dapat dilaksanakan seperti sub kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, sub kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota serta beberapa target kinerja yang belum dapat dilaksanakan pada penetapan anggaran, sehingga perlu pengambilan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah pada perubahan anggaran tahun 2024 diadakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum terealisasi pada penetapan anggaran.

Adapun realisasi target kinerja dan anggaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal sampai dengan triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)* Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal

Lembar

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1				2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(5+7+8)	10=(9/4)	
				DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH									
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
2	17	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	300%	75%	
2	17	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan penganggaran dan evaluasi PD	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	24 Dokumen	3 Dokumen	
2	17	01	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi keuangan dalam satu tahun	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	3 Bulan	
2	17	01	2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	barang milik daerah yang masuk didalam laporan aset	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	3 Bulan	

2	17	01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	pemenuhan kebutuhan rutin	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	36 Paket	3 Paket
2	17	01	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit kendaraan yang diadakan	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	12 Unit	3 Unit
2	17	01	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	3 Bulan
2	17	01	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	barang milik daerah yang masuk didalam laporan aset terpelihara	27 Unit	27 Unit	27 Unit	100%	27 Unit	81 Unit	3 Unit
2	17	02		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi yang diterbitkan	10,60%	3,10%	3,10%	100%	10,40%	15,20%	1,68%
2	17	02	2,01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT	79%	78%	78%	100%	79%	234%	0,03
2	17	03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentasi koperasi/KSP yang diawasi	22,22%	18,80%	18,80%	100%	20,51%	54,60%	0,0321

2	17	03	2,01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa	30 Koperasi	30 Koperasi	30 Koperasi	100%	30 Koperasi	90 Koperasi	3 Koperasi
2	17	04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi dan BPR/LKM yang dinilai	59,09%	50,00%	55,00%	100%	54,55%	145,00%	3,62%
2	17	04	2,01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dinilai	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
2	17	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
2	17	05	2,01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan/ uji kompetensi	57 Orang	40 Orang	40 Orang	100%	57 Orang	110 Orang	3,6 Orang
2	17	06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	26,60%	26,10%	26,10%	100%	26,40%	78,20%	3,00%

2	17	06	2,01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberdayakan dan perlindungan	10 Koperasi	10 Koperasi	10 Koperasi	100%	10 Koperasi	30 Koperasi	3 Koperasi
2	17	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang diberdayakan	6,41%	5,40%	5,40%	100%	6,26%	15,80%	3,16%
2	17	07	2,01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	jumlah Usaha mikro yang diberdayakan	763 UMKM	683 UMKM	683 UMKM	100%	763 UMKM	2.049 UMKM	3 UMKM
2	17	08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha mikro yang dikembangkan	6,10%	5,70%	5,70%	100%	5,90%	16,40%	0,03
2	17	08	2,01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang dikembangkan	200 umkm	200 umkm	200 umkm	100%	200 UMKM	600 umkm	3 umkm
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	29			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								

3	29	05		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase Energi terbarukan yang diawasi	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
3	29	05	2,01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang terlibat dalam Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	150 Orang	3 Orang
3	30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
3	30	03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar yang layak fungsi	38,45%	23,07%	23,07%	100%	30,76%	61,52%	4%
3	30	03	2,01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	pasar yang dibangun dan dikelola	2 Pasar	2 Pasar	2 Pasar	100%	2 Pasar	6 Pasar	3 Pasar
3	30	03	2,02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	sarana distribusi perdagangan yang mendapatkan fasilitasi pengelolaan	13 Pasar	13 Pasar	13 Pasar	100%	13 Pasar	39 Pasar	3 Pasar
3	30	04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersediaan barang pokok dan penting	150%	150%	150%	100%	150%	450%	3%
3	30	04	2,01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	terjaminnya ketersediaan barang pokok dan penting di tingkat kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%

3	30	04	2,02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	terjaminnya harga barang pokok dan penting yang terjangkau ditingkat kabupaten	12 Data	12 Data	12 Data	100%	12 Data	36 Data	3 Data
3	30	04	2,03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	ketersediaan pupuk dan pestisida bersubsidi yang dilakukan	10 Distributor	10 Distributor	10 Distributor	100%	10 Distributor	30 Distributor	3 Distributor
3	30	05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan produk unggulan ekspor	5%	5%	5%	100%	5%	15%	3%
3	30	05	2,01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	penyelenggaraan dagang yang dilaksanakan	1 Event	1 Event	1 Event	100%	1 Event	3 Event	3 Event
3	30	06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	36%	90%	36%	100%	95%	196%	2,80%
3	30	06	2,01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	pelaksanaan tera tera ulang dan pengawasan yang dilakukan	6000 UTTP	6000 UTTP	6000 UTTP	100%	6000 UTTP	18000 UTTP	3 UTTP

Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab tersebut adalah :

Sampai dengan bulan Juni ini dari total pagu anggaran Rp.24.525.711.524,- terealisasi Rp.11.285.683.427,- atau 46,02%, secara umum semua kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. Terdapat beberapa kegiatan di Bidang yang pelaksanaannya menyesuaikan jadwal dari pemerintah pusat, ada pula kegiatan yang belum dapat dilaksanakan karena salah pengkode rekeningannya, untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan penyesuaian kode rekening pada perubahan anggaran, selain itu ada pula kegiatan yang pada tahapan penyelesaiannya pada bulan november.

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal sudah menyusun ulang jadwal pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk mempercepat terlaksanannya kegiatan.

Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Terhadap APBD Tahun 2024

Kesesuaian Program antara Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024.

Berdasarkan evaluasi terhadap program yang ada pada Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal dengan APBD Tahun 2024, terdapat kesesuaian/tidak kesesuaian 90%. Artinya bahwa jumlah program dalam renja sama/tidak sama dengan jumlah program yang ada dalam APBD, yaitu ada 13 program, 21 kegiatan, 46 sub kegiatan berkurang 10 menjadi 36 Sub kegiatan urusan perdagangan 8 program, 11 kegiatan, 12 sub kegiatan sedangkan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah 4 program, 4 kegiatan dan 11 sub kegiatan, selain itu urusan tersebut ditunjang 1 program kesekretariatan, 6 kegiatan dan 13 sub kegiatan.

Kesesuaian Kegiatan antara Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024.

Seperti halnya evaluasi program, untuk kegiatan yang ada di Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal dengan APBD tahun 2024 terdapat kesesuaian 90% yaitu jumlah kegiatan yang ada di Renja sebanyak 21 sedangkan kegiatan yang ada di

APBD masih sama yaitu sebanyak 21 kegiatan, hanya ada pengurangan 10 Sub kegiatan yang semula 46 berkurang menjadi 36 Sub Kegiatan.

Kesesuaian Pagu Kegiatan Antara Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024.

Sedangkan anggaran yang ada di Renja dan APBD, setelah dievaluasi ada perbedaan kenaikan anggaran. Anggaran yang diusulkan dalam Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebesar Rp.101.523.957.809,-, sedangkan dalam APBD penetapan 2024 sebesar Rp.24.950.603.524,-. Penurunan anggaran disebabkan adanya beberapa kegiatan yang harus dihilangkan, salah satunya yaitu rencana kelanjutan pembangunan pasar weleri 1 tahap ke 2, namun karena APBD pada tahun 2024 tidak mencukupi, rencana pembangunan pasar weleri 1 tidak dilaksanakan.

Hasil evaluasi kesesuaian program, kegiatan dan pagu kegiatan antara Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.4. dibawah ini :

Tabel 2.3

Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Antara Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2024 dengan APBD 2024

NO	PROGRAM/KEGUATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN RENJA (Rp.)	ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	BERKURANG / BERTAMBAH
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.801.957.809	19.906.341.131	1.104.383.322
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	197.302.000	112.984.200	84.317.800
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	110.000.000	69.707.400	40.292.600
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	87.302.000	43.276.800	44.025.200
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.064.203.809	15.127.633.543	1.063.429.734
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.500.203.809	15.127.633.543	1.627.429.734
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	564.000.000		564.000.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.952.000		4.952.000
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4.952.000		4.952.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.114.500.000	2.221.263.388	1.106.763.388
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	300.000.000	254.500.000	45.500.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000	60.000.000	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000		150.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	300.000.000	300.000.000	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	200.000.000	197.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	301.500.000	1.406.763.388	1.105.263.388

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.729.000.000	2.144.460.000	- 584.540.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	700.000.000	655.000.000	- 45.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	390.000.000	1.486.460.000	1.096.460.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.636.000.000		- 1.636.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	125.000.000	150.000.000	25.000.000
	Pengadaan Mebel	50.000.000		- 50.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000	150.000.000	75.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.000.000	-	- 150.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000		- 150.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	417.000.000	150.000.000	- 267.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000	150.000.000	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	267.000.000		- 267.000.000
2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	50.000.000	33.180.000	- 16.820.000
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	33.180.000	- 16.820.000
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	33.180.000	- 16.820.000
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	150.000.000	106.919.000	- 43.081.000
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	150.000.000	106.919.000	- 43.081.000
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000		- 100.000.000
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000		- 50.000.000
	Penguatan tata kelola kelembagaan koperasi		20.850.000	20.850.000
	Pelaksanaan proses pemeriksaan dan kewenangan koperasi yang wilayah keanggotaannya daerah kabupaten/kota		86.069.000	86.069.000
4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	100.000.000	28.385.000	- 71.615.000
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	28.385.000	- 71.615.000
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	28.385.000	- 71.615.000
5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	475.000.000	-	- 475.000.000
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	475.000.000	-	- 475.000.000
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	475.000.000	-	- 475.000.000
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	75.000.000	46.400.000	- 28.600.000
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah	75.000.000	46.400.000	- 28.600.000

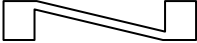
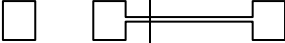
	<i>Kabupaten/Kota</i>			
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	75.000.000	46.400.000	- 28.600.000
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	530.000.000	358.926.000	- 171.074.000
	<i>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	530.000.000	358.926.000	- 171.074.000
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	100.000.000	200.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	100.000.000	23.676.000	- 76.324.000
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	280.000.000		- 280.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	50.000.000	35.250.000	- 14.750.000
	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro		100.000.000	100.000.000
8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.700.000.000	101.220.000	- 1.598.780.000
	<i>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</i>	1.700.000.000	101.220.000	- 1.598.780.000
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	1.700.000.000	101.220.000	- 1.598.780.000
9	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	25.000.000	11.375.000	- 13.625.000
	<i>Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	25.000.000	11.375.000	- 13.625.000
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	11.375.000	- 13.625.000
10	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	77.092.000.000	2.798.599.393	- 74.293.400.607
	<i>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	76.892.000.000	2.609.629.393	- 74.282.370.607
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	74.892.000.000	1.017.650.000	- 73.874.350.000
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.000.000.000	1.591.979.393	- 408.020.607
	<i>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</i>	200.000.000	188.970.000	- 11.030.000
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	100.000.000	186.550.000	86.550.000
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	100.000.000	2.420.000	- 97.580.000
11	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	335.000.000	100.759.000	- 234.241.000
	<i>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	180.000.000	27.529.000	- 152.471.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	100.000.000	27.529.000	- 72.471.000
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	80.000.000		- 80.000.000
	<i>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</i>	105.000.000	55.365.000	- 49.635.000
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	50.000.000	55.365.000	5.365.000

	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	55.000.000		- 55.000.000
	<i>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	50.000.000	17.865.000	- 32.135.000
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsid	50.000.000	17.865.000	- 32.135.000
12	<i>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</i>	1.890.000.000	1.422.804.000	- 467.196.000
	<i>Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	1.890.000.000	1.422.804.000	- 467.196.000
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	1.000.000.000		- 1.000.000.000
	Pameran Dagang Nasional	150.000.000		- 150.000.000
	Pameran Dagang Lokal		867.227.000	- 867.227.000
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	670.000.000	540.437.000	- 129.563.000
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	50.000.000	15.140.000	- 34.860.000
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	20.000.000		- 20.000.000
13	<i>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</i>	300.000.000	35.695.000	- 264.305.000
	<i>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</i>	300.000.000	35.695.000	- 264.305.000
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	200.000.000	25.420.000	- 174.580.000
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	100.000.000	10.275.000	- 89.725.000
	JUMLAH	101.523.957.809	24.950.603.524	-76.098.354.285

2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2024, disamping berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026, juga mengakomodir usulan para pemangku kepentingan, khususnya dari masyarakat, yang mana sudah dilaksanakan pada penetapan anggaran tahun 2024, sedangkan untuk perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal tidak melaksanakan kegiatan usulan dari masyarakat.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume (Rp.)	Catatan
					

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja Dinas Perdagangan, Kopeerasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2024 ini akan dimuat tentang program/kegiatan/Sub kegiatan lanjutan, Sub kegiatan yang dihapus, penambahan Sub kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Rekapitulasi Perubahan Kegiatan pada Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Secara ringkas dari total Sub Kegiatan terdapat 4 Sub kegiatan tidak mengalami perubahan, sebanyak 32 Sub Kegiatan mengalami pengurangan dan 16 sub kegiatan tidak dilaksanakan/dihapus di Perubahan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2024. Adapun rincian perubahan kegiatan dalam Perubahan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1

Rekapitulasi Perubahan Kegiatan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2024

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Dalam Perubahan Renja					
		Tetap	Bertambah	Berkurang	Baru	dihapus	Jumlah
1.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	4	0	32	0	16	52

Kegiatan yang tidak mengalami perubahan pagu anggaran

Kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yang ada dalam APBD Penetapan Tahun 2024 dan tidak mengalami penambahan maupun pengurangan baik target kinerja maupun pagu indikatif pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebanyak 2 Sub kegiatan. Adapun Sub kegiatan yang tidak mengalami perubahan pagu anggaran pada renja perubahan seperti tersebut dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
 Kegiatan Yang Tidak Mengalami Perubahan Pagu Anggaran Pada Renja
 Perubahan Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGUATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN RENJA (Rp.)	ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	BERKURANG / BERTAMBAG
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	513.000.000	513.000.000	-
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	360.000.000	360.000.000	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000	60.000.000	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	300.000.000	300.000.000	-
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	3.000.000	3.000.000	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	-
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	150.000.000	150.000.000	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000	150.000.000	-

Kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran.

Kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yang ada dalam APBD Penetapan Tahun 2024 dan mengalami pengurangan baik target kinerja dan/pagu indikatif sebanyak 32 Sub kegiatan. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian kembali terhadap belanja guna efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan. Adapun kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran dapat dilihat dalam tabel 3.3. dibawah ini.

Tabel 3.3
 Kegiatan Yang Mengalami Pengurangan Pagu Anggaran Pada Renja
 Perubahan 2024

NO	PROGRAM/KEGUATAN/ SUBKEGIATAN	ANGGARAN RENJA (Rp.)	ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	BERKURANG / BERTAMBAG	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.801.957.809	19.906.341.131	1.104.383.322	
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	197.302.000	112.984.200	84.317.800	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	110.000.000	69.707.400	40.292.600	Efisiensi anggaran
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	87.302.000	43.276.800	44.025.200	Efisiensi anggaran
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	14.064.203.809	15.127.633.543	1.063.429.734	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.500.203.809	15.127.633.543	1.627.429.734	Adanya pengurangan dari Baperlitbang (penyesuaian kebutuhan anggaran PD)
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	564.000.000		564.000.000	Anggaran sudah dialihkan ke Sub Kegiatan

					Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.952.000		4.952.000	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4.952.000		4.952.000	Dijadikan satu dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.114.500.000	2.221.263.388	1.106.763.388	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	300.000.000	254.500.000	45.500.000	Efisiensi anggaran
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000		150.000.000	Dijadikan satu dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	200.000.000	197.000.000	Adanya penambahan kegiatan publikasi kegiatan PD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	301.500.000	1.406.763.388	1.105.263.388	Adanya penambahan anggaran dari semua kegiatan operasional
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.729.000.000	2.144.460.000	584.540.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	700.000.000	655.000.000	45.000.000	Efisiensi anggaran
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	390.000.000	1.486.460.000	1.096.460.000	Untuk kebutuhan roolempose di 13 pasar tradisional
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.636.000.000		1.636.000.000	Dijadikan satu dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	125.000.000	150.000.000	25.000.000	
	Pengadaan Mebel	50.000.000		50.000.000	Adanya larangan belanja modal
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000	150.000.000	75.000.000	Penambahan perawatan mesin kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.000.000	-	150.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000		150.000.000	Dijadikan satu dengan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	417.000.000	150.000.000	267.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	267.000.000		267.000.000	Adanya larangan belanja modal
2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	50.000.000	33.180.000	16.820.000	
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	33.180.000	16.820.000	
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan	50.000.000	33.180.000	16.820.000	Efisiensi anggaran

	Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	150.000.000	106.919.000	43.081.000	-
	<i>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	150.000.000	106.919.000	43.081.000	-
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000		100.000.000	- Sebagian dialihkan ke Sub Kegiatan Pelaksanaan proses pemeriksaan dan kewenangan koperasi yang wilayah keanggotaannya daerah kabupaten/kota
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000		50.000.000	- Dialihkan ke Sub Kegiatan Pelaksanaan proses pemeriksaan dan kewenangan koperasi yang wilayah keanggotaannya daerah kabupaten/kota
	Penguatan tata kelola kelembagaan koperasi		20.850.000	20.850.000	Penambahan anggaran dari Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
	Pelaksanaan proses pemeriksaan dan kewenangan koperasi yang wilayah keanggotaannya daerah kabupaten/kota		86.069.000	86.069.000	Penambahan anggaran dari Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	100.000.000	28.385.000	71.615.000	-
	<i>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	100.000.000	28.385.000	71.615.000	-
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	28.385.000	71.615.000	- Efisiensi anggaran
5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	475.000.000	-	475.000.000	-
	<i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	475.000.000	-	475.000.000	-
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	475.000.000	-	475.000.000	- Efisiensi anggaran

6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	75.000.000	46.400.000	28.600.000	-
	<i>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	75.000.000	46.400.000	28.600.000	-
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	75.000.000	46.400.000	28.600.000	Efisiensi anggaran
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	530.000.000	358.926.000	171.074.000	-
	<i>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	530.000.000	358.926.000	171.074.000	-
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	100.000.000	200.000.000	100.000.000	Efisiensi anggaran
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	100.000.000	23.676.000	76.324.000	Efisiensi anggaran
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	280.000.000		280.000.000	Efisiensi anggaran
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	50.000.000	35.250.000	14.750.000	Efisiensi anggaran
	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro		100.000.000	100.000.000	Penambahan anggaran dari Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.700.000.000	101.220.000	1.598.780.000	-
	<i>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</i>	1.700.000.000	101.220.000	1.598.780.000	-
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	1.700.000.000	101.220.000	1.598.780.000	Efisiensi anggaran
9	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	25.000.000	11.375.000	13.625.000	-
	<i>Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	25.000.000	11.375.000	13.625.000	-
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	11.375.000	13.625.000	Efisiensi anggaran
10	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	77.092.000.000	2.798.599.393	74.293.400.607	-
	<i>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	76.892.000.000	2.609.629.393	74.282.370.607	-
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	74.892.000.000	1.017.650.000	73.874.350.000	Pengurangan rencana pembangunan pasar weleri 1 tahap 2
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.000.000.000	1.591.979.393	408.020.607	Efisiensi anggaran
	<i>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di</i>	200.000.000	188.970.000	11.030.000	-

	<i>Wilayah Kerjanya</i>				
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	100.000.000	186.550.000	86.550.000	Efisiensi anggaran
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	100.000.000	2.420.000	97.580.000	Anggaran operasional dialihkan ke sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
11	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	335.000.000	100.759.000	234.241.000	-
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	180.000.000	27.529.000	152.471.000	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	100.000.000	27.529.000	72.471.000	Efisiensi anggaran
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	80.000.000		80.000.000	Efisiensi anggaran
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	105.000.000	55.365.000	49.635.000	-
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	50.000.000	55.365.000	5.365.000	Efisiensi anggaran
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	55.000.000		55.000.000	Efisiensi anggaran
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	17.865.000	32.135.000	-
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	50.000.000	17.865.000	32.135.000	Efisiensi anggaran
12	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1.890.000.000	1.422.804.000	467.196.000	-
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.890.000.000	1.422.804.000	467.196.000	-
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	1.000.000.000		1.000.000.000	Dialihkan ke sub kegiatan Pameran Dagang Lokal
	Pameran Dagang Nasional	150.000.000		150.000.000	Efisiensi anggaran
	Pameran Dagang Lokal		867.227.000	867.227.000	Pengalihan dari sub kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	670.000.000	540.437.000	129.563.000	Efisiensi anggaran
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	50.000.000	15.140.000	34.860.000	Efisiensi anggaran
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	20.000.000		20.000.000	Efisiensi anggaran

13	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	300.000.000	35.695.000	- 264.305.000	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	300.000.000	35.695.000	- 264.305.000	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	200.000.000	25.420.000	- 174.580.000	Efisiensi anggaran
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	100.000.000	10.275.000	- 89.725.000	Efisiensi anggaran
	JUMLAH	101.010.957.809	24.437.603.524	- 76.098.354.285	

Kegiatan yang Mengalami Penambahan Pagu Anggaran

Kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yang ada dalam APBD Penetapan Tahun 2024 dan mengalami penambahan baik target kinerja dan/pagu indikatif, pada tahun 2024 ini tidak ada Sub Kegiatan yang mengalami penambahan anggaran.

Kegiatan yang mengalami penghapusan

Kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yang sebelumnya ada dalam APBD Penetapan Tahun 2024, namun diusulkan untuk dihapuskan dalam Perubahan Renja Tahun 2024 ini, pada tahun 2024 ini tidak ada Sub Kegiatan yang dihilangkan.

Kegiatan baru di perubahan.

Kegiatan yang masuk kategori ini sebanyak 1 sub kegiatan, yaitu Sub kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan baru ini dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan Pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk pelaku koperasi yang sumber dananya adalah Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang merupakan Silpa tahun 2023 (sesuai dengan petunjuk teknisnya dilaksanakan pada Sub Kegiatan dimaksud), Kegiatan baru dapat dilihat dalam Tabel 3.4. dibawah ini :

Tabel 3.4
Kegiatan Baru Pada Renja Perubahan 2024

No.	Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)		Bertambah
		Penetapan Renja	Perubahan Renja	
1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dlam Daerah Kabupaten/Kota	-	13.781.700	13.781.700

Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2024

Kebijakan belanja pada perubahan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja daerah pada tahun 2024;
2. Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah, terutama yang terkait dengan program pemerintah urusan perdagangan dan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
3. Penambahan Sub Kegiatan yang menyesuaikan kebijakan dari pemerintah pusat, yaitu terkait penggunaan anggaran Silpa tahun 2023 yang bersumber dari anggaran DAK Non Fisik.

Dengan kebijakan belanja tersebut, mengakibatkan perubahan target dan pagu indikatif. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif perubahan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal tahun 2024 terlihat dalam tabel 3.5. berikut ini :

Tabel 3.5
 Perubahan Target Kinerja Dan Pagu Indikatif Perubahan Renja
 Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGUATAN/ SUBKEGIATAN	PENETAPAN TARGET KINERJA	PERUBAHAN TARGET KINERJA	ANGGARAN RENJA (Rp.)	ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	BERKURANG / BERTAMBAG
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			18.801.957.809	19.906.341.131	1.104.383.322
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			197.302.000	112.984.200	- 84.317.800
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	110.000.000	69.707.400	- 40.292.600
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	12 Laporan	12 Laporan	87.302.000	43.276.800	- 44.025.200
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14.064.203.809	15.127.633.543	1.063.429.734
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	13.500.203.809	15.127.633.543	1.627.429.734
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Paket	0	564.000.000		- 564.000.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			4.952.000		- 4.952.000
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	20 Paket	0	4.952.000		- 4.952.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.114.500.000	2.221.263.388	1.106.763.388
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000.000	254.500.000	- 45.500.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Paket	12 Paket	60.000.000	60.000.000	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	0	150.000.000		- 150.000.000
	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	300.000.000	300.000.000	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12 Bulan	12 Bulan	3.000.000	200.000.000	197.000.000

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	301.500.000	1.406.763.388	1.105.263.388
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.729.000.000	2.144.460.000	- 584.540.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	3.000.000	3.000.000	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	700.000.000	655.000.000	45.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	390.000.000	1.486.460.000	1.096.460.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	0	1.636.000.000		- 1.636.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			125.000.000	150.000.000	25.000.000
	Pengadaan Mebel	2 Unit	0	50.000.000		- 50.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77 Unit	77 Unit	75.000.000	150.000.000	75.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			150.000.000	-	- 150.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77 Unit	0	150.000.000		- 150.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			417.000.000	150.000.000	- 267.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77 Unit	77 Unit	150.000.000	150.000.000	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 Koperasi	0	267.000.000		- 267.000.000
2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			50.000.000	33.180.000	- 16.820.000
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000	33.180.000	- 16.820.000
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Koperasi	25 Koperasi	50.000.000	33.180.000	- 16.820.000
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			150.000.000	106.919.000	- 43.081.000
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			150.000.000	106.919.000	- 43.081.000
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Koperasi	0	100.000.000		- 100.000.000
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Koperasi	0	50.000.000		- 50.000.000
	Penguatan tata kelola kelembagaan koperasi	30 Koperasi	30 Koperasi		20.850.000	20.850.000

	Pelaksanaan proses pemeriksaan dan kewenangan koperasi yang wilayah keanggotaanya daerah kabupaten/kota	300 UMKM	300 UMKM		86.069.000	86.069.000
4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			100.000.000	28.385.000	- 71.615.000
	<i>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>			100.000.000	28.385.000	- 71.615.000
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Koperasi	100 Koperasi	100.000.000	28.385.000	- 71.615.000
5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			475.000.000	-	- 475.000.000
	<i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>			475.000.000	-	- 475.000.000
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	200 UMKM	0	475.000.000	-	- 475.000.000
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			75.000.000	46.400.000	- 28.600.000
	<i>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>			75.000.000	46.400.000	- 28.600.000
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	1 Laporan	1 Laporan	75.000.000	46.400.000	- 28.600.000
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			530.000.000	358.926.000	- 171.074.000
	<i>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</i>			530.000.000	358.926.000	- 171.074.000
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	3 Unit	3 Unit	100.000.000	200.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	13 Unit	13 Unit	100.000.000	23.676.000	- 76.324.000
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	200 UMKM	0	280.000.000		- 280.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	13 Laporan	13 Laporan	50.000.000	35.250.000	- 14.750.000
	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	13 Laporan	13 Laporan		100.000.000	100.000.000
8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			1.700.000.000	101.220.000	- 1.598.780.000
	<i>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</i>			1.700.000.000	101.220.000	- 1.598.780.000
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan	12 Laporan	12 Laporan	1.700.000.000	101.220.000	- 1.598.780.000

	Teknologi					
9	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN			25.000.000	11.375.000	- 13.625.000
	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota			25.000.000	11.375.000	- 13.625.000
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	11.375.000	- 13.625.000
10	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			77.092.000.000	2.798.599.393	- 74.293.400.607
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			76.892.000.000	2.609.629.393	- 74.282.370.607
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	3 Unit	74.892.000.000	1.017.650.000	- 73.874.350.000
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	13 Unit	13 Unit	2.000.000.000	1.591.979.393	- 408.020.607
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			200.000.000	188.970.000	- 11.030.000
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	186.550.000	86.550.000
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	2.420.000	- 97.580.000
11	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			335.000.000	100.759.000	- 234.241.000
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			180.000.000	27.529.000	- 152.471.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakya	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	27.529.000	- 72.471.000
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	0	80.000.000		- 80.000.000
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			105.000.000	55.365.000	- 49.635.000
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	55.365.000	5.365.000
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	0	55.000.000		- 55.000.000
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000	17.865.000	- 32.135.000
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsid	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	17.865.000	- 32.135.000
12	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			1.890.000.000	1.422.804.000	- 467.196.000

	<i>Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>			1.890.000.000	1.422.804.000	- 467.196.000
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	1 Pameran	0	1.000.000.000		- 1.000.000.000
	Pameran Dagang Nasional	1 Pameran	0	150.000.000		- 150.000.000
	Pameran Dagang Lokal	1 Pameran	1 Pameran		867.227.000	867.227.000
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	1 Pameran	1 Pameran	670.000.000	540.437.000	- 129.563.000
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	15.140.000	- 34.860.000
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	1 Laporan	0	20.000.000		- 20.000.000
13	<i>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</i>			300.000.000	35.695.000	- 264.305.000
	<i>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</i>			300.000.000	35.695.000	- 264.305.000
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	6000 UTTP	6000 UTTP	200.000.000	25.420.000	- 174.580.000
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	9000 UTTP	9000 UTTP	100.000.000	10.275.000	- 89.725.000
	JUMLAH			101.523.957.809	24.950.603.524	- 76.098.354.285

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2024 disusun dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2024 mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2024;
2. Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja, maka perlu dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 yang selanjutnya dijadikan bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah periode berikutnya.

Semoga Perubahan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target yang telah ditetapkan

Kendal, 2024

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KENDAL


TONI ARI WIBOWO, AP., MM
Pimpinan Utama Muda
NIP. 19760117 199412 1 001

L A M P I R A N
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kendal
Tahun 2024

[illegible]

printed by e-Dalevbang PPT | 13 Agustus 2024 11:19

printed by e-Dalevbang PPT | 13 Agustus 2024 11:19

[illegible]

[illegible]

தே.	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்								பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்
-----	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

REALISASI TARGET KINERJA DAN ANGGARAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KENDAL						
NO	PROGRAM/KEGUATAN/SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2024	PENETAPAN 2024	PERUBAHAN 2024	BERKURANG / BERTAMBAH
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			19.906.341.131	19.177.341.131	- 729.000.000
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			112.984.200	112.984.200	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	69.707.400	69.707.400	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	12 Laporan	12 Laporan	43.276.800	43.276.800	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.127.633.543	14.197.633.543	- 930.000.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	15.127.633.543	14.197.633.543	- 930.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.221.263.388	2.364.263.388	143.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	12 Paket	254.500.000	254.500.000	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20 Paket	20 Paket	60.000.000	60.000.000	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket	300.000.000	300.000.000	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000	345.000.000	145.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	1.406.763.388	1.404.763.388	- 2.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.144.460.000	1.997.530.000	- 146.930.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	3.000.000	3.000.000	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	655.000.000	713.000.000	58.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	1.486.460.000	1.281.530.000	- 204.930.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			300.000.000	504.930.000	204.930.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77 Unit	77 Unit	150.000.000	354.930.000	204.930.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120 Unit	120 Unit	150.000.000	150.000.000	-
2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			33.180.000	33.180.000	-
	<i>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>			33.180.000	33.180.000	-
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Koperasi	100 Koperasi	33.180.000	33.180.000	-
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			106.919.000	106.919.000	-
	<i>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>			106.919.000	106.919.000	-
	Penguatan tata kelola kelembagaan koperasi	50 Koperasi	50 Koperasi	20.850.000	20.850.000	-
	Pelaksanaan proses pemeriksaan dan kewenangan koperasi yang wilayah keanggotaanya daerah kabupaten/kota	30 Koperasi	30 Koperasi	86.069.000	86.069.000	-
4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			28.385.000	28.385.000	-
	<i>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>			28.385.000	28.385.000	-
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Koperasi	100 Koperasi	28.385.000	28.385.000	-
5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			-	13.781.700	13.781.700
	<i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>			-	13.781.700	13.781.700
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	25 Koperasi	25 Koperasi	-	13.781.700	13.781.700
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			46.400.000	46.400.000	-
	<i>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>			46.400.000	46.400.000	-
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	100 Koperasi	100 Koperasi	46.400.000	46.400.000	-
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			358.926.000	426.749.570	67.823.570
	<i>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</i>			358.926.000	426.749.570	67.823.570
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	300 UMKM	300 UMKM	200.000.000	267.823.570	67.823.570
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	50 UMKM	50 UMKM	23.676.000	23.676.000	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	50 UMKM	50 UMKM	35.250.000	35.250.000	-
	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	-
8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			101.220.000	81.220.000	- 20.000.000
	<i>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</i>			101.220.000	81.220.000	- 20.000.000
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	200 UMKM	200 UMKM	101.220.000	81.220.000	- 20.000.000

1	2	3	4	5	6	7
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	200 UMKM	200 UMKM	101.220.000	81.220.000	20.000.000
9	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN			11.375.000	13.375.000	2.000.000
	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota			11.375.000	13.375.000	2.000.000
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	11.375.000	13.375.000	2.000.000
10	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			2.798.599.393	4.283.707.393	1.485.108.000
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			2.609.629.393	4.094.737.393	1.485.108.000
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	3 Unit	1.017.650.000	2.502.758.000	1.485.108.000
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	13 Unit	13 Unit	1.591.979.393	1.591.979.393	-
	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			188.970.000	188.970.000	-
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			186.550.000	186.550.000	-
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	13 Laporan	13 Laporan	2.420.000	2.420.000	-
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	13 Laporan	13 Laporan	100.759.000	116.359.000	15.600.000
11	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			27.529.000	40.329.000	12.800.000
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			27.529.000	40.329.000	12.800.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	12 Laporan	55.365.000	58.165.000	2.800.000
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			55.365.000	58.165.000	2.800.000
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	12 Laporan	17.865.000	17.865.000	-
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			17.865.000	17.865.000	-
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	12 Laporan	12 Laporan	1.422.804.000	1.746.204.000	323.400.000
12	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			1.422.804.000	1.746.204.000	323.400.000
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			867.227.000	867.227.000	-
	Pameran Dagang Lokal	1 Pameran	1 Pameran	540.437.000	863.837.000	323.400.000
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	1 Laporan	1 Laporan	15.140.000	15.140.000	-
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	1 Laporan	1 Laporan	35.695.000	35.695.000	-
13	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			35.695.000	35.695.000	-
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	6000 UTTP	6000 UTTP	25.420.000	25.420.000	-
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	9000 UTTP	9000 UTTP	10.275.000	10.275.000	-
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal			24.950.603.524	26.109.316.794	1.158.713.270
	JUMLAH					



PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KAB. KENDAL
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH								24.358.543.790,00	24.950.603.524,00	25.964.316.794,00	1.605.773.004,00						33.716.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							19.780.308.809,00	20.581.371.131,00	19.768.976.401,00	-11.332.408,00							20.266.000.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							19.780.308.809,00	20.581.371.131,00	19.768.976.401,00	-11.332.408,00							20.266.000.000,00	
1.	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi yang diterbitkan				12,10 %	12,10 %	43.388.000,00	33.180.000,00	33.180.000,00	56.612.000,00							100.000.000,00	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT				80 %	80 %	43.388.000,00	33.180.000,00	33.180.000,00	-10.208.000,00			-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	43.388.000,00	33.180.000,00	33.180.000,00	-10.208.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentasi koperasi/KSP yang diawasi				25,64 %	25,64 %	145.041.000,00	106.919.000,00	106.919.000,00	-5.041.000,00							140.000.000,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diawasi dan dperiksa				5 koperasi	5 koperasi	145.041.000,00	106.919.000,00	106.919.000,00	-38.122.000,00			-	-	-		140.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																		
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	46.694.000,00	20.850.000,00	20.850.000,00	-25.844.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	98.347.000,00	86.069.000,00	86.069.000,00	-12.278.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSPI/USP KOPERASI	Persentase koperasi dan BPR/LKM yang dinilai				68,18 %	68,18 %	96.694.000,00	28.385.000,00	28.385.000,00	13.306.000,00							110.000.000,00	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dinilai				100 koperasi	100 koperasi	96.694.000,00	28.385.000,00	28.385.000,00	-68.309.000,00			-	-	-		110.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSPI/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	96.694.000,00	28.385.000,00	28.385.000,00	-68.309.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			110.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian				27,00 %	27,00 %	475.000.000,00	0,00	13.781.700,00	-75.000.000,00							400.000.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan/ uji kompetensi				40 koperasi	40 koperasi	475.000.000,00	0,00	13.781.700,00	-461.218.300,00			-	-	-		400.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				250 Orang	250 Orang	475.000.000,00	0,00	13.781.700,00	-461.218.300,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			400.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.				27,00 %	27,00 %	68.388.000,00	46.400.000,00	46.400.000,00	11.612.000,00							80.000.000,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberdayakan dan perlindungan				10 koperasi	10 koperasi	68.388.000,00	46.400.000,00	46.400.000,00	-21.988.000,00			-	-	-		80.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																		
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				120 Unit Usaha	120 Unit Usaha	68.388.000,00	46.400.000,00	46.400.000,00	-21.988.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang diberdayakan Persentase usaha mikro yang diberdayakan				7,20 7,20 % %	7,20 7,20 % %	530.000.000,00	358.926.000,00	426.749.570,00	370.000.000,00							900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	<i>jumlah Usaha mikro yang diberdayakan</i>				763 ukm	763 ukm	530.000.000,00	358.926.000,00	426.749.570,00	-103.250.430,00			-	- -	-		900.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																		
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro</i>				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	100.000.000,00	200.000.000,00	267.823.570,00	167.823.570,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA INSENTIF DAERAH INSENTIF FISKAL	-	- -			300.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																		
			<i>Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan</i>				100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	100.000.000,00	23.676.000,00	23.676.000,00	-76.324.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL	-	- -			200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro</i>				100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	280.000.000,00	0,00	0,00	-280.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-PK2UKM	-	- -			150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro																		
			<i>Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro</i>				210 Orang	210 Orang	50.000.000,00	35.250.000,00	35.250.000,00	-14.750.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro																		
			<i>Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata</i>				-	28000 Unit Usaha	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
7.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha mikro yang dikembangkan				6,40 %	6,40 %	194.930.000,00	101.220.000,00	81.220.000,00	605.070.000,00							800.000.000,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	<i>Jumlah usaha mikro yang dikembangkan</i>				220 ukm	220 ukm	194.930.000,00	101.220.000,00	81.220.000,00	-113.710.000,00			-	- -	-		800.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																		
			<i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi</i>				800 Unit Usaha	800 Unit Usaha	194.930.000,00	101.220.000,00	81.220.000,00	-113.710.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL	-	- -			800.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
8.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	18.226.867.809,00	19.906.341.131,00	19.032.341.131,00	-490.867.809,00							17.736.000.000,00	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>jumlah dokumen perencanaan</i>				8 dokumen	8 dokumen	197.302.000,00	112.984.200,00	112.984.200,00	-84.317.800,00			-	- -	-		160.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	110.000.000,00	69.707.400,00	69.707.400,00	-40.292.600,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			80.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				24 Laporan	24 Laporan	87.302.000,00	43.276.800,00	43.276.800,00	-44.025.200,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			80.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</i>				4 dokumen	4 dokumen	14.064.203.809,00	15.127.633.543,00	14.197.633.543,00	133.429.734,00			-	- -	-		14.100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				14 Orang/bulan	121 Orang/bulan	13.500.203.809,00	15.127.633.543,00	14.197.633.543,00	697.429.734,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			13.500.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	564.000.000,00	0,00	0,00	-564.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			600.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	barang milik daerah yang masuk didalam laporan aset				12 bulan	12 bulan	4.952.000,00	0,00	0,00	-4.952.000,00			-	- -	-		5.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	4.952.000,00	0,00	0,00	-4.952.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan rutin				12 bulan	12 bulan	976.400.000,00	2.221.263.388,00	2.219.263.388,00	1.242.863.388,00			-	- -	-		625.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	161.900.000,00	254.500.000,00	254.500.000,00	92.600.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				60 Paket	60 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	197.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	200 Laporan	301.500.000,00	1.406.763.388,00	1.404.763.388,00	1.103.263.388,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			170.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sarana prasarana yang diadakan				8 unit	8 unit	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00			-	- -	-		190.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			70.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			120.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	barang milik daerah yang masuk didalam laporan aset terpelihara pemenuhan rutin				12 bulan	12 bulan	2.684.000.000,00	2.144.460.000,00	1.997.530.000,00	-686.470.000,00			-	- -	-		2.056.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			6.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	655.000.000,00	655.000.000,00	655.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			500.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	390.000.000,00	1.486.460.000,00	1.339.530.000,00	949.530.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.636.000.000,00	0,00	0,00	-1.636.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.400.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	barang milik daerah yang masuk didalam laporan aset terpelihara				12 bulan	12 bulan	300.000.000,00	300.000.000,00	504.930.000,00	204.930.000,00			-	- -	-		600.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				82 Unit	82 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	354.930.000,00	204.930.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				87 Unit	87 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			300.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							4.578.234.981,00	4.369.232.393,00	6.195.340.393,00	1.617.105.412,00							13.450.000.000,00	
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							24.000.000,00	11.375.000,00	13.375.000,00	-10.625.000,00							25.000.000,00	
1.	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase energi terbarukan yang diawasi				2.00 %	2.00 %	24.000.000,00	11.375.000,00	13.375.000,00	1.000.000,00							25.000.000,00	
	3.29.05.2.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang terlibat dalam Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota				50 orang	50 orang	24.000.000,00	11.375.000,00	13.375.000,00	-10.625.000,00			-	- -	-		25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.29.05.2.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	24.000.000,00	11.375.000,00	13.375.000,00	-10.625.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							4.554.234.981,00	4.357.857.393,00	6.181.965.393,00	1.627.730.412,00							13.425.000.000,00	
1.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentase Pasar yang layak fungsi				38.45 %	38.45 %	2.407.225.821,00	2.798.599.393,00	4.283.707.393,00	7.892.774.179,00							10.300.000.000,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	pasar yang dibangun dan dikelola				13 unit	13 unit	2.257.225.821,00	2.609.629.393,00	4.094.737.393,00	1.837.511.572,00			-	- -	-		10.000.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				13 Unit	13 Unit	1.388.670.981,00	1.017.650.000,00	2.502.758.000,00	1.114.087.019,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	- -			8.500.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				13 Unit	13 Unit	868.554.840,00	1.591.979.393,00	1.591.979.393,00	723.424.553,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.500.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	sarana distribusi perdagangan yang mendapatkan fasilitasi pengelolaan				14 Pasar	14 Pasar	150.000.000,00	188.970.000,00	188.970.000,00	38.970.000,00			-	- -	-		300.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				13 Dokumen	13 Dokumen	100.000.000,00	186.550.000,00	186.550.000,00	86.550.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	- -			150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				13 Dokumen	13 Dokumen	50.000.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00	-47.580.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-				-	-	277.500.000,00	100.759.000,00	116.359.000,00	32.500.000,00							310.000.000,00	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	terjaminnya ketersediaan barang pokok dan penting di tingkat kabupaten				100 persen	100 persen	175.000.000,00	27.529.000,00	40.329.000,00	-134.671.000,00			-	- -	-		190.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				12 Laporan	12 Laporan	95.000.000,00	27.529.000,00	40.329.000,00	-54.671.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat</i>				12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			40.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	<i>terjaminnya harga barang pokok dan penting yang terjangkau ditingkat kabupaten</i>				1200 data	1200 data	55.000.000,00	55.365.000,00	58.165.000,00	3.165.000,00			-	- -	-		60.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																		
			<i>Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</i>				12 Laporan	12 Laporan	55.000.000,00	55.365.000,00	58.165.000,00	3.165.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			60.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>ketersediaan pupuk dan pestisida bersubsidi yang dilakukan</i>				10 distributor	10 distributor	47.500.000,00	17.865.000,00	17.865.000,00	-29.635.000,00			-	- -	-		60.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																		
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%</i>				6 Laporan	6 Laporan	47.500.000,00	17.865.000,00	17.865.000,00	-29.635.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			60.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-				-	-	1.711.804.000,00	1.422.804.000,00	1.746.204.000,00	838.196.000,00							2.550.000.000,00	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>penyelenggaraan dagang yang dilaksanakan</i>				1 event	1 event	1.711.804.000,00	1.422.804.000,00	1.746.204.000,00	34.400.000,00			-	- -	-		2.550.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional																		
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang</i>				20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	107.272.000,00	0,00	0,00	-107.272.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal																		
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal</i>				200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	1.000.000.000,00	867.227.000,00	867.227.000,00	-132.773.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan																		
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan</i>				50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	604.532.000,00	540.437.000,00	863.837.000,00	259.305.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA INSENTIF DAERAH INSENTIF FISKAL	-	- -			1.250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor																		
			<i>Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi</i>				0 Produk	0 Produk	0,00	15.140.000,00	15.140.000,00	15.140.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	<i>Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan</i>				100.00 %	100.00 %	157.705.160,00	35.695.000,00	35.695.000,00	107.294.840,00							265.000.000,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	<i>pelaksanaan tera tera ulang dan pengawasan yang dilakukan</i>				6000 UTTP	6000 UTTP	157.705.160,00	35.695.000,00	35.695.000,00	-122.010.160,00			-	- -	-		265.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			<i>Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang</i>				6000 Unit	6000 Unit	102.705.160,00	25.420.000,00	25.420.000,00	-77.285.160,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			165.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
			<i>Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina</i>				9000 Orang	9000 Orang	55.000.000,00	10.275.000,00	10.275.000,00	-44.725.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim			100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
			J U M L A H						24.358.543.790,00	24.950.603.524,00	25.964.316.794,00	1.605.773.004,00							33.716.000.000,00	



**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN GEMUH
TAHUN 2024**



**KECAMATAN GEMUH
KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tidak dapat terakomodir dalam APBD Penetapan Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perubahan Renja dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Adapun untuk Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, perubahan RKPD dan Renja PD disebabkan adanya kegiatan yang tidak dapat terakomodir pada APBD Penetapan serta adanya rasionalisasi anggaran yang disebabkan pendapatan daerah yang tidak memenuhi target yang telah ditentukan.

Perubahan Renja Kecamatan Gemuh ini diharapkan dapat benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif kegiatan Kecamatan Gemuh pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.


CAMAT GEMUH
KARTINI, S.STP., M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19840620 200212 2 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
KATA PENGANTAR	ii	
DAFTAR ISI	iii	
BAB I PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang.....	1	
1.2 Landasan Hukum	2	
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5	
1.4 Sistematika Penulisan.....	6	
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN		
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II dan Renstra Perangkat Daerah	8	
2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24	
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		25
BAB IV PENUTUP	49	
Lampiran – lampiran		

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024 Kabupaten Kendal.....	17
Tabel 2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24
Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan RKPD Kabupaten Kendal telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 tahun 2024 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.

Dasar pertimbangan perubahan Renja 2024 ini menindaklanjuti dari surat Edaran Nomor : 007.2 / 1589 / Baperlitbang tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 tanggal 08 Agustus 2024. Perubahan Renja Perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka Organisasi Perangkat daerah termasuk Kecamatan Gemuh berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) dengan berpedoman pada Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Th 2024 dilaksanakan karena berdasar hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan dikarenakan adanya ketidaksesuaian proram dan kegiatan yang ada.

Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran maka perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gemuh Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan tahun 2024 serta menjadi dasar Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS).

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);

13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 20).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam mewujudkan efisiensi dalam pembangunan daerah.

Adapaun Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gemuh Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Kecamatan Gemuh dalam menentukan prioritas Program dan Kegiatan pada Perubahan Tahun 2024.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Gemuh untuk memahami Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Operasional pada Perubahan Tahun 2024, dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud anggaran berbasis kinerja.
3. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Gemuh tahun 2024 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Perubahan Kabupaten Kendal Tahun 2024;
4. Menjabarkan tentang gambaran umum daerah yang ingin dicapai pada perubahan tahun 2024 sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapinya misi dan visi kepala daerah;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/ Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. (disesuaikan dengan perbup Perubahan RKPD tahun 2023)

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
 - Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berisikan telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH (Menggunakan Lampiran Rancangan Akhir Perubahan RKPD 2024)

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap perangkat daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II dan Renstra Perangkat Daerah

Didalam penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Gemuh telah melakukan evaluasi atas program kegiatan pada periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Gemuh. Tercapai tidaknya pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Gemuh Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II, diketahui bahwa rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 45,75%.

Pada Triwulan II belum semua program terlaksana pada Kecamatan Gemuh dan juga belum sesuai dengan yang direncanakan. Realisasi Capaian kinerja dan anggaran masing program kegiatan pada Kecamatan Gemuh dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

Adapun gambaran lebih lengkap mengenai realisasi pencapaian kinerja Kecamatan Gemuh Tahun Anggaran 2024 Triwulan II adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Merupakan program yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan umum administrasi sebagai

fungsi penunjang kinerja pelaksanaan kegiatan pelayanan serta administrasi perkantoran dilingkungan Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran program ini adalah :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Pagu Anggaran | : Rp 3.330.000,- |
| Realisasi Anggaran | : Rp 0,- |
| Realisasi Anggaran | : 0 % |
| 2. Indikator kinerja capaian keluaran | : Jumlah tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah |
| 3. Target capaian kegiatan | : 8 Dokumen |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : 4 dokumen |
| 5. Tingkat capaian kinerja | : 50% |
- Capaian Kinerja sudah 50% tapi realisasi anggaran masih 0

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Pagu Anggaran | : Rp. 2.900.000,- |
| Realisasi Anggaran | : Rp. 0,- |
| Realisasi Anggaran | : 0 % |
| 2. Indikator kinerja capaian keluaran | : Jumlah koordinasi yang terlaksana |
| 3. Target capaian kegiatan | : 8 Dokumen |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : 4 dokumen |
| 5. Tingkat capaian kinerja | : 0% |

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 1 sub kegiatan.

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Pagu Anggaran | : Rp. 2.302.673.859,- |
| Realisasi Anggaran | : Rp. 1.139.683.286,- |
| Realisasi Anggaran | : 49,50 % |

2. Indikator kinerja capaian keluaran : Jumlah bulan terbayarnya gaji dan tunjangan ASN.
3. Target capaian kegiatan : 14 bulan
4. Realisasi capaian kegiatan : 8 bulan
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 49,50%

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah :

a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut

Kelengkapannya

1. Pagu Anggaran : Rp. 18.750.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 6.800.000,-
Realisasi Anggaran : 36,27 %
2. Indikator kinerja capaian keluaran : Jumlah pakaian yang terealisasi.
3. Target capaian kegiatan : 148 set
4. Realisasi capaian kegiatan : 20 set
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 36,27%

b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

1. Pagu Anggaran : Rp.4.903.000,-
Realisasi Anggaran : Rp.795.000,-
Realisasi Anggaran : 16,22%
2. Indikator kinerja capaian keluaran : Jumlah bulan tersediannya alat listrik/ penerangan bangunan.
3. Target capaian kegiatan : 12 bulan
4. Realisasi capaian kegiatan : 6 bulan
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 16,22 %

c. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1. Pagu Anggaran : Rp.46.691.000,-
Realisasi Anggaran : Rp.8.589.000,-
Realisasi Anggaran : 18,40 %
2. Indikator kinerja capaian keluaran : Jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor dan pengadaan
3. Target capaian kegiatan : 12 bln
4. Realisasi capaian kegiatan : 6 bln
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 18,40%

d. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1. Pagu Anggaran : Rp 4.543.000,-
Realisasi Anggaran : Rp 678.000,-
Realisasi Anggaran : 14,93 %
2. Indikator kinerja capaian keluaran : Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga

3. Target capaian kegiatan : 12 bln
 4. Realisasi capaian kegiatan : 6 bln
 5. Tingkat capaian kinerja (%) : 14,93%
- e. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1. Pagu Anggaran : Rp 14.640.000,-
Realisasi Anggaran : Rp 9.885.000,-
Realisasi Anggaran : 67,53 %
 2. Indikator kinerja capaian : Jumlah tersedianya logistik dan makan minum rapat/tamu.
keluaran
 3. Target capaian kegiatan : 12 bln
 4. Realisasi capaian kegiatan : 6 bln
 5. Tingkat capaian kinerja (%). : 67,53%
- f. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
1. Pagu Anggaran : Rp 2.136.000,-
Realisasi Anggaran : Rp 2.090.000,-
Realisasi Anggaran : 97,85 %
 2. Indikator kinerja capaian : Jumlah bulan penyediaan cetak dan penggandaan
keluaran
 3. Target capaian kegiatan : 12 bln
 4. Realisasi capaian kegiatan : 6 bln
 5. Tingkat capaian kinerja (%). : 97,85%
- g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
1. Pagu Anggaran : Rp 200.000,-
Realisasi Anggaran : Rp 150.000,-
Realisasi Anggaran : 75 %
 2. Indikator kinerja capaian : Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan perpu
keluaran
 3. Target capaian kegiatan : 12 bln
 4. Realisasi capaian kegiatan : 6 bln
 5. Tingkat capaian kinerja (%). : 75%
- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
1. Pagu Anggaran : Rp 99.700.000,-
Realisasi Anggaran : Rp 33.698.650,-
Realisasi Anggaran : 30,81 %
 2. Indikator kinerja capaian : Jumlah kegiatan koordinasi/ konsultasi dalam/luar daerah dan tersedianya kebutuhan bbm
keluaran
 3. Target capaian kegiatan : 6 bln
 4. Realisasi capaian kegiatan : 12 bln

5. Tingkat capaian kinerja (%). : 30,81%
- i. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 1. Pagu Anggaran : Rp 8.705.000,-
Realisasi Anggaran : Rp 0,-
Realisasi Anggaran : 0 %
 2. Indikator kinerja capaian : Ketercapaian dalam
keluaran penatausahaan Arsip
 3. Target capaian kegiatan : 1 bln
 4. Realisasi capaian kegiatan : 0 bln
 5. Tingkat capaian kinerja (%). : 0%

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa surat menyurat
 1. Pagu Anggaran : Rp 3.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp 1.000.000,-
Realisasi Anggaran : 33,34 %
 2. Indikator kinerja capaian : Persentase penyediaan
keluaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 3. Target capaian kegiatan : 12 bln
 4. Realisasi capaian kegiatan : 6 bln
 5. Tingkat capaian kinerja (%). : 33,34%
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik
 1. Pagu Anggaran : Rp 49.900.000,-
Realisasi Anggaran : Rp 19.427.604,-
Realisasi Anggaran : 38,94 %
 2. Indikator kinerja capaian : Jumlah bulan belanja
keluaran rekening listrik, air dan telpon
 3. Target capaian kegiatan : 12 bln
 4. Realisasi capaian kegiatan : 6 bln
 5. Tingkat capaian kinerja (%). : 38,94 %
- c. Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 1. Pagu Anggaran : Rp 153.604.000,-
Realisasi Anggaran : Rp 73.123.000,-
Realisasi Anggaran : 47,61%
 2. Indikator kinerja capaian : Belanja jasa peralatan
keluaran perlengkapan kantor
 3. Target capaian kegiatan : 12 bln
 4. Realisasi capaian kegiatan : 6 bln
 5. Tingkat capaian kinerja (%) : 47,61%
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 1. Pagu Anggaran : Rp 100.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp 0,-

- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Realisasi Anggaran | : | 0% |
| 2. Indikator kinerja capaian keluaran | : | Penyediaan artikel, media online dan media cetak |
| 3. Target capaian kegiatan | : | 12 bln |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : | 6 bln |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%). | : | 0% |

5. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1. Pagu Anggaran	:	Rp 5.400.000,-
Realisasi Anggaran	:	Rp 1.126.000,-
Realisasi Anggaran	:	47,61%
2. Indikator kinerja capaian keluaran	:	Tercukupinya jumlah pemeliharaan dan pembayaran Pajak
3. Target capaian kegiatan	:	12 Unit
4. Realisasi capaian kegiatan	:	5 Unit
5. Tingkat capaian kinerja (%).	:	47,61%
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1. Pagu Anggaran	:	Rp 16.650.000,-
Realisasi Anggaran	:	Rp 1.920.000,-
Realisasi Anggaran	:	11,54%
2. Indikator kinerja capaian keluaran	:	Prosentase ketercapaian dalam pemeliharaan peralatan dan mesin
3. Target capaian kegiatan	:	12 bln
4. Realisasi capaian kegiatan	:	6 bln
5. Tingkat capaian kinerja (%).	:	11,54%
- c. Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1. Pagu Anggaran	:	Rp 1.720.000,-
Realisasi Anggaran	:	Rp 0,-
Realisasi Anggaran	:	0%
2. Indikator kinerja capaian keluaran	:	Prosentase gedung yang dipelihara
3. Target capaian kegiatan	:	3 Unit
4. Realisasi capaian kegiatan	:	0 Unit
5. Tingkat capaian kinerja (%).	:	0%

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; untuk kegiatan ini ada 2 kegiatan :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada Di Kecamatan

a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan:

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp 700.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp 0,- |
| Realisasi Anggaran | : | 0% |
| 2. Indikator kinerja capaian keluaran | : | Monitoring dan evaluasi kegiatan efektifitas pemberdayaan masyarakat desa |
| 3. Target capaian kegiatan | : | 12 bln |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : | 0 |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%). | : | 0% |

2. Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha

- | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp 1.100.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp 0,- |
| Realisasi Anggaran | : | 0% |
| 2. Indikator kinerja capaian keluaran | : | Jumlah kegiatan yang dilakukan |
| 3. Target capaian kegiatan | : | 1 kegiatan |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : | 0 kegiatan |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%). | : | 0% |

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa,
kegiatan ini ada 3 sub kegiatan:

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp 200.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp 200.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | 0% |
| 2. Indikator kinerja capaian keluaran | : | Jumlah desa yang difasilitasi dalam forum musrenbang. |
| 3. Target capaian kegiatan | : | 1 keg |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : | 0 keg |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%). | : | 0% |

b. Sinkronisasi Program Kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh

Pemerintahan dan Swasta Di Wilayah Kerja Kecamatan

1. Pagu Anggaran : Rp 200.000,-
Realisasi Anggaran : Rp 0,-
Realisasi Anggaran : 0%
 2. Indikator kinerja capaian : Jumlah terselenggaranya
keluaran kegiatan pemberdayaan
oleh pemerintah dan
swasta
 3. Target capaian kegiatan : 1 kegiatan
 4. Realisasi capaian kegiatan : 1 kegiatan
 5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%
- c. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan:
1. Pagu Anggaran : Rp 869.200,-
Realisasi Anggaran : Rp 0,-
Realisasi Anggaran : 0%
 2. Indikator kinerja capaian : Jumlah desa yang
keluaran difasilitasi dalam
kegiatan pemberdayaan
perempuan
 3. Target capaian kegiatan : 12 bln
 4. Realisasi capaian kegiatan : 0
 5. Tingkat capaian kinerja (%). : 0%

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan sub Kegiatan:
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 1. Pagu Anggaran : Rp 200.000,-
Realisasi Anggaran : Rp 0,-
Realisasi Anggaran : 0%
 2. Indikator kinerja capaian : Prosentase kasus
keluaran konflik yang ditangani
 3. Target capaian kegiatan : 12 bln
 4. Realisasi capaian kegiatan : 0
 5. Tingkat capaian kinerja (%). : 0%
2. Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - a. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
 1. Pagu Anggaran : Rp 94.680.000,-
Realisasi Anggaran : Rp 47.340.000,-

Realisasi Anggaran	:	50%
2. Indikator kinerja capaian keluaran	:	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan
3. Target capaian kegiatan	:	12 kali
4. Realisasi capaian kegiatan	:	6 kali
5. Tingkat capaian kinerja (%).	:	50%

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a. Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional
 1. Pagu Anggaran : Rp 200.000,-
Realisasi Anggaran : Rp.0,-
Realisasi Anggaran : 0%
 2. Indikator kinerja capaian keluaran : Jumlah desa yang difasilitasi dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
 3. Target capaian kegiatan : 100 %
 4. Realisasi capaian kegiatan : 0 %
 5. Tingkat capaian kinerja (%). : 0%

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 1. Pagu Anggaran : Rp 800.000,-
Realisasi Anggaran : Rp 0,-
Realisasi Anggaran : 0%
 2. Indikator kinerja capaian keluaran : Prosentase penyusunan APBDes tepat waktu
 3. Target capaian kegiatan : 100 %
 4. Realisasi capaian kegiatan : 0 %
 5. Tingkat Capaian Kinerja (%) : 0%

Berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Gemuh Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II, diketahui bahwa rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 46,28%. Pada Triwulan II belum semua program terlaksana pada Kecamatan Gemuh dan juga belum sesuai dengan yang direncanakan.

Adapun Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya serta tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada **Tabel 2.1** berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kendal

Nama OPD : Kecamatan Gemuh

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Realisasi program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9	10
	UNSUR KEWILAYAHAN								
	KECAMATAN								
	PROGRAM								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah (%)							
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana (dokumen)							
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan laporan capaian kinerja persemester	8	8	0	0%	8	8	100
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	4	8	0	0%	8	8	100
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi							

		Keuangan yang dilaksanakan (dokumen)							
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	14	8	49,50%	14	14	100
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah (stell)							
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya	Tercukupinya pakaian dinas berserta kelengkapannya	14	148	20	36,27%	0	148	100
7.01.01.2.05.011	Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimtek	50	0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum yang dilaksanakan (paket)							
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket	4	12	6	16,22%	12	12	100
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	12	6	18,40%	12	12	100
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) Jumlah peralatan rumah tangga yang terpenuhi(bulan)	4	12	6	14,93%	12	12	100
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	umlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	12	6	67,53%	12	12	100

7.01.01.2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	12	6	97,85%	12	12	100
7.01.01.2.06.0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	4	12	6	75%	12	12	100
7.01.01.2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(laporan)	4	12	6	30,81%	12	12	100
7.01.01.2.06.1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD(dokumen)	4	12	0	0%	12	12	100
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset yang diadakan	4	0	6	0%	0	0	0
7.01.01.2.07.0 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	0	0	0%	12	0	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	12	12	6	30,53%	12	12	100
7.01.01.2.08.0 1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan Jumlah materai dan benda pos lainnya yang terpenuhi (bulan)	4	12	6	33,34%	12	12	100
7.01.01.2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah biaya listrik, air, telp dan website yang terpenuhi (bulan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	12	6	38,94%	12	12	100

		yang Disediakan							
7.01.01.2.08.0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah tersedianya peralatan kantor	4	12	6	47,61%	12	12	100
7.01.01.2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah jasa penunjang kegiatan yang terbayar(bulan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	12	6	0%	12	12	100
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang terpelihara (unit)	6	12	6	10,58%	12	12	100
7.01.01.2.09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang tercukupi dan pajak STNK yang terbayar(bulan)	4	15	5	20,86%	12	15	100
7.01.01.2.09.0 6	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	12	6	11,54%	12	12	100
7.01.01.2.09.1 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	4	3	0	0%	3	2	100
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan (%)							
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Tercapainya target pelayanan di Kecamatan (bulan)	12	12	0	0%	18	12	100
7.01.02.2.02.0 3	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas	4	1	0	0%	18	1	100

	Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (bulan)							
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat (dokumen	12	1	0	0%	0	1	100
7.01.02.2.04.0 1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) Jumlah ijin dan rekomendasi yang terakomodir (bulan)	4	1	0	0%	0	1	100
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatkan Koordinasi Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan (dokumen)	12	1	0	15%	12	1	100
7.01.03.2.01.0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Lewat Musrenbang	4	1	1	100%	12	1	100
7.01.03.2.01.0 2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4	12	0	0%	1	12	100
7.01.03.2.01.0 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan	4	12	0	0%	18	12	100
		Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)							

7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani (%)							
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(laporan)	12	12	0	0%	18	12	100
7.01.04.2.01.0 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	12	0	0%	18	12	100
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi yang dilakukan (laporan)	4	12	6	50%	12	12	100
7.01.04.2.02.0 1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	4	12	6	50%	12	12	100
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Prosentase Tercapainya Kegiatan Bimtek							
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase terpenuhinya Koordinasi dan Bimtek	4	12	0	0%	0	12	100
7.01.05.2.01.0 2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi,	jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan	4	12	0	0%	0	12	100

	Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)							
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu (%)							
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasa Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (dokumen)	4	12	0	0%	12	12	100
7.01.06.2.01.0 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	11	20	0	0%	12	20	100

2.2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 tidak memasukkan usulan dari masyarakat yang disampaikan lewat kegiatan Musrenbangcam, karena program/kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan bersifat rutin dan tugas pokok yang dilakukan bersifat koordinatif dan pembinaan. Sedangkan usulan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat bersifat fisik.

Usulan yang berasal dari masyarakat tersebut selanjutnya ditampung dalam Daftar Usulan Prioritas Kegiatan yang kemudian disampaikan dalam Musrenbangkab.

Program/kegiatan yang berasal dari masyarakat tersebut diperjuangkan dan dikawal oleh Tim Kecamatan agar masuk dalam program/kegiatan prioritas di OPD teknis terkait yang ada di Kabupaten Kendal.

Tabel. 2.2
Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat pada Perubahan Tahun 2024
Kabupaten Kendal

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Vol	Catatan
	NIHIL				

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan sebagai penjabaran misi yang pertama seperti tersebut diatas, maka tujuan yang ditetapkan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Gemuh pada tahun 2024 yaitu untuk mengacu pada arah kebijakan pembangunan tahun 2024, Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2024 “**Kendal Smart City**” yang diprioritaskan pada “Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal *Smart City*”. Arah kebijakan ini dengan focus peningkatan kemantapan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan *clean* dan *Good Governances*, penguatan *Smart City* yang difokuskan pada *Smart Government*, *Smart Education*, *Smart Health*, *Smart Economy* dan *Smart Transportation*.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka Rencana Kerja dan Pendanaan yang diusulkan pada Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gemuh Tahun 2024 terdiri dari 5 program dan 14 kegiatan, dengan nominal anggaran penetapan sebesar Rp. 2.943.395.059,- bertambah Rp. 10.000.000.000,-, sehingga menjadi Rp. 2.953.395.059,-. Adapun program/kegiatan yang diusulkan Perubahan APBD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA, Yang dijabarkan dalam subkegiatan:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp 3.330.000,- bertambah menjadi Rp 12.330.000,-
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp. 2.900.000,- berkurang menjadi Rp 916.400,-

- c. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 2.302.673.859,- anggaran tetap.
- d. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya sebesar Rp 18.750.000,- anggaran tetap
- e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran penetapan sebesar Rp.4.903.000,- anggaran tetap.
- f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan Anggaran Penetapan sebesar Rp. 46.691.000,- berkurang menjadi Rp. 44.963.000,-.
- g. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan Anggaran Penetapan Rp. 4.543.000,- berubah menjadi Rp. 4528.000,- , anggaran berkurang;
- h. Penyediaan Logistik Kantor, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 14.640.000,- bertambah menjadi Rp. 30.730.000,-
- i. Penyediaan barang cetakan dan Pengadaan Rp. 2.136.000,-
- j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan sebesar Rp. 200.000,- anggaran tetap;
- k. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 99.700.000,- bertambah menjadi Rp. 136.880.000,-;
- l. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sebesar Rp 8.705.000,- berkurang menjadi Rp 5.205.000,-;
- m. Penyediaan jasa surat menyurat. Dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 3.000.000,- berkurang menjadi Rp. 2.505.000,-;
- n. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 49.900.000,- berkurang menjadi Rp. 48.130.000,-;
- o. Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 153.604.000,- berkurang menjadi Rp. 144.424.000,-

- p. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 100.000.000,- anggaran tetap;
 - q. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, anggaran Penetapan sebesar Rp. 5.400.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.
 - r. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, anggaran Penetapan sebesar Rp.16.650.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.
 - s. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 6.720.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.
- 2) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMRINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
- Yang dijabarkan dalam subkegiatan:
- a. Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan, anggaran penetapan sebesar Rp. 1.200.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.
- 3) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
- Yang dijabarkan dalam subkegiatan:
- a. Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 700.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha sebesar Rp. 1.100.000,- tidak mengalami perubahan anggaran;
- 4) PROGRAM PERMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, yang dijabarkan dalam subkegiatan :

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 200.000 anggaran tetap;
- b. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan sebesar Rp. 200.000 anggaran tetap;
- c. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebesar Rp. 869.200,- bertambah menjadi Rp. 7.669.200,-

5) PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Yang dijabarkan dalam subkegiatan:

- a. Sinergitas dengan kepolisian Negara republic Indonesia. Tentara nasional Indonesia dan Instansi vertical di wilayah Kecamatan, dengan anggaran penetapan sebesar Rp.200.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.
- b. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 94.680.000,- anggaran tetap;

6) PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- a. Fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional, dengan anggaran penetapan Rp. 200.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.

7) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Yang dijabarkan dalam subkegiatan:

- a. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, dengan anggaran sebesar Rp. 800.000,- bertambah menjadi Rp. 9.850.000,-

Tabel 3.1
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KECAMATAN GEMUH KAB. KENDAL
TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Bertambah / Berkurang
								Target 2024				
								Sebelum	Sesudah	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	5	6	7	8	9
						KECAMATAN GEMUH				2.943.395.059,00	2.953.395.059,00	10000000
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.943.395.059,00	2.953.395.059,00	10000000
	7	01				KECAMATAN				2.943.395.059,00	2.953.395.059,00	10000000
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100.00 %	100.00 %	2.844.445.859,00	2.838.595.859,00	-5850000
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi yang tersusun	8 dokumen	8 dokumen	6.230.000,00	6.230.000,00	0

	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						0
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	3.330.000,00	12.330.000,00	9000000
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	2.900.000,00	916.400,00	-1983600
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terbayarnya gaji ASN	14 dokumen	12 Bulan	2.302.673.859,00	2.302.673.859,00	0
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						0
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.302.673.859,00	2.253.225.459,00	-49448400
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas harian dan emblem/ID card yang tersediaterselenggar	12 Bulan	12 Bulan	18.750.000,00	18.750.000,00	0

							anya administrasi pegawai						
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							0
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	20 Paket	18.750.000,00	18.750.000,00		0
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							0
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang	0,00	0,00		0
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kanto tercukupinya bahan peralatan kantor	100 % 12 Bulan	100 % 12 Bulan	181.518.000,00	181.518.000,00		0
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							0

						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4.903.000,00	4.903.000,00	0
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	46.691.000,00	44.963.000,00	-1728000
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4.543.000,00	4.528.000,00	-15000
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	14.640.000,00	30.730.000,00	16090000
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						0
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2.136.000,00	2.136.000,00	0
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0

						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen	200.000,00	200.000,00	0	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					0	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan	99.700.000,00	136.880.000,00	37180000	
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					0	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	8.705.000,00	5.205.000,00	-3500000	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset yang diadakan	4 unit	4 unit	0,00	0,00	0
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0	

	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor	12 bulan	12 bulan	306.504.000,00	306.504.000,00	0
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	2.505.000,00	-495000
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						0
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	49.900.000,00	48.130.000,00	-1770000
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	153.604.000,00	144.424.000,00	-9180000
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	0

	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis aset yang dipeliharaterawatnya barang kantor	12 Bulan6 jenis	12 Bulan6 jenis	28.770.000,00	28.770.000,00	0
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit	5.400.000,00	5.400.000,00	0
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	16.650.000,00	16.650.000,00	0
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	6.720.000,00	6.720.000,00	0

2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	90 %	90 %	1.800.000,00	1.800.000,00	0
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan tercapainya target pelayanan di kecamatan	12 Bulan	12 Bulan	700.000,00	700.000,00	0
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						0
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25 Laporan	25 Laporan	700.000,00	700.000,00	0
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	12 Jenis	12 Jenis	1.100.000,00	1.100.000,00	0
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						0

						Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	20 Dokumen	20 Dokumen	1.100.000,00	1.100.000,00	0	
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	80 %	80 %	1.269.200,00	8.069.200,00	6800000
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah koordinasi yang dilaksanakan terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat selama satu tahun	12 Bulan 12 Kali	12 Bulan 12 Kali	1.269.200,00	1.269.200,00	0
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					0	
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	200.000,00	200.000,00	0	
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan					0	

						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	200.000,00	200.000,00	0	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					0	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	869.200,00	7.669.200,00	6800000	
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	90 %	90 %	94.880.000,00	94.880.000,00	0
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah koordinasi yang dilaksanakan terlaksananya kegiatan dalam sinegritas dengan tokoh agama dan kepolisian serta TNI	12 Bulan	12 Bulan	200.000,00	200.000,00	0

	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						0
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	200.000,00	200.000,00	0
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	jumlah koordinasi yang dilaksanakan terbayarnya honor linmas dalam melaksanakan penegakan perdaalam sinegritas dengan tokoh agama dan kepolisian serta TNI	12 Bulan	12 Bulan	94.680.000,00	94.680.000,00	0
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						0

						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	94.680.000,00	94.680.000,00	0	
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani	85 %	85 %	200.000,00	200.000,00	0
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan	12 kali	12 kali	200.000,00	200.000,00	0
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					0	

						Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	12 Orang	12 Orang	200.000,00	200.000,00	0	
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	100 %	100 %	800.000,00	9.850.000,00	9050000
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes terlaksananya kegiatan memfasilitasi desa selama satu tahun	12 Bulan	12 Bulan	800.000,00	800.000,00	0
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					0	
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20 Dokumen	20 Dokumen	800.000,00	9.850.000,00	9050000	
	J U M L A H								2.943.395.059,00	2.953.395.059,00	10000000	

Adapun Lampiran Rancangan Akhir Perubahan RKPD 2024 hasil printout sipd.kemendagri.go.id sebagaimana Tabel berikut ini :

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KENDAL
TAHUN 2024

1	2	3	4	5	6	7	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										14	15	PRIORITAS		18	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		21
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		RKPD PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL			DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEBESAR	APBD 2024	11		12	13											
		KECAMATAN GEMUH						2.673.961.821,00	2.943.396.069,00	2.943.396.069,00	379.833.238,00									2.766.960.000,00				
	7	UNSUB KEMILAYAHAN						2.673.961.821,00	2.943.396.069,00	2.943.396.069,00	379.833.238,00									2.766.960.000,00				
	7.01	KECAMATAN						2.673.961.821,00	2.943.396.069,00	2.943.396.069,00	379.833.238,00									2.766.960.000,00				
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase ketercapaian urusan pemerintahan Perangkat Daerah				100,00 %	100,00 %	2.447.061.821,00	2.844.445.859,00	2.838.585.859,00	178.938.179,00								2.628.000.000,00				
	/ 01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi yang disusun				8 dokumen	8 dokumen	12.531.700,00	6.230.000,00	13.248.400,00	/14.700,00			Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			13.000.000,00	KECAMATAN GEMUH				
	/ 01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	4.409.200,00	3.330.000,00	12.330.000,00	7.920.800,00	Kab. Kendal, Gemuh, Semaus, KadiDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			4.500.000,00	KECAMATAN GEMUH				
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Realisasi Kinerja				12 Laporan	12 Laporan	8.122.500,00	2.900.000,00	9.16.400,00	7.206.100,00	Kab. Kendal, Gemuh, Semaus, KadiDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			8.500.000,00	KECAMATAN GEMUH				
	/ 01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terbayarnya gaji ASN				12 bulan	12 bulan	2.081.920.621,00	2.362.673.859,00	2.253.225.450,00	1/1.304.838,00			Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			2.250.000.000,00	KECAMATAN GEMUH				
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang	14 Orang	2.081.920.621,00	2.362.673.859,00	2.253.225.450,00	1/1.304.838,00	Kab. Kendal, Cernuh, Semaus, KadiDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			2.250.000.000,00	KECAMATAN GEMUH				
	7.01.01.2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakuas dinas harian dan weekend card yang terakumulasi sebagai pegawai				12 Bulan	12 Bulan	26.313.500,00	18.750.000,00	18.750.000,00	-6.563.500,00			Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			26.500.000,00	KECAMATAN GEMUH				
	/ 01.01.2.03.0002	Pengadaan Pakuan Utas beserta Akses Kepegawaian	Jumlah Paket Pakuan Utas beserta Akses Kepegawaian				20 Paket	20 Paket	18.313.500,00	18.750.000,00	18.750.000,00	-563.500,00	Kab. Kendal, Cernuh, Semaus, KadiDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			20.000.000,00	KECAMATAN GEMUH				
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Kendal, Cernuh, Semaus, KadiDesa	PENYALINAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			6.000.000,00	KECAMATAN GEMUH				
	7.01.01.2.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tercapainya kebutuhan pelayanan kantor terakumulasi dalam pelayanan kantor				100 %	100 %	89.296.000,00	181.518.000,00	220.545.000,00	180.249.000,00			Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			73.200.000,00	KECAMATAN GEMUH				
	/ 01.01.2.08.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didistribusikan				12 Paket	12 Paket	3.000.000,00	4.803.000,00	4.803.000,00	1.803.000,00	Kab. Kendal, Cernuh, Semaus, KadiDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			3.900.000,00	KECAMATAN GEMUH				
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRUKTUR DPRD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTUR DPRD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RESTRUKTUR DPRD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAFTAR PERANGKUTAN JAWAH		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)							NASIONAL			DAERAH			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	10	11	12	13	14			15	16		17	18		19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
			Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Loka yang Tersebut				12 Laporan	12 Laporan	44.000.000,00	49.900.000,00	49.130.000,00	-4.130.000,00	Kab. Kendal, Gunung, Sempu, Kecamatan Kertayasa	PEHIDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyediaan jasa kesehatan yang efektif, efisien, akuntabel dan terjangkau dan terjangkau			45.000.000,00	KECAMATAN GEMUH						
7.01.01.2.00.0003		Penyediaan Jasa Kesehatan dan Pertengahan Kantor	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Kesehatan dan Pertengahan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	98.000.000,00	153.804.000,00	144.424.000,00	-48.474.000,00	Kab. Kendal, Gunung, Sempu, Kecamatan Kertayasa	PEHIDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyediaan jasa kesehatan yang efektif, efisien, akuntabel dan terjangkau dan terjangkau			99.000.000,00	KECAMATAN GEMUH						
7.01.01.2.00.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	82.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Kendal, Gunung, Sempu, Kecamatan Kertayasa	PEHIDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyediaan jasa kesehatan yang efektif, efisien, akuntabel dan terjangkau dan terjangkau			83.000.000,00	KECAMATAN GEMUH						
7.01.01.2.00		Pemeliharaan Bangun Milik Daerah dan Bangun Milik Daerah yang Disediakan	Jumlah jenis aset yang dikelola dan dikelola barang kantor				12 Bulan 6 pers	12 Bulan 6 pers	26.000.000,00	28.770.000,00	28.770.000,00	2.770.000,00			-	Penyediaan jasa kesehatan yang efektif, efisien, akuntabel dan terjangkau dan terjangkau			27.500.000,00	KECAMATAN GEMUH						
7.01.01.2.00.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Uraja Pemeliharaan, Pajal dan Pemasangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Ketersediaan Unit Operasional atau Lapangan yang Disediakan dan Disediakan Unit dan Pemasangan				15 Unit	15 Unit	11.000.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	-5.600.000,00	Kab. Kendal, Gunung, Sempu, Kecamatan Kertayasa	PEHIDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyediaan jasa kesehatan yang efektif, efisien, akuntabel dan terjangkau dan terjangkau			11.500.000,00	KECAMATAN GEMUH						
7.01.01.2.00.0006		Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	18.800.000,00	18.800.000,00	8.800.000,00	Kab. Kendal, Gunung, Sempu, Kecamatan Kertayasa	PEHIDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyediaan jasa kesehatan yang efektif, efisien, akuntabel dan terjangkau dan terjangkau			10.500.000,00	KECAMATAN GEMUH						
7.01.01.2.00.0010		Pemeliharaan/Perawatan/Perawatan dan Pemasangan Casing Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan/Perawatan	Jumlah Sarana dan Pemasangan Casing Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan/Perawatan				2 Unit	2 Unit	5.000.000,00	6.720.000,00	6.720.000,00	1.720.000,00	Kab. Kendal, Gunung, Sempu, Kecamatan Kertayasa	PEHIDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyediaan jasa kesehatan yang efektif, efisien, akuntabel dan terjangkau dan terjangkau			5.500.000,00	KECAMATAN GEMUH						
7.01.02		PROGRAM PENYELANGKARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase selingpahan pelaksanaan pelayanan pemerintahan				90 %	90 %	5.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	3.200.000,00							8.700.000,00							
7.01.02.2.02		Perencanaan dan Pelaksanaan Pemerintahan yang Tidak Dikawatirkan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah yang Ada dan Ketersediaan	Jumlah Ketersediaan yang Dikawatirkan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah yang Ada dan Ketersediaan				12 Bulan 12 kali	12 Bulan 12 kali	2.500.000,00	700.000,00	700.000,00	-1.800.000,00			Memperkuat dan memperkuat Pemerintahan dan Pemerintahan Publik	Penyediaan jasa kesehatan yang efektif, efisien, akuntabel dan terjangkau dan terjangkau			5.500.000,00	KECAMATAN GEMUH						
7.01.02.2.02.0003		Menyediakan Lini Lini Pemerintahan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelidikan Pemerintahan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				25 Laporan	25 Laporan	2.500.000,00	700.000,00	700.000,00	-1.800.000,00	Kab. Kendal, Gunung, Sempu, Kecamatan Kertayasa	PEHIDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat dan memperkuat Pemerintahan dan Pemerintahan Publik	Penyediaan jasa kesehatan yang efektif, efisien, akuntabel dan terjangkau dan terjangkau			5.500.000,00	KECAMATAN GEMUH						
7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Disediakan kepada Camat	Jumlah Laporan Urusan Pemerintahan yang Disediakan kepada Camat				12 Januari	12 Januari	3.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-1.900.000,00			Memperkuat dan memperkuat Pemerintahan dan Pemerintahan Publik	Penyediaan jasa kesehatan yang efektif, efisien, akuntabel dan terjangkau dan terjangkau			3.200.000,00	KECAMATAN GEMUH						
7.01.02.2.04.0001		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Disediakan kepada Camat	Jumlah Laporan Urusan Pemerintahan yang Disediakan kepada Camat				20 Dokumen	20 Dokumen	3.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-1.900.000,00	Kab. Kendal, Gunung, Sempu, Kecamatan Kertayasa	PEHIDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat dan memperkuat Pemerintahan dan Pemerintahan Publik	Penyediaan jasa kesehatan yang efektif, efisien, akuntabel dan terjangkau dan terjangkau			3.200.000,00	KECAMATAN GEMUH						

SMPD RI: dicetak pada 2024-09-19 22:30:02

Halaman 2

SIPD RI : dicetak pada 2024-09-19 22:30:02

BAB IV

PENUTUP

Renja Perubahan Kecamatan Gemuh Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Gemuh di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Didalam Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Gemuh diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kendal;
2. Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra Kecamatan Gemuh Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja.
3. Penyusunan Renja Kecamatan Gemuh ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

a. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Gemuh Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Gemuh ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Gemuh Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Kendal. Begitu pula dalam

penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Kendal;

3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Gemuh Tahun 2024.

b. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2025, Kecamatan Gemuh menetapkan Rencana Tindak Lanjut sbb :

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja dengan fokus kinerja aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan pada Kecamatan Gemuh;
2. Peningkatan pengetahuan , ketrampilan dan sikap aparatur desa
3. melalui pembinaan SDM dan kelembagaan/administrasi diprioritaskan kepada Aparatur desa yang kurang memahami tugas dan fungsi.
4. Peningkatan intensitas koordinasi antar dinas / instansi, UPTD/UPTB dan desa diprioritaskan kepada program bersama dalam pembangunan, keamanan, kesejahteraan.
5. Peningkatan pelaksanaan kewenangan Bupati kepada Camat diprioritaskan kepada pembinaan dan pendampingan penyusunan APBDes, LPPDes serta pemantauan aset Pemda dan aset desa.
6. Peningkatan kinerja pelayanan publik difokuskan pada penilaian SKM.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan apabila dalam penyusunan Renja ini masih banyak kekurangan, kami mohon sarannya untuk perbaikan di tahun yang akan datang.

Kendal, 2024
CAMAT GEMUH

KARTINI, S.STP., M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19840620 200212 2 003

PERUBAHAN RENCANA KERJA TA. 2024

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KAB. KENDAL**



Jalan Laut Nomer 25C Kendal



<https://disperkim.kendalkab.go.id>



(0294) – 381395



Disperkimkendal.it@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Renana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024. Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan tahunan OPD yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Perubahan Renja Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja OPD yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Perubahan Renja Dinas Perkim Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan jangka pendek Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang memuat kebijakan dan program/kegiatan disertai dengan pagu indikatif-nya dalam satu tahun anggaran dan berguna sebagai acuan penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2024. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan penjelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Kendal, 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KENDAL



MUHAMAD NURHASYIM, S.T., M.M
Pembina
NIP. 19700504 200501 1 010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
 BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	 14
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II dan Renstra Perangkat Daerah	14
2.2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	48
 BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	 50
BAB IV.	
PENUTUP.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273

ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.” Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Dinas Tahun 2024.

Seiring berjalannya waktu dokumen Renja dapat mengalami perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat diantaranya meliputi :

- 1) Menyesuaikan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dengan perkembangan dan perubahan kondisi yang terjadi;
- 2) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan;
- 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor.
- 4) Memastikan keterpaduan antara perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.

Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini diharapkan dapat benar-benar menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disesuaikan sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan Pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan,

penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Dokumen Renja Perubahan juga menjadi instrumen untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib yang diampu oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada khususnya dan instrumen untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah, target standar pelayanan minimal dan kinerja pelayanan OPD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Renja Perubahan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah

Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 20).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara berkesinambungan. Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2024;
- b. Tersedianya acuan untuk penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Kendal Tahun 2024 serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kendal Tahun 2024;
- c. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja

sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;

- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA); serta
- e. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Bab ini Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Realisasi program/kegiatan yang

melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menampilkan usulan rencana kegiatan dan program serta pagu indikatif yang akan dilaksanakan pada anggaran perubahan tahun 2024

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencala tindak lanjut; Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II dan Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Triwulan II Tahun Anggaran 2024 secara umum selaras dengan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2024, namun terdapat beberapa sub kegiatan yang sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2024 belum dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran pada tahun bersangkutan. Untuk kegiatan-kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun 2024, diusulkan Kembali pada Renja Tahun 2025 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - ❖ Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - ❖ Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ❖ Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Pengembangan Perumahan

- a. Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - ❖ Sub Kegiatan : Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota
 - ❖ Sub Kegiatan : Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota
 - b. Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - ❖ Sub Kegiatan : Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/ Kota
 - c. Kegiatan : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
 - ❖ Sub Kegiatan : Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik
3. Program Kawasan Permukiman
- a. Kegiatan : Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - ❖ Sub Kegiatan : Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
 - b. Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - ❖ Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

a. Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

❖ Sub Kegiatan : Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

❖ Sub Kegiatan : Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan

Sedangkan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada penetapan tahun 2024 dan diusulkan pada Perubahan RKPD tahun 2024 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

a. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

❖ Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

❖ Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

❖ Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

❖ Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

❖ Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

❖ Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

d. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

- ❖ Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ❖ Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ❖ Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - ❖ Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ❖ Sub Kegiatan : Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- 2. Program Pengembangan Perumahan
 - a. Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - ❖ Sub Kegiatan : Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - ❖ Sub Kegiatan : Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
 - b. Kegiatan : Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - ❖ Sub Kegiatan : Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan
 - c. Kegiatan : Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

- ❖ Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
- ❖ Sub Kegiatan : Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
- d. Kegiatan : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
 - ❖ Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
- 3. Program Kawasan Permukiman
 - a. Kegiatan : Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - ❖ Sub Kegiatan : Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
 - ❖ Sub Kegiatan : Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
 - b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - ❖ Sub Kegiatan : Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh

Sedangkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengalami pergeseran karena nomenklatur DAK dari pusat yaitu :

- 1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
 - a. Kegiatan : Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
 - ❖ Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan

Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah (sepuluh)
Ha

2. Program Kawasan Permukiman

a. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

- ❖ Sub Kegiatan : Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
- ❖ Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
- ❖ Sub Kegiatan : Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10

3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

a. Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

- ❖ Sub Kegiatan : Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan secara garis besar sampai dengan triwulan II tahun 2024 untuk target fisiknya dapat mencapai target yang ditetapkan karena dapat memenuhi output yang diharapkan, namun untuk penyerapan anggaran masih belum dapat memenuhi harapan. Adapun rewiu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 sampai dengan triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Program/ kegiatan/ sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang telah ditetapkan

Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah ditetapkan adalah :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Berdasarkan Tugas dan Fungsinya, ketercapaian target 0%.
- 2) Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan :
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, ketercapaian target 0%
- 3) Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud, ketercapaian target 0%

b. Program Pengembangan Perumahan

- 1). Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan :
 - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana, dengan ketercapaian target 0%
- 2) Kegiatan : Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, meliputi Sub Kegiatan :
 - Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan, dengan ketercapaian target 0%
- 3) Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program

Kabupaten/Kota, meliputi Sub Kegiatan :

- Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana, dengan ketercapaian target 0%

c. Program Kawasan Permukiman

1). Kegiatan : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, meliputi Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman, dengan ketercapaian target 0%

2). Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, meliputi sub kegiatan :

- Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh, dengan ketercapaian target 0%
- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, dengan ketercapaian target 0%
- Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10, dengan ketercapaian target 0%

2. Realisasi Program/ kegiatan yang memenuhi target dan/atau melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang telah ditetapkan

Program / kegiatan yang memenuhi dan / atau melebihi target kinerja hasil / keluaran yang telah ditetapkan adalah :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang meliputi sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang meliputi sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD;
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, yang meliputi sub kegiatan :
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang meliputi sub kegiatan :
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang meliputi sub kegiatan :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang meliputi sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang meliputi sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan Mebel;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- b. Program Pengembangan Perumahan
- 1) Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, yang meliputi sub kegiatan :
- Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
- 2) Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, yang meliputi sub kegiatan :
- Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan;
- 3) Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, yang meliputi sub kegiatan :
- Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun;
 - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus;

4) Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, yang meliputi sub kegiatan:

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;

c. Program Kawasan Permukiman

1) Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, yang meliputi sub kegiatan:

- Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh;
- Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh;

2) Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, yang meliputi sub kegiatan :

- Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh;

d. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

1) Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota, yang meliputi sub kegiatan :

- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha;

e. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

1) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, yang meliputi sub kegiatan :

- Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan;
 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
3. Realisasi Program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang telah ditetapkan
Program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang telah ditetapkan nihil.
 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, tercapainya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan
 - a. Faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target kegiatan antara lain :
 - 1) Terjadi pergeseran rencana pelaksanaan kegiatan ke triwulan III tahun 2024;
 - b. Faktor yang mendukung tercapainya kegiatan karena adanya komitmen semua pihak untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, sebagai bagian untuk pencapaian perjanjian kinerja perangkat daerah.
 - c. Faktor yang menjadi penyebab melebihinya target kinerja program/ kegiatan adalah nihil
 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah secara umum mencapai target yang telah ditetapkan, meskipun demikian guna meningkatkan pelayanan dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, perlu ditingkatkan pelaksanaan kegiatan yang langsung mendukung implementasi e-

goverment, bersentuhan dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat terutama Masyarakat yang berpenghasilan rendah dan Masyarakat yang berada di kawasan kumuh.

6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Kebijakan sebagai langkah strategis dalam menentukan arah program yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam beraktivitas. Adapun kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dengan fokus pada pemberian bantuan simultan rehab rumah tidak layak huni terutama bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan;
2. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar lingkungan permukiman dan peremajaan lingkungan kumuh di kawasan kumuh yang telah ditetapkan oleh SK Bupati;
3. Peningkatan kapasitas aparatur teknis guna menghasilkan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang berkualitas.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab Kendal

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 s.d Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN								
	Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten /Kota	Persentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan	100%	100%	50%	50%	100%	50%	100%

		Perangkat Daerah							
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun	11 dokumen	11 dokumen	6 dokumen	50,36%	11 dokumen	11 dokumen	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok perencanaan yang disusun	5 dokumen	5 dokumen	3 dokumen	60%	4 dokumen	4 dokumen	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	0 laporan	0%	1 laporan	1 laporan	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	8 bulan	57,14%	14	14	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 orang/bulan	26 orang/bulan	26 orang/bulan	100%	28 orang/bulan	28 orang/bulan	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	12 laporan	12 laporan	100%

	Keuangan ulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD							
	Administras i Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah kegiatan administrasi barang milik daerah	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
	Penyusuna n Perencanaa n Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Administras i Kepegawaia n Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terlayani	30 orang	30 orang	15 orang	50%	55 orang	55 orang	100%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarka	Jumlah pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	30 orang	30 orang	15 orang	50%	55 orang	55 orang	100%

	n Tugas dan Fungsi	Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							
	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	50 orang	50 orang	50 orang	100%	50 orang	50 orang	100%
	Administras i Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemuhan kebutuhan rutin	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	12 bulan	12 bulan	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	6 paket	50%	12 paket	12 paket	100%

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 paket	9 paket	6 paket	66,67%	9 paket	9 paket	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rutin	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12	12	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	12 laporan	12 laporan	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	12 laporan	12 laporan	100%

		yang Disediakan							
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	12 laporan	12 laporan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	12 laporan	12 laporan	100%
	Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang terpelihara	75 unit	75 unit	30 unit	40%	75	75	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	40 Unit	20 Unit	50%	40 Unit	40 Unit	100%

	Operasional atau Lapangan								
	Pemeliharaan n Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 unit	12 unit	6 unit	50%	12 unit	12 unit	100%
	Pemeliharaan n Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	60 Unit	30 Unit	50%	60 Unit	60 Unit	100%
	Pemeliharaan n Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	0	0%	1 Unit	1 Unit	100%
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, Persentase Rumah layak huni bagi penduduk yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Persentase Pengembangan Perumahan Berijin	100	100	100	100%	100	100	100%

	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen pendataan rumah korban bencana atau rekolasi program kab/kota	1	1	1	100%	1	1	100%
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	1 dokumen	1 dokumen	0	0%	0	0	0
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/ Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 dokumen	1 dokumen	0	0%	0	0	0
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban	Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya terkait Penyediaan dan	100 orang	100 orang	0	0%	0	0	0

	Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota							
	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	100 orang	100 orang	0 orang	0%	0	0	0
	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	4 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	50%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah rumah korban bencana/ relokasi program yang dibangun dan direhabilitasi	10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	4 Unit Rumah	40%	0	0	0

	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	4 Unit Rumah	40%	0	0	0
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Rumah susun yang dikelola dengan baik	6 twinblok	6 twinblok	3 twinblok	50%	3	3	100%
	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	12 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50%	12 dokumen	12 dokumen	100%
	Penerbitan Izin Pembangunan dan	Jumlah rekomendasi siteplan perumahan	12 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50%	1	1	100%

	Pengembangan Perumahan	yang diterbitkan							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	12 laporan	12 laporan	100%
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman,	Prosentase RTLH yang tertangani	11,06%	11,06%	100 unit rumah	54%	100	100	100%
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) RTLH diluar kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang dibangun	185 Unit Rumah	185 Unit Rumah	100 unit rumah	54%	170	170	100%
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan	185 Unit Rumah	185 Unit Rumah	100 unit rumah	54%	170 Unit Rumah	170 Unit Rumah	100%

	dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki							
	Program Kawasan Permukiman	kawasan kumuh yang telah ditangani	4,45%	4,45%	2%	50%	2,23	2,23	100%
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	2 kali	2 kali	2 kali	100%			100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	12 laporan	12 laporan	100%

	gan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Permukiman dan Permukiman Kumuh							
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Luasan Kumuh yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya	1 Ha	0 Ha	0 Ha	0%			100%
	Pembentukan/ Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	14 KSM	14 KSM	7 KSM	50%	12 laporan	12 laporan	100%
	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	-	-	100%

	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Luasan Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang ditingkatkan kualitas lingkungannya	1 Ha	1 Ha	1 Ha	100%			100%
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/ Dipugar	1 ha	-	-	100%	1 ha	1 ha	100%
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki							
	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh)	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10							

	Ha	(Sepuluh) Ha							
	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	-	-	100%	-	-	100%
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	% perumahan memiliki PSU	100	100	100	100%			100%
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Prasarana sarana utilitas umum (PSU) kondisi baik	5 Sertifikat PSU yang 5 Sertifikat PSU yang diserahkan	5 Sertifikat PSU yang 5 Sertifikat PSU yang diserahkan	3 Sertifikat PSU yang 5 Sertifikat PSU yang diserahkan	60%			100%
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	2 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	50%	2 lokasi	2 lokasi	100%

	untuk Menunjang Fungsi Hunian	yang Menunjang Fungsi Hunian							
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	12 laporan	12 laporan	5 laporan	50%	12 laporan	12 laporan	100%

a. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan Organisasi Perangkat Daerah baru yang menangani urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal maka, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal, maka tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang

- perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- f. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berusaha menyesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam hal ini konsistensi ketepatan waktu penyelesaian kegiatan berusaha dijaga dan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Kendal melalui Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan evaluasi kegiatan yang rutin diadakan setiap sebulan sekali. Sehingga dapat segera diketahui kegiatan mana yang sudah memenuhi target yang telah ditentukan maupun kegiatan yang belum memenuhi target untuk selanjutnya ditelusuri sumber permasalahannya dan dicarikan solusi. Melalui kegiatan evaluasi ini juga dibahas kendala yang dihadapi beserta alternatif solusi sehingga diharapkan dapat meminimalisir hambatan yang bisa terjadi di waktu yang akan datang.

Tabel 2.2
CAPAIAN KINERJA RENSTRA DISPERKIM KABUPATEN KENDAL 2021-2026
PERIODE SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024		PROYEKSI TAHUN 2024		CATATAN ANALISIS
					TRIWULAN 1	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
A	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) OPD								
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	-	-	85,24%	-	88,94%	-	90%%	Melebihi Target
2	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	-	-	2,97%	-	14,02%	-	18,64%	Melebihi Target
B	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) OPD								
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota			100%		100%		100	Tercapai
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/ kota			100%		100%		100	Melebihi Target
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani			2,97%		14,02%		18,64%	Melebihi Target

4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)			11,72%		11,06%		11,27%	Tercapai
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)			100%		95,73%		100%	Tercapai
C	INDIKATOR SASARAN RENSTRA OPD NON IKU NON IKK								
1	Skor nilai SAKIP perangkat daerah			72,25%		0%		74.80%	Melebihi Target

b. Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan antara lain berasal dari beberapa unsur, diantaranya sebagai berikut :

- a. Kurangnya koordinasi antar sektoral sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pengambilan keputusan;
- b. Minimnya kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah sehingga dalam mengalokasikan anggaran untuk menempatkan program perumahan sebagai prioritas utama baik di tingkat kabupaten maupun tingkat desa masih kurang.
- c. Sarana prasarana perkantoran yang kurang memadai;
- d. Kurangnya jumlah SDM;

Alternatif Solusi :

- a. Meningkatkan koordinasi antar sektor agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik;
- b. Rehabilitasi gedung kantor serta sarana prasarana perkantoran menjadi lebih baik agar dapat mendukung pelaksanaan kegiatan.
- c. Melakukan perekrutan tenaga penunjang kegiatan sehingga dapat ikut membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan dan target kegiatan tahunan dapat tercapai.

c. Penentuan Isu-isu Strategis Tahun 2024

Masyarakat saat ini menuntut adanya peningkatan pelayanan prima atas kinerja pemerintah serta berbagi kebijakan yang dilakukannya. Sebagai upaya untuk menjawab tuntutan masyarakat tersebut, pemerintah telah

menetapkan beberapa aturan yang diharapkan dapat memperbaiki segala kekurangan yang ada antara lain dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yaitu tentang pertanggung jawaban instansi pemerintah yang didasarkan pada ukuran efisien, efektif dan ekonomis.

Berkaitan dengan peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, Isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Masih belum terpenuhinya rumah layak huni;
- b. Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani;
- c. Belum tercapainya standar pelayanan perumahan (rumah layak huni untuk korban bencana dan rumah yang terkena dampak program);
- d. Kurangnya kompetensi sumberdaya aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Disamping Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan, Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Tahun 2024 juga telah melalui proses penelaahan usulan Program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan/ masyarakat.

Berdasarkan hasil musrenbang tingkat Kecamatan, terdapat usulan kegiatan yang dimintakan masyarakat kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal, namun usulan tersebut tidak dapat diakomodir karena anggaran yang didapat tidak dapat mencukupi usulan yang dihasilkan dari musrenbang.

Adapun hasil Penelaahan Program dan Kegiatan dari Masyarakat dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini

Tabel 2.3
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
KABUPATEN KENDAL

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perubahan perencanaan pembangunan tahun 2024 sebagai acuan Perangkat Daerah yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi Perangkat Daerah pelaksana program ditindak lanjuti dengan menyusun kerangka anggaran dalam Perubahan APBD Tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 dan adanya kebutuhan mendesak yang timbul pada pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan, maka diperlukan adanya perubahan atau penambahan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sesuai dengan prioritas dan plafon sementara perubahan tahun 2024.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Tahun 2024 setelah dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Untuk program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Sebagai

berikut

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada 8 (delapan) Kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Sub Kegiatan

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk persiapan pembuatan dokumen RENSTRA tahun 2026-2030
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD untuk pembayaran tenaga penunjang kegiatan dan honorarium narasumber untuk kegiatan capaian kinerja dinas
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah untuk kegiatan acara Kendal Expo
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD untuk kegiatan penyusunan laporan keuangan baik itu triwulan, semesteran maupun laporan tahunan
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD untuk penyusunan kebutuhan barang Dinas

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi untuk bimbingan dan pelatihan ASN
 - Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan untuk kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor untuk persediaan peralatan kelistrikan kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk persediaan ATK
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga untuk kegiatan pembelian peralatan rumah tangga
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor untuk penyediaan logistic kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan untuk kegiatan penggandaan dan percetakan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD untuk penyediaan perjalanan dinas dalam kota maupun luar kota
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD untuk kegiatan penataan arsip perkantoran
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat untuk pembelian materai

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk pembayaran Listrik, telpon dan air
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk kegiatan service peralatan kantor seperti AC, laptop, computer, printer
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk pembayaran honor tenaga penunjang kegiatan dan outsourcing dinas
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan untuk kegiatan pemeliharaan kendaraan roda dua maupun roda empat dan juga penyediaan BBM
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel untuk kegiatan pemeliharaan mebel dinas
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya untuk kegiatan penyediaan peralatan kebersihan dinas
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud untuk kegiatan pemeliharaan website dinas

B. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Program Pengembangan Perumahan dengan 5 (Lima) Kegiatan dan 8 (delapan) Sub Kegiatan

1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana untuk kegiatan pendataan rumah bagi masyarakat yang terkena Bencana

- Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota untuk mengidentifikasi perumahan yang ada di Kabupaten Kendal yang rawan terkena Bencana
- 2. Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan untuk mendata penerima bantuan berdasarkan jenis layanan
 - Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan untuk mensosialisasikan pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses pembayaran pembiayaan perumahan
- 3. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
- 4. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun untuk kegiatan pemeliharaan rusunawa
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus untuk kegiatan operasional rusunawa yang meliputi pembayaran Listrik, air telpn, honor tenaga penunjang kegiatan dan juga untuk pemeliharaan Gedung rusunawa
- 5. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan untuk kegiatan penunjang bantuan dari provinsi

C. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Program Kawasan Permukiman dengan 3 (tiga) Kegiatan dan 7 (tujuh) Sub Kegiatan

1. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman untuk kegiatan penunjang kawasan kumuh

2. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

- Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh untuk kegiatan pengentasan kawasan kumuh
- Sub Kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh untuk kegiatan pengentasan kawasan kumuh

3. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

- Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk kegiatan pengurangan RTLH di Kabupaten Kendal
- Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Untuk Pendataan SK Kumuh
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh untuk kegiatan penunjang pengentasan kawasan kumuh
- Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

D. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan

1. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha untuk kegiatan bantuan perbaikan RTLH atau Pembangunan baru bagi backlog di kabupaten kendal

E. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Program Peningkatan, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan 1 (satu) Kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan

1. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

- Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan untuk kegiatan penyusunan DED perumahan yang sudah diserahkan ke pemda dan akan di perbaiki sarana prasarannya.
- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian untuk kegiatan perbaikan PSU yang sudah diserahkan dan operasional pemakaman
- Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan untuk kegiatan penunjang PSU yang akan diserahkan kepada Pemda

Adapun estimasi anggaran untuk tahun 2024 sebesar Rp. 26.350.980.316; yang rencana akan dialokasikan melalui program kegiatan sub kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Kendal adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan rencana alokasi sebesar Rp. 7.044.772.316;
2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN dengan rencana alokasi sebesar Rp. 2.616.258.000;
3. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN dengan rencana alokasi sebesar Rp 6.774.167.000;
4. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH dengan rencana alokasi sebesar Rp 762.590.000;
5. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) dengan rencana alokasi sebesar Rp. 9.153.193.000;

Adapun rincian perubahan rencana kerja dan pendanaan dapat dilihat pada Tabel 3.1. dibawah ini :

TABEL 3.1
PERUBAHAN RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REA LISA SI CAP AIAN REN JA OPD TAHU N 2022	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHU N 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDA H	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIO NAL	DAER AH				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							8.991.614.614,00	28.717.430.316,00	26.350.980.316,00	17.359.365.702,00							9.811.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAH N WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.991.614.614,00	28.717.430.316,00	26.350.980.316,00	17.359.365.702,00							9.811.000.000,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAH N BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							8.991.614.614,00	28.717.430.316,00	26.350.980.316,00	17.359.365.702,00							9.811.000.000,00	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Prosentase terpenuhin a lanyanan umum, kepegawaia n dan keuangan Perangkat Daerah				100.00 %	100.00 %	5.110.999.614,00	7.277.518.316,00	7.044.772.316,00	264.000.386,00							5.375.000.000,00	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencana an dan evaluasi kinerja yang tersusun				11 dokumen	11 dokume n	227.060.000,00	797.395.000,00	799.595.000,00	572.535.000,00			-	-	ASN Dispe rkim		365.000.000,00	DINAS PERUMA HAN RAKYAT DAN KAWASA N PERMUKI MAN
	1.04.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	61.500.000,00	31.950.000,00	35.250.000,00	-26.250.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Ngilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			125.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				11 Laporan	11 Laporan	100.060.000,00	171.312.000,00	180.462.000,00	80.402.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Ngilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			175.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	65.500.000,00	594.133.000,00	583.883.000,00	518.383.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Ngilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			65.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN				14 bulan	14 bulan	3.412.299.614,00	3.672.749.816,00	3.382.402.816,00	-29.896.798,00			-	-	ASN Dispe rkim		3.715.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	3.167.299.614,00	3.652.412.816,00	3.347.712.816,00	180.413.202,00	Kab. Kendal, Kendal, Ngilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJUKAN PENGGAJIAN	-	-			3.700.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

[illegible]

			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	16 Orang	75.000.000,00	60.940.000,00	60.940.000,00	-14.060.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Ngilir	PENDAPATAN ASL DAERAH (PAD)	-	-			125.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	25.000.000,00	343.974.000,00	337.974.000,00	312.974.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Ngilir	PENDAPATAN ASL DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rutin				12 bulan	12 bulan	381.520.000,00	1.501.437.700,00	1.585.938.700,00	1.204.418.700,00			-	-	ASN Disperkim		480.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Ngilir	PENDAPATAN ASL DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	94.100.000,00	44.100.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Ngilir	PENDAPATAN ASL DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	-			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Ngilir	PENDAPATAN ASL DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	13.076.000,00	13.076.000,00	-1.924.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Ngilir	PENDAPATAN ASL DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	13.740.000,00	16.740.000,00	16.740.000,00	3.000.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Ngilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Ngilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Ngilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	1.386.841.700,00	1.427.242.700,00	1.227.242.700,00	Kab. Kendal, Kendal, Ngilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			275.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	17.780.000,00	14.780.000,00	14.780.000,00	-3.000.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Ngilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sarana prasarana yang diadakan				1 unit	1 unit	315.000.000,00	0,00	0,00	-315.000.000,00			-	-	ASN Disperkim		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRA M/ KEGIATA N / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022		PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
								TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berk urang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELU M	SESUDA H	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUB AHAN 2024			SIONAL	DAERAH														
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.04.01.2.07.0 001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	1 Unit	315.000.000,00	0,00	0,00	-315.000.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Ngilir	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHA N RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIM AN	
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemen uhan kebutuh an rutin					12 bulan	12 bulan	332.660.000,00	527.591.800,00	489.491.8 00,00	156.831.800,00			-	-	ASN Disperkim		330.000.000,00	DINAS PERUMAHA N RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIM AN	
	1.04.01.2.08.0 001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	20.000.000,00	20.000.00 0,00	5.000.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Ngilir	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	DINAS PERUMAHA N RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIM AN	
	1.04.01.2.08.0 002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	125.000.000,00	159.875.000,00	121.775.0 00,00	-3.225.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Ngilir	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			130.000.000,00	DINAS PERUMAHA N RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIM AN	
	1.04.01.2.08.0 003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	20.685.000,00	20.685.00 0,00	5.685.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS PERUMAHA N RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIM AN	
	1.04.01.2.08.0 004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	177.660.000,00	327.031.800,00	327.031.800,00	149.371.800,00	Kab. Kendal, Kendal, Ngilir	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANS FER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			175.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang terpelihara					75 Unit	75 Unit	304.500.000,00	371.610.000,00	386.610.000,00	82.110.000,00			-	-	ASN Disperkim		300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					40 Unit	40 Unit	219.500.000,00	239.500.000,00	239.500.000,00	20.000.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Ngilir	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			175.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.005		Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara					12 Unit	12 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Kendal, Ngilir	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					60 Unit	60 Unit	40.000.000,00	75.110.000,00	75.110.000,00	35.110.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Ngilir	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.008		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara					1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	42.000.000,00	57.000.000,00	27.000.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Ngilir	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase rumah layak huni bagi penduduk yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota Prosentase rumah layak huni bagi korban bencana					100 100 100.00 pro sentas e Prosen tas e %	100 100 100.00 Pro sentas e prosen tas e %	1.737.615.000,00	2.633.512.000,00	2.616.258.000,00	1.048.385.000,00							2.786.000.000,00	

			kabupaten/kota																	
			Persentase Pengembangan Perumahan Berijin																	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pendataan rumah korban bencana atau rekolasi program kab/kota				1 dokumen	1 dokumen	100.000.000,00	75.910.000,00	57.280.000,00	-42.720.000,00			-	-	Masyarakat yang terkena korban bencana		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.004		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana																	
			Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	46.820.000,00	46.820.000,00	-3.180.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.009		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	29.090.000,00	10.460.000,00	-39.540.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang meningkatkan pemahaman terkait Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	211.275.000,00	368.600.000,00	368.600.000,00	157.325.000,00			-	-	Masyarakat yang terkena korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		286.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan				100 Orang	100 Orang	27.275.000,00	223.565.000,00	223.565.000,00	196.290.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

		1.04.02.2.03	Pemba ngunan dan Rehabili tasi Rumah Korban Bencan a atau Relokas i Progra m Kabupa ten/Kot a	Jum ah rumah korban bencana/ relokasi program yang dibangun dan direhabilita si				10 unit	10 unit	250.000.000,00	307.050.000,00	307.050. 000,00	57.050.000,00			-	-	Masyarakat yang terkena korban bencana		300.000.000,0 0	DINAS PERUMA HAN RAKYAT DAN KAWASA N PERMUKI MAN
		1.04.02.2.03. 0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
				Jum lah Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terehabilita si				10 Unit Ru mah	10 Un it Ru mah	250.000.000,00	307.050.000,00	307.050. 000,00	57.050.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD) DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-			300 .00 0.0 00, 00	DINAS PERUMA HAN RAKYAT DAN KAWASA N PERMUKI MAN
		1.04.02.2.05	Pem bina an Pen gelol aan Rum ah Sus un Umu m dan/ atau Rum ah Khu sus	Jum lah Rumah susun yang terkelola dengan baik				6 twinblok	6 twinblok	1.126.340.000,0 0	1.475.250.000,0 0	1.483.12 6.000,00	356.786.000,00			-	-	Masy arak at berp engh asila n rend ah		1.700.000.000 ,00	DINAS PERUMA HAN RAKYAT DAN KAWASA N PERMUKI MAN
		1.04.02.2.05. 0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun																		
				Jum lah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelol aan Kelemba gaan bagi Pemilik/P enghuni Rumah Susun				1 Laporan	1 Laporan	17.340.000,00	274.310.000,00	275.610. 000,00	258.270.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD)	-	-			200.000.000,0 0	DINAS PERUMA HAN RAKYAT DAN KAWASA N PERMUKI MAN
		1.04.02.2.05. 0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																		

				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				12 Dokumen	12 Dokumen	1.109.000.000,00	1.200.940.000,00	1.207.516.000,00	98.516.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah rekomendasi siteplan perumahan yang diterbitkan				12 dokumen	12 dokumen	50.000.000,00	406.702.000,00	400.202.000,00	350.202.000,00			-	-	Pengembang perumahan		300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																		
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	406.702.000,00	400.202.000,00	350.202.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Anggaran				4,45 %	4,45 %	788.500.000,00	7.769.300.000,00	6.774.167.000,00	-388.500.000,00							400.000.000,00	
		1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	koordinasi yang dilaksanakan				2 kali	2 kali	50.000.000,00	22.750.000,00	22.750.000,00	-27.250.000,00			-	-	Masyarakat yang berada di kawasan kumuh		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																		
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	22.750.000,00	22.750.000,00	-27.250.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

		1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Luasan Kumuh yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya				1 Ha	1 Ha	100.000.000,00	284.860.000,00	290.551.000,00	190.551.000,00			-	-	Masyarakat yang berada di kawasan kumuh		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.03.2.02.0004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh																		
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	241.760.000,00	251.251.000,00	201.251.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh																		
				Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina				14 Kelompok Masyarakat	14 Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	43.100.000,00	39.300.000,00	-10.700.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh)	Jumlah Luasan Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang ditingkatkan kualitas lingkungannya				1 Ha	1 Ha	638.500.000,00	7.461.690.000,00	6.460.866.000,00	5.822.366.000,00			-	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim	Masyarakat yang berada di kawasan kumuh		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

			Ha														s dan berkelanju tan dengan memperha tikan kelestarian lingkunga n dan perubaha n iklim				
		1.04.03.2.03. 0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		

				Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				-	0 Unit Rumah	0,00	0,00	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN MAN-PENUGAS AN	-	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.03.2.03.007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh																		
				Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	37.300.000,00	20.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.03.2.03.009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh																		
				Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan				1 Ha	1 Ha	588.500.000,00	7.424.390.000,00	770.866.000,00	182.366.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN MAN-PENUGAS AN	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.03.2.03.012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		

				Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			-	0 Unit	0,00	0,00	4.150.000.000,00	4.150.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKI MAN-PENUGAS AN	-	Pemerataan infrastruktur dengan berbasis peningkatan konektivitas wilayah pendukung perekonomian Pemerataan infrastruktur dengan berbasis peningkatan konektivitas wilayah pendukung perekonomian			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.		1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Prosentase RTLH yang tertangani			11,06 %	11,06 %	285.000.000,00	7.572.530.000,00	762.590.000,00	115.000.000,00							400.000.000,00	
		1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di luar kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang dibangun			185 unit	185 unit	285.000.000,00	7.572.530.000,00	762.590.000,00	477.590.000,00			-	-	Masyarakat yang mempunyai rumah tidak layak huni		400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.04.2.01.001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																	
				Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di			175 Unit Rumah	175 Unit Rumah	285.000.000,00	7.572.530.000,00	762.590.000,00	477.590.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKI MAN-PENUGAS AN	-	-			400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

				Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki																
5.		1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Prasarana sarana utilitas umum (PSU) kondisi baik Prasarana sarana utilitas umum (PSU) kondisi baik			100.00 100 % prosentase	100 100.00 prosentase %	1.069.500.000,00	3.464.570.000,00	9.153.193.000,00	-219.500.000,00							850.000.000,00	
		1.04.05.2.01	Urutan Penyenggaraan PSU Perumahan	Jumlah perumahan yang telah menyerahkan PSU			5 Sertifikat PSU yang 5 Sertifikat PSU yang diserahkan	5 Sertifikat PSU yang 5 Sertifikat PSU yang diserahkan	1.069.500.000,00	3.464.570.000,00	9.153.193.000,00	8.083.693.000,00			-	-	Masyarakat yang berada di perumahan		850.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.05.2.01.001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan			2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	92.860.000,00	121.960.000,00	21.960.000,00	Kab. Kendal , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.05.2.01.002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																	
				Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian			2 Lokasi	2 Lokasi	869.500.000,00	3.281.760.000,00	8.945.733.000,00	8.076.233.000,00	Kab. Kendal , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFERR UMUM- DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK- BIDANG PERUMAHAN DAN	-	-			300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

															PERMUK I MAN- PENUGA S AN							
		1.04.05.2.01.003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisa si dalam rangka Penyediaa n Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumaha n				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	89.950.000,00	85.500.000,00	-14.500.000,00	Kab. Kendal , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	- -				300.000.000,00	DINAS PERUM AHAN RAKYA T DAN KAWAS AN PERMU KIMAN	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Tahun 2024 yang telah disusun, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kendal merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai landasan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan SKPD Tahun Anggaran 2024 yang akan digunakan sebagai dasar dan pedoman Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Tahun Anggaran 2024

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Disperkim Kabupaten Kendal tahun 2024 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja perangkat daerah yang efektif, optimal, dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan.

Keberhasilan pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal tahun 2024 sebagaimana telah disempurnakan dan diubah menyesuaikan asumsi dan kondisi terkini, tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal itu sendiri. Dalam kaitannya dengan hal ini, maka setiap unsur aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman perlu bersungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Renja Tahun 2024 beserta perubahannya agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil nyata untuk pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan adalah untuk kegiatan-kegiatan prioritas yang belum mendapat pagu tambahan anggaran pada tahap RKPD Perubahan, diprioritaskan untuk dianggarkan dari pergeseran intenal atau dianggarkan ulang pada Rencana Kerja Tahun 2025. Agar realisasi program dari kegiatan sesuai dengan sasaran, maka diperlukan semangat, komitmen, dan disiplin yang tinggi dari Peragkat Daerah dan stakeholders sesuai dengan tanggung jawab masing-masing

Dokumen ini diharapkan mampu dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana. Evaluasi dimaksud meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan anggaran, kendala yang dihadapi sehingga perlu dilakukan perubahan serta faktor yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan. Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab Kendal adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Kabupaten Kendal.

Sekiranya dokumen Perubahan Rencana Kerja 2024 ini dapat bermanfaat dalam proses perencanaan dan penganggaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab Kendal.

Kendal, 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KENDAL



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
JL. SOEKARNO-HATTA NO. 142 KENDAL
Telp. (0294) 384464**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal dapat tersusun.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal Tahun 2024 ini merupakan upaya penyusunan dokumen perencanaan kinerja sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 dan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal.

Rencana Kerja (Renja) juga menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan yang akan dicapai pada tahun 2024 sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi. Selain itu Rencana Kinerja Tahunan ini memuat berbagai program yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai macam kegiatan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal juga memuat tentang indikator-indikator kinerja kegiatan berupa masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang langsung atau tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran.

Dokumen rencana kinerja juga merupakan penjabaran dokumen strategis yang telah ditetapkan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan sistem penganggarannya. Pada tahun 2024 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal merencanakan 8 program yang dijabarkan lebih lanjut dalam 20 kegiatan dan 56 sub kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Kendal, 2024
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAAGA
DAN PARIWISATA KABUPATEN KENDAL



ACHMAD BOHAM CHALID, S.STP., MH.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19790626 199810 1 001

DAFTAR ISI

COVER	1
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	1
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB II EVALUSI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN ..	6
2.1. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	6
2.2. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	30
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	31
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	31
BAB IV PENUTUP.....	53

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perubahan PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 tahun setelah disesuaikan dengan program, kegiatan dan anggaran pada perubahan APBD tahun 2024. Perubahan Renja PD merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) PD sehingga penyusunan Renja Perubahan PD berpedoman pada Renstra PD dan mengacu pada Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Perubahan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Kabupaten Kendal, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perubahan PD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan visi misi dan program PD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis PD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Perubahan Pembangunan Daerah (RKPPD);
2. Renja Perubahan PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUPA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) pada tahun 2024;
3. Renja Perubahan PD merupakan salah satu instrument evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-

- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
 12. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 94).
 13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 20);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a). Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal Tahun 2024 dimaksudkan :

- 1) Sebagai dasar evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2024.
 - 2) Sebagai dasar perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal Tahun 2024.
- b). Tujuan
- Penyusunan Rencana Kerja PD (Renja PD) bertujuan untuk
1. Memberikan acuan bagi PD dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun berjalan;
 2. Menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun berjalan;
 3. Menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun berjalan;
 4. Menentukan kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun berjalan;
 5. Menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun berjalan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rancangan akhir Rencana Kerja PD Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat Kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sampai pada triwulan II, yang memuat target capaian/realisasi indikator program kegiatan, serta permasalahan pelaksanaan kegiatan.

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Mengemukakan prioritas pembangunan dan perubahan rencana kerja dan disajikan dalam table matrik.

BAB IV : PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian.

BAB II

2.1. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

HASIL EVALUASI TERHADAP REALISASI TARGET KINERJA OUTPUT KEGIATAN DAN ANGGARAN KEGIATAN RENJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KENDAL SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024.

Realisasi anggaran pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2024 yang melaksanakan Satu Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan 2 bidang urusan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga serta Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Anggaran Belanja sebesar Rp. 63.713.299.618,- dengan capaian realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp. 15.229.915.274,- atau 23,90%. Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal terdapat 8 Program, 20 Kegiatan, dan 56 Sub Kegiatan sebagai berikut :

Program :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
6. Program Pemasaran Pariwisata
7. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
8. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Kegiatan :

1. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

4. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
5. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
6. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
7. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
8. Kegiatan pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
9. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
11. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
12. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
13. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
14. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
15. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
16. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
17. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
18. Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
19. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
20. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
3. Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan

4. Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi
5. Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
6. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
7. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
8. Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah
9. Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
10. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
11. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
12. Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
13. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
14. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota
15. Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
16. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
17. Standarisasi Organisasi Keolahragaan
18. Kegiatan pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
19. Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi
20. Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
21. Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
22. Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
23. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
24. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
25. pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
26. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
27. Penyediaan komponen instalasi listrik
28. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
29. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
30. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

31. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
32. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
33. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
34. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
35. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
36. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
37. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
38. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
39. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
40. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
41. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
42. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis pariwisata Kabupaten/Kota
43. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
44. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
45. penetapan destinasi pariwisata kabupaten/kota
46. pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota
47. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
48. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi pariwisata Kabupaten/Kota
49. Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata baik dalam dan luar negeri
50. fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dala dan luar negeri pariwisata Kabupaten/Kota
51. penguatan promosi melalui media cetak elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri
52. Pengembangan Pendidikan
53. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

- 54.pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata
- 55.Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
- 56.Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif

Sedangkan Realisasi target kinerja output kegiatan Tahun 2024 pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal Triwulan II terdapat beberapa capaian, yaitu :

Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah,
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Faktor penyebab tidak tercapainya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pada kegiatan ini belum tercapainya target kinerja dikarenakan
 - 1). terdapat rekening belanja perjalanan dinas untuk monitoring dan evaluasi, sedangkan berdasarkan edaran Bupati Kendal nomor 900/2391/2023 rekening belanja perjalanan dinas seharusnya berada di sub kegiatan rapat koordinasi, sehingga berpengaruh dalam capaian realisasi
 - 2). Rekening belanja lainnya yang ada pada kegiatan ini yaitu untuk penggajian tenaga operator komputer sehingga capaian kinerja berdasarkan bulan dibayarkannya gaji.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, pada kegiatan ini belanja yang ada berisikan gaji ASN/PPPK, TPP, honor penatausahaan keuangan dan insentif pegawai atas realisasi pendapatan, belum tercapainya target kinerja pada kegiatan ini dikarenakan capaian kinerja berdasarkan bulan dibayarkannya.

- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, pada kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan diklat dan bintek, yang untuk pelaksanaan kegiatannya berdasarkan undangan dari penyelenggara bintek, serta sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang pelaksanaan kegiatannya rencananya dilaksanakan pada bulan September, Oktober dan November, karena sumber dana berasal dari DBHCHT sehingga pelaksanaan kegiatan berdasarkan jadwal dari Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah.
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, pada kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan Penyediaan Pembayaran Listrik, Telepon, Internet dan PDAM sehingga capaian berdasarkan bulan dibayarkannya serta sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, merupakan sub kegiatan yang berisikan penyediaan untuk makan minum rapat dan perjalanan dinas berdasarkan undangan.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Belum tercapainya target dikarenakan pada kegiatan ini berisikan kegiatan-kegiatan rutin seperti pembayaran gaji TPK keamanan, driver, tenaga kebersihan, outsourcing dan belanja-belanja rutin dimana realisasi capaian berdasarkan bulan dibayarkannya.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, berisikan penyediaan anggaran untuk pemeliharaan baik kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor, website, mesin dan Gedung sehingga capaian kinerja pada tri wulan ke-2 ini belum 100%.

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Kegiatan :

- a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, pada kegiatan ini berisikan sub kegiatan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga dan pembangunan GOR lanjutan, belum tercapainya target kinerja karena pada tri wulan ke -2 ini proses baru sampai di tahapan lelang.
- b. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi. Realisasi belum memenuhi target dikarenakan pelaksanaan

pengiriman atlet untuk berpartisipasi pada kejuaraan yang diselenggarakan di tingkat Provinsi menunggu jadwal dari Disporapar Provinsi, dan kegiatan kejuaraan yang diselenggarakan di tingkat provinsi, nasional ataupun internasional saat ini masih sedang berjalan.

3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Kegiatan :

- a. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan. Pada kegiatan ini berisikan sub kegiatan untuk pengembangan pramuka, namun belum terselenggara kegiatan pengembangan kepramukaan, serta sub kegiatan hibah kepada Kwartir Cabang Pramuka dimana pada tri wulan 2 belum diajukan pencairan dana hibah dikarenakan per Juni habis masa berlaku kepengurusan dan menunggu surat perpanjangan dari Kwarda Jawa Tengah.

4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Kegiatan :

- a. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, belum tercapainya target dikarenakan target yang dipasang merupakan kontribusi sektor pariwisata dalam PAD dalam 1 tahun dan pada akhir tri wulan 2 baru terealisasi 36,9%.
- b. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, pada kegiatan ini berisikan sub kegiatan untuk penataan DTW Curugsewu lanjutan, dimana pada tri wulan dua ini tahapannya baru sampai persiapan lelang dan untuk target jumlah kunjungan wisatawan target belum tercapai dikarenakan jumlah wisatawan yang berkunjung masih sedang dihitung dalam 1 tahun ini sehingga capaian pada tri wulan ke-2 belum 100%.

5. Program Pemasaran Pariwisata

Kegiatan :

- a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, kegiatan ini berisikan penyelenggaraan kegiatan pemilihan sinok sinang Kendal dan even-even seperti pemilihan duta santri yang rencananya diselenggarakan di tri wulan tiga bersamaan dengan kegiatan weh wehan Maulid Nabi Muhammad S.A.W, Even Festival Desa Wisata dan Travel Mart Branding Pariwisata bersamaan dengan kegiatan dari Disporapar Provinsi Jawa Tengah.

6. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Kegiatan :

- a. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, kegiatan ini merupakan kegiatan pelatihan bagi pelaku ekraf, direncanakan kegiatan di tri wulan ke tiga.

7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, bersisi kegiatan sosialisasi ekonomi kreatif, kegiatan sudah berjalan dan direncanakan selesai pada tri wulan ke tiga.
- b. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, berisikan kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata, masyarakat yang dilibatkan dari pengelola pokdarwis, desa wisata dan sinok sinang, kegiatan akan dilaksanakan pada tri wulan ke tiga setelah hasil kegiatan pemilihan sinok sinang.

Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Kegiatan :

- a. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan ini berisikan pembinaan kepada pengurus OKP yang ada di Kab. Kendal, dimana jumlah OKP yang ada di tahun 2024 ini masih sama dengan jumlah OKP pada tahun sebelumnya.
- b. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota, kegiatan ini berisikan kegiatan pengembangan pemuda baik melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan, sekolah bisnis, seleksi technopreneur, santri preneur ataupun kegiatan seleksi jambore pemuda, kegiatan ini telah dilaksanakan dari tri wulan 1 sehingga telah mencapai target kinerja.

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, pada penyelenggaraan kejuaraan, kegiatan yang dilaksanakan oleh Disporapar telah merata menyetuh kepada 17 cabor yang ada.

Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Kegiatan :

- a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, kegiatan-kegiatan keolahragaan yang diselenggarakan oleh Disporapar telah mampu mengakomodir jumlah atlet berprestasi sehingga jumlah atlet yang mengikuti pembinaan olahraga prestasi di tingkat provinsi telah melampaui apa yang telah ditargetkan.
- b. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, terealisasi cakupan 2 organisasi olahraga berupa pencairan dana hibah untuk organisasi KONI dan NPCI yang telah 100%.
- c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi, telah terealisasi cakupan 1 organisasi olahraga rekreasi, berupa Pencairan dana hibah untuk organisasi KORMI yang telah 100%.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Capaian Program yang tidak tercapai

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab

1. Adanya dukungan anggaran yang memadai, terutama untuk mendukung Program
2. Menggandeng kesertaan stakeholder terkait

Adapun realisasi target kinerja dan anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal sampai dengan triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Kendal

Kode				Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.				2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	19			BIDANG URUSAN KEPEMUDAA								

Kode				Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				N DAN OLAHRAGA								
2	19	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan pencapaian kinerja program	100%	100%	32.52%	32.52%	100%	95.73%	95.73%
2	19	01	2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan capaian kinerja	100%	100%	16.29%	16.29%	100%	62.11%	62.11%

Kode				Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	19	01	2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan pencapaian kinerja program	100%	100%	47.55%	47.55%	100%	95.31%	95.31%
2	19	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Lancarnya tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	0.32%	0.32%	100%	97.73%	97.73%
2	19	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	35.42%	35.42%	100%	86.83%	86.83%

Kode				Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	19	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan dan kinerja aparatur	100%	100%	86.64%	86.64%	100%	98.81%	98.81%
2	19	01	2.09	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya sarana prasarana aparatur	100%	100%	22.58%	22.58%	100%	98.08%	98.08%
2	2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN	Tingkat partisipasi pemuda	16,6%	16,6%	15.96%	96.1%	15.94%	15.96%	100.1%

Kode				Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan							
2	19	02	2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha	Jumlah pemuda pelopor, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader tingkat kabupaten	400 Orang	400 Orang	650 Orang	162.5%	350 orang	400 orang	114.29%

Kode				Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota								
2	19	02	2.02	Kegiatan :Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi pemuda yang aktif	83,33%	83,33%	83,33%	100%	83,33%	83,33%	100%
3	2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Cabang	100%	100%	43.33%	43.33%	100%	92.85%	92.85%

Kode				Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				KEOLAHRAAGAN	Olahraga Prestasi Tingkat Daerah							
2	19	03	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100%	100%	1.14%	1.14%	100%	90.83%	90.83%

Kode				Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	19	03	2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kotora	Cabang olahraga binaan yang menyelenggarakan kejuaraan tingkat kabupaten	17 Cabor	17 Cabor	100%	100%	10 cabor	17 cabor	170%
2	19	03	2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase atlet yang mengikuti pembinaan olahraga prestasi di tingkat provinsi	0,13%	0,13%	52,27%	402%	0,12%	871.43%	871.43%

Kode				Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	19	03	2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Cakupan pembinaan organisasi olahraga	83%	83%	100%	120%	100%	100%	100%
2	19	03	2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Cakupan pembinaan organisasi olahraga rekreasi	68%	68%	100%	147%	100%	100%	100%
4	2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan gerakan pramuka kwartir cabang	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%

Kode				Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	19	04	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase kwartir ranting yang telah memperoleh pembinaan	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								

Kode				Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3	26	02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PAD sektor pariwisata	Rp 2.883.100.000	Rp 2.883.100.000	Rp 1.063.960.213	36.90%	Rp 2.663.010.000	Rp 1.600.451.050	65.82%
3	26	02	2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		652.958 orang	652.958 orang	523.476 orang	87.8%	714.528 orang	1.806.225 orang	252%
3	26	02	2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah wisatawan	652.958 orang	652.958 orang	523.476 orang	87.8%	572.504 orang	1.806.225 orang	315.5%

Kode				Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3	26	03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	6.06 %	6.06 %	5.32%	87.8%	5,98%	18.87%	315.5%
3	26	03	2.01	Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang dipromosikan	100 %	100%	33%	0.33%	100 %	100%	100%

Kode				Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3	26	04		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan	24 %	24 %	4.2%	17.5%	18 %	36%	200%
3	26	04	2.02	Kegiatan : Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangk	1 dokumen	1 dokumen	0%	0%	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode				Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					an (Dokumen)							
3	26	05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase tenaga kerja sektor pariwisata dan ekraf yang tersertifikasi	24 %	24 %	4.2%	17.5%	18 %	36%	200%

Kode				Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3	26	05	2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	120 orang	120 orang	10 orang	8.33%	80 orang	80 orang	100%

Kode				Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3	26	05	2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	60 orang	60 orang	42 orang	70%	60 orang	75 orang	125%

2.2. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, pada perubahan renja ini belum ada usulan masyarakat.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal Tahun 2024 ini akan dimuat tentang sub kegiatan lanjutan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Secara ringkas dari total sub kegiatan sebanyak 56, terdapat 29 Sub kegiatan (51,78%) tidak mengalami perubahan, sebanyak 27 Sub kegiatan (48,21%) mengalami perubahan, 15 Sub kegiatan (26,78%) mengalami penambahan anggaran, 7 sub kegiatan (12,5%) mengalami penurunan anggaran, serta 5 Sub kegiatan yang mengalami perubahan rincian belanjanya. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan :

Program :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
6. Program Pemasaran Pariwisata
7. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
8. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Kegiatan :

1. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
4. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

5. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
6. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
7. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
8. Kegiatan pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
9. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
11. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
12. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
13. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
14. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
15. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
16. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
17. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
18. Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
19. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
20. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
3. Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
4. Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi
5. Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda

6. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
7. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
8. Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah
9. Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
10. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
11. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
12. Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
13. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
14. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota
15. Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
16. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektor Olahraga
17. Standarisasi Organisasi Keolahragaan
18. Kegiatan pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
19. Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi
20. Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
21. Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
22. Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
23. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
24. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
25. pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
26. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
27. Penyediaan komponen instalasi listrik
28. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
29. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
30. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
31. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
32. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
33. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
34. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

35. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
36. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
37. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
38. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
39. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
40. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
41. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
42. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis pariwisata Kabupaten/Kota
43. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
44. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
45. penetapan destinasi pariwisata kabupaten/kota
46. pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota
47. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
48. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi pariwisata Kabupaten/Kota
49. Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata baik dalam dan luar negeri
50. fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dala dan luar negeri pariwisata Kabupaten/Kota
51. penguatan promosi melalui media cetak elektronik dan media lainnya baik dalan dan luar negeri
52. Pengembangan Pendidikan
53. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
54. pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata
55. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
56. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif

Adapun rincian perubahan Sub kegiatan dalam Perubahan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Rekapitulasi Perubahan Kegiatan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Dalam Perubahan Renja				
		Tetap	Bertambah	Berkurang	Berubah rincian	Jumlah
1.	Dinas Kepemudaan ,Olahraga dan Pariwisata Kab. Kendal	29	15	7	5	56

Dari 15 Sub kegiatan yang mengalami penambahan anggaran, 6 Sub kegiatan mendapatkan tambahan dari TAPD karena merupakan program prioritas yaitu :

- 1). Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota, mendapatkan tambahan anggaran untuk pengaspalan halaman GOR baru/komplek stadion utama dan untuk pengangkutan hibah bangku stadion Jatidiri untuk stadion utama.
- 2). Sub kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota, dimana pada APBD penetapan baru teranggarkan untuk atlet dan pelatih peraih juara 1 dan 2 pada kejuaraan PORPROV dan PEPARPROV 2023, dan pada perubahan ini mendapatkan tambahan anggaran untuk atlet dan pelatih peraih medali perunggu/juara 3 PORPROV dan PEPARPROF serta atlet dan pelatih juara 1 dan 3 FORNAS.
- 3). Sub kegiatan Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan, mendapatkan tambahan anggaran dari SILPA DID 2023 pada perubahan 2024 ini direncanakan untuk pemberian oven kepada

peserta pelatihan kewirausahaan/santripreneur guna peningkatan investasi/penurunan kemiskinan.

- 4). Sub kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi mendapatkan tambahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan coaching clinic sepeda dan event sepeda downhill.
- 5). Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, mendapatkan tambahan anggaran dari SILPA DBHCHT Tahun 2023, akan dilaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan melalui event sepeda serta sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai cukai tembakau.
- 6). Sub kegiatan fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata Kabupaten/Kota, mendapatkan tambahan anggaran untuk kegiatan promosi/pameran pariwisata.

Sedangkan 9 sub kegiatan yang mendapatkan tambahan anggaran dari pergeseran/pengurangan pagu sub kegiatan lainnya, dikarenakan ada anggaran yang tidak boleh dibelanjakan oleh bidang sehingga harus dipindah ke sekretariat dan ada juga yang dikarenakan adanya kekurangan anggaran pada sub kegiatan tersebut sehingga harus ditambahkan lagi pagu nya dari sub kegiatan lainnya, yaitu :

- 1). Sub kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan, pada sub kegiatan ini masih dibutuhkan anggaran untuk pelaksanaan pengiriman peserta POPDA SD dan SMP, pengiriman peserta gerak jalan 28K dan pengiriman peserta PORPROV KORPRI Provinsi Jawa Tengah sehingga untuk pemenuhannya diambilkan dari sub kegiatan lain.
- 2). Sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi, pada sub kegiatan ini masih dibutuhkan anggaran untuk pengiriman ASN Disporapar memenuhi undangan Pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jabatan dan tugas serta fungsinya.
- 3). Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, pada sub kegiatan ini masih dibutuhkan tambahan anggaran untuk cetak karcis DTW.
- 4). Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, mendapatkan tambahan anggaran dari sub kegiatan yang ada di Bidang karena aturan untuk SPPD harus masuk di sekretariat.
- 5). Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, penambahan anggaran untuk biaya servis komputer, laptop dan printer.

- 6). Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, penambahan anggaran untuk biaya servis kendaraan dinas jabatan.
- 7). Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, penambahan anggaran untuk biaya servis kendaraan operasi balak/lapangan,
- 8). Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya penambahan anggaran untuk biaya servis AC.
- 9). Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, penambahan anggaran untuk biaya pemeliharaan Gedung kantor Disporapar.

a) Sub Kegiatan yang tidak mengalami perubahan pagu anggaran.

Sub Kegiatan yang masuk kategori ini adalah sub kegiatan yang ada dalam APBD Penetapan Tahun 2024 dan tidak mengalami penambahan maupun pengurangan baik target kinerja maupun pagu indikatif ataupun rincian belanjanya pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebanyak 29 sub kegiatan. Adapun Sub kegiatan yang tidak mengalami Perubahan pagu anggaran pada renja perubahan seperti tersebut dalam tabel dibawah ini.

Tabel. 3.2

Sub Kegiatan Yang Tidak Mengalami Perubahan Pagu Anggaran ataupun rincian belanja Pada Renja Perubahan Tahun 2024

No	Kegiatan	PAGU (Rp)		Bertambah / Berkurang
		APBD Penetapan	Perubahan Renja	
1.	penyediaan komponen instalasi listrik	15.000.000	15.000.000	0
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.000.000	90.000.000	0
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.450.000	54.450.000	0
4.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000	7.500.000	0
5.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.631.600.000	1.631.600.000	0
6.	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	10.000.000	10.000.000	0

7.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	50.000.000	0
8.	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis pariwisata Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	0
9.	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	169.700.000	169.700.000	0
10.	penetapan destinasi pariwisata kabupaten/kota	219.824.400	219.824.400	0
11.	pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota	150.000.000	150.000.000	0
12.	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	200.000.000	200.000.000	0
13.	Pengembangan Pendidikan	50.000.000	50.000.000	0
14.	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	3.330.000.000	3.330.000.000	0
15.	fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	60.600.842	60.600.842	0
16.	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	162.575.000	162.575.000	0
17.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	150.000.000	150.000.000	0
18.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	51.000.000	51.000.000	0
19.	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	350.000.000	350.000.000	0
20.	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	100.000.000	100.000.000	0

21.	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	200.000.000	200.000.000	0
22.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1.125.000.000	1.125.000.000	0
23.	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	800.000.000	800.000.000	0
24.	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	500.000.000	500.000.000	0
25.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	15.050.000	15.050.000	0
26.	Standarisasi Organisasi Keolahragaan	100.000.000	100.000.000	0
27.	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	5.150.000.000	5.150.000.000	0
28.	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	400.000.000	400.000.000	0
29.	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	274.720.000	274.720.000	0

b) Sub Kegiatan yang mengalami pengurangan Penganggaran

Sub Kegiatan yang masuk kategori ini adalah sub kegiatan yang ada dalam APBD Penetapan Tahun 2024 dan mengalami pengurangan baik target kinerja dan / pagu indikatif sebanyak 7 Sub kegiatan. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian kembali terhadap belanja guna efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan, seperti misalnya pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan sub kegiatan Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan, kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, pengurangan pagu sub kegiatan ini ditambahkan ke sub kegiatan lainnya yang kekurangan anggaran, kemudian sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang mengalami pengurangan pagu anggaran sesuai dengan hasil desk, sub kegiatan yang masih menganggarkan SPPD, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata baik dalam dan luar negeri, penguatan promosi melalui media cetak elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri

sehingga harus dipindahkan ke sekretariat. Adapun sub kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran dapat dilihat dalam tabel 3.3. di bawah ini.

Tabel. 3.3.

Sub Kegiatan Yang Mengalami Pengurangan Pagu Anggaran Pada Renja Perubahan 2024

No	Kegiatan	PAGU (Rp)		Berkurang
		APBD Penetapan	Perubahan Renja	
1.	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	503.770.000	453.770.000	- 50.000.000
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	65.000.000	42.500.000	- 22.500.000
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.469.974.401	7.019.974.401	- 450.000.000
4.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	800.000.000	660.000.000	- 140.000.000
5.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	50.000.000	45.500.000	- 4.500.000
6.	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata baik dalam dan luar negeri	119.768.000	59.768.000	- 60.000.000
7.	penguatan promosi melalui media cetak elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	350.000.000	315.000.000	- 35.000.000

c) Sub Kegiatan yang mengalami penambahan penganggaran

Sub Kegiatan yang masuk kategori ini adalah Sub kegiatan yang ada dalam APBD Penetapan Tahun 2024 dan mengalami penambahan baik target kinerja dan/pagu indikatif sebanyak 15 Sub kegiatan. Sub Kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran dapat dilihat dalam tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4.

Sub Kegiatan Yang Mengalami Penambahan Pagu Anggaran Pada Renja Perubahan 2024

No	Kegiatan	PAGU (Rp)		Bertambah
		APBD Penetapan	Perubahan Renja	
1.	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis	150.000.000	213.002.780	63.002.780
2.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	23.735.900.000	25.840.900.000	2.105.000.000
3.	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	500.000.000	700.000.000	200.000.000
4.	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	5.110.000.000	7.700.000.000	2.590.000.000
5.	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1.594.491.800	2.399.491.800	805.000.000
6.	pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	64.247.400	104.247.400	40.000.000
7.	Sosialisasi Peraturan	772.323.017	1.072.323.017	300.000.000

	Perundang-Undangan			
8.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000	72.500.000	22.500.000
9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	656.630.000	756.130.000	99.500.000
10.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.080.000	85.080.000	35.000.000
11.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	60.000.000	10.000.000
12.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000	80.000.000	20.000.000
13.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	30.000.000	5.000.000
14.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.000.000	75.000.000	30.000.000
15.	fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dala dan luar negeri pariwisata Kabupaten/Kota	1.440.000.000	1.740.000.000	300.000.000

d) Sub Kegiatan yang berubah rincian belanja

Sub Kegiatan yang masuk kategori ini yaitu sub kegiatan yang tidak mengalami perubahan pagu namun rincian belanja mengalami perubahan. Sub kegiatan yang masuk kategori ini sebanyak 5 Sub kegiatan, dapat dilihat dalam Tabel 3.5. dibawah ini.

Tabel 3.5.

Sub Kegiatan berubah rincian belanja Pada Renja Perubahan 2024

No	Kegiatan	PAGU (Rp)		Berkurang / Bertambah
		APBD Penetapan	Perubahan Renja	
1.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	869.095.600	869.095.600	0
2.	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	50.000.000	50.000.000	0
3.	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	200.000.000	200.000.000	0
4.	Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan DestinasiPariwisata Kabupaten/Kota	2.764.100.000	2.764.100.000	0
5.	pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata	650.899.158	650.899.158	0

e) Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2024

Kebijakan belanja pada perubahan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal Tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja daerah pada tahun 2024;

Dengan kebijakan belanja tersebut, mengakibatkan perubahan target dan pagu indikatif. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif perubahan renja pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal tahun 2024 terlihat dalam tabel 3.6. dibawah ini :

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal Tahun 2024 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal Tahun 2024 mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2024.
2. Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja, maka perlu dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Renja Tahun 2024 yang selanjutnya dijadikan bahan bagi penyusunan Rencana Kerja periode berikutnya.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target yang telah ditetapkan.

Kendal,

2024

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KABUPATEN KENDAL



ACHMAD IRHAM CHALID, S.STP., MH.

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 19790626 199810 1 001



PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KENDAL
2024

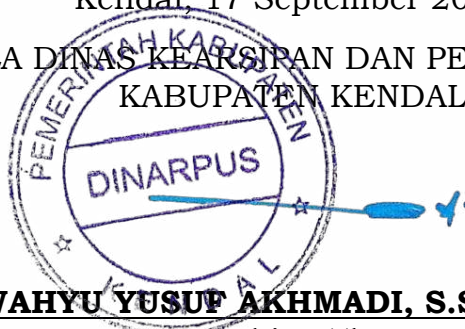
KATA PENGANTAR

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tidak dapat terakomodir dalam Penetapan APBD 2024. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa perubahan Renja dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Perubahan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal ini benar – benar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan APBD Tahun 2024.

Kendal, 17 September 2024

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KENDAL



WAHYU YUSUF AKHMADI, S.STP.M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19820425 200012 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
I. Pendahuluan	1
1. 1. Latar Belakang	1
1. 2. Landasan Hukum	5
1. 3. Maksud dan Tujuan	7
1. 4. Sistematika Penulisan	8
II. Evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun berkenaan	11
2. 1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II dan Renstra Perangkat Daerah.....	11
2. 2. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat	33
III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	34
IV. Penutup	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang kemudian disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja PD ini mengacu pada Rancangan Awal Perubahan RKPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode triwulan I dan II untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, menyelaraskan serta mendasarkan kegiatan prioritas yang masih dilaksanakan.

Perubahan RKPD menjadi acuan perumusan perubahan atas program, kegiatan, indikator kinerja dan proyeksi dana yang dibutuhkan dalam penyusunan rancangan akhir perubahan Renja PD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode triwulan I dan II menjadi acuan perumusan rasionalisasi kegiatan maupun kegiatan alternatif dan/atau baru guna menunjang capaian sasaran daerah, yang berpedoman pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan kebutuhan anggaran dalam penyusunan rancangan akhir perubahan Renja PD, ini dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran.

Perubahan Renja PD dikoordinasikan oleh Baperlitbang, dimana pembahasan meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai situasi dan kondisi serta tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan antar

Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta penyesuaian terhadap pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah. Rancangan akhir perubahan Renja PD disusun kemudian ditetapkan menjadi Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Baperlitbang. Kemudian Perubahan Renja tersebut juga dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan sampai akhir tahun anggaran.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 juga diatur tentang tatacara Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah yaitu dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dari tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Perubahan RKPD menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah. Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud diatas meliputi perubahan:

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- b. Target sasaran pembangunan Daerah;
- c. Prioritas pembangunan Daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan

- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 disusun dengan tahapan:

- a. Penyusunan rancangan perubahan RKPD;
- b. Perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
- c. Penetapan.

Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada :

- a. Perubahan RKPD; dan
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal berkewajiban menyusun Dokumen Perubahan Renja 2024 sebagai satu kesatuan dari sistem perencanaan pemerintah daerah, provinsi dan nasional. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal Tahun 2024 juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang termuat dalam RPJMD, serta menjadi dasar untuk penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal Tahun 2024 merupakan bagian penjabaran dari perencanaan tahun ketiga RPJMD Kabupaten Kendal dan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.

Mempedomani Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2024.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan atau tahun 2024. Hasil evaluasi tersebut disampaikan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah melalui Kepala Baperlitbang atau Tim Penyusun Perubahan RKPD Kabupaten Kendal yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi yang menunjukkan perlu dilakukan perubahan dengan pertimbangan :

- 1) Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan.
- 2) Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar OPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan.
- 3) Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2024 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2024.

Perubahan Renja tahun 2024 dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Perangkat Daerah dan kemudian ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) melalui

penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD Perubahan) Kabupaten Kendal.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
14. Peraturan Bupati Kendal No. 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencna Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 20);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) adalah tersusunnya dokumen perubahan perencanaan pembangunan tahunan bagi Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan daerah jangka menengah dan panjang .

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyelaraskan dengan tugas dan fungsinya;
- b. Memberikan acuan yang lebih rasional bagi Perangkat Daerah dalam menyelaraskan capaian dan proyeksi kinerja program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran;
- c. Memberikan acuan yang lebih rasional bagi Perangkat Daerah dalam menyelaraskan lokasi kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran;
- d. Memberikan acuan yang lebih rasional bagi Perangkat Daerah dalam menyelaraskan indikator kinerja kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran;
- e. Memberikan acuan yang lebih rasional bagi Perangkat Daerah dalam menyelaraskan kelompok sasaran kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran;
- f. Memberikan acuan yang lebih rasional bagi Perangkat Daerah dalam menyelaraskan serta memproyeksi pendanaan dalam rangka menyelaraskan dinamika pelayanan sampai akhir tahun anggaran;
- g. Memberikan pedoman pembangunan tahun 2024 bagi Perangkat Daerah yang akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perubahan Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja

provinsi/ Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. (disesuaikan dengan perbup Perubahan RKPD tahun 2024).

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:
 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah menggunakan lampiran rancangan akhir perubahan RKPD 2024

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap perangkat daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II dan Renstra Perangkat daerah.

Dalam rangka menunjang capaian Visi dan Misi Kabupaten Kendal Tahun 2021 - 2026 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal mendukung dan berkontribusi dalam mencapai dua dari lima tujuan Pembangunan Kabupaten Kendal yaitu “Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan berbudi pekerti luhur” dan “Meningkatkan reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik”. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mendukung Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia serta mendukung Peningkatan akses dan kualitas layanan publik demi mewujudkan arah kebijakan pembangunan tahun 2023 yaitu “KENDAL SMART CITY”, yang menitikberatkan pada perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal Smart City.

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal di tahun 2024 sampai dengan Triwulan II secara umum masih selaras dengan dinamika yang ada setelah melalui penyelarasan dan penyempurnaan terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan kabupaten Kendal yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kinerja kegiatan menunjukkan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal Tahun 2024 Triwulan II menunjukkan kinerja yang optimal, selaras dan masih *on the track* dengan target serta capaian yang diharapkan. Ini dapat dilihat dari berjalannya semua kegiatan, selaras dengan dinamika situasi dan kondisi yang berkembang sesuai tugas dan fungsinya sebagai penyedia/penunjang pelayanan

publik di bidang Kearsipan dan Perpustakaan termasuk pelayanan kepada masyarakat.

Monitoring dan evaluasi secara berkala terfokus pada beberapa program/kegiatan prioritas yang terindikasi capaian realisasinya masih rendah, meskipun pada dasarnya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal selaku unit penyedia/penunjang pelayanan publik di bidang Kearsipan dan Perpustakaan termasuk pelayanan kepada masyarakat tentunya mempunyai konsekuensi terhadap kesiapan serta ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang berbagai bidang pelayanan selaras dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya. Hal ini berpengaruh pada tahap perencanaan anggaran terkait dinamika penganggaran dengan kebutuhan insidentil/tidak terduga yang sulit diprediksi sebelumnya dan terkait penunjang pelayanan kepada masyarakat. Evaluasi kinerja setiap kegiatan serta kebutuhan rutin pada tahun-tahun sebelumnya, akomodasi terhadap usulan rencana kebutuhan barang yang masuk serta proyeksi cadangan bagi kebutuhan insidentil/tidak terduga merupakan unsur terpenting dalam proses penganggaran dengan berpedoman pada setiap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal untuk beberapa program/kegiatan lebih mengedepankan outcome atas capaian target kinerja yang telah ditentukan. Proyeksi terhadap alokasi penyediaan juga tidak selalu berbanding lurus dengan kebutuhan yang ada seiring dinamika yang terus berkembang mengikuti mekanisme serta kebijakan yang ada.

Dalam pelaksanaan serta evaluasi yang berjalan, beberapa program/kegiatan perlu adanya perubahan pada rencana kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal guna mengakomodasi serta menyelaraskan terhadap berbagai dinamika kebutuhan prioritas yang berkembang terkait dengan penyesuaian atas APBD Tahun 2024.

Perubahan rencana kerja ini akan mengakomodir usulan proyeksi anggaran perubahan yang diprioritaskan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal yang selanjutnya akan ditetapkan masing-masing plafon anggaran per kegiatan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS)

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Perubahan rencana kerja ini juga akan mengakomodir adanya beberapa pergeseran belanja pada beberapa kegiatan guna penyesuaian atas kondisi-kondisi yang terjadi pada APBD Tahun 2024, dinamika kebutuhan yang sedang berkembang serta faktor efisiensi pada beberapa belanja kegiatan yang memungkinkan optimalisasi capaian kinerja pada belanja kegiatan lain yang lebih prioritas dengan berpedoman pada peraturan/kebijakan yang ada.

Adapun alokasi serta realisasi anggaran sampai Triwulan II (Semester I) tahun 2024 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Alokasi	Realisasi (sp2d)	
			(Rp)	(%)
2	BELANJA	12.260.528.959	4.283.990.342	34.94
2.1	Belanja Operasi	9.747.506.039	4.283.990.342	43,94
2.2	Belanja Modal	2.513.022.920	0	0
2.3	Belanja Tak Terduga	0	0	0
2.4	Belanja Transfer	0	0	0

Sumber : SIPD 2024 (s/d 30 Juni 2024)

Tingkat rata - rata capaian kinerja dan realisasi anggaran pada evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II masih menunjukkan Tingkat Capaian Kinerja 35% (*Rendah*) dengan Realisasi Anggaran Renja OPD Rp. 4.283.990.342,-. Namun evaluasi kinerja ini dikalkulasi dengan indikator kinerja output melalui besaran serta capaian output yang telah terealisasi terhadap target yang telah ditentukan. Evaluasi capaian kinerja outcome akan berpengaruh lebih signifikan untuk menunjukkan predikat kinerja lebih baik yang telah dicapai oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal sebagai unit penunjang dan penyedia pelayanan Kearsipan dan Perpustakaan kepada masyarakat. Realisasi dari target output yang ditetapkan tidak selalu berbanding lurus dengan proyeksi perencanaan di awal, hal ini dikarenakan sebagian besar dari kegiatan yang ada pada

rencana kerja merupakan kegiatan rutin penyediaan yang tidak terduga atau situasional/insidental mengacu pada dinamika kebutuhan tahun anggaran sebelumnya. Dengan demikian Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal optimis *on the track* atas semua pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis. Perubahan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal pada tahun berjalan ini dilakukan demi mencapai optimalisasi dan keselarasan. Hal ini dapat dimonitor dari hasil evaluasi berkala atas semua program kegiatan yang ada terhadap target capaian yang diharapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II, di jelaskan dengan rincian sebagai berikut :

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 10.688.570.173,- terealisasi Rp. 4.151.081.342,- Capaian program dapat dilihat melalui Kegiatan :

- a. *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* realisasi kinerja 0% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- dengan sub kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah realisasi kinerja 50% dan realisasi keuangan Rp. 0,- fisik sudah dilaksanakan namun belum diSPJkan.
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah realisasi kinerja 0% dan realisasi keuangan Rp. 0,- Pelaksanaan pada triwulan III.
- b. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* realisasi kinerja 52% dan realisasi Rp. 3.051.889.554,- dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN realisasi kegiatan 52% dan realisasi keuangan Rp. 3.051.889.554,- sesuai kebutuhan.
- c. *Administrasi Umum Perangkat Daerah* realisasi kinerja 45% dan realisasi keuangan Rp. 162.415.976,- dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor realisasi kegiatan 10% dan realisasi keuangan Rp. 587.000,- sesuai kebutuhan
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, realisasi kegiatan 16% dan realisasi keuangan Rp. 7.239.600,- sesuai kebutuhan
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, realisasi kegiatan 10% dan realisasi keuangan Rp. 1.129.000,- sesuai kebutuhan
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor, realisasi kegiatan 50% dan realisasi keuangan Rp. 7.734.000,- sesuai kebutuhan
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, realisasi kegiatan 30% dan realisasi keuangan Rp. 3.746.200,- sesuai kebutuhan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, realisasi kegiatan 42% dan realisasi keuangan Rp. 4.369.000,- sesuai kebutuhan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu, realisasi kegiatan 35% dan realisasi keuangan Rp. 4.925.000,- sesuai kebutuhan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, realisasi kegiatan 55% dan realisasi keuangan Rp. 122.808.176,- sesuai kebutuhan
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD realisasi kegiatan 100% dengan realisasi keuangan Rp. 9.878.000,- selesai.
- d. *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* realisasi kinerja 15% dan realisasi keuangan Rp. 0,- dengan sub kegiatan :
- Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya, Belanja Pengadaan Mebel, realisasi kegiatan 10% dan realisasi keuangan Rp. 0,- proses pengadaan e purchasing.
 - realisasi kegiatan 15% dan realisasi keuangan Rp. 0,- proses pengadaan e purchasing.
- e. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* realisasi kinerja 50% dan realisasi keuangan Rp. 890.018.537,- dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat realisasi kegiatan 42% dan realisasi keuangan Rp. 1.500.000,- sesuai kebutuhan.
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, realisasi kegiatan 50% dan realisasi keuangan Rp. 323.532.430,- sesuai kebutuhan.
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, realisasi kegiatan 0% dan realisasi keuangan Rp. 0,- belum terlaksana rencana akan digeser.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, realisasi kegiatan 55% dan realisasi keuangan Rp. 564.986.101,- sesuai kebutuhan.
- f. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* realisasi kinerja 45% dan realisasi keuangan Rp. 46.757.275,- dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, realisasi kegiatan 42% dan realisasi keuangan Rp. 30.882.275,- sesuai kebutuhan.
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, realisasi kegiatan 25% dan realisasi keuangan Rp. 6.185.000,- sesuai kebutuhan.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan, realisasi kegiatan 20% dan realisasi keuangan Rp. 0,- dalam proses dokumen persiapan pengadaan.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, realisasi kegiatan 25% dan realisasi keuangan Rp. 9.690.000,- sesuai kebutuhan.

2) PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Program Pembinaan Perpustakaan terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 1.395.130.586,- terealisasi Rp. 84.030.000,- Capaian program dapat dilihat melalui Kegiatan :

- a. *Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* realisasi kinerja 20% dan realisasi keuangan Rp. 82.400.000,- dengan sub kegiatan :
- Pengembangan Perpustakaan di tingkat daerah Kabupaten/Kota realisasi kinerja 25% dan realisasi keuangan Rp. 2.500.000,- kegiatan sedang berjalan.
 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standart Nasional Perpustakaan realisasi kinerja 15% dan realisasi keuangan Rp. 1.400.000,- sedang berjalan.
 - Peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan dan Pustakawan tingkat Daerah Kabupaten/Kota realisasi kinerja 5% dan realisasi keuangan Rp. 0,- diperuntukkan penyusunan IPLM dan PGM tahap persiapan.
 - Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota realisasi kinerja 35% dan realisasi keuangan Rp. 75.110.000,- sedang berjalan.
 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka, realisasi kegiatan 15% dan realisasi keuangan Rp. 3.390.000,- proses pengadaan.
- b. *Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* realisasi kinerja 5% dan realisasi keuangan Rp.1.630.000,- dengan sub kegiatan :
- Pembangunan dan pemeliharaan sarana Perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota realisasi kegiatan 0% dan realisasi keuangan Rp. 0,- rencana digeser.
 - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial, realisasi kegiatan 10% dan realisasi keuangan Rp. 1.630.000,- sedang berjalan.

3) PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

Program Pengelolaan Arsip terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan dengan anggaran Rp. 139.952.200,- terealisasi Rp. 32.580.000,- capaiannya dapat dilihat melalui Kegiatan :

- a. *Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota*, realisasi kinerja 35% dan realisasi keuangan Rp. 6.907.000,- dengan sub kegiatan:
 - Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis, realisasi kegiatan 75% dan realisasi keuangan Rp. 2.832.000,- kegiatan sedang berjalan hampir selesai.
 - Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota, realisasi kinerja 25% dan realisasi keuangan Rp. 4.075.000,- kegiatan sedang berjalan.
- b. *Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota*, realisasi kinerja 33% dan realisasi keuangan Rp. 19.273.000,- dengan sub kegiatan:
 - Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis realisasi kinerja 33% dan relisasi keuangan Rp. 19.273.000,- proses berjalan.
- c. *Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota*, realisasi kinerja 25% dan realisasi keuangan Rp.6.400.000,-
 - Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN realisasi kinerja 65% dan realisasi keuangan Rp. 2.360.000,- kegiatan berjalan.
 - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota, realisasi kinerja 10% dan realisasi keuangan Rp. 4.040.000,- persiapan pelaksanaan.

4) PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip terdiri dari 4 (Empat) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 28.208.000,- terealisasi Rp. 15.784.000,- sedangkan capaiannya dapat dilihat melalui Kegiatan :

- a. *Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun*, realisasi kinerja 45% dan realisasi keuangan Rp. 1.829.000,- dengan sub kegiatan :
- Penilai, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun, realisasi kinerja 90% dan realisasi keuangan Rp. 1.829.000,- hampir selesai.
 - Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun, realisasi kinerja 20% dan realisasi keuangan Rp. 0,- proses persiapan.
- b. *Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan*, realisasi kinerja 80% dan realisasi keuangan Rp. 11.975.000,- dengan sub kegiatan :
- Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, realisasi kinerja 90% dan realisasi keuangan Rp. 11.975.000,- kegiatan hampir selesai.
 - Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, realisasi kinerja 10% dan realisasi keuangan Rp. 0,- persiapan kegiatan.
- c. *Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota*, realisasi kinerja 600% dan realisasi keuangan Rp. 1.980.000,- dengan sub kegiatan :
- Penilaian dan Penetapan Autentitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip , realisasi kinerja 10% dan realisasi keuangan Rp. 0,- persiapan.
 - Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip, realisasi kinerja 80% dan realisasi keuangan Rp. 1.980.000,- sedang berjalan.
- d. *Pencarian Arsip Statis Kabupaten / Kota yang Dinyatakan Hilang*, realisasi kinerja 10% dan realisasi keuangan Rp. 0,- dengan sub kegiatan :

- Penetapan dan pengumuman daftar pencarian arsip , realisasi kinerja 10% dan realisasi keuangan Rp. 0,- persiapan.

5) PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP

Program Perizinan Penggunaan Arsip terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 8.668.000,- terealisasi Rp. 515.000,- sedangkan capaiannya dapat dilihat melalui Kegiatan :

- a. *Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten / Kota* , realisasi kinerja 10% dan realisasi keuangan Rp. 515.000,- dengan sub kegiatan :
 - Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup, realisasi kinerja 10% dan realisasi keuangan Rp. 0,- persiapan.
 - Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup, realisasi kinerja 10% dan realisasi keuangan Rp. 515.000,- sedang berjalan.

Berdasarkan uraian diatas kami kelompokkan program/kegiatan sebagai berikut :

1. Realisasi kegiatan yang belum memenuhi target kinerja sampai Triwulwn II adalah :
 - a. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - b. Kegiatan Pengeloaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
2. Realisasi kegiatan yang sesuai dengan target kinerja sampai Triwulan II adalah :
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - d. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

- e. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota.
 - f. Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi Dibawah 10 Tahun.
3. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja adalah :
- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - c. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota.
 - d. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota.
 - e. Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
 - f. Kegiatan Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota.
 - g. Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang.
 - h. Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
- 1. SDM pengadaan barang yang belum optimal memahami sistem pengadaan barang.
 - 2. Penempatan sub kegiatan bersumber dari DAK Fisik tidak sesuai dengan kode klasifikasi, karena SE hasil pemetaan dan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomerklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait DAK TA 2024 baru terbit tanggal 22 April 2024.
 - 3. Untuk realisasi kegiatan yang sudah sesuai dengan target, kegiatan tersebut berdasarkan kebutuhan rutin.
 - 4. Untuk realisasi kegiatan yang melebihi target khususnya pada bidang Kearsipan karena SDM sudah cukup memadai, namun untuk SDM yang bidang Perpustakaan masih kurang.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Perangkat daerah diharapkan bisa mencapai target kinerja pada Renstra walau ada perbedaan target capaian kinerja antara Renstra dan Renja, namun semua itu untuk memenuhi capaian kinerja program Renstra.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
 1. Koordinasi dengan PBJ tentang sistem Pengadaan Baang dan Jasa.
 2. Berkoordinasi dengan Baperlitbang dan Bagian Administrasi Pembangunan serta membuat nota dinas berkaitan dengan pergeseran antar sub kegiatan.
 3. Mengajukan tambahan SDM untuk bidang Perpustakaan ke BKPP.
 4. Mengajukan penambahan anggaran guna memenuhi target kinerja yang belum tercapai.

Untuk lebih jelas capaian kinerja kami sajikan dalam bentuk tabel 2.1 yang berisi rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja (RENJA) dan pencapaian rencana strategis (RENSTRA) perangkat daerah sampai dengan 2024 khususnya triwulan II :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kendal

**Perangkat
Daerah**

**: Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiat an (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangk at Daerah 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangk at Daerah Tahun 2024 TW II	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10=(10/4)
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar													
2	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	100 persen	100	50	50	100	150	150
2	2	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	25 dokumen	25	9	36	7	16	64
2	2	0	2.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	7 dokumen	25	9	36	7	16	229

2	2	0	2.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1	0	0	0	0	0
2	2	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	86 laporan	12	6	50	12	18	21
2	2	0	2.0	000	penyedia gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	56 orang	56	51	91	56	107	191
2	2	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja internal yang terlayani	95 persen	100	50	50	100	150	158
2	2	0	2.0	000	penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	11	6	55	15	21	175
2	2	0	2.0	000	penyedia peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	12	6	50	12	18	150
2	2	0	2.0	000	penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 paket	12	6	50	12	18	150
2	2	0	2.0	000	penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	12	6	50	12	18	150
2	2	0	2.0	000	penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	12 paket	12	6	50	12	18	150
2	2	0	2.0	000	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	10 dokumen	10	6	60	10	16	160
2	2	0	2.0	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12	6	50	12	18	150

2	2	0	2.0	000	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	12	6	50	12	18	150
2	2	0	2.0	001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1	0	0	1	1	100
2	2	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	6 unit	40	0	0	30	30	500
2	2	0	2.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	50 buah	50	0	0	30	30	60
2	2	0	2.0	000	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	50 unit	50	0	0	40	40	80
2	2	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rutin	48 bulan	12	6	50	12	18	38
2	2	0	2.0	000	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa surat menyurat yang disediakan	12 laporan	12	6	50	12	18	150
2	2	0	2.0	000	penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	12	6	50	12	18	150
2	2	0	2.0	000	penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	12	0	0	0	0	0
2	2	0	2.0	000	penyedia jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	12	6	50	12	18	150
2	2	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah yang terpelihara	147 unit	21	25	119	21	46	31

2	2	0	2.0	000	penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	19 unit	19	11	58	21	32	168
2	2	0	2.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan terpeliharanya peralatan mesin kantor	50 unit	50	7	14	3	10	20
2	2	0	2.0	000	pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	2	0	0	2	2	4
2	2	0	2.0	001	pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	46 unit	46	20	43	20	40	87
2	2	0			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan aktif	75	65	65	100	70	135	180
2	2	0	2.0		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pengelolaan Perpustakaan tingkat Daerah di Kabupaten Kendal	60	69	15	22	60	75	115
2	2	2	2.0	000	Pengembangan Perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah perputakaan yang dikembangkan ditingkat daerah kabupatenkota sesuai Standart Nasional Perpustakaan diwilayah Kabupaten /kota sesuai Kewenangannya	20 perpustakaan	17	15	88	20	35	175

2	2	0	2.0	000	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten / Kota Sesuai Standar nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar dan yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	20 perpustakaan	20	15	75	20	35	35
2	2	0	2.0	000	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan pustakawan tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	8 orang	8	0	0	0	0	0
2	2	0	2.0	000	Pengembangan layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/ kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangkan tingkat kabupaten/ kota melalui peningkatan koleksi	210 layanan	210	187	89	90	90	43
2	2	0	2.0	000	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan pustaka	Jumlah bahan pustaka yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	4000 eksemplar	2000	0	0	4000	4000	100
2	2	0	2.0	001	Penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan, dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	1 dokumen	3	2	0	0	2	200
2	2	0	2.0		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah promosi gemar membaca	5 kali	2	2	100	2	4	80

2	2	0	2.0	000	sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pada pendidikan khusus serta masyarakat	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan	100 lokus	0	0	0	0	0	0
2	2	0	2.0	000	Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan ditempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah perpustakaan yang dibangun ditempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	1 perpustakaan	1	0	0	1	1	20
2	2	0	2.0	000	Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan	5 perpustakaan	5	0	0	20	20	400
2	2	0			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengolahan arsip secara baku	42 persen	42	30	71	33	63	150
						Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat buki yang sah dan pertanggungjawaban Nasional pasal 40 dan pasal 59 Undang undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan	76.35 persen	76	50	65	77	127	166
2	2	0	2.0		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah arsip dinamis yang dikelola	1700 berkas	1700	17491	1029	1700	19191	1129
2	2	0	2.0	000	pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan	1200 Berkas	12000	22102	184	1500	23602	1967

						penyusutan							
2	2 4	0 2	2.0 1	000 3	pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	3 laporan	3	2	67	3	5	167
2	2 4	0 2	2.0 2		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah arsip statis yang dikelola	1896 berkas	1896	4059	214	1896	5955	314
2	2 4	0 2	2.0 2	000 2	Akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan Akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis	50 arsip	50	2140	4280	3800	5940	11880
2	2 4	0 2	2.0 3		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten / Kota	Persentase sarana prasarana kearsipan	37,67 Persen	32.67	32.67	100	33	66	174
2	2 4	0 2	2.0 3	000 1	Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/ kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah Kabupaten/kota melalui JIKN	10 pengguna	10	8	80	5	13	130
2	2 4	0 2	2.0 3	000 2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Dan Lembaga Kerasipan Daerah Kbupaten / Kota	Jumlah laporan hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Dan Lembaga Kerasipan Daerah Kabupaten / Kota	12 laporan	12	11	92	6	17	142
2	2 4	0 3			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN	Persentase arsip statis yang dialihmediakan	6,76 persen	6.76	12.46	184	6.76	19	284

					ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan Negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat	91,75 persen	91.7	91.7	100	91.72	183	200
2	2 4	0 3	2.0 1		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Yang Memiliki Retensi Dibawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan	2500 berkas	1600	1600	100	1600	3200	128
2	2 4	0 3	2.0 1	000 1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi Dibawah 10 Tahun	Jumlah arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi Dibawah 10 Tahun	1000 arsip	1000	14441	1444	4000	18441	1844
2	2 4	0 3	2.0 1	000 2	Pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun	Jumlah arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun yang dimusnahkan	2000 berkas	2000	0	0	2500	2500	125

2	2 4	0 3	2.0 3		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Yang Digabung dan atau Dibubarkan Dan Pemekaran Daerah Kecamatan Dan Desa / Kelurahan	Jumlah arsip OPD yang didampingi dalam pengelolaan arsip	2000 berkas	2000	8405	420	2000	10405	520
2	2 4	0 3	2.0 3	000 1	Pendataan Penyusunan Daftar Dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah daftar arsip yang dilakukan Pendataan Penyusunan Daftar Dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	1 daftar	1	0	0	1	1	100
2	2 4	0 3	2.0 3	000 2	Pendataan Penyusunan Daftar Dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah arsip yang dilakukan Pendataan Penyusunan Daftar Dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	1 arsip	100	0	0	100	100	10000
2	2 4	0 3	2.0 4		Auntentifikasi Arsip Statis Dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/ Kota	Jumlah arsip statis statis dan arsip hasil alih media yang dilakukan autentifikasi	2000 berkas	500	3512	702	1000	4512	226
2	2 4	0 3	2.0 4	000 1	Penilaian Dan Pentapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah daftar autentisitas arsip sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip yang dinilai dan ditetapkan	1000 arsip	1000	0	0	1000	1000	100

2	2	0	2.0	000	Penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	Jumlah daftar autentisitas arsip sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip yang dinilai dan ditetapkan	1000 arsip	1000	0	0	1000	1000	100
2	2	0	2.0		Pencarian Arsip Statis kabupaten / Kota Yang Dinyatakan Hilang	Jumlah arsip statis statis dan arsip hasil alih media yang dilakukan autentifikasi	20 kali	10	21	210	10	31	155
2	2	0	2.0	000	Penetapan dan pengumuman daftar pencarian arsip (DPA)	Jumlah daftar pencarian arsip (DPA) yang dilakukan penetapan dan pengumuman	10 arsip	10	0	0	9	9	90
2	2	0			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase ijin pemanfaatan arsip tertutup yang dikeluarkan	60 persen	55	78	142	56	134	223
2	2	0	2.0		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup di Kabupaten / Kota	Jumlah ijin pemanfaatan arsip tertutup yang dikeluarkan	1 kali	1	78	7800	1	79	7900
2	2	0	2.0	01	Penyusunan Dan Pentapan SOP Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup yang disusun dan ditetapkan	10 SOP	10	1	10	1	2	20
2	2	0	2.0	02	Penyediaan Daftar Arsip Dan Pentapan Izin Penggunaan Arsip Yang bersifat Tertutup	Jumlah daftar arsip hasil Penyediaan Daftar Arsip Dan Pentapan Izin Penggunaan Arsip Yang bersifat Tertutup	1 arsip	1	1	100	1	2	200

2.2. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, tidak terdapat usulan kegiatan yang dimintakan masyarakat kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal dan tidak ada Pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.

Tabel 2.2.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah				:DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			
NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN /VOLUME	CATATAN
1							
2							

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan rencana kerja ini akan mengakomodir usulan proyeksi anggaran perubahan yang diprioritaskan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal yang selanjutnya akan ditetapkan masing-masing plafon anggaran perkegiatan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Perubahan rencana kerja ini juga akan mengakomodir adanya beberapa pergeseran belanja pada beberapa kegiatan guna penyesuaian atas kondisi-kondisi yang terjadi pada APBD Tahun 2024. Dinamika yang sedang berkembang memerlukan langkah rasionalisasi pada beberapa belanja kegiatan yang diharapkan mampu mengoptimalkan capaian kinerja pada belanja kegiatan lain yang lebih prioritas dengan berpedoman pada peraturan/kebijakan yang ada. Pengalokasian anggaran dalam bentuk belanja pegawai yang rutin diperuntukkan sebagai pemberian gaji dan tunjangan bagi PNS Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal.

Adapun rincian yang mencakup penyelarasan terhadap isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan, target capaian kinerja baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan serta sumber dana terdapat pada **Lampiran 1** Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 Perubahan (sumber dari : SIPD-RI perubahan 2024).

Adapun secara garis besar persandingan pagu alokasi pendanaan anggaran belanja tahun 2024 antara Pagu Penetapan APBD dengan Pagu usulan Perubahan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal, yaitu sebagai berikut :

No.	Uraian	APBD		SELISIH (+/ -)	RENJA	SELISIH (+/ -)
		Penetapan	Pergeseran		Usulan Perubahan	
1	2	3	4	5 = (4-3)	6	7 = (6-4)
	BELANJA	12.260.528.959	12.260.528.959	0	13.324.528.959	1.063.997.184
2.1	Belanja Operasi	9.747.506.039	9.747.506.039	0	10.097.782.727	350.276.688
2.2	Belanja Modal	2.513.022.920	2.513.022.920	0	3.226.746.232	713.720.496
2.3	Belanja Tak Terduga	0	0	0	0	0
2.4	Belanja Transfer	0	0	0	0	0

Sumber : SIPD Perubahan 2024

Sedangkan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal yang diusulkan pada Perubahan Renja Tahun 2024 (*Pagu anggaran berdasarkan Penetapan*) diuraikan sebagai berikut :

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA pagu Rp. 10.668.570.173,- menjadi Rp. 11.494.761.173,- dengan rincian :
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 80.520.000,- menjadi Rp. 80.520.000,-
 - *Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp. 10.520.000,- menjadi Rp. 10.520.000,-.*
 - *Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp. 70.000.000,- menjadi Rp. 70.000.000,-*
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 6.147.945.006,- menjadi Rp. 5.907.945.006,-
 - *Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 6.147.945.006,- menjadi Rp. 5.907.945.006,-*
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. 0,- menjadi Rp. 100.000.000,-
 - *Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Rp. 0,- menjadi Rp. 100.000.000,- untuk bimtek peningkatan SDM pegawai.*
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 936.215.539,- menjadi Rp. 1.052.165.639,-
 - *Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp. 10.000.000,- menjadi Rp. 33.000.000,- tambahan anggaran untuk tambah daya listrik.*
 - *Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 49.910.250,- menjadi Rp. 83.410.250,- tambahan untuk pemenuhan alat tulis kantor layanan perpustakaan.*

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp. 195.780.868,- menjadi Rp. 234.541.000,- tambahan untuk mencukupi kekurangan peralatan rumah tangga.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp. 19.260.000,- menjadi Rp. 19.260.000,-
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 14.600.000,- menjadi Rp. 14.600.000,-
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Rp. 12.500.000,- menjadi Rp. 12.500.000,-
 - Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, Rp. 17.950.000,- menjadi Rp. 17.950.000,-
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Rp. 605.380.171,- menjadi Rp. 626.070.139,- tambahan untuk mencukupi rakor, konsultasi dan makan minum jamuan tamu.
 - Sub Kegiatan Penatausahaan arsip Dinamis pada SKPD, Rp. 10.834.250,- menjadi Rp. 10.834.250,-
- e. Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 289.390.000,- menjadi Rp. 464.510.496,-
- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, Rp. 212.890.000,- menjadi Rp. 212.890.000,-
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Rp. 76.500.000,- menjadi Rp. 251.720.496,- tambahan untuk mencukupi kekurangan peralatan kantor.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 2.125.830.628,- menjadi Rp. 2.158.754.032,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 4.000.000,- menjadi Rp. 4.000.000,-
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Rp. 746.067.000,- menjadi Rp. 725.357.000,- dikurangi diperkirakan silpa.

- *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Rp. 1.226.783.760,- menjadi Rp. 1.429.397.032,- tambahan anggaran untuk kekurangan gaji tenaga alihdaya tenaga kebersihan, keamanan dan supir.*
- g. *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 1.108.669.000,- menjadi Rp. 1.730.766.000,-*
 - *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Rp. 88.269.000,- menjadi Rp. 161.866.000,- tambahan untuk mencukupi kekurangan belanja servis kendaraan operasional dinas.*
 - *Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya, Rp. 35.400.000,- menjadi Rp. 45.400.000,- tambahan untuk mencukupi kekurangan pemeliharaan peralatan mesin kantor.*
 - *Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Rp. 900.000.000,- menjadi Rp.1.439.500.000,- tambahan untuk rehabilitasi lahan parkir perpustakaan Kendal.*
 - *Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Rp. 85.000.000,- menjadi Rp. 85.000.000,-*
- 2) **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** Pagu anggaran Rp. 1.395.130.586,- menjadi Rp. 1.543.610.586,- dengan rincian :
 - a. **Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** Rp. 553.204.906,- menjadi Rp. 1.502.290.586,-
 - *Sub Kegiatan Pengembangan dan pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik, Rp. 0,- menjadi Rp. 300.139.955,- tambahan untuk mengakomodir anggaran yang bersumber dari DAK Fisik.*
 - *Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Rp. 14.527.200,- menjadi Rp. 529.992.925,- tambahan untuk mencukupi penyediaan makan minum*

kegiatan kolaborasi dengan pihak luar/komunitas dan untuk mengakomodir anggaran yang bersumber dari DAK Fisik.

- *Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten / Kota Sesuai Standar nasional Perpustakaan, Rp. 15.730.000,- menjadi Rp. 72.210.000,- tambahan untuk pendampingan akreditasi perpustakaan sekolah dan perpustakaan desa.*
 - *Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota, Rp. 8.840.000,- menjadi Rp. 20.840.000,- tambahan untuk bimtek peningkatan kapasitas pengelolaan perpustakaan.*
 - *Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota, Rp. 272.474.000,- menjadi Rp. 272.474.000,-*
 - *Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka, Rp. 230.633.706,- menjadi Rp. 295.633.706,- penambahan anggaran untuk penambahan bahan koleksi (Ebook)*
 - *Sub Kegiatan Penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah Kabupaten/ Kota, Rp. 11.000.000,- menjadi Rp. 11.000.000,-*
 - b. *Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp. 841.925.680,- menjadi Rp. 41.320.000,-*
 - *Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di tempat-tempat Umum yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota, Rp. 800.605.680,- menjadi Rp. 0,- disesuaikan kode klasifikasi.*
 - *Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial, Rp. 41.320.000,- menjadi Rp. 41.320.000,-*
- 3) *PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP pagu anggaran Rp. 139.952.200,- menjadi Rp. 228.765.200,- dengan rincian :*
- a. *Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota, Rp. 28.205.000,- menjadi Rp. 65.658.000,-*

- *Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis, Rp. 4.240.000,- menjadi Rp. 22.240.000,- penambahan anggaran untuk sarpras pegolahan arsip provinsi..*
 - *Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota, Rp. 23.965.000,- menjadi Rp. 43.418.000,- penambahan anggaran untuk rakor dan evaluasi implementasi SRIKANDI.*
- b. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota, Rp. 73.107.000,- menjadi Rp. 121.232.000,-
- *Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Rp. 73.107.000,- menjadi Rp. 121.232.000,- penambahan untuk fumigasi dan termite control.*
- c. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota, Rp. 39.640.200,- menjadi Rp. 41.875.200,-
- *Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN Rp. 4.580.000,- menjadi Rp. 6.680.000,- untuk narasumber pengolahan arsip peta.*
 - *Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kerasipan Daerah Kbpupaten / Kota Rp. 34.060.200,- menjadi Rp.35.195.200,- untuk narasumber penyelamatan arsip bencana.*
- 4) PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP pagu anggaran Rp. 28.208.000,- menjadi Rp.48.724.000,- dengan rincian :
- a. Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun, Rp. 5.090.000,- menjadi Rp. 5.090.000,-
- *Sub Kegiatan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi Dibawah 10 Tahun, Rp. 2.050.000,- menjadi Rp. 2.050.000,-*
 - *Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun, Rp. 3.040.000,- menjadi Rp. 3.040.000,-*

- b. Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Rp. 16.618.000,- menjadi Rp. 37.134.000,-
- *Sub Kegiatan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Rp. 13.480.000,- menjadi Rp. 33.996.000,- untuk sarpras pengolahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah.*
 - *Sub Kegiatan Pendataan Penyusunan Daftar Dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten / Kota, Rp. 3.138.000,- menjadi Rp. 3.138.000,-*
- c. Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota, Rp. 3.872.000,- menjadi Rp. Rp. 3.872.000,-
- *Sub Kegiatan Penilaian Dan Pentapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip, Rp. 1.784.000,- menjadi Rp. 1.784.000,-*
 - *Sub Kegiatan penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip, Rp. 2.088.000,- menjadi Rp. 2.088.000,-*
- d. Kegiatan Pencarian Arsip Statis Kabupaten / Kota Yang Dinyatakan Hilang Rp. 2.628.000,- menjadi Rp. 2.628.000,-
- *Sub Kegiatan Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA), Rp. 2.628.000,- menjadi Rp. 2.628.000,- 0,-*

- 5) PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP pagu anggaran Rp. 8.668.000,- menjadi Rp. 8.668.000,- dengan rincian :
- a. Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup di Kabupaten / Kota Rp. 8.668.000,- menjadi Rp. 8.668.000,-
- *Sub Kegiatan Penyusunan Dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup Rp. 1.100.000,- menjadi Rp. 1.100.000,-*
 - *Sub Kegiatan Penyediaan Daftar Arsip Dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip Yang bersifat Tertutup Rp. 7.568.000,- menjadi Rp. 7.568.000,-*

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHI R PERIO DE RENS TRA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIO NAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN								9.171.909.046,00	12.260.528.959,00	13.324.528.959,00	4.152.619.913,00						7.401.256.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.171.909.046,00	12.260.528.959,00	13.324.528.959,00	4.152.619.913,00							7.401.256.000,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							8.862.565.846,00	12.083.700.759,00	13.038.371.759,00	4.175.805.913,00							7.029.355.000,00	
1,	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	-				75.00 %	-	643.733.200,00	1.395.130.586,00	1.543.610.586,00	445.981.800,00							1.089.715.000,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				65 persen	-	545.813.200,00	553.204.906,00	1.502.290.586,00	956.477.386,00			-	-	-		949.495.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				1 Layanan	0 Perpustakaan	19.640.000,00	0,00	0,00	-19.640.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Manaaement)				-	3 Layanan	0,00	0,00	300.139.955,00	300.139.955,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola		100.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	

															pemerintah yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani					
	2.23.02.2. 01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/ Kota Sesuai Kewenangannya				17 Perpustakaan	17 Perpustakaan	47.927.200, 00	14.527.200,0 0	529.992.925, 00	482.065.725,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)DANA TRANSFERR KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAN YABIDANG PENDIDIKAN	-	--			10.000.000, 00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2. 01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				20 Perpustakaan	20 Perpustakaan	15.730.000, 00	15.730.000,0 0	72.210.000,0 0	56.480.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAN YABIDANG PENDIDIKAN	-	- -			30.000.000, 00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2. 01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				8 Orang	8 Orang	25.280.000, 00	8.840.000,00	20.840.000,0 0	-4.440.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAN YABIDANG PENDIDIKAN	-	- -			75.000.000, 00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2. 01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota																		

			<i>Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/ Kota Melalui Peningkatan Koleksi</i>				210 Layanan	210 Layanan	198.516.000,00	272.474.000,00	272.474.000,00	73.958.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNGGAAN BIDANG PENDIDIKAN	-	-			335.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka																		
			<i>Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan</i>				4000 Eksemplar	2000 Eksemplar	211.300.000,00	230.633.706,00	295.633.706,00	84.333.706,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGUNGGAAN BIDANG PENDIDIKAN	-	-			399.495,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																		
			<i>Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>				1 Dokumen	3 Dokumen	27.420.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	-16.420.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNGGAAN BIDANG PENDIDIKAN	-	-			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah promosi gemar membaca Persentase pengelolaan Perpustakaan tingkat Daerah di Kabupaten Kendal</i>				5 kali	5 kali 65 persen	97.920.000,00	841.925.680,00	41.320.000,00	-56.600.000,00			-	-	-		140.220,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat																		
			<i>Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan</i>				100 Lokus	100 Lokus	56.600.000,00	0,00	0,00	-56.600.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNGGAAN BIDANG PENDIDIKAN	-	-			220.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

	2.23.02.2.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				1 Layana n	0 Perpust a kaan	0,00	800.605.680, 00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFE R KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			40.000.000, 00	DINAS KEARSIP AN DAN PERPUST AKAAN
	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan				5 Perpust a kaan	5 Perpust a kaan	41.320.000, 00	41.320.000,0 0	41.320.000,0 0	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTU KAN P ENGGUN AANN YA BIDANG PENDIDI KAN	-	- -			100.000.00 0,00	DINAS KEARSIP AN DAN PERPUST AKAAN
2,	2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah				100.00 %	100.00 %	8.218.832. 646,00	10.688.570. 173,00	11.494.761. 173,00	- 2.279.192.646 ,00							5.939.640. 000,00	
	2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah				25 dokum en	25 dokum en	114.040.000 ,00	80.520.000,0 0	80.520.000,0 0	-33.520.000,00			-	- -	-		82.000.000, 00	DINAS KEARSIP AN DAN PERPUST AKAAN
	2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokum en	7 Dokum en	79.760.000, 00	10.520.000,0 0	10.520.000,0 0	-69.240.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMLAK AU (CHT)	-	- -			6.000.000,0 0	DINAS KEARSIP AN DAN PERPUST AKAAN
	2.24.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				18 Lapora n	18 Lapora n	34.280.000, 00	0,00	0,00	-34.280.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMLAK AU (CHT)	-	- -			6.000.000,0 0	DINAS KEARSIP AN DAN PERPUST AKAAN

	2.24.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	1 Laporan	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			70.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang tersusun				86 laporan	86 laporan	5.037.844.984,00	6.147.945.006,00	5.907.945.006,00	870.100.022,00			-	-	-		3.763.240.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/bulan	56 Orang/bulan	4.864.724.984,00	6.147.945.006,00	5.907.945.006,00	1.043.220.022,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			3.741.420.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	168.120.000,00	0,00	0,00	168.120.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			16.820.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				18 Laporan	18 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disusun</i>				111 dokumen	111 dokumen	55.000.000,00	0,00	100.000.000,00	45.000.000,00			-	-	-		5.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				45 Dokumen	45 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				56 Orang	56 Orang	50.000.000,00	0,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase unit kerja Internal yang terlayani</i>				95 persen	95 persen	403.770.162,00	936.215.539,00	1.052.165.639,00	648.395.477,00			-	-	-		332.500,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	33.000.000,00	23.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAK AU (CHT)	-	-			10.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	40.000.000,00	49.910.250,00	83.410.250,00	43.410.250,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAK AU (CHT)	-	-			40.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

	2.24.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	195.780.868,00	234.541.000,00	224.541.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	-			10.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	52.560.000,00	19.260.000,00	19.260.000,00	-33.300.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	-			25.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00	-5.400.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	12 Dokumen	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	-			12.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	17.950.000,00	17.950.000,00	7.950.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	-			10.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	243.710.162,00	605.380.171,00	626.070.139,00	382.359.977,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	--			200.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		

			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	10.834.250,00	10.834.250,00	5.834.250,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAK AU (CHT)	-	-			5.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah barang milik daerah yang diadakan</i>				6 unit	6 unit	290.798.000,00	289.390.000,00	464.610.496,00	173.812.496,00			-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	-		100.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				50 Unit	110 Unit	110.000.000,00	212.890.000,00	212.890.000,00	102.890.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAK AU (CHT)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			50.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				50 Unit	11 Unit	180.798.000,00	76.500.000,00	251.720.496,00	70.922.496,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAK AU (CHT)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			50.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

															akuntabel dan melayani					
	2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rutin				48 bulan	48 bulan	2.122.574.500,00	2.125.830.628,00	2.158.754.032,00	36.179.532,00			-	-	-		787.100.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	7.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-3.500.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	-			7.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	581.038.000,00	746.067.000,00	725.357.000,00	144.319.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	-			270.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0 Laporan	93.146.500,00	148.979.868,00	0,00	-93.146.500,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	-			202.400.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Lapora n	12 Lapora n	1.440.890.0 00,00	1.226.783.76 0,00	1.429.397.03 2,00	-11.492.968,00	Kab. Kendal, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM DBH CUKAI HASIL TEMBAK AU (CHT)	-	-			307.200.00 0,00	DINAS KEARSIP AN DAN PERPUST AKAAN
	2.24.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah yang terpelihara				147 unit	147 unit	194.805.000 ,00	1.108.669.00 0,00	1.730.766.00 0,00	1.535.961.000 00			-	-	-		869.800.00 0,00	DINAS KEARSIP AN DAN PERPUST AKAAN
	2.24.01.2. 09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	19 Unit	50.005.000, 00	88.269.000,0 0	161.866.000, 00	111.861.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAK AU (CHT)	-	-			50.000.000, 00	DINAS KEARSIP AN DAN PERPUST AKAAN
	2.24.01.2. 09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	5.000.000,0 0	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAK AU (CHT)	-	-			5.000.000,0 0	DINAS KEARSIP AN DAN PERPUST AKAAN
	2.24.01.2. 09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	25.000.000, 00	35.400.000,0 0	45.400.000,0 0	20.400.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAK AU (CHT)	-	-			25.000.000, 00	DINAS KEARSIP AN DAN PERPUST AKAAN
	2.24.01.2. 09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		

			<i>Jumlah Aset Tak Bervujud yang Dipelihara</i>				1 Unit	1 Unit	69.800.000,00	0,00	0,00	-69.800.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAK AU (CHT)	-	-			69.800.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				-	2 Unit	0,00	900.000.000,00	1.438.500,00	1.438.500.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAK AU (CHT)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			690.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				46 Unit	46 Unit	45.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAK AU (CHT)	-	-			30.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							309.343.200,00	176.828.200,00	286.157.200,00	23.186.000,00							371.901.000,00	

1,	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban Nasional pasal 40 dan pasal 59 Undang undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengolahan arsip secara baku				76,35 42.00 %	76,35 42.00 %	253.807.20 0,00	139.952.200 ,00	228.765.200 ,00	44.279.800,00						298.087.0 00,00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip Dinamis yang dikelola				1700 berkas	1700 berkas	103.520.000 ,00	28.205.000,0 0	65.658.000,0 0	-37.862.000,00			-	-	-	98.542.000, 00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																	
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				12000 Berkas	12000 Berkas	70.000.000, 00	4.240.000,00	22.240.000,0 0	-47.760.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	-	-	48.542.000, 00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Laporan	3 Laporan	33.520.000, 00	23.965.000,0 0	43.418.000,0 0	9.898.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	-	-	50.000.000, 00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang dikelola				1896 berkas	1896 berkas	76.907.000, 00	73.107.000,0 0	121.232.000, 00	44.325.000,00			-	-	-	35.000.000, 00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																	

			<i>Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis</i>				50 Arsip	50 Arsip	76.907.000,00	73.107.000,00	121.232.000,00	44.325.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	-			35.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	<i>Persentase sarana prasarana kearsipan</i>				37,67 persen	37,67 persen	73.380.200,00	38.640.200,00	41.875.200,00	-31.505.000,00			-	-	-		164.545.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																		
			<i>Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN</i>				10 Pengguna	10 Pengguna	35.465.000,00	4.580.000,00	6.680.000,00	-28.785.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	-			60.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota</i>				12 Laporan	12 Laporan	37.915.200,00	34.060.200,00	35.195.200,00	-2.720.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	-			104.545.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2,	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan Negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Persentase arsip statis yang dialihmediakan				6,76 91,75 %	91,75 6,76 %	43.628.000,00	28.208.000,00	48.724.000,00	6.372.000,00							50.000.000,00	

2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan				2500 berkas	2500 berkas	13.000.000,00	5.090.000,00	5.090.000,00	-7.910.000,00			-	-	-		18.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																		
		Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				1000 Arsip	1000 Arsip	3.000.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	-950.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAK AU (CHT)	-	-	-		3.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.03.2.01.0002	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun																		
		Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				2000 Berkas	2000 Berkas	10.000.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	-6.960.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAK AU (CHT)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah arsip OPD yang didampingi dalam pengelolaan arsip				2000berkas	2000berkas	20.000.000,00	16.618.000,00	37.134.000,00	17.134.000,00			-	-	-		20.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota																		
		Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Daftar	1 Daftar	15.000.000,00	13.480.000,00	33.996.000,00	18.996.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAK AU (CHT)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

	2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Arsip	1 Arsip	5.000.000,00	3.138.000,00	3.138.000,00	-1.862.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAK AU (CHT)	-	-	-		0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	<i>Jumlah arsip statis statis dan arsip hasil alih media yang dilakukan autentifikasi</i>				2000 berkas	2000 berkas	6.000.000,00	3.872.000,00	3.872.000,00	-2.128.000,00			-	-	-		12.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip																		
			<i>Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan</i>				1000 Arsip	1000 Arsip	3.000.000,00	1.784.000,00	1.784.000,00	-1.216.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAK AU (CHT)	-	-	-		2.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip																		
			<i>Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip</i>				1000 Arsip	1000 Arsip	3.000.000,00	2.088.000,00	2.088.000,00	-912.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAK AU (CHT)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	<i>Jumlah pencarian arsip yang dilaksanakan</i>				20 kali	20 kali	4.628.000,00	2.628.000,00	2.628.000,00	-2.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang																		
			<i>Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan</i>				10 Arsip	10 Arsip	4.628.000,00	0,00	0,00	-4.628.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAK AU (CHT)	-	-	-		0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

	2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)																	
3,	2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase ijin pemanfaatan arsip tertutup yang dikeluarkan				60.00 %	60.00 %	11.908.000,00	8.668.000,00	8.668.000,00	11.906.000,00						23.814.000,00	
	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah ijin pemanfaatan arsip tertutup yang dikeluarkan				1 kali	1 kali	11.908.000,00	8.668.000,00	8.668.000,00	-3.240.000,00			-	-	-	23.814.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup																	
			Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan				10 SOP	10 SOP	3.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-1.900.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAK AU (CHT)	-	-	-	13.814.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.04.2.01.0002	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup																	
			Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				1 Arsip	1 Arsip	8.908.000,00	7.568.000,00	7.568.000,00	-1.340.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAK AU (CHT)	-	-	-	10.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

BAB IV

PENUTUP

- c. Catatan penting dalam penyusunan Perubahan Renja 2024.

Output Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal adalah program prioritas yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi beserta sasarannya. Rencana Kerja Dinas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja serta umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik. Seperti pada bidang kearsipan terakomudir anggaran untuk pengelolaan arsip serta kegiatan evaluasi implementasi SRIKANDI, dan pada bidang perpustakaan rencana ada rehabilitasi lahan parkir perpustakaan sehingga menciptakan rasa aman pemustaka dalam berkunjung ke perpustakaan.

- d. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur dan memberikan pelayanan yang berkualitas serta profesional. Pencapaian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026, dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, telah disepakati dan ditetapkan dokumen perencanaan berupa Perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal Tahun 2024, serta kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Rencana Kerja sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan sekaligus sebagai bahan evaluasi

kinerja Perangkat Daerah;

2. Program, kegiatan, dan sub kegiatan selaras dengan sistem perencanaan dan penganggaran yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- e. Rencana tindaklanjut untuk pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan diprioritaskan pada pelayanan arsip dan perpustakaan sehingga memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan arsip dan memberi rasa nyaman saat berkunjung ke perpustakaan dengan merehabilitasi lahan parkir yang lebih representatif.

Kendal, 17 September 2024

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KENDAL



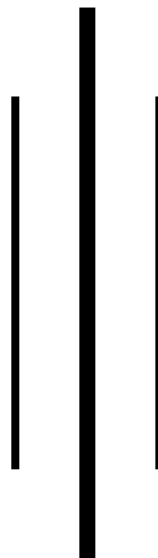
WAHYU YUSUF AKHMADI, S.STP.M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19820425 200012 1 001



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN NGAMPEL
TAHUN 2024**



KECAMATAN NGAMPEL
Jalan Sunan Ampel Km. 2 Ngampel
Telp./Fax. (0294)3689599 Kode Pos 51357

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 membawa konsekuensi logis adanya perubahan Renja Perangkat Daerah bagi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan dalam rencana program dan kegiatan Tahun 2024. Kecamatan Ngampel merupakan salah satu perangkat daerah yang mengalami perubahan dalam rencana program dan kegiatan Tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan adanya penambahan anggaran kegiatan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan.

Dasar pertimbangan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan gambaran tentang perubahan asumsi daerah meliputi: (1) Adanya pergeseran kegiatan antar Perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan; dan (2) Adanya perubahan perkembangan kondisi perekonomian yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan. Kedua pertimbangan dalam penyusunan perubahan RKPD tersebut akan dijelaskan pada uraian berikut ini.

1. Adanya pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan RKPD tahun 2024 perlu dilakukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Masih ditemukan kegiatan dalam APBD 2024 yang tidak terdapat dalam RKPD tahun 2024.
 - b. Perlu adanya penjadwalan ulang pelaksanaan beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal ini, peraturan yang dipergunakan sebagai landasan hukum, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);

13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 20).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan dalam menyusun program dan kegiatan pada perubahan APBD Tahun 2024;
- b. Memberikan acuan dalam menentukan lokasi kegiatan pada perubahan APBD Tahun 2024;
- c. Memberikan acuan dalam menyusun indikator kinerja kegiatan pada perubahan APBD Tahun 2024;
- d. Memberikan acuan dalam kelompok sasaran kegiatan pada perubahan APBD Tahun 2024;
- e. Memberikan acuan dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan pada perubahan APBD Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Pada bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan

perkiraan capaian tahun berjalan, kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah beserta dana yang dibutuhkan.

Bab IV Penutup

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Ngampel sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 selaras dengan Renja Kecamatan Ngampel Tahun 2024, namun terdapat beberapa kegiatan yang anggarannya tidak mencukupi untuk kegiatan selama satu tahun berjalan karena keterbatasan anggaran pada tahun yang bersangkutan. Untuk kegiatan tersebut, diusulkan pada perubahan anggaran Tahun 2024.

Hasil Renja Kecamatan Ngampel sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini karena semua kegiatan dapat dilaksanakan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Dari hasil evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, capaian kinerjanya adalah 42,16 %. Adapun secara rinci evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Ngampel sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

- a. Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pencapaian kinerjanya : :
 1. Pagu Anggaran : Rp. 2.244.367.601,-
Realisasi Anggaran : Rp. 1.292.859.678,-
Realisasi Anggaran (%) : 57,60%
 2. Indikator kinerja : Jumlah Orang yang Menerima
capaian keluaran Gaji dan Tunjangan ASN
(Orang/bulan)
 3. Target capaian : 17 orang
kegiatan

4. Realisasi capaian kegiatan : 14 orang
 5. Tingkat capaian kinerja (%) : 100%
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Pencapaian kinerjanya :
1. Pagu Anggaran : Rp. 130.065.000,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 58.393.000,-
 Realisasi Anggaran (%) : 44,90 %
 2. Indikator kinerja capaian keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 3. Target capaian kegiatan : 100 laporan
 4. Realisasi capaian kegiatan : 44,90 %
 5. Tingkat capaian kinerja (%) : 44,90 %
- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya, Pencapaian kinerjanya :
1. Pagu Anggaran : Rp. 20.000.000,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 0,-
 Realisasi Anggaran (%) : 0%
 2. Indikator kinerja capaian keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)
 3. Target capaian kegiatan : 2 Unit
 4. Realisasi capaian kegiatan : 0

5. Tingkat capaian kinerja : 0%
(%)
- Pemeliharaan Mebel, Pencapaian kinerjanya :
1. Pagu Anggaran : Rp. 4.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 0,-
Realisasi Anggaran (%) : 0%
 2. Indikator kinerja : Jumlah Mebel yang
capaian keluaran Dipelihara (Unit)
 3. Target capaian : 10 Unit
kegiatan
 4. Realisasi capaian : 0
kegiatan
 5. Tingkat capaian kinerja : 0%
(%)
- Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan, Pencapaian kinerjanya :
1. Pagu Anggaran : Rp. 8.378.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 0,-
Realisasi Anggaran (%) : 0%
 2. Indikator kinerja : Jumlah Dokumen Sinkronisasi
capaian keluaran Program Kerja dan Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat
yang Dilakukan oleh
Pemerintah dan Swasta di
Wilayah Kerja Kecamatan
 3. Target capaian : 1 dokumen
kegiatan
 4. Realisasi capaian : 0
kegiatan

5. Tingkat capaian kinerja : 0%
(%)
- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan 12 Dokumen Peraturan Kepala Desa, Pencapaian kinerjanya :
 1. Pagu Anggaran : Rp. 3.020.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 0,-
Realisasi Anggaran (%) : 0%
 2. Indikator kinerja : Jumlah Dokumen yang
capaian keluaran Difasilitasi dalam rangka
Penyusunan Peraturan Desa
dan Peraturan Kepala Desa
 3. Target capaian : 12 dokumen
kegiatan
 4. Realisasi capaian : 0
kegiatan
 5. Tingkat capaian kinerja : 0%
(%)
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan. Pencapaian kinerjanya :
 1. Pagu Anggaran : Rp. 21.850.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 0,-
Realisasi Anggaran (%) : 0%
 2. Indikator kinerja : Jumlah Laporan Hasil
capaian keluaran Sinergitas dengan Kepolisian
Negara Republik Indonesia,
Tentara Nasional Indonesia dan
Instansi Vertikal di Wilayah
Kecamatan
 3. Target capaian : 12 laporan
kegiatan

4. Realisasi capaian kegiatan : 0
 5. Tingkat capaian kinerja (%) : 0%
- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Pencapaian kinerjanya :
1. Pagu Anggaran : Rp. 3.820.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 0,-
Realisasi Anggaran (%) : 0%
 2. Indikator kinerja capaian keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 3. Target capaian kegiatan : 12 dokumen
 4. Realisasi capaian kegiatan : 0
 5. Tingkat capaian kinerja (%) : 0%
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Pencapaian kinerjanya :
1. Pagu Anggaran : Rp. 3.820.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 0,-
Realisasi Anggaran (%) : 0%
 2. Indikator kinerja capaian keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 3. Target capaian kegiatan : 12 dokumen
 4. Realisasi capaian : 0

kegiatan

5. Tingkat capaian kinerja : 0%
(%)

b. Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut :

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Pencapaian kinerjanya :

1. Pagu Anggaran : Rp. 14.160.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 8.361.500,-
Realisasi Anggaran (%) : 59,05 %
2. Indikator kinerja : Jumlah Paket Bahan Logistik
capaian keluaran Kantor yang Disediakan
3. Target capaian : 3 Paket
kegiatan
4. Realisasi capaian : 70 %
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Pencapaian kinerjanya :

1. Pagu Anggaran : Rp. 38.938.800,-
Realisasi Anggaran : Rp. 19.613.907,-
Realisasi Anggaran (%) : 50,37 %
2. Indikator kinerja : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
capaian keluaran Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
3. Target capaian : 12 laporan
kegiatan
4. Realisasi capaian : 50,37%
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 50,37%
(%)

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Pencapaian kinerjanya :

1. Pagu Anggaran : Rp. 103.933.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 60.341.942,-
Realisasi Anggaran (%) : 58,06 %
2. Indikator kinerja : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
capaian keluaran Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
3. Target capaian : 12 laporan
kegiatan
4. Realisasi capaian : 58,06%
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 58,06%
(%)

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pencapaian kinerjanya :

1. Pagu Anggaran : Rp. 23.800.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 13.259.131,-
Realisasi Anggaran (%) : 55,71%
2. Indikator kinerja : Jumlah unit kendaraan dinas
capaian keluaran yang dipelihara dan Jumlah
unit kendaraan dinas yang
pajaknya harus dibayar
3. Target capaian : 16 unit
kegiatan
4. Realisasi capaian : 55,71%
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 55,71%
(%)

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pencapaian kinerjanya :

1. Pagu Anggaran : Rp. 12.250.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 6.617.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 54,02 %
 2. Indikator kinerja : jumlah Peralatan dan Mesin
capaian keluaran Lainnya yang Dipelihara
 3. Target capaian : 26 unit
kegiatan
 4. Realisasi capaian : 54,02 %
kegiatan
 5. Tingkat capaian kinerja : 54,02 %
(%)
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, Pencapaian kinerja :
1. Pagu Anggaran : Rp. 3.830.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 3.330.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 86,95 %
 2. Indikator kinerja : Jumlah Laporan Pelaksanaan
capaian keluaran Nonperizinan pada Urusan
Pemerintahan
 3. Target capaian : 1 laporan
kegiatan
 4. Realisasi capaian : 86,95 %
kegiatan
 5. Tingkat capaian kinerja : 86,95 %
(%)
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, Pencapaian kinerjanya :
1. Pagu Anggaran : Rp. 900.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 900.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100 %
 2. Indikator kinerja : Jumlah desa yang melaksanakan
musrenbang

- capaian keluaran
3. Target capaian kegiatan : 12 desa
 4. Realisasi capaian kegiatan : 100 %
 5. Tingkat capaian kinerja (%) : 100 %
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, Pencapaian kinerjanya :
1. Pagu Anggaran : Rp. 5.026.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 2.804.500,-
Realisasi Anggaran (%) : 55,80%
 2. Indikator kinerja capaian keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 3. Target capaian kegiatan : 4 laporan
 4. Realisasi capaian kegiatan : 55,80 %
 5. Tingkat capaian kinerja (%) : 100 %
- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pencapaian kinerjanya :
1. Pagu Anggaran : Rp. 108.373.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 58.036.242,-
Realisasi Anggaran (%) : 53,55 %
 2. Indikator kinerja capaian keluaran : Laporan Koordinasi/Sinergi dengan hasil dengan

Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

3. Target capaian kegiatan : 12 laporan
4. Realisasi capaian kegiatan : 53,55 %
5. Tingkat capaian kinerja (%) : 53,55 %

c. Program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, pencapaian kinerjanya :

1. Pagu Anggaran : Rp. 9.864.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 6.243.200,-
Realisasi Anggaran (%) : 63,29%
2. Indikator kinerja : Jumlah Paket Komponen
capaian keluaran Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang disediakan
3. Target capaian kegiatan : 2 paket
4. Realisasi capaian kegiatan : 63,29%
5. Tingkat capaian kinerja (%) : 63,29%

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, capaian kinerja :

1. Pagu Anggaran : Rp. 20.678.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 13.176.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 63,72 %
 2. Indikator kinerja : Jumlah Paket Peralatan dan
capaian keluaran Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
 3. Target capaian : 4 paket
kegiatan
 4. Realisasi capaian : 63,72 %
kegiatan
 5. Tingkat capaian kinerja : 63,72 %
(%)
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Pencapaian kinerjanya :
1. Pagu Anggaran : Rp. 3.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 2.000.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 66,67 %
 2. Indikator kinerja : Jumlah Laporan Penyediaan
capaian keluaran Jasa Surat Menyurat
 3. Target capaian : 12 laporan
kegiatan
 4. Realisasi capaian : 66,67 %
kegiatan
 5. Tingkat capaian kinerja : 66,67 %
(%)
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Pencapaian kinerjanya :
1. Pagu Anggaran : Rp. 8.966.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 5.473.600,-
Realisasi Anggaran (%) : 61,05%
 2. Indikator kinerja : Jumlah Paket Barang Cetak
capaian keluaran dan Penggandaan yang

Disediakan

3. Target capaian kegiatan : 12 laporan
4. Realisasi capaian kegiatan : 61,05%
5. Tingkat capaian kinerja (%) : 61,05%

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

- 1 Memenuhi target : Sesuai dengan Rencana Anggaran Kas dan kebutuhan kegiatan rutin Kantor Kecamatan
- 2 Tidak memenuhi target :
 - Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN tidak tercapai disebabkan karena adanya ASN yang pensiun, kekosongan pejabat struktural dan mutasi ASN.
 - Kegiatan lain yang tidak tercapai karena dilaksanakan pada triwulan ke III dan IV, Sehingga Belum terlaksana
- 3 Melebihi target : Karena sesuai kebutuhan kegiatan rutin Kantor Kecamatan, dan penggunaan melebihi dari yang direncanakan

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi yang timbul dengan tercapainya target kinerja adalah dapat mendorong tercapainya tujuan dan sasaran Perangkat

Daerah yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan.

f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapai target kinerja yaitu :

- Evaluasi dan Penyesuaian Target

Melakukan evaluasi rutin terhadap target dan sasaran yang telah ditetapkan.

- Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran

Melakukan analisis kebutuhan yang mendalam untuk memastikan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang sebenarnya.

- Pengelolaan Risiko

Melakukan Identifikasi dan analisis risiko yang dapat menghambat pencapaian target. Melakukan pemantauan risiko secara berkala dan sesuaikan strategi mitigasi sesuai dengan perkembangan situasi.

- Partisipasi dan Kolaborasi

Dengan meningkatkan kerja sama antar-unit atau antar-bidang untuk memastikan sinergi dalam pencapaian target.

- Pengelolaan Sumber Daya Keuangan

Dengan membuat anggaran yang fleksibel untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan kondisi dan kebutuhan yang mendesak.

Dengan menerapkan kebijakan dan tindakan tersebut, diharapkan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target capaian dapat diatasi secara efektif, sehingga perencanaan dan penganggaran dapat lebih optimal dan berdampak positif bagi pencapaian tujuan strategis.

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d
Tahun 2024 Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Kegiatan Tahun 2024				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sampai TW II	Tingkat Realisasi (%)			
1		2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10=(8/4)
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG								
	0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100	100	50	50,00%	50	50	100%
	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	12	12	12	12	12	12	80%
	01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	180	180	90	50,00%	90	90	100%
	01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor	100	100	50	50,00%	50	50	100%
	01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	2	2	100,00%	2	2	50%
	01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16	4	4	100,00%	4	4	50%

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Kegiatan Tahun 2024				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sampai TW II	Tingkat Realisasi (%)			
1		2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10=(8/4)
			yang Disediakan (Paket)							
	01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	3	2	66,67%	2	2	33%
	01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8	2	2	100,00%	2	2	50%
	01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	400	100	55	55,00%	55	55	28%
	01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset yang diadakan	12	3		0,00%	0	0	0%
	01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	3		0,00%	0	0	0%
	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor	12	12		0,00%	12	12	0%
	01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	48	12		0,00%	12	12	0%
	01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	12		0,00%	12	12	0%

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sampai TW II	Tingkat Realisasi (%)			
1		2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10=(8/4)
			(laporan)							
	01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	48	12		0,00%	12	12	0%
	01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah jenis aset yang dipelihara	64	16	16	100,00%	16	16	50%
	01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas yang dipelihara dan Jumlah unit kendaraan dinas yang pajaknya harus dibayar (Unit)	64	16		0,00%	16	16	0%
	01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	40	10		0,00%	0	0	0%
01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	64	16		0,00%	16	16	0
	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	50	50		0,00%	50	50	0%

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Kegiatan Tahun 2024				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sampai TW II	Tingkat Realisasi (%)			
1		2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10=(8/4)
	02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	48	12		0,00%	12	12	0%
	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam musrenbang	50	50	48	96,00%	48	48	192%
	03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12	12		0,00%	12	12	0%
	03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang (Desa)	48	12		0,00%	12	12	0%
	03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	4	1		0,00%	1	1	0%
	03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	20	5		0,00%	5	5	0%

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Kegiatan Tahun 2024				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sampai TW II	Tingkat Realisasi (%)			
1		2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10=(8/4)
	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100	100		0,00%	100	100	90%
	04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12	12		0,00%	12	12	0%
	04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (laporan)	48	12		0,00%	12	12	0%
	04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	1		0,00%	1	1	0%
	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa tertib administrasi	100	100	0	0,00%	50	50	50%

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Kegiatan Tahun 2024				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sampai TW II	Tingkat Realisasi (%)			
1		2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10=(8/4)
	06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	48	12		0,00%	12	12	0%
	06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	48	12		0,00%	12	12	0%
	06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	48	12		0,00%	12	12	0%

2.2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 tidak memasukkan usulan dari masyarakat yang disampaikan lewat kegiatan Musrenbangcam, karena program/kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan bersifat rutin dan tugas pokok yang dilakukan bersifat koordinatif dan pembinaan. Sedangkan usulan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat bersifat fisik.

Usulan yang berasal dari masyarakat tersebut selanjutnya ditampung dalam Daftar Usulan Prioritas Kegiatan yang kemudian disampaikan dalam Musrenbangkab. Program/kegiatan yang berasal dari masyarakat tersebut diperjuangkan dan dikawal oleh Tim Kecamatan agar masuk dalam program/kegiatan prioritas di Perangkat Daerah teknis yang ada di Kabupaten Kendal.

Tabel 2.2
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kabupaten Kendal
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Ngampel

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	N	I	H	I L	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan sebagai penjabaran misi yang pertama seperti tersebut di atas, maka tujuan yang ditetapkan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngampel pada tahun 2024 yaitu untuk Meningkatkan keamanan, rasa nyaman, harmonis dan kondusivitas wilayah, Meningkatkan kemandirian desa, Meningkatkan reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Sedangkan sasaran dari program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 yaitu Meningkatkan toleransi, keamanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, Meningkatkan kualitas desa, Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja aparatur, Meningkatkan kualitas pelayanan Publik.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka Rencana Kerja dan Pendanaan yang diusulkan pada Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ngampel Tahun 2024 terdiri dari 5 program dan 10 kegiatan, dengan nominal anggaran penetapan sebesar Rp. 2.703.239.165,- berkurang Rp. 106.199.764,- sehingga menjadi Rp. 2.597.039.401,-.

Perubahan APBD Tahun 2024 di karenakan ada beberapa hal sebagai berikut :

- a. Adanya penyesuaian gaji dan tunjangan PNS, karena adanya Purna tugas dan mutasi tugas PNS.
- b. Adanya tambahan APBD tahun 2024, yang akan digunakan untuk kegiatan Sosialisasi.
- c. Ada beberapa sub kegiatan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan kantor, misalnya untuk Mencukupi Bahan

bakar minyak kendaraan dinas, kebutuhan makan minum rapat kegiatan, kebutuhan logistik kantor dan untuk kegiatan rutin lainnya.

Adapun program/ kegiatan yang diusulkan Perubahan APBD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kegiatan :

- a. Penyediaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp. 2.163.806.065,- berkurang Rp. 169.437.664,- menjadi Rp. 1.994.368.401,-
- b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp. 8.929.000,- bertambah Rp. 935.000,-. Menjadi Rp. 9.864.000,-.
- c. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp. 26.143.500,- berkurang Rp. 2.205.500,- menjadi Rp. 23.938.000,-
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan anggaran Rp. 19.745.100,- berkurang Rp. 5.585.100,- menjadi Rp. 14.160.000,-
- e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan anggaran Rp. 8.323.200,- bertambah Rp. 642.800,- menjadi Rp. 8.966.000,-
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp. 69.920.000,- bertambah Rp. 77.087.000,- menjadi Rp. 147.007.000,-
- g. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, , dengan anggaran Rp. 1.978.000,- bertambah Rp. 18.022.000,- menjadi Rp. 20.000.000,-
- h. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp. 3.000.000,- bertambah Rp. 200.000,- menjadi Rp. 3.200.000,-
- i. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan anggaran Rp. 38.938.800,- masih tetap.

- j. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor, dengan anggaran Rp. 91.873.000,- bertambah Rp. 12.060.000,- menjadi Rp. 103.933.000,-
- k. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran yang sebesar Rp. 23.800.000,- bertambah Rp. 1.750.000,- menjadi Rp. 25.550.000,-
- l. Pemeliharaan mebel, dengan anggaran yang sebesar Rp. 4.000.000,- bertambah Rp. 4.000.000,- menjadi Rp. 8.000.000,-
- m. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran yang sebesar Rp. 12.250.000,- bertambah Rp. 3.650.000,- menjadi Rp. 15.900.000,-

2) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan :

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan, dengan anggaran Rp. 5.316.000,- berkurang Rp. 1.986.000,- menjadi Rp. 3.330.000,-

3) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan :

- a. Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan di desa, dengan anggaran Rp. 4.700.000,- bertambah Rp. 3.800.000,- menjadi Rp. 900.000,-
- b. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pihak Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan, dengan anggaran Rp. 7.478.000,- bertambah Rp. 900.000,- menjadi Rp. 8.378.000,-

- c. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan dengan anggaran Rp. 23.843.500,- berkurang Rp. 18.817.500,- menjadi Rp. 5.026.000,-.

4) PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kegiatan :

- a. Sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, tantara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan dengan anggaran Rp. 5.690.000 bertambah Rp. 16.160.000,- menjadi Rp. 21.850.000,-.
- b. Koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan anggaran Rp. 101.475.000,- bertambah Rp. 6.898.000,- menjadi Rp. 108.373.000,-.

5) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Kegiatan :

- a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, dengan anggaran yang sebesar Rp. 5.210.000,- berkurang Rp. 4.590.000,-, menjadi Rp. 620.000,-
- b. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dengan anggaran Rp. 5.810.000,- berkurang Rp. 4.390.000,- menjadi Rp. 1.420.000,-
- c. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayaan aset desa, dengan anggaran Rp. 5.810.000,- bertambah Rp. 27.507.200,- menjadi Rp. 33.317.200,-

Adapun Rincian Program dan Kegiatan Kecamatan Ngampel Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Ngampel Tahun 2024 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Perubahan Renja dilakukan sesuai dengan ketersediaan anggaran Pemerintah Kabupaten Kendal. Dalam pemilihan program dan kegiatan pada perubahan Renja 2024 bersifat prioritas dan mendesak untuk dipenuhi dalam perubahan APBD 2024 dan tetap berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ngampel ini didasarkan pada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024, serta Rencana Strategis Kecamatan Ngampel Tahun 2021 – 2026. Renja sebagaimana dimaksud merupakan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Kecamatan Ngampel Tahun 2024, setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA – PPAS), guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kendal.

Demikian untuk menjadikan maklum dan apabila dalam penyusunan Renja ini masih banyak kekurangan, kami mohon kritik dan saran untuk perbaikan di tahun yang akan datang.

Kendal, 2024

CAMAT NGAMPEL,

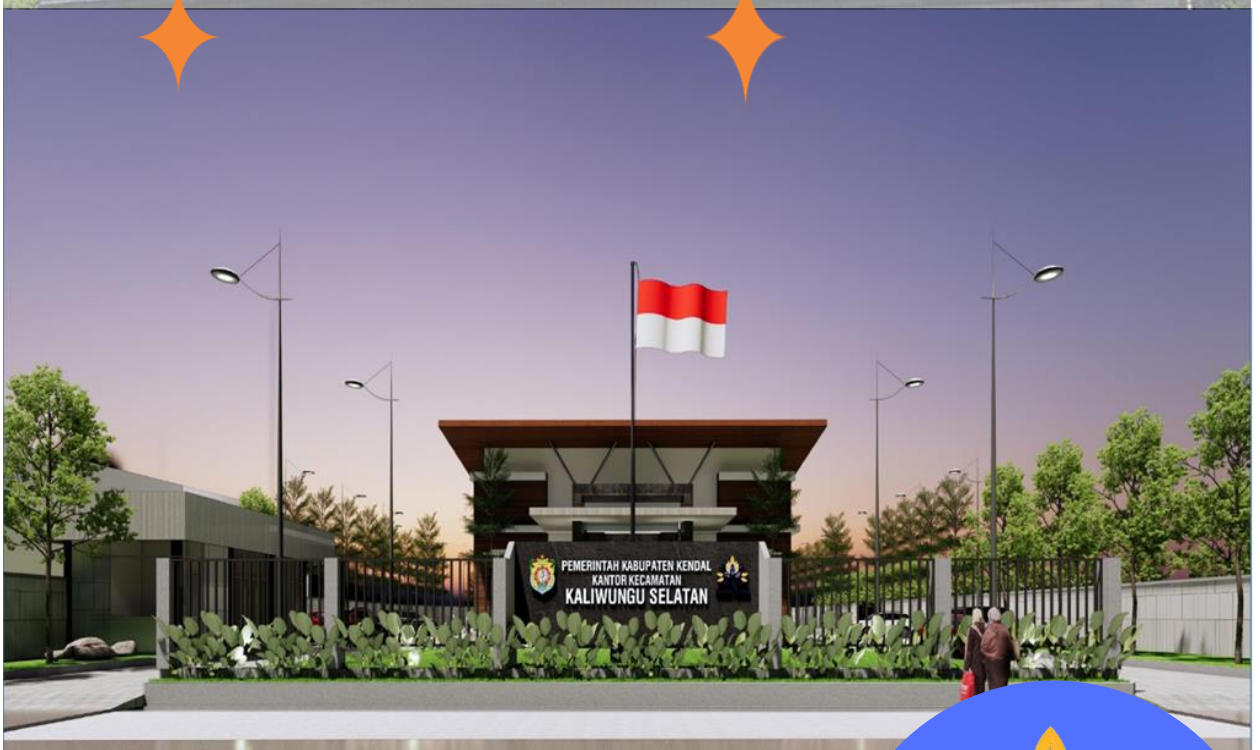
Drs. KURNIAWAN BAGUS SAMODRO, M.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19670904 199403 1 008



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024



Jl. PANGERAN DJUMINAH KM. 6 DARUPONO

e.mail : kec.kalsel@kendalkab.go.id website :
www.kendalkab.go.id



KATA PENGANTAR

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tidak dapat terakomodir dalam APBD Penetapan Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Adapun untuk Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, Perubahan RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah disebabkan adanya kegiatan yang tidak dapat terakomodir pada APBD Penetapan serta adanya penggeseran terhadap anggaran yang dimungkinkan tidak terserap ke anggaran yang benar-benar diperlukan untuk kebutuhan rutin.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan ini diharapkan benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif kegiatan Kecamatan Kaliwungu Selatan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Kami menyadari bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu masukan, saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan sehingga penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan ke depan semakin lebih baik.

Kendal,

2024

CAMAT KALIWUNGU SELATAN



SUPRIYANTO, S.TP., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19740218 200312 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum..... 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 6

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Renstra Perangkat Daerah 6

2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 19

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 20

BAB I V PENUTUP 31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2024 membawa konsekuensi logis adanya perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah bagi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan dalam rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024. Kecamatan Kaliwungu Selatan merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mengalami perubahan dalam rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan adanya pendanaan kegiatan yang tidak dapat terakomodir serta adanya penggeseran terhadap anggaran yang dimungkinkan tidak terserap ke anggaran yang benar-benar diperlukan untuk kebutuhan rutin sehingga menjadikan di beberapa kegiatan dimungkinkan tidak dapat dilaksanakan pada APBD Tahun 2024.

Dasar pertimbangan perubahan RKPD dengan gambaran tentang perubahan asumsi daerah yaitu : Adanya pergeseran kegiatan dan pagu anggaran, perubahan target kinerja dan pagu kegiatan, dalam penyusunan perubahan RKPD tersebut akan dijelaskan pada uraian berikut ini.

1. Adanya pergeseran kegiatan dan pagu anggaran, perubahan target kinerja dan pagu kegiatan. Perubahan RKPD tahun 2024 perlu dilakukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Perubahan rincian belanja pada Penetapan dengan DPA 2024. Dalam perubahan APBD 2024 hal tersebut dapat diidentifikasi sehingga perlu diusulkan perubahan.
 - b. Perlu adanya pergeseran beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
 - a. Keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran lebih tahun anggaran tahun berjalan;
 - b. Pergeseran pagu kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan.
 - c. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

- d. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- e. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Perundang - undangan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Kaliwungu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2006 Seri D No. 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 20).

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2024 disusun dengan maksud :

- a. Merupakan suatu dokumen perubahan perencanaan kinerja dan menjadi pedoman dalam merencanakan perubahan anggaran untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja;
- b. Merupakan tolok ukur bagi Kecamatan Kaliwungu Selatan dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja Kecamatan Lumbir setiap tahun berdasarkan capaian target yang telah ditetapkan;
- c. Merupakan acuan/pedoman arah bagi Kecamatan Kaliwungu Selatan dalam mencapai sasaran, keluaran dan dampak terhadap kinerja yang akan dilaksanakan agar target indikator program yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik;
- d. Merupakan gambaran terhadap kinerja Kecamatan Kaliwungu Selatan yang efektif, berkelanjutan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahunan sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Kaliwungu Selatan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal;
- b. Sebagai dasar dan pedoman untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Kaliwungu Selatan dan RPJMD Kabupaten Kendal di tahun 2024;
- c. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di tahun 2024 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kewilayahan dan laporan kinerja;
- d. Sebagai dasar atau acuan bagi Kecamatan Kaliwungu Selatan dalam pengusulan dan penetapan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaannya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disajikan, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dan pendanaan Perangkat Daerah.

BAB IV Penutup

Memuat uraian penutup, berupa catatan penting yang perlumendapatkan perhatian dalam pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II ada yang tidak memenuhi target kinerja, ada yang telah memenuhi target kinerja. ada juga yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Namun secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan banyak kegiatan/sub kegiatan dapat terlaksana dan memenuhi output yang diharapkan.

Pencapaian Kinerja sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II dan Renstra Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Kaliwungu Selatan selama tahun 2024, tahun berjalan serta perkiraan target anggaran tahun 2024. Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Triwulan II Tahun 2024 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Triwulan II Tahun 2024 telah dilaksanakan dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 didasarkan pada data yang ada pada Kecamatan Kaliwungu Selatan antara lain:

1. Realisasi Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi targetkinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah ; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2024 Kecamatan Kaliwungu Selatan, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan dan Pencapaian Rencana Strategis Kecamatan Kaliwungu Selatan sampai dengan triwulan ke-3 tahun 2024 dapat dilihat bahwa :

1. Indikator Kinerja Utama yang sudah tercapai :

Sasaran pada Rencana Kerja Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2024 adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator sasaran yaitu :

1. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
2. Meningkatkan Nilai SAKIP;

Sejalan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal tersebut, tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target	Realisasi Capaian	Analisis
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	92	92,93	
2.	Nilai SAKIP	-	-	72	-	

- a. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sampai dengan triwulan 2024 dengan skor 92,93 dari target 92;
 - b. Nilai SAKIP sampai dengan triwulan 2024, masih kosong karena nilai dari Inapektorat belum keluar.
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya Indikator Kinerja dari beberapa program / kegiatan pada tahun 2024 diantaranya adalah :
 - a. Ada beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang belum direalisasikan atau dilaksanakan sampai dengan triwulan II.
 - b. Ada beberapa kegiatan yang target pencapaiannya ditetapkan terlalu tinggi di awal tahun.
 - c. Pada waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, ternyata berbarengan dengan kegiatan-kegiatan dari OPD kabupaten sehingga pencapaian target kecamatan terhambat;
 - d. Adanya gagal tender pada belanja modal pembangunan gedung kantor, prosesnya diulangi lagi dari awal sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda (mundur).
 - e. Keterbatasan kualitaas sumber daya manusia yang ada.
3. Faktor-faktor pendukung tercapainya Indikator Kinerja dari beberapa program / kegiatan pada tahun 2024 diantaranya adalah :
 - a. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan sudah dilakukan secara tepat;
 - b. Penyusunan administrasi keuangan dapat selesai tepat waktu;
 - c. Personil yang melaksanakan kegiatan telah siap tepat waktu;

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah diantaranya adalah :
 - a. Adanya Indikator Kinerja dari beberapa program / kegiatan tidak tercapainya pada triwulan II tahun 2024, apabila dapat dicapai pada triwulan III dan triwulan IV maka tidak akan berpengaruh pada capaian program Renstra Perangkat Daerah;
 - b. Apabila Indikator Kinerja dari beberapa program / kegiatan tidak tercapainya pada triwulan II dan tidak tercapai pada triwulan III dan triwulan IV, maka akan berpengaruh pada capaian program Renstra Perangkat Daerah;
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan adalah :
 - a. Menyusun ulang pelaksanaan rencana kegiatan/sub kegiatan yang tidak tercapai di Semester I ke Semester II tahun 2024;
 - b. Merencanakan kembali kegiatan/sub kegiatan yang tidak tercapai sampai dengan triwulan II dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan tahun 2024;
 - c. Menyusun kembali skala prioritas kegiatan/sub kegiatan mana yang benar-benar diperlukan dan harus dilakukan dan kegiatan mana yang tidak perlu atau dihapus saja;
 - d. Menambah alokasi anggaran untuk kegiatan/sub kegiatan prioritas dan mengurangi alokasi anggaran untuk kegiatan/sub kegiatan yang kurang prioritas;

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 6.536.282.904,-- dengan 5 program, 11 kegiatan dan 27 sub kegiatan. Dari jumlah anggaran tersebut pada Semester II sudah terealisasi sebesar Rp 1.141.727.754,-- dengan capaian kinerja fisik sebesar 41,85% dan capaian kinerja keuangan sebesar 17,47 % Dengan penyerapan anggaran terendah dan tertinggi yaitu pada kegiatan :

- a. Penyerapan terendah (serapan anggaran masih 0%) pada sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 4) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

- 5) Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- 6) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- 7) Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan

Dari sub kegiatan yang serapan anggarannya masih 0% karena anggaran kegiatan tersebut akan di laksanakan di Semester II.

- b. Penyerapan tertinggi pada sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa sebesar 94,37%.

Tabel 2.1
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
 Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kaliwungu Selatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7					UNSUR KEWILAYAHAN		100	100	41,85	41,85	100	100	60
7	01				KECAMATAN		100	100	41,85	41,85	100	100	60
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah (%)	100	100	50	50	100	100	60

7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah (Persen)	100	100	50	50	100	100	60
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	12	6	50	12	12	60
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	6	50	12	12	60
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100	100	0	0	-	-	10
7	01	01	2.05	01	Penyediaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	0	0	-	-	10
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor (Persen)	100	100	50	50	100	100	60
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	2	20	10	10	60

7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	6	50	12	12	60
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	12	2	16,67	12	12	60
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	6	50	12	12	60
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	5	41,67	12	12	60
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	0	0	12	12	60
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	6	50	12	12	60
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan barang milik daerah (Unit)	3	3	1	15	7	7	65

7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	0	0	6	6	65
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1	15	1	1	45
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor (Bulan)	12	12	6	50	12	12	60
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	6	50	12	12	60
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	6	50	12	12	60
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	6	50	12	12	60
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan barang milik daerah (Unit)	14	14	4	28,57	14	14	60

7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan (Unit)	14	14	4	28,57	14	14	60
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14	14	2	14,29	14	14	60
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	12	5	41,67	12	12	60
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	1	0	10	1	1	60
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	6	6	3	50	6	6	60
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan (%)	100	100	50	50	100	100	60

7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan (Kegiatan)	4	4	2	50	4	4	60
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan	12	12	6	50	12	12	60
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD (%)	35	35	35	100	33,12	100	35
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa (Desa)	8	8	5	62,50	8	8	60
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga)	8	8	5	62,50	8	8	60
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	12	12	6	50	12	12	60

						Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)								
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani (%)	100	100	50	50	100	100	60
7	01	04	2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan (Kali)	12	12	6	50	12	12	60
7	01	04	2.01	01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	6	50	12	12	60
7	01	04	2.02			Koordinasi Upaya Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan (Kali)	12	12	6	50	12	12	60
7	01	04	2.02	01		Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan	12	12	6	50	12	12	60

						dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)							
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu (%)	100	100	50	50	100	100	60
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemerintahan desa (Persen)	100	100	50	50	100	100	60
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	8	8	5	62,50	8	8	60
7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan yang Difasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan (Laporan)	8	8	5	62,50	8	8	60

2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2024 tidak memasukkan usulan dari masyarakat yang disampaikan lewat kegiatan Musrenbangcam, karena program/kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan bersifat rutin dan tugas pokok yang dilakukan bersifat koordinatif dan pembinaan. Sedangkan usulan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat bersifat fisik.

Usulan yang berasal dari masyarakat tersebut selanjutnya ditampung dalam Daftar Usulan Prioritas Kegiatan yang kemudian disampaikan dalam Musrenbangkab. Program/kegiatan yang berasal dari masyarakat tersebut diperjuangkan dan dikawal oleh Tim Kecamatan agar masuk dalam program/kegiatan prioritas di Perangkat Daerah teknis terkait yang ada di Kabupaten Kendal.

Tabel 2.2
Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kaliwungu Selatan

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume (Rp)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
		N I H I L			

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan dan pendanaan pada Tahun 2024 ada beberapa perubahan pada kegiatan yang membutuhkan tambahan anggaran pada Perubahan Anggaran Tahun 2024. Perubahan terutama hanya terjadi pada penggeseran terhadap anggaran yang dimungkinkan tidak terserap ke anggaran yang benar-benar diperlukan untuk kebutuhan rutin. Program dan Kegiatan yang diusulkan pada bahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, untuk belanja pembayaran gaji dan tunjangan PNS;
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, untuk belanja pembayaran honorarium peangggung jawab pengelola keuangan;

1.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, untuk belanja makanan dan minuman harian pegawai;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, untuk belanja barang cetak dan penggandaan;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, untuk belanja bahan bakar minyak, belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas/rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah;

1.3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, untuk belanja pengadaan sound system dan alat pemadam api ringan (APAR);
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, untuk belanja pengadaan pembangunan gedung kantor, talud, paving dan penataan lahan;

1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, untuk belanja pembayaran tagihan telepon/internet, tagihan air dan tagihan listrik/token listrik;

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, untuk belanja pemeliharaan computer dan printer;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, untuk belanja pemeliharaan gedung berupa pengadaan kelengkapan memenuhi persyaratan SLF bangunan gedung dan pemindahan perlengkapan kantor dari gudang di Desa Magelung ke kantor Desa Darupono.

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan :

2.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, untuk belanja aktivitas seleksi MTQ tingkat kecamatan, pengiriman peserta MTQ tingkat kabupaten, rakerwil PKK, pembinaan TP PKK Desa, mengikuti Pekan Raya Kendal dan Latihan Paskibra.

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan :

3.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, untuk belanja aktivitas pembinaan linmas desa dalam rangka menghadapi Pilkada serentak tahun 2024;

3.2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk belanja pembayaran honorarium Tenaga Penunjang Kegiatan (Linmas Kecamatan).

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan :

4.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, untuk belanja aktivitas fasilitasi penyusunan APBDes 2025, fasilitasi penyusunan Perubahan APBDes 2024, fasilitasi penyusunan SPJ pengelolaan keuangan desa, fasilitasi penatausahaan dalam siskeudes, pelaporan-pelaporan dan OMSPAM, sosialisasi PBB, monev DD/ADD, serta sosialisasi mitigasi konflik sosial;

Adapun Rincian Program dan Kegiatan Kecamatan Kaliwungu Selatan pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah ini :

TABEL 3.1 PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN PADA PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
7					UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	01				KECAMATAN										6.536.282.904	6.313.106.904			6.412.527.928				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										6.394.195.804	6.152.478.804			6,331,720,828				
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2.037.241.804	1.737.241.804			1.913,486,828				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			15 orang/Bulan	15 orang/Bulan			1.950.961.804	1.650.961.804	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15 orang/Bulan	1.827.206.828	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12 dokumen	12 dokumen			86.280.000	86.280.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 dokumen	86.280.000	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0			0				

7	01	01	2.06	01	Penyediaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			15 Paket	15 Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15 paket	0
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										162.760.000	190.043.000					179,710,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			10 Paket	10 Paket			3.084.000	3.084.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10 paket	4,500,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			24 Paket	24 Paket			20.000.000	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 paket	20,000,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6 Paket	6 Paket			3.000.000	3.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 paket	3,000,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Kasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Capaian Kinerja		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	

7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Paket	12 Paket			3.270.000	3.270.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3.270,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Paket	12 Paket			12.000.000	12.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12,000,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Laporan	12 Laporan			121.406.000	148.689.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				136,940,000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									4.000.000.000	4.031.000.000					4,160,000,000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					2 Unit	7 Unit			0	31.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				60.000.000

7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dibangun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Unit	1 Unit			4.000.000.000	4.000.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,000,000,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									134.594.000	134.594.000					109,000,000
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Laporan	12 Laporan			2.000.000	2.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Kasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolak Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah			
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Laporan	12 Laporan			68.274.000	68.274.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	71,424,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Laporan	12 Laporan			64.320.000	64.320.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				56,100,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								59.600.000	59.600.000				129,524,000				

7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			16 Unit	16 Unit			25.000.000	25.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			19 unit	25,000,000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			14 Unit	14 Unit			6.600.000	6.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			19 unit	6,600,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			14 Unit	14 Unit			4.000.000	4.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10 unit	4,000,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung dan bangunan yang dipelihara/direhabilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3 Unit	1 Unit			20.000.000	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 unit	20,000,000
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6 Unit	6 Unit			4.000.000	4.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10 unit	4,000,000

Urusan/ Bidang	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024	Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
-------------------	-------------------	--------------------	---------	-----------------------------------

Kode				Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan														Penting				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Kasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolok Ukur	Target	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										7.244.000	7.244.000				7,244,000			
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										7.244.000	7.244.000				7,244,000			
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Non Usaha yang Dilimpahkan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Dokumen	12 Dokumen		7.244.000	7.244.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	7,244,000	
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										32.849.000	32.849.000				32,849,000			
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										32.849.000	32.849.000				32,849,000			
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			8 Desa	8 Desa		8.430.000	8.430.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Lembaga	8,430,000		
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Laporan	12 Laporan		24.419.000	24.419.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	24,419,000		

7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								101.810.000	101.810.000					89,930,000
7	01	04	2.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum								7.130.000	7.130.000					7,130,000
7	01	04	2.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Laporan	12 Laporan	7.130.000	7.130.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	7,130,000
7	04	12	0.01		Koordinasi Upaya Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daeah								94.680.000	94.680.000					82,800,000

7	01	04	2.02	01	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Laporan	12 Laporan	94.680.000	94.680.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	82,800,000
---	----	----	------	----	---	--	--	--	--	--	------------	------------	------------	------------	------------------------------	--	--	------------	------------

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catat an Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	kasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					

701	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											184.100	18.725.100					42,000,000
701	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											184.100	18.725.100					184,100
701	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			8 Dokumen	8 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8 Dokumen	20.000.000
701	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan PendaayagunaanAset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaayagunaan Aset Desa		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			8 Dokumen	8 Dokumen			56.000	18.597.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8 Dokumen	60.560,000
701	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Laporan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			8 Laporan	8 Laporan			128.100	128.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8 Laporan	25.128,100
701	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggara n Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			8 Dokumen	8 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8 Dokumen	50.000.000
TOTAL														6.536.282.904	6.313.106.904					7,816,000,000	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran Kecamatan Kaliwungu Selatan beserta indikatornya, penyesuaian program dan kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif program / kegiatan. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan sebelum disahkan menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun Anggaran 2024.

Untuk itu, perlu dukungan dari semua pihak terutama jajaran aparatur Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal agar tantangan dan problema yang ada dalam pelaksanaan tugas diberbagai bidang (pendayagunaan sumber daya aparatur) dapat dihadapi secara bersinergi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2024 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kaliwungu Selatan pada Tahun Anggaran 2024. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan sesuai dengan ketersediaan anggaran Pemerintah Kabupaten Kendal. Dalam pemilihan program dan kegiatan pada Renja Perubahan 2024 bersifat prioritas dan mendesak untuk dipenuhi dalam perubahan APBD 2024 dan tetap berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku.

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional.

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2021-2026 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2024 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerja sama dan koordinasi antara sekretariat dan seksi.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasil-hasil yang telah dilaksanakan.
3. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kaliwungu Selatan 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan OPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kendal.
4. Dalam Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2024 berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya antara lain : RPJMD, Renstra Kabupaten, RKPD Kabupaten, dan Renstra Kecamatan Kaliwungu Selatan.
5. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2024 harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan/kegiatan Kecamatan Kaliwungu Selatan tahun 2024 setelah adanya Perubahan Anggaran.

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan / kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodir di dalam kebijakan tersebut. Dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasyarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan,

2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggungjawab tentang penyelenggaraan pemerintahan.
3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan.
4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks.
5. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan.
6. Dalam sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD yang membawahi Perencanaan (Baperlitbang) agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.

Kendal, 2024

CAMAT KALIWUNGU SELATAN



SUPRIYANTO, S.IP., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19740218 200312 1 006



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 050/ 73 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2024 sehingga dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. Ketua bertugas :

a. memimpin segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2024 dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2024;

b. mengoordinir segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2024 dalam pelaksanaan, pengendalian, *monitoring* seluruh kegiatan penyusunan Rencana Kerja

Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan

- c. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2024.

2. Sekretaris bertugas :

- a. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan dan penatausahaan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
- b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2024.

3. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan bertugas :

- a. mengumpulkan data dan informasi bidang kesekretariatan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
- b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2024.

4. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan bertugas :

- a. mengumpulkan data dan informasi bidang pemerintahan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
- b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2024.

5. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Ketenteraman dan Ketertiban bertugas :

- a. mengumpulkan data dan informasi bidang ketenteraman dan ketertiban dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
- b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2024.

6. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat bertugas :

- a. mengumpulkan data dan informasi bidang pemberdayaan masyarakat dalam rangka menyusun Rencana Kerja

Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan

- b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2024.
7. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Umum bertugas :
- a. mengumpulkan data dan informasi bidang pelayanan umum dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2024.
8. Anggota Kelompok Kerja bertugas membantu tugas Koordinator Kelompok Kerja masing-masing.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Sekretaris, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Ketenteraman dan Ketertiban, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Umum dan Anggota Kelompok Kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 7 Pebrvari 2023

BUPATI KENDAL



DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Kepala BKAD Kabupaten Kendal;
 3. Segenap Anggota Tim yang bersangkutan;
 4. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 050/73/2023

TANGGAL : 7 Pebrvari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Kaliwungu Selatan	Ketua	
2.	Sekretaris Kecamatan Kaliwungu Selatan	Sekretaris	
3.	Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan		
	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Kaliwungu Selatan	Koordinator Kelompok Kerja	
	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Kaliwungu Selatan	Anggota	
	Pelaksana pada Kecamatan Kaliwungu Selatan	Anggota	1. Agus Budi Prasetyo, S.E.; 2. Eriyanto Budi Purnomo; dan 3. Annisa Rohmawati, A.Md.
4.	Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan		
	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Kaliwungu Selatan	Koordinator Kelompok Kerja	
	Pelaksana pada Kecamatan Kaliwungu Selatan	Anggota	- Mukhidin.
5.	Kelompok Kerja Bidang Ketenteraman dan Ketertiban		
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kecamatan Kaliwungu Selatan	Koordinator Kelompok Kerja	
	Pelaksana pada Kecamatan Kaliwungu Selatan	Anggota	- Ira Noviana.

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
6.	Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Kaliwungu Selatan	Koordinator Kelompok Kerja	
	Pelaksana pada Kecamatan Kaliwungu Selatan	Anggota	- Sutami Rahayu, S.E.
7.	Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Umum		
	Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kecamatan Kaliwungu Selatan	Koordinator Kelompok Kerja	
	Pelaksana pada Kecamatan Kaliwungu Selatan	Anggota	- Raesar Satwika, A.Md.

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO



PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KENDAL**

Jl. Soekarno - Hatta No. 193 Kendal 51313 Telp. / Fax. (0294) 384353
e-mail: Dinas Kominfo@kendalkab.go.id

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) merupakan acuan perencanaan kegiatan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per-tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 40 Tahun 2020.

Dalam pelaksanaannya terdapat perubahan-perubahan yang diperlukan untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan. Untuk itu perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 agar dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pada anggaran perubahan Tahun 2024.

Perubahan Renja Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 ini diharapkan dapat benar-benar menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif kegiatan Dinas KOMunikasi dan Informatika pada perubahan anggaran tahun 2024.

Kendal,

2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KENDAL,



ARDHI PRASETIYO, S.STP,MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19810925 200012 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 dan Renstra Perangkat Daerah	8
2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	42
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	43
BAB IV PENUTUP.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal.....	24
Tabel 2.2. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Kendal	42
Tabel 3.1. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2024.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini mengacu pada RKPD, Renstra PD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perangkat Daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada RKPD. Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja Perangkat Daerah, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam Renja Perangkat

Daerah dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Renja PD adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pada tahun 2024 dilakukan Perubahan Renja Dinas Kominfo Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Adapun alasan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 antara lain :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. Adanya penambahan dan pengurangan kegiatan;
- c. Adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

Perubahan Renja Dinas Kominfo ini diharapkan dapat benar-benar dapat menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disesuaikan sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan rancangan Perubahan Renja SKPD pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal mengacu pada peraturan-peraturan yang ada, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor

12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran

Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 20).

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2024 disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja SKPD yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Kominfo tahun 2024 adalah:

- a. menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Tahun 2024;
- b. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- c. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah.

Perubahan Renja Dinas Kominfo disusun dengan tujuan sebagai pedoman penyusunan perencanaan Dinas Kominfo di triwulan IV tahun 2024 mulai dari penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Dinas Kominfo 2024 sampai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Kominfo Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menampilkan usulan rencana kegiatan dan program serta pagu indikatif yang akan dilaksanakan pada anggaran perubahan tahun 2024.

BAB IV. Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 dan Renstra Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal telah melaksanakan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2024 dengan mengampu program-program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Evaluasi terhadap hasil Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal memuat tentang evaluasi pencapaian masing - masing program, kegiatan dan sub kegiatan di tahun 2024 sampai dengan Triwulan II. Dibawah ini akan dijelaskan pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan oleh masing-masing program kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal sampai dengan Triwulan II Tahun 2024. Alokasi anggaran penetapan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebesar Rp. 19.943.490.679,- dengan penyerapan anggaran pada Triwulan II

sebesar Rp 5.704.484.552,- atau 28,60 % . Dengan realisasi fisik mencapai 28,78% dari keseluruhan pelaksanaan kegiatan.

Realisasi Program/ Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

Terdapatnya beberapa rencana kegiatan yang belum memenuhi target kinerja sampai dengan tahun 2024 Triwulan II, hal itu dikarenakan pengefektifan dan pengefisienan kebutuhan dan pergeseran rencana pelaksanaan kegiatan. Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan di Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja Program :

- Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah pada triwulan II, realisasi 49,50% dari target 100% (tingkat realisasi baru tercapai sebesar 49,50%) karena realisasi pada beberapa indikator kinerja kegiatan belum mencapai target.

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja :

- Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran & laporan evaluasi kinerja Dinas Kominfo tepat waktu s.d triwulan II, realisasi 63,33% dari target 100% (tingkat realisasi baru tercapai sebesar 63,33%), karena ada beberapa dokumen perencanaan, penganggaran maupun evaluasi belum selesai disusun. Koordinasi antar bidang dan instansi terkait terus

dilakukan untuk mendorong percepatan penyusunan dokumen sesuai dengan jadwal.

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja :

- Persentase pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggung jawaban keuangan Dinas Kominfo sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku s.d triwulan II, realisasi 77,53% dari target 100% (tingkat realisasi baru tercapai sebesar 77,53%), hal ini karena merupakan kegiatan penyediaan dalam satu tahun. Ketelitian dan ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan serta pengajuan gaji dan tunjangan ASN dibutuhkan untuk mendorong percepatan penyusunan dokumen sesuai dengan jadwal.

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Kinerja :

- Persentase peningkatan disiplin aparatur Dinas Kominfo dalam berpakaian dinas s.d triwulan II, realisasi 0% dari target 100% (tingkat realisasi baru tercapai sebesar 0%), hal ini karena tidak ada pengadaan pakaian dinas dan pelaksanaan sub kegiatan sosialisasi perundang-undangan direncanakan pada triwulan III dan IV. Koordinasi dengan instansi terkait secara intens dilakukan untuk penentuan jadwal kegiatan.

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja :

- Persentase pengadaan barang Dinas Kominfo sesuai rencana kebutuhan s.d triwulan II, realisasi 51,85% dari

target 100% (tingkat realisasi baru tercapai sebesar 51,85%), hal ini karena menunggu ijin dari Bupati terkait pembelian barang non TKDN. Koordinasi intens dengan ajudan Bupati dilakukan untuk mendorong percepatan penerbitan ijin.

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kinerja :

- Persentase layanan administrasi umum internal Dinas Kominfo s.d triwulan II, realisasi 51,63% dari target 100% (tingkat realisasi baru tercapai sebesar 51,63%), hal ini karena merupakan kegiatan dalam satu tahun. Komitmen semua pihak terkait dapat mendorong pencapaian target kinerja perangkat daerah. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD tidak dilaksanakan berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi terkait.

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja :

- Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Kominfo s.d triwulan II, realisasi 50% dari target 100% (tingkat realisasi baru tercapai sebesar 50%), hal ini karena merupakan kegiatan dalam satu tahun. Komitmen semua pihak terkait dapat mendorong pencapaian target kinerja perangkat daerah.

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja :

- Persentase pemeliharaan barang milik Dinas Kominfo s.d triwulan II, realisasi 52,13% dari target 100% (tingkat

realisasi tercapai sebesar 52,13%), hal ini karena merupakan penyediaan dalam satu tahun dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor direncanakan pada perubahan karena dibutuhkan tambahan anggaran untuk rehabilitasi gedung. Komitmen semua pihak terkait dapat mendorong pencapaian target kinerja perangkat daerah.

B. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Indikator Kinerja Program :

- Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah (kumulatif) s.d triwulan II, realisasi 0% dari target 72% (tingkat realisasi baru tercapai sebesar 0%) karena survey dilaksanakan pada triwulan III.

***Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota***

Indikator Kinerja :

- Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan s.d triwulan II, realisasi 50% dari target 67% (tingkat realisasi sebesar 74,63%), hal ini dikarenakan kegiatan diseminasi dan layanan informasi publik belum seluruhnya terlaksana dan direncanakan pada triwulan III dan IV. Komitmen semua pihak terkait dapat mendorong pencapaian target kinerja perangkat daerah.

C. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Indikator Kinerja Program :

- Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo s.d triwulan II, realisasi 62,38% dari target 65% (tingkat realisasi tercapai sebesar 95,97%) karena realisasi pada beberapa indikator kinerja kegiatan belum mencapai target.

Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja :

- Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo s.d triwulan II, realisasi 53,57% dari target 65% (tingkat realisasi sebesar 82,42%), hal ini dikarenakan keterbatasan peralatan jaringan. Penambahan anggaran untuk pembelian dan pemeliharaan peralatan jaringan diperlukan untuk mendorong capaian kinerja.

Kegiatan : Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja :

- Persentase layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah s.d triwulan II, realisasi 0,02% dari target 0,03% (tingkat realisasi sebesar 66,67%), hal ini dikarenakan integrasi masih tergantung pada pengembang layanan/aplikasi masing-masing instansi. Koordinasi dengan OPD dan pengembang aplikasi terkait dapat mendorong pencapaian target kinerja perangkat daerah.

D. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

Indikator Kinerja Program :

- Persentase ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang dirilis/ diunggah Perangkat Daerah ke portal data kendal s.d triwulan II, realisasi 20,67% dari target 100% (tingkat realisasi baru tercapai sebesar 20,67%) karena masih dalam proses validasi oleh walidata.

Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja :

- Persentase data yang dapat berbagi pakai s.d triwulan II, realisasi 21,75% dari target 95% (tingkat realisasi sebesar 22,89%) hal ini dikarenakan portal data yang dimiliki belum terintegrasi dengan aplikasi milik produsen data, sehingga perlu penambahan anggaran untuk pengembangan sistem informasi yang terintegrasi.

Realisasi Program/ Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja sampai dengan tahun 2024 Triwulan II adalah :

A. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja :

- Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar s.d triwulan II, realisasi 100% dari target 100% (tingkat realisasi sebesar 100%). Komitmen semua pihak mendorong ketercapaian target kinerja.

Kegiatan : Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja :

- Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan s.d triwulan II, realisasi 100% dari target 100% (tingkat realisasi sebesar 100%). Komitmen semua pihak mendorong ketercapaian target kinerja.
- Persentase Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik s.d triwulan II, realisasi 100% dari target 100% (tingkat realisasi sebesar 100%). Komitmen semua pihak mendorong ketercapaian target kinerja.

B. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Indikator Kinerja Program :

- Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi s.d triwulan II, realisasi 50,15% dari target 50,15% (tingkat realisasi sebesar 100%). Target sudah terpenuhi karena realisasi tahun sebelumnya sudah melebihi target.

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja :

- Persentase komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten s.d triwulan II, realisasi 100% dari target 100%

(tingkat realisasi sebesar 100%). Komitmen semua pihak mendorong ketercapaian target kinerja.

C. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja :

- Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah s.d triwulan II, realisasi 100% dari target 100% (tingkat realisasi sebesar 100%). Komitmen semua pihak mendorong ketercapaian target kinerja.
- Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah s.d triwulan II, realisasi 100% dari target 100% (tingkat realisasi sebesar 100%). Komitmen semua pihak mendorong ketercapaian target kinerja.
- Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai Renstra Kominfo) s.d triwulan II, realisasi 100% dari target 100% (tingkat realisasi sebesar 100%). Komitmen semua pihak mendorong ketercapaian target kinerja.

D. Program Penyelenggaraan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah

Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja :

- Persentase sistem elektronik/ aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah s.d triwulan II,

realisasi 7,58% dari target 7,58% (tingkat realisasi sebesar 100%). Kerjasama dan komitmen antara Dinas Kominfo, *stakeholder* dan pemilik sistem elektronik mendorong ketercapaian target kinerja. Namun demikian, target maupun realisasi masih sangat kecil sehingga dibandingkan jumlah sistem elektronik yang ada, sehingga perlu didukung anggaran maupun SDM yang memadai.

Kegiatan : Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja :

- Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi (PHKS) yang ditetapkan s.d triwulan II, realisasi 100% dari target 100% (tingkat realisasi sebesar 100%). Komitmen semua pihak mendorong ketercapaian target kinerja.

Realisasi Program/ Kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

Program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja sampai dengan tahun 2024 Triwulan II adalah :

A. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja :

- Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) s.d triwulan II, realisasi 66,22% dari target 56% (tingkat realisasi sebesar 118,24%).

Namun demikian angka tingkat realisasi dapat berubah karena bertambahnya jumlah konten informasi kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten yang dipublikasikan.

- Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Kab/kota sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik s.d triwulan II, realisasi 59,65% dari target 54% (tingkat realisasi sebesar 110,46%). Hal ini terjadi karena Dinas Kominfo senantiasa memberikan sosialisasi maupun bintek kepada PPID sehingga meningkatkan kesadaran perangkat daerah akan keterbukaan informasi publik. Namun demikian, target kinerja belum seluruh OPD sehingga masih bisa ditingkatkan.

B. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja:

- Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo s.d triwulan II, realisasi 81,19% dari target 72,94% (tingkat realisasi sebesar 111,31%). Target sudah terpenuhi karena realisasi tahun sebelumnya sudah melebihi target.
- Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (terdaftar di Kemenkominfo) s.d triwulan II, realisasi 21% dari target 15% (tingkat realisasi sebesar 140%). Namun demikian,

target masih sangat rendah sehingga perlu untuk ditingkatkan.

- Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah s.d triwulan II, realisasi 100% dari target 70,18% (tingkat realisasi sebesar 142,49%). Seluruh perangkat daerah sudah menggunakan layanan pusat data pemerintah yang ada di Dinas Kominfo. Semakin banyaknya pengguna layanan harus diimbangi dengan pemeliharaan dan peningkatan kapasitas pusat data.
- Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah s.d triwulan II, realisasi 100% dari target 70,18% (tingkat realisasi sebesar 142,49%). Seluruh perangkat daerah sudah menggunakan layanan pusat data pemerintah yang ada di Dinas Kominfo untuk menyimpan datanya. Semakin banyaknya penyimpanan data harus diimbangi dengan pemeliharaan dan peningkatan kapasitas pusat data.
- Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city s.d triwulan II, realisasi 100% dari target 68,42% (tingkat realisasi sebesar 146,16%). Seluruh perangkat daerah sudah mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city.
- Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo s.d triwulan II, realisasi 100% dari target 92,11% (tingkat realisasi sebesar 108,57%). Dinas Kominfo melaksanakan sosialisasi maupun bintek kepada seluruh perangkat daerah.

C. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja :

- Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral s.d triwulan II, realisasi 74% dari target 70% (tingkat realisasi sebesar 105,71%). Target sudah terpenuhi karena realisasi tahun sebelumnya sudah melebihi target.
- Persentase kelengkapan metadata variabel statistik sektoral s.d triwulan II, realisasi 91,07% dari target 80% (tingkat realisasi sebesar 113,84%). Target sudah terpenuhi karena realisasi tahun sebelumnya sudah melebihi target.
- Persentase kelengkapan metadata indikator statistik sektoral s.d triwulan II, realisasi 82,97% dari target 80% (tingkat realisasi sebesar 103,71%). Target sudah terpenuhi karena realisasi tahun sebelumnya sudah melebihi target.

D. Program Penyelenggaraan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Program :

- Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian s.d triwulan II, realisasi 77,73% dari target 50% (tingkat realisasi sebesar 155,46%). Penerapan SSL pada SE yg dikelola Pemkab Kendal sudah dilakukan walaupun perpanjangan lisensi belum terbayarkan. Penambahan anggaran dibutuhkan karena harga lisensi yg berubah menyesuaikan kenaikan nilai tukar dolar terhadap rupiah.

Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik s.d triwulan II, realisasi 90,53% dari target 65% (tingkat realisasi sebesar 139,28%). Pemanfaatan sertifikat elektronik untuk pengelolaan sistem elektronik berupa pemanfaatan TTE dan penerapan SSL sudah melebihi rencana target.
- Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan s.d triwulan II, realisasi 28,57% dari target 15% (tingkat realisasi sebesar 190,47%). Target masih rendah, pengamanan kegiatan strategis berupa penyediaan fasilitas keamanan siber belum berjalan dengan maksimal dikarenakan tingkat kebutuhan pengamanan informasi yg belum efektif.

Secara umum, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/ Kegiatan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target kegiatan antara lain :
 - Rencana kegiatan berada pada Triwulan III dan IV;
 - Kegiatan bersifat penyediaan 1 tahun;
 - Adanya pertimbangan teknis dan keuangan sehingga kegiatan tidak dilaksanakan;
 - Anggaran untuk beberapa kegiatan membutuhkan tambahan saat perubahan.

- b. Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program maupun kegiatan karena adanya komitmen dan kerjasama semua pihak untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sesuai perjanjian kinerja perangkat daerah.
- c. Faktor penyebab capaian program maupun kegiatan melebihi target adalah komitmen dan kerjasama semua pihak untuk mencapai target kinerja, namun terdapat beberapa penentuan target yang belum maksimal.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah, bahwasanya dapat mendorong capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kendal yaitu Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Kendal, dengan indikatornya Tingkat Kematangan SPBE (Indeks SPBE). Perhitungan capaian indikator Renstra hanya bisa terhitung pada posisi akhir tahun. Guna meningkatkan pelayanan dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, perlu ditingkatkan pelaksanaan kegiatan yang langsung mendukung implementasi e-goverment, bersentuhan dengan kebutuhan layanan kepada masyarakat, keterbukaan informasi, serta peningkatan keamanan informasinya.

Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor penghambat adalah dengan perencanaan dan penganggaran yang mendukung percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, antara lain :

- a. mengoptimalkan kegiatan dengan menggunakan anggaran yang ada seefisien mungkin
- b. pengusulan tambahan anggaran pada Program/ Kegiatan yang dirasa anggarannya masih kurang, untuk mengejar ketertinggalan target yang telah ditetapkan, serta

mengevaluasi program kegiatan yang telah berjalan untuk mengidentifikasi kendala-kendala dan hambatan yang ada guna menentukan solusi atau penyelesaiannya.

- c. integrasi sistem informasi manajemen pada masing-masing OPD, peningkatan pembangunan infrastruktur TIK, pembangunan keamanan informasi, penyediaan satu data statistik, dan peningkatan komunikasi dan informasi publik;

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Dinas Kominfo Kabupaten Kendal dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024**

Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah.	100,00%	100,00%	49,50%	49,50%	100,00%	100,00%	100,00%
2.16.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran & laporan evaluasi kinerja Dinas Kominfo tepat waktu	100,00%	100,00%	63,33%	63,33%	100,00%	100,00%	100,00%
2.16.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	9	7	77,78%	9	9	100,00%
		Jumlah dokumen perencanaan (Renstra/ Renja/ RKT/ TAPKIN) yang disusun	4	4	3	75,00%	4	4	100,00%

		Jumlah dokumen anggaran yang disusun	4	4	3	75,00%	4	4	100,00%
		Jumlah dokumen RTP SPIP yang disusun	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
2.16.01.2.01.0006	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5	4	80,00%	5	5	100,00%
		Jumlah laporan LKJIP, Bahan LPPD, Bahan LKPJ, IKK, PMPRB yang disusun	5	5	4	80,00%	5	5	100,00%
2.16.01.2.01.0007	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	16	8	50,00%	16	16	100,00%
		Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan	16	16	8	50,00%	16	16	100,00%
2.16.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan adminitrasi keuangan dan pertanggung jawaban keuangan Dinas Kominfo sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100,00%	100,00%	77,53%	77,53%	100,00%	100,00%	100,00%
2.16.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	45	45	100,00%	33	45	128,57%
		Jumlah penyediaan pembayaran gaji, tunjangan ASN, dan pembayaran TPP	12	12	6	50,00%	12	12	100,00%
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	6	50,00%	12	12	100,00%
		Jumlah bulan penyediaan dana untuk pembayaran honor-honor penanggung jawab keuangan dan pelaksana kegiatan	12	12	6	50,00%	12	12	100,00%

2.16.01.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
2.16.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2	2	1	50,00%	2	2	100,00%
		Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	2	2	1	50,00%	2	2	100,00%
2.16.01.2.02.0008	Sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
		Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
2.16.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan disiplin aparatur Dinas Kominfo dalam berpakaian dinas	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.16.01.2.05.010	Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40	40	0	0,00%	40	40	100,00%
		Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	5	1	0	0,00%	1	1	20,00%
2.16.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum internal Dinas Kominfo	100,00%	100,00%	51,63%	51,63%	100,00%	100,00%	100,00%
2.16.01.2.06.0001	Sub kegiatan Penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15	15	12	80,00%	15	15	100,00%
		Jumlah bulan penyediaan alat penerangan kantor	12	12	6	50,00%	12	12	100,00%
2.16.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	6	50,00%	12	12	100,00%

		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12	12	6	50,00%	12	12	100,00%
2.16.01.2.06.0003	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16	16	7	43,75%	16	16	100,00%
		Jumlah bulan penyediaan alat kebersihan, alat dapur, gas dan alat rumah tangga lainnya	12	12	6	50,00%	12	12	100,00%
2.16.01.2.06.0004	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	6	50,00%	12	12	100,00%
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	12	6	50,00%	12	12	100,00%
2.16.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	6	50,00%	12	12	100,00%
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	12	6	50,00%	12	12	100,00%
2.16.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	6	50,00%	12	12	100,00%
		Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12	12	6	50,00%	12	12	100,00%
2.16.01.2.06.0010	Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	0	0,00%	1	1	100,00%
		Jumlah kegiatan penyusutan arsip dinamis SKPD	1	1	0	0,00%	1	1	100,00%
2.16.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang Dinas Kominfo sesuai rencana kebutuhan	100,00%	100,00%	51,85%	51,85%	100,00%	175,00%	175,00%
2.16.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	26	13	50,00%	7	13	185,71%
		Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	7	26	13	50,00%	7	13	185,71%
2.16.01.2.07.0010	Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%

		Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
2.16.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Kominfo	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.16.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	6	50,00%	12	12	100,00%
		Jumlah pembayaran jasa telepon, listrik, dan air	12	12	6	50,00%	12	12	100,00%
2.16.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	6	50,00%	12	12	100,00%
		Jumlah penyediaan dana untuk pembayaran honor tenaga penunjang kegiatan	12	12	6	50,00%	12	12	100,00%
2.16.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik Dinas Kominfo	100,00%	100,00%	52,13%	52,13%	100,00%	100,00%	100,00%
2.16.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32	32	16	50,00%	29	32	100,00%
		Jumlah bulan pemeliharaan Kendaraan dinas yang dipelihara	12	12	6	50,00%	12	12	100,00%
		Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajak dan perijinannya	32	32	16	50,00%	29	29	90,63%
2.16.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44	44	28	63,64%	44	44	100,00%
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan kerja dan mesin	12	12	6	50,00%	12	12	100,00%
2.16.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	2	0	0,00%	2	2	100,00%
		Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara	1	1	0	0,00%	1	1	100,00%

		Jumlah gedung LPPL yang terpelihara	1	1	0	0,00%	1	1	100,00%
2.16.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	40	40	20	50,00%	40	40	100,00%
		Jumlah bulan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	12	12	6	50,00%	12	12	100,00%
02.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah (kumulatif)	72	72	0	0,00%	70	70	97,22%
2.16.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah	65,00%	80,00%	80,00%	100,00%	63,00%	80,00%	123,08%
		Persentase komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten	78,00%	100,00%	100,00%	100,00%	75,00%	100,00%	128,21%
		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	56,00%	56,00%	66,22%	118,24%	54,00%	76,92%	137,36%
		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi	67,00%	67,00%	50,00%	74,63%	65,00%	65,00%	97,01%

		komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan							
		Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Kab/kota sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	63,00%	54,00%	59,65%	110,46%	54,00%	59,65%	94,68%
2.16.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	13	11	1	9,09%	6	10	76,92%
		Jumlah Laporan Hasil Pemantauan/ Analisa Media (Media Sosial dan Media Online)	6	3	1	33,33%	6	3	50,00%
		Jumlah paket pemberdayaan influencer	2	2	0	0,00%	0	2	100,00%
		Jumlah Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh Bupati	2	2	0	0,00%	0	2	100,00%
		Jumlah laporan hasil pengumpulan pendapat umum (Jumlah frekuensi, Jumlah responden & Jumlah Rekomendasi hasil analisis survey, polling, jajak pendapat)	1	1	0	0,00%	1	1	100,00%
		Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Opini dan Aspirasi Publik	2	2	0	0,00%	6	2	100,00%
2.16.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1	1	0	0,00%	1	1	100,00%
		Jumlah Peserta Penerima Penghargaan Bupati Kendal Award	8	8	0	0,00%	8	8	100,00%
		Jumlah agenda prioritas komunikasi Pemda yang ditetapkan	1	1	0	0,00%	1	1	100,00%

2.16.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	405	405	148	36,54%	370	370	91,36%
		Jumlah konten komunikasi publik/ berita yang diproduksi	405	405	148	36,54%	370	370	91,36%
		Jumlah dokumen Perencanaan Media/ STRAKOM yang disusun (tujuan, target khalayak & materi konten)	230	230	98	42,61%	208	208	90,43%
2.16.02.201.05	Sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	180	180	66	36,67%	178	178	98,89%
		Jumlah media komunikasi publik yang terpasang	180	180	66	36,67%	178	178	98,89%
		Jumlah kegiatan diseminasi informasi publik melalui tatap muka	2	2	1	50,00%	2	2	100,00%
		Jumlah pameran pembangunan (kendal expo)	1	1	0	0,00%	1	1	100,00%
		Jumlah Podcast yang dilaksanakan	3	2	2	100,00%	3	2	66,67%
		Jumlah bulan operasional penyelenggaraan LPPL (Pengurus Izin, streaming dll)	12	12	6	50,00%	12	12	100,00%
2.16.02.2.01.0006	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	455	455	132	29,01%	455	455	100,00%
		Jumlah Dokumen Informasi Publik milik perangkat daerah yang bisa diakses masyarakat (diunggah OPD di web)	32	34	34	100,00%	32	34	106,25%

		Jumlah Layanan Informasi Publik (Jumlah koordinasi PPID utama dgn PPID pelaksana, Jumlah laporan uji konsekuensi, Jumlah layanan permohonan info publik online/ offline, Jumlah akses web, Jumlah permohonan info yg diterima dan ditolak, Jumlah pengelolaan keberatan permohonan informasi publik)	5	5	4	80,00%	5	5	100,00%
		Jumlah pengelolaan pengaduan Publik melalui Kanal Aduan Publik (Jumlah SOP dan SP pengaduan publik, Jumlah laporan pemantauan pengaduan publik/laporan masuk/diteruskan/ditindaklanjuti/ selesai, dan Jumlah evaluasi pengelolaan pengaduan publik)	450	450	128	28,44%	450	450	100,00%
		Jumlah Informasi kepada ASN dan Perangkat Desa melalui Kanal SMS Masking/WA Blasting	6	6	4	66,67%	6	6	100,00%
2.16.02.2.01.0007	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	79	79	37	46,84%	79	79	100,00%
		Jumlah informasi berita yang ditayangkan di TV	15	15	6	40,00%	15	15	100,00%
		Jumlah Penyediaan pemberitaan informasi pembangunan lewat media massa/advertorial	25	25	12	48,00%	25	25	100,00%
		Jumlah kegiatan Kemitraan dengan Wartawan/Rakor Publikasi dengan Media Cetak/Elektronik/Online	20	20	9	45,00%	20	20	100,00%
		Jumlah Pelaksanaan Jumpa Pers/ konferensi pers dengan Wartawan Liputan Kendal	6	6	3	50,00%	6	6	100,00%
		Jumlah penyelenggaraan kegiatan Media Gathering	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%

		Jumlah Dokumen Penyediaan koran untuk media informasi masyarakat pada papan informasi	12	12	6	50,00%	12	12	100,00%
2.16.02.2.01.0008	Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	2	2	2	100,00%	2	2	100,00%
		Jumlah Kegiatan yg melibatkan Mitra Komunikasi Publik/Pembinaan Mitra Komunikasi Publik agar menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah	2	2	2	100,00%	2	2	100,00%
2.16.02.2.01.010	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	60	60	0	0,00%	60	60	100,00%
		Jumlah kegiatan Bakohumas (pengembangan kapasitas SDKP) yang dilaksanakan	1	1	0	0,00%	1	1	100,00%
2.16.02.2.01.013	Sub Kegiatan Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	75	8	8	100,00%	8	8	10,67%
		Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang dipelihara	35	8	8	100,00%	6	8	22,86%
		Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang diadakan	1	6	0	0,00%	2	2	200,00%
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	65,00%	65,00%	62,38%	95,97%	55,00%	65,00%	100,00%
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	24,29%	50,15%	50,15%	100,00%	23,16%	50,15%	206,46%

2.16.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	72,94%	72,94%	81,19%	111,31%	70,64%	81,19%	111,31%
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	65,00%	65,00%	53,57%	82,42%	55,00%	62,38%	95,97%
2.16.03.2.01.0002	Sub kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	525	587	598	101,87%	520	598	113,90%
		Jumlah Domain dan Sub Domain Pemerintah Kabupaten Kendal yang dikelola dan diawasi	525	587	598	101,87%	520	598	113,90%
		Jumlah kegiatan pengelolaan dan pengawasan domain sub domain pemda dan desa	6	6	0	0,00%	6	6	100,00%
		Jumlah OPD yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	57	57	57	100,00%	57	57	100,00%
2.16.03.2.01.0003	Sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	157	161	177	109,94%	164	218	138,85%
		Jumlah OPD yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah	157	161	177	109,94%	164	218	138,85%
		Jumlah OPD yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	108	165	136	82,42%	109	142	131,48%

		Jumlah jaringan intra pemda yang dipelihara dan diadakan	4	2	1	50,00%	4	4	100,00%
		Jumlah bulan Pemeliharaan dan pengadaan jaringan intra Pemda	12	12	6	50,00%	12	12	100,00%
2.16.03.2.02	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	10,68%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	936,33%
		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (terdaftar di Kemenkominfo)	15%	15%	21,00%	140,00%	7%	21,00%	140,00%
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	0,03%	0,03%	0,02%	66,67%	4,14%	0,03%	100,00%
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	70,18%	70,18%	100,00%	142,49%	100,00%	100,00%	142,49%
		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	70,18%	70,18%	100,00%	142,49%	100,00%	100,00%	142,49%
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city	68,42%	68,42%	100,00%	146,16%	73,69%	100,00%	146,16%

		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo	92,11%	92,11%	100,00%	108,57%	100,00%	100,00%	108,57%
2.16.03.2.02.0001	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2	2	1	50,00%	3	3	150,00%
		Jumlah dokumen penyelenggaraan SPBE yang disusun/direview	1	1	1	100,00%	2	2	200,00%
		Jumlah evaluasi indeks SPBE yang dilaksanakan	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
		Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi SPBE	7	7	1	14,29%	7	7	100,00%
		Jumlah Perda atau Perkada terkait implementasi e-government	26	26	0	0,00%	25	25	96,15%
2.16.03.2.02.0003	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
		Jumlah Pusat Data Pemda yang dibangun dan dikelola	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
		Jumlah fasilitasi berbagi pakai pusat data Pemda dengan instansi lain dan interoperabilitas/keterhubungan pusat data Pemda dengan pusat data Nasional	2	2	2	100,00%	2	2	100,00%
2.16.03.2.02.0004	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	4	4	4	100,00%	4	4	100,00%
		Jumlah kapasitas bandwidth internet yang diadakan (Dedicated dan Metro Up To)	1000	1000	2300	230,00%	850	2300	230,00%
		Jumlah Hotspot area publik yang diadakan	40	40	45	112,50%	38	45	112,50%

		Jumlah Sarana prasarana Command Centre yang diadakan/dipelihara	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
		Jumlah Pengadaan sarana prasarana teleconference	0	0	0	0,00%	0	0	#DIV/0!
		Jumlah penyediaan dan pemanfaatan kapasitas jaringan internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	NA	12	3	25,00%	12	12	#VALUE!
		Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	6	6	6	100,00%	6	6	100,00%
2.16.03.2.02.0007	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2	2	1	50,00%	5	5	250,00%
		Jumlah Sistem informasi Manajemen yang terintegrasi (Sistem Penghubung Layanan Pemerintah)	2	2	0	0,00%	1	1	50,00%
		Jumlah penyediaan layanan Call Center 112	3.100	800	529	66,13%	1.500	1500	48,39%
		Jumlah Sistem Elektronik Pemkab/ Aplikasi berbagai jenis platform/ multi platform	6	550	586	106,55%	540	586	9766,67%
2.16.03.2.02.0009	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	90	90	137	152,22%	90	137	152,22%
		Jumlah pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi Pengembangan dan pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota cerdas	6	6	2	33,33%	6	6	100,00%

		Jumlah Ruang Command Center yang dibangun dan dipelihara	0	0	0	0,00%	1	0	#DIV/0!
		Jumlah dokumen Smartcity yang ditetapkan/ direview	1	1	0	0,00%	1	1	100,00%
2.16.03.2.02.010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	3	3	8	266,67%	3	8	266,67%
		Jumlah pengembangan SDM di bidang TIK bagi OPD	59	57	57	100,00%	59	57	96,61%
		Jumlah masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	230	230	440	191,30%	200	440	191,30%
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang dirilis/ diunggah Perangkat Daerah ke portal data kendal	100,00%	100,00%	20,67%	20,67%	100,00%	100,00%	100,00%
2.20.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	95,00%	95,00%	21,75%	22,89%	95,00%	95,00%	100,00%
		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai Renstra Kominfo)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	70,00%	70,00%	74,00%	105,71%	60,00%	74,00%	105,71%
		Persentase kelengkapan metadata variabel statistik sektoral	80,00%	80,00%	91,07%	113,84%	75,00%	91,07%	113,84%
		Persentase kelengkapan metadata indikator statistik sektoral	80,00%	80,00%	82,97%	103,71%	74,86%	82,97%	103,71%
2.20.02.2.01.0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4	4	4	100,00%	4	4	100,00%
		Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah, dianalisis dan diseminasikan serta diunggah ke portal data kendal	210	210	62	29,52%	210	210	100,00%
		Jumlah buku statistik sektoral yang disusun oleh Dinas Kominfo	2	2	2	100,00%	2	2	100,00%
		Jumlah kegiatan diseminasi data statistik sektoral	2	2	2	100,00%	2	2	100,00%
		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	4	90	1	1,11%	90	90	2250,00%
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	2	20	69	345,00%	20	69	3450,00%
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	2	15	28	186,67%	15	28	1400,00%
		Tersedianya buku profil daerah	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
2.20.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	70	70	74	105,71%	60	74	105,71%
		Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral yang dibangun	70	70	74	105,71%	60	74	105,71%
		Jumlah metadata variabel statistik sektoral yang dibangun	224	224	255	113,84%	210	255	113,84%

		Jumlah metadata indikator statistik sektoral yang dibangun	296	296	307	103,72%	277	307	103,72%
		Jumlah kegiatan penyusunan metadata statistik	1	1	0	0,00%	1	1	100,00%
2.21.02	Program Penyelenggaraan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip system manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian	60,00%	50,00%	77,73%	155,46%	50,00%	77,73%	129,55%
2.21.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	65,00%	65,00%	90,53%	139,28%	92,00%	92,00%	141,54%
		Persentase sistem elektronik/ aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0,82%	7,58%	7,58%	100,00%	2,00%	7,58%	924,39%
		Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan	15,00%	15,00%	28,57%	190,47%	15,00%	28,57%	190,47%
2.21.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	590	590	416	70,51%	500	500	84,75%
		Jumlah identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan dan pemulihan serangan siber pada sistem elektronik yang dilaksanakan	10	10	1	10,00%	9	9	90,00%
		Jumlah layanan keamanan informasi yang dilaksanakan	590	590	416	70,51%	500	500	84,75%
		Jumlah OPD yang menerapkan SMKI (Sistem manajemen keamanan informasi)	7	7	7	100,00%	7	7	100,00%

		Jumlah dokumen tata kelola/ audit keamanan informasi yang disusun	1	1	2	200,00%	1	2	200,00%
2.21.02.2.02	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi (PHKS) yang ditetapkan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.21.02.2.02.0001	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	57	57	57	100,00%	57	57	100,00%
		Jumlah data, informasi dan berita yg masuk dalam sistem persandian	750	750	205	27,33%	750	750	100,00%
		Jumlah jaring komunikasi sandi yang dilaksanakan sesuai dengan PHKS	238	238	221	92,86%	231	231	97,06%
		Jumlah perangkat daerah yang terpasang ip phone	51	51	34	66,67%	44	44	86,27%

2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Disamping Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan, Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2024 juga telah melalui proses penelaahan usulan Program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan/masyarakat. Secara umum, dari hasil penelaahan usulan Program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan, tidak ada usulan masyarakat yang ditujukan kepada Dinas Kominfo Kabupaten Kendal.

Tabel 2.2
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Kendal**

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perubahan perencanaan pembangunan tahun 2024 sebagai acuan Perangkat Daerah yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi Perangkat Daerah pelaksana program ditindak lanjuti dengan menyusun kerangka anggaran dalam Perubahan APBD Tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Secara keseluruhan, Pagu Perubahan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika mengalami penurunan dari Rp. 19.943.490.679,- menjadi Rp. 18.570.843.625,- (berkurang Rp. 1.372.647.054,-). Beberapa sub kegiatan mengalami pengurangan anggaran, hal ini disebabkan :

1. Penyesuaian penghitungan gaji dan tunjangan pegawai;
2. Beberapa tenaga penunjang kegiatan diterima menjadi PPPK sehingga ada sisa honor yang tidak bisa dibayarkan;
3. Efisiensi anggaran dari kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 dan adanya kebutuhan mendesak yang timbul pada pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan, maka diperlukan adanya perubahan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sesuai dengan prioritas dan plafon sementara perubahan tahun 2024.

Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan pada perubahan adalah :

A) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pada Sub Kegiatan Sosialisai Peraturan Perundang-Undangan, semula anggaran Rp. 250.000.000,- menjadi Rp. 347.802.546,- (bertambah Rp. 97.802.546,-). Kegiatan yang akan dilaksanakan di perubahan :

1. Sosialisasi bidang cukai tembakau.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, semula anggaran Rp. 95.017.160,- menjadi Rp. 110.866.760,- (bertambah Rp. 15.849.600,-). Kegiatan yang akan dilaksanakan di perubahan :

1. Pembelian perlengkapan pendukung sarana kerja (hdmi audio video wireless transmitter receiver, brancket TV Standing);

2. Pembelian sarana pendukung layanan (kursi roda).

- Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, semula anggaran Rp. 227.700.000,- menjadi Rp. 377.700.000,- (bertambah Rp. 100.000.000,-). Kegiatan yang akan dilaksanakan di perubahan :

1. Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor Dinas Kominfo.

- Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, semula anggaran Rp. 24.400.000,- menjadi Rp. 26.400.000,- (bertambah Rp. 2.000.000,-). Kegiatan yang akan dilaksanakan di perubahan :

1. Isi ulang alat pemadam kebakaran/apar.

B) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, semula anggaran Rp. 131.700.000,- menjadi Rp. 142.300.000,- (bertambah Rp. 10.600.000,-). Kegiatan yang akan dilaksanakan di perubahan :

1. Pembayaran honor tenaga penunjang kegiatan beserta JKK dan JKM bulan Desember.

- Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, semula anggaran Rp. 835.339.000,- menjadi Rp. 843.189.000,- (bertambah Rp. 7.850.000,-). Kegiatan yang akan dilaksanakan di perubahan :

1. Cetak spanduk dan baliho.

C) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, semula anggaran Rp. 286.490.000,-

menjadi Rp. 326.490.000,- (bertambah Rp. 40.000.000,-).

Kegiatan yang akan dilaksanakan di perubahan :

1. Pengembangan Sistem Informasi Data Sektoral Terintegrasi;
2. Review Arsitektur Data dan Informasi.

D) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, semula anggaran Rp. 601.550.000,- menjadi Rp. 611.000.000,- (bertambah Rp. 9.450.000,-). Kegiatan yang akan dilaksanakan di perubahan :
 1. Perpanjangan Lisensi Antivirus untuk Server, Lisensi Aplikasi Antispam Email, Lisensi Imunify360, Lisensi SSL Greenbar, Lisensi SSL Wildcard;
 2. Tes Penetrasi Sistem Elektronik

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan RKPD 2024 sebagaimana Tabel berikut ini :

Tabel 3.1
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. KENDAL
TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				17.346.420.695,00	19.943.490.679,00	18.570.843.625,00						24.264.690.150,00					
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				17.346.420.695,00	19.943.490.679,00	18.570.843.625,00						24.264.690.150,00					
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				16.152.005.695,00	18.850.060.679,00	17.441.963.625,00						22.584.665.150,00					
1	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 %	100 %	7.174.011.095,00	9.483.255.079,00	8.769.549.625,00						8.291.998.150,00					
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran & laporan evaluasi kinerja Dinas Kominfo tepat waktu	100 %	100 %	116.095.000,00	81.750.000,00	53.080.000,00			-	-	-	225.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	69.980.000,00	55.250.000,00	37.190.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	23.230.000,00	20.000.000,00	12.120.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	

							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	16 Laporan	22.885.000,00	6.500.000,00	3.770.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi dan laporan keuangan Dinas Kominfo Persentase pengelolaan adminitrasi keuangan dan pertanggung jawaban keuangan Dinas Kominfo sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	100 %	4.895.339.515,00	5.969.876.719,00	5.167.146.719,00			-	-	-		5.553.948.150,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	4.550.339.515,00	5.949.701.719,00	5.149.701.719,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.208.948.150,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	6.725.000,00	6.725.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	6.725.000,00	6.725.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	2	16	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																			
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	6.725.000,00	3.995.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					

	2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik Dinas Kominfo	100 %	100 %	15.000.000,00	0,00	0,00			-	-	-		31.750.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			31.750.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase capaian target pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Dinas Kominfo	100 %	100 %	75.000.000,00	0,00	0,00			-	-	-		75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah														
						Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah		278 Laporan	278 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan disiplin aparatur Dinas Kominfo dalam berpakaian dinas	100 %	100 %	185.587.220,00	250.000.000,00	347.802.546,00			-	-	-		327.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		35 Paket	35 Paket	525.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			27.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		6 Orang	6 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		40 Orang	40 Orang	185.062.220,00	250.000.000,00	347.802.546,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	-			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum internal Dinas Kominfo	100 %	100 %	877.400.000,00	1.646.549.000,00	1.493.641.400,00			-	-	-		939.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	75.000.000,00	101.415.000,00	101.415.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	75.000.000,00	6.100.000,00	14.150.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	37.662.000,00	37.662.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			4.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	650.000.000,00	1.459.322.000,00	1.305.414.400,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			700.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	7.050.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang Dinas Kominfo sesuai rencana kebutuhan	100 %	100 %	162.500.000,00	439.627.200,00	462.627.200,00			-	-	-		314.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	18.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	128.500.000,00	424.627.200,00	447.627.200,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			185.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	16.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			24.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Kominfo	100 %	100 %	322.200.000,00	589.960.000,00	571.410.000,00			-	-	-		340.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	99.960.000,00	99.960.000,00	99.960.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			90.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	222.240.000,00	490.000.000,00	471.450.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik Dinas Kominfo	100 %	100 %	524.889.360,00	505.492.160,00	673.841.760,00			-	-	-	485.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32 Unit	32 Unit	155.735.000,00	158.375.000,00	158.875.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			175.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel													
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	44 Unit	60.800.000,00	95.017.160,00	110.866.760,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	273.954.360,00	227.700.000,00	377.700.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	40 Unit	24.400.000,00	24.400.000,00	26.400.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah (kumulatif)	72 Score	72 Score	3.881.100.000,00	4.104.942.000,00	4.005.780.000,00						5.012.667.000,00	
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan di web oleh Perangkat Daerah Persentase komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah	56 % 63 % 65 % 67 % 78 %	56 % 63 % 65 % 67 % 78 %	3.881.100.000,00	4.104.942.000,00	4.005.780.000,00		-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	-		5.012.667.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik													
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	13 Dokumen	13 Dokumen	390.760.000,00	311.860.000,00	261.860.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani		840.760.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah													
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani		80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik													

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	405 Dokumen	405 Dokumen	171.260.000,00	131.700.000,00	142.300.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			180.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	180 Dokumen	180 Dokumen	794.377.000,00	835.339.000,00	843.189.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			895.730.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	455 Dokumen	455 Dokumen	402.473.000,00	474.268.000,00	411.868.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			465.791.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0007	Layanan Hubungan Media														
							Jumlah Layanan Hubungan Media	79 Layanan	79 Layanan	1.189.310.000,00	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			1.550.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan														
							Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	2 Dokumen	2 Dokumen	47.000.000,00	105.172.000,00	99.960.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			74.466.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik														
							Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	60 Orang	60 Orang	25.000.000,00	15.225.000,00	15.225.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														

							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6 Unit	6 Unit	810.920.000,00	285.578.000,00	285.578.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			895.920.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	65 24,29 %	24,29 65 %	5.096.894.600,00	5.261.863.600,00	4.666.634.000,00							9.280.000.000,00	
	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai PM Kominfo 5/2015 Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 % 24 % 65 % 72,94 %	100 % 24 % 65 % 72,94 %	1.759.189.600,00	1.886.961.600,00	1.520.727.000,00			-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	-		4.600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.01	0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	525 Dokumen	525 Dokumen	100.000.000,00	70.072.000,00	48.967.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah														

							Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	161 Unit	161 Unit	1.659.189.600,00	1.816.889.600,00	1.471.760.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	-			4.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo Persentase layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah Persentase Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city Persentase perangkat daerah yang mengimplemen tasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (terdaftar di Kemenkominfo)	0,03 % 100 % 10,68 % 15 % 68,42 % 70,18 %	0,03 % 100 % 10,68 % 15 % 68,42 % 70,18 %	3.337.705.000,00	3.374.902.000,00	3.145.907.000,00			-	-	-		4.680.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	124.500.000,00	179.819.500,00	128.479.500,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			125.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	03	2.02	0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah														
						Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			1.600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

	2	16	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	2.372.950.000,00	2.225.827.500,00	2.082.427.500,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			2.300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik														
							Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Unit	2 Unit	507.455.000,00	559.455.000,00	525.200.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			515.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas														
							Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	90 Dokumen	90 Dokumen	76.500.000,00	20.190.000,00	20.190.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah														
							Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	56.300.000,00	189.610.000,00	189.610.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				298.415.000,00	318.530.000,00	358.530.000,00						582.695.000,00		
4	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Prosentase ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang dirilis/ diunggah Perangkat Daerah ke portal data kendal	100 %	100 %	298.415.000,00	318.530.000,00	358.530.000,00							582.695.000,00	

	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data yang dapat berbagi pakai Persentase kelengkapan metadata indikator statistik sektoral Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral Persentase kelengkapan metadata variabel statistik sektoral Persentase organisasi perangkat daerah (Perangkat Daerah) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Persentase organisasi perangkat daerah (Perangkat Daerah) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai Renstra Kominfo)	100 % 70 % 80 % 95 %	100 % 70 % 80 % 95 %	298.415.000,00	318.530.000,00	358.530.000,00			-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	-		582.695.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral														
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 Dokumen	4 Dokumen	236.665.000,00	286.490.000,00	326.490.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			520.945.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	20	02	2.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral														
						Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	70 Dokumen	70 Dokumen	61.750.000,00	32.040.000,00	32.040.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			61.750.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				896.000.000,00	774.900.000,00	770.350.000,00							1.097.330.000,00	
5	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Prosentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip system manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian	60 %	60 %	896.000.000,00	774.900.000,00	770.350.000,00							1.097.330.000,00	

	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik Persentase sistem elektronik/ aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0,82 % 15 % 65 %	0,82 % 15 % 65 %	721.000.000,00	601.550.000,00	611.000.000,00			-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	-		922.330.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	590 Laporan	590 Laporan	721.000.000,00	601.550.000,00	611.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			922.330.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi (PHKS) yang ditetapkan	100 %	100 %	175.000.000,00	173.350.000,00	159.350.000,00			-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	-		175.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	57 Perangkat Daerah	57 Perangkat Daerah	175.000.000,00	173.350.000,00	159.350.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			175.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	J U M L A H									17.346.420.695,00	19.943.490.679,00	18.570.843.625,00							24.264.690.150,00	

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kominfo Kabupaten Kendal tahun 2024 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja perangkat daerah yang efektif, optimal, dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan. Perubahan Renja Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan SKPD Tahun Anggaran 2024 yang akan digunakan sebagai dasar dan pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Tahun Anggaran 2024.

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan adalah untuk kegiatan-kegiatan prioritas yang belum dapat dilaksanakan, diprioritaskan untuk dianggarkan dari pergeseran internal atau dianggarkan ulang pada Rencana Kerja Tahun 2025. Agar realisasi program dan kegiatan sesuai dengan sasaran, maka diperlukan semangat, komitmen, dan disiplin yang tinggi dari Perangkat Daerah dan *stakeholders* sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Keberhasilan pelaksanaan dokumen ini, disamping sangat tergantung pada kesiapan dan kemampuan semua komponen masyarakat, baik eksekutif, legislatif, dunia usaha, kelompok kepentingan, maupun kelompok masyarakat lainnya, juga sangat ditentukan oleh sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin dari setiap pelaku pembangunan. Faktor-faktor ini dicerminkan pada kualitas dan profesionalisme dalam

pengelolaan pembangunan yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta koordinasi yang makin mantap sehingga hasil pembangunan menjadi optimal.

Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan tahun keempat dari periode Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026. Kaidah Pelaksanaan Rencana Kerja sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2024 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2024.
2. Dalam rangka menjaga kesinambungan layanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, sebelum ditetapkan Renja ini berpedoman pada Renja periode tahun sebelumnya.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebagaimana tujuannya, diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 yang dapat dimanfaatkan oleh segenap komponen pelaksana teknis kegiatan maupun *stakeholder* yang berkepentingan.

Kendal, 2024
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KENDAL,

ARDHI PRASETIYO, S.STP,MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19810925 200012 1 001

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN ROWOSARI TAHUN ANGGARAN 2024



**PEMERINTAH KECAMATAN ROWOSARI
KABUPATEN KENDAL
JL. BAHARI NO. 80 ROWOSARI TELP. (0294) 641697**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas ridho-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Rowosari Tahun 2024.

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal.

Adapun penyusunan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Kecamatan Rowosari diharapkan dapat benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Kecamatan Rowosari tahun 2025 mendatang.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparat terkait di Kecamatan Rowosari, yang telah membantu dalam penyusunan Renja Perubahan 2024 ini. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih ada kekurangan oleh karena itu kami mohon saran untuk penyempurnaan Renja di tahun yang akan datang.

Kendal, 2024

CAMAT ROWOSARI,



MAHMUD EKO SAPUTRO, S.STP

Pembina

NIP. 19830810 200112 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
BERKENAAN..... 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II
dan Renstra Perangkat Daerah..... 7

2.2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 28

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH..... 30

BAB IV PENUTUP 46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. 22

Tabel 2.2. 29

Tabel 3.1. 35

Tabel Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah
Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal..... 43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Dokumen Renja Kecamatan Rowosari merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Kecamatan Rowosari memuat perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah.

Mendasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Perubahan Renja Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Perubahan RKPD Kabupaten Kendal telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29

Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penyelarasan dan penyempurnaan sejak tahap penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada arah kebijakan pembangunan tahun 2024, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal pada tahun 2024 adalah **“Kendal Smart City”** yang diprioritaskan pada “Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal *Smart City*”. Arah kebijakan ini dengan focus peningkatan kemantapan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan *clean* dan *Good Governances*, penguatan *Smart City* yang difokuskan pada *Smart Government*, *Smart Education*, *Smart Health*, *Smart Economy* dan *Smart Transportation*.

Pembangunan daerah yang menerapkan perencanaan yang SMART dan prinsip Money Follow Program Priority, dan Money Follow Result, diharapkan mampu untuk lebih mendorong potensi dan keunggulan daerah menuju kemandirian ekonomi daerah. Mendasarkan pada isu global, nasional dan regional.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal

Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 20).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan OPD (Perubahan Rencana Kerja OPD) adalah sebagai berikut:

1. Maksud

- a. Menjadi pedoman penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS, serta Perubahan Renja Kecamatan Rowosari untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2024.
- b. Memberikan acuan bagi OPD dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun berjalan;
- c. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun berjalan;
- d. Memberikan acuan bagi OPD dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun berjalan;

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Tahun 2024 adalah untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi makro sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD

Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

**BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN BERKENAAN**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

**BAB III RENCANA KERJA & PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH**

Menampilkan usulan rencana kegiatan dan program serta pagu indikatif yang akan dilaksanakan pada anggaran perubahan tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II dan Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Rowosari sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 secara umum selaras dengan Renja Kecamatan Rowosari tahun 2024, namun terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran dan SE yang berlaku pada tahun bersangkutan. Untuk kegiatan-kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun 2024, diusulkan kembali pada perubahan anggaran tahun 2024 dan tahun 2025.

Adapun kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun 2024 dan diusulkan kembali pada Renja tahun 2025 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 - a) Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b) Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel.
 - Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c) Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel; dan
 - Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Rowosari Tahun 2024 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan

dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Adapun review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Rowosari sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Realisasi Program/ kegiatan/ sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang telah ditetapkan

Program/ kegiatan yang memenuhi dan/ atau melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang telah ditetapkan adalah :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

- 1) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang meliputi sub kegiatan :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (sub kegiatan tidak dilaksanakan);

- 2) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang meliputi sub kegiatan :

- a. Pengadaan Mebel, tidak tercapai karena sub kegiatan termasuk Point Point yang Masuk dalam SE Penyusunan RKA 2024 (sub kegiatan tidak dilaksanakan);

- 3) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang meliputi sub kegiatan :

- a. Pemeliharaan Mebel, tidak tercapai karena sub kegiatan belum tercukupi anggarannya (sub kegiatan tidak dilaksanakan);

- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, tidak tercapai karena sub kegiatan belum tercukupi anggarannya (sub kegiatan akan dilaksanakan pada perubahan anggaran);

2. Realisasi Program/ kegiatan yang memenuhi target dan/atau melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang telah ditetapkan

Program/ kegiatan yang memenuhi dan/ atau melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang telah ditetapkan adalah :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang meliputi sub kegiatan:
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang meliputi sub kegiatan:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik ;
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya;
- b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Indikator Kinerja Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan Kecamatan dengan target kinerja 100%, realisasi kinerja 79.17% yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha;
- c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - 1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
- d) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 1) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan target Kinerja yang dijabarkan dalam sub kegiatan:
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
- f) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Indikator Kinerja yang dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset Desa;

3. Realisasi Program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang telah ditetapkan

Program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang telah ditetapkan nihil.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, tercapainya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan

- a) Faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target kegiatan antara lain :

1) Adanya Surat Edaran Pembatasan Dalam Penyusunan RKA seluruh Perangkat Daerah se-Kabupaten Kendal;

2) Terjadi pergeseran rencana pelaksanaan kegiatan ke triwulan IV tahun 2024;

- b) Faktor yang mendukung tercapainya kegiatan karena adanya komitmen semua pihak untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, sebagai bagian untuk pencapaian perjanjian kinerja perangkat daerah.

- c) Faktor yang menjadi penyebab melebihinya target kinerja program/ kegiatan adalah nihil

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

- a) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah secara umum mencapai target yang telah ditetapkan, meskipun demikian guna meningkatkan pelayanan Kecamatan Rowosari, perlu ditingkatkan pelaksanaan kegiatan yang langsung mendukung implementasi e-goverment, bersentuhan dengan kebutuhan layanan kepada masyarakat.

6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor penghambat adalah dengan perencanaan dan penganggaran

yang mendukung percepatan Pelayanan Kecamatan Rowosari antara lain :

- a) pengajuan penambahan kekurangan anggaran pada perubahan RKPD untuk kegiatan-kegiatan yang kurang anggaran pada penetapan anggaran;
- b) pergeseran anggaran antar kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan perubahan kebijakan/ prioritas.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2024 Kecamatan Rowosari, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

➤ **Analisis IKU Kecamatan Rowosari**

Faktor pendukung tercapainya nilai SAKIP ada beberapa faktor yaitu :

- a. Komitmen Pimpinan Kunci Keberhasilan SAKIP
- b. Adanya koordinasi yang melibatkan semua kepala seksi, kepala subbagian dan aparatur Kecamatan dalam hal penataan administrasi perkantoran
- c. Manajemen kinerja dalam mendukung efektivitas

Faktor penghambat tercapainya nilai SAKIP ada beberapa faktor yaitu :

- a. Keterbatasan peralatan dan fasilitas kantor pendukung pelaksanaan pekerjaan.
- b. Data dan dokumen pendukung perencanaan yang belum memadai.
- c. Regulasi tentang perencanaan yg selalu mengalami perubahan.

Faktor pendukung tercapainya nilai IKM ada beberapa faktor yaitu :

- a. Komitmen Pimpinan Kunci Keberhasilan tercapainya Nilai IKM
- b. Kecepatan dalam memproses permintaan atau penyelesaian layanan, serta efisiensi dalam penyampaian hasil.

- c. Kepastian bahwa layanan akan diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan konsistensi dalam penerapan layanan.

Faktor penghambat tercapainya nilai IKM ada beberapa faktor yaitu :

- a. Keterbatasan peralatan dan fasilitas kantor pendukung pelaksanaan pekerjaan.
- b. Kurang informatif; informasi kurang tersebar luas kepada masyarakat
- c. Tanpa tindakan perbaikan yang jelas, masyarakat mungkin merasa bahwa survei tidak memberikan dampak yang nyata.

Kecamatan Rowosari Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II, dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.959.438.638,- (Dua milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sedangkan untuk realisasi pelaksanaan program dan kegiatan telah menyerap Anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 1.560.621.628,- (Satu milyar lima ratus enam puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) atau dengan penyerapan anggaran 52.73%. Capaian target kinerja dan keuangan Kecamatan Rowosari selama Triwulan II masih belum menampakkan kinerja yang maksimal hal ini dikarenakan ada beberapa faktor penghambat.

Ada Program/Kegiatan yang Realisasinya tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran sesuai yang direncanakan. Tapi ada juga yang memenuhi bahkan melebihi, seperti yang diuraikan dibawah ini sekaligus Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, kemudian Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah serta Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun gambaran lebih lengkap mengenai realisasi pencapaian kinerja Kecamatan Rowosari Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II, berdasarkan Evaluasi Hasil Renja OPD Kecamatan Rowosari Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja : Prosentase unit kerja yang terlayani dengan target kinerja 100%, realisasi kinerja 53,16 % yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluas Kinerja Perangkat Daerah dijabarkan dalam sub kegiatan:
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Target Kinerja 12 Laporan dengan anggaran penetapan Rp. 1.853.004,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 0 atau 0%.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, realisasi capaian kinerja dijabarkan dalam sub kegiatan:
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Indikator Kinerja Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Target Kinerja 18 Orang/bulan dengan anggaran penetapan Rp. 2.359.838.134,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 1.297.419.256,- atau 54.98% %.
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor, target kinerja 100% , realisasi capaian kinerja 45.59% % yang dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Kinerja adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Target Kinerja 4 Paket dengan anggaran penetapan Rp. 7.110.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 4.259.000,- atau 59.90% %.

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Indikator Kinerja adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Target Kinerja 12 Paket dengan anggaran penetapan Rp. 45.382.500,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 25.792.500,- atau 56.83%.
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Indikator Kinerja adalah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Target Kinerja 12 Paket dengan anggaran penetapan Rp. 14.033.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 8.134.000,- atau 57.96 %.
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor , Indikator Kinerja adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Target Kinerja 12 Paket dengan anggaran penetapan Rp. 49.895.500,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 21.696.000,- atau 43.48%.
 - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Indikator Kinerja adalah Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Target Kinerja 12 Paket dengan anggaran penetapan Rp. 14.938.500,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 6.953.500,- atau 46.55%.
 - 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Indikator Kinerja adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Target Kinerja 12 Laporan dengan anggaran penetapan Rp. 134.244.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 54.245.000,- atau 40.41%.
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Indikator Kinerja Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan dengan Target Kinerja 8 Unit, realisasi capaian Kinerja 1 Unit, yang di jabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Indikator Kinerja adalah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Target Kinerja 1 unit dengan anggaran penetapan Rp. 6.500.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 3.850.000,- atau 59.23%.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Indikator Kinerja Jumlah bulan tersedianya jasa kantor dengan target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 39.60% yang dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat, Indikator Kinerja adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Target Kinerja 12 Laporan dengan anggaran penetapan Rp. 4.500.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 2.150.000,- atau 47.78%.
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Indikator Kinerja Jumlah bulan kebutuhan layanan listrik, telepon, air dan hosting/internet, dengan target kinerja adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Target Kinerja 12 Laporan dengan anggaran penetapan Rp. 66.500.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 25.425.807,- atau 38.23%.
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Indikator Kinerja adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Target Kinerja 12 Laporan dengan anggaran penetapan Rp. 85.664.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 34.460.426,- atau 40.23%.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Indikator kinerja Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, dengan

target kinerja 12 unit, realisasi capaian kinerja 51.03% yang dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Indikator Kinerja adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Target Kinerja 12 Unit dengan anggaran penetapan Rp. 25.300.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 12.580.500,- atau 49.73%.
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Indikator Kinerja adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Target Kinerja 15 unit dengan anggaran penetapan Rp. 17.120.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 8.660.000,- atau 50.58%.
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya, Indikator Kinerja adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Target Kinerja 18 unit dengan anggaran penetapan Rp. 9.000.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 5.000.000,- atau 55.56%.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Indikator Kinerja Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan Kecamatan dengan target kinerja 100%, realisasi kinerja 79.17% yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat, Indikator Kinerja dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, Indikator kinerja adalah jumlah kegiatan sosialisasi bidang paten Target Kinerja 1 Kegiatan dengan anggaran

penetapan Rp. 1.200.000, dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 950.000,- atau 79.17% %.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Indikator Kinerja Prosentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD dengan target kinerja 100%, realisasi kinerja 29.86% yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Indikator Kinerja Jumlah kegiatan pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan, target kinerja dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

1) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, Indikator Kinerja adalah Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Target Kinerja 4 Lembaga dengan anggaran penetapan Rp. 1.650.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 1.600.000,- atau 96.97%.

2) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, Indikator Kinerja adalah Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Target Kinerja 12 Laporan dengan anggaran penetapan Rp. 18.240.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 4.340.000,- atau 23.79%.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Indikator kinerja prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani dengan target kinerja 100%, realisasi capaian kinerja 47.33% yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Indikator Kinerja dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, Indikator Kinerja adalah Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Target Kinerja 1 Laporan dengan anggaran penetapan Rp. 3.200.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 3.200.000,- atau 100%.
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Indikator Kinerja adalah Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Target Kinerja 12 Laporan dengan anggaran penetapan Rp. 87.450.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 39.705.639,- atau 45.40%.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Indikator Kinerja Prosentase kasus konflik yang di tangani dengan target kinerja 100%, realisasi capaian kinerja 0% yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan target Kinerja yang dijabarkan dalam sub kegiatan:
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Indikator kinerja adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Target Kinerja 30 Orang dengan anggaran penetapan Rp. 3.700.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 0,- atau 0%.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Indikator Kinerja Prosentase desa maju dengan target kinerja 100%, realisasi capaian kinerja 9.43% yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Indikator Kinerja yang dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Indikator Kinerja Jumlah bulan kebutuhan pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan, dengan target kinerja adalah Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Target Kinerja 16 Dokumen dan Terlaksananya kegiatan fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Target Kinerja 16 Dokumen dengan anggaran penetapan Rp. 1.200.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 200.000,- atau 16.67%.

2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Indikator Kinerja adalah Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Target Kinerja 16 Dokumen dengan anggaran penetapan Rp. 920.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 0,- atau 0%.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Rowosari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(5+6+8)	10=(9/4)
	KECAMATAN ROWOSARI								
7.	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN								
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah							
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun							
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terbayar gaji dan tunjangan ASN	14	14	7	50	14	14	100%
7.01.01.2.02.05	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Penatausahaan dan	12	12	6	50	12	12	100%

	Keuangan SKPD	pengujian/Verifikasi Keuangan							
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas harian dan emblem/ID card yang tersedia							
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian beserta atributnya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	18	0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor							
7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12	12	6	50	12	12	100%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	6	50	12	12	100%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah bulan tersedianya makan minum rapat	12	12	6	50	12	12	100%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12	12	6	50	12	12	100%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan	12	0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan tersedianya bahan bakar minyak dan biaya perjalanan dinas dalam serta	12	12	6	50	12	12	100%

		luar daerah							
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	Jumlah aset yang diadakan							
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan barang mebel yang tersedia	30	0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia	15	0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor							
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah bulan penyediaan materai yang tersedia	12	12	6	50	12	12	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya jasa telp, air, internet dan listri	12	12	6	50	12	12	100%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan tersedianya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	12	12	6	50	12	12	100%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan tersedianya honor tenaga penunjang	12	12	6	50	12	12	100%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis aset yang dipelihara							
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Pajak Perizinan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas dan suku cadang yang	10	10	5	50	10	10	100%

	Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan	tersedia dan terbayarnya pajak/STNK kendaraan dinas							
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan komputer, jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan mesin	12	12	6	50	12	12	100%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	1	0	0	1	1	100%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan							
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan							
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah laporan pelaksanaan penerbitan izin non usaha	12	12	6	50	12	12	100%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD							
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah koordinasi yang dilaksanakan							

7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah desa yang melaksanakan musrenbang	16	16	16	100	16	16	100%
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan, penyuluhan dan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16	16	16	100	16	16	100%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani							
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	jumlah koordinasi yang dilaksanakan							
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	jumlah bulan koordinasi yang dilaksanakan	12	12	6	50	12	12	100%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani							
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan							

7.01.05.2.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	jumlah peserta bimtek tentang wawasan kebangsaan	50	85	0	50	50	50	100%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu							
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes							
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16	16	8	50	16	16	100%
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Telaksananya kegiatan fasilitasi pengelolaan dan pendayagunaan aset desa	16	16	8	50	16	16	100%

2.2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 tidak memasukkan usulan dari masyarakat yang disampaikan lewat kegiatan Musrenbangcam, karena program/kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan bersifat rutin dan tugas pokok yang dilakukan bersifat koordinatif dan pembinaan. Sedangkan usulan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat bersifat fisik.

Usulan program/ kegiatan dari masyarakat merupakan hasil aspirasi dalam forum musrenbang dengan memperhatikan tugas dan fungsi, rencana strategis perangkat daerah. Serta isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut apabila ada, dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun Perubahan renja Kecamatan yang nantinya dibahas dalam forum perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Baperlitbang.

Dalam Menyusun Usulan Perubahan Renja Kecamatan Rowosari tidak mendapat usulan aspirasi dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD untuk tahun anggaran 2024.

Usulan yang berasal dari masyarakat tersebut selanjutnya ditampung dalam Daftar Usulan Prioritas Kegiatan yang kemudian disampaikan dalam Musrenbangkab. Program/kegiatan yang berasal dari masyarakat tersebut diperjuangkan dan dikawal oleh Tim Kecamatan agar masuk dalam program/kegiatan prioritas di OPD teknis terkait yang ada di Kabupaten Kendal.

Tabel 2.2

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Rowosari

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan sebagai penjabaran misi yang pertama seperti tersebut diatas, maka tujuan yang ditetapkan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Rowosari pada tahun 2024 yaitu untuk mengacu pada arah kebijakan pembangunan tahun 2024, Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2024 “**Kendal Smart City**” yang diprioritaskan pada “Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep *Kendal Smart City*”. Arah kebijakan ini dengan focus peningkatan kemantapan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan *clean* dan *Good Governances*, penguatan *Smart City* yang difokuskan pada *Smart Government*, *Smart Education*, *Smart Health*, *Smart Economy* dan *Smart Transportation*.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka Rencana Kerja dan Pendanaan yang diusulkan pada Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rowosari Tahun 2024 terdiri dari 6 program dan 12 kegiatan, dengan nominal anggaran penetapan sebesar Rp. 2.959.438.638,- berkurang Rp. 49.700.000,-, sehingga menjadi Rp. 2.909.738.638,-. Adapun program/kegiatan yang diusulkan Perubahan APBD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Yang dijabarkan dalam subkegiatan:
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp.

- b. 1.853.004,- berkurang Rp. 653.004,- menjadi Rp. 1.200.000,- dikarenakan anggaran fotocopy dipindah ke Rekening Penyediaan barang cetakan dan Pengadaan
- c. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 2.359.838.134,- berkurang Rp. 150.000.000,- menjadi Rp. 2.209.838.134,-; dilakukan perhitungan ulang sesuai jumlah pegawai dan efisiensi anggaran.
- d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran penetapan sebesar Rp.5.500.000,- bertambah Rp. 3.500.000,- menjadi Rp. 10.610.000,-; untuk Pemeliharaan Jaringan Listrik Kantor
- e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan Anggaran Penetapan sebesar Rp. 45.382.500,- bertambah Rp. 2.000.000,- menjadi Rp. 47.382.500,-; untuk memenuhi anggaran Atk Kantor yang penyediaannya tinggal sedikit.
- f. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan Anggaran Penetapan Rp. 14.033.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.
- g. Penyediaan Logistik Kantor, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 49.895.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.
- h. Penyediaan barang cetakan dan Pengadaan Rp. 14.938.500,- bertambah Rp. 3.0004,- menjadi Rp. 14.941.504,-;
- i. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 134.244.000,- bertambah Rp. 37.830.000,- menjadi Rp. 172.074.000,-; bertambah pada anggaran bantuan transport kegiatan dan Makan Minuman Rapat.
- j. Pengadaan Mebel Anggaran Penetapan sebesar Rp. 0,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan. Sehingga pengadaan mebel tidak bisa terlaksana
- k. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya , dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 6.500.000- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.

- l. Penyediaan jasa surat menyurat. Dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 4.500.000,- bertambah Rp. 200.000,- menjadi Rp. 4.700.000,-;
- m. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 66.500.000,- bertambah Rp. 12.000.000,- menjadi Rp. 78.500.000. untuk menaikan Daya Listrik di Pendopo Kecamatan Rowosari.
- n. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 85.664.000,- bertambah Rp. 5.300.000,- menjadi Rp. 90.964.000.- memenuhi Kebutuhan Anggaran untuk Honor Tenaga Penunjang Kegiatan.
- o. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, anggaran Penetapan sebesar Rp. 25.300.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.
- p. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, anggaran Penetapan sebesar Rp.17.120.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.
- q. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, anggaran Penetapan sebesar Rp. 0,- bertambah Rp. 20.000.000 menjadi Rp. 20.000.000.- untuk pemeliharaan plafon ruang rapat/ aula kecamatan
- r. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 9.000.000 tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.

2) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMRINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Yang dijabarkan dalam subkegiatan:

- a. Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan, anggaran penetapan sebesar Rp. 1.200.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.

3) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Yang dijabarkan dalam subkegiatan:

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa , anggaran penetapan RP. 1.650.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.
- b. Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 18.240.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.

4) PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Yang dijabarkan dalam subkegiatan:

- a. Sinergitas dengan kepolisian Negara republic Indonesia. Tentara nasional Indonesia dan Instansi vertical di wilayah Kecamatan, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 3.200.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.
- b. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 87.450.000,- bertambah Rp. 7.950.000,- menjadi Rp. 95.400.000.-

5) PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- a. Fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional, dengan anggaran penetapan Rp. 3.700.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.

6) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Yang dijabarkan dalam subkegiatan:

- a. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, dengan anggaran sebesar Rp. 1.200.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.
- b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan asset desa, dengan anggaran sebesar Rp. 920.000,- bertambah Rp. 12.170.000,- menjadi Rp. 14.290.000.-

Adapun rincian perubahan rencana kerja dan pendanaan dapat dilihat pada Tabel 3.1. dibawah ini :

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kecamatan Rowosari Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)
								Target 2024				
								Sebelum	Sesudah	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	11	12	13
						KECAMATAN ROWOSARI				2.959.438.638	2.909.738.638	- 49.700.000
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.959.438.638	2.909.738.638	- 49.700.000
	7	01				KECAMATAN				2.959.438.638	2.909.738.638	- 49.700.000
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.841.878.638	2.772.058.638	- 69.820.000
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.853.004	1.200.000	- 653.004
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	0	0	-
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.853.004	1.200.000	- 653.004
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.359.838.134	2.209.838.134	- 150.000.000

	7	01	01	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	2.359.838.134	2.209.838.134	- 150.000.000
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	-	-
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	20 Paket	-	-	-
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				265.603.500	308.936.504	43.333.004
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	7.110.000	10.610.000	3.500.000
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	45.382.500	47.382.500	2.000.000
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						

							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	14.033.000	14.033.000	-
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	49.895.500	49.895.500	-
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	14.938.500	14.941.504	3.004
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	134.244.000	172.074.000	37.830.000
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				6.500.000	6.500.000	-
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel						
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	-	-	-
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	6.500.000	6.500.000	-
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				156.664.000	174.164.000	17.500.000

	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	4.500.000	4.700.000	200.000
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	66.500.000	78.500.000	12.000.000
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	85.664.000	90.964.000	5.300.000
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			51.420.000	71.420.000	20.000.000
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	25.300.000	25.300.000	-
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	17.120.000	17.120.000	-
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0,00	20.000.000	20.000.000
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	18 Unit	9.000.000	9.000.000	-
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.200.000	1.200.000	-
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	1.200.000	1.200.000	-
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000	1.200.000	-
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				19.890.000	19.890.000	-
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12 kali	12 kali	19.890.000	19.890.000	-
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.650.000	1.650.000	-

	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	18.240.000	18.240.000	-
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			90.650.000	98.600.000	7.950.000
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			3.200.000	3.200.000	-
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	6 Laporan	3.200.000	3.200.000	-
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			87.450.000	95.400.000	7.950.000
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	87.450.000	95.400.000	7.950.000
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			3.700.000	3.700.000	-

	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Perundang - undangan	12 Laporan	12 Laporan	3.700.000	3.700.000	-
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	30 Orang	30 Orang	3.700.000	3.700.000	-
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				2.120.000	14.290.000	12.170.000
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				2.120.000	14.290.000	12.170.000
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 Dokumen	16 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000	-
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 Dokumen	16 Dokumen	920.000	13.090.000	12.170.000

Adapun Lampiran Rancangan Akhir Perubahan RKPD 2024 hasil printout sipd.kemendagri.go.id sebagaimana Tabel berikut ini :

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN ROWOSARI KAB. KENDAL
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRATRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL			DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		KECAMATAN ROWOSARI							2.852.177.636,00	2.959.438.638,00	2.909.738.638,00	57.561.002,00							3.267.500.000,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.852.177.636,00	2.959.438.638,00	2.909.738.638,00	57.561.002,00							3.267.500.000,00		
	7.01	KECAMATAN							2.852.177.636,00	2.959.438.638,00	2.909.738.638,00	57.561.002,00							3.267.500.000,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah				100,00 %	100,00 %	2.663.657.636,00	2.841.878.638,00	2.772.058.638,00	297.842.364,00							2.961.500.000,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan/penganggaran evaluasi yang terusun				24 Dokumen	24 Dokumen	3.700.000,00	1.853.004,00	1.200.000,00	-2.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -		ASN Kecamatan Rowosari	7.000.000,00	KECAMATAN ROWOSARI	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	1.920.000,00	0,00	0,00	-1.920.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			4.000.000,00	KECAMATAN ROWOSARI	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.780.000,00	1.853.004,00	1.200.000,00	-580.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			3.000.000,00	KECAMATAN ROWOSARI	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang terusun				26 Dokumen	26 Dokumen	2.241.147.136,00	2.359.838.134,00	2.209.838.134,00	-31.309.002,00			-	-		ASN Kecamatan Rowosari	2.290.000.000,00	KECAMATAN ROWOSARI	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/b ulan	18 Orang/b ulan	2.157.267.136,00	2.359.838.134,00	2.209.838.134,00	52.570.998,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-			2.200.000.000,00	KECAMATAN ROWOSARI
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	83.880.000,00	0,00	0,00	-83.880.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			90.000.000,00	KECAMATAN ROWOSARI	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakikan dinas harian dan emblem/ID card yang tersedia				21 Stel	21 Stel	0,00	0,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -		ASN Kecamatan Rowosari	22.000.000,00	KECAMATAN ROWOSARI	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	20 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			22.000.000,00	KECAMATAN ROWOSARI	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhnya kebutuhan pelayanan kantor				100 persen	100 persen	225.036.500,00	265.603.500,00	308.936.504,00	83.900.004,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -		ASN Kecamatan Rowosari	259.000.000,00	KECAMATAN ROWOSARI	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	7.953.500,00	7.110.000,00	10.610.000,00	2.656.500,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			7.000.000,00	KECAMATAN ROWOSARI	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	45.382.500,00	45.382.500,00	47.382.500,00	2.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			50.000.000,00	KECAMATAN ROWOSARI	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	19.443.000,00	14.033.000,00	14.033.000,00	-5.410.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			6.000.000,00	KECAMATAN ROWOSARI	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	54.200.000,00	49.895.500,00	49.895.500,00	-4.304.500,00	Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			80.000.000,00	KECAMATAN ROWOSARI	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	14.938.500,00	14.938.500,00	14.941.504,00	3.004,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			16.000.000,00	KECAMATAN ROWOSARI	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	83.119.000,00	134.244.000,00	172.074.000,00	88.955.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			100.000.000,00	KECAMATAN ROWOSARI	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penerimaan Urusan Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Aset yang diadakan				1 Unit	1 Unit	13.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	-6.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -		ASN Kecamatan Rowosari	110.000.000,00	KECAMATAN ROWOSARI	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	13.000.000,00	0,00	0,00	-13.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			60.000.000,00	KECAMATAN ROWOSARI	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEHDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			50.000.000,00	KECAMATAN ROWOSARI	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor				12 Bulan	12 Bulan	127.424.000,00	156.664.000,00	174.164.000,00	46.740.000,00				-	ASH Kecamatan Rowosari		165.500.000,00	KECAMATAN ROWOSARI	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														-			5.500.000,00	KECAMATAN ROWOSARI	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	4.700.000,00	200.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEHDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			5.500.000,00	KECAMATAN ROWOSARI	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														-					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	66.500.000,00	66.500.000,00	78.500.000,00	12.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEHDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			65.000.000,00	KECAMATAN ROWOSARI	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														-					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	56.424.000,00	85.664.000,00	90.964.000,00	34.540.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEHDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			95.000.000,00	KECAMATAN ROWOSARI	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis aset yang dipelihara				6 Unit	6 Unit	53.350.000,00	51.420.000,00	71.420.000,00	18.070.000,00				-	ASH Kecamatan Rowosari		108.000.000,00	KECAMATAN ROWOSARI	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														-					
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	26.500.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00	-1.200.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEHDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			30.000.000,00	KECAMATAN ROWOSARI	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya														-					
			Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	17.850.000,00	17.120.000,00	17.120.000,00	-730.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEHDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akurabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akurabel dan melayani			0,00	KECAMATAN ROWOSARI	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														-					
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEHDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			50.000.000,00	KECAMATAN ROWOSARI	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														-					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				18 Unit	18 Unit	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEHDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			28.000.000,00	KECAMATAN ROWOSARI	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN LAYANAN PUBLIK	Prosentase Pelimpahan pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kecamatan.				100 %	100 %	6.855.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.145.000,00				-			9.000.000,00		
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	6.855.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-5.655.000,00				-	Masyarakat Umum/ Kelompok UMKM		9.000.000,00	KECAMATAN ROWOSARI	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														-					
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	6.855.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-5.655.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEHDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			9.000.000,00	KECAMATAN ROWOSARI	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD				80 %	80 %	57.980.000,00	19.890.000,00	19.890.000,00	13.020.000,00				-			71.000.000,00		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah koordinasi yang dilaksanakan				12 kali	12 kali	57.980.000,00	19.890.000,00	19.890.000,00	-38.090.000,00				-	Pemerintah Desa dan Masyarakat Umum		71.000.000,00	KECAMATAN ROWOSARI	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														-					
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				4 Lembaga Kemasyara kutan	4 Lembaga Kemasyara kutan	13.600.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	-11.950.000,00	Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kel/Desa	PEHDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Meningkatkan Pemerataan	-			21.000.000,00	KECAMATAN ROWOSARI	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														-					
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	44.380.000,00	18.240.000,00	18.240.000,00	-26.140.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEHDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Meningkatkan Pemerataan	-			50.000.000,00	KECAMATAN ROWOSARI	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEDUHAH	RKPD 2024		APBD 2024					RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETETRAMAN DAN KETERIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani				100 %	100 %	86.540.000,00	90.650.000,00	98.600.000,00	46.460.000,00							133.000.000,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan				12 kali	12 kali	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-	Masyarakat Umum	36.000.000,00	KECAMATAN ROWOSARI	
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																					
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		36.000.000,00	KECAMATAN ROWOSARI	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan				12 kali	12 kali	83.340.000,00	87.450.000,00	95.400.000,00	12.060.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	-	Linmas Kecamatan Rowosari	97.000.000,00	KECAMATAN ROWOSARI	
7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																					
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	83.340.000,00	87.450.000,00	95.400.000,00	12.060.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	-		97.000.000,00	KECAMATAN ROWOSARI	
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase kasus konflik sosial yang di tangani				100 %	100 %	13.600.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	-600.000,00							13.000.000,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Tugas dan Fungsinya Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Perundang - undangan				12 Laporan	12 Laporan	13.600.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	-9.900.000,00			Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-	Masyarakat Umum	13.000.000,00	KECAMATAN ROWOSARI	
7.01.05.2.01.0002 Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																					
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				30 Orang	30 Orang	13.600.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	-9.900.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		13.000.000,00	KECAMATAN ROWOSARI	
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase penyusunan APBDes tepat waktu				100 %	100 %	23.545.000,00	2.120.000,00	14.290.000,00	66.455.000,00							80.000.000,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitas pembinaan pengawasan pemerintah desa				16 Desa	16 Desa	23.545.000,00	2.120.000,00	14.290.000,00	-9.255.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	-	Pemerintah Desa	80.000.000,00	KECAMATAN ROWOSARI	
7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa																					
			Jumlah Dokumen yang Difaasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				16 Dokumen	16 Dokumen	14.335.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-13.135.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN ROWOSARI	
7.01.06.2.01.0003 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																					
			Jumlah Dokumen yang Difaasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				16 Dokumen	16 Dokumen	9.210.000,00	920.000,00	13.090.000,00	3.880.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN ROWOSARI	
J U M L A H									2.852.177.636,00	2.959.438.638,00	2.909.738.638,00	57.561.002,00									

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rowosari Tahun 2024 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Rowosari itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Rowosari dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rowosari Tahun 2024 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Perencanaan Kabupaten Kendal, sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran berkenaan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Rowosari Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Penetapan maupun Perubahan Kecamatan Rowosari pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kendal;
2. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rowosari ini berpedoman pada Renstra Kecamatan Rowosari Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja.
3. Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Rowosari ini juga berpedoman pada RKPD Perubahan Kabupaten Kendal Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Rowosari Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rowosari ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Rowosari Tahun 2024;

2. Dalam penyusunan RKAP nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kendal. Begitu pula dalam penyusunan DPPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Kendal;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Rowosari Tahun 2024.

Rencana Tindak Lanjut

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal pada tahun 2024 adalah “**Kendal Smart City**” yang diprioritaskan pada “Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal *Smart City*”. Arah kebijakan ini dengan focus peningkatan kemantapan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan *clean* dan *Good Governances*, penguatan *Smart City* yang difokuskan pada *Smart Government*, *Smart Education*, *Smart Health*, *Smart Economy* dan *Smart Transportation*.

Pembangunan daerah yang menerapkan perencanaan yang SMART dan prinsip Money Follow Program Priority, dan Money Follow Result, diharapkan mampu untuk lebih mendorong potensi dan keunggulan daerah menuju kemandirian ekonomi daerah. Mendasarkan pada isu global, nasional dan regional.

Berdasarkan arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2024, Kecamatan Rowosari menetapkan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja dengan fokus kinerja aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan pada Kecamatan Rowosari;
2. Peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap aparatur desa melalui pembinaan SDM dan kelembagaan / administrasi diprioritaskan kepada Aparatur desa yang kurang memahami tugas dan fungsi;
3. Peningkatan pelaksanaan kewenangan Bupati kepada Camat diprioritaskan kepada pembinaan dan pendampingan

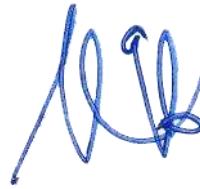
penyusunan APBDes, LPPDes serta pemantauan aset Pemda dan aset desa.

4. Peningkatan kinerja pelayanan publik difokuskan pada penilaian SKM.

Demikian untuk menjadikan periksa dan apabila dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, kami mohon sarannya untuk perbaikan di tahun yang akan datang.

Kendal, 2024

CAMAT ROWOSARI



MAHMUD EKO SAPUTRO, S.STP.

Pembina

NIP. 19830810 200112 1 003



PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2024

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KENDAL
2024

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Kata Pengantar	iv
I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan.....	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
II. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Renstra Perangkat Daerah	11
2.2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	20
III. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah	21
IV. Penutup	44

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Alokasi dan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.....	13
Tabel 2.2. Hasil Evaluasi Program pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Triwulan II Tahun 2024.....	14
Tabel 2.3. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 Kabupaten Kendal	16
Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat pada Perubahan Tahun 2024 Kabupaten Kendal	20
Tabel 3.1. Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Kendal (RKPD) Tahun 2024	22
Tabel 3.2. Persandingan Pagu Alokasi Pendanaan Anggaran Belanja Operasi Tahun 2024.....	41

KATA PENGANTAR

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan Renja OPD) diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tidak dapat terakomodir dalam APBD Penetapan Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Perubahan Renja dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Adapun untuk Kabupaten Kendal, perubahan RKPD dan Renja OPD disebabkan adanya kebutuhan anggaran dan pergeseran anggaran antar kegiatan.

Perubahan Renja Baperlitbang ini diharapkan dapat benar-benar menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif kegiatan Baperlitbang pada perubahan APBD Tahun 2024.

Kendal,

2024



KEPALA BAPERLITBANG KAB. KENDAL

HIZUDDIN LATIF, S.H., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19750704 200312 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D) sebagai rencana kerja tahunan. Sebagai tindak lanjut atas keluarnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, diinstruksikan kepada daerah untuk melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sebagai tindak lanjutnya, kepala Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan membuat penyesuaian atas semua dokumen perencanaan, mulai dari Renstra-OPD, Rencana Kerja OPD dengan berpedoman pada dokumen RPJMD dan RKPD yang telah disesuaikan, serta tetap mengakomodir hasil-hasil Musrenbang. Oleh karena dokumen RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2024 telah disesuaikan dengan nomenklatur serta OPD/unit kerja baru, maka dokumen Renja OPD/unit kerja juga perlu segera disesuaikan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 dan Renstra PD yang telah disusun. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal Tahun 2024 merupakan perubahan atas dokumen perencanaan tahunan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal yang memuat program-program dan kegiatan urusan pemerintahan fungsi penunjang, sebagai bagian dari menunjang capaian Visi dan Misi Kabupaten Kendal Tahun 2021 - 2026. Di dalam Perubahan Renja ini memuat permasalahan serta menyelaraskan target capaian kinerja yang belum diselesaikan dan penajaman strategi

dalam rangka mewujudkan sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal sampai akhir Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang kemudian disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja PD ini mengacu pada Rancangan Awal Perubahan RKPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode triwulan I dan II untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, menyelaraskan serta mendasarkan kegiatan prioritas yang masih dilaksanakan.

Rancangan awal perubahan RKPD menjadi acuan perumusan perubahan atas program, kegiatan, indikator kinerja dan proyeksi dana yang dibutuhkan dalam penyusunan rancangan akhir perubahan Renja PD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode triwulan I dan II menjadi acuan perumusan rasionalisasi kegiatan maupun kegiatan alternatif dan/atau baru guna menunjang capaian sasaran daerah, yang berpedoman pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan kebutuhan anggaran dalam penyusunan rancangan akhir perubahan Renja PD, ini dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penyelarasan dan penyempurnaan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan tahun 2024 yaitu "KENDAL SMART CITY" yang diprioritaskan pada *"Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal Smart City"*. Arah kebijakan ini dengan fokus peningkatan

kemantapan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan clean dan Good Governances, penguatan Smart City yang difokuskan pada Smart Government, Smart Education, Smart Health, Smart Economy dan Smart Transportation.

Pembahasan Rancangan akhir perubahan Renja meliputi rasionalisasi dan penyesuaian program dan kegiatan sesuai situasi dan kondisi serta tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal, juga berdasarkan usulan program kegiatan hasil reses anggota DPRD, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan, penyesuaian program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta penyesuaian terhadap pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah. Rancangan akhir perubahan Renja PD disusun kemudian ditetapkan menjadi Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah melalui Keputusan Bupati dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan sampai akhir tahun anggaran.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 juga diatur tentang tata cara Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah yaitu dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud diatas meliputi perubahan :

- a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- b. target sasaran pembangunan Daerah;
- c. prioritas pembangunan Daerah;
- d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
- e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 disusun dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan perubahan RKPD;
- b. perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
- c. penetapan.

Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.

Rancangan akhir perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan bagian akhir dari penyusunan dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah yang harus diverifikasi guna memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan awal perubahan RKPD. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal berkewajiban menyusun Dokumen Perubahan Renja 2023 sebagai satu kesatuan dari sistem perencanaan pemerintah daerah, provinsi dan nasional. Rancangan akhir perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal Tahun 2024 juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang termuat dalam RPJMD, serta menjadi dasar untuk penyusunan Dokumen Rencana Kerjadan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal Tahun 2024.

Mengingat arti strategis dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal Tahun 2024 merupakan bagian penjabaran dari perencanaan tahun keempat RPJMD Kabupaten Kendal dan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.

Mempedomani Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2024.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan atau tahun 2024. Hasil evaluasi tersebut disampaikan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah melalui Tim Penyusun Perubahan RKPD Kabupaten Kendal yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi yang menunjukkan perlu dilakukan perubahan dengan pertimbangan :

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan.

2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar OPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan.
3. Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2023 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2024.
4. Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Perubahan RKPD Tahun 2024 ditetapkan dengan peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota yang kemudian menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS, Renstra PD dan Perubahan Renja PD untuk menyusun rancangan perubahan APBD Provinsi dan Kabupaten/ Kota tahun 2024.

Selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2024 dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Perangkat Daerah dan kemudian ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD Perubahan) Kabupaten Kendal.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Nomor 219);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 20).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) adalah tersusunnya dokumen perubahan perencanaan pembangunan tahunan bagi Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan daerah jangka menengah dan panjang.

Adapun tujuan Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan acuan dalam menyusun program dan kegiatan pada perubahan APBD Tahun 2024;
- b. Memberikan acuan dalam menentukan lokasi kegiatan pada perubahan APBD Tahun 2024;
- c. Memberikan acuan dalam menyusun indikator kinerja kegiatan pada perubahan APBD Tahun 2024;
- d. Memberikan acuan dalam kelompok sasaran kegiatan pada perubahan APBD Tahun 2024;
- e. Memberikan acuan dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan pada perubahan APBD Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan serta telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan Rencana Kerja didasarkan pada arah kebijakan Pembangunan, daftar program/ kegiatan prioritas dan lampiran program dan kegiatan.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka menunjang capaian Visi dan Misi Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mendukung dan berkontribusi dalam mencapai salah satu tujuan Pembangunan Kabupaten Kendal yaitu "Meningkatkan Reformasi Birokrasi dalam Tata Kelola Pemerintahan yang baik" yang fokus pada penerapan strategi daerah yaitu Perbaikan tata kelola pemerintahan. Badan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mendukung Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia serta mendukung Peningkatan akses dan kualitas layanan publik demi mewujudkan arah kebijakan pembangunan tahun 2024 yaitu "KENDAL SMART CITY", yang fokus peningkatan kemantapan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan clean dan Good Governances, penguatan Smart City yang difokuskan pada Smart Government, Smart Education, Smart Health, Smart Economy dan Smart Transportation. Arah kebijakan ini diprioritaskan pada *"Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal Smart City"*.

Pelaksanaan kegiatan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan di tahun 2024 sampai dengan Triwulan II secara umum masih selaras dengan dinamika yang ada setelah melalui penyelarasan dan penyempurnaan terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kinerja kegiatan menunjukkan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024 Triwulan II menunjukkan kinerja yang optimal, selaras dan masih on the track dengan target serta capaian

yang diharapkan. Ini dapat dilihat dari berjalannya semua kegiatan, selaras dengan dinamika situasi dan kondisi yang berkembang khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, dimana Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan selaku unit kerja yang terkait tugas dan fungsinya sebagai penunjang perencanaan dan penunjang penelitian dan pengembangan.

Monitoring dan evaluasi secara berkala terfokus pada beberapa program/kegiatan prioritas yang terindikasi capaian realisasinya masih rendah. Evaluasi kinerja setiap kegiatan serta kebutuhan rutin pada tahun-tahun sebelumnya, akomodasi terhadap usulan rencana kebutuhan barang yang masuk serta proyeksi cadangan bagi kebutuhan insidental/tidak terduga merupakan unsur terpenting dalam proses penganggaran dengan berpedoman pada setiap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Badan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan untuk beberapa program/kegiatan lebih mengedepankan outcome atas capaian target kinerja yang telah ditentukan. Proyeksi terhadap alokasi penyediaan juga tidak selalu berbanding lurus dengan kebutuhan yang ada seiring dinamika yang terus berkembang mengikuti mekanisme serta kebijakan yang ada. Sinkronisasi dalam setiap langkah perencanaan menjadi pola rutin karena Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagai unsur penunjang mempunyai tugas penting dalam melaksanakan fungsi perencanaan maupun fungsi penelitian dan pengembangan.

Sebagai catatan khusus bagi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mempunyai capaian realisasi anggaran rendah disamping realisasi fisiknya juga tidak mencapai hasil maksimal, hal ini dimungkinkan karena beberapa faktor yang diantaranya meliputi pertimbangan hasil kajian, kebijakan maupun mekanisme yang tidak memungkinkan untuk direalisasikan sepenuhnya berdasarkan prioritas dan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan serta evaluasi yang berjalan, beberapa program/kegiatan perlu adanya perubahan pada rencana kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan guna mengakomodasi serta menyelaraskan terhadap berbagai dinamika kebutuhan prioritas yang

berkembang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal terkait dengan penyesuaian atas APBD Tahun 2024.

Perubahan rencana kerja ini akan mengakomodir usulan proyeksi anggaran perubahan yang diprioritaskan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan yang selanjutnya akan ditetapkan masing-masing plafon anggaran per kegiatan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Perubahan rencana kerja ini juga akan mengakomodir adanya beberapa pergeseran belanja pada beberapa kegiatan guna penyesuaian atas kondisi-kondisi yang terjadi pada APBD Tahun 2024, dinamika kebutuhan yang sedang berkembang serta faktor efisiensi pada beberapa belanja kegiatan yang memungkinkan optimalisasi capaian kinerja pada belanja kegiatan lain yang lebih prioritas dengan berpedoman pada peraturan/kebijakan yang ada.

Pada tahun 2024 belanja operasi diarahkan guna mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai bidang kewenangan/urusan pemerintah daerah dengan tujuan dan target sasaran yang jelas guna mendukung arah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 dalam mewujudkan “KENDAL SMART CITY”. Selain itu pengalokasian anggaran untuk membiayai kebutuhan rutin termasuk pemberian gaji dan tunjangan bagi PNS di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal.

Adapun alokasi serta realisasi operasi sampai Triwulan II (Semester I) tahun 2024 pada Badan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Alokasi dan Realisasi sampai Triwulan II Tahun 2024

No.	Uraian	Alokasi	Realisasi (sp2d)	
			(Rp.)	(%)
1	BELANJA OPERASI	11.675.431.326	4.072.481.275	34,88 %

Sumber : SIMPOK SIPD 2024 (s/d 30 Juni 2024)

Berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Baperlitbang Tahun 2024 sampai dengan semester I, diketahui bahwa rata-rata tingkat capaian realisasi kinerja dan anggaran sebesar 34,88 %. Adapun capaian tersebut termasuk dalam kriteria sedang.

Adapun capaian kinerja dan anggaran masing-masing program pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Hasil Evaluasi Program pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Triwulan II Tahun 2024

Kode	Program Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD yang dievaluasi	
		Keg/Sub Keg.	Rp	Fisik	Keu
5.1	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5/18	3.511.393.006	41,43 %	41,43 %
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3/11	340.889.212	40,35 %	40,35%
Kode	Program Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD yang dievaluasi	
		Keg/Sub Keg.	Rp	Fisik	Keu
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3/24	88.543.242	10 %	7 %
5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	4/9	131.655.815	12,08%	12,08%

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Baperlibang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada table 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 Kabupaten Kendal

Nama PD : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal

Kode	Urusan/Bidang urusan pmda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian program Renstra Tahun 2024	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	URUSAN								
5.01	PERENCANAAN								
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah (%)	100	100	41,43	82,86	100	100	100,00
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (dokumen)	12	12	6	100	12	12	100,00
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah (persen)	100	100	47,24	94,48	100	100	100,00
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan rutin perkantoran (persen)	100	100	27,59	55,18	100	100	100,00
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang	Persentase	100	100	30,72	61,44	100	100	100,00

Kode	Urusan/Bidang urusan pmda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian program Renstra Tahun 2024	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	PerkiraanRealisasiCapaianTarget Renstra PD s/d tahun 2024	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat realisasi (%)		RealisasiCapaian Program dankegiatan s/d tahunberjalan tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Urusan Pemerintahan Daerah	terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran (persen)							
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (persen)	100	100	21,08	42,16	100	100	100,00
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD (%)	100	100	40,35	80,70	100	100	100,00
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun (dokumen)	34	30	42,67	85,34	28	28	100,00
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terinputnya analisis damta dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah (kali)	1	1	1	100	1	1	100,00
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan BidangPerencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penyusunan pengendalian, evaluasi (Perangkat Daerah)	57	57	31,30	62,60	57	57	100,00
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	Prosentase realisasi indikator OPD dibawah rumpun	96,15	90,38	22,85	45,70	82,69	84,23	101,86

Kode	Urusan/Bidang urusan pemda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian program Renstra Tahun 2024	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	PEMBANGUNAN DAERAH	Pemerintahan & Pembangunan Manusia (%)							
		Prosentase realisasi indikator OPD dibawah rumpun Perekonomian (%)	93,94	90,91	33,51	67,02	81,8	97,84	119,60
		Persentase realisasi indikator OPD dibawah rumpun SDA (Sumber Daya Alam) (%)	86,36	81,81	1,8	3,60	77,27	77,49	100,28
		Prosentase realisasi indikator OPD dibawah rumpun Infrastruktur & kewilayahan (%)	88,89	83,33	1,76	3,52	79,63	80,63	101,25
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah koordinasi perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (kali)	46	46	23	100	58	58	100,00
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (kali)	36	32	13,26	26,52	31	24	77,42
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang	Jumlah koordinasi	12	12	6	100	12	12	100,00

Kode	Urusan/Bidang urusan pemda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian program Renstra Tahun 2024	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Infrastruktur dan Kewilayahan	perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (kali)							
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase jenis kelitbangan utama yang diimplementasikan (%)	85,71	71,43	12,08	24,16	57,14	57,14	100,00
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan (dokumen)	3	3	1,5	100	1	1	100,00
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah penelitian bidang social dan kependudukan (dokumen)	4	4	2	100,00	3	3	100,00
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah penelitian bidang ekonomi dan pembangunan (dokumen)	4	4	2	100,00	2	2	100,00
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi dan teknologi yang dihasilkan (buah)	24	22	32,66	100,00	20	20	100,00

2.2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 ini Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal tidak mendapat usulan aspiratif dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD karena usulan program dan kegiatan masyarakat lebih banyak mengarah pada usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik sehingga diarahkan pada OPD teknis terkait. Akan tetapi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal tetap mengajukan usulan program-program kegiatan lain yang sifatnya strategis dan bermanfaat guna menunjang peningkatan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta peningkatan Sumber Daya Manusia ASN yang lebih baik dalam mencapai tujuan serta sasaran yang diinginkan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik demi mewujudkan reformasi birokrasi. Disamping perlunya strategi serta kebijakan khusus pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal sebagai lini pendukung kesuksesan dan kelancaran penyelenggaraan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan di daerah, diharapkan pemerintahan yang terbentuk di Kabupaten Kendal mampu berpandangan jauh ke depan (visioner), transparan, akuntabel, efisien dan efektif, profesional, demokratis, partisipatif, responsif, serta memiliki komitmen yang tinggi pada pengurangan berbagai kesenjangan yang terjadi.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Pada Perubahan Tahun 2024 Kabupaten Kendal

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Vol	Catatan
	NIHIL				

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024 tetap mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah dan dinamika yang berkembang untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Perubahan rencana kerja ini akan mengakomodir usulan proyeksi anggaran perubahan yang diprioritaskan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya akan ditetapkan masing-masing plafon anggaran per kegiatan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Perubahan rencana kerja ini juga akan mengakomodir adanya beberapa pergeseran belanja pada beberapa kegiatan guna penyesuaian atas kondisi-kondisi yang terjadi pada APBD Tahun 2024. Dinamika yang sedang berkembang memerlukan Langkah rasionalisasi pada beberapa belanja kegiatan yang diharapkan mampu mengoptimalkan capaian kinerja pada belanja kegiatan lain yang lebih prioritas dengan berpedoman pada peraturan/kebijakan yang ada. Sedangkan untuk belanja tidak langsung juga diakomodir dalam perubahan rencana kerja tahun 2024, pengalokasian anggaran dalam bentuk belanja pegawai yang rutin diperuntukkan sebagai pemberian gaji dan tunjangan bagi PNS Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal.

Adapun rincian yang mencakup penyesuaian terhadap isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan, target capaian kinerja baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan serta sumber dana terdapat pada Tabel 3.1. berikut :

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
5.01.01.2.01.0006		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5 Laporan	5 Laporan	30.000.000	22.250.000	11.350.000	-18.650.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan dan Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	40.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah			100 Persen	100 Persen	5.328.703.616	6.165.400.374	5.515.400.374	186.696.758			-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	5.498.223.392	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	5.106.623.616	6.165.400.374	5.515.400.374	408.776.758	Kab. Kendal, Semua Kecamatan dan Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	5.276.143.392	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 Dokumen	1 Dokumen	222.080.000	0	0	-222.080.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan dan Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	222.080.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan rutin perkantoran			100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	674.331.912	1.515.051.282	2.077.777.082	1.403.445.170			-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	908.655.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															

5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan sarana prasarana perkantoran						100 Persen	100 Persen	261.050.000	461.050.000	461.050.000	200.000.000			Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	-	561.500.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							32 Unit	32 Unit	160.000.000	160.000.000	160.000.000	0	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	-	160.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara						70 Unit	70 Unit	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	-	6.500.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						56 Unit	56 Unit	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	-	30.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 Unit	1 Unit	51.050.000	251.050.000	251.050.000	200.000.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	-	350.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

2.	37.377	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperkirakan Direhabilitasi	20 Unit	20 Unit	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	15.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase kesesuaian RPJMD dengan RPJMD	1	1	1.167.039.870	844.801.000	1.039.890.200	265.950.130					1.433.000.000	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	853.079.870	660.256.000	827.856.200	-35.223.670				ASN	1.138.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Pemmasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000	28.000.000	26.000.000	-24.000.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	160.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Secara Kelulusan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000	15.000.000	13.000.000	-37.000.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	120.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	50.000.000	21.700.000	15.998.000	-34.002.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	30.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah													

		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		1 Dokumen	1 Dokumen	38.960.000	19.620.000	31.370.000	-7.590.000	Kab. Kendal, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			70.000.000	BADAN PERENCANA AN, PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN
5.01.02.2.02. 0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			1 Buku	1 Buku	25.000.000	8.050.000	8.050.000	-16.950.000	Kab. Kendal, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			35.000.000	BADAN PERENCANA AN, PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penyusunan pengendalian, evaluasi		57 Perangka t Daerah	57 Perangka t Daerah	240.000.000	156.875.000	172.614.000	-67.386.000			-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			190.000.000	BADAN PERENCANA AN, PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN
5.01.02.2.03. 0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	142.275.000	158.014.000	8.014.000	Kab. Kendal, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			90.000.000	BADAN PERENCANA AN, PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN
5.01.02.2.03. 0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		1 Laporan	1 Laporan	90.000.000	14.600.000	14.600.000	-75.400.000	Kab. Kendal, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani			100.000.000	BADAN PERENCANA AN, PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN

		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kebudayaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				7 Laporan	7 Laporan	10.000.000	2.650.000	2.650.000	-7.350.000	Kab. Kendal, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	39.000.000	BADAN PERENCANA AN PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN
5.01.03.2.03. 0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana/Renja dengan RKPD/RP-UMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	90.000.000	9.990.000	9.990.000	-80.010.000	Kab. Kendal, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	125.000.000	BADAN PERENCANA AN PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN
5.05 37.381	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Prosentase jenis kegiatan utama yang diimplementasikan				1,00	1,00	1.824.612.660	1.089.511.170	1.089.511.170	-735.101.490					1.597.885.220	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan				4 dokumen	4 dokumen	625.350.660	590.890.170	590.890.170	-34.460.490			-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	382.885.220	BADAN PERENCANA AN PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN
5.05.02.2.01. 0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	547.850.660	523.390.170	523.390.170	-24.460.490	Kab. Kendal, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKA N P ENGUNAA NN YA BIDANG PENDIDIKA N	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	300.000.000	BADAN PERENCANA AN PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN
5.05.02.2.01. 0006	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertarikan dan Ketertarikan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertarikan dan Ketertarikan Umum dan Perindungan Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	27.500.000	17.500.000	17.500.000	-10.000.000	Kab. Kendal, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKA N P ENGUNAA NN YA BIDANG PENDIDIKA N	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	25.000.000	BADAN PERENCANA AN PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN
5.05.02.2.01. 0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan																

5.05.02.2.02		Jumlah Data Kelirangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P N P ENGGUNAA NN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	57.885.220	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah penelitian bidang sosial dan kependudukan				6 dokumen	6 dokumen		100.000.000	400.000.000	-300.000.000			-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	400.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial																
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	100.000.000	-100.000.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P N P ENGGUNAA NN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	100.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan																
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	100.000.000	-100.000.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P N P ENGGUNAA NN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	100.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata																
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	100.000.000	-100.000.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P N P ENGGUNAA NN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	100.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.02.2.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan																

Secara garis besar persandingan pagu alokasi pendanaan anggaran belanja operasi Tahun 2024 antara Pagu Penetapan APBD dengan Pagu Rasionalisasi/Reefisiensi Anggaran dan Usulan Perubahan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.2.

Persandingan Pagu Alokasi Pendanaan Anggaran Belanja Operasi Tahun 2024

No.	Uraian	APBD		SELISIH (+/ -)	RENJA Usulan Perubahan	SELISIH (+/ -)
		Penetapan	Pergeseran			
1	2	3	4	5 = (4-3)	6	7 = (6-4)
2	BELANJA					
2.1	BELANJA OPERASI	11.675.431.326	11.675.431.326	0	11.655.431.326	(20.000.000)

Sumber : SIMPOK 2024 & SIPD Perubahan 2024

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal Tahun 2024 yang telah ditetapkan, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyelarasan program/kegiatan pada Perubahan Renja 2024 lebih bersifat prioritas dan mendesak untuk diakomodir sampai dengan akhir tahun anggaran 2024. Langkah-langkah refocussing kegiatan dan reefisiensi anggaran dilakukan melalui perhitungan rasionalisasi pada beberapa program/kegiatan yang ada.

Perubahan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal ini sebagai penyesuaian atas proyeksi serta dinamika yang terjadi sampai akhir tahun anggaran, dan dipergunakan sebagai acuan kinerja dalam melanjutkan pelaksanaan tugas dan fungsi sampai dengan akhir tahun anggaran 2024, sehingga rencana kerja dapat lebih terarah dan terukur sesuai perencanaan dan kaidah yang ada. Dan ini diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal, dalam menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Dengan telah disepakati dan ditetapkannya dokumen perencanaan berupa RENJA-OPD, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Renja-OPD ini sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan, sekaligus sebagai bahan evaluasi kinerja OPD;
- b. Program dan kegiatan selaras dengan sistem perencanaan dan penganggaran, maka program dan kegiatannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

c. Renja-OPD akan dilakukan perubahan sebagaimana perlunya guna penyesuaian dengan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2023 manakala terjadi revisi sebagai akibat penyesuaian dengan hasil evaluasi.

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2024 selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan Renja diperlukan komitmen dan dukungan dari seluruh Sumber Daya Manusia di lingkup Baperlitbang. Dengan adanya Renja diharapkan kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi lebih efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan good governance bagi Pemerintah Kabupaten Kendal.

Akhir kata, semoga Perubahan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik, disertai kerja keras dan dedikasi tinggi dari segenap aparatur di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal melalui mekanisme yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan good governance dan public service yang lebih baik.

Kendal,

2024



KEPALA BAPERLITBANG KAB. KENDAL

IZZUDDIN LATIF, S.H., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19750704 200312 1 003



PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KENDAL
2024

KATA PENGANTAR

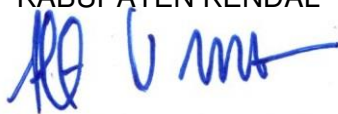
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Kendal Tahun 2024 dapat tersusun.

Perubahan Renja Bakesbangpol Kabupaten Kendal Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Bakesbangpol Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 serta Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun 2024, untuk menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen ini memuat tujuan dan sasaran Bakesbangpol Kabupaten Kendal beserta indikatornya, program dan kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program / kegiatan. Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (Perubahan RKA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bakesbangpol Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024.

Kami menyadari bahwa Perubahan Renja Bakesbangpol Kabupaten Kendal Tahun 2024 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Selanjutnya diharapkan Perubahan Renja Bakesbangpol Kabupaten Kendal ini dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kendal, 2024
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KENDAL



ALFEBIAN YULANDO, S.T., M.A.
Pembina Tingkat I
NIP. 19770701 200501 1 011

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi..... ii

Bab I Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum.....2

1.3 Maksud dan Tujuan4

1.4 Sistematika Penulisan5

Bab II Evaluasi Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II dan
Renstra Perangkat Daerah6

2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat22

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah23

Bab IV Penutup41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Bakesbangpol Kabupaten Kendal sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Bakesbangpol Kabupaten Kendal Tahun 2024, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun 2024 serta Renstra Bakesbangpol Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2024 yang disebabkan oleh :

- (1) Adanya dinamika kondisi ekonomi global dan nasional menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi;
- (2) penyesuaian target

pendapatan di tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2024; serta (3) adanya audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebabkan adanya perubahan dalam struktur APBD Tahun Anggaran 2024 karena Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Bakesbangpol Kabupaten Kendal. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Bakesbangpol Kabupaten Kendal Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Bakesbangpol Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Bakesbangpol Kabupaten Kendal Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bakesbangpol Kabupaten Kendal Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 20)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Bakesbangpol Kabupaten Kendal Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan pada Perubahan Anggaran Bakesbangpol Kabupaten Kendal di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bakesbangpol Kabupaten Kendal secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Bakesbangpol Kabupaten Kendal Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Bakesbangpol Kabupaten Kendal pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2024 dan Renstra Bakesbangpol Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bakesbangpol Kabupaten Kendal secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bakesbangpol Kabupaten Kendal Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Bakesbangpol Kabupaten Kendal sampai dengan triwulan kedua tahun 2024, analisis kinerja pelayanan Renstra Bakesbangpol Kabupaten Kendal, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Renstra Bakesbangpol Kabupaten Kendal, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program dan kegiatan Bakesbangpol Kabupaten Kendal pada tahun 2024.

BAB IV. Penutup

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II dan Renstra Perangkat Daerah

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renjayang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Bakesbangpol Kabupaten Kendal Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Bakesbangpol Kabupaten Kendal Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II.

Capaian IKU

IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal adalah Persentase penanganan terhadap kejadian konflik sosial, dengan Tingkat Realisasi Capaian 100%, berupa penanganan terhadap 6 potensi konflik di Triwulan II Tahun 2024.

Faktor Pendukung IKU : sinergitas antara aparat keamanan dan intelijen daerah.

Faktor Penghambat IKU : belum optimalnya pemahaman masyarakat dalam kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.

Secara singkat hasil Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja capaian : Persentase ketercapaian penunjang urusan
keluaran program Perangkat Daerah
Target capaian kegiatan : 100,00%
Realisasi capaian kegiatan : 47,19%
Tingkat capaian kinerja (%) : 47,19
Permasalahan : Capaian kinerja belum tercapai, karena masih di
Triwulan II.

Kegiatan :

a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kinerja capaian : Persentase ketercapaian administrasi keuangan
keluaran kegiatan perangkat daerah
Target capaian kegiatan : 100,00%
Realisasi capaian kegiatan : 57,14%
Tingkat capaian kinerja (%) : 57,14

Sub Kegiatan :

i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pagu anggaran	: Rp.	3.846.442.083,-
Realisasi anggaran	: Rp.	2.040.978.851,-
Realisasi anggaran (%)	:	53,06
Indikator kinerja capaian	:	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
keluaran sub kegiatan		Tunjangan ASN
Target capaian kegiatan	:	26 orang / 14 bulan
Realisasi capaian kegiatan	:	26 orang / 8 bulan
Tingkat capaian kinerja (%)	:	57,14

b) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kinerja capaian	:	Persentase terpenuhinya administrasi umum
keluaran kegiatan		perangkat daerah
Target capaian kegiatan	:	100,00%
Realisasi capaian kegiatan	:	43,32%
Tingkat capaian kinerja (%)	:	43,32

Sub Kegiatan :

i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pagu anggaran	: Rp.	36.610.750,-
Realisasi anggaran	: Rp.	11.442.000,-
Realisasi anggaran (%)	:	31,25
Indikator kinerja capaian	:	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan
keluaran sub kegiatan		Kantor yang Disediakan
Target capaian kegiatan	:	3 paket
Realisasi capaian kegiatan	:	1 paket
Tingkat capaian kinerja (%)	:	33,33

ii. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pagu anggaran	: Rp.	20.100.000,-
Realisasi anggaran	: Rp.	6.320.000,-
Realisasi anggaran (%)	:	31,44
Indikator kinerja capaian	:	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang
keluaran sub kegiatan		Disediakan
Target capaian kegiatan	:	3 paket
Realisasi capaian kegiatan	:	1 paket
Tingkat capaian kinerja (%)	:	33,33

iii. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pagu anggaran	: Rp.	19.000.000,-
Realisasi anggaran	: Rp.	5.490.000,-
Realisasi anggaran (%)	:	28,89
Indikator kinerja capaian	:	Jumlah Paket Barang Cetak dan
keluaran sub kegiatan		Penggandaan yang Disediakan
Target capaian kegiatan	:	2 paket
Realisasi capaian kegiatan	:	1 paket
Tingkat capaian kinerja (%)	:	50,00

iv. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Pagu anggaran	: Rp.	400.000.000,-
Realisasi anggaran	: Rp.	239.075.000,-
Realisasi anggaran (%)	:	59,77
Indikator kinerja capaian	:	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan

keluaran sub kegiatan	Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Target capaian kegiatan	: 12 dokumen
Realisasi capaian kegiatan	: 6 dokumen
Tingkat capaian kinerja (%)	: 50,00

v. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pagu anggaran	: Rp. 1.623.558.000,-
Realisasi anggaran	: Rp. 638.035.844,-
Realisasi anggaran (%)	: 39,30
Indikator kinerja capaian	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
keluaran sub kegiatan	Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Target capaian kegiatan	: 12 laporan
Realisasi capaian kegiatan	: 6 laporan
Tingkat capaian kinerja (%)	: 50,00

c) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja capaian	: Persentase terpenuhinya penyediaan jasa
keluaran kegiatan	penunjang urusan pemerintah daerah
Target capaian kegiatan	: 100,00%
Realisasi capaian kegiatan	: 50,00%
Tingkat capaian kinerja (%)	: 50,00

Sub Kegiatan :

i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pagu anggaran	: Rp. 12.000.000,-
Realisasi anggaran	: Rp. 2.000.000,-
Realisasi anggaran (%)	: 16,67
Indikator kinerja capaian	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
keluaran sub kegiatan	Menyurat
Target capaian kegiatan	: 12 laporan
Realisasi capaian kegiatan	: 6 laporan
Tingkat capaian kinerja (%)	: 50,00

ii. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pagu anggaran	: Rp. 119.135.000,-
Realisasi anggaran	: Rp. 43.803.212,-
Realisasi anggaran (%)	: 36,77
Indikator kinerja capaian	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
keluaran sub kegiatan	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Target capaian kegiatan	: 12 laporan
Realisasi capaian kegiatan	: 6 laporan
Tingkat capaian kinerja (%)	: 50,00

iii. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pagu anggaran	: Rp. 14.200.000,-
Realisasi anggaran	: Rp. 4.800.000,-
Realisasi anggaran (%)	: 36,77
Indikator kinerja capaian	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
keluaran sub kegiatan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Target capaian kegiatan	: 12 laporan

Realisasi capaian kegiatan : 6 laporan
Tingkat capaian kinerja (%) : 50,00

iv. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pagu anggaran : Rp. 143.146.700,-
Realisasi anggaran : Rp. 47.394.000,-
Realisasi anggaran (%) : 31,07
Indikator kinerja capaian : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
keluaran sub kegiatan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Target capaian kegiatan : 12 laporan
Realisasi capaian kegiatan : 6 laporan
Tingkat capaian kinerja (%) : 50,00

d) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja capaian : Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik
keluaran kegiatan daerah
Target capaian kegiatan : 100,00%
Realisasi capaian kegiatan : 38,33%
Tingkat capaian kinerja (%) : 38,33

Sub Kegiatan :

i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pagu anggaran : Rp. 49.200.000,-
Realisasi anggaran : Rp. 15.287.400,-
Realisasi anggaran (%) : 31,07
Indikator kinerja capaian : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau
keluaran sub kegiatan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara
dan dibayarkan Pajaknya
Target capaian kegiatan : 12 bulan
Realisasi capaian kegiatan : 6 bulan
Tingkat capaian kinerja (%) : 50,00

ii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pagu anggaran : Rp. 237.756.250,-
Realisasi anggaran : Rp. 0,-
Realisasi anggaran (%) : 0,00
Indikator kinerja capaian : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
keluaran sub kegiatan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Target capaian kegiatan : 1 unit
Realisasi capaian kegiatan : 0 unit
Tingkat capaian kinerja (%) : 0,00

iii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pagu anggaran : Rp. 4.550.000,-
Realisasi anggaran : Rp. 3.230.000,-
Realisasi anggaran (%) : 70,99
Indikator kinerja capaian : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung
keluaran sub kegiatan Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
Target capaian kegiatan : 17 unit
Realisasi capaian kegiatan : 11 unit

Tingkat capaian kinerja (%) : 65,00

2) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Indikator kinerja capaian : Persentase masyarakat yang paham terhadap keluaran program ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan
Target capaian kegiatan : 83,00%
Realisasi capaian kegiatan : 33,20%
Tingkat capaian kinerja (%) : 33,20
Permasalahan : Capaian kinerja belum tercapai, karena masih di Triwulan II.

Kegiatan :

- a) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Indikator kinerja capaian : Persentase masyarakat yang paham terhadap keluaran kegiatan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Target capaian kegiatan : 83,00%
Realisasi capaian kegiatan : 33,20%
Tingkat capaian kinerja (%) : 33,20

Sub Kegiatan :

- i. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Pagu anggaran : Rp. 1.010.042.000,-
Realisasi anggaran : Rp. 122.818.800,-
Realisasi anggaran (%) : 12,16
Indikator kinerja capaian : Jumlah Orang yang Mengikuti keluaran sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Target capaian kegiatan : 825 orang
Realisasi capaian kegiatan : 330 orang
Tingkat capaian kinerja (%) : 40,00

3) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Indikator kinerja capaian : Persentase masyarakat yang paham terhadap keluaran program politik
Target capaian kegiatan : 83,00%
Realisasi capaian kegiatan : 45,97%
Tingkat capaian kinerja (%) : 45,97
Permasalahan : Capaian kinerja belum tercapai, karena masih di Triwulan II.

Kegiatan :

- a) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas

Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /
 Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
 Indikator kinerja capaian : Persentase masyarakat yang paham dalam
 keluaran kegiatan Pendidikan politik, Pemilihan Umum / Pemilukada,
 dan pemantauan situasi politik

Target capaian kegiatan : 83,00%

Realisasi capaian kegiatan : 27,39%

Tingkat capaian kinerja (%) : 27,39

Sub Kegiatan :

- i. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

Pagu anggaran : Rp. 363.181.000,-

Realisasi anggaran : Rp. 120.044.800,-

Realisasi anggaran (%) : 33,05

Indikator kinerja capaian : Jumlah Orang yang Mengikuti
 keluaran sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Target capaian kegiatan : 990 orang

Realisasi capaian kegiatan : 350 orang

Tingkat capaian kinerja (%) : 35,35

- ii. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

Pagu anggaran : Rp. 47.127.059.000,-

Realisasi anggaran : Rp. 42.606.750.000,-

Realisasi anggaran (%) : 90,41

Indikator kinerja capaian : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan
 keluaran sub kegiatan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Target capaian kegiatan : 250 orang

Realisasi capaian kegiatan : 220 orang

Tingkat capaian kinerja (%) : 88,00

4) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Indikator kinerja capaian : Persentase pengurus dan anggota ormas yang
 keluaran program paham terhadap tujuan dan fungsi ormas

Target capaian kegiatan : 83,00%

Realisasi capaian kegiatan : 42,47%

Tingkat capaian kinerja (%) : 42,47
Permasalahan : Capaian kinerja belum tercapai, karena masih di Triwulan II.

Kegiatan :

- a) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- Indikator kinerja capaian : Persentase pengurus dan anggota ormas yang keluaran kegiatan paham dalam pemberdayaan dan pengawasan ormas
- Target capaian kegiatan : 83,00%
- Realisasi capaian kegiatan : 42,47%
- Tingkat capaian kinerja (%) : 42,47

Sub Kegiatan :

- i. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- Pagu anggaran : Rp. 122.834.000,-
- Realisasi anggaran : Rp. 58.750.000,-
- Realisasi anggaran (%) : 47,83
- Indikator kinerja capaian : Jumlah Orang yang Mengikuti keluaran sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- Target capaian kegiatan : 450 orang
- Realisasi capaian kegiatan : 180 orang
- Tingkat capaian kinerja (%) : 40,00
- ii. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- Pagu anggaran : Rp. 9.077.012.000,-
- Realisasi anggaran : Rp. 9.010.700.000,-
- Realisasi anggaran (%) : 99,27
- Indikator kinerja capaian : Jumlah Orang yang Mengikuti keluaran sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- Target capaian kegiatan : 115 orang
- Realisasi capaian kegiatan : 60 orang
- Tingkat capaian kinerja (%) : 52,17

5) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Indikator kinerja capaian : Persentase masyarakat yang paham terhadap keluaran program ketahanan bangsa

Target capaian kegiatan : 83,00%

Realisasi capaian kegiatan : 0%

Tingkat capaian kinerja (%) : 0

Permasalahan : Capaian kinerja belum tercapai, karena masih di Triwulan II.

Kegiatan :

- a) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - Indikator kinerja capaian : Persentase masyarakat yang paham dalam keluaran kegiatan ketahanan ekonomi sosial budaya, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan kerukunan umat beragama
 - Target capaian kegiatan : 83,00%
 - Realisasi capaian kegiatan : 0,00%
 - Tingkat capaian kinerja (%) : 0,00

Sub Kegiatan :

- i. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - Pagu anggaran : Rp. 644.497.000,-
 - Realisasi anggaran : Rp. 400.000.000,-
 - Realisasi anggaran (%) : 62,06
 - Indikator kinerja capaian : Jumlah Orang yang Mengikuti keluaran sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - Target capaian kegiatan : 675 orang
 - Realisasi capaian kegiatan : 0 orang
 - Tingkat capaian kinerja (%) : 0,00

6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Indikator kinerja capaian : Persentase masyarakat yang paham terhadap keluaran program kewaspadaan dan deteksi dini

Target capaian kegiatan : 83,00%

Realisasi capaian kegiatan : 36,60%

Tingkat capaian kinerja (%) : 36,60

Permasalahan : Capaian kinerja belum tercapai, karena masih di Triwulan II.

Kegiatan :

- Indikator kinerja capaian : Persentase masyarakat yang paham dalam keluaran kegiatan kewaspadaan dan deteksi dini serta penanganan konflik
- Target capaian kegiatan : 83,00%
- Realisasi capaian kegiatan : 36,60%
- Tingkat capaian kinerja (%) : 36,60
- a) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - Sub Kegiatan :
 - i. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga

Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Pagu anggaran : Rp. 78.900.000,-

Realisasi anggaran : Rp. 0,-

Realisasi anggaran (%) : 0,00

Indikator kinerja capaian : Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Target capaian kegiatan : 300 orang

Realisasi capaian kegiatan : 0 orang

Tingkat capaian kinerja (%) : 0,00

- ii. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Pagu anggaran : Rp. 6.307.372.000,-

Realisasi anggaran : Rp. 4.745.224.600,-

Realisasi anggaran (%) : 75,23

Indikator kinerja capaian : Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Target capaian kegiatan : 14.140 orang

Realisasi capaian kegiatan : 6.236 orang

Tingkat capaian kinerja (%) : 44,10

Tabel 2.1.
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
 Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
 Kabupaten Kendal

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun s.d. Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
08.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	47,19%	47,19%	100,00%	100,00%	100,00%
08.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	100,00%	57,14%	57,14%	100,00%	100,00%	100,00%
08.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	100,00%	100,00%	43,43%	43,32%	100,00%	100,00%	100,00%
08.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%
08.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	100,00%	100,00%	38,33%	38,33%	100,00%	100,00%	100,00%

08.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	83,00%	83,00%	33,20%	40,00%	81,00%	83,00%	100,00%
08.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang paham terhadap Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika	83,00%	83,00%	33,20%	40,00%	81,00%	83,00%	100,00%
08.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat yang paham terhadap politik	83,00%	83,00%	45,97%	55,38%	81,00%	83,00%	100,00%
08.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase masyarakat yang paham dalam pendidikan politik, Pemilihan Umum / Pemilukada, dan pemantauan situasi politik	83,00%	83,00%	45,97%	55,38%	81,00%	83,00%	100,00%
08.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pengurus dan anggota ormas yang paham terhadap tujuan dan fungsi ormas	83,00%	83,00%	42,47%	51,17%	81,00%	83,00%	100,00%
08.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pengurus dan anggota ormas yang paham dalam pemberdayaan dan pengawasan ormas	83,00%	83,00%	42,47%	51,17%	81,00%	83,00%	100,00%
08.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan bangsa	83,00%	83,00%	00,00%	00,00%	81,00%	83,00%	100,00%

08.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase masyarakat yang paham dalam ketahanan ekonomi sosial budaya, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan kerukunan umat beragama	83,00%	83,00%	00,00%	00,00%	81,00%	83,00%	100,00%
08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan dan deteksi dini	83,00%	83,00%	36,60%	44,09%	81,00%	83,00%	100,00%
08.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase masyarakat yang paham dalam kewaspadaan dan deteksi dini serta penanganan konflik	83,00%	83,00%	36,60%	44,09%	81,00%	83,00%	100,00%

Dari data sebagaimana tabel 2.1 tersebut di atas, Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 Bakesbangpol Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan Dua Tahun 2024 Bakesbangpol Kabupaten Kendal
 - a. Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 1 urusan, 6 program dengan 6 indikator kinerja program, dan 9 kegiatan dengan 9 indikator kinerja kegiatan.
 - b. Dari 6 indikator kinerja program, terdapat 6 indikator yang masih dalam proses pencapaian target.
 - c. Dari 9 indikator kinerja kegiatan, 9 masih dalam proses pencapaian target.
2. Perkiraan Capaian Target Perubahan Kedua Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Triwulan Dua Tahun 2024 Bakesbangpol Kabupaten Kendal
 - a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 6 program dengan 6 indikator program dan 12 kegiatan dengan 12 indikator.
 - b. Dari 6 indikator kinerja program, terdapat 6 indikator yang masih dalam proses pencapaian target.
 - c. Dari 12 indikator kinerja kegiatan, terdapat 12 indikator yang masih dalam proses pencapaian target.

Tabel 2.2
 Realisasi Keuangan Bakesbangpol Kabupaten Kendal
 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

No.	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD	
				REAL KEUANGAN (Rp.)	REAL FISIK (%)
1		2	3	4	5
	BADAN KESBANGPOL		71.256.595.783	60.122.144.507	84,37
1.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.525.698.783	3.057.856.307	46,86
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.846.442.083	2.040.978.851	53,06
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.846.442.083	2.040.978.851	53,06
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.099.268.750	900.362.844	42,89
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.610.750	11.442.000	31,25
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.100.000	6.320.000	31,44
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.000.000	5.490.000	28,89
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	400.000.000	239.075.000	59,77
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.623.558.000	638.035.844	39,30
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288.481.700	97.997.212	33,97
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	2.000.000	16,67
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.135.000	43.803.212	36,77
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.200.000	4.800.000	33,80
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	143.146.700	47.394.000	33,11

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	291.506.250	18.517.400	6,35
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.200.000	15.287.400	31,07
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	237.756.250	-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.550.000	3.230.000	70,99
2.		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.010.042.000	122.818.800	12,16
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.010.042.000	122.818.800	12,16
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.010.042.000	122.818.800	12,16
3.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	644.497.000	400.000.000	62,06
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	644.497.000	400.000.000	62,06
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	644.497.000	400.000.000	62,06
4.		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	47.490.240.000	42.726.794.800	89,97
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	47.490.240.000	42.726.794.800	89,97
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	363.181.000	120.044.800	33,05

		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	47.127.059.000	42.606.750.000	90,41
5.		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	9.199.846.000	9.069.450.000	98,58
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	9.199.846.000	9.069.450.000	98,58
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	122.834.000	58.750.000	47,83
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	9.077.012.000	9.010.700.000	99,27
6.		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	6.386.272.000	4.745.224.600	74,30
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	6.386.272.000	4.745.224.600	74,30
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	78.900.000	-	-
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	6.307.372.000	4.745.224.600	75,23

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa sampai dengan triwulan dua Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 6 program dan 9 kegiatan pada Bakesbangpol Kabupaten Kendal adalah sebesar Rp71.256.595.783,00. Dari anggaran tersebut, realisasi sampai dengan triwulan dua Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp60.122.144.507,00 (84,37%) dengan sisa anggaran yang belum digunakan sebesar Rp11.134.451.276,00 (15,63%).

2.2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan, baik Kelompok Masyarakat, LSM, Organisasi Masyarakat, Partai Politik, Lembaga/Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

- 1. Usulan tersebut di peroleh Badan Kesbangpol Kabupaten Kendal, melalui Hibah dan Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kendal, yang belum bisa dilaksanakan di anggaran penetapan 2024, dan diusulkan di anggaran perubahan 2024.
- 2. Pada Perubahan Renja 2024, di Badan Kesbangpol Kabupaten Kendal tidak terdapat usulan program dan kegiatan masyarakat

Tabel 2.4.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesbangpol Kabupaten Kendal

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	Nihil				

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 13 ayat (2), memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan majus sebagaimana tersebut mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Dengan demikian Renja yang disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPJMD.

Kebutuhan pendanaan dalam RPJMD bersifat indikatif, hal ini dimaksudkan bahwa kebutuhan pendanaan setiap tahun yang dijabarkan dalam rencana kerja perangkat daerah disesuaikan dengan prioritas daerah setiap tahun sehingga kebutuhan pendanaan dapat diselaraskan.

Berikut beberapa penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal Tahun 2024 :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
Peruntukan : pembayaran tagihan pajak kendaraan, pemeliharaan kendaraan dinas.
- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
Peruntukan : pemeliharaan gedung kantor.

- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Peruntukan : pemeliharaan air conditioner (AC split)

- d. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Peruntukan : sosialisasi penguatan pendidikan politik bagi masyarakat

- e. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Peruntukan : penambahan kekurangan hibah partai politik, akibat penambahan kursi DPRD Kabupaten Kendal dari 45 kursi menjadi 50 kursi hasil Pemilu 2024.

- f. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

Peruntukan : sosialisasi pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.

- g. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

Peruntukan : sosialisasi penguatan ketahanan ekonomi social budaya bagi masyarakat

- h. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Peruntukan : rapat koordinasi pengamanan lintas sektoral, fasilitasi Kodim Kendal, fasilitasi Polres Kendal, fasilitasi Kejari Kendal.

Secara garis besar Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesbangpol Kabupaten Kendal

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				62.508.696.092	71.256.595.783	72.230.682.983	9.721.986.891					
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				62.508.696.092	71.256.595.783	72.230.682.983	9.721.986.891					
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				62.508.696.092	71.256.595.783	72.230.682.983	9.721.986.891					
1,	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 %	100 %	4.315.843.492	6.525.698.783	6.836.040.783	37.590.508					
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	20.000.000	0	0	-20.000.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000	0	0	-10.000.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola	ASN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000	0	0	-10.000.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	3.630.531.192	3.846.442.083	3.706.442.083	75.910.891	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	3.409.431.192	3.846.442.083	3.706.442.083	297.010.891	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	221.100.000	0	0	-221.100.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	20.250.000	0	0	-20.250.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	20.250.000	0	0	-20.250.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	293.189.200	2.099.268.750	2.303.505.750	2.010.316.550	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	35.000.000	36.610.750	36.610.750	1.610.750	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	35.000.000	20.100.000	20.100.000	-14.900.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	18.559.200	19.000.000	19.000.000	440.800	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	5.400.000	400.000.000	400.000.000	394.600.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien,	ASN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													akuntabel dan melayani	
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	199.230.000	1.623.558.000	1.827.795.000	1.628.565.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100 %	100 %	0	0	0	0	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	0	0	0	0	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	233435000	288481700	276526700	43091700	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	115.140.000	119.135.000	107.180.000	-7.960.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN
	8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	14.200.000	14.200.000	-800.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	91.295.000	143.146.700	143.146.700	51.851.700	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien,	ASN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													akuntabel dan melayani	
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	100 %	100 %	118.438.100	291.506.250	549.566.250	431.128.150	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	12 Unit	63.200.000	49.200.000	66.800.000	3.600.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	2 Unit	49.838.100	237.756.250	472.756.250	422.918.150	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN
	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	5 Unit	5.400.000	4.550.000	10.010.000	4.610.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN
2,	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	83 %	83 %	1.025.932.000	1.010.042.000	1.010.042.000	474.068.000					
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang paham terhadap Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter	83 %	83 %	1.025.932.000	1.010.042.000	1.010.042.000	-15.890.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Masyarakat Kabupaten Kendal

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan												
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1200 Orang	825 Orang	1.025.932.000	1.010.042.000	1.010.042.000	-15.890.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Masyarakat Kabupaten Kendal
3,	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat yang paham terhadap politik	83 %	83 %	51.141.204.000	47.490.240.000	47.758.743.200	- 44.141.204.000					
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase masyarakat yang paham dalam pendidikan politik, Pemilihan Umum / Pemilukada, dan pemantauan situasi politik	83 %	83 %	51.141.204.000	47.490.240.000	47.758.743.200	- 3.382.460.800	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Masyarakat Kabupaten Kendal

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah												
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3000 Orang	735 Orang	383.820.000	363.181.000	415.381.000	31.561.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Masyarakat Kabupaten Kendal
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah												
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	240 Orang	250 Orang	50.757.384.000	47.127.059.000	47.343.362.200	- 3.414.021.800	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Masyarakat Kabupaten Kendal

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4,	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pengurus dan anggota ormas yang paham terhadap tujuan dan fungsi ormas	83 %	83 %	331.950.000	9.199.846.000	9.237.446.000	2.668.050.000					
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pengurus dan anggota ormas yang paham dalam pemberdayaan dan pengawasan ormas	83 %	83 %	331.950.000	9.199.846.000	9.237.446.000	8.905.496.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabiliitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Masyarakat Kabupaten Kendal
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah												
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	600 Orang	800 Orang	282.000.000	122.834.000	160.434.000	-121.566.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabiliitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Masyarakat Kabupaten Kendal
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120 Orang	115 Orang	49.950.000	9.077.012.000	9.077.012.000	9.027.062.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Masyarakat Kabupaten Kendal
5,	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan bangsa	83 %	83 %	681.918.000	644.497.000	767.467.000	668.082.000					
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase masyarakat yang paham dalam ketahanan ekonomi sosial budaya, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan kerukunan umat beragama	83 %	83 %	681.918.000	644.497.000	767.467.000	85.549.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Masyarakat Kabupaten Kendal
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah												
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan	1200 Orang	1125 Orang	681.918.000	644.497.000	767.467.000	85.549.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola	Masyarakat Kabupaten Kendal

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah										pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	
6,	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan dan deteksi dini	83 %	83 %	5.011.848.600	6.386.272.000	6.620.944.000	- 2.271.848.600					
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase masyarakat yang paham dalam kewaspadaan dan deteksi dini serta penanganan konflik	83 %	83 %	5.011.848.600	6.386.272.000	6.620.944.000	1.609.095.400	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Masyarakat Kabupaten Kendal
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah												
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar	2000 Orang	300 Orang	299.160.000	78.900.000	78.900.000	-220.260.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Masyarakat Kabupaten Kendal

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah											
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah												
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3000 Orang	14815 Orang	4.712.688.600	6.307.372.000	6.542.044.000	1.829.355.400	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Masyarakat Kabupaten Kendal
	J U M L A H					62.508.696.092	71.256.595.783	72.230.682.983	9.721.986.891					

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Bakesbangpol Kabupaten Kendal Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program dan kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Bakesbangpol Kabupaten Kendal di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Bakesbangpol Kabupaten Kendal Tahun 2024 antara lain :

- Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Bakesbangpol Kabupaten Kendal pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Penyusunan Perubahan Renja Bakesbangpol Kabupaten Kendal ini berpedoman pada Renstra Bappeda Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan output / keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Bakesbangpol Kabupaten Kendal;
- Penyusunan Perubahan Renja Bakesbangpol Kabupaten Kendal ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Bakesbangpol Kabupaten Kendal Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Perubahan Renja Bakesbangpol Kabupaten Kendal ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bakesbangpol Kabupaten Kendal Tahun 2024;
- Dalam penyusunan RDPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal. Begitu pula dalam penyusunan DPPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Kendal.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Bakesbangpol Kabupaten Kendal Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Bakesbangpol Kabupaten Kendal Tahun 2024 pada triwulan tiga dan triwulan empat tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja Bakesbangpol Kabupaten Kendal Tahun 2024. Selanjutnya program dan

kegiatan pada Perubahan Renja Bakesbangpol Kabupaten Kendal Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Bakesbangpol Kabupaten Kendal, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Kendal. Dengan disusunnya Perubahan Renja Bakesbangpol Kabupaten Kendal Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol Kabupaten Kendal pada Tahun Anggaran 2024.

Kendal, 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KENDAL



ALFEBIAN YULANDO, S.T., M.A.

Pembina Tingkat I

NIP. 19770701 200501 1 011

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																	REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024																	

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PATEBON

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1	
									Sebelum					Sesudah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)		
KECAMATAN PATEBON																				
7					UNSUR KEWILAYAHAN				Rp. 2.715.694.385					Rp. 2.715.694.385	Rp. 2.665.694.385				Rp. 2.665.694.385	Rp. 4.314.500.000,00
7	01				KECAMATAN				Rp. 2.715.694.385					Rp. 2.715.694.385	Rp. 2.665.694.385				Rp. 2.665.694.385	Rp. 4.314.500.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 2.561.014.385					Rp. 2.561.014.385	Rp. 2.417.596.385				Rp. 2.417.596.385	Rp. 3.838.500.000,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 150.000					Rp. 150.000	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 66.500.000,00
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa		Rp. 150.000					Rp. 150.000	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 4.000.000,00
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa													Rp. 2.500.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa													Rp. 60.000.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 2.292.269.385					Rp. 2.292.269.385	Rp. 2.105.689.385				Rp. 2.105.689.385	Rp. 3.093.000.000,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa		Rp. 2.225.169.385					Rp. 2.225.169.385	Rp. 2.025.169.385				Rp. 2.025.169.385	Rp. 3.000.000.000,00
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa		Rp. 67.100.000					Rp. 67.100.000	Rp. 80.520.000				Rp. 80.520.000	Rp. 90.000.000,00
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa													Rp. 3.000.000,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															Rp. 15.500.000,00
7	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa													Rp. 15.500.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 44.899.500					Rp. 44.899.500	Rp. 91.601.500				Rp. 91.601.500	Rp. 143.500.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa		Rp. 791.000					Rp. 791.000	Rp. 791.000				Rp. 791.000	Rp. 3.500.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa		Rp. 5.872.000					Rp. 5.872.000	Rp. 5.872.000				Rp. 5.872.000	Rp. 15.000.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa		Rp. 2.122.500					Rp. 2.122.500	Rp. 2.122.500				Rp. 2.122.500	Rp. 20.000.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa		Rp. 3.890.000					Rp. 3.890.000	Rp. 3.890.000				Rp. 3.890.000	Rp. 25.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa		Rp. 3.442.000					Rp. 3.442.000	Rp. 4.648.000				Rp. 4.648.000	Rp. 5.000.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa		Rp. 23.890.000					Rp. 23.890.000	Rp. 69.386.000				Rp. 69.386.000	Rp. 60.000.000,00
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa		Rp. 4.892.000					Rp. 4.892.000	Rp. 4.892.000				Rp. 4.892.000	Rp. 15.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 210.615.500					Rp. 210.615.500	Rp. 207.225.500				Rp. 207.225.500	Rp. 205.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																							
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah															
								Tahun - 1	Tahun N														Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah									
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)					
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa		Rp. 1.500.000				Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000				Rp. 1.500.000	Rp. 5.000.000,00				
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa		Rp. 43.075.500				Rp. 43.075.500	Rp. 59.815.500				Rp. 59.815.500	Rp. 50.000.000,00				
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa		Rp. 166.040.000				Rp. 166.040.000	Rp. 145.910.000				Rp. 145.910.000	Rp. 150.000.000,00				
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 13.080.000				Rp. 13.080.000	Rp. 13.080.000				Rp. 13.080.000	Rp. 315.000.000,00				
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa		Rp. 9.300.000				Rp. 9.300.000	Rp. 9.300.000				Rp. 9.300.000	Rp. 35.000.000,00				
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa		Rp. 3.780.000				Rp. 3.780.000	Rp. 3.780.000				Rp. 3.780.000	Rp. 30.000.000,00				
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa												Rp. 250.000.000,00				
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Rp. 121.780.000				Rp. 121.780.000	Rp. 132.214.000				Rp. 132.214.000	Rp. 187.000.000,00				
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Rp. 22.900.000				Rp. 22.900.000	Rp. 14.500.000				Rp. 14.500.000	Rp. 70.000.000,00				
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa		Rp. 22.200.000				Rp. 22.200.000	Rp. 13.800.000				Rp. 13.800.000	Rp. 35.000.000,00				
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa		Rp. 700.000				Rp. 700.000	Rp. 700.000				Rp. 700.000	Rp. 35.000.000,00				
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				Rp. 95.400.000				Rp. 95.400.000	Rp. 95.400.000				Rp. 95.400.000	Rp. 95.000.000,00				
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa		Rp. 95.400.000				Rp. 95.400.000	Rp. 95.400.000				Rp. 95.400.000	Rp. 95.000.000,00				
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				Rp. 3.480.000				Rp. 3.480.000	Rp. 22.314.000				Rp. 22.314.000	Rp. 22.000.000,00				
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa		Rp. 3.480.000				Rp. 3.480.000	Rp. 22.314.000				Rp. 22.314.000	Rp. 22.000.000,00				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Rp. 21.700.000				Rp. 21.700.000	Rp. 56.920.000				Rp. 56.920.000	Rp. 180.000.000,00				
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				Rp. 21.700.000				Rp. 21.700.000	Rp. 56.920.000				Rp. 56.920.000	Rp. 170.000.000,00				
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa		Rp. 5.275.000				Rp. 5.275.000	Rp. 5.275.000				Rp. 5.275.000	Rp. 20.000.000,00				
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa		Rp. 16.425.000				Rp. 16.425.000	Rp. 51.645.000				Rp. 51.645.000	Rp. 150.000.000,00				
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan														Rp. 10.000.000,00				
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa												Rp. 10.000.000,00				
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														Rp. 20.000.000,00				
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														Rp. 20.000.000,00				

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																					
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1		
									Sebelum					Sesudah							
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa												Rp. 20.000.000,00		
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Rp. 6.400.000					Rp. 6.400.000	Rp. 3.850.000				Rp. 3.850.000	Rp. 25.000.000,00	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				Rp. 6.400.000					Rp. 6.400.000	Rp. 3.850.000				Rp. 3.850.000	Rp. 25.000.000,00	
7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa			Rp. 250.000					Rp. 250.000	Rp. 100.000				Rp. 100.000	Rp. 5.000.000,00
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa			Rp. 3.750.000					Rp. 3.750.000	Rp. 3.750.000				Rp. 3.750.000	Rp. 10.000.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa			Rp. 2.400.000					Rp. 2.400.000	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 10.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Rp. 4.800.000						Rp. 4.800.000	Rp. 55.114.000				Rp. 55.114.000	Rp. 64.000.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Rp. 4.800.000						Rp. 4.800.000	Rp. 55.114.000				Rp. 55.114.000	Rp. 64.000.000,00
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa			Rp. 700.000					Rp. 700.000	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 15.000.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa			Rp. 700.000					Rp. 700.000	Rp. 33.400.000				Rp. 33.400.000	Rp. 15.000.000,00
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa														Rp. 4.000.000,00
7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Kendal, Patebon, Semua Kel/Desa			Rp. 3.400.000					Rp. 3.400.000	Rp. 21.714.000				Rp. 21.714.000	Rp. 30.000.000,00
Jumlah									Rp. 2.715.694.385						Rp. 2.715.694.385	Rp. 2.665.694.385				Rp. 2.665.694.385	Rp. 4.314.500.000,00
Kab. Kendal, Camat PATEBON																					
ABDUL MUFID, SH.MH NIP. 196810141992031001																					



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JL. PRAMUKA NO. 1 KENDAL, KODE POS 51351
TELP/FAX (0294) 381443

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) disusun sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan aturan lebih rinci mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana kerja (RENJA) ini disusun sebagai acuan dalam penetapan dan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Kendal Tahun 2024 dan dalam pelaksanaannya terdapat perubahan yang diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dan perubahan kebijakan. Untuk itu perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan di perubahan anggaran Tahun 2024.

Kepada semua pihak yang telah banyak memberi masukan dan sumbangan pemikiran diucapkan terima kasih atas selesainya dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini. Semoga Rencana Kerja ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Kendal.

Kendal, 2024
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kendal

drh. HUDI SAMBODO
Pembina Tingkat I
NIP. 197205041999031009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 6

2.2. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan 7

2.3. Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 22

2.4. Penentuan Isu-isu Strategis Tahun 2024 23

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat 23

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .. 24

BAB IV. PENUTUP 44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 7

Tabel 2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan 2 Tahun 2024 19

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Kabupaten Kendal 27

Tabel 3.1 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 23

Tabel 3 Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan (print-out <https://sipd-ri.kemendagri.go.id>) 31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 mengacu pada rancangan awal RKPD Tahun 2024, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026 dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 351 mengamanatkan Kepala daerah wajib menyusun dan menyempurnakan rancangan perubahan rencana kerja perangkat daerah (Perubahan Renja PD) dengan berpedoman pada rancangan perubahan rencana kerja pemerintah daerah (Perubahan RKPD). RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, OPD dapat melakukan pergeseran pagu antar kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan dan pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran

kegiatan dalam Perubahan RKPD. Dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan keadaan dalam tahun berjalan seperti perubahan asumsi mikro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi prioritas belanja, serta aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka perlu dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.

Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kendal 2021-2026, maka tagline pembangunan Tahun 2024 adalah “*Kendal Smart City*”, dimana arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2023 di prioritaskan pada “Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep *Kendal Smart City*”. Arah kebijakan ini dengan fokus peningkatan kemantapan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan clean dan *Good Governances*, penguatan *Smart City* yang difokuskan pada *Smart Government*, *Smart Education*, *Smart Health*, *Smart Economy* dan *Smart Transportation*. *Focus smart transportation* adalah pada peningkatan kualitas transportasi masal seperti penyediaan BRT yang menghubungkan antar kecamatan dan feeder yang menghubungkan antar desa, dengan pengelolaan berbasis teknologi informasi.

Dinas Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2024 telah melaksanakan program kegiatan prioritas untuk mendukung target pembangunan pemerintah daerah maupun target rencana kerja DKP Tahun 2024 melalui kegiatan yang nyata dalam mendukung pembangunan khususnya bidang kelautan dan perikanan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya perlu adanya tambahan anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2024 agar target kinerja dapat dicapai sampai dengan akhir Tahun 2024. Maka perlu disusun Perubahan Renja DKP Tahun 2024 ini yang digunakan sebagai dasar dan bagian dari proses penyusunan Perubahan APBD Tahun 2024.

Hal yang mendasari dilakukannya perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 antara lain :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai kerangka pendanaan, prioritas, dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. Adanya penambahan kegiatan/sub kegiatan;
- c. Adanya pergeseran anggaran antar kegiatan, program, maupun antar jenis belanja.

Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan ini diharapkan dapat benar-benar menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan perubahan yang akan dilakukan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15

- dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 20);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja DKP Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi capaian indikator kinerja Renstra DKP dalam rangka pencapaian target kinerja.
2. Tujuan tersusunnya Perubahan Renja ini adalah untuk menjamin konsistensi keberlanjutan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra DKP dan memberikan pedoman bagi seluruh bidang/UPTD/bagian di DKP Kabupaten Kendal dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai target sasaran sesuai Renstra yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang disusunnya Perubahan Renja SKPD Tahun 2024, Landasan hukum, Maksud dan Tujuan penyusunan Perubahan Renja SKPD, serta Sistematika Penulisan.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan tahun berjalan, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun berjalan sampai dengan Triwulan II.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang pergeseran/perubahan pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Dasar hukum keberadaan Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219) dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal.

a. Tugas

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

b. Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
- 2) Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan.
- 3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang kelautan dan perikanan.
- 4) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kelautan dan perikanan.
- 6) Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang kelautan dan perikanan.
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kelautan dan perikanan.

Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai. Secara rinci capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1. Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024		Proyeksi Tahun 2024		Catatan Analisis
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan I	Triwulan II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Indikator Kinerja Kunci (IKK)									
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) [Kg]			29.991.244	5.649.711	6.525.561	7.725.631	7.824.010	Tidak tercapai
2	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP) [orang]			162		162		162	Tercapai
3	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional [%]			100		100		100	Tercapai
4	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kota/ kota yang diterbitkan [izin]			-		-		-	Bukan Kewenangan
5	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan) [orang]			300	80	80	80	80	Tercapai
6	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi [ekor benih ikan]			26.023.750	6.540.385	7.042.400	6.703.620	6.788.984	Tercapai

2.2. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal 2021-2026, dan merupakan fase awal pelaksanaan pencapaian target Rencana Kerja lima tahunan Renstra. Untuk mengetahui capain kinerja perlu dilakukan evaluasi dengan mengacu dari hasil Laporan Kinerja Triwulanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal, capaian target Renja OPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Pelaksanaan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 secara umum selaras dengan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 dan secara umum telah dilaksanakan seoptimal mungkin untuk mencapai target yang ditetapkan. Capaian Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 ini terdapat beberapa kegiatan yang capaian masih rendah. Hal ini dikarenakan tertundanya pelaksanaan kegiatan karena adanya kendala teknis di lapangan maupun jadwal pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV sehingga realisasi fisik dan anggaran belum bisa dihitung.

Adapun review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 secara garis besar capaian

output/kinerja dari program/kegiatan yang dilaksanakan dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Hasil pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan secara umum telah berjalan dengan baik, akan tetapi karena beberapa hal, permasalahan, maupun regulasi yang ada, maka tidak semua target tercapai.

Terdapat 2 program yang tidak memenuhi target adalah :

- 1) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, ketercapaian target 69%
- 2) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, ketercapaian target 85%

Kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target adalah :

- 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, pada sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, pada sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
 - b. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan tangkap
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, pada sub kegiatan :
 - a. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

B. Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Hasil pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan secara umum telah berjalan dengan baik, dimana semua capaian output kegiatan/sub kegiatan telah memenuhi target yang ditetapkan, dan terdapat 2 program yang telah memenuhi target kinerja.

Capaian program yang telah memenuhi target adalah :

- 1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, ketercapaian target 125%
- 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota, ketercapaian target 100%

Capaian kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target adalah :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - c) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - c) Penyediaan bahan logistik kantor
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
 - e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - f) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- 5) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
- 6) Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan :
 - a) Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
- 7) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) terdiri dari sub kegiatan :
 - a) Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- 8) Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil terdiri dari sub kegiatan :
 - a) Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

- 9) Pengelolaan Pembudidaya Ikan terdiri dari sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - c) Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - d) Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 10) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil terdiri dari sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 11) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil terdiri dari sub kegiatan :
 - a) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
- 12) Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan :
 - a) Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- C. Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
Tidak terdapat program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang telah ditetapkan
- D. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, tercapainya, atau melebihi target kinerja program/kegiatan
 - a) Faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target program/kegiatan antara lain :
 1. Faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target program Pengelolaan Perikanan Budidaya :
 - (a) Tidak adanya alokasi pupuk bersubsidi bagi pembudidaya ikan bandeng dan mahal nya harga pupuk urea di pasaran, sehingga pembudidaya memberikan pupuk sekedarnya /semampunya

- serta mengurangi kepadatan tebar benih maka produksi ikan bandeng juga berkurang
- (b) Harga pakan pabrikan (pelet) yang terus meningkat sedangkan harga ikan bandeng tidak stabil.
 - (c) Harga udang Vaname menurun drastis (terutama udang size besar) sehingga panen udang dilakukan walaupun ukuran masih relatif kecil (panen di size 80-100 yang harganya stabil, padahal biasanya panen di size 30-40), terjadi gagal panen akibat air pasang tinggi (rob) dan bencana banjir.
 - (d) Banyak lahan tambak yang tidak produktif atau di kawasan KIK sudah semakin banyak yang diurug untuk pembangunan industry, sampai saat ini jumlah tambak yang telak diurug seluas 400 hektar.
 - (e) Beberapa pengusaha udang vanamme skala besar di Kecamatan Brangsong berhenti beroperasi akibat banjir dan turunnya harga udang
2. Faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan :
 - (a) Kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya ikan bagi kesehatan belum memadai
 - (b) Rendahnya tingkat konsumsi ikan di daerah pegunungan daripada di wilayah pesisir karena faktor produksi dan distribusi
 - (c) Turunnya produksi perikanan budidaya
 3. Faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target kegiatan/sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, karena adanya kesalahan dalam penyusunan anggaran kas penarikan dana di SIPD, dimana terjadi kekurangan anggaran pada Tunjangan PPh, Tunjangan JKM, JKK. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan gaji 8 % yang belum terbagi di anggaran kas sejak awal tahun dan sudah habis di bulan Mei 2024. Mengakibatkan tertundanya gaji Juni, gaji Ke-13, dan tunjangan penghasilan pegawai.
 4. Faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target kegiatan/sub kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap, karena penganggaran merupakan penunjang dari program KOTAKU sehingga pelaksanaan juga menyesuaikan.

5. Faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan tangkap dan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota karena belum dilakukan pencairan anggaran untuk pekerjaan yang dibiayai dari DAK karena belum ada penyaluran anggaran ke rekening Kasda. Hal ini karena belum selesainya review APIP atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.
 - b) Faktor yang mendukung tercapainya kegiatan karena adanya komitmen semua pihak untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, kondisi perekonomian yang semakin membaik dan harga komoditas perikanan tangkap yang relatif stabil, serta kondisi cuaca dan iklim yang mendukung dalam aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan.
 - c) Faktor yang menjadi penyebab melebihi target kinerja program/kegiatan adalah nihil.
- E. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
- Dampak yang mungkin ditimbulkan akibat ketidaktercapaian target kinerja antara lain :
- a) Tidak tercapainya indikator tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan mengakibatkan turunnya kinerja OPD
 - b) Berkurangnya potensi produksi perikanan yang mempengaruhi kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB daerah akibat penurunan produksi perikanan tiap tahunnya terutama perikanan budidaya.
 - c) Berkurangnya tingkat konsumsi ikan masyarakat. Semakin tingginya harga ikan akan menyebabkan masyarakat mengalihkan konsumsi protein hewani pada komoditas lain yang lebih murah/terjangkau. Perubahan perilaku konsumsi tersebut dapat berpengaruh serius terhadap tingkat konsumsi ikan masyarakat yang juga merupakan indikator kinerja program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- F. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
- Kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab ketidaktercapaian antara lain :

- (a) Berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi dampak pengurangan lahan akibat melalui pemanfaatan lahan-lahan terutama di wilayah pesisir untuk dijadikan lahan tambak budidaya perikanan
- (b) Meningkatkan penggunaan teknologi budidaya perikanan untuk intensifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ikan di lahan budidaya (tambak) maupun kolam budidaya
- (c) Mitigasi iklim dan cuaca yang lebih baik untuk mengatasi dampak kerugian akibat banjir yang sering terjadi

Keberhasilan pencapaian kinerja merupakan keterlibatan seluruh komponen organisasi dan masyarakat dimana adanya optimalisasi sumber daya organisasi, arahan pengambil kebijakan pada tujuan dan sasaran organisasi, saling memberikan informasi yang memadai dalam menunjang proses pengambilan keputusan maupun dalam setiap penyelesaian tugas, dan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala. Penjabaran atas kinerja keuangan pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2023 sebagai berikut :

Adapun secara rinci evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Semester I Tahun 2024 sebagai berikut :

A. Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, pagu anggaran Rp. 289.070.000,- realisasi Rp. 278.000.000,- prosentase 96% dengan realisasi untuk belanja penggandaan dan penjilidan dokumen perencanaan, honorarium narasumber, bantuan transport peserta sosialisasi.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, pagu anggaran Rp. 6.565.000,- realisasi Rp. 141.736,- prosentase 2,2% dengan realisasi untuk pembelian BBM.
 - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pagu anggaran Rp.430.000.000,- realisasi Rp. 0,- prosentase 0% kegiatan belum terlaksana karena merupakan anggaran untuk event Pekan Raya Kendal/Kendal Expo 2024 dan publikasi kegiatan OPD di media massa yang belum terlaksana.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, pagu anggaran Rp.4.189.703.790,- realisasi Rp. 1.644.264.644,- prosentase 39%

dengan realisasi untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS sampai dengan bulan Juni 2024.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, pagu anggaran Rp. 40.000.000,- realisasi Rp. 13.297.500,- prosentase 33% dengan realisasi untuk pengadaan alat tulis kantor, kertas, alat listrik.
- b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, pagu anggaran Rp. 17.503.000,- realisasi Rp. 5.594.800,- prosentase 32% dengan realisasi untuk isi ulang tabung gas, perabot kantor, dan retribusi kebersihan.
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, pagu anggaran Rp. 20.130.000,- realisasi Rp. 4.205.000,- prosentase 21% dengan realisasi untuk pembelian snack dan makan minum rapat sebanyak 5 kali.
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, pagu anggaran Rp. 39.800.000,- realisasi Rp. 34.886.000,- prosentase 87% dengan realisasi untuk pencetakan barang cetakan kebutuhan kantor (map, amplop, blanko-blank, karcis, dsb).
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, pagu anggaran Rp. 325.325.397,- realisasi Rp. 118.104.548,- prosentase 36% dengan realisasi untuk membiayai perjalanan dinas dan kebutuhan bahan bakar kendaraan dinas.
- f. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, pagu anggaran Rp. 4.740.000,- realisasi Rp. 0,- prosentase 0% belum ada realisasi keuangan karena kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan III.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, pagu anggaran Rp. 6.500.000,- realisasi Rp. 4.000.000,- prosentase 61% dengan realisasi untuk pembelian materai.
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, pagu anggaran Rp. 100.050.000,- realisasi Rp. 68.333.128,- prosentase 68% dengan realisasi untuk pembayaran tagihan rekening listrik, air, telepon, dan internet.
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, pagu anggaran Rp. 14.710.000,- realisasi Rp. 5.105.000,- prosentase

- 35% dengan realisasi untuk pemeliharaan peralatan rumah tangga, pemeliharaan computer/laptop, pemeliharaan printer.
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, pagu anggaran Rp. 725.340.000,- realisasi Rp. 274.376.000,- prosentase 38% dengan realisasi untuk pembayaran honorarium tenaga kebersihan, security/penjaga malam, dan pengemudi.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pagu anggaran Rp. 105.540.000,- realisasi Rp. 33.590.786,- prosentase 32% dengan realisasi untuk pembayaran pajak kendaraan dinas dan servis mobil dinas.
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, pagu anggaran Rp. 6.100.000,- realisasi Rp. 0,- prosentase 0% karena belum ada realisasi anggaran.
- B. Progam Pengelolaan Perikanan Tangkap
1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - a. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan, pagu anggaran Rp. 40.000.000,- realisasi Rp. 15.872.700,- prosentase 40% dengan realisasi untuk penyediaan perlengkapan pertemuan petugas statistik dan akomodasi bahan bakar untuk pelaksanaan pendataan statistik perikanan selama 6 bulan, serta honorarium tenaga penunjang kegiatan pengumpulan data 1 orang selama 2 bulan, BBM, ATK, dan pembuatan aplikasi perikanan tangkap.
 - b. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap, pagu anggaran Rp. 4.000.000,- realisasi Rp. 0,- prosentase 0%. Belum ada realisasi anggaran karena merupakan penunjang dari program KOTAKU sehingga pelaksanaan kegiatan ini juga menyesuaikan.
 - c. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap, pagu anggaran Rp. 691.878.000,- realisasi Rp. 23.727.500,- prosentase 3% dengan realisasi untuk pembelian administrasi kegiatan berupa bahan bakar, penggandaan, ATK, pengadaan bibit ikan untuk penebaran benih ikan di perairan umum (*restocking*). Sedangkan belanja yang diberikan kepada masyarakat berupa

sarana pencarian ikan (mesin kapal) yang dibiayai dari DAK belum dilakukan pencairan anggaran karena belum ada penyaluran anggaran DAK ke rekening Kasda. Hal ini karena belum selesainya review APIP atas pekerjaan yang telah dilaksanakan

2. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil, pagu anggaran Rp.455.220.000,- realisasi Rp. 161.149.000,- prosentase 35% dengan realisasi untuk pembelian administrasi kegiatan berupa bahan bakar, makan minum, pulsa untuk informasi cuaca dan iklim kepada nelayan, sewa kapal, serta honorarium tenaga penunjang kegiatan sampai dengan Juni 2024.
3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - a. Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pagu anggaran Rp. 96.110.000,- realisasi Rp. 42.595.000,- prosentase 44% dengan realisasi untuk membiayai kegiatan monitoring pembinaan ke TPI di Kabupaten Kendal, honorarium narasumber pelatihan /sosialisasi, honorarium tenaga penunjang kegiatan, serta honorarium tenaga pengelola TPI selama 6 bulan.
- b. Progam Pengelolaan Perikanan Budidaya
 1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 - a. Pemberian Pendampingan Kemudahan, Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan, pagu anggaran Rp. 257.111.000,- realisasi Rp. 93.595.750,- prosentase 36% dengan realisasi untuk pembelian administrasi kegiatan untuk pelatihan/sosialisasi pembudidaya ikan berupa makan minum, BBM, ATK, uang saku, perlengkapan pelatihan/sosialisasi, honorarium narasumber yang telah terlaksana sebanyak 4 kali.
 2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 - a. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota, pagu anggaran Rp. 12.370.000,- realisasi Rp. 2.360.000,- prosentase 19% dengan realisasi untuk pembelian administrasi kegiatan untuk perjalanan dinas dan ATK untuk menunjang operasional petugas lapangan dalam pendataan statistik perikanan budidaya.
 - b. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota, pagu anggaran Rp. 2.414.155.000,- realisasi

Rp. 33.270.090,- prosentase 1,4% dengan realisasi untuk pembelian administrasi kegiatan untuk perjalanan dinas, ATK, jasa konsultan perencanaan jalan produksi.

- c. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, pagu anggaran Rp. 379.310.000,- realisasi Rp. 63.073.000,- prosentase 17% dengan realisasi untuk pembelian administrasi kegiatan untuk pembelian bahan bakar minyak, ATK, dan perjalanan dinas untuk menunjang pemberian hibah kepada sarana budidaya perikanan kepada pokdakan serta biaya operasional BBI Boja dan tambak dinas.
 - d. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, pagu anggaran Rp. 73.800.000,- realisasi Rp. 32.661.700,- prosentase 44% dengan realisasi untuk pembelian administrasi kegiatan untuk monitoring kesehatan ikan, pemeriksaan sampel untuk penyakit ikan, dan honorarium tenaga penunjang petugas kesehatan ikan (Posikandu) selama 5 bulan, serta kebutuhan untuk pelatihan/sosialisasi tentang penyakit ikan berupa makan minum, uang saku, perlengkapan pelatihan/sosialisasi, materi sosialisasi, honorarium narasumber yang telah terlaksana sebanyak 3 kali.
- c. Progam Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
1. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
 - a. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, pagu anggaran Rp. 28.571.000,- realisasi Rp. 1.220.000,- prosentase 4% dengan realisasi untuk pembelian administrasi kegiatan untuk monitoring informasi harga komoditas perikanan di pasar-pasar yang ditentukan serta honorarium tenaga penunjang kegiatan Petugas Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengelolaan Hasil Perikanan selama 5 bulan.
 2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
 - a. Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil, pagu anggaran Rp. 40.760.000,- realisasi Rp. 8.239.500,- prosentase 20% dengan realisasi untuk pembelian administrasi

kegiatan untuk pelatihan/ sosialisasi kepada para pelaku usaha pengolahan hasil perikanan berupa makan minum, uang saku, ATK, BBM, perlengkapan pelatihan/sosialisasi, honorarium narasumber yang telah terlaksana sebanyak 5 kali.

3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - a. Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, pagu anggaran Rp. 1.354.153.800,- realisasi Rp. 50.239.000,- prosentase 3,7% untuk menunjang pekerjaan rehabilitasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) di 4 lokasi.

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya Pemerintah Kabupaten Kendal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dievaluasi dengan parameter indikator yang tercantum dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal, melalui evaluasi capaian indikator tersebut diharapkan dapat memberi gambaran tentang tingkat keberhasilan dan potensi pengembangan kedepannya.

Indikator kinerja adalah merupakan pengukuran kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Pengukuran kinerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan pelayanan kedinasan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal, yang secara operasional dilaksanakan setiap tahun melalui program dan kegiatan/sub kegiatan. Capain kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal sampai dengan semester I Tahun 2024 sebagaimana Tabel 2.2 berikut ini :

TABEL 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kendal

SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KENDAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan tahun (n-1) --> 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan --> 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan --> 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7)	11=(9/5)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
3.25-03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	kg	18.062.386	14.823.431	4.851.244	3.158.232	65	19.674.675	109
3.25-03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Produksi perikanan tangkap	kg	18.062.386	14.823.431	4.851.244	3.158.232	65	19.674.675	109
3.25-03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	dokumen	2	1	1		-	2	100
3.25-03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	unit	4	2	2		-	4	100
3.25-03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	unit	40	70	63	63	100	133	333
3.25-03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan yang diberdayakan	orang	1.210	1.210	705	400	57	1.915	158
3.25-03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	orang	100	480	705	400	57	1.185	1.185
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	kelompok	20	17	-	-		17	85
3.25-03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan TPI	skor	80	85	80	85	106	80	100
3.25-03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	layanan	575	600	620	620	100	620	108
3.25-04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	kg	96.518.000	63.384.100	25.140.000	9.017.040	36	88.524.100	92
3.25-04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya ikan/pelaku usaha perikanan yang diberdayakan	orang	1.340	1.910	500	200	40	2.410	180
3.25-04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	kelompok	-	-	-	-		-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-1) --> 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan --> 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan --> 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7)	11=(9/5)
3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	kelompok	24	9	-	-		9	38
3.25.04.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	kelompok	6	-	-	-		-	-
3.25-04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	kelompok	28	23	14	6	43	37	132
3.25-04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terfasilitasinya sarana prasarana perikanan budidaya	paket	38	34	8	3	38	42	111
3.25-04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	-	1		-	1	100
3.25-04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	unit	4	3	3		-	6	150
3.25-04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	unit	13	14	4	2	50	18	138
3.25-04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	dokumen	24	12	12	6	50	24	100
3.25-06	PROGRAM PENGOLAHAN dan PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka konsumsi ikan	kg/kapita/tahun	37,60	32,04	37,6	32,04	85	37,60	100
3.25-06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah data harga ikan di pasar di wilayah kabupaten Kendal	data	192	144	48	24	50	192	100
3.25-06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	dokumen	96	48	48	24	50	96	100
3.25-06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah masyarakat yang memahami mutu dan keamanan pangan produk hasil perikanan	orang	1.110	1.005	60	20	33	1.065	96
3.25-06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	unit usaha	2	2	3	1	33	5	250

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-1) --> 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan --> 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan --> 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7)	11=(9/5)
3.25-06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan dalam menunjang pengolahan bahan baku dan/atau pemasaran hasil olahan perikanan	kegiatan	16	11	6	2	33	17	106
3.25-06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	pelaku usaha	4	3	4	2	50	7	175
3.25-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	persen	100	100	100	70	70	100	100
3.25-01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja dinas	dokumen	45	34	11	7	64	45	100
3.25-01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	12	6	6	2	33	12	100
3.25-01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	6	3	3	3	100	6	100
3.25-01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	4	2	2	2	100	4	100
3.25-01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	bulan	12	12	12	6	50	12	100
3.25-01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	35	35	35	35	100	35	100
3.25-01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	12	12	6	50	12	100
3.25-01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	24	12	12	6	50	24	100
3.25-01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	24	12	12	3	25	24	100
3.25-01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	24	12	12	5	42	24	100
3.25-01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	6	6	5	83	12	100
3.25-01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	30	15	20	12	60	35	117
3.25-01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	1.500	670	460		-	1.130	75
3.25-01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	bulan	12	12	12	6	50	12	100
3.25-01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	8	4	4	2	50	8	100
3.25-01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	24	12	12	6	50	24	100
3.25-01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	8	4	4	2	50	8	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-1) --> 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan --> 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan --> 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7)	11=(9/5)
3.25-01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	24	12	12	6	50	24	100
3.25-01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang berfungsi dengan baik dan siap pakai	persen	100	100	100	50	50	100	100
3.25-01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	40	40	42	18	43	42	105
3.25-01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	20	16	10		-	26	130

2.3. Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan PD dapat berasal dari beberapa unsur, sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumberdaya manusia di bidang Kelautan dan Perikanan, baik secara kualitas maupun kuantitas;
2. Skala usaha perikanan pada umumnya masih berskala kecil dan bersifat tradisional;
3. Lemahnya posisi tawar pelaku usaha perikanan, mengakibatkan nilai jual produk perikanan masih rendah sehingga tidak sebanding dengan biaya produksi;
4. Masih rendahnya daya beli pelaku usaha perikanan terhadap sarana produksi perikanan seperti kapal, alat penangkap ikan dan pakan ikan sehingga ketergantungan kepada pemerintah tinggi;
5. Terbatasnya alokasi permodalan yang murah dan mudah untuk usaha pengembangan kelautan dan perikanan dari lembaga keuangan;
6. Lemahnya dinamika kelembagaan ekonomi perikanan yang sudah terbentuk seperti Koperasi Mina, Swamitra Mina, dan Unit Pelayanan Pengembangan Perikanan;
7. Harga pakan yang terkadang masih cukup tinggi;
8. Dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang sentra produksi belum tersedia dengan merata di semua kawasan sentra produksi;
9. Terjadinya degradasi (kerusakan) lingkungan pada perairan laut akibat ulah masyarakat seperti penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan yang berpengaruh terhadap produksi perikanan;
10. Kondisi fasilitas sarana prasarana balai Benih Ikan Boja banyak yang rusak baik bangunan utama seperti kolam dan saluran maupun bangunan penunjang, selain itu juga kurangnya ketersediaan air saat musim kemarau;
11. Persoalan di TPI karena kurangnya SDM sehingga di setiap TPI tidak ada petugas dari Dinas yang mengawasi setiap hari aktivitas TPI. Selain itu juga masih banyak ikan yang tidak dilelang di TPI.

2.4. Penentuan Isu-isu Strategis Tahun 2024

Adapun isu strategis pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

1. Terjadinya pendangkalan muara sungai Kalikutho dan Bodri sebagai akses keluar masuk kapal nelayan mencari ikan di laut. Pendangkalan tersebut menyebabkan kapal kandas dan tidak bisa jalan karena bagian bawah kapal menyentuh tanah di dasar sungai.
2. Masih banyaknya nelayan yang tidak menjual hasil tangkapan di TPI
3. Belum dapat terlaksananya proses pelelangan ikan secara elektronik (aplikasi e-TPI) karena kendala kesiapan SDM petugas di TPI
4. Ketersediaan stok beberapa jenis karcis TPI hampir habis sehingga dapat mengganggu aktivitas pelelangan TPI
5. Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang harus segera diikuti pembuatan kajian terkait penentuan retribusi yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.
6. Lantai lelang di TPI Sendangsikucing kurang luas karena semakin banyaknya ikan yang dilelang di TPI

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Disamping Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal Tahun 2024 juga telah melalui proses penelaahan usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan/masyarakat. Secara umum, dari hasil penelaahan usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan, tidak ada usulan masyarakat yang ditujukan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal.

Adapun hasil Penelaahan Program dan Kegiatan dari Masyarakat dapat dilihat pada Tabel 2.5 (T-C 32) berikut ini :

Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Kabupaten Kendal

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal antara lain pencapaian visi dan misi kepala daerah, dimana visi Bupati adalah mewujudkan Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan dan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2024 yaitu “*Kendal Smart City*”, dimana arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2024 di prioritaskan pada “Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal Smart City”. Arah kebijakan dengan fokus peningkatan kemantapan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan *clean dan Good Governances*, penguatan *Smart City* yang difokuskan pada *Smart Government, Smart Education, Smart Health, Smart Economy* dan *Smart Transportation*. Focus smart transportation adalah pada peningkatan kualitas transportasi masal seperti penyediaan BRT yang menghubungkan antar kecamatan dan feeder yang menghubungkan antar desa, dengan pengelolaan berbasis teknologi informasi.

Jumlah program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal pada Penetapan Anggaran Tahun 2024 adalah 4 program terdiri dari 29 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 12.564.516.187,- sumber pendanaan dari APBD Kabupaten Kendal (PAD dan DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kelautan dan Perikanan, dan DBHCHT. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan sebagian besar di Kabupaten Kendal baik lokasi perikanan darat dan di pesisir pantai sepanjang 42 km yang membujur dari timur ke barat, dan sebagian besar dari masyarakat yang mendapatkan program dan kegiatan yaitu masyarakat pembudidaya ikan, nelayan di pesisir pantai, pengolah hasil perikanan, masyarakat dan kelompok wanita nelayan. Kegiatan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan tersebar di 5 titik Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Kendal, yang meliputi TPI Tawang (Rowosari), TPI Sendang Sikucing (Rowosari), TPI Tanggulmalang (Patebon), TPI Bandengan (Kendal), TPI Karangsari (Kendal). Dalam hal membantu penyediaan benih ikan untuk pembudidaya ikan, Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki pusat pembenihan ikan BBI di Desa Purwogondo Kecamatan Boja. Benih ikan yang

dihasilkan sebagian besar untuk mencukupi kebutuhan benih bagi pembudidaya di Kabupaten Kendal dan sebagian keluar kabupaten.

Pada perubahan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 terdapat penambahan anggaran SILPA dana *earmark* DAK Bidang Kelautan Perikanan dan Dana Insentif Daerah (DID) yang bersumber dari sisa anggaran tahun-tahun sebelumnya yang tidak terlaksana atau gagal dalam proses pengadaan barang/jasa. Disamping pengurangan juga terdapat pengurangan anggaran terutama pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN karena kelebihan anggaran pada Penetapan anggaran 2024 dan sub kegiatan yang terdapat honorarium Tenaga Penunjang Kegiatan non ASN karena beberapa Tenaga Penunjang Kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan telah diterima menjadi PPPK.

Jumlah anggaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan pada perubahan anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 13.120.208.014,- sumber pendanaan dari APBD Kabupaten Kendal (PAD dan DAU), DAU Pendidikan, Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kelautan dan Perikanan, DBHCHT, Dana Insentif Fiskal (DIF), dan Dana Insentif Daerah (DID). Rumusan program dan kegiatan pada Renja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal Tahun 2024 sesuai dengan rancangan akhir Perubahan RKPD 2024 yaitu berjumlah 4 program dan 29 sub kegiatan. Program yang dilaksanakan meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Secara lengkap rumusan Rencana Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal dalam Renja Perubahan Tahun 2024 disajikan dalam Tabel 3.1 berikut ini :

TABEL 3.1
PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2024

SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KENDAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2024							Sumber dana
				Lokasi		Target capaian kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Selisih			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							12.564.516.187	13.120.208.014	555.691.827	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							12.564.516.187	13.120.208.014	555.691.827	
3.25-03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap			4.851.244	4.851.244	1.683.208.000	1.861.208.000	178.000.000	
3.25-03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Produksi perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap			4.851.244	4.851.244	1.131.878.000	477.300.000	- 654.578.000	
3.25-03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab Kendal	Kab Kendal	1	1	40.000.000	19.300.000	- 20.700.000	APBD
3.25-03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	TPI Bandengan	TPI Bandengan	2	2	400.000.000	420.700.000	20.700.000	APBD
3.25-03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Kab Kendal	Kab Kendal	63	63	691.878.000	37.300.000	- 654.578.000	APBD
3.25-03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah nelayan yang diberdayakan	Jumlah nelayan yang diberdayakan			705	705	455.220.000	1.259.798.000	804.578.000	
3.25-03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab Kendal	Kab Kendal	705	705	455.220.000	1.259.798.000	804.578.000	APBD, DBHCHT, DAU Pendidikan, Dana Insentif Fiskal, DAK, Dana Insentif Daerah
3.25-03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah produksi ikan di TPI	Jumlah produksi ikan di TPI			80	80	96.110.000	124.110.000	28.000.000	
3.25-03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kec Rowosari, Cepiring, Kendal	Kec Rowosari, Cepiring, Kendal	620	620	96.110.000	124.110.000	28.000.000	APBD
3.25-04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	Produksi perikanan budidaya			25.140.000	25.140.000	3.136.746.000	3.372.929.827	236.183.827	
3.25-04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya ikan/pelaku usaha perikanan yang diberdayakan	Jumlah pembudidaya ikan/pelaku usaha perikanan yang diberdayakan			500	500	257.111.000	490.999.487	233.888.487	
3.25-04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab Kendal	Kab Kendal	14	14	257.111.000	490.999.487	233.888.487	APBD, DAU Pendidikan, Dana Insentif Fiskal, Dana Insentif Daerah
3.25-04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terfasilitasinya sarana prasarana perikanan budidaya	Terfasilitasinya sarana prasarana perikanan budidaya			8	8	2.879.635.000	2.881.930.340	2.295.340	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2024							Sumber dana
				Lokasi		Target capaian kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Selisih			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.25-04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Kendal	Kab Kendal	1	1	12.370.000	12.370.000	-	APBD
3.25-04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ds Kalirejo Kec Kangkung, Kel Banyotowo Kec Kendal, Ds Turunrejo Kec Brangsong	Ds Kalirejo Kec Kangkung, Kel Banyotowo Kec Kendal, Ds Turunrejo Kec Brangsong	3	3	2.414.155.000	2.414.155.000	-	APBD, DAK
3.25-04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ds Mojoagung Kec Plantungan, Ds Margosari Kec Limbangan, Ds Purwogondo Kec Boja, Ds Turunrejo Kec Brangsong	Ds Mojoagung Kec Plantungan, Ds Margosari Kec Limbangan, Ds Purwogondo Kec Boja, Ds Turunrejo Kec Brangsong	4	4	379.310.000	381.605.340	2.295.340	APBD, DAK
3.25-04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Kab Kendal	Kab Kendal	12	12	73.800.000	73.800.000	-	APBD
3.25-06	PROGRAM PENGOLAHAN dan PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat konsumsi ikan penduduk	Tingkat konsumsi ikan penduduk			37,6	37,6	1.423.484.800	1.573.484.800	150.000.000	
3.25-06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko			48	48	28.571.000	28.571.000	-	
3.25-06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Pasar Kendal, Pasar Weleri, Pasar Sukorejo, Pasar Pegandon, Pasar Srogo, Pasar Kaliwungu, Pasar Reja	Pasar Kendal, Pasar Weleri, Pasar Sukorejo, Pasar Pegandon, Pasar Srogo, Pasar Kaliwungu, Pasar Reja	48	48	28.571.000	28.571.000	-	APBD
3.25-06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah masyarakat yang memahami mutu dan keamanan pangan produk hasil perikanan	Jumlah masyarakat yang memahami mutu dan keamanan pangan produk hasil perikanan			60	60	40.760.000	190.760.000	150.000.000	
3.25-06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kab Kendal	Kab Kendal	3	3	40.760.000	190.760.000	150.000.000	APBD, Dana Insentif Daerah
3.25-06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan dalam menunjang pengolahan bahan baku dan/atau pemasaran hasil olahan perikanan	Jumlah kegiatan dalam menunjang pengolahan bahan baku dan/atau pemasaran hasil olahan perikanan			6	6	1.354.153.800	1.354.153.800	-	
3.25-06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Kec Rowosari, Kec Gemuh, Kec Kaliwungu	Kec Rowosari, Kec Gemuh, Kec Kaliwungu	4	4	1.354.153.800	1.354.153.800	-	APBD, DAK, Dana Insentif Fiskal

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2024							Sumber dana
				Lokasi		Target capaian kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Selisih			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X.XX-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah			100	100	6.321.077.387	6.312.585.387	- 8.492.000	
X.XX-01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja dinas	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja dinas			11	11	725.635.000	725.635.000	-	
X.XX-01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DKP	DKP	6	6	289.070.000	289.070.000	-	APBD
X.XX-01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DKP	DKP	3	3	6.565.000	6.565.000	-	APBD
X.XX-01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKP	DKP	2	2	430.000.000	430.000.000	-	APBD
X.XX-01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah bulan terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah			12	12	4.189.703.790	4.059.703.790	- 130.000.000	
X.XX-01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DKP	DKP	35	35	4.189.703.790	4.059.703.790	- 130.000.000	APBD
X.XX-01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah			12	12	447.498.597	522.206.597	74.708.000	
X.XX-01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKP	DKP	12	12	40.000.000	40.000.000	-	APBD
X.XX-01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	DKP	DKP	12	12	17.503.200	18.303.200	800.000	APBD
X.XX-01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DKP	DKP	12	12	20.130.000	20.130.000	-	APBD
X.XX-01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DKP	DKP	6	6	39.800.000	89.800.000	50.000.000	APBD
X.XX-01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Kendal dan Luar Kab Kendal	Kab Kendal dan Luar Kab Kendal	20	20	325.325.397	349.233.397	23.908.000	APBD
X.XX-01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DKP	DKP	460	460	4.740.000	4.740.000	-	APBD
X.XX-01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah			12	12	846.600.000	863.400.000	16.800.000	
X.XX-01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DKP	DKP	4	4	6.500.000	6.500.000	-	APBD
X.XX-01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DKP	DKP	12	12	100.050.000	137.550.000	37.500.000	APBD
X.XX-01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKP	DKP	4	4	14.710.000	14.710.000	-	APBD
X.XX-01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DKP	DKP	12	12	725.340.000	704.640.000	- 20.700.000	APBD
X.XX-01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang berfungsi dengan baik dan siap pakai	Ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang berfungsi dengan baik dan siap pakai			100	100	111.640.000	141.640.000	30.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2024							Sumber dana
				Lokasi		Target capaian kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Selisih			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X.XX-01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DKP	DKP	42	42	105.540.000	105.540.000	-	APBD
X.XX-01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DKP	DKP	10	10	6.100.000	36.100.000	30.000.000	APBD

Adapun Lampiran Rancangan Akhir Perubahan RKPD 2024 hasil *print out* laman <https://sipd-ri.kemendagri.go.id> sebagaimana terlampir.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KENDAL TAHUN 2024																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN								8.335.726.928,00	12.564.516.187,00	13.120.208.014,00	4.784.481.086,00						10.127.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							8.335.726.928,00	12.564.516.187,00	13.120.208.014,00	4.784.481.086,00							10.127.000.000,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							8.335.726.928,00	12.564.516.187,00	13.120.208.014,00	4.784.481.086,00							10.127.000.000,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah				100 %	100 %	4.001.654.853,00	6.321.077.387,00	6.312.585.387,00	1.195.345.147,00							5.197.000.000,00	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja dinas				11 dokumen	11 dokumen	80.000.000,00	725.635.000,00	725.635.000,00	645.635.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata	Dinas Kelautan dan Perikanan		145.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	20.000.000,00	289.070.000,00	289.070.000,00	269.070.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	20.000.000,00	6.565.000,00	6.565.000,00	-13.435.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00	430.000.000,00	430.000.000,00	390.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			95.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah				12 bulan	12 bulan	3.261.491.000,00	4.189.703.790,00	4.059.703.790,00	798.212.790,00			-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata	pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan		3.685.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	3.057.491.000,00	4.189.703.790,00	4.059.703.790,00	1.002.212.790,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			3.500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	204.000.000,00	0,00	0,00	-204.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			185.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terpenuhi adminstrasi kepegawaian				25 orang	25 orang	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata	pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan		65.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				24 Paket	24 Paket	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah				12 bulan	12 bulan	281.533.853,00	447.498.597,00	522.206.597,00	240.672.744,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata	pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan		356.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	17.503.200,00	17.503.200,00	18.303.200,00	800.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	40.000.000,00	20.130.000,00	20.130.000,00	-19.870.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	40.000.000,00	39.800.000,00	89.800.000,00	49.800.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			6.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	124.530.653,00	325.325.397,00	349.233.397,00	224.702.744,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			155.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				750 Dokumen	750 Dokumen	13.500.000,00	4.740.000,00	4.740.000,00	-8.760.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkeadilan dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Ketersediaan barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan OPD</i>				100 persen	100 persen	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkeadilan dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata	pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan		285.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkeadilan dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			105.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkeadilan dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				9 Unit	9 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkeadilan dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>				12 bulan	12 bulan	279.490.000,00	846.600.000,00	863.400.000,00	583.910.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata	pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan		331.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				4 Laporan	4 Laporan	6.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	500.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	100.050.000,00	100.050.000,00	137.550.000,00	37.500.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			136.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	6.760.000,00	14.710.000,00	14.710.000,00	7.950.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	166.680.000,00	725.340.000,00	704.640.000,00	537.960.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			170.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang berfungsi dengan baik dan siap pakai				100 persen	100 persen	81.140.000,00	111.640.000,00	141.640.000,00	60.500.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata	Dinas Kelautan dan Perikanan		330.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				40 Unit	40 Unit	75.040.000,00	105.540.000,00	105.540.000,00	30.500.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			120.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			190.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				10 Unit	10 Unit	6.100.000,00	6.100.000,00	36.100.000,00	30.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap				4851244 kg	4851244 kg	1.565.300.000,00	1.683.208.000,00	1.861.208.000,00	934.700.000,00							2.500.000.000,00	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Produksi perikanan tangkap</i>				4851244 kg	4851244 kg	865.000.000,00	1.131.878.000,00	477.300.000,00	-387.700.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata	Tercapainya produksi perikanan tangkap		1.730.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			<i>Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	19.300.000,00	-20.700.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			80.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				2 Unit	2 Unit	440.000.000,00	400.000.000,00	420.700.000,00	-19.300.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PE NUGASAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			650.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				-	0 0	385.000.000,00	691.878.000,00	37.300.000,00	-347.700.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PE NUGASAN	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			1.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan yang diberdayakan				250 orang	250 orang	85.000.000,00	455.220.000,00	1.259.798.000,00	1.174.798.000,00			-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata	nelayan kecil		195.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																		
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				50 Orang	50 Orang	85.000.000,00	455.220.000,00	1.259.798.000,00	1.174.798.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PE NUGASAN DANA INSENTIF DAERAH DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			120.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangannya Kelembagaannya				10 Kelompok	10 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan TPI				80 score	80 score	615.300.000,00	96.110.000,00	124.110.000,00	-491.190.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata	Penegelola tempat pelelangan ikan dan pedagang ikan di TPI		575.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																		
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				165 Layanan	165 Layanan	615.300.000,00	96.110.000,00	124.110.000,00	-491.190.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			575.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya				25140000 kg	25140000 kg	1.998.742.000,00	3.136.746.000,00	3.372.929.827,00	-578.742.000,00							1.420.000.000,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya ikan/pelaku usaha perikanan yang diberdayakan				200 orang	200 orang	50.000.000,00	257.111.000,00	490.999.487,00	440.999.487,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata	pembudidaya ikan dan pokdakan		210.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				15 Kelompok	15 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			35.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya				3 Kelompok	3 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				14 Kelompok	14 Kelompok	50.000.000,00	257.111.000,00	490.999.487,00	440.999.487,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA INSENTIF DAERAH DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terfasilitasinya sarana prasarana perikanan budidaya				5 paket	5 paket	1.948.742.000,00	2.879.635.000,00	2.881.930.340,00	933.188.340,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata	pembudidaya ikan		1.210.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	12.370.000,00	12.370.000,00	-17.630.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	2 Unit	1.550.000.000,00	2.414.155.000,00	2.414.155.000,00	864.155.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PE NUGASAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			465.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Unit	5 Unit	288.742.000,00	379.310.000,00	381.605.340,00	92.863.340,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PE NUGASAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			540.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				12 Dokumen	12 Dokumen	80.000.000,00	73.800.000,00	73.800.000,00	-6.200.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			165.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat konsumsi ikan penduduk				37,6 kg/kap/th	37,6 kg/kap/th	770.030.075,00	1.423.484.800,00	1.573.484.800,00	239.969.925,00							1.010.000.000,00	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				48 dokumen	48 dokumen	30.000.800,00	28.571.000,00	28.571.000,00	-1.429.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata	pelaku usaha pengolahan dan pemasaran ikan		30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				48 Dokumen	48 Dokumen	30.000.800,00	28.571.000,00	28.571.000,00	-1.429.800,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah masyarakat yang memahami mutu dan keamanan pangan produk hasil perikanan				30 orang	30 orang	40.029.275,00	40.760.000,00	190.760.000,00	150.730.725,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata	pelaku usaha pengolahan dan pemasaran ikan		180.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil																		
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	40.029.275,00	40.760.000,00	190.760.000,00	150.730.725,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA INSENTIF DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			180.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan dalam menunjang pengolahan bahan baku dan/atau pemasaran hasil olahan perikanan				1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	700.000.000,00	1.354.153.800,00	1.354.153.800,00	654.153.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata	pelaku usaha pengolahan dan pemasaran ikan		800.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				2 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	700.000.000,00	1.354.153.800,00	1.354.153.800,00	654.153.800,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PE NUGASAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI INSENTIF FISKAL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM), BUMDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata			800.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	J U M L A H								2.455.210.099.261,00	2.554.502.569.720,00	2.710.823.152.865,00	255.613.053.604,00							2.761.903.860.666,00	

BAB IV

PENUTUP

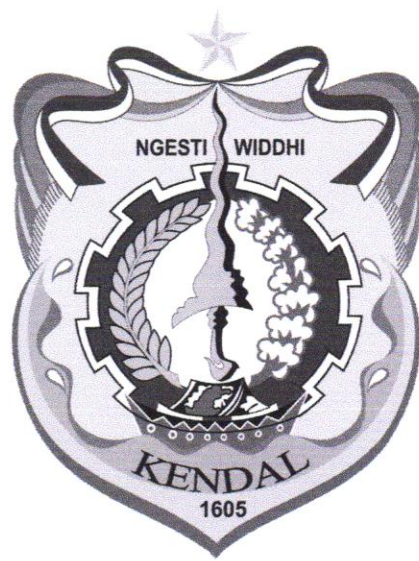
Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, dengan berdasar pada azas perencanaan yang berbasis kinerja untuk menunjang keberhasilan program dan kegiatan Tahun 2024. Penyusunan Perubahan Renja DKP Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman bagi bidang/UPTD/bagian yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal dalam menyusun program/kegiatan dan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi di masing-masing bagian tersebut.

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan adalah kegiatan-kegiatan prioritas yang belum mendapat pagu tambahan anggaran pada tahap RKPD Perubahan, diprioritaskan untuk dianggarkan dari pergeseran internal atau dianggarkan ulang pada Rencana Kerja Tahun 2025. Agar kinerja program dan kegiatan sesuai dengan target, maka diperlukan semangat, komitmen, dan disiplin dari Perangkat Daerah dan stakeholders sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan memperhatikan prinsip efektifitas dan efisiensi, diharapkan target-target yang telah tercantum dalam Perubahan Renja DKP ini, dapat memenuhi target Renstra Tahun 2021 - 2026. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila pagu anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan perencanaan, dikarenakan adanya penyesuaian dengan ketersediaan anggaran, kiranya dapat dilakukan penyesuaian kembali terhadap target kinerja.

Kendal, 2024
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kendal

drh. HUDI SAMBODO
Pembina Tingkat I
NIP. 197205041999031009



PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KENDAL
ANGGARAN 2024

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KENDAL
2024**

KATA PENGANTAR

Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 ini disusun guna meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal sehingga terwujud Pemerintahan yang baik dan bersih.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KENDAL



ALI SUTARIYO, S.T., M.A
Pembina Tk. I
NIP. 19700505 199803 1 012

	Hal
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB. I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum... ..	2
C. Maksud dan Tujuan.....	5
D. Sistematika	5
BAB. II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	8
2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.2. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun Berjalan	10
BAB. III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	21
BAB. IV PENUTUP.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mendasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sesuai Pasal 361 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, serta target kinerja program dan kegiatan. Perubahan Rencana Kerja didasarkan pada hasil evaluasi Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Rencana Kerja Tahun 2024 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan dimensi waktu serta

permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam pembangunan daerah.

Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Kendal Tahun 2024.

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Tahun Perubahan Anggaran 2024 berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 20);
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural, dan Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural, dan Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 108);

C. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2024;
2. Sebagai perubahan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Baperlitbang Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,
3. Sebagai sarana pengendalian perubahan program dan kegiatan tahun 2024;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA) Tahun 2024.

D. Sistematika

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja Perubahan PD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal tahun 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja

Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/ Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun berjalan sampai dengan Semester I dan prakiraan capaian tahun berjalan, berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta memuat hal-hal berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

Perangkat Daerah; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan perangkat Daerah

Berisi tentang rencana program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Perubahan Anggaran 2024.

BAB IV Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani urusan wajib bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pendukung Tugas Bupati dibidang Penanggulangan Bencana sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar Urusan Trantibumlinmas sub urusan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 108 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural, dan Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal mempunyai tugas pokok melaksanakan Penanggulangan Bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Sedangkan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di daerah secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
- c. pembinaan dan pengendalian penanggulangan bencana di daerah; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penanggulangan bencana di daerah.

Kinerja pelayanan perangkat daerah yang telah dilaksanakan meliputi :

1. Pelayanan informasi rawan bencana;
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Tabel 2.1.

Capaian Kinerja Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 Periode Sampai Dengan Triwulan II
Tahun 2024

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024		Proyeksi Tahun 2024		Catatan Analisis
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Nilai Sakip	-	-	74	0	0	0	74,55	Tercapai
2.	Persentase desa/ kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	-	-	6,85%	0	0%	6,85%	6,85%	Tercapai
3.	Indeks Risiko Bencana (IRB)			124,57	91,74	91,74	91,74	91,74	Tercapai
4.		Layanan informasi daerah rawan bencana	Layanan informasi daerah rawan bencana	100%	25%	50%	75%	100%	Tercapai

5.		Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	25%	50%	75%	100%	Tercapai
6.		Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	25%	50%	75%	100%	Tercapai

2.2. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berjalan

A. Analisis Capaian Kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 sudah selaras dengan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sampai dengan triwulan II sebesar 42%. Hal ini disebabkan karena beberapa kegiatan tidak sesuai dengan rencana.

Beberapa kegiatan yang belum terlaksana sesuai dengan jadwal, direncanakan akan segera dilaksanakan pada semester II tahun berjalan. Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun 2024 dan diusulkan kembali pada Renja tahun 2025 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua tahun 2024 ada yang sudah mencapai target dan ada juga yang belum mencapai target. Kegiatan-kegiatan yang sudah mencapai target adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Administrasi keuangan perangkat daerah
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - b. Administrasi umum perangkat daerah
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - c. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - d. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lain
2. Program penanggulangan bencana
- a. Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota
 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota

- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
- b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
 - Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota
 - Penyusunan rencana kontinjensi
- c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
 - Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota
- d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

Sedangkan Kegiatan-kegiatan yang belum mencapai target adalah :

1. Program Penanggulangan Bencana

- a. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan capaian 10%,
 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dengan capaian 10%,
- b. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
 - Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota dengan capaian 20%,
- c. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan dengan capaian 10%,

B. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kegiatan

Beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target kegiatan adalah :

1. Adanya hierarkhi urutan pelaksanaan beberapa sub kegiatan, sehingga pelaksanaan sub kegiatan satu menunggu pelaksanaan sub kegiatan lainnya selesai;
2. Adanya kegiatan kedaruratan bencana yang mana kegiatan tersebut menyebabkan persiapan kegiatan lainnya menjadi tertunda;
3. Adanya pesta demokrasi yang sedikit banyak menyita perhatian;
4. Adanya sumberdana baru Dana Insentif Fiskal (DIF) sehingga perlu koordinasi terkait aktifitas di dalam sub kegiatan termasuk pelaksanaan kegiatan; dan
5. Adanya pergeseran belanja modal antar sub kegiatan sehingga kegiatan dilaksanakan di perubahan anggaran.

Faktor yang mendukung tercapainya kegiatan karena adanya konsistensi saat rencana pelaksanaan kegiatan dan kesesuaian dengan anggaran kas, sebagai bagian untuk pencapaian perjanjian kinerja perangkat daerah sedangkan faktor yang menjadi penyebab melebihinya target kinerja program/ kegiatan adalah adanya keinginan untuk melaksanakan kegiatan lebih awal guna mengurangi pekerjaan di perubahan anggaran.

Secara umum target program dan kegiatan yang ada pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal sudah mendekati capaian target. Meskipun demikian tetap diperlukan inovasi-inovasi untuk mencapai masyarakat Kabupaten Kendal yang tangguh bencana. Bagaimana mempercepat pelaporan kejadian bencana, bagaimana pengumpulan data awal dan kaji cepat kejadian bencana, bagaimana meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pencegahan dan mitigasi bencana baik mitigasi struktural maupun non struktural.

Kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mengatasi penghambat adalah dengan perencanaan dan penganggaran yang mendukung percepatan penerapan sistem pemerintahan yang baik (good governance) antara lain :

1. Melaksanakan kegiatan yang lebih memungkinkan untuk dilaksanakan terlebih dahulu,

2. Melakukan konsolidasi internal perangkat daerah untuk merumuskan strategi pencapaian kinerja kedepan,
3. meningkatkan koordinasi dengan semua pihak,
4. mencari inovasi-inovasi baru guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
5. koordinasi dengan instansi vertikal terkait hibah guna mencukupi operasional penanggulangan bencana.

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran sampai dengan triwulan kedua tahun 2024 masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut :

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 KABUPATEN KENDAL
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2021- 2026 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024 (%)		Ket			
						I	II	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12 = 7 + 11		13 = 12/8 x100%		14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		1				6.676.393.578		0		6.676.393.578		0		0		0		0		0	
		1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			6.676.393.578		0		6.676.393.578		0		0		0		0		0	
1		1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah (%)	500	4.508.728.578	300	0	100	4.508.728.578	25	0	25	0	50	0	350	0	70	0	
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	500	3.047.956.478	0	0	100	3.047.956.478	25	0	25	0	50	0	50	0	10	0	
		1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	28	3.047.956.478	0	0	14	3.047.956.478	4	0	4	0	8	0	8	0	28,57	0	
		1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian (%)	500	0	86	0	100	0	0	0	0	0	0	0	86	0	17,2	0	
		1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan admistrasi umum PD (%)	500	746.979.100	0	0	100	746.979.100	25	0	25	0	50	0	50	0	10	0	
		1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	57.000.000	7	0	5	57.000.000	2	0	2	0	4	0	11	0	110	0	
		1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6	29.999.600	0	0	3	29.999.600	1	0	1	0	2	0	2	0	33,33	0	
		1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	525	37.127.500	12	0	275	37.127.500	105	0	125	0	230	0	242	0	46,1	0	
		1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	13.000.000	6	0	2	13.000.000	0	0	1	0	1	0	7	0	175	0	

1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	37	609.852.000	12	0	12	609.852.000	3	0	3	0	6	0	18	0	48,65	0
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (jenis)	56	101.620.000	0	0	16	101.620.000	0	0	12	0	12	0	12	0	21,43	0
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	13	52.000.000	0	0	12	52.000.000	0	0	12	0	12	0	12	0	92,31	0
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	9	49.620.000	0	0	4	49.620.000	0	0	2	0	2	0	2	0	22,22	0
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang (%)	500	313.100.000	0	0	100	313.100.000	25	0	25	0	50	0	50	0	10	0
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	24	4.000.000	0	0	12	4.000.000	3	0	3	0	6	0	6	0	25	0
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	245.200.000	0	0	12	245.200.000	3	0	3	0	6	0	6	0	25	0
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	24	63.900.000	0	0	12	63.900.000	3	0	3	0	6	0	6	0	25	0
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (unit)	311	299.073.000	0	0	64	299.073.000	10	0	20	0	30	0	30	0	9,65	0
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	30	132.773.000	0	0	15	132.773.000	4	0	5	0	9	0	9	0	30	0
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	30	24.000.000	0	0	15	24.000.000	4	0	2	0	6	0	6	0	20	0
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	32.300.000	0	0	15	32.300.000	4	0	2	0	6	0	6	0	20	0
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	110.000.000	1	0	1	110.000.000	0	0	1	0	1	0	2	0	200	0
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																		
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																		
Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya																		

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya

2	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase desa/kelurahan yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan (%)	34,25	2.167.665.000	9,59	0	6,85	2.167.665.000	0	0	2	0	2	0	11,59	0	33,84	0
			Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap. (%)	500		200		100		25		25		50		250		50	
			Persentase lokasi pemulihan pasca bencana yang terealisasi (%)	500		200		100		25		0		25		225		45	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	500	526.902.000	0	0	100	526.902.000	40	0	40	0	80	0	80	0	16	0
	1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal (dokumen)	1	158.500.000	0	0	1	158.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (orang)	200	368.402.000	0	0	200	368.402.000	80	0	80	0	160	0	160	0	80	0
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana (%)	500	710.397.000	0	0	100	710.397.000	0	0	40	0	40	0	40	0	8	0
	1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (Kawasan)	10	240.588.000	2	0	5	240.588.000	0	0	2	0	2	0	4	0	40	0
	1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Menghadapi Bencana Tanah Longsor yang disusun (Dokumen)	1	93.300.000	0	0	0	93.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi (Dokumen)	1		0		1		0		0		0		0		0	

1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan (Orang)	100	42.495.000	0	0	100	42.495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan (laporan)	0		0		0		0		0		0		0		0	
1.05.03.2.02.0012	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (keluarga)	20	57.590.000	0	0	20	57.590.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (unit)	1	9.454.000	0	0	1	9.454.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (kawasan)	1	75.000.000	0	0	1	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maksudat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	2	191.970.000	0	0	2	191.970.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi (%)	500	852.982.000	0	0	100	852.982.000	25	0	30	0	55	0	55	0	11	0
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	1.500	310.882.000	0	0	1.500	310.882.000	53.521	0	0	0	53.521	0	53.521	0	3.568,07	0
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (orang)	1.500	542.100.000	0	0	1.500	542.100.000	500	0	0	0	500	0	500	0	33,33	0
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana (dokumen)	26	77.384.000	0	0	6	77.384.000	10	0	0	0	10	0	10	0	38,46	0
1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan (Dokumen)	1	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.3 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis yang diangkat dalam pembangunan daerah adalah belum optimalnya penanganan bencana. Isu tersebut kemudian dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal, yaitu meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dengan indikator (Indeks Ketahanan Daerah/IKD) dan meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan bencana dengan indicator jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk dan Indeks Risiko Bencana (IRB).

1.4 Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Disamping Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan, Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 juga telah melalui proses penelaahan usulan Program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan/masyarakat. Secara umum, dari hasil penelaahan usulan Program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan, tidak ada usulan masyarakat yang ditujukan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan dalam Perubahan Anggaran 2024 adalah :

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				6.258.340.512,00	6.676.393.578,00	6.626.393.578,00			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.258.340.512,00	6.676.393.578,00	6.626.393.578,00			
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				6.258.340.512,00	6.676.393.578,00	6.626.393.578,00			
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.605.088.512,00	4.508.728.578,00	4.337.728.578,00			
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.628.388.912,00	3.047.956.478,00	3.047.956.478,00			
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2.407.588.912,00	3.047.956.478,00	2.904.512.478,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas	

														Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		
	1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	220.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian	100 % 86 %	100 % 86 %	0,00	0,00	0,00				
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	29 Paket	29 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan admistrasi umum PD	100 %	100 %	314.999.600,00	746.979.100,00	746.979.100,00				
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	57.000.000,00	57.000.000,00	72.453.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	29.999.600,00	29.999.600,00	30.499.600,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		

	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	250 Paket	250 Paket	40.000.000,00	37.127.500,00	37.127.500,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	13.000.000,00	13.000.000,00	16.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	175.000.000,00	609.852.000,00	626.419.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	9 jenis 9 unit	9 jenis 9 unit	102.680.000,00	101.620.000,00	101.620.000,00		
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	32.680.000,00	49.620.000,00	28.620.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	100 %	100 %	414.020.000,00	313.100.000,00	313.100.000,00		
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	160.000.000,00	245.200.000,00	187.660.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	250.020.000,00	63.900.000,00	68.364.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	66 unit	66 unit	145.000.000,00	299.073.000,00	299.073.000,00		
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	21 Unit	100.000.000,00	132.773.000,00	142.773.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	21 Unit	20.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	39 Unit	25.000.000,00	32.300.000,00	32.300.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

2	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase lokasi pemulihan pasca bencana yang terrealisasi Persentase desa/kelurahan yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	100.00 6.85 % %	100.00 6.85 % %	2.653.252.000,00	2.167.665.000,00	2.288.665.000,00		
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara ya ng memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	100 %	419.660.000,00	526.902.000,00	526.902.000,00		
	1	05	03	2.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota								
							Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	158.500.000,00	158.500.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal
	1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)								
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	200 Orang	200 Orang	269.660.000,00	368.402.000,00	389.402.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	100 %	100 %	1.073.350.000,00	710.397.000,00	710.397.000,00		
1	05	03	2.02	0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan								
						Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5 Kawasan	5 Kawasan	363.100.000,00	240.588.000,00	240.588.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	03	2.02	0009	Penyusunan Rencana Kontinjensi								
						Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	93.300.000,00	93.300.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	03	2.02	0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								
						Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	40 Orang	40 Orang	54.150.000,00	42.495.000,00	42.495.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	03	2.02	0012	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam								
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	20 Keluarga	20 Keluarga	74.400.000,00	57.590.000,00	57.590.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota								

						Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	9.454.000,00	9.454.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota								
						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	40 Kawasan	40 Kawasan	131.700.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Insentif Fiskal
1	05	03	2.02	0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota								
						Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	2 laporan	2 laporan	250.000.000,00	191.970.000,00	191.970.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi Persentase warga negara yang mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi	100 %	100 %	960.242.000,00	852.982.000,00	852.982.000,00		

	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota								
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1500 Orang	1500 Orang	735.242.000,00	310.882.000,00	310.882.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota								
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1500 Orang	1500 Orang	225.000.000,00	542.100.000,00	642.100.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah lokasi pemulihan pasca bencana yang terealisasi dibagi jumlah lokasi terdampak bencana Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 % 5 dokumen	100 % 5 dokumen	200.000.000,00	77.384.000,00	77.384.000,00		
	1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan								
							Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota								

						Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.000.000,00	27.384.000,00	27.384.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
								J U M L A H	6.258.340.512,00	6.676.393.578,00	6.626.393.578,00		

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 ini merupakan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Kendal yaitu Kendal Smart City dengan “Mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata dengan meningkatkan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan”.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dengan telah disepakati dan ditetapkannya dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja OPD, maka kaidah pelaksanaannya adalah Rencana Kerja OPD ini sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan, sekaligus sebagai bahan evaluasi kinerja OPD. Kegiatan penanggulangan bencana termasuk dalam urusan wajib pelayanan dasar. Ketika dalam pelaksanaan terdapat kekurangan anggaran, maka akan diupayakan pendanaan melalui CSR, Lembaga Non Profit serta Instansi Vertikal.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kendal, Agustus 2024

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KENDAL



ALI SUTARIYO, S.T., M.A.
Pembina Tk. I
NIP. 19700505 199803 1 012

